RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas telah terbitnya Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021. Proses penyusunan RKPD Tahun 2021 telah menggunakan aplikasi daring Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen ini juga merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi NTB yang diselenggarakan pada Tahun 2020. Pelaksanaan Musrenbang tahun 2020 terbilang istimewa, yakni dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, yang dilaksanakan secara daring sebagai penerapan protokol penanganan COVID-19 yang tidak mengizinkan berkumpulnya banyak orang dalam satu pertemuan. Meskipun demikian pelaksanaan Musrenbang ini telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah meliputi unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Musrenbang telah dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi. Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan penyelenggaraan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota serta Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan dalam upaya untuk menyelaraskan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 105 ayat (1) menyatakan bahwa Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi dijadikan

sebagai : a) Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi; b) Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan c) pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi.

Saya berharap agar dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menghimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas daerah dalam mewujudkan pencapaian seluruh indikator RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perlu ditingkatkan guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merestui niat dan langkah kita bersama dalam meletakkan pondasi yang kuat bagi perwujudan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Gemilang. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Mataram, 30 Juni 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 dan sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan RKPD masing-masing;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perudahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 2 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Pasal 2

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII PENUTUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;

b. pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD dan RKA-Kementerian/Lembaga APBN bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat; dan

c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD dan RAPBN Tahun 2021 :

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021, sebagai bahan pembahasan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran sementara di DPRD;

b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan rencana kerja dan anggaran dengan kementerian/Lembaga dan DPRD.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelaah kesesuaian rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2021 dengan RKPD Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 30 Juni 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL v
EXECUTIVE SUMMARY xix
KATA PENGANTAR xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 6
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.5 Sistematika Dokumen RKPD 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 11
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 23
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 25
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 574
2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAN TAHUN SEBELUMNYA 575
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 575
2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023 589
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 597
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN 599
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 599
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 599
3.1.2 Inflasi 604
3.1.3 Ketenagakerjaan 606
3.1.4 Kemiskinan 609
3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia 612
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 614
3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan 614

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah 616
3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah 619
3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 620
3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya 620
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 626
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 626
4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021 633
4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2021 634
4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021 634
4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021 638
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA 643
5.1 Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan 644
5.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 671
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 675
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 677
BAB VIII PENUTUP 684

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar dokumen perencanaan 7
Gambar 2. 1 Proporsi tingkat capaian Aspek Kesejahteraan..... 24
Gambar 2. 2 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum..... 30
Gambar 2. 3 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 51
Gambar 2. 4 Jumlah Kasus dan Proporsi Kematian Ibu di NTB Tahun 2017 - 2019 52
Gambar 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2019 54
Gambar 2. 6 Prevalensi Kurang Gizi NTB Tahun 2017-2019 55
Gambar 2. 7 Prevalensi Berat Kurang (Underweight) Menurut Indeks Berat Badan dan Umur Tahun 2017 – 2019 56
Gambar 2. 8 Cakupan Jamban Keluarga NTB Tahun 2017 – 2019 61
Gambar 2. 9 Model layanan SIRUKO GALAR 95
Gambar 2. 10 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Instegrasi Kesehatan Jiwa tahun 2019..... 95
Gambar 2. 11 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB..... 106
Gambar 2. 12 Jumlah Kasus Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 125
Gambar 2. 13 Kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2019..... 142
Gambar 2. 14 Target dan Realisasi TPT Dalam RPJMD 173
Gambar 2. 15 Upah Minimum Provinsi NTB..... 184
Gambar 2. 16 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023 198
Gambar 2. 17 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTBPeriode Tahun 2015-2019..... 199
Gambar 2. 18 Model Pengelolan Sampah Menuju NTB Zero Waste..... 254
Gambar 2. 19 Data AngkutanTruk di Penyebrangan Kayangan – Pototano..... 274
Gambar 2. 20 Perkembangan Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019..... 343
Gambar 2. 21 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2017–2019..... 343
Gambar 2. 22 Perkembangan Capaian Produksi Garam Tahun 2017-2019 348
Gambar 2. 23 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam (ton) Provinsi NTB Tahun 2019 349
Gambar 2. 24 Komposisi Realisasi Produksi Ragam Olahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019..... 355
Gambar 2. 25 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam (ton) Provinsi NTB Tahun 2019 366

Gambar 2. 26 Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB Tahun 2017-2019 (Rp.000) 425
Gambar 2. 27 Target dan Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023 553
Gambar 2. 28 Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2018-2019 554
Gambar 2. 29 Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2018-2019 558
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019 599
Gambar 3. 2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019 601
Gambar 3. 3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019 602
Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDRB NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2019 603
Gambar 3. 5 Inflasi Tahun 2016-2019 605
Gambar 3. 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018*-2019 609
Gambar 3. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 – 2019 611
Gambar 3. 8 Perbandingan IPM NTB dan Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2010–2019 613

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019 12
Tabel 2. 2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB 14
Tabel 2. 3 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor 15
Tabel 2. 4 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi 15
Tabel 2. 5 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami 16
Tabel 2. 6 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan 17
Tabel 2. 7 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang 17
Tabel 2. 8 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan 18
Tabel 2. 9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia 18
Tabel 2. 10 Status Penyediaan Air Provinsi NTB 19
Tabel 2. 11 Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 20
Tabel 2. 12 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 21
Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019 22
Tabel 2. 14 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019 22
Tabel 2. 15 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat 23
Tabel 2. 16 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum 25
Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 33
Tabel 2. 18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 34
Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 34
Tabel 2. 20 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SD Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 35
Tabel 2. 21 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SMP Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 36
Tabel 2. 22 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 37
Tabel 2. 23 Angka Partispasi Sekolah (APS) Tahun 2016/2017 s.d 2018/2019 di Provinsi NTB 38
Tabel 2. 24 Angka Partispasi Sekolah (APS) Tahun 2016/2017 s.d 2018/2019 di Provinsi NTB 39
Tabel 2. 25 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019 39
Tabel 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016–2019 40

Tabel 2. 27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun 2018/2019 40
Tabel 2. 28 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019 41
Tabel 2. 29 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2018 / 2019 42
Tabel 2. 30 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019 43
Tabel 2. 31 Perkembangan Lulusan dan Melanjutkan Ke Jenjang yang Lebih Tinggi Tahun Pelajaran 2012/2013 - 2018/2019 44
Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019 45
Tabel 2. 33 Sebaran Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2018/2019 46
Tabel 2. 34 Pemberian PIP, dan BOS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019 47
Tabel 2. 35 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019 48
Tabel 2. 36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023 49
Tabel 2. 37 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 51
Tabel 2. 38 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 53
Tabel 2. 39 Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 57
Tabel 2. 40 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2019 59
Tabel 2. 41 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2019 59
Tabel 2. 42 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2019 60
Tabel 2. 43 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2018-2019 62
Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2018 64
Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2017-2018 65
Tabel 2. 46 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2017-2018 65
Tabel 2. 47 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di BAPELKES Tahun 2017-2019 66
Tabel 2. 48 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2019 68

Tabel 2. 49 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017-2019 69
Tabel 2. 50 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019 71
Tabel 2. 51 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019 72
Tabel 2. 52 Kasus 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2019 73
Tabel 2. 53 Kerjasama RSUD Provinsi NTB Di Bidang Pendidikan Tahun 2019 ... 75
Tabel 2. 54 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Penunjang Tahun 2019 77
Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2019 81
Tabel 2. 56 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Kesehatan pada RSUD Provinsi NTB Tahun 2018 88
Tabel 2. 57 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017-2019 89
Tabel 2. 58 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017-2019 90
Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2017-2019 91
Tabel 2. 60 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2019 92
Tabel 2. 61 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Home Visite Tahun 2019 92
Tabel 2. 62 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Dropping Tahun 2019 93
Tabel 2. 63 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2019 94
Tabel 2. 64 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2019 96
Tabel 2. 65 10 Penyakit Terbanyak Pasien yang Berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019 97
Tabel 2. 66 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2018 – 2019 99
Tabel 2. 67 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir Tahun 2019 100
Tabel 2. 68 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023 102
Tabel 2. 69 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2019) 105
Tabel 2. 70 Data Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota se-NTB 105
Tabel 2. 71 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 108
Tabel 2. 72 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2019 111
Tabel 2. 73 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 115
Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 115

Tabel 2. 75 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2019 118
Tabel 2. 76 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2019 120
Tabel 2. 77 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 120
Tabel 2. 78 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2019 121
Tabel 2. 79 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019 123
Tabel 2. 80 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 124
Tabel 2. 81 Jumlah Kasus yang Dilaporkan (crime total) dan Diselesaikan (crime cleared) Tahun 2018 dan Tahun 2019 126
Tabel 2. 82 Capaian Indikator RPJMD Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 127
Tabel 2. 83 Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan Kebijakan Daerah Lainnya Tahun 2019 127
Tabel 2. 84 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2019 130
Tabel 2. 85 Jenis Bencana, Lokasi, Waktu, Kerusakan dan Korban Akibat Bencana Tahun 2019 132
Tabel 2. 86 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Provinsi NTB Tahun 2019 152
Tabel 2. 87 Perkembangan Data Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD NTB Tahun 2019 - 2023 154
Tabel 2. 88 Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Tahun 2019 155
Tabel 2. 89 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Tahun 2019 170
Tabel 2. 90 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2019 171
Tabel 2. 91 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 Menurut Kabupaten/Kota 178
Tabel 2. 92 Rekapitulasi Data Remintance PMI Provinsi NTB Tahun 2017-2019 179
Tabel 2. 93 Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019 180
Tabel 2. 94 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2019 180

Tabel 2. 95 Data besaran UMP/UMK dan Prosentase Kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2019 183
Tabel 2. 96 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019 186
Tabel 2. 97 Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2019 187
Tabel 2. 98 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Usia 10 Tahun Keatas) Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2017-2019 190
Tabel 2. 99 Kabupaten/Kota Peraih KLA Tahun 2019 193
Tabel 2. 100 Tingkat perkembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak dan Telepon Sahabat Anak (TESA) 194
Tabel 2. 101 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2019 194
Tabel 2. 102 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 196
Tabel 2. 103 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019 198
Tabel 2. 104 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2015-2019 201
Tabel 2. 105 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein NTB tahun 2015-2019 202
Tabel 2. 106 Skor PPH Ketersediaan NTB Tahun 2019 203
Tabel 2. 107 Data Prognosa Ketersediaan Pangan Kondisi s.d Desember 2019 204
Tabel 2. 108 Perekembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat NTB Tahun 2019 205
Tabel 2. 109 Perkembangan Cadangan Pangan di NTB 2015-2019 206
Tabel 2. 110 Perkembangan Rata-Rata Harga Komoditas Pangan di 10 Pasar Induk Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Bulan Januari s.d Desember 2019 207
Tabel 2. 111 Data Arus Distribusi Komoditas Pangan yang Keluar dari NTB Tahun 2019 Kondisi s.d Desember 2019 209
Tabel 2. 112 Data Arus Distribusi Komoditas Pangan yang Masuk ke NTB Tahun 2019 Kondisi sd Desember 2019 211
Tabel 2. 113 Data Sertifikasi dan Registrasi OKKPD Provinsi NTB Tahun 2019212
Tabel 2. 114 Data Sertifikasi dan Registrasi OKKPD Provinsi NTB Tahun 2010-2019 215
Tabel 2. 115 Data Jumlah Sertifikasi Aktif Tahun 2017-2019 216
Tabel 2. 116 Daftar Sasaran Kegiatan KRPL Berbasis Cabe Terintegrasi Unggas (TanCabGas) di Provinsi NTB Tahun 2019 218
Tabel 2. 117 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan Tahun 2019 219
Tabel 2. 118 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2019 221

Tabel 2. 119 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bagian Pertanahan, Bagian Administrasi Kewilayahan, Bagian Otonomi Daerah Tahun 2019 228
Tabel 2. 120 Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 230
Tabel 2. 121 Kriteria dan Indikator IKLH 232
Tabel 2. 122 Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2017 - 2019 234
Tabel 2. 123 Perbandingan Nilai IKLH NTB dengan IKLH Nasional 234
Tabel 2. 124 Indeks Kualitas Air Tahun 2017 – 2019 236
Tabel 2. 125 Kriteria Kondisi Air Berdasakan Skor IKA 236
Tabel 2. 126 Perbandingan Nilai IKA NTB dengan IKA Nasional 239
Tabel 2. 127 Klasifikasi Kategori Kualitas Udara Berdasarkan Nilai Indeks Kualitas Udara 240
Tabel 2. 128 Indeks Standar Pencemar Udara 241
Tabel 2. 129 Indeks Kualitas Udara (IKU) NTB Tahun 2017 – 2019 242
Tabel 2. 130 Hasil Perhitungan Sampel untuk Perolehan Nilai IKU NTB Tahun 2018 242
Tabel 2. 131 Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara di Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 2019 244
Tabel 2. 132 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 250
Tabel 2. 133 Perbandingan Nilai IKTL NTB dengan IKLH Nasional tahun 2017-2019 250
Tabel 2. 134 Capaian Indeks Pengelolaan Sampah (%) Tahun 2018-2019 257
Tabel 2. 135 Perhitungan Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2018 258
Tabel 2. 136 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019 261
Tabel 2. 137 Capaian Indikator Kinerja RPJMD NTB 2019 - 2023 261
Tabel 2. 138 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2019 262
Tabel 2. 139 Capaian Indikator Kinerja RPJMD NTB 2019 - 2023 262
Tabel 2. 140 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB 263
Tabel 2. 141 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2016-2019 265
Tabel 2. 142 Bumdes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2018-2019 266
Tabel 2. 143 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB 267
Tabel 2. 144 Rincian status desa tahun 2018 dan 2019 268
Tabel 2. 145 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 269
Tabel 2. 146 Capaian Indikator Kinerja Laju Petumbuhan Penduduk tahun 2017-2019 270
Tabel 2. 147 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 272

Tabel 2. 148 Data Jumlah Penumpang per Pelabuhan Tahun 2018-2019 273
Tabel 2. 149 Data Bongkar-Muat Barang di Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima 274
Tabel 2. 150 Jumlah Penumpang Angkutan Udara Tahun 2019 277
Tabel 2. 151 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2019 279
Tabel 2. 152 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja OPD Tahun 2019 281
Tabel 2. 153 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2018-2019 284
Tabel 2. 154 Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi NTB di Tingkat Nasional Tahun 2019 286
Tabel 2. 155 Pemenang Lomba Phonegrafi Tahun 2019 287
Tabel 2. 156 Pemenang Lomba Desain Poster tahun 2019 287
Tabel 2. 157 Pemenang Lomba Film Pendek/Vlog Tahun 2019 288
Tabel 2. 158 Pemenang Seni Perupa Ramah IT 288
Tabel 2. 159 Pemenang Lomba Fotografi Tahun 2019 288
Tabel 2. 160 Jadwal Kegiatan Inspiratif Expo Tahun 2019 289
Tabel 2. 161 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 290
Tabel 2. 162 Persentase Koperasi Aktif di NTB Tahun 2017 - 2019 291
Tabel 2. 163 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2017-2019 291
Tabel 2. 164 Target dan Realiasi Program Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba Tahun 2019 s/d 2023 296
Tabel 2. 165 Capaian Pengembangan KSP Pola Syariah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2019 297
Tabel 2. 166 Bantuan Pemerintah Hibah Bagi Wira Usaha Pemila Di Provinsi NTB Sampai 31 Desember 2019 298
Tabel 2. 167 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019 299
Tabel 2. 168 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 301
Tabel 2. 169 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 302
Tabel 2. 170 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 - 2019 302
Tabel 2. 171 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017- 2019 303
Tabel 2. 175 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2017 – 2019 304
Tabel 2. 173 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2017 – 2019 304
Tabel 2. 174 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2017-2019 306

Tabel 2. 178 Pelaksanaan Standar Palayanan Minimal (SPM) Urusan Penanaman Modal Tahun 2014-2018 307
Tabel 2. 179 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2019 311
Tabel 2. 180 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2019 311
Tabel 2. 181 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2019 312
Tabel 2. 182 Capaian Atlet PPLP/PPLPD pada KEJURNAS Tahun 2019 318
Tabel 2. 183 Capaian Atlet PPLP/PPLPD pada POPNAS Tahun 2019 319
Tabel 2. 184 Capaian Atlet Alumni PPLP pada SEA GAMES Tahun 2019 320
Tabel 2. 185 Kompetisi 16 Cabang Olahraga Piala Gubernur Tahun 2019 321
Tabel 2. 186 Peserta PEPARPENAS IX Tahun 2019 324
Tabel 2. 187 Prestasi NTB pada PEPARPENAS IX Tahun 2019 324
Tabel 2. 188 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 325
Tabel 2. 189 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2019 326
Tabel 2. 190 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Statistik Tahun 2019 328
Tabel 2. 191 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Persandian Tahun 2019 330
Tabel 2. 192 Cagar Budaya yang direvitalisasi Tahun 2019 330
Tabel 2. 193 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi (dipagar) di Kabupaten / Kota se NTB tahun 2019 331
Tabel 2. 194 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2019 332
Tabel 2. 195 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2016-2019 333
Tabel 2. 196 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2019 334
Tabel 2. 197 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2019 335
Tabel 2. 198 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan 336
Tabel 2. 199 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB 337
Tabel 2. 200 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2018 338
Tabel 2. 201 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2017 - 2018 340
Tabel 2. 202 Daftar Nama OPD yang Telah Memiliki Record Center sampai dengan Tahun 2019 340
Tabel 2. 203 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2019 341
Tabel 2. 204 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2016 – 2019 344
Tabel 2. 205 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2019 345
Tabel 2. 206 Indikator RPJMD pada Dinas Perikanan dan Kelautan 346

Tabel 2. 207 Capaian Indikator Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%) tahun 2019 347
Tabel 2. 208 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2017-2019 348
Tabel 2. 209 Capaian Indikator Rasio Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Total Luasan Perairan Territorial 350
Tabel 2. 210 Angka Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 352
Tabel 2. 211 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2017 -2019 355
Tabel 2. 212 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019 363
Tabel 2. 213 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 364
Tabel 2. 214 Indikator Kinerja Bidang Pariwisata 366
Tabel 2. 215 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2019 367
Tabel 2. 216 Tingkat Penghunian Kamar Dan Lama Menginap Di Provinsi NTB Tahun 2018-2019 367
Tabel 2. 217 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2019 368
Tabel 2. 218 Capaian Pertambahan Nilai PDRB Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan 2016-2018 (Rp.Milyar) 371
Tabel 2. 219 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2017 – 2019 372
Tabel 2. 220 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 373
Tabel 2. 221 Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2017-2019 374
Tabel 2. 222 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 375
Tabel 2. 223 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017-2019 375
Tabel 2. 224 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2016-2019 377
Tabel 2. 225 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019 378
Tabel 2. 226 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019 379
Tabel 2. 227 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019 379
Tabel 2. 228 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 380
Tabel 2. 229 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2017 - 2019 381

Tabel 2. 230 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019 382
Tabel 2. 231 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 384
Tabel 2. 232 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2017-2019. 386
Tabel 2. 233 Pemotongan Ternak Betina Produktif Tahun 2017 s.d 2019 387
Tabel 2. 234 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 387
Tabel 2. 235 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 388
Tabel 2. 236 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2017 – 2019 388
Tabel 2. 237 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Tahun 2019 ... 390
Tabel 2. 238 393
Tabel 2. 239 Unit-Unit Pengolahan HHBK di KPH 393
Tabel 2. 240 396
Tabel 2. 241 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2019 398
Tabel 2. 242 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2023 401
Tabel 2. 243 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019 409
Tabel 2. 244 Neraca Daya Sistem NTB 415
Tabel 2. 245 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2017-2019 415
Tabel 2. 246 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2019 . 420
Tabel 2. 247 Rekapitulasi Piutang Negara dari Iuran Tetap (Landrent) Pemegang IUP Logam sampai dengan bulan Desember 2019 420
Tabel 2. 248 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2019 422
Tabel 2. 249 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2019 424
Tabel 2. 250 Inflasi Dari Sumbangan Kelompok Bahan Makanan Tahun 2019 . 426
Tabel 2. 251 Inflasi Dari Sumbangan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Tahun 2019 427
Tabel 2. 252 Rekapitulasi Mesin Peralatan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Masyarakat Tahun 2019 (Bantuan OPD) 429
Tabel 2. 253 Rekapitulasi Mesin Peralatan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Masyarakat Tahun 2018 (Bantuan OPD) 429
Tabel 2. 254 Barang Kebutuhan Pokok yang menjadi Tolok Ukur Stabilitas Harga 431
Tabel 2. 255 Barang Penting yang menjadi Tolok Ukur Stabilitas Harga 432
Tabel 2. 256 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahun 2019 433

Tabel 2. 257 Jumlah Kasus dan Metode Penyelesaian oleh BPSK Provnsi NTB Tahun 2015-2019 435
Tabel 2. 258 Sasaran, Lokasi dan Jenis Pengawasan Barang dan Jasa 437
Tabel 2. 259 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kota Mataram 438
Tabel 2. 260 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kota Mataram 439
Tabel 2. 261 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kabupaten Lombok Barat 440
Tabel 2. 262 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kabupaten Lombok Barat 441
Tabel 2. 263 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kabupaten Lombok Tengah. 442
Tabel 2. 264 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kabupaten Lombok Tengah 443
Tabel 2. 265 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019 444
Tabel 2. 266 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019 444
Tabel 2. 267 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019 446
Tabel 2. 268 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019 447
Tabel 2. 269 Kegiatan Pelatihan Untuk UKM Pemula 448
Tabel 2. 270 Kegiatan Pelatihan Untuk UKM Lanjutan 448
Tabel 2. 271 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2019 449
Tabel 2. 272 Capaian Kinerja Program Prioritas Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri Tahun 2019 451
Tabel 2. 273 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2019 451
Tabel 2. 274 Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2019 454
Tabel 2. 275 Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Merek Daerah Tahun 2019 455
Tabel 2. 276 Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2019 460
Tabel 2. 277 Sertifikasi SNI & Bimbingan ISO 9001 Tahun 2019 463
Tabel 2. 278 Nama-Nama Mesin Yang Telah Uji Report 464
Tabel 2. 279 Perkembangan Industri Formal s.d tahun 2019 465
Tabel 2. 280 Perkembangan Industri Non Formal tahun 2019 465
Tabel 2. 281 Perkembangan Industri Berdasarkan Jenis Kelompok Industri Sampai Dengan Tahun 2019 466
Tabel 2. 282 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian Tahun 2019 466
Tabel 2. 283 Capaian Indikator Kinerja Daerah Cakupan Penempatan Transmigran Tahun 2017 Sampai 2019 467
Tabel 2. 284 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah 468
Tabel 2. 285 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi Tahun 2019 468
Tabel 2. 286 Distribusi Undangan dan Surat pada Biro Umum Tahun 2019 470

Tabel 2. 287 Kegiatan Kunjungan yang Difasilitasi Tahun 2019 471
Tabel 2. 288 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Inovasi Pelayanan Publik yang Tereplikasi Tahun 2019 472
Tabel 2. 289 Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik Yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2018-2019 473
Tabel 2. 290 Hasil Penilaian LKJiP Pemerintah Provinsi Tahun 2017-2019 475
Tabel 2. 291 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2017-2019 476
Tabel 2. 292 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2019 476
Tabel 2. 293 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2019 477
Tabel 2. 294 Rekapitulasi Rekomendasi Izin Kepala Daerah dan DPRD Tahun 2019 493
Tabel 2. 295 Perbandingan angka inflasi NTB dan Nasional Tahun 2015 s.d 2019 494
Tabel 2. 296 Rekapitulasi Inflasi Tahun 2019 494
Tabel 2. 297 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2018-2019 496
Tabel 2. 298 Perbandingan angka pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Termasuk Sektor Pertambangan Bijih Logam Tahun 2015 s.d 2019 496
Tabel 2. 299 Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2019 497
Tabel 2. 300 Realisasi Penerimaan Deviden yang Bersumber dari Deviden Perusda dan BUMD Tahun 2017 s.d 2019 498
Tabel 2. 301 Realisasi Kegiatan tender UKPBJ Provinsi NTB 499
Tabel 2. 302 Realisasi Kegiatan Tender UKPBJ Provinsi NTB Tahun 2018 s.d 2019 Sumber dana APBN Provinsi NTB 500
Tabel 2. 303 Perkembangan Data CapaianKinerjaberdasarkan RPJMD NTB Tahun 2019 - 2023 501
Tabel 2. 304 Event Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2019 506
Tabel 2. 305 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Tahun 2019 ... 509
Tabel 2. 306 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tahun 2019 .. 518
Tabel 2. 307 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Tahun 2019 522
Tabel 2. 308 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri Tahun 2019 523
Tabel 2. 309 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Pemerintahan Biro Kerjasama Tahun 2019 524
Tabel 2. 310 Jumlah pengunjung di Anjungan NTB TMII Tahun 2017-2019 539
Tabel 2. 311 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pemerintahan pada Badan Penghubung Daerah Tahun 2019 540
Tabel 2. 312 Hasil Audit Penyelenggaraan Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017-2019 540

Tabel 2. 313 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019 542
Tabel 2. 314 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 543
Tabel 2. 315Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPKD Tahun 2017-2019 543
Tabel 2. 316 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2019 544
Tabel 2. 317 Penetapan APBD Provinsi NTB Dalam 5 Tahun Terakhir 544
Tabel 2. 318 Penetapan APBD Kabupaten/Kota Selama Tahun 2016 - 2020 546
Tabel 2. 319 Capaian Indikator Opini BPK Selama Tahun 2011-2019 547
Tabel 2. 320 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015-2018 548
Tabel 2. 321 Data Penghapusan BMD yang telah Dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun 2019 549
Tabel 2. 322 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan pada BPKAD Tahun 2019 551
Tabel 2. 323 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB 552
Tabel 2. 324 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 -2019 554
Tabel 2. 325 Target dan Relaisasi Penerimaan PAD Tahun 2019 555
Tabel 2. 326 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) Tahun 2019 556
Tabel 2. 327 Penerimaan Dari Masing-Masing Komponen Bagian Dana Perimbangan 557
Tabel 2. 328 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan pada BAPPENDA Tahun 2019 560
Tabel 2. 329 Nilai Indeks Profesionalisme ASN Berdasarkan Dimensi Tahun 2019 564
Tabel 2. 330 Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN 567
Tabel 2. 331 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepegawaian Tahun 2019 569
Tabel 2. 332 Akreditasi Jenis Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019. 570
Tabel 2. 333 Jenis dan Jumlah Peserta Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019 571
Tabel 2. 334 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 572
Tabel 2. 335 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019 573
Tabel 2. 336 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah 574
Tabel 2. 337 Rekapitulasi Hasil Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019 575

Tabel 2. 338 Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Triwulan IV 577
Tabel 2. 339 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 1 Tahun 2019 589
Tabel 2. 340 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 2 Tahun 2019 590
Tabel 2. 341 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 3 Tahun 2019 593
Tabel 2. 342 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 4 Tahun 2019 594
Tabel 2. 343 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 5 Tahun 2019 595
Tabel 2. 344 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 6 Tahun 2019 597

Tabel 3. 1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah) 600
Tabel 3. 2 PDRB Provinsi NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019 603
Tabel 3. 3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 – 2019 608
Tabel 3. 4 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010 – 2019 614
Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 615
Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 628
Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2021 640
Tabel 4. 3 641
Tabel 5. 1 Target Indikator makro pembangunan Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi NTB Tahun 2021 643
Tabel 5. 2 Desa Pilot Project Pada 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Penanganan Provinsi 646
Tabel 5. 3 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota Serta Desa / Kelurahan 652
Tabel 5. 4 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020 668
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023 677
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 678

EXECUTIVE SUMMARY

Sebagai tahun ke 3 (tiga) dari pelaksanaan periodesasi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 berpedoman dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan mengacu pada Pasal 16 Permendagri 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa salah satu tahapan penyusunan RKPD adalah penyusunan rancangan awal RKPD. Dokumen rancangan awal RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 dimaksud berisikan arah pembangunan NTB pada tahun 2021, yang disusun dalam beberapa bagian, yaitu: Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Saaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.

Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, pembangunan manusia, peningkatan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan integritas aparatur. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dengan penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin, penanganan dampak ekonomi Pasca Pandemi COVID-19, upaya pembangunan manusia diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengembangan kepemudaan dan olah raga, serta pemuliaan perempuan, perlindungan anak dan penyandang disabilitas.

Peningkatan ekonomi dan infrastruktur dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, kemudahan pelayanan perizinan, dan pengembangan industri. Sementara peningkatan integritas aparatur diimplementasikan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan integrasi aparatur disertai dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Perwujudan NTB Lestari diupayakan melalui

peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan kawasan permukiman, dan upaya penyediaan ruang terbuka hijau bagi warga. Selanjutnya, upaya mewujudkan NTB yang ramah ditandai dengan pengembangan pariwisata dan kebudayaan serta pengembangan wilayah pesisir dan perdesaan.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat merampungkan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 ini.

Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional tahun 2021, serta Permendagri 86 Tahun 2017. Dengan demikian, pada penyusunan dokumen Rancangan Akhir RKPD tahun 2021 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah sesuai yang tercantum dalam RPJMD. Selain itu, penyelarasan dilakukan juga dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam rancangan RKP serta program strategis nasional lainnya.

Dalam proses penyusunannya, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini. Semoga Allah SWT membalas kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas kita dalam membangun Provinsi Nusa Tenggara Barat meraih NTB Gemilang yang kita cintai bersama ini.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inilah yang dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

Mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan sistim perencanaan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah *(top-down),* dan bawah-atas *(bottom-up).* Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh

karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan *(stakeholder)* terhadap pembangunan, dimana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Dalam menyusun RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa

RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 merupakan perencanaan tahun ketiga penjabaran RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian diharapkan seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 nomor 1447);
17. Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Noreg Peraturan Daerah Provinsi NTB: 12/297/2017);

21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1; Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor [1-108/2019]).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah, dimana Rencana Kerja perangkat daerah akan menjadi bahan masukan dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun RKPD tahun 2021, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan

jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas.

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Gambar 1.1 Hubungan antar dokumen perencanaan

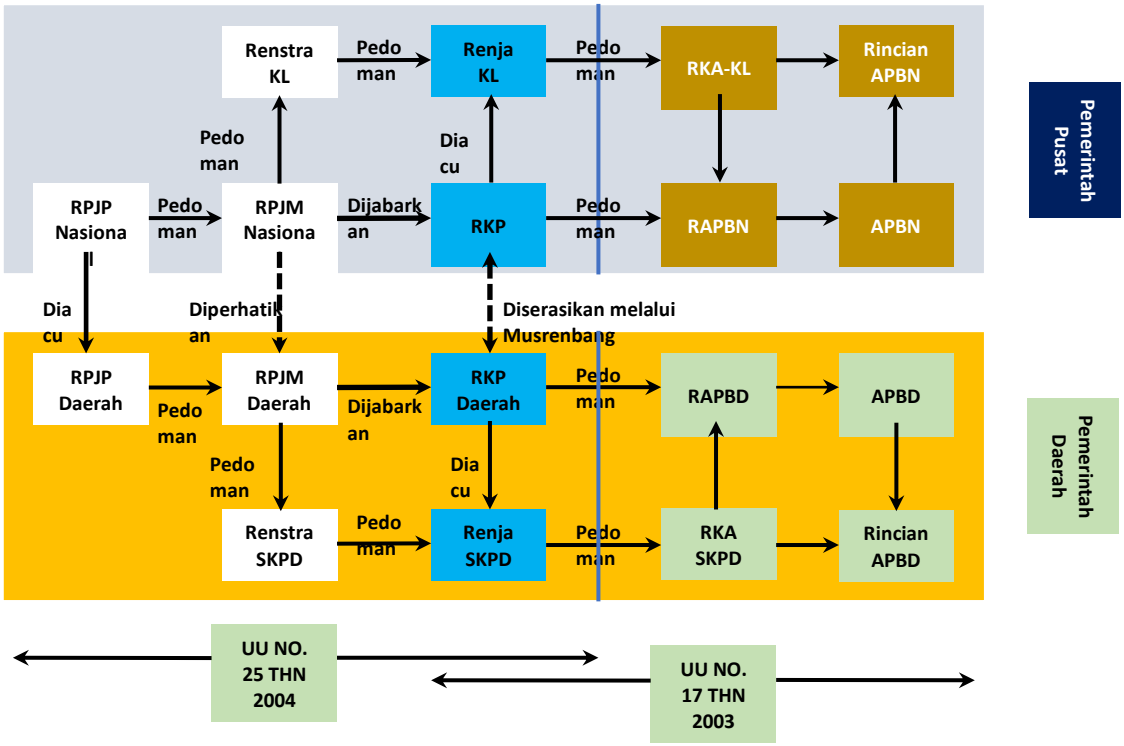

Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004

: UU Nomor 17 Tahun 2003

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

(1). Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2021;

(2). Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;

(3). Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;

(4). Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

(5). Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

(6). Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;

(7). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;

(8). Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(9). Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah daerah lainnya;

(10). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat diperlukan sinergitas di jajaran pemerintah Provinsi Nua Tenggara Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

Provinsi NTB secara geografis terletak antara 08° 10' – 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' – 119° 05' Bujur Timur. Wilayah di sebelah utara berbatasan Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi NTT, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali.

- **Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

  Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km^2 terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km^2 atau 40,87% dan perairan laut seluas 29.159,04 Km^2 atau 59,13% dengan panjang garis pantai sekitar 2.332,80 Km, yang terdiri atas 2 (dua) pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan dikelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil, 15,71% atau 44 pulau-pulau kecil tersebut telah berpenghuni. Beberapa pulau kecil merupakan daerah obyek wisata seperti: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, Pulau Moyo. Pulau Lombok mempunyai luas 4.738,80 Km^2 atau 23,51% sedangkan Pulau Sumbawa 15.414,05 Km^2 atau 76,49%.

  Posisi Provinsi NTB terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh-Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu, wilayah NTB adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya-Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tana Toraja.

  Secara administratif, Provinsi NTB terdiri dari 8 (delapan) kabupaten, 2 (dua) kota, 116 wilayah kecamatan dan 1.137 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki desa/kelurahan terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan. Kabupaten Lombok Utara memiliki jumlah kecamatan terkecil sebanyak 5 (lima) kecamatan dengan 33 desa/kelurahan dan Kota Mataram merupakan Ibu Kota Provinsi NTB. Tabel berikut memaparkan secara rinci jumlah kecamatan, desa/kelurahan serta luas wilayah pada masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi NTB tahun 2019.

Tabel 2- 1.

Tabel 2. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Km^2)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	1.053,87
2	Kabupaten Lombok Utara	5	33	809,53
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	139	1.169,58
4	Kabupaten Lombok Timur	21	254	1.605,55
5	Kabupaten Sumbawa	24	166	6.643,98
6	Kabupaten Dompu	8	81	2.320,00
7	Kabupaten Bima	18	192	4.389,40
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	65	1.849,02
9	Kota Mataram	6	50	61,30
10	Kota Bima	5	41	222,25
	Jumlah	117	1.143	20.124,48

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Selama tahun 2019, terdapat pemekaran 1 (satu) kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sehingga jumlah total kecamatan bertambah menjadi 117 dari 116 kecamatan di tahun 2018. Sementara, jumlah desa/kelurahan bertambah 6 (enam) menjadi 1.143 dari 1.137 pada tahun 2018 karena adanya pemekaran di sejumlah Kabupaten/Kota dengan rincian masing-masing: Kabupaten Sumbawa (1 desa), Kabupaten Bima (1 desa), Kabupaten Sumbawa Barat (1 desa), dan Kota Bima (3 Kelurahan).

- **Topografi**

  Secara topografis, Provinsi NTB mempunyai bentuk wilayah bervariasi, yakni dari 0 – 3.276 mdpl (Pulau Lombok) dan 0 – 2.755 mdpl (Pulau Sumbawa). Adapun sebaran wilayah berdasarkan klasifikasi ketinggian wilayah, yaitu: wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 mdpl sekitar seluas 478,911 Ha (23,76 %); ketinggian 100-500 mdpl seluas 753,612 Ha (37,39%), ketinggian 500-1000 mdpl seluas 307,259 Ha (15,25%), dan lebih dari 1000 mdpl seluas 475,533 Ha (23,60%). Selong merupakan kota dengan letak tertinggi (166 mdpl) dan terendah berada di Taliwang (11 mdpl). Sementara, Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Berdasarkan klasifikasi kemiringan tanah atau lereng, wilayah daratan NTB terluas masuk ke dalam klasifikasi kemiringan tanah 15-40% yaitu seluas 704.619 Ha (34,96%), sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0–2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Klasifikasi kemiringan paling luas di Pulau Lombok adalah antara 2-15% seluas 198.616 Ha atau sekitar 9,85% dari luas wilayah daratan dan paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha atau sebesar 1,01% dari luas wilayah Provinsi NTB. Sementara, klasifikasi kemiringan tanah paling luas di Pulau Sumbawa antara 15-40% seluas 573.903 Ha atau sekitar 28,48% dari luas Provinsi NTB dan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha atau sebesar 10,63%.

Provinsi NTB memiliki 16 gunung dengan sebarannya adalah 7 (tujuh) jajaran gunung terdapat di Pulau Lombok dan dan Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl. 6 (enam) gunung lainnya, yakni gunung Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan dan Baru. Di Pulau Sumbawa, terhampar deretan Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi. Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 2.851 mdpl.

- **Geologi**

  Geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter, batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuarter di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuarter di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral, aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

- **Hidrologi**

  Sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai di satuan wilayah sungai Lombok dan satuan wilayah sungai Sumbawa dibagi menjadi 18 sub satuan wilayah sungai/daerah aliran sungai (SSWS/DAS) berdasarkan SK Gubernur NTB No. 147 Tahun 1999. Satuan wilayah sungai (SWS) Lombok

terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi: Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P, Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh.

Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2. 2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air	Luas (Km^2)	Air Tanah Bebas (Juta M^3/Tahun)	Air Tanah Tertekan (Juta M^3/Tahun)
1	Mataram – Selong	2.366	662	8
2	Tanjung – Sambelia	1.124	224	22
3	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4	Empang	345	35	3
5	Pekat	977	220	10
6	Sanggar – Kilo	1.419	320	14
7	Dompu	375	63	6
8	Bima	1,102	165	16
9	Tawali – Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

- **Klimatologi**

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Kediri-Lombok Barat pada tahun 2019, kelembaban udara terendah mencapai 75% terjadi pada bulan Oktober dan tertinggi hingga 86 % di bulan Januari. Temperatur maksimum berkisar antara 34,0˚C – 34,1˚C pada bulan Oktober dan November, sedangkan terendah berkisar antara 19,5˚C – 20,6˚C terjadi pada bulan Juni dan Juli. Tekanan udara terendah terjadi pada bulan Januari mencapai 1004,5 mb dan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 1009,4 mb.

Curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 1 mm dan tertinggi pada bulan Desember sebesar 398 mm. Sementara, hari hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Oktober sebanyak 1 hari dan tertinggi di bulan Desember sebanyak 25 hari. Lama penyinaran matahari terendah terjadi pada bulan Januari sebesar 61% sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Oktober sebesar 93%. Rata-rata kecepatan angin setiap bulan berkisar antara 3 sampai 5 knots. Rata-rata kecepatan angin terendah terjadi di bulan

Februari dan Desember serta tertinggi pada bulan Agustus, September, dan Oktober.

- **Wilayah Rawan Bencana**

Wilayah Rawan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 3 Lokasi Kawasan Rawan Tanah Longsor

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Longsor
Rawan Tanah Longsor Tipe A	
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kawasan sekitar Rinjani, Malimbu dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan
Kab. Lombok Timur	Kawasan sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan sekitar Taliwang, Seteluk, Jereweh, Maluk dan Punik
Kab. Sumbawa	Kawasan sekitar Alas, Semongkat, Lenangguar dan Empang
Kab. Dompu	Kawasan Sekitar Tambora, Ranggo dan Paradowane
Kab dan Kota Bima	Kawasan sekitar Tambora Bagian timur, Bima dan Karumbu
Rawan Tanah Longsor Tipe B	
Kab. Lombok Barat	Kawasan Sekitar Rinjani, Malimbu, Lembar dan Sekotong
Kab. Lombok Tengah	Kawasan sekitar Rinjani bagian selatan dan sekitar Kuta
Kab. Lombok Timur	Kawasan Sekitar Rinjani bagian timur dan sekitar Gunung Nangi
Kab. Dompu	Kawasan sekitar Tambora bagian barat
Kab. Bima	Kawasan sekitar Tambora bagian timur dan sekitar Gunung Kuta

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gunung berapi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 4 Lokasi Kawasan Rawan Gunung Berapi

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Gunung Rinjani	
Kab. Lombok Utara	Daerah Bahaya: Kecamatan Bayan dan Kampung Batusantek (sepanjang alur sungai Kokok Putih)
Kab. Lombok Timur	Daerah Bahaya: Kecamatan Aikmel, Sambelia, dan sepanjang alur Kokok Putih
Gunung Tambora	
Kab. Dompu	Daerah Bahaya: Daerah di sekitar kaldera dengan luas kurang lebih 58,7 km2

Lokasi	Kawasan Rawan Gunung Berapi
Kota Bima	Daerah Waspada: jalur sepanjang sungai Ngguwu kara, sungai Ngguwu Tula (ketiganya termasuk Desa Beringin Jaya) dan Sungai Hodo (Desa Kesi)
Kab. Bima	Daerah Waspada : jalur sepanjang sungai Oi Marai dan sungai Mango (Desa Kawinda Toi), sungai Panihi (Desa Kawinda Nae), dan sungai Sumba (Desa Labuhan Kenanga)
Gunung Api Sangiang	
Kab. Bima	Daerah terlarang : daerah yang termasuk dalam lingkaran dengan jari-jari kurang lebih 5,0 Km2 yang berpusat di Puncak Doro Api yang diperluas sepanjang alur sungai kering Oi Sola, Oi sori Buntu, Sori Belanda, Sori Mbere, Sori Do Japa, Sosi Panda, Sori Iso dan Sori Berano
	Daerah Bahaya I : hampir seluruh daratan pulau Sangiang termasuk dalam daerah ini, kecuali kampung Toro Panda yang berada di bagian selatan
	Daerah Bahaya II : daerah di sekeliling pantai pulau Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana Tsunami di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 5 Lokasi Kawasan Rawan Tsunami

Lokasi	Kawasan Rawan Tsunami
Kab. Lombok Barat	Kawasan Pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Barat
Kab. Lombok Tengah	Kawasan pesisir bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta, Tanjung Aan, Gerupuk dan Teluk Awang
Kab. Lombok Timur	Kawasan pesisir selatan Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji
Kab. Sumbawa Barat	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejorong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Kawasan pesisir bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Kawasan pesisir bagian barat dan selatan Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Kawasan pesisir bagian timur dan selatan Kabupaten Bima, yakni Sape dan Lambu, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana angin topan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 6 Lokasi Kawasan Rawan Angin Topan

Lokasi	Kawasan Rawan Angin Topan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Lombok Timur	Kecamatan Gerung dsk, Sekotong Tengah, Darmada dsk, dan Bayan dsk
Kab. Sumbawa Barat	Kecamatan Brang Rea dsk
Kab. Sumbawa	Kecamatan Alas dsk, Unter Iwes dsk, Empang-Tarano dsk
Kab. Dompu	Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Dompu
Kab. Bima	Kecamatan Woha dsk, monta dsk, Woja dsk

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana gelombang pasang di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 7 Lokasi Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Lokasi	Kawasan Rawan Gelombang Pasang
Kota Mataram	Sepanjang pesisir bagaian barat yaitu Sekip dan Ampenan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Sepanjang Pesisir Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara
Kab. Lombok Tengah	Pantai bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah yaitu Selong Belanak, Kuta Tanjung Aan, Gerupuk dan Pantai Awang
Kab. Lombok Timur	Pantai selatan dan timur Kabupaten Lombok Timur yaitu Ekas, Tanjung Ringgit, Tanjung Luar, Labuhan Haji, Labuhan Lombok
Kab. Sumbawa Barat	Pantai bagian barat dan selatan yaitu Maluk, Benete, Tongo, Sejorong dan Sekongkang
Kab. Sumbawa	Pantai bagian utara dan selatan yaitu Alas, Utan, Badas, Sumbawa Besar, Prajak, Labuhan Moyo Hilir, Empang dan Plampang bagian selatan, Lunyuk dan Teluk Panas, Plampang
Kab. Dompu	Pantai bagian barat Kabupaten Dompu, yakni Calabai, Nangamiro dan Kilo, serta Pantai Hu'u di pesisir bagian selatan
Kota Bima	Pantai bagian barat Kota Bima
Kab. Bima	Pantai bagian utara dan timur Kabupaten Bima, yakni Donggo dsk, Sape dan Lambu, Wera, Karumbu dan daerah sekitarnya

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Berikut ini lokasi rawan bencana kekeringan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 8 Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Kekeringan
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar, Sekotong dan sekitarnya, Kedondong, Malimbu, Pemenang dan sekitarnya, Tanjung, Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan, dan Medas
Kab. Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya
Kab. Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur, Labuhan Haji, Pringgabaya, Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong Taliwang-Tepas-Seteluk-Labuhan Sepakeh
Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batu Lanteh-Baturotok Punik, Alas-Penyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat, Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-kalaning-Tanjungberu Pungkit, Plampang-Empang
Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo dan Mbawi
Kab. dan Kota Bima	Sila, Paradowane, Bima dan Sekitarnya, Tawali, Sape, dan P.Sangiang

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Lokasi rawan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tersebar di wilayah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu daerah/kawasan yang berpotensi dan/atau yang pernah mengalami gempa skala VII s.d XII MMI *(modified mercally intensity*).

Untuk bencana yang timbul akibat kesalahan manusia, teridentifikasi kawasan rawan banjir sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Lokasi Kawasan Rawan Bencana Akibat Kesalahan Manusia

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung dan Jembatan Kembar

Lokasi	Kawasan Rawan Tanah Bencana Akibat Kesalahan Manusia
Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke-Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber : RTRW Provinsi NTB

Daya dukung air dapat dihitung menggunakan metode jasa ekosistem. Angka persentase yang ditampilkan dari hasil perhitungan jasa ekosistem adalah persentase lahan yang potensial dalam menghasilkan air. Kelas tinggi sedang dan rendah menunjukkan penyediaan air di Provinsi NTB.

Untuk menggambarkan status kemampuan daya dukung air pada Provinsi NTB, jumlah ketersediaan air pada provinsi NTB selanjutnya dibandingkan dengan tingkat konsumsi. Sehingga akan menghasilkan besaran selisih penyediaan (melampaui/belum melampaui) daya tampung.

Tabel 2. 10 Status Penyediaan Air Provinsi NTB

Ketersediaan (m^3)	Kebutuhan (m^3)			Selisih (m^3)	Status Ketersediaan
	Domestik	Lahan	Total		
4.735.817.287	190.426.032	8.204.726.871	8.395.152.903	3.659.335.615	Terlampaui

Sumber: Bappeda Prov. NTB

Kebutuhan total air di Provinsi NTB sebesar 8.395.152.903 m^3 sedangkan ketersediaan air sebanyak 4.735.817.287 m^3 sehingga sudah berhasil melampaui kebutuhan dengan jumlah selisih 3.659.335.615 m^3.

2.1.1.2 Demografi NTB

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Provinsi NTB pada tahun 2019 mencapai 5.070.385 jiwa. Proyeksi ini meningkat sebesar 1,13% dibandingkan proyeksi penduduk tahun 2018 yakni 5.013.687 jiwa. Namun demikian, prosentase

peningkatan jumlah penduduk NTB dari tahun 2018 ke 2019 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi peningkatan periode sebelumnya dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 1,17%. Berdasarkan sebaran dan laju pertumbuhan, Kabupaten Sumbawa Barat diproyeksikan memiliki jumlah penduduk paling kecil yakni 148.606 jiwa namun laju pertumbuhannya tertinggi yaitu 2,69%. Sementara, Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 1.200.612 jiwa dan laju pertumbuhan paling rendah yakni mencapai 0,71%. Dapat dijelaskan juga bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Pulau Sumbawa yakni mencapai 1,57% relatif lebih besar dibandingkan dengan Pulau Lombok dengan laju pertumbuhan sebesar 1,16%. Adapun faktor penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk tersebut karena adanya kelahiran alamiah dan migrasi penduduk. Tabel di bawah ini menyajikan informasi terkait jumlah penduduk NTB menurut kabupaten/kota.

Tabel 2. 11 Sebaran Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)		
		2017	2018	2019
1.	Lombok Barat	675.222	685.161	694.985
2.	Lombok Tengah	930.797	939.409	947.488
3.	Lombok Timur	1.183.204	1.192.110	1.200.612
4.	Lombok Utara	216.515	218.533	220.412
5.	Kota Mataram	468.509	477.476	486.715
	Pulau Lombok	**3.474.274**	**3.512.689**	**3.550.212**
6.	D o m p u	245.387	248.879	252.288
7.	B i m a	478.967	483.901	488.577
8.	Sumbawa Barat	140.890	144.707	148.606
9.	Sumbawa	449.680	453.797	457.671
10.	Kota Bima	166.407	169.714	173.031
	Pulau Sumbawa	**1.481.331**	**1.500.998**	**1.520.173**
	Jumlah	**4.955.578**	**5.013.687**	**5.070.385**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Dari sisi distribusi penduduk berdasarkan wilayah, pola penyebaran penduduk NTB tidak merata karena 70,02% penduduk tinggal di Pulau Lombok

dan sisanya 29,98% mendiami Pulau Sumbawa sehingga berimplikasi pada tingginya ketimpangan kepadatan penduduk di antara kedua pulau tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 12 Kepadatan Penduduk Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)		
		2017	2018	2019
1.	Lombok Barat	640,71	650,14	659,46
2.	Lombok Tengah	1.149,80	1.160,44	810,11
3.	Lombok Timur	979,15	986,52	747,79
4.	Lombok Utara	117,10	118,19	272,27
5.	Kota Mataram	7.642,89	7.789,17	7.939,89
	Pulau Lombok	**697,35**	**705,06**	**755,39**
6.	Sumbawa Barat	32,10	32,97	80,37
7.	Sumbawa	280,08	282,64	68,89
8.	Dompu	36,93	37,46	108,74
9.	Bima	206,04	208,17	111,31
10.	Kota Bima	801,96	817,90	778,54
	Pulau Sumbawa	**97,64**	**98,94**	**98,55**
	Provinsi NTB	**245,90**	**248,78**	**251,95**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Merujuk pada tabel di atas, Pulau Lombok mempunyai tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi yakni tiga kali lipat dari Pulau Sumbawa yakni masing-masing sebesar 755,39 jiwa/km2 dibandingkan 98,55 jiwa/km2. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Mataram yakni 7.939,89 jiwa/km2 dan terendah adalah Kabupaten Sumbawa sebesar 68,89 jiwa/km2. Besarnya sex ratio pada tahun 2019 adalah 94,36%, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun demikian, pertumbuhan penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan meskipun secara keseluruhan cenderung menurun dari 1,17% tahun 2018 menjadi 1,13% di tahun 2019. Tabel berikut

menyajikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pertumbuhannya secara rinci selama periode tahun 2017 - 2019.

Tabel 2. 13 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

Tahun	Penduduk (Jiwa)			Pertumbuhan (%)			*Sex Ratio*
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
2017	2.405.080	2.550.498	4.955.578	1,23	1,19	1,21	94,30
	(48,53)	(51,47)	100%				
2018	2.433.731	2.579.956	5.013.687	1,19	1,15	1,17	94,33
	(48,54)	(51,46)	100%				
2019	2.461.619	2.608.766	5.070.385	1,15	1,11	1,13	94,36
	(48,55)	(51,45)					

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) pada tahun 2019 sebanyak 3.325.403 orang atau sebesar 65,58% atau meningkat 1,32% dibandingkan tahun 2018. Sementara, kelompok umur tidak produktif sebesar 1.744.982 orang atau 34,42%. Penduduk perempuan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yaitu mencapai 52,37% sedangkan laki-laki sebesar 47,63%. Dengan demikian, jumlah penduduk laki-laki tidak produktif (50,29%) lebih tinggi dari penduduk perempuan (49,71%). Adapun rasio ketergantungan (dependency ratio) sebesar 52,47 atau cenderung mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,29 dan 0,57 poin. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya sumber daya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Tabel berikut menyajikan jumlah penduduk berdasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin serta rasio ketergantungan tahun 2017 – 2019.

Tabel 2. 14 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			*Dependency Ratio*
		0 - 14	15 - 64	65	
2017	Laki	749.138	1.540.900	115.042	56,08

TAHUN	JENIS KELAMIN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)			*Dependency Ratio*
		0 - 14	15 - 64	65	
	Perempuan	718.95	1.697.088	134.46	50,29
	Total	1.468.088	3.237.988	249.502	53,04
2018	Laki	751.919	1.563.026	118.786	55,71
	Perempuan	722.099	1.719.054	138.803	50,08
	Total	1.474.018	3.282.080	257.589	52,76
2019	Laki	753.255	1.584.052	124.312	55,40
	Perempuan	723.150	1.741.351	144.265	49,81
	Total	1.476.405	3.325.403	268.577	52,47

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, meningkatnya tingkat kepadatan dan semakin bertambahnya penduduk kelompok umur produktif. Situasi dan kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan komprehensif kaitannya dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja melainkan juga memiliki daya ungkit dala meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Adapun capaian indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 15 Capaian Indikator pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	7.1	3.08	4,5 - 5,0	4,76	100.00

2.	Inflasi		3.7	3.16	3,0 - 4,0	1.87	137.67
3.	Angka Kemiskinan	%	15.05	14.63	13.75	13.88	99.05
4.	Gini Ratio		0.378	0.372	0.367	0.374	98.09
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66.58	67.3	68.07	68.14	100.10
6.	Indeks Kebahagiaan		70.7	-	-	NA	NA

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019

Dari 6 indikator untuk mengukur aspek kesejahteraan masyarakat, terdapat 3 indikator (50%) tercapai atau sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan indikator yang memenuhi target namun tingkat capaiannya sangat tinggi diatas 96% yaitu indikator Angka Kemiskinan dan Gini Ratio. Adapun indikator Indeks Kebahagiaan tiga tahun sekali baru dapat diukur.

Gambar 2. 1 Proporsi tingkat capaian Aspek Kesejahteraan

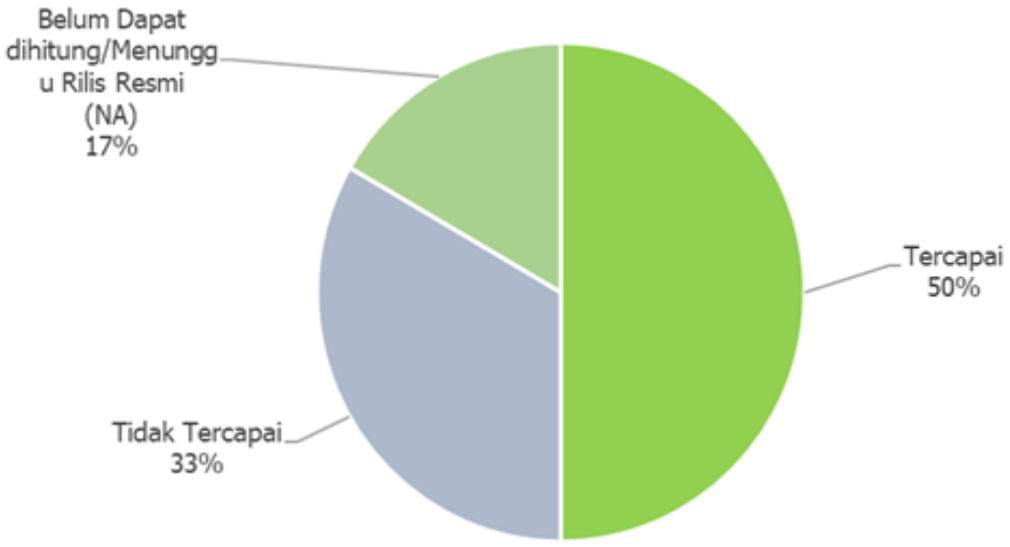

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan bagian dari pelayanan publik baik dalam bentuk barang maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab atau urusan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Terdapat 76 indikator kinerja untuk mengukur pelayanan umum yang terdiri dari urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 21 indikator yang tersebar pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib terkait pelayanan dasar sebanyak 26 indikator yang tersebar pada 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan 15 indikator yang tersebar pada 8 urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan sebanyak 14 indikator yang tersebar 7 fungsi penunjang urusan. Adapun tingkat capaian indikator-indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 16 Capaian Indikator pada Aspek Pelayanan Umum

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019		
			2017	2018	Target	Capaian	Tingkat Capaian
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**						
1.01	**Pendidikan**						
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.51	13.57	13.48	99.34
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	6.93	6.96	7.27	104.45
1.02	**Kesehatan**						
1	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66.74	70.35	73.00	86.47	118.45
2	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	69.25	69.53	72.62	75.02	103.30
3	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.55	65.55	66.07	66.28	100.32
4	Persentase Balita *Stunting*	%	37.20	33.49	32.49	25.5	154.82
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
1	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10.00	50.00	50.00	100.00
2	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77.16	83.65	84.65	80.28	94.84

3	Cakupan Air Minum	%	70.48	72.56	74.08	74.69	100.82
4	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55.31	55.35	56.18	54.41	96.85
5	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	17.18	0.00	0.00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						
1	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	-	20.00	75.00	59.00	78.67
2	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	89.50	92.01	92.37	92.02	99.62
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**						
1	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	0.00	10.00	50.00	33.21	66.42
2	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	0.00	10.00	50.00	11.45	22.91
3	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	5.07	7.14	11.75	11.75	100.00
6	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%		0.41	10.00	10.00	100.00
1.06	**Sosial**						
1	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54.50	54.50	100.00	100.00	100.00
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	5.07	22.42	5.50	4.42	80.36
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**						
2.01	**Tenaga Kerja**						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.32	3.72	3.39	3.42	98.25
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59.95	60.19	60.43	NA	NA
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		90.36	90.72	91.08	NA	NA

3	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20.27	20.23	20.42	20.21	98.97
2.03	**Pangan**						
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77.80	78.30	78.80	85.30	108.25
2.05	**Lingkungan Hidup**						
1	Indeks Kualitas Air		20.25	20.25	22.75	NA	NA
2	Indeks Kualitas Udara		88.02	88.37	88.45	NA	NA
3	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50.00	51.00	60.00	NA	NA
2.04	**Pertanahan**						
1	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
1	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio		0.78	0.80	0.99	123.75
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**						
1	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14.17	20.86	24.47	33.29	136.07
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1.21	1.17	1.13	1.13	100.00
2.09	**Perhubungan**						
1	Indeks konektivitas transportasi publik	%	-	74.76	76.7	78.64	102.53
2.10	**Komunikasi dan Informatika**						
1	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level		1	2	2.2	110.00
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**						
1	Persentase Koperasi Aktif	%	62.00	60.00	62.00	61.77	99.63
2.12	**Penanaman Modal**						
1	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11,28	14	16	10,024	62.65
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**						
1	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	35	140.00
2	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23	153.33
3	Proporsi wirausaha muda	%	67.78	67.86	67.97	68	100.04
2.14	**Statistik**						

1	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	-	60.00	70.00	95.49	136.41
2.15	**Persandian**						
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	I	I	II	II	100.00
2.16	**Kebudayaan**						
1	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	-	-	3.52	NA	NA
2	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	8.70	17.39	20.00	26.00	130.00
2.17	**Perpustakaan**						
1	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	47.46	47.46	100.00	100.00	100.00
2	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	17.27	19.93	23.91	26.57	111.11
2.18	**Kearsipan**						
1	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	16.55	16.67	33.33	33.33	100.00
C	**URUSAN PILIHAN**						
3.01	**Kelautan dan Perikanan**						
1	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4.77	4.76	4.76	4.57	96.01
3.02	**Pariwisata**						
1	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00
2	Rata-rata Lama Menginap	hari	2.64	1.50	2.75	2.05	74.55
3	Angka kunjungan wisatawan	orang	3,508,903	2,552,634	4,000,000	3,706,352	92.66
4	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	-	-	-	NA
3.03	**Pertanian**						
1	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	(Rp. Juta)	1,292,781.85	308,343.18	820,307.23	371,852.43	45.33
2	Nilai Tukar Petani		107.95	>105	>105	115.81	110,3
3.04	**Kehutanan**						
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61.27	61.27	60.03	NA	NA
2	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0.08	0.08	0.08	NA	NA
3.05	**Energi dan Sumberdaya Mineral**						
1	Rasio Elektrifikasi	%	85.10	93.83	94.46	99.55	105.39
3.06	**Perdagangan**						

1	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9,877	9,917	9,956	10,64	106.87
3.07	**Perindustrian**						
1	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235,421.31	67,344.90	164,565.72	164,96	100.24
2	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0.57	1.13	1.68	NA	NA
3	Pertumbuhan Industri	%		2.68	3.20	NA	NA
3.08	**Transmigrasi**						
1	Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	80.00	100.00
D	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**						
4.01	**Administrasi Pemerintahan**						
1	Skor EKPPD		29.752	30.012	30.329	NA	NA
2	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100.00	100.00	100.00	144.05	144.05
3	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	%	100.00	100.00	100.00	311.25	311.25
4	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35.1	35.45	35.81	NA	NA
5	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2	100.00
6	Persentase Kerjasama Daerah	%	-	-	100	150	150.00
4.02	**Pengawasan**						
1	Nilai SAKIP		B	B	B	BB	115.38
4.03	**Perencanaan**						
1	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100.00	100.00	100.00	95.09	95.09
4.04.	**Keuangan**						
1	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	100
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0.46	0.45	0.47	0.5	106.38
4.05	**Kepegawaian dan Diklat**						
1	Indeks Profesionalisme ASN		0.00	0.60	0.65	0.54	83.08
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**						
1	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	B	B	B	100
2	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32.55	34.76	10.43	11.85	113.61
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**						

1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12.00	15.00	18.00	21.00	116.67

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019

Gambar 2. 2 Proporsi tingkat capaian Aspek Pelayanan Umum

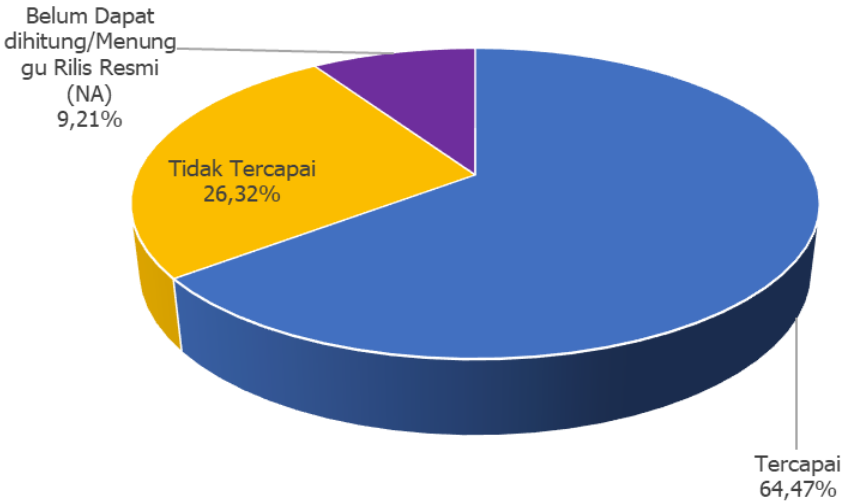

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2019

Dari 76 indikator untuk mengukur aspek pelayanan umum, terdapat 49 indikator (64,47%) tercapai atau memenuhi target bahkan melampaui target, sedangkan 20 indikator (26,32%) belum memenuhi target, namun 14 indikator diantaranya dengan tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 90%. Dan masih terdapat 7 indikator (9,21%) belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait. Beberapa indikator yang tercapai antara lain: Rata-rata Lama Sekolah, Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, Angka Harapan Hidup, Persentase Balita Stunting, Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi, Cakupan Air Minum, Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR), Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman, Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas, Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%), Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter, Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Indeks Kualitas Air, Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi , Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan , Pertumbuhan Penduduk, Indeks

konektivitas transportasi public, Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik, Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, Proporsi wirausaha muda, Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi , Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5), Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas), Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul), Persentase Arsip yang Terselamatkan, Persentase Desa Wisata yang dikembangkan, Nilai Tukar Petani, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Rasio Elektrifikasi, Pengeluaran per kapita, Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri, Cakupan Penempatan Transmigran, Skor EKPPD, Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk, Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah, Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi , Persentase Kerjasama Daerah, Nilai SAKIP, Opini BPK, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Akreditasi BPSDM, Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN, dan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB).

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan penyelenggaraan urusan tersebut berpedoman pada standar pelayananan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayananan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat umum serta sosial.

1. Urusan Pendidikan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tahun 2019 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB beserta UPTD yaitu Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (BTIKP); UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Barat-Mataram; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Tengah, UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Timur; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Lombok Utara; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Sumbawa Barat; UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Sumbawa;

UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Dompu; dan UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan PK-PLK Bima-Kota Bima.

Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumberdaya manusia dan menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi NTB. Pendidikan sebagai sarana untuk menyiapkan sumberdaya manusia bagi pembangunan dalam pengentasan kemiskinan dan memberikan ketrampilan kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hakikat pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan ataupun kualitas kehidupan sosial, ekonomi penduduk suatu daerah.

Beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah antara lain: peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan asrama sekolah; pembangunan rumah singgah untuk sekolah di daerah terpencil; penambahan ruang kelas; pembangunan laboratorium dan ruang praktikum; pembangunan perpustakaan; pengadaan alat praktik dan peraga siswa; dan pengadaan perlengkapan sekolah dan pengadaan jaringan WLAN bagi sekolah. Selain itu bagi sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa yang menjadi wewenang pemerintah provinsi juga mendapat perhatian dalam hal peningkatan akses dan pengadaan sarana prasarana sekolah. Kegiatan lain dalam peningkatan mutu pendidikan dilaksanakan melalui penerbitan surat edaran terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi untuk SMA sehingga bagi siswa yang kurang mampu dapat terserap atau melanjutkan sekolahnya di sekolah yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan demikian akan menghemat biaya transportasi bagi siswa kurang mampu tersebut. Selain itu, surat edaran terkait PPDB juga memberikan kebebasan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikannya khususnya pada jenjang SMK/SMK sesuai kewenangan provinsi. Adapun indikator yang ketiga yang menjadi tanggung jawab Dinas DIKBUD adalah urusan kebudayaan yaitu Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi dengan rencana 20% dan capaian untuk tahun 2019 adalah sebesar 26%.

Meningkatnya rata-rata lama sekolah sebagai akibat dari meningkatnya capaian angka partisipasi sekolah dan angka melanjutkan sekolah serta menurunnya angka buta huruf dan drop out. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar

(APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa Seluruhnya				APK			
			SD	MI	SDLB	Paket A Setara	Tidak Termasuk Paket A Setara		Termasuk Paket A Setara	
							Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2012/2013	554,255	540,381	86,885	1,62	860	628,886	113.47	629,746	113.62
2.	2013/2014	557,174	540,246	91,672	1,649	1,305	633,567	113.71	634,872	113.95
3.	2014/2015	559,704	531,753	93,45	2,577	1,255	627,78	112.16	629,035	112.39
4.	2015/2016	566,512	520,567	95,321	1,946	1,325	617,834	109.06	619,159	109.3
5.	2016/2017	574,512	517,639	98,388	1,875	1,59	617,902	107.55	619,492	107.83
6.	2017/2018	580.258	512.678	104.033	2.099	6.866	618.810	106,64	625.676	107,83
7.	2018/2019	590.459	512.612	100.490	2.174	11.961	615.276	104,20	627.237	106,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel diatas, APK SD sederajat mengalami penurunan dari tahun pelajaran 2015/2016 – 2018/2019, artinya penduduk yang bersekolah diluar usia 7-12 tahun pada jenjang SD/sederajat makin berkurang. Apabila melihat jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sejak tahun 2015-2019 mengalami peningkatan namun tidak demikian halnya dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/sederajat termasuk paket A pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang berimplikasi pada nilai APK SD. Jika disandingkan antara jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/sederajat termasuk paket A setara. Tahun 2015-2019 jumlah penduduk yang bersekolah pada level SD/sederajat termasuk paket A lebih tinggi jumlahnya dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dapat diartikan bahwa kelompok usia diluar 7-12 tahun masih terdapat 6,23% bersekolah di jenjang SD/sederajat termasuk paket A.

Tabel 2. 18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa Seluruhnya					APK			
			SMP	MTs	SMP Terbuka	SMPLB	Paket B Setara	Tidak Termasuk Paket B Setara		Termasuk Paket B Setara	
								Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2012/2013	271,78	174,972	98,321	5,362	384	5,916	279,039	102.67	284,955	104.85
2.	2013/2014	275,667	176,978	104,635	6,002	381	6,308	287,996	104.47	294,304	106.76
3.	2014/2015	270,049	178,653	105,336	5,041	394	4,05	289,424	107.17	293,474	108.67
4.	2015/2016	271,023	181,592	107,217	5,041	654	4,014	294,504	108.66	298,518	110.14
5.	2016/2017	271,934	182,273	106,915	4,153	734	5,026	294,075	108.14	299,101	109.99
6.	2017/2018	271.348	179.868	110.788	2.372	828	6.001	293.856	108,29	299.857	110,51
7.	2018/2019	274.998	174.099	110.561	5.208	774	9.580	290.642	105,69	300.222	109,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat termasuk paket B setara terlihat lebih tinggi dari jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat termasuk paket B setara pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan masih ada penduduk diluar kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/sederajat. Jumlah penduduk yang bersekolah pada tingkat SMP/sederajat termasuk paket B setara mengalami trend meningkat, demikian pula dengan APK. Hal ini semakin menegaskan bahwa masih banyak penduduk diluar usia 13-15 tahun bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/sederajat termasuk paket B setara.

Tabel 2. 19 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Peserta Didik Seluruhnya						APK					Total APK (SM)
			SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	Jumlah	SMA	MA	SMK	SMA LB	Paket C	
1.	2012/2013	259,702	97,911	56,849	53,75	117	6,126	214,753	37.70	21.89	20.70	0.05	2.36	82.69
2.	2013/2014	264,659	97,238	56,609	58,001	127	11,391	223,366	36.74	21.39	21.92	0.05	4.30	84.40
3.	2014/2015	265,971	100,537	57,768	62,201	189	5,722	226,417	37.80	21.72	23.39	0.07	2.15	85.13
4.	2015/2016	267,108	103,076	60,584	63,106	223	6,811	233,8	38.59	22.68	23.63	0.08	2.55	87.53
5.	2016/2017	267,146	105,777	66,194	67,226	290	6,88	246,367	39.60	24.78	25.16	0.11	2.58	92.22
6.	2017/2018	267,651	104.949	70.705	71.571	423	14.454	262.102	39,21	26,42	26,74	0,16	5,40	97,93
7.	2018/2019	267,595	101.066	67.282	72.684	479	22.194	263.705	37,77	25,14	27,16	0,18	8,29	98,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin meningkat dari tahun 2015-2018. NAmun untuk tahun 2019 jumlah pendidikan usia 16-18 tahun mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat termasuk paket C setara dan besaran APK SMA/sederajat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat, berusia diluar 16-18 tahun. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat termasuk paket C setara maka dapat terlihat masih ada selisih antara jumlah penduduk usia 16-18 dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat, hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada jenjang tersebut sebesar 1,45%.

Berdasarkan jenjang pendidikan, APK SD/sederajat cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk APK SMP/sederajat dan APK SMA/sederajat mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD/sederajat, penduduk yang bersekolah pada jenjang tersebut diluar usia 7-12 tahun mulai menurun. Masyarakat semakin peduli dengan pentingnya pendidikan dasar sehingga saat anak berusia 7-12 tahun, anak tersebut diberi pendidikan sesuai jenjangnya, jenjang SMP/sederajat dan SMA/sederajat APK meningkat, namun masih terdapat anak diluar usia yang seharusnya atau masih ada lulusan jenjang SD/sederajat atau SMP/sederajat yang tidak/belum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Peningkatan APK SMP/sederajat dan APK SMA/sederajat tidak mempengaruhi secara signifikan jumlah penduduk yang bersekolah diluar usianya.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 20 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SD Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No.	Tahun	Penduduk	Siswa Usia 7-12 tahun	APM

		Usia 7-12 Tahun	SD	MI	Paket A Setara	Tidak Termasuk Paket A Setara		Termasuk Paket A Setara	
						Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2012/2013	554,255	490,436	63,236	267	553,672	99.89	553,954	99.95
2.	2013/2014	557,174	487,863	68,816	282	556,679	99.91	556,961	99.96
3.	2014/2015	559,704	485,418	143,474	270	558,848	99.85	559,13	99.90
4.	2015/2016	566,512	490,171	75,534	302	565,705	99.86	566,007	99.91
5.	2016/2017	574,512	495,036	77,274	282	572,31	99.62	572,592	99.67
6.	2017/2018	580.258	489.933	87.945	536	577.878	99,59	578.414	99,68
7.	2018/2019	590.459	496.842	88.347	2.965	585.189	99,11	588.154	99,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa belum semua penduduk usia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang SD/sederajat sesuai dengan usianya. Melihat trendnya sejak tahun 2015-2019, angka APM SD terus menurun, namun demikian angka APM tetap bertengger pada angka hampir 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program wajar 9 tahun yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, meskipun masih ada sebagian kecil penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/sederajat yang tidak sesuai dengan usianya.

Tabel 2. 21 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SMP Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa Usia 13-15 tahun				APM			
			SMP	MTs	SMP Terbuka	Paket B Setara	Tidak Termasuk Paket B Setara		Termasuk Paket B Setara	
							Jumlah	%	Jumlah	%
1.	2012/2013	271,78	160,857	90,091	4,265	2,986	255,213	93.90	258,199	95.00
2.	2013/2014	275,667	162,823	95,973	4,99	3,097	263,786	95.69	266,883	96.81
3.	2014/2015	270,049	162,388	93,24	3,896	3,032	259,524	96.10	262,556	97.23
4.	2015/2016	271,023	166,854	91,9	3,896	2,386	262,65	96.91	265,036	97.79
5.	2016/2017	271,934	167,522	93,04	3,12	3,398	263,682	96.97	267,08	98.22
6.	2017/2018	271.348	162.206	98.462	1.710	4.454	262.378	96,69	266.832	98,34
7.	2018/2019	274.998	62.407	98.842	1.855	8.033	263.104	95,67	271.137	98,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada level SMP/sederajat termasuk paket B setara lebih rendah dari pada total penduduk yang berusia 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia 13-15 tahun bersekolah tepat pada usianya di level pendidikan SMP/sederajat. Namun demikian APM SMP terus beranjak naik hampir mencapai angka 100%, hal ini berarti semakin sedikit penduduk yang bersekolah diluar usia yang seharusnya.

Tabel 2. 22 Angka Partispasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Siswa Usia 16-18 tahun						APM				Total APM (SM)
			SMA	MA	SMK	Paket C	SMA LB	Jumlah	SMA	MA	SMK	Paket C	
1.	2012/2013	259,702	85,462	50,383	46,599	5,944	70	188,458	32.91	19.40	17.94	2.29	72.57
2.	2013/2014	264,659	88,879	53,322	51,435	4,078	76	197,79	33.58	20.15	19.43	1.54	74.73
3.	2014/2015	265,971	88,945	52,52	56,636	3,979	113	202,194	33.44	19.75	21.29	1.50	76.02
4.	2015/2016	267,108	93,846	54,987	58,12	3,381	134	210,468	35.13	20.59	21.76	1.27	78.80
5.	2016/2017	267,146	96,647	60,212	62,24	3,381	174	222,654	36.18	22.54	23.30	1.27	83.35
6.	2017/2018	267.651	98.354	66.799	66.509	3.381	254	235.296	36,75	24,96	24,85	1,26	87,91
7.	2018/2019	267.595	97.551	64.887	69.130	4.719	310	236.597	36,45	24,25	25,83	1,76	88,42

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Jumlah penduduk usia 16-18 tahun dan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/sederajat setiap tahun menunjukkan trend yang terus meningkat. Namun jumlah penduduk yang bersekolah pada level SMA/sederajat masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun, hal ini memberikan gambaran masih ada penduduk usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMA atau tidak bersekolah sesuai usianya. Meskipun demikian, nilai APM SMA/sederajat terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan sehingga mau menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan sesuai usianya.

Dari ketiga jenjang pendidikan diatas, nilai APM cenderung mengalami kenaikan. APM SD/sederajat meskipun fluktuatif (menurun) namun angkanya tetap mendekati 100%. APM yang mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir 100% penduduk bersekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai (termasuk didalamnya pendidikan non formal dan paket A, B, dan C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2. 23 Angka Partispasi Sekolah (APS) Tahun 2016/2017 s.d 2018/2019 di Provinsi NTB

TAHUN	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th
2016	99.48	97.44	75.86	26.84
2017	99.42	97.60	76.24	27.79
2018	99.43	97.69	76.61	28.52
2019	100	98,73	94,43	29.48

Sumber BPS-RI Susenas 2005-2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, APS semakin rendah. APS jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat menunjukkan angka mendekati 100%. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dan universitas menunjukkan APS yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa APS untuk pendidikan dasar (SD dan SMP) tinggi karena dampak dari program wajib belajar 9 tahun dan didorong pula oleh program pemberian bantuan dana BOS yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB. Selain itu upaya pemerintah provinsi memperluas akses pendidikan dasar sampai ke daerah terpencil untuk menjangkau masyarakat disana sudah menampakkan hasilnya. APS jenjang SD telah mencapai 100% dan SMP mendekati 100% menunjukkan semakin terbukanya peluang bagi masyarakat dalam mengakses jenjang pendidikan tersebut. APS usia 16-18 (SMA) dan usia 19-24 (perguruan tinggi) masih tergolong rendah disebabkan masih terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di daerah terpencil, belum semua penduduk usia 16-18

tahun dapat ditampung di sekolah yang ada dan juga disebabkan keterbatasan dana untuk melanjutkan sekolah.

Perkembangan terhadap angka melanjutkan sekolah dan angka drop out di Provinsi NTB cenderung menurun yang merupakan alat untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah.

Tabel 2. 24 Angka Partispasi Sekolah (APS) Tahun 2016/2017 s.d 2018/2019 di Provinsi NTB

No	Tahun	Lulusan tahun sebelumnya			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs th. Berutnya					
		SD	MI	Jumlah	SMP	%	MTs	%	Jumlah	%
1.	2015/2016	87.163	13.621	100.784	62.287	61,80	39.381	39,07	101.668	100,88
2.	2016/2017	87.278	14.051	101.329	60.683	59,89	40.691	40,16	101.374	100,04
3.	2017/2018	82.945	15.329	98.274	57.417	58,43	41.107	41,83	98.524	100,25
4.	2018/2019	81.577	15.607	97.184	57.028	58,68	40.333	41,50	97.361	100,18

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 25 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB dari Tahun 2015/2016 s.d 2018/2019

No	Tahun	Lulusan tahun sebelumnya			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs th. Berutnya					
		SD	MI	Jumlah	SMP	%	MTs	%	Jumlah	%
1.	2015/2016	894	0,17	582	0,33	828	0,82	955	1,53	894
2.	2016/2017	782	0,15	463	0,25	688	0,67	864	1,37	782
3.	2017/2018	456	0,09	312	0,17	422	0,4	548	0,81	456
4.	2018/2019	475	0,09	273	0,15	393	0,37	465	0,65	475

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 26 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2016–2019

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah			
		2016	2017	2018	2019*
1.	Lombok Barat	5,93	6,15	6,36	6,37
2.	Lombok Tengah	5,60	5,95	6,16	6,27
3.	Lombok Timur	6,26	6,32	6,49	6,69
4.	Sumbawa	7,53	7,54	7,63	7,91
5.	Dompu	8,10	8,11	8,26	8,53
6.	Bima	7,45	7,58	7,72	7,77
7.	Sumbawa Barat	8,05	8,18	8,38	8,53
8.	Lombok Utara	5,47	5,54	5,73	5,84
9.	Kota Mataram	9,25	9,32	9,48	9,45
10.	Kota Bima	10,13	10,14	10,28	10,38
	NTB	**6,79**	**6,90**	**7,06**	**7,27**

*Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019, *) Angka Proyeksi Bappeda Provinsi NTB*

Rata-rata lama sekolah Provinsi NTB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah mencapai 6,79 tahun, meningkat 0,11 tahun di tahun 2017 sampai dengan 2018 mencapai 7,06 tahun sehingga mengalami peningkatan sebesar 0,16 tahun. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa target RPJMD Provinsi NTB telah terlampaui ditahun 2018 yaitu 6,95 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk NTB yang berusia 25 tahun keatas mampu menyelesaikan pendidikan kelas 1 SMP. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi NTB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sebagai akibat peningkatan dan membaiknya beberapa indikator pendidikan lainnya, yaitu:

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK.

Tabel 2. 27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK Tahun 2018/2019

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Peserta Didik Seluruhnya				APK	
			SD	MI	SDLB	Paket A Setara	Tidak Termasuk Paket A / Setara	Termasuk Paket A /Setara

							Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Lombok Barat	75.274	65.617	11.500	167	4063	77.284	102,67	81.347	108,07
2.	Lombok Tengah	112.429	90.553	31.178	209	1073	121.940	108,46	123.013	109,41
3.	Lombok Timur	144.325	123.959	28.284	301	4519	152.544	105,69	157.063	108,83
4.	Sumbawa	52.051	49.026	3.489	99	152	52.614	101,08	52.766	101,37
5.	Dompu	36.147	30.809	6.116	459	896	37.384	103,42	38.280	105,90
6.	Bima	61.584	51.902	8.813	442	885	61.157	99,31	62.042	100,74
7.	Sumbawa Barat	16.466	16.371	981	34	28	17.386	105,59	17.414	105,76
8.	Lombok Utara	26.738	24.279	3.232	52	121	27.563	103,09	27.684	103,54
9.	Kota Mataram	48.428	45.028	5.135	195	38	50.358	103,99	50.396	104,06
10.	Kota Bima	17.017	15.068	1.762	216	186	17.046	100,17	17.232	101,26
	Jumlah	590.459	512.612	100.490	2.174	11.961	615.276	104,20	627.237	106,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya

Tabel 2. 28 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019

No	Tahun	APK SD/MI (%)	APK SMP/MTS (%)	APK SMA/MA/SMK (%)
1.	2012/2013	113,62	104,85	82,69
2.	2013/2014	113,95	106,76	84,4
3.	2014/2015	112,29	108,67	85,13
4.	2015/2016	109,29	110,14	87,53
5.	2016/2017	107,83	109,99	92,22

6.	2017/2018	107,83	110,51	97,93
7.	2018/2019	106,23	109,17	98,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

APK SD/MI Provinsi NTB sebesar 106,23% berarti jumlah siswa SD/MTs di Provinsi NTB sama atau lebih dari jumlah Penduduk NTB Usia 7-12 tahun dan APK SMP/MTs sebesar 109,17% berarti jumlah siswa SMP/MTs di Provinsi NTB sama atau lebih dari jumlah Penduduk NTB Usia 13-15 tahun, hal ini merupakan indikasi keberhasilan program pembangunan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun yang diselenggarakan, sehingga anak-anak di Provinsi NTB Usia 7-12 tahun dan Usia 13-15 tahun telah semua mendapatkan akses untuk bersekolah di SD/MI maupun di SMP/MTs.

APK SMA/MA/SMK sebesar 98,55% hal ini menunjukkan bahwa masih ada 1,45% penduduk usia sekolah menengah secara umum yang belum terserap di Pendidikan Menengah baik itu di SMA, MA , SMK dan Paket C dibanding dengan jumlah penduduk provinsi NTB usia 16-18 tahun.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terus meningkat.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan.

Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2. 29 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2018 / 2019

No	Kabupaten/Kota	APM SD/MI (%)	APM SMP/MTs (%)	APM SMA/MA/SMK (%)
1.	Lombok Barat	99,63	98,98	82,88
2.	Lombok Tengah	99,82	99,30	86,99
3.	Lombok Timur	99,56	98,28	90,1

No	Kabupaten/Kota	APM SD/MI (%)	APM SMP/MTs (%)	APM SMA/MA/SMK (%)
4.	Sumbawa	99,64	98,72	87,73
5.	Dompu	99,49	98,87	89,02
6.	Bima	99,14	97,49	86,99
7.	Sumbawa Barat	99,56	98,17	88,39
8.	Lombok Utara	99,87	98,37	81,15
9.	Kota Mataram	99,86	98,66	99,09
10.	Kota Bima	99,39	98,72	92,14
NTB		99,61	98,60	88,42

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Trend perkembangan Angka Partisipasi Murni tahun 2012/2013 sampai dengan tahun 2018/2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 30 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019

No	Tahun	APM SD/MI (%)	APM SMP/MTS (%)	APM SMA/MA/SMK (%)
1.	2012/2013	99,95	95	72,57
2.	2013/2014	99,96	96,81	74,73
3.	2014/2015	99,9	97,23	76,02
4.	2015/2016	99,91	97,79	78,8
5.	2016/2017	99,67	98,22	83,35
6.	2017/2018	99,68	98,34	87,91
7.	2018/2019	99,61	98,6	88,42

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Pada tahun 2018/2019 APM SD/MI sebesar 99,61% dan APM SMP/MTs sebesar 98,60% berarti bahwa jumlah anak usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun di Provinsi NTB dapat bersekolah sesuai usianya di jenjang SD/MI maupun SMP/MTs sudah cukup tinggi. Sedangkan APM SMA/MA/SMK sebesar 88,42% berarti masih ada 11,58% penduduk Provinsi NTB usia 16-18 tahun yang belum terserap di pendidikan menengah baik itu di SMA, MA dan SMK serta Paket C.

Nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

3) Angka Melanjutkan sekolah yang terus meningkat,

Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs tahun 2017/2018 sebesar 100,25% atau 98.524 siswa dari jumlah lulusan SD/MI sebesar 98.274 siswa, angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK tahun 2017/2018 sebesar 99,21% atau 85.381 siswa dari jumlah lulusan SMP/MTs sebesar 86.065 siswa, hal ini menunjukkan bahwa ada 0,79% atau 684 penduduk Provinsi NTB lulusan SMP/MTs yang belum melanjutkan ke sekolah menengah.

Tabel 2. 31 Perkembangan Lulusan dan Melanjutkan Ke Jenjang yang Lebih Tinggi Tahun Pelajaran 2012/2013 - 2018/2019

JENJANG	TAHUN AJARAN	LULUSAN	MELANJUTKAN (CR) (%)
SD/MI			Ke SMP/MTs
	2012/2013	93.572	100,75
	2013/2014	94.520	102,48
	2014/2015	95.469	101,09
	2015/2016	100.784	100,88
	2016/2017	101.329	100,04

	2017/2018	98.274	100,25
	2018/2019	97.184	100,18
SMP/MTs			Ke SMA/MA/SMK
	2012/2013	78.457	97,16
	2013/2014	76.622	98,97
	2014/2015	79.366	98,99
	2015/2016	88.016	99,03
	2016/2017	89.049	99,07
	2017/2018	86.065	99,21
	2018/2019	84,077	99,32

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

4) Angka Putus Sekolah (DO)

Angka Putus Sekolah (DO) mengalami penurunan di setiap jenjang pendidikan, hal ini ditunjukkan oleh data Angka Putus Sekolah tahun 2012/2013 s.d tahun 2018/2019 sebagai berikut.

Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2018/2019

No	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, SMA dan SMK							
		SD	%	SMP	%	SMA	%	SMK	%
1.	2012/2013	1.116	0,20	843	0,48	1259	1,32	915	1,84
2.	2013/2014	1.047	0,19	822	0,47	1128	1,15	857	1,66
3.	2014/2015	969	0,18	801	0,45	990	1,02	907	1,56
4.	2015/2016	894	0,17	582	0,33	828	0,82	955	1,53

5.	2016/2017	782	0,15	463	0,25	688	0,67	864	1,37
6.	2017/2018	456	0,09	312	0,17	422	0,40	548	0,81
7.	2018/2019	475	0,09	273	0,15	393	0,37	465	0,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 33 Sebaran Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2018/2019

No.	Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, SMA dan SMK							
		SD	%	SMP	%	SMA	%	SMK	%
1.	Lombok Barat	108	0,17	37	0,20	38	0,40	80	0,75
2.	Lombok Tengah	88	0,10	28	0,11	52	0,36	49	0,43
3.	Lombok Timur	92	0,07	57	0,14	67	0,34	136	0,88
4.	Sumbawa	48	0,10	36	0,19	45	0,47	50	0,78
5.	Dompu	19	0,06	21	0,16	48	0,54	37	0,79
6.	Bima	48	0,09	40	0,16	63	0,34	17	0,40
7.	Sumbawa Barat	18	0,11	3	0,06	15	0,50	9	0,52
8.	Lombok Utara	34	0,14	15	0,20	22	0,57	27	0,88
9.	Kota Mataram	4	0,01	18	0,09	29	0,24	28	0,27
10.	Kota Bima	16	0,10	18	0,29	14	0,26	32	0,82
	Jumlah	475	0,09	273	0,15	393	0,37	465	0,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Perkembangan angka drop out terus mengalami penurunan pada semua jenjang pendidikan yang akan mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Beberapa strategi intervensi/inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB antara lain:

1) Meningkatkan pelaksanaan pendidikan keluarga bekerjasama dengan kabupaten/ kota dan Direktorat Jenderal PAUD dan Penmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta orang tua/wali murid/masyarakat tentang pentignya pendidikan;

2) Layanan pendidikan benar-benar sanggup menjangkau seluruh anak usia sekolah, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan terisolir sekalipun dengan program SD-SMP Satu Atap, Program PAKET A, B dan C;
3) Memfasilitasi anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi untuk tetap bersekolah dengan memberikan layanan khusus melalui pendidikan inklusi dan pemberian beasiswa sehingga mereka tetap dapat melanjutkan sekolah;
4) Memastikan bahwa anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah agar tetap berada di sekolah dengan memberikan fasilitas Bantuan Beasiswa Miskin di luar Kartu Indonesia Pintar (KIP);
5) Meningkatkan jumlah SMA terbuka secara bertahap pada semua kabupaten/kota yang pada saat ini baru ada di Kabupaten Lombok Barat dengan sekolah induk SMA Negeri 1 Narmada;
6) Meningkatkan APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C dengan terus menfasilitasi berbagai bantuan misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa Pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi Laboratorium, Perpustakaan sekolah untuk memenuhi target Setiap Kecamatan di Provinsi NTB telah memiliki minimal 1 SMA dan 1 SMK, Biaya Operasional Sekolah (BOS), meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan menengah;
7) Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 4 Tahun 2015 yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

Jumlah siswa yang mendapat bantuan dari APBN untuk program PIP tahun 2019 di provinsi NTB sebanyak 91.426 siswa dan penerima Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 155.035 siswa, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 34 Pemberian PIP, dan BOS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Satuan	Jumlah
A.	Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP)	Siswa	91.426
	a. PIP SMA	Siswa	41.151
	b. PIP SMK	Siswa	50.275
B.	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		155.035

No	Program/Kegiatan	Satuan	Jumlah
	BOS SMA	Siswa	99.735
	b. BOS SMK	Siswa	52.080
	d. BOS SLB	Siswa	3.220

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan sebagaimana yang telah diuraikan, dalam pelaksanaannya masih dihadapi beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi dan solusinya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 35 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih kurangnya Ruang Kelas Belajar pada sekolah-sekolah negeri	Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pembangunan Ruang Kelas Baru
Ruang praktek siswa SMA dan SMK masih kurang jumlahnya	Membangun Ruang Praktek bagi SMA dan SMK
Belum terdatanya secara rinci kebutuhan guru di masing-masing sekolah negeri	Melakukan pendataan dan pemetaan secara komprehensif
MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) belum berfungsi maksimal	Memberdayakan seluruh MGMP untuk meningkatkan kompetensi masing-masing anggotanya dengan mengalokasikan anggaran yang memadai
Rekrutmen Kepala Sekolah masih belum melalui proses sesuai standar	Diadakan seleksi dan diklat sesuai peraturan yang berlaku untuk mendapat kepala sekolah
Program keahlian pada SMK belum tertata sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah	Penataan kembali program keahlian dan kelembagaan SMK
Belum maksimalnya bahan ajar yang berbasis Website	Membangun website yang memungkinkan guru/MGMP/KKG mengupload bahan ajar yang diproduksinya untuk selanjutnya dinilai

PERMASALAHAN	SOLUSI
	kelayakannya oleh Tim verifikasi media pembelajaran
Rendahnya serapan kerja untuk lulusan SMK	Melakukan revitalisasi SMK untuk meningkatkan mutu lulusan sehingga dapat terserap ke dunia kerja
Perencanaan pendidikan yang belum terarah dengan program dan kegiatan yang masih mengacu pada program dan kegiatan tahun sebelumnya	Melakukan inovasi dan terobosan terobosan guna mendukung dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan dengan melakukan pendalaman tujuan yang ingin dicapai

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 pada bidang kesehatan terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu:

1) Angka Harapan Hidup (AHH)
2) Persentase Balita Stunting
3) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
4) Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Capaian keempat indikator tersebut tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam RPJMD NTB Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja		2019	
			2017	2018	Target	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,55	65,87	66,07	66,28
2	Persentase Balita *Stunting*	%	37,20	33,49	32,49	25,50*)
3	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	66,74	70,35	73,00	86,47
4	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	69,25	69,53	72,62	75,02

Sumber: BPS NTB, 2020; Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019
*Keterangan: *) Data survei masih pada angka 67%*

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup pada tahun 2017 telah mencapai 65,55 tahun, dan pada tahun 2018 menjadi 65,87 tahun, kemudian pada tahun 2019 meningkat menjadi 66,28 tahun, telah melampau target 66,07 tahun. Peningkatan UHH pada tiga tahun terakhir menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah cukup efektif. Peningkatan UHH tahun 2019 ini sejalan dengan menurunnya jumlah kasus kematian bayi, jumlah kasus kematian ibu.

Peningkatan pencapaian UHH, meskipun belum signifikan namun peningkatannya tetap dipengaruhi oleh berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten/kota dan desa serta NGO, swasta dan masyarakat seperti program Generasi Emas NTB, program ASHAR, dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin/kurang mampu, dan lain-lain. Berbagai program diatas diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, prevalensi kurang gizi yang semuanya berpengaruh pada pencapaian UHH. Gambaran penurunan kasus kematian bayi dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 3 Jumlah Kasus Kematian Bayi di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

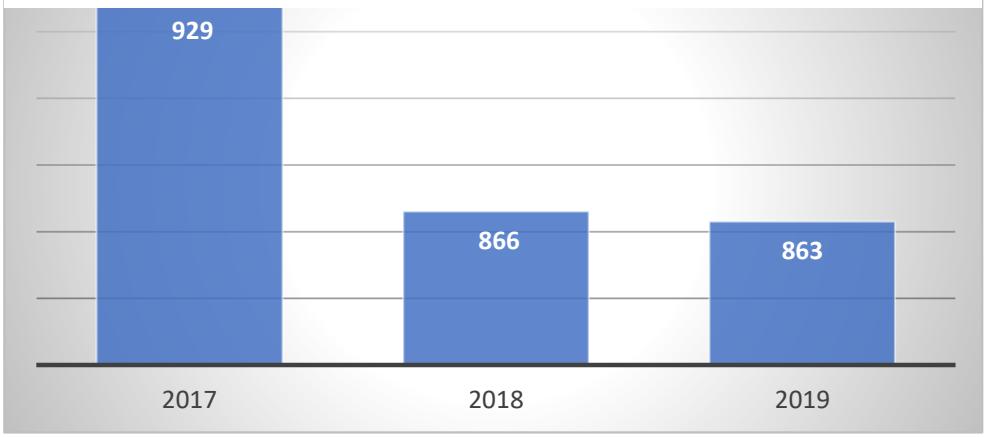

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Kasus kematian bayi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut menurun menjadi 866 kasus pada tahun 2018 dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 8,36 per 1.000 kelahiran hidup, naik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jumlah kasus kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2017-2019 per kabupaten/kota se-NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 37 Jumlah Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019

NO	Kabupaten/ Kota	2017			2018			2019		
		Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Proporsi *)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Proporsi *)	Jumlah Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Proporsi *)
1.	Mataram	44	8.231	5,34	58	7.748	7,48	36	7.761	4,64
2.	Lombok Barat	31	13.772	2,25	28	13.723	2,04	46	13.708	3,94
3.	Lombok Utara	86	4.567	18,83	87	4.517	19,26	76	4.670	16,27
4.	Lombok Tengah	242	19.641	12,32	230	19.500	11,80	204	19.577	10,42
5.	Lombok Timur	346	26.145	13,23	226	27.211	8,31	288	27.047	10,64
6.	Sumbawa Barat	17	2.857	5,95	17	3.119	5,45	13	2.821	6,38
7.	Sumbawa	30	8.853	3,38	74	8.857	8,35	59	8.701	6,78

8.	Dompu	40	5.700	7,01	43	10.950	3,93	21	5.570	3,77
9.	Bima	74	10.207	7,24	79	10.496	7,53	79	10.149	7,78
10.	Kota Bima	19	3.177	5,98	24	3.279	7,32	28	3.270	8,56
	NTB	**929**	**103.170**	**9,00**	**866**	**109.400**	**7,91**	**850**	**103.274**	**8,36**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019, *) Proporsi : per 1000 Kelahiran Hidup*

Kasus kematian bayi tahun 2018 terbanyak terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 230 kasus, dan tahun 2019 Kabupaten Lombok Timur kembali mencatatkan kasus terbanyak mencapai 288 kasus. Sementara untuk proporsi kematian bayi per 100 kelahiran hidup, Kabupaten Lombok Utara masih menempati tempat tertinggi pada tahun 2018 sebesar 19,26 per 1.000 kelahiran hidup, berhasil diturunkan menjadi 16,27 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Kasus kematian bayi terendah tahun 2018 terjadi di Kota Bima dengan 24, dan pada tahun 2019 terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 18 kasus. Proporsi terendah tahun 2018 terjadi di Kabupaten Lombok Barat sebesar 2,04 per 1.000 kelahiran hidup dengan kasus kematian bayi sebanyak 28 kasus, kemudian pada tahun 2019 proporsi terendah terjadi di Kabupaten Dompu sebesar 3,77 per 1.000 kelahiran hidup dengan 21 kasus kematian bayi.

Indikator berikutnya yang turut mempengaruhi capaian UHH adalah Kasus Kematian Ibu. Selama periode tiga tahun terakhir jumlah kasus kematian ibu melahirkan mengalami kecenderungan meningkat, dengan capaian berturut dari tahun 2017-2019 adalah 85 kasus, 99 kasus, dan 97 kasus. Sama dengan jumlah kasus, kecenderungan meningkat juga terjadi pada angka proporsi kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yakni berturut-turut selama 2017-2019 adalah 82,40, 90,49, dan 93,92. Kasus kematian ibu dan proporsinya pada tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 2. 4 Jumlah Kasus dan Proporsi Kematian Ibu di NTB Tahun

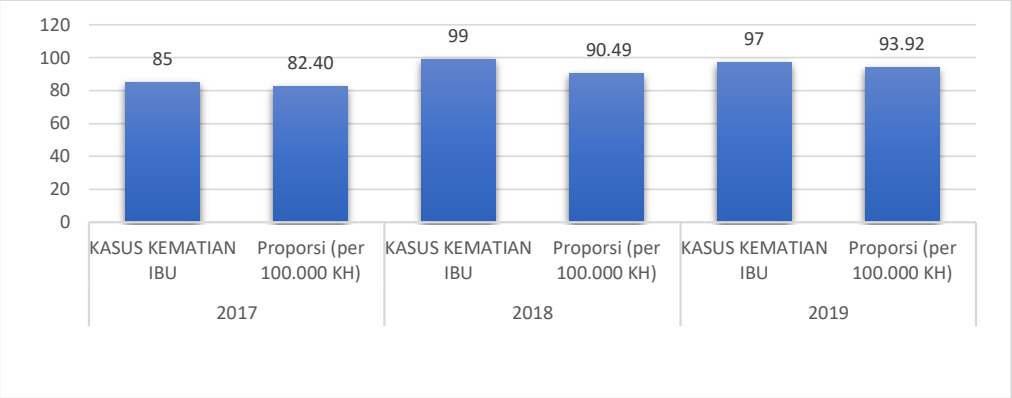

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Kasus kematian ibu melahirkan terbanyak pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 34 kasus dengan proporsi 124,95 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu melahirkan terbanyak di Kabupaten Lombok Tengah dengan 30 kasus dan proporsi 153,24 per 100.000 kelahiran hidup. Kasus kematian ibu terendah pada tahun 2018 terjadi di Kabupaten Dompu dengan 0 kasus, pada tahun 2019 yang terendah adalah Kabupaten Sumbawa Barat dengan 2 kasus dengan proporsi 70,89 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota tahun 2017-2019 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 38 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019

NO	KABUPATEN/ KOTA	2017			2018			2019		
		KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)
1	Mataram	6	8.251	72,72	9	7.748	116,15	6	7.761	77,31
2	Lombok Barat	5	13.772	36,31	5	13.723	36,44	6	13.708	43,77
3	Lombok Utara	3	4.567	65,69	2	4.517	44,28	4	4.670	85,65
4	Lombok Tengah	24	19.641	91,80	24	19.500	123,08	30	19.577	153,24
5	Lombok Timur	22	26.145	84,15	34	27.211	124,95	29	27.047	107,22
6	Sumbawa Barat	3	2.837	105.75	1	3.119	32,06	2	2.821	70,89
7	Sumbawa	4	8.853	45,19	12	8.857	135,48	5	8.701	57,46
8	Dompu	4	5.700	70,18	0	10.950	0	4	5.570	71,81

NO	KABUPATEN/ KOTA	2017			2018			2019		
		KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	PROPORSI *)
9	Bima	8	10.207	78,38	8	10.496	76,22	5	10.149	49,26
10	Kota Bima	6	3.177	188,86	4	3.279	121,99	6	3.270	183,48
NTB		**85**	**103.170**	**82,38**	**99**	**109.400**	**90,49**	**97**	**103.274**	**93,92**

*Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019; Proporsi *) : per 100.000 Kelahiran Hidup*

Ikhtiar yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan dalam rangka menurunkan jumlah kasus kematian ibu dan bayi adalah melalui berbagai program dan kegiatan yang diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.

Gambar 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Ibu dan Anak di Provinsi NTB Tahun 2019

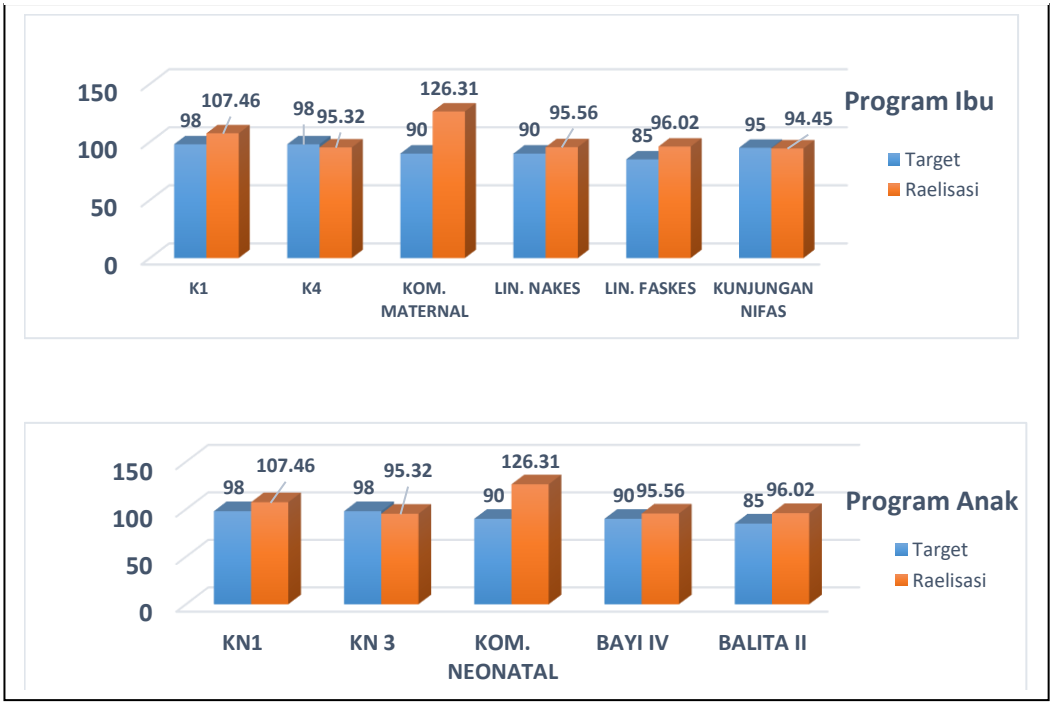

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Grafik diatas menunjukkan bahwa sebagian besar indikator sudah mencapai target yang ditentukan, untuk program ibu, yang belum tercapai

adalah kunjungan keempat ibu hamil (K4), kunjungan nifas, sementara untuk program anak yang belum mencapai target hanya indikator kunjungan neonatal ketiga (K3). Belum tercapainya target indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa monitoring terhadap ibu hamil masih harus terus ditingkatkan, disamping itu peningkatan kompetensi petugas kesehatan juga harus terus dilakukan.

2. Balita Stunting

Pencapaian indikator Kinerja "Persentase Balita Stunting" pada tahun 2019 telah mencapai 25,5%. Data ini diperoleh dari hasil pelaporan melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), namun hingga 31 Desember 2019, cakupan pendataan/pengukuran baru mencapai 67%. Sehingga angka 25,5% belum dapat menggambarkan secara menyeluruh keadaan stunting di NTB. Pendataan/pengukuran dilakukan secara terus menerus sampai dengan seluruh Balita sasaran terdata. Indikator yang mempengaruhi dalam rangka menurunkan angka balita stunting adalah prevalensi kurang gizi dan Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S). Untuk indikator prevalensi kurang gizi dapat dilihat perkembangannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada grafik berikut.

Gambar 2. 6 Prevalensi Kurang Gizi NTB Tahun 2017-2019

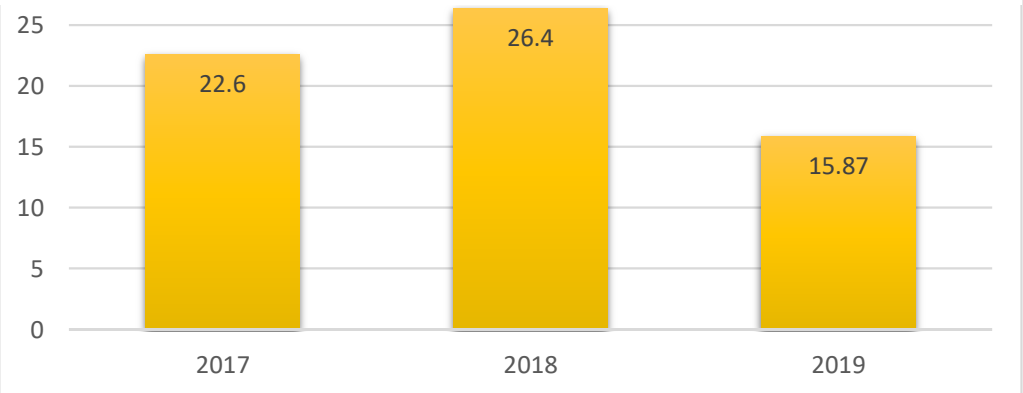

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Prevalensi Kurang Gizi pada periode 2017-2019 di Provinsi NTB menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 26,40% menjadi 15,87%. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Daerah dalam menangani gizi buruk dan gizi kurang. Beberapa faktor penyebab keberhasilan penurunan prevalensi gizi kurang adalah Asupan gizi yang terus membaik, terus meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu, Hygiene sanitasi lingkungan dan

perorangan serta akses air bersih yang terus membaik, dan faktor-faktor lainnya.

Gambar 2. 7 Prevalensi Berat Kurang (Underweight) Menurut Indeks Berat Badan dan Umur Tahun 2017 – 2019

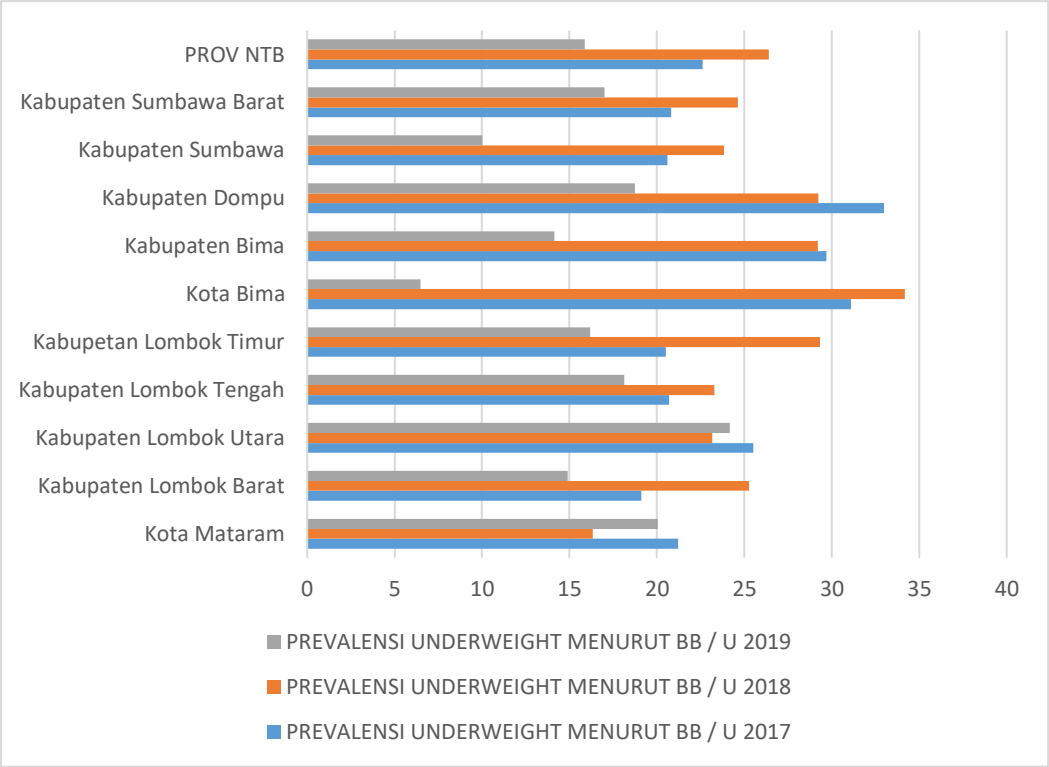

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Prevalensi berat badan kurang menurut indeks berat badan dan umur hampir pada periode 2017-2018 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. Tetapi jika perbandingan hanya pada 2018, maka Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara menunjukan peningkatan. Meskipun begitu, angka prevalensi berat badan kurang secra umum masih tinggi. Pengetahuan masyarakat akan peran gizi bagi penciptaan sumberdaya manusia yang berkualitas sangat perlu lebih ditingkatkan. Masalah gizi tidak saja timbul karena ketidakmampuan untuk membeli bahan pangan berkualitas namun juga dipengaruhi oleh pola asuh anak, yang mana karena kesibukan orangtua mencari nafkah sehingga pengasuhan anak termasuk di dalamnya pengaturan pola makan anak diserahkan kepada asisten rumah tangga atau nenek/kakeknya.

Penanganan balita stunting juga dilakukan dengan optimalisasi peran posyandu sebagai wadah pemantau masalah gizi pada masyarakat.

Oleh karena itu masyarakat (ibu hamil/menyusui, bayi dan balita) harus didorong untuk rajin memeriksakan status gizinya di posyandu sehingga jika terjadi gangguan terkait kecukupan gizi dapat segera diketahui dan ditangani. Pemanfaatan Posyandu oleh masyarakat dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Indikator yang dipergunakan adalah jumlah balita yang datang dibandingkan dengan jumlah balita yang ada atau D/S. selama periode 2017-2019 terlihat bahwa pencapaian cakupan D/S terus menunjukkan kecenderungan meningkat/membaik. Cakupan D/S tertinggi dicapai oleh Kabupaten Lombok Barat dengan cakupan sebesar 95,80%, dan terendah di Kota Bima sebesar 72,12%. selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39 Tingkat partisipasi masyarakat di posyandu (Cakupan D/S) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO	KAB./KOTA	TAHUN		
		2017	2018	2019
1.	Lombok Barat	97,65	95,63	95,80
2.	Lombok Tengah	87,46	80,26	80,55
3.	Lombok Timur	78,63	79,34	88,55
4.	Sumbawa	79,33	83,35	82,67
5.	Dompu	97,65	79,19	81,92
6.	Bima	77,29	80,2	81,33
7.	Sumbawa Barat	79,33	83,28	84,30
8.	Lombok Utara	88,2	79,44	86,91
9.	Mataram	91,13	83,86	83,19
10.	Kota Bima	70,77	72,12	76,08
	NTB	**75,6**	**82,37**	**85,15**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2018

Cakupan D/S merupakan angka yang menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat di posyandu, dengan menghitung tingkat kedatangan pada posyandu. Cakupan D/S tahun 2019 di Provinsi NTB telah mencapai 85,15% naik dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 82,37%. Selama pencapaian cakupan D/S belum mencapai 100%, maka kasus gizi buruk maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk masih mungkin terjadi

karena masih ada balita yang tidak terpantau pertumbuhannya secara dini oleh kader maupun petugas kesehatan di lapangan. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB untuk menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain melalui:

a. Pembinaan Keluarga Sehat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi;
b. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di 100 Desa GEN di kabupaten/kota se NTB oleh mahasiswa dalam rangka ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan);
c. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan desa dan kader posyandu;
d. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD Dukcapil, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dll), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK, dan ibu menyusui.
e. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil.

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Indikator Kinerja Daerah “Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional” telah mencapai 86,47% pada tahun 2019, melampui target RPJMD NTB 2019-2023 sebesar 73%. Pencapaian ini juga naik secara signifikan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar 70,35%. Kuota peserta JKN NTB yang terdaftar dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) tahun 2019 sebanyak 500.316 jiwa, naik 107.217 jiwa dibandingkan tahun 2018 sebanyak 393.099 jiwa.

Tabel 2. 40 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1.	Kota Mataram	156.563	7.508	15.950	180.021
2.	Kabupaten Lombok Barat	406.036	5.684	14.081	425.801
3.	Kabupaten Lombok Utara	137.058	46.778	9.903	193.739
4.	Kabupaten Lombok Tengah	552.612	16.530	48.128	617.270
5.	Kabupetan Lombok Timur	852.315	10.794	53.223	916.332
6.	Kota Bima	58.779	21.908	15.626	96.313
7.	Kabupaten Bima	307.713	6.216	32.096	346.025
8.	Kabupaten Dompu	131.827	1.739	49.697	183.263
9.	Kabupaten Sumbawa	217.007	3.652	82.939	303.598
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	52.732	998	56.866	110.596
	TOTAL PROV NTB	**2.872.642**	**121.807**	**378.509**	**3.372.958**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Provinsi NTB baik PBI, Non PBI maupun Non JKN sampai 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel 2. 41 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (DATA BPS)	NON PBI	PBI
1.	Kota Mataram	486.715	194.014	180.021
2.	Kabupaten Lombok Barat	694.985	135.916	425.801
3.	Kabupaten Lombok Utara	220.412	27.177	193.739
4.	Kabupaten Lombok Tengah	947.488	148.146	617.270
5.	Kabupetan Lombok Timur	1.200.612	175.286	916.332
6.	Kota Bima	173.031	53.824	96.313
7.	Kabupaten Bima	488.577	87.320	346.025
8.	Kabupaten Dompu	252.288	49.639	183.263
9.	Kabupaten Sumbawa	457.671	103.916	303.598

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK (DATA BPS)	NON PBI	PBI
10.	Kabupaten Sumbawa Barat	148.606	36.170	110.596
	PROVINSI NTB	**5.070.385**	**1.011.408**	**3.372.958**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020; Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk NTB yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebanyak 4.384.366 jiwa atau 86,47% dari jumlah penduduk NTB (Non PBI + PBI). Besar dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp. 29.129.324.000 untuk masyarakat miskin diluar JKN Pusat.

Tabel 2. 42 Dana Sharing Jamkesmas Provinsi Tahun 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
1.	Provinsi	40.554.568.000	29.129.324.000	71,83	
2.	Kota Mataram	519.432.000	519.432.000	100,00	
3.	Lombok Barat	-	-	-	Tidak Ada Kerjasama Tahun 2019
4.	Lombok Tengah	1.532.106.000	1.522.968.000	99,40	
5.	Lombok Timur	-	-	-	Tidak Ada Kerjasama Tahun 2019
6.	Lombok Utara	-	-	-	Sharingnya hanya pada tahun 2016
7.	Sumbawa Barat	-	-	-	Tidak Ada Kerjasama Tahun 2019
8.	Sumbawa	524.814.000	524.814.000	100,00	
9.	Dompu	279.312.000	279312000	100,00	Tidak Ada Kerjasama
10.	Bima	555.726.000	555.726.000	100,00	
11.	Kota Bima	3.312.000.000	895.700.500	27,04	

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
JUMLAH		47.277.958.000	33.427.276.500	70,70	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Realisasi dana sharing provinsi dan kabupaten/kota yang sudah ditransfer ke BKSPJK adalah Rp.33.427.276.500,- dari target sebesar Rp.47.277.958.000,-. Kabupaten Sumbawa Barat tidak memberikan dana sharing pada tahun 2019 karena kabupaten tersebut telah mampu memenuhi secara mandiri kebutuhan jamkesmas daerah sepenuhnya melalui APBD kabupaten. Sedangkan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, karena keterbatasan anggaran yang banyak dialokasikan untuk penanganan akibat dampak gempa sehingga tidak mengalokasikan untuk sharing. Total iuran peserta PBI NTB yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp.33.427.276.500,- dengan jumlah kepesertaan 500.316 jiwa.

4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah "Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak" pada tahun 2019 mencapai 75,02% melampaui target yang sudah ditetapkan sebesar 72,62%. Dalam rangka pencapaian Indikator ini, Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada tahun 2019 mengintervensi melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan jamban keluarga. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan terus meningkat, ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2. 8 Cakupan Jamban Keluarga NTB Tahun 2017 – 2019

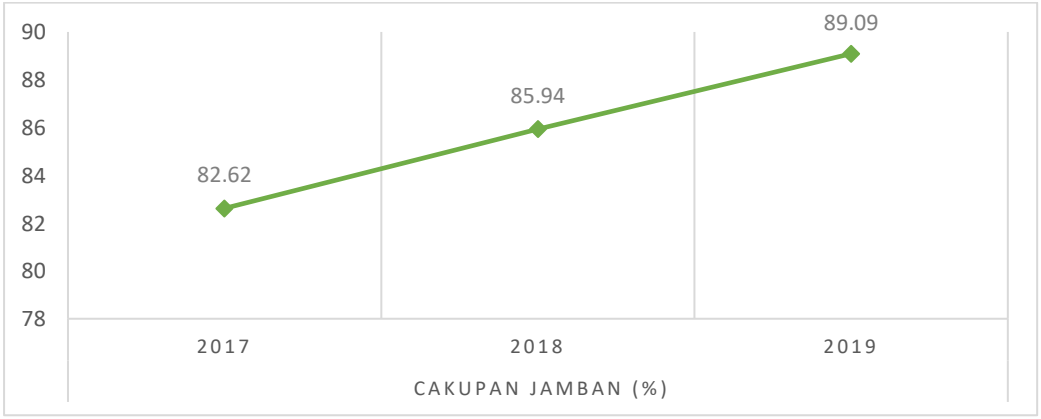

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui metode pemicuan yang dilakukan oleh Tim Pemicu Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara kontinyu sehingga akses jamban meningkat 3,47% yaitu 58.606 KK dalam waktu 1 tahun. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan satu-satunya Kabupaten yang telah berhasil meraih angka cakupan 100%, dan kabupaten Sumbawa sebagai kabupaten dengan pencapaian terendah pada tahun 2019 dengan cakupan sebesar 84,02%. Pencapaian cakupan jamban keluarga tahun 2018 dan 2019 secara detail per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 43 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2018-2019

NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN JAMBAN (%)	
		2018	2019
1.	Kota Mataram	99,49	99,54
2.	Kab. Lombok Barat	92,45	93,92
3.	Kab. Lombok Tengah	82,26	84,19
4.	Kab. Lombok Timur	82,72	85,02
5.	Kab. Lombok Utara	82,10	88,27
6.	Kab. Sumbawa Barat	100,00	100,00
7.	Kab. Sumbawa	82,32	84,02
8.	Kab. Dompu	85,47	84,56
9.	Kab. Bima	87,52	93,34
10.	Kota Bima	90,19	91,74
	NTB	**85,94**	**89,09**

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten di NTB yang telah bebas buang air besar sembarangan dan mendapatkan reward sebagai kabupaten bebas BASNO. Ketersediaan sanitasi adalah salah satu syarat utama untuk mencapai predikat sebagai kabupaten bebas buang air besar sembarangan. Kabupaten Sumbawa memiliki cakupan jamban terendah tahun 2019, Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2018 berada pada posisi terendah dengan capaian 82,10%, berhasil memperbaikinya dengan cakupan

88,27% pada tahun 2019. Angka ini menunjukkan keberhasilan Rehabilitasi dan rekonsiliasi pasca gempa bumi yang dilakukan bersama Pemerintah Provinsi.

Pemicuan Program BASNO di 10 kabupaten/kota pada tahun sejak tahun 2015 telah dilaksanakan pada 1.131 desa (2015-2019), total desa BASNO sampai dengan tahun 2019 sebanyak 626 desa. Faktor yang mempengaruhi capaian cakupan jamban keluarga antara lain:

a. Akses air bersih yang terjangkau, semakin mudah mengakses air bersih berpengaruh pada kesadaran masyarakat membangun jamban menjadi semakin tinggi;
b. Lingkungan pemukiman yang padat, semakin padat lingkungan pemukiman lahan untuk membangun jamban menjadi semakin kecil sehingga diperlukan pembangunan MCK komunal/septic tank komunal;
c. Kemampuan ekonomi, untuk masyarakat miskin pemerintah memberikan bantuan pembangunan jamban melalui pola bantuan permodalan koperasi;
d. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya aliran sungai, pesisir pantai, kebun dan lain-lain.

Upaya-Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan cakupan jamban keluarga, yaitu :

a. Melaksanakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2015;
b. Melakukan pemicuan yang dilakukan oleh petugas sanitarian puskesmas dengan didukung oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota/provinsi dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, Da'i kesehatan, dan masyarakat yang tidak memiliki jamban yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
c. Memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten yang telah mencapai BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 tahun 2013 tentang GERAKAN BASNO;
d. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan DPMPD Dukcapil, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, BAPPEDA, dan Baznas khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan MCK Komunal;
e. Melibatkan DA' I Kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan;
f. Penyusunan awig-awig atau peraturan desa bagi desa yang telah mendeklarasikan Desa BASNO sehingga PHBS tetap terjaga;

g. Pemberdayaan Masyarakat melalui pemicuan pada lokasi program PAMSIMAS, dan MCAI;
h. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK;
i. Pembinaan Wira Usaha Sanitasi untuk mendukung sarana sanitasi/jamban yang lebih murah;
j. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dukungan dari UNICEF. konfirmasi

Adapun capaian pelayanan yang dilaksanakan pada unit-unit pelaksana teknis daerah di Dinas Kesehatan Provinsi NTB tahun 2019 antara lain:

b. Rumah Sakit Mata NTB

Capaian indikator kinerja bidang kesehatan pada Rumah Sakit Mata NTB tahun 2018, sebagaimana tabel berikut

Tabel 2. 44 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Rumah Sakit Mata NTB Tahun 2018

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Capaian per tahun		
			2017	2018	2019
1.	Sterilisasi kultur peralatan medis dan ruangan	Kali	2	2	2
2.	Cakupan *screening* penyakit mata	Orang	2.000	2.500	1.500
3.	Cakupan operasi katarak	Orang	2.500	1.009	1.251
4.	Cakupan kunjungan	Orang	40.000	28.246	24.826
5.	Cakupan Operasi pterygium dan operasi lainya	Orang	400	266	420

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Capaian kinerja Rumah Sakit Mata NTB pada tahun 2019 untuk indikator cakupan screening penyakit mata dan cakupan kunjungan, mengalami penurunan. Sementara indikator cakupan operasi katarak, serta cakupan operasi pterygium dan operasi lainya meningkat pada tahun 2019.

c. Balai Laboratorium Kesehatan Kalibrasi dan Penunjang Medis (BLKKPM)

Kunjungan pasien ke BLKKPM pada tahun 2018 adalah sebanyak 2.983 orang, lebih rendah dibanding tahun 2017 sebanyak 3.757 orang. Menurunnya jumlah kunjungan tersebut disebabkan terhambatnya pelayanan akibat

kerusakan bangunan dan peralatan karena bencana gempa bumi. Untuk Pemeriksaan Medis, Pelayanan radiologi, dan Pelayanan Kalibrasi Alat jumlah yang dapat dilayani oleh BLKKPM terus mengalami peningkatan. Capaian indikator kinerja program pada BLKKPM Tahun 2017-2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Indikator Program BLKKPM Tahun 2017-2018

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN PER TAHUN			
			2017	2018	2019	
			REALISASI	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Kunjungan pasien	Orang	3.757	2.983	3.292	4101
2.	Pemeriksaan Medis	Orang	1.838	1.458	1.604	3.420
3.	Pelayanan radiologi	Orang	90	80	88	216
4.	Pelayanan Kalibrasi Alat	Unit	-	592	851	1.752

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh BLKKPM pada periode Tahun 2017-2019, dapat disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKKPM Tahun 2017-2018

No	Bidang Pemeriksaan	Satuan	Capaian per tahun			
			2017	2018	2019	
					Target	Realisasi
1.	*Hematologi*	Parameter	2.431	1.295	1.425	2.829
2.	*Kimia Klinik*	Parameter	10.821	8.266	9.093	12.215
3.	*Mikrobiologi*	Parameter	6.485	6.078	6.686	5.576
4.	*Imunoserologi*	Parameter	6.354	378	416	3.513

5.	*Toksikologi*	Parameter	481	660	792	1.245
6.	Kimia Kesehatan	Parameter	10.313	7.863	8.649	12.293
7.	Pengabdian Masyarakat	Parameter				771
8.	Pemeriksaan Mobil Keliling	Parameter				
9.	Media Reageb			31.706	34.877	547.190
10.	Sampling			2.492	2.741	3.341
Jumlah			36.885	58.738	64.679	588.973

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

d. Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES)

Pelaksanaan Pelatihan oleh BAPELKES bekerjasama dengan Badan Pusat Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK), Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, BBPK Ciloto, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB dengan menyiapkan Fasilitator, Narasumber dan Master of Trainer. Sedangkan OPD/lembaga donor/LSM yang menggunakan tempat/ruang pertemuan di BAPELKES antara lain RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah kegiatan pelatihan dan non pelatihan di BAPELKES, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 47 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di BAPELKES Tahun 2017-2019

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					
		PEMERINTAH			NON PEMERINTAH		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Pelatihan	38	4	37	1	2	4
2.	Pertemuan (Non Pelatihan)	2	2	0	0	0	0
JUMLAH		40	6	37	1	2	4

Sumber: Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2019

Kegiatan pelatihan pada tahun 2019 lebih banyak dilakukan di lingkungan BAPELKES Provinsi NTB, namun untuk praktek lapangan BAPELKES Provinsi NTB bekerjasama dengan puskesmas–puskesmas yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram serta Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

- **Program Unggulan di Bidang Kesehatan Revitalisasi Posyandu**

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Upaya pengembangan kualitas sumberdaya manusia dengan mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak dapat dilaksanakan secara merata, apabila sistim pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan dapat menjangkau semua sasaran yang membutuhkan layanan kesehatan anak, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu nifas.

Secara kuantitas, perkembangan jumlah Posyandu di NTB cukup signifikan, karena terjadi penambahan jumlah posyandu setiap tahun, pada tahun 2018 sebanyak 7.207 dan bertambah Tahun 2019. Jadi setiap Desa/Kelurahan rata-rata terdapat 6-7 Posyandu, dan setiap Posyandu melayani sekitar 70 anak balita. Namun bila ditinjau dari aspek kualitas, masih perlu ditingkatkan baik jumlah maupun prosentase posyandu Purnama dan mandiri) karena kedua strata tersebut dikatakan sebagai posyandu aktif. Dalam penilaian tingkat perkembangan posyandu ada 4 (empat) strata yaitu Strata Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Posyandu Purnama dan Mandiri disebut Posyandu aktif karena lebih banyak peran masyarakat dibandingkan peran petugas dalam pelaksanaan posyandu. Berdasarkan data posyandu yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tingkat perkembangan Posyandu pada tahun 2018 masih terbanyak pada strata Madya (42,6%) dan posyandu strat purnama dan mandiri baru 52,9% masih dibawah target yang diharapkan yakni 55%. Hal ini berarti masih banyak permasalahan dalam pelaksanaan posyandu antara lain kurangnya kader yang aktif, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengambil langkah bijak, dengan mengangkat atau menghidupkan kembali kinerja Posyandu ini, melalui program unggulan “Revitalisasi Posyandu”. Hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu. Upaya ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak, baik pemerintah maupun komponen masyarakat. Karena itu, mengingat sumberdaya yang terbatas, maka penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu dirancang sebagai suatu kolaborasi dan sinergi yang sistematis antar sektor terkait, para mitra pembangunan (NGO), swasta serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota bahkan sampai pemerintah Desa.

Peningkatan kualitas posyandu juga mencakup upaya perluasan sasaran, sehingga posyandu di NTB dapat melayani/ memberikan manfaat bagi

semua kelompok sasaran yang rentan, seperti ibu hamil, bayi, balita, remaja dan kelompok lanjut usia. Karena itu, Pemerintah provinsi NTB telah merumuskan arah revitalisasi posyandu di NTB yaitu terbentuknya "Posyandu Keluarga" di semua Desa/ Kelurahan, atau posyandu yang dapat melayani semua anggota keluarga. Sejak dilaunching program Posyandu keluarga sebagai salah satu inovasi Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017, perkembangan terbentuknya posyandu keluarga cukup pesat dari 86 Posyandu pada tahun 2019 saat ini jumlah posyandu keluarga 1050 posyandu, karena dirasa begitu besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Tabel 2. 48 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum optimalnya koordinasi, kerjasama dan dukungan pelaksanaan Program Unggulan dan program lainnya oleh lintas sektor dan dengan kabupaten/kota.	Terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta mensinergikan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor terkait dan kabupaten/kota.
Ketersediaan sarana dan prasarana khususnya ruang kelas pelatihan, asrama dan peralatan penunjang di Bapelkes yang belum memadai untuk menunjang kegiatan pelatihan tenaga kesehatan.	Mengoptimalkan sarana yang tersedia dengan menyusun jadwal pelatihan dengan ketat.
Pemenuhan dan distribusi kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.	Melakukan advokasi kepada kabupaten/kota untuk melakukan pemenuhan dan distribusi/redistribusi tenaga kesehatan secara merata.

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019

b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

RSUD Provinsi NTB secara resmi telah direlokasi pada tanggal 17 Desember 2015 dengan luas lahan dan bangunan yang lebih representative, sehingga menunjang upaya-upaya pengembangan program pelayanan yang dilakukan. Pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB mencakup pelayanan administrasi manajemen, rawat inap, rawat jalan, rekam medis, farmasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keperawatan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Perinatal Resiko Tinggi, IGD, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Radiologi, gizi, pelayanan intensif dan pelayanan darah. Pada tahun 2019,

RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan re-assesment akreditasi RS versi 2012 dan tetap mempertahankan predikat PARIPURNA. Pada bulan Februari 2020 RSUD Provinsi NTB akan melaksanakan akreditasi edisi 1.1 oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan 6 bulan kemudian direncanakan juga akan melakukan akreditasi international.

Pelayanan medis yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB Tahun 2019, mencakup rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. Adapun cakupan rawat jalan, rawat inap dan IGD (rawat darurat) berdasarkan cara pembayaran yang telah dilayani oleh RSUD Provinsi NTB tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 49 Cakupan Layanan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017-2019

No.	Cara Pembayaran	2017				2018				2019			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	IGD	Jumlah
1.	Askes (Non PBI)	35.038	8.065	6.989	50.092	79.120	8.600	7.367	95.087	81.511	9.842	7.042	98.395
2.	Umum	14.550	1.829	6.339	22.718	15.667	1.338	4.896	21.901	18.292	1.483	5.048	24.823
3.	Jamkesmas (PBI)	75.407	5.997	5.084	86.488	35.743	6.366	4.712	46.821	39.048	6.637	4.555	50.240
4.	Asuransi Lain	317	812	330	1.459	315	427	198	940	2.090	714	380	3.184
5.	Dana Bencana Alam (DBA)					262	302	481	1.045	150	47	0	197
Jumlah		125.312	16.703	18.742	160.757	131.107	17.033	17.654	165.794	141.091	18.723	17.025	176.839

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019, terjadi peningkatan kunjungan pasien sebesar 6,66 persen, baik rawat jalan, rawat inap dan IGD menjadi sebanyak 176.839 orang, dibanding dengan tahun 2018 sebanyak 165.794 orang. Tahun 2019 Provinsi NTB masih memberikan pelayanan kepada pasien korban bencana alam. Adapun jumlah korban bencana alam yang ditangani oleh RSUD Provinsi NTB tahun 2019 sebanyak 197 orang atau sebesar 0,11 persen dari jumlah total kunjungan ke RSUD Provinsi NTB. Pengembangan pelayanan dan upaya peningkatan pelayanan secara optimal di RSUD Provinsi NTB terus berusaha ditingkatkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan layanan kepada masyarakat tahun 2019 antara lain:

- ✓ Pengembangan ruang kemoterapi;
- ✓ Pengembangan poli TB-MDR dan TB DOT;
- ✓ Pengembangan ruang intermediate;

- ✓ Pengembangan OK cyto;
- ✓ Pengembangan pelayanan bedah onkologi dan genekologi onkologi dengan kemoterapi;
- ✓ Pengembangan ruang bedah sentral;
- ✓ Pengembangan ruang burn unit;
- ✓ Pengembangan ruang ODC (One Day Care) dengan OK VIP.

Selain melakukan pengembangan layanan, RSUD Provinsi NTB juga menetapkan beberapa pelayanan yang ada menjadi pelayanan unggulan antara lain:

a. Pusat Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah Terpadu (cathlab);
b. Pusat Pelayanan Intervensi Paru;
c. Pelayanan Hemodialisa;
d. Pelayanan Riset Biomedik;
e. Pelayanan Onkologi dan Radiotherapi.

Sejak tahun 2018, RSUD Provinsi NTB telah memiliki layanan unggulan yaitu layanan Radioterapi dan Kemoterapi terpadu. Layanan Radioterapi dan Kemoterapi merupakan layanan yang diperuntukkan bagi pengobatan yang dikhususkan untuk pasien-pasien kanker. Adapun layanan untuk radioterapi ditahun 2019 sebanyak 4.125 pasien dengan 76,8% adalah pasien perempuan yang melakukan radioterapi. Tingginya tindakan radioterapi tersebut dapat dilihat pada tabel 10 penyakit terbanyak di Instalasi Rawat Jalan.

Tahun 2019 ada 3 (tiga) jenis penyakit yang paling banyak dirawat di instalasi rawat jalan yaitu Chronic renal failure-unspecified, atherosclerotic heart disease, malignant neoplasm of breast-unspecified. Di tahun 2019 penyakit Chronic renal failure-unspecified menjadi urutan pertama dalam 10 kasus terbanyak. Ditahun 2018, penyakit Chronic renal failure-unspecified tidak masuk dalam 10 penyakit terbanyak. Penyakit terbanyak kedua adalah atherosclerotic heart disease. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, Penyakit atherosclerotic heart disease ditahun 2019 mengalami penurunan jumlah kasus baru sebanyak 1.192 kasus (67,35%). Jumlah kasus baru Aatherosclerotic heart disease tahun 2019 sebanyak 578 kasus baru dan jumlah kunjungan sebanyak 4443 kasus. Kasus ketiga terbanyak Rawat Jalan tahun 2019 adalah malignant neoplasm of breast_unspecified dengan jumlah kasus baru 496 kasus dan jumlah kunjungan sebanyak 5216. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, kasus malignant neoplasm of breast_unspecified mengalami penurunan kasus baru sebanyak 602 kasus baru atau sekitar 54,83%. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat jalan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 50 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019

NO	ICD	Nama ICD	KASUS BARU		JUMLAH KASUS BARU	JUMLAH KUNJUNGAN
			L	P		
1	N18.9	Chronic renal failure, unspecified	440	355	795	4095
2	I25.1	Atherosclerotic heart disease	411	167	578	4443
3	C50.9	Malignant Neoplasm of Breast, unspecified	0	496	496	5216
4	N20.0	Calculus of kidney	250	163	413	1634
5	G40.9	Epilepsy, unspecified	230	179	409	1817
6	N40	Hyperplasia of prostate	285	0	285	1525
7	I11.9	Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure	106	115	221	1828
8	H26.9	Cataract, unspecified	113	98	211	713
9	M54.5	Low back pain	75	117	192	950
10	D24	Benign neoplasm of breast	0	106	106	345

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Pelayanan di instalasi rawat inap, 3 (tiga) penyakit yang paling banyak yang dirawat di RSUD Provinsi NTB tahun 2019 yaitu malignant neoplasm of breast_unspecified, Anemia_unspecified, dan Peumonia_unspecified. Dibandingkan dengan tahun 2018, pada tahun 2019 kasus malignant neoplasm of breast_unspecified terjadi peningkatan sebesar 657 kasus (37,52%). Penyakit yang terbanyak kedua adalah Anemia, namun bila dibandingkan dengan tahun 2018, pasien yang dirawat inap karena penyakit anemia di tahun 2019 terjadi penurunan jumlah kasus baru sebanyak 476 kasus (47,41%). Kasus anemia pada tahun 2018 sebanyak 1.004 kasus sedangkan di tahun 2019 sebanyak 528 kasus. Penyakit ketiga terbanyak Rawat Inap tahun 2019 adalah pneumonia-unspecified dengan jumlah pasien 520 pasien, sedangkan di tahun 2018 penyakit ini berada diurutan ke-6 dalam 10 penyakit terbanyak instalasi rawat ianap RSUD Provinsi NTB. Ditahun 2019 kasus dirawatnya pasien karena penyakit anemia meningkat sebanyak 64 kasus (14,04%) bila dibandingkan dengan tahun 2018. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat inap adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 51 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2019

NO URUT	DIAGNOSA		PASIEN KELUAR HIDUP		PASIEN KELUAR MATI		TOTAL
	KODE	NAMA PENYAKIT	L	P	L	P	
1	C50.9	Malignant Neoplasm of Breast, unspecified	0	2354	0	54	2408
2	D64.9	Anaemia, unspecified	229	224	38	37	528
3	J18.9	Pneumonia, unspecified	232	145	78	65	520
4	S06.0	Concussion	301	147	18	4	470
5	N18.9	Chronic renal failure, unspecified	198	157	46	39	440
6	I25.1	Atherosclerotic heart disease	276	131	20	9	436
7	D63.0	Anaemia in neoplastic disease (C00-D48+)	114	246	24	34	418
8	I50.0	Congestive heart failure	192	142	24	37	395
9	C11.9	Malignant Neoplasm of Nasopharynx, unspecified	264	112	3	4	383
10	I63.9	Cerebral infarction, unspecified	155	128	52	39	374

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019 3 (tiga) penyakit yang terbanyak pada Pelayanan Instalasi Gawat Darurat, yaitu Fever-unspecified, Open wound of unspecified body region, Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis. Kunjungan karena penyakit Fever- unspecified meningkat sebanyak 84 kasus baru (35,75%). Penyakit kedua terbanyak adalah Open wound of unspecified body region, dengan jumlah kunjungan sebanyak 261 kunjungan dan jumlah kasus baru sebesar 232 kasus, dibandingkan tahun 2018 terjadi peningkatan kunjungan sebanyak 33 kunjungan (14,47%). Penyakit ketiga terbanyak adalah Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis. Pada tahun 2018 penyakit ini berada pada urutan ke 6 pada 10 penyakit terbanyak di RSUD Provinsi NTB. Jumlah kunjungan penyakit ini pada tahun 2018 sebanyak 267 kunjungan dan tahun 2019 sebanyak 261 kunjungan, jika dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan jumlah kunjungan sebanyak 6 kunjungan (2,25%). Namun jika dilihat dari jumlah kasus baru, jumlah kasus baru untuk penyakit ini terjadi peningkatan sebanyak 1,87% ditahun 2019. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat Darurat adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 52 Kasus 10 (Sepuluh) Penyakit Terbanyak di Instalasi Gawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2019

NO	ICD	Nama ICD	KASUS BARU		JUMLAH KASUS BARU	JUMLAH KUNJUNGAN
			L	P		
1	R50.9	Fever, unspecified	184	135	319	453
2	T14.1	Open wound of unspecified body region	160	72	232	261
3	K21.9	Gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis	102	116	218	351
4	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	76	116	192	290
5	J45.9	Asthma, unspecified	67	54	121	248
6	T14.0	Superficial injury of unspecified body region	72	44	116	133
7	R11	Nausea and vomiting	52	60	112	183
8	K52.9	Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified	56	55	111	182
9	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	60	50	110	153
10	R51	Headache	39	50	89	157

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

RSUD Provinsi NTB juga melakukan peningkatkan kualitas pelayanan melalui dana DAK dan DBCHT pada tahun 2019, dengan melengkapi alat-alat kesehatan/kedokteran. Melalui dana DAK, RSUD Provinsi NTB membeli alat kebutuhan instalasi/unit yaitu alat untuk pengelolaan limbah, steam stelillizer, autopsi table, Defibrilator, ventilator, CT scan, brachiterapi, dan lain lain. Sedangkan dengan dana DBCHT membeli alat untuk CT Simulator, Thoractomy dan lain lain sehingga total pengadaan alat di tahun 2019 dengan menggunakan anggaran DAK dan DBCHT sebanyak 642 unit.

Tahun 2019 dilaksanakan juga kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan. 4 (empat) orang mengikuti pendidikan pelatihan formal untuk jenis pendidikan spesialis ke subspesialis (pembiayaan APBD). Untuk mengakomodir SDM RS yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pagu anggaran tidak hanya menggunakan dana dari subsidi tetapi juga menggunakan dana dukungan dari fungsional BLUD dan kemitraan seperti kementerian kesehatan. Sampai dengan tahun 2019 SDM RSUD Provinsi NTB yang menempuh studi dengan menggunakan dana BLUD dan dana kementerian kesehatan 29 orang dan biaya mandiri sebanyak 11 orang. Sementara untuk kegiatan pelatihan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pelatihan baik berupa pelatihan lebih dari 20 jam pelatihan maupun pelatihan yang kurang dari 20 jam (berupa workshop, symposium dan lain-lain). Adapun SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan yang lebih dari 20 jam pelatihan sebanyak 300 orang, SDM yang mengikuti pelatihan di unit khusus sebanyak 184 orang.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, selalu melengkapi kekurangan SDM, salah satunya adalah dokter spesialis dan sub spesialis. Saat ini untuk memenuhi kebutuhan SDM dokter spesialis dan subspesialis yang kurang, RSUD Provinsi NTB berkerjasama dengan dokter paruh waktu Universitas Mataram sebanyak 39 orang yaitu: dokter spesialis anak 2 orang, spesialis anastesi 1 orang, spesialis bedah 1 orang, spesialis bedah plastik 1 orang, spesialis bedah syaraf 2 orang, spesialis bedah thoraks kardiovaskuler 1 orang, spesialis forensic 1 orang, spesialis jantung 2 orang, spesialis kesehatan jiwa 1 orang, kulit kelamin 1 orang, spesialis mata 4 orang, spesialis mikrobiologi klinik 1 orang, spesialis neurologi 1 orang, spesialis obgyn 2 orang, spesialis orthopedi 1 orang, spesialis paru 2 orang, spesialis patologi klinik 1 orang, spesialis penyakit dalam 4 orang, spesialis radiologi 1 orang, spesialis syaraf 3 orang, spesialis THT 3 orang, dan spesialis urologi 2 orang.

Dalam rangka membantu masyarakat yang berobat keluar daerah karena penyakit jantung dan pembuluh darah, RSUD Provinsi NTB telah mengembangkan program pelayanan inovatif yakni membentuk Pusat Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah Terpadu (cathlab). Cathlab merupakan alat kedokteran canggih yang digunakan untuk penanganan penyempitan pembuluh darah koroner jantung, pemasangan stent/ring pada pembuluh darah koroner yang mengalami penyempitan, tindakan darurat pemasangan alat pacu sementara dan permanen, tindakan penutupan dinding/sekat jantung yang mengalami kebocoran, dan tindakan repair katup jantung yang mengalami penurunan fungsional. Untuk menunjang kegiatan tersebut RSUD Provinsi NTB juga mendatangkan ahli jantung dari Rumah Sakit dr. Soetomo–Surabaya dalam melaksanakan operasi pemasangan pacemaker (alat pemacu detak jantung) yang

selama ini pemasangan pacemaker dilakukan di Rumah Sakit Tipe A. Selama kurun waktu 2019, RSUD Provinsi NTB telah melakukan pelayanan unggulan antara lain: bedah syaraf sebanyak 3.837 orang, Pelayanan pembuluh darah terpadu (Cathlab) 589 orang, bedah plastic 1.488 orang, bedah onkologi 13.928 orang, endoscopy 284 orang dan kemoterapi 3.045 orang dan radioterapi 3.332. Pada tahun 2019, terjadi penurunan tindakan pasien yang dilakukan kemoterapi sebesar 24,08 persen dari tahun 2018. Adapun 5 kasus terbanyak dilakukan tindakan kemoterapi adalah Kanker Payudara (Ca. Mamae) sebanyak 1.673 tindakan, Kanker Nasofaring (Ca. Nasofaring) sebanyak 337 tindakan, Kanker Rektum (Ca. Rektum) sebanyak 242 tindakan, Ca. Ovarium sebanyak 212 tindakan dan Kanker Serviks (Ca. Serviks) sebanyak 185 tindakan.

Sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik pada co-assisten melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sampai bulan Desember 2019 sebanyak 65 orang dan pelayanan kegiatan praktik siswa/mahasiswa non kedokteran sebanyak 666 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Ners) di wilayah Provinsi NTB dan luar Provinsi NTB. Di bidang pendidikan dan pelatihan sampai dengan tahun 2019, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan 8 Kerja Sama Operasional (KSO), antara lain dengan: Stikes Yarsi Mataram 225 orang, Universitas Muhammadiyah 37, Stikes Hamzar 30 orang, Fakultas Ilmu Kesehatan UNU Mataram 3 orang, UGM Jogyakarta 8 orang, Akper Samawa 35 orang. Untuk lebih meningkatkan kemampuan SDM yang memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Provinsi NTB telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo sebagai sister Hospital (RS Kemitraan) di bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. Tabel dibawah ini merupakan tabel kerjasama RSUD Provinsi NTB di bidang pendidikan.

Tabel 2. 53 Kerjasama RSUD Provinsi NTB Di Bidang Pendidikan Tahun 2019

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2019	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
					Lama	Dari tanggal	
1	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi NTB	No. 065/1021/RSUDP/2019; No. 893/890/45.I/Bapelkes/I/2019	Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelatihan	2 (dua) tahun	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2021	
2	Universitas Qamarul Huda Badarudin	No. 065/1472/RSUDP/2019; No.	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian	Pendidikan	2 (dua) tahun	1 Maret 2019 s/d 28	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2019	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
					Lama	Dari tanggal	
	(UNIQHBA) BAGU Kab. Lombok Tengah	042/UNIQHBA/YPPQH/III/2019	Masyarakat Universitas Qamarul Huda Badarudin (Uniqhba) Bagu Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB			Februari 2021	
3	Universitas Nahdlatul Ulama NTB	No. 065/2400/RSUDP/2019; No. 068/A9.1/MoU/2019	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama NTB Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendidikan	2 (dua) tahun	23 Mei 2019 s/d 22 Mei 2021	
4	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Mataram	No. 065/2272/RSUDP/2019; No. HK.03.01/1.1/1442/2019	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan Mataram Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Gizi dan Jurusan Analis Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendidikan	1 (satu) tahun	20 Maret s/d 19 Februari 2020	
5	RS Unram dan FK Unram	No. 065/3104/RSUDP/2019; No. 357/UN18/RS/DIR/HK/2019 ; No. 2784/UN18.F7/KS/2019	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat di RS Unram	Pendidikan	3 (tiga) tahun	1 Juli 2019 s/d 31 Agustus 2022	
6	Universitas Mataram	No. 2624/UN18.F7/KS/2019; No. 065/3290/RSUDP/2019	Program SHERA (Sustainable Higher Education Research Alliance)	Penelitian	1 (satu) thun	1 Juli 2019 s/d 31 Juli 2020	
7	RS Jiwa Mutiara Sukma dan FK Unram	No. 065/3392/RSUDP/2019; No. 415.4/918.A/TU/RSJMS/2019; No. 110/UN18,8/KS/2018	Addendum Kesatu penyelenggaraan Pendidikan/Pelatihan, penelitian, Pelayanan Kesehatan dan pengabdian Masyarakat di RS Jiwa Mutiara Sukma PROV NTB	Pendidikan	3,2 Tahun	20 Juni 2019 s/d 31 agustus 2022	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2019	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
					Lama	Dari tanggal	
8	STIKES HAMZAR	No. 065/4098/RSUDP/2019; NO. 461/SPj/Stikes/IX/2019	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hamzar di RSUD Prov NTB	Pendidikan	2 (dua) tahun	17 September 2019 s/d 16 Sept 2021	

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Selain bekerjasama dengan dokter paruh waktu Universitas Mataram, RSUD Provinsi NTB juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan canggih yang dibutuhkan seperti pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium, dan penyediaan gasmedik. Tabel dibawah ini merupakan kerjasama dengan pihak ke tiga di bidang pelayanan penunjang.

Tabel 2. 54 Kerjasama Dengan Pihak Ketiga Di Bidang Pelayanan Penunjang Tahun 2019

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
		2019			Lama	Dari tanggal	
1	PT. DEXA ARFINDO PRATAMA	No. 065/411/RSUDP/2019; 009/DAP-KSO/II/2019	Penempatan Alat Nyco Card Reader II Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang pelayanan Lab	2 (dua) tahun	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2021	
2	PT. RIZKI EDUCALAB	No. 065/297/RSUDP/2019; No.009/RE/MOU/I/2019	Penyediaan Alat Kesehatan Habis Pakai Di Instalasi Radiologi RSUDP NTB	Bidang Pelayanan Radiologi (Film)	1 (satu) tahun	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	
3	PT. ALEXA MEDIKA	No. 065/295/RSUDP/20198; No. 009/AM-MTR/XI/2019	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Farmasi	1 (satu) tahun	1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
		2019			Lama	Dari tanggal	
4	PT. Ridho Ilahi Farma	No. 065/299/RSUDP/2019; No. S-011/RIF/I/2019	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrumen Pemasangan Alat (Bedah, Syaraf, Bedah Urologi, Mata Gigi, Bedah, THT, NICU) Pada Pasien BPJS Atau Ketenagakerjaan	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	2 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	
5	CV. FATAHILLAH 354	No. 065/922/RSUDP/2019; No. 313/02/Fat.3541/2019	Addendum Kesatu Pembuatan Slide Dari Seluruh Sediaan Hasil Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	1 (satu) tahun	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	
6	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/914/RSUDP/2019; No. 005/PSJ/KSO/II/2019	Penempatan 1 (satu) Unit Alat Blood Culture System BD Bactec 9000 Alyzer di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	2 (dua) tahun	23 Januari 2019 s/d 22 Januari 2021	
7	PT. Enseval Medika Prima	No. 065/926/RSUDP/2018; No. 022/EMP.KSO-Hoslab/II/2018	Penempatan alat Immunology Analyzer Mini Vidas di Instalasi Laboratorium Klinik RSUDP NTB	Bidang Pelayanan Laboratorium	2 (dua) tahun	2 Januari 2019 s/d 1 Januari 2021	
8	PT KARUNIA ABADI	No. 065/1331/RSUDP/2019; No. 19,6/1403/KAI MTR/2019	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrumen Pemasangan Alat Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau Ketenagakerjaan	Bidang Pelayanan Bedah Tulang dan Bedah Saraf	1 (satu) tahun	1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
		2019			Lama	Dari tanggal	
9	PT. Cipta Husada Mandiri	No. 065/1445/RSUDP/2019; No. 007/PK/CHM-NTB/2019	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab (Intervensi Kardiologi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (Intervensi Kardiologi -Cathlab)	1 (satu) tahun	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	
10	PT SABA INDOMEDIKA	No. 065/2427/RSUDP/2019; No. 8670/Perp/SI-UKH/Sysmex XN1000B3/V/2019	Penempatan Alat Hematology Analyzer Sysmex Type XN1000B3 di Instalasi Klinik RSUD Prov NTB	Bidang Laboratorium	3 (tiga) tahun	1 Juli 2019 s/d 30 Juni 2022	
11	PT. Cipta Husada Mandiri	No. 065/3650/RSUDP/2019; No. 012/PK/CHM-NTB/2019	Addendum Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab (Intervensi Kardiologi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (Intervensi Kardiologi -Cathlab)	1 (satu) tahun	1 Juni 2019 s/d 31 Maret	
12	PT Sinergi Tridaya Medical	No. 065/4209/RSUDP/2019; No. 390/STM-S/Sales/EXT/PKS/VIII/2019	Penyediaan Alat/BMHP Spine Medtronic (Produk G5) dan EV3/Medtronic Endovascular pada RSUD Prov NTB	Pelayanan	1 (satu) thun	20 Juni 2019 s/d 19 Juni 2020	
13	PT SAKA ANGKASA MULIA	No. 065/2389/RSUDP/2019; No. 015/PT.SAM/III/2019	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Listrik Dan Panel SDP Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang IPSRS/Listrik	9 (sembilan) bln	1 April 2019 s/d 31 Desember 2019	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
		2019			Lama	Dari tanggal	
14	PT Firsha Rana Azzam Medika	No. 065/1817/RSUDP/2019; No 0401/MOU/FRAME/IV/2019	Penyediaan Alat Media Habis Pakai Implant Dan Instrument Orthopaedics Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (Tulang)	1 (satu) tahun	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	
15	PT Trinusa Darma Baswara	No. 065/2083/RSUDP/2019; No. 016/TDB/PKS/IV/2019	Penyediaan Produk/AMHP Bedah Syaraf Dan Orthopedi Di RSUD Prov NTB	Bidang Pelayanan (Bedah Saraf dan Tulang)	1 (satu) tahun	1 April 2019 s/d 31 Maret 2020	
16	PT Nusatri Utama	No. 065/1654/RSUDP/2019; No. S-0217A/NTU/IV/2019	Penempatan 1 Unit Alat Hematology Analyzer 5 Diff Type CellDyn Ruby (Abbott) Untuk Pelayanan Pemeriksaan Darah lengkap Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov NTB	Bidang Laboratorium	3 (tiga) tahun	9 Maret 2019 s/d 8 Maret 2022	
17	PT Intermedika Raya	No. 065/4638/RSUDP/2019; NO. 016/IMR-MOU/X/2019	Penyediaan Alat/BHP MATA pada RSUD Prov NTB	Pelayanan Mata	1 (satu) thun	1 Oktober 2019 s/d 30 Sept 2020	
18	PT Dharma ASTITI	No. 065/4767/RSUDP/2019; No. 20/DA/X/2019	Penyediaan Alat/BHP Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUDP NTB	Pelayanan Jantung	1 (satu) thun	27 September 2019 s/d 26 Sept 2020	
19	PT Rekamileniumindo	No. 065/4676/RSUDP/2019; No. 0040/RS/PKS/IX/2019	Penyediaan Alat Medis habis pakai Untuk Layanan Cathlab Pada RSUDP NTB	Pelayanan Jantung	1 (satu) tahun	4 September 2019 s/d 3 Sept 2019	
20	PT Pelita Santoso Jaya	No. 065/4648/RSUDP/2019; No. 17/KSO/RSUDP.NTB/X/2019	Penempatan 1 alat Electrolyte Analyzer Roche 9180 Di Instalasi	LAB	2 (dua) tahun	1 Okt 2019 s/d 30 Sept 2021	

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu		KET
		2019			Lama	Dari tanggal	
			Lab Klinik RSUDP NTB				
21	PT Pelita Santoso Jaya	No. 065/4645/RSUDP/2019; No. 15/KSO/RSUDP.NTB/X/ 2019	Penempatan 1 alat Unit Coagulation Start 4 Merk Stago di Instalasi Lab Klinik RSUDP NTB	LAB	2 (dua) tahun	1 Okt 2019 s/d 30 Sept 2021	
22	PT Pelita Santoso Jaya	No. 065/4647/RSUDP/2019; No. 19/KSO/RSUDP.NTB/X/ 2019	Penempatan 1 alat Urin Chemistry Analyzer Urometer 720 SD Allere di Instalasi Lab Klinik RSUDP NTB	LAB	2 (dua) tahun	1 Okt 2019 s/d 30 Sept 2021	
23	PT Pelita Santoso Jaya	NO. 065/4646/RSUDP/2019; No. 16/KSO/RSUDP.NTB/X/ 2019	Penempatan 1 alat Blood Gas Analyzer Opti CCA TS Medical USA di Instalasi Lab Klinik RSUDP NTB	LAB	2 (dua) tahun	1 Okt 2019 s/d 30 Sept 2021	
24	PT Pelita Santoso Jaya	No. 065/2947/RSUDP/2019; No. 18/KSO/RSUDP.NTB/X/ 2019	Penempatan 1 alat Autoanalyzer Kimia Klinik Indiko Plus Merk Thermo Scientific di Instalasi Lab Klinik RSUDP NTB	LAB	2 (dua) tahun	1 Okt 2019 s/d 30 Sept 2021	
25	PT KARYA LURDI PERKASA	No. 065/5035/RSUDP/2019; No. 049/KLP/X/2019	Penyediaan Alat/BMHP Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUDP NTB	Cathlab	1 (satu) tahun	28 Okt 2019 s/d 27 Okt 2020	

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menetapkan Indikator Kinerja Pelayanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 55 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2019

No	Aspek/Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Sat	Target	Capaian	% capaian
			2019	2019	
1	Kepuasan Pelanggan (Indeks)	%	84	90	107,14

No	Aspek/Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Sat	Target	Capaian	% capaian
			2019	2019	
2	Rasio Likuiditas				
	Current Ratio	%	10,069	5,307	52,71
	Cash Ratio	%	7,466	3,142	42,08
	Quick Ratio	%	8,719	5,008	57,44
3	Rasio Solvabilitas				
	Rasio Perputaran Piutang	%	82,17	59,44	72,34
	Rasio rata-rata pengumpulan piutang	Hari	0,03	27,66	92.200,00
	Piutang Turn Over	Kali	88,53	13,2	14,91
4	Rasio Rentabilitas				
	Profit Margin Ratio	%	49,83	15,58	31,27
	Return on Asset	%	37,22	9,26	24,88
5	BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS)	%	71	72,6	102,25
6	ALS (Tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS)	Hari	6,1	5,8	95,08
7	BTO (Frekuensi penggunaan TT)	Orang	42	49,9	118,81
8	TOI (Interval TT tdk terisi sampai terisi kembali RS)	Hari	2,4	2	83,33
9	NDR (Angka kematian > 48 jam)	Permil	43	41,5	103,49
10	GDR (Angka kematian umum)	Permil	80	61,2	123,50
11	Angka Kematian Ibu di RS				
	Akibat Pendarahan	%	1	3,03	-103,00
	Preklamsia	%	30	20,91	130,30
	Sepsis	%	0,2	11,93	-5.765,00
12	Angka Infeksi Nosokomial	%	1,5	0,24	184,00
13	Tingkat Penggunaan Obat Generik	%	60	67,79	112,98
14	Waktu tunggu (Kecepatan penanganan penderita gawat darurat)	Menit	5	4,05	119,00
15	Jumlah pasien yang dilayani :				

No	Aspek/Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Sat	Target	Capaian	% capaian
			2019	2019	
	Rawat Inap	Orang	11.724	18.723	159,70
	Rawat Jalan	Orang	101.024	141.091	139,66
	Gawat Darurat	Orang	39.535	17.025	43,06
16	Kelengkapan pengisian Rekam Medik	%	70	65,9	94,14
17	Prosentase Baku Mutu limbah cair				
	BOD	mg/lt	50	7,18	185,64
	COD	mg/lt	80	17,6	178,00
	TSS	mg/lt	30	11,92	160,27
	PH	%	7	6,43	108,14
18	Pendapatan BLUD	Milyar	165	204	123,64
19	Jumlah sarana yang terbangun	Paket	0	0	0,00
20	Jumlah gedung yang terpelihara	Unit	22	22	100,00
21	Jumlah Alat Kedokteran yang tersedia	Unit/Set	548	642	117,15
22	Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis	Orang	2	4	200,00
23	Jumlah Dokter Umum ke Spesialis	Orang	2	8	400,00
24	Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS	%	880	410	46,59
25	Prosentase Pelatihan di Unit Khusus	%	60	69,12	115,20
26	Jumlah SPM/SPO/CP yang tersusun	Jenis	323	1.374	425,39
27	Jumlah Dokumen Perencanaan RS yang tersusun	Jenis	6	6	100,00
28	Jumlah Naskah Kerjasama	Jenis	50	104	208,00
29	Jumlah laporan capaian kinerja	Jenis	5	5	100,00

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit pada tahun 2019 mencapai sebesar 90%, artinya mutu pelayanan dalam kategori “Sangat Baik” (88,31 – 100,00), ini berdasarkan survei yang dilakukan untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Namun bila dilihat dari angka kematian, baik NDR

(kematian > 48 jam), maupun kematian ibu di RS yang disebabkan karena sepsis, preeklamsi dan eklamsi secara umum masih tinggi. Sesungguhnya RSUD Provinsi NTB telah berusaha maksimal memberikan pelayanan kepada pasien namun karena RSUD Provinsi NTB merupakan RS Rujukan tersier maka pasien yang datang sudah dalam kondisi kritis. Selain itu tingginya angka kematian di RSUD Provinsi NTB khususnya untuk kematian ibu disebabkan karena rujukan terlambat.

Selama kurun waktu tahun 2019, RSUD Provinsi NTB telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu beberapa inovasi telah dilakukan oleh RSUD Provini NTB aantara lain:

1. Inovasi JALAN HIDUP

   Jalan Hidup ini merupakan jalur bagi pejalan kaki atau pedistrian yang dibangun dengan menggunakan rangka besi holow dengan ukuran panjang 3 meter, lebar 1 meter, tinggi 2,5 meter dengan bahan rangka besi holo galpanis ukuran 8x8 cm ketebalan 2,0 inch. Rangka besi dirambatkan tanaman hidup yang tahan musim kemarau sebagai atap atau pelindung. Untuk pembangunan rangka besi dalam program JALAN HIDUP, rumah sakit menggalang kemitraan kepada civitas hospitalia dan mitra rumah sakit untuk pengadaan rangka besi dan tanaman rambatannya. Proses pembangunan inovasi JALAN HIDUP ini mulai berlangsung sejak pertengahan januari 2019 dan kini sudah terbangun sebanyak 30 unit yang berdiri di jalan sepanjang 255 meter. Selain sebagai pelindung, program JALAN HIDUP ini merupakan hiburan sarana swafoto bagi masyarakat sekitar terutama dimalam hari karena jalur ini dihiasi lampu warna-warni. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman bagi pengunjung RS (pasien, keluarga pasien, pembesuk, dll. Dalam menjalankan program kerjanya JALAN HIDUP melibatkan tim taman yang dibentuk oleh Direktur RSUD Provinsi NTB dibawah koordinasi tim green hospital serta menjalin kemitraan dengan pedagang kaki lima (pelapak) yang berada disekitar RS dalam hal pengembangan tanaman hidroponik. Inovasi ini mendapatkan apresiasi dari ibu wakil gubernur dengan arahan agar tanaman rambat diJALAN HIDUP dapat tumbuh subur dan menghijau. Ada beberapa pelajaran yang dipetik dari inovasi ini antara lain :

   a. Satu strategi yaitu membuat jalur pedistrian yang hijau teduh nan asri ternyata dapat merubah animo masyarakat yang beranggapan RS adalah tempat orang sakit;
   b. Menjadi tempat berolah raga jalan kaki (joging track) masyarakat sekitar;
   c. Tempat swafoto yang tentunya dapat meningkatkan kesehatan jiwa raga masyarakat terutama pengunjung RS.

2. Inovasi Sistem Informasi Ketersedian Tempat Tidur (Bed Management System) Inovasi ini bertujuan untuk
   a. Penyedian informasi secara akurat mengenai Bed Management System;
   b. Menyiapkan informasi tempat tidur yang terisi, tidak terisi, tersedia dengan catatan, dan rusak secara transparan kepada masyarakat;
   c. Mempermudah akses bagi masyarakat yang akan membutuhkan layanan rawat inap di RSUD provinsi NTB;
   d. Memperlancar alur masuk pasien rawat inap diunit-unit rawat inap.

   Sistem Informasi Ketersedian Tempat Tidur diupdate dua kali sehari oleh admin atau kepala ruangan terkait. Ada beberapa keterangan yang perlu diperhatikan saat melihat ketersedian kamar pada Bed Management System, yaitu untuk Bed berwarna merah menandakan bahwa bed tersebut telah terisi, sedangkan bed dengan warna kuning menandakan bahwa bed tersebut tersedia dengan catatan. Kemudian untuk bed berwarna hijau menandakan bahwa bed tersebut sedia atau belum terisi, dan bed dengan warna hitam menunjukkan bed tersebut rusak.

   Inovasi ini merupakan aplikasi yang diperuntukkan bagi pasien yang akan dirawat inap atau sekedar ingin tahu ketersedian tempat tidur di RSUD Provinsi NTB. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pasien melihat ketersedian bed yang ada.
   Adapun dampak inovasi ini adalah :
   a) Bagi RS
      - Memperlancar alur masuk pasien ke unit ranap inap;
      - Memastikan respon time pelayanan pasien rawat inap yang cepat;
      - Bahan evaluasi harian mengenai kondisi kamar rawat inap dan fasilitas didalamnya.
   b) Bagi Masyarakat
      - Menjamin kepastian informasi bagi masyarakat;
      - Kemudahan akses informasi dan pemesanan ruangan rawat inap secara mudah dan praktis;
      - Pelayanan bagi masyarakat yang murah, efektif dan tersedia 24 jam.

   Pelajaran yang dapat dipetik dari inovasi ini adalah :
   - Pemanfaatan teknologi informasi terkini berbasis komputerisasi oleh masyarakat;
   - Menjamin hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi ketersedian tempat tidur;
   - Inovasi ini diharapkan mampu menurunkan angka kematian dan angka kesakitan;

- Membudayakan dan mendidik masyarakat untuk bersikap tanggap dan positif terhadap teknologi informasi.

3. Inovasi RASI (RUMAH SINGGAH)

Inovasi ini bertujuan untuk :

a. Mempermudah akses pasien kurang mampu yang berasal dari pulau Lombok dan jauh dari Rumah Sakit;
b. Mencegah terputusnya proses pengobatan pasien dikarenakan ketidakmampuan pasien untuk datang berobat ke RSUD Provinsi NTB;
c. Melakukan fungsi sosial Rumah Sakit sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien kurang mampu.

Inovasi RASI dikelola oleh divisi pre hospital instalasi gawat darurat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim RASI adalah membuat bangunan yang permanen, peningkatan fsilitas indoor dan outdoor, peningkatan SDM khusus RASI. Dampak RASI :

a. Memberi harapan bagi pasien untuk menyelesaikan pengobatan tanpa khwatir akan biaya hidup;
b. Meningkatkan kesinambungan pengobatan;
c. Membuat lingkungan di sekitar Rumah Sakit lebih tertib, teratur dan nyaman

Pelajaran yang bisa dipetik:

a. Meningkatkan rasa kepedulian sesama;
b. Pasien punya tempat tinggal sementara;
c. Meningkatkan derajat kesehatan;
d. Aman dan murah;
e. Keberlangsungan pengobatan pasien lebih terjamin;

Penghargaan yang diraih RSUD Provinsi NTB tahun 2019 dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019, RSUD Provinsi NTB menerima penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB sebagai Badan Publik Informatif Kategori OPD Provinsi NTB. Untuk memperoleh penghargaan tersebut berbagai upaya telah dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB yaitu:
    a. Membangun komitmen pimpinan terhadap progress kerja PPID.
    b. Melengkapi dokumen informasi dan mengklasifikasikan sesuai dengan jenis informasi (terbuka, pengecualian).
    c. Memenuhi permintaan dari pemohon informasi publik sebelum batas waktu dan meminimalkan adanya komplain dari masyarakat terhadap pemenuhan dokumen (sesuai dengan UU KIP yang berlaku).
    d. Selalu melakukan update informasi di WEB resmi RSUD.
2. Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2019 untuk Kantor Wilayah Bali Nusa Tenggara Papua. Penghargaan ini

diberikan oleh BPJS ketenagakerjaan yang diberikan langsung oleh Deputi Direktur Wilayah Banuspa pada tanggal 5 Desember 2019 di Bali.

3. Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori 'Sangat Baik' tahun 2019. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 22 November 2019 di Jakarta. Penilaian pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat wajib melaksanakan pelayanan yang memudahkan kepada masyarakat. Aspek penilaian pelayanan publik meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan oleh RSUD Provinsi NTB, masih ditemui beberapa permasalahan dan permasalahan tersebut telah diatasi dengan beberapa solusi seperti table dibawah ini.

Tabel 2. 56 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Kesehatan pada RSUD Provinsi NTB Tahun 2018

PERMASALAHAN	SOLUSI
Keterbatasan pelaksana untuk peningkatan kompetensi khusus, misalnya diklat ATLS, BCLS, NICU, dll (Terkait keterbatasan periode sertifikat)	Kerjasama dengan RSCM (sister hospital) dalam rangka pelatihan untuk peningkatan kompetensi khusus
Sesuai amanat permenkes no. 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perijinan RS, bahwa rasio antara beban kerja dengan jumlah SDM masih belum terpenuhi sehingga berpengaruh terhadap waktu tunggu pelayanan.	Melakukan rekruitmen tenaga non PNS yang dibebankan kepada pendapatan fungsional RS (BLUD).
Keterbatasan jumlah dan jenis alat kedokteran canggih untuk meningkatkan pelayanan yang prima.	Melakukan Kerjasama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga.
Tidak tersedianya anggaran subsidi untuk pemeliharaan alat kesehatan	1. Advokasi ke BPKAD dan Bappeda Provinsi NTB untuk penambahan anggaran pemeliharaan alat kesehatan dalam rangka meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan kesehatan 2. Membebankan anggaran pemeliharaan pada pendapatan fungsional (BLUD)
Belum tersedianya anggaran untuk pembangunan *trauma center* untuk mendukung pelaksanaan MotoGP tahun 2021	Advokasi ke stakeholder terkait

Sumber: RSUD Provinsi NTB, 2019

c. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah salah satu pendukung dalam pencapaian misi ketiga RPJMD 2019-2023 "NTB Sehat dan Cerdas" yang mengusung indikator kinerja Angka Harapan Hidup (AHH). Melalui berbagai program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2019 diharapkan AHH dapat meningkat dari 65,75 tahun pada 2018 menjadi 65,96 tahun pada 2019. Dalam rangka meningkatkan AHH Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tidak bekerja sendiri namun didukung oleh program-program dari OPD terkait seperti Dinas

Kesehatan, RS HL Manambai Abdul Kadir, dan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi. Program prioritas yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam rangka meningkatkan AHH menjadi 65,96 tahun 2019 adalah program upaya kesehatan masyarakat, program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa, program pemeliharaan sarana dan prasarana RS Jiwa, program standarisasi pelayanan kesehatan dan program Peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD.

Program RSJ Mutiara Sukma yang mendukung capaian indikator kinerja misi ke-3 RPJMD 2019-2023: angka harapan hidup adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan output:

- Jumlah Pasung tertangani tahun 2019 sebanyak 68 orang (2011-2019 sebanyak 730 orang);
- Jumlah masyarakat miskin yang terlayani dengan bantuan sosial RSJ Mutiara Sukma tahun 2019 sebanyak 31 orang

Pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma kepada masyarakat adalah pelayanan kesehatan jiwa baik meliputi rawat jalan maupun rawat inap. Pelayanan pasien rawat jalan tahun 2019 sebanyak 35.465 orang, sedangkan pasien rawat inap sebanyak 1.602 orang sehingga total pasien rawat jalan dan rawat inap adalah sebanyak 37.067 orang. Jumlah ini menurun 21,08 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018. Penurunan jumlah pasien yang dilayani pada tahun 2019 disebabkan adanya renovasi gedung poliklinik yang mengalami kerusakan akibat bencana alam gempa bumi tahun 2018 yang lalu.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2019 meliputi pelayanan kepada pasien pasung dan pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat miskin. Tahun 2019, pasien layanan kesehatan jiwa lebih banyak menggunakan BPJS Kesehatan sebagai cara pembayaran yang mencapai 77% atau sebanyak 28.540 orang. Sementara pasien yang menggunakan layanan umum (non BPJS Kesehatan) sebesar 21,24% atau sebanyak 7.874 orang. Metode pembayaran tidak saja melalui mekanisme layanan BPJS Kesehatan dan Non BPJS Kesehatan, tetapi juga melalui mekanisme bantuan sosial sebanyak 1,76%.

Tabel 2. 57 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017-2019

No	Cara Pembayaran	2017			2018			2019		
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	Rawat Jalan	Rawa t Inap	Jumlah
1	Umum	6.073	268	6.341	5.253	182	5.435	7.642	232	7.874

No	Cara Pembayaran	2017			2018			2019		
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
2	BPJS	43.754	834	44.588	40.618	916	41.534	27.380	1.160	28.540
3	Bansos	-	-	-	-	-	-	443	210	653
Jumlah		49.827	1.102	50.929	45.871	1.098	46.969	35.465	1.602	37.067

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Pasien IGD Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma tahun 2019 sebanyak 1.692 orang, meningkat 17,66% dibandingkan tahun 2018. Jika melihat cara pembayaran untuk pasien IGD, sebagian besar menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebesar 63,23% atau sebanyak 1.070 orang. Pasien IGD yang menggunakan layanan umum sebesar 20,69% atau sebanyak 350 orang dan pasien IGD yang menggunakan bantuan sosial sebesar 16,08% atau sebanyak 272 orang.

Tabel 2. 58 Jumlah Pasien IGD di RSJ Mutiara Sukma Provinsi Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2017-2019

No	Cara Pembayaran	2017	Persentase	2018	Persentase	2019	Persentase
1	Umum	323	21,96	331	23,02	350	20,69
2	BPJS	1.148	78,04	957	66,55	1.070	63,23
3	Bansos	0	0	150	10,43	272	16,08
Jumlah		1.471	100	1.438	100	1.692	100

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

RSJ Mutiara Sukma memiliki instalasi khusus rehabilitasi penyalahgunaan napza (instalasi rehabilitasi napza) sebagai salah satu institusi pelayanan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Orang Dengan Penyalahgunaan Napza (ODPGN). Oleh karena itu, RSJ Mutiara Sukma selain memberikan pelayanan pasien rawat inap, rawat jalan dan IGD untuk pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, juga melayani pasien penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza). Sepanjang tahun 2019, sebanyak 626 pasien penyalahgunaan napza telah ditangani oleh unit ini. Jumlah ini meningkat 54,18% atau 220 pasien dibandingkan tahun 2018.

Tabel 2. 59 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2017-2019

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	JUMLAH YANG DIREHABILITASI DI RSJ
2017	100	100	253
2018	100	100	406
2019	100	100	626

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Dalam melaksanakan tugasnya melayani pasien penyalahgunaan napza, RSJ Mutiara Sukma bekerjasama dengan BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram dalam bentuk Tim Assessment Terpadu (TAT), Rehabilitasi Ketergantungan Napza, Rumah Damping pasca Rehabilitasi, Pemetaan Wilayah, serta Pendampingan dan Penjangkauan Bagi Penyalahgunaan Napza. Selain melayani rehabilitasi Napza, RSJ Mutiara Sukma juga memberikan pelayanan konseling dan tes HIV/AIDS yang tidak hanya berupa pelayanan intramural di RSJ Mutiara Sukma, tapi juga melakukan pelayanan ekstramural yaitu kunjungan ke Lapas Mataram dan Lapas Bima, dengan jumlah klien di tahun 2019 sebanyak 782 orang.

Program RSJ Mutiara Sukma yang selalu digaungkan dan mendapatkan perhatian adalah program NTB Bebas Pasung 2018. Meskipun tahun 2018 telah berlalu, namun RSJ MUtiara Sukma tetap berkomitmen untuk NTB Bebas pasung. Salah satu upaya untuk mendorong dan meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat dan untuk mendukung program NTB bebas pasung, RSJ Mutiara Sukma telah melakukan kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi. Dalam rangka mewujudkan program ini dikedepankan upaya-upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.

Upaya lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan menekan jumlah pasien penderita gangguan kejiwaan menuju NTB bebas pasung, RSJ Mutiara Sukma melakukan penjangkauan. Penjangkauan kepada pasien pasung merupakan bukti kepedulian pemerintah terhadap penyakit gangguan kejiwaan di masyarakat dimana sampai saat ini masih ada stigma buruk di masyarakat terhadap pasien gangguan jiwa sehingga pasien cenderung “disembunyikan” keberadaannya karena keluarga takut tercemar nama baiknya. Penjangkauan ini telah mulai dilakukan sejak tahun 2011. Di tahun 2019, RSJ Mutiara Sukma Provinsi telah menjangkau sebanyak 68 pasien pasung dan seluruhnya tertangani (100%). Penjangkauan pasien pasung

tahun 2019 meningkat 48 pasien dibandingkan tahun 2018 yaitu hanya 20 pasien yang mana seluruhnya tertangani. Peningkatan ini disebabkan oleh telah aktifnya kembali Tim Keswamas dalam menjangkau pasien pasung yang sempat terhambat aktivitasnya di akhir tahun 2018 karena bencana gempa bumi. Jumlah pasien pasung hasil penjangkauan tahun 2017 - 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2019

No	Wilayah PUSKESMAS	2017	2018	2019
1.	Mataram	7	5	1
2.	Lombok Barat	14	3	17
3.	Lombok Tengah	10	5	6
4.	Lombok Utara	3	-	6
5.	Lombok Timur	13	6	16
6.	Sumbawa	7	-	2
7.	Sumbawa Barat	0	-	5
8.	Dompu	1	-	3
9.	Bima	1	-	7
10.	Kota Bima	6	1	5
JUMLAH		**62**	**20**	**68**

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Adanya instalasi kesehatan jiwa masyarakat (Keswamas) pada RSJ Mutiara Sukma memberikan dampak bagi perkembangan pelayan di RSJ Mutiara Sukma, khususnya pelayanan ekstramural. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan home visite yaitu kunjungan petugas kesehatan ke rumah pasien yang pernah dirawat di RSJ Mutiara Sukma. Pada tahun 2019 tim keswamas telah melakukan kunjungan rumah sebanyak 20 kali. Berikut adalah rincian kegiatan home visite.

Tabel 2. 61 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Home Visite Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi
1.	Kota Mataram	2 kali
2.	Kab. Lombok Barat	4 kali
3.	Kab. Lombok Tengah	3 kali
4.	Kab. Lombok Timur	8 kali
5.	Kab. Lombok Utara	3 kali
TOTAL		**20**

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Selain kegiatan home visite, tim keswamas juga melakukan kegiatan dropping. Kegiatan dropping pasien adalah upaya RSJ Mutiara Sukma untuk mengembalikan pasien ke keluarganya setelah selesai menjalani perawatan. Ini dikarenakan banyak keluarga pasien yang enggan untuk menjemput kembali pasien yang sudah di rawat inap di RSJ Mutiara Sukma dan dinyatakan sudah boleh pulang oleh DPJP, juga ada beberapa pasien yang tidak mampu dijemput kembali oleh keluarganya. Mengembalikan pasien yang sudah di rawat ke keluarga bukanlah kewajiban RSJ Mutiara Sukma, namun karena kurangnya kepedulian dan pemahaman keluarga dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal pasien serta untuk kelancaran operasional pelayanan, RSJ Mutiara Sukma berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB sehingga kegiatan tersebut dibebankan pada APBD dan BLUD RSJ Mutiara Sukma. Kedepannya diharapkan RSJ Mutiara Sukma dapat bersinergi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota untuk dapat bersama-sama memberi pemahaman pada keluarga dan masyarakat akan pentingnya keterlibatan kelurga dalam proses penyembuhan pasien. Berikut adalah rincian lokasi dan frekuensi kegiatan dropping oleh tim keswamas RSJ Mutiara Sukma :

Tabel 2. 62 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Dropping Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Jumlah pasien
1.	Lombok Tengah	2 kali	2 orang
2.	Lombok Barat	1 kali	1 orang
3.	Sumbawa	2 kali	5 orang
	TOTAL	**5 kali**	**8 orang**

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh keswamas adalah kegiatan ACT (Assertive Community Therapy). Kegiatan ACT atau terapi komunitas adalah bentuk terapi yang berusaha memanipulasi lingkungan untuk keuntungan pasien di lingkungan sosialnya. Pendekatan ini biasanya digunakan pada kasus penyalahgunaan Napza atau individu dengan gangguan/ketidakmampuan fungsi normal kehidupannya atau keluarga yang tidak mampu melakukan perawatan terhadap pasien yang mengalami masalah kejiwaan di masyarakat.

Program ACT didesain untuk menurunkan hospitalisasi, meningkatkan kemandirian, fungsi dan produktifitas individu serta memberi support pada keluarga. Dalam pelaksanaannya terapi ini membutuhkan tim yang terdiri dari multidisiplin ilmu seperti psikiater, dokter, perawat dan seorang koordinator. Bentuk layanan yang diberikan adalah :

a. Layanan ACT statis : dilakukan di poliklinik maupun ruang rawat inap RSJ Mutiara Sukma, dengan sasaran pasien yang kriterianya ditentukan oleh profesional pemberi asuhan;
b. Layanan ACT mobile : dengan kunjungan pada pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya pada kasus-kasus tertentu yang membutuhkan dukungan tim KESWAMAS.

Tabel 2. 63 Lokasi dan Jumlah Klien Kegiatan ACT Tahun 2019

No	Bentuk Kegiatan ACT	Lokasi	Jumlah klien
1.	ACT Statis	RSJ Mutiara Sukma	473 orang
2.	ACT Mobile	Kab. Lombok Timur	20 orang
3.		Kab. Dompu	324 orang
	TOTAL		817 orang

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

RSJ Mutiara Sukma membuat terobosan melalui program "SIRUKO GALAR" (Sistem Rujukan Komunikasi Tiga Pilar) dalam rangka mencapai penjangkaun kepada pasien pasung/pernah pasung di NTB yang secara estimasi jumlahnya mencapai 1.614 orang (Riskesdas, 2018). Inti dari terobosan ini adalah:

a. Berkolaborasi secara sinergis dengan Dinas Kesehatan dalam satu sistem dengan cakupan ke semua kab/kota di NTB. Pada tahap pemberdayaan, kolaborasi dapat melibatkan lebih banyak stakeholder.
b. Inovasi model terhadap pelayanan yang sudah ada:
    - Menjadikan satu sistem yang saling bersinergi melalui komunikasi timbal balik. Pada model rujukan konvensional, tidak ada hubungan timbal balik antara RSJ, Puskesmas dan pasien/keluarga, sehingga pengobatan pasien pasca rawat tidak dapat dimonitor, dengan demikian ada risiko kambuh atau dipasung lagi. Sebaliknya pada "Siruko Galar".
    - mensinergikan tugas Tim ACT RSJMS (Tim Ahli/profesional multi disiplin) dalam memberikan pelayanan secara langsung ke masyarakat/pasien dengan Tim CMHN di Puskesmas yang fungsinya memberikan pelayanan di Puskesmas dan juga langsung ke masyarakat. Tim CMHN terdiri dari dokter dan perawat yang sudah dilatih tentang pelayanan kesehatan jiwa. Tim ini juga juga dilengkapi dengan kader kesehatan jiwa terlatih yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, pasien cukup kontrol ke Puskesmas yang aksesnya lebih dekat dengan tetap mendapatkan supervisi Tim Ahli.

Model layanan SIRUKO GALAR dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 9 Model layanan SIRUKO GALAR

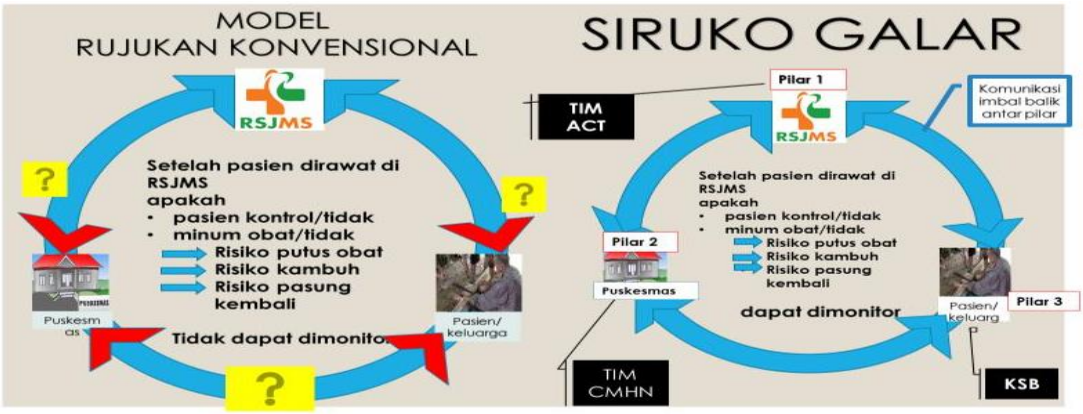

RSJ Mutiara Sukma Provinsi tidak hanya melayani pasien gangguan kejiwaan dalam bentuk perawatan intensif kepada pasien baik dirumah maupun di rumah sakit, namun juga memberikan pemberdayaan pasca pasien telah melalui perawatan intensif dan proses rehabilitasi lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama antar sektor terkait seperti tokoh masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perangkat desa, dan kader sehingga tujuan agar pasien setelah kembali ke keluarga mampu bekerja secara mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat dapat tercapai.

Untuk mendukung kegiatan penjangkauan pasien pasung, instalasi keswamas juga melakukan berbagai kegiatan ekstramural seperti kegiatan integrasi kesehatan jiwa yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan tentang masalah kesehatan jiwa dan penanganannya, serta mampu berperan aktif mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan kesehatan jiwa. Sasaran kegiatan ini adalah dokter dan petugas kesehatan dengan bentuk kegiatan berupa penyuluhan dan bimbingan tentang pelayanan kesehatan jiwa. Berikut adalah rincian kegiatan integrasi kesehatan jiwa tahun 2019:

Gambar 2. 10 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Instegrasi Kesehatan Jiwa tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Jumlah peserta

1.	Mataram	2	42 orang
2.	Lombok Barat	2	36 orang
3.	Lombok Tengah	2	32 orang
4.	Lombok Utara	2	25 orang
5.	Lombok Timur	2	46 orang
6.	Sumbawa	2	58 orang
7.	Sumbawa Barat	2	44 orang
8.	Dompu	2	33 orang
9.	Bima	2	43 orang
10.	Kota Bima	2	31 orang
JUMLAH		**20 kali**	**390 orang**

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Selain itu, tim Keswamas juga melakukan kegiatan mobile clinic yang merupakan kegiatan layanan pengobatan dan konsultasi tentang masalah kesehatan jiwa yang dilakukan langsung ke masyarakat. Berikut adalah rincian kegiatan mobile clinic tahun 2019:

Tabel 2. 64 Lokasi dan Frekuensi Kegiatan Mobile Clinic Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Frekuensi	Jumlah klien
1.	Lombok Barat	2	10 orang
2.	Lombok Tengah	2	26 orang
3.	Lombok Utara	2	3 orang
4.	Lombok Timur	2	28 orang
5.	Sumbawa	2	74 orang
6.	Sumbawa Barat	2	53 orang
7.	Dompu	2	49 orang
8.	Bima	2	70 orang
9.	Kota Bima	2	18 orang
	JUMLAH	**18 kali**	**331 orang**

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, RSJ Mutiara Sukma mengadakan pelayanan poli khusus untuk penyakit dalam yang dilaksanakan setiap hari kamis. Jumlah kunjungan pada poli penyakit dalam pada tahun 2019 sebanyak 109 kunjungan. Pelayanan untuk poli syaraf setiap hari Rabu dengan jumlah kunjungan 1.817 orang selama tahun 2019.

Klinik jiwa anak dan remaja dengan nama Klinik Mental Sehat Ceria (MSC) juga telah dibuka. Pada klinik ini RSJ Mutiara Sukma mengembangkan sistem pelayanan jiwa anak dan remaja secara terpadu dan komprehensif. Pelayanan ini berbentuk CLP (Consulant Lison Psychiatre)/Kerja Tim antara Dokter Spesialis Jiwa Anak dan Remaja, Dokter Anak, Dokter Neurologi beserta Tim Tumbuh Kembang RSJ Mutira Sukma. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan Klinik MSC mencapai 3.593 kunjungan. Ada 10 penyakit terbanyak dari pasien yang berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma dapat dilihat dari diagnosanya yaitu.

Tabel 2. 65 10 Penyakit Terbanyak Pasien yang Berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma Tahun 2019

NO	GOLONGAN DIAGNOSA
1	Skizofrenia, Gg. Skizotifal, Psikotik Akut dan sementara
2	Gg. Anxietas Fobik dan Gg. Ansietas lainnya
3	Gg. Skizoafektif
4	Epilepsi
5	Gg. Hipernetik, prilaku, emosional, fungsi khas, gg. “tic” dan gg. mental dan emosi lainnya
6	Episode depresif, Gg.depresif berulang,Gg.suasana perasaan (mood afektif) menetap,lainnya atau YTT
7	Episode manik dan Gg. afektik bipolar
8	Retardasi mental
9	Gg. Perkembangan Psikologis
10	Demensia

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017-2019

Survey kepuasan masyarakat untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma dilakukan setiap tahun. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSJ Mutiara Sukma tahun 2019 mencapai 79,48%. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sudah tergolong baik. Upaya peningkatkan mutu pelayanan rumah sakit telah dilakukan melalui akreditasi rumah sakit. Tahun 2016 RSJ Mutiara Sukma telah melaksanakan proses penilaian akreditasi KARS versi 2012 dan dinyatakan Lulus Paripurna berdasarkan penilaian dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Tahun 2017 dilaksanakan survei verifikasi untuk tetap menjaga status paripurna. Tahun 2018 dilaksanakan survei

verifikasi kembali yang sedianya akan dilaksanakan bulan September, namun tertunda karena bencana gempa bumi dan akhirnya dijadwalkan kembali untuk survei verifikasi pada bulan Maret 2019 dan tetap memperoleh predikat paripurna. Kemudian pada bulan Agustus 2019 RSJ Mutiara Sukma kembali melakukan penilaian akreditasi SNARS edisi 1 dan kembali memperoleh predikat Paripurna.

Adapun faktor pendukung dalam pencapaian indikator RPJMD :

a. Perencanaan program dan kegiatan sudah didasarkan pada permasalahan yang ada dengan target yang mampu dicapai.
b. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar untuk menunjang pelayanan, serta pemeliharaan sarpras rumah sakit secara rutin untuk menjamin validitas diagnose kepada pasien. Selain itu kegiatan in house training dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya kesehatan agar pelayanan mememnuhi standar pelayanan minimal.
c. Adanya komitmen bersama seluruh pegawai RSJ Mutiara Sukma untuk tetap memberikan pelayanan yang bermutu melalui kegiatan akreditasi Rumah Sakit
d. Pada program peningkatan mutu pelayanan BLUD, keberhasilan capaiannya didukung oleh peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sesuai standar

Sedangkan faktor penghambat dalam pencapaian indikator RPJMD adalah :

a. Pada program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan pengadaan alat kesehatan terdapat alat yang tidak sesuai spesifikasi;
b. Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, jumlah pasien bantuan sosial yang terlayani tidak mencapai target karena pembiayaan pasien bansos sudah di cover oleh kabupaten/kota.

d. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir memberikan fasilitas penyediaan prasarana kesehatan bagi masyarakat Provinsi NTB di Pulau Sumbawa. Cakupan rawat jalan dan IGD berdasarkan cara bayar ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 66 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2018 – 2019

NO	Cara Pembayaran	2018				2019			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Insatalasi Gawat Darurat	Jml	Rawat Jalan	Rawat Inap	Instalasi Gawat Darurat	Jml
1.	Umum	4.837	653	2.127	7.617	4.284	685	1.989	6.958
2.	BPJS	13.524	4.466	5.603	23.593	18.114	6.461	6.099	30.674
3.	JAMKESMAS / MOU	46	15	10	71	47	20	3	70
4.	Lainnya/intern	51	2	19	72	0	0	31	31
Jumlah		18.458	5.136	7.759	31.353	22.445	7.166	8.122	37.733

Sumber : Rekam Medis Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir 2019

Selama tahun 2019, cakupan layanan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mencapai 37.733 orang pasien atau naik sebesar 6.380 orang atau 20% dari total pasien di tahun 2018. Terdapat peningkatan kunjungan pasien BPJS sebesar 7.081 pada tahun 2019. Peningkatan pasien yang signifikan terutama pada pasien BPJS yang di rawat inap dari 23.593 orang pasien pada tahun 2018, meningkat menjadi 30.674 orang pasien pada tahun 2019. Peningkatan pasien rawat inap mengindikasikan semakin baiknya pelayanan dan tingkat kepercayaan pasien terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang telah resmi berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 440- 470 Tahun 2016 Tanggal 10 Mei 2016, tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, dan pada Tahun 2019 Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkkadir telah Terakreditasi UTAMA (Bintang Empat) oleh Komisi Akreditasi Nasional (KARS) dengan Nomor : KARS-SERT/120/XII/2018, artinya Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Nasional dalam melayani masyarakat adapun Program unggulan yang diselenggarakan yaitu:

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- paru/Rumah Sakit Mata.
   a. Pengadaan Alat- alat Kesehatan Rumah Sakit.
   b. Pengadaan Obat Rumah Sakit.

c. Pembangunan Rumah Sakit.
d. Pengadaan Pencetakan administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit.

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
   a. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
   b. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
   c. Penyediaan Jasa Keamanan kantor.
3. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
   a. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.
4. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata.
   a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah Sakit.
5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD.
   a. Pelayanan dan Pendukung Pelaayanan BLUD.

Program-program ini sangat bermanfaat untuk menunjang Proses Pelayanan terhadap masyarakat di R.S. Manambai Abdulkadir dan menjadikan Rumah Sakit menuju Tipe B.

Pada tahun 2018 Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mempunyai anggaran Rp.89.666.843.628 dan terealisasi sebesar Rp.84.304.523.636 atau sebesar 94%. Dan PPK-BLUD dengan target Rp. 29.400.657.500, dapat direalisasikan sejumlah Rp. 24.098.526.338, atau sebesar 81,97%. Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang diselenggarakan selama tahun 2019 dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan dengan solusi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 67 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kurangannya Dokter Spesialis dan Dokter Umum	Kerjasama dengan Universitas yang memiliki Fakultas Kedokteran untuk mengirimkan Dr Spesialis yang sedang menjalani wajib kerja DR spesialis (WKDS) dan wajib kerja spesialis
Perlunya Penambahan Ruang Rawat Inap VIP, VVIP	Tahun 2020 dilakukan pengusulan penganggaran untuk pembangunan Rawat Inap,VIP,VVIP

PERMASALAHAN	SOLUSI
Pelayanan Haemodialisa belum bisa operasional karena belum ada tenaga medis terlatih	Pelatihan Hemodialisa
Ruang Isolasi untuk penyakit menular masih kurang	Memanfaatkan ruang yang menggunakan skat sesuat standar kesehatan
Masih terdapat keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan yang menghambat pelayanan	Berhutang kepada pihak distributor atau rekanan penyedia bahan penunjang pelayanan (obat, Bahan Medis Habis Pakai, reagent lab, dll)

Sumber: Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, 2019

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur urusan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota dimana kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi NTB meliputi bidang:

a. Bidang Pekerjaan Umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya (Perkotaan dan Perdesaan, Air minum, Air limbah, Persampahan, Drainase, bangunan gedung dan lingkungan) dan jasa konstruksi;
b. Bidang Penataan Ruang, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala provinsi; Ketersediaan infratruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah bidang pekerjaan umum yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 adalah Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 68 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi
			2017	2018	2019	2019
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
	Ketaatan Terhadap RTRW		-	87,51	87,79	NA
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	-	10,00	50,00	50,00
2.	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	77,16	83,65	84,65	80,28
3.	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	74,69
4.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		55,31	55,35	56,18	54,41
5.	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	0	0,00	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

- **Prasarana Jalan**

Keseimbangan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor harus dijaga sehingga mewujudkan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan di Provinsi NTB pada tahun 2019, sebagai berikut:

1) Paket DAK yaitu:
   - Pembangunan/Peningkatan Jalan Tumpang Sari (Mataram), Jalan Soekarno - Hatta (Gerung) sepanjang 2,40 Km.
   - Pembangunan/Peningkatan Jalan Hu'u - Parado (Dompu, Bima) sepanjang 8,50 Km.
   - Pembangunan/Peningkatan Jalan Jalan Kiwu - Sampungu (Bima) sepanjang 4,00 Km.
   - Pembangunan/Peningkatan Jalan Bajo - Sampungu (Bima) sepanjang 4,00 Km.
2) Paket Reguler yaitu:
   - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Pal IV-Lenangguar (Sumbawa)

(6,167 Km)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan di Provinsi NTB sebagai berikut:

1) Pemeliharaan Jalan Kota Mataram
   Dengan Program Reguler, Ruas Jalan Gajah Mada (2,75 Km); Ruas Jln Brawijaya (1,93 Km); Ruas Jalan TGH.Bangkol (1,72 Km); Ruas Jln IG KT. Jelantik Gosa (1,70 Km).

   Dengan Program PRIM, Ruas Jalan Yos Sudarso (0,85 Km); Ruas Jalan Langko (2,30 km); Ruas Jalan Pejanggik (3,15 Km); Ruas Jalan Selaparang (2,25 Km); Ruas Jln RA Kartini (1,05 Km); Ruas Jln Ade Irma Suryani (3,00 Km); Ruas Jln Bung Karno (4,35 Km); Ruas Jl Majapahit (3,05 Km); Ruas Jl Sriwijaya (3,13 Km)

2) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lombok Barat
   Dengan Program Reguler, Ruas Jalan Bengkel - Kediri (2.56 Km); Ruas Jalan Kediri - Praya (4.40 Km)

   Dengan Program PRIM, Ruas Jalan Rembiga (Bts. Kota) - Pemenang (21.64 Km); Ruas Jalan Kediri-Rumak (3.00 Km); Ruas Jalan Kuripan-Giri Menang (2,80 Km)

3) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lombok Tengah
   Dengan Program Reguler, Ruas Jalan Kediri - Praya (10.06 Km).

   Dengan Program PRIM, Ruas Jalan Praya - Keruak (16,40 Km); Ruas Jalan Kuta - Keruak (21,00 Km); Ruas Jalan Mantang - Praya (11,27 Km); Ruas Jalan Wakul - Ketejer (3,53 Km); Ruas Jalan Ketejer - Jontlak (2,93 Km); Ruas Jalan Penujak - Mt. Ajan (23,00 Km)

4) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Lombok Timur
   Dengan Program Reguler, Ruas Jalan Masbagik - Pancor (6.30 Km); Ruas Jalan Lb. Lombok - Sambelia (2.00 Km), Pemeliharaan/Pengaspalan Jalan Desa Jantuk-Kab. Lombok Timur

   Dengan Program PRIM, Ruas Jalan Praya - Keruak (5.10 Km); Ruas Jln. Tgh Zainuddin Abdul Majid (Pancor-Selong) (3.45 Km); Ruas Jalan Jln Cokroaminoto (1.92 Km); Ruas Jalan Selong - LB. Haji (5.45 Km); Ruas Jalan Pancor - Rempung (4.41 Km); Ruas Jalan Lb. Lombok - Sambelia (27,73 Km) E-Katalog; Ruas Jalan Sambelia - Dsn. Biluk (23.52 Km) E-Katalog; Ruas Jalan Pringgabaya - Sembalun Bumbung (26.90 Km).

5) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sumbawa
   Ruas jalan Sumbawa – Semongkat - Bt. Dulang (R.109) (1,66 Km);

Ruas jalan Sumbawa - Sebewe - Lua Air (R.110) (1,11 Km); Ruas jalan Sp. Negara - Moyo -Lua Air (R.111) (1,48 Km); Ruas jalan Sekokat – Ropang (R.113.2) (3,03 Km); Ruas jalan Sekokat- Mbawi (R.114) (3,34 Km).

6) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Sumbawa Barat
Ruas jalan Sp. Tano - Sp. Seteluk (R.106) (0,90 Km); Ruas jalan Benete – Sejorong (R.107.1) (2,72 Km); Ruas jalan Sejorong-Tatar-Bts. KSB (R.107.2) (0,67 Km).

7) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Dompu
Ruas jalan Sp. Kempo - Simpang Kore (R.117) (1,60 Km); Ruas jalan Hu'u – Parado (R.120) (0,62 Km).

8) Pemeliharaan Jalan Kabupaten Bima
Ruas jalan Talabiu – Simpasai (R.122.1) (1,98 Km); Ruas jalan Wilamaci – Karumbu (R.123.2) (2,41 Km); Ruas jalan Karumbu-Sape(R.123.3) (2,90 Km).

9) Pemeliharaan Jalan Kota Bima
Ruas jalan Datuk Dibanta - Bts. Kota (R.121.11K) (0,99 Km).

10) Pemeliharaan Jalan PRIM
- Pemeliharaan Jalan Provinsi Kab. Sumbawa (PRIM)
- Pemeliharaan Jalan Provinsi Kab. Sumbawa Barat (PRIM)
- Pemeliharaan Jalan Provinsi Kab. Dompu(PRIM)
- Pemeliharaan Jalan Provinsi Kab. Bima dan Kota Bima (PRIM)

11) Pemeliharaan Ruas Jalan Provinsi SJN – Prajak
Pemeliharaan Ruas Jalan Provinsi SJN – Prajak (Saluran Pembuangan Jalan) (KM, 7.500)

12) Pemeliharaan Ruas Jalan Moyo – Luar Air
Pemeliharaan Ruas Jalan Moyo – Luar Air, Desa Moyo (Pelat Deker)

13) Pemeliharaan Jalan Pal IV - Lenangguar
Pemeliharaan Ruas Jalan Pal. IV- Lenangguar (Pengerukan Sedimentasi Jembatan Boak)

14) Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sumbawa
- Peningkatan Jembatan Kokar Erpeka, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa;
- Peningkatan Jembatan Kokar Lisbud, Batu Alang Moyo Hulu, Sumbawa;

- Peningkatan Jembatan Kokar Peruak Naga, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa;
- Peningkatan Jembatan Kokar Rea, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa;
- Peningkatan Jembatan Kokar Akom, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa;
- Peningkatan Jalan Pruak Naga, Batu Alang, Moyo Hulu, Sumbawa.

Tabel 2. 69 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2019)

Status Jalan	Panjang Jalan(Km)	Satuan	Mantap	Tidak Mantap	Kritis	Belum Tembus
Jalan Nasional	934,55	Km	912,75	21,80	0	0
		%	97,67	2,33	0	0
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	**1.191,63**	25,25	85,45	182,10
		%	**80,28**	1,70	5,75	12,27
Jalan Kab. / Kota	5.621,81	Km	-			
		%				
Total	**8.040,79**					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 70 Data Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota se-NTB

NO	KABUPATEN/KOTA	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (KM)				KONDISI PERKERASAN								KET.
			ASPAL/ PENETRASI MAKADAM	PERKERASAN BETON	TELFORD/ KERIKIL	TANAH/ BELUM TEMBUS	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		
							KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KOTA MATARAM	61.89	61.89	-	-	-	58.39	94.34	1.53	2.47	0.45	0.73	1.53	2.47	
2	KAB. LOMBOK BARAT	124.58	124.58	-	-	-	117.18	94.06	4.64	3.72	1.00	0.80	1.76	1.41	
3	KAB. LOMBOK UTARA	9.78	9.78	-	-	-	9.78	100.00	-	-	-	-	-	-	
4	KAB. LOMBOK TENGAH	142.99	142.99	-	-	-	130.59	91.33	6.80	4.76	0.80	0.56	4.80	3.36	
5	KAB. LOMBOK TIMUR	188.92	188.92	-	-	-	185.99	98.45	2.43	1.29	0.20	0.11	0.30	0.16	
6	KAB. SUMBAWA BARAT	76.39	72.76	-	0.48	3.16	69.22	90.61	1.02	1.34	2.20	2.88	3.95	5.17	
7	KAB. SUMBAWA	367.18	230.95	-	21.76	114.47	200.53	54.61	17.60	4.79	8.60	2.34	140.46	38.25	
8	KAB. DOMPU	103.24	62.44	-	-	40.80	55.25	53.52	2.30	2.23	2.90	2.81	42.79	41.45	
9	KAB. BIMA	389.27	363.16	-	2.44	23.67	286.60	73.63	24.30	6.24	6.80	1.75	71.57	18.39	
10	KOTA BIMA	20.19	20.19	-	-	-	17.29	85.64	0.20	0.99	2.30	11.39	0.40	1.98	

NO	KABUPATEN/KOTA	PANJANG JALAN (KM)	PANJANG TIAP JENIS PERMUKAAN (KM)				KONDISI PERKERASAN								KET.
			ASPAL/ PENETRASI MAKADAM	PERKERASAN BETON	TELFORD/ KERIKIL	TANAH/ BELUM TEMBUS	BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT		
							KM	%	KM	%	KM	%	KM	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	JUMLAH PANJANG JALAN (KM)	**1,484.43**	**1,277.66**	**-**	**24.68**	**182.10**	**1,130.81**	**76.18**	**60.82**	**4.10**	**25.25**	**1.70**	**267.55**	**18.02**	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

Kemantapan Jalan provinsi tahun 2019 mencapai 80,28% dari rencana 84,65% target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2019 telah mencapai target 97,67%. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km dengan panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.277,66 Km, sehingga dari rencana 84,65% dari target yang tertuang dalam RPJMD, capaian kinerja belum tercapai karena sehingga upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Gambar 2. 11 Capaian Kinerja Kemantapan Jalan di Provinsi NTB

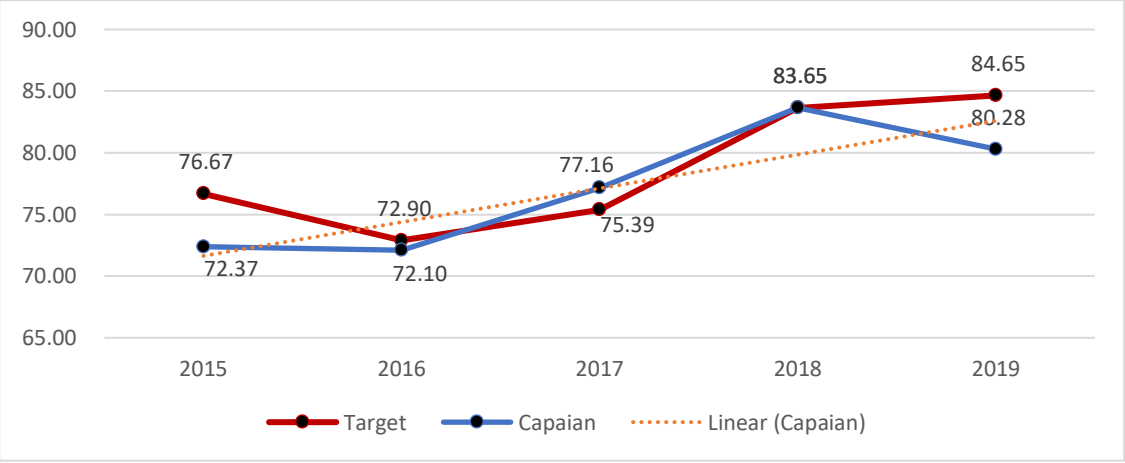

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

Selain penanganan jalan Provinsi, dilaksanakan pula penanganan ruas-ruas jalan strategis nasional sumber pendanaannya berasal dari APBN, sebagai berikut:

1. Preservasi Jalan Bandara Internasional Lombok – Kuta (Mandalika);
2. Penggantian Jembatan Luk I;
3. Penggantian Jembatan Longken dan Tampes;
4. Rekonstruksi/Preservasi Pelebaran Pemenang – Bayan – Sembalun I / KSPN/ UMYC;
5. Penggantian Jembatan Sokong A CS;
6. Preservasi Jalan Cakranegara – Mantang; Mataram – Gerung – Kuripan; Ampenan – Pemenang;
7. Rekonstruksi Ampenan – Pemenang;
8. Penanganan Abrasi Pantai Taliwang – Jereweh;
9. Preservasi Jalan PL Pototano – Simpang Negara – Taliwang – Jereweh – Benete;
10. Preservasi Jalan Simpang Negara – Bts Kota Sumbawa Besar;
11. Penanganan Abrasi Pantai SP. Negara – Bts. Kota Sumbawa;
12. Pembangunan Jembatan Gantung Brang Rope Kabupaten Sumbawa Barat;
13. Preservasi Jalan Pal. IV – KM. 70.00 – Bts Kab. Dompu (KM. 130. SBW);
14. Pembangunan Jembatan Labu Sawo;
15. Penggantian Jembatan Sori Depa I;
16. Preservasi Jalan Balibunga – Madaprama – Bts. Kab. Dompu – Dompu – Hu'u;
17. Penggantian Jembatan Sori Mila I;
18. Pembangunan Jembatan Pranda Prangga Cs;
19. Preservasi Jalan Sp. Banggo – Kempo – Kesi – Hodo – Doropati – Lb. Kenanga;
20. Preservasi Jalan Sila – Bts. Kota Bima – Raba – Sape;
21. Pembangunan Jembatan Gantung Parangina Kabupaten Bima;
22. Rehabiltasi Jalan Doropeti – Lb. Kenanga.

- **Prasarana Keciptakaryaan dan Sumberdaya Air**

Pelaksanaan kegiatan prioritas keciptakaryaan dan Sumberdaya Air dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB meliputi penanganan cakupan air minum dan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

1. Penanganan Air Minum

Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi NTB Pada Tahun 2019 mencapai 74,69% sedangkan target RPJMD sebesar 74,08 % (telah melampaui target RPJMD), Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum di Provinsi NTB pada tahun 2019 sumber dana APBD, sebagai berikut :

Tabel 2. 71 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum

NO	BANTUAN HIBAH
A	**HIBAH PIHAK KETIGA MASYARAKAT**
1	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Dusun Kelanjut Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah
2	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Minum Dsn. Lebah Munte Desa Lebah Sampage Kec. Narmada
3	Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Dusun Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lombok Barat
4	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok Dusun Belumbang Desa Mekar Sari Kec. Suela Kab. Lotim
5	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok Lingkungan Rekat Lauk Kel. Sandubaya Kec. Selong Kab. Lotim
6	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok Dusun Gunung Siup Desa Denggen Timur Kec. Selong Lotim
7	Perpipaan Air Bersih (Target : Kelompok MADA OI WAU, Lokasi : MPILI - DONGGO - Kab. Bima)
8	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target: Desa RANAN, Kec. ROPANG, - Kab Sumbawa)
9	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu (Target : Kelompok Sori Tatanga, Lokasi : PERSIAPAN SORI TATANGA - PEKAT - Kab. Dompu)
10	Pembuatan Bak Penampungan Air Beserta Perpipaan dan Mesin Penyedot Air (Target : Kelompok Masyarakat Terdampak Gempa Desa Selebung, Lokasi : SELEBUNG - BATUKLIANG UTARA - Kab. Lombok Ten)
11	Penyediaan Air Minum (Target :Kelompok Masyarakat, Lokasi : Pringgajurang Utara - Montong Gading - Kab. Lombok Timur
12	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target: Desa RHEE LOKA, Lokasi Kec. RHEE, - Kab Sumbawa)
13	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target: Desa SEBEDO, Lokasi Kec. UTAN, - Kab Sumbawa)

NO	BANTUAN HIBAH
14	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target: DUSUN AMBUNG, Lokasi: Desa MASBAGIK TIMUR -KEC LOTIM)
15	Pembanguna Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target: Desa Bunklotok Desa Batujaim Lokasi Batujai - Praya Barat-Kab LOTENG)
16	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih (Penyambungan Pipa) (Target : Kelompok Masyarakat Desa Pringgasela, Lokasi : PRINGGASELA - PRINGGASELA - Kab. Lombok Timur)
17	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih (Penyambungan Pipa) (Target : Kelompok Masyarakat Desa Korleko, Lokasi : KORLEKO - LABUHAN HAJI - Kab. Lombok Timur)
18	Sarana & Prasarana Air Bersih (Target : Irigasi Jurusan Kuburan Dusun Lendang Kantong, Lokasi : SUKAREMA - AIKMEL - Kab. Lombok Timur)
19	Penyediaan Perpipaan Air Minum (Target : Desa Gumantar Kacamatan Tanjung, Lokasi : GUMANTAR - TANJUNG - Kab. Lombok Utara)
20	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : Kelompok Masyarakat Pemakai Air Bina Karya,Dusun Kampung Karya Induk, Lokasi : AIKMEL - AIKMEL - Kab. Lombok Timur)
21	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : BP SPAMS Tandur Wangi, Lokasi : KESIK - MASBAGIK - Kab. Lombok Timur)
22	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : BP SPAMS Tandur Wangi, Lokasi : KESIK - MASBAGIK - Kab. Lombok Timur)
23	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : masjid darrussalam, Lokasi : LENDANG NANGKA - MASBAGIK - Kab. Lombok Timur)
24	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu (Target : Kelompok Masyarakat, Lokasi : NTORI - WAWO - Kab. Bima)
25	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : desa teros, Lokasi : TEROS - LABUHAN HAJI - Kab. Lombok Timur)
26	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : dusun aik prapa, Lokasi : AIK PRAPA - AIKMEL - Kab. Lombok Timur)
27	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : Desa Lembah Sempaga, Lokasi: Lembah Sempage-Narmada-Kab LOBAR)
28	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : PERPIPAAN DESA GUMANTAR, Lokasi : GUMANTAR - KAYANGAN - Kab. Lombok Utara)
29	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : DUSUN SOLOH ATAS, Lokasi : REMPEK - GANGGA - Kab. Lombok Utara)
30	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : Lingkungan Desa Gapuk, Lokasi : GAPUK - SURALAGA - Kab. Lombok Timur)

NO	BANTUAN HIBAH
31	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : dusun petak desa batujai, Lokasi : BATUJAI - PRAYA BARAT - Kab. Lombok Tengah)
32	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : dusun montung praje, Lokasi : PENGENJEK - JONGGAT - Kab. Lombok Tengah)
33	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : Dusun Gontoran, Lokasi : SESAOT - NARMADA - Kab. Lombok Barat)
34	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target : DUSUN PAMUNGA, Lokasi : USAR - PLAMPANG - Kab. Sumbawa)
35	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target : BUKIT MALAKA, Lokasi : BATUDULANG - BATULANTEH - Kab. Sumbawa)
36	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target : DUSUN LEKONG ATAS, Lokasi : LEKONG - MOYOHULU - Kab. Sumbawa)
37	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Kab. Sumbawa dan KSB (Target : SANGORO, Lokasi : LABUHAN SANGORO - MARONGE - Kab. Sumbawa)
38	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : DESA BANJAR SARI, Lokasi : BANJAR SARI - LABUHAN HAJI - Kab. Lombok Timu)
39	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : DESA TELAGA WARU, Lokasi : TELAGA WARU - PRINGGABAYA - Kab. Lombok Timur)
40	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Wilayah Lombok (Target : DUSUN EROT, Lokasi : KALIJAGA TIMUR - AIKMEL - Kab. Lombok Timur)
41	Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Ds. Pringga Jurang Kec. Montong Gading Kab. Lotim
B	**PEMBANGUNAN SPAM (PERDESAAN)**
1	SPAM Desa Teke Kec. Palibelo Kab. Bima
2	SPAM Desa Ntonggu Kec. Palibelo Kab. Bima
3	SPAM Dsn Pancor Manis Dsn Lekong Sukemulia Lotim
4	SPAM Desa Hijrah Kec. Lape Kab. Sumbawa
5	SPAM Desa Semamung Kec. Moyo Kab. Sumbawa
6	SPAM Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lotim

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

Peningkatan capaian pelayanan sistem penyediaan prasarana dan sarana air bersih (SPAM) pada setiap tahunnya diharapkan dapat

tercapai, melihat trend anggaran APBN (untuk perkotaan) terhadap program ini terus meningkat. pencapaian indikator kinerja penduduk pengguna layanan air bersih sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 72 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Yang Mendapat Akses Air Minum	Ratio (%)
1.	Lombok Barat	694.985	644.529	92,74
2.	Lombok Tengah	947.488	842.696	88,94
3.	Lombok Timur	1.200.612	1.159.431	96,57
4.	Sumbawa	457.671	407.007	88,93
5.	Dompu	252.288	247.167	97,97
6.	Bima	488.577	481.688	98,59
7.	Sumbawa Barat	148.606	136.718	92,00
8.	Lombok Utara	220.412	195.285	88,60
9.	Kota Mataram	486.715	485.158	99,68
10.	Kota Bima	173.031	169.172	97,77
Jumlah		5.070.385	4.768.851	94,05

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

a) Prasarana SDA

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air baku dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar se-Provinsi NTB menjadi kegiatan strategis selain kegiatan pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir yaitu perkuatan tebing sungai. Kegiatan pada tahun 2019 antara lain: Pembangunan irigasi sepanjang ± 54 km, rehabilitasi saluran sepanjang 10 km. pemasangan talud/ bronjong sepanjang 3.265 m, penurunan titik banjir pada 466 titik. Dan pembangunan dan rehabilitasi embung untuk kapasitas tampung ±1.969 m3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha. Di Pulau Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km dengan luas areal irigasi 6.334 Ha

Daerah Irigasi yang pelaksanaan pembangunannya melalui dana APBD meliputi Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jaringan Irigasi di Pulau Sumbawa sebanyak 4 Jaringan Irigasi. Untuk Rehabilitasi jaringan irigasi melalui pendanaan DAK antara lain :

- DI Kalimantong I (0,525 Km)
- DI Maronggek Komplek Kab.Lotim (3,623 Km)
- DI RUTUS (3,375 Km)
- DI Santong (5,404 Km)
- DI Belanting (2,403 Km)

Untuk peningkatan jaringan irigasi melalui pendanaan IPDMIP antara lain :

- Jaringan Irigasi DI Renggung (0,75 Km)
- Jaringan Irigasi DI Sumi Sape (0,61 Km)
- Jaringan Irigasi DI Gde Bongoh (1,3 Km)
- Jaringan Irigasi DI Sambelia (0,75 Km)
- Jaringan Irigasi DI Madapangga II (0,9 Km)
- Jaringan Irigasi DI latonda Pekat (0,7 Km)

Prasarana Sumber Daya Air yang ada di Provinsi NTB pada tahun 2019 mampu mendukung upaya produksi padi sebanyak 2,5 juta ton/tahun. Untuk mendukung peningkatan produksi pangan di Provinsi NTB, telah dibangun dan diresmikan Bendungan Tanju dan Bendungan Mila Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Dompu dan Bima.

Sedangkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air dengan sumber pembiayaan APBN tahun 2019 sebagai berikut.

1. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I) (MYC);
2. Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket II) (MYC);
3. Supervisi Pembangunan Bendungan Beringin Sila (Paket I & II) (MYC);
4. Pembangunan Bendungan Meninting (Paket I) (MYC);
5. Pembangunan Bendungan Meninting (Paket II) (MYC);
6. Supervisi Pembangunan Bendungan Meninting (MYC);
7. Pembangunan Embung Serbaguna Bajak;
8. Pembangunan Embung Serbaguna Tembowong;
9. Pembangunan Embung Serbaguna Ompokaloi;
10. Pembangunan Embung Serbaguna Soka;
11. Pembangunan Embung Serbaguna Tebo;

12. Penyelesaian Pembangunan Bendung Pengalih Rababaka dan Saluran Interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Rababaka Kompleks) Paket II (MYC);
13. Supervisi Penyelesaian Pembangunan Bendung Pengalih Rababaka dan Saluran Interbasin untuk Bendungan Tanju dan Bendungan Mila (Rababaka Kompleks) Paket II (MYC);
14. Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku;
15. Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku;
16. Pengeboran Sumur Air Tanah Untuk Air Minum Pada Daerah Kekeringan;
17. Peningkatan Jaringan Sumur Bor Untuk Air Baku;
18. Pembangunan Penyediaan Air Tanah Untuk Air Baku Pada Daerah Kekeringan;
19. Peningkatan Penyediaan Air Baku Sumber Mata Air 2 Lokasi;
20. Pembangunan Sumur Eksplorasi/Produksi;
21. Pembangunan JIAT dan Fasilitas Lainnya;
22. Rehabilitasi JIAT Serta Prasarana Pendukung Lainnya Tersebar di Pulau Sumbawa;
23. Rehabilitasi JIAT Serta Prasarana Pendukung Lainnya Tersebar di Pulau Lombok;
24. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Bintang Bano (Paket I) (MYC);
25. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Bintang Bano (Paket II) (MYC);
26. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Bintang Bano(Paket III) (MYC);
27. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Bintang Bano(Paket IV) (MYC);
28. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak;
29. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak;
30. Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak;
31. Pembangunan Irigasi DI. Rababaka Kompleks (Areal Irigasi Tanju Kiri);
32. Pembangunan Irigasi DI. Rababaka Kompleks (Areal Irigasi TanjuKanan);
33. Penanganan Banjir Kota Bima;
34. Pembangunan Perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Brangbiji;
35. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Sungai Belanting;
36. Pembangunan Sabo Dam dan Normalisasi Sungai Beburung Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai/Brang biji di Kabupaten Sumbawa.

b) Pembangunan Jalan dan Jembatan;

Kemantapan Jalan Provinsi tahun 2019 mencapai 80,28% dari rencana 84,65% target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2019 telah mencapai target 97,67%. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km dengan panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.277,66 Km, sehingga dari rencana 84,65% dari target yang tertuang dalam RPJMD, capaian kinerja belum tercapai karena sehingga upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

c) Konservasi Sumber Daya Air;

Kegiatan pada tahun 2019 antara lain: Pembangunan irigasi sepanjang ± 54 km, rehabilitasi saluran sepanjang 10 km. pemasangan talud/ bronjong sepanjang 3.265 m, penurunan titik banjir pada 466 titik. Dan pembangunan dan rehabilitasi embung untuk kapasitas tampung ±1.969 m3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 12 DI dengan panjang saluran 156,71 Km dengan luas areal irigasi 57.628 Ha. Di Pulau Sumbawa pada 10 DI sepanjang 9,24 Km dengan luas areal irigasi 6.334 H

d) Pengembangan Sistem Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum;

Capaian Akses Air Minum Layak di Provinsi NTB Pada Tahun 2019 mencapai 74,69 % sedangkan target RPJMD sebesar 74,08 % (telah melampaui target RPJMD).

- **Urusan Penataan Ruang**

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis provinsi diperlukan tertib penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang telah dilakukan pembinaan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga konsistensi antara rencana Tata Ruang dan implementasi.

Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun waktu tahun 2019 menangani 2 kasus indikasi pelanggaran. Tim TKPRD yang dibentuk sudah melakukan kajian dan pembahasan terhadap 57 ijin yang masuk dari kabupaten/ kota terkait dengan pemanfaatan tata ruang, dari hasil pembahsan ini mengeluarkan 30 surat rekomendasi, 23 masih dalam

proses, dan 4 tidak dapat diproses (dikembalikan ke kabupaten/ kota untuk pembahsannya)

Tahun 2019 hanya memiliki 1 kegiatan yaitu perbaikan materi teknis dan album peta RTR KSP Senggigi 3 Gili.

Tabel 2. 73 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Terdapat beberapa kegiatan yang kegiatan perencanaan/DED dilaksanakan pada tahun yang sama dengan pelaksanaan fisik konstruksi	Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan, terutama paket-paket pekerjaan yang memerlukan proses tender di ULP
Regulasi pelanggaran tata ruang belum diterapkan secara optimal.	Pemberian ijin pemanfaatan ruang oleh pihak yang berwenang harus berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi terhadap pelanggaran tata ruang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.	Meningkatkan peran TKPRD dan PPNS dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang
Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam program pemanfaatan ruang	Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
Belum sepenuhnya RTRWP NTB menjadi acuan secara optimal dalam penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	Meningkatkan kemampuan perencana dan pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, guna menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dan efektif

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang Perumahan dan Permukiman dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang juga merupakan program unggulan dari Dinas Perumahan dan Permukiman, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 74 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017		2018		2019	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.073	1.081	2.423	2.171	225	212

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.

Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan pembangunan perumahan diarahkan untuk:

a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia;

b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan;
c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna;
d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan
e. mendorong iklim investasi asing.

Rumah yang layak huni menurut penjelasan pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dalam definsi lain, Sebuah rumah dikatakan layak huni jika kualitas atap, dinding dan lantainya baik, alat penerangan yang bersumber dari listrik serta memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik.

Untuk memenuhi kriteria rumah layak huni terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), merupakan hal yang sulit disamping keterbatasan biaya dalam membangun rumah yang layak, ada kebutuhan pokok lain yang harus dipenuhi. Untuk itu, dalam menangani permasalahan terkait rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), perlu dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak Huni, yang bertujuan terbangunnya rumah yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Layak Huni secara substansial untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Pembangunan RLH bagi Masyarakat Miskin dan sangat miskin (berdasarkkan data Desil 1 dan 2, BPS, TNP2K, BDT dan BDP).

Berdasarkan kriteria rumah layak huni, maka masih terdapat banyak rumah tidak layak huni. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rumah rumah tidak layak huni di Indonesia hingga akhir 2019 menjadi 1,9 juta unit, sementara di Provinsi NTB menurut data Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB bahwa persentase rumah layak huni baru mencapai 92,02% artinya masih terdapat 7,99% rumah tidak layak huni atau sekitar 113.643 unit dari total 1.422.318 unit rumah di NTB. Cakupan penanganan rumah tidak layak huni tahun 2019

sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 belum mencapai target yaitu 92,37%.

Pada tahun 2018 penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB diprioritaskan untuk menangani rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan seperti kelengkapan administrasi, kondisi rumah yang dilihat dari kondisi atap, lantai dan dinding (aladin) sedangkan untuk penanganan rumah akibat bencana alam/sosial dengan kriteria rumah rusak berat dan harus sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT). Untuk tahun 2019 capaian penanganan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 212 unit dari target 225 unit. Angka ini tidak melampaui target karena terjadi pembiayaan yang sama yang bersumber dari APBN untuk sasaran yang sama. Selain bersumber dari dana APBD Provinsi penanganan RTLH juga dilakukan oleh kabupaten kota melalui APBD Kabupaten/kota (termasuk dana DAK) dan pemerintah pusat melalui dana APBN sehingga total RTLH yang tertangani di Provinsi NTB sebanyak 8.689 RTLH. Data penanganan RTLH yang bersumber dari APBD provinsi kurun waktu tahun 2017-2019 di kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 75 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB Tahun 2018 – 2019

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	2017	2018	2019	
					Target	Realisasi
1	Kota Mataram	Unit	32	110	-	-
2	Lombok Barat	Unit	160	291	29	25
3	Lombok Tengah	Unit	208	444	15	15
4	Lombok Utara	Unit	76	108	18	12
5	Lombok Timur	Unit	217	651	98	98
6	Sumbawa Barat	Unit	52	61	3	-
7	Sumbawa	Unit	96	156	52	52
8	Dompu	Unit	72	81	-	-
9	Kabupaten Bima	Unit	121	176	10	10
10	Kota Bima	Unit	47	93	-	-
Jumlah		**Unit**	**1.081**	**2.171**	**225**	**212**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

Salah satu amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2011 adalah penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh, lebih lanjut ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 yang dimaksudkan Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Sementara itu Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian sedangkan Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sehingga dirasakan perlu dilakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman dan dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat selanjutnya penetapan lokasi ditetapkan oleh bupati/walikota. Tahap selanjautnya adalah kesesuaian terhadap standar teknis berupa a) bangunan gedung; b) jalan lingkungan; c) penyediaan air minum; d) drainase lingkungan; e) pengelolaan air limbah, f) pengelolaan persampahan dan g. proteksi kebakaran.

Luas kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikta se NTB adalah 6.664,35 Ha yang tersebar di 9 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2019 baru seluas 18,10 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 76 Luas Kawasan Kumuh Dan Capaian Kawasan Kumuh yang Tertangani Tahun 2019

No.	Kabupaten/kota	Tahun 2019	
		Luas kawasan (Ha)	Kawasan Tertangani (Ha)
1.	Kota Mataram	805,66	3.44
2.	Lombok Barat	221,42	1.85
3.	Lombok Utara	0	0
4.	Lombok Tengah	110,56	0.45
5.	Lombok Timur	1.387,70	8.54
6.	Sumbawa Barat	85,92	0
7.	Sumbawa	340	0.65
8.	Dompu	2.928	0.09
9.	Kabupaten Bima	755,69	2.50
10.	Kota Bima	29,4	0.50
	Jumlah	**6.664,35**	**18,1**

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target RPJMD untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni selama tahun 2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 77 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Lokasi pembangunan perumahan yang bervariasi dengan jarak jangkau berbeda sementara pagu anggarannya sama, menyebabkan kurang efektifnya dalam pelaksanaan pembangunan.	Diperlukan keterlibatan aparat desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelsaian pekerjaan.
Terjadi perubahan lokasi pembangunan perumahan dan permukiman dari usulan awal yang direncanakan	Verifikasi dan validasi terhadap usulan pembangunan perumahan dan permukiman berbasis elektronik dan spasial.
Terbatasnya kemampuan pembiayaan daerah untuk mendukung kegiatan tersebut	Mengajukan usulan ke pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan tersebut
Terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan	Tidak menganggarkan kegiatan fisik pada APBD perubahan

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang diselenggarakan bertujuan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang tentram, tertib sesuai dengan norma dan ketentuan bermasyarakat untuk menuju kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera.

Urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diselenggarakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2019-2023 yaitu Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka pendidikan karakter. Dan yang menjadi program unggulan atau prioritas adalah Desa Bersih Narkoba (Bersinar) capaian kinerja dapat diukur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 78 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2019

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN					
		2017		2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka pendidikan Karakter.	%	0	0	0	0,41	10	10 / 60 komunitas
Terwujudnya Desa Bersinar (Bersih Narkoba)	Desa	0	0	0	0	10	14
Penurunan Konflik Sosial	Kasus	32	21	27	13	24	7

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019

- **Sekolah Perjumpaan**

Capaian indikator Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter dengan target 10% yang diampu oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dapat dicapai 10% atau 60 komunitas, kegiatan yang dilakukan merupakan pembelajaran berbasis komunitas dengan mempraktikkan nilai-nilai kehidupan yang baik secara langsung yang dilandasi nilai-nilai kearifan lokal. Kegiatan pengembangan sekolah perjumpaan dilatar belakangi adanya kegelisahan tentang kondisi sosial dimana kurangnya saling menghargai antar sesama, rentannya terjadi perselisihan yang disebabkan hanya persoalan kecil, anak-anak remaja tidak lagi mempedulikan nilai-nilai moral dan etika, terjadi banyak penyimpangan tapi tidak ada yang mempedulikan dan banyak hal lainnya.

Sekolah Perjumpaan diharapkan menjadi wadah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah bersama dalam kehidupan sosial. Anggota komunitas mulai dari anak-anak sampai orang dewasa terutama lintas etnis, semua anggota komunitas berlaku sebagai murid sekaligus sebagai guru. Materi pembelajaran adalah mengelola perasaan atau suasana kebatinan, menggunakan bahasa untuk berekspresi yang dilandasi kejujuran dan keikhlasan, menekankan pada komitmen untuk setiap bertindak, berkata dan berperilaku sesuai dengan perasaan. Kegiatan pengembangan Sekolah perjumpaan dimulai tahun 2017 dan sampai dengan 2019 sudah terbentuk 60 komunitas di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat.

- **Desa Bersinar (Bersih Narkoba)**

Mewujudkan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) adalah merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 10 Desa, realisasinya tercapai 10 desa. Hal ini sebagai upaya untuk membentengi dan mengantisipasi generasi muda dan anak-anak bangsa dari pengaruh penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sasaran dari peredaran narkoba tidak terbatas di perkotaan saja, namun masyarakat pedesaan saat ini menjadi tempat tujuan peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019, melalui Bakesbangpoldagri mengawali inisiasi melawan narkoba dalam bentuk Program Desa/Kelurahan Bersinar (Desa/Kelurahan Bersih dari Narkoba) dengan hasil 14 Desa/Kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai Desa/Kelurahan Bersinar, terdiri dari : 10 Desa/Kelurahan merupakan Program Desa/Kelurahan Bersinar yang diinisiasi dari Pemerintah Provinsi, sementara 4 Desa/Kelurahan lainnya merupakan pengembangan dari Kabupaten/Kota melalui APBD-nya masing-masing, yaitu Desa Pasir

Putih di Kabupaten Sumbawa Barat, Desa Lembar, Desa Taman Ayu dan Desa Labuapi di Kabupaten Lombok Barat. Pelaksanaan program Desa/Kelurahan Bersinar selain mampu memberi efek yang positif bagi Pemerintah Daerah, juga mampu menggugah hati pengguna narkoba itu sendiri.

- **Penurunan Jumlah Konflik Sosial**

Secara umum kondisi keamanan di Provinsi NTB semakin terkendali dan konflik sosial dapat di tekan setiap tahunnya. Seperti yang tersaji pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 target 32 kasus, dengan realisasi 21 kasus, tahun 2018 target 27 kasus, realisasi 13 kasus dan pada 2019 ditargetkan 24 kasus, realisasi 7 kasus, berarti konflik yang terjadi di Provinsi NTB menurun secara signifikan dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Karena pernyataan indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin kecil capaian kinerja (realisasi) dibandingkan dengan target, berarti itu menunjukkan tingkat capaian kinerja yang lebih baik. Tahun 2019 potensi konflik yang terjadi di Provinsi NTB dipicu oleh konflik sosial budaya dan terkait dengan batas wilayah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 79 Konflik Sosial yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	LATAR BELAKANG KONFLIK						JMLH KASUS	KET.
		POLITIK	EKONOMI	SOSIAL BUDAYA	SARA	BATAS WILAYAH	HANKAM		
1.	Kota Mataram	-	-	2	-	-	-	2	Vertikal = 0
2.	Lombok Barat	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Lombok Tengah	-	-	-	-	1	-	1	Horisontal = 7
4.	Lombok Timur	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Lombok Utara	-	-	-	-	-	-	-	Sumber:
6.	Sumbawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	Kominitas Jejaring Kab/Kota se-NTB POLDA NTB
7.	Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Dompu	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Bima	-	-	2	-	-	-	2	
10.	Kota Bima	-	-	2	-	-	-	2	
	Jumlah	**-**	**-**	**6**	**-**	**1**	**-**	**7**	

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019

Beberapa hal menjadi pendorong tercapainya indikator kinerja penurunan konflik sosial di NTB sebagai berikut:

a. Makin meningkatnya kesigapan dan kerjasama antara Pimpinan Daerah baik di tingkat provinsi (Forkopimda NTB) maupun pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota (Forkopimda kabupaten/kota se-NTB) dalam mengatasi dan menindaklanjuti berbagai isu konflik sosial;
b. Makin meningkatnya sinergitas dengan mitra Bakesbangpoldagri NTB seperti FKDM, Jejaring Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) NTB, FPK, FKUB, Bale Mediasi, dan PPWK;
c. Makin meningkatnya sinergitas dan kesigapan lintas OPD yang tergabung dalam Tim Terpadu Penagnanan Konflik Sosial (Timdu PKS) baik instansi vertikal maupun daerah;
d. Meningkatkanya kesadaran masyarakat Provinsi NTB dalam menyikapi setiap isu yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 80 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Rendahnya kesadaran politik masyarakat	Melakukan pembinaan secara terus menerus.

Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2019

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28G Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Variabel yang digunakan untuk mengetahui rasa aman cukup luas, dapat mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial dan ekonomi.Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, seperti jumlah korban kejahatan,

jumlah kejadian kejahatan dan jumlah perkelahian massal. Indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman berkorelasi dengan semakin tinggi angka kriminalitas yang menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan ditengah tengah masyarakat.

Untuk menentukan indeks kriminalitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat formula yang digunakan adalah membandingkan jumlah tindak kriminal selama satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2019 jumlah kejahatan yang dilaporkan mencapai 6.427 kasus dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 yang mencapai 5.054.670 jiwa maka Indeks kriminaltias di NTB sebesar 12,71.

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB, pada Tahun 2019 Indeks Kriminalitas di Provinsi NTB diperkirakan sebesar 16,45, dan realisasi Indeks Kriminalitas Tahun 2019 yang mencapai 12,71 menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang terjadi jauh dibawah yang di perkirakan. Dari 6.427 kasus kejahatan di Tahun 2019 yang dilaporkan telah diselesaikan sebanyak 3.896 kasus atau 60,62%. Jumlah kasus yang dilaporkan dan yang telah diselesaikan Tahun 2019 berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada grafik berikut

Gambar 2. 12 Jumlah Kasus Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019

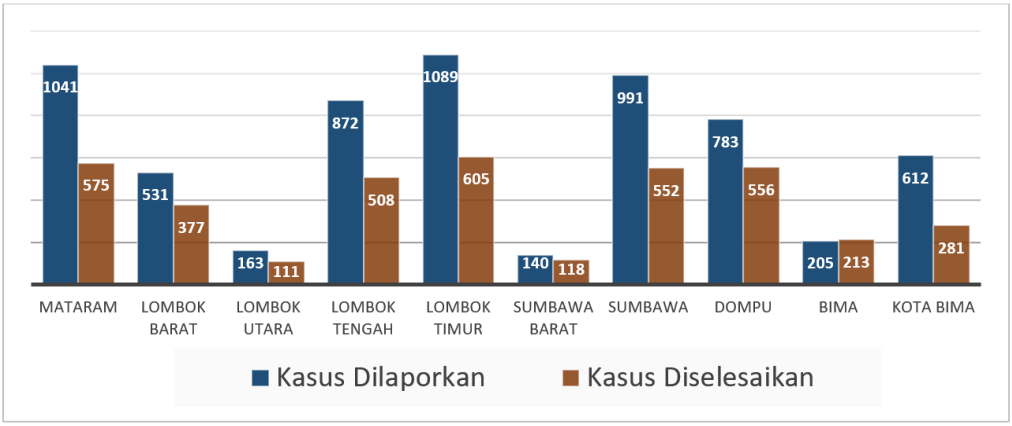

Sumber : Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, 2019

Jumlah kejahatan yang dilaporkan (crime total) tahun 2019 sebesar 6.427 kasus mengalami penurunan sebesar -26,44% jika dibandingkan jumlah kejahatan yang dilaporkan (crime total) pada tahun 2018 yang mencapai 8.737 kaus. Jumlah kasus yang dilaporkan (crime total) dan yang telah diselesaikan (crime cleared) tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 81 Jumlah Kasus yang Dilaporkan (crime total) dan Diselesaikan (crime cleared) Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Kesatuan	Tahun 2018			Tahun 2019 (JAN S/D OKT)			Trend (%)	
		CT	CC	%	CT	CC	%	CT	CC
1	Mataram	1267	707	55,80	1041	575	55,24	-17,84	-18,67
2	Lombok Barat	899	659	73,30	531	377	71,00	-40,93	-42,79
3	Lombok Utara	186	128	68,82	163	111	68,10	-12,37	-13,28
4	Lombok Tengah	1083	726	67,04	872	508	58,26	-19,48	-30,03
5	Lombok Timur	1469	824	56,09	1089	605	55,56	-25,87	-26,58
6	Sumbawa Barat	179	149	83,24	140	118	84,29	-21,79	-20,81
7	Sumbawa	1485	933	62,83	991	552	55,70	-33,27	-40,84
8	Dompu	978	685	70,04	783	556	71,01	-19,94	-18,83
9	Bima	371	255	68,73	205	213	103,90	-44,74	-16,47
10	Kota Bima	820	328	40,00	612	281	45,92	-25,37	-14,33
Jumlah		**8.737**	**5.394**	**61,74**	**6.427**	**3.896**	**60,62**	**-26,44**	**-27,77**

Sumber : Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, 2019

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai unit kerja yang menyelenggarakan urusan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2023 memiliki dua indikator kinerja daerah yaitu Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas. Adapun capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 82 Capaian Indikator RPJMD Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019

INDIKATOR	SATUAN	2018	2019		TARGET 2018
			TARGET	REALISASI	
Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	100	100	100	100
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2019

Pada tahun 2019 pelanggaran terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat berjumlah 9Perda/Pergub/peraturan Perundang-undangan lainnya terdiri dari 5 Peraturan Daerah, 2 Peraturan Gubernur dan 2 buah Undang-Undang RI dengan jumlah kasus sebanyak 18 kasus.

Pelanggaran yang terjadi seluruhnya telah ditangani sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Capaian program penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator persentase penanganan pelanggaran produk hukum daerah dan Tingkat Penyelesaian Kamtrantibmas telah dapat ditangani dengan baik dan mencapai 100 persen dari target 100 persen pada RPJMD. Penanganan pelanggaran Perda dan ketertiban umum di Provinsi NTB serta pengawalan terhadap kebijakan daerah yang dilakukan Satpol PP Provinsi NTB tahun 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 83 Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan Kebijakan Daerah Lainnya Tahun 2019

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT / PENANGANAN
1.	Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan	2 Kasus	1 Penggunaan Trotoar dan Bahu Jalan sebagai Lokasi menggelar Barang dagangan PKL	Terjaring 6 orang pedagang yang sedang berjualan dipinggir jalan dijalan majapahit dengan menggunakan mobil dan grobak dorong	- Melakukan pendataan terhadap para pedagang kali lima - Memberikan peringatan tegas untuk tidak melakukan aktivitas perdagangan yang

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT / PENANGANAN
			2 Menghalangi Pejalan Kaki	dan sebagian menggelar jualannya di diatas trotoar.	melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - Memindahkan pedagang yang berjualan ditrotoar ke belakang taman sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan pejalan kaki
2.	Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 kasus	Berada di Luar sekolah di saat jam pelajaran berlangsung	Terjaring 75 orang pelajar sedang berada diluar sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung.	Dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan BAP dan pembinaan setalah itu dikembalikan ke sekolah masing-masing
		1 kasus	Berjualan pada siang hari pada saat bulan puasa	Ditemukan 26 Warung makan yang buka pada siang hari pada bulan puasa	Dilakukan pendataan, peringatan dan penutupan warung makan
3.	Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2017 tentang Cukai	2 kasus	1. Memiliki Tembakau Ilegal 2. Menjual/ Mengedarkan Tembakau Ilegal	Ditemukan 426 bungkus tembakau iris kemasan tanpa dilekati pita cukai	Dilakukan pendataan, BAP dan barang sitaan sebagai diamankan d Kantor Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram dan sebagian di Kantor Satpol PP
4.	Pergub. NTB No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Perda NTB No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi NTB	4 kasus	1. Tidak Apel Pagi 2. Meninggalkan Jam Kerja 3. Tanpa Keterangan 4. Berada diluar Kantor pada saat jam kerja	Ditemukan 830 ASN yang indisipliner terdiri dari : - 474 orang Tanpa Apel Pagi (TAP) - 331 orang Meninggalkan Jam Kerja (MJK) - 23 orang Tanpa Keterangan (TK) - 2 orang berada diluar kantor pada saat jam kerja	- Dilakukan Rekapitulasi ketidakhadiran - Hasil Rekapitulasi dikirim ke masing-masing OPD untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pembinaan internal - Melakukan pemanggilan terhadap ASN tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 kali berturut-turut untuk dilakukan pembinaan oleh Gubernur selaku Pembina ASN
5.	Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	1 Kasus	Menggunakan Narkotika	Terjaring 7 (tujuh) orang Postif Narkoba	Dilakukan Tes Urin dan BAP selanjutnya di bawa ke Kantor BNNP untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT / PENANGANAN
6.	- Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Orang - Perda Prov. NTB No. 2 Thn 2009 ttg Penyelenggaraa, Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan	2 Kasus	1. Tindak Asusila 2. Tidak Memiliki Identitas	- Terjaring 41 pasang bukan muhrim sedang berada didalam kamar tanpa surat nikah dan dan diduga melakukan tidak asusila - Terjaring 33 orang sedang berada di café tanpa identitas berupa KTP/SIM	- Pelaku dibawa ke Kantor Satpol PP Prov NTB untuk didata dan diberi peringatan serta pembinaan - Diminta Wajib Lapor ke Kantor Satpol PP Prov. NTB.
7.	Perda No. 4 Tahun 1997 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	3 Kasus	1. Memiliki/Menyimpan Minuman Beralkohol 2. Menjual/Mengedarkan Minuman Beralkohol tanpa izin 3. Mengkonsumsi minuman beralkohol	Terjaring 385 botol dan 3 jerigen minuman beralkohol terdiri dari : - 29 botol Bir Bintang - 97 botol brem - 259 botol dan 3 jerigen tuak	Dilakukan penyitaan terhadap barang bukti dan dibawa ke Kantor Satpol PP Provinsi NTB untuk dimusnahkan.
8.	Pergub No. 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja PNS Lingkup Pemprov. NTB Pasal 6 ayat (4) tentang Larangan berada pada lokasi hiburan dan atau tempat yang tidak layak bagi PNS	2 Kasus	1. Berada di tempat hiburan malam (café) 2. Membawa Senjata Api	- Terjaring 20 orang ASN sedang berada didalam Café - Terjaring 1 orang ASN membawa Senjata Api tanpa izin	- Dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan, BAP serta pembinaan. - Bagi ASN yang membawa senjata api diserahkan ke Polres Mataram untyk ditindaklanjuti.

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2019

Terjaminnya rasa aman di masyarakat akan menciptakan suasana yang kondusif untuk masyarakat dapat melakukan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Rasa aman yang terjamin di masyarakat dalam skala luas akan menciptakan stabilitas daerah sebagai salah satu prasayarat bagai berjalannya dengan baik program-program pembangunan oleh pemerintahan.

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan selama berlangsungnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 84 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Semakin meningkatnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena kurangnya kesadaran, kepatuhan serta partisipasi masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	• Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Tibumtran dan Penegakan perda. • Memfasilitasi Peningkatan peran dan fungsi PPNS lingkup provinsi NTB • Membuat MoU antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se-NTB dalam rangka penegakan/penertiban Perda/Pergub dan Peraturan Lainnya. • Melakukan pengamanan dan penertiban gabungan yang melibatkan aparat terkait dan Pol PP kabupaten/kota dibawah koordinasi Pol PP Provinsi secara berkesinambungan. • Mengembangkan SMS Pengaduan Pelanggaran Perda dan Keteriban Umum melalui NTB *Care*

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB, 2019

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Implementasi dari amanat alinea ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dengan dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan yang

disebabkan oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Sementara bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. NTB secara georafis, hidrologis, klimatologis, oceanografis dan topografis wilayah, sebagian besar wilayah NTB tergolong rawan bencana karena hampir seluruh (14 jenis) potensi bencana yang ada di Indonesia, 11 diantaranya terdapat diwilayah NTB, terutama diwilayah pegunungan dan di pesisir pantai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis tentang Penanggulangan Bencana. Sementara itu Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi: a) pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan; b)perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan dan pemenuhan masyarakat dan hak pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dan siap pakai; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Mengantisipasi kondisi tersebut Pemerintah Daerah NTB melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, pemerintah provinsi NTB membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB yang merupakan garda terdepan dalam penanggulangan bencana di daerah yang mencakup strategi preventif, tanggap darurat pada saat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi secara terkoordinasi. Untuk mengantisipasi kondisi-

kondisi ekstrem seperti kondisi alam yang saat ini tidak dapt diprediksi dan berubah dalam waktu cepat akibat pemanasan global, menjadi tantangan tersendiri bagi BPBD agar jatuhnya korban jiwa dapat dihindari. Sepanjang tahun 2019 tercatat beberapa bencana yang terjadi di Provinsi NTB.

- **Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

  Sebaran bencana yang terjadi di Provinsi NTB selama kurun waktu satu tahun (2019) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 85 Jenis Bencana, Lokasi, Waktu, Kerusakan dan Korban Akibat Bencana Tahun 2019

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
1.	Kebakaran Toko	Cakranegara, Kota Mataram	2 Januari 2019 (03.00 WITA)		
2.	Puting Beliung	Desa Persiapan Tibu, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah	2 Januari 2019 (18.20 WITA)		100 jiwa terdampak, 1 orang luka ringan
3.	Gempa Bumi (5,2 SR)	Sumbawa Region	2 Januari 2019 (22.06 WITA)		
4.	Banjir Bandang	Desa Lamunga, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	3 Januari 2019 (15.10 WITA)	1 unit Bendungan	
5.	Banjir Bandang	Empang, Kab. Sumbawa	4 Januari 2019 (22.30 WITA)		1000 jiwa terdampak
6.	Banjir	Desa Bada, Desa Bali I, Desa Karijawa, Kab. Dompu	11 Januari 2019 (17.00 WITA)		
7.	Banjir	Desa Ragi, Kab. Bima	14 Januari 2019 (12.40 WITA)		
8.	Banjir	Desa Langam, Kec. Lopok Desa Brang Bara, Desa Brang Biji, Desa Kampung Bajo, Desa Kali Baru, Desa Karang Padak, Kec. Lab Badas, Kab. Sumbawa			
9.	Puting Beliung	Kec. Brang Rea, Kec. Taliwang, Kec. Seteluk, Kab. Sumbawa Barat	17 Januari 2019 (14.25 WITA)	3 unit rumah rusak berat, 2 rusak sedang, 1 rusak ringan	24 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
10.	Banjir Rob	Desa Gondang, Desa Genggelang, Desa Gangga, Kab. Lombok Utara	22 Januari 2019 (12.00 WITA)		168 jiwa terdampak
11.	Putting Beliung	Desa Pejeruk, Desa Pejanggik, Kec. Ampenan, Kota Mataram	22 Januari 2019 (19.00 WITA)	3 unit rumah rusak berat, 9 rusak ringan	48 jiwa terdampak
12.	Putting Beliung	Desa Beleke, Desa Lebesane, Desa Jeropuri, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah	23 Januari 2019 (00.00 WITA)		
13.	Banjir	Desa Batu Jangkih, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah	23 Januari 2019 (00.00 WITA)		
14.	Banjir Rob	Desa Kore, Kec. Sanggar, Kab. Bima	23 Januari 2019 (03.00 WITA)		
15.	Putting Beliung	Desa O'o, Kec. Donggo, Kab. Bima	23 Januari 2019 (03.00 WITA)		
16.	Banjir Rob	Desa Lab Badas, Kab. Sumbawa	23 Januari 2019 (10.00 WITA)		
17.	Kebakaran		23 Januari 2019 (15.00 WITA)		
18.	Gempa Bumi (6.0 SR)	South of Sumbawa	23 Januari 2019 (18.39 WITA)		
19.	Putting Beliung	Desa Ai Kangkung, Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat	23 Januari 2019 (01.15 WITA)	1 unit rumah rusak berat, 1 rusak sedang, 1 rusak ringan	12 jiwa terdampak
20.	Putting Beliung	Desa Lab Lalar, Desa Talaga Bertong, Desa Dalam, Desa Lalar Liang, Desa Bugis, Desa Kertasari, Desa Batu Putih, Kec. Taliwang Desa Goa, Desa Dasan Anyar, Kec. Jereweh Desa Benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Pasir	24 Januari 2019 (19.00 WITA)	12 unit rumah rusak sedang, 27 unit rusak ringan	76 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
		Putih, Desa Mantun, Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat			
21.	Putting Beliung	Desa Telaga Lebur, Kec. Sekotong Desa Sedayu, Kec. Kediri Desa Midang, Kec. Gn Sari Desa Senggigi, Kec. Batu Layar, Kab. Lombok Barat	24 januari 2019 (15.30 WITA)	7 unit rumah rusak berat	36 jiwa terdampak
22.	Putting Beliung	Desa Empang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa	24 Januari 2019 (18.00 WITA)	4 unit rumah rusak berat, 15 rusak ringan, 2 unit fasdik	17 jiwa terdampak
23.	Putting Beliung	Desa Banjar Sari, Kec. Lab Haji Desa Moyot, Kec. Sakra Kab. Lombok Timur	24 januari 2019		11 jiwa terdampak
24.	Tanah Longsor	Desa Hu'u, Desa Goa, Kec. Hu'u, Kab. Dompu	24 Januari 2019	Ruas jalan sepanjang 10 m	
25.	Putting Beliung	Desa Bintaro, Desa Pagutan, Desa Sayang – Sayang, Kota Mataram	24 Januari 2019 (06.00 WITA)	1 unit rumah rusak berat, 2 rusak sedang, 1 rusak ringan	16 jiwa terdampak
26.	Putting Beliung	Desa Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram	26 Januari 2019 (15.00 WITA)	3 unit rumah rusak sedang	12 jiwa terdampak
27.	Kebakaran Pemukiman	Mataram Timur, Mataram	1 Februari 2019 (09.30 WITA)	1 unit rumah rusak ringan	4 jiwa terdampak
28.	Tanah Longsor	Desa Rarak, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	5 Februari 2019 (15.30 WITA)	Ruas jalan sepanjang 10 m	
29.	Banjir Bandang	Desa Timbe Gading, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur	9 Februari 2019 (17.00 WITA)		
30.	Banjir	Desa Rhee, Kab. Sumbawa	11 Februari 2019 (08.30 WITA)		124 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
31.	Kebakaran Pemukiman	Desa Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram	19 Februari 2019 (05.00 WITA)	1 unit rumah rusak berat	5 jiwa terdampak
32.	Banjir	Desa Darek, Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah	28 Februari 2019 (14.00 WITA)		248 jiwa terdampak
33.	Putting Beliung	Desa Manemeng, Kec. Brang Ene, Kab. Sumbawa Barat	28 Februari 2019 (14.15 WITA)	3 unit rumah rusak berat, 24 rusak sedang dan 1 unit kios	108 jiwa terdampak
34.	Banjir	Desa Boro, Desa Piong, Desa Oi Saro, Kec. Sanggar Desa Sakuru, Kec. Monta Kab. Bima	16 Maret 2019 (14.00 WITA)	15 unit rumah rusak berat, 25 rusak ringan, 60 unit terendam, 1 faskes, 3 unit jembatan, 1 bendungan	1640 jiwa terdampak
35.	Gempa Bumi (5,4 SR)	Montong Gading, Aikmel, Lenek, Wanasaba, Sikur, Sembalun, Sambelia, Masbagik, Sukamulia, Pringgasela, Terara, Kab. Lombok Timur Bayan, Kab. Lombok Utara	17 Maret 2019 (14.07 WITA)	876 unit rumah rusak berat, 1617 rusak sedang, 2096 rusak ringan 50 unit faskes	101664 jiwa terdampak, 4 korban jiwa, 17 luka berat, 60 luka ringan
36.	Banjir	Desa Bada, Desa Karijawa, Desa Bali I, Kec. Dompu Desa Kandai II, Desa Wawondoru, Desa Beka Jaya, Kec. Woja Kab. Dompu	3 April 2019 (16.00 WITA)	785 unit rumah terendam	3140 jiwa terdampak
37.	Banjir	Desa Montong Sepah, Kec. Prabada, Kab. Lombok Tengah Desa Lembar, Kec. Sekotong Timur, Kab. Lombok barat Desa Moteng, Desa Tepas, Desa Sapugara	5 April 2019 (16.00 WITA)		

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
		Bree, Desa Beru, Kec. Brang Rea Desa Seloto, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat		2238 unit rumah terendam	660 jiwa terdampak
38.	Karhutla	Sembalun Lawang, Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur	7 Juli 2019 (13.17 WITA)		
39.	Kebakaran	Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara	11 Juli 2019 (12.30 WITA)	1 unit rumah rusak berat	4 jiwa terdampak
40.	Kegagalan Teknologi	Desa Kawo, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah	15 Juli 2019		
41.	Kebakaran Pemukiman	Desa Cemara, Kec. Selaparang, Kota Mataram	21 Juli 2019 (19.00 WITA)		5 jiwa terdampak
42.	Karhutla	Sembalun, Kab. Lombok Timur	30 Juli 2019 (19.26 WITA)	Hutan 88 ha	
43.	Karhutla	Lembar, Kab. Lombok Barat	31 Juli 2019	Hutan 5 ha	
44.	Kebakaran Pasar	Desa Tanjung, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara	1 Agustus 2019 (00.00 WITA)		
45.	Kebakaran Pemukiman	Desa Monjok, Kec. Selaparang, Kota Mataram	6 Agustus 2019 (13.30 WITA)	1 unit rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
46.	Putting Beliung	Desa Tepas, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	22 Agustus 2019 (11.30 WITA)	1 unit rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
47.	Kebakaran Pemukiman	Desa Golong, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat	23 Agustus 2019 (01.50 WITA)	1 unit rumah rusak berat Kerugian Rp.50jt	5 jiwa terdampak
48.	Kebakaran Pemukiman	Desa Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah	24 Agustus 2019	1 unit rumah rusak berat	
49.	Karhutla	Desa Serange, Praya Barat, Kab. Lombok Tengah	24 Agustus 2019 (19.00 WITA)		
50.	Kebakaran Pemukiman	Desa keru, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat	.30 Agustus 019 (09.00 WITA)	1 unit rumah rusak berat	4 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
51.	Kebakaran Pemukiman	Pringgarata, Lombok Tengah	6 September 2019 (23.40 WITA)	Kerugian Rp.200jt	4 jiwa terdampak
52.	Kebakaran pemukiman	Paruga, Kota Bima	16 September 2019 (11.00 WITA)	Kerugian Rp.100jt	5 jiwa terdampak
53.	Karhutla	Desa Sori Tatangga, Kec. Pekat, Kab. Dompu	19 September 2019 (17.30 WITA)		
54.	Karhutla	Desa Senaru, Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara	19 September 2019 (14.00 WITA)	Kebun 6000 ha	
55.	Kebakaran TPA	Desa Suka Makmur, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat	13 Oktober 2019 (15.30 WITA)	TPA 4,5 ha	
56.	Putting Beliung	Kuranji Dalang, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat	21 November 2019 (13.00 WITA)	26 unit rumah rusak ringan	104 jiwa terdampak
57.	Putting Beliung	Desa Taman Ayu, Desa beleke, Desa Grebekan, Kec. Gerung, Kab. Lombok Barat	22 November 2019	20 unit rumah rusak ringan	80 jiwa terdampak
58.	Putting beliung	Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram	22 November 2019 (14.00 WITA)	2 unit rumah rusak berat, 2 rusak ringan	16 jiwa terdampak
59.	Putting Beliung	Desa Mantun, Kec. Maluk, Kab. Sumbawa Barat	25 November 2019 (15.15 WITA)	6 unit rumah rusak sedang	24 jiwa terdampak
60.	Putting Beliung	Padak Guar, Kec. Sambelia, Kab. Lombok Timur	29 November 2019 (15.10 WITA)	3 unit rumah rusak ringan	12 jiwa terdampak
61.	Putting Beliung	Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	30 November 2019 (15.00 WITA)	1 unit rumah rusak ringan	4 jiwa terdampak
62.	Putting Beliung	Des Marga Karya, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa	4 Desember 2019 (16.30 WITA)	5 unit rumah rusak berat, 5 rusak ringan	40 jiwa terdampak
63.	Putting Beliung	Desa Arken, KEc. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	4 Desember 2019 (15.30 WITA)	1 unit rumah rusak ringan	4 jiwa terdampak
64.	Putting Beliung	Hu'u, Kab. Dompu	6 Desember 2019 (13.30 WITA)	16 unit rumah rusak	168 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
				berat, 26 rusak sedang	
65.	Putting Beliung	Desa Batu Tulis, Desa Labulia, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah	7 Desember 2019 (16.00 WITA)	5 unit rumah rusak ringan	20 jiwa terdampak
66.	Putting Beliung	Desa Lekong, Kec. Alas Barat. Kab. Sumbawa	9 Desember 2019 (15.28 WITA)	4 rumah rusak sedang	16 jiwa terdampak
67.	Putting Beliung	Wawondoru, monta Baru, Baka Jaya, Bara, Kandai II, Simpasai, Kec. Woja Desa Kareke, Kec. Dompu Kab. Dompu	10 Desember 2019 (14.00 WITA)	53 unit rumah rusak berat, 50 rusak sedang, 12 rusak ringan	460 jiwa terdampak
68.	Putting Beliung	Desa Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota mataram	10 Desember 2019	1 unit rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
69.	Putting Beliung	Kediri Selatan, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat	10 Desember 2019	6 unit rumah rusak sedang, 4 rusak ringan	40 jiwa terdampak
70.	Putting Beliung	Telaga Bertong, KEc. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat	11 Desember 2019 (13.30 WITA)	3 unit rumah rusak sedang	12 jiwa terdampak
71.	Putting Beliung	Desa Tatede, Kec. Lopok, Kab. SUmbawa	11 Desember 2019 (16.00 WITA)	6 unit rumah rusak berat, 11 rusak sedang, 34 rusak ringan 1 fasilitas peribadatan	204 jiwa terdampak, 1 orang luka berat
72.	Putting Beliung	Desa Lanci Jaya, Nusa Jaya, Kec. Manggalewa Desa Tembalae, Kec. Pajo Desa Mbawi, Kec. Dompu Kab. Dompu	11 Desember 2019 (15.00 WITA)	73 unit rumah rusak berat, 68 rusak sedang, 114 rusak ringan 3 fasilitas ibadah, 1 faskes, 3 fasdik	1020 jiwa terdampak, 6 luka ringan
73.	Putting Beliung	Desa Senayan, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat	12 Desember 2019 (14.25 WITA)	4 rumah rusak sedang	16 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
74.	Putting Beliung	Desa Bengkaung, Kab. Lombok Barat	12 Desember 2019 (14.30 WITA)	1 unit rumah rusak berat, 1 rusak sedang	8 jiwa terdampak
75.	Putting Beliung	Kandai II, KEc. Woja, Kab. Dompu	12 Desember 2019 (15.00 WITA)	2 rumah rusak sedang	8 jiwa terdampak
76.	Putting Beliung	Batu tering, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa	12 Desember 2019 (16.00 WITA)	3 rumah rusak sedang 1 fasdik	12 jiwa terdampak
77.	Putting beliung	Montong gamang, Kec. Kopang, Kab. Lombok tengah	13 Desember 2019	17 rumah rusak sedang	68 jiwa terdampak, 2 luka ringan
78.	Putting beliung	Mataram	14 Desember 2019 (14.30 WITA)	2 rumah rusak ringan	12 jiwa terdampak, 1 luka berat, 11 luka ringan
79.	Banjir	Desa Bolo, Kec. Madapangga, Kab. Bima	15 Desember 2019 (14.30 WITA)		
80.	Putting Beliung	Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	17 Desember 2019 (14.30 WITA)	1 rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
81.	Putting Beliung	Dorotangga, Sorisakolo, Kec. Dompu, Kab. Dompu	17 Desember 2019 (16.30 WITA)	33 rumah rusak ringan	132 jiwa terdampak
82.	Banjir	Desa Kore, Kec. Sangat, Kab. bima	18 Desember 2019 (14.02 WITA)	45 rumah terendam 2 fasdik	180 jiwa terdampak
83	Putting Beliung	Kuang, Menala, Arab Kenangan, Bugis, Sampir, Dalam, Kec. Taliwang Kelanir, Air SUning, Loka, Seran, Seteluk, Lamusung, Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat	18 Desember 2019 (14.45 WITA)	2 unit rumah rusak berat, 32 rusak sedang, 6 rusak ringan 1 fas ibadah, 1 fasdik	160 jiwa terdampak
84.	Putting Beliung	Desa Rarang, Kec Terara Desa Montong Baan, Jenggik, Sukadana, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur	19 Desember 2019 (16.00 WITA)	6 unit rumah rusak berat, 6 rusak ringan 1 fas ibadah, 1 fasdik	48 jiwa terdampak

NO	JENIS BENCANA	LOKASI	WAKTU	KERUSAKAN	KORBAN
85.	Putting Beliung	Desa Dorebara, Kereke, Kec. Dompu, Kab. Dompu	19 Desember 2019 (15.00 WITA)	9 rumah rusak berat, 5 rusak sedang, 49 rusak ringan	252 jiwa terdampak
86.	Putting Beliung	Kopang, Kab. Lombok Tengah	19 Desember 2019 (16.00 WITA)	1 rumah rusak berat	4 jiwa terdampak
87.	Putting Beliung	Desa Dara, Desa Penaraga, Kota Bima	21 Desember 2019 (13.30 WITA)	4 rumah rusak sedang	16 jiwa terdampak
88.	Banjir	Desa Dara, Desa Simbanae, Kota Bima	25 Desember 2019 (12.05 WITA)	65 rumah terendam	260 jiwa terdampak
89.	Putting Beliung	Desa Manggemaci, Kota Bima	25 Desember 2019 (13.00 WITA)	1 rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
90.	Tanah Longsor	Desa Kareka, Dompu	25 Desember 2019 (07.00 WITA)	1 rumah rusak sedang	4 jiwa terdampak
91.	Putting Beliung	Desa Beru, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat	26 Desember 2019 (15.00 WITA)	2 rumah rusak sedang	8 jiwa terdampak
92.	Banjir	Desa Bada, Kab. Dompu	26 Desember 2019	175 rumah terendam	700 jiwa terdampak

Sumber : BPBD Provinsi NTB, 2019

Upaya yang telah dilakukan pemerintah Provinsi NTB menanggulangi bencana, antara lain:

- Memberikan bantuan ketika dan pasca bencana;
- Pemulihan mental korban bencana;
- Melakukan Koordinasi penanggulangan bencana dengan instansi terkait;
- Pembuatan rekomendasi status bahaya gunung berapi dengan berKoordinasi dengan Badan Nasional Penganggulangan Bencana dan Badan Geologi Kementrian ESDM;
- Rekomendasi evakuasi penduduk dari ancaman bencana yang diperlukan saat kejadian berdasarkan kajian teknis;
- Penanganan masalah strategis cepat tanggap darurat;
- Pembangunan sarana dan prasarana penampungan anak terlantar;

- Bantuan bahan bangunan perbaikan rumah masyarakat pasca bencana.

- **Status Bencana**

Kewenangan Penetapan "Status Bencana" berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah Pemerintah dalam hal ini Presiden dan Pemerintah Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Penetapan status bencana dilakukan atas rekomendasi BNPB/BPBD. Status bencana meliputi potensi terjadinya bencana dimulai Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. BPBD sebagai koordinator tim penanggulangan bencana menentukan status dan tingkatan bencana daerah didasarkan atas jumlah korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan prasarana dan sarana akibat bencana yang ditentukan secara cepat dan akurat.

Bencana yang terjadi sepanjang tahun 2019 di Provinsi NTB dikategorikan dalam status bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganannya dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Terbitnya Keputusan Gubernur NTB tentang status Transisi Darurat ke Pemulihan antara lain :

a) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 360-161 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 22 Februari 2019;
b) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 360-332 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 15 April 2019;
c) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 360-956 Tahun 2019 tentang Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan dan Perbaikan Darurat Akibat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa Povinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 17 Desember 2019;
d) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 360-990 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor dan Angin Puting Beliung di Provinsi Nusa Tenggara Barat31 Desember 2019;

Kejadian bencana di NTB sepanjang tahun 2019 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 13 Kejadian bencana di Provinsi NTB Tahun 2019

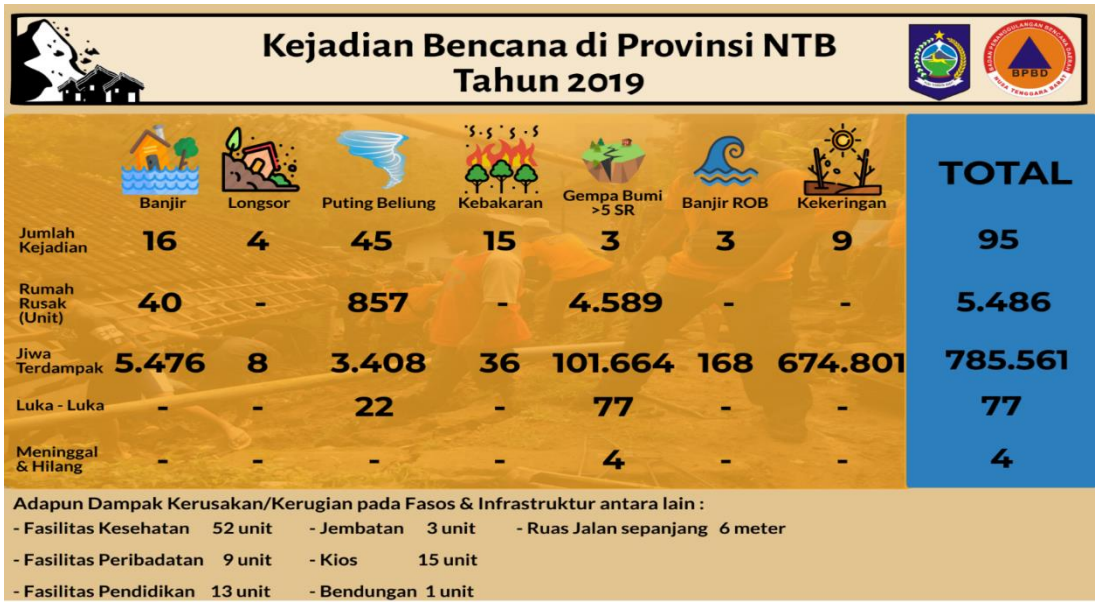

Sumber : BPBD Provinsi NTB, 2019

- Banjir Bandang
  Banjir bandang yang melanda Desa Lamunga Kabupaten Sumbawa Barat terjadi pada tanggal 11 Januari 2019, menyebabkan 1 buah bendungan rusak, di Empang Kabupaten Sumbawa pada tanggal 4 Januari 2019 menyebabkan 1000 jiwa terdampak.

- Gempa Bumi
  Gempa bumi terjadi sebanyak 3 (tiga) kali kejadian yaitu :

  - Sumbawa Region pada tanggal 2 Januari 2019 (5,2 SR) tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian;
  - South of Sumbawa pada tanggal 23 Januari 2019 (6,0 SR) tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian;
  - Montong Gading, Aikmel, Lenek, Wanasaba, Sikur, Sembalun, Sambelia, Masbagik, Sukamulia, Pringgasea, Terara, Kab. Lombok Timur, Bayan Kab. Lombok Utara (5,4 SR) pada tanggal 17 Maret 2019 menyebabkan 876 unt rumah rusak berat, 1.617 rusak sedang, 2096 rusak ringan, 50 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 4 korban jiwa terdampak, 17 luka berat dan 60 luka ringan.

- Banjir

  Banjir melanda beberapa wilayah antara lain :

  - Desa Bada, Desa Bali I, Desa Karijawa Kab. Dompu terjadi pada tanggal 11 Januari 2019, tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian;
  - Pada tanggal 14 Januari 2019 di Desa Ragi Kabupaten Bima pada tanggal Desa Langam, Kec, Lopok, Desa Brang Bara, Desa Brang Biji, Desa Kampung Bajo, Desa Kali Baru, Desa Karang Padak, Kec. Lab. Badas Kab. Sumbawa tidak menimbulkan kerusakan dan kerugian;
  - Pada tanggal 23 Januari 2019 di Desa Batu Jangih, Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Rhee, Kab. Sumbawa sebanyak 124 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 28 Februari 2019 di Desa Darek, Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah Sebanyak 124 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 16 Maret 2019 di desa Boro, Desa Piong, Desa Oi Saro, Kec. Sanggar, Desa Sakuru Ke. Monta Kab. Bima sebanyak 15 unit rumah rusak berat, 25 unit rumah rusak ringan, 60 unit rumah terendam, 1 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 3 unit jembatan rusak ringan dan 1 bendungan rusak ringan, sebanyak 1.640 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 3April 2019 di Desa Bada, Desa Kariawa, Desa Bali I Desa Kandai II, Desa wawondari, Desa Beka Jaya Kab. Dompu sebanyak 785 unit rumah terendam dan 3140 jiwa terdampak.
  - Pada tanggal 5 April 2019 di Desa Montong Sepah, Kec. Paraya barat Daya Kab. Loteng, Desa Lembar Kec. Sekotong Timur, Kab. Lobar, Desa Moteng, Desa Tepas, Desa Sapugara, Bree, Desa Beru, Kec. Brang Rea, Desa Seloto Kec. Taliwang KSB sebanyak 2.238 unit rumah terendam dan 660 jiwa terdampak.

- Puting Beliung

  Angin puting beliung terjadi di beberpa wilayah antara lain :

  - Pada tanggal 2 Januari 2019 di Desa Persiapan Tibu, Kec. Janapria, Kab. Lombok Tengah menyebabkan 100 jiwa terdampak dengan 1 orang luka ringan;
  - Pada tanggal 17 Januari 2019 di Kec. Brang Rea, Kec. Taliwang;
  - Pada tanggal 22 Jnauari 2019 di Desa Pejeruk, Desa Pejanggik, Kec. Ampenan, Kota Mataram menyebabkan 3 unit rumah rusak berat, 9 unit rumah rusak ringan dan 48 jiwa terdampak;

- Pada tanggal 23 Januari 2019 di Desa Belek Desa Lebesane, Desa Jeropuri, Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah, Desa O'o Kec. Donggo Kab. Bima tidak menyebabkan kerusakan dan kerugian, Desa Ai Kangkung Kec. Sekongkang, KSB menyebabkan 1 unit rumah rusak berat, 1 unit rumah rusak sedang, 1 unit rumah rusak ringan dan 12 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 24 Januari 2019 di Desa Lab. Lalar, Desa Telaga Bertong, Desa Dalam, Desa Lalr Liang, Desa Bugis, Desa Kertasari, Desa Batu Putih kec. Taliwang, Desa Goa, Desa Dasan Anyar Kec. Jereweh, Desa benete, Desa Bukit Damai, Desa Maluk, Desa Pasir Putih, Desa Mantun Kec. Maluk KSB menyebabkan 12 unit rumah rusak sedang, 27 unit rumah rusak ringan dan 76 jiwa terdampak, Desa Telaga Lebur Kec. Sekotong, Desa Sedayu Kec. Kediri, Desa Midang Kec. Gunung sari, Desa Senggigi Kec. Batu Layar, Kab. Lobar menyebabkan 7 unit rumah rusak berat dan 36 jiwa terdampak, Desa Emang Lestari Kec. Lunyuk Kab. Sumbawa menyebabkan 4 unit rumah rusak berat, 15 unit rumah rusak ringan dan 2 unit fasilitas pendidikan dan 17 jiwa terdampak. Desa Banjarsari Kec. Lab. Haji. Desa MoyotKec. Sakra Kab. Lotim menyebabkan 11 jiwa terdampak, Desa Bintaro Desa Pagutan, Desa Sayang-Sayang Kota Mataram menyebabkan 1 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rusak sedang, 1 unit rumah rusak ringan, dan 16 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 26 Jnauari 2019 di Desa Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram menyebabkan 3 unit rumah rusak sedang dan 12 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 28 Februri 2019 di Desa Manemeng Kec. Brang Ene, KSB menyebabkan 3 unit rumah rusak berat, 24 unit rumah usak sedang, 1 unit kios dan 108 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 25 Agustus 2019 di Desa Tepas Kec. Brang Rea KSB menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 22 November 2019 di Desa Taman Ayu, Desa Beleke, Desa Grebekan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat meyebabkan 20 unit rumah rusak ringan dan 80 jiwa terdampak, Desa Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram menyebabkan 2 unit rumah rusak berat, 2 unit rumah rusak ringan dan 16 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 25 November 2019 di Desa Mantun Kec. Maluk KSB menyebabkan 6 unit rumah rusak sedang dan 24 jiwa terdampak.
- Pada tanggal 29 November di Desa padak Guar Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur menyebabkan 3 unit rumah rusak ringan dan 12 jiwa terdampak;

- Pada tanggal 30 November 2019 di Desa Sapugara Bree, Kec. Brang Rea, kSB menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan dan 4 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 4 Desember 2019 di Desa Marga karya Kec. Moyo Hulu KSB menyebabkan 5 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak ringan dan 40 jiwa terdampak, di Des Arab Kennagan (Arken) Kec. Taliwang kSB menyebabkan 1 unit rumah rusak ringan dan 4 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 6 Desember 2019 di Desa Hu'u Kab. Dompu menyebabkan 16 unit rumah rusak berat, 26 unit rumah rusak ringan dan 168 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 7 Desember 2019 di Desa batu Tulis Desa Labulia Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah menyebabkan 5 unit rumah rusak ringan dan 20 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 9 Desember 2019 di Desa Lekong Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa menyebabkan 4 rumah rusak sedang dan 16 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 10 Desember 2019 di Desa Wawondoru, Monta Baru, Baka Jaya, Kandai II Simpasai Kec. Woja, Desa Kareke Kec. Dompu Kab. Dompu menyebabkan 53 unit rumah rusak berat, 50 unit rumah rusak sedang dan 12 unit rumah rusak ringan dan 450 jiwa terdampak, Desa Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiwa terdampak, Desa Kediri Selatan Kec. Kediri Kab. Lombok Barat menyebabkan 6 unit rumah rusak sedang, 4 unit rumah rusak ringan dan 40 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 11 Desember 2019 di Telaga Bertong Kec. Taliwang KSB menyebabkan 3 unit rumah rusak sedang dan 12 jiwa terdampak, Desa Tatede Kec. Lopok Kab. Sumbawa meyebabkan 6 unit rumah rusak berat, 11 unit rumah rusak sedang, 34 unit rumah rusak ringan, 1 fasilits peribadatan rusak ringan dan 204 jiwa terdampak, 1 orang luka berat, Desa Lanci Jaya Nusa Jaya Kec. Manggalewa, Desa Tembalae Kec. Pajo, Desa Mbawi Kec. Dompu, Kab. Dompu menyebabkan 73 unit rumah rusak berat, 68 unit rusak sedang, 114 rumah rusak ringan, 3 unit fasilitas ibadah rusak ringan, 1 unit fasilitas kesehatan rusak ringan, 3 unit fasilitas pendidikan juga rusak ringan dan1020 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 12 Desember 2019 di Desa Senayan Kec. Poto Tano KSB menyebabkan 4 unit rumah rusak sedang dan 16 jiwa terdampak, Desa Bengkaung Kab. Lombok Barat menyebabkan 1

unit rumah rusak bert, 1 unit rusak sedang dan 8 jiwa terdampak, Kandai II Kec. Woja Kab. Dompu menyebabkan 2 unit rumah rusak sedang dan 8 jiwa erdampak, Bau Tering Kec. Moyo Hulu kab. Sumbawa menyebabkan 3 unit rumah rusak sedang, 1 unit failitas pendidikan rusak sedang dan 12 jiwa terdampak;

- Pada tanggal 13 Desember 2019 di Desa Montong Gamang Kec. Kopang Kab. Loteng menyebabkan 17 unit rumah rusak ringan dan 68 jiwa terdampak, 2 orang luka ringan;
- Pad tanggal 14 Desember 2019, Mataram menyebabkan 2 rumah rusak ringan dan 12 jiwa terdampak, 1 orang luka berat dan 11 orang luka ringan.
- Pada tanggal 17 Desember 2019 di Desa Sapugara Bree Kec. Brang Rea KSB menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiw terdampak;
- Pada tanggal 18 Desember 2019 di Desa Kuang, Menala, Arab Kenangan, Bugis, Sampir, Dalam Kec. Taliwang, Kelanir, Air Suning, Loka, Seran, Seteluk, Lamusung Kec. Seteluk KSB menyebabkan 2 unit rumah rusak berat, 32 unit rumah rusak sedang, 6 unit rumah rusak ringan, 1 unit fasilitas ibadah, 1 unit fasilitas pendidikan rusak ringan dan 160 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 19 Desember 2019 di Desa raring Kec. Terara, Desa Montong Baan, Jenggik Sukadana Kec. Sikur Kab. Lotim menyebabkan 6 unit rumah rusak berat, 6 unit rumah rusak ringan, 1 unit fasilitas ibadah, 1 unit fasilitas pendidikan rusak ringan dan 48 jiwa terdampak, Desa Dorebara Kereke Kec. Dompu Kab. Dompu menyebabkan 9 unit rumah rusak berat, 5 unit rumah rusak sedang, 49 unit rusak ringan dan 252 jiwa terdampak, Kopang Kab. Loteng menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 16 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Manggemaci Kab. Bima menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiwa terdampak;
- Pada taggal 26 Desember 2019 di Desa Beru Kec. Brang Rea KSB menyebabkan 2 unit rumah rusak sedang dan 8 jiwa terdampak.

➢ Tanah Longsor

Terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah antara lain :

- Pada tanggal 24 Jnauari 2019 di Desa Hu'u Desa Goa Kec. Ju'u Kab/ dompu menyebabkan ruas jalan rusak sepanjang 10 M;
- Pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Rarak Kec. Brang Rea KSB menyebabkan ruas jalan rusak sepanjang 10 M;

- Pada tanggal 25 Desember 2019 di Desa Kareke Kab. Dompu menyebablkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiwa terdampak.

- Banjir ROB
  - Pada tanggal 22 Januari 2019 di Desa Gondang Desa Genggelang, Desa Gangga Kab. Lombok Utara menyebabkan 168 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 23 Januari 2019 di Desa Kore Kec. Sanggar Kab. Bima, Desa O'o Kec. Donggo Kab. Bima tidak ada kerusakan dan kerugian.
- Kebakaran
  - Pada tanggal 2 Januari 2019 kebakaran toko di Cakranegara menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah;
  - Pada tanggal 23 Januari 2019 tidak meimbulkan kerusakan dan kerugian;
  - Pada tanggal 7 Juli 2019 kebakaran hutan dan lahan di Sembalun Lawang Kec. Sembalun Kab. Lotim tidak menimbulkan erusakan dan kerugian;
  - Pada tanggal 11 Juli 2019 kebakaran rumah di Gili Indah Pemenang Kab. Lombok Utara menyebabkan 1 unit rumah rusak berat dan 4 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 21 Juli 2019 kebakaran permukiman di Desa Cemara Kec. Selaparang menyebabkan 5 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 30 Juli 2019 kebakaran hutan dan lahan seluas 88 Ha di Sembalun Kab. Lombok Timur;
  - Pada tanggal 31 Juli 2019 kebakaran hutan dan lahan seluas 5 Ha di Lembar Kab. Lombok Barat;
  - Pada tanggal 1 Agustus 2019 kebakaran pasar di Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara tidak menimbulkan kerugin dan kerusakan yang besar;
  - Pada tanggal 6 Agustus 2019 kebakaran permukiman di Desa Monjok Kec. Selaparang Kota Mataram menyebabkan 1 unit rumah rusak sedang dan 4 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 23 Agustus 2019 kebakaran permukiman di Desa Golong Kec. Narmada Kab. Lombok Barat menyebabkan 1 unit rumah usak berat kerugian sebesar Rp. 50 juta dan 5 jiwa terdampak;
  - Pada tanggal 24 Agustus 2019 kebakaran permukiman di Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah menyebabkan 1 unit rumah rusak; Desa Serange Praya Barat kebakaran hutan dan lahan;

- Pada tanggal 30 Agustus 2019 kebakaran permukiman di Desa Keru Kec. Narmada Kab. Lombok Barat menyebabkan 1 unit rumah rusak berat dan 4 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 6 September 2019 kebakaran permukiman di Paruga Nae Kota Bima menyebabkan kerugian Rp. 100 juta dan 5 jiwa terdampak;
- Pada tanggal 19 September 2019 kebakaran hutan dan lahan di Desa Sori Tatangga Kec. Pekat Kab. Dompu tidak menimbulkn kerugian yang besar, desa Senaru Kec. Bayan Kab. Lombok Utara kebakaran kebun seluas 6.000 Ha;
- Pada tanggal 13 Oktober kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah kebun kongok di Desa Suka Makmur Kec. Gerung Kab. Lombok Barat seluas 4,5 Ha.

Upaya yang telah dilakukan BPBD dalam mengurangi risiko bencana selama tahun 2019 adalah :

1. Pembangunan prasarana Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa pembangunan embung dan DAM penahan di 20 lokasi di Kabupaten Bima yaitu di Desa Tonggorisa Kec. Palibelo 2 buah, Desa Maria Kec. Wawo 2 buah, Desa Maria Utara Kec. Wawo 2 buah, Desa Ntori Kec. Wawo 2 buah, Desa Pesa Kec. Wawo 2 buah, Desa Raba Kec. Wawo 2 buah, Desa Rite Kec. Ambalawai 2 buah, Desa Kole Kec. Ambalawi 2 buah, Desa Npa Kec. Ambalawi 2 buah, Desa Riamau Kec. Wawo 2 buah;
2. Pembangunan prasarana Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa pembangunan embung dan DAM penahan di 16 lokasi di Kota Bima yaitu di Kelurhan Dodu Kec. Rasanae Timur 2 buah, Kelurahan Jatibaru Kec. Asakota 2 buah, Kelurahan kendo Kec. Asakota 2 buah, Kelurahan Ntobo Kec. Raba 2 buah, Kelurahan nungga Kec. Raba 2 buah, Kelurahan Penanae Kec. Raba 2 buah, Kelurahan Lelamase Kec. Rasanae Timur 2 buah, Kelurahan Sambinae Kec. Mpunda 2 buah;
3. Bencana Kekeringan yaitu melakukan kegiatan :

Pembangunan sumur bor di 15 lokasi yaitu di Desa Kandai II Kec. Woja Kab. Dompu, Dusun Sepang Desa Denggen Kec. Selong Kab. Lotim, Dusun punik Jaya Kec. Lendang Nanga kab. Lotim, Desa Teko Daya Kec. Pringgabaya Kab. Lotim, Kelurahan Kelayu Jorong Kec. Selong Kab. Lotim, Desa Kaung Kec. Buir Kab. Sumbawa, Desa Lendang Bunga Utara alijaga Kab. Lotim, Desa Marong Kec. Praya timur Kab. Loteng, Desa Prode Sp. 2 Kec. Plampang Kab. Sumbawa, Desa Sepapan Kec. Jerowaru Kab. Lotim, Desa Sukarara Kec. Sakra Barat

Kab. Lotim, Desa Tuananga Kec. Poto Tao KSB, Dusun Sepakek Desa Kiantar Kec. Poto Tano KS, Dusun Timba Bune Lenek Daya Kab. Lotim, Kec. Paraya Barat Kab. Loteng;

4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di 8 lokasi yaitu di Desa Lohan Kec. Bayani Kab. Lombok Utara, Desa PenduaKec. Kayangan Kab. Lombok Utara, Desa Tempek kec. Gangga Kab. Lombok Utara, Desa sembalun Lawang Kec. Semblun Kab. Lombok Timur, Desa Sembalun Bumbung Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur, Desa Sajan Kec. Sembalun Kab. Lombok Timur, Desa Sambiq elen Kec. Bayan Kab. Lombok Utara, Desa Gengelang Kec. Gangga Kab. Lombok Utara;
5. Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB) di 11 lokasi di Kabupaten Lombok Utara yaitu di SMAN 1 Bayan Kec. Bayan, SMPN 1 Bayan Kec. Bayan, SMA 1 Kayangan Kec. Bayan, MA NW Santong Kec. Kayangan, SMAN 1 Tanjung Kec. Tanjung, SDN 1 Kayangan Kec. Kayangan, SDN 2 Selengen Kec. Kayangan, SDN 6 Sesait Kec. Kayangan, SDN SukadanaKec. Bayan, SDN 2 Loloan Kec. Bayan, SDN 3 Bayan Kec. Bayan.

- **Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019 telah melakukan upaya-upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana antara lain :

1. Menerapkan Rencana Aksi Daerah - Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) gempa bumi di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang terdampak, yang merupakan prioritas kegiatan Pengurangan Resiko Bencana dan masuk dalam misi 1 RPJMD 2019-2023;
2. Penyebaran brosur dan leaflet serta pemasangan papan informasi/baliho tentang tata cara evakuasi dan perlindungan dari bahaya bencana;
3. Simulasi penyelamatan dan evakuasi diri dari terjangan tsunami di daerah sepanjang pesisir selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia;
4. Pemetaan lokasi evakuasi pada daerah rawan bencana;
5. Penyebarluasan informasi bencana geologi dan prosedur mitigasinya, berupa baliho dan papan informasi di lokasi rawan bencana gunung berapi, lokasi rawan gempa dan berpotensi tsunami dan beberapa lokasi yang teridentifikasi rawan bencana gerakan tanah;
6. Monitoring dan Evaluasi Rawan Bencana;

7. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, dan perdagangan perempuan dan anak;
8. Pengendalian dampak perubahan iklim;
9. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA;
10. Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi;
11. Perlindungan mata air dengan vegetasi/civil teknis;
12. Sosialisasi dan mitigasi bencana alam geologi di kabupaten/kota se-NTB;
13. Pendataan daerah berpotensi terkena landasan tsunami 21 lokasi di Pulau Lombok dan 32 lokasi di Pulau Sumbawa;
14. Pemasangan baliho/papan informasi cara menyelamatkan dan mengevakuasi diri dari :
    - Bahaya letusan gunung berapi di 3 lokasi.
    - Bahaya gempa bumi di 7 lokasi
    - Bahaya tanah longsor di 3 lokasi.
15. Memperbanyak iklan layanan masyarakat pada berbagai masmedia tentang tata cara menghadapi bencana, terutama antisipasi dan evakuasi diri;
16. Dana siap pakai penyelamatan (on call);
17. Belanja Tidak Terduga (BTT);
18. Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
19. Pembentukan Sekolah Aman Bencana (SAB);
20. Penyiapan bupperstock pada gudang bencana kabupaten/kota;
21. Pembangunan Kolam Tandon Air (KTA) di Kabupaten Bima dan kota Bima di 36 lokasi;
22. Pembuatan sumur bor untuk penanggulangan bencana kekeringan sebanyak 15 titik di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa;
23. Penyebarluasan informasi potensi dan mitigasi bencana melalui *http://www.bpbdntb.info/*.

- **Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Berdasarkan catatan yang ada bencana alam dan non alam yang melanda Provinsi NTB dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan sarana dan prasarana umum adalah bencana banjir bandang, puting beliung, cuaca buruk/gelombang pasang/rob, kekeringan, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kebakaran pemukiman, epidemi dan wabah penyakit, kecelakaan transportasi darat, laut, udara dan konflik sosial.

Penduduk beberapa kawasan di Provinsi NTB harus mewaspadai datangnya bencana alam, yang termasuk rawan bencana untuk daerah NTB, antara lain:

a. Bencana Tsunami dan gelombang pasang di sepanjang Pantai Selatan dan Utara. Penataan ruang pantai khususnya di kawasan rawan tsunami terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami, memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir;
b. Bencana Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida (magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik di sekitar Gunung Api Rinjani, Tambora, dan Sangeangapi. Getaran gempa juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan yang berupa kebakaran, kecelakaan transportasi dan juga banjir akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. Sumber gempa bumi di NTB banyak dijumpai di lepas pantai/di bawah laut yang disebabkan oleh aktivitas subduksi dan sesar bawah laut. Beberapa gempa bumi dengan sumber di bawah laut, dengan magnitude besar dengan mekanisme sesar naik dapat menyebabkan tsunami. Dijumpai pula sumber gempa bumi di darat yang disebabkan oleh aktivitas sesar di darat, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Fisika Mataram merilis kaleidoskop, sedikitnya 5.330 Gempa Bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Barat Sepanjang Tahun 2019, rata-rata jumlah gempa bumi per hari yang terjadi dari Juli-Desember 2019. Gempa bumi yang dirasakan sebanyak 8 kali sepanjang bulan Desember 2019, hal ini lebih diakibatkan patahan sesar flores dan mnyebabkan gempabumi tektonik.
c. Bencana tanah longsor di sekitar bantaran sungai dan tebing. Longsor sering terjadi di daerah yang memiliki derajat kemiringan tinggi, yang diperburuk oleh penataan penggunaan lahan yang tidak sesuai. Pada umumnya, longsor terjadi pada musim basah ketika terdapat peningkatan curah hujan.Untuk antisipasi dan pengurangan risiko bencana pada masa mendatang, beberapa hal yang mendesak untuk tetap dilakukan adalah normalisasi sungai, penataan drainase dan penertiban penataan ruang.

d. Bencana Siklon Angin Tropis. Adapun yang dimaksud dengan angin Puting Beliung adalah angin kencang, tapi angin kencang belum tentu dikatakan angin puting beliung, tergantung kecepatan angin yang menyertainya, angin Puting Beliung kejadiannya singkat antara 3 - 5 menit setelah itu diikuti angin kencang yang berangsur-angsur kecepatannya melemah. Adapun daerah di NTB yang cukup rawan terhadap bencana angin puting beliung adalah Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kabupaten Dompu.
e. Bencana Kekeringan, dengan 3 kategori jenis kekeringan sebagai berikut:
   - Kering Langka Terbatas, dengan kriteria ketersediaan air 30-60 liter/hari/ orang, untuk kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air 100 s/d 500 meter;
   - Kering Langka, dengan kriteria ketersediaan air 10-30 liter/hari/orang untuk pemenuhan kebutuhan minum, masak, mandi terbatas dengan jarak pengambilan ke sumber air 500 meter s/d 3 kilometer;
   - Kering Kritis, dengan kriteria ketersediaan air dibawah 10 liter/hari/ orang untuk pemenuhan kebutuhan minum dan masak serta jarak pengambilan ke sumber air diatas 3 kilometer;
   - Kekeringan terjadi diseluruh kabupaten/kota di NTB puncaknya pada bulan September tahun 2019.

Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan dalam menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 86 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada BPBD Provinsi NTB Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
• Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah masih belum sepenuhnya mengacu kepada Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana	• Perlu adanya komitmen yang tinggi dari pengambil kebijakan daerah dan membangun kesepahaman serta koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan pembangunan

PERMASALAHAN	SOLUSI
• Belum adanya satu sistem pengolahan data kebencanaan terpadu sehingga berkendala pada akses terhadap data dan informasi kebencanaan serta validasi data yang beredar di masyarakat • Manajemen kelembagaan BPBD belum optimal dan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi masih kurang baik kuantitas maupun kualitas. • Belum maksimalnya koordinasi lintas sektor yang menangani kebencanaan • Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, menuju NTB Tangguh dan Mantap	daerah berbasis pengurangan risiko bencana • Pembentukan Pusat Data dan informasi (Pusdatin) kebencanaan dengan melibatkan OPD terkait dan lintas sektor lainnya, serta Pembuatan aplikasi sistem informasi kebencanaan (Sincan) sebagai aplikasi manajemen logistik dan peralatan di BPBD Provinsi NTB • Perlu adanya penempatan dan penambahan SDM yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Perlu adanya sinergitas dan keselarasan program kegiatan di lingkup pemerintah daerah yang harus benar-benar berjalan dimulai pada saat musrenbang dan rakor lainnya. • Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana

Sumber : BPBD Provinsi NTB, 2019

6. Urusan Sosial

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial melalui 4 (empat) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan utama,

Tabel 2. 87 Perkembangan Data Capaian Kinerja Berdasarkan RPJMD NTB Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019		TARGET 2020
				TARGET	REALISASI	
Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	%	54,50	54,50	100	100	100
Persentase PMKS yang tertangani	%	5,07	22,42	5,50	5,29	6,60

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2020

Indikator Kinerja Daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB beserta UPTD-nya berdasarkan RPJMD 2019-2023 adalah Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dan Prosentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Dinas Sosial Provinsi NTB pada tahun 2019 dalam rangka menjalan kan indikator kinerja RPJMD yaitu Cakupan Penduduk Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial dengan melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Rastra, Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB) telah mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasarbagi penduduk miskin pada tahun 2019 telah terlealisasikan secara keseluruhan. Untuk indikator kinerja Prosentase PMKS yang tertangani Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran baik yang bersumber dari alokasi APBD dan alokasi APBN.

Dinas Sosial memiliki 8 (delapan) panti yang berperan dalam menangani PMKS di Provinsi NTB. Adapun yang termasuk dalam kategori PMKS dan menjadi tugas Dinas Sosial beserta panti social untuk menanganinya antara lain: keluarga fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban *trafficking* dll. Jenis dan jumlah PMKS yang telah mendapat penanganan selama tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 88 Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Tahun 2019

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN	%	SISA PENANGANAN PMKS	%
1	Anak Terlantar	36.062 Jiwa	1.940 Jiwa	5.38	34.122 Jiwa	94.62
2	LanjutUsiaTerlantar	93.368 Jiwa	835 Jiwa	0.90	92.433 Jiwa	99.10
3	PenyandangDisabilitas	24.080 Jiwa	1.424 Jiwa	5.91	22.656 Jiwa	94.09
4	Tuna Susila	350 Jiwa	80 Jiwa	22.86	270 Jiwa	77.14
5	Gelandangan	588 Jiwa	75 Jiwa	12.76	513 Jiwa	87.24
6	Pengemis	227 Jiwa	75 Jiwa	33.04	152 Jiwa	66.96
7	Korban Traficking	Jiwa	200 Jiwa	100	Jiwa	
8	Korban TindakKekerasan	1.287 Jiwa	166 Jiwa	12.90	1.121 Jiwa	87.10
9	Korban BencanaAlam	KK	10.928 KK	100	KK	
10	Korban BencanaSosial	KK	93 KK	100	KK	
11	Keluarga Fakir Miskin	348.722 KK	6.500 KK	1.86	342.222 KK	98.14
	JUMLAH	**504.584**	**22.316**	**4.42**	**428.268**	**95.89**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2020

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama Dinas Sosial Provinsi NTB beserta panti sosialnya yaitu penanganan PMKS, tahun 2019 Dinas Sosial beserta UPTD tidak saja didukung oleh APBD namun juga oleh APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.15.349.747.000,-. Jumlah PMKS yang ditangani melalui APBD sejumlah 6.921 orang, sementara melalui APBN sejumlah 15.545 orang.

Dinas Sosial Provinsi NTB telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan pada tahun 2019 dengan anggaran yang bersumber dari alokasi APBD, alokasi APBN, maupun anggaran yang bersumber langsung dari Kementerian Sosial sebagai berikut:

a. Melalui Alokasi APBD

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya.

   Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase PMKS yang tertangani melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, antara lain:

   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin (Bantuan Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat).

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	30 KK/120 Orang
2	Kab. Lombok Barat	45 KK / 160 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	55 KK / 220 Orang
4	Kab. Lombok Timur	80 KK / 320 Orang
5	Kab. Lombok Utara	30 KK / 120 Orang
6	Kab. Sumbawa	10 KK / 40 Orang
	J U M L A H	**250 KK / 980 Orang**

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin melaksanakan kegiatan dengan memberikan bantuan bagi keluarga fakir miskin, dimana masing-masing keluarga mendapatkan bantuan peralatan untuk berusaha seperti alat pertukangan, perbengkelan, menjahit dan lain-lain dengan maksud agar keluarga fakir miskin memiliki sumber pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

b. Pemberdayaan Fakir Miskin
   1) Bantuan hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat.

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	24 Kelompok / 240 Orang
2	Kab. Lombok Barat	30 Kelompok / 300 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	26 Kelompok / 260 Orang
4	Kab. Lombok Timur	35 Kelompok / 350 Orang
5	Kab. Lombok Utara	13Kelompok / 130Orang
6	Kab. Sumbawa	8 Kelompok / 80 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	2 Kelompok / 20 Orang
8	Kab. Bima	11 Kelompok / 110 Orang
9	Kota Bima	1 Kelompok / 10 Orang
	J U M L A H	**150 Kelompok/1500 Orang**

Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dinas Sosial juga memberikan bantuan bagi kelompok masyarakat miskin. Bantuan berupa peralatan untuk berusaha seperti peralatan salon kecantikan, peralatan prosesing makanan, peralatan percetakan, peralatan pertukangan, dan lain-lain dengan harapan agar bantuan tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidupnya.

2) Bantuan hibah barang untuk diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya.

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	7 KUBE / 70 Orang
2	Kab. Lombok Barat	9 KUBE / 90 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	9 KUBE / 90 Orang
4	Kab. Lombok Timur	28 KUBE / 280 Orang
5	Kab. Lombok Utara	10 KUBE / 100 Orang
6	Kab. Sumbawa	7 KUBE / 70 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	10 KUBE / 100 Orng
8	Kab. Dompu	7 KUBE / 70 Orang
9	Kab. Bima	6 KUBE / 60 Orang
10	Kota Bima	7 KUBE / 70 Orang
	J U M L A H	**100 KUBE / 1000 Orang**

Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan fakir miskin melaksanakan kegiatan dengan memberikan bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) keluarga fakir miskin, dimana masing-masing kelompok mendapatkan bantuan peralatan untuk berusaha seperti alat pertukangan, perbengkelan, menjahit dal lain-lain dengan maksud agar keluarga fakir miskin mendapatkan bantuan usaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

2. Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraanSosial

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Prosentase PMKS yang tertangani pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial antara lain:

a. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Pedagangan Perempuan dan Anak

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	12Kasus
2	Kab. Lombok Barat	22Kasus
3	Kab. Lombok Tengah	27 Kasus
4	Kab. Lombok Timur	36 Kasus
5	Kab. Lombok Utara	32Kasus
6	Kab Sumbawa	18Kasus
7	Kab. Dompu	11Kasus
8	Kab. Bima	12Kasus
	J U M L A H	**166Kasus**

Dinas Sosial Provinsi NTB melalui kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Pedagangan Perempuan dan Anak, bekerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yakni Sakti Peksos sebagai petugas lapangan yang menangani langsung korban eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, dimana Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan dukungan operasional bagi Sakti Peksos sebagai petugas lapangan dan juga memberikan bantuan kepada para korban yang telah mendapatkan penanganan dan pelayanan.

b. Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk Korban Bencana

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	14 Orang
2	Kab. Lombok Tengah	21 Orang
3	Kab. Lombok Timur	28 Orang
4	Kab. Lombok Utara	23 Orang
5	Kab. Sumbawa	25 Orang
6	Kab. Dompu	19 Orang
7	Kab. Bima	20 Orang
8	Luar NTB	50 Orang
	J U M L A H	**166 Orang**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penanganan permasalahan orang terlantar hasil rujukan dari pihak kepolisian, masyarakat dan instansi terkait. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melalui shelter home, kemudian untuk penanganan yang selanjutnya dipulangkan ke daerah asal bagi korban orang terlantar, yang didampingi oleh petugas shelter home.

c. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	65Orang
2	Kab. Lombok Barat	50Orang
3	Kab. Lombok Tengah	40Orang
4	Kab. Lombok Timur	35 Orang
5	Kab. Lombok Utara	10Orang
	J U M L A H	**200 Orang**

Penyandang disabilitas diberikan bantuan berupa kursi roda, tongkat ketiak dan alat bantu dengar dalam bentuk bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB dalam rangka memberikan pelayanan dan rehabilitasi social kepada penyandang disabilitas. Dengan harapan agar penyandang disabilitas dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

d. Peningkatan keterampilan bagi PMKS (Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat)

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	47Orang
2	Kab. Lombok Barat	38Orang
3	Kab. Lombok Tengah	34Orang
4	Kab. Lombok Timur	51 Orang
5	Kab. Lombok Utara	20Orang
6	Kab/ Sumbawa	10 Orang
	J U M L A H	**200 Orang**

Dinas Sosial Provinsi NTB memberikan bantuan hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat khususnya Orang Dengan Kecacatan dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) seperti peralatan menjahit, peralatan percetakan, peralatan tenun, peralatan olahan kue, peralatan perbengkelan las dan peralatan pertukangan. Hasil yang diharapkan agar ODK dan WRSE dapat mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar
   a. Pembinaan Anak Terlantar di BSAA "GENERASI HARAPAN" Mataram

NO	ASAL KELAYAN	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	4 Orang
2	Kab. Lombok Barat	11 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	17 Orang
4	Kab. Lombok Timur	11 Orang
5	Kab. Lombok Utara	8 Orang
6	Kab. Sumbawa	16 Orang
7	Kab. Dompu	5 Orang
8	Kab. Bima	5 Orang
9	Kota Bima	3 Orang
	J U M L A H	**80 Orang**

Balai Sosial Asuhan Anak (BSAA) Generasi Harapan memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu yang masih sekolah ditingkat SD, SLTP, SLTA, dengan penerima manfaat sebanyak 80 Orang.

   b. Pembinaan Anak Terlantar di BSBR "KARYA MANDIRI" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	15 Orang
2	Kab. Lombok Barat	15 Orang

3	Kab. Lombok Tengah	16 Orang
4	Kab. Lombok Timur	18 Orang
5	Kab. Lombok Utara	10 Orang
6	Kab. Sumbawa	12 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	9 Orang
8	Kab. Dompu	7 Orang
9	Kab. Bima	10 Orang
10	Kota Bima	8 Orang
	J U M L A H	**120 Orang**

Balai Sosial Bina Remaja (BSBR) Karya Mandiri memberikan pembinaan keterampilan, pelayanan bagi anak remaja putus sekolah melalui berbagai jurusan keterampilan dengan penerima manfaat sebanyak 120 orang dalam 2 angkatan.

c. Pembinaan Anak Terlantar di BSPPSA "SASAMBO MATUPA" Selat

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	90 Orang
2	Kab. Lombok Barat	90 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	90 Orang
4	Kab. Lombok Timur	90 Orang
5	Kab. Sumbawa	45 orang
6	Kab. Bima	45 Orang
7	Kab. Lombok Utara	45 Orang
8	Kab. Sumbawa Barat	45 Orang
	J U M L A H	**540 Orang**

Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak (BSPPSA) Sasambo Matupa memberikan pelayanan, perlindungan dan petirahan anak yang mengalami permasalahan belajar dengan penerima manfaat sebanyak 540 orang pada tahun 2019.

4. Program Pembinaan Panti Jompo
   a. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU "Mandalika" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	30 Orang
2	Kab. Lombok Barat	20 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	18 Orang
4	Kab. Lombok Timur	11 Orang
5	Kab. Lombok Utara	1 Orang
	J U M L A H	**80 Orang**

Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) Mandalika memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan penerima manfaat sebanyak 80 orang.

b. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU "MeciAngi" Bima

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	KOTA BIMA	30 Orang
2	KAB. BIMA	20 Orang
	J U M L A H	**50 Orang**

Balai Sosial Tresna Werdha (BSTW) Meci Angi memberikan perlindungan, pelayanan dan bimbingan bagi lanjut usia dengan dengan penerima manfaat sebanyak 50 orang per tahun.

5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

a. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSKW "MIRAH ADI" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kab. Lombok Barat	1 Orang
2	Kab. Lombok Tengah	12 Orang
3	Kab. Lombok Timur	9 Orang
4	Kab. Lombok Utara	1 Orang
5	Kab. Sumbawa	6 Orang
6	Kab. Dompu	3 Orang

7	Kab. Bima	8 Orang
	J U M L A H	**40 Orang**

Balai Sosial Karya Wanita (BSKW) Mirah Adi memberikan pembinaan, pelayanan, bimbingan bagi Wanita Tuna Susila dengan penerima manfaat sebanyak 40 orang per tahun.

b. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBL "MUTHMAINAH" Selebung Loteng

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	16 Orang
2	Kab. Lombok Barat	6 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	37 Orang
4	Kab. Lombok Timur	19 Orang
5	Kab. Lombok Utara	2 Orang
6	Kab. Sumbawa Barat	2 Orang
7	Kab. Sumbawa	3 Orang
8	Kab. Bima	4 Orang
9	Kota Bima	2 Orang
10	Lain - Lain	10 Orang
	J U M L A H	**100 Orang**

Balai Sosial Bina Laras (BSBL) Mutmainah memberikan pelayanan, rehabilitasi bagi ekspsikotik dengan dengan penerima manfaat sebanyak 100 orang.

c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBK "MADANI" Aikmal Lotim

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kab. Lombok Barat	13 Orang
2	Kab. Lombok Tengah	12 Orang

3	Kab. Lombok Timur	32 Orang
4	Kab. Sumbawa	13 Orang
5	Kab. Dompu	3 Orang
	J U M L A H	**75 Oang**

Balai Sosial Bina Karya (BSBK) Madani memberikan pelayanan, pembinaan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis dengan penerima manfaat sebanyak75 orang dalam 2 angkatan.

6. Program PemberdayaanKelembagaanSosial Masyarakat
   Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja prosentase PMKS yang tertangani melalui Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat antara lain :
   a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	10 Orang
2	Kab. Lombok Barat	10 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	10 Orang
4	Kab. Lombok Timur	10 Orang
5	Kab. Lombok Utara	10 Orang
	J U M L A H	**50 Orang**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, namun termasuk dari peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Pada tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi NTB mengadakan pertemuan dengan forum CSR dalam meningkatkan peran aktif dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

   b. Belanja hibah barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	5Paket
2	Kab. Lombok Barat	8 Paket

3	Kab. Lombok Tengah	5Paket
4	Kab. Lombok Timur	5Paket
	J U M L A H	**23 Paket**

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Dinas Sosial Provinsi NTB mengalokasikan bantuan hibah barang / jasa agar LKS dapat berperan lebih optimal lagi dalam membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

7. Program Jaminan Sosial

Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan social melalui Program Jaminan Sosial antara lain :

a. Jaminan sosial bagi korban bencana alam

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	50 Orang
	J U M L A H	**50 Orang**

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Provinsi NTB dalam mengurangi resiko bencana alam melaksanakan kegiatan kampung siaga bencana dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih siap siaga untuk menghadapi kerawanan kerentanan dan resiko bencana.

b. Jaminan sosial bagi korban bencana sosial

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	10 Orang
2	Kab. Lombok Barat	10 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	10 Orang
4	Kab. Lombok Timur	10 Orang
5	Kab. Lombok Utara	10 Orang
6	Kab. Sumbawa	10 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	10 Orang
8	Kab. Dompu	10 Orang
9	Kab. Bima	10 Orang

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
10	Kota Bima	10 Orang
	J U M L A H	**100 Orang**

Dalam rangka mengurangi terjadinya konflik social ditengah-tengah masyarakat, Dinas Sosial Provinsi NTB memfasilitasi kegiatan forum silaturahmi akses kearifan local dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan dan tokoh lainnya.

c. Jaminan sosial keluarga

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	30 Orang
2	Kab. Lombok Barat	30 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	30 Orang
4	Kab. Lombok Timur	30 Orang
5	Kab. Lombok Utara	30 Orang
6	Kab. Sumbawa	30 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	30 Orang
8	Kab. Dompu	30 Orang
9	Kab. Bima	30 Orang
10	Kota Bima	30 Orang
	J U M L A H	**300 Orang**

Dalam rangka untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Rapat Kordinasi Tim Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) se Kab/Kota.

b. Melalui Alokasi APBN

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

   Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja cakupan penanganan PMKS melalui Program Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain :

a. PerlindunganSosial Korban BencanaAlam

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	349 Jiwa
2	Kab. Lombok Barat	978 Jiwa
3	Kab. Lombok Tengah	1.215 Jiwa
4	Kab. Lombok Timur	2.021 Jiwa
5	Kab. Lombok Utara	626 Jiwa
	J U M L A H	**5.389 Jiwa**

Bencana berupa bencana banjir, angin puting beliung dan kebakaran yang terjadi Provinsi NTB khususnnya di Pulau Lombok telah banyak memakan koraban jiwa. Dinas Sosial Provinsi NTB melaksanakan penanganan korban bencana dengan memberikan bantuan logistik pada saat dan setelah terjadinya bencana berupa bantuan permakanan (lauk pauk), paket sembako, selimut, tenda serba guna, kasur, tenda gulung, tenda keluarga dan lain-lain.

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kab. Sumbawa	93 Jiwa
	J U M L A H	**93 Jiwa**

Pelaksanaan Kegiatan ini bertujuan untuk menangani korban bencana sosial yang telah terjadi di Desa Senteluk Tengah Kabupaten Sumbawa. Bencana berupa banjir bandang yang menimpa Desa Sentelu dan mengakibatkan korban meningggal 1 orang. Dinas Sosial Provinsi NTB dalam menangani korban bencana banjir bandang ini memberikan bantuan berupa tenda, selimut, tikar, lauk pauk dan makanan siap saji.

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

1) Bantuan Tabungan Sosial Anak (TASA)

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	35 Anak
2	Kab. Lombok Barat	80 Anak
3	Kab. Lombok Tengah	215 Anak

4	Kab. Lombok Timur	385 Anak
5	Kab. Lombok Utara	55 Anak
6	Kab. Sumbawa	55 Anak
7	Kab. Sumbawa Barat	40 Anak
8	Kab. Dompu	120 Anak
9	Kab. Bima	90 Anak
10	Kota Bima	125 Anak
	J U M L A H	**1200 Anak**

Pelaksanaan Kegiatan ini berupa pemberian bantuan uang melalui program Tabungan Sosial Anak (TASA) dimana masing-masing anak mendapatkan uang tabungan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) diperuntukan untuk kebutuhan sekolah. Anak-anak yang mendapatkan bantuan TASA didampingi oleh petugas pendamping untuk mengontrol penggunaan dana yang telah diterima.

3. Program Penanganan Fakir Miskin

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kab. Lombok Barat	200 KK
2	Kab. Lombok Tengah	300 KK
3	Kab. Lombok Timur	400 KK
4	Kab. Sumbawa	200 KK
5	Kab. Bima	200 KK
6	Kota Bima	200 KK
	J U M L A H	**1500 KK**

Pengentasan kemiskinan Dinas Sosial Provinsi NTB melalui program penanganan fakir miskin, berupa pemberian bantuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin untuk 150 KUBE / 1.500 KK dimana masing-masing kelompok usaha bersama (KUBE) mendapatkan bantuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harapan agar KUBE fakir miskin memiliki modal usaha untuk dikembangkan sehingga dapat menunjang dalam meningkatkan taraf hidupnya.

c. Melalui Dana Pusat (Kementerian Sosial RI)

1. Bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin Perkotaan

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Bima	70 KUBE / 700 KK
	J U M L A H	**70 KUBE / 700 KK**

Alokasi anggaran dana pusat pada Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka penanganan fakir miskin di Wilayah Provinsi NTB tepatnya di Kota Bima. Kementerian Sosial RI memberikan bantuan kepada masing-masing Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin di Kota Bima masing-masing KUBE mendapatkan bantuan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harapan agar KUBE fakir miskin dapat meningkatkan produksi usahanya sehingga dapat menunjang dalam meningkatkan taraf hidup keluarga.

2. Bantuan Asistensi bagi Lanjut Usia Terlantar

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	93 Orang
2	Kab. Lombok Barat	125 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	110 Orang
4	Kab. Lombok Timur	136 Orang
5	Kab. Lombok Utara	46 Orang
6	Kab. Sumbawa	40 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	30 Orang
8	Kab. Dompu	40 Orang
9	Kab. Bima	40 Orang
10	Kota Bima	40 Orang
	J U M L A H	**700 Orang**

Alokasi anggaran dana pusat pada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Asistensi bagi Lanjut Usia Terlantar yang ada di Wilayah Provinsi NTB dalam rangka membantu para lanjut usia terlantar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Kementerian Sosial RI memberikan bantuan kepada masing-masing lansia terlantar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per

bulan selama satu tahun, dengan harapan agar dengan harapan agar para lansia terlantar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membantu meringankan beban keluarga para lansia.

3. Bantuan Asistensi bagi Penyandang Disabilitas Berat

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	26 Orang
2	Kab. Lombok Barat	185 Orang
3	Kab. Lombok Tengah	83 Orang
4	Kab. Lombok Timur	38 Orang
5	Kab. Lombok Utara	316 Orang
6	Kab. Sumbawa	45 Orang
7	Kab. Sumbawa Barat	12 Orang
8	Kab. Dompu	37 Orang
9	Kab. Bima	34 Orang
10	Kota Bima	198 Orang
	J U M L A H	**974 Orang**

Alokasi anggaran dana pusat pada Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Asistensi bagi Penyandang Disabilitas Berat yang ada di Wilayah Provinsi NTB dalam rangka untuk membantu para Penyandang Disabilitas Berat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Kementerian Sosial RI memberikan bantuan kepada masing-masing Penyandang Disabilitas Berat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama satu tahun, dengan harapan agar dengan harapan agar para Penyandang Disabilitas Berat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan membantu meringankan beban keluarga para Penyandang Disabilitas Berat.

Tabel 2. 89 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dinas Sosial Kabupaten/Kota se-NTB belum memiliki data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang valid. Mulai Tahun 2019 Dinas	Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota agar updating data yang sedang dilaksanakan

Sosial Kab/Kota sudah mulai melakukan updating data melalui anggaran APBD II namun belum dapat untuk melakukan updating data seluruh kecamatan. Diperkirakan sampai saat ini baru 25% desa yang memiliki data PMKS.	memperoleh hasil yang valid dan dapat dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2020

B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayananan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, perhubungangan, komunikasi dan informatika, koperasi dan umkm, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

1. Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 yaitu "NTB Sejahtera dan Mandiri" dengan mengusung indicator kinerja daerah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Capaian TPT tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 90 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019		2023
		Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,32	3,72	3,39	3,42	3,17

Sumber: BPS NTB, Berita Resmi Statistik, Agustus 2019

Dari tabel diatas diketahui bahwa TPT tahun 2017 sampai 2019 mengalami fluktuasi. TPT tahun 2019 yaitu 3,42% menurun dibandingkan TPT tahun 2018 (3,72%), dan sedikit mengalami Peningkatan dibandingkan TPT tahun 2017

(3,32%). Jika dibandingkan dengan target TPT tahun 2019 (3,39%), TPT belum mencapai target.

TPT adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja cukup berhasil menekan tingkat pengangguran yang ditunjukkan oleh menurunnya TPT tahun 2018 sebesar 3,72% menjadi 3,42% atau sebanyak 84.520 pada tahun 2019. Terobosan pemerintah daerah tersebut antara lain: penciptaan lapangan kerja dan pelatihan kerja yang mendukung sector pariwisata dan industry kreatif. Penurunan TPT 2019 dibandingkan tahun 2018 salah satunya karena pada tahun 2018 NTB mengalami bencana alam gempa bumi yang mengakibatkan tidak sedikit sector industry kreatif dan pariwisata yang gulung tikar dan menyebabkan berkurangnya kunjungan wisatawan ke NTB. Namun segera setelah bencana gempa bumi, NTB segera berbenah diri dengan maraknya pembangunan fisik terutama di wilayah pusat gempa serta bangkitnya sector-sektor lapangan usaha yang terkait dengan pariwisata, mengakibatkan penurunan pengangguran di tahun 2019. Sektor yang banyak menyerap tenaga kerja pasca gempa bumi adalah sektor konstruksi, informasi dan komunikasi dan penyediaan akomodasi makan dan minum.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang, naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Sejalan dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 2,74% poin dibandingkan tahun 2018. Dalam setahun terakhir, secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1.260 orang (1,51%), akan tetapi kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja yaitu sebanyak 232.920 (naik 10,81%) dibandingkan tahun 2018, sehingga TPT turun sebesar 0,3% poin dari 3,72% (Agustus 2018) menjadi 3,42% pada Agustus 2019.

Pada Agustus 2019 terdapat sebanyak 691,93 ribu orang (28,99%) penduduk bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 1.695,11 orang (71,01%) bekerja pada kegiatan informal. Persentase pekerja informal mengalami penurunan dibanding kondisi Agustus 2018. Selama setahun terakhir pekerja informal menurun dari 71,78% pada Agustus 2018 menjadi 71,01 persen pada Agustus 2019.

Gambar 2. 14 Target dan Realisasi TPT Dalam RPJMD

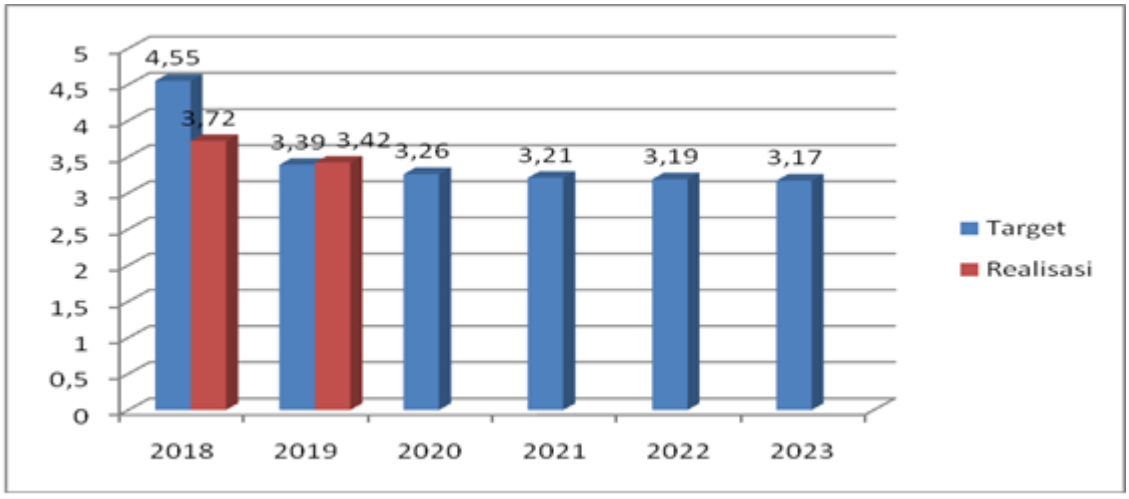

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019

Jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, penyumbang TPT adalah lulusan SMK sebesar 9,63%. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB untuk semakin berinovasi dan menjalin kemitraan dengan stakeholder lainnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya baik di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan skill/keterampilan pencari kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja lainnya. Pengangguran tidak saja disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja namun juga disebabkan oleh tenaga kerja yang tersedia tidak link and match dengan kebutuhan pasar kerja. Kemungkinan belum link and matchnya skill pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja inilah yang menjadi penyebab masih tingginya pengangguran khususnya penganggur lulusan SMK. Komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB selaku pemegang kewenangan pendidikan tingkat menengah dan kejuruan perlu dilakukan untuk menekan TPT lulusan SMK.

Ada dua program utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam upaya menekan TPT yaitu program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2019 telah melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya menekan TPT yaitu pembinaan dan monev kepada lembaga pelatihan tenaga kerja; pelatihan dasar bagi calon tenaga kerja yang akan magang ke Jepang, sosialisasi dan rekrutmen kegiatan Asean Skill Competition dalam rangka mencari siswa SMK yang inovatif di bidangnya; pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dimana siswa pelatihan akan dilatih oleh instruktur berstandar kompetensi, dan diuji kompetensi keterampilannya oleh assessor yang terakreditasi dan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sehingga siswa yang lulus uji kompetensi akan memperoleh sertifikat kompetensi yang dapat meningkatkan nilai "jual" tenaga kerja tersebut di perusahaan. Kegiatan lainnya adalah pengadaan peralatan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, tujuannya selain untuk upgrading perlalatan pelatihan agar sesuai dengan peralatan di tempat kerja/perusahaan juga untuk meningkatkan rasio alat dengan jumlah siswa.

Kegiatan akreditasi lembaga pelatihan keterampilan adalah merupakan salah satu kegiatan utama yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam rangka menurunkan TPT melalui Peningkatan skill atau keterampilan pencari kerja. Lembaga pelatihan keterampilan di NTB berjumlah 301 lembaga dengan jumlah instruktur sebanyak 1.074 orang. LPK yang sudah terakreditasi sampai dengan tahun 2019 sebanyak 108 lembaga. Sisa lembaga yang belu terakreditasi sebanyak 193 lembaga. Adapun persyaratan LPK terakreditasi adalah harus memenuhi delapan (8) standar akreditasi antara lain:

a. Kompetensi kerja terkait dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Program yang ditawarkan oleh LPK didasarkan pada standar industri atau kebutuhan lainnya yang teridentifikasi;
b. Kurikulum Lembaga Pelatihan Kerja menggunakan kurikulum yang terstruktur dan tertulis berdasarkan capaian atau SKKNI;
c. Materi bahan pelatihan; bahan pelatihan memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan kebutuhan pembelajaran;
d. Assesmen lembaga pelatihan kerja memiliki proses yang memastikan assesmen memenuhi capaian kurikulum atau SKKNI dan dapat dipercaya oleh industry atau pengguna akhir;
e. Instruktur/tenaga pelatih lembaga pelatihan kerja memperkerjakan pegawai yang memiliki kapasitas kualifikasi dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan dan bahwa pegawai bagian pelatihan serta assesmen dapat memberikan jasa pelatihan dan assesmen yang bermutu tinggi;
f. Sarana dan prasarana peserta pelatihan memiliki kesempatan untuk menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang akan mereka gunakan di tempat kerja dan fasilitas manajemen memungkinkan bagi LPK untuk melaksanakan kewajiban administrative dan dukungan pelatihan;
g. Manajemen lembaga pelatihan kerja memiliki system manajemen yang telah siap dan mampu menjamin transparansi pengambilan keputusan dan mendukung ketersediaan pelatihan yang bermutu tinggi;
h. Keuangan lembaga pelatihan kerja mengatur dana yang cukup untuk membiayai operasional dan untuk menjamin pembayaran yang telah diterima di muka;

Tim yang melaksanakan akreditasi adalah tim assessor yang telah dibimtek oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun langkah-langkah akreditasi adalah sebagai berikut:

a. LPK mendaftar online mengunakan form F01 dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung 8 standar ke komite akreditasi;
b. Ketua komite menetapkan LPK yang akan diakreditasi;
c. Komite berkoordinasi dengan dinas untuk melaksanakan bimbingan teknis akreditasi;
d. Ketua komite menetapkan asesor yang akan melaksanakan akreditasi;
e. Asesor melakukan desk asesmen terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh lembaga yang akan diakreditasi;
f. Tim assessor melakukan visitasi penilaian terhadap LPK yang akan diakreditasi;
g. Assesor menyampaikan hasil desk dan visitasi kepada komite akreditasi;
h. Komite akreditasi menetapkan jadwal sidang pleno;
i. Komite akreditasi menetapkan apakah LPK tersebut terakreditasi atau tidak terakreditasi;
j. Komite akreditasi membuat rekomendasi disampaikan secara online ke lembaga akreditasi pusat untuk diplenokan, apabila lembaga tersebut telah memenuhi syarat baru diterbitkan sertifikatnya.

Di kegiatan pembinaan lembaga pelatihan dilakukan melalui kunjungan langsung ke LPK sekaligus memberikan pembinaan terhadap tata kelola lembaga dan 8 standar akreditasi. Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Mataram tahun 2019 dilaksanakan melalui pelatihan berbasis kompetensi (PBK) sebanyak 88 paket pelatihan baik institusional maupun mobile training unit (MTU) yang diikuti oleh 1.048 orang peserta. Program pelatihan tersebut terdiri dari kejuruan sebagai berikut:

- Otomotif
- Listrik
- Teknologi informatika dan komunikasi
- Bisnis dan manajemen
- Garmen
- Pariwisata
- Teknik mekanik
- Pertanian dan perikanan
- Bangunan

Pelatihan keterampilan yang sifatnya “on the spot” atau langsung turun ke masyarakat adalah pelatihan melalui Mobil Training Unit (MTU) yang dilaksanakan di desa, pondok pesantren, yayasan disabilitas, BAPPAS Mataram dan Lapas Wanita Mataram. Disamping itu, BLK bekerjasama dengan Dinas

Perindustrian Provinsi NTB dan Dinas Pariwisata Provinsi NTB terkait pengembangan pelatihan sebagai upaya BLK Mataram turut berkontribusi dalam mempersiapkan pencari kerja berkompetensi keterampilan di bidang pariwisata dan industri untuk mensukseskan program unggulan NTB yaitu: Pariwisata Handal dan Industrialisasi. Untuk itu, BLK Mataram telah menyiapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sektor Pariwisata
   BLK Mataram melatih tenaga kerja terampil pelaksana di bidang perhotelan. BLK Mataram memberikan pelatihan pendukung bidang Pariwisata yaitu CME (*Chemical Mechanical Enginering*) diantaranya adalah bidang kelistrikan, pendingin dan yang tidak kalah penting adalah pelatihan bahasa inggris.
2. Sektor Industrialisasi
   BLK Mataram mendukung industrialisasi dengan mempersiapkan tenaga kerja bidang industri melalui pelatihan welding dan otomotif.

Dalam penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi, selain mendapat alokasi anggaran dari APBD Provinsi NTB, BLK Mataram juga mendapat alokasi anggaran APBN melalui BLK Lombok Timur sebagai UPT milik Pemerintah Pusat yang tugas pokoknya adalah mengimplementasikan kebijakan pelatihan kerja nasional di daerah. Jenis Kejuruan dan Skema Program Pelatihan serta jumlah paket pelatihan sudah ditentukan oleh KEMNAKER RI melalui UPTP BLK LOTIM.

Balai Latihan Kerja Mataram bekerjasama dengan LSP Surabaya dan LSP 2 BLK Lombok Timur dalam melayani Uji Kompetensi terhadap 880 orang pada kejuruan Basic Office, Otomotif R2 dan R4, Menjahit, Listrik, Perhotelan dan Las pada tahun 2019. Dari hasil pengujian kompetensi hanya 661 orang dinyatakan lulus dan memiliki kompetensi sesuai dengan kejuruannya.

BLK Mataram juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan terhadap siswa pelatihan. Dari hasil monev diperoleh data penempatan peserta pasca pelatihan sebagai berikut:

- perusahaan/industri 281 orang
- instansi pemerintah 28 orang
- usaha mandiri 561 orang

Dilihat dari hasil monev pasca pelatihan antara tahun 2018 dan 2019, terjadi pergeseran penempatan siswa BLK Mataram pasca pelatihan. Tahun 2018, lulusan pelatihan BLK yang ditempatkan di perusahaan sebanyak 774 orang, instansi pemerintah sebanyak 115 orang dan usaha mandiri sebanyak 82 orang. Dari perbandingan data penempatan siswa BLK Mataram pasca pelatihan dapat dilihat bahwa penempatan siswa pasca pelatihan telah bergeser dari

sektor formal (instansi pemerintahan dan perusahaan/industri) pada tahun 2018 ke sektor informal yaitu usaha mandiri pada tahun 2019.

Dalam rangka menurunkan TPT melalui link and match kejuruan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB telah menyusun perencanaan tenaga kerja daerah sebagai basis data kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja daerah ini menjadi acuan bagi LPK maupun BLK di NTB untuk merencanakan jenis keterampilan yang akan ditawarkan kepada pencari kerja.

Program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja bertujuan untuk membuka kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan utamanya adalah pelayanan terpadu satu pintu (LTSP) yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berencana bekerja di luar negeri, melakukan job fair untuk memberi informasi seluas-luasnya ketersediaan kesempatan kerja kepada masyarakat dan melakukan pelatihan keterampilan bagi kelompok masyarakat yang sudah memiliki embrio usaha untuk lebih meningkatkan keterampilan mereka sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih mandiri.

LTSP sebagai salah satu terobosan Provinsi NTB di bidang ketenagakerjaan, di NTB telah dibentuk enam (6) LTSP dalam rangka mendekatkan pelayanan penempatan dan perlindungan kepada PMI yaitu LTSP Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dan Mataram. Dengan adanya LTSP di masing-masing kabupaten/kota, masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke Mataram untuk mendapat pelayanan penempatan dan perlidungan calon PMI ke luar negeri, cukup di kabupaten/kota masing-masing, termasuk pembuatan paspor. Dengan keberadaan LTSP di kabupaten/kota, harapannya dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur legal sehingga menekan keberangkatan calon PMI melalui jalur non procedural/illegal dan menekan jumlah PMI bermasalah. Dengan adanya LTSP-P2TKI di Kabupaten/Kota diharapkan Pelayanan penempatan dan Perlidungan TKI menjadi lebih mudah, cepat, dan murah sehingga akan lebih banyak PMI yang berangkat secara prosedural/legal.

Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menangani sebanyak 2.045 orang PMI bermasalah, jika dibandingkan dengan jumlah PMI bermasalah yang ditangani tahun 2017 dan 2018, maka tahun 2019 jumlah PMI bermasalah yang ditangani mengalami penurunan. Upaya yang telah dilakukan untuk penanganan PMI Bermasalah antara lain:

- Pembentukan satgas penanganan PMI bermasalah yang terdiri dari Kepolisian, KP3 Lembar, BP3TKI, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.
- Posko PMI di Bandara Internasional Lombok Praya

- Menanggung biaya pemulangan dari pelabuhan lembar ke LTSP dan dari LTSP sampai Kabupaten/Kota (10 Kab/Kota) termasuk pemulangan PMI meninggal dunia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

Selain menangani PMI Bermasalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB juga melakukan tindakan preventif untuk PMI Unprosedural/illegal melalui sosialisasi ke daerah kantong-kantong PMI oleh Tim Satgas yang dibentuk oleh Gubernur NTB. Adapun data perkembangan penanganan PMI bermasalah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 91 Perkembangan Penanganan PMI Bermasalah di Provinsi NTB Tahun 2017-2019 Menurut Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PMI BERMASALAH								
		2017			2018			2019		
		Laki	Prmpn	Jlh	Laki	Prmpn	Jlh	Laki	Prmp	Jmh
1.	Kota Mataram	19	9	28	14	9	23	53	0	53
2.	Lombok Barat	174	34	208	197	57	254	294	33	327
3.	LombokTengah	640	106	746	741	206	947	475	74	549
4.	Lombok Timur	1032	146	1.178	972	310	1.282	588	71	659
5.	Lombok Utara	47	4	51	76	31	107	230	23	253
6.	Sumbawa	69	16	85	72	20	92	32	25	57
7.	Sumbawa Barat	13	2	15	29	2	31	12	9	21
8.	Dompu	32	7	39	56	17	73	23	22	45
9.	Bima	49	17	66	81	30	111	42	28	70
10.	Kota Bima	0	0	0	3	0	3	4	7	11
Jumlah		**2.075**	**341**	**2.416**	**2.241**	**682**	**2,923**	**1.753**	**292**	**2.045**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017-2019

Upaya pemerintah Provinsi NTB lainnya dalam rangka perluasan kesempatan kerja adalah dengan menjalin kemitraan dengan job user di luar negeri melalui penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) yang proses pelayanan administrasinya dilakukan melalui LTSP-P2TKI. LTSP-P2TKI pada tahun 2019 telah melayani sebanyak 23.843 orang calon PMI. Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN tahun 2019 meningkat sebanyak 813 orang dibandingkan tahun 2018, hal ini disebabkan banyaknya job order dari luar negeri. Penempatan PMI di luar negeri memberikan dampak ekonomi yaitu adanya penerimaan remittance yang diterima oleh pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 yang dikirim melalui Bank Indonesia maupun Kantor Pos.

Perkembangan penerimaan remittance yang diterima pemerintah Provinsi NTB tahun 2017-2019 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 92 Rekapitulasi Data Remintance PMI Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO.	NEGARA TUJUAN	REMINTANCE		
		2017	2018	2019
1.	Saudi Arabia	162.564.489.112,44	184.969.186.516,59	124.167.424.285,08
2.	Uni Emirat Arab	15.147.508.917,72	14.805.711.657,17	21.104.482.040,33
3.	Kuwait	3.668.137.314,00	3.716.042.542,00	55.790.375,00
4.	Qatar	3.876.703.245,53	2.939.069.983,01	1.657.694.756,00
5.	Jordan	0	0	0
6.	Korea	143.556.838,43	487.346.325,52	240.223.316,00
7.	Malaysia	15.718.422.386,38	11.083.680.795,15	5.334.555.024,56
8.	Brunei Darussalam	23.326.290,00	0	0
9.	Philipina	6.451.070.00	20.570.680,00	3.246.720.00
10.	Hongkong	747.358.751,75	686.556.546,61	408.474.047,00
11.	Jepang/Tokyo	3.814.397.565,25	5.113.238.030,29	10.547.303.650,47
12.	Singapura	856.817.845,77	1.489.231.574,98	1.300.535.087,68
13.	Negara Lain	132.986.012.240,94	121.765.071.537,34	97.348.777.348,87
14.	Weastern union (kantor pos dan pegadaian)	1.216.589.361.955,00	967.094.108.462,00	956.205.800.760
J u m l a h		**1.556.142.543.533,21**	**1.314.169.814.650,68**	**1.218.374.307.410,99**

Sumber : BI, Tahun 2017-2019

Dalam upaya menekan penempatan PMI secara illegal, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah melakukan pendataan dan pembinaan rutin kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di NTB. Perkembangan jumlah PPTKIS di Provinsi NTB tahun 2017-2019 menurut kabupaten/kota adalah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 93 Perkembangan Jumlah PPTKIS di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019

NO	KAB/KOTA	PUSAT			CABANG		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Kota Mataram	10	9	9	29	22	32
2.	Lombok Barat	2	2	2	8	4	6
3.	Lombok Utara	0	0	0	1	1	1
4.	Lombok Tengah	1	1	1	17	13	14
5.	Lombok Timur	0	0	1	10	10	11
6.	Sumbawa	0	0	0	28	29	26
7.	Sumbawa Barat	0	0	0	3	0	0
8.	Dompu	0	0	0	2	1	2
9.	Bima	0	0	0	4	5	1
10.	Kota Bima	0	0	0	6	1	8
JUMLAH		**13**	**12**	**13**	**121**	**86**	**114**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017- 2019

Dalam upaya menertibkan penggunaan tenaga kerja asing, maka pemerintah Provinsi NTB melakukan pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah daerah memberikan pelayanan izin kerja bagi TKA sekaligus melalukan monitoring atas ijin kerja yang telah dikeluarkan agar tidak terjadi penyalahgunaan izin kerja TKA yang dapat merugikan tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 300 orang dengan realisasi sebanyak 93 orang, hal ini disebabkan karena proses Izin perpanjangan tanaga kerja asing sudah diambil oleh pemerintah pusat, sehingga peran pengawasan pemerintah provinsi tidak optimal. Adapun jumlah TKA yang ada di NTB tahun 2019 menurut kewarganegaraannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 94 Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2019

No	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Australia	8	1	9
2.	Amerika	6	2	8
3.	Jerman	5	5	10
4.	Italia	5	1	6
5.	Inggris	4	6	10
6.	Prancis	6	2	8
7.	Polandia	2	1	3
8.	Selandia Baru	3	0	3
9.	Belanda	1	1	2
10.	Netherland Antiles	1	0	1

No	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
11.	Finladia	2	1	3
12.	Afrika Selatan	4	0	4
13.	Belgia	2	0	2
14.	Korea Selatan	4	1	5
15.	Malaysia	2	0	2
16.	Spanyol	3	1	4
17.	Newzeland	1	0	1
18.	Swedia	4	0	4
19.	India	1	0	1
20.	Philippina	1	1	2
21.	Canada	1	0	1
22.	Jepang	1	0	1
23.	Irlandia	0	1	1
24.	Slovakia	1	0	1
25.	Brasil	1	0	1
	Jumlah	**69**	**24**	**93**

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2019

Kegiatan Job Fair (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin Pemerintah Provinsi NTB, yang dilakukan minimal setahun sekali. Dalam job fair pemerintah Provinsi NTB sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan antara Perusahaan (*job user*) dan Pencari Kerja (*job seeker*). Job fair memberikan informasi peluang kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2019 sebanyak 23.843 orang kesempatan kerja di luar negeri yang penempatannya melalui mekanisme AKAN, serta sebanyak 3.544 orang kesempatan kerja di dalam negeri.

Kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri merupakan kegiatan yang memberikan pelatihan dan bantuan sarana usaha kepada wirausaha yang sudah memiliki embrio usaha melalui proses identifikasi proposal yang diajukan oleh kelompok usaha tersebut dan selanjutnya pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB akan melakukan verifikasi kelayakan. Pemberdayaan tenaga kerja mandiri ini merupakan pelatihan kewirausahaan dimaksudkan untuk menguatkan kelompok-kelompok usaha yang sudah ada menjadi mandiri. Pada Tahun 2019 kegiatan pemberdayaan tenaga kerja mandiri telah dilaksanakan sebanyak 7 kegiatan atau 140 orang dengan lokasi sebagai berikut :

a. Kelompok Usaha “Ingin Maju” Jajanan/Kuliner Alamat : Lingkungan Karang Parua Kelurahan Abian Tubuh Baru Mataram;
b. Kelompok Usaha Bersama “Sejahtera” Alamat Lingkungan Babakan Timur Selatan Kelurahan Babakan Kota Mataram;

c. Kelompok Usaha “Saling Tulung” Alamat Lingkungan Gerung Butun Kelurahan Mandalika Kota Mataram;
d. Kelompok Usaha Penepung Beras dan Kopi “Jaran Pusang” Alamat Dusun Telaga Lompa Desa Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa;
e. Kelompok Usaha Penggilingan Padi “Iman PO” ALamat Dusun Kolong Desa Brang Kolong Kec. Plampang Kab. Sumbawa;
f. Kelompok Usaha Menjahit Alamat Lingkungan Lendang Lekong Kel. Mandalika Kec. Sandubaya Mataram;
g. Kelompok Usaha Mekarsari Alamat Lingkungan Bertais Kec. Sandubaya Mataram.

Setelah mendapatkan paket kegiatan Tenaga Kerja Mandiri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melakukan pendampingan melalui Pendamping Kelompok Usaha Masyarakat/Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Pemerintah Provinsi NTB tahun 2019 melakukan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan. Sasaran dari program tersebut adalah untuk meningkatkan perlindungn kepada tenaga kerja. Adapun indicator dari program tersebut adalah besaran sengketa pengusaha dan pekerja yang diselesaikan. Dari 154 kasus yang diperselisihkan oleh perusahaan dan pekerja, dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebanyak 75 kasus atau 48% dan 79 kasus masih dalam penyelasian di kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan jumlah perselisihan antara perusahaan dengan pekerja adalah melalui:

- Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat dengan melibatkan 11 (sebelas) lembaga tripartite di NTB;
- Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kab/Kota oleh Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB Tahun 2019 berlaku 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur NTB nomor : 561-812 Tahun 2019. Sebelum ditetapkan, telah berlangsung sidang untuk merumuskan dan membahas usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yaitu: unsur APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta unsur Pemerintah. Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp.2.183.000,-;
- Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di 10 (sepuluh) kabupaten/kota.

Tabel 2. 95 Data besaran UMP/UMK dan Prosentase Kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROV./KAB/KOTA	BESARAN UMP / UMK 2019 (RP.)		BESARAN UMP/UMK 2020		NO DAN TANGGAL SK GUBERNUR NTB
		UMP	UMK	UMP/ UMK 2020 (RP.)	PROSENTASE KENAIKAN 2018 - 2019 (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prov. NTB	2.012.610	-	2.183.883	8,51%	No. 561-812 TH. 2019, Tgl. 30/10-2019
2	Kota Mataram	-	2.013.165	2.184.485	8,51%	No. 561-878 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
3	Kab. Lombok Barat	-	2.013.110	2.184.425	8,51%	No. 561-879 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
4	Kab. Lombok Tengah	-	2.021.000	2.192.987	8,51%	No. 561-880 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
5	Kab. Lombok Timur	-	2.012.900	2.184.197	8,51%	No. 561-881 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
6	Kab. Lombok Utara	-	2.014.610	2.186.053	8,51%	No. 561-882 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
7	Kab. Sumbawa Barat	-	2.100.000	2.278.210	8,49%	No. 561-883 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
8	Kab. Sumbawa	-	2.028.950	2.201.613	8,51%	No. 561-884 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
10	Kab. Bima	-	2.055.000	2.229.880	8,51%	No. 561-887 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
9	Kab. Dompu	-	2.016.000	2.187.562	8,51%	No. 561-885 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019
11	Kota Bima	-	2.050.000	2.225.000	8,54%	No. 561-886 TH. 2019, Tgl. 28/11-2019

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019

Gambar 2. 15 Upah Minimum Provinsi NTB

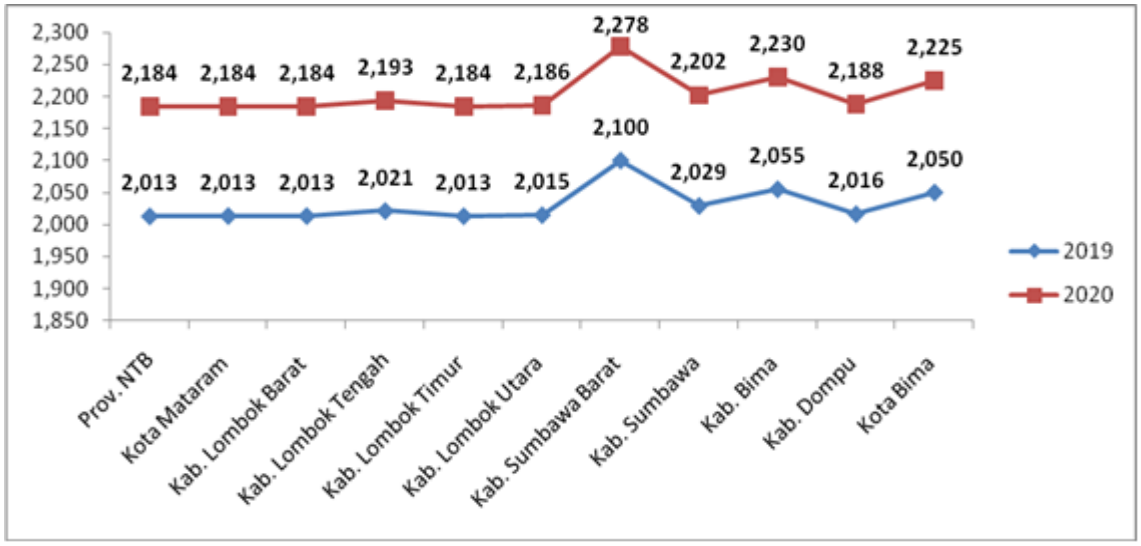

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019

- Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja yang melibatkan 200 orang pekerja di perusahaan-perusahaan di Pulau Lombok. Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja meliputi beberapa lokasi yang berpotensi menimbulkan faktor bahaya kimia berupa pencemaran udara yang ada disekitar tempat kerja sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dimana parameter uji yang dipilih merupakan factor bahaya yang paling dominan kemungkinan ditimbulkan pada saat produksi. Adapun paremeter tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pemeriksaan debu total
  - Pemeriksaan kelembaban
  - Suhu

  Lingkungan kerja sektor UMKM meliputi 2 (dua) Kabupaten di Wilayah Provinsi NTB yaitu :
  - UMKM UD. Rukun (Lombok Tengah) sebanyak 2 lokasi titik sampling.
  - UMKM UD. Jihan (Lombok Tengah) sebanyak 2 lokasi titik sampling.
  - UMKM UD. Gemilang Jati (Lombok Timur) sebanyak 2 lokasi titik sampling
  - UMKM UD. Seni Ayu (Lombok Timur) sebanyak 2 lokasi titik sampling.

  Dari hasil pengujian dan pengamatan dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya Kadar Debu Total, Kelembaban dan Suhu di Lingkungan Kerja seluruh UMKM masih dibawah NAB (Nilai Ambang Batas) yang diperbolehkan. Tindak lanjut yang diperlukan antara lain:

- Agar pemeriksaan lingkungan kerja khususnya pemeriksaan debu total ini dilaksanakan secara berkala, minimal 1 tahun sekali sebagai tindakan preventif terhadap resiko paparan debu yang mungkin dapat timbul ditempat kerja.
- Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) terutama pada pekerja yang bersiko terpapar asap hasil produksi/pembakaran/pengopenan ditempat kerja.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa kewenangan yang sebelumnya ada di pemerintah kabupaten/kota, saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Salah satunya di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pada tahun 2017 telah dibentuk 2 (dua) UPTD baru yaitu UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa.

Kegiatan pemeriksaan CPMI di tempat penampungan, yaitu melakukan pembinaan kepada CPMI yang akan bekerja ke luar negeri dengan memantau standar norma yang diberlakukan oelah erusahaan jasa pengerah tenaga kerja apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam pemberangkatan CPMI.

Kegiatan Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan, diikuti oleh 25 perusahaan, dengan maksud agar perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peningkatan pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja [K3] melalui berbagai agenda kegiatan dalam even Bulan K3 yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan di NTB, dari tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari 2019.

Dalam rangka pembinaan pengawasan dan penegakan norma ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melalui Bidang Pengawasan dan UPTD-nya telah melakukan pemeriksanaan norma ketenagakerjaan di 980 perusahaan, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Di samping itu, aparatur bidang pengawasan telah pula melakukan pengujian terhadap 742 obyek di berbagai perusahaan.

Personil Pengawas ketenagakerjaan di Provinsi NTB sebanyak 16 orang, 10 orang di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan 6 orang UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa. Sepanjang tahun 2019, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan Sumbawa telah melakukan pemeriksaan pengujian spesialis obyek K3 sejumlah 742 Uji Obyek K3 yang terdiri dari:

- Pesawat angkat angkut : 65 Obyek
- Pesawat uap : 1 obyek

- Bejana tekan dan Tangki timbun : 388
- Pesawat tenaga dan produksi : 39 obyek
- Kebakaran : 49 obyek
- Listrik : 48 obyek
- Petir : 78 obyek
- Lift : 52 obyek
- Escalator : 22 obyek

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 96 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih kurangnya serapan tenaga kerja bagi lulusan pelatihan pemagangan dalam negeri	Menambah kesepakatan kerjasama dengan perusahaan tempat magang untuk dapat menerima siswa lulusan magang sebagai pekerja sesuai dengan persyaratan perusahaan.
Masih banyak LPKS yang belum terakreditasi dan re-akreditasi	Melakukan sosialisasi kepada LPKS yang belum terakreditasi, agar memenuhi persyaratan tentunya dengan memenuhi standar-standar yang sudah di tetapkan lembaga penilai akreditasi
Belum semua kejuruan melaksanakan uji kompetensi dan belum tersedia Asesor dan TUK.	Belum bisa dijadikan tempat Uji Kompetensi untuk 3 kejuruan yaitu Kejuruan Elektronika, Kejuruan Perhotelan dan bahasa Inggris karena sarana dan prasarana masih belum memenuhi syarat.
	Membuat perencanaan dan mengusulkan sarana dan prasarana workshop agar memenuhi standard sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK).
Masih rendahnya daya saing untuk memperebutkan pasar kerja dan kesempatan kerja baik di tingkat lokal, regional maupun nasional.	Peningkatan kompetensi untuk menyamakan kurikulum silabus pada dunia industri dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
Masih kurangnya tenaga pengantar kerja	Mengoptimalkan tugas dan fungsi petugas pengantar kerja baik di provinsi dan Kab/Kota, dan juga mengusulkan

PERMASALAHAN	SOLUSI
	kepada pemerintah menambah tenaga pengantar kerja.
Masih banyak perusahaan yang belum menyusun struktur skala upah bagi pekerja	Melaksanakan Bimtek penyusunan struktur skala upah bagi pekerja
Ketersediaan SDM pengawas ketengakerjaan masih sangat terbatas tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan di NTB	Telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan porsi kepada pemerintah daerah NTB secara bertahap untuk memanggil personil untuk dilatih di pusat sehingga secara bertahap pengawas dapat memenuhi sesuai kebutuhan dalam upaya perlindungan pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan.

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2019

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja pembangunan daerah Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja Utama Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 97 Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
					TARGET	REALISASI
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,36	90,37	91,45	90,40
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,95	60,56	60,67	NA
3.	Rata-Rata Usia Kawin Pertama	Tahun	20,27	20,23	20,42	20,21

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan". Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adanya ketimpangan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan ketidakadilan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan dan kehidupan sosial. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender tahun 2018 yang dikeluarkan oleh BPS Ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terlihat dalam hal ekonomi dimana pengeluaran perkapita laki-laki sebesar Rp.14.616.000 sementara perempuan Rp.9.334.000. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Arah kebijakan yang strategi yang disusun untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan antara lain melalui :

- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender melaui kelompok kerja PUG;
- Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan;
- Meningkatkan peran perempuan di bidang politik;
- Meningkatkan peran perempuan dalam bidang ekonomi/pendapatan melalui kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan.

Alat ukur Keberhasilan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 khususnya melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) masih tetap mengacu pada hasil evaluasi beberapa kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraja (APE) yaitu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para

pimpinan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya memwujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), hasil evaluasi pelaksanaan PUG sampai dengan tahun 2019 adalah:

- Kabupaten Dompu memperoleh penghargaan APE kategori Madya;
- Kabupaten Bima memperoleh penghargaan APE kategori Pratama;
- Kabupaten Lombok Barat memperoleh penghargaan APE kategori Madya;
- Kota Mataram memperoleh penghargaan APE kategori Pratama

Kondisi Indeks Pembangunan Gender NTB pada tahun 2019 masih berada 0,67 point dibawah kondisi IPG nasional yaitu 91,07. Meskipun demikian, tren IPG di NTB cenderung meningkat setiap tahunnya. IPG yang semakin meningkat mengindikasikan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun IPG mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 IPG NTB 90,37 mengalami kenaikan 0,01 bila dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 90,36, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan NTB masih tertinggal bila dibanding dengan IPM laki-laki dimana nilai IPM perempuan adalah 65,61 dan IPM laki-laki 72,58 pada tahun 2019. Hal Ini yang membuat IPG NTB masih berada di bawah nilai nasional 90,99.

Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator untuk mengukur peran perempuan dalam ruang publik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) NTB pada tahun 2018 adalah 60,56 masih berada 11,54 point dibawah level nasional yaitu 72,10. Secara nasional IDG NTB tahun 2018 berada pada urutan 31 dari 34 provinsi. IDG juga merupakan salah satu indikator untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Jumlah perempuan dalam parlemen sebanyak 6 orang dari 65 anggota hal Ini terbukti dari 9,23% keterwakilan perempuan dalam parlemen serta 45,66% dalam kepemimpinan profesional dan sumbangan pendapatan perempuan 32,81% pada 2018.

Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan merupakan salah satu indikator kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan tolok ukur yang dapat merangkum beberapa indikator kinerja pada 2 (dua) urusan yaitu pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk keluarga berencana dengan sasaran strategis dari indikator kinerja tersebut adalah pendewasaan usia perkawinan (PUP). Intervensi pendewasaan usia perkawinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan dini/muda pada usia 10-20 Tahun, sedangkan usia yang yang dianjurkan bagi perempuan yang akan melangsungkan

perkawinan pertama yaitu usia 21-25 tahun. Rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2019 berdasarkan rilis BPS sebesar 20,21 tahun belum melampaui target akhir RPJMD yaitu sebesar 20,42 tahun. Realisasi tahun 2019 menurun sebesar 0,02 point jika dibandingkan realisasi pada tahun 2018. Sementara itu Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Usia 10 Tahun Keatas) kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017-2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 98 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan (Usia 10 Tahun Keatas) Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Lombok Barat	20.10	19.80	19,89
2.	Kabupaten Lombok Tengah	19.67	19.39	19,18
3.	Kabupaten Lombok Timur	19.48	19.49	19,66
4.	Kabupaten Sumbawa	21.16	21.54	21,38
5.	Kabupaten Dompu	20.72	21.13	21,34
6.	Kabupaten Bima	20.97	21.50	21,11
7.	Kabupaten Sumbawa Barat	21.97	21.28	21,76
8.	Kabupaten Lombok Utara	20.08	20.26	28,20
9.	Kota Mataram	21.17	20.97	21,18
10.	Kota Bima	21.87	22.00	21,62
	NTB	**20.27**	**20.23**	**20,21**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017-2019

Berdasarkan data tersebut diatas rata-rata usia kawin pertama perempuan belum bisa mencapai target RPJMD 2019-2023. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain:

1. Faktor ekonomi
   Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu.
2. Faktor Pendidikan
   Rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dan tujuan dan dilangsungkannya pernikahan dan menyebabkan adanya kecendrungan menikahkan naknya yang masih di bawah umur.
3. Fakor orang tua

Orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket/dekat sehingga segera menikahkan anaknya.

4. Media massa
   Maraknya ekspose seputar seks di media massa menyebabkan remaja modern semakin permisif atau terbuka terhadap seks.
5. Faktor sosial-budaya
   Pernikahan dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
6. Pergaulan Bebas pada Remaja
   Akibat pergaulan yang bebas dan gaya pacaran yang kebarat-baratan sering menimbulkan kehamilan di luar nikah atau sering disebut dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar sah dimata hukum.

DP3AP2KB selaku OPD yang menjadi leading untuk indikaotor kinerja Rata-rata Usia Kawin Pertama Prempuan menghadapi beberapa hambatan tersebut telah melalukan beberapa upaya agar dapat untuk mempercepat tercapainya target yang telah ditetapkan yaitu:

a. Meningkatkan keterampilan kelompok remaja putri dan putra dan kelompok ibu rumah tangga dalam meningkatkan ekonomi keluarga melalui peningkatan kapasitas kelompok Dialog Warga;
b. Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dalam pengambilan kebijakan;
c. Sosialisasi PUP ke masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak dari perkawinan dini dalam mewujudkan PUP;
d. Publikasi PUP melalui media cetak dan elektronik;
e. Mamfasilitasi pembetukan awig-awig dan peraturan desa tentang pendewasaan usia perkawinan

Perkawinan dini/muda memberikan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat antara lain tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya kasus perceraian, rendahnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan dan swasta dan tingginya angka kematian ibu dan bayi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 4.773.795 juta jiwa (proyeksi BPS). Dari jumlah tersebut, di bawah 18 tahun sebanyak 1.711.364 juta jiwa, yang terdiri dari anak laki-laki sebanyak 873.546 juta jiwa dan anak perempuan sebanyak 837.818 juta jiwa, Di tahun 2045, anak-anak tersebut akan berada pada usia 28-45 tahun yang merupakan periode emas usia produktif dimana mereka sebagai generasi penerus bangsa akan menentukan eksistensi bangsa di masa depan.

Pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak Saat ini, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran orang tua dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak menjadi prioritas isudalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masalah utama yang masih terjadi pada anak-anak di Indonesia yaitu kesenjangan pada berbagai aspek, salah satunya adalah kesenjangan sosial. Dalam mengatasi kesenjangan, pemerintah melalui Kemen PPPA membina organisasi anak yaitu Forum Anak Nasional (FAN). Forum ini dikembangkan pada setiap jenjang administrasi pemerintahan seperti kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional. Tentunya, untuk mendukung program ini sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya dalam membangun Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah meluncurkan program pembentukan kota/kabupaten layak dengan maksud agar anak bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak mereka.

Melalui program tersebut, pemerintah mengintegrasikan komitmen dari pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Guna mengefektifkan upaya untuk mewujudkan KLA, penyelenggaraan KLA dilakukan melalui tahapan: persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam perkembangannya, semangat terhadap pengembangan Kabupaten Layak Anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa Kabupaten/Kota yang tergerak dan terlibat. Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (DP3AP2KB) dalam mewujudkan Kab./Kota Layak Anak adalah:

- MoU antara Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB tentang KLA;
- Sosialisasi dan Launcing KLA;
- Advokasi ke Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB;
- HAN (Hari Anak Nasional) Tingkat Provinsi dan Nasional;
- Puskesmas dan Sekolah Ramah Anak;
- Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini (PUP);
- Sosialisasi Perlindungan Anak di Sekolah;
- PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat);
- Bimtek Gugus Tugas KLA bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten / Kota yang mendapat penghargaan KLA dari Kementerian PPPA RI sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 99 Kabupaten/Kota Peraih KLA Tahun 2019

No	Kab./Kota	Penghargaan	Nilai Evaluasi
1.	Pemerintah Kota Mataram	KLA Tingkat Madya	852,70
2.	Pemerintah Kab. Lombok Barat	KLA Tingkat Pratama	684,45
3.	Pemerintah Kab. Dompu	KLA Tingkat Pratama	749,01
4.	Pemerintah Kab. Bima	KLA Tingkat Pratama	767,90

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2019

Tingkat perkembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak dan Telepon Sahabat Anak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 100 Tingkat perkembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Forum Anak, Sekolah Ramah Anak dan Telepon Sahabat Anak (TESA)

No.	Jenis Data	Prov.	Mataram	Lobar	Loteng	Lotim	KLU	KSB	SBW	Dompu	Kobi	Bima	Jumlah	Keterangan
1	Kabupaten/Kota (Penghargaan KLA)												4	
	- Pratama		2017	2019						2019		2019		
	- Madya		2018-2019											
	- Nindiya													
	- Utama													
	- K L A													
2	Forum Anak (KLA) Provinsi NTB :												113	
	1. Forum Anak Provinsi NTB	1											1	
	2. Forum Anak Kabupaten		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	3. Forum Anak Kecamatan		6					4		5	3	14	32	
	4..Forum Anak Desa/Kelurahan		50							13	4	3	70	
3	Telepon Sahabat Anak (TESA) Prov.	1											1	
4	Sekolah Ramah Anak (SRA)	4	18		9	12				36	42	10	131	

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2019

Sementara itu capaian indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 101 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
					TARGET	REALISASI
1.	Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	%	99,33	100	56,74	100
2.	Perencanaan Penganggaran Responsiv Gender (PPRG)	%	39	45	100	30.32

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2019

Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak pada tahun 2019 sebanyak 526 kasus (data Simfoni), bila dibandingkan dengan kasus pada tahun 2018 1.127 hal ini menunjukkan kekerasan terhadap perempuan/anak mengalami penurunan 53,33% jika dibandingkan tahun 2018. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebanyak 272 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), 25 kasus

kekerasan terhadap laki-laki dewasa dan 229 kasus kekerasan terhadap anak (KTA).

Faktor kemiskinan menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, selain itu berdasarkan pemantauan lapangan faktor lainnya adalah rapuhnya ketahanan keluarga, teknologi dan informasi yang tidak terkendali, pendidikan dan kepedulian masyarakat yang kurang dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hampir seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pelakunya berasal dari keluarga atau kerabat dekat korban, hal ini membuktikan bahwa dalam keluarga masih rentan terjadi kekerasan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah NTB untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTP/KTA) antara lain melakukan :

1) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi pelajar;
2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang bagi kepala desa dan lurah;
3) Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan;
4) Pembentukan UPTD PPA.

Cakupan penanganan korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak terus meningkat, sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 100%, kondisi ini mencerminkan setiap korban kekerasan yang melapokan kasusnya selalu mendapatkan pelayanan dan penanganan, karena telah optimalnya fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang di seluruh kabupaten/kota. Perkembangan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan.

Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

a. Melatih tenaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan;
b. Peningkatan fungsi mobil operasional “MOLIN” (Mobil Perlindungan Perempan dan Anak Korban Kekerasan) dalam penjangkauan kasus kekerasan;
c. Penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan
d. Pembentukan UPTD PPA
e. Koordinasi dengan kabupaten/kota dalam upaya penanganan korban kekerasan.

Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 102 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

PERMASALAHAN	SOLUSI
- Belum maksimalnya pelaksanaan rencana aksi daerah (RAD) tentang KLA dalam upaya pencapaian indikator KLA di Kabupaten/Kota	- Advokasi percepatan pembentukan KLA
- Belum optimalnya dukungan dari masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan;	- Mengembangkan upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam upaya mempercepat pembentukan desa layak anak
- Pokja PUG belum berfungsi secara maksimal - PPRG belum bisa diterapkan dalam sistem perencanaan	- Optimalisasi peran dan fungsi Pokja PUG baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- perilaku tidak sehat pada remaja makin lama makin meningkat dan beresiko tinggi diantaranya: gaya pacaran yang tidak sesuai norma dan kekerasan dalam pacaran	- Peningkatan promosi kesehatan dan hak-hak reproduksi di provinsi dan kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2019

3. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pangan diukur dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolute maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan).

- **Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi**

Pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).Skor PPH telah menjadi indikator kinerja urusan pangan, yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2024.Terkait dengan itu, pencapaian Skor PPH merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik agar perkembangan konsumsi pangan penduduk dapat menjadi salah satu informasi dasar dalam menyusun kebijakan pangan.

Skor PPH Konsumsi didefinisikan sebagai proporsi kelompok pangan yang menggambarkan keragaman dan keseimbangan pangan dalam kondisi konsumsi pangan. Skor PPH Konsumsi dihitung dengan cara mengalikan persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dengan bobot setiap kelompok pangan yang sudah ditetapkan. Pola konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100.

Analisis PPH Konsumsi menggunakan data Susenas Konsumsi Pangan/ Pengeluaran yang mencakup data rinci tentang seluruh konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga, baik konsumsi makanan maupun bukan makanan.Data konsumsi/pengeluaran yang digunakan merupakan data konsumsi/pengeluaran Susenas Triwulan I (Bulan Maret). Berdasarkan kesepakatan Widyakara Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, Standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Nasional untuk Energi mengalami perubahan dari 2.000 menjadi 2150 Kkal/kap/hari dan Protein dari 52 Gram/kap/hari menjadi 57 Gram/kap/hari.

Capaian Skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2019 sebesar 85,3 atau 108,25 persen dari target 78,8. Capaian ini bahkan telah melampaui target akhir tahun 2023 sebesar 83,3. Hal ini berarti tingkat konsumsi pangan penduduk NTB terus meningkat semakin membaik.Target dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi NTB Tahun 2019 s.d 2023 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 16 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2019-2023

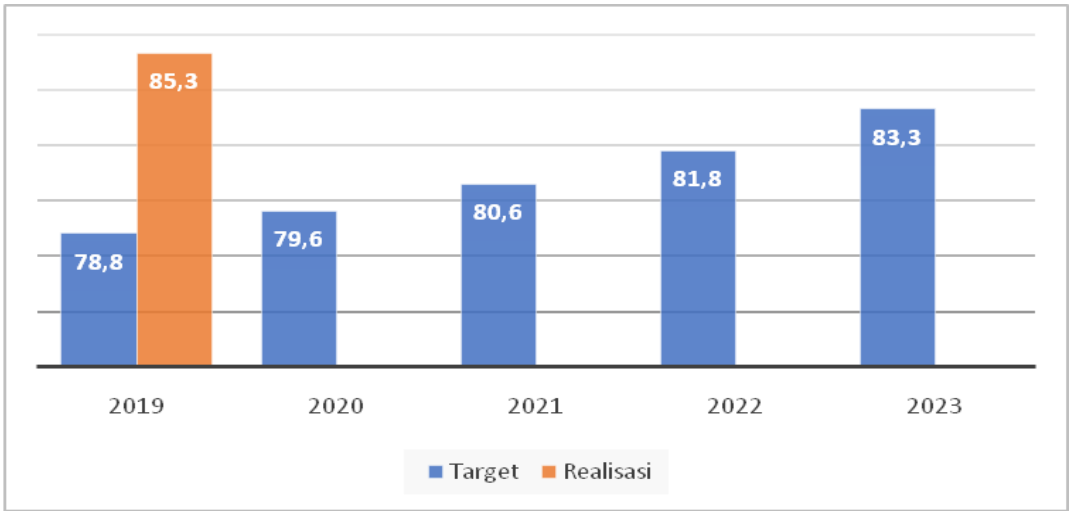

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2018

Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, yang dipengaruhi faktor pendapatan, ketersediaan pangan, terdistribusi merata dengan harga terjangkau, serta pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat.Konsumsi pangan, baik secara kuantitas maupun kualitas, harus dipenuhi agar setiap orang dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 103 Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB Tahun 2019

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan (Gram/Kapita)	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	387,7	1.556	66,8	72,4	0,5	33,4	36,2	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	29,5	35	1,5	1,6	0,5	0,8	0,8	2,5	0,8
3.	Pangan Hewani	110,4	201	8,6	9,3	2,0	17,2	18,7	24,0	18,7
4.	Minyak dan Lemak	22,2	199	8,6	9,3	0,5	4,3	4,6	5,0	4,6
5.	Buah/biji berminyak	3,2	18	0,8	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6.	Kacang-kacangan	26,5	75	3,2	3,5	2,0	6,4	7	10,0	7,0
7.	Gula	16,8	62	2,7	2,9	0,5	1,3	1,5	2,5	1,5
8.	Sayuran dan buah	275,5	118	5,0	5,5	5,0	25,2	27,4	30,0	27,4
9.	Lain-lain	120,3	67	2,9	3,1	-	-	-	-	-
	Jumlah		**2.331**	**100,0**	**108,4**		**89,0**	**96,5**	**100,0**	**85,3**

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Meskipun Skor PPH Konsumsi Tahun 2019 sudah melebihi target yang ditetapkan tetapi masih jauh dari skor ideal sebesar 100 dan masih didominasi oleh konsumsi padi-padian terutama beras. Konsumsi beras Penduduk NTB Tahun 2019 sebesar 120 kg/kap/tahun, meningkat 1,61% dari Tahun 2018 sebesar 118,1 Kg/Kap/Tahun. Tingkat Konsumsi beras ini lebih tinggi dari konsumsi ideal sebesar 100,3 kg/kap/thn dan peningkatan konsumsi pangan utama beras pada tahun 2019 menyebabkan tidak tercapainya target penurunan konsumsi beras sebesar 1,5% per tahun. Perkembangan konsumsi beras penduduk NTB dalam kg/kap/tahun periode Tahun 2015-2019 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 17 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTBPeriode Tahun 2015-2019

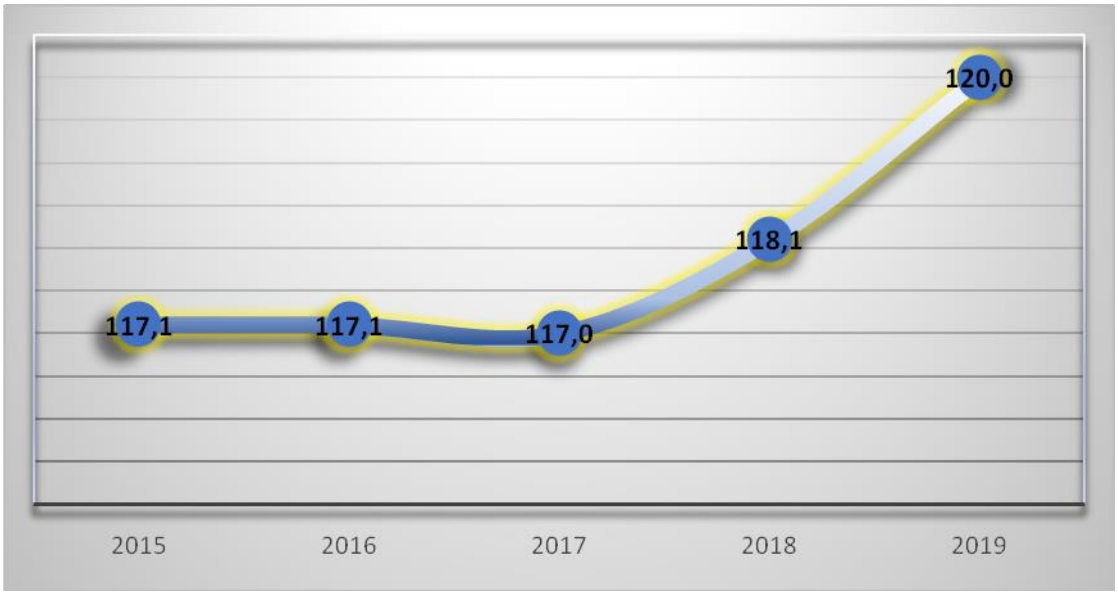

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Konsumsi pangan masyarakat sampai saat ini masih kurang beragam, yang ditunjukkan masih tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras, dan rendahnya konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta umbi-umbian. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: a) perilaku masyarakat yang merasa belum makan jika belum makan nasi; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbangdan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan

pangan terutama pangan lokal non beras dan non terigu; (e) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-umbian di pasar; (f) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki tahap industrialisasi (*scaling up production*), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (g) teknologi penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; (h) berbagai produk olahan pangan lokal belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior; (i) komitmen aparat dalam mengimplementasi program dan kegiatan diversifikasi dirasa masih belum kuat; dan (j) belum optimalnya kerjasama antar instansi terkait serta lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat, perlu terus didukung dengan upaya mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang melalui : a) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi-KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); b) upaya penurunan konsumsi beras dilakukan dengan meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; c) Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Upaya diatas merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.

Terpenuhinya konsumsi pangan secara kuantitas dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein penduduk. Tingkat konsumsi energi adalah perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam satuan % AKE.Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal.Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Tingkat konsumsi energi penduduk NTB tahun 2019 sebesar 2.331 kkal/kap/hari.

Sedangkan Tingkat konsumsi Protein adalah perbandingan antara banyaknya protein yang dikonsumsi (gram) terhadap kecukupan protein, dalam satuan % AKP.Konsumsi protein per kapita per hari didefinisikan

sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan gram. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Konsumsi protein per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi protein rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Tingkat konsumsi protein penduduk NTB tahun 2019 sebesar 69,53 gram /kap/hari. Perkembangan tingkat konsumsi energi dan protein Penduduk NTB tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 104 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2.078	2.139	2.374	2.395,60	2.331	2.263,52	3,03
	Tingkat Konsumsi Energi (% dari 2.150 kkal/kap/hari)	96,65	99,49	110,42	111,42	108,42		
2.	Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)	64,3	66,4	66,7	76,4	69,53	68,67	2,32
	Tingkat Konsumsi Protein (% dari 57 gram/kap/hari)	112,81	116,49	117,02	134,04	121,98		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tingkat konsumsi energi penduduk NTB tahun 2019 sebesar 2.331 kakl/Kap/hari. Walaupun capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dan 2017, capaian ini masih normal karena masih 108,42% di atas Angka Kecukupan Energi sebesar 2.150 kkal/kap/hari. Begitu pula Konsumsi Protein tahun 2019 sebesar 69,53 gram/kap/hari lebih rendah dari capain tahun 2018 tetapi masih lebih tinggi di atas Angka Kecukupan Protein sebesar 57 gram/kap/hari.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan, ada 3 (tiga) komponen yang harus diperhatikan, yaitu: 1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata; 2) keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien; dan 3) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Ketiga komponen tersebut harus diwujudkan sampai dengan tingkat rumah tangga.

- **Pola Pangan Harapan Ketersediaan**

Tingkat ketersediaan pangan suatu daerah, baik yang berasal dari produksi domestik, cadangan/stok maupun impor adalah suatu ukuran yang mencerminkan cukup tidaknya pangan di suatu daerah. Ketersediaan pangan tersebut harus didasarkan pada standar kecukupan pangan, baik kecukupan energi maupun protein, yang dianjurkan untuk hidup sehat dan produktif. Jumlah pengadaan dan penggunaan pangan di suatu wilyah serta tingkat ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk kandungan zat gizi (kalori dan protein) dapat diketahui melalui neraca bahan makanan (NBM).

Ketersediaan energi berdasarkan hasil perhitungan PPH Ketersediaan 2018 untuk penduduk Provinsi NTB adalah 7.281 kkal per kapita per hari atau 303,38% lebih tinggi dari Angka Kecukupan Gizi/Energi yang dianjurkan yaitu 2.400 kkal per kapita per hari. Sedangkan tingkat ketersediaan protein sebesar 171,62 gram/kapita/hari atau 272% dari Angka Kecukupan Protein yang dianjurkan sebesar 63 gr/kapita/hari.

Tabel 2. 105 Perkembangan Ketersediaan Energi dan Protein NTB tahun 2015-2019

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari)	3.991,66	5.011,83	5.310,97	7.116,96	7.281,05	5.742,49	16,96
	Tingkat Ketersediaan Energi (% dari 2.400 kkal/kap/hari)	166,32	208,83	221,29	296,54	303,38		
2.	Ketersediaan protein (gr/kapita/hari)	135,16	118,07	137,52	173,73	171,62	147,22	7,24
	Tingkat Ketersediaan protein (% dari 63 gr/kapita/hari)	214,54	187,41	218,29	275,76	272,41		

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ketersediaan Protein pada tahun 2019 mengalami pernunan dibandingkan dengan ketersediaan protein tahun 2018.Penuruan ini disebabkan karena penurunan ketersediaan protein hewani terutama yang bersumber dari ikan. Walaupun produksi ikan tangkap secara keseluruhan pada tahun 2018 meningkat,

namun bila dipilah berdasarkan ikan yang memiliki protein tinggi terjadi penurunan produksi yang cukup signifikan sehingga terjadi penurunan protein hewani seperti turunnya produksi Ikan gurami, pada tahun 2017 sebanyak 771 ton menjadi 224 ton pada tahun 2018, ikan Lemuru pada tahun 2017 sebanyak 9.338 ton menjadi 7.628 ton pada tahun 2018 dan ikan kembung sebanyak 10.242 ton pada tahun 2017 menjadi 9,250 ton pada tahun 2018.

Ketersediaan pangan tidak hanya dinilai dari kecukupan gizinya dalam bentuk energi dan protein, tetapi juga dinilai dari keberagaman ketersediaan gizi tersebut berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi pada Neraca Bahan Makanan. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 sebesar 91,65 point atau 104,23% dari target sebesar 87,93 Point, tetapi masih jauh dari target ideal sebesar 100. Hal ini berarti masih belum berimbangnya keragaman ketersediaan pangan penduduk provinsi Nusa Tenggara Barat.Terlihat pada tbel di bawah bahwa capaian skor ketersediaan pangan umbi-umbian baru mencapai 0,6 dari skor ideal yang diharapkan yaitu 2,5, minyak dan lemak baru mencapai skor 4,6 dari skor ideal yang di harapkan yaitu 5,0 serta dari kelompok sayur dan buah yang baru mencapai 25,6 dari target yang diharapkan 30,0. Skor PPH Ketersediaan NTB Tahun 2019 berdasarkan kelompok bahan pangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 106 Skor PPH Ketersediaan NTB Tahun 2019

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	4.914	204,8	0,5	102,4	25,0	25,0	+
2.	Umbi-umbian	31	1,3	0,5	0,6	0,6	2,5	-
3.	Pangan Hewani	1.692	70,5	2,0	141,0	24,0	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	221	9,2	0,5	4,6	4,6	5,0	-
5.	Buah/biji berminyak	68	2,9	0,5	1,4	1,0	1,0	+
6.	Kacang-kacangan	192	8,0	2,0	16,0	10,0	10,0	+
7.	Gula	39	1,6	0,5	0,8	0,8	2,5	-
8.	Sayuran dan buah	123	5,1	5,0	25,6	25,6	30,0	-
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	**7.281**	**303,4**		**292,5**	**91,65**	**100,0**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Realisasi PPH Ketersediaan pada tahun 2019 telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terjadinya peingkatan produksi pertanian khususnya padi, jagung dan kedelai, secara kuantitas ketersediaan

pangan di NTB memang surplus namun dari kualitas masih dibawah harapan karena terjadinya penurunan produksi minyak dan lemak pada sektor peternakan (kerbau, kambing, domba dan babi) serta produksi dari sektor perikanan.

Pada Kelompok daging yang produksinya turun pesat pada tahun 2018 adalah daging sapi (Tahun 2017 produksinya 13.259 ton menjadi 7.425 ton pada tahun 2018), daging kerbau (tahun 2017 produksi 969 ton menjadi 662 ton pada tahun 2018), daging kuda (tahun 2017 produksi 135 ton menjadi 79 ton pada tahun 2018), produksi daging babi (tahun 2017 sebesar 230 ton menjadi 66 ton pada tahun 2018).

Ketersediaan Pangan Berdasarkan Analisis Prognosa Ketersediaan Pangan sampai dengan Bulan Desember 2019 menunjukkan bahwa dari 15 komoditas pangan yang dipantau tingkat ketersediaannya menunjukkan bahwa:

a. Ketersediaan pangan asal tanaman seluruhnya mengalami surplus. Stok beras tersedia untuk kebutuhan 17,35 bulan kedepan, Komoditas Bawang Merah, Cabe Merah dan Cabe Rawit tersedia lebih dari 7 tahun yaitu 90,32 bulan, 86,92 bulan dan 108,97 bulan ke depan.
b. Ketersediaan pangan asal hewani terlihat bahwa semua komoditi mengalami surplus dan mencukupi kebutuhan penduduk NTB di atas bulan ke depan. Hanya komoditas telur, ikan tangkap dan daging sapi yang ketersediaannya di bawah 5 bulan ke depan.

Prognosa Ketersediaan, Konsumsi dan Surplus Komoditas Bahan Pangan di Provinsi NTB Kondisi Akumulatif sampai dengan Bulan Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 107 Data Prognosa Ketersediaan Pangan Kondisi s.d Desember 2019

No	Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan (Konsumsi Penduduk dan 4 Jt Wisatawan)	Arus Distribusi Pangan		Surplus/ Defisit	Cukup Untuk Beberapa Bulan Kedepan
				Masuk	Keluar		
1.	Padi (GKG)	2.506.409					
2.	Beras	1.409.185	599.559	(240)	27.958	849.958	17,55
3.	Jagung	851.386	7.205	(340)	737.672	106.849	180,00
4.	Kedelai	79.202	31.273	(828)	696	48,061	15,48
5.	Kacang Tanah	26.872	8.631	-	4.197	14.044	24,00
6.	Daging Sapi	27.792	19.544	0	1.469,14	6.779	4,17
7.	Daging Ayam Ras	47.057	24.603	1.048		23.501	11,63

No	Komoditas	Produksi (ton)	Kebutuhan (Konsumsi Penduduk dan 4 Jt Wisatawan)	Arus Distribusi Pangan		Surplus/ Defisit	Cukup Untuk Beberapa Bulan Kedepan
				Masuk	Keluar		
8.	Bawang Merah	147.530	10.610	(82)	33.941	103.060	90,32
9.	Cabe Merah	17.517	2.132	-	-	15.385	86,92
10.	Cabe Rawit	15.211	15.230	(50.20)	2.275	138.168	108,97
11.	Ubi Kayu	43.369	24.597	-	-	18.771	9,27
12.	Ubi Jalar	15.066	6.024	-	-	9.041	18,05
13.	Kacang Hijau	7.382	1.270	(956)		5.157	125
14.	Telur	30.256	28.939	2.749	32,80	4.034	0,14
15.	Ikan	205.165	182.205	-	724	22.960	1,51

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

- **Cadangan Pangan**

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi merupakan salah satu upaya untuk pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2011. Dalam Inpres tersebut, khususnya Diktum kedua point (i) dinyatakan bahwa Kementerian Pertanian mendapatkan mandat untuk memperkuat cadangan gabah/beras pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga didasarkan kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi harus memiliki cadangan pangan di tingkat Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras dan Pemerintah kabupaten/kota memiliki cadangan pangan minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras. Kondisi Cadangan Pangan Pemerintah, Masyarakat Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2. 108 Perekembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat NTB Tahun 2019

No	Cadangan Pangan	Stok Beras (Kg)
1.	Cadangan Pangan Pemerintah di Provinsi	**67.748**
2.	**Cadangan Pangan Pemerintah di Kab/Kota**	**140.410**
	Kota Mataram	10.560
	Lombok Barat	2.009
	Lombok Tengah	41.120
	Lombok Utara	-

No	Cadangan Pangan	Stok Beras (Kg)
	Lombok Timur	31.239
	Sumbawa Barat	24.720
	Sumbawa	17.832
	Dompu	2.500
	Bima	-
	Kota Bima	10.430
3.	**Cadangan Pangan di Lumbung Pangan Masyarakat**	**2.760.703**
	Kota Mataram	17.667
	Lombok Tengah	313.675
	Lombok Barat	409.241
	Lombok Timur	451.576
	Lombok Utara	650.653
	Sumbawa	43.455
	Dompu	288.916
	Kabupaten Bima	171.961
	Kota Bima	392.456
	KSB	21.100
	Total	**2.968.861**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 109 Perkembangan Cadangan Pangan di NTB 2015-2019

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras) Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	156,21	164,77	137,18	105,76	67,75
2	Cadangan Pemerintah Kabupaten/Kota	70,93	592,33	145,73	154,92	140,41
3	Cadangan Pangan Masyarakat	755,41	112,32	163,00	2,169,37	2.760,70
Jumlah		982,55	869,42	445,91	2,430,05	2.968,86

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

- **Distribusi dan Harga Pangan**

Distribusi pangan dimaksudkan untuk memastikan kemudahan rumah tangga dalam mengakses pangan, menjaga stabilitas harga pangan dan mengetahui jumlah pasokan pangan. Untuk melaksanakan fungsi tesebut dilakukan kegiatan antara lain pemantauan harga dan pasokan, serta pemantauan arus distribusi komoditas pangan. Pemantuan informasi harga pangan dilaksanakan di Pasar Induk Mandalika dan Pasar Raya

Kabupaten/Kota se NTB dengan tujuan untuk: a) Mendapatkan data dan informasi tentang perkembangan harga pangan; dan b) Mengetahui keragaman harga pangan antar wilayah dan antar waktu. Data perkembangan harga pasar komoditas pangan strategis bulan Januari sampai dengan Desember 2019 di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 110 Perkembangan Rata-Rata Harga Komoditas Pangan di 10 Pasar Induk Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Bulan Januari s.d Desember 2019

Komoditi	Satuan	Per-Bulan			CV
		Rata-rata	Min	Max	
Beras					
a. Beras Super / C - 4	Per 1 Kg	10,888	10,585	11,214	1.77
b. Beras Medium I / IR 64	Per 1 Kg	9,898	9,760	10,073	1.11
c. Beras Medium II / IR 36	Per 1 Kg	8,973	8,182	9,228	3.08
Jagung					
a. Jagung Pipilan Kuning	Per 1 Kg	5,849	5,543	6,245	4.29
b. Jagung Pipilan Putih	Per 1 Kg	6,938	4,938	7,717	11.04
Kedelai					
a. Kedelai Lokal/Kuning Kecil	Per 1 Kg	11,448	10,720	12,375	4.33
b. Kedelai Kuning Besar	Per 1 Kg	11,984	10,894	14,438	8.14
Ubi Kayu	Per 1 Kg	7,136	6,550	7,705	5.65
Ubi Jalar	Per 1 Kg	7,299	6,536	8,250	6.22
Gula Pasir					
a. Lokal (Putih)	Per 1 Kg	12,918	12,625	13,150	1.58
b. Non Lokal (Impor)	Per 1 Kg	14,219	12,500	14,750	4.25
Minyak Goreng					
a. Minyak Goreng Bimoli	Per 1 Liter	14,734	14,400	15,045	1.39
b. Minyak Goreng Curahan	Per 1 Liter	11,540	10,972	12,000	3.21
c. Minyak Goreng Kelapa	Per 1 Liter	12,215	5,500	20,767	27.53
Tepung Terigu	Per 1 Kg	7,480	7,355	7,550	0.95
Daging Sapi	Per 1 Kg	117,326	110,321	121,992	3.63
Daging Ayam Broiler	Per 1 Kg	41,383	33,555	43,585	6.38
Telur					
a. Telur Ayam Kampung	Per 1 Btr	3,011	2,738	3,200	4.92
b. Telur Ayam Ras	Per 1 Btr	1,686	1,655	1,755	1.59
c. Telur Itik	Per 1 Btr	2,505	2,371	2,688	3.23
Cabe Merah					
a. Cabe Merah Besar	Per 1 Kg	32,272	22,950	48,123	25.38
b. Cabe Keriting	Per 1 Kg	33,116	17,225	56,361	40.98

Komoditi	Satuan	Per-Bulan			CV
		Rata-rata	Min	Max	
c. Cabe Kecil/Rawit	Per 1 Kg	35,062	22,123	65,815	35.77
Bawang Merah					
a. Bawang Merah Umbi Kering	Per 1 Kg	23,684	15,138	32,819	22.74
b. Bawang Merah Umbi Basah	Per 1 Kg	21,630	14,100	32,500	22.02
Bawang Putih					
a. Bawang Putih Umbi Kering	Per 1 Kg	33,039	23,941	50,625	23.19
b. Bawang Putih Umbi Basah	Per 1 Kg	36,988	20,573	65,000	33.18
Kacang Tanah	Per 1 Kg	23,061	21,484	25,275	4.28
Kacang Hijau	Per 1 Kg	20,201	18,629	21,470	4.27
Ikan					
a. Karper	Per 1 Kg	31,379	25,375	36,000	11.23
b. Nila	Per 1 Kg	31,243	28,694	33,063	4.93
c. Gurami	Per 1 Kg	32,511	25,000	45,000	22.78
d. Lele	Per 1 Kg	29,562	27,125	32,429	5.82

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan harga semua komoditas pangan yang dipantau rata-rata stabil, dan tidak terjadi gejolak harga pangan sesuai dengan capaian Corfisien Variasi CV) masing-masing komoditas.

Disamping pemantauan harga pangan telah dilakukan pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan oleh petugas yang ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan laut. Melalui Keputusan Gubernur NTB telah ditetapkan 4 pelabuhan laut lokasi pemantauan yaitu Pelabuhan Lembar, Badas, Sape dan Bima. Jumlah komoditas pangan yang masuk dan keluar dari Provinsi NTB Bulan Januari sampai dengan Desember 2019, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 111 Data Arus Distribusi Komoditas Pangan yang Keluar dari NTB Tahun 2019 Kondisi s.d Desember 2019

No	Komoditas	Satuan	Jumlah	Pelabuhan Keluar	Daerah Tujuan
1.	a. Gabah	Ton	4.707,00	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Bima	Bali, Surabaya, Sumba Timur, Malang, Jember
	b. Beras	Ton	19.239,89	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Sape, Pel. Laut Bima, Pel. Laut Badas	Batam, Denpasar, Kupang, Manggarai, Ende, Sumba, Surabaya, Batam, Flores
2.	Jagung	Ton	664.168,57	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Sape, Pel. Laut Bima, BIL, Pel. Laut Kempo, Pel. Laut Badas	Jakarta Timur, Surabaya, Balikpapan, Tanah Laut, Kalsel, Probolinggo, Bali, Makasar, Ende, Padang, Medan, Banjarmasin, Cirebon
3.	Kedelai	Ton	506,42	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Bima, Bandara Sultan M Salahuddin, Pel. Laut Sape, Pel. Laut Bima, Labuhan Lombok	Sumba Barat, Jakarta, Kediri, Batam, Banjarmasin, Mimika, Balikpapan, Jakarta, Merauke, Makasar, Sumba Timur, Surabaya, Bali, Malang,
4.	Bawang Merah	Ton	28.630,75	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Sape, Pel. Laut Bima, Bandara Sultan M Kaharuddin, Bandara Sultan M Salahuddin, BIL	Lebak, Bandung, Jakarta, Manggarai, Ende, Makasar, Banjarmasin, Flores, Surabaya, Bali, Jeneponto, Gorontalo, Merauke, Bengkulu
5.	Bawang Putih	Ton	3.472,30	Pel. Laut Lembar, BIL	Palangkaraya, Denpasar, Surabaya, Jakarta, Bekasi, Depok, Gorontalo, Makasar
6.	Cabe Rawit	Ton	2.030,74	Pel. Laut Lembar, BIL,	Pangkal Pinang, Pekan Baru, Batam, Belitung, Sidoarjo, Pontianak, Pekanbaru, Malang, Pekalongan, Surabaya, Denpasar, Tanjung Pinang
7.	Kacang Tanah	Ton	3.834,83	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Bima, Pel. Laut Sape	Tangerang, Surabaya, Makasar, Banjarmasin,

No	Komoditas	Satuan	Jumlah	Pelabuhan Keluar	Daerah Tujuan
					Manggarai, Sinjai, Bali, Jakarta
8.	Kacang Hijau	Ton	2.260,09	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Bima	Surabaya, Solo, Banjarmasin, Makasar
9.	Gula Pasir		132,00	Pel. Laut Lembar	Surabaya
10.	Telur Ayam	Ton	18,30	Pel. Laut Lembar	NTT
11.	Sapi Potong	Ekor	12.566,00	Pel. Laut Bima, Pel. Laut Lembar, Pel. Ferry Sape	Balikpapan, Palangkaraya, Banjarmasin, Barito, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Makasar, Jeneponto
12.	Kerbau Potong	Ekor	2.582,00	Pel. Laut Bima, Pel. Laut Badas, Pel. Laut Sape	Jeneponto, Tana Toraja, Sumba Barat Daya, Bekasi, Jakarta,
13.	Tembakau	Ton	7.862,97	Pel. Laut Lembar, BIL, Pel. Laut Lombok	Bandar Lampung, Yogyakarta, banjarmasin, Belitung, Pontianak, Lampung, Probolinggo, Tangerang, Kupang, Pati, Jambi, Makasar, Surabaya, Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Kendari,
14.	Jambu Mente	Ton	4.237,57	Pel. Laut Lembar, Pel. Laut Bima, Pel. Laut Kempo	Bali, Surabaya, Makasar
15.	Rumput Laut	Ton	2.557,00	Pel. Laut Lembar	Bali, Surabaya
16.	Ikan Segar	Ton	699,00	Pel. Laut Lembar	Jatim, Bali, Jakarta
17.	Ikan Asin	Ton	25,00	Pel. Laut Lembar	Jatim
18.	Udang Tambak	Ton	2.791,00	Pel. Laut Lembar	Jatim

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 112 Data Arus Distribusi Komoditas Pangan yang Masuk ke NTB Tahun 2019 Kondisi sd Desember 2019

No	Komoditas	Satuan	Jumlah	Pelabuhan Masuk	Daerah Asal
1.	Beras	Ton	120,90	Pel. Laut Lembar	Surabaya
2.	Jagung	Ton	340,43	Pel. Laut Lembar	Surabaya
3.	Kedelai	Ton	1.521,70	Pel. Laut Lembar	Surabaya
4.	Bawang Merah	Ton	82,02	Pel. Laut Lembar, BIL	Brebes, Nganjuk, Tangerang, Surabaya
5.	Bawang Putih	Ton	26,90	Pel. Laut Lembar	Surabaya
6.	Cabe Rawit	Ton	50,20	Pel. Laut Lembar	Situbondo
7.	Kacang Hijau	Ton	1.304,00	Pel. Laut Lembar	Surabaya
8.	Tepung Terigu	Ton	18.974,00	Pel. Laut Lembar	Surabaya
9.	Minyak Goreng	Ton	8.486,80	Pel. Laut Lembar	Surabaya
10.	Gula Pasir	Ton	891,13	Pel. Laut Lembar	Jawa Timur
11.	Daging Ayam	Ton	871,57	Pel. Laut Lembar	Bali, Jatim, Jakarta
12.	Telur Ayam	Ton	2.250,61	Pel. Laut Lembar	Bali, Jatim
13.	Rumput Laut	Ton	78,00	Pel. Laut Lembar	Jawa Timur
14.	Pakan Ternak	Ton	10.507,68	Pel. Laut Lembar	Jatim, Manado

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

- **Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar**

Salah satu permasalahan pangan dewasa ini selain terbatasnya produksi adalah masih dijumpainya praktek penanganan pangan mulai dari budidaya hingga konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan. Kondisi ini meningkatkan potensi terjadinya residu atau kontaminasi pada pangan, yang kemudian dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan makanan. Sedangkan dari aspek mutu, mutu pangan yang rendah menyebabkan daya saing produk pangan menjadi berkurang. Keamanan pangan tidak hanya terkait dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait perdagangan pangan, dimana keamanan pangan menjadi salah satu persyaratan dalam perdagangan global.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB melaksanakan kegiatan sertifikasi PSAT yang merupakan salah satu bentuk

pengawasan sebelum peredaran (*pre-market*). Sertifikasi keamanan PSAT atau Sertifikasi Prima merupakan jaminan pemenuhan persyaratan keamanan pangan di tingkat proses produksi (*On Farm*). Sertifikasi Prima dibedakan menjadi sertifikasi Prima 1, Prima 2 dan Prima 3. Sertifikasi Prima 3 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan dari aspek keamanan pangan; Prima 2 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan; sedangkan Prima 1 diberikan untuk produk pertanian yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan serta sosial dan lingkungan. Sampai dengan tahun 2019 Sertifikasi yang sudah diterbitkan oleh OKKPD Provinsi NTB adalah Sertifikasi Prima 3, Prima 2, Registrasi Produk Dalam untuk komoditi beras dan Registrasi Rumah Pengemasan (*Packing House*). Sertifikasi Produk Pangan Buah dan sayur segar bertujuan untuk :

1) Memberikan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran produk pangan segar yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutunya (cemaran fisik, cemaran biologi serta cemaran bahan kimia yang melebihi batas minimum yang ditetapkan);
2) Memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi dan peredaran produk pangan segar;
3) Mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan terjadinya penyimpangan produksi dan peredaran produk pangan segar;
4) Meningkatkan daya saing produk pangan segar, sehingga dapat memperluas akses pasar;
5) Memberikan citra (*image*) produk pangan segar dari dalam negeri

Sertifikasi Prima 3 diberikatan untuk komoditi buah dan sayur, sedangkan Registrasi Produk Dalam diberikan untuk komoditi beras. Masa berlaku Sertikasi selama 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkan sertifikat. Pada tahun 2019 OKKPD Provinsi NTB telah menerbitkan 41 sertifikat yang terdiri atas 23 Sertifikasi Prima 3 (Buah 8 Komoditi dan sayur 15 Komoditi) dan 18 Sertifikasi Registrasi Produk Dalam.

Tabel 2. 113 Data Sertifikasi dan Registrasi OKKPD Provinsi NTB Tahun 2019

No	Unit/Pelaku	Alamat	Ruang Lingkup/ Komoditas	Mulai Berlaku Sejak	Masa Berlaku s/d	Nomor (S/R/Rek)
1.	Poktan Batu Tumpeng	Ds. Jagaraga, Lombok Barat	Kangkung	30-Apr-19	29-Apr-22	52/01-3-2/031-014-04/2019
2.	Poktan Ketapang	Ds. Batu Putih, Lombok Barat	Cabe Rawit "Dewata"	30-Apr-19	29-Apr-22	52/01-3-2/017-013-04/2019

No	Unit/Pelaku	Alamat	Ruang Lingkup/ Komoditas	Mulai Berlaku Sejak	Masa Berlaku s/d	Nomor (S/R/Rek)
3.	Poktan Ketapang	Ds. Batu Putih, Lombok Barat	Cabe Keriting	30-Apr-19	29-Apr-22	52/01-3-2/016-012-04/2019
4.	Poktan Cinta Damai	Ds. Dasan Baru, Sumbawa Barat	Kacang Panjang	30-Apr-19	29-Apr-22	52/07-3-2/029-016-04/2019
5.	Poktan Cinta Damai	Ds. Dasan Baru, Sumbawa Barat	Cabe Keriting	30-Apr-19	29-Apr-22	52/07-3-2/016-015-04/2019
6.	Poktan Cinta Damai	Ds. Dasan Baru, Sumbawa Barat	Tomat	30-Apr-19	29-Apr-22	52/07-3-2/071-014-04/2019
7.	Mursyid	Ds. Aikbukak, Lombok Tengah	Ubi Jalar	30-Apr-19	29-Apr-22	52/02-3-II-3/028-029-04/2019
8.	UD. Nusa Indah	Ds. Marente, Sumbawa	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00012-04/2019
9.	Poktan Ai No Toar	Ds. Seteluk, Sumbawa Barat	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.07-II.I.00-03-00017-04/2019
10.	UD. Indrayani	Ds. Gelora, Lombok Timur	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.03-II.I.00-03-00014-04/2019
11.	UD. Tanya Dhefyan	Ds. Baru Tahan, Sumbawa	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00013-04/2019
12.	UD. Cahaya Tiga Berlian	Ds. Bale Brang, Sumbawa	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00014-04/2019
13.	Gapoktan Adil Makmur	Ds. Bale Brang, Sumbawa	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00015-04/2019
14.	Gapoktan Beriuk Maju	Ds. Pengenjek, Lombok Tengah	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.02-II.I.00-03-00030-04/2019
15.	UD. Candra	Ds. Jagaraga, Lombok Barat	Beras	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.01-II.I.00-03-00015-04/2019
16.	Poktan KTNA Mataram	Ds. Rembiga, Mataram	Beras Merah	30-Apr-19	29-Apr-24	KEMENTAN RI PD 52.71-II.I.00-03-00014-04/2019
17.	PT. Karya Tani Semesta	Ds. Usar, Plampang, Sbw	Bawang Merah	26-Aug-19	25-Aug-22	52/04-3-2/008-016-08/2019
18.	Poktan Sumber Sentosa	Ds. Kebon Ayu, Gerung, Lombok Barat	Kacang Panjang	26-Aug-19	25-Aug-22	52/01-3-2/018-016-08/2019
19.	Poktan Toloncanga	Ds. Ncera, Kec. Belo, Kab. Bima	Bawang Merah	26-Aug-19	25-Aug-22	52/06-3-2/008-013-08/2019

No	Unit/Pelaku	Alamat	Ruang Lingkup/ Komoditas	Mulai Berlaku Sejak	Masa Berlaku s/d	Nomor (S/R/Rek)
20.	Poktan Santula	Ds. Kalampa, Kec. Woha, Kab. Bima	Bawang Merah	26-Aug-19	25-Aug-22	52/06-3-2/008-014-08/2019
21.	Poktan Gorok Sokong	Ds. Sajang, Sembalun, Lombok Timur	Kopi	26-Aug-19	25-Aug-22	52/03-3-c/069-015-08/2019
22.	Poktan Olor Kedondong	Ds. Sajang, Sembalun, Lombok Timur	Kopi	26-Aug-19	25-Aug-22	52/03-3-c/069-016-08/2019
23.	Poktan Lendak Kuta	Ds. Sembalun, Sembalun, Lombok Timur	Bawang Putih	26-Aug-19	25-Aug-22	52/03-3-b-II/010-017-08/2019
24.	Aminudin	Ds. Selebung, Lombok Tengah	Sawi	26-Aug-19	25-Aug-22	52/02-3-b-II/069-031-08/2019
25.	Nurhayati	Pancor Dao, Lombok Tengah	Pepaya California	26-Aug-19	25-Aug-22	52/02-3-b-I/045-032-08/2019
26.	Perum Bulog Divre NTB	Mataram	Beras	26-Aug-19	25-Aug-24	KEMTAN RI PD 52.71-II.I.00-03-00015-08/2019
27.	PT. Bangun Alam Samawa	Batu Ongo, Lopok, Sumbawa	Beras	26-Aug-19	25-Aug-24	KEMTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00017-08/2019
28.	PT. Karya Tani Semesta	Ds. Usar, Plampang, Sbw	Bawang Merah	09-Oct-19	08-Oct-22	52/04-2-2/008-017-10/2019
29.	PT. Bintang Agro Sentosa	Ds. Dasan Tereng Narmada Lobar	Manggis	09-Oct-19	08-Oct-22	KEMTAN RI PH 52.01.0001-10/19
30.	Perum Bulog Kanwil NTB (Dewi Mandalika)	Jl. Langko, Mataram	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.71-II.I.00-03-00016-12/2019
31.	PT. SAN Cab. Sumbawa (Jempol)	Ds. Boak , Unteriwis, Sumbawa	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00018-12/2019
32.	PT. SAN Cab. Sumbawa (Dua Jempol)	Ds. Boak , Unteriwis, Sumbawa	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.04-II.I.00-03-00019-12/2019
33.	PT. SAN Cab. Dompu (Jempol)	Ds. Teka Sire , Manggalewa, Dompu	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.05-II.I.00-03-00003-12/2019
34.	PT. SAN Cab. Dompu (SGR)	Ds. Teka Sire , Manggalewa, Dompu	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.05-II.I.00-03-00004-12/2019

No	Unit/Pelaku	Alamat	Ruang Lingkup/ Komoditas	Mulai Berlaku Sejak	Masa Berlaku s/d	Nomor (S/R/Rek)
35.	PD. Jaya Perdana (Cap Ikan)	Labuapi, Lombok Barat	Beras	03-Dec-19	02-Dec-24	KEMTAN RI PD 52.01-II.I.00-03-00017-12/2019
36.	Kaharudin	Ds. Rarak Ronges, Brang Rea, KSB	Kopi	03-Dec-19	02-Dec-22	52/07-3-c/069-018-12/2019
37.	KWT. Kawa Rama	Ds. Rarak Ronges, Brang Rea, KSB	Kopi	03-Dec-19	02-Dec-22	52/07-3-c/069-019-12/2019
38.	H. Abu Bakar	Ds. Rarak Ronges, Brang Rea, KSB	Kopi	03-Dec-19	02-Dec-22	52/07-3-c/069-020-12/2019
39.	Nurjanah	Ds. Bangket Monteh, Brang Rea, KSB	Terung Ungu	03-Dec-19	02-Dec-22	52/07-3-b-II/077-021-12/2019
40.	Nurjanah	Ds. Bangket Monteh, Brang Rea, KSB	Terung Mol	03-Dec-19	02-Dec-22	52/07-3-b-II/077-022-12/2019
41.	King Coffee	Ds. Tambora, Pekat, Dompu	Kopi	03-Dec-19	02-Dec-22	52/05-3-c/069-005-12/2019

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Sementara itu, sejak tahun 2010 OKKPD Provinsi NTB telah menerbitkan 163 Sertifikat yang terdiri dari : 130 Sertifikasi Prima 3 (Buah 47 Komoditi dan Sayur 83 Komoditi) dan 33 Sertifikat Registrasi Produk Dalam. Jumlah Sertifikat yang masih aktif sebanyak 112 Sertifikat yang teridiri dari Sertifikasi Prima 3 sebanyak 85 Sertifkat (Buah 27 Komoditi dan Sayur 58) dan Sertifikat Registrasi Produk Dalam sebanyak 27 Komoditi.

Tabel 2. 114 Data Sertifikasi dan Registrasi OKKPD Provinsi NTB Tahun 2010-2019

No	Tahun	Sertifkasi		Regitrasi	Jumlah	Keterangan
		Buah	Sayur			
1.	2010	3		-	3	Tidak Aktif
2.	2011	2		-	2	Tidak Aktif
3.	2012	6		-	6	Tidak Aktif
4.	2013	7		-	7	Tidak Aktif

5.	2014	3		-	3	Tidak Aktif
6.	2015	8		-	8	Tidak Aktif
7.	2016	17		5	12	Tidak Aktif
8.	2017	10	31	3	44	Aktif
9.	2018	9	11	7	27	Aktif
10.	2019	8	16	17	41	Aktif
	Jumlah	**72**	**58**	**33**	**163**	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 115 Data Jumlah Sertifikasi Aktif Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/ Kota	2017			2018			2019			Jumlah
		Sertifikasi Prima 3		Registrasi Produk Dalam	Sertifikasi Prima 3		Registrasi Produk Dalam	Sertifikasi Prima 3		Registrasi Produk Dalam	
		Buah	Sayur		Buah	Sayur		Buah	Sayur		
1.	Kota Mataram		11							3	14
2.	Lombok Barat					3	2	1	4	2	12
3.	Lombok Tengah		9	1	6	3	2	1	2	1	25
4.	Lombok Timur		2	1	1			2	1	1	8
5.	Lombok Utara	1	5		1	3					10
6.	Sumbawa Barat	2	4					3	5	1	15
7.	Sumbawa	2		1		1	2		2	7	15
8.	Dompu						1	1		2	4
9.	Bima	5			1	1			2		9
10.	Kota Bima										
	Jumlah	10	31	3	9	11	7	8	16	17	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

- **Kawasan Rumah Pangan Lestari**

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan menjadi sumber pangan dan gizi keluarga secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi sumber daya alam dan kebutuhan gizi warga setempat. Tujuan pelaksanaan KRPL adalah meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi

pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral.

Untuk meningkatkan keragaman komoditas pangan dilakukan optimalisasi pekarangan. Optimalisasi pekarangan ini dikembangkan secara intensif melalui pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), antara lain dengan membangun kebun bibit dan mengutamakan sumber daya lokal yang disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal (*local wisdom*), sehingga kelestarian alam pun tetap terjaga. Implementasi konsep inilah dikenal dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Melalui konsep KRPL, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan menuju kemandirian pangan sekaligus melestarikan sumber daya alam. KRPL dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan intensif kepada ibu rumah tangga yang terwadahi dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan teknologi budidaya tanam pada pekarangan. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan KRPL untuk individu maupun kelompok diantaranya untuk kemudahan akses pangan terutama pangan lokal, pemenuhan pangan dan gizi keluarga, menghemat pengeluaran belanja pangan keluarga yang berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat.

Pemanfaatan pekarangan dilaksanakan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Berbasis Cabe Terintegrasi Unggas (TanCabGas) sebagai kegiatan alternatif percepatan penurunan kemiskinan. Jumlah sasaran tahun 2019 sebanyak 54 KRPL. SK Gubenur NTB Nomor 400/234 Tahun 2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019 dan Perencanaan Tahun 2020 dan mengacu pada data Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

Jumlah Anggota yang anggota difasilitasi melalui Kegiatan KRPL tahun 2019 sebanyak 1.350 KK (54 KRPL x 25 KK) dengan Jumlah KK Miskin yang difasilitasi sebanyak 80% x 1.350 KK = 1.080 KK. Diasumsikan jumlah anggota keluarga sebanyak 4 Jiwa per KK maka total jiwa yang difasilitasi sebanyak 4.320 jiwa.

Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah :

a. Penguatan kapasitas anggota dan kelembagaan kelompok melalui upaya pendampingan, pembinaan, pertemuan kelompok;
b. Pemberian bantuan hibah per Kelompok berupa:
   - Hibah benih, bahan dan sarana budidaya tanaman pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan kelompok (TanCabGas);

- Unggas (ayam kampung petelur dan itik/entok) umur 3-4 bulan, itik/entok sebanyak 250 ekor;
- Pakan ternak: konsentrat layer khusus 15 zak, jagung 250 kg, dan dedak: 300 kg.

Tabel 2. 116 Daftar Sasaran Kegiatan KRPL Berbasis Cabe Terintegrasi Unggas (TanCabGas) di Provinsi NTB Tahun 2019

No	Lokasi			
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	
1.	Kota Mataram	Ampenan	1	Bintaro
2.	Lombok Barat	Sekotong	2	Sekotong Barat
		Kediri	3	Kediri
		Gunung Sari	4	Taman Sari
		Gunung Sari	5	Mekar Sari
3.	Lombok Tengah	Pujut	6	Mertak
		Jonggat	7	Puyung
		Jonggat	8	Labulia
		Janapri	9	Saba
		Kopang	10	Montong Gamang
		Kopang	11	Kopang Rembiga
4.	Lombok Timur	Sukamulia	12	Dasan Lekong
		Aikmel	13	Kembang Kerang Daye
		Jerowaru	14	Jerowaru
		Pringgasela	15	Pringgasela
		Aikmel	16	Aikmel
		Montong Gading	17	Montok Betok
		Terara	18	Suradadi
		Sikur	19	Kotaraja
		Aikmel	20	Lenek
		Sikur	21	Tete Batu
		Masbagik	22	Lendang Nangka
		Pringgabaya	23	Apitaik
5.	Lombok Utara	Pemenang	24	Pemenang Timur
		Tanjung	25	Sokong
		Tanjung	26	Sigar Penjalin
		Gangga	27	Rempek
		Gangga	28	Bentek
		Kayangan	29	Kayangan
		Kayangan	30	Sesait
		Bayan	31	Sukadana

No	Lokasi			
	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	
6.	Sumbawa Barat	Taliwang	32	Batu Putih
		Poto Tano	33	Mantar
7.	Sumbawa	Batulanteh	34	Kelungkung
		Labuhan Badas	35	Karang Dima
		Untir Iwes	36	Kerekeh
		Alas	37	Juran Alas
		Uthan	38	Stowe Brang
		Rhee	39	Luk
		Alas	40	Pulau Bungin
		Moyo Hulu	41	Lito
8.	Dompu	Woja	42	Saneo
		Kilo	43	Malaju
9.	Bima	Donggo	44	Bumi Pajo
		Lambitu	45	Teta
		Ambalawi	46	Wawu
		Palibelo	47	Ntonggu
		Ambalawi	48	Rite
		Woha	49	Pandai
		Langgudu	50	Kerambu
		Langgudu	51	Rupe
		Tambora	52	Kawinda To'i
		Madapangga	53	Mpuri
10.	Kota Bima	Rasana'E Barat	54	Tanjung

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 117 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pangan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih adanya daerah/desa terkategori rawan/rentan pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis FSVA Kabupaten	Memberdayakan masyarakat di daerah/rentan rawan pangan melalui pola padat karya untuk peningkatan kapasitas anggota dan kelembagaan
Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat belum beragam, bergizi seimbang dan aman dan masih di dominasi oleh konsumsi beras	• Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui Komunikasi, Informasi,

PERMASALAHAN	SOLUSI
	Edukasi-KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat lapangan, Lomba Cipta Menu B2SA, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik); • Meningkatkan produksi serta konsumsi pangan karbohidrat berbasis sumberdaya lokal; • Peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, dan kacang-kacangan yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga. Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal
Komoditas pangan segar yang disertifikasi masih rendah	Melakukan advokasi, promosi dan sosialisasi pengawasan dan monitoring keamanan pangan segar serta identifikasi komoditas pangan segar yang belum tersertifikasi
Persentase Cadangan Beras pemerintah 11,26% dari Total Kebutuhan yang seharusnya disiapkan Provinsi sebesar 601,64 Ton	Dukungan anggaran untuk pengadaan stok Cadangan beras pemerintah

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2019

4. Pertanahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 yang menjelaskan tentang urusan pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pertanahan adalah Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan

obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Kesembilan sub bidang urusan pertanahan yang secara *de jure* menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara *de facto* penanganannya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. Namun demikian, penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

- **Tanah Terlantar**

Memperkuat kesepakataan bersama Menteri Data tanah yang terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat seluas 166.027.457 Ha, semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan dan ada sebagian yang diusulkan menjadi tanah bermasalah, yang berlokasi di Kabupaten/Kota se-NTB seluas seluas 1.607.377 Ha, dan semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan, ada sebagian menjadi tanah bermasalah, termasuk ada juga badan usaha yang diberi kesempatan dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara, secara rinci. sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 118 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2019

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lombok Tengah	PT. Trisno Kenangan	a. Konversi Hak erfacth No.333/ 1966 b. 14 Des 1966 c. HGU	a. Batukliang b. Lantan dan Karang Sideman	355,1000	Perkebunan	Bangunan, Kolam Renang, Kebun Kopi, Tanaman Berkayu Keras	355,100	Kegiatan Penertiban 2013
2.	Lombok Timur	PT.Kosambi factory Lac Liendarto Wirawan	a. 31/HGU/BPN/1990	a.Sembalun b.Sajang	99,4160	Perkebunan Kosambi, dan	Hutan, Rumput, campur,	99,4160	Kegiatan Penertiban 2010, diusulkan

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		Jl.Kerta Jaya No.79A Surabaya	b. 20 Desember 1990 c. HGU			Penularan Kutu Lac	Tambak udang		sebagai TANAH TERLANTAR
		3.PT.Tanjung Kenanga Yahya Surya Buana,SE Jl.Panca Usaha No.1 Mataram	a. 80/HGU/DA/1988 b. 01 Januari 1988	a. Sambelia b. Belanting	38,5000	Perkebunan	Kebun, Pemukima, Tambak	38,5000	Kegiatan Penertiban 2013, pemberian PERINGATAN
		4.PT.Bumi Padak Goar	a. 540.3/01/1/HGU/62/2005 b. 13 Juli 2005 c. HGB	a.Sambelia b.Labu Pandan	85,1890	Tambak	Tambak Udang, Ladang	45,1890	Masuk dalam Kegiatan Penertiban Tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
3.	Sumbawa Barat	1.PT.Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.Pemecahan HGU 1 Senayan	a.Seteluk b.Senayan	1,9845	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	1,9845	
		2.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.HGU	a.Seteluk b.Senayan	93,4110	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekita	93,4110	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a. 72/HGU/BPN/1994 b. 27 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	156,0600	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	156,0600	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011, dengan keputusan diberi

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
									PERINGATAN
		4.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a. 540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b. 16 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	170,332	Tambak	Semak Belukar	170,332	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATANI
		5.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a.540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b.5 Juli 2001 c.HGU	a.Seteluk b.Senayan	70,1410	Tambak	Semak Belukar	70,1410	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
4.	Sumbawa	1.Pt.Alam Hijau Heny Firmansyah Desa Empang Bawah Kec.Empang Kab.Sumbawa	a.13/HGU/1987 b.15 oktober 1987 c.HGU	a.Empang b.Boal	650,0000	Tambak Udang	Bekas tambak, Tegalan, sawah, padak, usaha perikanan / tambak udang	650,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Multimina Mertasari kusnadi said Desa Rhee,Kec.Rhee,Kab.Sumbawa	a.07/HGU/02-BKPMD/1989 b.24 oktober 1989 c.HGU	a.Rhee b.Rhee	79,0739	Tambak Udang	Bekas Tambak, semak belukar	79,0739	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.Peterta	a.30.a/HGU/DA/80	a.Lape-Lapok	1.885,0000	peternakan	Semak belukar,	1.885,0000	Masuk dalam

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
			b.28 februari 1980 c.HGU	b.Lab.Kuris			padang rumput		kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.MINA AQUA CULTURA Yala Agra Pratama Inc	a.01/HGU/02-BKPDM/87 b.10 agustus 1987 c.HGU	a.Alas b.Gontar	98,0000	Tambak	Bekas Tambak	98,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		5.PT.Dinaco Widjaja Kusuma	a.01/HGU/02-BKPMB/90 b.20-06-1990 c.HGU	a.Moyo Hilir b.Penyaring	32,8178		Tambak	32,8178	
		6.PT.Dani Tama Land	a.25/HGU/BPN/2004 b.04 juli 2004 c.HGU	a. Moyo Hilir b.Penyaring	276,9101	Perkebunan jeruk dan agrowisata	Perkebunan jeruk	100,9101	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
5.	Kab.Dompu	1.PT.BALI ANACARDIA Toriqullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1650,9000	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, masjid, SD dan Semak/ rumput	1650,9000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010,dengan keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukse

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
									s Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		2.Pt.Bali Anacardia Toriqullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	3.889,5900	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, basecamp	3.889,5900	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dgn keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		3.Pt.Tugu Vanila Jaya Edi Toet Hendratno, SH Jl.Pejaten Mas V-B 16 Jakarta	a.19/HGU/BPN/1999 b.01 Maret 1999 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1.043,2400	Peternakan	Basecamp, pemagaran kandang, pemagaran hijau, makanan ternak, semak rumput & sapi 150 ekor	388,5000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.Lawata Permai H.idrus	a.06/HGU/BPN/1987 b.19/05/1987	a.pekat b.Doropeti	200,0000	Peternakan	Semak rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		Usman,BSC Jl.Belimbing-Bima	c.HGU						penertiban tahun 2010
		5.PT.Asia Tunggal Inti M.Budiman Hasta Centre Blok 16 Lt.I Kav.9 Jl.S.Parman, Jakarta	a.05/HGU/1993 b.05 maret 1993 c.HGu a.540.3/03/1/03/52/62/1994 b.29 desember 1994 c.HGU	a.pekat b.pekat a.pekat b.Tolokalo	999,6 143,18	Penggembalaan ternak sapi Penggembalaan ternak sapi	Kandang dan barak, bak air minum hewan dekat mata air, sapi 100 ekor dan semak/ rumput	999,6 143,18	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		6.Pt.Putra Purna Yudha Jl.Al Inabah No.22 Pancoran Jakarta Selatan	a.11/HGU/BPN/1989 b.17 oktober 1989 c.HGU	a.Pekat b.Doropeti	200,0000	peternakan	Semak/ rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
6.	Kab.Bima	1.Pt.Sondi Bima Sakti Dr.Sanusi H.Ibrahim Jl.Anggrek No.2 Kelapa Dua Kebun Jeruk Jak	a.540.3/02/1/62/1994 b.07 Juli 1994 c.HGU	a.Tawah b.Wera	112,0000	Peternakan sapi potong	Semak dan padang rumput	112,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Sanggar Agro Karya Persada I Drs.H.Anas	a.60/HGU/BPN/1996 b.14 desember 1996	a.Sanggar b.Piong	598,8000	Peternakan sapi	Peternakan,rumah jaga dan satu		Masuk dalam kegiatan penertib

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUN-TUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		Moezakir,MBA Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	c.HGU				kandang paksa		an tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.SANGGAR AGRO KARYA PERSADA I Drs.H.Anas Moezakir,MBA Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	a.22/hgu/bpn/1999 b.11 maret 1999 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	3962,0000	perkebunan	Sudah tidak digunakan oleh pemegang hak, seluas 477 Ha telah dimanfaatkan oleh masyarakat 159 kk, sebagai lahan perkebunan mente, tegalan, serta pemukiman, fasilitas umum dll.	3962,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.TERNAK LESTARI H.Jakariah H.Majid Jl.Tongkol,Pasar raya kota Bima	a.540.3/01/1/01/62/1994 b.19/04/1994 c.HGU	a.Wera b.Nunggi	100,0000	peternakan	Semak dan rumput	100,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
	Jumlah				**169.912.457**			**166.027.457**	

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

Adapun Langkah – langkah dan upaya yang sudah dilakukan :

a. Biro Pemerintahan melalui Bagian Bina Pertanahan hanya melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar.

b. Sementara untuk pemberian sanksi berupa peringatan terhadap Badan Usaha dan penetapan tanah terindikasi terlantar dilakukan oleh Badan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

- **Tanah Bermasalah**

Pada tahun 2019Sub Bagian Fasilitasi Tanah Bermasalah telah menidaklanjuti aduan masyarakat atas namaH. Umar Yusuf di Lombok Tengah dan memfasilitasi masalah tanah enclave dalam kawasan KEK Mandalika.

Atas aduan H. Umar Yusuf, yang bersangkutan diminta untuk berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Praya guna diterbitkan surat perintah eksekusi sebagai tindak lanjut putusan inkrah dari Mahkamah Agung. Sedangkan untuk masalah tanah enclave di kawasan KEK Mandalika telah di *take over* (ambil alih) oleh Saber Pungli Provinsi NTB.

Dalam upaya fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan tetap diupayakan melalui jalur musyawarah, mediasi dengan pihak-pihak terkait dan apabila tidak ada penyelesaiakan disarankan untuk menempuh jalur hukum.

Tabel 2. 119 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bagian Pertanahan, Bagian Administrasi Kewilayahan, Bagian Otonomi Daerah Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
- Peta Dasar Rupabumi merupakan peta yang masih bersifat indikatif sehingga tidak bisa diterapkan dalam penentuan batas wilayah - Permasalahan yang terjadi adalah tidak adanya kesepakatan antara pemerintah kab/kota dalam menentukan garis batasnya ada kecenderungan masing-masing daerah mau mmeperluas wilayahnya. - Adanya beberapa dokumen Batas yang bervariatif dan berbeda-beda cakupanwilayahnya - Lampiran pembentukan daerah baik pada Orde Lama maupun pada orde	- Melakukan fasilitasi penyelesaian batas wilayah dengan mengadakan rapat koordinasi Tim penegasan batas daerah - Mengadakan Orientasi laporan dengan memverifikasi wilayah yang disengketakan untuk dicarikan titik temunya - Pemerintah Provinsidan pemerintah Pusat menggunakan yang diberikan UU untuk menyelesaikan batas wilayah dengan mengambil sebuah keputusan

PERMASALAHAN	SOLUSI
reformasi, pembentukan daerah tidak ada peta lampirannya dan atau peta lampirannya akan tetapi tidak mencantumkan titik koordinat dan deliniasi garis batasnya - Masyarakat dan Aparat Pemerintah sebagian besar belum memahami tentang pembakuan nama rupabumi - Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pembakuan nama rupa bumi - Dukungan anggaran masih sangat kecil bila dibanding dengan beban tugas yang harus dicapai - Bupati/Walikota dalam menerbitkan pembentukan desa/kelurahan tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi - Persyaratan dasar pembentukan desa/kelurahan masih banyak yang belum di penuhi - Pemahaman terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 oleh pejabat yang menangani penataan desa masih rendah - Minimnya anggaran yang tersedia sehingga adanya keterbatasan dalam melakukan pembinaan - Minimnya anggaran yang tersedia dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan terutama terkait dengan DK/TP terutama yang berkaitan dengan RPJMD - Kesadaran aparatur bidang trantib dan linmas kab/kota dalam menyampaikan	- Mengaadakan sosialisasi terhadap para pelaku yang akan melaksanakan kegiatan pembakuan nama Rupabumi - Mengadakan training singkat dalam pembakuan nama rupa bumi - Melakukan pembakuan secara bertahap terhadap unsur buatan menyesuikan dengan anggaran yang tersedia - Mengembalikan berkas yang masih kurang untuk dilengkapi - Mengadakan Monitoring dan supervisi terbatas dalam rangka penataan desa - Mengajukan anggaran tambahan - Dukungan tambahan dana terutama terkait dengan DK/KP terutama berkaitan dengan RPJMD - Diperlukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah kab/kota secara intens dan perkunya tambahan dana terutama untuk monev bidang Trantib, Linmas dan Kebencanaan.

PERMASALAHAN	SOLUSI
laporan ke Gubernur cq. Biro Pemerintahan belum optimal - OPD Kab/Kota masih belum seragam yang menangani trantib dan linmas (sebagian di Pol PP dan sebagian msih di Kesbangpol, hal ini berdampak pada kelancaran penyampaian laporan Trantib dan Linmas Belum adanya kesepakatan penentuan batas daerah antara: - Kab. Sumbawa-Kab. Sumbawa Barat - Kab. Lombok Tengah-Kab. Lombok Barat.	- Fasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa; - Gubernur telah membuat Surat Percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah No. 100/013/ADM PEM tanggal 19 Januari 2015 perihal mendorong kepada kemendagri untuk menerbitkan permendagri tentang batas daerah sesuai dengan hasil pelacakan yang telah dilakukan oleh kemendagri bersama pemerintah Kab/kota dan Pemprov. - Telah dilakukan mediasi penyelesaian sebagaimana putusan dalam tabel tersebut diatas.

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

5. Lingkungan Hidup

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, urusan bidang lingkungan hidup dan kehutanan diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan 5 indikator sasaran yaitu 3 indikator pendukung IKU IKLH : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan serta indikator neraca pengelolaan sampah. dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2. 120 Capaian Indikator Kinerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Indikator	Satuan	2017	2018	Target 2019	Capaian 2019
1.	IKLH	-	56,99	75,16	57,09	75,16
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	-	20,25	74,63	22,75	74,63
3.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	-	88,02	87,17	88,45	87,17

4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	-	61,27	66,56	60,03	66,56
5.	Neraca Pengelolaan Sampah	%	-	51	60	NA*

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019
(Data IKLH dirilis resmi oleh Pusat Data dan Informasi KLHK)
**) Dalam tahap pengumpulan data neraca sampah dari kab/kota se-NTB*

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional, dimana IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. IKLH menjadi indikator pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep konsep Environmental Performance Index (EPI).

IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indikator Indeks Kualitas Air (IKA), parameter yang diukur 7 yaitu TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU), parameter yang diukur yaitu: SO2 dan NO2; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. Namun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup versi baru (IKLH baru) merupakan istilah baru yang menggabungkan keseluruhan jenis indeks kualitas lingkungan dari semua matra yang mencakup udara, air, hutan, flora, dan fauna, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan. IKLH versi baru ini dikembangkan dengan cara menggabungkan semua komponen indeks yang mencakup Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Keanekaragaman Hayati (IKH), Indeks Kesehatan Masyarakat (IKM), dan Indeks Kesehatan Lingkungan (IKL).

Nilai IKLH di Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Data hasil pemantauan kualitas air di sungai yang menjadi prioritas nasional, Pemantauan kualitas udara pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industry dan komersial serta Hasil analisis Citra Satelit tutupan lahan dan dinamika vegetasi pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH

adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30% IKA, 30% IKU dan 40% IKTL.

Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, IKLH NTB tahun 2018 menggunakan versi/metode baru sebesar 75,16. Hal ini berarti, nilai IKLH NTB mengalami kenaikan sebesar 18.63 jika dibandingkan IKLH tahun 2017 yaitu sebesar 56,99. Namun kedua nilai ini tidak dapat dibandingkan karena menggunakan metode yang berbeda. Kenaikan yang signifikan diakibatkan adanya penyempurnaan metode perhitungan pada komponen IKA dan IKTL. Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan bertambah 3, sehingga menjadi 10 parameter, yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS dengan perhitungan berdasarkan bobot dan transformasi nilai sub-indeks parameter kualitas air yang ditetapkan dalam metode Indeks Kualitas Air modifikasi Indonesia. Sementara pada komponen IKTL, parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% dan sempadan sungai, danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati. Kemudian untuk indeks kualitas udara (IKU), parameter yang diukur tetap, yaitu SO2 dan NO2.

Tabel 2. 121 Kriteria dan Indikator IKLH

No	Uraian	Paramater		Bobot
		IKLH Lama	IKLH Baru	
1.	Kualitas Air Sungai	TSS	TSS	30 %
		DO	DO	
		BOD	BOD	
		COD	COD	
		Total Fosfat	Total Fosfat	
		Fecal Coliform	Fecal Coliform	
		pH	Total Coliform	
		NH3-N	-	
		NO3-N	-	
		TDS	-	
2.	Kualitas Udara	SO2	SO2	30%
		NO2	NO2	

No	Uraian	Paramater		Bobot
		IKLH Lama	IKLH Baru	
3.	Kualitas Tutupan Lahan	• Luas Tutupan Hutan,belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dankawasanberfungsi lindung (sempadan sungai, danau dan pantai, lereng>25%) • RuangTerbuka Hijau, Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati	• Luas Tutupan Lahan • DinamikaVegetasi 40%	40%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga kedudukan IKLH baru akan sangat penting karena mempunyai potensi besar sebagai dasar kuat dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Pemerintah dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas yang akan terjadi.

Sementara itu potensi yang mempengaruhi capaian nilai IKLH meliputi industri makanan dan minuman, bahan bangunan, perhiasan, logam, perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, serta timbulan sampah. Disamping itu upaya intensif Dinas LHK NTB dalam mengurangi dan mencegah terjadinya illegal logging dan perambahan hutan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang secara otomatis dapat mempengaruhi nilai IKLH (40% dari nilai IKLH) secara keseluruhan. Nilai IKLH tahun 2019 belum tersedia, karena saat ini masih dalam tahap pengujian sampel kualitas air sungai dan udara yang dilaksanakan di 10 kabupaten/kota se NTB.

Adapun capaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2019 sebagai berikut:

- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian LHK setiap tahunnya melakukan Perhitungan dan Publikasi IKLH yang diperoleh dari hasil pengambilan sampel oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama tahun 2019. Sampai saat ini, data nilai IKLH belum

dipublikasikan oleh Pusdatin Kementerian Lingkungakan Hidup. Capaian IKLH selama tiga tahun sejak tahun 2017-2019 disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 122 Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2017 - 2019

Aspek	2016		2017		2018		2019	
IKLH	Target	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	67,84	56,53	67,89	67,89	67,95	75,16	57,09	75,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Data time series di atas telah mengikuti metode penghitungan baru khususnya untuk tahun 2018 sehingga terjadi perubahan kondisi kualitas lingkungan hidup NTB yang cenderung membaik jika dibandingkan pada periode RPJMD sebelumnya, bahkan IKLH 2018 telah melampaui target tahun 2019. Penetapan target IKLH 2019 sebesar 57,09 dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 berdasarkan tren nilai indeks yang cenderung menurun selama tahun 2016-2018 menggunakan metode penghitungan yang lama.

Pada bulan September 2019 Kementerian Lingkungan Hidup secara resmi menetapkan nilai IKLH Tahun 2018 untuk Provinsi NTB yaitu sebesar 75,16. Nilai ini melonjak cukup signifikan, yakni 18.15 poin lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IKLH Tahun 2017. Peningkatan nilai IKLH disebabkan karena adanya pengembangan metode perhitungan IKA dan IKTL. Untuk Tahun 2019 nilai IKLH masih dalam proses perhitungan dan diperkirakan akan sama dengan tahun sebelumnya dengan adanya berbagai program/kegiatan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Kondisi yang sama juga terjadi jika diperbandingkan dengan nilai IKLH Nasional. Terlihat peningkatan nilai IKLH dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, sedangkan untuk Tahun 2018 IKLH naik signifikan sebanyak 5.21 poin dikarenakan adanya pengembangan metode pada IKA dan IKTL.

Tabel 2. 123 Perbandingan Nilai IKLH NTB dengan IKLH Nasional

Aspek	2016		2017		2018		2019	
IKLH	Nasional	NTB	Nasional	NTB	Nasional	NTB	Nasional	NTB
	65,73	56,53	66,46	56,99	71,67	75,16	NA	75,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

1) Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum.

Kualitas air termasuk suatu subjek yang sangat kompleks dan dicerminkan dari jenis pengukuran dan indikator air yang digunakan karena kondisi air bervariasi seiring waktu tergantung pada kondisi lingkungan setempat. Air terikat erat dengan kondisi ekologi setempat sehingga Aktivitas industri seperti manufaktur, pertambangan, konstruksi dan transportasi merupakan penyebab utama pencemaran air, juga limpasan permukaan dari pertanian dan perkotaan.

Pengukuran akan lebih akurat jika dilakukan di tempat karena air berada dalam kondisi yang ekuilibrium dengan lingkungannya. Pengukuran di tempat, umumnya akan mendapatkan data mendasar seperti temperatur, pH, kadar oksigen terlarut, konduktivitas, dan sebagainya.

Indikator lingkungan untuk kualitas air dapat menggunakan indikator fisik seperti temperatur air, elektrokonduktivitas, padatan terlarut, padatan tersuspensi, transparansi, bau, warna dan rasa; indikator kimia seperti pH, BOD, COD, Tingkat kesadahan air, logam berat, Nitrat, Ortofosfat, Pestisida dan surfaktan; dan indikator biologis Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Mollusca, Escherichia coli. Dalam pengukuran indikator biologis, digunakan istilah EPT yang merujuk kepada Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera,tiga ordo serangga bersayap yang hidup di sekitar perairan. Index EPT, yaitu jumlah EPT ketika kondisi lingkungan sehat, dapat bervariasi di setiap daerah. Secara umum, semakin banyak organisme EPT, menunjukan bahwa kualitas ekologi perairan tersebut lebih sehat. Bencana Alam dan bencana buatan manusia akan mempengaruhi kualitas air suatu daerah secara cepat seperti bencana alam gempa bumi yang dialami NTB tahun 2018, sehingga perlu dilakukan pengukuran secara berkala untuk menentukan langkah terbaik dalam penanganan bencana dan mengembalikan kualitas air agar akses terhadap air bersih dan sanitasi tetap terpenuhi.

Untuk mendapatkan data IKA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menggunakan metode pemantauan dan pengambilan sample di 10 (sepuluh) sungai yang menjadi prioritas

Provinsi yaitu di wilayah Pulau Lombok pemantauan dilakukan di Sungai Sidutan, Babakan, Tojang, Dodokan dan Ancar. Pemantauan di wilayah Pulau Sumbawa dilakukan di Sungai Sari, Padolo, Rabalaju, Brang Rea dan Brang Biji. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA pada tahun 2018 adalah sebanyak 5 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, dan TSS. Capaian indikator Indeks Kualitas Air tahun 2017-2019 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 124 Indeks Kualitas Air Tahun 2017 – 2019

NILAI INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	
				Target	realisasi
Indeks Kualitas Air	27,19	20,25	74,63	22,75	74,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Data IKA NTB berdasarkan buku IKLH yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 mengalami revisi menjadi 74,63, terjadi peningkatan 54,38 point jika dbandingkan tahun 2017 yaitu 20,25. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode penghitungan dari 7 parameter terukur menjadi 10 paramater.

Berdasarkan klasifikasi dan skor Indeks Kualitas Air dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI bahwa IKA NTB tahun 2018 (versi baru) masuk dalam kategori sangat baik, berbeda dengan kondisi tahun sebelum rilis bulan september 2019 (masih menggunakan versi lama) yang masuk dalam kategori cukup sehingga perlu lebih mendapat perhatian sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2. 125 Kriteria Kondisi Air Berdasakan Skor IKA

Skor IKA	Kriteria
> 70	Sangat Baik
60 - 69	Baik
50 - 59	Cukup Baik
40 - 49	Sedang
< 39	Marginal

Sumber : Buku IKLH, Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan, 2018

Sementara untuk kondisi tahun 2019, pemerintah NTB masih melakukan pemantauan kualitas air sungai di 10 lokasi sungai di Provinsi

NTB dengan pengambilan sampling di 6 titik pada masing-masing lokasi. Sampai saat ini sudah dilaksanakan 2 kali tahap pemantauan di 5 (lima) sungai di wilayah Pulau Sumbawa yaitu pada Sungai Brang Biji (Kab Sumbawa), Brang Rea (Sumbawa), Rabalaju (dompu), Padolo (Kota Bima), dan sungai Sari (Kabupaten Bima) dan 1 kali tahap pemantauan di 5 (lima) sungai di Pulau Lombok yang dilaksanakan di Sungai Segara, Babak, Tojang, Dodokan, dan Ancar dan didanai APBD provinsi NTB. Harapannya pengambilan sampel dapat dilakukan di lebih banyak lokasi sehingga keterwakilan wilayah menjadi lebih lengkap dan data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Hasil sampling pemantauannya saat ini sedang dalam pengujian dan verifikasi oleh Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok. Hasil pemantauan tersebut kemudian diuji lebih lanjut di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok dan hasil uji tersebut disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Hasil uji tersebut diolah untuk memperoleh nilai IKA yang akan disampaikan secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengambilan sampel yang bertahap ini menyebabkan nilai indeks kualitas air tahun 2019 belum bisa terpublikasi. Namun, berdasarkan hasil sampling, parameter yang jauh melampaui baku mutu. Tingginya nilai Fecal Coliform disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit.

Perhatian lebih dari Pemerintah daerah dan seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan agar kualitas air di NTB dapat terus terjaga dan meningkat. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah komponen variabel yang mempengaruhi nilai IKA antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fuktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi, sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air tersebut harus terjadi sinergi program dan kegiatan unit kerja, kementerian terkait, demerintah daerah dan pelaku usaha.

Sebagai tindak lanjut dalam rangka pengendalian dan menjaga kualitas air NTB agar tetap dalam kategori baik dan terus meningkat yaitu salah satunya dengan menjaga kualitas air sungai di NTB, Dinas LHK melakukan upaya berupa penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan, evaluasi dan monitoring terhadap ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungannya, verifikasi dan peninjauan kasus lingkungan hidup, validasi dokumen KLHS, melibatkan masyarakat dalam program

adiwiyata dan kampung iklim dan pengembangan operasional TPA. Namun di sisi lain, musim kemarau berkepanjangan selama tahun 2019 juga berakibat pada meningkatnya jumlah e-coli yang dapat berpengaruh pada turunnya nilai IKA. Terkait kontribusi yang dominan dari sampah rumah tangga dan lingkungan permukiman terhadap kualitas air NTB, dinas LHK sudah melakukan beberapa upaya strategis yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan teknis dan pemberian bantuan sarpras bank sampah, Bantuan peralatan pendukung sarpras bank sampah (gudang unit bank sampah, gerobak angkut sampah, karung, timbangan) sebagai upaya pengurangan jumlah timbunan sampah dari sumbernya dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan melalui bimbingan teknis yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penurunan jumlah timbunan sampah yang harus diangkut ke TPA. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat desa dalam mengelola sampah dengan metoda 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*); memberikan penguatan teknis dalam mengolah sampah organik yang diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan sampah anorganik melalui bank sampah; mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah; serta mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kreatif berbasis bank sampah.

2. Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi
   Pemerintah Provinsi Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Yayasan Forest for Life Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun pabrik percontohan pengolahan sampah organik dengan teknologi biokonversi yaitu menggunakan lalat hitam (*Black Soldier Fly*/BSF). *Black Soldier Fly* (BSF) atau *Hermetia illucens* adalah salah satu jenis lalat yang memiliki keunikan tidak memiliki mulut sehingga tidak mengganggu kesehatan, larvanya (maggot) memiliki kemampuan untuk mengolah bahan organik secara menjadi sumber protein, penghasil pupuk organik atau pupuk hayati dan produk turunan lainnya yang bermanfaat untuk pertanian, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini merupakan upaya alternatif pengolahan sampah yang ramah lingkungan dalam rangka mengurangi volume sampah khususnya sampah organik. Kapasitas pabrik pengolahan sampah BSF untuk tahap awal direncanakan maksimal 4,8 ton/hari, dari 2 bioreaktor (masing-masing memiliki 24 ruang bioreaktor kecil).

Untuk tahap awal, Dinas LHK telah bekerjasama dengan hotel-hotel di Kota Mataram dan para karyawan Dinas LHK untuk mengumpulkan dan memilah sampah organiknya serta dikirim ke pabrik pengolahan sampah.

Jika dibandingkan dengan data IKA secara nasional, nilai IKA Provinsi NTB pada Tahun 2018 sudah berada 1.86 poin di atas nasional. Namun untuk Tahun 2019, data hasil pengolahan sampel uji IKA belum dipublikasikan oleh Pusdatin KLHK namun diperkirakan akan sama dengan tahun 2018.

Tabel 2. 126 Perbandingan Nilai IKA NTB dengan IKA Nasional

Aspek	2016		2017		2018		2019	
IKA	Nas	NTB	Nas	NTB	Nas	NTB	Nas	NTB
	60,38	27,19	60,38	27,19	72,77	74,63	NA	74,63

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air di NTB masih jauh lebih baik dari kualitas air secara nasional. Hasil uji sampling tahun 2019 untuk kualitas air sungai dijadikan acuan oleh bidang teknis lingkungan hidup Dinas LHK NTB untuk melakukan identifikasi, sosialisasi, kerjasama antar instansi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya untuk mendukung pengendalian pencemaran air di titik-titik yang tercemar sesuai dengan data.

Beberapa upaya strategis dalam rangka penanganan dan pengendalian kualitas air sungai di NTB Pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas LHK NTB antara lain :

1. Melakukan Pengkajian dan penilaian dokumen lingkungan;
2. Melakukan verifikasi pengaduan terhadap kasus lingkungan hidup, serta mengintensifkan pengawasan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup;
3. Melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
4. Partisipasi masyarakat melalui program Adiwiyata dan Kampung Iklim;
5. Monitoring dan evaluasi PROPER kepada pelaku usaha (kegiatan sumber dana APBN).

2) Indeks Kualitas Udara

Kualitas udara adalah angka yang menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat. Indeks Kualitas Udara dibuat untuk memberikan

kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan metode passive sampler yang dilakukan di 4 (empat) lokasi sampling, yaitu: transportasi, industri, permukiman, dan perkantoran dan parameter yang diuji adalah SO_2 dan NO_2.

Tabel 2. 127 Klasifikasi Kategori Kualitas Udara Berdasarkan Nilai Indeks Kualitas Udara

Nilai IKU	Kategori
> 91	Sangat Baik
82 - 91	Baik
72 - 81	Cukup Baik
62 - 71	Kurang Baik
52 - 61	Sangat Kurang Baik
< 51	Waspada

Sumber : Buku IKLH, Kementerian LIngkungan HIdup dan Kehutanan, 2018

Metode lain penentuan kualitas udara adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) (Air Pollution Index/ API) yaitu laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. ISPU ditetapkan berdasarkan 5 pencemar utama, yaitu: karbonmonoksida (CO), sulfurdioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), Ozon Permukaan (O_3), dan partikel debu (PM). ISPU juga dapat sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara di wilayah terkait.

ISPU di Indonesia diatur berdasarkan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997.

Tabel 2. 128 Indeks Standar Pencemar Udara

ISPU	Pencemaran Udara Level	Dampak kesehatan
0 - 50	Baik	tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan.
51 - 100	Sedang	tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.
101 - 199	Tidak Sehat	bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
200 - 299	Sangat Tidak Sehat	kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300 - 500	Berbahaya	kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi (misalnya iritasi mata, batuk, dahak dan sakit tenggorokan).

Sumber : Buku IKLH, Kementerian Lingkungan HIdup dan Kehutanan, 2017

Sementara itu, melihat sarana prasarana dan kondisi yang ada di NTB maka digunakan metode passive sampler dengan mengambil sample di empat lokasi sampling. Jika menggunakan metode ISPU, NTB hanya memiliki 1 alat yang di pasang di Kota Mataram (tahun 2018) sehingga tidak mewakili situasi dan kondisi udara di NTB. Pemantauan kualitas passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji. Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Dinas LHK NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap beberapa pelaku usaha melalui kegiatan PROPER. Perusahaan dipastikan untuk tetap melaksanakan kewajibannya dalam pengendalian pencemaran udara, yakni tetap wajib taat terhadap : (1) titik penaatan pemantauan, (2) pelaporan, (3), parameter baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, (4) pemenuhan baku mutu emisi sesuai dengan peraturan berlaku, dan (5) ketentuan teknis yang dipersyaratkan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan pengukuran kualitas udara ambien sekurang-kurangnya 6 bulan sekali sesuai dengan PP Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Kewajiban lainnya ialah menyampaikan laporan setiap enam bulan tentang pengujian emisi udara manual atau sesuai

dengan dokumen pemantauan UKL/UPL kepada Dinas LH kab/kota setempat, Dinas LHK Provinsi, dan Kementerian LHK.

Berdasarkan standar klasifikasi dan rentan nilai IKU yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014), maka nilai IKU NTB tahun 2018 tergolong kategori Baik (data tahun 2019 masih NA) atau dapat diartikan kualitas udara Provinsi NTB masih tergolong baik apabila dilihat dari parameter SO_2 dan NO_2 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 129 Indeks Kualitas Udara (IKU) NTB Tahun 2017 – 2019

Indikator	Capaian			
	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019
Indeks Kualitas Udara	88,02	87,17	88,45	87,17

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

IKU NTB tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,85 point dari tahun 2017 sebesar 88,02. Penurunan nilai indeks disebabkan oleh beberapa hal antara lain cuaca, arah angin, kebakaran hutan, emisi kendaraan, dan pengaruh pembangunan lainnya, sedangkan untuk tahun 2019, nilai IKU hasil dari pengolahan data passive sampler diperkiran sama dengan tahun 2018. Umumnya, data tersebut akan tersedia pada pertengahan tahun 2020. Mengacu pada data nilai IKU Tahun 2018, maka nilai IKU di Tahun 2019 akan tetap berada pada kriteria Baik (di atas 80). Hasil perhitungan IKU NTB tahun 2018 secara rinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 130 Hasil Perhitungan Sampel untuk Perolehan Nilai IKU NTB Tahun 2018

No	Kab/Kota	Peruntukan	Koordinat		Konsentrasi NO_2 Rata-Rata Tahunan ($\mu g/Nm^3$)		Konsentrasi SO_2 Rata-Rata Tahunan ($\mu g/Nm^3$)	
			N/S	E/W	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	LOMBOK BARAT (5201)	Transportasi	-8,6823833	116,1245667	7,60	5,60	8,54	8,94
		Industri	-8,7210167	116,0821333	5,90	3,70	9,86	12,75
		Pemukiman	-8,6715500	116,1361833	6,40	6,00	6,42	7,71

No	Kab/Kota	Peruntukan	Koordinat		Konsentrasi NO_2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm³)		Konsentrasi SO_2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm³)	
			N/S	E/W	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
		Perkantoran	-8,6842167	116,1371333	4,40	3,60	10,20	11,49
		Blank	-	-	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
2.	LOMBOK TENGAH (5202)	Transportasi	-8,6965547	116,2541719	7,90	9,00	3,98	<2.57
		Industri	-8,6485503	116,1905155	9,00	8,20	6,85	5,14
		Pemukiman	-8,7090917	116,2643783	8,70	5,70	2,60	<2.57
		Perkantoran	-8,7034987	116,2652559	Hilang	7,50	Hilang	<2.57
		Blank	-	-	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
3.	LOMBOK TIMUR (5203)	Transportasi	-8,6461111	116,5186111	18,00	19,80	6,09	5,14
		Industri	-8,5408500	116,6297500	11,60	8,40	4,13	4,68
		Pemukiman	-8,6566644	116,5376550	10,60	9,10	<2.57	<2.57
		Perkantoran	-8,7900000	116,8633333	13,20	13,40	5,60	3,18
		Blank	-	-	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
4.	SUMBAWA (5204)	Transportasi	-8,3540556	116,1606667	20,60	23,10	11,34	7,17
		Industri	-8,3970556	116,1067500	28,50	30,20	14,55	12,24
		Pemukiman	-8,3638333	116,1387500	6,50	8,50	3,51	4,68
		Perkantoran	-8,3541389	116,1534444	11,40	11,10	10,61	8,18
		Blank	-	-	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
5.	DOMPU (5205)	Transportasi	-8,5930556	116,1521944	20,20	15,00	4,25	<2.57
		Industri	-8,5979444	116,1084444	11,20	10,30	3,25	<2.57
		Pemukiman	-8,5806194	116,1168833	11,00	11,00	<2.57	<2.57
		Perkantoran	-8,6409111	116,1905056	9,40	8,00	3,31	<2.57
		Blank	-	-	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
6.	KAB. BIMA (5206)	Transportasi	-8,7347222	116,8512778	20,30	16,80	15,47	12,85
		Industri	-8,7735556	116,8907500	11,80	10,90	7,53	7,71
		Pemukiman	-8,7418889	116,8557778	9,70	7,50	6,23	5,14
		Perkantoran	-8,7553056	116,8517500	14,50	15,40	3,55	<2.57
		Blank			<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
7.	KAB. SUMBAWA BARAT (5207)	Transportasi	-8,6780556	118,4841667	9,20	9,60	15,02	12,85
		Industri	-8,6577778	118,5841667	10,90	11,20	13,88	12,08
		Pemukiman	-8,5997222	118,6219444	12,20	13,20	20,20	17,99
		Perkantoran	-8,5547222	118,7041667	7,20	8,10	3,37	4,13
		Blank			<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
8.	LOMBOK UTARA (5208)	Transportasi	-8,5882600	118,6955800	6,40	5,90	10,33	10,28
		Industri	-8,5881800	118,6054400	7,30	7,20	7,04	8,31
		Pemukiman	-8,5019200	118,6190600	5,00	3,50	3,30	3,57

No	Kab/Kota	Peruntukan	Koordinat		Konsentrasi NO_2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm³)		Konsentrasi SO_2 Rata-Rata Tahunan (µg/Nm³)	
			N/S	E/W	Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
		Perkantoran	-8,5054300	118,6161700	4,10	3,30	4,10	4,61
		Blank			<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
9.	MATARAM (5271)	Transportasi	-8,4885556	117,4181667	18,80	10,40	7,41	6,02
		Industri	-8,4737500	117,3961667	16,30	13,20	9,95	6,48
		Pemukiman	-8,5023333	117,4343333	11,80	12,60	3,09	3,46
		Perkantoran	-8,6270000	117,4047778	22,80	14,30	12,42	10,28
		Blank			<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
10.	KOTA BIMA (5272)	Transportasi	-8,4548778	118,7264861	16,80	16,80	7,71	5,14
		Industri	-8,4930528	118,7143972	18,20	20,80	5,14	<2.57
		Pemukiman	-8,4508472	118,7276389	15,50	14,80	<2.57	<2.57
		Perkantoran	-8,4618194	118,7488722	14,90	10,90	9,45	6,98
		Blank			<0.41	<0.41	<2.57	<2.57

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Pemantauan kualitas udara sampai dengan November 2019, sudah dilakukan 2 (dua) tahap yang berlokasi di 10 (sepuluh) lokasi titik pantau yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB. Metodologi perhitungan Indeks Kualitas Udara mengadopsi Program European Union (EU) melalui EUROPEAN Regional Development Fund pada Regional Initiative Project. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia, masih mengacu pada PP 41/1999 yang bersifat longgar maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU. Berdasarkan Referensi EU untuk kualitas udara, baku mutu parameter SO2 dan NO2 masing-masing adalah 20 µg/Nm3 dan 40 µg/Nm3. Data hasil sampling telah dikirimkan ke PUSARPEDAL untuk diuji. Pengambilan sampel yang bertahap ini menyebabkan nilai Indeks Kualitas Udara belum bisa dihitung sampai dengan tahun 2019. Lokasi titik pantau sementara Kualitas Udara Ambien di Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 2019 sebagaiman tabel dibawah ini.

Tabel 2. 131 Lokasi Titik Pantau Kualitas Udara di Pulau Lombok dan Sumbawa Tahun 2019

Kab/Kota	Peruntukan	Lokasi	Koordinat	
			N/S	E/W
	Transportasi	Jl. Gatot Subroto, (Depan Kantor Camat Gerung)	-8.6823833	116.1245667

Kab/Kota	Peruntukan	Lokasi	Koordinat	
			N/S	E/W
LOMBOK BARAT (5201)	Industri	Jl. Raya Lembar, (Belakang Kantor Camat Lembar)	-8.7210167	116.0821333
	Pemukiman	Jl. Jend. Sudirman, (BTN Pemda Gerung)	-8.6715500	116.1361833
	Perkantoran	Jl. Soekarno - Hatta, (BLH Kab. Lombok Barat)	-8.6842167	116.1371333
	Blank	-	-	-
LOMBOK TENGAH (5202)	Transportasi	Jl. Gajah Mada No. 37 - Leneng Praya - Kab. Loteng NTB	-8.4142072	116.1511386
	Industri	Jl.TGH.Ibrahim Embung Duduk Desa Labulia Jonggat	-8.3840772	116.1126792
	Pemukiman	BTN PEMDA Blok B/6 Bonter Bunut Baok Praya	-8.4213406	116.1742172
	Perkantoran	DLH Loteng Jl. Mamik Ocet Talib Leneng Praya	-8.4211645	116.1554860
	Blank	-	-	-
LOMBOK TIMUR (5203)	Transportasi	SPBU Pancor	-8.3846000	116.3107000
	Industri	PT. IRADAT AMAN - PRNGGABAYA	-8.3227020	116.3747230
	Pemukiman	Lingkungan Kebon - Talo Selong	-8.3923500	116.3219000
	Perkantoran	Dinas LH dan Kebersihan - Kab. Lotim	-8.3849850	116.3158610
	Blank	-	-	-
LOMBOK UTARA (5208)	Transportasi	SPBU 54.333.12 Tanjung	-90766018.4757	408696.4943
	Industri	Kantor Desa Pemenang Barat	-9070481.9880	401066.2252
	Pemukiman	Perumahan Bumi Tanjung Nusantara - Tanjung	-9075375.9692	405150.9573
	Perkantoran	Kantor Bupati KLU Tanjung	-9076142.8089	407403.5332
	Blank	-	-	-
MATARAM (5271)	Transportasi	Kantor Pertamanan, Jl. Sandubaya No. 88	-8.5930556	116.1521944
	Industri	Paud Raudatul Jannah, Jl. Bangil 11 Taman Baru	-8.5979444	116.1084444
	Pemukiman	Jl. Pariwisata Gg. VI No. 12 - Mataram	-8.5806194	116.1168833
	Perkantoran	Kantor Walikota, Jl. Pejanggik	-8.6409111	116.1905056
	Blank	-	-	-

Kab/Kota	Peruntukan	Lokasi	Koordinat	
			N/S	E/W
SUMBAWA BARAT	Transportasi	Rumah Sakit Asy-Syifa - Kab. Sumbawa Barat	-8.4405900	116.5103000
	Industri	Kantor Camat Maluk - Kab. Sumbawa Barat	-8.4624800	116.5326700
	Pemukiman	Kantor Kelurahan sampir	-8.4430900	116.5121000
	Perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup, KSB	-8.4405000	116.5104600
	Blank			
DOMPU	Transportasi	Jln. Soekarno-Hatta, Dompu (Komplek Pasar Atas Dompu)	-8.5394400	118.4613910
	Industri	Jln. Lintas Rime - Dompu Desa Mangglasi - Dompu	-8.5249726	118.4736323
	Pemukiman	Jln. Mujair Kelurahan Bali (Kantor Kelurahan Bali)	-8.5373537	118.4602557
	Perkantoran	Jln. Beringin No. 1 Dompu (Komplek Kantor Bupati)	-8.5361937	118.4596731
	Blank			
KAB BIMA	Transportasi	Kantor Desa Talabiu,Jl. Lintas Sumbawa Talabiu Kec. Wona	-8.5882600	118.6955800
	Industri	Kantor Desa Tente, Jl. Buya Hamka, Tente Kec. Wona	-8.5881800	118.6054400
	Pemukiman	Polsek Kecamatan BOLO, Jl. Pendidikan, Rato , Kec. Bolo	-8.5019200	118.6190600
	Prkantoran	Kantor UPTD Kearsipan Jl. Lintas Sumbawa Kec. Bolo	-8.5054300	118.6161700
	Perkantoran	Kantor Bupati Bima Jl. Soekarno-Hatta No. 1 Woha	-8.5624658	118.6705542
	Blank			
SUMBAWA	Transportasi	TAMAN TUGU ADIPURA - JL. GARUDA SUMBAWA BESAR	-8.2918600	117.2505500
	Industri	AREA PT SEGER - Jl. LINTAS SUMBAWA	-8.2308300	117.2730100
	Pemukiman	KOMP.PERUMAHAN BRANG BARA	-8.3008100	117.2523100
	Perkantoran	Dinas LH Kab.Sumbawa Jl.Garuda 96	-8.2843700	117.2427900
	Blank			
KOTA BIMA	Transportasi	Masjid Sultan Salahudin - Jl. Soekarno-Hatta	-8.4548800	118.7264860
	Industri	SDN 61 Kota Bima	-8.4378380	118.7411240

Kab/Kota	Peruntukan	Lokasi	Koordinat	
			N/S	E/W
	Pemukiman	BS. SARAE MARASO - Kel. Sarae - Kota Bima	-8.4508472	118.7276389
	Perkantoran	Kantor Walikota Bima - Jl. Soekarno-Hatta	-8.4618194	118.7488722
	Blank			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Nilai IKU juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi. terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi. Untuk itu upaya yang dilakukan Dinas LHK untuk mendorong peningkatan Indeks Kualitas Udara di provinsi NTB pada tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai berikut

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015, atau dengan kata lain Indeks Kualitas Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. IKTL dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL=0{,}23\ ITH+0{,}24\ IPH+0{,}30\ IKT+0{,}15\ IKBA+0{,}08\ IKH$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
ITH = Indeks Tutupan Hutan
IPH = Indeks Performance Hutan
IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah
IKBA = Indeks Konservasi Badan Air
IKH = Indeks Kondisi Habitat

4) Indeks Tutupan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Penghitungan ITH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman.

Perhitungan ITH diasumsikan bahwa daerah yang ideal memiliki kawasan hutan adalah Provinsi Papua pada tahun 1982 (84,3% dari luas wilayah administrasinya). Asumsi yang digunakan dalam penghitungan ITH bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai ITH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3% dari luas wilayah administrasinya.

5) Indeks *Performance* Hutan (IPH)

Pengamatan permukaan bumi menggunakan citra satelit secara simultan pada periode yang panjang, baik musiman dan tahunan; akan memberikan informasi dinamika temporal vegetasi. Hasil penelitian Setiawan et al. (2014) mengindikasikan bahwa karakterisasi dinamika temporal vegetasi dalam waktu yang panjang dapat dipergunakan untuk mengamati tren perubahan yang terjadi pada satu kelas penggunaan lahan, baik perubahan yang bersifat gradual akibat variasi iklim ekstrim, maupun perubahan drastis akibat manusia maupun alam (contohnya: perubahan penggunaan lahan dan kebakaran hutan). Karakterisasi perubahan ini merupakan alternatif metode untuk mengetahui trend perubahan tutupan lahan secara kontinyu, sehingga dapat dipergunakan untuk melihat performa tutupan hutan.

6) Indeks Kondisi Tutupan Tanah (IKT)

IKT merupakan nilai dari fungsi tutupan lahan atau tanah terhadap konservasi tanah dan air. Indeks ini terkait dengan parameter

koefisien tutupan lahan yang ditentukan berdasarkan fungsi konservasi tanah dan air Nilai indeks kondisi tanah dihitung dengan memberikan nilai indeks terbesar sebesar 100 dan terkecil sebesar 50.

7) Indeks Konservasi Badan Air (IKBA)

Indeks konservasi badan air merupakan fungsi dari sempadan sungai/danau dalam menjaga kualitas badan air. Dalam hal ini fungsi hutan sebagai buffer di areal sekitar ekosistem riparian (riparian buffer) untuk menjaga kualitas air tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Prinsip perhitungan nilai indeks konservasi badan air sama dengan perhitungan indek tutupan hutan. Nilai indeks konservasi badan air bernilai 100 apabila tutupan lahan di sempadan sungai atau danau adalah 100% hutan dan bernilai 50 apabila 30% adalah hutan.

8) Indeks Kondisi Habitat (IKH)

Keanekaragaman hayati di suatu habitat ditentukan oleh luas habitat tersebut berdasarkan teori biogeografi pulau (Island Biogeography Theory). Semakin luas habitat (dalam hal ini tutupan hutan) maka akan semakin tinggi keanekaragaman hayatinya. Pemahaman ini digunakan sebagai proxy untuk menduga keanekaragaman hayati dalam perhitungan IKLH. Asumsi yang digunakan adalah apabila semakin luas core/interior hutan dalam setiap patch maka semakin tinggi nilai keanekaragaman hayati habitat tersebut.

Nilai IKTL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3.

Metode perhitungan IKTL yang digunakan pada tahun 2017 adalah perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman. Namun pada tahun 2018, terdapat penyempurnaan metode perhitungan, parameter yang dinilai kembali hanya memperhitungkan tutupan lahan berupa tutupan hutan dengan menambahkan tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, dan kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan >25% (0,6 dari tutupan hutan), ruang terbuka hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan) dan sempadan sungai,

danau, pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 2. 132 Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019

Indikator	Capaian			
	2017	2018	Target 2019	Realisasi 2019
Indeks Tutupan Lahan	61,27	66,56	60,03	66,56

Sumber : IKLH Tahun 2019

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Tahun 2018 tutupan lahan NTB mengalami peningkatan 5,29 point dibandingkan tahun 2017. Data kualitas tutupan lahan secara nasional berkisar pada nilai 56 sampai dengan 59 (tertinggi di Tahun 2014). Artinya secara umum, kondisi kualitas tutupan lahan di NTB lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas tutupan lahan nasional. Nilai IKTL di Indonesia berasal dari hasil penafsiran dari citra landsat yang dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai gambaran kondisi alih fungsi lahan di beberapa wilayah hutan NTB. Sebagai informasi, angka tutupan hutan dalam kurun waktu 2014-2015 turun sebesar 1,29% atau 10.832 ha, Sawah dan permukiman semakin luas, sementara penutupan lahan terus berkurang.

Jika mengacu pada nilai IKTL beberapa tahun sebelumnya, ditambah dengan adanya peningkatan nilai dari tahun 2017 ke Tahun 2018, diperkirakan nilai IKTL untuk Tahun 2019 akan tetap berada di atas nilai 60. Nilai IKTL NTB Tahun 2018 lebih tinggi 5,53 poin dibandingkan dengan IKTL Nasional sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 133 Perbandingan Nilai IKTL NTB dengan IKLH Nasional tahun 2017-2019

Aspek	2017		2018		2019	
IKTL	Nas	NTB	Nas	NTB	Nas	NTB
	56,88	61,27	61,03	66,56	NA	66,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Rutinitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan

reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif, sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global.

Rehabilitasi hutan ditargetkan seluas 3.000 ha, sampai Oktober 2019, progress pelaksanaannya dalam tahap telah melakukan identifikasi calon lokasi dan penyusunan rancangan teknis kegiatan RHL sebagai acuan dalam pelaksanaan teknis pembuatan bibit dan penanaman bibit RHL. Penanaman akan dilakukan setelah curah hujan setiap harinya mulai stabil.

Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan melalui daerah tangkapan, dengan membuat bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Tahun 2019, direncanakan akan dibangun 80 bangunan sipil teknis di beberapa wilayah KPH NTB. Proses pelaksanaan sampai dengan semester II telah dibangun bangunan sipil teknis di beberapa wilayah KPH NTB berupa 31 unit DAM Penahan, 39 unit Gully Plug, dan 61 unit Sumur Resapan Air.

Sementara itu upaya dari sisi legalitas, operasi pengamanan hutan juga dilaksanakan di areal hutan seluas 129.250 hektar dalam rangka meningkatkan tutupan lahan dengan menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan juga dilakukan secara tuntas. Selain itu, juga upaya penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas yangi diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan.Selain Satgas tersebut di atas, telah dibentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2018 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.

- **Indikator Neraca Pengelolaan Sampah**

  Berdasarkan Laporan capaian Jakstrada Tahun 2018, persentase sampah terkelola adalah 40% dan yang tidak terkelola sebanyak 60%. Data tersebut berdasarkan pengelolaan sampah di TPA Regional Kebon

Kongok. Sedangkan data tahun 2019 belum tersedia. Kendala yang dihadapi adalah pengumpulan data sampah terkelola dari seluruh bank sampah binaan Dinas LHK di kab/kota. Aplikasi SMASH (Sistem Online Manajemen Sampah) belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media penyampaian data sampah terkelola secara realtime. Sebagai upaya untuk menghasilkan data neraca pengelolaan sampah provinsi NTB, Dinas LHK telah berkoordinasi dengan LH Kab/Kota sebagai upaya percepatan pengumpulan data neraca pengelolaan sampah..

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah besarnya angka timbulan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas penanganannya. Contoh, di Kota Mataram jumlah infrastruktur yang ada hanya dapat menangani sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan, sisanya 30% menjadi permasalahan yang harus kita jawab bersama. Selain itu belum optimalnya peranserta masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, turut menyebabkan kompleksnya permasalahan sampah di Provinsi NTB.

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Provinsi NTB Pada tahun 2018, mencanangkan program Unggulan yaitu Zero Waste dengan target tahun 2023 Provinsi NTB telah mengolah 100% sampahnya dengan rincian 30% diolah pada bank sampah dan 70% pengolahan sampah dilakukan di TPA. Zero Waste atau nir-sampah adalah konservasi sumberdaya, melalui peningkatan tanggung jawab dalam melakukan produksi, konsumsi, penggunaan kembali dan pemulihan semua produk, serta saat melakukan pengemasan bahan, tanpa membakarnya dan tanpa membuangnya ke tanah, air, atau udara, yang mengancam lingkungan atau kesehatan manusia. Berdasarkan definisi tersebut, nir-sampah adalah sekumpulan prinsip dasar yang fokus pada upaya pencegahan timbulnya sampah, melalui re-desain siklus hidup sumberdaya, sehingga semua produk yang dihasilkan bisa digunakan kembali, tidak dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA), insinerator, sungai, dan laut. Sayangnya, hingga saat ini, hanya 9% sampah plastik yang benar-benar berhasil didaur ulang. Nir-sampah merupakan tujuan ideal yang sangat sulit dicapai. Namun, demi bersih dan lestarinya bumi tercinta, konsep ini harus tetap hidup dan menjadi prinsip yang memandu kita untuk terus bekerja menuju pengentasan sampah.

Untuk itu dilakukan upaya penanganan dua arah yang pertama melalui upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem penanganan sampah dari TPS hingga di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kedua adalah upaya pengurangan jumlah timbulan sampah melalui pengelolaan sampah secara intensif dari sumber timbulan

sampah, sehingga diharapkan jumlah sampah yang tidak dapat terangkut dapat mencapai tingkat minimum atau bahkan nol (zero waste).

Secara umum pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 strategi yaitu Pengurangan dan Penanganan. Kegiatan pengurangan menitikberatkan pada peran masyarakat/kelompok dalam mengelola sampah, sedangkan kegiatan penanganan melalui optimalisasi (efisiensi dan efektifitas) sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah. Kedua strategi baik pengurangan dan penanganan, tetap berpegang teguh pada konsep pengelolaan sampah berkelanjutan yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya melalui 3R (Reduce, Reuse and Recycle) dan ekonomi sirkular.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, bahwa pemerintah mendorong upaya pengelolaan sampah organik melalui komposting dan sampah non organik melalui bank sampah. Kedua kegiatan ini perlu dimasifkan dengan membentuk kelompok-kelompok pengelola sampah di masyarakat agar sampah sebanyak mungkin dapat diselesaikan di sumbernya dan hanya tersisa sedikit residu untuk diangkut ke TPA.

Dalam rangka mewujudkan hal diatas, upaya pengurangan jumlah timbulan sampah dari sumbernya, pemerintah provinsi NTB melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi penurunan jumlah timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal dari berbagai aspek, perlu dibangun koordinasi yang saling bersinergi antara para pihak untuk ambil bagian dalam upaya pengelolaan sampah uga berdasarkan peranan dan fungsi masing-masing. Selain itu Dinas LHK melaksanakan kegiatan bimtek kepada kelompok pengelola persampahan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan SDM masyarakat desa dalam mengelola sampah dengan metoda 3R (Reduce, Reuse dan Recycle); memberikan penguatan teknis dalam mengolah sampah organik yang diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan sampah anorganik melalui bank sampah; mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah; serta mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kreatif berbasis bank sampah.

Program Inovasi dalam upaya mengejar target 70% sampah diolah di TPA perlu dilakukan untuk mempercepat pencapaian target RPJMD. Salah satu yang dilakukan dengan mengolah sampah dengan sistem

waste to energy, alternatif pengolahan yang akan dilakukan di TPA Regional Provinsi NTB. Sampah dalam Sanitary Landfill akan terdekomposisi dan menghasilkan gas. Produksi gas metan dari sampah yang ada di TPA dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif sehingga dampak dari gas metan yang ada di TPA dapat di manfaatkan secara optimal tentunya dengan sentuhan teknologi. Manfaat yang diperoleh antara lain untuk menerangi perumahan di sekitar TPA.

Rantai Layanan Pengelolaan Sampah ini menggambarkan alur neraca pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, yang mencakup pengurangan (reduksi) sampah dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengurangan yang dimaksud dilakukan melalui: pembatasan timbulan sampah; (ii) pendauran ulang dan atau (iii) pemanfaatan kembali sampah. Sementara penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Rancangan model pengelolaan sampah menuju NTB Zero Waste 2023 adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 18 Model Pengelolan Sampah Menuju NTB Zero Waste

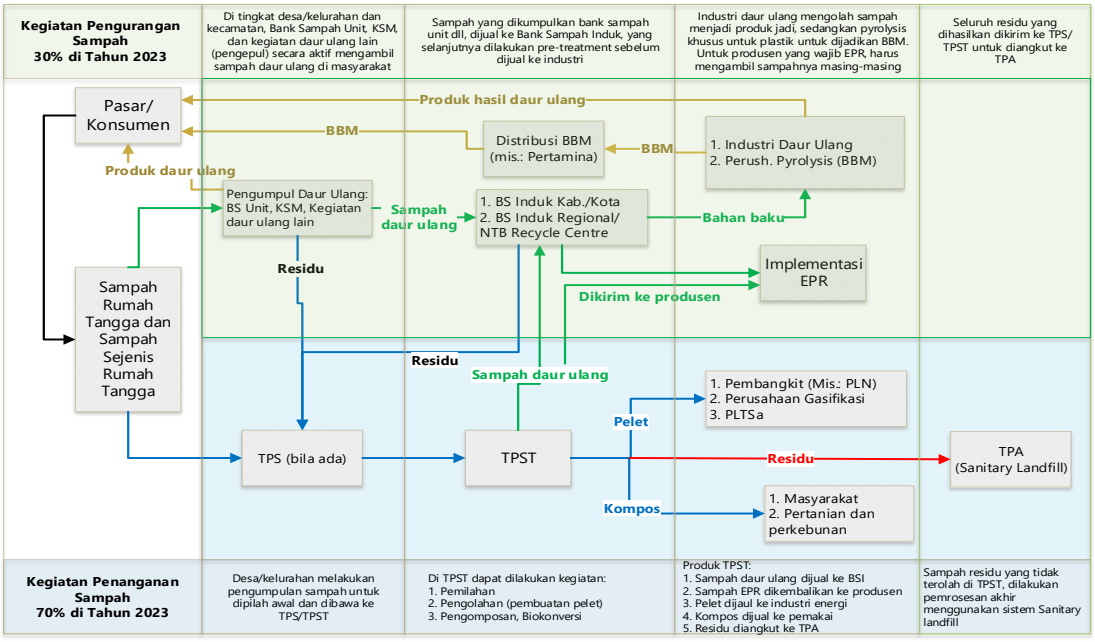

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Ket: Garis biru dapat dihitung sebagai penanganan dan garis hijau sebagai pengurangan.

Kegiatan pengurangan sampah dimulai dari sumbernya baik itu rumah tangga, area komersil, perkantoran, hotel, restoran, pasar, dll. Sumber sampah wajib melakukan pemilahan sampah minimal 3 jenis :

daur ulang, organik, dan sampah lain. Sumber sampah juga wajib melakukan kegiatan pengurangan/pembatasan sampah. Dikoordinir oleh kepala desa/lurah dan camat pengumpul swadaya (Bank Sampah, Kelompok Swadaya Masyarakat, Pengepul, dan lain-lain) secara aktif melakukan pengumpulan sampah daur ulang (dan organik bila memungkinkan) yang sudah dipilah di sumber sampah.

Sampah daur ulang dikumpulkan dan dipilah lebih spesifik sesuai jenis sampah, misalnya: PET, PETE, Duplex, dan lain-lain. Apabila melakukan pengolahan sampah organik, pengumpul daur ulang dapat mengemas kompos yang dihasilkan kemudian langsung dipasarkan atau melalui bank sampah induk. Perkembangan bank sampah sampai dengan tahun 2019 di NTB sebanyak 124 bank sampah yang tersebar di 10 kabupaten/kota yaitu Mataram (15 unit), Lombok Barat (25 unit), Lombok Utara (9 unit), Lombok Tengah (25 unit), Lombok Timur (27 unit), Kab Sumbawa Barat (2 unit), Kab Sumbawa (12 unit), Dompu (3 unit), Kota Bima (3 unit) dan Kabupaten Bima (3 unit). Sampah yang sudah dikumpulkan pengumpul daur ulang dijual ke Bank Sampah Induk (Kabupaten/Kota atau Regional). Selain menjual langsung dalam bentuk bahan baku, dapat juga dibuat kerajinan tangan atau produk jadi dari sampah untuk langsung dijual ke masyarakat seperti: kursi, taplak meja dan lain-lain.

Sampah yang diterima Bank Sampah Induk, dilakukan pre-treatment untuk meningkatkan harga jual sampah seperti: pengepresan, pembersihan, dan pencacahan. Fungsi utama bank sampah induk adalah sebagai pembeli wajib produk pengumpul daur ulang, namun pengumpul daur ulang tidak wajib menjual sampahnya ke bank sampah induk. Bank sampah induk kabupaten mengumpulkan sampah se-kabupaten/kota kemudian melakukan pemilahan, pembersihan, dan pengepresan. Sedangkan bank sampah induk regional utamanya bertugas mengumpulkan sampah dari bank sampah induk kabupaten, melakukan pemilahan, pengepresan, pembuatan pelet/bijih plastik,dan penjualan ke industri pengolahan. Secara umum, fungsi utama bank sampah induk adalah untuk meningkatkan nilai jual dan mengurangi biaya transportasi.

Bank sampah induk regional menjual sampah ke industri daur ulang untuk dibuat produk baru. Khusus plastik, dapat dijual ke perusahaan pyrolysis dan/atau dijual ke produsen yang nenerapkan EPR (Extended Producer Responsibility) Hasil pyrolysis berupa BBM dapat dijual ke pertamina untuk didistribusikan kembali ke masyarakat. Untuk mendukung program EPR, perlu dikeluarkan regulasi mengenai kewajiban EPR bagi produsen yang memasarkan produknya di NTB. Aplikasi EPR

dapat berupa pembelian kembali kemasan, atau subsidi kegiatan daur ulang kemasan. Residu dari semua kegiatan di atas masuk ke TPS atau TPST untuk diangkut ke TPA.

Kegiatan penanganan sampah dimulai dari pengumpulan sampah menggunakan Roda Tiga atau Pick Up di sumber sampah. Pengumpulan sampah dikoordinir oleh Kepala Desa/Lurah bersama camat setempat dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga (swasta). Sampah yang diangkut dalam penanganan sampah adalah sampah organik dan sampah lain (selain sampah daur ulang) setelah itu sampah dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk dilakukan pemilahan awal atau langsung ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk wilayah yang tidak ada TPS-nya. Kegiatan yang dilakukan di TPST antara lain diantaranya:

1. Pemilahan dilakukan untuk sampah yang belum terpilah. Pemilahan dilakukan sedetil mungkin untuk memudahkan pengelolaan lanjutan. Sampah daur ulang yang terpilah di TPST di *press* kemudian dijual ke Bank Sampah Induk dan/atau ke perusahaan yang mengaplikasi EPR.
2. Pengolahan dapat dilakukan dengan membuat sumber energi menggunakan sampah seperti biogas (*biodigester*) dan *pellet* sampah. Hasil *pellet* dapat dijual ke perusahaan pembangkit listrik seperti PLN atau PLTS lain dan perusahaan gasifikasi yang menghasilkan energi berupa gas untuk bahan bakar.
3. Pengomposan sampah organik yang dihasilkan dapat dilakukan pengomposan dengan metode *open windrow*, Takakura, biokonversi (BSF) atau metode lain yang cocok sesuai komposisi dan karakteristik sampah. Hasil dari kegiatan pengolahan dapat dijual langsung ke konsumen seperti pertanian, perkebunan, perikatan (produk BSF)

Sampah lain yang tidak terolah (residu) diangkut ke TPA oleh dinas yang menangani sampah di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Di TPA sampah residu dari TPST diproses dengan metode sanitary landfill. Sampah yang masuk ke TPA hanya sampah residu dari TPST, dan sampah dari TPS terdekat di sekitar TPA. Harapan kedepan, TPA dapat menjadi lokasi wisata edukasi/pengelolaan sampah. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memiliki 10 TPA yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB. di pulau Sumbawa terdapat 5 TPA yaitu : TPA Oi Mbu di Kota Bima, TPA Waduwani Kabupaten Bima, TPA Lune di Dompu, Kaupaten Sumbawa memiliki 2 TPA yang berada di Raberas dan di Lekong, TPA Batu putih di Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara di Pulau Lombok ada 5 TPA juga yaitu TPA Ijo Balit di kabupaten Lombok Timur, TPA Pengengat di Kabupaten Lombok Tengah, di Lombok Utara adalah TPA Jugil sedangkan TPA Kebon Kongok menangani sampah

untuk dua lokasi yaitu sampah yang bersumber dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Sejak 1 Januari 2018 Pemerintah Provinsi NTB berperan secara langsung dalam pengelolaan TPAR Kebon Kongok dan sejak 1 Oktober 2018 mengambil alih operasional TPAR Kebon Kongok. Berkaitan dengan pengelolaan sampah yang telah menjadi kewenangan Dinas LHK NTB, TPA Kebon Kongok menjadi instansi balai dibawah Dinas LHK NTB. Dengan luas lahan total TPA adalah 8,14 Ha (sesuai sertifikat yang dimiliki Kota Mataram), di antaranya 5,41 Ha digunakan untuk pemrosesan sampah dengan kapasitas desain sebesar 951.859,58 m3. Sesuai dengan target RPJMD di tahun 2019, target penanganan dan pengurangan sampah masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Presentase penanganan sampah dihitung berdasarkan jumlah seluruh sampah yang masuk ke TPA dibagi dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat yang berlokasi di wilayah kelola TPA. Sampai dengan tahun 2019, capaian penanganan sampah di NTB belum tersedia, sementara capaian tahun 2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 134 Capaian Indeks Pengelolaan Sampah (%) Tahun 2018-2019

Indikator	Capaian		
	2018	Target 2019	Realisasi 2019
Neraca Pengelolaan Sampah (%)	51	60	NA

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Penganggaran untuk mendukung NTB Zero Waste tahun 2019 dengan indikator kinerja neraca pengelolaan sampah diarahkan untuk pembinaan kelompok bank sampah, pembentukan bank sampah induk regional dan induk, penguatan sarpras bank sampah, dan sarpras yang digunakan untuk operasional TPA Kebon Kongok dan unit BSF Lingsar. Untuk mendapatkan nilai neraca pengelolaan sampah Provinsi NTB, dibutuhkan perhitungan neraca yang disesuaikan dengan potensi timbulan sampah, jumlah pengurangan sampah, dan jumlah penanganan sampah masing-masing kab/kota. Jumlah pengurangan sampah adalah total perhitungan pembatasan timbulan sampah, jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah, dan jumlah sampah didaur ulang di sumber. Sedangkan untuk jumlah penanganan sampah didapatkan dari perhitungan pemilahan/pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Permasalahan yang dihadapi saat ini ialah belum adanya sistem pengumpulan data rekapan data seluruh bank sampah dari masing-masing kabupaten/kota. Jenis bank sampah yang cukup banyak juga menyulitkan pendataan bank sampah ini. Dinas LHK telah melakukan koordinasi dengan LH Kab/Kota sebagai upaya percepatan pengumpulan data neraca pengelolaan sampah. Sampai November 2019, hanya Kabupaten Lombok Utara yang telah menyelesaikan perhitungan neraca pengelolaan sampah, yaitu 17,87% sampah terkelola dan 82,13% sampah tidak terkelola. Saat ini, sedang dikembangkan aplikasi SMASH, diharapkan kedepannya seluruh bank sampah dapat menginput data sampah yang dikelolanya secara harian, sehingga data sampah yang dikelola dapat terhimpun sebagai bahan untuk perhitungan persentase penanganan sampah.

Tabel 2. 135 Perhitungan Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2018

No.	Uraian	2017	2018	Perubahan tahun 2018-2017	
I	Potensi timbunan sampah				
	(jumlah penduduk x faktor estimasi timbunanperkapita	1.266.150	1.280.964	14.814	1,17%
II	Jumlah pengurangan sampah				
	Persentase pengurangan sampah	6,8%	6,8%	-	0%
A	Pembatasan timbunan sampah				
B	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah	71.550	72.388	838	1,17%
C	Jumlah sampah di daur ulang di sumber	14.096	14.261	165	1,17%
III	Jumlah Penanganan sampah				
	Persentase penanganan sampah	33%	33%	-	0%
A	Pemilahan				
B	Pengangkutan				
C	Pengolahan menjadi sumber energi				
D	Pemrosesan akhir	417.915	422.805	4.800	1,17%
IV	Sampah yang dikelola (II + III)	503.561	509.454	5.893	1,17%
	Persentase sampah terkelola	40%	40%	-	0%
V	Sampah Tidak dikelola (I-IV)	762.689	771.510	8.921	1,17%
	Persentase sampah tidak dikelola	60%	60%	-	0%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Selama tahun 2019 Kegiatan besar yang dilakukan dalam pengelolaan sampah adalah Pengurangan dan Penanganan. Kegiatan pengurangan menitikberatkan pada peran masyarakat/kelompok dalam

mengelola sampah, sedangkan kegiatan penanganan melalui optimalisasi (efisiensi dan efektifitas) sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh pemerintah dengan melakukan pembinaan terhadap 50 unit bank sampah. Upaya penyadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga dilaksanakan melalui kegiatan training pemuda peduli sampah.

Di samping itu, dalam hal pengembangan sarpras persampahan, Dinas LHK NTB memberikan hibah bantuan sarpras kepada 74 unit bank sampah di 10 kab/kota se-NTB. Bantuan yang diberikan antara lain peralatan pendukung sarpras bank sampah (gudang unit bank sampah, gerobak angkut sampah, karung, timbangan). Bantuan kendaraan roda tiga juga diberikan kepada 5 (lima) Kelompok Masyarakat Peduli Sampah. Pengembangan sarpras persampahan yang ditujukan untuk Bank Sampah Induk (BSI) adalah berupa bantuan peralatan berupa mesin press kardus dan gudang, serta kendaraan roda tiga. Sedangkan untuk Bank Sampah Induk Regional sarpras yang diberikan antara lain berupa bantuan mesin cacah sampah, alat pembuat paving block, kendaraan roda tiga, dan kendaraan roda empat/truk. Terdapat juga bantuan persampahan untuk lembaga pendidikan di Pulau Lombok dan Sumbawa, kendaraan operasional pengangkut sampah bak terbuka untuk satgas berantas sampah, dan 100 unit bak sampah tiga warna untuk masyarakat, kantor dan lokasi wisata.

Kegiatan lainnya adalah telah dibangun pabrik percontohan pengolahan sampah organik dengan teknologi biokonversi yaitu menggunakan tentara lalat hitam (black dragon fly) sebagai pendaur ulang sampah organik. Pembangunan pabrik pengolahan sampah yang berlokasi di dusun Bebae desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat ini merupakan kerjasama antara Yayasan Forest for Life Indonesia dengan Dinas LHK NTB. Sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos padat dan cair ini dipasok oleh beberapa pihak, antara lain beberapa pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, perkantoran, sekolah, dan TPA Regional Kebon Kongok. Kapasitas produksi unit BSF dapat mencapai 4,8 ton per harinya. Kondisi saat ini rata-rata sampah organik yang diolah mencapai 800 kg/hari. Pemasaran pupuk kompos cair dan padat belum terlalu meluas disebabkan karena adanya komposisi pupuk yang masih memerlukan uji laboratorium. Selain pupuk, produk BSF lainnya ialah maggot atau pupa lalat hitam. Beberapa konsumen memanfaatkan maggot tersebut untuk pakan ternak unggas dan ingin mengembangkannya dalam skala kecil.

Sementara itu UPTD TPA Sampah Regional Kebon Kongok melakukan pengelolaan sampah yang masuk ke TPA Regional melalui pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Seluruh kegiatan

pengelolaan sampah dari sumber sampai pengangkutan ke TPA Regional menjadi tanggung jawab Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat yang menjadi layanan dari TPA Regional Kebon Kongok. Pada tahun 2019, jumlah sampah yang masuk ke TPA adalah sebanyak 108.970 ton. Atas dasar jumlah sampah masuk diatas, ditetapkan Tiping Fee berupa Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) sebesar Rp. 1.336.982.625,- dari Kota Mataram, dan Rp. 314.584.875,- dari Kabupaten Lombok Barat. Dana KJP digunakan untuk operasional TPA, dan dana KDN dialokasikan untuk Desa Banyumulek dan Desa Sukamakmur sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Barat. Penggunaan dana bantuan KDN mencakup kegiatan pengembangan bank sampah, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Dari aspek SDM, dalam rangka menuju NTB Asri dan Lestari, Dinas LHK NTB telah membentuk tim satgas dan tim kreatif sebagai upaya percepatan NTB Zero Waste. Aksi bersih sampah telah dilaksanakan di beberapa kawasan pariwisata dengan berkolaborasi dengan berbagai komunitas masyarakat. Selain itu, pembinaan pengelolaan sampah juga dilaksanakan untuk 40 OPD Lingkup Provinsi NTB dan sekolah di 10 kab/kota se-NTB.

Dinas LHK NTB juga telah melakukan Penyusunan Dokumen Petunjuk Pengelolaan Sampah bagi OPD dan melaksanakan Seminar Nasional Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah. Selain itu halyang dilakukan Dinas LHK NTB adalah melakukan pembinaan dan pengawasan ke beberapa pelaku usaha antara lain : (1) PT. PLN (Persero) - PLTMG Sumbawa 50 MW, (2) PT. Anugrah Mandiri Jaya Energi, (3) PT. Peduli Lingkungan Lestari, (4) PT. PLN (Persero) - PLTU Sumbawa, (5) PT. Wahyu Nusantara Indah Putra, (6) PT. Pertamina Patra Niaga dalam rangka pengelolaan limbah B3.

Demikian capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup, namun masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 136 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum maksimalnya penggunaan aplikasi SMASH sebagai media penyampaian data sampah terkelola secara realtime sehingga data neraca pengelolaan sampah tahun 2019 belum tersedia	Koordinasi dengan LH Kab/Kota untuk mempercepat pengumpulan data neraca pengelolaan sampah.
Masterplan pengelolaan sampah belum tersusun	Rekrutmen tenaga ahli bersertifikat
Penyusunan KLHS beberapa kab/kota belum berpedoman pada PP 46/2016	Sosialisasi PP 46/2016 kepada kab/kota serta memberikan arahan dan pemahaman mendalam terkait PP 46/2016
SDM Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) belum tersedia	Pelatihan PPLHD kepada PNS

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, urusan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil l diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk, dengan capaian sebagai berikut

Tabel 2. 137 Capaian Indikator Kinerja RPJMD NTB 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
				TARGET	REALISASI
Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	%	-	0,78	0,80	0,99

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019, penduduk NTB yang wajib KTP berjumlah 3.704.007, dari jumlah tersebut penduduk yang telah melakukan perekaman sebanyak 3.666.347 orang atau 98,98%, masih terdapat 37,660 orang penduduk yang

belum melakukan perekaman e-KTP. Sedangkan dari 3.666.347 orang yang telah melakukan perekaman, 3.689.312 orang atau 99,60% yang telah dilakukan pencetakan e-KTP. Pencapaian ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat nasional yang mencapai 0,98%. Meskipun demikian evaluasi juga tetap dilakukan untuk terus dapat meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat terkait kebutuhan dokumen kependudukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti adalah meningkatkan kualitas SDM petugas ASN tersebut. Disamping itu juga diharapkan kabupaten/kota dapat menambah peralatan adminduk dalam bentuk mobil keliling dari dana APBD kabupaten/kota.

Tabel 2. 138 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2019

NO	KABUPATEN /KOTA	WAJIB KTP(*)	REKAM	%	CETAK	%
1	Kota Mataram	298.486	295.753	99,08	291.510	97,66
2	Lombok Barat	508.331	491.418	96,67	535.489	105,34
3	Lombok Utara	168.175	174.916	104,01	226.831	134,88
4	Lombok Tengah	742.378	747.356	100,67	748.585	100,84
5	Lombok Timur	885.098	849.759	96,01	789.654	89,22
6	Sumbawa Barat	93.785	94.630	100,90	93.507	99,70
7	Sumbawa	373.689	345.632	92,49	338.546	90,60
8	Dompu	158.494	170.265	107,43	177.856	112,22
9	Bima	371.705	387.543	104,26	382.742	102,97
10	Kota Bima	103.866	109.075	105,02	104.592	100,70
	TOTAL	**3.704.007**	**3.666.347**	**98,98**	**3.689.312**	**99,60**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel 2. 139 Capaian Indikator Kinerja RPJMD NTB 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
				TARGET	REALISASI
Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	14,17	20,86	24,47	33,29

Sumber: - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

- Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) memiliki tugas untuk menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan indikator kinerja RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, "Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan". Secara keseluruhan desa pesisir desa lingkar hutan berjumlah 730 desa. Sampai dengan tahun 2019 desa pesisir dan lingkar hutan yang diberdayakan ditargetkan mencapai 183 desa atau 24,47% dari seluruh desa pesisir dan lingkar hutan, dengan pencapaian sebanyak 243 desa yang telah diberdayakan atau 33,29% dari seluruh desa pesisir dan lingkar hutan.

- **Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antardesa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Tahun 2019 ditargetkan 40% Posyantek sudah terbentuk dan aktif, yang tercapai baru sebesar 37,60% dari 117 jumlah Kecamatan. Terdapat 5 Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Posyantek yaitu:

a. Kabupaten Lombok Tengah;
b. Kabupaten Lombok Timur;
c. Kabupaten Dompu;
d. Kabupaten Bima;
e. Kota Bima.

Sampai dengan tahun 2019 telah didirikan 44 Posyantek di 5 Kabupaten/Kota, berikut adalah data posyantek yang sudah terbentuk:

Tabel 2. 140 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB

No	Kabupaten / Kota	Kecamatan	No. / Tanggal SK
1.	Kota Mataram 6 Posyantek	Cakranegara, Ampenan, Selaparang, Sekarbela, Sandubaya, Mataram	157 / II / 2018, 2 Pebruari 2018
2.	Kabupaten Lombok Utara 5 Posyantek	Bayan, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan	74/05/DP2KBPMD/2017, 1 Pebruari 2017

3.	Kabupaten Sumbawa Barat 8 Posyantek	Jereweh, Maluk, Sekongkang, Brang Rea, Brang Ene, Seteluk, Poto Tano, Taliwang	4012 tahun 2017 / 23 November 2017
4.	Kabupaten Lombok Barat 1 Posyantek	Kecamatan Labuapi	414.3/52/DPMPD/2010; 6 mei 2010
5	Kabupaten Sumbawa 24 Posyantek	Empang, Torano, Plampang, Labangka, Maronge, Lape, Moyo Hilir, Unter Iwes, Utan, Alas, Alas Barat	51 Tahun 2011, 31 Januari 2011
		Sumbawa, Ropang, Lunyuk, Orong Telu, Moyo Hulu, Moyo Utara	1254 Tahun 2011, 17 Oktober 2011
		Buer, Labuan Badas, Lopak, Batu Lanteh, Lenangguar, Lantung, Rhee	1130 Januari 2012, 10 September 2012
	Jumlah	**44 Posyantek**	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

Pada tanggal 18 s/d 20 Juli 2019, di Lapangan Tugu Selong Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan Gelar TTG 2019 berikut adalah kategori lomba dan pemenang pada masing-masing kategori:

1. Lomba Stand
   - Juara I : Kabupaten Sumbawa Barat
   - Juara II : Kabupaten Sumbawa
   - Juara III : Kota Bima
   - Juara IV : Kota Mataram
2. Teknologi Tepat Guna Unggulan
   - Juara I : Kabupaten Lombok Timur dengan Alat Pengolah Sampah Pelastik Menjadi BBM
   - Juara II : Kabupaten Lombok Utara dengan Alat Filtrasi Air
   - Juara III : Kabupaten Lombok Tengah dengan Kompresor Tanpa Suara
3. Untuk Lomba Inovasi
   - Juara I : Kabupaten Lombok Utara dengan Alat Pemotong Kayu Multi Guna
   - Juara II : Kabupaten Lombok Barat dengan Alat Semprot Handprayer Tenaga Surya
   - Juara III : Kabupaten Dompu dengan Alat Pemupuk Jagung sederhana “Caki Pupuk”

Juara IV : Kabupaten Bima dengan Alat Pupuk Cepat dan Praktis

4. Untuk Lomba Posyantek

Juara I : Posyantek KSP Kompi Handal, Kabupaten Sumbawa Barat

Juara II : Posyantek Matahari Gangga, Kabupaten Lombok Utara

Juara III : Posyantek Bhineka, Kabupaten Sumbawa

- **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pemberdayaan BUMDes merupakan salah satu program prioritas di DPMPD Dukcapil Provinsi NTB untuk menanggulangi kemiskinan melalui pemberian batuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa. Dari 995 desa yang ada di NTB, sampai tahun 2019 telah terbentuk 870 BUMDes aktif, dari target 835 BUMdes Aktif pada akhir 2019 sesuai RPJMD 2019-2023. Terlampauinya target RPJMD ini salah satunya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, dimana salah satu kebijakannya adalah penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes.

Tabel 2. 141 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2016-2019

No.	KABUPATEN	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes		
				2017	2018	2019
1	LOMBOK BARAT	10	119	51	106	118
2	LOMBOK TENGAH	12	127	77	115	125
3	LOMBOK TIMUR	20	239	110	137	181
4	LOMBOK UTARA	5	33	26	28	28
5	SUMBAWA BARAT	7	57	34	40	41
6	SUMBAWA	24	157	85	150	157
7	DOMPU	8	72	51	72	72
8	BIMA	18	191	60	148	148
JUMLAH		**104**	**995**	**494**	**796**	**870**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

Pemerintah Provinsi NTB juga memperkuat kelembagaan BUMDes dengan menyalurkan bantuan guna memperkuat permodalan BUMDes sebesar Rp. 13,1 milyar dengan rincian Rp. 3,1 milyar disalurkan pada tahun 2017 untuk 28 BUMDes dan Rp. 10 milyar disalurkan pada tahun 2019 untuk 100 BUMDes. Bantuan penguatan modal yang disalurkan tahun 2019, diarahkan untuk membantu Bank Sampah guna menyukseskan Program Prioritas Pemerintah Provinsi "Zero Waste ". Rincian BUMDes per kabupaten yang telah mendapatkan bantuan guna penguatan permodalan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 142 Bumdes Yang Mendapatkan Bantuan Penguatan Modal Tahun 2018-2019

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes yang mendapat bantuan		Jumlah
		2018	2019	
1	Lombok Barat	3	9	12
2	Lombok Tengah	3	8	11
3	Lombok Timur	1	46	47
4	Lombok Utara	6	6	12
6	Sumbawa	3	8	11
5	Sumbawa Barat	4	7	11
7	Dompu	5	7	12
8	Bima	3	9	12
Jumlah		**28**	**100**	**128**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

Kegiatan BUMDes Award tidak dilaksanakan mengingat alokasi anggaran untuk kegiatan ini tidak dialokasikan dalam DPA Perubahan melainkan untuk kegiatan rehab rekon pasca bencana gempa bumi. Disamping itu untuk melaksanakan kegiatan BUMDes Award memerlukan waktu yang relatif lama sehingga tidak dimungkinkan dilaksnakan pada akhir tahun 2018. Untuk itu kegiatan BUMDes Award direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

- **Lembaga Adat**

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang diusung DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Sampai dengan akhir Desember 2019, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 768 lembaga adat dari 1.137 desa/kelurahan di NTB (67,55%) sementara target pembentukan lembaga adat sampai akhir tahun 2019 sesuai RPJMD 2019-2023 adalah 568 lembaga adat, 50% dari jumlah desa/kelurahan di NTB. Dengan pencapaian untuk indikator ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50% pada tahun 2019.

Tabel 2. 143 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Lembaga Adat	
				2018	2019
1	Lombok Barat	10	122	23	45
2	Lombok Tengah	12	139	109	129
3	Lombok Timur	20	254	128	230
4	Lombok Utara	5	33	21	32
5	Sumbawa Barat	8	64	35	64
6	Sumbawa	24	165	78	149
7	Dompu	8	81	9	21
8	Bima	18	191	35	65
9	Kota Mataram	6	50	18	27
10	Kota Bima	5	38	1	6
Jumlah		**116**	**1.137**	**457**	**768**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

Meskipun target pembentukan sudah terlampaui namun legalitas dan penyiapan perangkat kelembagaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya legalisasi dan penyiapan perangkat lembaga adat sudah dan sedang berproses sampai dengan saat ini. Lembaga adat menjadi wadah terbentuknya bale mediasi di desa bertujuan menyelesaikan perselisihan/konflik di tingkat masyarakat melalui jalur mediasi yang dibantu paralegal. Dengan adanya bale mediasi diharapkan mengurangi jumlah kasus/perselisihan naik ke tingkat peradilan yang menyita waktu

dan dana tidak sedikit selain itu keputusan pengadilan sering menimbulkan dendam dari masing-masing pihak yang berkonflik. Pembentukan lembaga adat juga lebih kepada menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat/budaya lokal atau local wisdom sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai subyek pembangunannya.

- **Penurunan Jumlah Desa Tertinggal**

Indek Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi serta Ketahanan Ekologi Desa yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui 22 variabel dan 52 indikator. IDM ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa serta informasi tentang pembangunan desa. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 satus yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Pada tahun 2018 jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal sebanyak 8 desa, sedangkan desa dengan status Tertinggal sebanyak 2018. Pada tahun 2019, jumlah desa dengan status Sangat Tertinggal sebanyak 5 desa atau menurun 3 desa bila dibandingkan dengan tahun 2018, sedangkan jumlah desa dengan status Tertinggal sebanyak 108 desa atau menurun sebanyak 100 desa.

Tabel 2. 144 Rincian status desa tahun 2018 dan 2019

NO	KAB	JML KEC	JML DESA	STATUS DESA										KET
				ST		T		B		M		MD		
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
1	LOMBOK BARAT	10	119			21	2	79	92	19	25			
2	LOMBOK UTARA	5	33			1	4	21	21	11	8			Jumlah Kecamatan di
3	LOMBOK TENGAH	12	127			10	2	103	80	14	43		2	Kab. Lombok Timur yang
4	LOMBOK TIMUR	21	239			37	6	175	160	27	72		1	semula berjumlah 20 Kec.
5	SUMBAWA BARAT	8	57			9	2	36	38	12	16		1	pada Tahun 2019 menjadi
6	SUMBAWA	24	157	1	1	43	23	89	104	23	29	1		21 Kec. bertambah 1 Kec.
7	DOMPU	8	72			6	5	62	60	4	7			yaitu Kec. Lenek akibat
8	BIMA	18	191	7	4	81	64	90	104	13	18		1	pemekaran dari Kec.
9	KOTA MATARAM	6												Aikmel
10	KOTA BIMA	5												
Jumlah		117	995	8	5	208	108	655	659	123	218	1	5	

Keterangan :
ST : Sangat Tertinggal
T : Tertinggal
B : Berkembang
M : Maju
Md : Mandiri

- **Prestasi yang telah diraih pada tahun 2019**

Tahun anggaran 2019, terdapat prestasi ditingkat nasional yang berhasil diraih yaitu:

1. Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha
   Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah meraih penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Anugerah penghargaan tersebut diberikan kepada Kepala Daerah atas prestasi dan komitmen dalam memajukan desa dan kelurahan di wilayahnya.
   Penyerahan penghargaan oleh Sekjen Kementerian Dalam Negeri Dr. Hadi Prabowo, MM dan diterima Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dr. H. Ashari, SH., M.H mewakili Gubernur NTB pada acara Pembukaan Temu Karya Nasional dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PinDesKel) Tahun 2019, yang merupakan puncak pelaksanaan rangkaian kegiatan evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan di Ballroom Hotel Discovery Ancol Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.
2. Desa Suranadi Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat meraih Juara 1 Lomba Desa Tingkat Nasional pada Regional IV yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri;
3. Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram meraih Juara 1 Lomba Kelurahan Tingkat Nasional pada Regional IV yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri;
4. Desa Kembang Kuning Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur meraih Juara 1 Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2019 Kategori Berkembang yang diselenggarakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019 berbagai permasalahan telah dihadapi dan solusi telah dilakukan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 145 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kurangnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemprov bersama pemerintah kabupaten melakukan pelatihan

	peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
Kurangnya kapasitas pengelola BUMDes	- Pemprov bersama pemkab melakukan pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes - Pemberian bantuan modal kepada 100 bumdes masing-masing sebesar Rp.100Jt
Masih ada 236 Desa yang belum melakukan Updating data dalam profil desa	Memberikan pelatihan bagi operator desa/kelurahan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2019

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja pembangunan daerah Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluraga Berencana dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja Utama Laju Pertumbuhan Penduduk dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 146 Capaian Indikator Kinerja Laju Petumbuhan Penduduk tahun 2017- 2019

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	
					Target	Realisasi
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,21	1,17	1,13	1,13

Sumber :BPS NTB, 2019

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Sementara Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlahpenduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahun yang secara administrasi memiliki surat resmi yang memberinya hak untuk tinggal di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan

asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu.

Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya pertambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan. Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula ketersediaan pangan. Begitu juga energy, pertumbuhan penduduk akan menyedot energy besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas, dll. Faktor utama dari pertumbuhan penduduk yang tinggi adalah karena tidak ada komitmen pemerintah untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Program Keluarga Berencana (KB) yang pada periode 1970 sampai akhir 1990-an berhasil mengerem pertumbuhan penduduk, tidak dilanjutkan.

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen
utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas
dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah
penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama. Laju pertumbuhan penduduk NTB tahun 2019 adalah 1,13, cenderung menurun 0,04 point jika dibandingkan tahun 2018.

Pengendalian penduduk dapat dilakukan dengan optimalisasi program
keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan. Menurunkan *Total Fertility Rate*/Angka Kelahiran Total dan meningkatkan persentase Pemakaian Kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate*/CPR). Selain itu upaya yang dapat dilakukan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kemudahan dalam menjadi akseptor Keluarga Berencana;
2. Mempermudah dan meningkatkan pelayanan dalam bidang pendidikan, sehingga keinginan untuk segera menikah dapat dihambat;
3. Meningkatkan wajib belajar pendidikan dasar bagi masyarakat, dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tabel 2. 147 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
- Budaya patrilinial dimana suami memegang keputusan dalam hal penggunaan kontrasepsi sehingga banyak calon akseptor yang tidak ber KB yang disebabkan ketidaksetujuan suami	- Peningkatan peran kelompok kegiatan (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) - Pemberdayaan kader sebagai penghubung dalam proses pencatatan dan pelaporan di fasilitas kesehatan. - Promosi dan KIE melalui berbagai media (media massa/cetak dan elektronik, media luar ruang) terutama melalui media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner).

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2019

9. Perhubungan

Dinas Perhubungan sesuai dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi ke 1 : NTB Tangguh dan Mantap dengan Indikator Kinerja Kunciadalah Indeks Konektivitas Transportasi Publik. Pengukuran indikator ini menggambarkan banyaknya rute konektivitas transportasi publik antar wilayah dan menuju luar wilayah NTB. Pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 76,70%. Pencapaian pada akhir tahun 2019 telah mencapai 78,64%.

Pencapaian dari penyelenggaraan urusan bidang perhubungan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dapat dijelaskan sebagai berikut.

- **Angkutan Laut**

Jumlah penumpang angkutan laut dihitung dari 5 (lima) pelabuhan laut di NTB yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Bima, Pelabuhan Senggigi dan Pelabuhan Bangsal/Pemenang, dimana pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.155.528 orang atau sebesar 121,62 % dari target

sebanyak 950.083 orang. Akan tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun 2018 maka terdapat peningkatan sebesar 21,62%.

Tabel 2. 148 Data Jumlah Penumpang per Pelabuhan Tahun 2018-2019

No	Nama Pelabuhan	Tahun	
		2018	2019
1.	Pelabuhan Lembar	48.373	54.876
2.	Pelabuhan Badas	0	445
3.	Pelabuhan Bima	87.020	94.374
4.	Pelabuhan Senggigi	21.484	7.753
5.	Pelabuhan Bangsal/Pemenang	793.206	998.525
	Jumlah	**950.083**	**1.155.973**

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019

Naiknya jumlah penumpang angkutan laut tahun 2019 terjadi pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2019, yaitu penumpang yang menggunakan kapal cepat dari Bali menuju kawasan 3 gili dengan menyumbang 86,38% dari keseluruhan penumpang angkutan laut yang ada. Penyumbang penumpang angkutan laut tertinggi kedua adalah penumpang yang melalui Pelabuhan Bima yakni sebesar 8,16%, kemudian diikuti Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Senggigi masing-masing 4,75 % dan 0,67%, dan untuk Pelabuhan Badas laporan penumpang angkutan laut yang menggunakan pelabuhan tersebut, baru mulai tercatat bulan Oktober 2019 sejak dimulainya Pelayaran Perdana Lombok Distance Ferry (LDF) Badas-Surabaya sebesar 0,04%.

Inovasi di Tahun 2019 : Lombok Distance Ferry (LDF)

Pulau Sumbawa merupakan wilayah dengan sumber daya alam sangat potensial yang memiliki penghasil utama produk pertanian seperti jagung, ternak dan produk pertambangan. Secara khusus, di Pulau Sumbawa terdapat kawasan Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) yang telah ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia dengan potensi ekonomi bidang perikanan dan pariwisata. Masalah utama dari pengembangan wilayah di Pulau Sumbawa adalah terbatasnya aksesibilitas transportasi sehingga menghambat mobilitas barang dan orang.Infrastruktur utama bagi akses barang dari dan ke Pulau Sumbawa adalah Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima. Berdasarkan data BPS tahun 2018, jumlah layanan bongkar dan muat barang per tahun melalui kedua pelabuhan tersebut adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2. 149 Data Bongkar-Muat Barang di Pelabuhan Badas dan Pelabuhan Bima

Tahun	Pelabuhan Badas (ton)		Pelabuhan Bima (ton)	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
2016	200.440	150.037	76.489	31.516
2017	246.197	222.025	63.046	39.247
2018	178.958	181.082	116.105	82.713
2019	216.933	186.820	108.559	64.189

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Angkutan darat dengan menggunakan moda transportasi truk masih dominan digunakan sebagai pengangkut barang. Hal ini dapat dilihat dari data penyebrangan pada pelabuhan ASDP Pototano, Sumbawa – Kayangan, Lombok dimana tujuan akhir angkutan barang dengan menggunakan truk sebagian besar menuju Surabaya atau Pulau Jawa. Trend peningkatan angkutan kendaraan dengan moda transportasi truk tiap tahunnya di Pelabuhan Pototano-Kayangan selalu mengalami peningkatan dengan data sebagai berikut.

Gambar 2. 19 Data AngkutanTruk di Penyebrangan Kayangan – Pototano

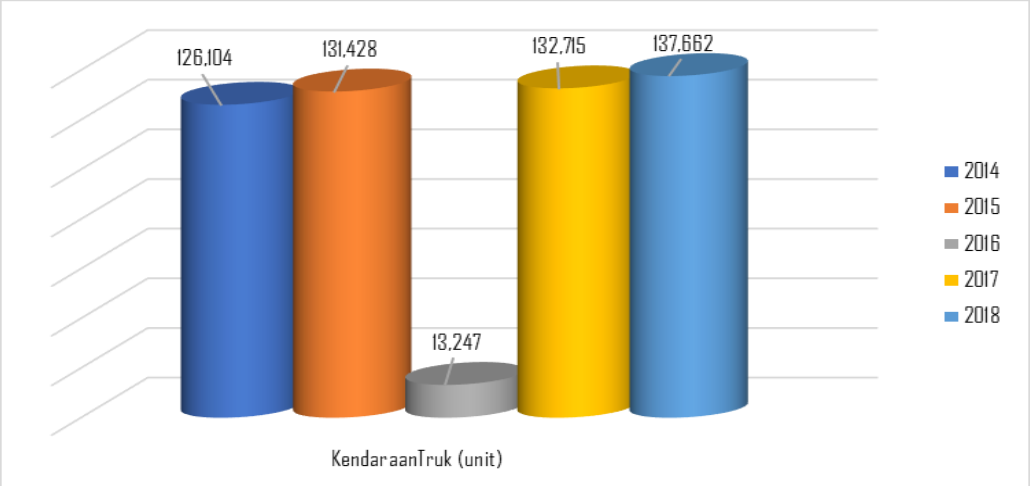

Sumber: Data PT.ASDP Kayangan, 2019

Penggunaan angkutan darat/truk sebagai moda utama untuk pengangkutan angkutan barang menimbulkan masalah tersendiri karena

truk barang banyak mengangkut muatan berlebih/ODOL (Over Dimension Over Loading) sehingga berdampak pada:

1. Mempercepat laju kerusakan jalan sehingga menyebabkan tingginya biaya untuk perbaikan/peningkatan jalan;
2. Menambah kemacetan di dua destinasi termasyhur, Pulau Lombok dan Pulau Bali yang menjadi jalur utama akses menuju tujuan akhir di PulauJawa;
3. Tingginya potensi kecelakaan lalu lintas;
4. Polusi udara dari gas buang truk.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut maka angkutan barang perlu dipindahkan dari angkutan darat menjadi menggunakan moda angkutan laut. Diperlukan transportasi langsung menuju Pulau Jawa dari Pulau Sumbawa, untuk itu kapal Ro-Ro dengan kapasitas +5.000 GT/*Long Distance Ferry* merupakan salah satu solusi paling baik untuk melayani rute dari Pelabuhan Badas di Pulau Sumbawa menuju Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Tujuan dari *Long Distance Ferry* Pelabuhan Badas, Sumbawa – Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya adalah:

1. Menyediakan konektivitas transportasi sehingga arus barang dan orang ke Pulau Sumbawa memiliki akses yang lebih baik;
2. Efisiensi biaya logistik;
3. Mengurangi disparitas harga barang antara Jawa dan luar Jawa;
4. Mengembangkan kawasan strategis Provinsi NTB di Pulau Sumbawa yaitu kawasan Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) yang merupakan cagar biosfer dunia;
5. Memaksimalkan umur infrastruktur jalan di Pulau lombok yang merupakan jalur utama menuju Pulau Jawa;
6. Mengurangi potensi kecelakaan dan kemacetan pada jalur utama yaitu Pulau Lombok dari Pelabuhan Kayangan – Pelabuhan Lembar, yang dikenal sebagai "*dead route*" karena tingginya angka kecelakaan yang disebabkan karena bauran kendaaraan yang sangat tinggi pada lintasan tersebut.

Gubernur NTB dalam rangka mewujudkan visi membangun NTB GEMILANG, salah satunya telah menetapkan mempercepat pengembangan infrastruktur penopang sektor pariwisata, industri sektor unggulan serta kawasan strategis. Konektivitas dan aksesibilitas transportasi merupakanan prasyarat utama pengembangan wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, konektivitas transportasi *Long Distance Ferry* dari Pelabuhan Badas Sumbawa – Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan salah satu faktor penting guna memajukan dan mensejahtrakan masyarakat NTB dan Pulau Sumbawa pada khususnya.

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah pada tahun 2019 bulan Oktober 2019 telah dibuka Rute Pelayaran Badas-Sumbawa menuju Surabaya-Jawa Timur sebanyak 11 (sebelas) trip pelayaran.

- **Angkutan Darat**

Dalam penyelenggaraan pelayanan angkutan darat, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya dan capaian yang cukup baik diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas angkutan umum dengan memastikan kelaikan angkutan umum dengan memberikan Kartu Pengawasan bagi angkutan umum kepada Taxi, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Pariwisata dan Angkutan Pemandu Moda;
2. Melakukan pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan supir teladan angkutan umum;
3. Melakukan pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa RPPJ untuk mendukung Geosite Rinjani;
4. Melakukan koordinasi antar stakeholder penyelenggara jalan melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Keanggotaan dari forum ini berasal dari unsur Kepolisian, Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kelompok Masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, aduan maupun saran, maka FLLAJ telah membuat sebuah aplikasi berbasis android yang diberi nama PELOR MAS (Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat) dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan aduan dan masalahnya secara langsung dan dapat mengetahui tindaklanjut dari aduan tersebut;
5. Operasional BRT yang diprioritaskan untuk pelajar di Kota Mataram;
6. Terminal Tipe B yang ada di NTB sudah dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan semenjak bulan November 2018 seiring dengan berlakunya perda pengelolaan terminal tipe B sudah mulai melakukan penarikan retribusi pelayanan kepada pengguna jasa terminal. Sampai dengan 31 Desember 2019 penarikan retribusi pelayanan terminal tipe B (Terminal Tana Mira – Sumbawa Barat dan Terminal Ginte–Dompu) mencapai Rp.304.772.000,- dari target sebesarRp.210.000.000,- (145,13%). Jika dibandingkan dengan realisasi PAD Dinas Perhubungan Provinsi NTB tahun 2019 sebesar Rp.495.938.500,- maka Retribusi Terminal Tipe B memberikan kontrbusi yang sangat signifikan yaitu sebesar 61,45%.

- **Angkutan Udara**

Jumlah penumpang angkutan udara tahun 2019 berjumlah 3.309.041 orang atau mencapai 76,39% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2019 yakni sebanyak 4.331.661 orang. Jika dibandingkan dengan realisasi jumlah penumpang tahun 2018 sebesar Rp.4.205.496 turun sebesar 24,29 %, hal ini diakibatkan turunnya jumlah penumpang pasca gempa Lombok yang terjadi mulai bulan Agustus 2018 dan tingginya lonjakan harga tiket pesawat sehingga masyarakat beralih pada alternatif transportasi lainnya seperti Penyebarangan melalui Lembar langsung menuju Tanjung Perak Surabaya. Dari tiga bandara udara yang ada di Provinsi NTB, Lombok International Airport (LIA) menyumbang 87.38%, sementara bandara Sultan M. Salahuddin dan bandara Sultan M. Kaharuddin masing-masing hanya menyumbang 9,31% dan 3,31% dari keseluruhan jumlah penumpang angkutan udara tahun 2019. Tingginya kontribusi dari LIA salah satu penyebabnya adalah makin bertambahnya konektivitas dengan adanya penerbangan langsung terutama untuk rute domestik maupun internasional. Sampai saat ini LIA telah melayani penerbangan langsung menuju 12 kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Makassar, Kupang, Banjarmasin, Bima, Sumbawa dan Benete. Sedangkan untuk rute internasional telah melayani 3 tiga rute yaitu Kuala Lumpur-Malaysia, Singapura dan Perth-Australia. Konektivitas untuk dua bandara lainnya belum bisa berkembang karena infrastruktur bandara belum ditingkatkan khususnya panjang *runway* bandara guna memungkinkan pesawat berbadan besar bisa mendarat di kedua bandara tersebut. Jumlah penumpang angkutan udara tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 150 Jumlah Penumpang Angkutan Udara Tahun 2019

Bulan	Bandara LIA					Bandara Sultan Kaharuddin		Bandara Sultan Salahuddin	
	Penumpang Domestik			Penumpang Internasional		Penumpang		Penumpang	
	Datang	Berangkat	Transit	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat
Januari	98.488	91.603	10.268	5.896	5.517	4.469	5.309	11.741	11.646
Februari	83.210	79.866	7.734	6.898	6.552	3.505	4.026	9.400	10.295
Maret	95.081	85.245	9.878	8.126	7.828	4.334	5.189	11.568	11.914
April	96.993	80.295	1.165	10.859	8.898	4.120	4.913	12.144	12.057
Mei	91.288	80.162	8.638	10.987	8.873	4.157	4.444	12.016	9.871
Juni	118.673	111.410	16.055	10.310	9.708	4.870	5.440	13.104	16.358
Juli	117.138	112.430	13.422	11.710	15.465	5.146	5.430	13.375	14.542

Agustus	122.404	119.831	13.659	14.685	10.704	4.847	5.125	14.375	14.582
September	114.863	112.129	11.289	11.396	10.822	4.174	4.278	13.947	14.530
Oktober	120.808	114.151	11.277	10.693	10.936	4.291	4.457	13.382	13.926
November	119.416	112.881	10.219	10.327	9.190	4.210	4.272	13.176	12.946
Desember	133.668	117.514	11.528	11.213	9.102	4.106	4.325	13.653	13.682
Total	**1.312.030**	**1.217.517**	**125.132**	**123.100**	**113.595**	**52.229**	**57.208**	**151.881**	**156.349**
Total Per Bandara	**2.654.679**			**236.695**		**109.437**		**308.230**	
Total Penumpang	**3.309.041**								

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019

Dinas Perhubungan Provinsi NTB selama tahun 2019 telah melakukan beberapa hal antara lain:

1. Meningkatkan kualitas angkutan umum dengan memastikan kelaiklayakan angkutan umum dengan memberikan Kartu Pengawasan bagi angkutan umum kepada Taxi, AKDP, Angkutan Sewa, Angkutan Sewa Khusus, Angkutan Pariwisata dan Angkutan Pemandu Moda;
2. Melakukan pembinaaan kepada pengusaha angkutan penumpang dan barang termasuk juga pemilihan pelajar pelopor keselamatan dan supir teladan angkutan umum;
3. Melakukan pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa Traffic Light di Kota Bima dan RPPJ Geopak Rinjani;
4. Melakukan koordinasi antar stakeholder penyelenggara jalan melalui Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Keanggotaan dari forum ini berasal dari unsur kepolisian, Perhubungan, PU dan Kelompok Masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan, aduan maupun saran maka FLLAJ melalui aplikasi berbasis android yang diberi nama PELOR MAS (Pelaporan Online Transportasi Berbasis masyarakat) dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan aduan dan masalahnya secara langsung dan dapat mengetahui tindaklanjut dari aduan tersebut;
5. Mengadakan Angkutan perkotaan BRT bekerjasama dengan DAMRI sebagai angkutan bersubsidi bagi pelajar;
6. Mengadakan Kegiatan Mudik Gratis ke pulau Sumbawa;
7. Menyusun DED Pelabuhan Kilo dan FS Ai Bari;

8. Mengadakan dan membuka Rute Baru Badas – Surabaya dengan Long Distance Ferry (LDF);
9. Terminal Tipe B yang ada di NTB sudah dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan semenjak bulan November 2018 seiring dengan berlakunya perda pengelolaan terminal tipe B sudah mulai melakukan penarikan retribusi pelayanan kepada pengguna jasa terminal di tahun 2019 pada 2 terminal yaitu terminal Ginte Kabupaten Dompu dan Terminal Tana Mira Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk 2 terminal yang tidak beroperasi yaitu Terminal Renteng Kabupaten Lombok Tengah (dalam tahaprehabilitasi) dan Terminal Tanjung Kabupaten Lombok Utara (pinjam pakai oleh Kabupaten Lombok Utara untuk Rumah Sakit Sementara akibat Gempa). Namun dari 2 terminal yang beroperasi Ginte dan Tana Mira realisasi PAD telah mencapai bahkan melebihi dari target yang direncanakan sebesar Rp.495.938.500 atau 147,46%dari targetawal Rp.335.000.000;
10. Melakukan Rehabilitasi Toilet Terminal Ginte Kabupaten Dompu;
11. Mengadakan Infeksi keselamatan kendaraan Angkutan Umum (*Ramp Check*).

Tabel 2. 151 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
- Masih terbatasnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas antar wilayah	- Pembukaan angkutan perintis menuju daerah-daerah terpencil baik di Pulau Lombok maupun Pulau sumbawa bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan
- Masih kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Darat	- Bekerjasama dengan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan untuk merekrut CPNS dan Pelatihan PNS untuk mengikuti diklat teknis perhubungan darat.
- Terbatasnya fasilitas kelengkapan jalan	- Mengusulkan penganggaran pengadaan infrastruktur fasilitas kelengkapan jalan di jalan-jalan Provinsi.

PERMASALAHAN	SOLUSI
- Terbatasnya pelayanan sarana dan prasarana transportasi laut dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna pengembangan konektivitas antar wilayah.	- Meningkatkan pembukaan angkutan laut perintis bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan
- Kurangnya fasilitas penunjang operasional pelabuhan	- Pengembangan dan peningkatan pelabuhan yang ada baik dengan penambahan fasilitas maupun pembangunan dermaga/pelabuhan baru
- Kurangnya SDM Teknis di Bidang Perhubungan Laut	- Bekerjasama dengan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan untuk merekrut CPNS dan Pelatihan PNS untuk mengikuti diklat tekns perhubungan laut.
- Ketimpangan jumlah penumpang yang melalui LIA di pulau Lombok yang mencapai 87,38 persen dari penumpang udara di NTB sementara 2 bandara yang ada di pulau Sumbawa hanya menyumbang 12,62 persen penumpang udara	- Telah dilaksanakan pengembangan bandara Sultan M. Salahuddin dan bandara Sultan M. Kaharuddin terutama perpanjangan runway bandara agar maskapai penerbangan komersil bisa melayani rute dari dan menuju kedua bandara tersebut

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019

10. Komunikasi Dan Informatika

Indikator Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Penetapan Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana hal ini ditujukan dari indikator capaian setiap tahunnya. Untuk menuju indikator kinerja tersebut perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Sasaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral;
2. Menyebarnya Publikasi dan Informasi tentang Kegiatan/Kebijakan Pemerintah;
3. Meningkatkan Kinerja Badan Publik untuk Memperbaharui Daftar Informasi Publik Secara Berkala;
4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi Informatika;
5. Meningkatnya Pengelolaan SPBE yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi;
6. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Meningkatnya Kualitas Layanan Telekomunikasi Kepada Masyarakat.

Capaian Indikator Kinerja Tahun pertama penyelenggaraan misi kedua Akselerasi Transformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi (NTB Bersih dan Melayani) dengan sasaran kelima "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat", dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 152 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja OPD Tahun 2019

No	Indikator	Satuan	Tahun Awal RPJMD	2019		Kondisi Kinerja Akhir 2023
				Target	Realisasi	
	IKD					
1.	Indeks Pelayanan Publik	Skor	97.68	97.78	NA	98.17
	IKK					
1.	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level/Skor	1.0	2.0	2.2	4.0
2.	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	%	-	70	95.49	100
3.	Indeks Kematangan Keamanan Informasi	Level/Skor	-	II	II	IV

4.	Kualifikasi Informatif	Kualifikasi	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Pemanfaatan teknologi informasi diera ini menjadi suatu keharusan, hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang Berintegritas, Berkinerja Tinggi, Bersih dari KKN dan Berdedikasi guna menciptakan pemerintahan efisien, efektif, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung manajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Ketersediaan data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi, menjadi salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah provinsi NTB terus berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas sumber data yang dihasilkan. Melalui NTB satu data, sebagai gerbang data induk yang dihimpun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi NTB, diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pembangunan di NTB secara digital. Data statistik sektoral yang valid, dihasilkan dari proses analisis yang cermat didukung data survey yang memadai untuk terwujudnya validitas data sektoral tersebut. Melalui NTB Satu Data, perbaikan tata kelola data Pemerintah diselenggarakan melalui prinsip satu standar data, satu meta data, keterbukaan dan aksesibilitas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Data merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui apakah program yang dijalankan oleh berbagai stakeholder mampu menjawab secara komprehensif beragam permasalahan yang ditangani tersebut. Artinya, semua program pemerintah Provinsi NTB, idealnya haruslah disusun berdasarkan basis data yang valid. Sehingga capaiannya dapat diukur dan juga permasalahan serta kendalanya pun dapat di diagnosis secara tepat. Oleh Karena itu, diperlukan "Satu Data yang valid untuk NTB Gemilang". Yakni data tersebut, tidak hanya harus akurat dan tepat, tetapi juga konsisten dan terintegrasi serta mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan data itu. Misalnya untuk mengukur keberhasilan program pengentasan kemiskinan, maka alat untuk mengujinya yang paling tepat adalah tersedianya Data Dasar Penduduk miskin yang akurat. Data itu

akan akurat jika didukung data miskin berdasarkan data statistik by name by addres. Yakni data yang dapat menunjukkan secara tepat jumlah penduduk miskin beserta nama dan alamatnya. Dan konsisten atau data yang berintegritas, artinya data tersebut haruslah merupakan "Satu Data" yang diyakini keakuratannya dan sekaligus dapat digunakan sebagai satu acuan bersama oleh berbagai pihak dan sektor dalam menjalankan berbagai program intervensi kemiskinan, sehingga tepat sasaran. Jika kita ingin melakukan percepatan pengentasan kemiskinan kedepan, maka pertama-tama yang harus dipastikan secara berkelanjutan adalah validasi mengenai data kemiskinan. Cakupan NTB satu data yakni data statistik, data geospasial, dan data sektoral. Data tersebut bisa didapatkan masyarakat hanya dengan mengakses portal NTB satu data yakni data.ntbprov.go.id.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dimana Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB selaku Ketua PPID Provinsi NTB. Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) yang telah dibangun, bersifat online maupun offline pada OPD lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota se NTB. Pada tahun 2019 SIP-PPID difokuskan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB, melalui kegiatan, antara lain:

a. Melakukan pengawasan DIP pada OPD Pemerintah Provinsi NTB;
b. Melakukan pengawasan terkait update data pada OPD Pemerintah Provinsi NTB;
c. Memberikan pelayanan permintaan data dan informasi, baik melalui desk layanan atau online;
d. Membuat laporan penyelenggaraan PPID Utama;
e. Bersama Komisi Informasi melakukan Monev Badan Publik.

Sementara itu terkait jumlah kunjungan Sistem Infomasi secara Online PPID Provinsi NTB terjadi penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2019 yaitu (33.344 kali kunjungan) 21,7%, jika dibandingkan dengan kunjungan tahun 2018 (42.589 kali kunjungan). Adapun Kunjungan tertinggi pengguna pada Sistem Infomasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2019 terjadi pada bulan Maret 2019 yaitu sebanyak 3.615 kali kunjungan. Sedangkan jumlah yang mengunduh Daftar Informasi Publik (DIP) tertinggi adalah pada bulan Mei 2019 dengan 15.000 kali unduhan dan untuk Permohonan Informasi yang masuk selama tahun 2019 sejumlah 3 orang pemohon.

Tabel 2. 153 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2018-2019

No	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN (Kali)		DOWNLOAD DIP (Kali)		PERMOHONAN INFORMASI (Orang)	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Januari	2.596	1.852	5.772	2.811	1	1
2.	Februari	1.730	2.179	5.045	8.592	-	-
3.	Maret	1.639	3.615	4.492	3.753	-	-
4.	April	2.345	3.074	4.482	2.116	3	-
5.	Mei	3.075	3.202	4.920	15.000	-	-
6.	Juni	1.867	2.206	1.859	2.748	-	-
7.	Juli	4.444	3.464	2.121	6.893	4	-
8.	Agustus	2.288	2.294	1.451	2.039	-	2
9.	September	5.784	2.699	2.448	2.769	2	-
10.	Oktober	6.895	2.830	4.092	2.926	6	-
11.	November	8.242	3.278	2.895	3.179	4	-
12.	Desember	1.702	2.651	2.730	2.958	4	-
	TOTAL	**42.589**	**33.344**	**42.307**	**55.784**	**24**	**3**

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Data pada tabel 3.12 memperlihatkan bahwa informasi publik yang disediakan pada sistem informasi online PPID Provinsi NTB sangat diperlukan oleh masyarakat, minat untuk mengakses informasi publik cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan Sistem Informasi Online PPID Provinsi NTB setiap bulannya menembus ribuan kunjungan.

Masuknya era globalisasi seperti saat ini telah memperluas ruang informasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin terbukanya ruang informasi yang harus disediakan pemerintah, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan. NTB Care merupakan bagian dari pelayanan publik. Aplikasi NTB Care, sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan dan mendapatkan informasi yang terjadi di sekitar mereka, dalam pengembangannya aplikasi ini juga di desain guna memberi kemudahan pelayanan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Terus memperkuat pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Pemerintah Provinsi NTB.

Pertama, karena melalui aplikasi ini masyarakat bisa menyampaikan beberapa informasi yang berkembang di masyarakat, langsung kepada

pihak yang berkompeten. Mereka bisa langsung mendapatkan penjelasan dan konfirmasi tentang permasalahan tersebut. Dan sebalik pengaduan dari masyarakat haruslah didasarkan fakta, bukan hoax.

Kedua, aplikasi NTB Care ini wajib digunakan ditingkat kabupaten dan kota. Walaupun pemerintah Provinsi yang membuatnya, namun dalam tataran pelaksanaannya, Pemda Kabupaten/Kota wajib menjalankan dan merespon setiap pengaduan masyarakat sesuai prosedur dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah, sejalan dengan perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang antara lain mengatur bahwa aplikasi umum yang terkait layanan publik, termasuk NTB Care yang dibuat pemerintah Provinsi NTB ini, wajib dilaksanakan pemerintah di bawahnya. Dan terpenting dalam manangani pengaduan masyarakat, OPD terkait responsif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

NTB Care telah menangani ratusan pengaduan, sejak dilounching pada akhir Oktober 2018 lalu, admin NTB Care pada Dinas Kominfotik Provinsi NTB mencatat Jumlah masyarakat yang mendownload aplikasi NTB Care 4.326, dengan jumlah pengaduan masuk sebanyak 1.042 pengaduan. Dari pengaduan tersebut oleh admin sistem dilakukan verifikasi dan validasi, sehingga aduan yang diterima dan dapat diproses sebanyak 874 aduan. Dari data yang ada, pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagian besar lokus aduannya berada pada Kabupaten Kota. Aduan yang sudah direspon dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang terkait baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebanyak 498 (57%). Mayoritas dari pengaduan masyarakat tersebut terkait dengan masalah lingkungan dan kebersihan. Karena sebagian besar permasalahan yang diadukan berada pada kewenangan Kabupaten/Kota diperlukan koordinasi yang lebih efektif untuk meningkatkan penyelesaian aduan oleh instansi terkait di Kabupaten/Kota.

Selain itu, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui fitur laporan dugaan pelanggaran (*Whistle Blowing System*) dalam aplikasi NTB care. Fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan melawan hukum, perbuatan tidak etis yang disampaikan secara rahasia. Jika sebelumnya pengaduan atau masukan dari masyarakat hanya bersifat umum dan lebih menekankan terhadap aduan yang bersifat pelayanan dasar, kali ini, fitur pengaduan NTB care akan disempurnakan sehingga terdapat sistem pengaduan yang berdimensi hukum. Untuk penanganan pengaduan yang bersifat khusus dibutuhkan kordinasi yang masif antara perangkat daerah terkait. Admin yang ada harus aktif betul dan diawasi oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

Penghargaan yang diterima Provinsi NTB di Tingkat Nasional pada tahun 2019:

1. Pemerintah Provinsi NTB meraih Indonesian Attractivenes Awards (IAA), sebagai Provinsi Terbaik dengan kategori Gold Pelayanan Publik melalui program NTB Care, dimana NTB mampu menggeser 56 nominator dari kabupaten/ kota provinsi lain di Indonesia. Gubernur NTB Dr.H.Zulkiefkimansyah hadir langsung menerima penghargaan yang diinisiasi oleh Tempo Media Group bekerjasama dengan Frountir Consulting Group ini pada Selasa malam 23/7/2019 di Jakarta dengan di hadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Direktur Tempo Thoriq Hadad, dan Direktur Frontier Group Handi Irawan.
2. Pemerintah Provinsi NTB juga berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, dengan kualifikasi tertinggi, Yakni Badan Publik Informatif Tahun 2019. Bersama 7 Provinsi lainnya se-indonesia, yang juga meraih anugerah Badan Publik Informatif Tahun 2019, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Riau, Sumut dan Kalimantan Barat.

Tabel 2. 154 Daftar Penghargaan yang diterima Provinsi NTB di Tingkat Nasional Tahun 2019

NO	PENGHARGAAN	BIDANG	WAKTU	PEMBERI PENGHARGAAN
1	Indonesian Attractive Awards (IAA)	Pelayanan Publik	23 Juli 2019	Thoriq Hadad (Direktur Tempo Grup)
2	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	Keterbukaan Informasi Publik	21 November 2019	K. H. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI 2019-2024)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Beberapa kegiatan lain juga yang dilaksanakan selama tahun 2019 yaitu program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan penyebarluasan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai media seperti Baliho, Spanduk, Pertunjukan Rakyat, Publikasi Media Cetak, Publikasi Media Elektronik dan Publikasi Mobil Calling. Sedangkan Kegiatan Anugerah Duta Informasi Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 155 Pemenang Lomba Phonegrafi Tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JUDUL TULISAN
1.	I Nyoman Budiana	Gandari, Narmada-Lombok Barat	Memanfaatkan Sampah Plastik.Siswa dan guru memilah sampah plastik yang nantinya bisa menambah nilai ekonomi bagi sekolah, baik dijadikan bahan baku kerajinan ataupun di jual langsung
2.	Samsudin	DesaTeke Kec. Palibelo Kab. Bima	Edukasi Pemilahan Sampah Plastik Desa Jala Kec.Hu'u Kab. Dompu. Kira-kira teman bagaimana cara menangulangi sampah di NTB ?
3.	Wahyudi	Desa Pengadang, Lombok Tengah	Hai! Saya Wahyu. Direktur di Bank Sampah Maju Mandiri Desa Pengadang. Saya ingin desain bebas sampah tahun 2023.

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 156 Pemenang Lomba Desain Poster tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	JUDUL POSTER
1.	Amelia Mardiati	Lingk. Kramat Nunggal Sayang-Sayang, Mataram	Zero waste menjadi salah satu program pemerintah Provinsi NTB dengan target 70% pengelolaan dan 30% pengurangan sampah di tahun 2023 nanti
2.	Yogi Lesmana	Desa. Gapuk Kecamatan. Gerung. Lombok Barat	"Olah Dahulu Sebelum Ia Membunuhmu" Permasalahan Sampah Masih Terus Menghantui Kita Sampai Saat ini
3.	Indah Wahyu Utami	Desa. Montong Baan, Kec.Sikur, Kab.Lombok Timur	Indonesia adalah negara kepulauan yang 70% wilayahnya adalah lautan. Namun sayangnya, fakta dari para peneliti mengatakan bahwa pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari pada jumlah ikan di dalamnya

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 157 Pemenang Lomba Film Pendek/Vlog Tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	TEMA LOMBA
1.	L. Rendy Suteja	Desa Mangkung, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, NTB	Di era moderen seperti saat ini, perkembangan teknologi dan pembangunan seakan menggerus peradaban untuk selalu maju dan berkembang. Limbah sampah menjadi salah satu problematika yang tak kunjung menemui titik terangun tuk dapat diselesaikan setara dengan 64 juta ton per tahun. Zerowaste? Sudah saatnya kita bergerak.
2.	Dimas Budi Utomo	Jalan Cakalang 6B Pondok Perasi Ampenan, Mataram	
3.	Sigit Arya Primasatya	Jalan halmahera II No. 90 BTN Rembiga Utara, Mataram	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 158 Pemenang Seni Perupa Ramah IT

NO	NAMA	NAMA AKUN	JUDUL/TEMA
1.	Lalu. Muh. Asysaukani,SH	Jalan. Leo No.16 Lingkungan Selaparang - Ampenan	Ekonomi Kreatif dan Zero Waste''

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 159 Pemenang Lomba Fotografi Tahun 2019

NO	NAMA	Nama Akun	Keterangan	Tema Lomba
1.	Agus Kurniawan	@Ka Wawan Herman	Juara I	"Bahagia Bersama Keluarga" dan "Mana Bahagiamu ini Bahagiaku"
2.	Juliadin Kuswara	@Oget_id	Juara II	
3.	Alfian Pebriadi	@Lombok HD	Juara III	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Media lain yang juga dipakai untuk menyebarkan informasi pembangunan daerah antara lain melalui kegiatan pertunjukan rakyat pada beberapa lokasi yang berbeda, dan kegiatan Inspiratif Expo pada kegiatan car free day di Jalan Udayana Mataram setiap hari minggu sebanyak 20 kali pada tahun 2019. Berikut jadwal kegiatan Inspiratif Expo pada tahun 2019:

Tabel 2. 160 Jadwal Kegiatan Inspiratif Expo Tahun 2019

No	Waktu	Tema	Ket
1.	10 Februari 2019	Zerro Waste	Dinas LHK, Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Perdagangan, BKP, UMKM.
2.	17 Februari 2019	Biro Organisasi	Biro Organisasi, KPI, BKP, UMKM.
3.	24 Februari 2019	Ketahanan Pangan	BKP, Dinas Perdagangan, UMKM
4.	3 Maret 2019	Waspada Demam Berdarah	Dinas Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Dinas Perdagangan, UMKM, BKP, RS Mata.
5.	10 Maret 2019	Geo Park, Ramah Lingkungan	Bappeda, Dekranasda,
6.	17 Maret 2019		Dinas Pariwisata, BPOM, IWAPI, BKP.
7.	24 Maret 2019	Kreatifitas Warga Binaan Lapas Wanita.	Lapas Wanita Mataram, Dinas Kesehatan, BPOM, BKP, Dinas Perdagangan.
8.	31 Maret 2019	HUT Ikatan Bidan Indonesia	IBI Cabang NTB, Dinas Kesehatan, BKP, Dinas Perdagangan, BKP.
9.	7 April 2019	Imunisasi	Dinas Kesehatan, IDAI, Dinas Perdagangan, BKP.
10.	14 April 2019	Dekranasda	Dekranasda, Dhama Wanita, Dinas Kesehatan, PT. ASDP
11.	21 April 2019	Hari Kartini	TP PKK, Dekranasda, IPEMI, hotel Aruna, Dinas Kesehatan.
12.	28 April 2019	Hari Konsumen Nasional	Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, BPOM, Lapas Wanita, Hotel Jayakarta, Hotel Aruna.
13.	4 Agustus 2019	Visi Misi dan Program Unggulan Pemprov NTB	Biro Humas Setda Provinsi NTB
14.	18 Agustus 2019	Komunitas Pecinta Batik Indonesia NTB	Komunitas Cinta Batik Indonesia (KCBI)
15.	15 September 2019	Hari Bakti Persatuan Terapis Gigi dan Mulut (PTGM)	PTGMN Cabang NTB

No	Waktu	Tema	Ket
16.	6 Oktober 2019	Hari Lingkungan Sedunia	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Cabang NTB
17.	20 Oktober 2019	Program Unggulan Desa di Kec. Narmada	Kantor Kecamatan Narmada Lombok Barat
18.	27 Oktober 2019	Keterbukaan Informasi Publik dan Akses Informasi	Dinas Kominfotik dan PT. Telkomsel
19.	3 November 2019	Hari Kesehatan Jiwa Masyarakat	RSJ Mutiara Sukma Mataram, Telkomsel
20.	24 November 2019	Hari Diabetes	Dinas Kesehatan Kota Mataram, PT. Nutrifood

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 161 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
PPID yang ada di beberapa OPD tidak aktif mengupdate data dan informasi sehingga berita tidak selalu terbaru	PPID Utama mendorong OPD lebih aktif dalam mengupdate berita/informasi
Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan infomasi publik	Meningkatkan koordinasi dan mendorong komitmen Kab/Kota dalam penanganan pengaduan
Pengembangan keahlian dan keterampilan SDM Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum optimal dan jumlah SDM TIK belum memadai	Mengusulkan formasi ASN SDM TIK pada Dinas Kominfotik melalui BKD Provinsi NTB

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019.

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB adalah organisasi perangkat daerah pendukung pencapaian misi kelima RPJMD NTB 2019-2023 "NTB Sejahtera dan Mandiri" dengan indikator kinerja daerah yang diusung adalah persentase koperasi aktif. Perkembangan jumlah koperasi aktif di NTB dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 162 Persentase Koperasi Aktif di NTB Tahun 2017 - 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Realisasi 2017	Realisasi 2018	2019		Target 2023
				Target	Realisasi	
Persentase Koperasi Aktif	%	62	60	62,00	59,61	70

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Tahun 2019

Jumlah Koperasi di Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 4.093 koperasi. Dibanding dengan per 31 Desember 2018, jumlah koperasi sebanyak 4.110 Koperasi, terjadi penurunan sebanyak 17 buah koperasi (0,41%) akibat adanya pembubaran koperasi oleh Pemerintah. Koperasi tidak memenuhi peraturan perundang-undangan diantaranya tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan lebih dari 3 tahun dan kegiatan usaha sudah tidak ada lagi Menurut Peraturan Menteri KUKM Nomor : 23/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Penilaian Indeks Pembangunan Koperasi (IPK) Terhadap Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi, koperasi aktif adalah koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Persentase koperasi aktif tahun 2019 sebanyak 59,61% (2.440 unit koperasi) dari target 62%. Perkembangan koperasi Aktif Provinsi NTB tahun 2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 163 Perkembangan Koperasi Aktif Provinsi NTB Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	2019		
				Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Jumlah
1.	Mataram	557	504	397	107	504
2.	Lombok Barat	503	503	151	360	511
3.	Lombok Utara	154	154	119	42	161
4.	Lombok Tengah	574	617	299	318	617
5.	Lombok Timur	530	507	215	303	518
6.	Sumbawa Barat	492	501	329	50	379
7.	Sumbawa	398	307	224	86	310
8.	Dompu	311	308	150	164	314

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017	Tahun 2018	2019		
				Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Jumlah
9.	Bima	270	278	238	50	288
10.	Kota Bima	184	185	95	103	198
11.	Provinsi	230	246	223	70	293
	Jumlah	**4.203**	**4.110**	**2.440**	**1.653**	**4.093**

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2019

Upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan jumlah koperasi aktif dan meningkatkan kapasitas UMKM Bersaing agar mencapai target yang ditetapkan adalah sebagai beriku:

a. Meningkatkan dan mengembangkan semangat dan prilaku kewirausahaan, menumbuhkan wirausaha baru, meningkatkan kemampuan dan kualitas manajemen, serta memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan Koperasi dengan penguatan produktifitas dan mutu, penguasaan teknologi jaringan informasi pemasaran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. Meningkatkan kemampuan usaha mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya, terutama potensi sumber daya lokal yang tersedia, dengan penguatan akses permodalan, basis produksi dan akses pasar;
c. Meningkatkan kualitas dan koordinasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, semakin terbukanya kesempatan dan kepastian berusaha bagi usaha mikro, Kecil, menengah dan Koperasi sebagai prasyarat utama untuk menjamin perkembangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- **Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional**

Penilaian Koperasi Berprestasi setiap tahun dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan penghargaan atas sumbangsih dharma baktinya yang besar terhadap pertumbuhan koperasi. Penilaian dilihat dari pencapaian kinerja dari aspek organisasi, tatalaksana, produktivitas, manfaat dan dampak dari koperasi. Penilaian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi/Kabupaten/Kota se-NTB dan pada setiap tahun Peringatan Hari Koperasi diberikan penghargaan dan hadiah kepada Koperasi Berprestasi baik tingkat Provinsi NTB maupun Tingkat Nasional. Adapun Daftar Nama Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi NTB/Tingkat Nasional adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan SK Gubernur No. 500 – 402 Tahun 2016 Koperasi Berprestasi Tahun 2016 sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI / NO. BADAN HUKUM	ALAMAT	PERINGKAT	BESARNYA HADIAH PENGHARGAAN
1.	**KOPERASI KARYAWAN KATALA** BADAN HUKUM No. 32/BH/KWK.23/VI/1995 TANGGAL 12 JUNI 1995	Komplek 2100 Building 620 Townsite, Batu Hijau, Kecamatan Sekongkang Kab. Sumbawa Barat	JUARA I	Rp. 9.000.000,-
2.	**KOPERASI KARYAWAN MEGA MAKMUR** BADAN HUKUM No. 256/BH/KWK.23.1/X/1999 TANGGAL 2 OKTOBER 1999	Jalan Bung Karno No. 7 Mataram	JUARA II	Rp. 8.000.000,-
3.	**KOPERASI TANI BINA USAHA** BADAN HUKUM No. 52/BH/KDK.23.2/IV/1999 TANGGAL 14 APRIL 1999	Desa Pendem, Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah	JUARA III	Rp. 7.000.000,-
4.	**KOPERASI PEGAWAI TELEKOMUNIKASI PALAPA** BADAN HUKUM No. 703/BH/XXII TANGGAL 7 DESEMBER 1985	Jalan Langko No. 94 Mataram	JUARA HARAPAN I	Rp. 6.000.000,-

Koperasi Karyawan Katala terpilih menjadi Koperasi terbaik Tingkat Nasional Tahun 2016.

2. Berdasarkan SK Gubernur No. 500 – 542 Tahun 2017 Koperasi berprestasi Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

NO	NAMA KOPERASI / NO. BADAN HUKUM	ALAMAT	PERINGKAT	BESARNYA HADIAH PENGHARGAAN
5.	KSP BMT BATU HIJAU No. 518/275/BH/XXVIII/ DISKOP&UKM/X/2013 TANGGAL 12 OKTOBER 2013	Jl. TOWNSITE – SEKONGKANG KAB. SUMBAWA BARAT	JUARA I	Rp. 10.000.000 ,-
6.	KPRI SEPAKAT MATARAM No. 518/23/BH/PAD/ DISKOP & UKM/IV/2013 TANGGAL 15 APRIL 2017	Jl. AIRLANGGA NO. 36 MATARAM	JUARA II	Rp. 9.000.000,-
7.	KSU KARYA TERPADU No. 518/36/BH/PAD&UKM/10 /2004 TANGGAL 29 OKTOBER 2004	Jl. RAYA RARANG KM. 35 KAB. LOMBOK TIMUR	JUARA III	Rp. 8.000.000,-
8.	KPRI KARPEN No. 292/BH/PAD.KWK/VIII/19 96 TANGGAL 1 AGUSTUS 1995	Jl. A. YANI NO.11 TALIWANG KAB. SUMBAWA BARAT	JUARA HARAPAN I	Rp. 7.000.000,-
9.	KSU SYARIAH MITRA PAERTA NO. 03/623/BH/XXVIII.4/ DISKOP UKM/VIII/ 2010, TANGGAL 16 AGUSTUS 2010	DUSUN BEDUGUL DESA BADRAIN KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT	JUARA HARAPAN II	Rp. 6.000.000,-

Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Terpadu meraih Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017

3. Kegiatan penilaian koperasi berprestasi tingkat provinsi dan nasional tahun 2018 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.
4. Berdasarkan SK Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB Nomor 835/97/Diskop UKM/III/2019 Tanggal 20 Maret 2019 Koperasi berprestasi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KOPERASI / NO. BADAN HUKUM	ALAMAT	PERINGKAT	BESARNYA HADIAH PENGHARGAAN
1.	Koperasi Unit Desa (KUD) Karya No. 147/BH/PAD/KWK.23/VI /96 tanggal 18 Juni 1996	Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kab. Lombok Tengah	JUARA I	-
2.	KPRI Usaha Bersama No. 429/BH/XXII Tanggal 23 Oktober 1978	Jln. Persinggahan Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu	JUARA II	-
3.	KPRI Pasar Seni Bina Harapan Sejahtera, No. 03/644/BH/XXVIII/ Diskop UKM Perindag/X/2011	Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kab. Lombok Barat	JUARA III	-
4.	KSPPS Gumarang Akbar Syariah No. 518/277/BH/XXVIII/Diskop UMKM/II/2014 tanggal 28 Februari 2014	Jln. Sriwijaya No. 20 Kota Mataram	JUARA HARAPAN I	,-
5.	Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuansa Perkasa No. 33/BH/KDK.23.6/IV/1999 tanggal 19 April 1999	Jln. Lintas Bima	JUARA HARAPAN II	-

- **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Koperasi (KSPPS/USPPS - Kop)**

Salah satu program di Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 adalah pembentukan Koperasi Kawasan Bebas Riba dan program penumbuhan serta pengembangan Koperasi berbasis syari'ah. Target penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba dan Data jumlah Koperasi syariah di Provinsi NTB per-13 Desember 2019 dapat terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 2. 164 Target dan Realiasi Program Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba Tahun 2019 s/d 2023

No	Wilayah	Program Tahun 2019 s/d 2023						Jumlah
		2019		2020	2021	2022	2023	
		Target	Realisasi					
	Provinsi NTB	3	3	3	3	3	3	15

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, 2019

Dalam upaya penumbuhan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah, Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB melakukan berbagai upaya antara lain:

a. Melakukan rekrutmen pendampingan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi se-NTB;
b. Muswil Perkopsyah dalam rangka Restrukturisasi organisasi dan Penguatan Peran untuk mensukseskan NTB Gemilang;
c. Rakor Penguatan Peranan PERKOPSYAH dan IAEI dalam rangka pengembangan KSPPS/USPPS-Kop;
d. Rapat Koordinasi Kemitraan Baznas dan Perkopsyah dengan kabupaten/kota se-NTB;
e. Bimtek Pengawasan bagi calon Dewan Pengawas Syariah kabupaten/kota se-NTB;
f. Bimtek Pengembangan SDI Pengurus dan Pengelola KSPPS/ USPPS;
g. Sosialiasi kawasan bebas riba pada Kopsyah di kabupaten/kota se-NTB;
h. Rapat evaluasi pendampingan penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS Koperasi;
i. Workshop sistem administrasi pendaftaran dan tata naskah pembentukan dan perubahan anggaran dasar KSPPS/USPPS koperasi bagi Notaris selaku PPAK se-NTB;
j. Memfasilitasi pembuatan akte anggaran dasar KSPPS/USPPSdan akta perubahan anggaran dasar dari konvensional ke KSPPS/USPPS koperasi;
k. Koordinasi pengembangan koperasi syariah ke kabupaten/kota se-NTB;
l. Monitoring kegiatan pendampingan penumbuhan dan pengembangan KSPPS/USPPS koperasi.

- **Pencapaian Program Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah.**

a. Penumbuhan Koperasi Syariah

Dari target 500 Koperasi berbasis syariah pada tahun 2018, sampai dengan tahun 2019 telah realisasi berjumlah 387 Kopsyah, penumbuhan Koperasi Syariah pada tahun 2019 sebanyak 42 Koperasi Syariah.

b. Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan Bebas Riba
Penumbuhan Koperasi Syariah Kawasan bebas Riba Tahun 2019 telah memenuhi target capaian penumbuhan sebanyak 3 koperasi dari target sebanyak 3 koperasi. Hingga tahun 2019 Jumlah Koperasi syariah kawasan bebas riba berjumlah 9 (sembilan) koperasi yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Pulau Lombok.

Tabel 2. 165 Capaian Pengembangan KSP Pola Syariah Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2019

NO	KAB/KOTA	RENCANA PENGEMBANGAN KSPPS/USPPS 2013-2018	2013-2018	CAPAIAN 2019	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	Kota Mataram	40	25	1	26	65.00
2.	Lombok Barat	85	33	2	35	41.18
3.	Lombok Utara	35	16	0	16	45.71
4.	Lombok	85	82	15	97	114.12
5.	Tengah	100	59	2	61	61.00
6.	Lombok Timur	20	12	0	12	60.00
7.	Sumbawa Barat	30	11	0	11	36.67
8.	Sumbawa	30	16	0	16	53.33
9.	Dompu	35	32	0	32	91.43
10.	Bima	25	10	0	10	40.00
11.	Kota Bima	15	49	22	71	473.33
	Provinsi					
		500	**345**	**42**	**387**	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2019

- **Sarana Usaha Koperasi**

Pada tahun 2019 Provinsi NTB mendapatkan Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk Revitalisasi Pasar Tradisional di 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima dengan nilai rupiah masing-masing Rp.950.000.000,-. Sedangkan untuk bantuan Penataan Lapak PKL di Kabupaten Lombok Barat, dana TP diberikan dengan Nilai Rp.800.000.000,- serta bantuan untuk Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT) diberikan ke Kabupaten Lombok Utara dengan Nilai Rp.2.100.000.000,-

- **Bantuan Permodalan Bagi Wirausaha Pemula (WP)**

Bantuan modal usaha yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI bagi Wirausaha Pemula (WP) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 dengan total nilai bantuan sebesar Rp.3.224.817.000,- yang diberikan kepada 311 Wirausaha Pemula dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 166 Bantuan Pemerintah Hibah Bagi Wira Usaha Pemila Di Provinsi NTB Sampai 31 Desember 2019

NO	TAHUN	JUMLAH (ORANG)	JUMLAH DANA (Rp.)
1.	2012	21	220,000,000
2.	2013	52	654,000,000
3.	2014	84	841,000,000
4.	2017	37	420,817,000
5.	2018	62	433,000,000
6.	2019	55	656,000,000
	Jumlah	**311**	**3,224,817,000**

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2019

- **Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM)**

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 20 Mataram. PLUT-KUMKM didirikan dengan maksud untuk memberikan fungsi layanan berupa konsultasi pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 (tujuh) orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Dalam periode Januari sampai dengan Desember 2019, sesuai bidang masing-masing dilakukan telah dilakukan bantuan konsultasi kepada lebih dari 800 UMKM lama termasuk pengurus dari 33 koperasi lama dan 5 koperasi baru serta 8 kampung UKM Digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 256 orang.

Dalam penyelenggaraan urusan bidang Koperasi dan UMKM sepanjang tahun 2019 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 167 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan UKM	Mendorong Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UKM melalui APBN selain itu bermitra dengan NGO serta mendorong pihak swasta melalui CSR nya.
Kurangnya akses permodalan bagi Koperasi dan UKM untuk Pengembangan Usaha.	Mendorong pemerintah pusat, NGO, perbankan dan swasta untuk membuka akses permodalan dengan bunga yang rendah. bagi koperasi dan UMKM.
Kurangnya akses tehnologi Koperasi dan UKM baik dalam penerapan maupun pemanfaatannya.	Bermitra dengan Dinas Kominfotik, pihak swasta, NGO untuk membuka akses bagi penerapan dan pemanfaatan IT.
Kurangnya jaringan usaha maupun Lembaga Konsultasi Usaha bagi Koperasi dan UKM	Meningkatkan kualitas penyedia jasa pengembangan usaha (PS) dan memperluas jaringan usaha dan jiwa kewirausahaan bagi Koperasi dan UKM.
Lemahnya organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM, khususnya di tingkat pengelola Koperasi dan UKM	Meningkatkan pengembangan organisasi dan manajemen Koperasi dan UKM untuk mengelola Koperasi dan UKM secara kontinue dan professional

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kurangnya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan Koperasi dan UKM	Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan PERDA untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Rendahnya kepedulian dan pembinaan dari Instansi/Dinas Sektoral baik vertical maupun horisontal	Meningkatkan koordinasi instansi/Dinas Sektoral yang terkait dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM baik vertikal maupun horizontal.
Kurangnya Tenaga Penyuluh koperasi dan UKM	Mendorong kebijakan pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga penyuluh dibidang koperasi dan UKM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon tenaga penyuluh koperasi dan UKM

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2019

12. Penanaman Modal

Salah satu sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2019-2023 pada Misi 5 adalah meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kemudahan perizinan yang diukur melalui indikator Nilai Realisasi Investasi (Rp.Milyar). Untuk mencapai target tersebut, diintervensi dengan Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diukur dengan indikator Nilai Realisasi Investasi. Nilai realisasi investasi diukur berdasarkan jumlah nilai penanaman modal baik oleh dalam negeri maupun asing sesuai dengan jumlah izin penanaman modal yang diterbitkan.

Selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019, Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB terus mengalami peningkatan sebagaimana yang tersaji pada grafik berikut ini.

Tabel 2. 168 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019

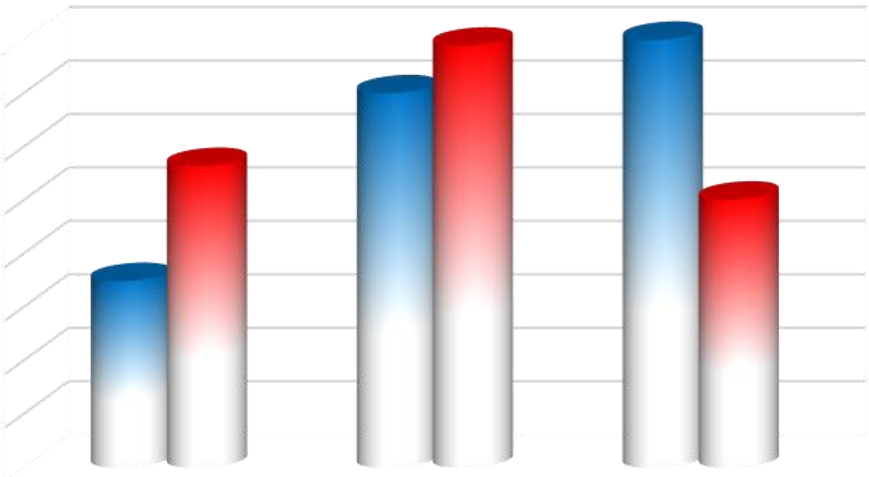

	2017	2018	2019
Target	6,976,259,920,139	14,000,000,000,000	16,000,000,000,000
Realisasi	11,280,326,526,268	15,781,354,703,933	10,023,792,916,210

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Pada tahun 2017 Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB sebesar Rp.11,280 Trilyun melampaui dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp.6,976 Trilyun atau 161,70%. Selanjutnya pada tahun 2018, mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 39,90% atau sebesar Rp.15,781 Trilyun dari tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 menurun 37,36% dari target yang telah ditetapkan. Apabila dilihat dari perkembangan capaian Nilai Realisasi Investasi di Provinsi NTB selama kurun waktu dua tahun terakhir tersebut yang selalu meningkat dapat mengindikasikan bahwa Provinsi NTB memiliki potensi yang cukup besar untuk menarik investor yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, khusus tahun 2019 nilai realisasi investasi mengalami penurunan disebabkan oleh bencana alam yang terjadi pada tahun 2018 yang yang berdampak pada investasi tahun 2019 dimana banyak perusahaan yang membatalkan investasinya, merescedule ulang dan memiliki tambahan investasi 0.

Investasi atau penanaman modal dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2017-2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 169 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)				Total (Rupiah)
	PMDN		PMA		
2017	9.075.242.457.981	80,45%	2.205.084.068.287	19,55%	11.280.326.526.268
2018	11.863.726.122.754	75,18%	3.917.628.581.179	24,82%	15.781.354.703.933
2019	5.699.178.997.403	56,85%	4.324.613.918.807	43,14%	10.023.792.916.210

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN lebih tinggi dari PMA. Tahun 2017, Nilai Realisasi Investasi kategori PMDN sebesar Rp.9.075.242.457.981 atau 80,45%, sedangkan kategori PMA sebesar Rp.2.205.084068.287 atau 19,55% dari nilai total keseluruhan nilai realisasi investasi sebesar Rp.11.280.326.526.268. Kemudian pada tahun 2018, nilai realisasi investasi kategori PMDN mengalami kenaikan nilai dari tahun sebelumnya yang semula Rp.9.075.242.457.981 menjadi Rp.11.863.726.122.754 namun mengalami penurunan proporsi (80,45% menjadi 75,18%) dari nilai total investasi, sedangkan untuk kategori PMA baik nilai realisasi investasi (Rp.2.205.084.068.287 menjadi Rp.3.917.628.581.179) maupun secara proporsi mengalami kenaikan (19,55% menjadi 24,82%. Selanjutnya di tahun 2019 nilai realisasi investasi pada PMDN sebesar Rp. 11.863.726.122.754 menjadi 5.699.178.997.403 namun mengalami penurunan 75,18% menjadi 56,85% sedangkan pada PMA sebesar Rp.3.917.628.581.179 menjadi Rp.4.324.613.918.807 mengalami kenaikan (24.82% menjadi 43,14%) dengan nilai realisasi investasi secara keseluruhan PMDN/PMA sebesar Rp.10.023.792.916.210.

Untuk sebaran capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Kabupaten/Kota se-NTB periode tahun 2017 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017 - 2019

NO	Kabupaten/ Kota	Realisasi PMDN		
		2017	2018	2019
1	Kota Mataram	725,030,696,336	1,376,997,772,297	714.089.747.388
2	Lombok Utara	5,600,000,000	119,483,905,270	161.489.706.438
3	Lombok Barat	1,839,250,711,760	971,950,867,509	1.677.895.437.313

4	Lombok Tengah	3,991,200,000	1,124,096,059,292	995.013.262.185
5	Lombok Timur	798,033,538	4,317,672,443	131.793.187.659
6	Sumbawa Barat	6,688,619,558,802	7,972,692,137,212	1.759.727.462.113
7	Sumbawa	177,729,960,000	133,258,398,476	86.836.648.934
8	Dompu	-	41,426,789,004	4.428.853.872
9	Bima	-	55,350,000,000	-
10	Kota Bima	-	64,152,521,251	167.904.691.501
	J u m l a h	**9,441,020,160,436**	**11,863,726,122,754**	**5.699.178.997.403**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Tabel 2. 171 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2017- 2019

NO	Kabupaten/ Kota	Realiasi PMA		
		2017	2018	2019
1	Kota Mataram	18,103,775,714	57,265,415,993	136.132.503.268
2	Lombok Utara	622,281,089,274	570,780,340,551	396.632.183.942
3	Lombok Barat	723,950,687,268	483,452,500,723	527.269394.644
4	Lombok Tengah	224,031,213,376	276,714,717,973	801.752.724.553
5	Lombok Timur	167,600,425,200	436,290,505,135	294.168.108.036
6	Sumbawa Barat	24,003,990,000	16,491,780,504	1.245.816.725.156
7	Sumbawa	49,386,980,000	2,031,775,392,300	517.498.848.008
8	Dompu	3,625,985,000	35,384,028,000	447.763.925.000
9	Bima	6,318,230,000	9,464,450,000	2.570.000.000
10	Kota Bima	3,990,000	9,450,000	9.506.200
	J u m l a h	**1,839,306,365,832**	**3,917,628,581,179**	**4.324.613.918.807**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Meningkatnya investasi PMDN dan PMA dipengaruhi oleh investor (perusahaan) yang melakukan investasi. Berdasarkan sektor, penanaman modal baik kategori PMDN dan PMA untuk seluruh sektor tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Untuk kategori PMDN, sektor pertambangan merupakan penyumbang terbesar dari capaian nilai realisasi investasi di tahun 2017 sampai dengan 2018 sedangkan tahun 2019 penyumbang terbesar adalah sektor perhubungan/transportasi. Sedangkan sektor pertambangandan pariwisata mengalami penurunan nilai realisasi investasinya, namun secara keseluruhan ketiga sektor ini merupakan penyumbang terbesar. Hal ini mengindikasikan bahwa potensiperhubungan transportasi, pertambangan dan pariwisata menjadi sektor yang menjadi potensi dan unggulan di Provinsi NTB.

Tabel 2. 172 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2017 – 2019

NO	Sektor	Realisasi PMDN		
		2017	2018	2019
1	Pariwisata	284,646,063,494	1,451,048,753,585	1.088.214.867.228
2	Perhubungan Transportasi	-	773,953,967,944	1.908.976.176.462
3	Perdagangan	161,794,526,578	77,112,910,894	164.661.911.369
4	Pertanian/perkebunan	-	-	7.447.830.070
5	Perkebunan	-	-	
6	Kehutanan	-	-	
7	Perikanan	-	37,968,859,388	89.202.137.477
8	Peternakan	-	-	100.460.006.445
	Ketenagalistrikan			297.411.502.724
	PUPR			15.734.008.218
	Kesehatan			199.575.549.331
9	Pertambangan, Energi	8,258,850,024,366	8,965,043,699,120	1.542.019.015.485
10	Industri	125,292,500,000	164,373,708,944	267.430.297.032
11	Jasa Lainnya	244,659,343,543	394,224,222,879	15.148.685.063
	Lingkungan hidup			-
	Koperasi			2.897.010.499
	J u m l a h	**9,075,242,457,981**	**11,863,726,122,754**	**5.699.178.997.403**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Pada kategori PMA selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2019, secara total nilai realisasi investasi mengalami peningkatan. Sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap nilai realisasi investasi adalah pertambangan. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan nilai realisasi investasi PMA menurut sektor kurun waktu tahun 2017 – 2019.

Tabel 2. 173 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2017 – 2019

NO	SEKTOR	Realisasi PMA		
		2017	2018	2019
1	Pariwisata	1,434,680,401,095	803,209,911,859	1.840.003.268.613
2	Perhubungan Transportasi	-	100,000,000	229.963.976
3	Perdagangan	37,916,894,100	17,288,177,500	9.325.219.798
4	Pertanian/Perkebunan	-	170,938,054,918	148.251.201

5	Ketenagalistrikan	-	-	144.451.529.588
6	PUPR			167.386.456.266
7	Kesehatan			6.385.000
8	Kehutanan	-	-	-
9	Perikanan	63,017,189,000	80,635,801,200	21.408.413.400
10	Peternakan	-	-	-
11	Pertambangan, Energi	146,858,016,600	2,653,248,305,535	2.056.691.339.186
12	Industri	12,856,680,000	41,319,547,900	20.438.693.816
13	Jasa Lainnya	509,754,887,492	150,888,782,267	64.524.397.963
	J u m l a h	**2,205,084,068,287**	**3,917,628,581,179**	**4.324.613.918.807**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

Perkembangan positif dari Nilai Realisasi Investasi tidak lepas dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus melakukan berbagai terobosan diantaranya penetapan NTB sebagai daerah Ramah Investasi sebagai salah satu program unggulan dalam RPJMD NTB tahun 2019-2023. Program ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif dan berbagai kemudahan penanaman modal dan fasilitas investasi hingga pemasaran. Dimulai regulasi terkait insentif/kemudahan penanaman modal sampai kebijakan penyederhanaan prosedur dan regulasi perizinan, kemudahan persyaratan, waktu pemberian izin hingga penyediaan fasilitas lainnya.

Kontribusi Sektor Pertambangan, Sektor Pariwisata dan Sektor Perhubungan menduduiki tiga besar realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 baik itu PMDN/PMA, dengan perincian sebagai berikut :

Sektor Pertambangan/Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 3.598 Milyar; posisi kedua Sektor Pariwisata sebesar Rp. 2.928 Milyar; disusul sektor Perhubungan sebesar Rp.1.909 Milyar; Dibadingkan periode yang sama tahun 2018 (Januari - Desember), realisasi investasi tertinggi tercatat pada Sektor Pertambangan/Energi/Listrik/ Energi atau Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi tertinggi sebesar Rp. 8.405 milyar; disusul posisi kedua Sektor Pariwisata sebesar Rp. 1.719 milyar.

DPM dan PTSP Provinsi NTB khususnya di Layanan Perizinan, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 telah menggunaakan aplikasi dan terus dikembangkan baik yang merupakan produk dari OPD daerah maupun dari pusat, dimana saat ini aplikasi yang digunakan adalah OSS (online single Submision).Aplikasi ini lebih memberikan kemudahan kepada pengusaha/investor untuk membuat izin usaha investasinya di daerah . Dengan sistem tersebut pengusaha diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (registrasi) perusahaannya pada aplikasi OSS dengan

membuat NIB (Nomor Induk Berusaha). Kelebihan aplikasi ini adalahmampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang ada pada OSS yang dilaksanakan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya yang diberikan pada tahun 2019, setelah NIB dikeluarkan namun belum berlaku efektif jika belum memenuhi komitmen artinya bahwa perusahaan diharuskan untuk mengurus izin utama dan izin penunjang yang dilaksanakan di kab/kota.

Tabel 2. 174 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2017-2019

NO	BIDANG PERIZINAN	2017	2018	2019	NON IZIN	2019	JUMLAH
1.	Penanaman Modal	10	0	0	Penanaman Modal	0	0
2.	Perikanan Dan Kelautan	400	705	640	Perikanan Dan Kelautan	2	642
3.	Pertanian	2.836	0	3	Pertanian	0	3
4.	Koperasi & Umkm	2	6	3	Koperasi & Umkm	0	3
5.	Pekerjaan Umum	1	27	20	Pekerjaan Umum	0	20
6.	Kehutanan	19	6	7	Kehutanan	4	11
7.	Lingkungan Hidup & Penelitian	25	18	37	Lingkungan Hidup & Penelitian	0	37
8.	Perindustrian	0	0	0	Perindustrian	0	0
9.	Perdagangan	2	0	1	Perdagangan	0	0
10.	Perkebunan	2	0	1	Perkebunan	0	1
11.	Hubkominfo	26	47	45	Hubkominfo	0	45
12.	Pertambangan	313	421	539	Pertambangan	45	584
13.	Perencanaan Pembangunan Daerah	12	0	0	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0
14.	Kesehatan	14	51	14	Kesehatan	0	14
15.	Pariwisata	2	0	0	Pariwisata	0	0
16.	Pertanahan	-	0	0	Pertanahan	0	0
17.	Peternakan	-	2.953	2212	Peternakan	0	2212
18.	Sosial	-	2	4	Sosial	24	28
TOTAL			**3.664**	**4.236**		**75**	**3.600**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2018.

Upaya untuk meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui :

1. Perijinan yang tidak dipungut biaya;

2. Pemberian insentif/kemudahan penanaman modal;
3. Sinkronisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP;
4. Mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi.

Pengakuan terhadap kinerja pelayanan investasi di Provinsi NTB ditunjukkan dengan adanya penghargaan yaitu tahun 2016 sebagai Top 4 *Investment Award*, sebagai penyelenggara PTSP di bidang Penanaman Modal Provinsi Terbaik dari BKPM RI. Selain itu, PTSP DPMPTSP Provinsi NTB telah memperoleh sertifikasi ISO 9001-2015 terhadap standarisasi mutu pelayanan perizinan. Tahun 2018 DPMPTSP Provinsi NTB meraih Role Nodel Nasional Pelayanan Publik Terbaik ke 3 Tahun dengan Nilai Baik dari kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, selain itu Tahun 2018 DPMPTSP meraih penghargaan Provinsi Terbaik Secara Pelayanan Publik dan Potensial Sektor Investasi dari *Indonesia's Attractiveness*. Untuk tahun 2019 DPMPTS tidak memperoleh satupun penghargaan terkait pelayanan publik.

Sebagai urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan bidang penanaman modal memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan tujuh pelayanan dasar yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator yang mengacu pada Peraturan Kepala BKPM RI Nomor : 10 Tahun 2012 Tentang SPM Bidang PM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Juknis SPM Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota. Capaian pelaksanaan SPM urusan bidang penanaman modal disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 175 Pelaksanaan Standar Palayanan Minimal (SPM) Urusan Penanaman Modal Tahun 2014-2018

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 sektor/ Bidang usaha/ Tahun	8 sektor/ Bidang usaha/ tahun	8 sektor/ Bidang usaha/ Tahun	8 sektor/ Bidang usaha/ tahun	8 sektor/ Bidang usaha/ Tahun
Kerjasama penanaman modal	Terselenggara nya fasilitasi kemitraan antara UMKM tingkat	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	Kab/Kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional					
Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang PM kabupaten	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun
Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM melalui PTSP	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun
Pengelolaan data dan system informasi PM	Terimplementa Sinya system Pelayanan informasi dan Perizinan investasi secara elektronik SPIPISE	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ tahun
Penyebarluasan pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi Kebijakan penanaman modal kepada Masyarakat dunia usaha	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	1 kali/ Tahun	1 kali/ tahun	0 kali/ Tahun

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2018.

Realisasi pencapaian SPM bidang Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB periode tahun 2014 - 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal

   Indikator pelayanan dasar kebijakan penanaman modal adalah tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dengan target pada akhir tahun sebanyak 1 (satu) sektor/bidang usaha.

Realisasi sampai akhirDesember 2019 telah tersedia informasi peluang usaha sebanyak 8 (delapan) sektor yaitu sektor pariwisata, peternakan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pertanian dan industri. Selain itu, DPMPTSP juga menyediakan informasi peluang investasi 5 (lima) kawasan strategis yaitu KEK Mandalika, Kawasan SAMOTA. Global Hub dan SAKOSA serta Smelter dan industri turunannya. Informasi peluang usahatersebut dalam bentuk media cetak berupa buku, brosur/leaflet dan DVD.

2. Kerjasama Penanaman Modal

   Target pelayanan dasar kerjasama penanaman modal adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dengan Pengusaha tingkat Provinsi/Nasional sebanyak 1 (satu) kali per tahun.Realisasi sampai akhir Desember 2019, DPMPTSP telah melaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan Pengusaha dalam negeri dalam bentuk kesepakatan fasilitasi untuk melakukan kerjasama .

3. Promosi Penanaman Modal

   Target pelayanan dasar promosi penanaman modal adalah terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi sebanyak 1 (satu) kali per tahun. Realisasi sampai akhir Desember 2019, telah dilakukan promosi sebanyak 2 (kali) kali antara lain Roadshow temu bisnis di Hotel Sheraton Mustika YOGYAKARTA dan Roadshow temu bisnis di Hotel Grand Dafam SURABAYA.

4. Pelayanan Penanaman Modal

   Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik bidang Penanaman Modal, indikator pelayanan penanaman modal adalah terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal dengan target pada akhir tahun sebesar 100% atau 4 (empat) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dapat dilayani yaitu Izin Pendaftaran, Izin Prinsip, Izin Perpanjangan RPTKA dan Izin Perpanjangan IMTA. Namun dengan dikeluarkannyaPERKA BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Izin Pendaftaran sudah tidak ada lagi hanya ada Izin Prinsip dan Izin Usaha. Selain itu, untuk perpanjangan RPTKA dan perpanjangan IMTA bukan lagi merupakan kewenangan DPMPTSP Provinsi NTB karena telah dicabut pelimpahannya melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 757-700 tahun 2013.

Dengan demikian, indikator SPM pelayanan penanaman modal dengan target terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibidang penanaman modal pada akhir tahun menjadi sebesar 100% atau 2 (dua) jenis perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dapat dilayani yaitu Izin Prinsip dan Izin Usaha. Semenjak tahun 2019 dan dikeluarkannya PERMENDAGRI 138 tahun 2017 maka pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi OSS (online Single Submision) yang terintegrasi dengan SiCantik Cloud. Realisasi sampai akhir Desember 2019, Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP sebesar125,22%.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   Realisasi sampai akhir Desember 2019, DPMPTSP tidak melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal, namun tetap melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal kepada pelaku usaha serta menfasilitasi permasalahan pelaku usaha dan pendampingan tata cara penyampaian LKPM
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
   Berdasarkan PERGUB NTB Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik bidang Penanaman Modal, indikator pelayanan dasar pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal adalah terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dengan target pada akhir tahun sebesar 100% atau 4 (empat) jenis pelayanan SPIPISE yang telah diimplementasikan yaitu Izin Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
   Namun dengan dikeluarkannya PERKA BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, Izin Pendaftaran sudah tidak ada lagi sehingga izin tersebut tidak dilayani lagi melalui SPIPISE. Tahun 2019 DPMPTSP Provinsi NTB telah menerbitkan izin dan Non izin sebanyak 3.600. Selain itu, Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online.
7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
   Target pelayanan dasar penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal adalah terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dengan target sebanyak 1 (satu) kali.

Realisasi sampai akhir desember 2019, DPMPTSP tidak melaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2019 sebesar 83,82 yang termasuk dalam kriteria Sangat Baik (81,26-100). Pelaksanaan penilaian IKM tersebut berdasarkan 14 unsur pelayanan dan dilakukan terhadap 150 responden yang didominasi oleh pelaku usaha dan karyawan swasta dengan usia 22 sampai dengan 58 Tahun.

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Provinsi NTB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 176 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Banyaknya Regulasi pelayanan perizinan.	Meningkatkan koordinasi dengan BKPM RI
Kesadaran investor PMDN/PMA tentang kewajibannya untuk menyampaikan LKPM masih kurang	- Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Kab./Kota - Melakukan pembinaan ke Investor-investor.

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2019.

13. Kepemudaan Dan Olahraga

Tabel 2. 177 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD Tahun 2019

No	Indikator	satuan	2017	2018	2019	
					Target	Capaian
1.	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	40	30	25	35
2.	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23
3.	Proporsi wira usaha muda	%	67,78	67,86	67,97	68.00

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, pada RPJMD 2019-2023 mengemban tugas untuk mencapai 3 (tiga) indikator kinerja daerah, yakni

Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional, dan Proporsi wirausaha muda. Pencapaian ketiga indikator kinerja daerah ini pada tahun 2019 telah melampaui target semua, seperti dijelaskan dalam tabel diatas.

Indikator Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional diukur dengan jumlah medali yang peroleh oleh atlit NTB pada berbagai kejuaraan, nasional dan internasional. Tahun 2019 NTB ikut serta pada 4 (empat) kompetisi olahraga, dan memperoleh total 34 medali, melampaui angka yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar 25 medali. Rincian perolehan medali pada masing-masing kejuaraan adalah sebagai berikut:

1. KEJURNAS ANTAR PPLP 11 Medali;
2. POPNAS 10 Medali;
3. PEPARPENAS 7 Medali;
4. ALUMNI PPLP PADA SEAGAMES 7 Medali.

Pencapaian untuk indikator Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional dapat dirincikan dalam tabel di bawah, pencapaian indikator ini merupakan gabungan dari pemuda yang menerima penghargaan sebagai pemuda pelopor, Peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI).

Tabel 2. 178 Pemuda Berprestasi di Tingkat Nasional dan Internasional Tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.	Dipati, S.Pd	RT.12 RW.04, DesaRasabou, Kec. Bolo, Kab. Bima.	JuaraPemudaPelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Pendidikan Tahun 2019
2.	Andre Kurniawan	DesaKesik, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur.	JuaraPemudaPelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat BidangSosialBudaya dan PariwisataTahun 2019
3.	Ramlin, S.Pd	DesaWawonduru, Kec. Dompu, Kab. Dompu.	JuaraPemudaPelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat BidangPengelolaanSumberDaya Alam dan LingkunganTahun 2019
4.	AdelliaRizkiana	Dusun Sentul, Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara.	JuaraPemudaPelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat BidangPanganTahun 2019
5.	Robby Sahrullah, S. Biotek	Dusun MarentaBeru RT. 002 RW.002,	JuaraPemudaPelopor Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
		DesaMarente, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.	BidangInovasiTeknologiTahun 2019
6.	YarhamFathul Akbar	Jl. Lintas Sumbawa, Kab. Sumbawa	PesertaPertukaranPemudaAntar Negara (PPAN) keMalaysiaTahun 2019
7.	Ahmad Habibullah	Kabupaten Lombok Tengah	PesertaKapalPemuda Nusantara (KPN) di NiasTahun 2019
8.	Elsa Candra	Kab. Lombok Barat	PesertaKapalPemuda Nusantara (KPN) di NiasTahun 2019
9.	Putri Ramadhani	Kab. Dompu	PesertaKapalPemuda Nusantara (KPN) di NiasTahun 2019
10.	Muhammad Adzan	Kota Bima	PasukanPengibarBenderaPusaka (Paskibraka)Tahun 2019
11.	Shelly Melsyan Silva	Kab. Sumbawa	PasukanPengibarBenderaPusaka (Paskibraka)Tahun 2019
12.	SohibulKahfi	Kota Mataram	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
13.	NuraqillaWaidha Bintang G	Kab. Lombok Barat	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
14.	IsnaRohmania Malik	Kab. Lombok Tengah	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
15.	Roriansyah Ramadhan	Kab. Lombok Timur	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
16.	Kamala Dini	Kab. Lombok Timur	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
17.	Harbian Banyu Sehendra	Kab. Lombok Utara	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
18.	LeadyaWilandari, S.Sn	Kab. Sumbawa Barat	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
19.	Muhammad Zuhardiman	Kab. Sumbawa	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
20.	NunungKolmalasari	Kab. Sumbawa	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
21.	YuliraRahmi	Kab. Dompu	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
22.	M. Saleh Ahalik, M.Pd	Kab. Bima	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019
23.	Khairil Anwar	Kota Bima	PesertaJamborePemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional di Manado Tahun 2019

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

- **Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda**

Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda diikuti oleh 100 peserta yang terbagi dalam 2 angkatan pelatihan yang berasal dari pemuda 10 Kabupaten/Kota se-NTB yang tergabung dalam wirausaha pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan kepada wirausaha pemula untuk meningkatkan kemandirian, kapasitas, kompetensi profesional dan daya saing wirausaha muda. Hasil yang dicapai pada kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda adalah:

1. Meningkatnya wawasan para pemuda dalam dunia usaha;
2. Meningkatkan penghasilan pemuda dalam menjalankan usaha produktif;
3. Munculnya kelompok-kelompok wirausaha pemula.

Indikator Kinerja Daerah yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya "Proporsi wirausaha muda". Target tahun 2019 untuk indikator ini adalah 67,97% dengan pencapaian tahun 2019 sebesar 68,00% melampaui target yang telah ditetapkan.

- **Pelatihan Pendewasaan Usia Perkawinan**

Kegiatan pelatihan pendewasaan usia perkawinan (PUP) ini dimaksudkan untuk menciptakan pelatih-pelatih terkait pendewasaan usia perkawinan yang nantinya mampu men-deliver message di masyarakat terkait apa dan bagaimana PUP, dampak yang ditimbulkan, upaya pencegahannya, dan sebagainya, diikuti oleh 26 peserta yang terdiri dari Komunitas Literisa, Pramuka, PCMI, Menwa, dan Purna Kapal Pemuda Nusantara, sedangkan 8 orang pendamping dari unsure Pramuka, Menwa, Komunitas Literasi dan Organisasi binaan DISPORA NTB, dengan siswa sasaran sebanyak 300 orang. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah:

1. Siswa/siswi sasaran kegiatan memahami tentang bahaya pernikahan dini;

2. Peserta mampu memahami mengenai dampak kesehatan bagi remaja yang melakukan pernikahan dini;
3. Bertambahnya pengetahuan tentang Kerangka Pendewasaan Usia Perkawinan yaitu: Masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, dan masa mencegah kehamilan.

- **Pengembangan Kelompok Pemuda Pelopor**

Peran strategis pemuda memang tidak dapat diabaikan, paradigma pemuda sebagai kategori sosial (*social category*) mengindikasikan adanya pengakuan/ penghargaan terhadap potensi pemuda baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pemuda berjumlah 62.775 juta jiwa atau 27,31% dari jumlah penduduk Indonesia (data *single years* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik). Begitu pula dengan potensi kualitatif pemuda dalam aspek pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dapat diakui bahwa pemuda memiliki aneka talenta yang dalam kaitannya dengan kepeloporan bela negara, kewirausahaan, teknologi tepat guna, sosial budaya serta kelautan yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan nasional.

Kondisi kepemudaan secara nasional tidak jauh berbeda dengan kondisi kepemudaan di Provinis NTB. Perkembangan penduduk di NTB menunjukkan bahwa sekitar 2025-2030 NTB akan mengalami fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi, yaitu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (pemuda) jauh melebih usia non produktif (usia anak dan lanjut usia). Kondisi ini akan menjadi malapetaka apabila tidak dipersiapkan dengan baik. Dan sebalinya menjadi sebuah potensi luar biasa apabila usia produktif (kaum muda) ini dipersiapkan baik secara fisik (kesehatannya) dan secara intelektual (keilmuannya) serta akhlak (imannya). Melihat hal tersebut maka sisi intelektual dapat mulai dibangun melalui membangun kepeloporan kaum muda. Kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi bagi bangsa negara dan bagi dirinya sendiri. Pengembangan kepeloporan tahun 2018 ini difokuskan pada 5 bidang kepeloporan pemuda yaitu:

1. Pendidikan;
2. Agama, Sosial dan Budaya ;
3. Pengelolaan Sumberdaya Alam Lingkungan dan Pariwisata;
4. Pangan;
5. Inovasi Teknologi.

Dari pelaksanaan kegiatan ini hasil yang dicapai adalah :

a. Terseleksinya calon Pemuda Pelopor yang memiliki potensi kepeloporan dalam bidang-bidang yang telah ditetapkan;
b. Terpilihnya pemuda-pemuda pelopor yang memiliki karya nyata yang berkualitas dibidang kepeloporannya didasarkan pada kecerdasan, kreatif, kepribadian, jiwa kegotongroyongan dan kemandirian;
c. Meningkatnya potensi kepeloporan pemuda dalam pelbagai bidang berbasis isu-isu strategis dan sumberdaya lokal.

Adapun hasil seleksi Pemuda Pelopor dari Kabupaten/Kota sesuai bidang kepeloporannya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Asal Kabupaten/Kota	Peringkat
A.	Bidang Pendidikan		
1.	Dipati, S.Pd	Kab. Bima	I
2.	Muh. Irawadi, SH	Kab. Lombok Timur	II
3.	Trisagita Oktavianti	Kab. Sumbawa	III
B.	Bidang Agama, Sosial dan Budaya		
1.	Andre Kurniawan	Kab. Lombok Timur	I
2.	Rikianto, S.Pd	Kab. Sumbawa	II
3.	Dedi Ardianyah	Kab. Bima	III
C.	Bidang Pengelolaan SDA, Lingkungan dan Pariwisata		
1.	Ramlin, S.Pd	Kab. Dompu	I
2.	Muhammad Rizani	Kab. Lombok Barat	II
3.	Achmad Poetra Muliadi	Kab. Sumbawa	III
D.	Bidang Pangan		
1.	Adelia Rizkiana	Kab. Lombok Utara	I
2.	Dewi Yuliandani, SE	Kab. Lombok Timur	II
3.	Limbda Afriani	Kab. Sumbawa	III
E.	Bidang Teknologi		
1.	Robby Sahrullah S.Biotek	Kab. Sumbawa	I
2.	Mursanip	Kab. Lombok Timur	II
3.	Moh. Amir Hamzah	Kab. Lombok Tengah	III

Pada Tahun 2019 Prestasi seleksi Pemuda Pelopor di Tingkat Nasional, Provinsi NTB belum berhasil menyumbangkan Juara, dari 2 (dua) orang wakil yang dikirim hanya 1 (satu) orang mendapatkan predikat sebagai Pemuda Hebat yaitu: Andre Kurniawan asal Kabupaten Lombok Timur.

- **Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)**

Program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) mempunyai peran strategis dalam rangka menjalin persahabatan dan saling pengertian antar

pemuda Indonesia dan negara tujuan dalam aspek kehidupan, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir generasi muda Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional, serta meningkatkan patriotisme dan disiplin para pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Adapun hasil seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara pada Tahun 2019 adalah Yarham Fathul Akbar asal Kabupaten Dompu dengan tujuan ke Malaysia.

- **Seleksi Kapal Pemuda Nusantara (KPN)**

Selain Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) ada juga kegiatan KPN untuk meningkatkan jiwa nasionalisme, rasa kebangsaan, kebhinekaan dan bangga menerima perbedaan antara beragam suku, agama, ras, ethnis di Indonesia. Adapun Hasil Kegiatan Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara (KPN) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ASAL KAB/KOTA	KETERANGAN
1	Ahmad Habibullah	Kab. Lombok Tengah	
2	Elsa Candra	Kab. Lombok Barat	
3	Putri Ramadhani	Kab. Dompu	

- **Jambore Pemuda Indonesia (JPI)**

Peserta yang dinyatakan lulus Jambore Pemuda Indonesia Diharuskan untuk mengikuti pembekalan di Tingkat Provinsi. Kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut sebagai media untuk mengenal daerah tujuan, untuk menempa kesiapan fisik dan mental, serta persiapan bagi mereka untuk menyiapkan seni dan budaya di Nusa Tenggara Barat yang akan ditampilkan pada saat Jambore Pemuda Indonesia serta melatih beberapa keterampilan yang dimiliki. Sebagai sebuah tim dan menjadi duta NTB mereka diharapkan bekerjasama dengan baik, menjaga kekompakan dengan tim dan mampu beradaptasi serta bersosialisasi demi menjaga marwah NTB.

Adapun Pembekalan bagi Calon Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) untuk mengikuti Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tingkat Nasional Tahun 2019 di Manado tanggal 31 Oktober s.d 6 November 2019 sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA	ASAL KAB/KOTA	KETERANGAN
1	Sohibul Kahfi	Kota Mataram	Peserta
2	Baiq Widia Komalasari	Kota Mataram	Pendamping PPMI
3	Nuraqila Waidha Bintang G	Kab. Lombok Barat	Peserta

NO	NAMA PESERTA	ASAL KAB/KOTA	KETERANGAN
4	Isna Rohmania Malik	Kab. Lombok Tengah	Peserta
5	Harbian Banyu Suhendra	Kab. Lombok Utara	Peserta
6	Roriansyah Ramdhani	Kab. Lombok Timur	Peserta
7	Kamala Dini	Kab. Lombok Timur	Peserta
8	Laedya Wilandari	Kab. Sumbawa Barat	Peserta
9	Muhammad Zuhardiman	Kab. Sumbawa	Peserta
10	Nunung Komalasari	Kab. Sumbawa	Peserta
11	Yulira Rahmi	Kab. Dompu	Peserta
12	M. Saleh Ahalik, M.Pd	Kab. Bima	Peserta
13	Khairil Anwar	Kota Bima	Peserta

- **Kompetisi Olahraga**

Pada kegiatan pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah pada Tahun 2019 melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

1. Mengikuti Kejuaraan Nasional Antar PPLP/PPLPD/SKO.
   a. Kejurnas Cabang Olahraga Atletik di Bangka Blitung;
   b. Kejuaraan Cabang Olahraga Pencak Silat di Aceh;
   c. Kejuaraan Cabang Olahraga Voli Pasir di Bangka Blitung;
   d. Kejuaraan Cabang Olahraga Taekwondi di Semarang Jawa Tengah.
2. Menjadi Tuan Rumah Kejurnas Taekwondo
3. Tes Pengukuran Fisik Atlet PPLP di Laboratorium IKIP Mataram
4. Try Out Cabang Olahraga yang dibina di PPLP
5. Tes Pengukuran Fisik Atlet PPLP yang dilaksanakan dari Tim Kemenpora.
6. Seleksi calon Atlet PPLP NTB tahun 2019
7. Kejuaraan antar pelajar 10 cabang olahraga.
8. Pelatihan Tenaga Keolahragaan.

Tabel 2. 179 Capaian Atlet PPLP/PPLPD pada KEJURNAS Tahun 2019

NO	NAMA	NOMOR CABOR	MEDALI	TEMPAT
A.	**CABOR ATLETIK**			
1	M. Naufal Zakwan Agus Mirawan Rangga Bima	Atletik, 4 X 400 M	Perak	Bangka Blitung
2.	Mirawan	400 M Putra	Perak	
3.	Ni Komang Triana Md	4 X 100 M Putra	Perunggu	

NO	NAMA	NOMOR CABOR	MEDALI	TEMPAT
	Jumratun Fala Ditha Suchika Lestari			
4.	Ni Komang Triana MD Jumratun Fala Ditha Suchika Lestari	Atletik, 4 X 400 M	Emas	
6.	Mirawan	400 M	Perak	Asean Shcool
7.	Jumratun	400 M	Perak	
B.	**CABOR PENCAK SILAT**			
1.	Atika Zahra		Perak	Aceh
2	Iqbal Anugrah		Perunggu	
C.	**CABOR TAEKWONDO**			
1.	Desina Yusviantara	Over 68	Perunggu	Semarang Jateng
2.	Yosevin Candra L Tobing	Under 59	Perunggu	
D.	**CABOR VOLLY PASIR**			
1.	Rizki Ramdhan Raza Adam Martazia		Perak	Bangka Blitung

Tabel 2. 180 Capaian Atlet PPLP/PPLPD pada POPNAS Tahun 2019

NO	NAMA	NOMOR CABOR	MEDALI
A.	**CABOR ATLETIK**		
1.	Agus Gabril Luis Batesta Rangga Bima Mirawan	Atletik, 4 X 400 M	Perak
2.	Dini Jumratun Fala Ditha Iswatun	Atletik, 4 X 400 M	Perak
3.	Mirawan	400 M	Emas
B.	**CABOR TAEKWONDO**		
1	Desina Yuspiantara		Perak
C.	**CABOR VOLLY PASIR**		
1.	Rizki Ramdhan		Perak

	Raza Adam Martazia		

Tabel 2. 181 Capaian Atlet Alumni PPLP pada SEA GAMES Tahun 2019

NO	NAMA	NOMOR CABOR	MEDALI
A.	**CABOR ATLETIK**		
1.	Sapwaturrahman	Lompat Jauh	Emas
		Lompat Jangkit	Perunggu
B.	**CABOR VOLLY PASIR**		
1.	Putu Dini Jasika Dita Juliana		Perak
2.	Danangsyah		Emas
3.	Desi Ratnasari Alisah Muntaharah		Perunggu Emas

Selain mengikuti event-event tersebut, atlet PPLP/PPLPD juga melakukan try out untuk meningkatkan presetasi sbb:

1. Cabang Olaharaga Atletik
   Untuk cabor atletik dikarenakan banyaknya Kejuaraan Nasional yang tertunda sehingga try out untuk atletik hanya mengikuti beberapa kejuaraan yang ada di dalam maupun luar daerah.
2. Cabang Olahraga Voli Pasir.
   Cabang olahraga Voli pasir dilaksankan di Jawa Timur dengan mengikuti Open Turnamen yang dilaksankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Cabang Olahraga Pencak Silat.
   Try out untuk cabang olahraga pencak silat di Tahun 2019 ditiadakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
4. Cabang Olahraga Tae Kwondo
   Cabang Olahraga Tae kwondo melaksanakan try out dengan melakukan sparing dengan perguruan-perguruan yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, Pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga terdapat 3 kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu :

a. Kompetisi 16 cabang olahraga antar pelajar PIALA GUBERNUR NTB Tahun 2019;
b. Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Tahun 2019 dan
c. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XV Tahun 2019.

Kompetisi 16 cabang olahraga antar pelajar Piala Gubernur NTB Tahun 2019 dapat dilihar pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 2. 182 Kompetisi 16 Cabang Olahraga Piala Gubernur Tahun 2019

NO	CABANG OLAHRAGA	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT PELAKSANAAN	KET-
1.	Sepak Takraw	Tgl 23-27 Maret 2019	KSB	
2.	Catur;	Tgl 05-07 April 2019	Aula Dispora NTB	
3.	Dansa;	Tgl 21-23 Juni 2019	Ballroom Arena Hotel (Puri Mas Hotel) Senggigi	
4.	Muaythai	Tgl 27-29 April 2019	GYM PHOENIXS Senggigi	
5.	Atletik	Tgl 20-21 April 2019	Lap. Atletik GOR 17 Desember	
6.	Sepatu Roda	Tgl 24-25 Agustus 2019	Transmart Carrefour-Sweta	
7.	Biliar;	Tgl 01-04 Agustus 2019	"86" Biliar Mall lama lt. 2 Mataram	
8.	Shorinji Kempo;	Tgl 06-08 Sept- 2019	Padepokan Silat GOR 17 Desember	
9.	Bulutangkis	Tgl 16-19 Sept- 2019	GOR Warna Agung Ampenan	
10.	Tae Kwon Do	Tgl 26-28 Juli 2019	Gelanggang Pemuda Mataram	
11.	Menembak	Tgl 03-06 Oktober 2019	Lap. Menembak Saraswati dan Cemara Mataram	
12.	Tarung Derajat	Tgl 27-30 Juni 2019	Gelanggang Pemuda Mataram	
13.	Panjat Tebing	Tgl 16-19 Okt- 2019	Gelanggang Pemuda Mataram	
14.	Renang	Tgl 07-08 Sept- 2019	Tirta Karya Rinjani Selong	
15.	Wushu	Tgl 28-30 November 2019	Gedung Juang Selong-Lotim	
16.	Voli Pasir	Tgl 15-18 Desember 2019	Lap. Voli pasir GOR 17 DESEMBER	

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

Untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Tahun 2019 adalah yang pertama diselenggarakan setelah vakum sekian lama bagi Provinsi NTB. Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) adalah kegiatan

multi event Mahasiswa Tahunan yang merupakan titik kulminasi dan gambaran pembinaan prestasi olahraga di kalangan Perguruan Tinggi (Mahasiswa) di Provinsi NTB, selain sebagai alat pemersatu di kalangan Mahasiswa.

Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XV Tahun 2019, yang sedianya diselenggarakan di Papua, namun karena sarana prasarana serta situasi keamanan, maka penyelenggaraan dipindahkan ke DKI-Jakarta yang dilaksanakan pada tangal tanggal 16 s/d 25 November 2019. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XV Tahun 2019 di Papua mempertandingkan 13 (tiga belas) cabang oalahraga, dengan peserta seluruh PPLP/PPLPD/SKO Provinsi di seluruh Indonesia.

Dari 13 (tiga belas) cabang olahraga yang dipertandingkan Provinsi NTB hanya mengikuti 8 (delapan) cabang olahraga antara lain: Atletik, Bulutangkis, Pencak Silat, Renang, Tae Kwon Do, Tarung derajat, Voli pasir dan Karate. Dari 8 (delapan) cabang olahraga yang diikuti oleh Provinsi NTB memperoleh hasil medali : 1 emas, 4 perak dan 5 perunggu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Medali Emas: dari cabang olahraga Atletik di Nomor 400 m Putra yang diraih oleh Atlit MIRAWAN;
- 4 (empat) Medali Perak, antara lain:
  - 1 Medali perak dari Nomor Estafet 4 x 400m Putra diraih oleh atlit : MIRAWAN, AGUS, GABRIEL LOIS BAPTISTA dan RANGGA BIMA PRATAMA;
  - 1 Medali perak dari Nomor Estafet 4 x 400m Putri diraih oleh atlit : JUMRATUN, FALA DHITA, DINI AULIA dan ISWATUN;
  - Medali perak dari cabang olahraga Tae Kwon Do Nomor /Kls Kyu Rugi (tarung) diraih oleh atlit : YOSEVIN CHANDRA LUMBAN T;
  - Medali perak dari cabang olahraga Voli Pasir putra diraih oleh atlit : M. RIZKI RAMDAN dan RAZA ADAM MARTAZIA;
- 5 (lima) Medali Perunggu diraih oleh atlit cabang olahraga :
  - 1 medali perunggu dari cabang olahraga : Tae Kwon Do DI Nomor Kyu Rugi (tarung) diraih oleh atlit : AULIA RAHMAN;
  - 1 medali perunggu dari cabang olahraga Atletik di Nomor 2000m Stripelcise diraih oleh atlit : SRI AGUSTINI;
  - 1 medali perunggu dari cabang olahraga Renang di Nomor 200 m gaya dada diraih oleh atlit : RICKY ALEXANDER;
  - 1 medali perunggu dari cabang olahraga Tarung Derajat di Nomor/Kls 61.1-65 kg diraih oleh atlit : NULANG PRASTIONO;
  - 1 medali perunggu dari cabang olahraga Pencak Silat di Nomor/kls C. 47-51 kg diraih oleh atlit : SALSABIELA DWI ANANDA.

Pada Tahun Anggaran 2019, Seksi Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB melaksanakan kegiatan Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat antara lain kegiatan :

- Pemassalan Olahraga dalam rangka Peringantan HUT Kemerdekaan RI KE 74 Tahun 2019.

  Pemassalan olahraga dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 74 Tahun 2019 adalah, melaksanakan berbagai kegiatan, seperti : senam massal, tarik tambang, terompah panjang, lari karung dan panjat pinang yang diikuti oleh SD, SMP, SMA/ sederajat se-Kota Mataram, ASN Lingkup Provinsi NTB, dan masyarakat umum.

  Waktu dan tempat pelaksanaan dibagi dalam beberapa lokasi sbb:

  1. Aparatur Sipil Negara dilaksanakan di Gelanggang Pemuda Mataram tanggal 12 Agustus 2019.
  2. Pelajar dilaksanakan di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB tanggal 2 Agustus 2019.
  3. Masyarakat Umum di lapangan barat *Islamic Centre* tanggal 18 Agustus 2019.

- Pemassalan Olahraga dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional Ke 36 Tingkat Provinsi NTB Tahun 2019.

  Pemassalan olahraga dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional Ke-36 Tingkat Provinsi NTB, melaksanakan berbagai kegiatan, seperti : senam massal, Jumpa Bang Zul-Rohmi, dan kejuaraan atletik tingkat SD dan SMP/Sederajat yang dipusatkan di Lapangan Atletik Lawata Gomong Mataram pada tanggal 6 September 2019.

- Pemassalan Olahraga dalam rangka memperingati HUT NTB Ke 61 Tahun 2019

  Pemassalan olahraga dalam rangka memperingati HUT NTB ke 61 Tahun 2019 adalah, melaksanakan berbagai kegiatan olahraga tradisional, seperti :, tarik tambang, terompah panjang, lari karung dan panjat pinang yang diikuti oleh SD, SMP, SMA/ sederajat se-Kota Mataram, ASN Lingkup Provinsi NTB, TNI POLRI, dan masyarakat umum yang dipusatkan di Bumi Gora Kantor Gubernur pada tanggal 13 Desember 2019.

- Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) IX Tahun 2019.

  Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (PEPARPENAS) IX Tahun 2019 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 7 s/d 13 November 2019 merupakan event kompetisi olahraga bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Nasional yang diselenggarakan setiap 2 (tahun) sekali, yaitu pada tahun ganjil. Kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas di seluruh Indonesia untuk berprestasi di bidang olahraga.

Provinsi peserta PEPARPENAS IX Tahun 2019 sebanyak 34 Provinsi dengan 6 Cabang Olahraga yang dipertandingkan, yaitu :Atletik, Bulu Tangkis, Boccia, Tenis Meja, Renang, dan Catur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengikuti ke-6 Cabang Olahraga tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 183 Peserta PEPARPENAS IX Tahun 2019

No	Cabang Olah Raga	Jumlah Atlet	Ket
1	Atletik	7 Atlet	2 Pelatih
2	Bulu Tangkis	3 Atlet	1 Pelatih
3	Boccia	2 Atlet	1 Pendamping
4	Tenis Meja	1 Atlet	1 Pendamping
5	Renang	2 Atlet	1 Pelatih
6	Catur	2 Atlet	1 Pendamping
	Jumlah	17 Atlet	4 Pelatih dan 2 pendamping
Catatan: Dari 7 orang Atlet Atletik, 1 orang didiskualifikasi oleh panitia karena tidak memenuhi syarat jenis ketunaan, a.n Meri Anggriani. Dari Kab.Bima.			

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

Dalam PEPARPENAS IX Tahun 2019 Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat prestasi sebagai berikut:

Tabel 2. 184 Prestasi NTB pada PEPARPENAS IX Tahun 2019

MEDALI	NAMA ATLET	JENIS LOMBA	KET
Perunggu	1. Lucky Firmansyah	Boccia	T.B
	2. Syahredi Izwan	Boccia	T.B
	3. Lucky & Syahredi	Boccia	D.B
	4. Muhammad Suardin	Bulu Tangkis	S.P.T.R
	5. Muhammad Irwan Oktavia	Bulu Tangkis	S.P.T.G
		Bulu Tangkis	S.Put.T.R
	6. Lailatul Hasanah	Bulutangkis	G.C.T.R
	7. Lailatul & Muh. Suardin		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

Dalam penyelenggaraan urusan bidang kepemudaan dan olahraga sepanjang tahun 2019 masih banyak ditemui permasalahan. Namun demikian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB telah

melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 185 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kompetisi olahraga tingkat pelajar belum terjadwal secara maksimal untuk seluruh cabang dan Frekwensi pelaksanaannya masih kurang.	Menjadwalkan kompetisi secara rutin dan meningkatkan frekuensi pelaksanaannya
Sarana prasarana olah raga di Kabupaten/Kota termasuk di sekolah terbatas, sehingga pengembangan bakat olah raga pada anak kesulitan untuk dikembangkan	i. Peningkatan sarana prasarana olahraga ii. Memperbanyak pelaksanaan pemassalan olahraga
Kurangnya ketersediaan lapangan kerja	Meningkatkan minat wirausaha melalui pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
Keterbatasan jumlah Pelatih olahraga berkualitas (memiliki lisensi kepelatihan) di tingkat Kabupaten/Kota.	Mengadakan pelatihan pelatih untuk meningkatkan grade pelatih agar semakin berkualitas

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2019

14. Statistik

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik yang diselenggarakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan melalui 1 (satu) program prioritas dan 5 (lima) kegiatan utama, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 186 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral		Cakupan Ketersediaan jenis data	70%	95.49%
			Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial	-Buku Statistik Sektoral Bidang Sosial -Buku Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial -Buku Data Ketenagakerjaan	1 buku 1 buku 1 buku	1 buku 1 buku 1 buku
			Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi	-Buku Statistik Sektora Bidang Ekonomi -Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah -Buku Data Ekonomi Kreatif	1 buku 1 buku 1 buku	1 buku 1 buku 1 buku
			Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	-Buku Statistik Sektoral Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur -Data Statistik Sebaran Lokasi Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi NTB	1 buku 1 buku	1 buku 1 buku
			Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	-Jumlah data yang dapat diakses -Jumlah Masyarakat yang terlayani	700 data 1000 orang	972 data 6022 orang

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA		
				URAIAN	TARGET	REALISASI
			Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	-NTB satu data -Forum Data	1 dokumen	1 dokumen

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) mendasari pelaksanaan program unggulan NTB Satu Data. NTB Satu Data adalah Program yang bertujuan menghimpun, mengolah dan memvalidasi jenis data sektoral dan melakukan publikasi melalui portal NTB Satu Data dengan alamat: http://data.ntbprov.go.id.

Ketersediaan data pembangunan yang valid, lengkap, akurat serta terintegrasi, menjadi salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif. Dengan terwujudnya NTB Satu Data diharapkan data sektoral yang ada di tiap OPD mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh alat ukur untuk mengukur keberhasilan program kemiskinan adalah data penduduk miskin yang akurat. Jika kita ingin mempercepat pengentasan kemiskinan maka yang harus dipastikan secara berkelanjutan adalah validasi mengenai data kemiskinan.

Guna percepatan pelaksanaan NTB Satu Data, Pada Tahun 2019, Dinas Kominfotik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Kerjasama dengan Bappeda Provinsi NTB dan BPS NTB.
2. Melaksanakan Kegiatan Forum Data dengan 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan singkronisasi data-data sektoral;
3. Membangun Portal NTB Satu Data pada bulan Maret 2019 dengan 762 jenis data
4. Terlibat secara rutin pada acara *Press Release* terkait data-data sosial, ekonomi, serta SDA dan Infrastruktur yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi NTB setiap bulannya;
5. Penyusunan enam buku yang terbagi dalam:
   a. Buku Statistik Sektoral Bidang Sosial
   b. Buku Statistik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
   c. Buku Data Ketenagakerjaan
   d. Buku Statistik Sektoral Bidang Ekonomi
   e. Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

f. Buku Data Ekonomi Kreatif
g. Buku Statistik Sektoral Bidang SDA dan Infastruktur
h. Data Statistik Sebaran Lokasi RTLH di NTB

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang statistik tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 187 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Statistik Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kualitas data statistic masih rendah (Meta data tidak jelas, standar data tidak sama, coding tidak sama, dsb)	Membangun arsitektur data
Data statistic sectoral masih lingkup OPD provinsi, belum terintegrasi dengan Kab/Kota	Melakukan sinkronisasi dan integrasi data dengan pemerintah kab/kota yang menangani urusan statistik melaui portal NTB Satu Data
Minimnya SDM Statisi	Mengusulkan formasi ASN Statisi pada Dinas Kominfotik melalui BKD Provinsi NTB

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019

15. Persandian

Program kegiatan Persandian yang dilaksakan oleh Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas KOMINFOTIK Provinsi NTB Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, yang teknisnya diatur melalui Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi dan data center provinsi NTB, Dinas KOMINFOTIK melakukan MoU dengan Badan Siber Sandi Negara tentang tanda tangan digital guna mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meski pengimplementasian tanda tangan elektronik terkait outentifikasi dokumen, baru terlaksana pada outentifikasi dokumen produk hukum pada biro hukum sekretariat daerah pemprov. NTB melalui aplikasi JDIH sedangkan untuk target 3 (tiga) OPD lain belum terlaksana disebabkan karena belum tersedia apkikasi mandiri/alternatif e-office untuk tanda tangan elektronik sehingga untuk outentifikasi dokumen di 3 (tiga) OPD target belum terlaksana. Pemasangan "*honey pot*" pada data center milik Pemerintah Provinsi NTB juga dilakukan, guna mencegah serangan siber pada data center Provinsi NTB dan mulai membangun komunikasi jaringan intra pemerintah lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Indeks Kematangan Keamanan Informasi menjadi satu hal yang ingin terus dibenahi oleh Dinas Kominfotik, dimana pada tahun 2019 hasil penilaian dari Badan Siber Sandi Negara menempatkan Provinsi NTB berada pada Level II dari 5 level, dalam melaksanakan urusan persandian. Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian dengan sasaran meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan indikator kinerjanya Cakupan Produk Hukum OPD yang diotentifikasi merupakan kegiatan untuk mendorong dan membantu OPD lingkup pemeritah NTB agar dapat membentuk dan menggunakan sebuah sistem otentifikasi dokumen di OPD masing-masing.

Mengantisipasi terus meningkatnya serangan terhadap sistem informasi yang digunakan Pemerintah daerah, maka Dinas Kominfotik Provinsi NTB, mulai tahun 2019 telah mempersiapkan pembentukan Tim Keamanan Siber Daerah atau sebuah Tim yang diberi nama NTB-Computer Security Incident Response Team (NTB-CSIRT). Pemerintah Provinsi NTB memiliki 40 tenaga fungsional pranata komputer yang tersebar di sejumlah OPD, akan terus diberdayakan untuk mem-back up keamanan jaringan data. Keamanan informasi penyelenggaraan e-government di tingkat pusat maupun daerah menjadi sasaran utama serangan siber. Pola manajemen modern mengharuskan kita menerapkan konsep tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik dengan cepat, tepat dan efisien namun juga memiliki keamanan data yang baik.

Berdasarkan hasil assesment dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada awal bulan Mei 2019, NTB dinilai telah siap untuk membentuk CSIRT. NTB dinilai telah memiliki pedoman tata kelola, komitmen dan potensi SDM yang cukup tersedia. Karenanya, BSSN memberikan prioritas

kepada NTB bersama 17 Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia untuk diberikan asistensi dalam rangka mengembangkan NTB-CSIRT.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan persandian di provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 188 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Persandian Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Keterbatasan SDM Bidang Persandian	Mengirim ASN yang berkompeten untuk mengikuti Diklat Persandian di Badan Siber Sandi Negara (BSSN)
Belum optimalnya keamanan informasi dan tata kelola persandian di lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Mengoptimalkan Peran NTB-CSIRT dalam mendukung keamanan informasi dan tata kelola persandian di Provinsi NTB
Terbatasnya sarana dan prasarana persandian dalam mendukung pelaksanaan tusi pengamanan informasi.	Pengadaan dan peningkatan peralatan sarpras persandian

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2019

16. Kebudayaan

Untuk tahun 2019 Capaian kinerja pembangunan daerah urusan bidang kebudayaan diukur dengan indikator Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi, yang menjadi indikator utama dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-20123 untuk bidang kebudayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 189 Cagar Budaya yang direvitalisasi Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD 2018	2018	2019	
			TARGET	REALISASI
Cakupan cagar budaya yang direvitalisasi	-	17,39%	20%	26%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dieksekusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum

NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan tercapainya target jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi di tahun 2019 yaitu 26% dari target 20% atau dapat dikatan target capaian ditahun 2019 adalah sebesar 130% . Sejatinya dengan telah direvitalisasiny cagar budaya di beberapa lokasi dalam hal ini berbentuk pemagaran situs diharapkan kelestarian cagar buday ayang kita miliki dapat berlangsung dan dapat dinikmati oleh anak cucu kita dimas mendatang. Berikut adalah nama dan lokasi situs yang telah direvitalisasi sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 190 Cagar Budaya (Situs) yang telah direvitalisasi (dipagar) di Kabupaten / Kota se NTB tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Nama Cagar Budaya (SItus)	Kegiatan Revitalisasi
1.	Mataram		
2.	Lombok Tengah	Makam Bile Tawah	Pemagaran
3.	Lombok Timur	Bale Toaq - Sembalun	Pemagaran
4.	Lombok Barat	-	-
5.	Lombok Utara	Makam REMIGE	Pemagaran
6.	Sumbawa	-	-
7.	Sumbawa Barat	-	-
8.	Dompu	-	-
9.	Bima	-	-
10.	Kota Bima	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja Revitalisasi Cagar Budaya adalah:

- Melakukan inventarisasi Cagar Budaya (situs) untuk mengetahui kondisi fisik dilapangan;
- Setelah melakukan inventarisasi Cagar Budaya maka selanjutnya dilakukan pengolahan data;
- Kemudian setelah pengolahan data selesai, maka akan diterbitkan kepada Lembaga Pendidikan.

- **UPTD Taman Budaya**

Pada tahun 2019, UPT Taman Budaya Provinsi NTB menyelenggarakan beberapa event bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Nilai-nilai seni budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pergelaran dan pameran tetap, apresiasi film nasional, gelar seni pelajar,

pergelaran musik kreatif dan beberapa event-event lain yang telah diselenggarakan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 191 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2019

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT ACARA	TANGGAL/BULAN PELAKSANAAN	JUMLAH PENGUNJUNG
1.	Festival Musik Tradisi Anak	Gedung Tertutup	26 - 28 Februari 2019	300 Orang
2.	Pergelaran Pantomim	Gedung Tertutup	23 Maret 2019	200 Orang
3.	Pergelaran Musik Modern	Gedung Tertutup	23 Maret 2019	200 Orang
4.	Festival Tari Tradisi Remaja	Gedung Tertutup	4-6 April 2019	500 Orang
5.	Pentas Teater Pelajar	Gedung Tertutup	27 April 2019	300 Orang
6.	Konser YOIAKUSTIK	Gedung Tertutup	30 April 2019	200 Orang
7.	Gebyar Seni Pelajar	Gedung Tertutup	15-16 Juni 2019	300 Orang
8.	Teater Modern "Bencana Kepala"	Gedung Tertutup	24 Juni 2019	175 Orang
9.	Pentas Toples Ikan Yoiakustik	Gedung Tertutup	29 Juni 2019	200 Orang
10.	Pentas Musik Tradisi Pentadiatonik	Gedung Tertutup	20 Juli 2019	150 Orang
11.	Pemutaran Film	Lombok Timur	25-27 Juli 2019	500 Orang
12.	Lomba Poster	Lombok Timur	26-28 Juli 2019	300 Orang
13.	Pentas Evaluasi Olah Seni (I)	Gedung Tertutup	29 Juli 2019	250 Orang
14.	Musik Experience	Gedung Tertutup	03 Agustus 2019	250 Orang
15.	Pentas Kebangsaan	Panggung terbuka	20 Agustus 2019	500 Orang
16.	Gelar Seni Tradisi Lintas Etnis	Arena Terbuka	23- 24 Agustus 2019	700 Orang
17.	Pentas Seni Sastra" Reading Night"	Gedung Tertutup	07 September 2019	200 Orang

NO	NAMA KEGIATAN	TEMPAT ACARA	TANGGAL/BULAN PELAKSANAAN	JUMLAH PENGUNJUNG
18.	Pameran	Ruang Pameran	14- 25 September 2019	1550 Orang
19.	Wayang Kulit Sasak	Halaman	21 September 2019	150 Orang
20.	Pentas Koreografer Muda	Gedung Tertutup	16 November 2019	175 Orang
21.	Pentas Evaluasi Olah Seni (II)	Gedung Tertutup	23 November 2019	250 Orang
22.	Pentas Musik NTB Gemilang	Panggung terbuka	20 Desember 2019	350 Orang

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

- **UPTD Museum Negeri Provinsi NTB**

Minat masyarakat dan wisatawan untuk mengenal kesenian dan kebudayaan NTB tahun 2016 samapai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan. Meskipun jumlah pengunjung pada tahun 2018 menurun namun hal ini tidak berlangsung lama karena jumlah pengunjung Museum Negeri NTB tahun 2019 meningkat sebesar 109,34% atau sebanyak 90.533 orang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 192 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2016-2019

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	TK	3.927	11.438	15.196	19.398
2	SD	18.263	22.772	19.885	19.983
3	SLTP	7.767	16.398	11.675	11.022
4	SLTA	4.891	10.041	8.449	5.360
5	Mahasiswa	1.170	3.666	1.107	1.071
6	Peneliti	21	6	12	2
7	WTA (Wisatawan Asing)	2.669	1.667	1.323	1.562
8	RTD (Rombongan Tamu Daerah)	163	92	25	0
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	2.259	15	4	0
10	Pengunjung Umum	46.158	21.960	25.120	32.135

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
JUMLAH		87.288	88.055	82.796	90.533

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Dalam rangka meningkatkan minat dan kunjungan ke Museum Negeri Provinsi NTB, kegiatan yang dilakukan tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 193 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2019

No	Kegiatan	Tempat	Waktu
1.	Diskusi Pengelolaan Museum / 9 kali	Museum Negeri NTB	Mei – November 2019
2.	Pameran Keliling Pesona Khasanah Ramadhan	Islamic Center Mataram	12 – 23 Mei 2019
3.	Lomba Mewarnai TK, SD	Islamic Center Mataram	23 Mei 2019
4.	Shaum di Museum	Museum Negeri NTB	23 Mei 2019
5.	Lomba Cerdas Cermat Museum / 3 kegiatan	Kabupaten Dompu, Museum Negeri NTB	18 Juni 2019, 25 Juni 2019, 20 Agustus 2019
6.	Pameran Keliling	Kabupaten Dompu	18 – 20 Juni 2019
7.	Belajar Bersama di Museum	Museum Negeri NTB	27 Juni 2019, 30 September, 27 November 2019
8.	Lomba Peragaan Busana Tenun Ikat	Museum Negeri NTB	29 Juni 2019
9.	Festival Pepaosan	Museum Negeri NTB	30 Juni 2019
10.	Lomba Melukis SMP	Museum Negeri NTB	21 September 2019
11.	Lomba Karya Tulis Remaja	Museum Negeri NTB	28 September
12	Dialog Budaya	Museum Negeri NTB	4 Oktober 2019
13.	Lomba Fotografi Museum	Museum Negeri NTB	8 Oktober 2019
14.	Lomba Lagu-Lagu Daerah	Museum Negeri NTB	26 Oktober 2019
15.	Festival membaca hikayat	Museum Negeri NTB	25 November 2019
16.	Pameran Temporer	Museum Negeri NTB	27 Nov. – 4 Desember 2019
17.	Penyuluhan Museum	SMPN 1 Jonggat	28 November 2019
18.	Lomba Memandu Museum	Museum Negeri NTB	2 Desember 2019
19.	Kemah Budaya	Museum Negeri NTB	4 Desember 2019

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kebudayaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 194 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Apresiasi serta pemahaman masyarakat terhadap hasil karya seni dan budaya yang menjadi ciri khas daerah masih rendah.	Memaksimalkan pemanfaatan hasil karya seni dan budaya menjadi bernilai ekonomis.
Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pelestarian Benda Cagar Budaya	Melakukan inventarisasi, identifikasi serta perawatan preventif Benda Cagar Budaya langsung kepada masyarakat.
Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kab/kota dalam pelestarian kebudayaan daerah yang dimiliki	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama serta mensinergikan dengan kegiatan pelestarian budaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi
Terbatasnya alokasi dana untuk gegiatan revitalisasi cagar budaya	Dalam menentukan anggaran haruslah mengacu pada program prioritas dimana kegiatan revitalisasi cagar budaya dalah kegiatan prioritas bagi bidang kebudayaan yang harus disuport dengan dana yang sesui dengan kebutuhan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2019

17. Perpustakaan

Sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang perpustakaan dan arsip yang bertujuan mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan yang diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah sebagai penguatan terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing.Dukungan yang dilakukan adalah dengan

melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun.

Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah pengunjung ke perpustakaan disajikan pada grafik berikut.

Tabel 2. 195 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan

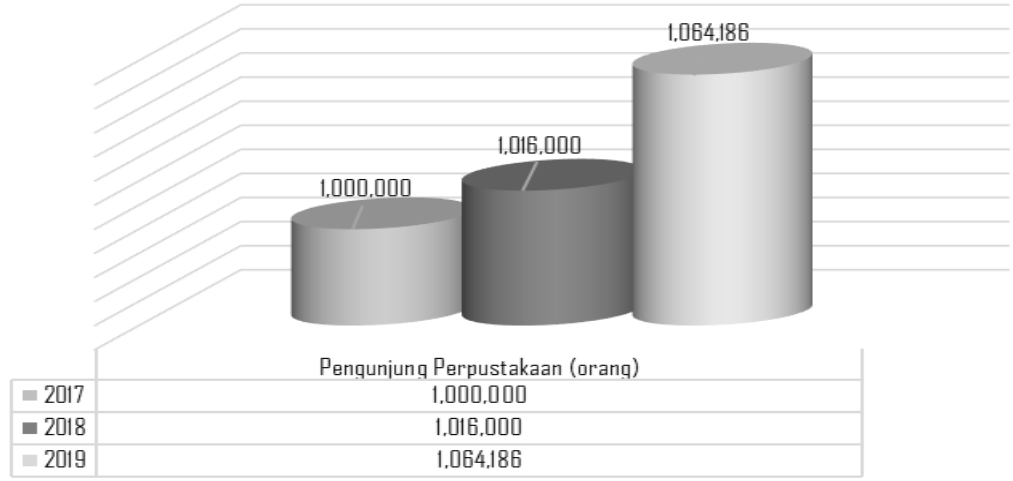

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 8.640 orang, meningkat sebanyak 10.807 orang atau 25,08% di tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2019 menurun sebesar 36,19%. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan perkembangan jumlah anggota perpustakaan selama tahun 2017 sampai dengan 2019.

Grafik 3.1 Jumlah Anggota Perpustakaan Tahun 2017-2019

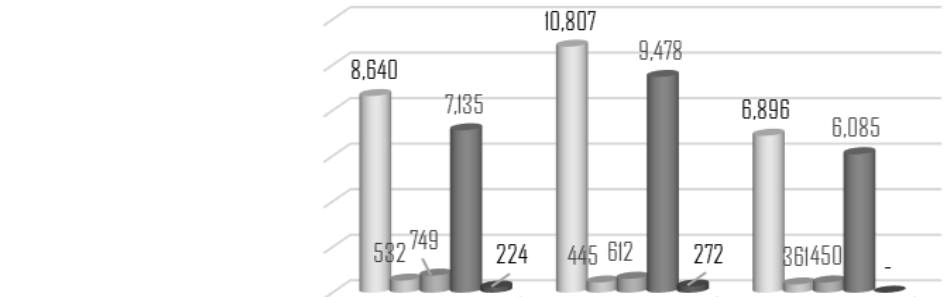

	2017	2018	2019
Anggota Perpustakaan (orang)	8,640	10,807	6,896
- Umum	532	445	361
- Pelajar	749	612	450
- Mahasiswa	7,135	9,478	6,085
- Unverified	224	272	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

Untuk menumbuhkembangkan minat baca, peran berbagai pihak sangat dibutuhkan salah satunya ialah upaya dari pihak pengelola perpustakaan untuk menarik minat masyarakat untuk lebih gemar membaca. Salah satunya ialah dengan menambah koleksi dan keanekaragaman jenis buku bacaan maupun buku ilmiah dengan berbagai sumber.Oleh sebab itu maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyediakan berbagai judul dan jumlah koleksi buku sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 196 Judul dan Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Provinsi NTB

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Judul Buku	98.983	100.250	100.546
2	Eksemplar	322.020	328.355	328.651

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan berbagai terobosan untuk mendukung peningkatan minat baca diantaranya:

- Meningkatkan pelayanan dalam proses pinjam buku dilakukan secara cepat, cukup dengan mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota perpustakaan diproses 5 menit dan saat itu juga anggota perpustakaan tersebut bisa langsung meminjam buku;

- Melakukan otomatisasi perpustakaan artinya judul buku yang diperlukan, peminjam tinggal mencari dan melihatnya di komputer yang tersedia di ruang pelayanan;
- Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung serta menyiapkan fasilitas wifi gratis;
- Menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat dan swasta salah satunya dengan PKK Provinsi NTB;
- Mengoptimalkan perpustakaan keliling dengan mengoperasikan 3 unit mobil keliling yang akan mendatangi para pembaca dengan lokasi yang berbeda-beda, seperti; di Taman Loang Baloq, Taman Udayana dan di Taman Sangkareang Mataram. Selain itu juga akan menjalin kemitraan dengan PT. Angkasa Pura I Lombok International Airport (LIA) agar mensupport sudut baca di areal bandara;
- Mendorong dan membina perpustakaan umum di desa dan kecamatan untuk aktif;
- Menghimbau kepada seluruh perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-NTB agar di setiap dinas/instansi memiliki perpustakaan dan pustakawannya.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 197 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perpustakaan Tahun 2018

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum optimalnya pelayanan perpustakaan yg menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang ada dengan seoptimal mungkin
Banyaknya koleksi khasanah budaya berupa karya-karya inspiratif dan kearifan lokal yang sudah hilang dan diperjual belikan	Melakukan pendataan dan pemeliharaan koleksi dalam bentuk fisik maupun digital
Belum terpenuhinya standar pelayanan prima perpustakaan dan informasi perpustakaan berbasis IT	Pengaplikasian teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan secara maksimal dan melakukan pengembangannya

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum optimalnya pengolahan koleksi/bahan pustaka	Melakukan pemeliharaan secara berkala
Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan di lembaga pemerintah maupun masyarakat	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pemustaka
Belum tertatanya perpustakaan di lembaga pemerintahan dan masyarakat	Sosialisasi dan himbauan kepada Perangkat Daerah untuk menyediakan saran kepustakaan di kantor masing-masing

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

18. Kearsipan

Arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa seiring dengan berjalannya setiap oarganisasi yang ada di suatu lingkungan pemerintah daerah, maka arsip yang tercipta semakin bertambah setiap saat. Apabila arsip tidak dikelola dengan baik, maka niscaya keberdaan arsip yang tidak teratur malah akan menjadi boomerang bagi pencipta arsip sendiri.Arsip sebagai sumber informasi yang otentik dan terpercaya apabila tidak disimpan menurut kaidah yang benar akan menyulitkan organiasai ketika memerlukan arsip sebagai rujukan. Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dan bukti hukum akan menjadi masalah ketika tidak dikelola dalam suatu manajemen yang baik.

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akusisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 198 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2017 - 2018

No	Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	25.400	14.400	26.000	26.100	-	-
2.	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	7.470	6.250	7.250	5.500	14.400	14.400
3.	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	870	22	1.000	12	-	-
4.	*Record centre* (Perangkat Daerah)	5	5	-	-	15	15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

Pusat Arsip atau *records center* merupakan tempat dan semua fasilitas yang didesain khusus untuk menyimpan arsip inaktif. Keberadaan pusat arsip harus melalui perencanaan, artinya pusat arsip tidak begitu saja terjadi karena suatu ruangan penuh dengan tumpukan arsip, lantas disebut pusat arsip. Pusat arsip diciptakan karena kebutuhan organisasi, sehingga ia perlu didesain secara khusus untuk memenuhi kriteria tertentu dan dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan arsip.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB memfasilitasi perangkat daerah untuk melaksanakan penataan arsip secara baku/*record centre* yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2016. Secara total Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penataan arsip secara baku/*record centre* sampai dengan tahun 2019 sebanyak 10 Perangkat Daerah sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 199 Daftar Nama OPD yang Telah Memiliki Record Center sampai dengan Tahun 2019

No	OPD	KETERANGAN
1.	Badan Pendapatan Daerah	
2.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	
3.	Inspektorat	
4.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

No	OPD	KETERANGAN
5.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	
6.	Dinas Perdagangan	
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
8.	Biro Umum Sekretariat Daerah	
9.	Biro Hukum Sekretariat Daerah	
10.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang kearsipan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 200 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kearsipan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum terbangunnya pengelolaan kearsipan berbasis TIK di lingkungan Pemda	Penerapan pengelolaan kearsipan berbasis IT
Belum dikelolanya arsip sesuai dengan manajemen kearsipan	Melakukan sosialisasi terkait pengelolaan kearsipan sesuai standar
Kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan kearsipan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2019

C. Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap bidang urusan pilihan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kelautan Dan Perikanan

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 5 UPTD dan 3 Cabang Dinas Kelautan melalui 5 program prioritas dan 25 kegiatan utama.

1) Produksi Perikanan

Produksi Perikanan di Provinsi NTB pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Total produksi perikanan pada tahun 2019 sebesar 1.368.849 ton meningkat 6,25% dibanding tahun 2018. Produksi pada tahun 2019 ini signifikan mencapai 99,43 % dari target sebesar 1.376.657 ton. Upaya yang dilakukan Pemerintan Provinsi NTB dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi perikanan melalui penyediaan dan perbaikan sarana prasarana berupa paket bantuan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan peningkatan produksi perikanan di Provinsi NTB.

Dari total produksi, kontribusi produksi budidaya perikanan jauh mendominasi sebesar dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap. Terdata ada sekitar 233.764*) orang nelayan dan pembudidaya ikan. Keberhasilan program peningkatan produksi perikanan tahun 2019 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut.

Gambar 2. 20 Perkembangan Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

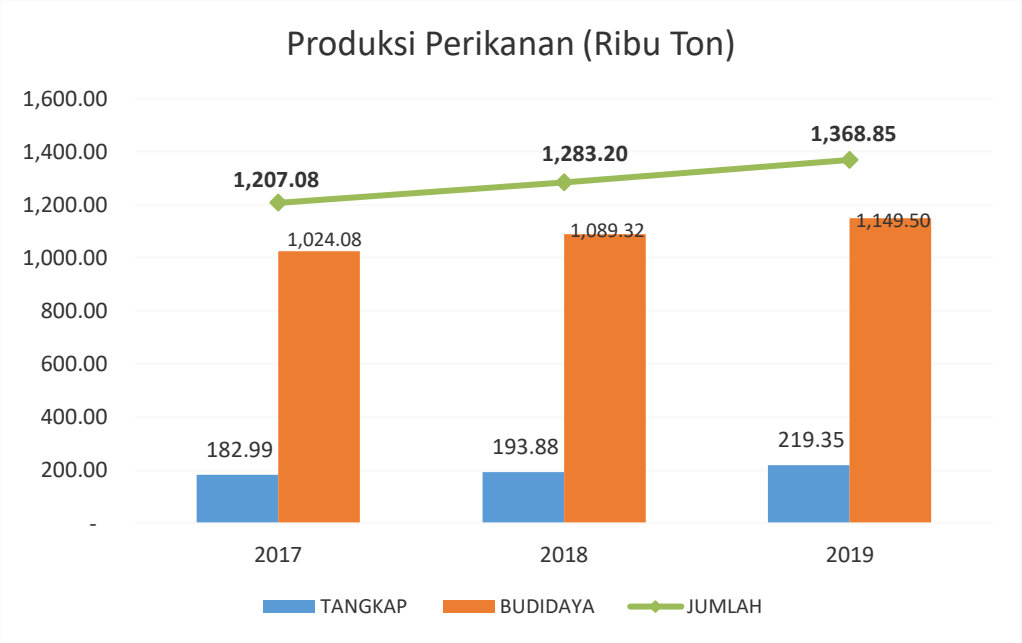

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019 *) data sementara*

- Produksi Perikanan Budidaya

Realisasi produksi perikanan budidaya sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 1.149.500*) Ton atau 100,07% melampaui target yang ditentukan. Angka ini meningkat 5,53% dari realisasi budidaya perikanan pada tahun 2018 sebesar 1.089.317,01 dan meningkat 12,25 % dibanding tahun 2017.

Gambar 2. 21 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2017–2019

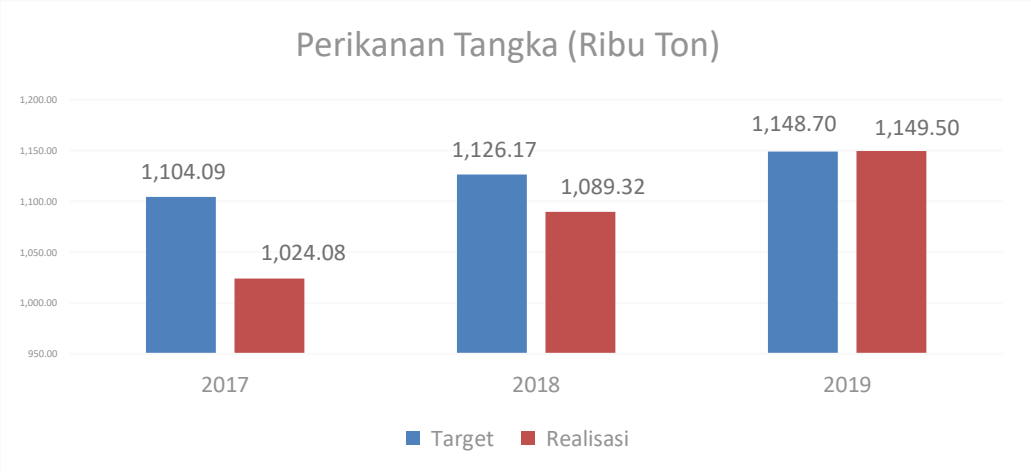

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019 *) Data Sementara*

Perkembangan total produksi perikanan budidaya cenderung fluktuatif, disebabkan oleh fluktuasi produksi rumput laut, dimana komoditas rumput laut mendominasi produksi perikanan budidaya sebesar 80% dari total produksi. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami anomali cuaca. Sedangkan untuk jenis komoditas penting lainnya seperti Udang, Nila, Lele dan Karper cenderung mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan besarnya animo masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan air tawar dan payau, dan juga tentunya pertumbuhan produksi ini mengacu pada permintaan pasar yang terus meningkat. Sebagai informasi bahwa komoditas udang hampir 80% terserap pasar luar daerah dan untuk komoditas air tawar hampir 100% terserap di pasar lokal.

Tabel 2. 201 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Per Komoditas Tahun 2016 – 2019

No	Komoditas	Produksi (Ton)			
		2016	2017	2018	2019
1.	Rumput Laut	1.026.580,42	822.749,19	875.894,51	920.879,15
2.	Udang Vaname	115.578,88	120.157,49	129.911,24	131.175,75
3.	Bandeng	16.813,86	18.623,02	15.283,47	26.732,16
4.	Nila	18.114,43	50.370,70	51.255,96	54.484,43
5.	Lele	2.602,48	4.520,08	6.469,76	6.143,43
6.	Karper	1.700,35	2.611,85	8.223,68	4.190,91
7.	Ikan Lainnya	1685,89	5.052,45	2.245,64	5.794,0
	Jumlah	**1.183.076,31**	**1.024.084,78**	**1.089.284,26**	**1.149.500**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

- Produksi Perikanan Tangkap

Perkembangan Produksi perikanan tangkap dari tahun 2017 s/d 2019 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,13 % pertahun. Pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap sebanyak 219.349 ton sedikit dibawah target sebesar 227.961 ton (96,22%). Hal ini disebabkan oleh menurunnya produksi jenis ikan pelagis kecil seperti Lemuru, Tembang dan Selar. Penurunan produksi jenis schooling fish ini disebabkan oleh penertiban beberapa jenis alat tangkap yang tidak selektif dan bersifat

progresif. Saat ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam penangkapan ikan dengan mempergunakan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, dengan target hasil tangkapan adalah jenis ikan ekonomis tinggi seperti ikan tuna, jenis ikan karang dan pelagis besar. Jika dilihat trend produksi penangkapan ikan dari tahun ketahun terhadap beberapa jenis ikan ini terus meningkat. Dengan dilakukan seleksi terhadap penangkapan ikan ini akan sangat menguntungkan nelayan, karena hasil tangkapan lebih tinggi nilai ekonomisnya disamping kualitas dan kuantitasnya.

Tabel 2. 202 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2017-2019

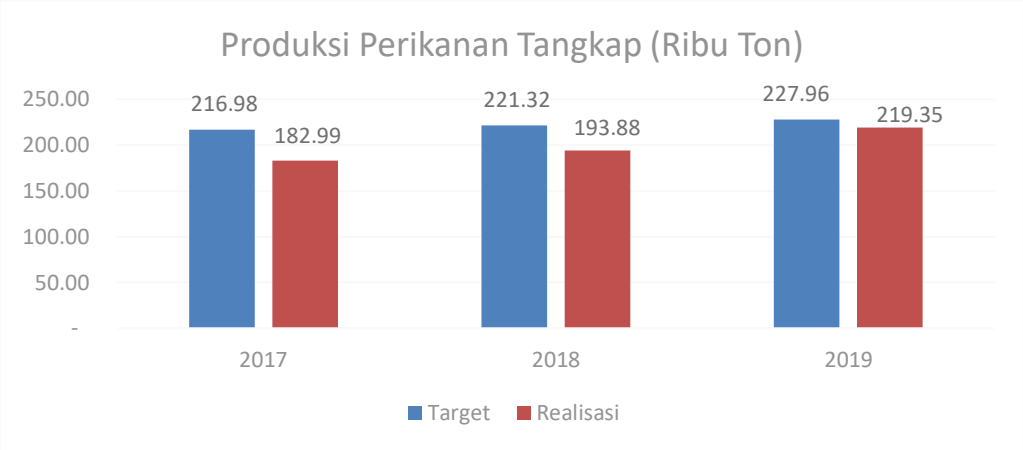

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka meningkatkan produksi perikanan tangkap tahun 2019 yaitu:

1) Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap seperti bantuan perahu, jaring, mesin ketinting, mesin tempel, dan peralatan penangkapan ikan lainnya;
2) Revitalisasi dan Pemulihan stok ikan melalui pembangunan rumah ikan di beberapa lokasi yang disinyalir menurun produktivitas perairannya;
3) Sosialisasi perizinan tangkap, dimana pada tahun 2019 izin yang telah terbit sebanyak 613 izin terdiri dari SIPI = 217 izin, SIKPI = 87 izin, SIUP = 105 izin dan SIPI Andon = 204 izin

Indikator RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 Pada Dinas Perikanan dan Kelautan yaitu Produksi Perikanan Provinsi NTB yang terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan

tangkap berkontribusi pada sektor perikanan terhadap PDRB dengan target sebesar target tahun 2019 sebesar 4,76 % adapun realisasinya sebesar 4,57%.

Tabel 2. 203 Indikator RPJMD pada Dinas Perikanan dan Kelautan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target	Realisasi
			2017	2018	2019	2020
	Kelautan dan Perikanan					
1.	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,77	4,76	4,76	4,57

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

4) Persentase kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan (%).

Indikator ini merupakan indikator baru pada periode RPJMD tahun 2019 – 2023. Indikator Persentase kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan ini dicapai melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang merupakan komitmen Gubernur NTB di bidang ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan masyarakat pesisir dan masyarakat lingkar hutan. Penetapan lokasi desa miskin sesuai dengan Keputusan Gubernur NTB Nomor : 400 – 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Program Kegiatan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019 dan Perencanaan Tahun 2020. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB menetapkan Lokasi pelaksanaan program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB Tahun 2019 di 2 (dua) desa sebagai pilot project program pemberdayaan masyarakat pesisir desa miskin/tertinggal yang menjadi wewenang pemerintah Provinsi untuk menanganinya yaitu Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Pulau Bungin Kecamatan Alas Kabupaten sumbawa. Kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan terdapat 13 kelompok dengan rincian sebagai berikut :

a. 1 Kelompok petambak garam atau pokmaswas;
b. 4 Kelompok pembudidaya;
c. 4 kelompok nelayan;
d. 4 kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Tabel 2. 204 Capaian Indikator Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%) tahun 2019

INDIKATOR KINERJA		2019		
		TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN
1.	Persentase Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan (%)	0,59	0,59	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan pada tabel di atas, angka ini diperoleh dari 13 kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan dari jumlah kelompok masyarakat pesisir sebanyak 2.193 kelompok. Pemberdayaan kepada kelompok masyarakat pesisir ini dilakukan dengan pemberian bantuan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor perikanan sebagai berikut:

- Perahu Ekowisata Bahari kepada kelompok petambak garam atau pokmaswas;
- sarana budidaya mutiara dan sarana budidaya ikan laut kepada kelompok pembudidaya;
- pembangunan rumah ikan dan sarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan;
- Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa sarana pengolahan hasil perikanan kepada kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan.

Selain pemberdayaan bidang perikanan, kegiatan pemberdayaan mayarakat pesisir diarahkan kepada pengembangan usaha garam rakyat. Dimana Provinsi NTB menjadi salah satu Provinsi dari 11 Provinsi yang ditetapkan sebagai lokasi sentra garam oleh Pemerintah. Produksi garam di Provinsi NTB dihasilkan sebagian besar dari tambak dan sedikit dari non tambak atau perebusan. Produksi garam ini merupakan kompilasi data produksi garam pada 6 (enam) Kabupaten/kota di Provinsi NTB kecuali Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Sampai dengan tahun 2019 luas lahan potensial untuk Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di NTB seluas 9.789,92 Ha, yang sudah dimanfaatkan seluas 2.403,91 Ha yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah kelompok usaha garam rakyat sampai dengan tahun 2018 sebanyak + 578 kelompok dengan jumlah anggota + 5.263 orang.

Tabel 2. 205 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Target (ton)	160.000,00	170.000	180.000
2.	Realisasi (ton)	91.093,29	296.930,17	155.721*)
3.	Pencapaian (%)	56,93	174,66	86,51

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, *) Data sementara, 2019*

Gambar 2. 22 Perkembangan Capaian Produksi Garam Tahun 2017-2019

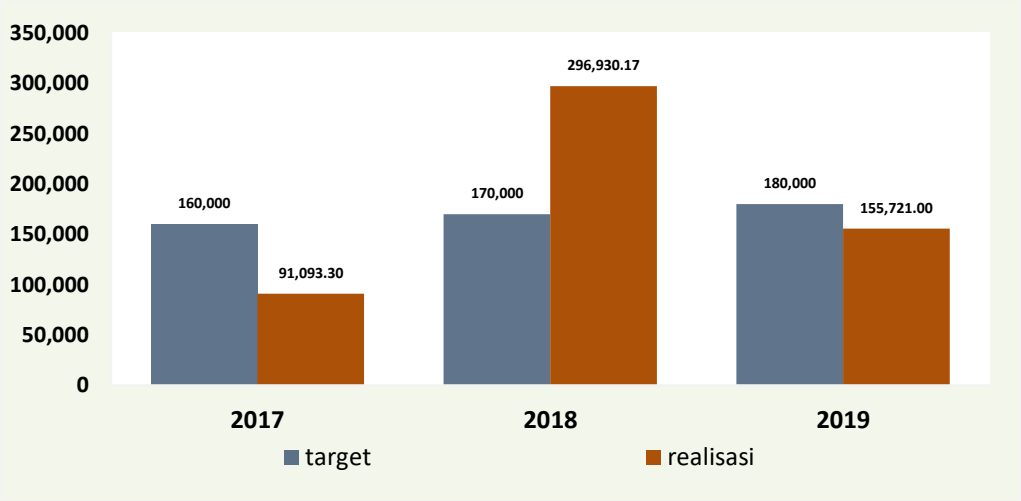

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

Produksi garam pada tahun 2018 mencapai 296.93,17 ton atau mencapai 174,66 % dari target sebesar 170.000 ton. Angka ini meningkat dibanding realisasi produksi tahun 2016 dan tahun 2017. Aktivitas budidaya garam pada tahun 2018 sangat stabil didukung oleh cuaca yang baik utk proses produksi garam, ditambah lagi dengan telah berproduksinya tambak garam dengan teknologi geoisolator di beberapa lokasi pada sentra garam menyebabkan lonjakan produksi yang cukup signifikan.

Pada Tahun 2019 produksi garam ditargetkan 180.000 ton, dengan capaian angka produksi sementara (data belum divalidasi) sebesar 155.572 ton atau tercapai sebesar 86,42% dari target. Hal ini disebabkan oleh aktivitas produksi garam efektif mulai pada bulan Juni – Juli, karena

bulan Januari – Mei aktivitas produksi garam terkendala cuaca/musim hujan yang panjang. Selain itu produksi garam yang cukup besar di tahun 2018 masih menyisakan stok/tidak terserap pasar seluruhnya, sehingga mengakibatkan aktivitas produksinya bulan Agustus – November menurun.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam pengembangan usaha garam ini tidak hanya berupaya untuk meningkatkan jumlah/kuotaproduksi garam saja, akan tetapi juga lebih kepada peningkatan kualitas hasil produksi garam yang mana produksi terbaik dengan kualitas K1 masih 10% dari total produksi tahun 2019. Kualitas yang masih belum standar yang menyebabkan lemahnya akses pemasarannya. Oleh karena itu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan produksi dan kualitas produksi garam adalah: perbaikan infrastruktur dan bantuan plastik geoisolator untuk meningkatkan sarana dan prasarana usaha petambak garam dan peningkatan kapasitas SDM Petambak Garam.

Gambar 2. 23 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam (ton) Provinsi NTB Tahun 2019

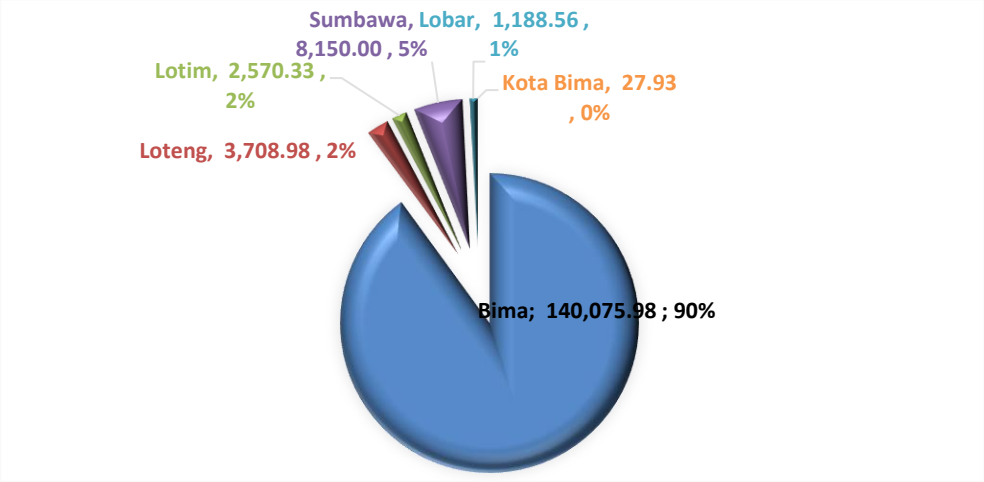

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

5) Rasio Kawasan Konservasi Perairan terhadap total luasan perairan teritorial

Indikator Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luasan perairan territorial dihitung berdasarkan Luas Perairan yang dikonservasi dibandingkan dengan luas perairan territorial. Indikator ini ditetapkan untuk menghitung kawasan perairan yang sebelumnya telah dicadangkan untuk kemudian ditetapkan sebagai kawasan

konservasi /dilindungi (zona inti, zona penyangga dan zona pemanfaatan) dan merupakan salah satu indikator dalam SDGs.

Tabel 2. 206 Capaian Indikator Rasio Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Total Luasan Perairan Territorial

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%
1.	Rasio Kawasan Konservasi Perairan terhadap total luasan perairan teritorial	0,086	0,094*)	109,3

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB *) catatan: Data Sementara*

Dalam pencapaian indikator outcome rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luasan perairan teritorial sebesar 0,094 atau 274.744,60 Ha, diperoleh melalui kegiatan Pelestarian dan Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dimana, kawasan perairan yang telah dicadangkan dalam dokumen RZWP3K sebagai kawasan konservasi perairan diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan Daerah melalui penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya harus dilengkapi dengan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ). Pada tahun 2019 lokasi perairan yang ditetapkan adalah Kawasan Pulau Panjang Kabupaten Sumbawa seluas 22.138,47 Ha, dimana sebelum penetapan Pulau Panjang sebagai kawasan konservasi perairan luas 252.606,13 Ha atau berada pada rasio 0,086 pada tahun 2018. Pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan didukung oleh 3 (tiga) Cabang Dinas Kelautan yang telah dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah yaitu Wilayah Pulau Lombok, Sumbawa – Sumbawa Barat, dan Bima – Dompu melalui kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah, selain itu juga aktif melakukan kegiatan Pengawasan di 3 (tiga) Wilayah tersebut.

Pada tahun 2019 Untuk akselerasi pencapaian target luasan kawasan konservasi perairan di Provinsi NTB, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB mendapatkan dukungan dan fasilitas dari NGO Wildlife Conservation Society (WCS) dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk melakukan kegiatan penyusunan zonasi dan penyusunan rencana pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Daerah yaitu KKP3K Pulau Panjang seluas 22,138.47 Ha.

Selain kegiatan konservasi capaian rasio kawasan konservasi perairan terhadap luas perairan teritorial didukung juga oleh kegiatan

Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dimana pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut harus mengacu kepada RZWP3K dan kajian melalui pertimbangan teknis/rekomendasi teknis kesesuaian ruang dan izin lokasi perairan. Pada tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 60 dokumen pertimbangan teknis/rekomendasi teknis izin usaha seperti budidaya laut, tambak udang, terminal khusus/dermaga untuk pariwisata bahari, dan pemasangan kabel dan pipa bawah laut.

Selain itu kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Pengawasan dan Penertiban Ilegal Fishing ikut mendukung dalam pencapaian indikator tersebut.

6) Angka Konsumsi Ikan (AKI) (kg/kap/tahun).

Indikator angka konsumsi ikan merupakan cara untuk mengetahui jumlah Kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat selama 1 tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Angka konsumsi ikan, dihitung berdasarkan konsumsi rumah tangga dan konsumsi diluar rumah tangga serta konsumsi yang tidak tercatat yang diperoleh dari data Susenas BPS, Survey bahan pokok, Data jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, Pangsa Pengeluaran pangan dan makanan jadi berbahan baku ikan, Jumlah Hotel, Jumlah tamu Hotel, dan volume impor produk Perikanan. Angka konsumsi ikan dihitung menggunakan dua metode yaitu metode berdasarkan ketersediaan ikan dan metode sampling.

Angka konsumsi ikan dapat dihitung setelah angka ketersediaan ikan yang terdiri dari angka produksi perikanan ditambah jumlah ikan yang masuk dikurangi jumlah ikan yang keluar dihitung menjadi Neraca Bahan Makanan (NBM). Sehingga penghitungan angka konsumsi ikan tahun 2019 akan dirilis pada tahun 2020. Angka konsumsi ikan yang dirilis terakhir adalah sebesar 38,20 Kg/Kap/Tahun angka ini meningkat sebesar 7,64% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 35,49 Kg/Kap/Tahun. Capaian AKI 38,20 Kg/Kap/Tahun masih rendah jika dibandingkan capaian angka konsumsi ikan nasional yang mencapai angka 50,69 Kg/Kap/Tahun.

Tabel 2. 207 Angka Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	
				Target	Realisasi
Angka Konsumsi Ikan	(Kg/Kapita / Tahun)	35,49	38,20	35,80	38,20*)

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2019 *) Angka sementara (BPS)*

Semakin tinggi tingkat konsumsi ikan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan dan gizi masyarakat. Kegiatan yang mendukung capaian angka konsumsi ikan adalah:

a. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

   Pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dengan cara mensosialisasikan dan mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang disingkat menjadi GEMARIKAN. Program Gemarikan dilakukan melalui kegiatan:

   1) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang disingkat menjadi PMTAS. Program PMTAS pada tahun 2019 dilakukan kepada 1.000 anak sekolah yang ada di NTB dengan kriteria penerima yang sudah ditentukan. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dimaksudkan untuk menunjang dan membantu pemenuhan pangan hewani sebagai sumber pangan yang baik untuk masyarakat, mencegah stunting, membantu dalam pengentasan angka kemiskinan dan kematian ibu dan anak pada proses melahirkan, serta mengenalkan produk perikanan yang berbahan baku ikan dalam bentuk produk olahan seperti bakso, scallop, stik ikan dan lain-lain.Tempat lokasi PMTAS sebagai berikut :
      - SDN Inpres Kending Sampi sebanyak 200 anak;
      - SDN 2 Sesait Desa Kayangan sebanyak 100 anak;
      - SDN 2 Desa Penimbung sebanyak 100 anak;
      - SDN 2 Dompu sebanyak 100 anak;
      - SDN 01,02, 04, 05, 09 10, 11 Taliwang, SD MI Taliwang dan SD Kalimati sebanyak 300 anak;
      - SDN 20 Mataram dan SDN 6 Mataram sebanyak 200 anak;
   2) Lomba masak ikan bekerjasama dengan PKK yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai

dengan nasional. Lomba masak serba ikan merupakan kegiatan yang strategis karana kegiatan ini secara langsung berpengaruh kepada peningkatan konsumsi ikan. Kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2019 bertempat di Pantai Balad Kecamatan Taliwang;

3) Pembentukan Forum Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (FORIKAN) mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.
4) Diseminasi olahan hasil kelautan dan perikanan merupakan salah satu upaya untuk menambah diversifikasi olahan, agar menambah volume olahan hasil kelautan dan perikanan dengan tujuan untuk:
   - Memperkenalkan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan yang diterapkan oleh Calon UPT kepada UKM di NTB
   - Menambah Ragam dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan di Prov.NTB khususnya di daerah Pesisir
   - Meningkatkan volume produksi olahan hasil perikanan di NTB
   - Upaya pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
   - Meningkatkan inovasi produk olahan kelautan dan perikanan bekerjasama dengan BP2HP (Satker KKP).

Diseminasi olahan hasil kelautan dan perikanan telah dilaksanakan di Daerah Pesisir yaitu Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa pada tanggal 26 April 2019 dan 29 Oktober 2019 sedangkan di Pesisir sekotong Barat kabupaten Lombok Barat pada tanggal 25 Juli 2019 dan 15 Oktober 2019. Jenis olahan hasil kelautan dan perikanan adalah pembuatan bakso ikan, abon ikan, kerupuk ikan tenggiri/amplang ikan tenggiri dan pilus keju rumput laut.

b. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan

Bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa

1) Rehab UPI Skala kecil sebanyak 10 UPI yaitu :
   - Kelompok maju bersama Tanjung – Lombok Utara;
   - Kelompok Pancor 1Tumpak Pujut – Lombok Tengah;
   - Kelompok Nina Bahari Rempek Gangga _ Lombok Utara;
   - Kelompok rembulan Labuhan Bua Desa Pukat – Sumbawa;
   - Kelompok Pemindang Bahari Medane- Tanjung Lombok Utara;
   - Kelompok Tunjung Biru Meninting- Batu Layar Lombok Barat;

- Kelompok Anggun 2 Gondang Gangga – Lombok Utara;
- Kelompok Karya Pesisir Labuhan Lalar- Taliwang Sumbawa Barat;
- Kelompok Dua Tengiri Sintung Ampenan – Mataram;
- Kelompok Minahorti Desa Lendang Nangke Masbagik-Lombok Timur;

2) Freezer kepada kelompok Labuhan Kuris Sumbawa
3) sarana pengolahan dan pemasaran ikan kepada kelompok di Mataram.

c. Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Koordinasi data logistik dan volume olahan bertujuan untuk mensinkronkan data ragam volume olahan hasil perikanan terdiri dari pelaku usaha dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-NTB. Strategi peningkatan tingkat konsumsi ikan dapat dilakukan melalui:

1) Meningkatkan Produksi olahan hasil perikanan

Pola konsumsi ikan masyarakat pada setiap strata usia, pendidikan, lokasi dan penghasilan berbeda. Kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan segar masih sangat tinggi dibandingkan dengan konsumsi hasil olahan. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya usia dan pengetahuan masyarakat tentang produk olahan perikanan terjadi pergeseran minat terhadap produk olahan berbahan baku ikan.

Pengenalan ragam produk olahan dengan cita rasa dan harga yang terjangkau menjadi daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi hasil olahan ikan. Pembinan dan fasilitasi terhadap UKM yang melakukan kegiatan pengolahan berbahan baku ikan diharapkan dapat meningkatkan produksi olahan ikan yang bermutu dan memiliki nilai tambah yang tinggi. Pada tahun 2019 produksi olahan Provinsi NTB sebesar 210.738 ton dengan jumlah UKM sebanyak 530 UKM dan pelaku usaha sebanyak 2.132 orang. Capaian selama kurun waktu tiga tahun terus mengalami peningkatan yang cukup berarti. Tahun 2019 produksi olahan hasil perikanan cukup stabil dibanding tahun 2018 meningkat 5,42% dibanding tahun 2017.

Tabel 2. 208 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2017 -2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Target (Ton)	201.600,00	199.896,9	211.893
2	Realisasi (Ton)	199.895,3	210.738,31	210.738*)
3	Pencapaian (%)	99,15	105,42	99,45

*Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2019 *) catatan: Data Sementara*

Gambar 2. 24 Komposisi Realisasi Produksi Ragam Olahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2019

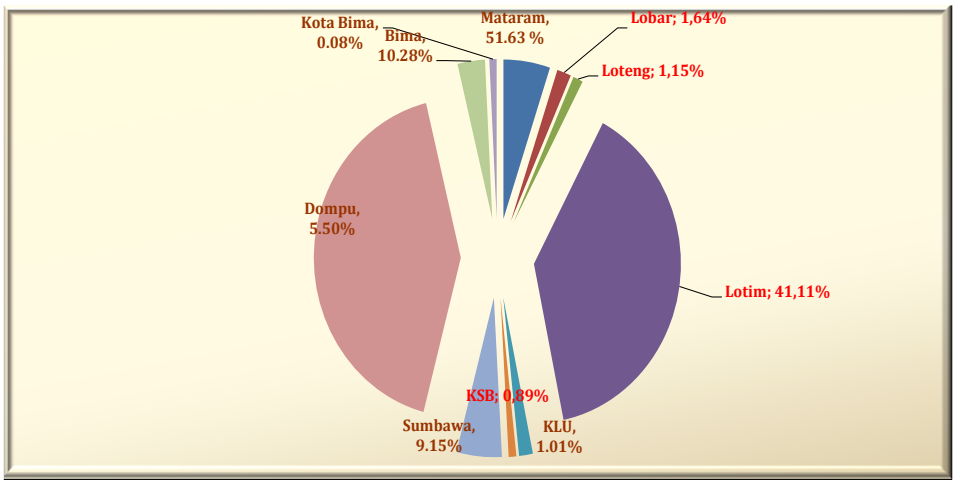

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

d. Ketersediaan stock dan akses terhadap produk perikanan

Ketersediaan stock ikan untuk konsumsi harus dipastikan dapat menjamin kebutuhan konsumsi masyarakat. Kelangkaan stock ikan dapat menyebabkan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Upaya yang telah dilaksanakan adalah dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di Pelabuhan Perikanan dan Cold storage yang ada di seluruh wilayah Provinsi NTB. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketersediaan stok ikan dan alur logistik dan pemasaran hasil produksi ikan di dalam dan di luar wilayah NTB.

a. Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BLPPMHPK) memiliki tupoksi menjamin keamanan pangan hasil perikanan untuk produk-produk konsumsi lokal maupun yang akan diekspor, serta membina pelaku usaha hasil perikanan dan memajukan pendidikan melalui magang mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan oleh Balai ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator Angka Konsumsi Ikan yang dilakukan melalui kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Fungsi Laboratorium Penguji dengan cara melakukan monitoring keamanan pangan ke lapangan seperti UPI, TPI/PPI, suplier serta pasar yang ada di Kabupaten/kota di NTB. Selain itu juga dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha serta pengambilan sampel produk perikanan dan kemudian dilakukan pengujian terhadap kandungan bahan kimia dan bakteri berbahaya lainnya terhadap kondisi kesehatan dari pada produk tersebut.

Parameter yang diuji pada tahun 2019 antara lain: parameter fisik (uji organoleptik), parameter kimia (uji kadar air dan formalin) dan parameter mikrobiologi (uji ALT, E.Coli dan Salmonella). Sampel yang diuji berjumlah 188 sampel atau mencapai 313 % dibanding target 2019 sebesar 60 sampel. Sampel yang diuji berasal dari hasil monitoring BLPPMHPK sebanyak 145 sampel dan 43 sampel berasal dari instansi lintas sektoral dan UKM. Sedangkan untuk Laporan Hasil Uji (LHU) sebanyak 51 dokumen tercapai 255% dari target sebanyak 20 dokumen.

Pada tahun 2019 BLPPMHPK melakukan bimbingan praktek kerja lapangan yang berkaitan dengan mutu hasil perikanan sebanyak 80 orang mahasiswa POLTEKES Mataram.

b. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong

Pelabuhan Perikanan Teluk Santong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang mengelola PPI Sape Bima, PPI Teluk Bima dan PPI Teluk Santong. Kegiatan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Teluk Santong ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator Produksi Perikanan yang dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran Teluk Santong, Sape & Teluk Bima dan Tata kelola dan pelayanan usaha Pelabuhan Perikanan Teluk Santong, Sape & Teluk Bima. Pada tahun 2019, jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 14.276 ton terdiri dari produksi ikan sebanyak 10.244 ton dan ubur-ubur sebesar 4.032 ton dengan nilai produksi

Rp.14.277.078.571,- meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 3.959,62 ton dengan nilai produksi Rp.11.383.601.871,-. Pelabuhan Perikanan Teluk Santong juga memberikan pelayanan berupa penyediaan air tawar 6.081 ton meningkat dari tahun 2018 sebesar 2.400 ton. Kunjungan kapal selama tahun 2019 sebanyak 6.318 unit meningkat 32,34% dibanding tahun 2018 sebanyak 4.774 unit.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi beberapa fasilitas dasar di Pelabuhan Perikanan Teluk Santong antara lain:

a. Rehab jalan kompleks PPI Sape;
b. Rehab Dermaga PPI Sape;
c. Turap (Rivertment) PPI Sape;
d. Turap (Rivertment) PPP Teluk Santong;
e. Pembangunan Drainase PPI Sape.

c. Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Kegiatan yang dilakukan oleh Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator Produksi Perikanan yang dilakukan melalui kegiatan Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran dan Tata kelola dan pelayanan usaha Pelabuhan Perikanan.

1. Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran

   Pada kegiatan pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran pada Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Jumlah ikan yang didaratkan dan jumlah Surat Perintah Berlayar. Tahun 2019 jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 6.084 ton meningkat 103,9 % dibanding tahun 2018 sebesar 2.982,53 ton. Sedangkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang terbit sebanyak 3.411 SPB atau mencapai 94,5 % dibanding target tahun 2019 sebesar 3,610 SPB. Unit pelayanan BBM solar 2.400 ton.

2. Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan

   Pada kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan Perikanan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah Kunjungan Kapal yang menggunakan fasilitas Pelabuhan. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan kapal sebanyak 3.761 kali atau mencapai 98,97 % dibanding target sebesar meningkat 47,8 % dibanding tahun 2018 sebanyak 2.544 kali. Pada tahun 2019, permintaan kebutuhan air yang dihasilkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok 7.457 ton naik sebesar 121 ton atau 1,65 %

dibanding tahun 2018 sebesar 7.336 ton. Peningkatan produksi pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok seiring dengan mulai stabilnya kunjungan kapal karena kondisi alam yang sudah mulai normal dibandingkan tahun 2018 yang banyak terjadi bencana alam terutama bencana gempa. Pada tahun 2019 yaitu pada akhir bulan Nopember 2019 mulai beroperasi pabrik es dengan produksi 52,5 Ton. Sedangkan permintaan kebutuhan air yang dihasilkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok sebesar 7.457 ton dengan nilai Rp. 37.285.000,- mengalami kenaikan 1,65 % dibanding tahun 2018. Selain kegiatan di atas, di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok melayani pelayanan bengkel antara lain perbaikan mesin, propeler, as propeler, pengelasan, bubut, pembuatan pondasi mesin dan lain-lain. Pada tahun 2019 melayani 115 buah pekerjaan meningkat 208 % dibanding tahun 2018 sebanyak 30 order pekerjaan. Peningkatan dari kegiatan diatas diakibatkan mulai stabilnya kunjungan kapal baik kapal penangkap maupun pengangkut yang mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok.

Perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar Labuhan Lombok meningkat cukup signifikan, hal ini karena fasilitas Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok makin lengkap yang memberikan pengaruh terhadap berkembangnya pengusaha ikan yang memiliki coldstorage di sekitar wilayah Labuhan Lombok. Jumlah cold storage yang ada sampai dengan saat ini terdapat 5 buah. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada tahun 2019 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi beberapa fasilitas dasar di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok antara lain:

a. Pengadaan mesin pabrik es Labuhan Lombok;
b. Rehab kantor administrasi labuhan Lombok;
c. Rehab bangunan tempat pelelangan ikan Labuhan Lombok;
d. Rehab bangunan pabrik es Labuhan Lombok;
e. Rehab tower air Labuhan Lombok;
f. Perbaikan palka latih;
g. Pembangunan jalan komplek/area parkir PPI Tanjung Luar;
h. Pembangunan talud (Breakwater) PP Labuhan Lombok;
i. Rehab Dermaga PPI Tanjung Luar.

d. Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengembangan Budidaya Perkanan Pantai Sekotong ini dalam rangka mendukung pencapaian

indikator Produksi Perikanan yang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan produksi benih ikan laut dan Peningkatan produksi benih ikan air payau.

1. Peningkatan Produksi Benih Ikan Laut

   Dalam rangka Peningkatan Produksi Benih Ikan Laut, pada BPBPP Sekotong melakukan kegiatan Pembenihan tiram mutiara dan penderan tiram mutiara. Pada tahun 2019, produksi benih ikan yang dihasilkan oleh BPBPP Sekotong adalah kolektor larva tiram mutiara sebanyak 587.400 ekor,

2. Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Payau

   Dalam rangka Peningkatan Produksi Benih Ikan Air Payau, BPBPP Sekotong melakukan budidaya ikan nila payau dan budidaya udang vanname. Dalam pemenuhan larva nila air payau sampai dengan akhir tahun 2019 menghasilkan larva nila sebesar 238.000 ekor.

   Kegiatan budidaya udang vanname melalui pembesaran udang vanname di tambak dan dikolam beton. Pemeliharaan udang vanname di Tambak Pijot – Tanjung Luar bertujuan sebagai tambak percontohan pembudidayaan udang bagi masyarakat. Produksi udang vannme size 100 sebesar 217.050 ekor.

   Disamping memproduksi benih ikan laut dan air payau, BPBPP Sekotong telah melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan teknologi budidaya mutiara, udang vaname dalam bentuk bimbingan tehnis langsung di lapangan serta menerapkan paket-paket percontohan (demplot) di masyarakat.

e. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok

Cabang Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTB Nomor 30 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 3 (tiga) cabang dinas kelautan yaitu:

1. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok;
2. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat;
3. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima-Dompu.

Kegiatan yang dilakukan pada 3 (tiga) cabang dinas ini dalam rangka mendukung pencapaian indikator Rasio Kawasan Konservasi Perairan terhadap total luas perairan teritorial melalui kegiatan Pengawasan dan penertiban Ilegal Fishing dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah.

1. Pengawasan dan Penertiban Ilegal Fishing

Pada Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok pada tahun 2019, Kegiatan pengawasan dan penertiban ilegal fishing telah dilaksanakan dengan lokasi 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten lombok Barat, Lombok tengah, Lombok Timur, Lombok Utara dan Kota Mataram dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 trip/kali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam sasaran kinerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok, lokasi kegiatan pengawasan berada di seluruh wilayah perairan/ pesisir diluar kawasan konservasi dan di dalam kawasan konservasi. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu bersama unsur terkait terdiri dari Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok, Polairud, Babinsa, WCS dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan laporan hasil pengawasan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Kegiatan pelatihan Smart Patrol dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi baik di dalam kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi. Pelatihan ini diikuti oleh Pokmaswas yang ada di wilayah Pulau Lombok. Melakukan identifikasi kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh kapal tongkang bersama Polairud, Pokmaswas dan masayarakat peduli lingkungan.

2. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Untuk tahun anggaran 2019 program pengelolaan kawasan konservasi telah melakukan kerjasama dengan salah satu lembaga Non Government (NGO) yaitu Wildlife Conservation Society (WCS) dalam hal pengelolaan dan sosialisasi kawasan konservasi perairan.

a) Sosialisasi dan inisiasi kemitraan pengelolaan kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Gita Nada Sekotong Kabupaten Lombok Barat, yang dihadiri oleh unsur - unsur Pemerintah, WCS, Pelaku usaha, Pokmaswas, dan stekholder lainnya.
b) Sosialisasi dan inisiasi kemitraan pengelolaan kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Sulat dan Gili Lawang Sambelia Kabupaten Lombok Timur, yang dihadiri oleh unsur -unsur Pemerintah, WCS, Pelaku usaha, Pokmaswas, dan stekholder lainnya.
c) Melaksanakan kegiatan kerjasama kemitraan bersama Yayasan Deep Blue Sea,Yayasan KKPL Sambelia, Pokmaswas Petrando dan Pokmaswas Pade Angen. Kerjasama kemitraan ini disepakati secara bersama - sama dan dituangkan dalam bentuk MOU dan ditanda tangani.(MOU terlampir)

d) Melaksanakan kegiatan kerjasama kemitraan bersama Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama kemitraan ini disepakati secara bersama - sama dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lindung (RTK 14) dan Kawasan Konservasi perairan Gili Sulat dan Gili Lawang serta perairan sekitarnya, dan MOU ini ditanda tangani secara bersama - sama.
e) Kegiatan sosialisasi dan rehabilatasi kawasan konservasi Gita Nada Sekotong melalui penanaman mangrove dan tranpalantasi karang bersama Litbang Universitas Mataram dan BUMN Angkasa Pura I.
f) Merencanakan program kerjasama pengelolaan kawasan konservasi TWP Gita Nada bersama Tim Sustainable Oceanic Research Conservation (SOURCE) Negara Prancis.
g) Dalam rangka meningkatakan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Pulau Lombok dan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) telah dilakukan kerjasama jejaring bersama Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan telah dituangkan dalam bentuk MOU serta ditanda tangani secara bersama – sama.
h) Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kawasan konservasi telah dilaksanakan kegiatan pelatihan teknis selam (Diving) di Gili Nanggu Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
i) Berperan serta dan mendukung peringatan Hari Bumi Nasional dengan kegiatan sosialisasi penanganan pengelolaan sampah, bersih - bersih pantai dan tranplantasi karang.

f. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa - Sumbawa Barat

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa – Sumbawa Barat dalam rangka mewujudkan pengelolaan Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan di Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan integritas penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dengan Dinas Kelutan dan perikanan Kabupaten, Danpolair, Danpos TNI AL serta dengan POKMASWAS kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat;
2. Meningkatkan Pengawasan melalui patroli laut di kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat;
3. Pengadaan prasarana kantor pengelola kawasan konservasi;
4. Pengadaan camera bawah air;
5. Pengadaan alat komunikasi lapangan;

6. Pengadaan alat selam;
7. Papan himbauan;
8. Tambat perahu di Pulau-Pulau Kecil.

Pada tahun 2019, Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban illegal fishing sebanyak 12 kali patroli.

g. Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima - Dompu

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di kawasan Bima-Dompu dilaksanakan bekerja sama dengan tim terpadu pengawasan yang terdiri dari unsur Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima-Dompu, POL AIR, TNI AL, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Nisa Pudu-Dompu, Kasabuaade-Dompu, Armada Utama-Kota, Polsus Perikanan Kabupaten Kota.

Beberapa hasil pelaksanaan pengawasan dilapangan seperti reklamasi tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi perairan yang mengalami abrasi, operasi pengawasan di laut, dan pemasangan papan informasi serta perizinan kapal merupakan kegiatan rutin dalam rangka upaya perlindungan dan pengawasan Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penegakkan aturan danpartisipasi kelompok masyarakat pengawas.

Adapun kegiatan pendataan Pengawasan Illegal Fishing berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima dengan Pokmaswas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima dengan Pokmaswas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Dompu dengan Pokmaswas.

Pada tahun 2019, Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok telah melaksanakan pengawasan dan penertiban illegal fishing sebanyak 12 kali patroli. Pada tahun 2019 program pengelolaan kawasan konservasi meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Alat Komunikasi/HT konservasi;
b. Pengadaan Alat Selam (3 Unit);
c. Pengadaan Tambatan Perahu.
   Lokasi pemasangan tambatan perahu berada di 2 (dua) lokasi yaitu Desa Jala - sejumlah 2 unit dan 1 unit Desa Marada-Kecamatan Hu'u.
d. Penanaman Mangrove
   Untuk itu Cabang dinas telah melaksanakan penanaman mangrove 1000 pohon di perairan Teluk Waworada bekerjasama dengan

Kelompok Nisabea dan di Perairan Kwangko-Dompu bekerjasama dengan DKP Dompu.

e. Evaluasi dan Pembinaan

Kegiatan Evaluasi dan Pembinaan Kawasan Konservasi bekerja sama dengan stake holder WCS (Wildlife Conservation Society) dilapangan dalam menentukan status kawasan konservas imaupun pertemuan-pertemuan pembahasan Rencana Kerja Jejaring Konservasi bekerjasama dengan BKKPN (Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional) sangat membantu dalam merencanakan program dan kegiatan di Tahun Anggaran berikutnya.

Mengikutsertakan stake holder disekitar wilayah Bima-Dompu dalam kegiatan pengelolaan konservasi merupakan wujud kebersamaan dalam peduli lingkungan. Untuk itu Cabang Dinas mengajak dan bekerjasama dalam kegiatan rehabilitasi mangrove, zero waste dan penyelaman bawah air di 3 (tiga) Kabupaten dengan SMA Al-Ikhwan, Pokmaswas Armada Utama, Kelompok Nisa Pudu, Pokwasmas Kasabua ade, Bio Community, Global Social Indonesia, Copa Mbojo, Satpol Airud Polres Bima dan Bima Diving Club.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTB pada tahun 2019 sebesar 1.820.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.937.005.120,- (106,41%) yang diperoleh dari jasa pemanfaatan fasilitas pelabuhan, penjualan komoditas perikanan (benih ikan), retribusi perizinan kelautan dan perikanan serta dari penerimaan lainnya sebagaimana berikut:

Tabel 2. 209 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Tahun 2019

No	Uraian	Target 2018	Realisasi	%
1.	**Pemakaian Kekayaan Daerah**	**325.250.000**	**231.923.500**	**112,77**
	PPI Tanjung Luar	40.250.000	41.655.000	103,49
	PPI Sape	30.000.000	28.702.000	95,67
	P3TS Sumbawa	40.000.000	57.927.050	140,82
	KPP Labuhan Lombok	200.000.000	182.909.500	91,45
	BPPI Tanjung Luar	5.000.000	2.500.000	50,00
	BLPMHP Mataram	10.000.000	10.000.000	100,00
	Lain-lain		43.156.700	
2.	**Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**805.000.000**	**561.156.700**	**92,75**
	BPBPP Sekotong	150.000.000	150.245.000	100,16

No	Uraian	Target 2018	Realisasi	%
	BPBIAT Aikmel	190.000.000	146.800.000	77,26
	BBI Batu Kumbung	150.000.000	151.511.700	101,01
	BBI Lingsar	80.000.000	80.000.000	100,00
	BBI Taliwang Sumbawa	15.000.000	12.500.000	83,33
	BBI Rade Bima	15.000.000	15.000.000	100,00
	BBI Matua	5.000.000	5.100.000	102,00
3.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**890.000.000**	**1.009.054.870**	**113,38**
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	890.000.000	1.009.054.870	113,38
3	**Penerimaan Lain-Lain**	**-**	**-**	
	Lain-lain penerimaan (NHP)	-	-	
	Denda Keterlambatan	-	-	
	Lain-Lain Penerimaan	-	-	
	Jumlah	**1.820.250.000**	**1.937.005.120**	**106,41**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

Meskipun terdapat berbagai keberhasilan dalam capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, namun terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya. Berbagai permasalahan dan solusinya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 210 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2. a. Banyaknya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang laut (tumpang tindih zona pemanfaatan) b. Tingginya pemanfaatan ruang laut yang memerlukan harmonisasi penggunaan fungsi ruang laut (Proses pengajuan izin).	1. Perlu kerjasama, koordinasi dan sinergi dengan Kab./Kota, Pusat, NGO dan stakeholder lainnya. 2. Perlu dilakukan reviu Perda tentang Perda RZWP3K

PERMASALAHAN	SOLUSI
c. Tingginya tingkat reklamasi ilegal dikawasan perikanan. b. Banyaknya regulasi yang baru yang membutuhkan penyesuaian. (Perda NTB 2017 sementara peraturan Tata Ruang Nasional PP 32/2019 ttg Ruang Laut.)	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2019

2. Pariwisata

NTB sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia seperti KEK Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, namun untuk mencapai tujuan tersebut harus didukung oleh SDM yang kreatif dan inovatif serta pelaku pariwisata yang profesional dan kreatif.

Target akhir capaian Indikator RPJMD 2019-2023 untuk kunjungan wisatawan ke NTB sebanyak 5.200.000 orang wisatawan baik wisatawan mancanegara dan nusantara. Beberapa tahun terakhir ini sektor pariwisata NTB mengalami penurunan yang pesat, ditandai terus menurunnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang mencapai angka 3.706.352 wisatawan di tahun 2019. Adapun angka kunjungan wisatawan pada tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2. 25 Proporsi kontribusi terhadap total produksi garam (ton) Provinsi NTB Tahun 2019

Tabel 2. 211 Indikator Kinerja Bidang Pariwisata

NO	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET	REALISASI
			2017	2018	2019	
3.02	**Pariwisata**					
1.	Persentase desa wisata yang dikembangkan	%	0	0	40	40
2.	Rata - rata Lama Menginap	hari	2,64	1,50	2,75	2,05
3.	Angka Kunjungan Wisatawan	orang	3,508,303	2,812,379	4,000,000	3,706,352
4.	Persentase Geosite yang Tertata	%	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 212 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2018-2019

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD 2018	2017	2018	2019	
				TARGET	REALISASI
Kunjungan wisatawan	2,812,379	3,508,903	2,812,379	4,000,000	3,706,352
Mancanegara	1,204,556	1,430,249	1,204,556	2,000,000	2,155,561
Nusantara	1,607,823	2,078,654	1,607,823	2,000,000	1,550,791

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019

Wisatawan yang berkunjung ke provinsi NTB melalui 6 pintu masuk utama yaitu; Zainudin Abdul Majid Internasional Airport (ZAMIA), Bandara M. Salahudin Bima, Pelabuhan Lembar (Pelindo), Pelabuhan Gili Mas, Pelabuhan Pemenang, dan Pelabuhan Sape. Perhitungan data wisatawan diperoleh 6 pindu masuk tersebut serta data Sekunder yaitu data yang dihimpun dari Imigrasi, BPS Provinsi NTB, Hotel, Pondok Wisata, Biro Perjalanan Serta data dari Stakeholder pariwisata lainnya. Jumlah Kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebanyak 3,706,352 orang wisatawan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Secara akumulasi angka ini dibawah target yang ditentukan sebanyak 4.000.000 orang wisatawan, dimana wisatawan mancanegara sebanyak 2,155,561 orang melebihi target sedangkan wisatawan nusantara sebanyak 1,550,791 orang dibawah target.

Tabel 2. 213 Tingkat Penghunian Kamar Dan Lama Menginap Di Provinsi NTB Tahun 2018-2019

Tahun	Hotel Bintang				Hotel Non Bintang			
	Unit	kamar	TPK (%)	Lama Menginap	Unit	kamar	TPK (%)	Lama Menginap
2018	83	4905	50,7	2,11	876	9045	53,2	2,64
2019	72	5173	47,79	2,05	983	10.664	31,12	1,60

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019

Pada tahun 2019 Perkembangan kunjungan wisatawan meningkat dibandingkan tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Peningkatan kunjungan seiring dengan proses rehab rekon pasca gempa. Provinsi NTB kembali menata diri sebagai daerah wisata

utama. Pemulihan pasca Gempa tahun 2018 – 2019 terus dilakukan dalam rangka mengembalikan pariwisata NTB yang sempat terpuruk.

Pada Tahun 2019 untuk kembali mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, Kementerian Pariwisata RI bersama Pemerintah Provinsi NTB dan stakeholder pariwisata serta media cetak/elektronik nasional dan internasional telah melakukan Sales Mission ke kantong-kantong pariwisata di dalam dan luar negeri. Selain itu upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB, Pada Tahun 2019 Dilaksanakan event pariwisata yang bertaraf nasional dan internasional, seperti Festival Tambora, Senggigi Jazz Festival, Festival Bau Nyale, Simposium Asia Pasific Geopark Network (APGN) 2019. Disamping dilakukan penataan destinasi wisata unggulan dan pembangunan desa wisata.

Beberapa event dan promosi yang dilaksanakan dan diikuti selama tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 214 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2019

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
A.	**Promosi Dalam Negeri**		
1	Lombok Sumbawa Great Sale	Lombok - Sumbawa	28 Januari - 28 Februari 2019
2	Festival Bau Nyale	Pantai Seger - Lombok Tengah	20 Februari - 6 Maret 2019
3	Tour De Lombok Mandalika	Mataram - Senaru - Kuta - Sembalun	7 - 10 Maret 2019
4	Festival Pesona Tambora	Dompu	9 - 11 April 2019
5	Festival Lawata	Kota Bima	10-Apr-19
6	Pesona Khazanah Ramadhan	Islamic Center NTB	8 - 25 Mei 2019
	- Branding khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Launching festival khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Opening ceremony khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Property pameran khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Property festival khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Berbagi bersama anak yatim khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
	- Atraksi khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Lomba khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
	- Nuzulul Qur'an khazanah ramadhan	Islamic Center NTB	Mei-19
7	Rinjani 100	Senaru - Sembalun	22 - 23 Juni 2019
8	Festival Pesona Mantar	Kabupaten Sumbawa Barat	14 - 20 Juli 2019
9	Festival Sangiang Api	Kabupaten Bima	28-Jul-19
10	Jamnas IMI	Mataram	15 - 18 Agustus 2019
11	Bulan Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	18 Agustus - 18 September 2019
	- Opening BPLS	Mataram	Agustus - September 2019
	- Sembalun holtikultura	Sembalun, Lombok Timur	Agustus - September 2019
	- Festival kota tua	Ampenan, Kota Mataram	Agustus - September 2019
12	Asia Pasific Geopark Network (APGN) Symposium	UGG Rinjani P. Lombok	Agustus - September 2019
13	Festival Pesona Moyo	Sumbawa	16 - 22 September 2019
14	Festival Pesona Senggigi	Senggigi, Lombk Barat	18 - 21 September 2019
15	Festival Pacuan Kuda	Kabupaten Sumbawa	22 - 26 September 2019
16	Mandalika International Marathon	Kuta, Lombok Tengah	05-Okt-19
17	Rinjani Golf Tournament	Pantai Sire, Lombok Timur	14 - 15 Desember 2019

S*umber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2019*

Event Internaional yang dilaksanakan pada tahun 2019 Yaitu Pelaksanaan Asia Pasific Geopark Network (APGN) Symposium. Kegiatan ini merupakan event bertaraf internasional dimana Unesco Global Geopark Rinjani Sebagai Host Acara tersebut. Acara Simposium APGN ini diikuti oleh 614 peserta berasal dari 30 negara, belum termasuk peninjau yang berasal dari dalam negeri dan tidak melakukan registrasi. Acara ini sekaligus sebagai promosi pariwisata untuk UGG Gunung Rinjani dan Provinsi NTB secara umum.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama mitra terus melakukan promosi pariwisata melalui Media Online Generasi Pesona Indonesia Lombok Sumbawa (GenPI LS) yang ada di Provinsi NTB.

Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi NTB gencar mempromosikan wisata halal. Dukungan konsep wisata halal mendapat dukungan dari penyelenggara wisata, Penguatan Branding Pariwisata Halal merupakan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan muslim Timur Tengah dan Wisatawan Nusantara. Ruang lingkup pengembangan Pariwisata Halal mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal, yaitu dengan:

Mengupayakan ketersediaan fasilitas umum dan tempat beribadah serta mendorong pengelola destinasi Pariwisata Halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah, mendorong terbentuknya desa wisata dengan potensi religius;

Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal dengan melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, PHRI dan HPI dengan melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran Wisata Halal ke pasar potensial, pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing dengan melibatkan peran media yang efektif dan efisien;

Mendorong industri Pariwisata Halal dengan prinsip syariah yang disertifikasi DSN-MUI.

3. Pertanian

Urusan Pilihan Bidang Pertanian sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan rumpunnya dan berkontribusi dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, peningkatan nilai tukar petani, serta penyerap tenaga kerja dan lainnya.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan uraian sebagai berikut.

a. Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Target Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, dan indikator kinerja pembangunan daerah Nilai Tukar Petani sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2019-2023 yang telah dijabarkan ke dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2019, adalah menjadi alat ukur capaian Sektor pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan, sub sektor holtikultura, sub sektor perikanan, sub sektor peternakan, dan sub sektor kehutanan. Kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian NTB masih dominan di tahun 2018 mencapai lebih dari 23,40% atau mencapai Rp.21,18 Triliun, pertambahan nilai PDRB pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 215 Capaian Pertambahan Nilai PDRB Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan 2016-2018 (Rp.Milyar)

URAIAN	TAHUN					
	2016	%	2017	%	2018	%
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan :						
- Pertanian. Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	16,000.55	16.93	17,048.16	18.01	17,245.21	19.09
- Kehutanan dan Penebangan Kayu	79.77	0.08	79.96	0.08	80.03	0.09
- Perikanan	3,484.42	3.69	3,715.11	3.93	3,862.39	4.28
Jumlah	19,564.74	20.70	20,843.23	22.02	21,187.63	23.46

Sumber : BPS, 2020 data diolah

Pada kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan; Peternakan; Tanaman Hortikultura dan jasa pertanian

dengan capaian selama tiga tahun dari 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan.

- Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada 8 kabupaten di Provinsi NTB, terjadi NTP yang berfluktuasi setiap bulannya, pada bulan Desember 2019 Nilai Tukar Petani gabung tercatat sebesar 115,27 mengalami penurunan sebesar (0,46) dibandingkan NTP pada bulan November sebesar 115,81. Dengan demikian Target nilai tukar petani Provinsi NTB tahun 2019 sebesar >105 berada di atas 100 (tercatat 115,27) yang berarti petani mengalami peningkatan daya beli, karena kenaikan harga produksi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan harga input produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangganya, data selengkapmya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 216 Nilai Tukar Petani (NTP) di NTB Tahun 2017 – 2019

No	NTPT	2017	2018	2019
1.	Januari	106,56	107,81	110.79
2.	Februari	104,58	106,02	110,32
3.	Maret	104,71	106,66	110,46
4.	April	104,02	106,04	109,36
5.	Mei	104,37	106,69	109,26
6.	Juni	105,09	107,41	110,82
7.	Juli	104,44	107,95	124,81
8.	Agustus	105,01	108,99	125,18
9.	September	105,85	109,76	115,04
10.	Oktober	107,20	110,83	115,27
11.	November	107,63	111,21	115,81
12.	Desember	107,48	110,91	115,27

Sumber : BPS, 2020 data diolah

Komoditi yang masih menjadi andalan produksi pertanian dan banyak diminati oleh para petani adalah padi, jagung dan kedelai dengan produksi padi mencapai 2.436.349 ton Gabah Kering Giling (GKG),

jagung pipilan kering sebesar 2.003.267 ton dan produksi kedelai sebesar 80.925 ton biji kering, sebagimana tabel berikut.

Tabel 2. 217 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)			
		2017	2018	2019	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Padi (GKG)	2.344.692	2.491.949	2.346.937	2.436.349
2.	Jagung (Pipilan Kering)	2.020.244	2.061.857	2.148.597	2.003.267
3.	Kedelai (Biji Kering)	51.365	71.908	56.658	80.925

*Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019 *) Aram I*

- Produksi padi

Hasil angka ramalan I BPS tahun 2019 produksi padi mencapai 2.436.349 ton Gabah Kering Giling/GKG, jika dibandingkan dengan produksi tahun 2018 turun sebesar 2,23% (55.600 ton), akan tetapi jika dibandingkan dengan target di dalam RPJMD yaitu 2.346.937 ton GKG tercapai lebih dari 100%, yaitu 103,81%. Penurunan produksi padi di tahun 2019 ini sebagian besar disebabkan karena adanya dampak perubahan iklim (kekeringan). Menurut data UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian luas kekeringan tanaman pangan tahun 2019 adalah sebesar 7.888,7 ha atau 2,19% dari luas tanam komoditas padi, yaitu 360.344 ha.

- Produksi Jagung

Komoditas jagung telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Komoditi jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan mampu sebagai salah satu program strategis dalam penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB. Capaian produksi jagung tahun 2019 sebesar 2.003.267 ton pipilan kering (aram I BPS 2019), turun sebesar 2,84% dari capain tahun 2018 sebesar 58.590 ton pipilan kering. Jika dibandingkan dengan target RPJMD mencapai sebesar 93,25% dari target sebesar 2.148.597 ton pipilan kering. Antusias petani untuk menanam jagung disebabkan karena pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp.3.150/Kg untuk harga pembelian di petani sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 58 Tahun 2018 tentang

Penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen.

Tabel 2. 218 Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2017-2019

No.	INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
					TARGET	REALISASI*)
1.	Luas Tanam	Ha	358,557	303,888	322,674	360,344
2.	Luas Panen	Ha	310,990	213,759	314,609	295,487
3.	Produksi	Ton	2,127,324	2,061,857	2,148,597	2,003,267
4.	Pruduktivitas	Kw/Ha	68.4	64.44	71.33	67.8
5.	Nilai Produksi	Rp.	9,751,717,788,000	7,216,499,500,000	6,768,080,550	6,310,291,050
6.	Nilai Investasi	Rp.	3,462,734,000,000	3,546,371,793,000	2,258,718,000,000	2,522,408,000,000
7.	Serapam Tenaga kerja	Orang	1,259,176	1,215,552	1,290,696	1,441,376
8.	Pendapatan Rata-rata 1x panen	Rp/Ha	31,824,411	20,698,128	21,512,673	21,355,562

Sumber: BPS Provinsi NTB, ATAP 2018) Angka Ramalan I 2019*

- Produksi Kedelai

Komoditi kedelai merupakan komiditas terbesar ketiga setelah padi dan jagung, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Kedelai masih menjadi komoditas impor dikarenakan banyaknya permintaan akan komoditi tersebut sebagai olahan pangan. Capaian produksi kedelai sebesar 80.925 ton biji kering (aram I BPS 2019). Bila dibandingkan tahun 2018 produksi kedelai 71.908 ton meningkat 11,14% dari produksi 2019. Jika dibandingkan dengan target RPJMD 2019 yaitu 56.658 ton meningkat sebesar 70,01%.

- Produksi Tanaman Hortikultura

Cabai dan bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB dengan bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang dalam bentuk umbi basah. Tahun 2019 produksi buah cabai segar mencapai 181.926 ton dibandingkan produksi tahun 2018 yaitu 234.528 ton menurun 22,43% atau 52.602 ton. Jika dibandingkan target RPJMD 2019 meningkat 10,48%.

Produksi umbi basah bawang merah mencapai 161.411 melebihi dari target RPJMD yang telah ditetapkan. Untuk produksi Manggis jika

dibandingkan produksi tahun 2018 meningkat 1,68% hal ini disebabkan karena adanya pemeliharaan intensif oleh kelompok tani manggis danpeningkatan mutu buah manggis dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Exsport manggis ke Cina.

Penurunan produksi tanaman sayuran cabe dan bawang merah disebabkan kemarau panjang, terdapat juga beberapa kab beralih ke komoditas lain seperti di Kabupaten Bima penurunannya dratis dikarenakan alih komoditas jagung. Kendala lainnya yaitu serangan OPT yang hampir terjadi di semua Kab/Kota dengan total serangan 1.322 ha (Alteria pory, ulat bawang, layu fusarium dll).

Di Kabupaten Bima penurunan produksi dikarenakan serangan ulat grayak dan musim kemarau panjang (tidak ada air) sehingga beralih ke komoditas lainnya seperti cabe, jagung, sedangkan harga pestisida dan bibit bawang merah juga mahal. Beralihnya petani sayuran ke tanaman jagung karena jagung memberikan tambahan pendapatan yang lebih besar dari komoditas yang lain dan pemerintah telah menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah).

Tabel 2. 219 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO	JENIS TANAMAN	2017	2018	PRODUKSI (Ton)	
				2019	
				TARGET	REALISASI *)
1.	Cabai (buah segar)	207.531	234.528	19.062	181.926
2.	Bawang merah (umbi basah)	208.156	212.885	197.412	161.411
3	Manggis buah segar	7.319	11.362	7.385	11.556

*Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019 *) ASEM*

Dalam rangka mempertahankan serta peningkatan produksi, produktifitas pertanian/ perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB telah memberikan alat dan mesin pertanian bagi petani. Adapun bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 2. 220 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2017-2019

NO	BANTUAN	JUMLAH (Unit)			
		2016	2017	2018	2019*
1.	Hand Traktor Roda Dua	14.261	10.618	11.951	12.817

NO	BANTUAN	JUMLAH (Unit)			
		2016	2017	2018	2019*
2.	Hand Traktor Roda Empat	350	46	84	116
3.	Transplanter	155	140	167	226
4.	Seeder	1.133	1.961	2.627	3.618
5.	Hand Sprayer dan Power Sprayer	75.169	48.297	55.026	42.564
6.	Swing Fog	1.209	124	14	50
7.	Emposan Tikus	977	829	107	260
8.	Pembersih Gulma	4.281	2.883	2.942	3.267
9.	Pompa Air	7.605	1.349	6.202	1.306
	<4 inci	14.437	881	2.947	2.961
	4 inci	4.396	2.719	4.307	3.516
	>4 inci	1.205	10.618	1.634	984
10.	Sabit Bergerigi	1.002.571	662.949	621.944	720.673
11.	Reaper	37.316	14	136	22
12.	Paddy Mower	879	87	248	137
13.	Stripper	1.855	266	65	66
14.	Combine Harvester	137	40	82	52
15.	Combine Harvester Kecil	96	92	67	150
16.	Combine Harvester Menengah	98	114	117	127
17.	Combine Harvester Besar	68	75	22	134
18.	Corn Combine Harvester	15	9	1	28
19.	Pengungkit Ubi Kayu/Ubi Jalar	1	1	0	49
20.	Paddy Thresher	16.251	13.146	15.546	8.660
21.	Corn Sheller	1.021	656	779	816
22.	Perontok Kedelai/Thresher	500	11	686	11
23.	Power Threser Multiguna	851	449	67	579
24.	Perajang Mekanis	-	-	7	18
25.	Winower	103	40	46	51
26.	Flat Bed Dryer	83	24	44	64
27.	Continuous Dryer	24	14	17	11
28.	Small Rice Mill	1.200	689	683	690
29.	Medium Rice Mill	641	436	394	506
30.	Large Rice Mill	310	199	157	186
31.	Silo	33	9	18	30
32.	Alat Pembuat Pupuk Organik	166	116	99	137

NO	BANTUAN	JUMLAH (Unit)			
		2016	2017	2018	2019*
33.	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1.561	856	915	1.015
34.	Kelompok Tani (POKTAN)	14.632	6.629	10.520	11.049
35.	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	1.111	450	615	795
36.	Koperasi Unit Desa (KUD)	159	44	60	121
37.	Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)	1.400	569	736	932
38.	Kelompok Penangkar Benih	214	98	102	122
39.	Regu Pengendali Hama	324	40	118	393

*Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019, *Baru 8 Kab/Kota yang melaporkan RKSP-Alsintan TP*

Pupuk bersubsidi yang tersedia tepat waktu, tepat jumlah dan harga serta sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) memberi andil besar dalam menyukseskan program swasembada pangan di NTB. Pasalnya, ketersediaan pupuk yang memadai sangat menunjang dan menentukan keberhasilan produksi pertanian para petani. Tahun 2019 alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 2. 221 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2016-2019

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
1.	UREA	2016	139.495,00	139.495,00	100,00
		2017	165.330,00	164.246,45	99,34
		2018	179,815,00	179,726,00	99,95
		2019	161.234	161.029,35	99,87
2.	SP-36	2016	19.100,00	17.842,00	93,41
		2017	17.069,00	17.069,00	100,00
		2018	19,350,00	18,722,55	96,76
		2019	19.280	19.060,05	98,86
3.	ZA	2016	16.000,00	14.330,00	89,56
		2017	18.047,00	18.046,50	100,00
		2018	19,181,00	18,637,93	97,17
		2019	18.640	18.122,05	97,22
4.	NPK	2016	46.601,00	47.836,00	102,65
		2017	59.160,00	54.122,00	91,48

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
		2018	54,850,00	52,289,03	95,33
		2019	47.620	47.571,35	99,90
5.	ORGANIK	2016	7.318,00	6.436,00	87,95
		2017	7.927,00	7.765,00	97,96
		2018	7,500,00	7,434,99	99,13
		2019	11.010	7.511,20	68,22

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019

Ketersediaan benih unggul bersertifikat merupakan faktor utama dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, untuk itu benih unggul bersertifikat yang tepat jumlah dan waktunya menjadi prioritas Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk meningkatkan produksi pertanian di NTB. Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan (padi, jagung dan kedelai) yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BPSB-P) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 222 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019

NO	KOMODITI	LUAS LULUS LAPANGAN (Ha)		
		2017	2018	2019
1.	Padi	4.350,84	3.877,84	1.455,74
2.	Jagung	12,30	9,50	1.70
3.	Kedelai	2.575,07	1.965,10	--

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019

Selain bibit unggul yang bersertifikat gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) juga harus menjadi perhatian dalam sistem budidaya.Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPT-P) Provinsi NTB mengambil peran penting dalam perlindungan tanaman terhadap gangguan organisme pengganggu Tanaman. UPTD BPTP terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian serangan berbagai OPT serta mengantisipasi dampak perubahan iklim yang saat ini mulai memperlihatkan siklus yang kurang bersahabat untuk petani. Luas serangan OPT pada tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 223 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT (Ha)			
		2017	2018	2019	PENURUNAN /PENINGKATAN (Ha)
1.	Padi	5.387,54	4.206,98	3.294,93	912,05*
2.	Jagung	687,65	475,40	1.328,92	853,52
3.	Kedelai	283,05	183,75	187,85	4,10

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019 (*) Menurun

UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P) Provinsi NTB, selaku unit penyediaan benih yang bersertifikat telah memproduksi benih padi kepada penangkar dan petani. Jumlah perbanyakan benih padi seluas 32 ha yang dihasilkan tahun 2019 hanya 1 ha yaitu 2.020 Kg. Selebihnya dilanjutkan pada tahun berikutnya 2020. Hasil perbanyakan benih padi, UPT BBI-P, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 224 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2017-2019

NO	KOMODITI	2017	2018	JUMLAH PRODUKSI (KG)	
				2019	
				PRODUKSI	KETERANGAN
1.	Padi	73.130	94.240	2.020	Sampai akhir Desember 2019 realisasi tanam perbanyakan benih sumber padi 1,0 ha yaitu 2,020 Kg sedang panen untuk 31 Ha diperkirakan bulan April 2020 estimasi produksi untuk bulan April 2020 per ha benih adalah 2.700 Kg per ha. Total produksi 31 x 2.700 Kg = 83.700 kg
2.	Jagung	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	
3.	Kedelai	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	Tidak diprogramkan	

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019

- Produksi Tanaman Perkebunan

Komoditi unggulan Provinsi NTB di bidang perkebunan adalah jambu mete, kopi, tembakau, kakao, dan kelapa. Produksi perkebunan tersebar di

kabupaten/kota. Adapun produksi komoditi perkebunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 225 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO	KOMODITI	PRODUKSI (TON)		PRODUKSI (Ton)	
				2019	
		2017	2018	Target	Realisasi **)
1.	Kopi	4.865,15	5.005,90	4.938	6.566.36
2.	Kelapa	48.346,30	45.555,62	48.849	48.766,08
3.	Kakao	2.083,37	1.818,90	2.115	2.219,35
4.	Jambu Mete	12.734,03	11.554,94	12.861	10.410,72
5.	Tembakau	50.680,13	44.570,56	51.694	43.068,47

*Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019 **) ASEM (Angka Sementara) tahun 2019*

Dilihat dari capaian tahun 2019 komoditi perkebunan sudah mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, terkecuali komoditi jambu mete dan tembakau yang belum mencapai target yang diharapkan. Produksi Jambu mete tahun 2019 menurun 9,90% dibandingkan produksi tahun 2018. Dari target RPJMD produksi jambu mete menurun 19,05%, Penurunan beberapa komoditi perkebunan yaitu jambu mete ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ;

1) Tanaman jambu mete yang ada di NTB rata-rata berumur 15 tahun keatas;
2) Adanya alih fungsi lahan produktif dan penurunan minat petani muda terhadap budidaya jambu mete (petani yang ada adalah petani berumur 40 tahun keatas);

- Komoditas Tembakau

Potensi lahan di NTB untuk produksi tembakau kurang lebih sebanyak 52 ribu ha, sementara yang sudah dimanfaatkan sebanyak 35 ribu ha yang berarti bahwa masih banyak potensi lahan untuk pengembangan komoditi tembakau.Tembakau Virginia dan tembakau rakyat merupakan jenis tembakau yang diproduksi petani NTB. Provinsi NTB saat ini terkenal dengan tembakau virginia karena merupakan salah satu daerah penghasil terbesar di Indonesia. Adapun Luas areal dan produksi tanaman tembakau di Provinsi NTB tahun 2017-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 226 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2017 - 2019

Komoditi	2017			2018			2019*		
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
Tembakau Virginia	25.983,81	43.054,48	31.293	23.623,28	34.286,86	36.736	26.991,15	32.447,77	16.104
Tembakau Rakyat	7.816,41	7.625,65	9.080	8.319,15	10.283,70	15.520	8.144,55	10.620,70	8.017

*Sumber : BPS Provinsi NTB, 2019 * angka sementara*

Produksi tembakau virginia pada tahun 2019 sebesar 32.447,77 ton mengalami penurunan menjadi 1.839,09 ton dibandingkan produksi tahun 2018, sedangkan tembakau rakyat mengalami peningkatan dari 10.283,70 ton di tahun 2018 menjadi 10.620,70 ton tahun 2019. Penambahan luas tanam dan produksi tembakau Virginia berdampak pada penurunan luas tanam dan produksi pada tembakau rakyat. Jumlah petani yang menanam tembakau Virginia pada tahun 2019 sebanyak 16.104 kepala keluarga akan tetapi jumlah petani tembakau rakyat sebanyak 8.017 kepala keluarga. Luas tanam tembakau Virginia per orang lebih luas dibandingkan tembakau rakyat.

Penurunan produksi tembakau pada tahun 2019 disebabkan karena adanya serang hama/penyakit pada tembakau dilahan produktif serta adanya dampak perubahan iklim (kekeringan). Rendahnya harga tembakau pada saat panen raya masih menjadi kendala dalam pengembangan komoditas tembakau. Sehingga untuk mengantisipasi masalah fluktuasi harga tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mengarahkan dan mensosialisasikan agar areal tanam tembakau virginia Lombok tidak melebihi target pembelian perusahaan mitra. Perusahaan tembakau yang ada di NTB diwajibkan menetapkan target pembelian sebelum musim tanam, dan petani diarahkan menyesuaikan dengan target pembelian tersebut.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan adalah sebagai berikut.

1. Rehabilitasi/peremajaan tanaman komoditi perkebunan;
2. Perluasan areal penanaman;
3. Melakukan teknologi sambung pucuk untuk tanaman kopi dan teknologi sambung samping pada tanaman kakao (coklat ;

4. Intensifikasi pada tanaman perkebunan dengan pemberian sarana produksi (pupuk dan pestisida) dan pengendalian hama/penyakit;
5. Pengendalian serangan OPT, sehingga penyebaran hama/penyakit tidak meluas pada tanaman yang masih produktif.

Dalam rangka mempertahankan produksi tanaman pertanian di Provinsi NTB, ada beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi lahan pertanian;
2. Pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi;
3. Peningkatan produktivitas, melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, pemupukan berimbang serta penggunaan pupuk organik;
4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan antisipasi dampak perubahan iklim;
5. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan.

Pelaksanaan program kegiatan yang telah diselenggaranan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB terdapat permasalahan yang dihadapi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 227 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dampak Perubahan Iklim	Membangun koordinasi dengan BMKG dalam rangka memperoleh informasi iklim
Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi bukan lahan pertanian	Menyusun Raperda pengganti Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2013 tentang Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan
Ketersedian dan penyebaran teknologi spesifik lokasi belum menjangkau seluruh karakteristik tipologi lahan, karena manajemen penyuluhan Pertanian yang bervariasi dibeberapa kabupaten	Diperlukan kebijakan tentang revitalisasi penyuluh Pertanian di instansi lingkungan Pertanian di tingkat kabupaten / kecamatan

PERMASALAHAN	SOLUSI
Kelembagaan dan organisasi petani belum mampu berperan dalam meningkatkan posisi tawar petani	Meningkatkan daya saing lembaga/gapoktan/petani untuk kesejahteraan petani
Pemasaran produk perkebunan belum optimal	Melakukan pembinaan kepada petani/pekebun terutama yang berkaitan dengan pasca panen guna meningkatkan kualitas dan mutu komoditi. Turut serta dalam event-event promosi di dalam maupun luar daerah guna memperkenalkan produk yang telah dihasilkan petani/pekebun/ kelompok tani komoditi perkebunan
Usia tua, produktivitas tanaman perkebunan yang menurun dan alih fungsi lahan tanaman perkebunan	Memperbaiki sistem budidaya komoditi perkebunan di hulu dengan pengembangan teknologi intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, perluasan areal dan peremajaan.

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2019

b. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB masuk dalam urusan pilihan, melalui misi 5 RPJMD 2019-2023 mewujudkan NTB Sejahtera dan Mandiri, Indikator Utama menurunkan Angka Kemiskinan dengan sasaran meningkatnya produksi sektor primer, yang diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Daerah Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan dan Nilai Tukar Petani. Untuk mencapai indikator yang telah dituangkan dalam RPJMD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program-program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; Peningkatan produksi hasil peternakan; Peningkatan pemasaran produksi hasil peternakan, dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

- Populasi Ternak

Peningkatan populasi dan produksi ternak di NTB melalui program strategis dan unggulan daerah bertujuan untuk peningkatan ekonomi, sekaligus memiliki kontribusi terhadap peningkatan PDRB sektor pertanian, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan populasi dan produksi, beberapa program strategis yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap capaian RPJMD khususnya Misi ke-5 yaitu NTB adil, sejahtera dan mandiri yang menitikberatkan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program dimaksud meliputi: Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Program Peningkatan Pemasaran Produksi Hasil Peternakan dan Program Penerapan Teknologi Hasil Peternakan. Secara sinergi dari keempat program dimaksud menjabarkan aktifitas dan kegiatan Fungsional Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam mencapai target dan sasaran pembangunan peternakan tahun 2019 – 2023.

Komoditas strategis peternakan yang dikembangkan di NTB digambarkan dalam populasi ternak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 228 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019

No	Ternak	Populasi Ternak (ekor)		
		2017	2018	2019
1.	Sapi	1.149.540	1.183.570	1.234.357
2.	Kerbau	116.847	120.149	121.572
3.	Kuda	48.367	47.738	47.292
4.	Kambing	656.585	672.854	622.039
5.	Domba	18.660	26.690	21.862
6.	Babi	53.784	56.986	60.066
7.	Ayam Ras Petelur	740.211	787.648	1.246.699
8.	Ayam Ras Pedaging	8.705.364	9.917.920	15.187.650
9.	Ayam Buras	8.104.488	8.262.407	7.870.476
10.	Itik	957.073	1.118.601	1.169.034

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2019

Dari beberapa komoditas peternakan yang tertuang dalam tabel tersebut terdapat 3 komoditas ternak yang termasuk komoditas andalan/ unggulan yaitu Sapi, Kambing dan Unggas. Rata-rata trend pertumbuhan populasi ternak sapi dari 2017 – 2019 adalah sebesar

3,63% dari target pertumbuhan 5%. Peternakan sapi merupakan usaha peternakan rakyat dengan agroinput dan pembiayaannya masih banyak dilakukan masyarakat peternak oleh karena itu capaian peningkatan populasi melalui dukungan dan pembiayaan pemerintah di tahun 2019 hanya mencapai 4,30% yang disebabkan oleh rendahnya intervensi pemerintah terhadap penyediaan Bulls dan Pejantan Pemacek baik dalam mendukung ketersediaan bibit dan benih melalui kelahiran IB maupun kelahiran Alam. Pencapaian target peningkatan populasi dimaksud merupakan kontribusi dari program peningkatan produksi peternakan melalui Inseminasi Buatan (IB) dan kelahiran dan juga didukung oleh optimalisasi fungsional bidang pengembangan hijauan pakan ternak, peningkatan kelembagaan dan usaha perbibitan, pengembangan teknologi penerapan hasil peternakan serta adanya aktifitas pelayanan kesehatan hewan dan pencegahan penyakit ternak pada masyarakat peternak.

Kinerja program berdampak terhadap dinamika populasi serta ketersediaan ternak sapi potong dan sapi bibit di masyarakat komponen pembentuk keseimbangan populasi ternak ruminansia besar seperti sapi dan kerbau adalah kelahiran dan kematian pedet, pemotongan lokal/konsumsi dalam daerah serta pengiriman dan ekspor diluar Provinsi NTB. Optimalisasi kelahiran melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam serta kegiatan-kegiatan distribusi bibit dan betina indukan di masyarakat memiliki korelasi positif terhadap peningkatan populasi ternak sapi baik kegiatan-kegiatan reguler maupun kegiatan supporting yang bersifat aspiratif dalam mecapai sasaran pembangunan peternakan. Secara kuanitatif capaian kinerja pertumbuhan populasi belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja namun secara ekonomis trend pertumbuhan 4,3% dapat meningkatkan kontribusi terhadap nilai tambah terutama ketersediaan sapi bibit dan sapi potong bagi kebutuhan lokal/dalam daerah juga dapat memenuhi permintaan eksport ke luar daerah NTB, sehingga memiliki kontribusi terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya turut mendorong pertumbuhan PDRB sub sektor peternakan.

Dalam memenuhi kebutuhan daging di NTB komoditas andalan lainnya adalah ternak kambing, namun dalam perkembangannya ternak kambing tidak mengalami perkembangan selama 3 tahun terakhir dan cenderung mengalami penurunan, hal ini diakibatkan kurangnya intervensi terhadap usaha pengembangan di masyarakat sementara permintaan terhadap kebutuhan daging kambing baik pada hari-hari biasa maupun pada saat Hari Besar Keagamaaan Nasional (HBKN) dan

Idul Qurban sangat tinggi. Oleh karena itu support dan dukungan dalam pengembangannya sangat diperlukan untuk memenuhi kecukupan daging bagi masyarakat.

Komoditas andalan lainnya selain sapi dan kambing adalah unggas. Komoditas ini terbagi dalam ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras dan itik sebagai penyumbang produksi daging dan telur bagi masyarakat. Secara komulatif produksi daging unggas dan telur masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di saat permintaan tinggi terutama pada hari raya dan tahun baru upaya memenuhi ketersediaan telur ayam ras harus didatangkan dari luar daerah (Jawa dan Bali). Belum ada perusahaan swasta yang bergerak pada ayam ras petelur hanya perusahaan yang bergerak dalam pengembangan ayam ras pedaging (broiler) untuk melihat secara teknis dan ekonomis kinerja pengembangan ternak sapi dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 229 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (Ternak Sapi) Tahun 2017-2019.

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2017	2018	2019	
					TARGET	CAPAIAN
1.	Populasi	Ekor	1.149.540	1.183.570	1.242.749	1.234.357
2.	Induk Produktif	Ekor	517.293	532.606	559.237	555.460
		%	45	45	45	45
3.	Kelahiran Pedet	Ekor	413.834	426.084	447.389	444.368
		%		80	80	80
4.	Kematian Pedet	Ekor	41.383	42.608	44.738	44.436
		%	10	10	10	10
5.	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	51	101	5000	50
		%	0,62	1,16	0,19	0,54
6.	Pengeluaran Bibit	Ekor	3.402	625	10.000	685
7.	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	43.378	11.244	44.000	11.835
8.	Serapan Tenaga Kerja	Orang	287.385	295,892	310.687	308.589
9.	Kesejahteraan Masyarakat (NTP)		120,60	125,65	100	130,98

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2019

Secara umum kinerja subsektor peternakan sapi menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019, kecuali indikator kinerja kematian pedet menunjukkan perkembangan yang negatif, karena jumlah kematian meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2. 230 Pemotongan Ternak Betina Produktif Tahun 2017 s.d 2019

Tahun	Jumlah Pemotongan						Jumlah Sapi dan Kerbau (ekor)	Betina Produktif Dipotong (ekor)			% Betina Produktif Terhadap	
	Sapi (ekor)			Kerbau (ekor)								
	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml		Sapi	Krb	Jml	Yang Dipotong	Betina yg Dipotong
2017	55.704	5.706	61.410	3.487	2.558	6.046	67.456	47	4	51	0,08	0,62
2018	58.889	5.874	64.763	3.684	2.057	5.741	70.504	79	7	86	0,12	1,08
2019	62.183	7.279	69.462	4.564	1.962	6.526	75.988	49	1	50	0,07	0,54

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2019

Produksi daging dari tahun 2017-2019 di NTB terus mengalami peningkatan baik ternak ruminansia maupun ternak unggas. Adapun perkembangan produksi daging di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 231 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2017-2019

NO	TERNAK	PRODUKSI DAGING (Ton)		
		2017	2018	2019
1.	Kuda	196,66	109,35	70,8
2.	Sapi	17.016,30	9.969,00	10.627
3.	Kerbau	1.907,76	942,04	1.071
4.	Kambing	5.547,26	2.854,25	2.900,3
5.	Domba	112,50	12,79	10,6
6.	Babi	2.790,01	97,93	87,5
7.	Ayam Ras	28.582,03	66.318,34	66.406,4
8.	Ayam Buras	8.736,64	10.873,33	11.225,8
9.	Itik	930,27	2.013,48	1.167,2

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2019

NTB dikenal sebagai daerah sentra ternak berimbas pada permintaan akan ternak bibit dan ternak potong dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain DKI, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan daerah lainnya.

Tabel 2. 232 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019

NO	JENIS TERNAK	TERNAK BIBIT KELUAR (ekor)			TERNAK POTONG KELUAR (ekor)			JUMLAH (ekor)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1.	Sapi	3.402	625	685	10.953	11.244	11.835	14.355	11.869	12.520
2.	Kerbau	-	-	-	2.434	2.479	1.969	2.434	2.479	1.969
3.	Kuda	-	-	-	1.200	1.237	1.584	1.200	1.237	1.584
4.	Kambing	-	-	-	-	255	20	-	255	20
5.	Babi	-	-	-	740	2.025	1.135	740	2.025	1.135

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2019

Untuk menjaga populasi ternak dalam daerah perlu dilakukan pembatasan pengiriman ternak bibit dan ternak potong ke provinsi lain, tahun 2016 pengiriman ternak keluar mengalami penurunan. Selain itu penurunan ini juga disebabkan oleh menurunnya permintaan dari konsumen luar NTB dan imbas rendahnya harga daging import dibandingkan daging lokal.

Dalam meningkatkan Nilai Tukar Petani pada sub sektor peternakan perlu dilakukan peningkatan nilai tambah produk peternakan, pengaturan regulasi dan transaksi perdagangan ternak antar pulau. NTPT dalam tahun 2017-2019 menurut analisis BPS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 233 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2017 – 2019

No	NTPT	2017	2018	2019
1.	Januari	118,43	121,47	127,02
2.	Februari	117,67	120,17	126,62
3.	Maret	119,03	121,39	126,79
4.	April	118,80	122,89	126,15
5.	Mei	119,13	124,26	126,49
6.	Juni	120,55	127,16	128,83
7.	Juli	119,10	128,00	130,82
8.	Agustus	120,46	130,37	133,58

No	NTPT	2017	2018	2019
9.	September	119,97	128,36	136,24
10.	Oktober	131,92	128,36	135,90
11.	November	120,52	128,43	137,12
12.	Desember	121,65	127,14	136,25

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Pada tabel diatas terlihat adanya trend peningkatan Nilai Tukar Petani di NTB adalah 120,65 ponit pada tahun 2018 meningkat menjadi 130,98 point pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa adanya Perubahan Indeks Nilai Tukar Petani tersebut dimaknai sebagai peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat peternak lebih besar dari pengeluaran dalam membiayai usaha produksi peternakan.

- UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Upaya meningkatkan produksi hasil peternakan UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB) melaksanakan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) merupakan salah satu program nasional yang diadopsi NTB untuk meningkatkan populasi sapi yang ada. Dengan harapan mampu mendongkrak realisasi produksi semen beku menjadi 120.000 straw /semen beku, target akseptor yang ditetapkan tahun 2019 adalah 70.000 akseptor dengan realisasi 77.000 akseptor.

- UPTD Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak

Tahun 2019 Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak Serading memproduksi bibit/Benih HMT sebanyak 1.236 kg. Peran UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak-Serading menyiapkan pakan yang bermutu baik akan mempengaruhi kualitas sapi maupun pedet yang dihasilkan.

- UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner

Selama tahun 2019 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner telah melakukan pelayanan kesehatan hewan sebanyak 3.229 ekor melebihi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1.000 ekor. Sedangkan untuk mendukung pengendalian dan pencegahan penyebaran PHMS, Rumah Sakit Hewan telah memeriksa sampel sebanyak 11.428 sampel yang terkait dengan penyebaran PHMS.

- UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia berfungsi sebagai tempat pelatihan pengolahan limbah hasil samping pertanian untuk dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak berkualitas, selain itu BP3TR juga berfungsi sebagai pusat pengkajian dan penelitian kualitas pakan ternak ruminansia yang beredar di masyarakat sekaligus menciptakan formulasi pakan ternak ruminansia. Selama tahun 2019 BP3TR telah menguji coba pembuatan formula pakan ruminansia sebanyak 30 ton dan telah diberikan ke KTT sebagai sarana sosialisasi dan pengenalan pakan olahan. Di samping itu BP3TR telah melatih peternak sebanyak 100 kelompok dan secara rutin melakukan sosialisasi pemanfaatan hasil samping pertanian sebagai sumber bahan pakan berkualitas.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan program kegiatan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi kendala sebaimana tabel berikut.

Tabel 2. 234 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Tingkat pemotongan ternak betina produktif masih tinggisehingga akan mengurangi ketersediaan induk betina sebagai mesin produksi dalam rangka peningkatan kelahiran yang berdapak langsung pada peningkatan populasi ternak. 2. Kecenderungan pemotongan ternak betina lebih tinggi di RPH akibat dari harga yg lebih rendah dipasaran	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan melibatkan stakhoders terkait Kepolisian, pol PP dan petugas RPH dalam rangka mengurangi tingkat pemotongan betina produktif dan sekalugu merupakan langka proaktif dalam penegakan perda No, 1/2015 tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif 2. Melakukan sosialisasi /penyuluhan yang lebih efektif terhadap pergub no 10 tahun 2019 tentang pengendalian pemotongan

	ternak ruminansia besar betina produktif peraturan pelaksanaan peraturan daerah no.1 thn 2015 3. Pengaturan tataniaga harga dasar ternak bakalan yang dipotong di RPH 4. Pengaturan sexratio jsntan dan betina dalam pelaksanaan IB perlu dioptimalkan sehingga akan diperoleh kelahiran pedet jantan dengan komposisi tertentu sesuai yang diharapkan sebagai sumber ketersediaan ternak potong.

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2019

4. Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB fokus dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. Urusan kehutanan berkontribusi terhadap indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Berdasarkan publikasi resmi melalui laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018, nilai IKTL NTB Tahun 2018 adalah sebesar 61,27 atau meningkat 5,29 poin dari tahun 2017. Nilai ini berasal dari hasil penafsiran dari citra landsat yang dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai gambaran kondisi alih fungsi lahan di beberapa wilayah hutan NTB. Tutupan hutan dalam kurun waktu 2014-2015 turun sebesar 1,29% atau 10.832 ha. Sawah dan dilakukan dinas Lingkungan permukiman semakin luas, sementara penutupan lahan terus berkurang.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas LHK untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan antara lain:

- Penanaman di dalam dan luar kawasan hutan

  Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan

bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. Pada tahun 2019, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 9.791,29 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya.

- Rehabilitasi daerah tangkapan air

  Pembuatan bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan tanah dan air dari di sekitar daerah tangkapan atau sebagai bangunan pengedali erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2019, telah dibangun bangunan sipil teknis berupa 30 unit DAM Penahan, 61 unit sumur resapan dan 39 unit Gully Plug di beberapa wilayah KPH NTB melalui sumber dana DAK. Selain pembangunan fisik KTA yang dilaksanakan oleh balai, Dinas LHK NTB melaksanakan kegiatan monitoring dan fasilitasi perencanaan sebanyak 47 unit KTA di beberapa KPH, diantaranya berlokasi di KPH Sejorong Mataiyang, KPH Brang Beh, dan KPH Ampang Riwo. Di samping itu, untuk memperkuat kompetensi SDM khususnya dalam rangka rehabilitasi lahan baik secara vegetatif maupun sipil teknis, maka dilaksanakan pelatihan pengelolaan DAS Provinsi NTB lintas OPD dan sosialisasi pengelolaan DAS untuk seluruh KPH dan Tahura.

- Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat

  Capaian kinerja yang telah dilaksanakan antara lain pembinaan dan monitoring kelompok sebanyak 87 kelompok di KPH se-NTB. Pencapaian lainnya ialah terbentuknya 1 (satu) kelompok Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah, dan 3 (tiga) Kelompok Usaha Produktif (KUP) di Desa Kuripan Selatan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat, Desa Batu Putih Kec. Sekotong Tengah Kab. Lombok Barat, dan Desa Riamau Kec. Wawo Kab. Bima.

- Program pemberdayaan masyarakat lainnya

  Program Perhutanan Sosial (PS) yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar : lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Di Provinsi NTB program Perhutanan Sosial dijalankan dalam 3 skema yaitu Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, dan Kemitraaan Kehutanan. Kondisinya sampai dengan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 235

No.	Skema Perhutanan Sosial	Luasan (Ha)	Jumlah Anggota (orang)
1	Hutan Tanaman Rakyat	3.152,88	2.916
2	Hutan Kemasyarakatan	24.271,60	22.223
3	Kemitraaan Kehutanan	15.571	9.240

Pemerintah Provinsi NTB menetapkan program unggulan untuk mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu dengan "Industrialisasi HHBK", upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Provinsi NTB. Pengembangan HHBK memliki beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan nilai tambah produk HHBK, mendukung pengelolaan hutan lestari, meningkatkan PAD dan PNBP, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui usaha produktif. Di Provinsi NTB, beberapa jenis HHBK unggulan mulai dikembangkan dengan adanya unit-unit pengolahan di KPH, antara lain sebagai berikut.

Tabel 2. 236 Unit-Unit Pengolahan HHBK di KPH

No.	Pabrik Pengolahan	KPH	Jumlah	Kapasitas Produksi	Jml. Produksi		Keterangan
1.	Kayu Putih	Rinjani Barat	2 unit	300 kg/unit	107.79	Liter	Produksi April 2017 s.d. Juli 2018 (Jeda Gempa), Produksi Lagi Pebruari 2019. 1 unit pabrik rusak terdampak gempa (Pabrik Minyak Kayu Putih di Lendang Luar)
2.	Kayu Putih	Batulanteh	1 unit	100 kg	50	Liter	Proses Uji Coba
3.	Minyak Nylam	Rinjani Barat	1 unit	300 kg	21	Liter	Produksi Juli 2017 s.d. Juli 2018
4.	Wood Pellet	Rinjani Barat	1 unit	500kg/jam	65	Kg	Proses Uji coba
5.	Minyak Kemiri	KPH Rinjani Barat dan Batulanteh	3 Unit	rata-rata 4.000 kemasan	3 – 4 ton kemiri	Per tahun	2 Kelompok Masyarakat di KPH Batulanteh dan 1

No.	Pabrik Pengolahan	KPH	Jumlah	Kapasitas Produksi	Jml. Produksi		Keterangan
							Kelompok di Rinjani Barat, produksi 2016
6.	Porang	KPH Orong Telu, Rinjani Barat, Batulanteh					Masih sumber Tanaman Alami, baru dimulai 2018/2019
7.	Rotan	KPH Sejorong Matayang	1 unit	200 ton/tahun	200 ton	Kering awet	Pengelolaan KPH Bersama BUMDes, produksi 2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

HHBK jenis wood pellet yang dikembangkan oleh Dinas LHK NTB melalui KPH Rinjani Barat mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT), melalui pemanfatan limbah kayu serta peluang untuk omprongan tembakau. Sumber bahan bakunya berupa tanaman Kaliandra dan Gamal, dan tanaman ini cocok untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis karena proses tumbuhnya yang cepat (*fast growing*). Pengembangan wood pellet ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani hutan, BUMDes dan PAD serta PNBP.

Tanaman Kayu Putih merupakan tanaman Pionir mampu hidup dalam lahan kritis dan tidak dimakan ternak. Saat ini, sudah terdapat pabrik pengolahan minyak kayu putih yang dikelola oleh KPH Rinjani Barat sebanyak 2 unit di Desa Bentek Kec. Gangga dan Desa Lendang Luar Kec. Malaka. Total kapasitas produksi 2 unit tersebut sudah mencapai 600 kg/hari. Minyak kayu putih yang dihasilkan unit KPH Rinjani Barat sudah menghasilkan kadar sineol di atas SNI. Sedangkan pengolahan minyak kayu putih oleh KPH Batulanteh masih dalam proses uji coba. Kapasitas penyulingan minyak kayu putih masih berkisar 100 kg/hari.

HHBK lainnya yang sedang dikembangkan adalah Rotan. Rotan akan meningkat nilai tambahnya jika jenis Rotan Basah diubah menjadi Rotan awet dengan sedikit upaya pengawetan. KPH Sejorong Mataiyang bersama Bumdes mengelola rotan dengan produksi 200 ton/tahun. Mitra KPH Sejorong Mataiyang adala KTH Olat Parigi dan BUMDes Orong Kleta Desa Sekongkang Atas Sumbawa Barat.

Potensi HHBK Kemiri tersebar di beberapa KPH antara lain tersebar KPH Batulanteh, KPH Maria Donggomassa, KPH Rinjani Barat, dan KPH Sejorong Mataiayang. Kendala dalam pengembangan kemiri adalah produk kelompok hanya pada tingkat kemiri glondongan dan kemiri kupas karena keterbatasan alat pengolahan kemiri. Terkait proses pemasaran, masih

dibutuhkan off taker (pembeli) dan pasar minyak, meski pasar minyak Kemiri cukup terbuka.

Tanaman porang (iles-iles) mulai dikembangkan di KPH Orong Telu, KPH Ampang Plampang, dan KPH Rinjani Barat. Kedepannya, porang akan diekspor ke Jepang sebagai bahan baku noodle (mie di Jepang), dengan pengolahan setengah jadi menjadi chips. Terkait usaha produktif lebah madu trigona, pengembangannya sudah dilakukan di seluruh KPH di NTB karena mudah untuk dibudidayakan. Namun untuk menghasilkan propolis butuh bahan baku banyak dan teknologi pengolahan yang memadai. Cikal bakal potensi industrialisasi HHBK lainnya tersebar di beberapa lokasi di NTB antara lain:

1. PT. Sanggar Agro, potensi industri kayu putih, dengan luasan 5.000 Ha, berlokasi di Oi Katupa Tambora, status belum berproduksi;
2. Industri Rumah Tangga Pengolahan Bambu Lombok Tengah;
3. Industri Pengolahan Minyak Serai Wangi, Usaha Dagang Swasta seluas 10 Ha di Kec. Lape, dan potensial bahan baku dari KPH Ampang Plampang, sudah 3 tahun berproduksi.

Dalam proses pengembangan industrialisasi HHBK, beberapa upayagencar dilakukan agar prosesnya berjalan maksimal, antara lain secara intensif melakukan pembinaan kelompok/masyarakat pengelola produk HHBK, sosialisasi peraturan dengan pemegang ijin IUPHHK-HTR/IUPHKm, IUPHHBK, Fasilitasi sapras pengembangan produk HHBK, sosialisasi regulasi pengolahan dan peredaran hasil hutan (PPHH), pengembangan luasan penanaman HHBK(bambu, gaharu, kayu putih, kopi, porang dll), fasilitasi pemungutan PNBP dan PAD, dan meningkatkan sinergitas antara KPH.

Upaya lainnya dalam rangka perlindungan hutan dan mempertahankan tutupan lahan dilaksanakan melalui operasi pengamanan hutan, penegakan hukum kehutanan, fasilitasi pembentukan KEE pada 2 lokasi (Desa Sedayu Kabupaten Lombok Utara dan Desa Lunyuk Kabupaten Sumbawa), serta pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 11 unit KPH dan 1 unit Tahura. Operasi pengamanan hutan di areal hutan seluas 243.468 hektar pada Tahun 2019. Operasi ini dilakukan untuk menekan upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh Dinas LHK. Jumlah kasus tindak pidana kehutanan yang dapat terselesaikan di tahun 2019 sebanyak 11 kasus.

Penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2019 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-

unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2019 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.

Terkait dengan penyusunan RPHJP KPH, Dinas LHK telah melaksanakan pendampingan dan bantuan fasilitasi penyusunan dokumen. Selain itu, dilaksanakan juga sosialisasi tata batas kawasan hutan se Pulau Lombok dan Sumbawa, dan penyusunan Perda Pengelolaan Hutan.

Dalam kegiatan pengembangan usaha kehutanan, telah dilaksanakan fasilitasi pengembangan kelompok usaha kehutanan untuk 66 kelompok yang tersebar di KPH. Kelompok usaha kehutanan diberikan pemahaman terkait : (1) Pemanfaatan Hutan, tujuannya untuk me-refresh dan me-review para pemegang izin (HKm, HTR, Kemitraan, dan Kerjasama) dalam hal pemanfaatan hutan terutama tentang hak dan kewajiban mereka dalam memanfaatkan hutan, (2) Penatausahaan Hasil Hutan, (3) PNBP dari pemanfaatan hasil hutan. Masing-maisng KPH dan Tahura juga melaksanakan terhadap beberapa KTH yang ada di wilayahnya, jumlahnya dirincikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 237

No.	KPH/Balai	Jumlah KTH yang dibina melalui anggaran 2019
1	Tahura Nuraksa	2
2	Rinjani Barat	3
3	Rinjani Timur	1
4	Sejorong Mataiyang	1
5	Brang Beh	1
6	Batulanteh	3
7	Ampang Plampang	1
8	Ropang	3
9	Ampang Riwo	13
10	Toffo Pajo Soromandi	1
11	Maria Donggomassa	12
12	Tambora	4
	TOTAL	45

Terkait indikator kinerja jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, terdapat 2 (dua) unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, PT. AWB (IUPHHK-HA) dan PT Sadhana Ariefnusa (IUPHHK-HT). Sedangkan terdapat unit yang termasuk dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan

Hutan (IPPKH) yaitu PT. Sumbawa Timur Minning, PT. Sumbawa juta raya, dan PT. Amman Mineral. Untuk HKm, terdapat HKm Oi Rida Kab. Bima dan HKm Samoko Kab. Sumbawa.

Sebagai dukungan terhadap capaian indikator IKLH di dalam RPJMD 2019-2023, pemerintah NTB menetapkan program NTB Hijau sebagai salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB khususnya bertujuan untuk meningkatkan nilai indeks tutupan lahan. NTB Hijau dilaksanakan melalui berbagai program di Dinas LHK, antara lain:

1. Program Rehabilitasi, Kerjasama, dan Perhutanan Sosial;
2. Program Pengelolaan Hutan;
3. Program Perlindungan Hutan, Konservasi, Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Beberapa hal yang dilakukan dalam mendukung program rehabilitasi, kerjasama, dan perhutanan sosial, beberapa upaya dilakukan Dinas LHK yaitu :

RHL Vegetatif, 1.020.000 btg atau equivalen 2.700 Ha dalam bentuk :

- Penanaman pemeliharaan (P1);
- Demplot Agroforestry;
- Pembuatan bibitTanaman Produktif;
- Hutan Rakyat;
- Penanaman Bambu dan Kebun Bibit Rakyat sebanyak 38 unit.

RHL Sipil Teknis,

- 32 Dam Penahan;
- 39 Gully Plug;
- dan 61 Sumur Resapan.

Pembiayaan mendapat dukungan melalui dana APBN, RHL sebesar 3.410.000 btg, equivalens 6.660 Ha, yang dilaksanakan oleh 124 kelompok melalui KPH, Penanaman bibit bakti sosial dan produktif sebanyak 1.780.000 btg, oleh 142 komunitas, dukungan pihak swasta/perusahaan pemegang ijin pakai kawasan hutan seluas 1.267 Ha.

Selain upaya penanaman yang dilakukan, upaya percepatan perhutanan sosial terus dilaksanakan untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar : lahan, kesempatan usaha, dan sumberdaya manusia. Di Provinsi NTB program Perhutanan Sosial dijalankan dalam 3 skema yaitu Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Kemasyarakatan/HKm, dan Kemitraaan Kehutanan.

Progress perhutanan sosial di tahun 2019 dicapai melalui berbagai kegiatan yaitu :

1. Pembinaan : Kelompok Tani Hutan Perhutanan Sosial 87 kelompok, 602 KTH Pemula, 47 KTH Madya, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

sebanyak 12 unit, Hutan Tanaman Rakyat 12 kelompok dan Kemitraan Kehutanan sebanyak 137 KTH;

2. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Usaha Produktif 3 kelompok;
3. Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan,m1 unit;
4. Pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Mandiri, 220 orang;
5. Fasilitasi bantuan sarpras untuk kelompok Perhutanan Sosial oleh Bang Pesona (Program Kementerian LHK untuk peningkatan sarpras kelompok Perhutanan Sosial) kepada 17 KTH;

Terkait upaya pemantapan kawasan hutan, dilakukan melalui penyusunan regulasi dan penataan batas kawasan hutan. Upaya lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Perda Pengelolaan Hutan;
2. Pemantapan Kawasan Hutan, 16 Unit;
3. Monitoring ijin usaha kehutanan, 7 unit usaha kehutanan (Terdapat 2 (dua) unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib, PT. AWB (IUPHHK-HA) dan PT Sadhana Ariefnusa (IUPHHK-HT). Sedangkan terdapat unit yang termasuk dalam Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yaitu PT. Sumbawa Timur Minning, PT. Sumbawa juta raya, dan PT. Amman Mineral. Untuk HKm, terdapat HKm Oi Rida Kab Bima dan HKm Samoko Kab Sumbawa);
4. Penyusunan Road map industrialisasi kehutanan;
5. Penataan Batas kawasan hutan;
6. Penyusunan RPHJP, 14 unit;
7. Penyusunan RHJPd, 8 unit;
8. Pengembangan Bambu, 200 Ha di 6 KPH;
9. Pengembangan Sarpras Wisata Alam di Tahura;
10. Pemantapan Industri Hasil Hutan (Kayu Putih, Nilam, Sereh Wangi, Madu) .

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang kehutanan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 238 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kehutanan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Database dan *profile* usaha Kehutanan sebagai basis cikal bakal Industrialisasi masih tersebar di KPH	Harus dilakukan konsolidasi untuk mengukur kontribusi terhadap pencapaian target2 RPJMD

PERMASALAHAN	SOLUSI
Banyaknya batas kawasan yang sudah lama tidak dilakukan rekonstruksi	Koordinasi kepada BPHP untuk bantuan fasilitasi rekonstruksi tata batas kawasan hutan
Roadmap Industrialisasi belum di Finalisasi	Percepat upaya koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam penyusunan roadmap
Belum jelas tergambar terkait kepastian Pasar produk/komoditi masyarakat *(secure market)*, Teknologi pengolahan belum memadai, proses pengolahan produk yang belum sesuai standar, Daya tahan kelembagaan / kelompok	Intensif melakukan pembinaan kelompok/masyarakat pengelola produk HHBK, sosialisasi peraturan dengan pemegang ijin IUPHHK-HTR/IUPHKm, IUPHHBK, Fasilitasi sapras pengembangan produk HHBK, sosialisasi regulasi pengolahan dan peredaran hasil hutan (PPHH), pengembangan luasan penanaman HHBK (bambu, gaharu, kayu putih, kopi, porang dll), fasilitasi pemungutan PNBP dan PAD, dan meningkatkan sinergitas antara KPH.
Belum optimalnya pengelolaan cagar biosfer di Provinsi NTB karena belum ditetapkan lembaga pengelola cagar biosfer di Provinsi NTB	Membentuk lembaga pengelola cagar biosfer di Provinsi NTB sebagai tindak lanjut rencana aksi pengelolaan cagar biosfer dan KEE koridor penyu.
Maraknya Pembakaran hutan	Peningkatan pengawasan oleh KPH
Maraknya pencurian kayu di kawasan hutan	Koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya
Tingginya aktivitas masyarakat dalam Kawasan Hutan terutama disekitar lokasi RHL	Menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2019

5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berpindah menjadi kewenangan Provinsi, sementara urusan yang sebelumnya menjadi kewenangan Provinsi terkait sub urusan minyak dan gas serta pengawasan pertambangan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sejalan dengan perubahan kewenangan tersebut dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka sejak tahun 2017 urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB.

Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan langsung. berdasarkan isu tersebut, Fokus kebijakan ESDM selama periode 2019-2023 diikhtiarkan untuk menjawab isu strategis sebagai berikut.

1. Usaha pertambangan belum menerapkan *good mining practices*;
2. Masih adanya kegiatan pertambangan tanpa ijin;
3. Masih ada rumah tangga yang belum berlistrik secara mandiri;
4. Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;
5. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses terhadap air bersih terutama pada daerah-daerah yang berpotensi rawan kekeringan;
6. Pengendalian dan pemanfaatan air tanah sebagai upaya konservasi belum optimal;
7. Pemanfaatan keanekaragaman geologi bagi pengembangan Geopark belum optimal.

Guna menjawab isu strategis tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengikhtiarkan langkah-langkah yang sekiranya dapat mempercepat penyelesaian masalah-masalah tersebut melalui program dan kegiatan terobosan diantaranya:

- **Memenuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat Secara Berkelanjutan Melalui Peningkatan Rasio Eektrifikasi**

Meningkatkan rasio elektrifikasi yaitu dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik

baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN. Beberapa terobosan yang telah dan sedang dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Program 'Listrik Murah dan Hemat' yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik. Harapannya dengan sambungan listrik tersebut dapat masyarakat meningkatkan produktifitasnya dalam menggapai kesejahteraan;
2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya;
3. Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi yaitu dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber Energi Terbarukan sesuai dengan potensi energi alam setempat seperti : pembangunan Pembangit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral terkait dengan RPJMD 2019-2023 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi dan cakupan layanan air bersih sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 239 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2019 s/d 2023

No	Indikator Kinerja		Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	%	94,46	95,09	95,72	96,35	97,00
		Realisasi		99,55	-	-	-	-
		Capaian		105,39	-	-	-	-
2.	Cakupan Air Bersih	Target	KK	2.040	425	255	255	425
		Realisasi		2.125	-	-	-	-
		Capaian	%	104,17	-	-	-	-

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2019

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan prosentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100%. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2019. Angka rasio elektrifikasi yang dimkasud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN

Tabel 2. 240 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	RT PROVINSI/ KAB/KOTA	RT BERLISTRIK				JUMLAH TOTAL	RE Non PLN (%)	RE PLN (%)	RE (%)
			PLN	NON PLN / EBT	LTSHE (2017 dan 2019)	JUMLAH NON PLN				
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	9=7/3 *100	10=4/3 *100	11=8/3 *100
	PROV. NTB	1.437.027	1.411.998	15.871	2.709	18.580	1.430.578	1,29	98,26	99,55
1.	Kota Mataram	136.215	141.245	-	-	-	141.245	0,00	103,69	103,69
2.	Kab. Lombok Barat	199.109	193.065	2.134	321	2.455	195.520	1,23	96,96	98,20
3.	Kab. Lombok Tengah	288.373	283.138	2.311	50	2.361	285.499	0,82	98,18	99,00
4.	Kab. Lombok Timur	359.167	344.762	1.161	536	1.697	346.459	0,47	95,99	96,46
5.	Kab. Lombok Utara	62.435	65.276	2.681	537	3.218	68.494	5,15	104,55	109,70
6.	Kab. Sumbawa	121.535	127.330	823	657	1.480	128.810	1,22	104,77	105,99
7.	Kab. Sumbawa Barat	38.934	35.146	3.136	-	3.136	38.282	8,05	90,27	98,33
8.	Kota Bima	44.154	39.734	1.241	-	1.241	40.975	2,81	89,99	92,80
9.	Kab. Bima	124.505	114.399	76	340	416	114.815	0,33	91,88	92,22
10.	Kab. Dompu	62.600	67.903	2.308	268	2.576	70.479	4,12	108,47	112,59

Sumber : (1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2019 (diolah)

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2019

(3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31Desember 2019

Dari tabel diatas, sampai akhir tahun 2019 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 5.722.312 jiwa (1.430.578 KK) atau 99,55% dari Penduduk 5.748.108 jiwa (1.437.027 KK). Dengan kata lain masih ada sekitar 0,45% (25.796 jiwa atau 6.449 KK) penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. Namun demikian berdasarkan data Direktrat Jenderal Ketetangalistrikan Kementerian ESDM dan PT. PLN masih ada 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik belum secara mandiri, masih menyambung dari tetangga yang memiliki kWh meter. Dibutuhkan usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui sinergi Pemerintah dan Swasta melalui dalam meningkatkan kuantias dan kualitas listrik bagi masyarakat NTB.

Realisasi RE sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 99,55%, melampaui 5,09% dari target RE tahun 2019 sebesar 94,46% atau meningkat 0,63% dari tahun 2018 (93,83%) dengan capaian 105,39%. Target ini dicapai melalui layanan listrik konvensional PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Target peningkatan RE direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capain RE sebesar 99,55%, sebesar 98,26% diantaranya merupakan cakupan RE yang berasal dari PLN dengan menggunakan pembangkit konvensional (PLTU dan PLTD). Sedangkan sisanya sebanyak 1,29% berasal dari energi baru terbarukan yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu).

Untuk meningkatkan cakupan listrik dibutuhkan ketersediaan daya yang memadai dan jaringan yang luas. Usaha penyediaan listrik termasuk kedalam kriteria usaha yang padat teknologi dan padat modal, karenanya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi. PLN sebagai perusahan penyedia energi listrik jaringannya belum menjangkau semua wilayah Provinsi NTB karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Karenanya untuk melayani kebutuhan energi listrik pada daerah kepulauan dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN Pemerintah telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin dengan pembiayaan yang berasal dari APBN, Anggaran PLN, APBD, dan swasta melalui Independent Power Producer (IPP).

Dalam rangka mewujudkan visi dan pencapaian misi Gubernur dan Wakil Gubernur program dan mengungkit pencapaian indikator kinerja sasaran (IKK) yang menjadi tanggungjawab Dinas Energi dan sumberdaya mineral, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Program Unggulan yang dihajatkan untuk mengatasi permasalahan ditengah-tengah masyarakat. Program unggulan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral diantaranya adalah Nusa Terang Benderang, Air Bersih Untuk Semua, dan Geopark Dunia.

Program Unggulan Nusa Terang Benderang bertujuan untuk memberikan akses listrik kepada seluruh masyarakat NTB secara berkelanjutan dengan sasaran intervensi adalah masyarakat miskin yang belum mendapatkan akses listrik yang dihajatkan dalam rangka mengungkit indikator Rasio Elektrifikasi. Kondisi kelistrikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin membaik dari waktu ke waktu, hal ini didukung oleh Program 35.000 MW Pemerintah Pusat yang dilaksanakan melalui PT. PLN beserta mitra kerjanya. Pada akhir tahun 2018 Daya Mampu listrik Provinsi NTB sebesar 403 MW dengan Beban Puncak sebesar 325, pada akhir 2019 meningkat menjadi Daya Mampu 444,02 MW dengan Beban Puncak sebesar 338,01 MW. Kondisi pada awal RPJMD Tahun 2019-2023 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB pada akhir tahun 2018 sebesar 93,83% yang artinya masih terdapat 6,17% rumah tangga (85.940 rumah tangga) belum mendapatkan akses terhadap listrik. Untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi Dinas ESDM Provinsi NTB melaksanakan Program/kegiatan sebagai berikut:

1). Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, yang terdiri dari:
   a). Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 950 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi untuk Pulau Lombok sebanyak 700 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tersebar Pulau Lombok:
      - Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Mandalika 30 RTS;
      - Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Bertais 20 RTS;
      - Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Sekotong Tengah 50 RTS;
      - Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Sekotong Barat 50 RTS;

- Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan 50 RTS;
- Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Desa Mertak 50 RTS;
- Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, Desa Tumpak 80 RTS;
- Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat, Desa Pengenjek 80 RTS;
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Jerowaru, Desa Jerowaru 50 RTS;
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Jerowaru, Sekaroh 50 RTS; dan
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Danerase 75 RTS.
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Timur, Desa Surabaya 65 RTS.
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan, Desa Senaru 50 RTS.

Sedangkan alokasi penerima Rumah Tangga Sasaran untuk Pulau Sumbawa sebesar 250 RTS yang tersebar :

- Kota Bima, Kecamatan Asakota, Kelurahan Jatibaru 15 RTS;
- Kota Bima, Kecamatan Raba, Kelurahan Penaraga 5 RTS;
- Kabupaten Bima, Kecamatan Palibelo, Desa Ntonggu 30 RTS;
- Kabupaten Bima, Kecamatan Monta, Desa Tolouwi 30 RTS;
- Kabupaten Dompu, Kecamatan Pekat, Desa Pekat 30 RTS;
- Kabupaten Dompu, Kecamatan Pekat, Desa Kadindi 30 RTS;
- Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Lape, Desa Lape 30 RTS;
- Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Utan, Desa Pukat 30 RTS;
- Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang, Kelurahan Telaga Bertong 20 RTS;
- Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang, Desa Batu Putih 30 RTS.

Sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi 950 RTS (100%).

b). Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 20 unit yaitu di Kota Mataram 5 titik, Kabupaten Lombok Barat 3 titik, Kabupaten Lombok Tengah 2 titik, Kabupaten Lombok Timur 5 titik dan Kabupeten Lombok Utara 5 titik dengan rincian sebagai berikut:

- Kota Mataram, Kecamatan Ampenan, Kelurahan Banjar, Lingkungan Sintung, Jln. Dahlia 5 unit (satu lengan).

- Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batulayar, Desa Bengkaung, Dusun Bunian, Jalan Raya dengan 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batulayar, Desa Bengkaung, Dusun Pelolat, Pertigaan Jalan Raya Pelolat 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Batulayar, Desa Bengkaung, Dusun Pelolat, Jalan Raya Pelolat 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Batukliang Utara, Desa Aik Bukak, Dusun Baturengseng Daya, Embung Guleliat 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Batukliang Utara, Desa Teratak, Dusun Pediti 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sambelia, Desa Belanting, Dusun Pakendangan, Kampung Lalang 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sambelia, Desa Belanting, Dusun Pedamekan 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Desa Sembalun Timbagading, Dusun Dasan Bantek, Mushalla Baitussalah 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Desa Sembalun Timbagading, Pemakaman Umum 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Desa Sajang, Dusun Bawak Nao Daye, Pertigaan Pendakian 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sambalia, Desa Dadap, Dusun Tanjung 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan, Desa Senaru, Dusun Tumpangsari, Masjid Raudhatul Muslimin 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan, Desa Senaru, Dusun Tumpangsari, Mushalla Riadhusshalihin 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Kayangan, Desa Gumantar, Dusun Gumantar, Masjid Nurul Muttaqin 1 unit (dua lengan).
- Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Gangga, Desa Rempek, Dusun Sejuik, Pertigaan Pemakaman Umum 1 unit (dua lengan).

2). Pembangunan Digester Biogas 4 m3 sebanyak 2 unit pada yaitu di Desa Pesanggarahan Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur. Sampai akhir tahun 2019 terealisasi sebanyak 2 Unit (100%).

- **Dukungan Pemerintah Pusat dan Swasta (IPP) Dalam Penyediaan Energi Listrik**

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan urusan bidang ESDM cukup tinggi, seperti halnya untuk pengembangan ketenagalistrikan merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya investasi yang tinggi. Penyediaan tenagalistrik di Provinsi NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan layanan Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN.

Target peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan akhir Tahun 2019 direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan selain bersumber dari dana APBD, juga terdapat kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta melalui *Independent Power Producer* (IPP) melalui pembangunan pembangkit dan jaringan distribusi tenaga listrik.

Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui IPP. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari Pembangkit Listrik Tenga Surya Fotofoltaik, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait.

Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2021 dengan beberapa pembangkit diantaranya bersumber dari energi terbarukan seperti tenaga surya. Secara umum untuk kondisi penyediaan ketenagalistrikan yang bersumber dari listrik PLN untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019 telah terlayani dengan baik dimana hingga akhir tahun 2019 seluruh desa di NTB telah terlayani jaringan listrik PLN. Penyediaan tenaga lisrik oleh PT. PLN di Wilayah NTB dibagi menjadi 2 sistem penyediaan ketenagalistrikan yaitu Sistem Lombok dan Sistem Tambora dimana untuk neraca daya dari masing-masing sistem tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 241 Neraca Daya Sistem NTB

No	Sistem	Daya Mampu Pasok (MW)	Beban Puncak (MW)	Cadangan Daya (MW)
1.	Lombok	290,05	243,78	46,27
2.	Tambora	153,97	94,74	59,23
	JUMLAH	444,02	338,52	105,5

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2019

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, capaian Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2019 sebesar 99,55%, telah melampaui target Rasio Elektrifikasi sebesar 5,09% dari target yang telah ditetapkan sebesar 94,46%, sehingga capaianya sebesar 105,39%. Bencana gempa bumi yang terjadi di pulau Lombok dan pulau Sumbawa pada tahun 2018 yang lalu berdampak terhadap penurunan Rasio Elektrifikasi akibat rusaknya fasilitas penyediaan listrik baik di sisi pelanggan rumah tangga maupun pada sisi jaringan penyediaan listrik milik PT. PLN. Untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi RE selama kurun waktu tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 242 Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi NTB Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja		Sat	2017	2018	2019
Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	%	72,67	75,00	94,46
	Realisasi		85,10	93,83	99,55
	Capaian		117,10	125,11	105,39

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2019

- **Peningkatan cakupan Air Bersih Melalui Pemanfaatan Air Tanah**

Cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung, pada indikator ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pendukung strategis, bersama Perangkat Daerah yang lainnya seperti BPBD dan Dinas Sosial, sementara sebagai OPD utama pengelolanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Cakupan air bersih merupakan prosentase jumlah penduduk NTB yang dapat menikmati air bersih, angkanya diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih dibanding dengan jumlah seluruh penduduk NTB dikalikan 100%.

Sebagai upaya mendukung pencapaian cakupan air bersih di NTB, Dinas ESDM berkontribusi terhadap Program Unggulan Air Bersih untuk Semua yang bertujuan memberikan akses air bersih kepada seluruh masyarakat NTB secara berkelanjutan dengan sasaran intervensi adalah masyarakat yang tinggal di daerah berpotensi rawan kekeringan. Sampai dengan akhir tahun 2017 cakupan air bersih perkotaan sebesar 90,65% dan cakupan air bersih perdesaan sebesar 80,45%. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Dinas ESDM Provinsi NTB berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat melalui pemanfaatan air tanah bersama-sama dengan Perangkat Daerah lainnya terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih pada daerah-daerah yang berpotensi rawan kekeringan. Sejak tahun 2009-2019 melalui dana APBD telah dibangun 146 unit sumur bor yang dapat melayani 12.410 rumah tangga. Berdasarkan data BPBD Povinsi NTB pada tahun 2017 terdapat 318 desa berpotensi terdampak kekeringan yang memerlukan penanganan, salah satu diantaranya melalui pemanfaatan air tanah dengan membangun sumur bor.

Pada Tahun 2019 Dinas ESDM Provinsi NTB melalui Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah telah membangun 25 unit sumur bor di 7 Kabupaten/Kota masing-masing Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu. Pembangunan sumur bor yang direncanakan semula berjumlah 24 unit dapat terealisasi sebanyak 25 unit (104,17%). Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor dapat melayani kebutuhan air bersih bagi 85 KK/sumur bor, sehingga untuk 25 unit sumur bor dapat melayani air bersih bagi 2.125 KK, jumlah ini melampaui target Renstra dinas ESDM Tahun 2019-2023 sebanyaki 2.040 KK.

Lokasi pembangunan 25 unit sumur bor produksi berdasarkan usulan masyarakat di 7 Kabupaten/Kota tersebut adalah:

1. Kota Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kelurahan Salagalas, Lingkungan Nyangget 1 Unit;
2. Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Gunungsari, Desa Dopang 1 Unit;
3. Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Tanjung, Desa Sigar Penjalin 1 Unit;
4. Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Gangga, Desa Segara Katon 1 Unit;
5. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra, Desa Moyot 1 Unit;
6. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra, Desa Sakra 1 Unit;
7. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun, Desa Semablun Timba Gading 3 Unit;
8. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgasela, Desa Jurit 1 Unit;

9. Kabupaten Lombok Timur, KecamatanMasbagik, Desa Lendang Nangka 1 Unit;
10. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Selebung Ketanga, Dusun Montongsari 1 Unit;
11. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sakra Timur, Desa Menceh 1 Unit;
12. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya, Desa Pringgabaya 1 Unit;
13. Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Jereweh, Desa Belo 1 Unit;
14. Kabupaten Sumbawa Barat, Kecamatan Seteluk, Desa Meraran 1 Unit;
15. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Moyo Hulu, Desa Pernek, Universitas Teknologi Sumbawa 1 Unit;
16. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Utan, Desa Tengah 1 Unit;
17. Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Alas, Desa Juran Alas 1 Unit;
18. Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu, Desa O'o 1 Unit;
19. Kabupaten Dompu, Kecamatan Dompu, Kelurahan Kandai Satu 1 Unit;
20. Kabupaten Dompu, Kecamatan Woja, Kelurahan Simpasai 1 Unit;
21. Kabupaten Dompu, Kecamatan Manggalewa, Desa Lanci Jaya 1 Unit;
22. Kabupaten Dompu, Kecamatan Pajo, Desa Timba Lae 1 Unit;
23. Kota Bima, Kecamatan Asakota, Kelurahan Jati Baru 1 Unit.

- **Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Geopark**

Sejak tahun 2009 Dinas ESDM telah turut berperan aktif dalam pengambangan *Geopark* (taman bumi), yang diawali dengan *Geopark* Rinjani hingga diakui menjadi *Geopark* Nasional pada tahun 2013. Pada tahun 2018 Geopark Rinjani telah ditetapkan menjadi *Geopark* Internasional sebagai bagian dari *Global Geopark Network* (GGN). Selain *Geopark* Rinjani sebagai *Geopark* Internasional, dikembangkan juga *Geopark* Tambora yang wilayahnya meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dan pada tahun 2017 *Geopark* Tambora berhasil masuk dalam *Geopark* Nasional.

Provinsi NTB memiliki potensi keanekaragaman geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang dapat menggambarkan proses evolusi geologi. Dari potensi keanekaragam geologi yang ada, Provinsi NTB telah memiliki dua Geopark yaitu Geopark Rinjani sebagai Geopark Internasional dan Geopark Tambora sebagai Geopark Nasional. Melihat potensi tersebut maka ditetapkan **Geopark Dunia** sebagai salah satu program unggulan NTB yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekologi lingkungan hidup dengan sasaran untuk meningkatkan pengelolaan Geopark melalui perlindungan situs geologi.

Peran Dinas ESDM Provinsi NTB dalam pengembangan Geopark diantaranya terlibat langsung dalam penyusunan Dozier, melakukan

pengkajian keanekaragaman geologi, penentuan geosite (situs geologi), sosialisasi terhadap masyarakat melalui Geopark to School dan School to Geopark, pemasangan signboard, papan informasi geosite, papan penunjuk arah geosite, mengikuti seminar dan acara-acara Geopark baik skala regional, nasional maupun internasional, terakhir ikut berberan aktif dalam APGN ke 6 Tahun 2019 yang diselenggarakan dari 3-6 September 2019. Keseriusan dalam pengembangan Geopark di Provinsi NTB ditunjukkan dengan semakin meningkatnya anggaran dalam rangka mendukung pengembangan Geopark. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan sosialisasi terhadap 400 orang dengan sasaran siswa SLTA yang berada disekitar Geopark Rinjani dan Geopark Tambora melalui Geopark to School dan School to Geopark. Sosialisasi tersebut ditujukan untuk memberi pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai geopark serta sebagai salah satu cara untuk melindungi tujuh situs geologi yang ada pada kedua geopark.

Empat situs geologi yang berada pada Geopark Tambora :

- Situs geologi Doro Bente di Kabupaten Dompu;
- Situs geologi Doro Ncanga di Kabupaten Dompu;
- Situs geologi Padang Savana Piong di Kabupaten Bima;
- Situs geologi Mata Air Oi Tampuro di Kabupaten Bima.

Tiga situs geologi yang berada pada Geopark Rinjani :

- Situs geologi Charcoal Tanak Beak;
- Situs geologi Batubolong;
- Situs geologi Nipah.

- **Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Penerapan Good Mining Pratctice**

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,09% naik sebesar 0,41% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 11,68%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian untuk tahun 2019 menjadi penyumbang terbesar ketiga terhadap PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan peran penting sektor pertambangan minerba bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi NTB.

Di sisi lain masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu meningkatnya permintaan bahan galian terutama batuan karena meningkatnya jumlah penduduk, pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan perumahan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan

munculnya kegiatan penambangan baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pada Tahun 2019 Pemerintah Provisi NTB bersama DPRD Provinsi NTB telah membahas dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Perda tersebut telah ditetapkan pada bulan September 2019. Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan yaitu penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan, Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi pengusahaan mineral logam hingga tahun 2019 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuikan menjadi IUPK.

Terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keharusan industri pertambangan untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, Pemerintah Provinsi NTB melalui "Tim Percepatan Pembangunan Industri Pertambangan (Smelter) dan Industri Turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat" telah mendorong segera dibangunnya fasilitas smelter dan telah menetapkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kawasan industri smelter. Pemerintah Pusat melalui Kepala Badan koordinas Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM talah menerbitkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 442//IUP/PMDN/2019 tangal 30 Desember 2019 tentang IUP OP Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Mineral Logam Komoditas Tembaga kepada PT. AMMAN MINERAL INDUSTRI.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2019 sebanyak 358 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 28 IUP Mineral Logam, 4 IUP Mineral Bukan Logam, 326 IUP Batuan. Untuk IUP

Operasi Produksi Khusus (OPK) hingga akhir tahun 2019 terdapat 21 IUP yang terdiri dari 1 IUP Operasi Produksi Khusus Mineral Logam dan 20 IUP Operasi Produksi Khusus Batuan.

Tabel 2. 243 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2019

NO	ID KAB	PROVINSI	IUP & IPR													TOTAL JML IUP&IPR
			MINERAL LOGAM					MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN					
			EKSP	OP	OPK	IPR	JML	EKSP	OP	JML	EKSP	OP	OPK	IPR	JML	
1.	5200	PROV. NUSA TENGGARA BARAT														
2.	5201	LOBAR	0	3	0	0	3	0	0	0	2	31	2	0	35	38
3.	5202	LOTENG	0	0	0	0	0	1	0	1	3	28	1	0	32	33
4.	5203	LOTIM	0	1	0	0	1	0	0	0	22	111	9	0	142	143
5.	5204	SUMBAWA	1	5	0	0	6	0	0	0	11	31	2	0	44	50
6.	5205	DOMPU	0	2	1	7	10	0	0	0	6	14	1	0	21	31
7.	5206	KAB. BIMA	0	6	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	6	12
8.	5207	KSB	1	1	0	0	2	3	0	3	1	15	2	0	18	23
9.	5208	KLU	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	2	0	16	16
10.	5271	MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	5272	KOTA BIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	1	0	12	12
TOTAL			**2**	**18**	**1**	**7**	**28**	**4**	**0**	**4**	**50**	**256**	**20**	**0**	**326**	**358**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2019

Berdasarkan data BPS sampai dengan triwulan III tahun 2019 kontribusi sektor pertambangan melalui lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 12,09% naik sebesar 0,41% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 11,68%. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang ketiga terbesar terhadap PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan peran sangat penting sektor pertambangan minerba bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

Terkait penerimaan negara yang berasal dari Iuran Tetap Pemegang IUP Logam di Provinsi NTB untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2. 244 Rekapitulasi Piutang Negara dari Iuran Tetap (Landrent) Pemegang IUP Logam sampai dengan bulan Desember 2019

NO	KABUPATEN	JUMLAH IUP	PIUTANG PNBP POKOK		PIUTANG PNBP POKOK + DENDA	
			RUPIAH	DOLLAR	RUPIAH	DOLLAR
DAFTAR IUP EXISTING						

NO	KABUPATEN	JUMLAH IUP	PIUTANG PNBP POKOK		PIUTANG PNBP POKOK + DENDA	
			RUPIAH	DOLLAR	RUPIAH	DOLLAR
1.	Bima	2	336,494,520	307,483	542,889,262	549,779
2.	Dompu	2	15,593,328	55,475	17,131,910	126,045
3.	Sumbawa	6	4,376,178	117,610	16,829,334	265,785
4.	Sumbawa Barat	2	-	-	21,491,096	94,273
5.	Lombok Timur	1	-	-	-	4,779
6.	Lombok Barat	3	-	3,054	-	19,609
	JUMLAH	16	356,464,026	483,622	598,341,603	1,060,270

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2019

Eksploitasi sumber daya mineral dan batubara identik dengan degradasi fungsi lingkungan hidup. Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup lebih baik tanpa materi yang berasal dari bahan tambang. Industri pertambangan juga secara nyata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi NTB, namun di sisi lain banyak terjadi aktivitas penambangan skala kecil yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi masyarakat tetapi juga berdampak pada rusaknya lingkungan dan sumber daya lainnya. Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 yang membatasi usaha pertambangan serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai panduan untuk mengelola, membina dan mengawasi usaha pertambangan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar maka telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung hal tersebut diantaranya melalui kegiatan pendataan produksi usaha pertambangan, pengawasan usaha pertambangan dan kegiatan monitoring pengendalian usaha pertambangan mineral logam dan mineral bukan logam dan batuan. Program pengawasan pertambangan mineral dan batubara bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemegang izin usaha pertambangan terhadap ketentuan teknis, administrasi dan keuangan serta lingkungan pertambangan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi NTB melibatkan Inspektur Tambang yang merupakan pegawai Kementerian ESDM yang ditempatkan di Provinsi NTB untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan pemahaman dan penyadaran kepada penambang khususnya dalam meningkatkan kemampuan teknis agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

Masalah lain dalam bidang pertambangan mineral dan batubara adalah masih adanya kegiatan usaha pertambangan oleh masyarakat yang tidak memiliki izin. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk memberantas kegiatan pertambangan tanpa izin yang berakibat merusak lingkungan, untuk itu pada tahun 2019 telah diterbitkan Keputusan Gubernur NTB Nomor 540-554 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Terpadu Pencegahan dan Penyelesaian *Illegal Mining* di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diketuai oleh Kepala Kepolisian Daerah NTB dengan tugas sebagai berikut :

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhenti melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang berdampak pada kerusakan lingkungan;
2. Mengawasi peredaran bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dan melakukan tindakan tegas terhadap pengedar dan pengguna ilegal;
3. Melaksanakan tindakan tegas kepada masyarakat yang melanggar dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Energi dan Sumber Daya Mineral tersebutmasih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 245 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih ada sekitar 0,45% atau 6.449 rumah tangga penduduk NTB belum menikmati layanan listrik. Masih ada 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur dari tetangga.	a. Sejak tahun 2012 telah dilaksanakan pemasangan listrik murah dan hemat (listrik gratis) bagi masyarakat tidak mampu (miskin) melalui pembiayaan APBN dan APBD. Sampai dengan tahun 2019 telah dilakukan pemasangan listrik murah dan hemat sebanyak 25.227 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Kedepan, kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat akan terus dilaksanakan untuk menjangkau masyarakat miskin yang tidak mampu untuk memasang listrik secara mandiri,

PERMASALAHAN	SOLUSI
	kegiatan ini akan melibatkan Pemerintah Pusat dan CSR perusahaan swasta maupun BUMN. Kegiatan pemasangan listrik murah dan hemat secara berkesinambungan akan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi NTB; b. Untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau jaringan Listrik PLN, pemerintah berupaya membuka akses listrik dengan mengembangkan Energi Baru Terbarukan, dengan dukungan pembiayaan APBD, APBN maupun CSR perusahaan swasta dan BUMN; c. Terkait masih adanya 19.514 rumah tangga yang mendapatkan listrik dengan cara menyalur, akan dilakukan pendataan lebih rinci dengan melaibatkan Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT. PLN, BPS,Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mendapatkan data yang akurat dalam mengambil kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut.

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, Tahun 2019

6. Perdagangan

Capaian kinerja pembangunan daerah urusan pilihan bidang perdagangan diukur dengan indikator kinerja daerah: Pengeluaran Perkapita, dengan capaian tahun 2019 sebagaimana pada uraian berikut.

Tabel 2. 246 Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi
Pengeluaran Perkapita	Rp. (000)	9,877	10,284	9,956	10,640

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Hingga saat ini IPM masih menjadi salah satu alat ukur pembangunan yang digunakan dalam target pembangunan pemerintah. IPM juga masih dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI, dan bahkan menjadi salah satu dasar alokator dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mengukur pembangunan kualitas hidup manusia yang dituangkan dalam tiga pendekatan dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, Pengetahuan dan dimensi Penghidupan yang layak. Dimensi Umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Adapun Dimensi Penghidupan Layak didekati melalui indikator Pengeluaran Per Kapita.

Menggambarkan kualitas kehidupan manusia dari sisi ekonomi, standar hidup layak diindikasikan oleh komponen Pengeluaran per Kapita disesuaikan (harga konstan 2012). Pengeluaran per kapita masyarakat NTB pada tahun 2019 telah mencapai Rp 10,64 juta per tahun. Dengan kata lain, setiap bulannya penduduk NTB mengeluarkan sekitar Rp.887 ribu per orang pada tahun 2019. Dalam kurun waktu 2010 hingga 2019 terjadi peningkatan Pengeluaran per Kapita sebanyak Rp.1,933 juta. Dalam periode yang sama, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi NTB mencapai 2,26% per tahun. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk NTB meningkat sebanyak Rp.356 ribu, atau kurang lebih meningkat sebesar Rp.30 ribu per orang per bulannya dalam setahun terakhir.

Gambar 2. 26 Pengeluaran per Kapita Provinsi NTB Tahun 2017-2019 (Rp.000)

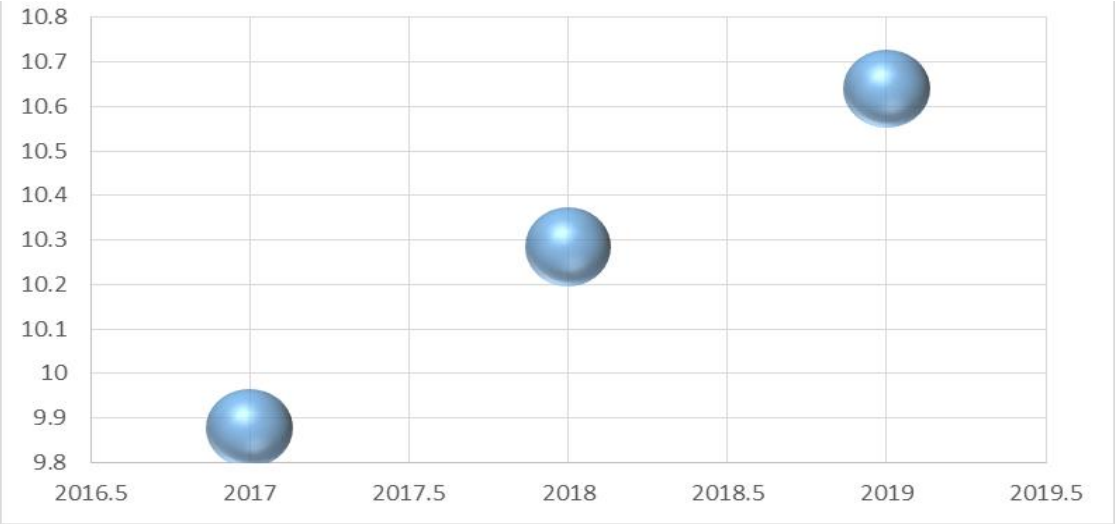

Sumber: BPS NTB, 2019

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan me menuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD-1995) adalah survey untuk mengetahui komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kalori per kapita sebanyak 2.100 kalori/hari. Survei ini dijadikan oleh BPS dalam mengukur garis kemiskinan. Komoditas yang menjadi acuan dalam menentukan pengeluaran perkapita tersebut adalah beras lokal, tepung terigu, ketela pohon, ikan tongkol/tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam kampung, telur ayam, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk,

papaya, kelapa, gula pasir, kopi bubuk, garam, merica/lada, mi instant, rokok kretek/filter, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah.

Selama periode 2010-2019 terjadi peningkatan pengeluaran per kapita sebanyak Rp.1,328 juta, dengan rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran per kapita Provinsi NTB mencapai 1,8% per tahun. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2018, pengeluaran per kapita penduduk NTB meningkat sebanyak Rp.356 ribu.

Inflasi berdasarkan hasil pemantauan pada bulan Desember 2019 Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,36%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 136,00 pada bulan Nopember 2019 menjadi 136,49 pada bulan Desember 2019. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi NTB tahun kalender (Desember 2019 terhadap Desember 2018) mencapai 1,87% dan laju inflasi tahun ke tahun (Desember 2019 terhadap Desember 2018) mencapai 1,87% dari target ≤3-4%, hal ini menunjukkan capaian yang sudah memenuhi target.

Lima Komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi di bulan Desember 2019 antara lain Tomat, Sayur, Bawang Merah, Angkutan Udara, Bandeng/bolu, dan Telur Ayam Ras. Selain lima komoditas yang mengalami kenaikan ada juga lima komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Daging ayam ras, semen, batu bata/batu tela, Tongkol Pindang dan tongkol ambu-ambu.

Komoditas sebagai penyumbang inflasi di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 247 Inflasi Dari Sumbangan Kelompok Bahan Makanan Tahun 2019

Komoditas	Inflasi	Sumbangan
Bahan Makanan	**1,61**	**0,3840**
Padi-padian, Umbi-Umbian dan Hasilnya	0,08	0,0039
Daging dan Hasil-hasilnya	- 2,45	- 0,0731
Ikan Segar	0,01	0,0122
Ikan diawetkan	- 1,93	- 0,0162
Telur, Susu dan Hasil-hasilnya	1,09	0,0185
Sayur-sayuran	19,94	0,3614
Kacang-kacangan	0,23	0,0031
Buah-buahan	- 0,83	- 0,0200
Bumbu-bumbuan	4,93	0,0846
Lemak dan minyak	0,97	0,0098

Bahan Makanan Lainnya	- 0,24	- 0,0001

Sumber Data : BPS Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 248 Inflasi Dari Sumbangan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Tahun 2019

Komoditas	Inflasi	Sumbangan
Makanan jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	***0,04***	***0,0077***
Makanan Jadi	0,01	0,0007
Minuman yang tidak beralkohor	0,00	0,0001
Tembakau dan Minuman Beralkohol	0,11	0,0070

Sumber Data : BPS Provinsi NTB, 2019

Adapun Sasaran Strategis dan Jangka Menengah Dinas Perdagangan dijelaskan sebagai berikut:

1. Stabilisasi Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis

Sasaran Stabiliasasi Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Indiktor dari Sasaran Stabilisasi stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis adalah Persentase Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis dengan target kinerja 100% setiap tahunnya yang datanya merupakan hasil dari perhitungan Jumlah Stok Awal Tahun dibagi dengan Jumlah Stok Akhir Tahun dimana untuk tahun 2019 Provinsi NTB tidak pernah mengalami kelangkaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis (100%) yang dapat dilihat dari pemantauan yang dilakukan Dinas Perdagangan Provinsi NTB setiap hari di pasar, selain dengan metode perhitungan tersebut ada metode lain yang digunakan untuk menghitung Persentase Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis yaitu ada dua metode/ukuran sebagai berikut :

a. Perputaran Persediaan (*Inventory Turnover*) yaitu mengukur hubungan antara volume barang terjual dengan jumlah persediaan selama periode tertentu;
b. Jumlah Hari Penjualan dalam Persediaan (*Number Of Days Sales In Inventory*).

Indikator Persentase Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis merupakan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan

perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perdagangan 2019-2023 dan merupakan turunan dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Untuk Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan dengan kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan dengan Indikator kegiatan jumlah bantuan mesin dan peralatan bagi pedagang kakilima dan asongan yang ditargetkan 17 jenis mesin/peralatan. Adapun Outcome dari Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan adalah Persentase Peningkatan Pedagang Kakilima dan Usaha Informal yang memperoleh Peralatan Perdagangan, dengan target kinerja 15,38% di tahun 2019. Untuk menghitung Indikator Program ini ada dengan formulasi Jumlah Pedagang Kaki lima yang memperoleh Peralatan Perdagangan Tahun Hitung dibagi Total Pedagang Kaki lima Tahun Dasar kemudian dikali 100%.

Kegiatan penataan tempat bagi padagang kakilima dan asongan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan serta peran serta pedagang kaki lima dan asongan dalam rangka mewujudkan peningkatan ekonomi pada sektor perdagangan sekaligus dapat memberikan konstribusi dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan serta dapat menciptakan wira usaha baru dengan harapan dapat memperluas lapangan pekerjaan di NTB.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program kegiatan tersebut maka Dinas Perdagangan Provinsi NTB memberikan Bantuan mesin dan peralatan yang diperuntukan untuk kelompok usaha masyarakat maupun bagi pedagang kakilima dan asongan, jenis mesin peralatan dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Lapak Pasar Dasan Agung Mataram;
b. Pertamini;
c. Kendaraan Roda 3;
d. Gerobak Usaha;
e. Gerobak Dorong;
f. Paket Sembako;
g. Tenda Jualan.

Untuk melaksanakan program penataan tempat bagi pedagang kakilima dan asongan Dinas Perdagangan pada tahun 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.785.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan 94,43%. Sedangkan untuk realisasi capaian program terjadi peningkatan 12,77%, dimana di tahun 2018 terdapat 368 kelompok yang diberikan bantuan sedangkan di 2019 terdapat 415

kelompok dengan target peningkatan 15,38% di tahun 2019 sehingga capaian kinerja sebesar 83%.

Selama tahun 2019 terdapat bantuan mesin dan peralatan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan maupun yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui dana aspirasi kepada pedagang kakilima dan asongan yang terbentuk dalam kelompok usaha masyarakat se-NTB sebagai bentuk sumbangsih keikutsertaan dalam meningkatkan usaha informal yang ada di NTB serta dalam rangka mendukung program kerja Gubernur NTB dari segi penurunan angka kemiskinan sehingga pada akhirnya mampu menciptakan peningkatan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik untuk kedepan bagi masyarakat NTB.

Jenis dan jumlah mesin peralatan yang diberikan kepada kelompok usaha masyarakat selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 249 Rekapitulasi Mesin Peralatan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Masyarakat Tahun 2019 (Bantuan OPD)

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total	Jumlah Kelompok Penerima
1.	Lapak Pasar	5	Unit	25.000.000	25.000.000	5 Kelompok
2.	Pertamini	2	Unit	10.000.000	20.000.000	2 Kelompok
3.	Roda Tiga	5	Unit	30.000.000	150.000.000	5 Kelompok
4.	Gerobak Usaha	10	Unit	8.000.000	80.000.000	10 Kelompok
5.	Gerobak Dorong	20	Unit	5.000.000	100.000.000	20 Kelompok
6.	Tenda Jualan	10	Unit	7.500.000	7.500.000	10 Kelompok

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 250 Rekapitulasi Mesin Peralatan yang diberikan kepada Kelompok Usaha Masyarakat Tahun 2018 (Bantuan OPD)

No	Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total	Jumlah Kelompok Penerima
1.	Lapak Dagang	4	Paket	25.000.000	100.000.000	4 Kelompok
2.	Lapak Kuliner	1	Paket	20.000.000	20.000.000	1 Kelompok
3.	Gerobak Dagang	9	Unit	8.000.000	24.000.000	9 Kelompok

4.	Gerobak Usaha	2	Unit	10.000.000	20.000.000	2 Kelompok
5.	Roda 3	5	Unit	10.000.000	50.000.000	1 kelompok
6.	Terop	5	Unit	10.000.000	50.000.000	4 Kelompok

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

2. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Strategis

Sasaran Stabiliasasi Harga Barang Kebutuhan Pokok merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Indikator dari Sasaran Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) yang datanya merupakan hasil dari rilis ataupun hasil dari olahan BPS Provinsi NTB, indikator tersebut masuk dalam tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Perdagangan 2019-2023 dan merupakan turunan dari RPJMD Provinsi NTB 2019-2023.

Pencapaian sasaran dan indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. Adapun Outcome dari Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan adalah Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah, dengan target kinerja ≤6% di tahun 2019.

Adapun target dari Indikator Sasaran Indeks Harga Konsumen yang kemudian disingkat IHK untuk tahun 2019 adalah 135. Nilai IHK dipengaruhi oleh tingkat inflasi, pada bulan Desember 2019, NTB mengalami inflasi 0,36%, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 136,00 pada bulan Nopember 2019 menjadi 136,49 pada bulan Desember 2019. Angka inflasi ini berada diatas angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 0,34%.

Untuk wilayah NTB, Kota Mataram mengalami inflasi sebesar 0,21% sedangkan untuk Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,95%. Inflasi NTB bulan Desember 2019 sebesar 0,36% terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukan dengan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,61%; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,55%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,04% dan kelompok pendidikan dan rekreasi dan olahraga sebesar 0,00%. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,38%; kelompok sandang sebesar 0,14% dan kelompok kesehatan sebesar 0,01%.

Dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang strategis Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB mengadakan pasar murah dan Operasi Pasar dibeberapa tempat di wilayah NTB yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok barang kebutuhan dan untuk menjaga stabilitas harga, pasar murah yang dilaksanakan tersebut sangat membantu masyarakat terutama masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Upaya tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok sehingga dapat menghindari kesenjangan sosial terutama segi ekonomi dalam kehidupan masyarakat di NTB.

Pemilihan kebijakan perlu memperhatikan pada karakteristik yang dimiliki oleh setiap komoditi dan kebijakan juga diimbangi dengan pengendalian produksi dan pengelolaan stok. Berdasarkan pendekatan fundamental dan harga dapat ditentukan jenis kebijakan harga pada komoditi Bapok, yaitu:

a. Kebijakan harga pembelian pemerintah dapat diterapkan pada gula dan beras;
b. Penetapan harga eceran tertinggi dapat diterapkan pada komoditi beras, gula dan minyak goreng; dan
c. Kebijakan harga acuan dapat diterapkan pada komoditi cabe dan bawang dengan memperbaiki manajemen produksi dan masa pasca panen.

Adapun komoditi barang kebutuhan pokok dan penting yang menjadi target pengukuran indikator sasaran ini adalah 22 (Duapuluh dua) komoditi barang kebutuhan pokok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 251 Barang Kebutuhan Pokok yang menjadi Tolok Ukur Stabilitas Harga

No	Nama Bahan Pokok	No	Nama Bahan Pokok
1.	Beras	12.	Tepung Terigu
2.	Gula Pasir	13.	Kacang Kedelai
3.	Minyak Goreng	14.	Cabe Merah
4.	Daging Sapi	15.	Cabe Rawit
5.	Daging Ayam	16.	Bawang Merah
6.	Telur	17.	Bawang Putih
7.	Susu Bubuk	18.	Ikan Laut Kembang
8.	Jagung Pipilan Kering	19.	Ikan Asin Teri
9.	Ikan Segar	20.	Mie Instan Kari Ayam

10.	Garam Beryodium	21.	Kacang Tanah
11.	Kacang Hijau	22.	Ketela Pohon

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 252 Barang Penting yang menjadi Tolok Ukur Stabilitas Harga

No	Nama Bahan Pokok	No	Nama Bahan Pokok
1.	Semen	6.	Paku
2.	Besi Beton	7.	Pupuk Non Subsidi
3.	Triplek	8.	Gas Elpiji 3 Kg
4.	Kayu Balok	9.	Baja Ringan
5.	Kayu Papan	10.	Komoditi Lainnya yang dianggap strategis oleh daerah setempay

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Selama periode RPJMD 2019-2023 yang berlangsung selama 5 tahun, Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam upaya penurunan angka kemiskinan, menjaga stabilitas harga, serta mengejar pertumbuhan ekonomi di NTB telah berupaya dengan kemampuan dukungan sumberdaya baik secara dukungan anggaran maupun dukungan SDM yang kemudian di implementasikan ke dalam program kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator RPJMD 2019-2023 melalui urusan bidang perdagangan dengan indikator kinerja utama pengeluaran perkapita dan inflasi. Berdasarkan tujuan-tujuan yang akan dicapai tersebut salah satunya diwujudkan Dinas Perdagangan Provinsi NTB ke dalam kegiatan Operasi Pasar yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan sekaligus dapat menciptakan stabilitas harga di NTB.

Pada awal tahun 2019 Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga kestabilan harga agar mencapai inflasi yang lebih rendah dari angka/standar inflasi nasional maka Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB melakukan berbagai upaya diantaranya menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif dan keterjangkauan harga sebagaimana yang sudah termaktub dalam Roadmap TPID Provinsi NTB Tahun 2019-2021. Selain itu TPID NTB di tahun 2019 memperoleh penghargaan nasional sebagai TPID berprestasi untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dimana penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI.

Dalam program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri selain kegiatan pemantauan Barang Pokok dan Penting serta Barang Strategis baik untuk perdagangan dalam daerah dan antar pulau yang rutin dilakukan Dinas Perdagangan Provinsi NTB, dalam program ini juga terdapat Kegiatan Pasar murah yang merupakan kegiatan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga distributor dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan pada saat menjelang Hari Besar keagamaan Nasional (HBKN) yang bertujuan untuk memberikan kestabilan harga dan menjamin ketersediaan stok barang kebutuhan pokok untuk masyarakat, selama tahun 2019 Dinas Perdagangan menyelenggarakan pasar murah sebanyak 15 (lima belas) kali dan dilaksanakan di pulau Sumbawa sebanyak 7 (tujuh) kali serta dilaksanakan di Pulau Lombok sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan untuk pelaksanaan pasar murah yang bersumber dari dana APBN/Dekonsentrasi sebanyak 10 (sepuluh) kali yang hanya dilaksanakan di Pulau Lombok saja. Pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 253 Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah Tahun 2019

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi/Tempat kegiatan	Sumber Dana
1.	25 Maret 2019	Lapangan merdeka bima	APBD
2.	28 Maret 2019	Desa selat narmada lobar	APBD
3.	29 Maret 2019	Selagas kota mataram	APBD
4.	22 April 2019	Bintaro ampenan kota Mataram	APBN
5.	23 April 2019	Kembang kerang lotim	APBD
6.	29 April 2019	Karang pule kota Mataram	APBN
7.	2 Mei 2019	Sumbawa	APBD
8.	2 Mei 2019	Karang genteng pagutan	APBN
9.	18 Mei 2019	Sesele kab.lombok barat	APBN
10.	23 Mei 2019	Lapangan merdeka kota bima	APBD
11.	29 Juni 2019	Lap.merdeka bima	APBD
12.	19 Juli 2019	Hal.kr.kubu cakra	APBN
13.	30 Juli 2019	Kr.medain	APBN
14.	10 Agustus 2019	Utan Sumbawa	APBD
15.	6 September 2019	Kekalik Jaya	APBD
16.	14 Oktober 2019	Bonder Lombok Tengah	APBN
17.	5 November 2019	Kekalik Jaya	APBN

No	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi/Tempat kegiatan	Sumber Dana
18.	6 November 2019	Karang Pule	APBD
19.	7 November 2019	Monjok	APBD
20.	11 November 2019	Kebun Sari	APBD
21.	13 November 2019	Karang Geteng Pagutan	APBD
22.	21 November 2019	Tembelok Kota Mataram	APBN
23.	3 Desember 2019	Sumbawa	APBD
24.	10 Desember 2019	KSB	APBD
25.	21 Desember 2019	Kampus Unram Ekonomi	APBN

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Pada awal tahun 2019 menurut pantauan Dinas Perdagangan Provinsi NTB harga bahan pokok di NTB masih terpantau stabil sepeti bahan pokok Beras, Minyak Goreng, Ikan dan Daging meskipun ada komoditas lain yang naik namun harganya masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain dari program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, terdapat 4 program lainnya sebagai pendukung dari capaian sasaran jangka menengah ini dengan penjabaran capaian sebagai berikut.

A. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator lemahnya kedudukan konsumen, yaitu:

1. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap suatu produk;
2. Lemahnya pengetahuan tentang proses produksi;
3. Lemahnya kemampuan tawar-menawar (*bargaining power*).

Capaian sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Tertib Niaga oleh Dinas Perdagangan diatas didukung oleh *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan* yaitu dengan menghitung *persentase* dari Cakupan Perlindungan Konsumen dan Pengawan Tertib Niaga. Sasaran ini dicapai oleh Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dengan Indikator Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen, Tahun 2019 target indicator ini adalah 70 persen.

Akhir Tahun 2019 Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui BPSK telah berhasil menyelesaikan kasus pengaduan konsumen sebanyak 29 Kasus dari target 70% sesuai dengan target dalam lampiran Renstra Dinas Perdagangan Tahun 2019-2023, apabila dibandingkan dengan Pencapaian Penyelesain Kasus Pegaduan Konsumen tahun 2018 sebanyak 36 Kasus maka akan terlihat pengurangan kasus pegaduan konsumen di tahun 2018 sebanyak 29 kasus atau sekitar 19,44% dari jumlah kasus yang masuk ditahun 2019.

Sejak kurun waktu tahun 2015 sampai akhir tahun 2019, jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh BPSK sebanyak 221 kasus dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 254 Jumlah Kasus dan Metode Penyelesaian oleh BPSK Provnsi NTB Tahun 2015-2019

No	Periode Terjadinya (Tahun)	Jumlah Kasus yang diselesaikan (Kasus)	Metode Penyelesaian Kasus		
			Konsiliasi	Mediasi	Arbitrase
1.	2015	31	-	30	1
2.	2016	32	-	28	4
3.	2017	31	1	30	-
4.	2018	25	-	21	4
5.	2019	29	4	23	2
	JUMLAH	**148 Kasus**	**5 Kasus**	**132 Kasus**	**11 Kasus**

Sumber : BPSK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

Salah satu produk rill dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen (BPSK) adalah dengan terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan yang merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara eksklusif dibidang perlindungan konsumen dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai dasar proses penyelesaiannya. BPSK diharapkan dapat mempermudah, mepercepat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar/diluar koridor hukum yang berlaku. Selain BPSK dapat menjadi akses informasi serta jaminan perlindungan hukum yang sama bagi konsumen dan pelaku usaha.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen telah dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang standarisasi, sosialisasi kewajiban pencantuman label

pada barang, sosialiasi undang-undang perlindungan konsumen dan Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Tujuan Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Konsumen antara lain:

1. Memberikan informasi secara langsung kepada siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswa dan masyarakat umum mengenai Peran Dinas Perdagangan sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang memfasilitasi Pengaduan Kosumen terhadap penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Menyebarluaskan informasi kepada siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi dan masyarakat umum mengenai alur pengaduan konsumen, alur penyelesaian sengketa konsumen, dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sampai dengan bulan Desember tahun 2019 terjadi pengaduan konsumen sebanyak 29 kasus yang masuk melalui BPSK Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa.

Selain melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Juga Melaksanakan Pengawasan Tertib Niaga melalui Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga dengan metode sampling dan kunjungan lapangan ke lokasi pusat distribusi, pengecer / retail toko, warung, supermarket, hypermarket dan pasar tradisional, dengan obyek produk pangan maupun non pangan dengan aspek pengawasan meliputi masa kadaluarsa, persayaratan kemasan, kualitas produk, harga, Kode SNI, penggunaan bahasa Indonesia, masa garansi dan lain-lain.

Tujuan kegiatan pengawasan peredaran barang dan jasa ini sebagai berikut:

- Memberikan perlindungan kepada konsumen
- Menegakkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- Mewujudkan pelaku usaha menjadi lebih professional dan berdaya saing
- Mewujudkan barang dan atau jasa yang beredar dipasaran berkualitas dan harga yang kompetitif
- Mewujudkan iklim berusaha yang sehat dan berdaya saing
- Meningkatkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha

Adapun lokus pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan pada pusat-pusat perdagangan kabupaten/kota se-NTB. Berdasarkan pelaksanaan pengawasan di lapangan terhadap baik kegiatan pengawasan rutin maupun pengawasan terhadap kasus-kasus yang berkembang di masyarakat dan media masa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 255 Sasaran, Lokasi dan Jenis Pengawasan Barang dan Jasa

Sasaran	Jumlah Lokasi	Jenis Pengawasan dan Hasil
Distributor Bahan Pokok	8 Distributor	- Stok ketersediaan bahan pokok menjelang/memasuki hari besar keagamaan - Harga bahan pokok - Ketersediaan dan harga bahan pokok relative mencukupi dan stabil
Pasar Tradisional	1 Pasar Induk 12 Psr Tradisional	- Ketersediaan bahan pangan pokok - Tingkat harga di pengecer - Tingkat hygienitas bahan pangan - Ketersediaan bahan pangan pokok mencukupi untuk 4 bulan ke depan dengan harga relative stabil / wajar sedangkan tingkat hygeinitas bahan pangan sebagian masih ada ditemukan bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti penggunaan zat pewarna dan boraks.
Toko Modern, Toko, Kios	45 Toko	- Jenis produk - Sistim pelabelan kemasan - Harga - Kondisi produk - Beberapa jenis produk makanan tidak memiliki kemasan yang baik, informasi dalam kemasan tidak lengkap, kemasan sudah ada yang rusak - Kondisi produk ada yang rusak dan menjelang atau melewati masa kadaluarsa
Supermarket	4 Supermarket	- Jenis produk - Sistim pelabelan kemasan - Harga - Kondisi produk - Beberapa jenis produk makanan tidak memiliki kemasan yang baik, informasi dalam kemasan tidak lengkap, kemasan sudah ada yang rusak

Sasaran	Jumlah Lokasi	Jenis Pengawasan dan Hasil
		- Kondisi produk ada yang rusak dan menjelang atau melewati masa kadaluarsa

Sumber Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Tim Terpadu, secara umum permasalahan yang sering di temukan adalah sebagai berikut :

a. Produk yang beredar menjelang masa dan atau kadaluwarsa;
b. Produk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa;
c. Kemasan rusak;
d. Kemasan Produk tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Tulisan Kadaluarsa tidak jelas;
f. Banyak Pengguna Tanda SNI Tempelan;
g. Produk wajib SNI tetapi tidak ada tanda SNI pada produk;
h. Harga di etalase berbeda dengan harga di kasir;
i. Legalitas perusahaan.

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Bidang Pengawasan dan Tertib Niaga selama Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 256 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kota Mataram

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat	Produk BJTB	Hasil Pengawasan
1.	Toko Lancar Bangunan	Sudianto	Jl. TGH Faisal Sweta	Merk : HIJ Jenis : PB 8	Sesuai SNI
2.	Toko Sidodadi Manunggal Jaya	Suradianto	Jl. TGH Faisal No. 26 Sweta	Merk : HIJ Jenis : PB 10	Sesuai SNI
3.	PT. Kokoh Mandiri	Anthony Wardhana	Jl. TGH Faisal Sweta	Merk : HIJ Jenis : PB 12	Sesuai SNI

Sumber Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 257 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kota Mataram

No	Pelaku Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Kepemilikan Legalitas	Hasil Pengawasan
1	CV. Tanpa Nama	Ketut Sumartha	Jl. Brawijaya No. 1-5 RT.001 RW. 01 Lingk. Gerung Butun Timur Mandalika Sandubaya Mataram	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP /Label TDP : 23.07.3.47.03224 TDG : 13.R/DPMPTSP/IV /2018 SIUP : 23-07/DPMPTSP/2011-10/1197	Sesuai Ketentuan
2	CV. Tanpa Nama	Ketut Sumartha	Jl. Brawijaya No. 1-5 RT.001 RW. 01 Lingk. Gerung Butun Timur Mandalika Sandubaya Mataram	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP /Label TDP : 23.07.3.47.03224 TDG : 13.R/DPMPTSP/IV /2018 SIUP : 23-07/DPMPTSP/2011-10/1197 SIUP-MB : 4/SIPT/SUBDIS-MB/07/2018 (Sub Distributor)	Sesuai Ketentuan
3	PT. Trans Retail Indonesia Cabang Transmart Selaparang	Rudi Sutrisno	Jl. Selaparang LK. Sweta Timur Kel. Mayura Kecamatan Cakranegara Mataram	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP /Label SITU Penjualan Minuman Beralkohol : 530.09/0007/DPMPTSP/IX/2018 SKP-A : 7/SIPT/SKP-A/07/2017	Sesuai Ketentuan

Sumber Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 258 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kabupaten Lombok Barat

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat	Produk BJTB	Hasil Pengawasan
1	Jaya Baru	Imelda nike Sari	Jl. Pariwisata No. 10 Montong	Merk : HIJ Jenis : PB 8	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 8 mm
2	UD. Wali Barokah	Hj. Saniah	Jl Raya Montong Senggigi	Merk : HIJ Jenis : PB 10	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 10 mm
3	Toko Perdana Sukses Mandiri	Amirah	Jl. Raya Tanjung Gunung Sari	Merk : HIJ Jenis : PB 12	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 12 mm

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 259 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kabupaten Lombok Barat

No	Pelaku Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Kepemilikan Legalitas	Hasil Pengawasan
1	PT. Indomarco Adi Prima	Moh Nurudin Yuwono S	Jl. TGH Lopan Nomor 234 Dusun Labuapi Utara Desa Labuapi Kecamatan Labuapi	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label Laporan TDPUD : 219/SIPT/TDPUD/11/2018 SITU : 503.B3/1284/SITU/BPMP2T-LB/X/2015 TDG : 503.B3/048/TDG/DPM-PTSP-LB/V/2017	Legalitas lengkap Distributor sembako Menjual mie instan, makanan bayi dan susu
2	PT. Pratama Artha Nusa	I Putu Budi Utama	PT Pratama Artha Nusa Jl. Raya Senggigi Kec. Batu Layar	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label TDP : 23.04.1.46.00920 TDG : 503.B3/062/TDG/DPM-PTSP-LB/I/2019 SIUP : 503.B3/0454/PM/DPM-PTSP-LB/I/2019 SIUP-MB : 57/SIPT/SUBDIS-MB/04/2019 (Sub Distributor)	Legalitas lengkap Sub distributor minuman beralkohol
3	PT. Suli Internusa Prima	Ida Bagus Alit Narendra, SE	Jl. Raya Senggigi Kelurahan Senteluk Kecamatan Batulayar	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label Laporan TDP: 23.04.1.46.00912 TDG: 503.B3/058/TDG	Legalitas lengkap Ditributor minuman beralkohol

No	Pelaku Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Kepemilikan Legalitas	Hasil Pengawasan
				/DPM-PTSP-LB/VI/2018 SIUP: 503.B3/0435/PM /DPM-PTSP-LB/V/2018 SIUP-MB : 14/SIPT/DIS-MB/08/2018	

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 260 Hasil Pegawasan Barang Beredar di Kabupaten Lombok Tengah

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Alamat	Produk BJTB	Hasil Pengawasan
1	Al Irsyad 2	Husni	Jl. Srigangga Makam Tiwugalih Praya	Merk: HIJ Jenis: PB 8	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 10 mm
2	PT. Sungai Mas Cemerlang	Babgkit Sanjaya	Jl. Anyelir Praya	Merk : HIJ Jenis : PB 10	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 10 mm
3	Toko Kunci Pelita	Rudi Cahyadi	Jl. Jenderal Sudirman No. 100 Praya	Merk : HIJ Jenis : PB 12	Pada pengamatan kasat mata tercantum tanda

					SNI dan ukuran. Panjang juga sesuai yaitu 12 m. Diameter 12 mm

Sumber Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 261 Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan di Kabupaten Lombok Tengah

No	Pelaku Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Kepemilikan Legalitas	Hasil Pengawasan
1	MM Haikar Jaya	Herman Wibawa, S.Si	Lingkungan Tenganan Kelurahan Gonjak Praya	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP /Label Laporan TDPUD : 23.05.5.47.0289 SIUP: 503.14.2/1900/2016 HO: 503.20/1900/2016 SITU : 503.16/1900/2016	Legalitas lengkap Minimarket yang menjual sembako dan barang kebutuhan sehari-hari
2	CV. Matahari	Suyanto	Jl. Jenderal Sudirman Nomor 88 Praya	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/ Label Laporan TDP: 23.05.3.47.0047 TDG: 503.8/08/PRB/2014 SIUP: 503.4.2/223/PRB/2014	Legalitas lengkap Minimarket yang menjual sembako dan barang kebutuhan sehari-hari
3	CV. Lion Mart	David Rianto	Jl. Jenderal Sudirman Lingk Meteng Kelurahan	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/ Label Laporan TDP: 23.05.3.47.0130	Legalitas lengkap Minimarket yang menjual sembako dan barang

No	Pelaku Usaha	Nama Pemilik	Alamat	Kepemilikan Legalitas	Hasil Pengawasan
			Prapen Praya ungan	HO: 503.3.2/603/2015 SIUP: 503.4.2/502/PRB/2015	kebutuhan sehari-hari

Sumber Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

B. Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB tahun 2019 tercatat sebanyak 23 (Dua puluh tiga) negara dari target dalam RPJMD sebanyak 21 Negara, hal ini berarti ada peningkatan 2 negara sebagai tujuan ekspor dari target yang telah ditentukan dengan nilai ekspor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 262 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019

NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPORT (US $)	BOBOT (%)
Jepang	38.471.858,26	7,19
Philipina	84.020.010,10	45,97
Korea Selatan	26.174.772,04	14,29
Cina	54.189.616,38	29,53
Australia	1.444.542,09	0,79
USA	5.332.984,08	1,78
Malaysia	33.646,34	0,26
Thailand	5.883,372	0,04
15 (limabelas) negara lainnya	215.889,73	0,15
Total Ekspor	**209.889.202,39**	**100,00**

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Terdapat sebanyak 5 (Lima) pelabuhan muat yang digunakan sebagai sarana ekspor produk NTB tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 263 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2019

PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPORT (US $)	BOBOT (%)
Benete Sumbawa	201.441.646,37	96,74

Lombok Internasional Airport	1.062.959,78	0,59
Tanjung Perak- Surabaya	2.781.149,28	1,50
Ngurah Rai Denpasar	4.153.957,06	1,05
Soekarno Hatta	449.489,90	0,12
Total Ekspor	**209.889.202,39**	**100,00**

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

C. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pada tahun 2019 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dengan sasaran program Meningkatnya kuantitas ekspor dengan Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Ekspor Produk Unggulan Daerah, program ini terdiri dari 5 kegiatan antara lain Pengembangan Informasi Peluang pasar Perdagangan Luar Negeri, Penguatan Kebijakan Penyederhanaan Prosedur Dokumen Ekspor Impor, Evaluasi Monitoring Importir dan Eksportir yang sudah memiliki API dan SKA, Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri, Penguatan Bagi UKM/Calon UKM yang Berorientasi/Berpotensi Ekspor/Eksportir Se-NTB secara garis besarya telah dilaksanakan dengan maksimal dengan persentase capaian indicator kegiatan 100%.

Realisasi Ekspor Daerah NTB bulan Desember 2019 tercatat volume sebesar 22.975,37 ton terjadi peningkatan volume sebesar 1,25% dari bulan bulan bulan Nopember 2019 tercatat volume sebesar 22.691,30 ton demikian juga sebaliknya dengan nilai bulan Desember 2019 tercatat sebesar US.$ 27.604.769,16 terjadi penurunan nilai sebesar 2,30% dari ekspor bulan Nopember 2019 tercatat sebesar US.$ 28.254.072,54.

Realisasi Ekspor Daerah NTB hasil tambang bulan Desember 2019 tercatat volume sebesar 22.371,01 ton terjadi penigkatan volume sebesar 0,07% dari bulan bulan bulan Nopember 2019 tercatat volume sebesar 22.354,62 ton demikian juga sebaliknya dengan nilai bulan Desember 2019 tercatat sebesar US.$ 25.089.548,56 terjadi penurunan nilai sebesar 2,30% dari ekspor bulan November 2019 tercatat sebesar US.$ 28.254.072,54 sedangkan hasil non tambang bulan Desember 2019 tercatat volume sebesar 604,37 ton terjadi penigkatan volume sebesar 79,51% dari bulan November 2019 tercatat volume sebesar 336,68 ton demikian juga sebaliknya dengan nilai bulan Desember 2019 tercatat sebesar US.$ 2.515.220,60 terjadi penurunan nilai sebesar 180,05% dari ekspor bulan November 2019 tercatat sebesar US.$ 898.121,76.

Dari Total nilai Ekspor NTB bulan Januari s/d Desember 2019, hasil tambang berupa konsentrat tembaga tercatat volume sebesar 141.057,76 ton, maka terjadi penurunan volume sebesar 51,55% dibandingkan dengan bulan Januari s/d Desember 2018 tercatat volume sebesar 291.128,71 ton demikian dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat sebesar

US.$. 201.441.646,37 maka terjadi penurunan nilai sebesar 49.09% bila dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama bulan Januari s/d Desember 2018 sebesar US.$ 387.669.352,98 Sedangkan untuk hasil non tambang bulan Desember 2019 tercatat volume sebesar 2.610,30 ton terjadi penurunan sebesar 96,36% dibandingkan dengan bulan Januari s/d Desember 2018 tercatat volume sebesar 71.638,75 ton demikian dengan nilai nulan Januari s/d Desember 2019 tercatat sebesar US.$. 8.447.556,02 maka terjadi penurunan nilai sebesar 65,64% bila dibandingkan dengan nilai pada periode yang sama bulan Januari s/d Desember 2018 sebesar US.$ 24.586.593,67

Realisasi ekspor berdasarkan komoditi bulan Januari s/d Desember 2019 sebanyak 18 (Delapan Belas) jenis komoditi dengan perolehan devisa Daerah NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 264 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019

KOMODITAS	NILAI EKSPORT (US $)	BOBOT (%)
Konsentrat Tembaga	201.441.646,37	96,38
Udang Vannamei	150.000,000	0,08
Gerabah	13.016,800	0,07
Kerajinan Buah Kering	251.410,04	0,11
Mutiara	2.095.592,11	0,65
13 (tigabelas) komoditi lainnya	5.937.537,07	2,71
Total Ekspor	**209.889.202,39**	**100,00**

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Apabila di ambil perbandingan dengan Realisasi antara tahun 2019 dengan tahun 2018, Ekspor Daerah NTB secara komulatif bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat volume sebesar 143.668,06 ton terjadi penurunan volume sebesar 60,00% dari bulan Januari s/d Desember 2018 yang tercatat volume sebesar 362.767,46 ton. Sedangkan untuk nilai ekspor bulan Januari s/d Desember 2019 tercatat sebesar US.$ 209.889.202,39 terjadi penurunan nilai sebesar 49,08% dari bulan Januari s/d Desember 2018 yang tercatat sebesar US.$ 412.255.946,65.

Dari gambaran ekspor NTB di atas menunjukkan masih besarnya ketergantungan kita kepada sektor pertambangan terutama pada komoditi konsentrat tembaga. Seharusnya kontribusi sektor non tambang pada nilai ekspor Provinsi NTB bisa lebih ditingkatkan terutama dengan mengandalkan pada sektor yang berbasis. pada perikanan dan pertanian

serta kerajinan, karena Provinsi NTB memiliki potensi yang besar dari ketiga sektor tersebut.

Komoditi ekspor non tambang di Provinsi NTB memiliki potensi cukup bagus untuk dikembangkan, terutama hasil pertanian dalam arti luas, hasil industri/kerajinan dan hasil pertambangan. Dengan potensi tersebut diharapkan kalangan dunia usaha dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal dalam rangka meningkatkan ekspor non tambang daerah NTB dan sekaligus membuka lapangan kerja/usaha.

Peningkatan nilai ekspor diupayakan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perdagangan Luar Negeri yakni melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha ekspor di Provinsi NTB terhadap regulasi terbaru yang dikeluarkan Pemerintah untuk mendorong ekspor seperti misalnya manfaat Surat Keterangan Asal (SKA) untuk menambah daya saing produk Indonesia dan sistem Perizinan online INATRADE untuk ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan.

Perbedaan data ekspor antara Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan BPS Provinsi NTB disebabkan oleh perbedaan sumber data primernya yaitu Dinas Perdagangan Provinsi NTB berdasarkan pada Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah diterbitkan pada IPSKA Dinas Perdagangan Provinsi NTB sedangkan BPS Provinsi NTB berasal dari dokumen PEB yang diterbitkan oleh bea cukai yang mencantumkan NTB sebagai daerah asal barang. Ini menunjukkan masih terbatasnya eksportir asal NTB yang mengurus dokumen ekspornya di NTB dan telah memanfaatkan Fasilitas SKA dari IPSKA NTB. Sepanjang Tahun 2019 jumlah formulir Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh IPSKA Dinas Perdagangan NTB sebanyak 176 ekspemplar.

Tabel 2. 265 Komoditas dan Nilai Eksor NTB Tahun 2019

KOMODITAS	NILAI EKSPORT (US $)	BOBOT (%)
Konsentrat Tembaga	201.441.646,37	95,98
Udang Vannamei	5.162.432,18	2,46
Gerabah	2.095.592,11	1,00
Kerajinan Buah Kering	543.757,38	0,26
Mutiara	251.410,04	0,12
9 (Sembilan) komoditi lainnya	394.364,31	0,19
Total Ekspor	**209.889.202,39**	**100,00**

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

Dalam rangka meningkatkan ekspor non tambang khususnya ekspor komoditi produk unggulan daerah, Dinas Perdagangan memprogramkan kegiatan melalui program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM para pelaku usaha baik itu pengusaha/UKM yang berorientasi ekspor maupun calon eksportir.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan mengacu kepada indikator kinerja yaitu menciptakan dan mengembangkan calon eksportir dan eksportir. Jenis kegiatan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan yaitu pelatihan UKM tingkat pemula dan pelatihan untuk UKM tingkat lanjutan yaitu UKM yang berdasarkan persyaratan administrasi sudah melengkapi dan memenuhi kriteria calon eksportir.

Selain itu Dinas Perdagangan sudah menyiapkan kegiatan-kegiatan ini guna mendukung Program Industrialisasi Pemerintah Daerah antara lain dengan memberikan pemahaman kepada UKM untuk melakukan promosi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah hasil olahan OPD pendukung Industrialisasi

Tabel 2. 266 Kegiatan Pelatihan Untuk UKM Pemula

No	Nama Pelatihan	Jumlah perserta Pengusaha/UKM	Keterangan
1.	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negri	30	
2.	Penguatan Kebijakan Prosedur Ekspor impor	30	
3.	Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri	30	

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

Tabel 2. 267 Kegiatan Pelatihan Untuk UKM Lanjutan

No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta Pengusaha/UKM	Keterangan
1.	Penguatan UKM berorientasi Ekspor	50 UKM	UKM yang terpilih menjadi eksportir berdasarkan hasil penilaian Dinas Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2019

D. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah mempunyai beberapa kegiatan antara lain penyelerasan dokumen program perdagangan dengan tujuan untuk menyelaraskan komitmen pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat dan daerah yang bermuara pada pengembangan usaha daerah khususnya dan sektor perdagangan pada umumnya, dimana di Tahun 2019 penyelerasan Program yang dilaksanakan di Kota Mataram dapat mempertemukan unsur Kementeriaan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, akademisi dan pelaku usaha dengan total 75 (tujuh puluh lima) orang peserta.

Dalam program ini juga terdapat kegiatan peningkatan kerjasama Mitra Praja Utama (MPU), dimana maksud dari MPU ini adalah untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah anggota MPU (10 Provinsi) dan di Tahun 2019 Dinas Perdagangan Provinsi NTB telah dapat menjalin kerjasama dengan 2 provinsi anggta MPU yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Bali dalam bentuk kerjasama Pasar Lelang Komoditas yang dilaksanakan kedua provinsi tersebut dengan menghadirkan pelaku-pelaku usaha dari provinsi NTB.

Kegiatan terakhir yang menjadi bagian dari program ini adalah Penyediaan Informasi Strategis Sektor Perdagangan dan di Tahun 2019 Dinas Perdagangan Provinsi NTB secara rutin menghadirkan 3 informasi penunjang sektor perdagangan yakni informasi harga dan stok harian 22 komoditi pasar tradisional di 3 pasar di Kota Mataram. Selain itu di tahun 2019 Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga rutin menghadirkan informasi-informasi komoditas unggulan potensial yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirnya 3 informasi ini tentunya dengan maksud sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 268 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perdagangan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Realisasi ekspor daerah Nusa Tenggara Barat belum tercatat seluruhnya di NTB karena sebagian	Menghimbau para pengusaha agar setiap kali melakukan ekspor barang agar menggunakan

besar dokumen ekspor produk masih di urus di daerah lain termasuk pembukaan L/C melalui Bank Devisa yang ada di luar daerah seperti Bali, Surabaya dan Jakarta.	dokumen ekspor dan pembukaan L/C pada Bank Devisa yang ada di NTB.
Provinsi NTB belum memiiki infrastruktur pelabuhan ekspor import, sehingga ekspor yang dilakukan bersifat indirect (Pelabuhan Bali, Tanjung Perak, Tanjung Priok dan Makassar) Sehingga nilai ekspor tidak tercatat	Mendorong pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pelabuhan ekspor import yang representatif di NTB
keterbatasan SDM dan infrastruktur ekspor yang dimiliki oleh Provinsi NTB	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait jalan keluar/solusi yang ditempuh untuk memperbaiki kinerja ekspor NTB
Mahalnya biaya/tarif cargo/bagasi yang dikenakan oleh pihak maskapai penerbangan khususnya di NTB sehingga membebani para eksportir dalam melakukan ekspor barang keluar negeri	Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak angkasa pura dan pihak maskapai penerbangan terkait tarif bagasi dan cargo agar dapat dipermudah ataupun dapat dinegosiasi
Kurangnya Promosi Produk Ekspor melalui Pameran baik di Dalam maupun Luar Negeri	Pemanfaatan ITPC yang ada di beberapa negara sebagai sarana promosi produk NTB di luar negeri.

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2019

7. Perindustrian

Dinas Perindustrian Provinsi NTB bertanggungjawab atas pencapaian indicator kinerja utama dan indicator kinerja kunci "Pertumbuhan Industri" bersama-sama dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Program prioritas pembangunan Dinas Perindustrian tahun 2019 yang mendukung pencapaian indicator "Pertumbuhan Industri" adalah: program Peningkatan kapasitas Iptek system produksi; program pengembangan industry kecil dan menengah; dan program peningkatan kemampuan teknologi industry. Capaian dari ketiga program prioritas tersebut diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 269 Capaian Kinerja Program Prioritas Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Industri Tahun 2019

Program Prioritas	Indikator Outcome	Target	Capaian
Peningkatan kapasitas iptek system produksi	Cakupan IKM yang terbina dalam kapasitas iptek system produksi	10,58%	10,04%
Pengembangan industry kecil dan menengah	Cakupan IKM yang terbina	2,69%	4,55%
Peningkatan kemampuan teknologi industri	Cakupan IKM yang menerapkan teknologi dalam proses produksi	4,16%	2,02%

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target program prioritas diatas adalah sebagai berikut.

1. Rendahnya Kompetensi SDM IKM dalam menerapkan proses produksi;
2. Kurangnya modal IKM dalam melakukan restrukturisasi mesin produksi.

Upaya mejawab rendahnya kompetensi SDM Dinas Perindustrian kedepan dalam mencapai target program diatas adalah dengan melakukan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan, sedangkan dalam rangka mengatasi permodalan IKM dalam melakkan restrukturisasi mesin produksi Dinas Perindustrian melakukan fasilitasi dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perindustrian adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 270 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017	2018	2019	
				Target	Kinerja
Pertambahan nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	235.421,31	67.344,90	164.565,72	164.960,00

Persentase industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	0,57	1,13	1,68	NA
Pertumbuhan industri	%	-	2,68	3,20	-1,38

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), namun sampai dokumen ini disusun belum ada rilis resmi dari BPS. Sedangkan indikator persentase industri kecil yang meningkat ke industri menengah masih dalam tahap evaluasi. Keterlambatan evaluasi diakibatkan keterbatasan data yang tersedia dan perlu validasi lebih mendalam terkait data yang ada. Data sementara yang diperoleh dari Kabupaten/kota, Jumlah IKM tahun 2018 sebanyak 83.137 IKM, tahun 2019 sebanyak 81.990 IKM, sehingga jumlah IKM mengalami penurunan sebesar 1.147 IKM (1,38%), hal ini diasumsikan terjadi karena masih banyak IKM yang belum bangkit pasca bencana gempa bumi di tahun 2018 silam.

Dalam upaya pertambahan nilai PDRB sektor industri dan peningkatan industri kecil ke menengah, Dinas Perindustrian Provinsi NTB tahun 2019 melaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi kemitraan IKM dengan swasta;
b. Pendaftaran dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual HAKI;
c. Sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan;
d. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster;
e. Penguatan IKM terhadap sumberdaya;
f. Penyediaan informasi strategis;
g. Kerjasama antar daerah;
h. Penguatan mutu kemasan produk olahan;
i. Pendampingan mutu kemasan produk unggulan;
j. Penguatan desain industry kerajinan dan industry kreatif.

Sedangkan kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan industri adalah sebagai berikut.

a. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri;
b. Penguatan industri berbasis teknologi;
c.Pelayanan pengembangan model ventura dan incubator;
d. Peningkatan kemasan (packaging) produk IKM olahan;

e. Pembinaan produksi hulu dan hilir;

f. Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur;

g. Penguatan kemampuan teknologi industri.

Pelatihan wirausaha baru di UPT Science Technology Industrial Park (STIP) dimaksudkan untuk membentuk anak muda NTB menjadi wirausaha khususnya di bidang permesinan dan turunannya karena saat ini kaum muda NTB belum mampu bersaing dengan pengusaha pada tingkat nasional. Kegiatan ini dilaksanakan guna memberikan peluang usaha di NTB sampai dengan pengenalan perbankan dan pasar. Pelatihan dan pendampingan akan diakhiri ketika peserta sudah benar-benar siap melakukan usaha sendiri.

Program industrialisasi adalah program yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan yang ada di NTB yang pada akhirnya dapat memberikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat NTB. Saat ini program industrialisasi masih pada tahap pendataan produk unggulan yang akan dikembangkan, penguatan dan peningkatan kapasitas IKM yang ada, serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), perguruan tinggi dan asosiasi yang ada dalam rangka memperkuat industrialisasi. Penguatan berupa amati, tiru dan modifikasi mesin-mesin yang mampu diproduksi oleh anak NTB, harapannya dapat dimanfaatkan guna mendukung pencapaian produksi hulu. Program industrialisasi diharapkan dapat memanfaatkan sumberdaya potensial terlatih yang dihasilkan oleh SMK maupun BLK sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi pengangguran.

Terkait pemasaran produk industrialisasi yang telah dihasilkan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan kegiatan pameran pada event-event yang berskala local dan nasional, bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi NTB dan Asosiasi IKM yang ada di NTB. Sedangkan untuk akses permodalan, Dinas Perindustrian Provinsi NTB mendorong IKM memiliki ijin usaha yang merupakan syarat dalam memperoleh permodalan pada perbankkan. Sehingga pada beberapa kegiatan, Dinas Perindustrian selalu menggandeng Perbankan untuk ikut andil dalam pengembangan industrialisasi di NTB.

Balai Kemasan dan STIP pada Dinas Perindustrian Provinsi NTB berfungsi sebagai pendukung industrialisasi dalam penguatan desain dan mutu kemasan produk olahan yang dihasilkan IKM baik berupa desain kemasan maupun desain produk. Keberadaan Balai Kemasan dihajatkan menjadi penggerak industri kecil dan menengah (IKM) dalam mendapatkan kemasan dengan harga murah dan berkualitas. Sedangkan STIP berfungsi

sebagai kawasan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi IPTEK serta sebagai agroeduwisata secara berkelanjutan, melalui upaya peningkatan produksi menjadi produk komersil skala besar/industri sehingga kemanfaatannya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Capaian kinerja pembangunan daerah urusan pilihan bidang perindustrian diukur melalui indikator kinerja jumlah pendaftaran HaKi karya seni budaya daerah dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 271 Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah Tahun 2019

Indikator	Satuan	Tahun Awal Rpjmd 2013	2017	2018		2019	
			Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah							
- Desain Industri	Produk	37	61	15	20	0	0
- Merek		42	45	20	-	100	83
- Hak Cipta		18	30	15	20	0	0

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Adapun nama-nama capaian HAKi merek IMK sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2. 272 Capaian Indikator Kinerja Pendaftaran HaKi Merek Daerah Tahun 2019

NO	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	PRODUK	NAMA MEREK
1	JEROACAN	PAOZIAH	TERASI UDANG	JEROACAN
2	UD. ARJUNA	H. M. JUNAIDI	GARAM BERYODIUM	PENJARING INDAH
3	GELORA AMBUNG	SUMAINI	SAMBAL BELUT	GELORA AMBUNG
4	FAMILY MANDIRI	INSAN HAIRI	KACANG MERAH & BLACK GARLIK	FAMILY MANDIRI
5	D'SQUA	SULRAHMAN	MINYAK HATI IKAN HIU	D'SQUA
6	JAMEELA	LAILY MARIAH	ANEKA KUE	JAMEELA PANCOR
7	RAU'S	SOPIAN HADI	KOPI	RAU'S
8	JORONG SEMBUNG	CONNYTA	OLAHAN MAKANAN	JORONG SEMBUNG
9	KAHWANTA	HARIYANTONO	KOPI	KAHWANTA
10	BERUGAK PESANGGRAHAN	SRI ASTUTI INDAYANI	KOPI	BERUGAK PESANGGRAHAN
11	SMARTNUT	MUHAMMAD TARMIZI	KACANG TELUR	SMARTNUT
12	ANOV	RIPAI	KERIPIK BUAH	ANOV
13	JARA LAMBU	MUHAMMAD YUSUF	GARAM MASAK BERYODIUM	JARA LAMBU
14	MADA OI	AFDALUL AULAD	AMDK	MADA OI
15	KALISOM	KALISOM	BANDENG PRESTO	SABUA ADE
16	RUMAH JAHIT RIZKYANA	SITI FATONAH	FASHION	RIZKYANA
17	CV. TRI UTAMI JAYA	NASRIN, S.ADM	TEH MORINGA	MORINGA SASAMBODO
18	CV. TRI UTAMI JAYA	NASRIN, S.ADM	DAN JAMU (OBAT TRADISIONAL)	MORIKAI CELUP
19	CV. TRI UTAMI JAYA	NASRIN, S.ADM	TEH DAUN SIRSAK	MORINGA KIDOM
20	DAPOER D & D	ROBERT EFENDY SAGALA	AYAM FRIED CHIKEN	DE'FRIED CHICKEN

NO	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	PRODUK	NAMA MEREK
21	MAZA HANDCRAFTED PEARL AND JEWELRY	LUBERTI BUDI UTANA	MUTIARA, EMAS DAN PERAK	MAZA
22	YOSINA RIA DJAMI	YOSINA RIA DJAMI	KOPI	PEACE
23	AL-AMIN	ZULHADI, AMD.AK	MINYAK KELAPA / VCO	AL
24	KLP NINA PACU	MUJI BIDAWATI, SE	KOPI BUBUK	KOPI BUMI LONTARA
25	UD. NARAFASTRONG	NURHAYATI	Depot Air Minum Isi Ulang	AI SAGALOKA
26	RINJANI	RUDI YONO	KOPI BUBUK	COFFEE MENAH
27	UD. SARI MADU	PUTU AGUS HARIBAWA	MADU	DORTANA
28	PT. BANDAR USAHA MANDIRI	RINI HANDAYANI	SAMBAL DAN ANEKA CAMILAN	BANDAR SAMBAL
29	UD. RINJANI LOMBOK	HJ. NURWARDAINI	KOPI	SAJANK COFFEE
30	OTTILIA	MAYLIZAR S.Ag	MUTIARA, EMAS DAN PERAK	OTTILIA
31	DELISH CAKE AND COOKIES	BOBIE JOUARTHA	ANEKA KUE KERING DAN BASAH	DELISH CAKE AND COOKIES
32	HEPTEL	RAHMATULLOH AKBAR	FASHION	HEPTEL
33	ETNIKA	HEPPI BIDRAHAPSARI	AKSESORIS , FASHION	ETNIKA
34	ETNIKA	HEPPI BIDRAHAPSARI	AKSESORIS , FASHION	IRENG
35	ETNIKA	HEPPI BIDRAHAPSARI	AKSESORIS , FASHION	LOMBOK SIWAQ
36	ANISA	ABDUL MUIS AMIN	OLAHAN MAKANAN / SAMBAL	SAMBAEL INAQ ENYENG

NO	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	PRODUK	NAMA MEREK
37	WIDIYA	WIDYA UTARI	ANEKA KUE BASAH, KUE KERING DAN KERIPIK	WIDIYA SNACK
38	UD. DB (DUA BELAS)	USWATUN HASANAH	OLAHAN MAKANAN	DB SNACK
39	GALANG TENUN SONGKET	SITI AMINAH	KAIN TENUN SONGKET	GALANG SONGKET
40	JAYADI FARM	JAYADI M.	KOPI	KOPIKEY
41	BALE CREATIVE	IKA ASNI SUSANTHI	KERING KENTANG & SAMBAL	LOMBOK BEGERIK
42	NIKMAH FOOD	SRI NANDAWATI	RENGGINANG	NIKMAH FOOD
43	SUSHI NORI	FRANGKY	MAKANAN SUSHI & PELECINAGAN AYAM	SUSHI NORY
44	SUSHI NORI	FRANGKY		PELECING AYAM JUARA
45	ARRENDI	SITI ARBAIYAH	OLAHAN MAKANAN	ARRENDI
46	FAVORIT	YULIATI	OLAHAN MAKANAN	FIQA
47	M RASA	MURNI HAYATI FATIMAH	ANEKA KUE	M RASA
48	GRAF MONESINDO PERSADA	MUHAMMAD F. HAFIZ	SABUN CUCI PIRING	MONES
49	RUMAH MAKAN P. IMAM	IMAM SADALI	RUMAH MAKAN	RUMAH MAKAN PAK IMAM
50	MADANIA CAKE BAKERY COOKIES	SATRIASYAH HARIS SANJOKO, ST	KUE KERING DAN KUE BASAH	MADANIA CAKE BAKERY COOKIES
51	ISHLAH	H. M. TAISIR IBRAHIM	MINUMAN	ISHLAH
52	UB. HARTAMAS	LALU RUSDI	OLAHAN DAGING KERING	KRIKISS
53	UD. FEBRILA SONGKET	JAPRI KARIM	KAIN TENUN SONGKET	UD. FEBRILA SONGKET
54	UD. NAUNG SONGKET	MARHAYANI	KAIN TENUN SONGKET	UD. NAUNG SONGKET
55	GEROK SOKONG	SUPAEDI	KOPI	GEROK SOKONG

NO	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	PRODUK	NAMA MEREK
56	MALSYE	SYAE'UN	OLAHAN MAKANAN	MALSYE
57	BUNGA MEKAR	HALIMATUS SAEBAH	OLAHAN PANGAN	BUNGA MEKAR
58	MEDODOLA ORGANIC PRODUCT	MAWAR JUNITA	BUBUK DAUN KELOR DAN DAUN PEGAGAN	MEDODOLA'S MORINGA
59	N21FOOD	NINI ARSIH	OLAHAN MAKANAN	N21FOOD
60	SONGGAJAH	SUNARTI	KULINER	SONGGAJAH
61	AZ-ZAHRA TAYLOR	JUBAIDAH	AKSESORIS TENUN	JU PALIBELO
62	UD. D'SAMBA	VERA WATI	ICE CREAM, OLAHAN SUSU	D'SAMBA
63	KUPI TUJAK LOMBOK	MOH. NAJAMUDIN	KOPI BUBUK	KUPI TUJAK LOMBOK
64	BEECOMB HONEY	IRHAMAYANTI	MADU	BEECOMB HONEY
65	AZ-ZAHRO	MAWARNIATUN	KERIPIK	AZ-ZAHRO
66	YANAMIJUAN	NI WAYAN SUPADMI	PAINT, TOTE BAG, SCARF, SILK	YANAMIJUAN
67	KOPI WALET AMAR SASAMBO	LALU BUNTARAN	MINUMAN KOPI, THE, COKLAT KERING	AMMAR
68	DARMA SETYA ARTSHOP	HAJJAH ROBIAH	KAIN TENUN DAN SONGKET	DARMA SETYA
69	PRIMA BUDAYA JAMUR	ANDHI HERTANTO	BUDIDAYA JAMUR DAN OLAHANNYA	LEGENDARIS
70	ALDA 121	HASANAH WATI	ANEKA SAMBAL DAN KERIPIK	ALDA 121
71	UD. OMBAK BERSATU	YOSI EKA KURNIAWATI	SALE PISANG, KERIPIK	OMBAK FOOD
72	TIFA ROSE	NURIDA WAHYUTI	OLAHAN MAKANAN	TIFAROSE
73	QUEEN GENGGELANG	DWI ERMAYANTI	PENGHARUM DARI KOPI	QUEEN GENGGELANG
74	KELOMPOK PADA JUJUR	SUHARNI SAHARUDIN	PANGSIT SAYURAN, STIK DAUN KATUK, TORTILA RUMPUT LAUT (OLAHAN RUMPUT LAUT)	PADA JUJUR

NO	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	PRODUK	NAMA MEREK
75	POK LAHSAR PASIK AKRA	SALMIAH, S.Pd.I	ABON IKAN LAUT	DAYGUN
76	KUB. BUNDA	TUTIK NURHASANAH	KOPI, SALE PISANG, STIK KELOR	KOBUSA
77	KWT. MUTIARA	ENIK KARYAWATI NINGSIH	STIK DAUN KELOR, KERIPIK DAUN BEBELA, REMPEYEK	REMUNGGEK
78	KAMPUNG COKLAT SENARA	PARDAN	OLAHAN COKLAT	DATU COKLAT
79	BAROKAH	MASIKI	PERMEN RUMPUT LAUT, KERUPUK RUMPUT LAUT	HIKMAH BAROKAH
80	UD. AMALIAH	DINI AMALIAH	KUE KERING	MERSEK
81	KOPERASI INDUSTRI LAUT BIRU	MUHLISA	GARAM BERYODIUM	CAP LETO LET
82	METROKOSTA	SRI HASTUTI	KOPI BUBUK	METROKOSTA
83	UD. SADU ASA	MASJAYANTI	KUE KERING	SADU RASA
84	ATHYJAWATI	JAWATI	KUE KERING	ATHYJAWATI
85	MUTIARA BARU	RINA RIANA	DODOL RUMPUT LAUT, KERUPUK RUMPUT LAUT, KUE KERING	AFLAH
86	UD. BENING	NINING ANDRIANI	BUBUK CABE, BUBUK KELOR	BU CAMER GALAK
87	TARA SHOP	QASHIRATUT THARAFI	MADU DAN PELEMBAB BIBIR	LIP BEE
88	UD. POKDARWIS KALATE WATERFALL	NURKA	BAWANG GORENG	ASDORIS
89	UD. RAKABUMI	MUSMULYADI	BAWANG GORENG	MILENIAL

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Label halal merupakan sebuah kewajiban dalam usaha makanan maupun usaha kosmetik. Melalui label halal dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap suatu produk. Produk yang bersertifikat halal memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan label halal tersebut.

Tabel 2. 273 Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2019

NO.	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	JENIS PRODUKSI
1	KUPI TUJAK LOMBOK	H. Moh. Najamudin	Kopi Bubuk
2	RINJANI	Rudiyono	Kopi
3	UD. CIN-CIN MAS	Anak Agung Ketut Karang	Kopi Bubuk
4	UD. NIHER MANDIRI	Sri Suherni	Martabak dan Terang Bulan
5	DAPOER SAFIRA	Arista Kusuma K.	Sambal Ikan Asin
6	BALE CREATIVE	Ika Asni Susanthi	Kering Kentang
7	KITA'S PIZZA	Pipin Mutiawati	Pizza
8	RUMAH CILOK	Adityo Martiantomo	Cilok
9	UD. RINJANI LOMBOK	Hj. Nurwardaini	Kopi
10	MUFFIN STATION	Endang Susilowati	Kue Basah
11	BAKSO BEKA	Indah Purwanti Ningsih	Bakso
12	UD. TABETA	Ratu Sa'Bani	Minuman dan Bahan Minuman
13	PIZZA PINTER	Mahridin Amin	Pizza
14	MINA SARI JAYA	Fajrin Ridyansah Halil	Makanan, Minuman / Bakso
15	PEACE FOOD	Yosina Ria Djami	Kopi Bubuk
16	DAPOER D & D	Septi Pujiani	Ayam Krispy, Ayam Geprek
17	UPPKS NURUL YAKIN	Aswini Hariyani	Makanan Ringan (Keripik)
18	UD. YASMIN	Aminatun Zahro	Abon Ikan
19	DAPUR COKLAT "TIAGA"	Dedeh Rodiah	Coklat
20	MARISA BAKERY	Sefila	Roti dan Kue
21	IIS BROWNIS	Supti Ishlah	Brownis dan Aneka KUE
22	BALE IKAN	Ajeng Roslinda	Olahan Pangan
23	ARIF	Arifin	Aneka Camilan
24	UD. SARI MADU	Putu Agus Haribawa	Madu
25	WAROH MAJU BERSAMA	Mainah	Manisan Rumput Laut
26	RUMAH MAKAN SIMPANG LIMA	Imam Sadali	Makanan Siap saji
27	WARUNG MAKAN ADUH ENAK'E	Umi Farichah	Makanan Siap saji
28	SASAK MAIQ	Baiq Siti Suryani	Rengginang Rumput Laut

NO.	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	JENIS PRODUKSI
29	BARIK	Hj. Ulyatin Asri	Stik Kelor
30	UD. PEMUDA SEJAHTERA	Yudi Setiawan	Keripik Tempe
31	ARISTA'S - KITCHEN	Anita Puji Lestari, ST	Aneka Cake Olahan dari Tepung
32	UD. AZ - DZIKRA UTAMA	Yulita Usmariana, S.Pt	Abon Daging Sapi
33	ANUGERAH SAMALAS	Suhaini	Keripik Naga, Keripik Pisang
34	UD. BAROKAH	Hj. Nikmah	Kue Kering
35	UD. NANDA PUTRI	Hasmini	Aneka Kue Kering
36	UD. ALDA 121	Hasanawati	Aneka Sambal
37	PRIMA BUDI DAYA JAMUR	Andhi Hertanto	Olahan Jamur
38	KWT OMBAK BERSATU	Yosi Eka Kurniawati	Tepung dan Hasil Olahannya
39	UD. KARE KARE	Minaya Sari	Tepung dan Hasil Olahannya
40	UD. WAFA WAFI	Samira, SE	Aneka Roti, Kue Kering
41	DELDA KITHCEN	Baqiatussolihah	Tepung dan Hasil Olahannya
42	UD. GERBANG EMAS	Baiq Siti Umi Kalsum	Kacang Asin
43	PUTRI NYALE	Emur	Dodol Rumput Laut
44	UD. ISTIQOMAH	Maryam	Pengolahan Pangan
45	UD. MANDIRI	Anjumuzuhriah	Pengolahan Pangan
46	UD. BAHAGIA	Sahmin	Pengolahan Pangan
47	UD. D.B (Dua Belas)	Uswatun Hasanah	Kue Kering
48	UD. WIDIYA	Widya Utari, SE	Kue Kering
49	DATU COFFE	Ari Syalmadi	Kopi
50	RUMAH KOPI ARABIKA	M.S Wathan	Kopi
51	KUB PARE MAS	Harniati	Kerupuk Cangkang Kepiting
52	DAPUR BUNDA	Rohani	Kue Kering
53	KUBE AL - BAROKAH	Husnul Khotimah	Kopi Belut
54	UD. MARIYA	Rohani	Keripik Tempe
55	UD. ANTERO	Musyarofah Hamdi	Temberodok
56	IKM AMIZ BERJAYA	SulRahman	Minyak Hiu
57	KWT. BANGKIT BERSAMA	Hadiatun	Keripik Pisang
58	UD. LOHMAK	Irwan Efendi	Keripik Talas

NO.	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	JENIS PRODUKSI
59	AMALIA BACKERRY	Rifa'i	Keripik Nanas
60	JAMEELA BAKERY	Laily Mariah	Bakery Roti
61	UD. PESISIR SAMUDRA	Mustamin	Terasi Udang
62	KWT. SOLONG JAYA	Sri Astuti Indayani	Kopi
63	LENTARI	Siliya Fikriati	Dendeng Daging
64	GUSTI PUTERI	Erwin Kurniadi	Keripik Tempe
65	MIRAMA	Jamilah	Roti dan Kue
66	UD. ARPAN	Artinah	Rengginang
67	DAPUR SYADZWINA	Tri Setiorini	Kue Basah (Snack Box)
68	CAHAYA MENTARI	IIN Hasanah	Bawang Goreng
69	MELATI UNTER	Nuraini	Dodol Rumput Laut
70	UD. ZEET TEE	Sri Mulyati ZT	Dendeng Daging dan Abon Daging
71	IBU ANNA	Rihuldjanah	Kue Kering
72	CV. TARUNA SAMAWA	Darmawanto	Madu Murni
73	METROKOSTA	Sri Hastuti	Kopi
74	UD. TINA TINI	Nurlaela	Kue Kering
75	ELI RED BAKERY	Elisiati	Kue dan Bronis
76	UD. BENING	Nining Andriani, M.Pd	Bubuk Cabai Merah Kering
77	TIGA DARA	Purwati	Aneka Kue
78	UD. LALA JINIS	Nurhayati	Kue Kering (Kacang Sembunyi)
79	UD. FATIMA	Fatimah	Kue Kering (Kue Bawang)
80	UD. CAHAYA FAMILY	Ninik Lestari	Minuman Herbal Sire Kunyit
81	UD. KARYA PESISIR	Zulkifli	Abon Ikan Tuna
82	KWT. MARNING ZEAMAYS	Artika	Marning Jagung
83	PASIR PUTIH	Emi Sulami, S.Pd	Brownis Komposit
84	SENANDUNG CINTA	Indriyani	Kue Putri Jagung
85	HARAPAN BUNDA	Fatimah	Kecap Manis dan Kecap Asin
86	SINAR MENTARI	Mariati, SE	Biruas Jagung
87	ISTANA ANGIN LAUT	Nurhasanah, A.Md	Stik Ikan Tuna
88	NAILA	Arina	Biskuit Jagung
89	SATONDA	Rosti Wahyuni	Kopi Bubuk
90	IKM MATAHARI	Hadijah	Kue Kering
91	UD. ETNIC	Khairunnas	Pengolahan Kopi dan Teh

NO.	NAMA IKM / PERUSAHAAN	NAMA PEMILIK	JENIS PRODUKSI
92	NAYA SWEET	Rohana	Kue Kering dan Kue Basah
93	PRESTO SABUA ADE	Kalisom A. Rahim	Bandeng Presto
94	UD. ARRAHMAN	Siti Hasiah H.A Hakim	Bandeng Presto
95	UD. DORO TO'I	Sri Rahmawati	Bubuk Kunyit
96	UD. MEKAR BARU	Kalisom	Pilus Rumput Laut
97	UD. NASHWA	Eka Vivi Rubiyanti	Kue Kering dan Kue Basah
98	POKLAHSAR BANDENG BIMA FOOD	Jubaedah	Bandeng Presto
99	HAYATI PRESTO	Nurhayati	Bandeng Presto
100	KAMENCI MORI	Julaiha	Jahe Instan, Sari Temulawak

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Era revolusi industri 4.0 memudahkan arus barang dan jasa masuk dari negara satu ke negara lainnya. Untuk itu Standar Nasional Indonesia (SNI) harus dimiliki oleh sebuah Industri guna menjamin mutu dan standar international, hal ini tentunya berkaitan dengan peningkatan pasar yang lebih luas. Sertifikasi SNI dan Bimbiangan ISO 9001 Tahun 2019 yang didukung oleh Dinas Perindustrian Provinsi NTB diantaranya adalah:

Tabel 2. 274 Sertifikasi SNI & Bimbingan ISO 9001 Tahun 2019

No.	Nama Pemilik / IKM	Nama Kelompok/ Perusahaan	Alamat/ No. HP	Jenis Produk
1.	JUNAIDI	UD. ARJUNA	Batu Keliang Desa Penjaringan Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur-NTB /0878.5683.7748	PENGOLAHAN GARAM BERYODIUM
2.	A. ZUBAIR	PD. WAWO	Jln. Sumbawa No.07, RT.011/RW.005 Kel. Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima- NTB/ 0823.3994.0899	EKSTRASI GARAM BERYODIUM
3.	ILHAM	MEKAR MAKMUR	Talabiu, RT.010/RW.005, Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima-NTB	PENGOLAHAN GARAM BERYODIUM
4.	MUHLISA, S.Pd.	KOP.INDUSTRI "LAUT BIRU"	RT. 002 RW.005 Desa Labuhan Kuris Kec. Lape Kab. Sumbawa – NTB	PENGOLAHAN GARAM BERYODIUM

No.	Nama Pemilik / IKM	Nama Kelompok/ Perusahaan	Alamat/ No. HP	Jenis Produk
5.	NASRIN, S.Adm.	CV. TRI UTAMI JAYA	Jl. Sakura Raya Blok G No. 9-10 BTN Sweta, Kel. Turida Kec. Sandubaya Kota Mataram- NTB/ 0852.3757.7498	INDUSTRI JAMU/ OBAT TRADISIONAL

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Dinas Perindustrian Provinsi NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pertanian Kementerian Pertanian telah melakukan uji report 19 mesin pertanian yang merupakan syarat dalam Standar Nasional Indonesia. Dari 19 mesin yang telah di lakukan uji report 18 diantaranya lulus uji dan selanjutnya dapat diusulkan memperoleh SNI, berikut nama-nama mesin yang telah lulus uji report.

Tabel 2. 275 Nama-Nama Mesin Yang Telah Uji Report

NO	NAMA ALAT
1	Tungku gasifikasi
2	Mesin sangrai kopi
3	Mesin kupas kopi kering
4	Mesin pengurai sabut kelapa
5	Mesin emping jagung
6	Mesin cuci telur
7	Mesin mixer pakan ternak
8	Peralatan press cetak tahu
9	Mesin spiner
10	Mesin Sangrai kopi
11	Mesin Pengupas/Pemipil Jagung mobile
12	Mesin pemipil jagung
13	Mesin cacah sampah organik
14	mesin cacah krepek
15	mesin cacah sampah toss-M
16	Mesin rajang sampah buah
17	mesin mixer magot
18	Mesin cetak pelet magot
19	Mesin Pencacah lamtoro

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019, unit usaha pada industri formal mengalami penurunan sekitar 11,55% atau 951 Unit usaha jika dibandingkan dengan tahun 2018. Tenaga kerja meningkat sekitar 8,64% atau sebesar 5.076 orang, namun nilai investasi mengalami penurunan sebesar 1.433.217.206 (000). Perkembangan industri formal sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 276 Perkembangan Industri Formal s.d tahun 2019

Kabupaten / Kota	Perusahaan (unit)	Tenaga Kerja (jiwa)	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp.000)
Lombok Barat	549	5.602	142.346.956	258.388.034
Lombok Tengah	174	-	-	-
Lombok Timur	2.465	23.818	71.483.564	154.265.609
Lombok Utara	274	1.451	9.972.886	24.114.947
Sumbawa	835	4.890	280.015.465	3.365.974
Dompu	421	2.345	52.472.478	71.869.965
Bima	1.003	4.616	48.042.785	107.360.606
Sumbawa Barat	71	306	2.173.000	9.636.306
Mataram	2.442	15.734	185.983.425	619.942.172
Bima	-	-	-	-
Jumlah / Total	8.234	58.762	792.490.559	1.248.943.612

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Pada industri non formal, unit usaha juga mengalami penurunan 0,27% dari tahun 2018 atau sekitar 196 unit usaha. Begitu juga halnya pada penyerapan tenaga tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 0,12% atau sekitar 7.298 orang. Perkembangan industri non formal sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 277 Perkembangan Industri Non Formal tahun 2019

Kabupaten / Kota	Perusahaan (unit)	Tenaga Kerja (jiwa)	Investasi (Rp.000)
1. Lombok Barat	11.054	22.992	382.789.933
2. Lombok Tengah	35.942	58.549	54.606.371
3. Lombok Timur	17.298	53.102	57.861.036
1. Lombok Utara	157	184	2.798.536
5. Sumbawa	271	523	5.327.608
6. Dompu	2.052	4.238	151.089.298
7. Bima	1.344	5.976	11.542.262
8. Sumbawa Barat	521	1.284	3.919.315

9. Mataram	2.517	8.972	27.236.337
10. Bima	2.600	6.929	22.134.570
Jumlah / Total	73.756	162.749	719.305.266

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 278 Perkembangan Industri Berdasarkan Jenis Kelompok Industri Sampai Dengan Tahun 2019

Kelompok Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai/*Value*)	
			Investasi	Produksi
1. Industri Formal	8.234	58.762	792.490.559	1.248.943.612
2. Industri Non Formal	73.756	162.749	719.305.266	2.319.922.470
Jumlah / *Total*	81.990	221.511	1.511.795.825	3.568.866.083
2018	83,137	223,733	2,471,774,029	5,407,608,339
2017	80,843	219,120	2,248,712,646	5,125,505,880
2016	83,319	223,968	2,199,763,421	5,105,043,716
2015	82,697	221,413	2,133,861,391	4,920,764,965
2014	81,078	216,200	2,084,783,775	4,601,233,821
2013	80,163	222,442	1,936,247,484	3,489,780,106
2012	77,001	205,745	1,885,973,783	3,275,453,314

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

Penurunan industri formal maupun industri non formal pada tahun 2019 disebabkan bencana gempa bumi pada tahun 2018 yang mengakibatkan banyaknya industri kecil menangah terpuruk dan belum pulih benar pada tahun 2019. Untuk itu kedepan industrialisasi harus lebih terarah guna menumbuhkan industri-industri kecil yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat NTB.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 279 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perindustrian Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terutama IKM tentang pentingnya HKI dan Halal dan SNI, untuk	Sosialisasi pentingnya HKI, Halal dan SNI bagi pelaku usaha

melindungi dakekayaan intelektual, kehalalan dan standarisasi pada produk yang dihasilkannya.	Melakukan Kerjasama penanganan HKI dengan Kanwil Kum Ham Prov. NTB Sinkronisasi dan sinergi program pendaftaran HKI, Halal, dan SNI dengan Dinas Perindag Kabupaten/Kota.
Fasilitasi Pendaftaran SNI wajib dilakukan oleh Dinas Perindustrian seringkali terlambat direspon oleh pengusaha terutama IKM	Sosialisasi Pentingnya standarisasi produk melalui sertifikasi produk

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2019

8. Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melaksanakan dua kewenangan yaitu urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang ketransmigrasian. Berdasarkan RPJMD NTB 2019-2023, urusan pilihan bidang ketransmigrasian dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indicator kinerja daerah "cakupan penempatan transmigran". Capaian indikator kinerja daerah cakupan penempatan transmigran tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 280 Capaian Indikator Kinerja Daerah Cakupan Penempatan Transmigran Tahun 2017 Sampai 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2017	Capaian 2018	2019		Target 2023
				Target	Capaian	
Cakupan Penempatan Transmigran	%	75	75	80	80	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnsi NTB, 2019

Daerah tujuan transmigrasi keluar Provinsi NTB periode 2019 telah dilaksanakan pengiriman transmigran ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 KK = 36 jiwa sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 281 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah

NO	PROV/KAB/ LOK/UPT	2018			2019		
		TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL	TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL
		KAB /KOTA	KK	JUMLAH KK	KAB/ KOTA	KK	JUMLAH KK
A	**Gurontalo**				**Sulawesi Tenggara**		
1.	Kab. Pohuwato				Kab. Muna		
	UPT. Sandalan				UPT. Raemuna		
		Kota Mataram	5	5 KK = 18 jiwa	Kab.Loteng	5	5 KK = 21 jiwa
					Kab. Lombok Utara	2	2 KK = 7 jiwa
					Kab. Lotim	3	3 KK = 11 jiwa
B	**SULAWESI BARAT**						
1.	Kab. Mamasa						
	UPT Kim Rano				-		
		Kab. Lobar	2	2 KK = 6 Jiwa			
		Kab. Lotim	3	3 KK = 12 jiwa			
JUMLAH TPA			**10 KK**	**10 KK=36 JIWA**			**10 KK = 39 Jiwa**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnsi NTB, 2019

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian tersebutmasih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 282 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Transmigrasi Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Dukungan sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi masih kurang, seperti perbaikan jalan poros, jembatan, bantuan sarana belajar mengajar, dll	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan program/ kegiatan sesuai skala prioritas, disertai dengan proposal, Perencanaan, DED serta kondisi lokasi terbaru.

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih kurangnya kuota pengiriman transmigran asal NTB, sementara peminat cukup banyak	Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, bahwa NTB sebagai penerima dan pengirim transmigran dengan kondisi kepadatan penduduk di Pulau Lombok yang sudah cukup tinggi.

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provnsi NTB, 201

D. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan. Pada tahun 2018, urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut.

1. Administrasi Pemerintahan

Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan merupakan unsur pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah meliputi Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD, dan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta.

- **BIRO UMUM**

  Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB merupakan salah satu unit kerja pendukung (*supporting unit*) dan unit koordinator (*coordinating unit*) dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan berdasarkan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi NTB.

Tata kelola kearsipan yang diselenggarakan Biro Umum pada tahun 2019 telah mengelola arsip inaktif sebanyak 35.000 berkas, 8.947 surat masuk, 6.421 surat keluar, 17.300 distribusi undangan dan konfirmasi surat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 283 Distribusi Undangan dan Surat pada Biro Umum Tahun 2019

NO	KATEGORI	JUMLAH
1.	HUT RI	5.800 Surat
2.	HUT NTB	5.000 Undangan
3.	Undangan hari besar lainnya	6.500

Sumber: Biro Umum Setda Provinsi NTB, 2019.

Pada tahun sebelumnya telah diterapkan aplikasi arsip SI TATIK "Sistem Informasi Temu Arsip Tiga detik" dimana dalam hitungan 3 detik bahkan kurang dari itu arsip sudah ada di tangan, dan banyak pengunjung yang datang ke Depo Arsip Biro Umum Setda Provinsi NTB Baik dari dalam dan dari luar daerah datang silih berganti, mulai dari ujung barat Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sampai ke ujung timur Provinsi Papua Barat. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan sistem pada aplikasi arsip yaitu berupa:

- Dapat merubah database dan menambah space data dokumen;
- Adanya perubahan tampilan pada aplikasi;
- Adanya penambahan fitur upload database dan download dokumen.

Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu dalam memberikan kemudahan layanan, pencarian data secara cepat, responsif, dan akuntabel. Untuk kedepannya akan dilakukan pengembangan dan inovasi lainnya dengan menyesuaikan pada era digital seperti sekarang ini dan akan dilakukan pengujian dari Tim penguji akademisi lainnya sehinga mendapatkan lisensi salah satu lokus studi pengelolaan arsip.

Inovasi pelayanan publik Si TATIK dapat juga dikembangkan pada berbagai bidang lainnya seperti kecepatan penemuan nota pajak di Kantor Dinas Pendapatan, kecepatan penemuan dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) keuangan pada saat adanya pemeriksaan, kecepatan penemuan kartu berobat/*medika record* di Rumah Sakit, kecepatan penemuan arsip IPK mahasiswa di Perguruan Tinggi atau bahkan kecepatan penemuan rekam jejak pelaku kejahatan di Kantor Kepolisian.

Selain itu, Biro Umum Setda Provinsi NTB juga mengelola beberapa asset provinsi NTB yakni Gedung Kantor Gubernur NTB, Rumah Jabatan

Gubernur NTB, Rumah Jabatan Wakil Gubernur NTB, Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ruang VIP A dan ruang VIP B pada Bandara Internasional Lombok. Hal ini mendukung tugas pokok dan fungsi Biro Umum Setda Provinsi NTB sebagai pelaku pelayanan pimpinan.

Adapun Kegiatan Kunjungan dari Instansi Luar daerah yang difasilitasi oleh Biro Umum antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 284 Kegiatan Kunjungan yang Difasilitasi Tahun 2019

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Kunjungan Pejabat dan Staf Pemkab Lany Jaya Papua	10 Januari 2019
2.	Kunjungan Komisi V DPR RI	23 Januari 2019
3.	Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Tengah	24 Januari 2019
4.	Menerima Kunjungan Puteri Indonesia	28 Januari 2019
5.	Kunjungan Komisi VIII DPR RI dan Komisi II DPR RI	14 Februari 2019
6.	Kunjungan Menteri Pariwisata RI	21 Februari 2019
7.	Kunjungan Komisi V DPRD Prov NTT	26 Februari 2019
8.	Kunjungan Komisi IX DPR RI	19 Maret 2019
9.	Kunjungan Kerja Tim verifikasi Kementerian Dalam Negeri RI	19 Maret 2019
10.	Kunjungan Kerja BAP DPD RI	22 Maret 2019
11.	Kunjungan Komisi X DPR RI Bidang Pariwisata	20 Maret 2019
12.	Kunjungan Presiden RI	22 Maret 2019
13.	Kunjungan Bapak Prabowo Subisnto	26 Maret 2019
14.	Kunjungan Bupati Sumbawa dan Rombongan	29 Maret 2019
15.	Kunjungan Kerja Wakil Presiden RI	6 April 2019
16.	Kunjungan Kerja Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam	28 April 2019
17.	Kunjungan Konjen China	24 Juni 2019
18.	Kunjungan Kerja dari Jawa Tengah	4 Juli 2019
19.	Kedatangan Komisi IV DPR RI	13 Juli 2019
20.	Kedatangan Menteri Pariwisata RI	25 Juli 2019
21.	Kunjungan Komisi VI DPR RI	29 Juli 2019
22.	Kunjungan Kerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur	27 Juli 2019
24.	Kunjungan Kerja dari Pemerintah Provinsi Bali	30 Juli 2019
25.	Kedatangan Wakil Presiden RI	3 Agustus 2019
26.	Kunjungan Kerja dari Jawa Barat	7-9 Agustus 2019
27.	Kunjungan Kerja dari Pemprov Sumatera Utara	8 Agustus 2019

NO	KEGIATAN	TANGGAL
28.	Kedatangan Wakil Menteri ESDM	8 Agustus 2019
29.	Kunjungan Ibu Wakil Presiden RI (Ibu Mufidah Yusuf Kalla) dalam acara peresmian gedung Dekranasda	14 Agustus 2019
30.	Kunjungan Kerja Pemprov Bengkulu	19 Agustus 2019
31.	Kunjungan Kerja Menpan	28 Agustus 2019
32.	Kunjungan Dewan Perdagangan Islam Malaysia	6 September 2018
33.	Menerima audiensi Rektor Tazkia Islamic University College(Dr. Nurniati,M.Acc)	2 Oktober 2019
34.	Menerima audiensi direktur Da'I peduli (ust Andri Lupias)	2 Oktober 2019
35.	Kedatangan Bapak KH. Ma'ruf Amin	10 Oktober 2019
36.	Kunjungan Kerja dari Biro Humas dan Protokol Prov Jawa Timur	29 Oktober 2019
37.	Menerima kedatangan Bupati Serang	31 Oktober 2019
38.	Kedatangan Konjen Jepang	1 November 2019
39.	Kedatangan Komisi VI DPR RI	21 November 2019
40.	Kedatangan Komisi X DPR RI	22 November 2019
41.	Kedatangan DPD I RI	3 Desember 2019
42.	Kunjungan Kerja Pemprov Kalimantan Selatan	5 Desember 2019
43.	Kedatangan Gubernur DKI Jakarta	18 Desember 2019
44.	Kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan	25 Desember 2019

Sumber: Biro Umum Setda Provinsi NTB, 2019.

- **Biro Organisasi**

Program Penataan Daerah Otonomi Baru, Peningkatan Pelayanan Publik, Pengembangan sistem Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur, EvaluasiKinerja SKPD, Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi sebagai perangkat daerah yang mengawal salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 285 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Inovasi Pelayanan Publik yang Tereplikasi Tahun 2019

INDIKATOR	Satuan	2018	2019	
		REALISASI	TARGET	REALISASI

Inovasi Pelayanan Publik yang Tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2019.

Tabel di atas menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik dapat tereplikasi sebanyak 2 jenis inovasi. Sementara itu terkait dengan aduan pelayanan publik yang diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, dari target 100% pada tahun 2019 telah ditangani secara keseluruhan. Dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 286 Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik Yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2018-2019

No	Uraian	TAHUN		Jumlah	Ditindaklanjuti (%)
		2018	2019		
1	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	-			-
2	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	26	10	36	100,0
3	Dinas Kominfo dan Statistik	-			-
4	Rumah Sakit Umum Daerah NTB	70	40	110	100,0
5	Rumah Sakit H.L Manambai	-			-
6	Satpol PP	-			-
7	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	-			-
	Jumlah	**96**	**50**	**146**	**100,0**

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2019

Jumlah aduan pelayanan publik yang diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB selama tahun 2018 sebanyak 96 aduan, dan tahun 2019 lebih rendah tingkat aduan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah sebanyak 50 aduan. Dapat diartikan bahwa dari 7 Organisasi Perangkat Daerah yang menerima aduan masyarakat di tahun 2019 tersisa 2 Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Data pada tabel diatas menunjukkan seluruh aduan telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, namun demikian ditahun 2019 perangkat daerah yang masih mendapat aduan dari masyarakat Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Rumah Sakit Umum Daerah NTB lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Aduan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara terus menjadi perhatian, karena kualitas kinerja pelayanan publik yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat, dan akan meningkatkan mutu aparatur pemerintah. Pelayanan publik diera reformasi menjadi isu penting dan strategis karena masyarakat semakin cerdas dan semakin tahu hak-haknya. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat dalam menyelenggarakan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kualitas pelayanan publik ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dimata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Upaya untuk mendorong perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB adalah dengan memberikan stimulan, semangat perubahan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui model kinerja yang obyektif dari unit pelayanan yang ada di daerah, serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang dirasakan tidak sesuai harapan. Pengaduan adalah ungkapan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Peraturan Gubernur NTB Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB tertuang didalam Penanganan pengaduan yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disebut Pos Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik, yang memiliki tugas menyampaikan laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk surat yang minimal memuat informasi tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasil penanganan dan disampaikan

kepada Sekretariat Desk Pengaduan Masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Penyelesaian aduan pelayanan publik Tahun 2019 telah memenuhi target RPJMD yaitu 100%, karena Pos di seluruh Unit Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB telah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan secara optimal hak-hak masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pada tahun 2018Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi NTB yang disusun dan menjadi tanggung jawab Biro Organisasi telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada kategori predikat penilaian BB dengan nilai skor 61,01 meningkat dibandingkan tahun 2018 memiliki nilai B dengan nilai skor 61,01 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 287 Hasil Penilaian LKJiP Pemerintah Provinsi Tahun 2017-2019

No	Komponen Yang Dinilai	2017		2018		2019	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	21,47	30	21,98	30	23,57
b	Pengkuran Kinerja	25	15,14	25	15,50	25	17,34
c	Pelaporan Kinerja	15	9,05	15	9,67	15	11,48
d	Evaluasi Internal	10	5,30	10	4,82	10	6,33
e	Capian Kinerja	20	10,05	20	10,56	20	11,32
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**61,01**	**100**	**62,53**	**100**	**70,05**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**		**B**		**BB**

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2019.

Sajian tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 nilai hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari 61,01 point menjadi 70,05 point, dengan di score BB. Diartikan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintahan Provinsi NTB, yang berorientasi pada hasil serta budaya kerja menunjukkan kinerja yang baik, namun masih perlu upaya meraih predikat yang lebih baik lagi di masa depan.

- **Biro Hukum**

Perkembangan produk hukum dari Tahun 2017 -2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 288 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2017-2019

NO.	PRODUK HUKUM	SATUAN	2017	2018	2019	
					TARGET	REALISASI
1.	Peraturan Daerah	Buah	13	16	10	14
2.	Peraturan Gubernur	Buah	69	51	30	65
3.	Keputusan Gubernur	Buah	1046	956	700	992
	Jumlah		**1.218**	**1.023**	**740**	**1.071**

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 289 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2019

No	Kab/Kota	Difasilitasi						Dievaluasi					
		Raperda/ perda		Raperbup/ perbup		Raperwal / perwal		Raperda/ perda		Raperbup / perbup		Raperwal / perwal	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Kota Mataram	13	12	-	-	-	23	-	1		-	3	-
2.	Lobar	12	8	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-
3.	Loteng	2	18	-	3	-	-	-	2		-	-	-
4.	Lotim	3	4	-	42	-	-	-	-	43	-	-	-
5.	Lombok Utara	8	9		5		-		-			-	
6.	Sumbawa Barat	6	15	-	37	-	-	-	3	1	-	-	-
7.	Sumbawa	21	12	-	2	-	-	-	-		-	-	-
8.	Dompu	3	14	-	4	-	-	-	4	3	-	-	-
9.	Kota Bima	5	8	-	-	-	4	-	4		-	6	-
10.	Bima	8	5	-	5	-	-	-	-	2	-	-	-
	Jumlah	**81**	**105**	-	**101**	-	**27**	-	**14**	**51**	-	**9**	-

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 290 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2019

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
1.	Perkara Perdata No. 39/PDT.G/2018/PN.Pya	Lalu Ramli,dkk (Penggugat/Pembanding)	Gubernur NTB (sbg Tergugat 4/Terbanding 4)	Lahan Bandar Udara (BIL) yang berlokasi di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kab.Lombok Tengah.	PN Praya tgl 13 Pebruari 2019 Nomor : 39/PDT.G/2018/PN.Pya **Amar Putusan Dalam Eksepsi :** Menolak Eksepsi Para Penggugat untuk seluruhnya. **Dalam Pokok Perkara** : a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruh-nya. b. Menghukum Para Penggugat utk membayar biaya perkara yg sampai hr ini ditetapkan sejumlah Rp.6.022.00,-			Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Loteng	Dalam Proses Kasasi oleh Penggugat

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
2.	Perkara Perdata No. 38/PDT.G/2019/PN.Mtr	Hj. Baiq Induwati (Penggugat/Pembanding)	Gubernur/ Pemerintah Daerah Prov. NTB (sbg Tergugat 4/Terbanding 4)	Ruislag Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 2,00 Ha atau 2.000 m2 yang dijadikan sebagai tempat Work Shop Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi NTB.	PTUN Mataram No. 38/PDT.G/2019/PN.Mtr **Amar Putusan Dalam Pokok Perkara** : Gugatan Penggugat tidak diterima			Dusun Serumbung, Desa Lembar, Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat.	Dalam Proses Kasasi oleh Penggugat
3.	Perkara Perdata No. 4/PDT.G/2019/PN.Rbi	Kalisom Binti H. Nurdin, dkk	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Pemerintah Provinsi NTB (sbg Tergugat IV)	Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1996 Milik Pemprov. NTB seluas 685 m2	PN Raba Bima Nomor : 4/PDT.G/2019/PN.Rbi **Amar Putusan Dalam Pokok Perkara** : Menolak Gugatan Para Penggugat			Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima	Penggugat Banding
4.	Perkara Perdata No. 69/PDT.G/2019/PN.Sel	Lalu Haji Abdul Fatah, dkk (Penggugat)	Pemerintah Provinsi NTB (sbg Tergugat 9)	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03 Tahun 2012 seluas 9.810 M2 atas nama Pusat Koperasi Unit Desa NTB dari				Desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lotim	Dalam proses persidangan di PN Selong.

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
				bagian tanah seluas ± 2.445 Ha, pipil No.1299, persil 227					
5.	Perkara Perdata No. 220/PDT.G/2019/PN.Mtr	Ida Made Singarsa (Penggugat)	Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat)	Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB seluas 3.700 m2 yang digunakan untuk Gedung Wanita Provinsi NTB dan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB.				Jalan Udayana No. 8 dan No. 10 Mataram, Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram	Dalam proses persidangan di PN Mataram
6.	Perkara Perdata No. 36/PDT.G/2018/PN.Pya	Sudiarto Bin Mulahir, dkk	Pemerintah Daerah Tk. I NTB (Tergugat III)	Sebidang Tanah dgn pipil 24, percil 1141 kls II 0,480 Ha tercatat atas nama Mulahir alias Bapak Sudirman, Milik Pemprov.NTB seluas				Dusun Ujung, Desa Kuta, Kec.Pujut. Kab. Loteng.	Dalam proses Kasasi oleh Penggugat

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
				480 m2, Hak Pengelolaan atas tanah yang diberikan Pemerintah Provinsi NTB kepada PT.LTDC/ITDC yang berlokasi di Desa Kuta Kec.Pujut Kab. Lombok Tengah.					
7.	Perkara Perdata No. 70/PDT.G/2018/PN.Pya	Rusnan, S.Pd	Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat)	Surat Keputusan (SK Pensiun) Gubernur NTB Nomor : 882.4.0367/BKD/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun.				-	Putusan Inkrah (berkekuatan tetap)
8.	Perkara Perdata No. 37/PDT.G/2016/PN.Pya	Suryo	Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat)	Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB seluas 76.150 m2 yang		PT. Mtr Nomor : 149	Putusan MARI tanggal 1 April	Desa leneng Puyung Kec. Praya	Dalam proses PK oleh

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
				berlokasi di Desa leneng Puyung Kec. Praya Kab. Loteng.		/PDT.G/2017/PN. Mtr **Amar Putusan Dalam Pokok Perkara** : Membatalkan Putusan PN. Praya Nomor : 37/Pdt.G/2016/PN.Pya	2019 Nomor : 1484.K/PDT/2018 yang **Amar Putusan Dalam Provisi :** Menolak Provisi dari Penggugat. **Dalam Eksepsi :** Menolak Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya. **Dalam Pokok Perk**	Kab. Loteng.	Penggugat

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
							ara : a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. b. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat / Pembanding utk membyr biaya perkara dlm semua tkt peradilan, yg dlm tk Kasasi		

No	No. Gugatan	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No PTS		
							sejumlah Rp. 500.000,-		

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2019

Berdasarkan data Penanganan penyelesaian sengketa hukum pada tahun 2019 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga permasalahan hukum/kasus hukum dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus dengan rincian 1 kasus inkrah, 1 banding, 3 kasasi, dalam proses sidang 2 dan proses Peninjaun Kembali (PK) 1 kasus.

Beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum selama tahun 2019 antara lain :

- Kegiatan Propemperda
  Berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai upaya dan tindak lanjut program penataan Peraturan Perundang-undangan serta pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan, perlu melaksanakan Program Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga dalam penyusunan/pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah secara terarah, terkoordinir dan terpadu setiap tahun. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah merupakan proses awal untuk dapat terlaksananya Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah
  Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan di 9 kabupaten kota se NTB. Adapun Perda yang di sosialisasikan adalah sebagai berikut :
  - Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektonik;

- Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan;
- Perda Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;

Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan Rakor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kota Mataram.

- Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Guru

Sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa:

(1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Maksud dari ayat diatas bahwa guru adalah orang yang mendalami profesi sebagai pengajar dan pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi hasil belajar siswa peserta didik, mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk memberikan kontribusi meningkatkan mutu pendidikan nasional

Kedudukan Guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan system pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu : berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi HAM untuk Guru tersebut, maka diharapkan:

a. Terwujudnya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM anak pada pelaksanaan kegiatan di sekolah;
b. Terwujudnya dukungan semua pihak baik dari anak, Guru maupun orang tua untuk bersama sama melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pemenuhan HAM anak;
c. Terwujudnya implementasi konsep pendidikan yang berbasis HAM secara optimal dengan menyebarkan informasi bagi Guru akan adanya hak dan kewajiban yang melekat pada tenaga pendidik dan peserta didik.

- Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Siswa

  Manusia dilahirkan sama dalam hak-haknya. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat mendasar dan mutal diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakatnya.

  Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasaran dan diskriminasi.

  Kegiatan sosialisasi HAM untuk Siswa dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak-haknya sebagai insan peserta didik dan memberikan pemahaman bagi anak-anak siswa SLTA di Provinsi NTB dalam hal melindungi diri dari pelanggaran HAM.

  Dengan dilaksanakannya kegiatasan Sosialisasi dari HAM untuk Siswa diharapkan:

  a. Terwujudnya penghormatan, pencegahan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM anak/siswa pada pelaksanaan kegiatan di sekolah maupun dilingkungan keluarga dan lingkungan bermainnya;
  b. Tersebarnya informasi bagi anak/siswa untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan diri terhadap tindak kekerasan dan kejahatan seksual dari orang disekitarnya yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan social dan mental spriritual;
  c. Tercapainya perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dari lingkungan sekitarnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Kegiatan Rakor HAM dan Penilaian Kab./Kota Peduli HAM

  Rapat Koordinasi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Perpres RANHAM) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Dengan munculnya Perpres dan Permen tersebut, rapat koordinasi perlu dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi kepada pihak Pemerintah daerah terkait Rencana Aksi HAM dan Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Sekretariat Bersama (Setber) RANHAM pada tahun 2018 telah melakukan revisi dan menyempurnakanPerpres 75/2015. Masuknya Kemenlu sebagai salah satu anggota Setber RANHAM akan dapat lebih meningkatkan efektifitas dan kinerja Setber RANHAM. Selain itu Aksi HAM 2018-2019 akan sekaligus dimuat dalam revisi Perpres hingga tidak perli lagi direpotkan untuk menyusun Aksi HAM setiap tahunnya.

Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda:

1. Permasalahan sertifikat illegal dalam kawasan hutan Sekaroh (RTK.15) atas Putusan PK Perkara TUN terhadap Keputusan Menteri Nomor 8214/Kpts-II/2002 tentang Penetapan Kawasan Hutan Sekaroh. Putusan tersebut berdampak terhadap integritas kawasan pengembangan kami, PT. Eco Solutions Lombok (ESL) dan berpotensi menimbulkan gugatan-gugatan lainnya oleh para pemegang serifikat maupun speculator tanah baik di kawasan IUPLJ ESL maupun kawasan hutan lainnya di NTB dan di Indonesia;
2. Surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat Penegak Kebenaran NTB (LSM-LPKB NTB) perihal Keberatan permohonan penerbitan sertifikat HGU PT. SMS. Adanya surat keputusan Bupati Dompu Np. 186 Tahun 2011 tentang Pemberian Ijin Lokasi Tanah seluas lebih kurang 30.000 hektar kepada Direktur PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) untuk keperluan perkebunan tebu dan industri pengolahan di Kabupaten Dompu Provinsi NTB yang berdampak sangat meresahkan masyarakat dan merugikan dimana perkebunan masyarakat sebagai mata pencaharian sudah dihancurkan PT. SMS dengan tanpa hak dan melawan hukum.
3. Surat Advokat dan Legal Konsultan perihal Somasi.
   Kuasa Hukum dari Syaifullah beralamat di Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa menyampaikan peringatan/somasi kepada Gubernur NTB, berkaitan dengan sebidang tanah hibah orang tua pemberi kuasa yang terletak di Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan sertifikat 2384, Nomor Ukur 212/Lempeh/2002 tgl 20

Juni 2002 dan luas 820 m2 yang sampai hari ini berdiri bangunan gedung Kantor Samsat Kabupaten Sumbawa.

4. Terkait Penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah dengan Perjanjian Kontrak Produksi Nomor: 1 Tahun 1995 – 01/IV/GTI/1995 tanggal 12 April 1995;
5. Perkara Ruislag Tanah dan Bangunan lokasi Work Shop Dinas PU Provinsi NTB seluas, 2.500 m2 yang terletak di Desa Serumbung Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
6. Perkara 69/PDT.G/2019/PN.Sel antara Haji Lalu Fatah, dkk (Penggugat) melawan Pemerintah Provinsi NTB (Tergugat 9) dengan obyek sengketa aset Pemerintah Provinsi NTB yang diberikan kepada Pusat Koperasi Unit Desa NTB dalam bentuk Hak Guna Bangunan No.03 Tahun 2012 terletak di Orong Kenaot, Dusun Kenaot, Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur seluas + 9.810 M2 (98 are 10 meter persegi) dari bangian tanah seluas + 2.445 Ha, pipil No. 1.299, persil 227;
7. Surat Pengacara dan Konsultan Hukum Lombok Law Firm sebagai Kuasa Hukum dari Lalu Khairul Huda, dkk Nomor 045/II/sp/VII/2019 tanggal 21 Juli 2019 perihal Permohonan Pembayaran Tanah milik Lalu Khairul Huda, dkk oleh ITDC, dengan obyek keberatan terhadap surat Sekda Provinsi NTB Nomor : 120/320/Pem/2018 tentang Penyelesaian Tanah Masyarakat di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
8. Perkara 20/Pdt.G/2016/PN.RBi antara Siti Nur, dkk (Penggugat) melawan Kepala Dinas Perikanan Provinsi NTB Cq. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima dengan obyek sengketa Tanah milik Pemerintah Provinsi NTB yang berlokasi di Desa Sape Kabupetn Bima yang dibangun sebagai Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dengan luas 0,90 hektar yang merupakan bangian dari tanah seluas + 3,5 hektar;

- **Biro Pemerintahan**

1. Penyusunan LPPD

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) termasuk dalam Dokumen Pertanggungjawaban Gubernur. LPPD dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Peringkat LPPD diumumkan setiap dua tahun sekali, LPPD yang dievaluasi dan dinilai

tahun 2019 diumumkan pada saat hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2019 di Banyuwangi, dimana Provinsi NTB menduduki peringkat 3 untuk tingkat nasional.

2. Batas Daerah

Kebijakan pembinaan batas wilayah tahun 2019, masih tetap diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti dilapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik. Terkait dengan penyelesaian batas wilayah, pada akhir tahun 2017 telah diterbitkan satu lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas wilayah di NTB yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017, tanggal 12 Desember 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat dan dilanjutkan dengan verifikasi lapangan pada bulan April 2018.

Untuk kegiatan penyelesaian penegasan batas daerah secara pasti di lapangan khususnya pada fasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah pada segmen batas daerah yang belum terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah atau telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah akan tetapi masih terdapat sengketa batas daerah yang diakibatkan oleh adanya perbedaan persepsi terhadap penarikan garis batas daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diterbitkan.

Sampai tahun 2019 ini batas wilayah daerah sampai saat ini telah diterbitkan 10 peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2013 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Tengah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kota Mataram;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2013 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Timur;
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Dompu;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Tengah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Dompu dengan Kabupaten Bima;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa;

Untuk 10 segmen batas daerah yang sudah terbit Permendagrinya namun masih ada perselisihan yaitu :

a. Segmen batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat masih ada perbedaan persepsi terhadap penarikan garis batas daerah pada titik koordinat I menuju PABU A.
   Sedangkan penempatan titik koordinat dan penarikan garis batas yang lain tidak terjadi permasalahan (sudah bias diterima)
b. Segmen batas daerah Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Tengah masih ada perselisihan belum tercapai kata sepakat dalam penentuan titik batas daerah dan penarikan garis batas khususnya penentuan titik nomor TK 1 menuju TK 2 dan TK 3 yang berlokasi diantara Dusun Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat dengan Desa Montong Ajan Kabupaten Lombok Tengah dan kini sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI

Sedangkan titik-titik lain dan penarikan garis batas lainnya dapat diterima oleh kedua belah pihak.

c. Segmen batas daerah Kabupaten Bima dengan kabupaten Dompu permasalahan terjadi pada lintasan titik koordinat 59 ke titik koordinat 60 yang lintasan dalam lampiran peta pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 37 Tahun 2016 bila dioverly di lapangan maka Dusun Krakau yang selama ini masuk wilayah Kabupaten Dompu akan masuk pada wilayah Kabupaten Bima untuk menghindari adanya sengketa yang mengarah pada terjadinya konflik antar warga maka solusinya dicarikan kemufakatan antar kedua Pemerintahan yang diwakili oleh Bupati kedua belah pihak dengan menuangkan kesepakatan tersebut dalam sebuah berita acara yang akan menjadi dasar untuk merubah Permendagri, namun sampai saat ini kesepakatan tersebut belum berhasil dibuat, pihak pemerintah Provinsi masih mengupayakan

adanya pertemuan antar pimpinan kedua pemerintahan. Sedangkan untuk titik koordinat lain dan penarikan garis batasnya tidak ada masalah dan dapat diterima oleh kedua Pemerintahan.

d. Segmen batas Kabupaten Bima dengan Kota Bima ada kesalahan dalam penulisan unsur toponimi sungai Oifanda dalam lampiran peta yang sudah berkoordinat pada Permendagri Nomor 33 tahun 2016 bila diovely di lapangan sungai Oifanda yang dimaksud dalam peta adalah Sorinehe, perbedaan ini memicu adanya sengketa batas baru, untuk menyelesaikan perselisihan batas dimaksud Pemerintah Provinsi sedang mengupayakan mediasi kedua pemerintah guna mencari solusi penyelesaian namun sampai saat ini belum ada kesepakatan.

3. Penataan Desa

Kegiatan penatan desa dimaksudkan untuk mengefektifkan sebuah pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa langkah tersebut bisa dengan Pemekaran desa dengan membentuk desa, penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa atau penghapusan desa. Kegiatan yang dilakukan selama ini adalah memfasilitasi pemekaran /pembentukan desa baru sejumlah 26 Desa persiapan yang telah memasuki dalam tahap pematangan untuk menjadi desa difinitif adapun desa persiapan dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Utara adalah:

No	Nama Desa persiapan	Kecamatan	Kode Register	Keterangan
1.	Batu Rakit	Bayan	08.04.0001	Dasar Perbup. Nomor 9 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Sukadana.
2.	Menggala	Pemenang	08.05.0002	Dasar Perbup. Nomor 10 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Pemenang Barat.
3.	Pansor	Kayangan	08.03.0003	Dasar Perbup. Nomor 11 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Sesait.
4.	Sama Guna	Tanjung	08.01.0004	Dasar Perbup. Nomor 12 Tahun 2015 pemekan dari Desa Jenggala.

No	Nama Desa persiapan	Kecamatan	Kode Register	Keterangan
5.	Andalan	Bayan	08.04.0005	Dasar Perbup. Nomor 13 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Akar-akar.
6.	Gunjan asri	Bayan	08.04.0006	Dasar Perbup. Nomor 14 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Akar-akar
7.	Santong Mulia	Kayangan	08.03.0007	Dasar Perbup. Nomor 15 tahun 2015 pemekaran dari Desa Sesait.
8.	Selelos	Gangga	08.02.0008	Dasar Perbup. Nomor 16 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Bentek.
9.	Segara Katon	Gangga	08.02.0009	Dasar Perbup. Nomor 17 Tahun 2015 pemekaran dari Desa Genggelang.
10.	Rempek Darusalam	Gangga	08.02.0010	Dasar Perbup. Nomor 18 Pemekaran Tahun 2015 pemekaran dari Desa Rempek.

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

2) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

No	Nama Desa Persiapan	Kecamatan	Kode Register	Keterangan
1.	Pandan Tinggang	Praya Barat Daya	02.11.0001	Dasar Perbup. Nomor 26 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Batu Jangkih.
2.	Janggawana	Janapria	02.07.0002	Dasar Perbup. Nomor 27 Tahun 2016 pemekan dari Desa Saba.
3.	Lingkok Berenge	Janapria	02.07.0003	Dasar Perbup. Nomor 28 Tahun 2016 pemekaran dari Desa saba
4.	Lendang Tampel	Batukliang	02.03.0004	Dasar Perbup Nomor 29 Tahun 2016 Pemekaran dari Desa Beber.
5.	Jero Puri	Praya Timur	02.06.0005	Dasar Perbup Nomor 30 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Ganti.

No	Nama Desa Persiapan	Kecamatan	Kode Register	Keterangan
6.	Kerame Jati	Pujut	02.04.0006	Dasar Perbup Nomr 31 Tahun 2016 Pemekaran dari Desa Pengembur.
7.	Lelong	Praya Tengah	02.10.0007	Dasar Perbup Nomor 32 pemekaran dari Desa Kelebuh.
8.	Prako	Janapria	02.07.0008	Dasar Perbup Nomor 33 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Loang maka.
9.	TibuSisok	Janapria	02.07.0009	Dasar Perbup Nomor 34 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Loang maka
10.	Beleke Lebe Sane	Praya Timur	02.06.0010	Dasar Perbup Nomor 35 Tahun 2016 pemekaran dari desa Beleka.
11.	Beleke Daye	Praya Timur	02.06.0011	Dasar Perbup Nomor 36 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Beleka.
12.	Pajangan	Kopang	02.09.0012	Dasar Perbup Nomor 37 Tahun Nomor 2016 pemekaran dari Desa Dasan Baru..
13.	Berinding	Kopang	02.09.0013	Dasar Perbup Nomor 38 tahun 2016 pemekaran dari Desa Kopang Rembiga.
14.	Pengonak	Praya Timur	02.06.0014	Dasar Perbup Nomor 40 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Ganti.
15.	Dadap	Pujut	02.04.0015	Dasar Perbup Nomor 41 Tahun 2016 pemekaran dari Desa Pengembur.

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

3) Desa Persiapan di Kabupaten Sumbawa Barat.

No.	Desa persiapan	Kecamatan	Kode Register	Keterangan
1.	Lamunga	Taliwang	07.02.0001	Dasar Perbup. Nomor 5 Tahun

				2017 Tentang pemekara dari Desa Batu Putih

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

Khusus untuk 10 desa persiapan di wilayah Kabupaten Lombok Utara saat ini sedang berproses peningkatan statusnya dengan dibuatnya Ranperda pembentukan desa baru hasil peningkatan status desa persiapan menjadi desa definitif telah selesai evaluasi oleh Gubernur dan permohonan untuk mendapatkan kode desa telah diajukan pada Kementerian Dalam Negeri.

4. Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD

Untuk fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah difasilitasi izin Kepala Daerah dan DPRD sebanyak 37 buah rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 291 Rekapitulasi Rekomendasi Izin Kepala Daerah dan DPRD Tahun 2019

No	Bulan	Undangan	Umroh/Haji	Berobat	Jumlah
1.	Januari	2	1	-	3
2.	Februari	1	1	1	3
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	1	-	-	1
6.	Juni	2	-	1	3
7.	Juli	11	1	-	12
8.	Agustus	3	-	-	3
9.	September	4	-	-	4
10.	Oktober	1	-	1	2
11.	Nopember	-	-	1	1
12.	Desember	2	3	-	5
	JUMLAH				**37**

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2019

- **Biro Perekonomian**

Tugas pokok Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB adalah sebagai fasilitator dan koordinator pelaksana program pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi NTB. Program yang telah dilaksanakan adalah Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan, Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah, Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Invetasi, dan Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian.

a. Perkembangan Inflasi

Laju inflasi NTB tahun kalender Desember 2019 sebesar 1,87% lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 3,16%. Sedangkan laju inflasi "tahun ke tahun" Desember 2019 sebesar 1,87% lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi "tahun ke tahun" di bulan Desember 2018 sebesar 3,16%.

5 (lima) komoditas yang mengalami penurunan harga terbesar antara lain Daging Ayam Ras, Semen, Batu Bata/Batu Tela, Tongkol Pindang, dan Tongkol/Ambu–Ambu.

Tabel 2. 292 Perbandingan angka inflasi NTB dan Nasional Tahun 2015 s.d 2019

No	Tahun	NTB	Nasional
1.	2015	3,41	3,36
2.	2016	2,61	3,02
3.	2017	3,70	3,61
4.	2018	3,16	3,13
5.	2019	1,87	2,72

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 293 Rekapitulasi Inflasi Tahun 2019

No	Bulan	Mataram	Bima	Gabungan (NTB)	Nasional
1	Januari	0,44	0,76	0,51	0,32
2	Februari	-0,24	-0,69	-0,33	-0,08
3	Maret	-0,17	-0,40	-0,22	0,11
4	April	0,33	0,67	0,40	0,44
5	Mei	0,73	1,18	0,82	0,68
6	Juni	0,63	0,16	0,54	0,55

No	Bulan	Mataram	Bima	Gabungan (NTB)	Nasional
7	Juli	-0,03	-0,52	-0,13	0,31
8	Agustus	-0,35	-0,56	-0,39	0,12
9	September	0,44	0,16	-0,38	0,27
10	Oktober	0,49	0,24	0,44	-0,02
11	November	0,15	0,62	0,24	0,15
12	Desember	0,21	0,95	0,36	0,34
Komulatif		2,63	2,57	1,86	2,69

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi NTB yang diukur dari PDRB selama tahun 2019 mencapai Rp. 132,67 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,01 triliun. Adapun pada tahun 2018 PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.123,97 triliun dan Rp.90,39 triliun. Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, perekonomian Provinsi NTB tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 4,01%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh pertumbuhan positif seluruh kategori lapangan usaha, selain kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Konstruksi yang tumbuh sebesar 12,19%. Selanjutnya, kategori Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 11,01% dan kategori Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,04%. Kemudian kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,36% dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,11%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi setelah gempa tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi NTB sebesar 4,01% tersebut disumbangkan oleh kategori Konstruksi sebesar 1,25 poin, diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,90 poin, dan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,36 poin. Selanjutnya kategori Jasa Pendidikan menyumbang 0,33% dan kategori Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menyumbang 0,19 poin. Struktur ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; diikuti kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan kategori Pertambangan dan Penggalian dengan peran masing-masing sebesar 22,89%; 14,92%; dan 13,56%. Selanjutnya kategori Konstruksi; dan kategori

Transportasi dan Pergudangan memiliki peran masing-masing sebesar 10,54% dan 7,27%. Peranan kelima lapangan usaha tersebut mencapai 69,19% terhadap total PDRB Provinsi NTB. Adapun Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB tanpa Subkategori Pertambangan Bijih Logam tumbuh sebesar 4,76% pada tahun 2019. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang hanya tumbuh 3,21%. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi NTB pada kegiatan ekonomi di luar pertambangan bijih logam menunjukkan adanya peningkatan kinerja.

Tabel 2. 294 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2018-2019

INDIKATOR	2018		2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Pertumbuhan Ekonomi non Tambang (%)	6,25-6,50	3,08	4,0-5,0	4,76

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tahun 2019 pertumbuhan ekonomi non tambang mengalami peningkatan yaitu mencapai 4,76%, pelemahan pertumbuhan ekonomi non tambang tahun 2018 merupakan dampak dari musibah gempa bumi di NTB. Hal ini erat kaitannya dengan menurunnya jumlah wisatawan yang mengunjungi NTB pada masa pemulihan setelah gempa yang berdampak pada menurunnya jumlah penumpang dan penjualan barang terkait sektor pariwisata.

Tabel 2. 295 Perbandingan angka pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Termasuk Sektor Pertambangan Bijih Logam Tahun 2015 s.d 2019

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi NTB	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
1.	2015	21,76	4,88
2.	2016	5,81	5,03
3.	2017	0,12	5,07
4.	2018	-4,56	5,17
5.	2019	4,01	5,02

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2018

c. Perkembangan Badan Usaha Milik Daerah

Perkembangan Badan usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan tingkat kesehatan 11 Badan Usaha Milik Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 296 Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2019

NO	PERUSAHAAN DAERAH DAN BUMD	KATEGORI
1	PT. Bank NTB	Sehat
2	PT. GNE	Sehat
3	PT. Jamkrida NTB Bersaing	Sehat
4	PD. BPR NTB Kota Mataram	Sehat
5	PD. BPR NTB Lombok Barat	Sehat
6	PD. BPR NTB Lombok Tengah	Sehat
7	PD. BPR NTB Lombok Timur	Sehat
8	PD. BPR NTB Sumbawa Barat	Sehat
9	PD. BPR NTB Sumbawa	Sehat
10	PD. BPR NTB Dompu	Sehat
11	PD. BPR NTB Bima	Sehat

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, secara keseluruhan dapat dikategorikan sehat oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK). PD. BPR NTB Kabupaten Lombok Timur saat ini kondisinya sudah sehat dan sudah keluar dari pengawasan intensif OJK. Pada Tahun Buku 2019 diasumsikan sudah mampu memperoleh keuntungan dan akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB.

Tabel 2. 297 Realisasi Penerimaan Deviden yang Bersumber dari Deviden Perusda dan BUMD Tahun 2017 s.d 2019

NO	NAMA PERUSDA dan BUMD	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	PT. BANK NTB	59,958,450,102	49,324,434,301	60,000,000,000	43,913,745,636	43,913,745,636	48,710,000,000
2	PT. GERBANG NTB EMAS	1,000,000,000	841,745,713	1,100,000,000	310,000,000	673,472,922	473,000,000
3	PT. JAMKRIDA NTB BERSAING	136,702,012	554,373,560	692,000,000	501,899,427	554,373,558	699,000,000
4	PT. DAERAH MAJU BERSAING	16,000,000,000	-	16,000,000,000	-	-	-
5	PT. ASKRIDA	88,761,211	96,086,469	100,634,661	75,375,858	75,375,858	75,375,858
6	PD. BPR NTB MATARAM	491,903,868	257,441,653	510,846,000	284,922,685	257,441,653	330,625,236
7	PD. BPR NTB LOMBOK BARAT	2,799,106,000	2,370,283,698	2,750,000,000	1,440,213,305	1,900,000,000	1,583,878,616
8	PD. BPR NTB LOMBOK TENGAH	2,691,964,307	2,020,350,270	2,384,904,766	2,584,924,080	2,020,350,270	2,631,410,493
9	PD. BPR NTB LOMBOK TIMUR	2,000,855,562	-	2,150,014,188	-	-	1,169,209,014
10	PD. BPR NTB SUMBAWA BARAT	160,384,050	432,992,430	375,000,000	348,190,401	432,992,430	330,996,597
11	PD. BPR NTB SUMBAWA	2,162,252,784	2,252,025,374	2,331,895,837	1,808,152,311	2,252,025,374	2,195,802,190
12	PD. BPR NTB DOMPU	1,034,567,332	1,139,655,455	1,452,902,379	1,171,188,848	1,139,655,455	591,952,951
13	PD. BPR NTB BIMA	1,771,634,334	1,012,317,147	1,645,740,000	1,735,092,122	1,012,317,147	1,500,077,279
JUMLAH		**90,296,581,562**	**60,301,706,070**	**91,493,937,831**	**54,173,704,673**	**54,231,750,303**	**60,291,328,234**

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi deviden terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTB berfluktuasi. Tahun 2019 deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp.60.291.328.234,- mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp.54.173.704.673,- atau 11,29%. Deviden untuk tahun 2019 Rp.60.291.328.234,- masih menjadi perkiraan karena belum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai hasil audit akuntan publik. BUMD yang semula berjumlah 12 perusahaan saat ini menjadi 11 perusahaan karena PT. Daerah Maju Bersaing sudah dibubarkan sejak tahun 2019.

- **Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah**

Pelaksanaan tender pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB yang dilaksanakan oleh Biro Bina Adminsitrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN sejumlah 190 paket.

Pada tahun 2019 Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB, salah satu target yang ditetapkan dalam program prioritas RPJMD adalah program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelakasanaan kebijakan Kepala Daerah dengan indikator tingkat kematangan UKPBJ pada Level 3, belum bisa tercapai. Hal ini disebabkan

karena item penilaian untuk mencapai Level 3 bertambah, yaitu standarisasi LPSE harus dipenuhi. UKPBJ Provinsi NTB belum bisa memenuhi itu mengingat LPSE baru bergabung dengan UKPBJ pada tanggal 1 April 2019 yang mana prasarana dan sarananya belum ada/memadai.

Kegiatan tender di UKPBJ Provinsi NTB pada tahun 2019 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 298 Realisasi Kegiatan tender UKPBJ Provinsi NTB

NO	KEGIATAN	2018		2019	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang	151	311.970.752.816	152	315.070.785.176
	Terdiri dari :				
	Jasa Konsultansi	23	6.362.374.974	18	7.449.685.000
	Jasa Konstruksi	62	201.066.861.134	57	167.382.539.820
	Pengadaan Barang	64	103.096.916.708	70	112.477.266.000
	Jasa Lainnya	2	1.444.600.000	7	4.874.266.000
2.	Jumlah Kontrak dari 151 paket lelang adalah sebesar		277.656.745.009		282.379.232.658
3.	Efisiensi dari 151 paket kegiatan yang di lelang		34.314.007.807		32.691.552.518,42
4.	Persentase Efisiensi thd total dana yang dilelang	11,00 %		10,37 %	

Sumber: Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2019

Tender pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBN, yang dilkasanakan oleh UKPBJ Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 299 Realisasi Kegiatan Tender UKPBJ Provinsi NTB Tahun 2018 s.d 2019 Sumber dana APBN Provinsi NTB

NO	KEGIATAN	2018		2019	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang Tahun	55	113.774.068.745	38	50.899.089.560
	Terdiri dari :				
	a. Jasa Konsultansi	0	0	0	0
	b. Jasa Konstruksi	0	0	2	760.000.000
	c.Pengadaan Barang	44	106.088.168.745	30	47.673.359.060
	d. Jasa Lainnya	11	7.655.900.000	6	2.465.730.500
2.	Jumlah Kontrak dari 61 paket lelang adalah sebesar		111.573.980.136		47.337.433.200
3.	Efisiensi dari 61 paket kegiatan yang di lelang		2,170.088.609		3.561.656.360
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang	1,91 %		7,00 %	

Sumber: Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2019

Proses tender pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup provinsi NTB, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan bidang Perumahan dan kawasan permukiman, Perhubungan dan Tata Ruang, SDA dan LH, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) NTB sebagai UKPBJ percontohan di Indonesia yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Tahun 2018 UKPBJ NTB mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Nasional Procurement Award 2018 dengan kategori UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (*Center of Excellence*) Pengadaan Baran/Jasa.

Dalam meningkatkan pelayanan UKPBJ didukung dengan tenaga pelaksana sebanyak 27 orang terdiri dari 18 orang tenaga pelaksana yang sudah memiliki sertifikat, dan 9 orang di bagian sekretariat, dimana sebanyak 12 orang sudah menjadi fungsional pengelola pengadaan barang jasa. UKPBJ dan TEPRA di Provinsi NTB merupakan salah satu dari 29 UKKPBJ percontohan di Indonesia, dan menerima beberapa

kunjungan dari Provinsi Aceh, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Provinsi NTT dan dari LKPP (pendampingan e katalog).

- **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Tabel 2. 300 Perkembangan Data CapaianKinerjaberdasarkan RPJMD NTB Tahun 2019 - 2023

INDIKATOR	SATUAN	2017	2018	2019	
				TARGET	REALISASI
Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,1	35,45	35,81	NA

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB, 2019

Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Peringatan hari besar Islam: Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, IdulFitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah;
2. Pesona Khasanah Ramadhan Tahun 1440 H dilaksanakan satu bulan penuh yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Mataram dengan kegiatan sebagai berikut:
   a. Shalat Tarawih dari Jazirah Arab (Yordania, Mesir) 1 juz setiap malam;
   b. Buka bersama (Ta'jil 5.000 gelas setiap sore) dan nasi kotak;
   c. Sahur bersama (nasi kotak dari SKPD dan rumah makan yang ada di Mataram);
   d. Kajian Ba'da Zuhur setiap hari selama bulan Ramadhan;
   e. Bazaar buku-buku islam dan kuliner khas arab.
3. Penyelenggaraan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji (JH). Jumlah Calon Jamaah Haji yang diberangkatkan dari kabupaten/kota se-Provinsi NTB Tahun 2019 sebanyak 4.906 orang;
4. Peserta MTQ XXVIII Tingkat Provinsi NTB setelah melalui seleksi, tersaring sebanyak 48 orang juara, 1 orang peserta juara kedua STQH tingkat Nasional yang dilaksanakan di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
5. Pemilihan Sekolah/Madrasah sehat tingkat Provinsi, terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP dan SMA. Dari 25 sekolah yang dinilai, terseleksi 12 sekolah yang menerapkan program Trias Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) secara berkesinambungan. Adapun

mekanisme dalam penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat (LSS) adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penilai Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTB dengan Surat Keputusan Gubernur;
b. Penyusunan Panduan Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTB
c. Pemberitahuan kepada Tim Pembina Unit Kesehatan Sekolah/Madrasah Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan LombaSekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi;
d. Pendaftaran peserta Lomba Sekolah/Madrasah Sehat sebagaimana syarat yang ditentukan. Adapun peserta LSS tingkat provinsi adalah juara I Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Kabupaten/Kota pada masing-masing jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota;
e. Verifikasi data dan profil Sekolah/Madrasah peserta Lomba Sekolah/Madrasah Sehat;
f. Observasi dan Penilaian Lapangan;
g. Pengolahan Data Hasil Observasi dan Penilaian Lomba Sekolah/Madrasah Sehat;
h. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi NTB melalui Surat Keputusan Gubernur. Bagi Juara I Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Provinsi pada masing-masing jenjang Pendidikan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) akan diikutkan pada Lomba Sekolah/Madrasah Sehat Tingkat Nasional.

6. Parade Senja merupakan kegiatan yang dilaksanakan berupa Lomba Parade Marching Band Tingkat SD/MI, SLTP dan SLTA dan telah terseleksi sebanyak 9 Sekolah serta 6 sekolah untuk lomba Gendang Beleq tingkat SLTP dan SLTA;
7. Kegiatan pengendalian zoonosis dilakukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat terkait tugas dan fungsinya dalam melaksanakan Pengendalian Zoonosis. Kegiatan ini melakukan workshop zoonosis lintas stakeholder terkait. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dari workshop pengendalian zoonosis adalah sebagai berikut:
   a. Penguatan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis di Kabupaten/Kota termasuk di dalamnya adalah penguatan koordinasi lintas sector dari anggota Komda pengendalian Zoonosis;
   b. Meningkatkan kewaspadaan wabah zoonosis (Kejadian Luar Biasa Rabies) dan penyakit infeksi lainnya

c. Penyebarluasan informasi tentang kewaspadaan dini terhadap zoonosis melalui media KIE;
d. Menyusun Rencana Kontijensi Pandemi Zoonosis bagi setiap Kabupaten/Kota.

8. Kegiatan workshop Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) tahun 2019 menghasilkan point penting yakni:
   a. Tema workshop adalah Sistem Informasi Komunikasi 3 Pilar (SIRUKOGALAR) dalam menuntaskan tindakan pasung pada ODGJ.
   b. Penguatan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) yang telah terbentuk baik di provinsi maupun di masing-masing Kabupaten/kota.
   c. Anggota TPKJM Kabupaten/Kota melaksanakan advokasi ke Bappeda masing-masing agar memasukkan program dan anggaran terkait Bebas Pasung, Dukungan Psikososial, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi ke dalam DPA Bagian Kesra Kabupaten/Kota serta program dan anggaran terkait system rujukan kesehatan jiwa dan pelatihan *screening* kesehatan jiwa ke dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
   d. Anggota TPKJM Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial di masing-masing OPD.

9 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pada tahun 2019 melakukan beberapa workshop dan rapat koordinasi antara lain: Workshop Penguatan Organisasi POPCI HIV-AIDS 1 Kali, Verifikasi Data HIV-AIDS 1 Kali, Pertemuan 6 Bulanan KPA 2 Kali, Koordinasi Internal Pokja 1 Kali, Seminar HIV-AIDS Dalam Rangka MRA 1 Kali, Pertemuan Kelompok Dukungan Sebaya(KDS) 15 Kali, Penguatan Organisasi 10 Kali, Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Sekolah 10 Kali, PEER Group HIV-AIDS di Ponpes, Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di Masyarakat (Organisasi wanita dan mahasiswa).
   a. Penguatan kelembagaan KPA Kabupaten/Kota yang telah mempunyai peraturan Bupati seperti KPA Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah;
   b. Advokasi kepada penentu kebijakan dan sosialisasi kepada penduduk usia 15-24 tahun (siswa sekolah/ponpes dan mahasiswa), organisasi wanita, organisasi pemuda dan ASN terkait HIV/AIDS;
   c. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan NGO terkait program penanggulangan HIV/AIDS di daerah;

d. Perlu adanya petugas lapangan dan petugas pendamping yang berasal dari komunitas/penggiat HIV-AIDS Kabupaten/Kota yang dibiayai dari APBD Kabupaten dan Kota.

10 Melalui Kegiatan Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang pedoman koordinasi perangkat daerah rumpun kesejahteraan rakyat Provinsi NTB, yang dimaksudkan untuk mingkatkan jaringan kerja dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan pada akhirnya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

10. Permasalahan bidang ketenagakerjaan sesuai hasil koordinasi dengan instansi teknis dan OPD terkait adalah sebagai berikut :
    a. Tingginya angka pengangguran termasuk yang berasal dari lulusan SMK;
    b. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki angkatan kerja;
    c. Tingginya animo masyarakat untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI;
    d. Terbatasnya penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja;
    e. Produktivitas tenaga kerja yang rendah;
    f. Daya saing tenaga kerja masih rendah;

    Berdasarkan permasalahan diatas dianggap perlu untuk menyusun Roadmap Angkatan Kerja sebagai dokumen perencanaan sebagai solusi masalah ketenagakerjaan tersebut.

- **Biro Humas Dan Protokol**

Biro Humas dan Protokol merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja pemerintah kepada publik. Dalam peranannya sebagai penyampai informasi, terus berupaya dan mencari kiat konstruktif dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang cepat terutama perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Biro Humas dan Protokol terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi, serta berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik, melalui upaya mewujudkan humas dan protokol yang informatif, responsive dan atraktif, dengan peningkatan penyediaan layanan doumentasi yang berkualitas, inspiratif dan mudah diakses; peningkatan layanan informasi yang aktual, akurat, edukatif dan komunikatif; serta

peningkatan pelayanan keprotokolan dan penerimaan tamu secara professional dan terintegrasi.

Inovasi dalam menyiapkan program pelayanan dokumentasi pimpinan yang siap diakses dan mudah ditemukan dalam waktu yang cukup singkat salah satunya dengan menciptakan system elektronik dokumentasi peliputan (Sendok Pelit) yang saat ini memasuki tahapan perwujudan aplikasi dan pengisian konten.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB berkomitmen untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja maupun Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2019, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Disamping itu juga, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB pada tahun 2019 telah melakukan inovasi pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media dengan kegiatan Pemantapan Komunikasi dan Informasi yaitu dengan Pengembangan Management Publik Relation Command Centre (PRCC) dengan didukung dengan 6 Aplikasi penunjang yang terintegrasi yaitu:

1. MCC (*Media Control dan Cooperation*);
2. GSMH (*Governor and Vice Governor Social Media Handling*);
3. MAPS (*Meeting Agenda Plan Summary*);
4. DPIS (*Data and Publik Information Service*);
5. OLDS (*Online Letter Disposition System*);
6. Sendok Plate (Sistem Elektronik Dokumentasi PeliputanTerpadu).

Inovasi yang dilakukan ini telah menghantarkan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB meraih beberapa Penghargaan sepanjang tahun 2019 yaitu:

1. Sebagai Badan Publik Informatif Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTB;
2. “10 TOP INOVASI“ pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTB eNTeBeNOVIK Tahun 2019.

Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Biro Humas dan Protokkol Setda Provinsi NTB ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kehumasan dan Keprotokoleran sangat ditentukan oleh komitmen, Keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen dari semua aparatur di Biro Humas dan Protokol.

Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan dating dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat Koordinasi baik internal maupun eksternal;
2. Inovasi dalam pelaksanaan Tugas;
3. Optimalisasi Manajemen Internal;
4. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang kehumasan dan protokol.
5. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan-pelatihan teknis dan workshop guna menunjang peningkatan kinerja Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
6. Meningkatkan mutu Teknologi Informasi yang sudah ada untuk memudahkan layanan yang cepat, tepat dan responsif.

Biro Humas dan Protokol melakukan kerjasama publikasi melalui berbagai media massa cetak dan elektronik baik media local maupun media nasional untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan kegiatan Pimpinan. Dalam rangka memperkuat publikasi informasi, secara rutin mengirim rilis berita dan mengadakan jumpa pers, dengan memanfaatkan kemajauan teknologi informasi dan komunikasi melalui website Biro Humas dan protokol, youtube serta media social seperti facebook, twitter, dan instagram.

Pelibatan Biro Humas dan Protokol dalam event berskala nasional dan internasional khususnya dari pengaturan protokoler, proses pemberitaan, dan pendokumentasian diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 301 Event Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2019

No	Event	Waktu		Ket
1	Lombok Sumbawa Great Sale	28 Januari - 28 Februari		Nasional
2	Festival Pesona Bau Nyale 2019	24	Februari	Nasional

No	Event	Waktu		Ket
3	Tour de Lombok Mandalika	7 - 10	Maret	Nasional
4	Festival PesonaTambora	9 – 11	April	Nasional
5	Festival Lawata	10	April	Nasional
6	Island Tourism Forum (ITF)	29	April	Internasional
7	Pesona Khazanah Ramadhan	8 – 25	Mei	Nasional
8	The 31st Session of the Man and the Biosphere Programme International Coordinating Council	17	Juni	Internasional
9	Rinjani 100	22 - 23	Juni	Nasional
10	Festival PesonaMantar	14 – 20	Juli	Nasional
11	Hari Anak Indonesia	18	Juli	Nasional
12	Festival Sangiang Api	28	Juli	Nasional
13	Jambore Nasional (Jamnas) IMI	15 - 18	Agustus	Nasional
14	Bulan Pesona Lombok Sumbawa	18 Agustus—18 September 2019		Nasional
15	Penandatanganan MoU dengan 18 Perguruan Tinggi Malaysia	23	Agustus	Internasional
16	NTB Expo 2019	29	Agustus	Nasional
17	The 6th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium 2019	3 – 6	September	Internasional
18	Konferensi Studi Regional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia	4	September	Nasional
19	Festival PesonaMoyo	16 – 22	September	Nasional
20	Festival Pesona Senggigi	18 – 21	September	Nasional
21	Bikers Brotherhood Motor Club Indonesia	20	September	Nasional
22	International Coastal Clean Up Day 2019	21	September	Internasional
23	Festival PacuanKuda	22—26 September 2019		Nasional

No	Event	Waktu		Ket
24	Rapat Pimpinan Nasional II Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia	26	September	Nasional
25	Peringatan World Rabies Day	28	September	Nasional
26	Mandalika International Marathon	5	Oktober	Internasional
27	Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	13	November	Nasional
28	Seminar Nasional dan Rapat Kerja Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia	21	November	Nasional
29	PesonaDesaWisata	21 – 22	November	Nasional
30	Rinjani Golf Tournament	14 – 15	Desember	Nasional

Sumber: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, 2019

- **Biro Kerjasama**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerjasama daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019 tertuang dalam 51 dokumen melampaui target yang ditetapkan sebanyak 34 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

- Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)

Usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pada tahun 2019 perjanjian kerjasama

daerah dengan daerah lain sebanyak 27 perjanjian sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 302 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Tahun 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
1	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dinkes Kab.Sumbawa Barat tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/57/kesmas/v/2019 441/068dikes/v/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Sumbawa Barat terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa Barat terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
2	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dinkes Kabupaten Lombok Tengah tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/54/KESMAS/V/2019 444/1130/KES/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Loteng terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Loteng terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
3	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kabupaten Lombok Timur tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	445/52/KESMAS/V/2019 800/505/KES/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Lotim terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Lotim terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
4	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan	440/61/KESMAS/V/	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Prov.NTB dengan Dikes Kabupaten Bima tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	2019 800/78.A/DIKES/V 2019		dengan Dikes Kab Bima terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	dengan Pemkab Bima terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
5	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kota Bima tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/60/KESMAS/V/2019 800/513.A/DIKES/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kota Bima terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Bima terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
6	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kabupaten Dompu tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/57/KESMAS/V/2019 441.7/2251/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Dompu terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Dompu terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
7	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kabupaten Sumbawa tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/53/KESMAS/V/2019 745/680KESMAS/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Sumbawa terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Sumbawa terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
8	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kabupaten Lombok Utara tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/59/KESMAS/V/2019 627.1/01/DIKES/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Lombok Utara terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Lombok Utara terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
9	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Kota Mataram tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/55/KESMAS/V/2019 440/1233.A/KES/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kota Mataram terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
10	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Dikes Lombok Barat tentang Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan	440/58/KESMAS/V/2019 442.1/205.1/V/2019	6 Mei 2019	terjalinnya KJS antara Dikes Prov. NTB dengan Dikes Kab Lobar terkait Revitalisasi Posyandu di bidang kesehatan	terlaksananya kerjasama antara Pemprov NTB dengan Pemkab Lobar terkait Revitalisasi Posyandu Bidang Kesehatan sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
11	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga	414.1/04/DPMPD-DUKCAPIL 209/DP2KBPMD/2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Utara tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan			Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Utara terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	tugas, peran dan kewajiban masing-masing
12	Perjanjian Kerjasam Dinas Pemberdayaa Masyarakat Pemerintahan Des Kependudukan Da Pencatatan Sip Prov.NTB denga Dinas Pengendalia Penduduk Keluarg Berencana Pemberdayaan Masyarakat Des Kab.Lombok Bar tentang Revitalisa Posyandu melal Advokasi Regula dan Penguata Kelembagaan	414.1/657/ DPMPD-DUKCAPIL 008/527.B/ DPMD/ 2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Lombok Barat terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
13	Perjanjian Kerjasam Dinas Pemberdayaa Masyarakat Pemerintahan Des Kependudukan Da Pencatatan Sip Prov.NTB denga Dinas Pengendalia Penduduk Keluarg Berencana Pemberdayaan Masyarakat Des Kab.Lombok Bar tentang Revitalisa Posyandu melal Advokasi Regula	414.1/03/D PMPD-DUKCAPIL 414.1/03/D PMD	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Tengah terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	dan Penguata Kelembagaan			Penguatan Kelembagaan	
14	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Lombok Timur tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	414.1/723/ DPMPD-DUKCAPIL 414.2/422.a /PMD/ 2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Lombok Timur terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
15	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bima tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	414.1/645/ DPMPD-DUKCAPIL 414.4/45.A /DPMD/ 2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Bima terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
16	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan	414.1/642/ DPMPD-DUKCAPIL 414.1/242.a /DPMD/ 2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Dompu tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan			Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa KabDompu terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
17	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	414.1/643/ DPMPD-DUKCAPIL 414.1/476/ DPMD/ 2019	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Sumbawa terkait Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan kewajiban masing-masing
18	Perjanjian Kerjasama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.NTB dengan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan	414.4/644/ DPMPD-DUKCAPIL 414.1/0669 /DPMD KSB	28 Juni 2019	terjalinnya KJS antara Dinas PMPD DUKCAPIL Prov. NTB dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Sumbawa Barat terkait Revitalisasi	Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan dapat ditindaklanjuti dengan terarah sesuai pembagian tugas, peran dan

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa Barat tentang Revitalisasi Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan			Posyandu melalui Advokasi Regulasi dan Penguatan Kelembagaan	kewajiban masing-masing
19	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemkot Mataram, Pemkab Lobar, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lotim, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, Pemkot Bima, Pemkab Bima tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste, Revitalisasi Posyandu, Pengembangan Desa Wisata, Penanggulangan Kemiskinan dan Mitigasi Bencana	415.4/27/KJS/2019, 24/MOU-MTR/IV/2019, 8 TAHUN 2019, 660.1/157/BUP/2019, 130/05/LTH/2019, 181.6/14/EKO/2019, 074/150/PEM/V/2019, 05/KB/2019, 500/05/KSD/2019, 180/83.A/PK/IV/2019, 055/07.3/2019	4 April 2019	terwujudnya dasar pembuatan perjanjian kerjasma antara OPD terkait di Pemprov NTB dengan OPD terkait di Kab/Kota se NTB	terciptanya dokumen Perjanjian kerjasama antara OPD terkait di Pemprov NTB dengan OPD terkait di Kab/Kota se NTB
20	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Kepolisian Daerah NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti, Badan Intelejen Negara Daerah NTB, Pemkot Mataram, Pemkab	415.4/33/KJS/2019, B/MoU-28/XI/HUK.8.1.1/2019, B-2708/N.1/cp.1/11/2019, BA/1865/X/2019, 44.a/MoU-MTR/VIII/2019,	26 Agustus 2019	terwujudnya dasar pembuatan perjanjian kerjasma antara Para Pihak	-

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Lobar, Pemkab Loteng, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lotim, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, Pemkot Bima, Pemkab Bima Tentang Penertiban Pertambangan Mineral Logam, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Izin di Provinsi NTB.	08/MoU/2019, 14 Tahun 2019, 130/13/LTH/2019, 181.6/22/EKO/2019, 06.a/KB/2019, KSB/660/04/DLH/XI/2019, 500/09/KSD/2019, 03.3/25/548/03.1/2019, 130/88/AP/XI/2019			
21	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemkot Mataram, Pemkab Lobar, Pemkab Loteng, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Lotim Tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok.	415.4/41/KJS/2019, 55.a/MoU-MTR/XI/2019 , 16 Tahun 2019, 11/MoU/2019 , 130/17/LTH/2019 , 191.6/23/PUPR/2019	26 November 2019	terwujudnya dasar pembuatan perjanjian kerjasma antara Para Pihak	-
22	Kerjasama Pemprov dengan Balitbang ESDM perihal Kerjasama Pengembangan, Pemanfaatan Teknologi Berbasis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	Nomor : 90/05/BLB/2019 dan Nomor: 240/26/KJS/2019	7 Februari 2019	MOU	Pelaksanaan kerjasama antara Balitbang RI dengan Pemprov NTB dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi baru dan terbarukan

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
23	Kesepakatan Bersama Pemprov NTB dengan 10 Prov Mitra Praja Utama Perihal Kerjasama Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana	Nomor : 03/2019	26 Maret 2019	MOU	Ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara 10 Provinsi MPU dalam rangka Kesiapsiagaan Daerah Guna Menghadapi Ancaman Bencana
24	Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi NTB dengan Lembaga Administrasi Negara Tentang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Pemerintah Provinsi NTB	Nomor: 415.43/27/ KJS/2019 dan Nomor : 22/K.1/HK M.03.1	27 Juni 2019	MOU	Terjalinnya penyelenggaran Kajian Kebijaka Pelatihan da Pengembangan Kompetensi, Inova Administrasi Negara da Pendidikan Ting di Pemprov NT dan LAN RI
25	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemprov Jatim Tentang Kerjasama Pembangunan Daerah dalam Rangka Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya	NO: 415.4/38/K JS/2019, DAN NO: 120.23/ /033.4/KSB /2019	29 Oktober 2019	MOU	terjalinnya hubungan kerjasama antara Pemprov NTB dan Jatim dalam pengelolaan potensi daerah
26	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Pemprov Sulawesi Tenggara Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Satuan Permukiman (SP) Raimuna Kawasan	NO:415.4/2 8/kjs/2019 DAN NO: 127/08/BK KP/V/2019	6 Mei 2019	MOU	Telah dilakukan pengiriman 10 KK di Satuan Permukiman (SP) Raimuna Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	
				KELUARAN	HASIL
	Transmigrasi Mutiara, Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara				
27	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Bank Indonesia Tentang Pengembangan Ekonomi dan Promosi Potensi Daerah	Nomor:415.43/455/KJS/2019 DAN Nomor: 21/21/MTR/PK	11 Desember 2019	MOU	dibentuknya tim kerja dalam rangka pengembangan ekonomi dan promosi potensi daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi NTB

Sumber : Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, 2019

- Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDKP)

Merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Jumlah KSDKP Tahun 2019 sebanyak 18 Perjanjian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 303 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Tahun 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL
A.	**Kerjasama Dengan Non Pemerintah Di Kabupaten/Kota Se NTB**		
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Surya Samudera Jaya Perkasa tentang Pengoperasian Transportasi Angkutan Laut Kapal Cepat Rute Pulau Sumbawa, Pulau Moyo, dan Pulau Medang Nusa Tenggara Barat. (MoU)	Nomor: 415.4/29/KJS/2019 Nomor : 018/SSJP/OPS/GEN/I/2019 Tahun 2019	17 Januari 2019
2	Kesepakatan Bersama antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan	Nomor: 420/130/KJS/2019 Nomor:	18 Februari 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL
	(LPP) Nusa Tenggara Barat tentang Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya manusia Nusa Tenggara Barat (MoU)	001/LPPNTB/SP /01/2019 Tahun 2019	
3	Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Bali Seafood Internasional (BSI) tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan Teluk Santong Kabupaten Sumbawa (PKS)	Nomor: 420/107/KJS/20 19 Nomor: 24A/IV/2019 Tahun 2019	29 April 2019
4	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Surya Samudera Jaya Perkasa tentang Pengoperasian Angkutan Laut Kapal Cepat 2019 (PKS)	Nomor: 26 Tahun 2019 Nomor: 0174/SSJP/OPS/ GEN/V/2019	2 Mei 2019
5	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB, Pemkot Mataram, Pemkab Lobar, Pemkab Lombok Utara, Pemkab Loteng, Pemkab Lotim, Pemkab Sumbawa Barat, Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu dan Pemkot Bima dengan PT. Bank NTB Syariah tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Nomor : 420/109/KJS/20 19, Nomor : 580/273/UMUM /U/2019, Nomor : 9 Tahun 2019, Nomor : 03/MoU/2019, Nomor : 130/04/APU/20 19, Nomor : 181.6/12/PEMD A/2019, Nomor : 979/52/562/V/ 2019, Nomor : 04/KB/2019, Nomor : 500/05/KSD/20 19, Nomor : 180/100/PK/V/ 2019, Nomor : 03.3/025/043/0 3.1/TAHUN 2019, Nomor : PJ.01/11/60/01 32/2019	2 Mei 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL
6	Kesepakatan Bersama antara Penmerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan CV. Bersama Indah tentang Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Sarang Burung Walet (Collocaluia Spp) di wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (MoU)	Nomor 420/133/KJS/2019, Nomor: B/11/CVBI/V/2019 Tahun 2019	6 Mei 2019
7	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Yayasan Institut Pengembangan Suara Mitra (SUMMIT Institute of Development) Tentang Pencegahan Stunting dan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak di Prov. NTB	Nomor : 442/31/KJS/2019, Nomor : SID/HR/EL/VIII/2019.004 Tahun 2019	29 Juli 2019
8	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Prov.NTB dengan Yayasan Institut Pengembangan Suara Mitra (SUMMIT Institute of Development) Tentang Program Pemberian Multi Mikronutrien (MMN) Kepada Ibu Hamil dengan Sistem Pemantauan Terpadu Menggunakan Aplikasi Open SRT Sebagai Program Pencegahan Stunting dan Peningkatan Derajat Kesehatan Ibu dan Anak di Prov. NTB	Nomor : 440/10/DIKES/VIII/2019, Nomor : SID.HR/EL/VIII/2019.003 Tahun 2019	2 Agustus 2019
9	Perjanjian Kerjasama antara Dinas LHK dengan CV Bersama Indah Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Sarang Burung Walet di Kelompok Hutan Tofo Rompu pada Hutan Produksi Terbatas di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tofo Pajo Madapangga Dompu Waworaja Kab. Bima Prov. NTB	Nomor : 522/3871.1/RH.DLHK/2019, Nomor : B/7/CVBI/IX/2019 Tahun 2019	9 September 2019
10	Kesepakatan Bersama Antara Pemprov NTB dengan CV Ganesha Cipta Sentosa Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH) Tastura Kabupaten Lombok Tengah Prov. NTB	Nomor : 415.4/34/KJS/2019 Nomor : 007/GCS/X/2019 Tahun 2019	16 September 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL
11	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan PW NU NTB, PW NW NTB, PW Muhammadiyah NTB, PHDI NTB, MBI NTB, PGI Wilayah NTB, Dekenat NTB dan Matakin NTB tentang Implementasi Program Unggulan Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nomor 415.4/462/KJS/ 2019 Tahun 2019	17 Desember 2019
12	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan UNRAM, UIN Mataram, UMM, UNU NTB, Universitas Hamzanwadi, UTS, STKIP Bima dan IPDN NTB tentang Implementasi Program Unggulan Revitalisasi Posyandu dan Zero Waste di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nomor 415.4/461/KJS/ 2019 Tahun 2019	17 Desember 2019
13	Perjanjian Kerjasama antara Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional Prov. NTB, Dinas Kesehatan NTB, Dinas Sosial NTB, Bappeda NTB, DPMPD Dukcapil NTB dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Nomor: 49/BKSPJK/XII/ 2019, Nomor : 441/14/YANKES /XII/2019, Nomor : 843/3.II/SOSIAL, Nomor : 440/5705/01-BAPPEDA, Nomor : 470/DPMPDDUKCAPIL/2019, Nomor : 69/KTR/WIL-XI/1219	27 Desember 2019
14	Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan CV. Ganesha Cipta Sentosa tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Produksi Mareje Bonga (RTK.13) di Wilayah Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura	Nomor : 027/4983/PH-DISLHK/2019 Nomor : 212/GCS/XII/2019 Tahun 2019	27 Desember 2019
B	**Kerjasama Dengan Non Pemerintah Di Provinsi Lainnya**		
15	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Institut Agama Islam Tazkia	Nomor : 415.42/35/KJS/	3 Oktober 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL
	tentang Pendidikan Kepegawaian dan UMKM	2019 Nomor : 007/KB/INSTITUT TAZKIA/X/2019	
16	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan PT Indonesia Satu Manajemen tentang Pengembangan Sistem Data Perlindungan dan Aplikasi Daring Rumah Pekerja Indonesia bagi Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari NTB	Nomor : 045/275/KJS/2019 Nomor : MOU.0001/ISM/X/19	17 Oktober 2019
17	Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dengan Universitas Brawijaya Malang tentang Pendidikan, Penelitian, pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan SDM	Nomor : 120.23/32/KJS/2019 Nomor : 120/UN10/KS/2019	05 Agustus 2019
18	Kesepakatan Bersama antar Pemprov NTB dengan Himpunan Industri Alat Besar Indonesia (HINABI) tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Prov. NTB	Nomor : 045/263/KJS/2019	20 September 2019

Sumber : Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, 2019

- Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL)

Merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Tahun 2019 KSDPL dengan pihak luar negeri sebanyak 2 (dua) perjanjian sebagai berikut.

Tabel 2. 304 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri Tahun 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	CAPAIAN KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

				KELUARAN	HASIL		
1	LoI dengan Kedubes Denmark tentang Energi Terbarukan dan Bersih (Sektor Energi) Ekonomi Sirkular dan Pengelolaan Sampah Padat (Sektor Lingkungan)	(Letter of Intent tidak bernomor)	27 Februari 2019	-	-	Tidak dapat ditindaklanjuti karena belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	-
2	LoI dengan Piotr Calbecki, The Marshal of The Kujawsko-Pamorskie Voivodeship (Polandia) tentangr Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Seni dan Budaya, Olahraga dan Pariwisata	(Letter of Intent tidak bernomor)	16 April 2019	Masih dalam proses	Masih dalam proses	-	Telah mendapat persetujuan dari Kemendagri dan dalam proses ke tahap berikutnya

Sumber : Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, 2019

- Kerjasama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)

Merupakan usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Tahun 2019 KSDLL sebanyak 4 (empat) perjanjian dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2. 305 Perjanjian Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri Tahun 2019

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
1	Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Republik Indonesia dan Universitas Chodang Republik Korea tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama (LoI)	(Letter of Intent tidak bernomor)	29 Januari 2019	Tidak dapat ditindaklanjuti karena belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	-

NO	KERJASAMA	NOMOR	TANGGAL	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN MASALAH
2	Pernyataan Kehendak antara Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Malaysia dengan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat	(Letter of Intent tidak bernomor)	1 Februari 2019	Tidak dapat ditindaklanjuti karena belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	Menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan memperbaiki tahapan kerjasama sesuai arahan Kemendagri
3	Pernyataan Kehendak antara Pemprov NTB dengan Global Labaour Solution Australia tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama Peningkatan Kapasitas SDM tenaga keperawatan	(Letter of Intent tidak bernomor)	16 Juli 2019	Belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	Menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan memperbaiki tahapan kerjasama sesuai arahan Kemendagri
4	Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi NTB dan Pemangku Presiden Dewan Perdagangan Malaysia tentang Pembentukan Hubungan Kerjasama	(Letter of Intent tidak bernomor)	11 September 2019	Belum dapat ditindaklanjuti karena belum adanya persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri	Menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan memperbaiki tahapan kerjasama sesuai arahan Kemendagri

Sumber : Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 306 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Administrasi Pemerintahan Biro Kerjasama Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Masih terdapat tindak lanjut teknis pelaksanaan kegiatan setelah disepakatinya Perjanjian Kerjasama belum optimal	Mengkoordinasi para pihak untuk menyepakati dan membentuk teknis pelaksanaan kegiatan dalam rangka

PERMASALAHAN	SOLUSI
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait	implementasi Perjanjian Kerjama
Letter of Intent (Pernyataan Kehendak) antara Pemerintah Provinsi NTB dengan beberapa pihak luar negeri belum seleruhnya dapat diimplementasikan dengan optimal	Mengkoordinsikan para pihak untuk menyepakati dan mengambil langkah untuk merumuskan model, teknis dan lokasi pelaksanaan kegiatan.

Sumber : Biro Kerjasama Setda Provinsi NTB, 2019

- **Sekretariat DPRD**

Pada tahun 2019, sebagai bagian dari pencapaian Sekretariat DPRD Provinsi NTB, sebanyak 9 Raperda prakarsa DPRD yang diusulkan yaitu:

1. Raperda Tentang Fasilitas Keamanan Transportasi;
2. Raperda Tentang Kepemudaan;
3. Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
4. Raperda Tentang Perijinan Usaha Kelautan Dan Perikanan;
5. Raperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
6. Raperda Tentang Pencegahan Ilegal Fishing;
7. Raperda Tentang Pengembangan,Pembinaan Dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra Indonesia Dan Daerah NTB;
8. Raperda Tentang Tata Niaga Ternak;
9. Raperda Tentang Pembentukan BUMD Pengembangan Dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah.

Dari target 16 perda, berdasarkan hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, ditetapkan 14 Rancangan perda telah disahkan menjadi Perda, 3 Perda merupakan usul prakarsa DPRD dan 11 Perda usul prakarsa Gubernur. 14 Perda yang telah ditetapkan tahun 2019, yaitu:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2024;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan;

3. Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentangPedoman Penyusunan Rencana Umum EnergiDaerah;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentangPengelolaan Sampah;
6. Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentangPertanggungjawahan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentangFasilitas Keselamatan Transportasi;
8. Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentangPeruhahan Atas Perda No. 13 Tahun 2018 tentang APBD Provinsi NTB TA. 2019;
9. Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentangPengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
10. Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentangAPBD Tahun Anggaran 2020;
11. Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentangLain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
12. Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentangPercepatan Pembangunan & Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;
13. Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;
14. Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentangPengelolaan Hutan.

Aspirasi masyarakat yang secara umum disampaikan dalam reses dari delapan daerah pemilihan, disimpulkan sebagai berikut :

a. Daerah pemilahan I (Dapil I) Kota Mataram
   1) Permintaan pembuatan spandek makam dilingkungan masjid untuk kepentingan para penziarah dan jamaah;
   2) Bantuan dana atau peralatan catering untuk majelis taklim dan ibu-ibu pengajian;
   3) Bantuan modal usaha para pedagang bakulan;
   4) Bantuan perbaikan gang lingkungan dan draenase;
   5) Bantuan perbaikan rumah layak huni;
   6) Bantuan terop dan kursi;
   7) Bantuan peralatan olahraga pencaksilat dan olahraga kempo;
   8) Bantuan wireless;
   9) Bantuan perbaikan dan renovasi bangunan masjid dan ponpes;
   10) Bantuan tambahan RKB untuk menunjang kegiatan belajar mengajar;
   11) Bantuan kendaraan roda tiga untuk mengatasi permasalahan sampah;

12) Perhatian pemerintah terhadap UMKM di kota Mataram masih sangat kurang;
13) Perlu bantuan baik peralatan maupun permodalan;
14) Perhatian pemerintah Provinsi NTB terhadap kelompok-kelompok masyarakat (kelompok budaya dan seni) masih sangat kurang;
15) Perlu adanya bantuan pemerintah daerah untuk melestarikan budaya-budaya lokal dan kesenian daerah;
16) Perlu ada bantuan pemerintah provinsi untuk ikut menata lingkungan di kota Mataram yang masih sangat kurang dan belum merata;
17) Menciptakan lapangan kerja masyarakat yang tidak mempunyai modal yang cukup dan tidak memiliki keahlian;
18) Memberikan perhatian khusus tentang tanah pemakaman;
19) Disediakan TPS (tempat pembuangan sementara) sampah di setiap kelurahan, terutama 50 kelurahan belum mempunyai TPS;
20) Pengangkutan sampah setiap hari;
21) Masalah banjir di kelurahan pagutan timur yang selalu menimpa merak setiap hari;
22) Minta penerangan jalan;
23) Minta bantuan modal usaha para pedagang sayuran, pedagang ikan dan kaki lima;
24) Bantuan alat begawe, pakaian seragam adat nyongkolan, bantuan untuk masjid dll;
25) Bantuan untuk rapat gang-gang, normalisasi saluran untuk setiap hujan pasti banjir;
26) Bantuan modal untuk pedagang bakulan dan kaki lima;
27) Bantuan modal untuk alat bengkel, alat las dan alat pertukangan;
28) Mohon bantuan alat-alat begawe banjar;
29) Mohon bantuan rehap masjid dan penembokan kuburan;
30) Mohon bantuan modal usaha sekaligus pelatihan para ibu-ibu buat jajan/kue;
31) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri;
32) Peningkatan program zero waste.

b. Daerah pemilahan II (Dapil II) Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara):
   1) Perlunya bantuan modal usaha bagi pedagang bakulan, pedagang kaki lima, pengrajin meubelair, pandai besi, pengrajin ketak, pengrajin bambu, pengrajin penjalin, kelompok usaha bersama, kelompok jahit, tata rias, tata boga dan kelompok usaha produktif;

2) Perlunya bantuan alat penunjang belajar mengajar paud dan taman kanak-kanak (TK);
3) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, jalan usaha tani, saluran irigasi, drainase, pengaspalan jalan, talud, rabat jalan, pemasangan batu bronjong, pompa air, sumur dangkal, penimbunan dan pengerasan jalan;
4) Perlunya bantuan dibidang pendidikan berupa gedung sekolah untuk PAUD;
5) Perlunya bantuan paket sembako untuk anak yatim, lansia dan masyarakat kurang mampu;
6) Belum meratanya akses bpjs khususnya bagi kelompok miskin dan rentan seperti kelompok di pelosok, anak dan keluarga buruh migran dan disable;
7) Perlunya bantuan alat pertanian berupa handtractor, sumur bor, mesin ketingting dan genset;
8) Perlunya bantuan alat perikanan berupa alat tangkap ikan, bibit ikan dan mesin ketingting;
9) Perlunya bantuan alat kesenian berupa rabana, gong, alat drumband, sound system, pakaian adat dan bantuan alat komunikasi orari (HT);
10) Perlunya bantuan gerobak, kendaraan roda tiga untuk angkut sampah, terop, kursi, kostum sepakbola, alat catering ibu-ibu pkk dan mesin jahit;
11) Perlunya bantuan peralatan perbengkelan;
12) Perlunya perhatian dan bantuan sosial bagi pesantren di NTB;
13) Perlunya pelatihan pemuda untuk mengurangi pengangguran;
14) Perlunya penyuluhan bagi perkawinan anak dan remaja putri;
15) Perlunya pembangunan sarana dan prasarana pertanian unggulan desa, sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi unggulan, sarana dan prasarana pembinaan generasi muda kelompok sepakbola, volly dan lain-lain, sarana dan prasarana keagamaan;
16) Perlunya perhatian pemerintah provinsi NTB kepada rakyat yang membutuhkan sambungan listrik gratis dan listrik murah yang dibiayai dengan dukungan apbd provinsi;
17) Perlunya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan potensi sdm bagi para pemuda pemudi yang memiliki kemampuan atau skill;
18) Perlunya perhatian pemerintah terhadap kartu indonesia sehat dan kartu indonesia pintar karena banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan;

19) Perlunya perhatian pemerintah terhadap perbedaan potensi sdm bagi para pemuda pemudi yang memiliki kemampuan atau skill;
20) Bantuan alat pemandian mayat;
21) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peranan perempuan;
22) Bantuan kelompok usaha bersama;
23) Bantuan untuk kegiatan remaja dan karang taruna;
24) Bantuan dibangunkan rumah layak huni;
25) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
26) Bantuan dana sosial untuk kegiatan pemuda;
27) Bantuan sosial untuk pembangunan masjid dan musholla;
28) Mohon program jambanisasi;
29) Bantuan tempat pemandian umum;
30) Bantuan pengadaan terop;
31) Bantuan pelatihan / kursus bahasa asing dan pelatihan perhotelan;
32) Bantuan pengadaan bibit ikan dan bibit sapi;
33) Pembinaan dan pelatihan keterampilan bidang otomotif;
34) Bantuan dana beasiswa kuliah (s1 dan s2) keluar negeri;
35) Percepatan program zero waste.

c. Daerah pemilahan III (Dapil III) Kabupaten Lombok Timur Bagian Utara membutuhkan:
   1) Bantuan dalam bidang kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan (bpjs bagi masyarakat terutama masyarakat kurang mampu);
   2) Bantuan dalam bidang pendidikan dengan menggratiskan spp sma sederajat dan bea siswa serta peningkatan kesejahteraan untuk pelaku pendidikan (guru honorer di sekolah negeri maupun swasta);
   3) Bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat/pemuda serta kelompok usaha ekonomi yang produktif;
   4) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, perpipaan, jembatan, irigasi, beronjong, pengaspalan jalan, bak penampungan dan rabat jalan, pembangunan mesjid di dusun denggen dan dusun batu mulut, jalan lingkungan dari denggen ke kembangsari, jalan dari lingkungan montong gerung ke batu mulut, talud dan irigasi perbaikan reban paok rusak akibat banjir;
   5) Perlunya bantuan dana untuk perbaikan masjid, musholla, tpq, tpa, pondok pesantren, tahfiz qur'an serta sarana dan prasarana (sound system dll);

6) Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki kemapuan untuk meberdayakan desanya;
7) Perlunya bantuan handtractor, mesin panen, alat elektronik, alsintan (alat mesin pertanian), perlengkapan alat olah raga, lapangan sepak bola, futsal dan alat-alat pendakian gunung;
8) Perlunya bantuan pertanian, peternakan, perikanan dan nelayan kepada kelompok usaha kecil yang ada di lombok timur;
9) Perlunya bantuan terop, kursi, tikar untuk kegiatan sosial masyarkat yang ada di lombok timur;
10) Perlunya bantuan dana untuk rehab rumah tidak layak huni yang ada di lombok timur;
11) Bantuan dana beasiswa kuliah (s1 dan s2) keluar negeri;
12) Peningkatan program zero waste.

IV. Daerah pemilahan IV (Dapil IV) Kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan membutuhkan:
1) Bantuan dalam bidang perikanan berupa pengadaan mesin ketinting dan jaring;
2) Perlunya bantuan dana untuk usaha pedagang kaki lima, pedagang bakulan, masyarakat kurang mampu, anak yatim dan orang tua jompo;
3) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, vavingisasi/perabatan jalan lingkungan, saluran irigasi melalui pemasangan viva untuk pengadaan air bersih, pembuatan sumur bor dan pembangunan embung baru;
4) Perlunya bantuan dana untuk perbaikan masjid dan musholla serta sarana dan prasaran tpq dan lain-lain;
5) Perlunya bantuan di bidang pertanian berupa pengadaan mesin perontok padi dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam;
6) Perlunya pemerataan bantuan baik bantuan modal, bantuan peralatan, dan pembinaan terhadap kelompok tani, kelompok ternak, kelompok usaha bersama, pengusaha mikro kecil menengah dan koperasi;
7) Bantuan dalam bidang pertanian berupa bantuan peralatan pertanian dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam;
8) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri;
9) Peningkatan program zero waste.

V. Daerah pemilahan V (Dapil V) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan:

1) Perlunya Bantuan Mesin Pompa Air, Handtractor, Alat Semprot Hama, Mesin Ketinting, Mesin Penggilingan Padi, Mesin Pengering Gabah, Alat Penyemprotan Tanaman, Mesin Bor, Mesin Genset Dan Mesin Pompa Air;
2) Perlunya Pembangunan Infrastruktur Berupa Perbaikan Jalan Lingkungan, Jalan Usaha Tani, Pengaspalan Jalan, Pinggir Jalan Irigasi, Jaringan Air Bersih, Pemasangan Beronjong, Prapet, Rehab Mesjid, Rehab Musholla, Pembangunan Pagar Paud, Pengamanan Tebing Kawasan Pemukiman,Pembangunan Ruang Kelas Belajar Bagi Sekolah Swasta Dan Perbaikan Saluran Induk Yang Melintasi Dua Desa Empang Atas Dan Empang Bawah Dan Pengerukan Sedimen Pada Embung Berang Praya Dan Destinasi Wisata Di Desa Merente;
3) Perlunya Pembangunan Infrastruktur Khususnya Daerah Kena Banjir Berupa Peninggian Drainnase, Talud, Penataan Bantahan Kali Untuk Mengganti Rumah Warga Yang Hanyut;
4) Perlunya Bantuan Dana Untuk Pedagang Bakulan, Pedagang Kaki Lima, Pengrajin Kelompok Tenun, Kelompok Usaha Bersama Dan Bantuan Dana Untuk Posyandu;
5) Perlunya Bantuan Pengadaan Alat Catering, Alat Pembuatan Kue, Bantuan Sembako, Pengadaan Kostum Olahraga, Alat Peraga Untuk Paud, Alat Qasidah Rabana, Alat Pembuat Kripik, Bantuan Terop, Kursi Dan Pengadaan Wereles;
6) Perlunya Bantuan Alat Produksi Pertanian, Peternakan, Perbengkelan Dan Pertukangan;
7) Perlunya Pemasangan Aliran Listrik Baik Itu Dengan Program Listrik Murah Untuk Rumah Tangga Miskin Maupun Plts Untuk Sarana-Sarana Umum;
8) Perlunya Pemberdayaan Masyarakat Berupa Pelatihan Kerja Bagi Pemuda Dan Remaja Untuk Mengurangi Pengangguran;
9) Pembangunan Tower Telpon Seluler;
10) Permohonan Bantuan Dana Untuk Pengadaan Untuk Jembatan Perahu Nelayan;
11) Permohonan Bantuan Dana Untuk Mpengadaan Alat-Alat Kasidah;
12) Permohonan Bantuan Dana Untuk Mpengadaan Alat-Alat Tangkap Ikan;
13) Permohonan Bantuan Dana Untuk Pengadaan Kursi Plastik;
14) Permohana Bantuan Dana Untuk Pengadaan Kostum Bola;
15) Permohonan Bantuan Dana Untuk Pembangunan Mck;

16) Permohonan Bantuan Dana Untuk Pengadaan Bibit Ayam Potong Untuk Kelompok Usaha Ayam Potong;
17) Permohonan Bantuan Dana Untuk Pengadaan Buku Nikah;
18) Bantuan Dana Beasiswa Kuliah (S1 Dan S2) Keluar Negeri;
19) Peningkatan Program Zero Waste.

VI. Daerah pemilahan VI (Dapil VI) Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu membutuhkan :

A. Bidang infrastruktur:
   1) Pembangunan dam campa di kecamatan madapangga, dan doro tumpu kecamatan wera Kabupaten Bima, dam raba bou kec. Sape, rehabilitasi bandungan dan jaringan daerah irigasi ketua di desa katua kec. Dompu, dam lae kecamatan poja, dam nui kecamatan dompu kab. Dompu;
   2) Bantuan bronjong di semua desa/kelurahan yang ada di kab bima, kota bima dan kab. Dompu;
   3) Membangun bendungan di desa parangina bendungan ndano-naru desa risa kecamatan woha dan beberapa desa yang ada di kabupaten bima dan kabupaten dompu;
   4) Membuat drainase di beberapa desa /kelurahan yang ada di kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu;
   5) Perbaikan beberapa jembatan jalan provinsi NTB di Kabupaten Bima dan Dompu;
   6) Peningkatan jalan provinsi NTB dari kecamatan soromandi kab. Bima ke kecamatan kilo kab. Dompu, dan kecamatan sanggar ke kecamatan tambora kab. Bima;
   7) Pembangunan embung di sori kowa kecamatan wera embung desa keli kecamatan woha, embung mada seli kecamatan donggo, embung desa ngali kecamatan belo dan embung desa monggo kecamatan madapangga;
   8) Peningkatan jalan provinsi NTB dari kecamatan tente ke langgudu, lambu, sape, wera, ambalawi menuju kota bima;
   9) Membangun jalan baru provinsi ntb lingkar selatan dari kecamatan woja ke kecamatan hu,u kab. Dompu menuju nanga doro kecamatan parado kab. Bima;
   10) Pembangunan jalan baru provinsi NTB dari kecamatan manggalewa ke tanjung taropo mbuju kecamatan kilo kab. Dompu;
   11) Memboran air dalam p2at untuk pertanian dan peternakan di desa wora kecamatan wera, desa tawali kec. Wera, desa tadewa kec. Wera, desa woro kec. Monta dan pemboran air

dalam p2at di beberapa desa yang ada di kab. Bima dan kab. Dompu;

12) Membuatan talut sungai dan talut pantai di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu.

B. Bidang perikanan dan kelautan :
   1) Bantuan bibit ikan air tawar untuk kelompok tani ikan di beberapa desa yang ada dikab. Bima dan kab. Dompu;
   2) Bantuan mesin ketingting, pukat/jaringan, genzet, freezer dan coolbox untuk kelompok nelayan yang ada di kecamatan wera, ambalawi, sape,lambu,langgudu,monta, tambora kab. Bima, di kecamatan kempo, kecamatan manggalewa kab. Dompu;
   3) Bantuan rumput laut untuk kelompok tani nelayan di beberapa desa yang ada di kab. Bima dan kab. Dompu;
   4) Bantuan kapal nelayan untuk kelompok nelayan di beberapa desa yang ada di kab. Bima dan kab. Dompu;
   5) Bantuan mesin pompa untuk kelompok tani tambak di beberapa desa yang ada di Kab. Bima dan Kab. Dompu.

C. Bidang pertanian dan perkebunan :
   1) Bantuan peralatan pertanian antara lain : hand traktor, mesin pompa air, roda tiga/tossa, semprot, mesin perontok padi untuk kelompok tani di beberapa desa / kelurahan yang ada di kab. Bima dan kab. Dompu;
   2) Bantuan bibit pertanian antara lain : padi, jagung, bawang merah, dan kedelai untuk kelompok tani di beberapa desa/kelurahan yang ada dikab. Bima dan kab. Dompu;
   3) Bantuan obat-obatan pertanian untuk kelompok tani di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima dan kab. Dompu;
   4) Membangun dan meningkatkan jalan usaha tani di desa sampasai kec lambu dan di beberapa desa yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
   5) Bantuan bibit keras : durian, mangga, metoa, kemiri, mente dan lain-lain;
   6) Membuat irigasi di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
   7) Pembukaan/peningkatan jalan usaha tani di beberapa desa kab. Bima, kab. Dompu dan kota bima.

D. Bidang peternakan :

1) Bantuan bibit ternak untuk kelompok ternak antara lain : sapi, kambing, kuda, ayam, itik di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
2) Bantuan hijauan makanan ternak (hmt) untuk kelompok ternak di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu.

E. Bidang kehutanan :
1) Masyarakat mengharapkan agar pemerintah provinsi ntb melakukan reboisasi hutan yang telah gundul di seluruh kecamatan yang ada di kab bima, dan kab dompu;
2) Rehab dan pembangunan kantor kph kecamatan tambora kab. Bima dan kecamatan pekat kab. Dompu;
3) Permohonan menambah tenaga kontrak kph kecamatan tambora kab. Bima dan kecamatan pekat kab. Dompu untuk pencegahan pembabatan hutan tambora.

F. Bidang pendidikan :
1) Bantuan peralatan dan pakaian olahraga untuk karang taruna dan organisasi pemuda lainnya di beberapa desa / kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
2) Bantuan rehab sekolah, sma/smk sederajat di beberapa kecamatan yang ada di kab kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
3) Bantuan pembangunan pondok pesantren di beberapa desa / kelurahan yang ada di kab. Bima kota bima dan kab. Dompu;
4) Bantuan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini (paud) dibeberap desa / kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
5) Bantuan untuk yayasan pendidikan di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
6) Bantuan pembangunan ruang kelas baru untuk sma/smk swasta kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu;
7) Bantuan dana beasiswa kuliah (s1 dan s2) keluar negeri.

G. Bidang perindustrian dan perdagangan :
1) Bantuan permodalan untuk kelompok – kelompok usaha bakulan, usaha kios, usaha kecil dan menengah di beberapa desa / kelurahan yang ada di kab bima, kota bima dan kab. Dompu;
2) Bantuan perbengkelan, mesin jahit, genset, terop dan kursi di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab bima, kota bima dan kab. Dompu. Bantuan alat tranportasi kendaraan roda

tiga untuk kelompok tani kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu.

H. Bidang kesejahteraan rakyat (kesra) :
   1) Bantuan untuk pembangunan mesjid dan musholla di beberapa desa/kelurahan yang ada di kab. Bima, kota bima kab. Dompu;
   2) Bantuan insentif untuk guru ngaji dan marbot di seluruh desa / kelurahan yang ada di kab bima, kota bima dan kab. Dompu;
   3) Bantuan untuk tempat pengajian al-qur'an (tpa) di seluruh desa/kelurahan yang ada di kab bima, kota bima dan kab. Dompu;
   4) Bantuan insentif penyuluh agama di seluruh kecamatan yang ada di kab. Bima, kota bima dan kab. Dompu.

I. Bidang kehutanan :
   1) Pengembangan parawisata dan kebudayaan khususnya di kota bima yakni tentang pengenalan terhadap istana kesultanan bima, muslim dan masjid tertua kesultanan bima;
   2) Pengembangan dan pengamanan terhadap daerah wisata la key kab. Dompu;
   3) Pengembangan parawisata pulau ular di kecamatan wera.

VII. Daerah pemilahan VII (Dapil VII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Utara membutuhkan :
   1) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana bagi yayasan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar berupa pembanguan ruang kelas baru (rkb) dan peralatan komputer, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, efisien, dan berbasis komputer sesuai yang diharapkan;
   2) Perlunya pengembangan usaha kecil menengah kebawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata;
   3) Perlunya bantuan modal usaha untuk pedagang kaki lima, pedagang bakulan, umkm, kelompok usaha produktif, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha tani;
   4) Perlunya bantuan alat tekhnologi pertanian yang memadai untuk meningkatkan hasil pertanian berupa handtractor, handspreyer, mesin pompa air, mesin tanam padi, dan mesin panen padi;
   5) Perlunya pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembuatan dam, rehabilitasi dan embung rakyat, penataan jalan lingkungan, untuk menadah air guna mengairi lahan pertanian, rabat jalan dan pembersihan lingkungan berupa saluran pembuangan air limbah (spal);

6) Perlunya perhatian pemerintah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja di masing-masing dusun yang ada di dapil vii untuk memberikan pelatihan dan bantuan peralatan seperti mesin percetakan, mesin pres bataco, mesin jahit, terop dan lain-lain;
7) Perlunya pembinaan mental spritual serta kewirausahaan bagi pemuda di beberapa desa dan kelurahan untuk menghindari pemuda dari pergaulan negatif, miras dan narkoba;
8) Perlunya bantuan dana untuk gaji/insentif marbot, guru ngaji dan da'i yang berada di pelosok-pelosok desa;
9) Perlunya bibit benih ikan air tawar, bibit sapi, bibit kambing, dan bibit unggas;
10) Perlunya bantuan alat radio komunikasi (orari) bagi badan pengamana desa (bkd);
11) Perlunya pelatihan pembuatan pakan ternak bagi peternak yang ada dibeberapa kecamatan di dapil vii;
12) Perlunya penutupan galian illegal di desa karang sidemen, tanak beak dan lantan yang merusak lingkungan, sarana jalan masyarakat, kesehatan dan kekhawatiran akan menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor;
13) Permohonan bibit tanaman buah-buahan dan tanaman keras lainnya untuk masyarakat dikawasan hutan di horti park persil dan kawasan hutan di tiga desa;
14) Bantuan dana beasiswa kuliah (S1 dan S2) keluar negeri;
15) Peningkatan program zero waste.

VIII. Daerah pemilahan VIII (Dapil VIII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Selatan membutuhkan :
1) Bantuan modal usaha guna mengurangi pengangguran;
2) Bantuan untuk kesejahteraan guru honorer;
3) Perlunya bantuan terop, werles dan peralatan banjar (piring,gelas,tong,sador) dan alat-alat catering;
4) Diwilayah kecamatan praya barat di desa selong blanak masyarakat menyampaikan aspirasinya / mengusulkan agar dilaksanakan secepatnya untuk menghindari terjadinya gejolak masyarakat karena sampai saat ini sebagian besar lahan yang telah di bebaskan oleh inspestor masih menjadi lahan kosong;
5) Bantuan alat-alat pertanian berupa hand traktor;
6) Perbaikan saluran irigasi;
7) Perlunya peningkatan bantuan pemerintah terhadap pembangunan prasarana peribadatan (masjid,musholla);

8) Perlunya bantuan pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan;
9) Perlunya bantuan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih;
10) Bantuan kelompok pemuda berupa pakaian adat;
11) Bantuan untuk nelayan berupa jaring dan alat tangkap ikan;
12) Meminta fasilitas olahraga;
13) Percepatan realisasi pembangunan dam lokon/dam mujur guna terjaminnya kebutuhan air untuk lahan pertanian seluas 8.000 ha;
14) Meminta supaya dibantu pemekaran desa dari desa peringgarata menjadi desa mekar wangi;
15) Penerapan program zero waste;
16) Pengadaan guru agama ;
17) Bantuan aliran listrik;
18) Pengadaan mobil operasional yayasan.

- **Badan Penghubung Daerah**

Badan Penghubungan Daerah masuk dalam urusan pemerintah fungsi penunjang telah melaksanakan Silaturahmi dan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial serta kemasyarakatan se-Jabodetabek, sebanyak 20 kali pertemuan di tahun 2019. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata baik manca negara maupun wisatawan nusantara Badan Penghubung juga melaksanakan fungsi promosi pariwisata dan informasi potensi daerah yang digelar melalui gebyar seni Budaya NTB sebagai berikut :

Dalam rangka Silaturahmi nonton bareng Film Dokumenter Inspirasi Matahari – matahari di Daerah NTB;

1. Pentas Seni Budaya Daerah NTB dengan tema MOZAIK BUDAYA menapilkan tarian : Drama Tari Cupak Gerantang dari daerah Lombok dan tari-tarian dari NTB;
2. Pentas Seni Budaya daerah NTB dalam rangka HUT Pandeglang Banten dengan menampilkan tarian: Pawai Atraksi Gendang Beleq dari daerah Lombok;
3. Pentas Seni Budaya daerah NTB dalam rangka Pembukaan HUT ke - 44 TMII menampilkan: Atraksi Tari Gendang Beleq dari daerah NTB;
4. Dalam rangka pembukaan HUT ke 44 MII menampilkan: pakaian adat abasanawan/busana wati daerah NTB membantu Penerimaan tamu;

5. Dalam rangka HUT TMII ke 44 Anjungan NTB ikut mengisi kegiatan Pameran Exfo, Pameran Produk Unggulan: Mutiara, KainTenun Ikat, Madu, dll;
6. Dalam rangka HUT TMII ke 44 Anjungan NTB ikut serta kegiatan Festival Kuliner menampilkan: Masakan khas SASAMBO menampilkan: Plecing Kankung, Palu Mara, Sepat Ikan dll;
7. Dalam rangka HUT TMII ke 44 Gelar Citra Budaya Tradisi Melaksanakan Pentas Seni Budaya NTB menampilkan: Atraksi Tari Gendang Beleq, tari Oncer, tari Nguri, tari Lenggo, tari Gandrung dll;
8. Pentas Seni Budaya NTB, menampilkan: Pawai Atraksi Tari Gendang Beleq;
9. Pentas Budaya NTB, Pelajar IPB Menampilkan: Permata dari Negri Sasambo Daerah NTB;
10. Dalam rangka Gelar Seni Budaya SASAMBO NTB. Memeriahkan hari raya Idul Fitri Menampilkan: Atraksi tari Gendang Beleq, tari Oncer, tari Rudat, tari Gandrung dari Daerah Lombok, tari Nguri, tari Siyer Male dari Daerah Sumbawa, tari Wura Bongi Monca, tari Lenggo dari Daerah Bima;
11. Dalam rangka Gelar Seni Budaya, Sumbawa, Bima, Dompu memeriahkan HUT RI ke – 74 Menampilkan: tari Nguri, tari Siyer Male, tari Humang Rame, tari Rasate Tanjung Menangis dari Daerah Sumbawa, Hadra, tari Lenggo, tari Wura Bongi Monca, tari Japin Bima dari Daerah Bima NTB;
12. Pentas Seni Budaya NTB, "Gelar Pesona Budaya Lombok – Sumbawa" menampilkan: Atraksi tari Gendang Beleq, tari Mirah Wibawa, Tari Oncer, tari Rudat dan tari Gandrung dari Daerah Lombok NTB. Kemudian tari Siyer Male, tari Nguri dan tari Rasate Tanjung Menangis dari Daerah Sumbawa NTB;
13. Pentas Seni Budaya NTB, "Gelar Pesona Seni Budaya Gumi Sasak (Lombok)" menampilkan: tari Kembang Sembah, tari Oncer, tari Mirah Wibawa, tari PerangTopat, tari Presean dan tari Gandrung;
14. Pentas Seni Budaya NTB, "Gebyar Etnik Tana Samawa dan Mbojo" menampilkan: tari Nguri, tari Ngumang Rame, tari Rasate Tanjung Menangis dari Daerah Sumbawa NTB, kemudian tari Lenggo dan tari Japin dari Daerah Bima NTB;
15. Parade Lagu Daerah;
16. Pergelaran Seni Budaya Sasak, Samawa, Mbojo;
17. Silaturahmi Badan Penghubung NTB dengan Tokoh Masyarakat NTB se-Jabodetabek;
18. Pentas Lomba MTQ Masyarakat Bima NTB se-Jabodetabek;

19. Pentas Seni Budaya NTB, “Malam Kasama Weki Pemilihan Duta Budaya Rimpu dan Sambolo” dari Daerah Bima NTB.

Badan Penghubung Daerah Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan Fungsi promosi budaya dan mengenalkan potensi pariwisata NTB di Anjungan TMII dapat dilihat dari jumlah pengunjung menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 yang terdiri dari wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara dan pelajar / mahasiswa disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 307 Jumlah pengunjung di Anjungan NTB TMII Tahun 2017-2019

URAIAN	Satuan	2017	2018	2019
Angka Kunjungan ke Anjungan TMII:	Orang			
- Wisatawan Mancanegara		885	812	800
- Wisatawan Nusantara		29.923	53.784	54.538
- Pelajar/Mahasiswa		6.238	11.460	12.150
JUMLAH		**37.046**	**66.056**	**67.488**

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2019

Jumlah pengunjung wisatawan nusantara di anjungan NTB TMII selama tiga tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan, demikian juga pengunjung Pelajar maupun mahasiswa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan mencapai jumlah 12.150 orang. Secara keseluruhan jumlah kunjungan terus bertambah dari tahun ke tahun.

Untuk menunjang promosi pariwisata NTB yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, dengan merenovasi bangunan berupa beruga dan membangun Rumah Adat Bima yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah.

Keikutsertaan dalam event-event berskala nasional maupun internasional yang secara periodik dilaksanakan oleh Pengelola anjungan NTB di TMII Jakarta, tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang timbul sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 308 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pemerintahan pada Badan Penghubung Daerah Tahun 2019

PERMASALAHAN	PEMECAHAN
- Bangunan Anjungan NTB di TMII sudah tua; - Alat kesenian tradisional dan pakaian khas suku NTB sudah tidak layak;	- Mengusulkan renovasi bangunan; - Pengadaan alat kesenian tradisional dan pakaian adat khas suku NTB

Sumber: Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB, 2019

2. Pengawasan

Hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi NTB, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 309 Hasil Audit Penyelenggaraan Keuangan Negara/Daerah Tahun 2017-2019

TAHUN	JUMLAH	KEMBALI	%	SALDO	%
2017	147.312.788.020,26	109.977.877.681,78	74,66	37.334.910.338,48	25,34
2018	187,285,025,005.20	151,381,908,186.33	80,83	35.903.116.818,87	19,17
2019	178.791.282.847,35	149.730.174.916,01	83,75	29.061.107.931,34	16,25
TOTAL	**513.409.095.872,81**	**411.089.960.784,12**	**80,07**	**102.229.135.088,69**	**19,93**

Sumber: Inspektorat Provinsi NTB, 2019

Tindak lanjut hasil temuan yang telah audit oleh Inspektorat selama tiga tahun mencapai Rp.411.089.960.784,12 atau 80,07% dari total Rp.513.409.095.872,81 dengan demikian saldo kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan dan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.102.299.135.088,69, atau sebesar 19,93%.

Total sisa kerugian negara/daerah tersebut akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui kegiatan operasi tindak lanjut dan apabila tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil sidang majelis (TP-TGR) akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh Majelis untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Dalam rangka meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2019 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (*Governance*) Organisasi Perangkat daerah (OPD). Selain itu Pemerintah Provinsi NTB juga membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pencapaian pada tahun 2019, Inspektorat Provinsi NTB antara lain Opini BPK: WTP 8 (delapan) kali, Tingkat Kapabilitas APIP Level III (Integreted), Tingkat Maturitas SPIP Level III (Terdefinisi), Indeks Integritas Daerah Posisi 6 untuk Provinsi dan urutan 7 untuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah, LPPD masuk 3 besar, Realisasi pencapaian rencana aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi KPK melalui Program MCP (*Monitoring Center For Prevention*) mencapai 82% (tertinggi secara Nasional), serta Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi NTB Predikat BB.

Permasalahan secara umum yang ada pada Inspektorat adalah kurangnya sumber daya manusia (fungsional auditor dan P2UPD), sarana dan prasarana yang belum memadai, dan belum memenuhi alokasi anggaran ideal sebesar 0,60% dari total APBD Provinsi seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Solusi yang diharapkan untuk penyelesaian permasalahan adalah penambahan formasi Auditor dan P2UPD serta melakukan pengembangan kapasitas APIP, peningkatan sarana dan prasarana penunjang pengawasan, ditambahkannya anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2020.

3. Perencanaan Pembangunan

Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 mengampu urusan fungsi penunjang yaitu urusan perencanaan dengan indikator tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan. Capaian kinerja pembangunan daerah urusan penunjang perencanaan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 310 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017		2018		2019	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real
Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	95,09

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2019

Tahun 2019 merupakan tahun awal perencanaan pembangunan periode 2019-2023. Bappeda menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, dan urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.38.951.410.000 (pagu APBDP termasuk BTL). Bappeda sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi di bidang perencanaan, bertanggungjawab pada indikator kinerja "Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan". Tahun 2019 indikator ini mencapai 95,09%, artinya belum mencapai target. Tidak tercapainya target tersebut, lebih disebabkan karena ketidaksesuaian antara program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, walaupun Pemerintah Provinsi NTB telah menerapkan sistem informasi perencanaan (entebePLAN) sejak tahun 2017. Namun, aplikasi tersebut masih dalam proses pengembangan sesuai dengan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023. Sistem tersebut dibangun sebagai upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 13 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renstra, e-Renja, e-Musrenbang, e-Aspirasi DPRD, e-RKPD, e-KUA PPAS, e-ASB, e-integrasi, e-monev, e-rka, e-lips dan simbada.

Berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai perangkat daerah yang mendapatkan penghargaan keterbukaan informasi publik dengan kategori informatif, sebagai apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Kemudian dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai target RPJMD untuk pencapaian tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan selama tahun 2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 311 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Belum optimalnya pelibatan stakeholder non pemerintah dalam mendukung pembangunan	2. Peningkatan proses perencanaan pembangunan tingkat provinsi. 3. Pelibatan stakeholder non pemerintah dalam inovasi dan pendanaan pembangunan.

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2019

4. Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut.

1. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan barang daerah dengan baik, benar dan tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama tiga tahun dari 2017 ke 2018 meningkat sebesar 17,88%, dan dari 2018 sampai dengan 2019 mengalami perkembangan sebesar 6,98% anggaran Belanja Daerah dalam APBD selaku SKPD dan SKPKD sebaimana tabel berikut.

Tabel 2. 312Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB Selaku SKPKD Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	PENINGKATAN (%)	2019	PENINGKATAN (%)
Belanja Tidak Langsung	1.380.184.673.734	1.627.098.385.000	17,88	1.740.690.391.626	6,98

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Peningkatan belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar 17,88% dari tahun 2017, sedangkan 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,98%.

Tabel 2. 313 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2017-2019

URAIAN	2017	2018	2019	PENINGKATAN / PENURUNAN (%)
Belanja Tidak Langsung	2.757.512.955.077,84	3.015.515.004.599,90	3.219.248.730.182,43	6,76%
Belanja Langsung	2.788.893.149.537,92	2.763.339.825.176,83	2.280.506.035.946,06	-17,47%
Jumlah	5.546.406.104.615,76	5.778.854.829.776,73	5.499.754.766.128,49	-4,83%

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 yang terakomodir dalam belanja langsung sebesar Rp.2.280.506.035.946,06 atau negatif sebesar -17,47% dari tahun 2018. Secara keseluruhan selama tiga tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,83%.

Penetapan APBD Provinsi NTB dalam 5 tahun terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 314 Penetapan APBD Provinsi NTB Dalam 5 Tahun Terakhir

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
MURNI						
2016	04-11-2015	30-11-2015	No. 903-6194 Tahun 2015 18-12-2015	Nomor 11 Tahun 2015 28-12-2015	Nomor 50 Tahun 2015 29-12-2015	Tepat Waktu
2017	11-11-2016	30-11-2016	No.903-10295 Tahun 2016 16-12-2016	Nomor 12 Tahun 2016 21-12-2016	Nomor 47 Tahun 2016 22-12-2016	Tepat Waktu

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	Penetapan		Ket.
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
2018	21-11-2017	30-11-2017	No. 903-9031 Tahun 2017 22-12-2017	Nomor 13 Tahun 2017 29-12-2017	Nomor 67 Tahun 2017 29-12-2017	Tepat Waktu
2019	05-11-2018	27-11-2018	No. 903-8688 Tahun 2018 10-12-2017	Nomor 13 Tahun 2018 17-12-2018	Nomor 47 Tahun 2018 17-12-2018	Tepat Waktu
2020	13-08-2019	29-08-2019	No. 903-4055 Tahun 2019 16-09-2019	Nomor 10 Tahun 2019, 26-09-2019	Nomor 33 Tahun 2019 30-09-2019	Tepat Waktu
PERUBAHAN						
2015	19-07-2015	11-08-2015	No. 903-5023 Tahun 2015 31-08-2015	Nomor 6 Tahun 2015 04-09-2015	Nomor 33 Tahun 2015	Tepatwaktu
2016	09-09-2016	30-09-2016	No. 903-9936 Tahun 2016 18-10-2016	Nomor 7 Tahun 2016 19-10-2016	Nomor 32 Tahun 2016 20-10-2016	Terlambat
2017	20-07-2017	11-08-2017	No. 903-7656 Tahun 2017 31-08-2017	Nomor 8 Tahun 2017 07-09-2017	Nomor 29 Tahun 2017 07-09-2017	Tepatwaktu
2018	03-09-2018	14-08-2018	No. 903-7421 Tahun 2018 25-09-2018	Nomor 11Tahun 2018 28-09-2018	Nomor 33Tahun 2018 28-09-2018	Tepatwaktu
2019	17-07-2019	02-08-2019	No. 903-3737 Tahun 2019 19-08-2019	Nomor 8 Tahun 2019 28-08-2019	Nomor 28 Tahun 2019 28-08-2019	Tepat waktu

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Selama kurun waktu 5 tahun penetapan APBD Provinsi NTB murni maupun Perubahan menunjukkan kedisiplinan dalam penyusunan anggaran tepat waktu artinya pengelolaan keuangan daerah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan diikuti oleh semua kabupaten/kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 315 Penetapan APBD Kabupaten/Kota Selama Tahun 2016 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Jadwal Penetapan APBD				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Mataram	29-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017	28-Dec-2018	30-Dec-2019
2	Lombok Barat	17-Dec-2015	28-Dec-2016	27-Dec-2017	27-Dec-2018	30-Dec-2019
3	Lombok Tengah	31-Dec-2015	29-Dec-2016	20-Dec-2107	27-Dec-2018	23-Dec-2019
4	Lombok Timur	30-Dec-2015	28-Dec-2016	18-Dec-2017	28-Dec-2018	18-Dec-2019
5	Lombok Utara	30-Dec-2015	29-Dec-2016	27-Dec-2017	28-Dec-2018	27-Dec-2019
6	Sumbawa Barat	29-Dec-2015	15-Dec-2016	18-Dec-2017	30-Nov-2018	23-Agust-2019
7	Sumbawa	28-Dec-2015	30-Dec-2016	7-Dec-2017	18-Dec-2018	30-Dec-2019
8	Dompu	31-Dec-2015	17-Jan-2016	29-Dec-2017	28-Dec-2018	27-Sept-2019
9	Bima	28-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017	28-Dec-2018	30-Dec-2019
10	Kota Bima	8-Dec-2015	16-Dec-2016	20-Dec-2017	28-Dec-2018	27-Dec-2019

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah merupakan sasaran pertama untuk mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah yang diukur melalui indikator: Opini Badan Pemeriksa Keuangan dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja karena merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Artinya dengan adanya penilaian Opini BPK, maka menjadi salah satu indikator bahwa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Penilaian terhadap pengelolaan keuangan dan Asset daerah yang dituangkan menjadi indikator kinerja pembangunan daerah sebagai standar pencapaian kinerja atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pada tahun pelaporan 2019 dengan LKPD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standart akuntansi pemerintah;
2. Kecukupan pengungkapana (*adequate disclosures*) = "kejujuran untuk/ dalam menjelaskan";
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) NTB dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Tahun Anggaran 2018 pada bulan Juli 2018 menyebutkan bahwa penilaian opini yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB adalah WTP. Penilaian itu sendiri menjadi yang ke-delapan kali secara berturut-turut diterima oleh Pemerintah Provinsi NTB. Trend Opini BPK dengan WTP ini diikuti seluruh Kabupaten/Kota untuk terus membenahi pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dengan pencapaian predikat yang sama selama kurun waktu tahun 2011-2018.

Keberhasilan pencapaian indikator Opini BPK merupakan adanya intervensi pencapaian program-program pendukungnya yang dilaksanakan oleh BPKAD dan Inspektorat, capaian dari indikator Opini BPK dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 316 Capaian Indikator Opini BPK Selama Tahun 2011-2019

Tahun Pelaporan	Opini
2011	WTP
2012	WTP
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian, untuk kabupaten/kota pada tahun pelaporan 2018 seluruh kabupaten/kota se-NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini sama dengan capaian pada tahun sebelumnya dimana seluruh kabupaten/kota mendapatkan opini WTP.

Tabel 2. 317 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015-2018

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD			
		2015	2016	2017	2018
1.	Kota Mataram	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WTP	WTP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WTP	WTP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

- **Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah**
  a) Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:
     1) Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
     2) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
     3) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;
     4) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
     5) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

     Untuk itu dokumen RKBMD merupakan indikator pengelolaan BMD yang tertib dari sisi perencanaan. BPKAD Provinsi NTB telah menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor 032-708 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 032-497 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun

2018 tanggal 26 Juni 2018.

b) Terkait pemindahtanganan BMD, BPKAD Provinsi NTB selaku PPBMD telah melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai dari Kanwil DJKN, dengan hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam proses lelang BMD tahun 2019.

Penilaian terkait pemindahtanganan BMD yang telah dilakukan dengan melakukan penilaian BMD Pemprov. NTB terhadap 5 (lima) objek yang terdiri dari Objek di Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Prapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Tanah dan bangunan Gedung kantor (Eks Bank NTB Praya), Jln. Purbasari Kel. Mayura Kec. Cakranegara Kota Mataram Tanah dan Bangunan Olahraga, Jln. Langko No. 60 Kel. Pejeruk, Kec. Ampenan, Kota Mataram Tanah bagunan Rumah negara Gilongan II, Jln. Langko No. 31 kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram Tanah Bagunan Rumah Negara Golongan II (Eks. Rumah dinas Direktur RSU Mataram) dan di Jln. Raden Puguh Kel. Puyung Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Limbah Padat (SCRAP0 2 (dua) Unit Alat Processing Lain-lain yang dilakukan oleh tim penilai dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

c) Terkait penghapusan BMD, Pemprov. NTB telah menetapkan 11 SK penghapusan. Data usulan dan penghapusan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 318 Data Penghapusan BMD yang telah Dilaksanakan oleh BPKAD pada Tahun 2019

No	No SK	Tanggal SK	Tentang	Nilai (Rp)
1.	032-28	16 Januari 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Hewan Ternak Sapi	111.750.000
2.	032-143	18Februari 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Kendaraan Roda 4 (Hibah ke Forkopimda)	4.907.673.720
3.	032-337	15April 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 9 unit (2	727.458.000

No	No SK	Tanggal SK	Tentang	Nilai (Rp)
			unit Hibah ke Masyarakat)	
4.	032-352	29April 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4	627.440.000
5.	032-460	23 Mei 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan 4 Unit	828.186.100
6.	032-459	23 Mei 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Peralatan dan Mesin	3.002.406.078,01
7.	032-461	23 Mei 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Peralatan dan Mesin	644.751.060
8.	032-502	23 Agustus 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa 5 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	68.107.000
9.	032-659	23 Agustus 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Peralatan dan Mesin	1.574341650.50
10.	032-789	25 Oktober 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa Bangunan 5 Unit (Hibah ke BRIMOB)	194.376.000
11.	032-790	25 Oktober 2019	Penghapusan BMD Pemerintah Prov. NTB Berupa 20 Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (Hibah ke Polda)	707.820.000

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

Adapun permasalahan yang dihadapi selama tahun 2019 dan upaya-upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 319 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan pada BPKAD Tahun 2019

PERMASALAHAN	UPAYA
1. Adanya Pengurangan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat yang diberlakukan pada akhir tahun sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan Kas Daerah dalam membayar tagihan (SPM)	1. Melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan agar kebijakan pengurangan transfer Dana Bagi Hasil di informasikan lebih awal guna mempersiapkan langkah-langkah antisipatif.
2. Adanya kesalahan dalam penganggaran khususnya terkait dengan penggunaan kode rekening yang dapat mempengaruhi Opini LKPD	2. Melakukan asistensi penyusunan RKA lebih teliti dan cermat sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Masih adanya perubahan sasaran/ lokasi pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dari dokumen perencanaan ke dokumen penganggaran sebagai akibat dilakukannya revisi anggaran pada tahun berjalan	3. Koordinasi dengan TAPD untuk mengawal sasaran/ lokasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tetap konsisten sampai dengan pelaksanaan program kegiatan.

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2019

2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) menjadi sebuah target RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.Untuk mendukung pencapaian sasaran Penguatan Fiskal Daerah yakni pencapaian misi kedua “NTB Bersih dan Melayani”, dalam rangka mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya membangun pondasi fiskal yang lebih baik, sehingga tidak selalu bergantung pada dana transfer pusat. Kreativitas, pengelolaan belanja APBD yang berkualitas, dan administrasi perpajakan yang lebih baik, bisa menjadi kunci. IKFD

Provinsi NTB Tahun 2019 dan indikator kinerja Bappenda tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 320 Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Indeks	0,47	0,50	106,38
2	Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah	Milyar Rp	5.244,78	5.197,73	99,11

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 0,5 masih masuk dalam kategori rendah karena nilai indeksnya masih dibawah 0,53. Hal ini tercermin dari kategori IKFD yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 119/PMK.07/2017, tanggal 31 Agustus 2017, dengan rentang IKFD dan kategori seperti tabel dibawah ini:

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,351	sangat rendah
0,351 ≤ IKFD < 0,530	rendah
0,530 ≤ IKFD < 0,823	sedang
0,823 ≤ IKFD < 1,531	tinggi
IKFD ≥ 1,531	sangat tinggi

Target Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) tahun 2019 sebesar 0,47 dan dapat direalisasikan 0,50. Capaian IKFD ini dipengaruhi oleh jumlah perolehan PAD yang harus mengimbangi dana transfer namun tidak termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) karena dana yang bersumber dari APBN ini lebih difokuskan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB berupaya sekuat tenaga memacu pertumbuhan PAD, paling tidak dapat mendekati atau sedikit lebih tinggi dari dana transfer tanpa DAK untuk bisa mencapai kategori sedang. Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2019 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2. 27 Target dan Realisasi Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2018-2023

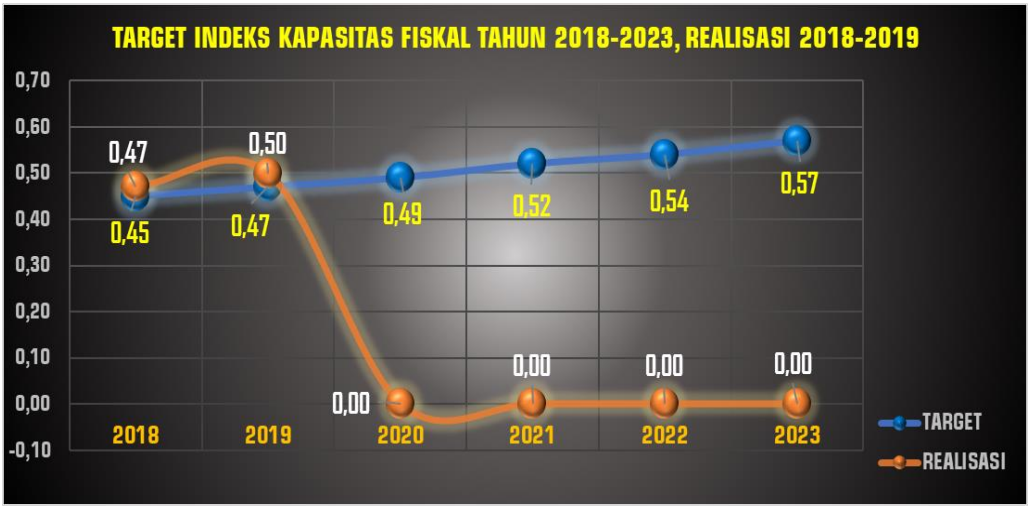

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2019

Kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena masih banyak ruang untuk melakukan optimalisasi penerimaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah.Secara nasional IKFD Provinsi NTB berada pada peringkat 19 dengan kategori rendah dari 34 provinsi.

Tonggak kemandirian fiskal daerah sebenarnya sudah dicanangkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terlebih lagi dengan transfer dana daerah yang makin besar setiap tahun, terutama dana desa dan terakhir dana kelurahan. Karena itu, pemerintah provinsi sudah seharusnya bisa membangun pondasi fiskal secara lebih baik, hingga tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pusat.

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Dengan meningkatnya penerimaan daerah maka ketergantungan pada pemerintah pusat akan lebih kecil, kualitas potensi ekonomi wilayah menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan penerimaan daerah juga berdampak pada meningkatnya kualitas dan akuntabilitas

pelayanan publik serta peningkatan sumber daya manusia yang mempetimbangkan sensitivitas gender dan pranata sosial.

Pendapatan Daerah provinsi NTB dari tahun 2018 s.d 2019 meningkat secara berlanjut, dimana Pendapatan Daerah tahun 2019 dapat direalisasikan sebesar Rp.5.197.727.488.242,- meningkat 5,2% dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2018 sebesar Rp.4.941.246.974.629,-. Berikut adalah realisasi per jenis komponen pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan 2019

Tabel 2. 321 Perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2018 -2019

No	Tahun	Realisasi (Rp)			
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah
1	2018	1.660.417.707.373	3.212.386.689.010	68.442.578.246	4.941.246.974.629
2	2019	1.807.482.745.855	3.342.865.637.337	47.379.105.050	5.197.727.488.242
	Jumlah	**3.467.900.453.228**	**6.555.252.326.347**	**115.821.683.296**	**10.138.974.462.871**

*Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020, *last data 06012020 (unaudited)*

Total Pendapatan Daerah sejak tahun 2018 sampai dengan 2019 telah terealisasi sebesar Rp.10.138.974.462.871,- atau 94,31% dari total target pendapatan daerah dalam APBD sebesar Rp.10.750.156.223.728,-. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Bagian Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah dengan kontribusi masing-masing komponen dapat dilihat dalam diagram sesbagai berikut:

Gambar 2. 28 Kontribusi Komponen Pendapatan Tahun 2018-2019

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020

Diagram di atas menggambarkan struktur pendapatan daerah Provinsi NTB masih sangat tergantung kepada dana yang bersumber dari dana transfer. Kontribusi pos PAD masih berkisar pada angka 33,50-35,00% dari total pendapatan daerah. Kontribusi menunjukan tren yang meningkat pada dua tahun terakhir.

Diagram diatas menunjukkan kontribusi PAD tahun 2018 sebesar 33,60% meningkat menjadi 34,77% tahun 2019. Adapun komponen pembentuk pendapatan daerah selama dua tahun pertama periode RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2019-2023, dimana tahun 2018 ke 2019 diperoleh PAD rata-rata 34,19%; Bagian Dana Perimbangan rata-rata 64,66%; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1,15%.

Berikut gambaran kondisi pos-pos pendapatan daerah Provinsi NTB tahun 2019:

- **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, yang dalam penetapan targetnya, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil perkapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan penyesuaian peraturan.

Target PAD tahun 2019 yang semula sebesar Rp.1.682.135.490.200,- bertambah dalam anggaran perubahan menjadi Rp.1.708.660.958.875,-. Target PAD tersebut merupakan 31,62% dari keseluruhan target Pendapatan Daerah Provinsi NTB sebesar Rp.5.403.971.042.675,- Sampai akhir tahun anggaran 2019, penerimaan PAD telah mencapai Rp.1.807.482.745.855 (105,78%) dari target perubahan pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.1.708.660.958.875,-.

Penerimaan PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Rincian penerimaan dari masing-masing komponen PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 322 Target dan Relaisasi Penerimaan PAD Tahun 2019

URAIAN	REALISASI 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
		TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
Pajak Daerah	1.269.688.670.076	1.353.790.000.000	1.404.964.803.251	103,78	10,65
Retribusi Daerah	21.271.223.932	26.331.739.350	21.480.849.525	81,58	0,99

URAIAN	REALISASI 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
		TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	60.080.960.356	54.589.651.726	54.173.704.673	99,24	-9,83
Lain-lain PAD yang Sah	309.376.853.009	273.949.567.799	326.863.388.406	119,32	5,65
Jumlah Total	**1.660.417.707.373**	**1.708.660.958.875**	**1.807.482.745.855**	**105,78**	**8,86**

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020

Program prioritas yang dijalankan Bappenda yakni Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sasaran Terwujudnya Peningkatan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah. Untuk mengukurnya diindikasikan dengan Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK), tahun 2019 ditargetkan pada APBD Perubahan sebesar 45,56% dan dapat terealisasai sebesar 49,88 dengan capaian 109,47%.

Tabel 2. 323 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Diluar DAK) Tahun 2019

Uraian	Realisasi 2019*	Formulasi (Milyar)
Pendapatan Daerah	5.197.727.488.242	1.807,48 / (5.197,73 – 1.573,80) = 49,88%
Pendapatan Asli Daerah	1.807.482.745.855	
Dana Alokasi Khusus	1.573.794.788.737	
Indikator Capaian	**49,88**	**Capaian: 109,47%**

**data realisasi 2019 Unaudit*

- Pendapatan Pajak Rokok

  Penerimaan pajak rokok tahun 2019 ditargetkan Rp.310.000.000.000,- terealisasi Rp.302.877.260.774,- namun dipotong Rp.8.949.905.690,- yang ditransfer langsung ke rekening BPJS tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sehingga tercatat dalam RKUD sebesar Rp.293.927.355.084,-. Tidak tercapainya realisasi pajak rokok disebabkan penurunan penerimaan cukai rokok nasional pada triwulan IV tahun 2019 dibandingkan dengan penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
- Penerimaan Retribusi Daerah

Proyeksi penerimaan Retribusi ditargetkan Rp. 23.807.449.350,- dalam APBD Provinsi NTB tahun 2019 dan dalam APBDP Provinsi NTB TA 2019 menjadi Rp.26.331.739.350,-. Pada tahun 2019 terealisasi Rp.21.480.894.525,- (81,58%). Tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Daerah disebabkan kendala administrasi dalam klaim BPJS pada retribusi pelayanan kesehatan terutama pada Rumah Sakit Mata Provinsi NTB, penurunan realisasi retribusi perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) sejak adanya surat edaran Mentri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 tahun 2018 mengenai penerapan Aplikasi OSS yang belum mengakomodir WNA yang bekerja dilintas Kabupaten/Kota, terdapat beberapa aset daerah yang berubah fungsi dari objek sewa menjadi pinjam pakai dan berkurangnya penyewa beberapa objek retribusi daerah.

Target penyampaian surat teguran tahun 2019 sebanyak 183.000 objek, dan telah direalisasikan 178.621 objek atau 97,61%, terdapat 3 (tiga) UPTB UPPD yang belum maksimal dalam melayangkan/menyampaikan surat teguran dari yang ditargetkan.

- **Bagian Dana Perimbangan**

Dana Perimbangan merupakan Pendapatan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dari dana APBN ke APBD untuk menunjang program Pemerintahanan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terdiri dari: 1) Bagi Hasil Pajak, 2) Bagi Hasil Bukan Pajak, 3) Dana Alokasi Umum (DAU) dan 4) Dana Alokasi Khusus (DAK). Rincian penerimaan dari masing-masing komponen Bagian Dana Perimbangan sebagai berikut.

Tabel 2. 324 Penerimaan Dari Masing-Masing Komponen Bagian Dana Perimbangan

URAIAN	REALISASI 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
		TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
Bagi Hasil Pajak	146.964.309.439	279.130.144.800	124.847.165.200	44,73	-15,05
Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	114.678.544.196	87.629.191.000	60.477.630.400	69,02	-47,26
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.537.777.886.000	1.583.746.053.000	1.583.746.053.000	100	2,99
Dana Alokasi Khusus (DAK)	330.074.001.617	457.020.502.000	434.251.210.607	95,02	31,56

URAIAN	REALISASI 2018	TAHUN 2019		CAPAIAN (%)	GROWTH (%)
		TARGET PERUBAHAN	REALISASI		
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	1.082.891.947.758	1.196.799.068.000	1.139.543.578.130	95,22	5,23
Jumlah	**3.212.386.689.010**	**3.604.324.958.800**	**3.342.865.637.337**	**92,75**	**4,06**

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020

Dalam tahun 2018-2019 pos dengan kontribusi paling besar adalah pos DAU, namun kontribusi DAU terhadap total dana perimbangan berangsur-angsur menurun. Pada tahun 2018, porsi DAU terhadap dana perimbangan sebesar 47,87% kemudian menurun hingga mencapai 47,38% pada tahun 2019. Ada pergeseran pola dimana DBH pajak menunjukan penurunan kontribusi sedangkan DAK menunjukan tren yang terus meningkat, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 2. 29 Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2018-2019

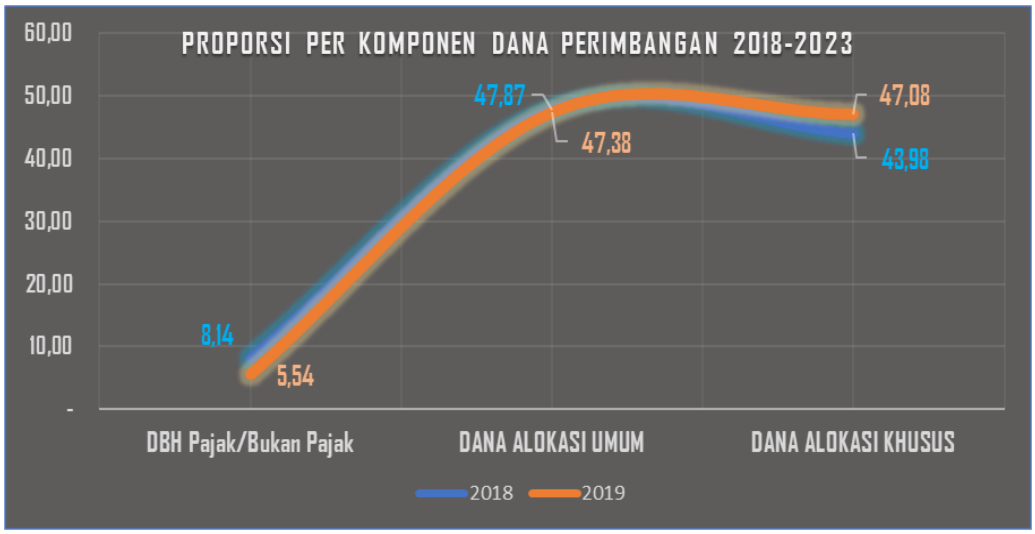

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020

Penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 terealisasi 92,75% atau terealisasi sebesar Rp.3.604.324.958.800,- dari target sebesar 3.475.324.958.800,-. Belum tercapaianya target penerimaan Dana Perimbangan tahun 2019 disebabkan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN Tahun Anggaran 2019 yang mengatur penyaluran DBH Pajak dan Sumber Daya Alam triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH sampai dengan tahun anggaran 2018 dengan memperhitungkan lebih bayar tahun-tahun sebelumnya, tidak terealisasinya proyeksi kurang bayar DBH sebesar 129

Milyar rupiah, serta efisiensi pelaksanaan DAK sebagai dana transfer pemerintah pusat yang bersifat khusus.

- **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari : 1) Pendapatan Hibah dan 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Penerimaan daerah dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah secara tren menunjukan tren yang menurun, hal ini terlihat dari gambar di atas. Pada tahun 2018 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp.68,44 milyar dengan kontribusi sebesar 1,39%, sedangkan pada tahun 2019 hanya Rp.47,38 milyar dengan kontribusi 0,91%.

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB tahun 2019 yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya;
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan UPTB UPPD yang ada di kabupaten/kota dalam pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi untuk aplikasi e-Samsat dan e-STS Retribusi Online dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan PAD;
4. Menambah 10 unit Armada Samsat keliling untuk masing-masing samsat kabupaten/kota, serta menambah beberapa unit Samsat bantuan yang digagas jajaran Bappenda;
5. Mengoptimalkan layanan Samsat Delivery yang sudah aktif sejak awal tahun 2019, yang makin memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran PKB tahunan melalui sistem jemput antar berbasis lokasi GPS perangkat Android dimanapun berada, khusus untuk Kota Mataram;

Langkah-langkah yang dilakukan guna mengoptimalisasi penerimaan PAD adalah melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD berupa:

1. Peningkatan kualitas layanan dan jam layanan pajak daerah 24/7 (pelayanan prima);
2. Peningkatan penyelesaian angka tunggakan melalui surat teguran, operasi gabungan dan juru sita pajak;
3. Melakukan pelatihan manajemen mutu pelayanan berbasis ISO 9001;2015 dengan melibatkan petugas pelayanan termasuk mitra kerja SAMSAT seperti kepolisian dan Jasa Raharja;

4. Melakukan penertiban dan sosialisasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menjadi non subsidi melaui penataan konsumsi BBM kendaraan dinas, penataan rekomendasi nelayan dan penataan rekomendasi petani;
5. Mengintensifkan penerimaan PAP melalui penagihan piutang PAP dan melakukan pendataan objek/potensi PAP;
6. Melakukan pemantauan/penertiban peredaran cukai rokok illegal;
7. Memberikan kepastian hukum yakni menyusun regulasi/dasar hukum pemungutan PAD;
8. Menyusun regulasi aturan Pajak Daerah dimana peran serta Kabupaten/Kota dalam mendukung optimalisasi Pajak Daerah menjadi salah satu indikator penunjang penyaluran Pajak Daerah;
9. Melakukan koordinasi dengan OPD pengelola PAD dengan membentuk tim pembina retribusi daerah dan kordinasi dengan BUMD terkait roadmap subsidi BLUD;
10. Membangun sistem informasi berbasis tekhnologi yang terintegrasi dan dinamis guna menunjang optimalisasi penerimaan PAD;
11. Mengintensifkan sosialisasi PBBKB untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyerapan Dana Perimbangan di provinsi NTB adalah:

1. Pembinaan penerimaan Dana Bagi Hasil Daerah dengan membentuk tim pembina penerimaan DBH Pajak dan Bukan Pajak, melakukan koordinasi dengan mitra kerja yakni OPD tekhnis penerima DBH serta rekonsiliasi realisasi PNBP dengan OPD pemungut PNBP serta melakukam penyusunan data potensi, target dan realisasi terhadap pajak dan PNBP;
2. Melakukan sosialisasi mengenai Konfirmasi Status Wajib Paja(KSWP) yang melibatkan Kabupaten/Kota dan Instansi terkait Lingkup Pemerintah Provinsi NTB;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus dan penyusunan database serta laporan DAK.

Tabel 2. 325 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Keuangan pada BAPPENDA Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Validasi Data Objek Kendaraan	Melakukan validasi data secara berkelanjutan dengan instrumen surat teguran, agent samsat,

PERMASALAHAN	SOLUSI
	updating data server, disiplin album notice, termasuk sinkronisasi data dengan ERI Kepolisian
Masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak daerah	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pekan panutan pajak dan gebyar pajak, mengadakan samsat go to school, penyampaian surat teguran, operasi gabungan kesadaran masyarakat, sms notrifikasi pemberitahuan jatuh tempo masa laku pajak, melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait partisipasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak
Penyesuaian tarif kendaraan plat kuning sejak tanggal 22 Februari 2019 mengharuskan pengembangan aplikasi kesamsatan	Melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan aturan terbaru terkait kesamsatan
Terdapat wajib pajak khususnya pajak daerah lainnya yang belum terdata baik objek pajak PAP maupun PBBKB	Membentuk tim penertiban PBBKB dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendeteksi penyedia BBM terbaru serta melakukan penyesuaian tarif BBM dan Membentuk tim dengan pihak terkait untuk mengukur debit air agar data objek PAP lebih akurat
Beredarnya cukai rokok ilegal dimasyarakat	Melakukan penertiban cukai ilegal bekerja sama dengan Bea Cukai Wilayah NTB dan instansi tekait
Banyak potensi sewa aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung kegiatan kedinasan	Koordinasi dengan BPKAD untuk pengelolaan aset yang menjadi

PERMASALAHAN	SOLUSI
dan terdapat aset yang dipinjam pakai dan dihibahkan sehingga tidak dapat menjadi potensi penerimaan	salah satu potensi andalan retribusi
Kurangnya pemanfaatan teklonogi informasi dalam mengelola pendapatan daerah	Mendorong OPD untuk melakukan inovasi termasuk membangun infrastruktur pendukung dalam mempercepat dan mengakuratkan data penerimaan maupun data potensi retribusi. Beberapa inovasi yang didukung oleh tim IT Bappenda Provinsi NTB antara lain aplikasi e-Retribusi, e-tiketing, e-Wisma NTB dan Samsat Zero Waste
Bencana alam gempa beberapa waktu lalu mengakibatkan banyak potensi pajak yang memerlukan perbaikan.	Membangun infrastruktur pendukung.
Terdapat objek retribusi baru yang belum masuk dalam Perda retribusi maupun tarif yang berubah/belum menyesuaikan dengan harga pasaran.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap objek maupun tarif potensi retribusi untuk selanjutnya digunakan dalam menyusun/merevisi regulasi terkait penerimaan retribusi
Klaim BPJS yang belum terbayar kepada Rumah Sakit Pemerintah	Melakukan koordinasi intensif dengan BPJS terkait pencairan klaim BPJS kepada rumah sakit pemerintah dan mengkoordinasikan OPD-OPD yang memiliki klaim BPJS.
Tindak lanjut dari Tuntutan Ganti rugi yang masih rendah	Koordinasi dengan pihak terkait untuk upaya tindak lanjut TGR/LHP.
Masih belum maksimalnya penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Melakukan koordinasi dan kerjasama untuk pertukaran data dan informasi dengan ILAP, NPWP Cabang dan KSWP

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2020

5. Kepegawaian

Untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi ke depan, Pemerintah Provinsi NTB merumuskan beberapa strategi percepatan pencapaian nilai indeks reformasi birokrasi untuk periode RPJMD 2019-2023, yaitu melalui kebijakan 1) meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dan, 2) meningkatkan kinerja dan disiplin ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB selaku penanggung jawab urusan penunjang bidang kepegawaian diamanatkan untuk mencapai sasaran "Terwujudnya Penataan Sistem Manajemen ASN berbasis Sistem Merit" agar dapat berjalan dengan baik. Adapun ukuran untuk menilai tercapainya saran tersebut adalah dengan indikator kinerja kunci Indeks Profesionalisme ASN (IPA).

Metode pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang digunakan yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\mathrm{IP} = \sum_{i=1}^{4} \mathrm{IP}_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme
IPi = Indeks Profesionalisme ke-i
IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi
IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi
IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja
IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

Kriteria Indeks Profesionalitas ASN dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu : 1) 0,91-1 (Sangat Tinggi); 2) 0,81-0,9 (Tinggi); 3) 0,71-0,8 (sedang); 4) 0,61-0,7 (Rendah); dan 5) 0,6 ke bawah (Sangat Rendah). Pada tahun 2019, capaian indikator Indeks Profesionalisme ASN lingkup Provinsi NTB sebesar 0,54 masuk dalam kategori **Sangat Rendah** belum mencapai target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 0,65. Capaian Indeks Profesionalisme ASN tahun 2019 berdasarkan dimensi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 326 Nilai Indeks Profesionalisme ASN Berdasarkan Dimensi Tahun 2019

No	Dimensi	Bobot (%)	Nilai IPA 2019		
			Nilai Per-Dimensi (%)	Nilai Komulatif per Dimensi x Bobot (%)	Selisih Nilai Komulatif terhadap Bobot (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5=3x4**	**6=5-3**
1	Kompetensi	40	29,75	11,90	-28,10
2	Kinerja	30	83,33	25,00	-5,00
3	Kualifikasi	25	48,71	12,18	-12,82
4	Disiplin	5	99,55	4,98	-0,02
	IPA/Bobot	**100**		**54,05**	**-45,95**

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019

Capaian Indeks Prefisionalesme ASN berdasarkan dimensi dijelaskan sebagai berikut:

a. **Dimensi Kompetensi,** digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dengan bobot penilaian masing-masing: 1) pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural/fungsional sesuai jabatan berbobot 15%; pernah mengikuti diklat teknis untuk jabatan stuktural/fungsional dengan bobot 15%; pernah mengikuti workshop untuk jabatan struktural/fungsional dengan bobot 10%; 2) pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis bagi jabatan pelaksana berbobot 22,5% dan untuk workshop 17,5%.

   Nilai IPA untuk dimensi kompetensi pegawai tahun 2019 sebesar 29,75% dengan nilai komulatif dimensi Kompetensi setelah dikali bobot berada pada 11,90 %, masih terdapat selisih -28,10% terhadap bobot 40%. Hal ini menggambarkan masih belum meratanya pengembangan kompetensi aparatur baik berupa pengembangan kompetensi bagi Jabatan Stuktural, Jabatan Fungsional maupun Jabatan Pelaksana berupa Pendidikan dan Pelatihan Stuktural, Pelatihan, Diklat Teknis dan Seminar/Workshop. Faktor lain yang menyebabkan masih rendahnya nilai Dimensi Kompetensiadalah:

   - Validasi data terkait dengan pengembangan kompetensi ASN (dimensi kompetensi) masih terkendala pada pengumpulan data dan informasi terkait pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar dan bimtek yang diikuti oleh ASN; sehingga perlu dikembangkan Sistem Informasi Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi ASN;

- Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melakukan pengembangan kompetensi diri dan belum terintegrasinya system pengembangan kompetensi satu pintu, sehingga kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan akan linier dengan pengembangan SDM aparatur pada setiap perangkat daerah.

b. **Dimensi Kinerja**, digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% dengan bobot penilaian kinerja masing-masing 1) 30% untuk penilaian kinerja 91-100; 2) 25% untuk penilaian kinerja 76-90; 3) 20% untuk penilaian kinerja 61-75; 4) 5% untuk penilaian kinerja 61-60 dan 5) 1% untuk penilaian kinerja 50% ke bawah. Nilai IPA untuk dimensi kinerja tahun 2019 berada pada 25,0%. Nilai ini menggambarkan kinerja ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB berada pada rentang capaian kinerja dengan nilai 76-90 atau dengan kategori Baik.

c. **Dimensi Kualifikasi**, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dengan bobot masing-masing jenjang: 1) 25% untuk S-3; 2) 20% untuk S-2; 3) 15% untuk S-1, 4) 10% untuk D-III, 5) 5% untuk D-II/DI/SLTA dan 6) 1 % untuk SLTA ke bawah. Nilai IPA untuk dimensi kualifikasi tahun 2019 berada pada 12,18%. Atau bila dijabarkan berdasarkan instrument pengukuran dimensi kualifikasi sebagaian besar ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB berada dibawah nilai kualifikasi untuk Strata I (S-I) dengan nilai 15% dan diatas nilai kualifikasi Diploma III (D-III) yakni 10%. Kondisi ini disebabkan jumlah ASN yang berpendidikan minimal S-I masih sangat rendah bila dibandingkan dengan jumlah pegawai. Adapun penyebab masih rendahnya kualifikasi pendidikan ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTB lebih diakibatkan masih kurangnya minat ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya.

d. **Dimensi Disiplin,** digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% dengan bobot masing-masing tingkatan: 1) 5% bagi PNS dengan riwayat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin; 2) 3% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan dan 3) 2% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin Sedang; 4) 1% bagi PNS dengan riwayat pernah dijatuhi hukuman disiplin Berat. Nilai IPA untuk dimensi disiplin

berada pada 4,98% menunjukkan bahwa tingkat disiplin PNS lingkup Provinsi NTB sangat baik dengan deviasi hanya 0,02%.

Capaian program yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur yang dilakukan melalui beberapa kegiatan dengan capaian berikut:

a. Seleksi Penerimaan CPNS, dengan target 2 (dua) kegiatan yang direncanakan yaitu penerimaan CPNS dan P3K, dimana yang telah terlaksana adalah kegiatan seleksi P3K sedangkan Seleksi CPNS pada saat ini dalam tahap seleksi administrasi dan pada tahun 2020 akan dilaksanakan ujian seleksi penerimaan CPNS.

   Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS sebanyak 2 kegiatan (periode April dan Oktober) dan telah dilaksanakan tepat waktu.
b. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur dengan indikator Jumlah ASN yang mengikuti, Workshop, Seminar, *Short Course* sebanyak 50 orang dengan realisasi 25 orang untuk pengembangan kemampuan bahasa inggris bagi ASN.
c. Pemetaan Kompetensi ASN berbasis sistem merit guna melihat kompetensi dan kualifikasi ASN untuk mengampu jabatan tertentu. Melakukan kerjasama pemetaan kompetensi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi Lain melalui kerjasama Penilaian Kompetensi melalui Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK) sebanyak 416 orang. Untuk kerjasama dan promosi pemetaan kompetensi dengan kabupaten/kota telah terealisasi sebanyak 17 dokumen kerjasama.
d. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) menjadi Sistem Manajemen ASN Terpadu (SIMADU). Aplikasi ini memungkinkan pelayanan kepegawaian dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta mampu memberikan data dan informasi secara akurat dan *real time* guna kepentingan pengelolaan kepegawaian. Selain itu aplikasi SIMADU merupakan suatu wadah penyimpanan digital untuk mendokumentasikan arsip-arsip kepegawaian sehingga mempermudah di dalam pengelolaan tata naskah kepegawaian.
e. Pengembangan Penilaian Kinerja Pegawai dengan memanfaatkan Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN (e-SIPJA). Sistem ini merupakan alat untuk mengukur kinerja individu ASN secara menyeluruh dari level Jabatan Tinggi sampai dengan Pelaksana. Dengan pengembangan aplikasi ini nantinya seluruh kinerja pegawai dapat terekam secara harian, bulanan dan tahunan dan menjadi alat untuk menilai kinerja pegawai yang

akan berkorelasi dengan jumlah tambahan penghasilan yang akan diterima pegawai.

f. Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi bagi Jabatan Tinggi dan Penerapan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrator dan Pengawas. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional terus dilakukan upaya peningkatan kapasitas jabatan fungsional melalui mekanisme *inpassing*.

g. Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin ASN dengan melakukan beberapa inovasi diantaranya pengawasan melekat dan berjenjang terhadap seluruh ASN. Selain itu proses Pembinaan Disiplin ASN menekankan cara yang prefentif dengan melakukan pemantauan secara berkala serta pendampingan konseling bagi ASN yang bermasalah.

h. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur dengan melakukan pemetaan komposisi ASN dan penyusunan informasi kompetensi ASN sehingga dapat dijadikan acuan di dalam pengembangan kompetensi dan kualifikasi Pegawai.

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur NTB Nomor 27 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, maka seluruh PNS yang berpredikat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB pada Tahun 2019 wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara untukTahun Aaggaran 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun realisasi capaian LHKPN Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 327 Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN

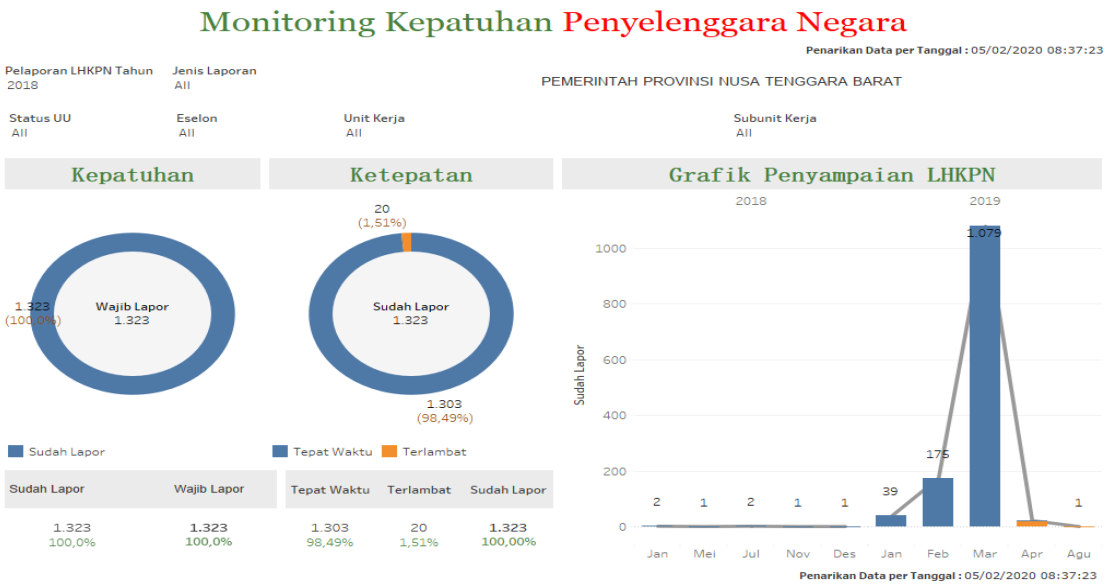

Sumber: https://elhkpn.kpk.go.id tahun 2019

Tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Provinsi NTB sangat tinggi yakni mencapai 100% dengan persentasi tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN sebesar 98,49%. Hal ini perlu ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang sehingga capaian pelaporan dan tingkat ketepatan waktu Pelaporan LHKPN dapat mencapai 100%. Untuk meningkatkan capaian ketepatan waktu LHKPN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB terus melakukan pembinaan dan pendampingan dengan cara melakukan bimbingan teknis tata cara pengisian LHKPN serta memberikan penghargaan bagi OPD yang telah tuntas dan tepat waktu melaporkan LHKPN. OPD yang LHKPN-nya mencapai 100% dan telah diberikan penghargaan berupa "Piagam Kepatuhan LHKPN 2018" adalah:

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Luar Negeri
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah PRovinsi NTB;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB;
5. Dinas Sosial Provinsi NTB;
6. Biro Umum Setda Provinsi NTB;
7. Biro Hukum Setda Provinsi NTB;
8. Dinas Pariwisata Provinsi NTB;
9. Dinas Perindustrian Provinsi NTB;
10. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Provinsi NTB;
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB;
12. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB.

Bagi OPD yang belum 100% diberikan surat teguran dan sekaligus melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Provinsi NTB, sehingga dari 1.323 jumlah wajib LHKPN yang melaporkan sampai dengan Desember 2019 sebanyak 1.303 orang atau 98,49% dan terlambat sebanyak 20 orang atau 1,51%.

Pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB telah melakukan beberapa inovasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan aparatur melalui layanan*e-Government* berbasis elektronik dengan maksud memberikan pelayanan kepada *stakeholder* agar mudah dan cepat dalam memperoleh informasi. Sistem informasi yang dikembangkan untuk menunjang kinerja yaitu Aplikasi SIMADU (Sistem Management ASN Terpadu) guna memudahkan user, operator, bahkan ASN dalam memanfaatkan, mengolah dan mengelola data kepegawaian sehingga terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan

pengembangan karier ASN. Aplikasi SIMADU selain sebagai system informasi kepegawaian secara terintegrasi, juga merupakan sistem pelayananan kepegawaian berbasis elektonik, sehingga dapat mempermudah pelayanan kepegawian lingkup Pemerintah Provinsi NTB dari ujung timur Pulau Sumbawa sampai dengan ujung barat Pulau Lombok.

Disamping itu, dikembangkan juga system aplikasi e-SIPJA (Sistem Informasi Penilaian Kinerja ASN) untuk membantu dalam penilaian kinerja secara individu. e-SIPJA selain dapat mengukur tingkat kinerja masing-masing ASN, juga terintegrasi dengan sistem kehadiran berbasis online sehingga dapat menjadi alat untuk memonitoring dan mengevaluasi tingkat disiplin ASN. Lebih lanjut, e-SIPJA juga akan terintegrasi dengan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berbasis kinerja, sehingga diharapkan kesejahteraan Pegawai dapat diwujudkan.

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kepegawaian pada tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 2. 328 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Urusan Bidang Kepegawaian Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Pengalihan urusan pemerintahan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi urusan kepegawaian mengakibatkan belum tersedianya Arsip/tata Naskah kepegawaian Secara lengkap sehingga menghambat pelayanan kepegawaian	Percepatan Penyiapan Data Base berbasis Elektronik (SIMADU) terhadap seluruh Arsip Kepegawaian masing-masing ASN.
Belum tepat waktunya Wajib LHKPN menyampaikan Laporannya	Pendampingan dan supervise untuk Pelaporan LHKPN dan menerapkan*reward/phunisment* yang mengikat
Masih banyak pelanggaran disiplin tingkat ringan-sedang belum tertangani di tingkat OPD	Pembinaan dan Pendampingan secara melekat dengan penerapan system evaluasi kinerja dan disiplin berbasis elektronik dan secara berjenjang
Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar masih mengacu kepada kebutuhan individu guna	Melakukan kajian terhadap kebutuhan organisasi dengan

PERMASALAHAN	SOLUSI
pengembangan kapasitas pribadi dan belum terintegrasi dengan kebutuhan organisasi	kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan
Belum adanya Regulasi tentang Standar Kompetensi dan Mekanisme Pemetaan Kompetensi ASN	Perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Standar Kompetensi dan Mekanisme Pemetaan Kompetensi ASN
Belum optimalnya layanan psikis ASN	Pendampingan dan sosialisasi perihal layanan Psikis ASN yang terintegrasi denga npembinaan disiplin ASN

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB Tahun 2019

6. Pendidikan Dan Pelatihan

Sebagai Institusi yang diberikan otoritas penuh untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di daerah, beberapa jenis diklat yang ada pada BPSDMD Provinsi NTB telah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 329 Akreditasi Jenis Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019

No	JenisDiklat	Akreditasi 2019
1.	Diklat Dasar/Latsar CPNS	A
2.	Diklat PIM III	B
3.	Dilat PIM IV	B

Sumber: BPSDMD Provinsi NTB, 2019

Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengakreditasi jenis-jenis diklat yang dilaksanakan oleh suatu Lembaga atau Institusi Penyelenggara Diklat. Dari 4 Jenis Diklat yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi NTB, Diklat Dasar/Latsar CPNS mendapatkan akreditasi A, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun, sementara Diklat PIM III dan IV mendapatkan akreditasi B, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. Akreditasi B yang diperoleh BPSDMD Provinsi NTB disebabkan karena:

1. Pengelola Diklat belum memiliki sertifikat *Master of Trainning* (*MOT*) begitu juga dengan penyelenggara diklat belum memiliki sertifikat *Training Officer Course* (TOC).

2. *Person In Charge Information technology* (PIC IT) BPSDMD Provinsi NTB masih dipegang oleh ASN Golongan II, yang seharusnya Golongan III.

3. WidyaIswara (WI) BPSDMD Provinsi NTB belum memiliki spesialis terhadap mata ajar tertentu.

Sedangkan untuk Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional/PKN Tingkat II masih menggunakan pola kerjasama antara LAN RI dengan BPSDMD Provinsi NTB, ke depan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Nasional/PKN Tingkat II di Provinsi NTB menggunakan pola mandiri. Dengan telah terakreditasinya Diklat Dasar/Latsar CPNS, Diklat PIM III dan Diklat Pim IV artinya BPSDMD Provinsi NTB telah mendapatkan pengakuan untuk menyelenggarakan diklat yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

BPSDM Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang bersifat manajerial/dasar maupun teknis/fungsional, peningkatan kapasitas kompetensi widyaiswara/tenaga pengajar serta fasilitasi sertifikasi kompetensi keahlian. Peserta diklat tahun 2019 berjumlah 1.696 orang mencapai 11,85% dari total ASN Provinsi NTB sebanyak 14.311 Orang. Jenis dan Jumlah Peserta Diklat pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 330 Jenis dan Jumlah Peserta Diklat Pada BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2019

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
A	**Diklat Dasar/Latsar CPNS**	**1.119**	**1.133**	
B	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural**	**90**	**94**	
1	Diklat PIM II	10	14	Termasuk 1 orang Diklat Pim I
2	Diklat PIM III	40	40	
3	Diklat PIM IV	40	40	
C	**DiklatFungsional**	**30**	**30**	
1	Diklat Dasar Satpol PP	30	30	
D	**DiklatTeknisUmum**	**90**	**90**	
1	Diklat Zero Waste	30	30	
2	DiklatIndustrialisasi Hasil Hutan Bukan Kayu	30	30	

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
3	DiklatAnalisisJabatan	30	30	
E	**DiklatTeknis Inti JabatanBagi ASN Daerah**	90	90	
1	DiklatManajemenPengelolaan Program PrioritasKesehatan	30	30	
2	DiklatManajemenSekolah	30	30	
3	DiklatManajemenBencana	30	30	
F	**DiklatTeknisPerangkat Daerah Penunjang**	**95**	**85**	
1	DiklatPengadaanBarang dan Jasa (2 angkatan)	60	50	
2	Diklat TOC (*Training Officer Course*)	20	20	
3	Diklat MOT(*Management Of Training*)	15	15	
G	**SertifikasiKompetensi**	**140**	**140**	RSUP, RSJ, RS Mata, RSJ Mutiara Sukma, RS Manambai, Dikes, Dinas Sosisl
1	SertifikasiPerawat	105	105	
2	SertifikasiTerapis Gigi	5	5	
3	SertifikasiPerekamMedis	14	14	
4	SertifikasiRadiografer	10	10	
5	SertifikasiTeknisElektromedik	6	6	
H	**PengelolaanSumberBelajar**	**30**	**30**	
I	**PeningkatanKeterampilan dan Profesionalisme**	**4**	**4**	Orasiilimiahuntukpeningkatanjenjang WI
	TOTAL (orang)	**1.598**	**1.696**	

Sumber : BPSDMD Provinsi NTB, 2019

Tabel 2. 331 Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum tersedianya data dan informasi kebutuhan diklat yang dibutuhkan (*Training Need Analysis*)	Sosialisasi dan pengumpulan data dan informasi kebutuhan diklat melalui surat maupun masukan dari Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota lain

PERMASALAHAN	SOLUSI
Belum ada regulasi daerah tentang pola kontribusi dan fasilitasi penyelenggaraan Diklat di BPSDMD Provinsi NTB	Mempercepat lahirnya regulasi daerah sebagai payung hukum penarikan kontribusi penyelenggaraan diklat di BPSDMD Provinsi NTB.

Sumber: BPSDM Provinsi NTB, 2019

7. Penelitian Dan Pengembangan

Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019 mengampu urusan fungsi penunjang yaitu urusan perencanaan dengan indikator tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan dan urusan penelitian dan pengembangan dengan indikator persentase pemanfaatan hasil penelitian (lokus NTB). Capaian kinerja pembangunan daerah urusan penunjang penelitian dan pengembangan dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 diukur dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan hasil penelitian (lokus NTB), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 332 Capaian Indikator Kinerja Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Tahun 2019

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2017		2018		2019	
		Target	Real	Target	Real	Target	Real
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	12	12	15	15	18	18

Sumber : Bappeda Provinsi NTB, 2019

Selain fungsi koordinasi di bidang perencanaan, Bappeda juga memiliki fungsi terkait penelitian dan pengembangan dan bertanggungjawab atas indikator kinerja "Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)". Tahun 2019 indikator ini mencapai 18 persen sesuai dengan target. Tercapainya target tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi NTB untuk menerapkan research base policy, dimana hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah. Adapun untuk menyusun daftar penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan maka Bappeda Provinsi NTB melakukan beberapa cara, yaitu: (1) melalui

penjaringan isu-isu dan permasalahan pembangunan dari hasil koordinasi dengan kepala daerah, perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota, pemangku kepentingan lainnya; (2) memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai umpan balik untuk melaksanakan penelitian; serta (3) hasil pertemuan dengan Dewan Riset Daerah Provinsi NTB.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Aspek daya saing Provinsi NTB diukur menggunakan pendekatan 8 indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 333 Capaian Indikator pada Aspek Daya Saing Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019		
			2017	2018	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	Indeks Kriminalitas		18.05	17.25	16.45	12.71	122.74
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		-	74.60	75.76	74.92	98.89
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		56.99	57.03	57.09	75.16	131.65
4	Ketaatan Terhadap RTRW	%	-	87.51	87.79	NA	NA
5	Indeks Risiko Bencana		177.50	177.50	172.18	129.02	125.06
6	Indeks Reformasi Birokrasi		CC	CC	B	NA	NA
7	Indeks Pelayanan Publik		97.58	97.68	97.78	NA	NA
8	Indeks Demokrasi		76.04	-	76.37	NA	NA

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2019

Dari 8 indikator untuk mengukur aspek daya saing daerah, terdapat 3 indikator (37,50%) tercapai atau memenuhi target yaitu Indeks Kriminalitas, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Risiko Bencana, sedangkan

1 indikator belum memenuhi target yaitu indikator Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur dan, namun tingkat capaiannya sangat tinggi mencapai diatas 98%. Dan masih terdapat 4 indikator (50%) belum dapat dihitung atau menunggu rilis resmi dari lembaga terkait yaitu Ketaatan Terhadap RTRW, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, dan Indeks Demokrasi.

2.2 HASIL EVALUASI PELAKSANAN TAHUN SEBELUMNYA

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019

A. Rekapitulasi Hasil Capaian Kinerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019

Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah sebanyak 46 Perangkat Daerah dan adapun rekaputilasi hasil capaian kinerja menurut perangkat daerah sebagaimana disajikan pada tabel laporan Triwulan IV tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2. 334 Rekapitulasi Hasil Hasil Capaian Kinerja Tahun 2019

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**				
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99,79	86,87	SANGAT TINGGI	TINGGI
2	Dinas Kesehatan	103,71	91,75	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
3	Rumah Sakit Umum Daerah	98,50	93,34	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	96,69	89,59	SANGAT TINGGI	TINGGI
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	96,15	94,63	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80,01	93,88	TINGGI	SANGAT TINGGI
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	91,30	91,08	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	92,13	95,74	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
9	Satuan Polisi Pamong Praja	100,00	97,58	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	109,96	88,76	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	Dinas Sosial	96,08	94,29	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**				
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	99,89	98,64	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	94,43	77,36	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	Dinas Ketahanan Pangan	96,30	92,90	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81,95	91,93	TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103,01	95,15	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Dinas Perhubungan	102,70	86,31	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	115,46	89,16	SANGAT TINGGI	TINGGI
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	112,12	85,72	SANGAT TINGGI	TINGGI

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,66	81,53	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	104,10	89,47	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	102,19	98,50	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
C	**URUSAN PILIHAN**				
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	101,34	93,77	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Dinas Pariwisata	96,36	89,55	SANGAT TINGGI	TINGGI
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	101,72	84,94	SANGAT TINGGI	TINGGI
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	94,11	95,92	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99,27	88,83	SANGAT TINGGI	TINGGI
6	Dinas Perdagangan	110,06	86,21	SANGAT TINGGI	TINGGI
7	Dinas Perindustrian	85,17	86,44	TINGGI	TINGGI
D	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**				
1	Biro Umum	101,55	98,50	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
2	Biro Organisasi	66,67	98,35	SEDANG	SANGAT TINGGI
3	Biro Hukum	151,55	92,38	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
4	Biro Pemerintahan	99,48	98,97	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
5	Biro Perekonomian	99,90	94,18	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	99,71	91,21	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	102,58	82,83	SANGAT TINGGI	TINGGI
8	Biro Kerjasama	109,77	89,66	SANGAT TINGGI	TINGGI
9	Biro Humas dan Protokol	98,51	90,19	SANGAT TINGGI	TINGGI
10	Sekretariat DPRD	92,86	88,27	SANGAT TINGGI	TINGGI
11	Badan Penghubung Daerah	97,51	84,61	SANGAT TINGGI	TINGGI
12	Inspektorat	102,46	93,96	SANGAT TINGGI	SANGAT TINGGI

NO	NAMA OPD	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
		KINERJA (%)	ANGGARAN (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98,22	88,77	SANGAT TINGGI	TINGGI
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100,00	89,50	SANGAT TINGGI	TINGGI
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	108,68	89,56	SANGAT TINGGI	TINGGI
16	Badan Kepegawaian Daerah	100,00	82,32	SANGAT TINGGI	TINGGI
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	102,27	79,87	SANGAT TINGGI	TINGGI
KATEGORI		**99,80**	**90,50**	**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**

B. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Triwulan IV sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 2. 335 Permasalahan dan Rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 Triwulan IV

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
A	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**			
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
2	Dinas Kesehatan	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesui dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV	1. Percepatan pelaksanan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3. Percepatan proses APBD Perubahan	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	1 Pada Program pengadaan, kegiatan pengadaan alat kesehatan, terdapat alat yang tidak sesuai spesifikasi yaitu bedside sebanyak 15 unit	Percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal	Belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan memperbaiki koordinasi internal

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
		2 Pada Program Upaya Kesehatan Masyarakat, KegiatanPeningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, jumlah pasien bansos yang terlayani tidak mencapai target karena pembiayaan pasien bansos sudah di cover oleh kabupaten/kota		
		3 Pada Program standarisasi pelayanan kesehatan, realisasi anggaran sebesar 81,76% karena biaya pendaftaran akreditasi lebih rendah dari estimasi.		
5	Rumah Sakit H.L. Abdul Kadir Manambai	-		Dalam menentukan target kinerja baik output maupun outcome perlu menambahkan kontribusi dari dana BLUD
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Proses Tender / Pelelangan Umum di ULP terkendala ada migrasi LPSE versi dari 4.0 ke 4.3	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak ULP untuk mempercepat pelaksanaan konstruksi dan jasa konsultansi	Konsistensi program dan kegiatan dalam RPJMD, RENSTRA dan RENJA OPD
		2 Tidak dilakukan penyesuaian target padahal ada penyesuaian alokasi anggaran terutama pada program untuk peningkatan		

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
		pemantapan jalan sehingga sulit tercapai kinerjanya.		
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Tersebarnya lokasi RTLH dengan jarak jangkau yg berbeda mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena terbatasnya waktu		1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun kab/kota dalam rangka pencapaian target RPJMD
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	-
9	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Keterbatasan anggaran 2. Kurangnya jumlah SDM 3. Sarpras Belum Memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penanambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penambahan Sarpras pendukung Pembinaan dan Pengawasan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-
11	Dinas Sosial	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan	Terus meningkatkan koordinasi,konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**			

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih Kurangnya anggaran Oprasional	-	Akan diusulkan APBD P Tahun 2019 sesuai anggaran yang tersedia.
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	Perlu penentuan target kinerja yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia
3	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	beberapa kegiatan dengan anggaran yg cukup besar terjadwal dalam anggaran kas triwulan III-IV, sehingga total rata2 capaian kinerja dan anggaran masih sangat rendah ; terdapat kegiatan yang masih dalam proses pembangunan fisik	Mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target serta melakukan koordinasi kepada instansi terkait.	Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan jadwal ROK ; memastikan anggaran yang tercantum dalam DPA konsisten dengan yang sudah direncanakan dalam Renja ; melakukan pencermatan untuk menghindari kesalahan kode rekening dan belanja
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bimtek untuk pelaksanaan BumDes sangat terbatas.	Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan	Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD,Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
			penganggaran,melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia.	DPA,Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD.
6	Dinas Perhubungan	Belum optmalnya data pendukung penyusunan laporan, Adanya Revisi Kegiatan	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait	Meningkatkan kinerja , SDM dan pengumpulan bahan bahan pendukung penyusunan laporan serta disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD, Renstra yang telah ditetapkan.
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Menunggu DPA Perubahan	-	-
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Regulasi Penanaman modal yang dinamis namun tidak diikuti perkembangan SDM dan Sarana Prasarana, dan terbatasnya pemahaman petugas/aparatur terkait perpu yang berlaku dlm pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder	Menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi Promosi, Penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, Peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP
10	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak		Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
		terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar Provinsi dengan kab/kota 2. Jumlah SDM yang belum memadai 3. Prasarana sarana dan dana yang masih kurang	Memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal	untuk mewujudkan tercapaianya indikator kinerja
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak tercapainya harga karena kendaraan dibawah standar harga, dan hasil negeosasi rekonsiliasi gedung kantor	Penyempurnaan perencanaan anggaran kegiatan	Program/Kegiatan hasil Evaluasi realisasi Kinerja Anggaran
C	**URUSAN PILIHAN**			
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-
2	Dinas Pariwisata			
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Adanya Kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	-	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1) Adanya revisi uraian DPA terkait perubahan kebijakan pemerintah pusat yaitu kebijakan diskon biaya pemasangan listrik untuk rumah tangga kategori miskin yang menyebabkan adanya penyesuaian target penerima bantuan sosial pemasangan listrik gratis yang semula berjumlah 750 rumah tangga sasaran (RTS) bertambah menjadi 950 RTS.; (2) Adanya keterlambatan proses lelang yang berada diluar kendali dinas; (3) Adanya beberapa paket pekerjaan yang mengalami tender ulang; (4) adanya perubahan nomeklatur Balai ESDM Wilayah Pulau Sumbawa menjadi Cabang Dinas ESDM Wlayah Pulau Sumbawa; (5) Adanya kebijakan pengelolaan anggaran oleh pemerintah provinsi.	-	-
6	Dinas Perdagangan	Perbedaan harga di tingkat distributor dan pengecer yang tidak berdasarkan HET (Harga Eceran Tertinggi)		Meningkatkan intensitas pengawasan dan sosialisasi regulasi terkait HET

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
7	Dinas Perindustrian	-	-	-
D	**URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG**			
1	Biro Umum			
2	Biro Organisasi			
3	Biro Hukum	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan.	Menata administrasi dan keuangan sesuai rencana	Perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang
4	Biro Pemerintahan	-	-	-
5	Biro Perekonomian			
6	Biro Adm. Pembangunan dan LPBJP	Perpres Pengadaan Barang/Jasa masih belum dipahami sepenuhnya oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa	melakukan pendampingan terhadap PPK yang realisasi kegiatannya masih rendah	meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat	1. Beberapa kegiatan terdapat salah kode akun dan ada yang analisis kebutuhan dana pada pelaksanaan tidak sesui dengan perencanaan awal, sehingga realisasi anggaran ditahan dahulu sampai dilakukan APBD Perubahan 2. Beberapa kegiatan memang direncanakan pelaksanaannya pada trimester ke I, II,III dan IV	1. Percepatan pelaksanan kegiatan sesuai jadwal 2. Percepatan penyerapan anggaran sesuai proses kegiatan 3) percepatan proses APBD Perubahan	Analisis kebutuhan ditingkatkan, sehingga perencanaan lebih efisien dan efektif
8	Biro Kerjasama	-	-	-

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
9	Biro Humas dan Protokol	-	-	-
10	Sekretariat DPRD	Sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD, dan kurang cermatnya pelaksana kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas.	Memperhatikan kembali jadwal penarikan kas, dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan DPRD	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap Anggota DPRD
11	Badan Penghubung Daerah	-	-	-
12	Inspektorat	1. Keterbatasan Anggaran 2. Kurangnya Jumlah SDM pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD 3. Infrastruktur yang belum memadai	1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Mendorong Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM	1. Penambahan Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan 2. Penyusunan Rencana Pengembangan, Peningkatan dan Profesionalisme SDM 3. Penambahan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengawasan
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat koordinasi yang belum optimal	Konsolidasi internal dan peningkatan koordinasi antar stakeholders	Evaluasi kinerja dalam periode bulanan

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	*2*	*8*	*9*	*9*
15	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.Masih adanya pekerjaan fisik yang tidak tepat waktu masa penyelesaianny 2. Minimnya serapan anggaran dari pagu yang ditetapkan.	efektifitas dalam penyusunan anggaran kas, dan berusaha konsisten dengan apa yang direncanakan	Optimal dalam perencanaan, maksaimal dalam pengendalian sehingga angka kesalahan dapat ditekan seminim mungkin
16	Badan Kepegawaian Daerah	Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengikat terkait pelaksanaan kegiatan sehingga perlu dilakukan kajian dan perumusan kegiatan lebih lanjut	Melakukan Reschedule terhadap Program dan Kegiatan sehingga dapat mempercepat pencapaian target kinerja dan realisasi keuangan	Melakukan Kajian Tentang Sekala Prioritas Organisasi sehingga mampu mengoptimalkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Tujuan OPD
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. ASN yang tidak kompeten dan kurang inovasi di bidangnya 2. Tidak sesuainya pelaksanaan anggaran dengan target yang telah disusun dalam RPJMD, RENSTRA sampai pelaksanaan program kegiatan di DPA 3. Adanya peraturan dari pusat terkait dengan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan padahal anggaran tidak ada 4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kinerja,keterlambatan	1. Melakukan evaluasi atau perbaikan terhadap data yang salah dengan melakukan konsultasi dengan dinas pendukung perencanaan dan penganggaran 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah tersedia	1. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan OPD 2. Menyusun anggaran sesuai yang ada di RPJMD,RENSTRA dan DPA 3. Melakukan perbaikan atau menelaah kembali data yang digunakan sebagai dasar penyusunan Renja PD

NO	NAMA OPD	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA	TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA
1	***2***	***8***	***9***	***9***
		dalam penyusunan dokumen pendukung kinerja 5. Tidak adanya kesesuaian permintaan data yang diinginkan dari SKPD pendukung 6. Kurangnya anggaran yang dibutuhkan		
KATEGORI				
E	**EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NTB**			
1	Kota Mataram	TIDAK MELAPORKAN		
2	Kota Bima	TIDAK MELAPORKAN		
3	Kabupaten Lombok Barat	TIDAK MELAPORKAN		
4	Kabupaten Lombok Utara	TIDAK MELAPORKAN		
5	Kabupaten Lombok Tengah	TIDAK MELAPORKAN		
6	Kabupaten Lombok Timur	TIDAK MELAPORKAN		
7	Kabupaten Sumbawa Barat	MELAPORKAN		
8	Kabupaten Sumbawa	TIDAK MELAPORKAN		
9	Kabupaten Dompu	TIDAK MELAPORKAN		
10	Kabupaten Bima	MELAPORKAN		

2.2.2 Evaluasi Capaian RPJMD 2019-2023

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap ke-empat dalam dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025. Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023.

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2018-2023 adalah **"Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang"**. Dalam visi yang diusung terdapat kata kunci "NTB GEMILANG" yang bermakna :

- Satu keyakinan bahwa Provinsi NTB dapat berperan besar di kancah nasional dan internasional.
- Satu komitmen bahwa percepatan dan lompatan pembangunan harus terus diikhtiarkan untuk mewujudkan Provinsi NTB yang tertata rapi sebagai tempat hunian menyenangkan, dengan masyarakat yang berdaya saing, tangguh, dan berbudi luhur serta pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB timbul dari hasil elaborasi permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan dan mempertimbangkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi dengan penjelasan serta capaian kinerja sebagai berikut.

1. Misi 1 : NTB TANGGUH DAN MANTAP

Pada dokumen RPJMD Tahun 2019 – 2023 disebutkan bahwa Misi 1 adalah NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah. Capaian indikator penyelenggaran Misi 1 sampai dengan Semester II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 336 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 1 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019		Interpretasi Capaian	Kondisi Akhir (2023)
					2017	2018	Target	Capaian	Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	
Terwujudnya Ketangguhan	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan	Indeks Risiko Bencana	Skor	177,50	177,50	172,18	129,02		152,43

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2019		Interpretasi Capaian	Kondisi Akhir (2023)
					2017	2018	Target	Capaian	Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	
Menghadapi Resiko Bencana		kerentanan terhadap bencana								
		Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	%	-	-	50	50	>	100
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Skor	-	74,60	75,76	74,92	<	81.17
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	Skor	-	74,76	76,70	78,64	>	84,47

Sumber : *1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, 2019*
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2019
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2019
4. Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2019

2. Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI

Misi kedua dari NTB Gemilang adalah NTB Bersih dan Melayani melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi. Capaian indikator penyelenggaraan Misi 2 sampai Semester II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 337 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 2 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		Interpretasi Capaian Tahunan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian		
Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi				CC	CC	B	NA	>	BB

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		Interpretasi Capaian Tahunan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	>	WTP
			Nilai SAKIP		B	B	B	BB	>	A
			Indeks Profesionalisme ASN		0,00	0,60	0,65	0,54	-	0,75
			Persentase Kerjasama Daerah	%	-	-	100	150	>	100
		Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	32,55	34,76	10,43	11,85		56,25
		Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,46	0,45	0,47	0,5	>	0,57
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	%	100	100	100	95,09	=	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik		97,58	97,68	97,78	NA	=	98,17

Sumber : 1. BPKAD;
2. Inspektorat
3. Biro Organisasi;
4. BKD;
5. BPSDM;
6. Bappenda;
7. Bappeda

3. Misi 3: NTB SEHAT DAN CERDAS

Misi ketiga RPJMD NTB 2019-2023 yaitu "NTB Sehat dan Cerdas" melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya saing Daerah". Modal manusia menjadi sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Jika dahulu pembangunan lebih difokuskan kepada ekonomi, maka kini pembangunan mengarah pada pembangunan manusia dengan

tetap mengacu pada tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia haruslah menyeluruh dan menyentuh setiap lapisan masyarakat, tidak seperti pembangunan ekonomi yang umumnya dinikmati oleh mereka yang memiliki modal besar.

Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia, baik itu aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (daya beli) dan juga aspek moral dan perasaan (iman, taqwa dan kebahagiaan). Hal ini disebabkan karena telah terjadi pergeseran paradigma dari pembangunan yang berorientasi produksi dan distribusi ke arah kebutuhan dasar dan terpusat pada manusia.

Misi ketiga RPJMD NTB 2019-2023 ini bertujuan untuk pembangunan manusia seutuhnya yaitu proses memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat baik pilihan di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan, pekerjaan serta pilihan yang lebih luas lagi yang tertuju pada pemberdayaan masyarakat. Konsep pembangunan manusia sangat sederhana yaitu terwujudnya kesejahteraan manusia. Pembangunan manusia harus ditujukan untuk memperluas pilihan bagi masyarakat melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Peluang untuk dapat hidup layak akan menjadi lebih luas dan terjamin jika kemampuan dasar yang mencakup hidup sehat, berpengetahuan dan berdaya beli tinggi dimiliki oleh masyarakat. Pada akhirnya, sasaran dasar pembangunan adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk hidup layak), Peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan) untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Pembangunan manusia harus dapat diukur capaiannya, sehingga Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pembangunan manusia ini telah menetapkan beberapa indikator kinerja pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebahagiaan dan Persentase Balita *Stunting*. Ketiga indikator tersebut dianggap mampu menggambarkan capaian pembangunan manusia di NTB.

Perhitungan IPM di NTB telah mengacu pada metode baru. IPM metode baru dibangun menggunakan pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yaitu.

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
b. Pengetahuan (*knowledge*);
c. Standar Hidup Layak (*Decent Standar Living*).

Indikator pembangunan manusia yang lain yaitu Indeks Kebahagiaan yang diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu: Kepuasan Hidup, Perasaan dan Makna Hidup. Sedangkan Persentase Balita *Stunting* diukur dengan *Zscore* yang diukur menggunakan berat badan dan tinggi badan dibandingkan

dengan umur yang dapat menggambarkan kasus gizi kronis. Capaian ketiga indikator utama pembangunan manusia diatas sampai dengan semester II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 338 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 3 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		nterpretasi Capaian Tahunan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian		
Terwujudnya Masyarakat NTB Yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				66.58	67.3	68.07	68,14		71.15
	Indeks Kebahagiaan				70.7	-	-	NA*)		73.10
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.51	13.57	13.48	Belum Tercapai	13.79
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6.90	6.93	6.96	7.27	Tercapai	7.07
		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.55	65.75	65.96	66,28		66.77
	Persentase Balita *Stunting*				37.20	33.49	32.49	25,5*)	Tercapai	28.49
		Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita *Stunting*	%	37.20	33.49	32.49	25,5*)	Tercapai	28.49

1. *BPS NTB, 2019;*
2. *Dinas Dikbud Provinsi NTB, 2019;*
3. *Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2019*

*Keterangan: *) Data survei masih pada angka 67%*

4. Misi 4: NTB ASRI DAN LESTARI

"NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan". Capaian indikator penyelenggaran Misi 4 sampai Semester II Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 339 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 4 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD			Tahun 2019		nterpretasi Capaian Tahunan	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018 (versi lama)	2018 (versi baru)	Target	Capaian		
Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				56,99	57.03	75,16	57,53	75,16		59,53
		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		20,25	35,42*	74,63	22,75	74,63		32,75
			Indeks Kualitas Udara		88,02	88,37	87,17	88,45	87,17		89,17
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,27	61,27	66,56	60,03	66,56		60,43
		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Neraca Pengelolaan Sampah (%)	%	50.00	51.00	40.00	60.00	NA	<	100,00
		Mengoptimalkan Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	%	-	-	-	-	NA		50

Sumber : Proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018

5. Misi 5: NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI

Dalam RPJMD Provinsi NTB 2019-2023, Misi Pembangunan yang ke-5 yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Untuk mengukur pencapaian misi ke-5 dapat diketahui dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dan 14 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Adapun capaian indikator kinerja pada misi ke-5 tahun 2019 sebagai ukuran sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 340 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 5 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		Interpretasi Capaian Semesteran	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian	Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam			%	7,10	3,08	4,5 - 5,0	4,76	>	6,5 - 7,0
		Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	11.280	14.000	16.000	10.024	<	88.410,10
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,32	3,72	3,39	3,42	<	3,17
	Pertumbuhan Industri			%		2,68	3,20	-1,38		8,40
		Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	%		2,68	3,20	-1,38		8,40
	Inflasi				3,70	3,16	3,0 - 4,0	1,8	<	3,0 - 4,0
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.877	9.917	9.956	10.640		10.116
	Gini Ratio				0,38	0,37	0,37	0,374	<	0,36
		Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio		0,38	0,37	0,37	0.374	<	0,36
	Angka Kemiskinan			%	15,05	14,63	13,75	13,88	<	9,75
		Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan Kesehatan (%)	%	66,74	70,35	73,00	86,47	>	
			Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	54,50	54,50	100,00	100	>	100,00
		Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	%	70,48	72,56	74,08	74,69	<	81,66
			Proporsi rumah tangga	%	69,25	69,53	72,62	75,02	>	85,00

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		Interpretasi Capaian Semesteran	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian	Melampaui (>), Tidak Tercapai (<), Sama (=)	
			dengan akses sanitasi layak							
			Rasio Elektrifikasi	%	85,10	93,83	94,46	99,55	>	97,00
			Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	89,50	92,01	92,37	92,02	<	93,82
		Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		77,80	78,30	78,80	85.30	>	83,30
		Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan	(Rp. Juta)	1.292.782	308.343	820.307	321.690	<	836.838
		Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka kunjungan wisatawan	orang	3.508.903	2.552.634	4.000.000	3.706.322	<	23.100.000

Sumber: DPM & PTSP Prov. NTB, Dinas Sosial Prov. NTB., Dinas Perindustrian Prov. NTB, Dinas ESDM Prov. NTB, Dinas PUPR Prov. NTB, Dispar Prov. NTB, Disperkim Prov. NTB, dan BPS Provinsi NTB, 2019

6. Misi 6: NTB AMAN DAN BERKAH

Misi ke-6 RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 yaitu "NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan". Capaian indikator penyelenggaran Misi 6 Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 341 Capaian Indikator Kinerja pada Misi 6 Tahun 2019

Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Tahun 2019		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2017	2018	Target	Capaian	
Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani	Indeks Kriminalitas				18,05	17,25	16,45	12,71	13,25
	Indeks Demokrasi				76,04	-	76,37	NA	77,69
		Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat dan Iklim Domokrasi	Indeks Kriminalitas		18,05	17,25	16,45	12,71	13,25
		Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				90,36	90,72	91,08	90,40	92,55
		Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		59,95	60,19	60,43	NA	61,40

Sumber : Badan Pusat Statistik
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan gambaran kondisi umum daerah dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya maka dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi permasalahan pembangunan di NTB sebagai berikut :

1. Wabah Covid-19 menyebabkan Jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis, tingkat pengangguran terbuka meningkat serta pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi;

2. Belum optimalnya kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah;
3. Masih tingginya angka prevalensi gizi buruk, balita stunting, angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
4. Semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat;
5. Belum optimalnya pengembangan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan);
6. Rata-rata lama sekolah masih dibawah angka nasional, dan masih tingginya angka buta huruf;
7. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan;
8. Belum meratanya pembangunan antar wilayah kabupaten kota;

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada tahun 2019, PDRB NTB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp.132,67 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,01 triliun. Nilai PDRB 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2018, masing-masing Rp.123.97 triliun (atas dasar harga berlaku) dan Rp.90,4 triliun (atas dasar harga konstan 2010). Berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,01% jika dibandingkan dengan tahun 2018. Artinya, kinerja perekonomian NTB di tahun 2019 mulai meningkat kembali setelah mengalami kontraksi sebesar 4,46% tahun 2018. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi NTB 2019 terjadi karena kinerja lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebagai penopang utama perekonomian daerah mulai membaik dengan laju pertumbuhan mencapai 0,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menurun hingga 33,71%.

Fluktuasi dari pertumbuhan ekonomi NTB sangat dipengaruhi oleh kinerja lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian terutama sub kategori Pertambangan Bijih Logam. Jika tanpa sub kategori Pertambangan Bijih Logam, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 mencapai 4,76%. Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar 3,21%. Hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi NTB pada kegiatan ekonomi di luar pertambangan bijih logam menunjukkan adanya peningkatan kinerja. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi NTB sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi NTB, Tahun 2011-2019

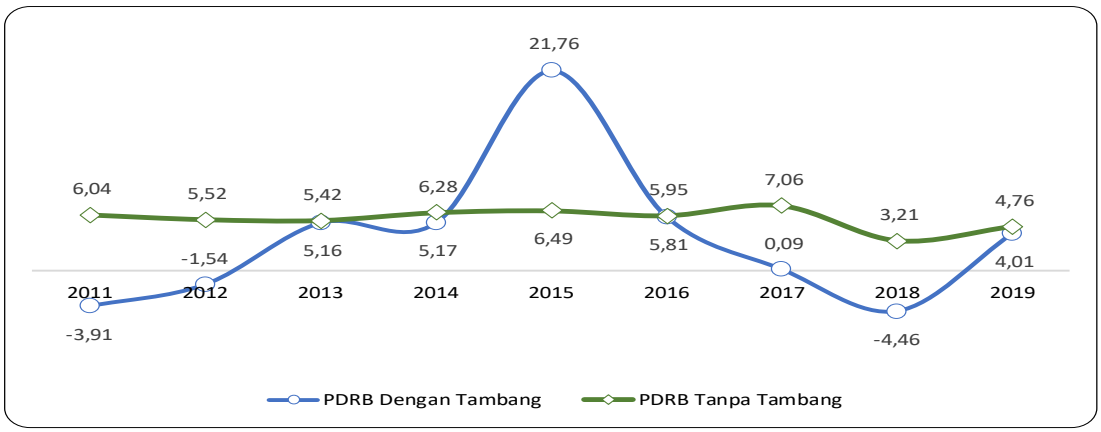

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Peningkatan pertumbuhan ekonomi NTB selama 2019 juga dimungkinkan karena semua lapangan usaha menunjukkan kinerja positif kecuali Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih menunjukkan sedikit kontraksi sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2018 meskipun mulai membaik. Beberapa lapangan usaha dengan laju pertumbuhan tinggi selama tahun 2019 secara berturut-turut adalah: konstruksi (12,19%); pengadaan listrik dan gas (11,01%); jasa Pendidikan (7,04%); Perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor (6,36%); jasa lainnya (5,65%); jasa perusahaan (5,01 %); real estate (4,76%). Untuk mengetahui besarnya perbandingan kegiatan ekonomi pada masing-masing sektor lapangan usaha pada tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 PDRB Provinsi NTB Tahun 2017 - 2019 (Dalam Milyar Rupiah)

No	Sektor Ekonomi	Atas Dasar Harga Berlaku (ADH)			Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	27.183,24	29.067,12	30.368,89	20.843,23	21.248,28	21.569,97
2	Pertambangan dan Penggalian	24.108,62	17.317,57	17.995,65	19.635,14	13.016,91	13.121,22
3	Industri Pengolahan	4.918,19	5.111,38	5.442,72	4.213,75	4.276,28	4.441,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	90,62	97,49	106,27	78,06	79,27	88,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	105,62	101,75	105,46	72,45	69,82	72,32
6	Konstruksi	10.961,23	11.809,06	13.986,70	9.032,56	9.277,10	10.408,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16.387,95	17.955,03	19.795,66	12.111,62	12.771,36	13.583,10
8	Transportasi dan Pergudangan	9.000,93	9.312,57	9.650,36	6.371,85	6.507,49	6.594,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.747,48	2.660,23	2.696,56	1.657,81	1.581,68	1.580,49
10	Informasi dan Komunikasi	2.303,21	2.456,65	2.598,25	2.157,77	2.274,53	2.368,19
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.245,90	4.692,48	4.840,13	3.065,62	3.273,29	3.319,08
12	Real Estate	3.793,67	4.099,76	4.363,71	2.678,34	2.803,02	2.936,50
13	Jasa Perusahaan	211,10	226,62	245,13	157,59	165,59	173,88
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.437,79	7.818,22	8.174,65	4.640,84	4.688,82	4.859,12
15	Jasa Pendidikan	5.680,64	6.122,06	6.700,49	4.062,12	4.274,00	4.574,89
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.186,65	2.450,13	2.685,38	1.827,61	1.975,37	2.096,05
17	Jasa Lainnya	2.459,70	2.667,80	2.918,13	2.001,85	2.108,65	2.227,81
	PDRB dengan Tambang	**123.822,76**	**123.965,94**	**132.674,15**	**94.608,21**	**90.391,46**	**94.014,74**
	PDRB tanpa Tambang	**99.713,92**	**106.648,35**	**114.678,49**	**74.973,13**	**77.374,55**	**80.893,52**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Pada tahun 2019, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori konstruksi yang tumbuh sebesar 12,19%. Selanjutnya, kategori pengadaan listrik dan gas tumbuh sebesar 11,01% dan kategori jasa Pendidikan tumbuh sebesar 7,04%. Selain itu, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 6,36% dan kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 6,11%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemulihan ekonomi setelah gempa tahun 2018. Berikut grafik perbandingan kinerja lapangan usaha sebagai sumber pertumbuhan ekonomi NTB selama periode tahun 2016-2019 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Kinerja Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2016-2019

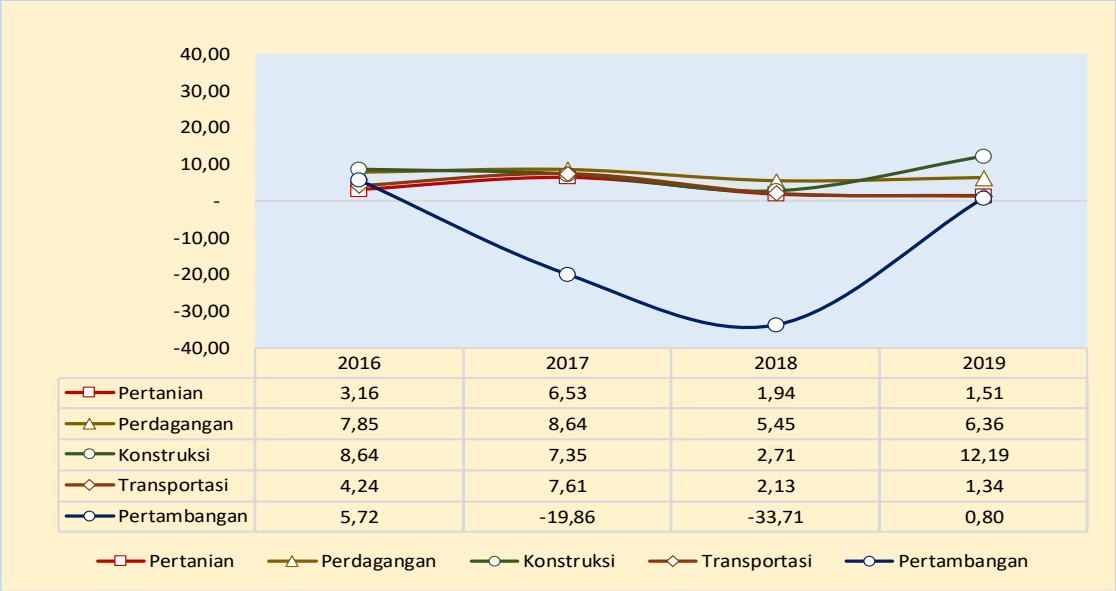

	2016	2017	2018	2019
Pertanian	3,16	6,53	1,94	1,51
Perdagangan	7,85	8,64	5,45	6,36
Konstruksi	8,64	7,35	2,71	12,19
Transportasi	4,24	7,61	2,13	1,34
Pertambangan	5,72	-19,86	-33,71	0,80

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Dari grafik di atas terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha mengalami peningkatan laju pertumbuhan di tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, masing-masing: perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sementara, laju pertumbuhan 2 (dua) sektor lainnya yakni pertanian dan transportasi menurun. Jika dilihat dari strukturnya, perekonomian NTB selama tahun 2019 masih didominasi oleh sektor primer. Kontribusi tertinggi terhadap pembentukan PDRB NTB (atas dasar harga konstan 2010) secara berturut-turut adalah: Pertanian, Kehutanan, Perikanan (22,94%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,45%); Pertambangan dan Galian (13,96%); Konstruksi (11,07%). Adapun gambaran dari kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB NTB tahun 2019 sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 3. 3 Struktur Perekonomian Provinsi NTB Berdasarkan Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap Pembentukan PDRB Tahun 2019

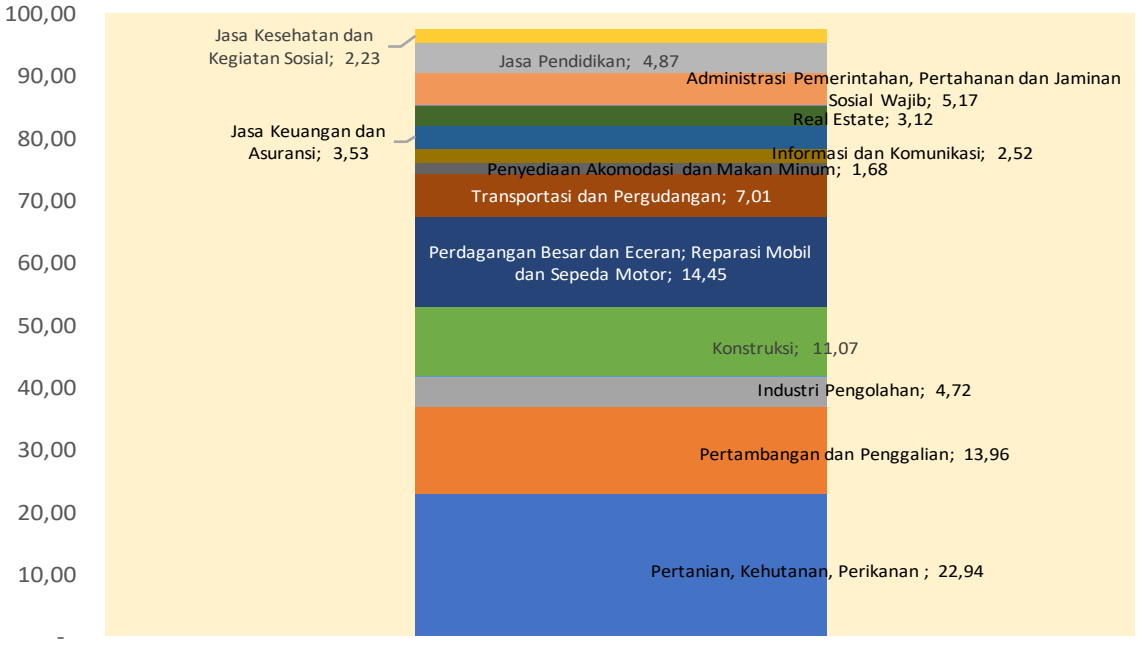

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2019 sebesar 4,01% dipengaruhi oleh meningkatnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,19%, peningkatan pada komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,87% dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 3,09%. Pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,89%. Sedangkan, komponen ekspor luar negeri pada tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 40,41% dibandingkan dengan tahun 2018. Grafik berikut menunjukkan pertumbuhan ekonomi NTB menurut pengeluaran pada tahun 2019.

Gambar 3. 4 Pertumbuhan PDRB NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2019

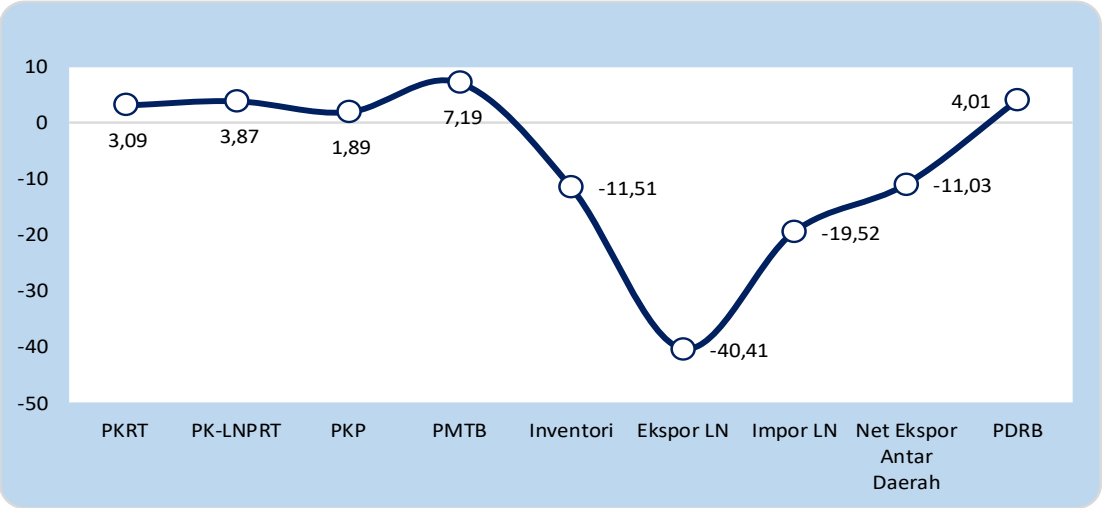

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Menurut pengeluaran PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, struktur ekonomi NTB didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (63,05%), diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (39,22%) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (15,32%). Bila dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2019, komponen PMTB menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,39 poin, diikuti komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) yang menyumbang pertumbuhan sebesar 1,93 poin. Sementara, komponen ekspor luar negeri menyumbang kontraksi tertinggi sebesar 2,91 poin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01%. Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB menurut pengeluaran berdasarkan komponen pembentuknya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 2 PDRB Provinsi NTB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2019

Komponen	ADH Berlaku (Miliar Rp)			ADH Konstan (Miliar Rp)		
	2017	2018*	2019**	2017	2018*	2019**
Konsumsi Rumah Tangga	74.854,23	79.034,02	83.656,39	55.313,39	56.523,35	58.269,57
Konsumsi LNPRT	1.810,76	2.067,61	2.201,69	1.319,66	1.457,37	1.513,76
Konsumsi Pemerintah	19.218,41	19.768,79	20.329,97	12.051,87	12.176,37	12.406,01
PMTB	43.826,44	47.243,91	52.029,61	28.526,82	30.007,15	32.163,88
Perubahan Inventori	993,75	881,91	801,99	384,01	332,28	294,02

Komponen	ADH Berlaku (Miliar Rp)			ADH Konstan (Miliar Rp)		
	2017	2018*	2019**	2017	2018*	2019**
Ekspor Luar Negeri	17.534,34	10.017,15	5.980,84	13.239,10	6.518,75	3.884,71
Impor Luar Negeri	3.903,93	5.097,31	4.305,76	2.573,73	3.223,14	2.594,12
Net Ekspor Antar Daerah	-30.511,25	-29.950,15	-28.020,58	-13.652,91	-13.400,66	-11.923,09
PDRB	**123.822,76**	**123.965,94**	**132.674,15**	**94.608,21**	**90.391,46**	**94.014,74**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

**Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

3.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli.

Inflasi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi–rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus–menerus dan saling mempengaruhi.

Inflasi merupakan salah satu variabel kinerja ekonomi sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Salah satu implikasinya adalah dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang pada akhirnya makin memperberat upaya peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah terus menerus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dapat mengendalikan inflasi. Grafik berikut menyajikan inflasi tahunan di Provinsi NTB periode tahun 2016-2019.

Gambar 3. 5 Inflasi Tahun 2016-2019

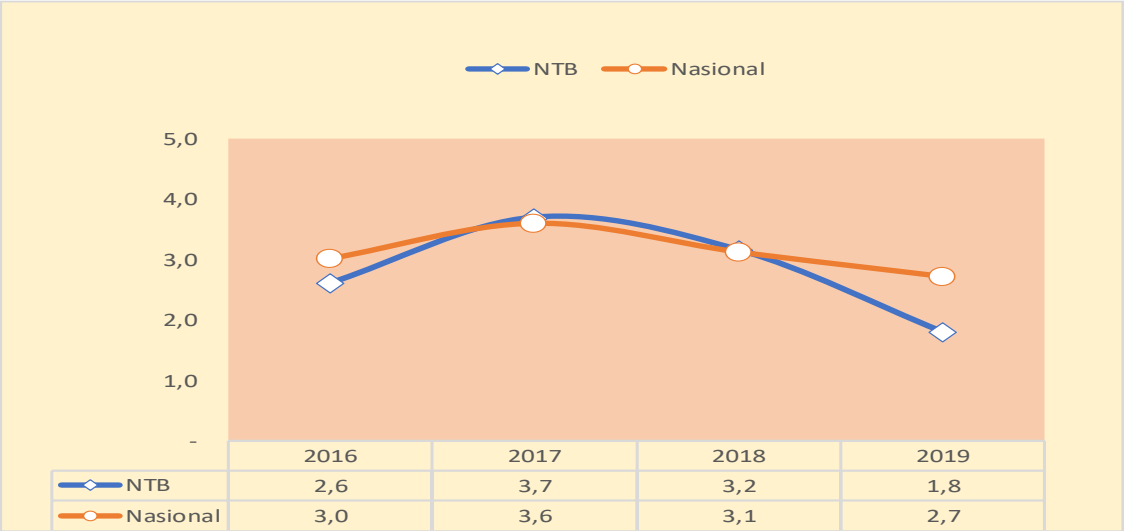

Sumber: BPS Provinsi NTB 2019, dan Bank Indonesia (2020)

Dari grafik di atas terlihat bahwa inflasi tahun 2019 lebih rendah 1,4 poin dibandingkan dengan tahun 2018 dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 2,7%. Berdasarkan Laporan Bank Indonesia (2019), inflasi di NTB dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas bahan makanan, terutama pada sub komoditas sayur-sayuran dan ikan segar. Selain bahan makanan, tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh harga pada kelompok komoditas kesehatan, terutama pada komoditas obat dengan resep dokter serta kelompok komoditas sandang, terutama pada komoditas emas perhiasan sejalan dengan menguatnya harga emas global. Pasca gempa, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bersama Satgas Pangan NTB secara intensif memantau dan pengendalian harga, terutama komoditas bahan makanan dan bahan bangunan. Upaya-upaya yang telah dilakukan TPID Provinsi NTB untuk memperkuat pengendalian harga pasca bencana gempa bumi, antara lain sebagai berikut.

a) Aspek Ketersediaan Pasokan:
   - Melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian inflasi oleh TPID di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok untuk tahun 2019;
   - Menjaga ketahanan pasokan beras oleh Bulog Divre NTB yakni dengan total stok sebanyak 79.089 ton dan tingkat ketahanan mencukupi untuk 19,03 bulan ke depan;
   - Perluasan pemasaran Bulog Divre melalui memanfaatkan jaringan 119 unit Rumah Pangan Kita (RPK) yang telah beroperasi di Kota Mataram dan Toko Tani Indonesia Centre (TTIC) Dinas Ketahanan Pangan.

b) Kelancaran Distribusi
   - Meningkatkan waktu operasional bongkar muat di Pelabuhan Lembar menjadi 24 jam;
   - Meningkatkan prioritas bongkar muat untuk komoditas semen di pelabuhan Lembar;
   - Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha baik produsen, distributor, retail modern, asosiasi, Bulog, dan
   - Perusahaan Perdagangan Indonesia guna memangkas rantai distribusi.

c) Keterjangkauan Harga
   - Menggelar pasar murah di sejumlah titik di wilayah NTB sebagai langkah mengantisipasi lonjakan harga dalam rangka menyambut HBKN;
   - Sebagai upaya untuk menekan lonjakan harga, menggelar pasar murah untuk komoditas semen di sejumlah titik di Pulau Lombok;
   - Penjualan komoditas sembako bekerjasama dengan Rumah Pangan Kita, Toko Tani Indonesia Centre, dan Retail Modern.

d) Komunikasi
   - Melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada publik untuk mencegah terjadinya panic buying dari masyarakat melalui talkshow;
   - Pengendalian ekspektasi inflasi masyarakat bekerjasama dengan pemuka agama dan organisasi wanita se-Provinsi NTB.

3.1.3 Ketenagakerjaan

Salah satu cara untuk meningatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara memperluas kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena semakin besar kesempatan kerja maka diharapkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat ketimpangan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hal tersebut.

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang telah tersedia sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin besar kesempatan kerja diharapkan aktivitas ekonomi makin meningkat dan pada akhirnya dapat mengurangi angka kemiskinan maupun tingkat ketimpangan. Selama tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan perhatian cukup besar terhadap hal tersebut. Paparan data ketenagakerjaan berikut khususnya tahun 2018 tidak termasuk

Kabupaten Lombok Utara (KLU) karena pada bulan Agustus 2018 BPS NTB tidak dapat melakukan survey ketenagakerjaan sehubungan dengan kejadian gempa bumi.

Data BPS (2019) mencatat bahwa jumlah Angkatan Kerja NTB pada bulan Agustus 2019 sebanyak 2.471.552 orang, meningkat sebanyak 234.171 orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.387.036 orang, bertambah 232.915 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran kondisi Agustus 2019 sebanyak 84.516 orang, mengalami kenaikan sebanyak 1.256 orang dibanding Agustus 2018.

TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 68,65%, naik sebesar 2,74 persen poin dibanding setahun yang lalu. Peningkatan TPAK selama setahun terakhir ini disebabkan karena meningkatnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja, disisi lain terjadi pengurangan jumlah bukan angkatan kerja yaitu pada penduduk dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 82,09% sementara TPAK perempuan hanya 56,46%. Jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 3,26% poin dan TPAK perempuan meningkat sebesar 2,21% poin.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja tampaknya cukup berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari 3,72% pada Agustus 2018 menjadi 3,42% pada Agustus 2019. Berbagai terobosan pemerintah daerah seperti penciptaan lapangan pekerjaan dan pelatihan kerja yang mendukung sektor pariwisata dan industri kreatif harus terus dilanjutkan. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding perdesaan. TPT di perkotaan dan perdesaan menunjukkan trend yang menurun. Pada Agustus 2019, TPT di perkotaan sebesar 4,05% sedangkan TPT di perdesaan 2,84%. Dibandingkan setahun yang lalu, terjadi penurunan tingkat pengangguran di perkotaan dan perdesaan masing-masing sebesar 0,20% poin dan 0,40% poin. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah angkatan kerja dan pengangguran di Provinsi NTB berdasarkan jenis kelamin tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Angkatan Kerja dan Pengangguran Tahun 2017 – 2019

NO	URAIAN	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja	2.396.169	2.237.381	2.471.552
	Laki-Laki	1.342.716	1.363.798	1.405.339
	(%)	(54,49)	(56,92)	(56,86)
	Perempuan	1.121.615	1.032.371	1.066.213
	(%)	(45,51)	(43,08)	(43,14)
	r (%)	**-2,77**	**-6,63**	**10,47**
2	Pengangguran	79.449	83.260	84.516
	Laki-Laki	51.471	51.199	47.866
	(%)	(64,78)	(61,50)	(56,64)
	Perempuan	27.978	32.058	36.650
	(%)	(35,22)	(38,50)	(43,36)
	r (%)	**-18,11**	**4,80**	**1,51**
	TPT (%)	**3,32**	**3,72**	**3,42**
	Target TPT (%)	**4,82**	**4,55**	**3,39**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2019, penduduk NTB paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 727,41 ribu orang (30,47%), disusul oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil sebanyak 476,99 ribu orang (19,98%) dan Industri Pengolahan 316,65 ribu orang (13,27%).

Berdasarkan tren menurut kategori/lapangan usaha, BPS (2019) melaporkan hampir tidak ada lapangan pekerjaan yang konsisten naik atau turun kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi penyerapan tenaga kerja bergerak secara fluktuatif. Dalam kurun waktu 2018 – 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja adalah lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (naik 3,62% poin), konstruksi (naik 1,61% poin), industri pengolahan (naik 0,89% poin), jasa pendidikan (naik 0,51% poin),jasa kesehatan dan kegiatan sosial (naik 0,32% poin), transportasi dan pergudangan (naik 0,31% poin), jasa keuangan dan asuransi (naik 0,11% poin), informasi dan komunikasi (naik 0,09% poin dan penyediaan akomodasi makan dan minum (naik 0,02% poin), dan jasa perusahaan (naik 0,04% poin). Sedangkan lapangan usaha yang mengalami penurunan adalah

lapangan real estate, jasa perusahaan dan jasa lainnya (turun 3,72% poin), usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (turun 3,01% poin), perdagangan besar dan eceran (turun 0,35% poin), pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (turun 0,28% poin), pengadaan listrik dan gas (turun 0,09% poin), dan pertambangan dan penggalian (0,07% poin).

Gambar 3. 6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2018*-2019

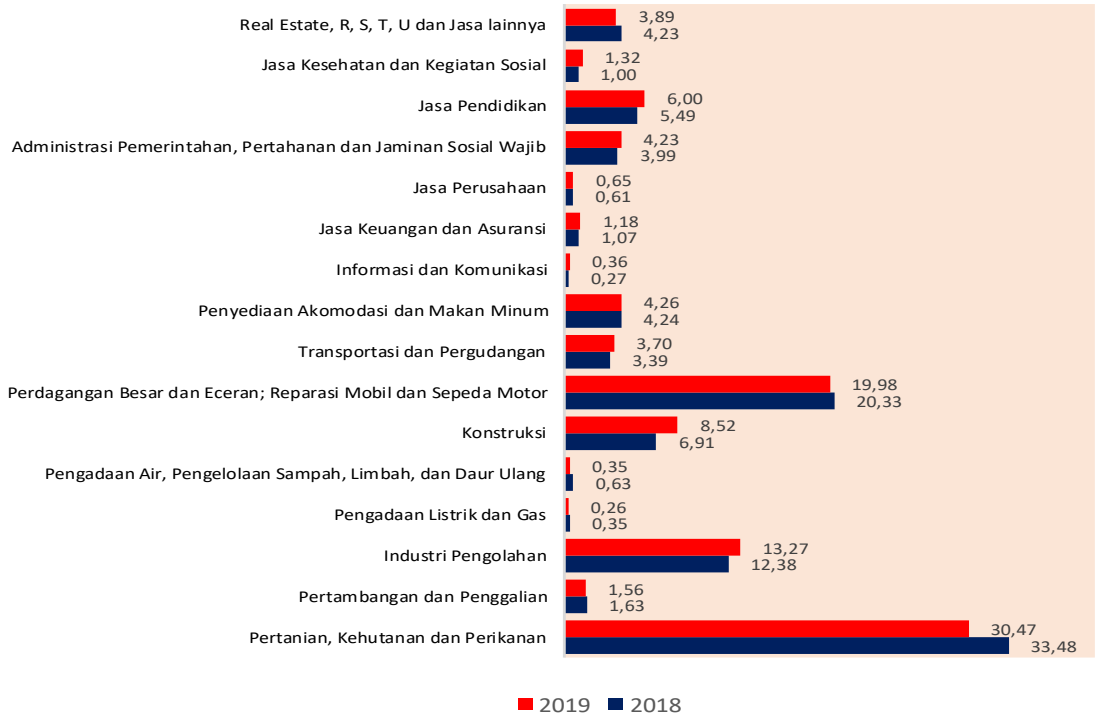

*Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020 *) Tidak termasuk Data Kabupaten Lombok Utara*

3.1.4 Kemiskinan

Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berbagi kebijakan telah diambil terutama kebijakan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan baik yang bersifat moneter maupun non moneter.

Perwujudan Visi "NTB Gemilang" melalui aktivitas pembangunan di segala bidang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk merealisasikan visi tersebut baik bersifat moneter maupun non moneter. Salah satu ukuran

keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun.

Data BPS NTB (2019) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin NTB pada bulan September 2019 sebesar 705.680 orang atau berkurang 29.940 orang dari periode September 2018. Persentase penduduk miskin September 2019 mencapai 13,88% atau mengalami penurunan sekitar 0,75 poin dari 14,63% pada periode September 2018 atau menurun 0,68 poin dari angka kemiskinan periode Maret 2019 sekitar 14,56%. Jika dilihat berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 15,74% dan turun menjadi 14,85% pada September 2019. Sejalan dengan hal tersebut, persentase penduduk miskin daerah perdesaan juga turun dari 13,45% pada Maret 2019 menjadi 12,97% pada September 2019. Jika merujuk grafik di bawah tampak perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Provinsi NTB selama sepuluh tahun terakhir terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi.

Berdasarkan indikator moneter terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada tahun 2018 menurun dibandingkan dengan tahun 2017. hal ini terlihat dari PDRB perkapita Provinsi NTB, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.25.010.000 dan tahun 2018 menjadi Rp.24.706.368. Tetapi bila dilihat dari jumlah penduduk miskin diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 735,620 orang atau 14,63% namun penurunan ini belum mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Bila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan lebih banyak yaitu 375.120 orang atau 15,66% dibandingkan dengan perdesaan yaitu 360.500 orang atau 13,69%. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pada tingkat kedalaman kemiskinan diketahui bahwa pada periode Maret - September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241 pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan. Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi

0,589 pada September 2018. Dengan menurunnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Berdasarkan pada paparan diatas terindikasi bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pemangku kepentingan telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun demikian jumlah penduduk miskin belum mencapai target RPJMD. Grafik berikut menyajikan perkembangan penduduk miskin dari tahun 2016 - 2018.

Gambar 3. 7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTB Tahun 2009 – 2019

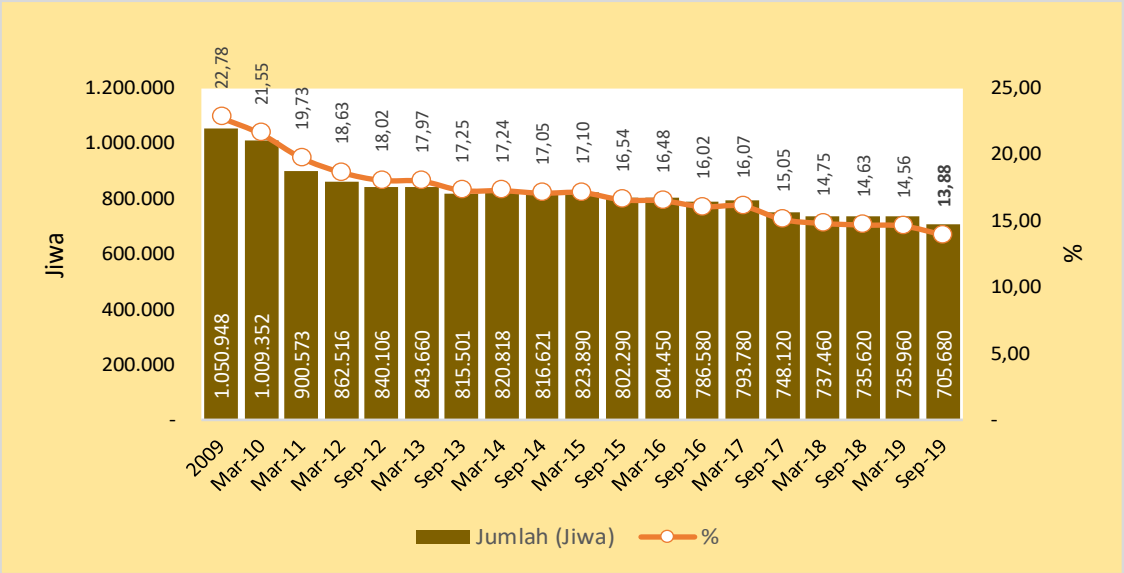

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,327 pada Maret 2019 menjadi 2,119 pada September 2019. Penurunan nilai indeks ini berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati Garis Kemiskinan. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,478 pada Maret 2019 menjadi 0,519 pada September 2019. Hal ini berarti ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Di daerah perkotaan, P1 2,500 pada Maret 2019 turun menjadi 2,169 pada September 2019. Di daerah perdesaan, P1 mengalami penurunan dari 2,166 pada Maret 2019 menjadi 2,073 pada September 2019. Untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan, P2 Maret 2019 sebesar 0,451 meningkat menjadi 0,533 pada September 2019. Sedangkan di daerah perdesaan, P2 juga mengalami kenaikan dari 0,504 pada Maret 2019 menjadi 0,505 pada September 2019.

3.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam setiap periode pemerintahan selama lima tahun, pembangunan manusia menjadi prioritas pemerintah dengan indikator pencapaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM dijadikan sebagai salah satu target bagi perwujudan Visi "NTB Gemilang" kaitannya dengan pembangunan manusia melalui program unggulan di sejumlah sektor terkait.

Capaian IPM Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir cukup menggembirakan dan terus mengalami kemajuan. IPM Provinsi NTB meningkat dari 61,16 pada tahun 2010 menjadi 68,14 pada tahun 2019. Dengan capaian IPM tahun 2019 ini telah membawa NTB berada di posisi 29 dari 34 Provinsi di Indonesia. Selama periode 2010-2019, IPM Provinsi NTB telah bertambah 6,98 poin dengan status capaian "IPM sedang". Laju pertumbuhan IPM NTB di tahun 2019 mencapai 1,25%. Laju pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 1,08%. Laju pertumbuhan IPM NTB sejak tahun 2010 hampir selalu bernilai lebih dari 1%. Jika kecepatan pertumbuhan IPM dapat dipertahankan maka setidaknya tiga tahun yang akan datang IPM Provinsi NTB akan mencapai level tinggi.

Gambar 3. 8 Perbandingan IPM NTB dan Rata-Rata IPM Nasional Tahun 2010– 2019

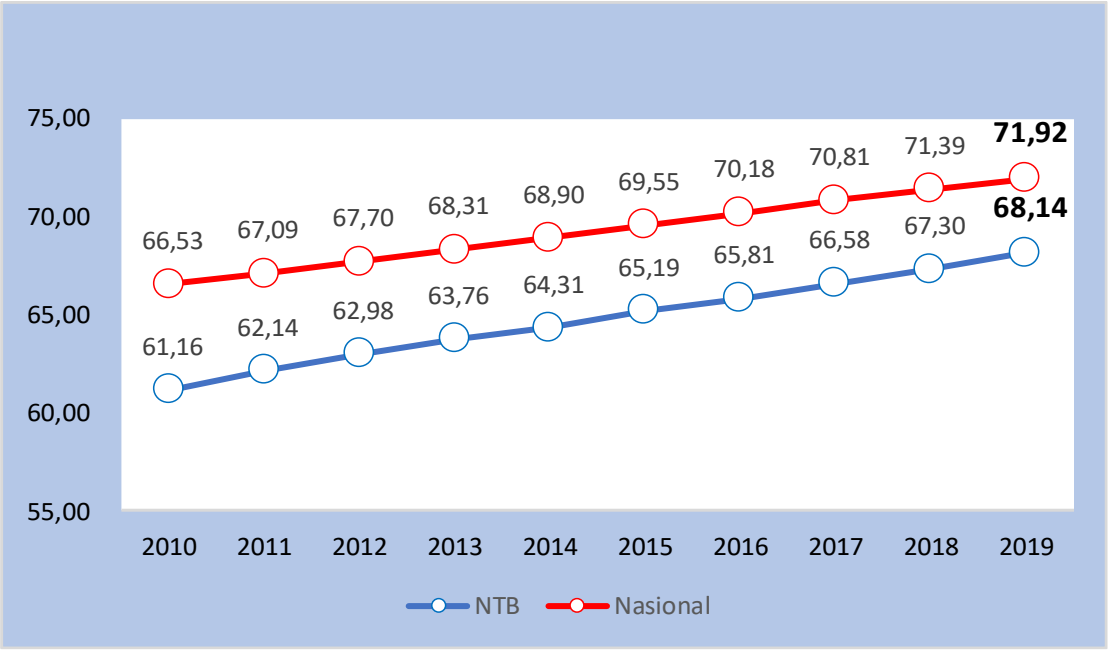

Sumber: BPS NTB, 2020

Meski laju pertumbuhan IPM NTB selalu berada di atas laju pertumbuhan IPM Nasional, namun level capaian IPM Provinsi NTB masih berada di bawah level Nasional. Selisih IPM Provinsi NTB dengan Nasional pada tahun 2010 masih cukup lebar yaitu sebesar 5,37 poin. Seiring dengan berjalannya waktu, selisih ini semakin menipis menjadi 3,84 poin pada tahun 2019. Artinya, NTB semakin berbenah dan berusaha mengejar ketertinggalan pembangunan manusia agar paling tidak bisa sejajar dengan Nasional. Ke depan, upaya yang lebih keras diperlukan agar jarak ketertinggalan dengan rata-rata IPM nasional semakin menipis. Adapun perkembangan komponen IPM Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Tabel 3. 4 Perkembangan Komponen IPM Tahun 2010 – 2019

Komponen	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	63,82	64,13	64,43	64,74	64,90	65,38	65,48	65,55	65,87	66,28
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,66	11,97	12,21	12,46	12,73	13,04	13,16	13,46	13,47	13,48
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	5,73	6,07	6,33	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90	7,03	7,27
Pengeluaran Per Kapita	Rp 000/ Tahun	8.707	8.759	8.853	8.950	8.987	9.241	9.575	9.877	10.284	10.640
IPM		61,16	62,14	62,98	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14
Pertumbuhan IPM	%	-	1,60	1,34	1,23	0,88	1,36	0,95	1,17	1,08	1,25

Sumber: BPS NTB, 2020

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Proyeksi Keuangan daerah dan kerangka pendanaan

Prediksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2019-2021

No	Uraian	APBD Tahun 2019 (N-2)	APBD Tahun 2020 (N-1)	Proyeksi Tahun 2021 (N)
1	**PENDAPATAN**	**5.403.971.042.675,00**	**5.671.543.327.848,99**	**6.125.059.038.695,90**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**1.708.660.958.875,00**	**1.844.846.716.576,00**	**2.271.208.210.471,00**
1.1.1	Pajak Daerah	1.353.790.000.000,00	1.494.660.000.000,00	1.862.134.452.971,00
1.1.2	Retribusi Daerah	26.331.739.350,00	19.639.217.407,00	47.219.957.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	54.589.651.726,00	54.379.651.726,00	88.458.400.000,00
1.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	273.949.567.799,00	276.167.847.443,00	273.395.400.000,00
1.2	**Dana Perimbangan**	**3.604.324.958.800,00**	**3.769.547.011.272,99**	**3.796.748.828.224,90**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	366.759.335.800,00	271.134.416.800,00	320.982.310.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.583.746.053.000,00	1.599.58.513.530,00	1.647.571.018.935,90
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	1.653.819.570.000,00	1.898.829.080.942,99	1.828.195.499.289,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**90.985.125.000,00**	**57.149.600.000,00**	**57.102.000.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	50.000.000.000,00	20.439.700.000,00	20.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	36.346.428.000,00	36.709.900.000,00	37.102.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	4.638.697.000,00	0,00	0,00
2	**BELANJA**	**5.499.754.766.128,49**	**5.716.743.327.848,99**	**6.406.683.967.340,65**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**3.219.248.730.182,43**	**3.178.085.430.340,86**	**3.291.031.254.453,43**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.478.558.338.556,43	1.462.884.468.000,00	1.555.226.713.366,43
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	1.438.000.800,00	3.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	926.662.601.000,00	978.565.600.822,00	920.686.339.487,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20.526.640.000,00	17.203.340.000,00	23.080.871.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	770.305.263.571,00	698.494.000.000,00	750.037.330.600,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	19.195.486.600,00	12.000.000.000,00	24.000.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.400.455,00	7.500.020.718,86	15.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**2.280.506.035.946,06**	**2.538.657.897.508,13**	**3.115.652.712.887,22**
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	Penerimaan Pembiayaan	95.783.723.453,49	55.300.000.000,00	20.000.000.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	10.100.000.000,00	30.000.000.000,00

3.2.2 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horisontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan:
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui,

a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan;
b. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalian dan pengembangan sumber penerimaan daerah, serta penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah.
Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya dalam intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, adalah sebagai berikut:
   a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinu.
   b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja.
   c. Melaksanakan Operasi Gabungan (OPGAB) untuk menjaring kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
   d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota.
   e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi e-Samsat, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Samsat Nonstop Service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui aplikasi Agent Samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan kepolisian.
g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui call center 1500-186.
h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah.
i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah.
k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing masing SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan SKPD pengelola Pendapatan Daerah setiap triwulan.
n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah.

2. Upaya Meningkatkan Pendapatan Dana Perimbangan, adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, dengan terus memperhatikan penegasan variable/komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK.
   b. Meningkatkan penggalian sumber pendapatan potensial seperti Cukai Tembakau.
   c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK.
3. Upaya meningkatkan penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di wilayah NTB.
   b. Meningkatkan kinerja pemerintahan agar dapat memenuhi kriteria penilaian pemberian Dana Insentif Daerah.

c. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait pemberian hibah dari pemerintah, swasta ataupun perorangan.

3.2.3 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Oleh karena itu kebijakan umum Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efesien;
2. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial pada komponen belanja tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
3. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
4. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanganan dampak pandemi COVID-19, baik penanganan di bidang kesehatan maupun untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

7. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya.
8. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau. Pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, maupun penyediaan infrastruktur strategis.
9. Pemenuhan Pelaksanaan SPM.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan Provinsi NTB menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Penganggaran SILPA untuk tahun 2020 mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan pembangunan diarahkan pada upaya membangun investasi di daerah khususnya pengeluaran pembiayaan. Aspek investasi tersebut digunakan untuk membiayai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam peningkatan usaha, serta berorientasi pada profit. Lebih lanjut BUMD yang didukung oleh pemerintah tentunya harus memberikan nilai manfaat kepada masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

3.2.5 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur antara lain SPAM Regional, Percepatan Jalan Tahap Ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi akan memperkuat integrasi sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota, Pinjaman Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi.

b. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntasan program dan kegiatan yag telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

c. Pinjaman Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, pinjaman daerah dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan. Konsep dasar pinjaman daerah dalam PP 54/2005 dan PP 30/2011 pada prinsipnya diturunkan dari UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai resiko seperti resiko kesinambungan fiskal, resiko tingkat bunga, resiko pembiayaan kembali, resiko kurs, dan resiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dari pinjaman daerah di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Daerah.
2. Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.

5. Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain.
6. Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan Pemerintah Daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
7. Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.
8. Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan Obilgasi Daerah.
9. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah, diantaranya bersumber dari:

1. Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
2. Pemerintah Daerah lain;
3. Lembaga Keuangan Bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Masyarakat, berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pemerintah Daerah dapat menggunakan hasil dari Pinjaman Daerah sebagaimana jenis pinjamannya, yaitu:

1. Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2. Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
3. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang (i) menghasilkan penerimaan langsung, (ii) menghasilkan penerimaan tidak langsung, (iii) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
4. Khusus pinjaman jangka panjang dalam bentuk obligasi daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau

sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.

d. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para fihak.

Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karateristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

a. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
b. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
c. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
d. Memiliki peran strategik terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
e. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
b. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
c. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi *(full cost recovery)* atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14)

infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.
2. Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2023.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2021.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Prioritas pembangunan daerah yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan RPJMD tahun 2019-2023 adalah "**Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang**", Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang gemilang, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

1. Misi 1 “NTB TANGGUH DAN MANTAP” melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah
2. Misi 2 “NTB BERSIH DAN MELAYANI” melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. Misi 3 “NTB SEHAT DAN CERDAS” melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. Misi 4 “NTB ASRI DAN LESTARI” melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. Misi 5 “NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI” melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
6. Misi 6 “NTB ADIL DAN BERKAH” melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tahun 2019-2023, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTB pada setiap misi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2021
1	Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Terwujudnya Ketangguhan Menghadapi Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas dan pengurangan kerentanan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	162,00
				Pulihnya Infrastruktur yang rusak akibat bencana gempa bumi	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi (%)	- (Selesai pada tahun 2020)
		Terwujudnya pembangunan Infrastruktur untuk Pengembangan Sektor Unggulan	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	78,56
				Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks konektivitas transportasi publik	80,58
2	Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi			B
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Opini BPK	WTP
					Nilai SAKIP	BB
					Indeks Profesionalisme ASN	0,7
					Persentase Kerjasama Daerah	100
				Melakukan Penataan Sistem Manajemen SDM	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	11,42

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2021
				Penguatan Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,52
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	97,97
3	Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Terwujudnya Masyarakar NTB yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			69,61
			Indeks Kebahagiaan			-
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,68
					Rata rata Lama Sekolah (Tahun)	7,01
				Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,36
			Persentase Balita Stunting	Meningkatnya kualitas asupan gizi masyarakat	Persentase Balita Stunting (%)	30,49
4	Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber	Meningkatnya Fungsi Ekologi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			57,29
					Indeks Kualitas Air	27,75
					Indeks Kualitas Udara	89,01

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2021
	daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan			Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,23
					Neraca pengelolaan sampah (%)	90
				Meningkatnya Pengelolaan Geopark	Persentase Geosite yang tertata	25
5	Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas				5,0 - 5,5
			Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	Meningkatnya Investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta kemudahan perizinan	Nilai Realisasi Investasi (Rp. Milyar)	17.640
				Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,21
			Pertumbuhan Industri	Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan	Pertumbuhan Industri	5,26
			Inflasi			3,0 - 4,0
				Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp.000)	10.036
			Gini Ratio	Menurunnya Tingkat Kesenjangan ekonomi Masyarakat	Gini Ratio	0,365
			Angka Kemiskinan			11,75
					Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	77

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2021
				Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	100
				Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	Cakupan Air Minum	77,55
					Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	78,81
					Rasio Elektrifikasi	95,72
					Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	93,1
				Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80,60
				Meningkatnya produksi Sektor Primer	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	829.328,38
				Meningkatnya Pengembangan Community Based Tourism dan Friendly Moslem Tourism	Angka Kunjungan Wisatawan	4.650.000

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan (IKU)	Sasaran	Indikator Sasaran (IKK)	Target Tahun 2021
6	Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat NTB yang Madani	Indeks Kriminalitas			14,85
			Indeks Demokrasi			77,03
				Menanamkan Nilai Sosial Budaya, Toleransi Masyarakat, dan Iklim Demorasi	Indeks Kriminalitas	14,85
				Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	100,00
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)			91,81
				Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)`	60,91

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2019-2023

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2021 merupakan irisan dari tahapan Lima Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan periode ketiga dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dokumen RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 sendiri memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pembangunan NTB yaitu "Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang".

Dalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Provinsi NTB 2019-2023 dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang meliputi:

1. Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, dengan strategi :
    a. Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19
    b. Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin
    c. Penanganan dampak ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.
2. Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :
    a. Pengembangan Sektor Pariwisata.
    b. Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.
    c. Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.
    d. Mengembangkan Kawasan Strategis Mandalika, Samota, Kawasan Industri SMELTER dan Industri turunannya di Maluk. La-SAKOSA serta Global Hub Bandar Kayangan).
    e. Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.

3. Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :
    a. Mengendalikan inflasi.
4. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan strategi :
    a. Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kab/Kota.
    b. Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
    c. Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.
    d. Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.
    e. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

4.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2021

4.3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai

landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional maka startegi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan**, dengan strategi:
    a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT).
    b. Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan eknomi.

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
d. Peningkatan penglolaan kemaritiman dan kelautan.
e. Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dan koperasi.
f. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.
g. Peningktan ekspor berniai tambah dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2. **Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin Pemerataan**, dengan strategi:
   a. Pengembangan wilayah pulau sumatera.
   b. Pembangunan wilayah pulau jawa-bali.
   c. Pembangunan wilayah kepualuan nusa tenggara
   d. Pembangunan wilayah pulau kalimantan
   e. Pembangunan wilayah pulau sulawesi
   f. Pembangunan wilayah pulau maluku
   g. Pembangunan wilayah pulau papua.

   Untuk mendukung strategi tersebut maka kegiatan prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
   a. Pengembangan kawasan strategis
   b. Pengembangan sektor unggulan
   c. Pengembangan kawasan perkotaan
   d. Pemenuhan pelayanan dasar
   e. Pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pedesaan dan transmigrasi.
   f. Kelembagaan dan keuangan daerah.
3. **Prioritas Nasional 3: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing**, dengan strategi:
   a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan.

b. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
c. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
d. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
e. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
f. Mengentaskan kemiskinan
g. Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

4. **Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**, dengan strategi:
   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
   c. Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
   d. Memperkuat moderasi beragama.
5. **Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,** dengan strategi:
   a. Infrastruktur pelayanan dasar.
   b. Infrastruktur ekonomi
   c. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan
   d. Energi dan ketenagalistrikan.
   e. Transformasi digital.
6. **Prioritas Nasional 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,** dengan strategi:
   a. Peningkatan kulaitas lingkungan hidup.
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.
   c. Pembangunan rendah karbon.
7. **Prioritas Nasional 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan transpormasi Pelayanan Publik,** dengan strategi:
   a. Konsolidasi demokrasi
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri.
   c. Penegakan hukum nasional.
   d. Reformasi birokrasi dan tata kelola

e. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

4.3.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2021

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mengambil tema **"Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**.

Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

1. **Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Mitigasi bencana.
   b. Infrastruktur dasar.
   c. Infrastruktur kawasan.
   d. Konektivitas wilayah.
   e. Teknologi informasi dan komunikasi

   Sedangkan program unggulannya antara lain: Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana, Si-AGA, Rumah Layak Huni, Air Bersih untuk Semua, SPAM regional, Jamban Keluarga, percepatan jalan mantap, irigasi cukup, NTB terkoneksi, dan Nusa Terang Benderang.
2. **Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik ,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Keandalan Perencanaan
   b. Optimalisasi Pendapatan daerah
   c. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
   d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
   e. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Daerah

   Sedangkan program unggulannya antara lain: eNTeBe Plan, NTB SDGs *centre*, *Research Based Policy*, IC pusat peradaban, NTB WTP, e-Samsat, Samsat Delivery, Bale Mediasi, Kampung Madani, Kampung Media, Sekolah Perjumpaan, NTB Satu Data, Satu Peta, Sakip level A, NTB *care*, Kota Layak Anak, Ramah *Difable*, Manajemen Talenta dan Agen Perubahan.
3. **Pembangunan Sumber Daya Manusia,** dengan program prioritas meliputi :

a. Pemerataan Pendidikan
b. Akses Pelayanan Kesehatan
c. Pembangunan Budaya, Karakter, dan Prestasi Daerah
d. Perlindungan Sosial

Sedangkan program unggulannya antara lain: Ayo Bercita-cita, 1000 Mahasiswa Luar Negeri, Re-engineering SMK, Rumah bahasa, revitaslisasi BLK, PAUD holistik integratif, literasi digital, revitalisasi posyandu, generasi emas NTB, sanitasi layak, dan NTB juara.

4. **Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Pemanfaatan EBT dan Pemenuhan Kebutuhan Energi
   b. Peningkatan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan
   c. Peningkatan Daya Dukung SDA
   d. Peningkatan Daya Tampung Lingkungan

   Sedangkan program unggulannya antara lain: Tataruang Berkelanjutan, NTB *Zero Waste*, NTB hijau, Cagar Biosfer, Energi Baru Terbarukan, Pertanian Lestari, Desa Mandiri Pangan, Rinjani Tambora Global Geopark, Bank Sampah, Taman Asri.
5. **Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Pengentasan Kemiskinan
   b. Peningkatan investor sektor riil
   c. Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian
   d. Pengembangan Pariwisata
   e. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja
   f. Penguatan Kewirausahaan dan UMKM

   Sedangkan program unggulannya antara lain: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Desa, STIP Inovatif, Industrialisasi Produk Pertanian, Rumah Kemasan, Koperasi Aktif, BUMDes Maju, UMKM Bersaing, NTB Ramah Investasi, Kampung Unggas, HHBK Unggul, 99 Desa Wisata, Apartemen Ikan.
6. **Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan,** dengan program prioritas meliputi :
   a. Peningkatan Nilai Sosial Budaya dan Toleransi masyarakat.
   b. Peningkatan kualitas dan penegakan produk hukum daerah
   c. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat
   d. Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Sedangkan program unggulannya antara lain: IC pusat peradaban, , Bale Mediasi, Kampung Madani, Sekolah Perjumpaan, Kota Layak Anak.

Tabel 4. 2 Target Pembangunan Daerah Tahun 2021

Indikator	Target Nasional	Target Nasional untuk Nusa Tenggara	Target Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	3,12	5,5 – 6,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,1	3,07	3,21
Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,0	16,85	11,75
Rasio Gini (Indeks)	0,375 – 0,380	-	0,365
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,5	-	69,61

Sumber : Proyeksi RKP dan RPJMD 2019-2023

Upaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Perumusan program prioritas tahun 2021 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2021 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya keselarasan tema, prioritas nasional dan daerah dijabarkan sebagaimana tabel 4.3 berikut.

Tabel 4. 3

Tema Nasional	Tema Daerah
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"	"Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"
Prioritas Nasional	**Prioritas Daerah**
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	**PD 1** Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	
PN 6 Membangun Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
PN 3 Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	**PD 2** Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	
PN 3 Meningkatkan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	**PD 3** Pembangunan Sumber Daya Manusia
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
PN 6 Membangun Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	**PD 4** Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	**PD 5** Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	

Tema Nasional	Tema Daerah
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"	"Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"
Prioritas Nasional	**Prioritas Daerah**
PN 7 Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	**PD 6** Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di setiap provinsinya, begitu juga halnya dengan keberhasilan pembangunan di Provinsi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten/Kota. Untuk itu, untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan provinsi maka perlu didukung oleh Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2021 berpedoman pada penyusunan RKP tahun 2021 yang disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Sedangkan penyusunan kabupaten/kota berpedoman pada RKPD provinsi tahun 2021.

Berdasarkan target pembangunan provinsi NTB pada tahun 2021, terdapat beberapa indikator makro merupakan kontribusi dan akumulasi dari target kabupaten/kota se provinsi NTB. Adapun beberpa indikator makro provinsi NTB yang ditargetkan pada tahun 2021 dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5. 1 Target Indikator makro pembangunan Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi NTB Tahun 2021

No	Nama Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Angka Kemiskinan (%)	Rasio Gini (Indeks)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1	Kota Mataram	8,27	0,97	6,06		81,22
2	Kota Bima		1	9,00	0,31	
3	Lombok Barat	> 6	3,10	15,75	< 0,4	66-67
4	Lombok Tengah	6,56	2,84	14,17	0,336	67,19
5	Lombok Timur	5,86	3,48	15,05		67,06
6	Lombok Utara	3,25	2	0,5	0,319	
7	Sumbawa Barat	4,259	5,09	5,7	0,39	71,28
8	Sumbawa	5,5-6,0	3	13,18	0,34-0,33	68,69
9	Dompu	6,7	3,04	12		67,13
10	Bima	6,01		11,62		
NTB		5,0 – 5,5	3,26	12,75	0,366	67,38
Nasional		5,3 – 5,5	4,8 – 5,1	8,5 – 9,0	0,375 – 0,380	72,5

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dilakukan melalui integrasi program baik lintas sektor maupun lintas daerah. Hal ini telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan difokuskan pada 5 aspek prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah berbasis *Zero Waste*
2. Revitalisasi Posyandu
3. Pengembangan desa wisata
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Mitigasi bencana

Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2021 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 25 (dua puluh lima) program prioritas yaitu: (1) Mitigasi Bencana, Pemerataan Infrastruktur dan Konektivitas wilayah; (2) Pembangunan Manusia, Ketahanan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan; (3) Invetasi, nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja; (4) Pelestarian lingkungan hidup, ketahanan pangan dan energi; dan (5) Transformasi birokrasi dan penanganan masalah sosial darurat. Hal ini mendorong percepatan integrasi pembangunan antara pusat dengan daerah.

5.1 Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir rata-rata pada kisaran 5 persen per tahun namun belum diikuti dengan penurunan yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 akan didorong pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB dari percepatan penurunan angka kemiskinan telah ditindak lanjuti melalui nota kesepahaman bersama (MOU) antara pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tujuan Mendorong inovasi Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin sesuai dengan pengelompokan 4 (empat) Program Penanggulangan Kemiskinan yaitu :

- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang berujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil dan menengah terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis kewilayahan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, maka perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk itu, penganggaran penanggulangan kemiskinan perlu memanfaatkan potensi anggaran yang tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikolaborasikan dengan penganggaraan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan bahkan *stakeholders* lainnya.

Pola penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dengan pendekatan spasial. Terdapat 13 program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa di 500 desa/kelurahan terbanyak penduduk miskinnya dan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan oleh APBD provinsi (data desa sesuai hasil musrenbang). Sisanya 400 desa kategori miskin tersebut diharapkan dukungan kabupaten dan dana desa untuk mengintervensi dengan 13 program kegiatan tsb. Disamping itu, terdapat 10 desa/kelurahan pilot project (dari 100 desa prioritas provinsi) yang diharapkan kenuntasan penanganannya melalui integrasi dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/kota dan APBDesa serta NGO serta ada 50 desa wisata juga yg diharapkan dukungan Kab/Kota serta Pemerintah Desa sesuai kewenangannya masing-masing. Adapun 13 Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan hasil kesepakatan (MOU) Pemerintah provinsi NTB dengan Pemerintah Kabupaten Kota yaitu : (1) Pengembangan Bumdes, (2) Jamban Keluarga, (3) Rumah Layah Huni , (4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE), (5) Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), (6) Pengelolaan Sampah (Bank Sampah), (7) Pembangunan Sarana Air Bersih, (8) Pengembangan Desa Wisata, (9) Pengembangan Pertanian Konservasi, (10) Sambungan Listrik Murah dan Hemat, (11) Desa Berdaya, (12) Motorisasi nelayan atau budidaya udang panani, (13) Ketahanan keluarga berbasis Pendidikan dan Revitalisasi POSYANDU.

Berikut ini sebaran desa miskin yang akan diintervensi di 10 Kabupaten/kota Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 400-234 Tahun 2019 tentang Penetapan lokasi pelakasanaan progam kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 dan Perencanaan tahun 2021 yaitu 10 Desa pilot project pada 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan penanganan Provinsi dan 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota serta Desa/Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Desa Pilot Project Pada 100 Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Penanganan Provinsi

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
I	KAB.LOMBOK TIMUR					
1		Pringgabaya	Pringgabaya	4084	12297	
2		Sakra	Sakra	2951	10601	
3		Pringgabaya	Labuhan Lombok	3254	9643	
4		Aikmel	Aikmel	2599	8660	
5		Pringgabaya	Pohgading	3080	8612	
6		Pringgabaya	Apitaik	2745	8558	
7		Sikur	Kotaraja	2563	8537	
8		Aikmel	Lenek	2115	8015	
9		Masbagik	Masbagik Selatan	2382	7817	
10		Masbagik	Masbagik Utara	2204	7789	
11		Masbagik	Danger	2523	7471	
12		Masbagik	Paok Motong	2162	7438	
13		Keruak	Tanjung Luar	1824	7263	
14		Jerowaru	Jerowaru	2539	7188	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
15		Pringgasela	Pringgasela	1744	6766	
16		Terara	Suradadi	1812	6696	
17		Pringgabaya	Batuyang	2193	6620	
18		Suralaga	Anjani	1855	6423	
19		Sukamulia	Dasan Lekong	1958	6394	
20		Sikur	Tetebatu	2020	6371	
21		Montong Gading	Montong Betok	1822	6347	
22		Wanasaba	Mamben Daya	1964	6250	
23		Jerowaru	Pandan Wangi	2176	5905	Desa Tertinggal
24		Sakra Tmur	Menceh	1357	5688	Desa Tertinggal
25		Labuhan Haji	Labuhan Haji	1646	5320	
26		Terara	Sukadana	1672	5217	Desa Tertinggal
27		Aikmel	**Kembang Kerang Daya**	**1547**	**4604**	**Pilot Project & Desa Tertinggal**
28		Suela	Mekar Sari	1556	4312	Desa Stunting
29		Jerowaru	Sukaraja	992	3232	Desa Stunting
30		Sambelia	Belanting	1000	3230	Desa Stunting
II	**KAB.LOMBOK TENGAH**					
1		Praya Barat	Batujai	3430	9201	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
2		Jonggat	Labulia	2476	7562	Desa Tertinggal
3		Praya Barat	Mangkung	2463	7010	
4		Jonggat	Puyung	2368	6826	
5		Kopang	Kopang Rembiga	2108	6699	
6		Praya Barat	Penujak	2019	6640	
7		Janapria	Saba	2513	6617	Desa Tertinggal
8		Batukliang	Barabali	2246	6454	
9		Kopang	Dasan Baru	2149	6372	Desa Tertinggal
10		Kopang	Montong Gamang	2096	6351	
11		Jonggat	Sukarara	2372	5956	Desa Tertinggal
12		Praya Barat	Kateng	1818	5941	
13		Kopang	Muncan	1763	5896	
14		Janapria	Loang Maka	1919	5884	Desa Tertinggal
15		Praya Tengah	Pengadang	1883	5781	
16		Pringgarata	Sintung	1800	5756	
17		Pringgarata	Pringgarata	1776	5729	
18		Praya	Jago	1956	5713	
19		Praya	Montong Terep	2016	5669	
20		Batukliang Utara	Teratak	1633	5027	Desa Stunting
21		**Pujut**	**Mertak**	**1749**	**4862**	**Pilot Project &**

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
						Desa Tertinggal
22		Praya Timur	Marong	1592	4407	Desa Tertinggal & Stunting
23		Praya Barat	Mekar Sari	1450	4132	Desa Tertinggal & Stunting
24		Pujut	Sukadana	1212	3951	Desa Stunting
III	**KAB.LOMBOK BARAT**					
1		Gunung Sari	Sesela	2160	8071	
2		Sekotong	Buwun Mas	3123	7941	Desa Stunting
3		Kediri	Kediri	1638	6737	
4		Kuripan	Jagaraga	1966	6714	
5		Kuripan	Kuripan	2334	6434	Desa Stunting
6		Gunung Sari	Taman Sari	2074	6433	
7		Kediri	Banyumulek	2068	6368	Desa Tertinggal
8		Lembar	Lembar Selatan		6118	
9		Sekotong	Pelangan	2158	6080	Desa Tertinggal
10		Lembar	Lembar	1039	6009	Desa Tertinggal & Stunting
11		Sekotong	Sekotong Tengah	1809	5992	Desa Tertinggal
12		Lembar	Jembatan Kembar	367	5758	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
13		Sekotong	Batu Putih	1822	5642	Desa Tertinggal & Stunting
14		Labu Api	Bengkel	1624	5604	
15		Kuripan	Kuripan Utara	1706	5595	Desa Stunting
16		Sekotong	**Sekotong Barat**	**1697**	**5022**	**Pilot Project**
17		Batu Layar	Sandik	1456	4772	
18		Lingsar	Langko	154	4272	Desa Tertinggal & Stunting
19		Gerung	Banyu Urip	521	3933	Desa Tertinggal & Stunting
20		Gunung Sari	Mekar Sari	897	3452	Desa Tertinggal & Stunting
IV	**KAB.LOMBOK UTARA**					
1		Tanjung	Sigar Penjalin	1885	6479	Desa Stunting
2		**Bayan**	**Sukadana**	**1743**	**6448**	**Pilot Project**
3		Pemenang	Pemenang Barat	1735	6395	
4		Tanjung	Sokong	1926	6061	
5		Kayangan	Sesait	1729	5777	Desa Stunting
6		Gangga	Bentek	1809	5724	Desa Tertinggal
7		Pemenang	Malaka	1518	5420	
8		Tanjung	Jenggala	1612	5359	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
9		Bayan	Senaru	1533	5294	
10		Kayangan	Selengen	1461	5178	
11		Bayan	Akar Akar	1438	5076	
12		Tanjung	Tanjung	1532	4975	
13		Gangga	Rempek	1194	4081	Desa Stunting
14		Pemenang	Pemenang Timur	1145	4077	Desa Stunting
15		Kayangan	Kayangan	1247	3817	Desa Stunting
V	**KOTA MATARAM**					
1		**Ampenan**	**Bintaro**	**1378**	**5385**	**Pilot Project**
VI	**KAB. SUMBAWA BARAT**					
1		**Taliwang**	**Batu Putih**	**723**	**2643**	**Pilot Project**
2		Poto Tano	Mantar	286	1111	
VII	**KAB. SUMBAWA**					
1		**Alas**	**Pulau Bungin**	**455**	**1525**	**Pilot Project**
2		Batulanteh	Kelungkung	468	1489	Desa Tertinggal & Stunting
VIII	**KAB. DOMPU**					
1		**Kilo**	**Malaju**	**407**	**1338**	**Pilot Project**
2		Woja	Saneo	627	2220	Desa Tertinggal
IX	**KAB. BIMA**					
1		**Palibelo**	**Ntonggu**	**819**	**2937**	**Pilot Project**

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
2		Ambalawi	Rite	758	2201	Desa Tertinggal & Stunting
X	**KOTA BIMA**					
1		**Rasanae Barat**	**Tanjung**	**702**	**2540**	**Pilot Project**
2		Asakota	Jatiwangi	1184	4528	Desa Tertinggal

Tabel 5. 3 400 desa prioritas penanggulangan kemiskinan intervensi Kabupaten/Kota Serta Desa / Kelurahan

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	**Kecamatan**	**Desa**	**KK**	**Individu**	
I	**Kab.Lombok Timur**					
1		Aikmel	Lenek Kali Bambang	421	1436	Desa Stunting & Tertinggal
2		Sambelia	Dadap	567	1385	Desa Stunting & Tertinggal
3		Suralaga	Bintang Rinjani	410	1299	Desa Stunting & Tertinggal
4		Jerowaru	Batu Nampar Selatan	433	1279	Desa Stunting & Tertinggal
5		Aikmel	Lenek Duren	210	730	Desa Stunting & Tertinggal
6		Aikmel	Toya	1507	4762	Desa Tertinggal
7		Pringgasela	Jurit	1540	4371	Desa Tertinggal
8		Sakra Timur	Gereneng	1365	4114	Desa Tertinggal
9		Sakra Timur	Gelanggang	1169	3937	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
10		Pringgasela	Jurit Baru	1541	3920	Desa Tertinggal
11		Sakra Barat	Sukarara	1366	3783	Desa Tertinggal
12		Jerowaru	Sekaroh	1302	3665	Desa Tertinggal
13		Pringgabaya	Pringgabaya Utara	1234	3430	Desa Tertinggal
14		Aikmel	Lenek Baru	1206	3369	Desa Tertinggal
15		Terara	Rarang Selatan	954	3239	Desa Tertinggal
16		Sambelia	Labuhan Pandan	787	2924	Desa Tertinggal
17		Pringgabaya	Teko	985	2879	Desa Tertinggal
18		Sakra Timur	Surabaya	787	2770	Desa Tertinggal
19		Sukamulia	Padamara	949	2753	Desa Tertinggal
20		Sakra Timur	Gereneng Timur	915	2598	Desa Tertinggal
21		Pringgasela	Pengadangan Barat	834	2539	Desa Tertinggal
22		Jerowaru	Seriwe	897	2446	Desa Tertinggal
23		Aikmel	Aik Prapa	813	2307	Desa Tertinggal
24		Aikmel	Kalijaga Baru	821	2203	Desa Tertinggal
25		Aikmel	Kalijaga Selatan	666	2118	Desa Tertinggal
26		Terara	Leming	729	1999	Desa Tertinggal
27		Sambelia	Dara Kunci	666	1973	Desa Tertinggal
28		Sakra Timur	Surabaya Utara	639	1928	Desa Tertinggal
29		Sakra Timur	Lenting	622	1919	Desa Tertinggal
30		Selong	Denggen Timur	617	1908	Desa Tertinggal
31		Terara	Pandan Duri	892	1859	Desa Tertinggal
32		Jerowaru	Ekas Buana	619	1840	Desa Tertinggal
33		Wanasaba	Bandok	625	1825	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
34		Sukamulia	Setanggor	567	1746	Desa Tertinggal
35		Aikmel	Aikmel Utara	519	1697	Desa Tertinggal
36		Sakra Barat	Pejaring	602	1658	Desa Tertinggal
37		Sikur	Sikur Barat	621	1638	Desa Tertinggal
38		Pringgabaya	Tanak Gadang	529	1583	Desa Tertinggal
39		Sambelia	Madayin	466	1520	Desa Tertinggal
40		Sambelia	Padak Guar	436	1504	Desa Tertinggal
41		Keruak	Pulau Maringkik	475	1420	Desa Tertinggal
42		Sakra Barat	Boyemare	495	1307	Desa Tertinggal
43		Sikur	Jeruk Manis	521	1282	Desa Tertinggal
44		Sakra Barat	Mengkuru	439	1273	Desa Tertinggal
45		Terara	Embung Kandong	455	1249	Desa Tertinggal
46		Sakra Timur	Lepak Timur	377	1247	Desa Tertinggal
47		Sukamulia	Jantuk	387	1211	Desa Tertinggal
48		Suralaga	Gapuk	350	1202	Desa Tertinggal
49		Jerowaru	Pene	490	1194	Desa Tertinggal
50		Sembalun	Sembalun Timba Gading	341	1166	Desa Tertinggal
51		Terara	Rarang Batas	431	1143	Desa Tertinggal
52		Suralaga	Gerung Permai	342	1119	Desa Tertinggal
53		Suela	Puncak Jeringo	384	1119	Desa Tertinggal
54		Wanasaba	Wanasaba Daya	385	1117	Desa Tertinggal
55		Jerowaru	Sukadamai	388	1108	Desa Tertinggal
56		Jerowaru	Kwang Rundun	394	1076	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
57		Sambelia	Senanggalih	355	1060	Desa Tertinggal
58		Sakra Barat	Rensing Raya	294	1044	Desa Tertinggal
59		Sakra Barat	Jero Gunung	308	1022	Desa Tertinggal
60		Sakra Barat	Rensing Bat	260	859	Desa Tertinggal
61		Wanasaba	Otak Rarangan	270	751	Desa Tertinggal
62		Wanasaba	Karang Baru Timur	231	643	Desa Tertinggal
63		Wanasaba	Jineng	170	560	Desa Tertinggal
64		Suralaga	Bagikpayung Timur	1072	2505	Desa Stunting
65		Jerowaru	Batunampar	541	1227	Desa Stunting
66		Terara	Jenggik	1558	5862	
67		Suela	Suela	1895	5441	
68		Masbagik	Kesik	1704	5345	
69		Selong	Pancor	1504	5342	
70		Aikmel	Kembang Kerang	1503	5317	
71		Suralaga	Suralaga	1546	5301	
72		Masbagik	Masbagik Timur	1668	5197	
73		Suela	Suntalangu	1801	5179	
74		Pringgasela	Pengadangan	1622	5152	
75		Masbagik	Lendang Nangka	1777	5146	
76		Montong Gading	Perian	1767	5104	
77		Sakra Barat	Gunung Rajak	1292	5090	
78		Terara	Rarang	1462	5001	
79		Suralaga	Bagik Payung	1487	4988	
80		Sikur	Montongbaan Selatan	1745	4946	
81		Aikmel	Kalijaga	1597	4841	
82		Sakra	Sakra Selatan	1537	4789	
83		Terara	Lando	1778	4782	
84		Sikur	Loyok	1393	4752	
85		Pringgabaya	Seruni Mumbul	1503	4711	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
II	**Kab. Lombok Tengah**					
1		Janapria	Langko	1169	3623	Desa Stunting & Tertinggal
2		Praya Barat	Banyu Urip	1116	3467	Desa Stunting & Tertinggal
3		Janapria	Lekor	1952	5080	Desa Tertinggal
4		Pujut	Kuta	1446	4845	Desa Tertinggal
5		Janapria	Kerembong	1943	4602	Desa Tertinggal
6		Praya Timur	Beleka	1817	4601	Desa Tertinggal
7		Pringgarata	Pemepek	1457	4457	Desa Tertinggal
8		Pujut	Tumpak	1494	4333	Desa Tertinggal
9		Pringgarata	Menemeng	1347	4147	Desa Tertinggal
10		Batukliang Utara	Lantan	1334	4034	Desa Tertinggal
11		Praya Timur	Kidang	1428	3851	Desa Tertinggal
12		Praya	Mertak Tombok	1296	3770	Desa Tertinggal
13		Pujut	Pengengat	1373	3669	Desa Tertinggal
14		Pujut	Prabu	904	3113	Desa Tertinggal
15		Praya Barat Daya	Montong Ajan	1070	3017	Desa Tertinggal
16		Pringgarata	Arjangka	1112	2958	Desa Tertinggal
17		Praya Barat	Setanggor	1153	2897	Desa Tertinggal
18		Pringgarata	Sisik	1082	2872	Desa Tertinggal
19		Praya Barat Daya	Montong Sapah	952	2652	Desa Tertinggal
20		Batukliang	Tampak Siring	928	2339	Desa Tertinggal
21		Praya Barat Daya	Ranggagata	854	2233	Desa Tertinggal
22		Janapria	Setuta	843	2229	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
23		Praya Barat Daya	Serage	786	2176	Desa Tertinggal
24		Praya Timur	Bilelando	728	2037	Desa Tertinggal
25		Praya Tengah	Prai Meke	627	1816	Desa Tertinggal
26		Batukliang	Mekar Bersatu	560	1458	Desa Tertinggal
27		Pujut	Gapura	514	1374	Desa Tertinggal
28		Praya Barat	Tanak Rarang	527	1172	Desa Tertinggal
29		Praya Barat Daya	Teduh	440	1105	Desa Tertinggal
30		Praya Barat	Selong Belanak	1085	3106	Desa Stunting
31		Praya Timur	Sukaraja	860	2593	Desa Stunting
32		Praya Tengah	Dakung	800	2239	Desa Stunting
33		Kopang	Waja Geseng	1760	5611	
34		Praya	Prapen	1625	5597	
35		Batukliang	Bujak	1770	5574	
36		Pujut	Pengembur	1819	5545	
37		Jonggat	Pengenjek	1748	5384	
38		Praya	Bunut Baok	1680	5378	
39		Pujut	Sengkol	1821	5313	
40		Kopang	Darmaji	1668	5230	
41		Jonggat	Jelantik	1741	5230	
42		Janapria	Janapria	1966	5214	
III	**Kab.Lombok Barat**					
1		Sekotong	Gili Gede Indah	318	999	Desa Stunting & Tertinggal
2		Kediri	Jagaraga Indah	1062	3826	Desa Tertinggal
3		Kediri	Ombe Baru	1024	3756	Desa Tertinggal
4		Sekotong	Cendi Manik	953	3541	Desa Tertinggal
5		Gerung	Gapuk	944	3417	Desa Tertinggal
6		Lembar	Sekotong Timur	970	3254	Desa Tertinggal
7		Narmada	Krama Jaya	848	2777	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
8		Narmada	Badrain	840	2610	Desa Tertinggal
9		Lembar	Mareje	804	2437	Desa Tertinggal
10		Kediri	Dasan Baru	700	2425	Desa Tertinggal
11		Kediri	Lelede	506	2276	Desa Tertinggal
12		Narmada	Sembung	697	2251	Desa Tertinggal
13		Lembar	Mareje Timur	0	1895	Desa Tertinggal
14		Kuripan	Kuripan Timur	110	1831	Desa Tertinggal
15		Lingsar	Gegelang	212	1806	Desa Tertinggal
16		Narmada	Sedau	718	1749	Desa Tertinggal
17		Narmada	Buwun Sejati	103	1687	Desa Tertinggal
18		Gunung Sari	Guntur Macan	620	1680	Desa Tertinggal
19		Gunung Sari	Gelangsar	115	1599	Desa Tertinggal
20		Batu Layar	Bengkaung	101	1580	Desa Tertinggal
21		Gunung Sari	Bukit Tinggi	62	1206	Desa Tertinggal
22		Lingsar	Saribaye	125	1095	Desa Tertinggal
23		Narmada	Pakuan	64	1010	Desa Tertinggal
24		Lingsar	Gontoran	115	972	Desa Tertinggal
25		Batu Layar	Pusuk Lestari	80	593	Desa Tertinggal
26		Lingsar	Batu Mekar	1634	5051	Desa Stunting
27		Gunung Sari	Penimbung	1379	2540	Desa Stunting
28		Gerung	Mesanggok	681	2271	Desa Stunting
29		Gunung Sari	Mambalan	1154	1746	Desa Stunting
30		Gerung	Babussalam	154	5447	
31		Gerung	Beleke	233	5104	
32		Labu Api	Bajur	1525	4681	
33		Labu Api	Merembu	1305	4333	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
34		Kediri	Gelogor	1181	4310	
IV	**Kab.Lombok Utara**					
1		Kayangan	Gumantar	1215	4384	
2		Kayangan	Salut	814	2704	
3		Kayangan	Pendua	473	1746	
4		Tanjung	Teniga	593	1709	
5		Bayan	Karang Bajo	784	2713	
6		Bayan	Mumbul Sari	769	2387	
7		Kayangan	Dangiang	677	2169	
8		Gangga	Genggelang	1435	4814	
9		Bayan	Anyar	1443	4787	
V	**Kota Mataram**					
1		Sekarbela	Jempong Baru	2472	8557	
2		Sandubaya	Selagalas	1884	6738	
3		Selaparang	Dasan Agung	1392	5351	
4		Ampenan	Ampenan Tengah	1329	4965	
5		Sandubaya	Babakan	1310	4767	
6		Sandubaya	Bertais	1353	4752	
7		Mataram	Pagutan	1226	4730	
8		Cakranegara	Sayang Sayang	1395	4662	
9		Sekarbela	Karang Pule	1154	4575	
10		Sandubaya	Mandalika	1298	4556	
11		Selaparang	Monjok	1187	4329	
12		Mataram	Pagesangan Barat	1020	4172	
13		Sandubaya	Turida	1097	3947	
14		Ampenan	Pejeruk	1012	3874	
VI	**Sumbawa Barat**					
1		Poto Tano	Kiantar	235	927	Desa Stunting & Tertinggal
2		Sekongkang	Tatar	135	516	Desa Stunting & Tertinggal
3		Seteluk	Loka	131	509	Desa Stunting & Tertinggal
4		Brang Rea	Sapugara Bree	481	1754	Desa Tertinggal
5		Poto Tano	Tua Nanga	297	1241	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
6		Seteluk	Seteluk Atas	288	1153	Desa Tertinggal
7		Brang Rea	Seminar Salit	281	1043	Desa Tertinggal
8		Taliwang	Lalar Liang	288	1022	Desa Tertinggal
9		Brang Ene	Kalimantong	266	889	Desa Tertinggal
10		Brang Rea	Lamuntet	190	811	Desa Tertinggal
11		Taliwang	Seloto	252	785	Desa Tertinggal
12		Brang Ene	Mura	205	727	Desa Tertinggal
13		Taliwang	Tamekan	224	711	Desa Tertinggal
14		Brang Ene	Manemeng	162	580	Desa Tertinggal
15		Poto Tano	Tebo	156	563	Desa Tertinggal
16		Brang Rea	Moteng	142	522	Desa Tertinggal
17		Seteluk	Lamusung	136	501	Desa Tertinggal
18		Brang Ene	Lampok	133	480	Desa Tertinggal
19		Seteluk	Seran	116	433	Desa Tertinggal
20		Sekongkang	Tongo	145	395	Desa Tertinggal
21		Brang Ene	Mataiyang	79	274	Desa Tertinggal
22		Sekongkang	Ai Kangkung	212	832	Desa Stunting
23		Sekongkang	Talonang Baru	231	723	Desa Stunting
VII	**Sumbawa**					
1		Moyohulu	Maman	301	984	Desa Stunting & Tertinggal
2		Rhee	Luk	245	903	Desa Stunting & Tertinggal
3		Moyohulu	Sempe	263	797	Desa Stunting & Tertinggal
4		Orong Telu	Mungkin	219	711	Desa Stunting & Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
5		Rhee	Rhee Loka	384	1516	Desa Tertinggal
6		Alas Barat	Mapin Rea	408	1441	Desa Tertinggal
7		Buer	Juru Mapin	413	1398	Desa Tertinggal
8		Maronge	Pemasar	386	1334	Desa Tertinggal
9		Moyohilir	Kakiang	372	1210	Desa Tertinggal
10		Moyohilir	Olat Rawa	376	1152	Desa Tertinggal
11		Plampang	Sp Iii Prode	313	1078	Desa Tertinggal
12		Plampang	Brang Kolong	275	1054	Desa Tertinggal
13		Moyohulu	Mokong	346	1047	Desa Tertinggal
14		Labuhan Badas	Sebotok	373	1022	Desa Tertinggal
15		Utan	Bale Brang	311	999	Desa Tertinggal
16		Lantung	Sepukur	303	926	Desa Tertinggal
17		Labangka	Suka Mulya	294	912	Desa Tertinggal
18		Ropang	Lebangkar	274	864	Desa Tertinggal
19		Lenangguar	Ledang	215	839	Desa Tertinggal
20		Moyohulu	Lito	238	765	Desa Tertinggal
21		Moyohilir	Ngeru	225	759	Desa Tertinggal
22		Moyohulu	Marga Karya	243	744	Desa Tertinggal
23		Orong Telu	Senawang	199	743	Desa Tertinggal
24		Orong Telu	Sebeok	170	689	Desa Tertinggal
25		Empang	Jotang	204	678	Desa Tertinggal
26		Plampang	Sp Ii Prode	181	639	Desa Tertinggal
27		Plampang	Sp I Prode	132	424	Desa Tertinggal
28		Ropang	Lebin	108	347	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
29		Lantung	Ai Mual	102	329	Desa Tertinggal
30		Ropang	Ranan	107	262	Desa Tertinggal
31		Rhee	Sampe	59	252	Desa Tertinggal
32		Lantung	Padesa	49	165	Desa Tertinggal
33		Utan	Stowe Brang	706	2444	Desa Stunting
34		Lopok	Berora	467	1685	Desa Stunting
35		Batulanteh	Bao Desa	353	1047	Desa Stunting
36		Empang	Ongko	275	862	Desa Stunting
37		Moyohulu	Berang Rea	268	803	Desa Stunting
38		Plampang	Usar	471	1775	
39		Labuhan Badas	Labuan Sumbawa	1408	5132	
40		Labuhan Badas	Karang Dima	922	3509	
41		Sumbawa	Brang Biji	923	3405	
42		Unter Iwes	Pelat	915	3386	
43		Utan	Pukat	964	3355	
44		Utan	Jorok	948	3216	
45		Lape	Lape	788	2756	
46		Alas	Dalam	670	2561	
47		Moyohilir	Serading	787	2553	
48		Batulanteh	Baturotok	662	2455	
49		Lunyuk	Pada Suka	738	2448	
50		Alas	Juranalas	694	2406	
51		Lopok	Langam	604	2398	
52		Sumbawa	Seketeng	622	2388	
53		Alas	Luar	584	2269	
54		Alas	Marenteh	544	2093	
55		Labuhan Badas	Labuhan Badas	594	2081	
56		Alas	Baru	508	2047	
57		Lunyuk	Emang Lestari	559	2013	
58		Utan	Motong	537	2008	
59		Labangka	Suka Damai	607	1998	
60		Sumbawa	Bugis	498	1973	
61		Buer	Labuhan Burung	516	1933	
62		Lape	Dete	483	1879	

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
63		Alas Barat	Lekong	515	1840	
64		Plampang	Sepayung	520	1825	
65		Lopok	Lopok	505	1805	
66		Labangka	Labangka	547	1776	
67		Tarano	Mata	528	1771	
68		Alas	Kalimango	441	1744	
69		Utan	Labuan Bajo	454	1710	
70		Lenangguar	Lenangguar	497	1704	
71		Utan	Sabedo	497	1692	
72		Tarano	Labuan Aji	486	1662	
73		Plampang	Teluk Santong	417	1658	
74		Moyohulu	Leseng	454	1616	
75		Batulanteh	Tepal	443	1599	
76		Sumbawa	Brang Bara	390	1569	
77		Labuhan Badas	Labuan Aji	486	1562	
78		Lape	Labuan Kuris	471	1556	
79		Sumbawa	Pekat	495	1541	
80		Unter Iwes	Kerekeh	428	1513	
81		Lape	Hijrah	430	1487	
82		Tarano	Labuan Jambu	395	1465	
VIII	**Dompu**					
1		Hu'u	Cempi Jaya	300	969	Desa Stunting & Tertinggal
2		Woja	Simpasai	1038	3732	Desa Tertinggal
3		Woja	Wawondur u	721	2596	Desa Tertinggal
4		Kempo	Soro	440	1556	Desa Tertinggal
5		Hu'u	Daha	398	1410	Desa Tertinggal
6		Woja	Serakapi	305	1099	Desa Tertinggal
7		Hu'u	Adu	227	761	Desa Tertinggal
8		Hu'u	Marada	218	704	Desa Tertinggal
9		Kempo	Konte	215	686	Desa Tertinggal
10		Woja	Bakajaya	868	3018	Desa Stunting
11		Dompu	Oo	690	2920	Desa Stunting

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
12		Woja	Mumbu	681	2324	Desa Stunting
13		Dompu	Dorebara	624	2087	Desa Stunting
14		Pajo	Ranggo	491	1638	Desa Stunting
15		Pekat	Sorinomo	385	1400	Desa Stunting
16		Hu'u	Persiapan Jala	279	1115	Desa Stunting
17		Dompu	Katua	274	982	Desa Stunting
18		Pekat	Upt Nangakara	232	781	Desa Stunting
19		Woja	Montabaru	819	3115	
20		Pekat	Doropeti	751	2817	
21		Woja	Kandai Dua	772	2774	
22		Pekat	Pekat	853	2694	
23		Woja	Matua	717	2675	
24		Pekat	Kadindi	747	2609	
25		Woja	Bara	680	2488	
26		Dompu	Mangge Asi	639	2374	
27		Kempo	Kempo	730	2373	
28		Woja	Nowa	606	2367	
29		Kempo	Ta'a	676	2196	
IX	**Bima**					
1		Monta	Simpasai	1436	3966	Desa Tertinggal
2		Woha	Risa	962	3259	Desa Tertinggal
3		Lambu	Soro	804	2992	Desa Tertinggal
4		Sape	Parangina	833	2813	Desa Tertinggal
5		Langgudu	Karumbu	665	2393	Desa Tertinggal
6		Lambu	Sumi	670	2323	Desa Tertinggal
7		Wera	Pai	814	2299	Desa Tertinggal
8		Sape	Sari	581	2265	Desa Tertinggal
9		Mada Pangga	Rade	658	2126	Desa Tertinggal
10		Bolo	Timu	648	2077	Desa Tertinggal
11		Monta	Tolotangga	573	1999	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
12		Belo	Renda	772	1943	Desa Tertinggal
13		Soromandi	Sai	512	1897	Desa Tertinggal
14		Langgudu	Karampi	608	1857	Desa Tertinggal
15		Sape	Poja	478	1851	Desa Tertinggal
16		Soromandi	Sampungu	521	1849	Desa Tertinggal
17		Langgudu	Rupe	653	1838	Desa Tertinggal
18		Belo	Ncera	660	1824	Desa Tertinggal
19		Wera	Nunggi	549	1689	Desa Tertinggal
20		Lambu	Hidirasa	659	1674	Desa Tertinggal
21		Ambalawi	Mawu	442	1668	Desa Tertinggal
22		Monta	Tangga Baru	490	1611	Desa Tertinggal
23		Sape	Jia	456	1583	Desa Tertinggal
24		Wera	Bala	495	1576	Desa Tertinggal
25		Parado	Kuta	469	1515	Desa Tertinggal
26		Palibelo	Roi	464	1505	Desa Tertinggal
27		Monta	Pela	431	1473	Desa Tertinggal
28		Woha	Pandai	396	1450	Desa Tertinggal
29		Sanggar	Taloko	427	1410	Desa Tertinggal
30		Langgudu	Dumu	425	1405	Desa Tertinggal
31		Lambu	Lambu	408	1373	Desa Tertinggal
32		Monta	Monta	462	1371	Desa Tertinggal
33		Wawo	Raba	383	1368	Desa Tertinggal
34		Langgudu	Doro O'o	394	1363	Desa Tertinggal
35		Sanggar	Boro	411	1323	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
36		Tambora	Labuhan Kananga	371	1308	Desa Tertinggal
37		Lambu	Lanta Barat	453	1290	Desa Tertinggal
38		Lambu	Nggelu	400	1266	Desa Tertinggal
39		Langgudu	Wadu Ruka	432	1244	Desa Tertinggal
40		Mada Pangga	Campa	426	1215	Desa Tertinggal
41		Lambu	Melayu	330	1191	Desa Tertinggal
42		Palibelo	Tonggorisa	483	1178	Desa Tertinggal
43		Langgudu	Rompo	306	1169	Desa Tertinggal
44		Lambu	Mangge	377	1151	Desa Tertinggal
45		Lambitu	Sambori	318	1144	Desa Tertinggal
46		Tambora	Kawinda Nae	342	1134	Desa Tertinggal
47		Tambora	Kawinda Toi	410	1132	Desa Tertinggal
48		Donggo	Bumi Pajo	285	1131	Desa Tertinggal
49		Mada Pangga	Mpuri	409	1126	Desa Tertinggal
50		Wawo	Maria Utara	314	1112	Desa Tertinggal
51		Ambalawi	Kole	395	1098	Desa Tertinggal
52		Lambu	Sangga	56	1096	Desa Tertinggal
53		Sanggar	Sandue	356	1067	Desa Tertinggal
54		Donggo	Mpili	260	1021	Desa Tertinggal
55		Sanggar	Piong	346	977	Desa Tertinggal
56		Palibelo	Tonggondoa	308	951	Desa Tertinggal
57		Donggo	Kala	258	935	Desa Tertinggal
58		Wawo	Tarlawi	235	931	Desa Tertinggal
59		Belo	Lido	304	913	Desa Tertinggal

No	Lokasi Sasaran			Jumlah Penduduk Miskin		KET
	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	KK	Individu	
60		Palibelo	Ragi	116	895	Desa Tertinggal
61		Belo	Soki	261	886	Desa Tertinggal
62		Donggo	Rora	376	882	Desa Tertinggal
63		Wera	Kalajena	23	873	Desa Tertinggal
64		Monta	Sondo	248	867	Desa Tertinggal
65		Sape	Tanah Putih	257	785	Desa Tertinggal
66		Sape	Boke	206	754	Desa Tertinggal
67		Monta	Waro	63	749	Desa Tertinggal
68		Wera	Tadewa	201	715	Desa Tertinggal
69		Monta	Nontotera	89	714	Desa Tertinggal
70		Soromandi	Wadukopa	176	697	Desa Tertinggal
71		Donggo	Palama	200	695	Desa Tertinggal
72		Lambitu	Teta	286	685	Desa Tertinggal
73		Langgudu	Kalodu	175	658	Desa Tertinggal
74		Sanggar	Oi Saro	205	656	Desa Tertinggal
75		Wawo	Riamau	167	636	Desa Tertinggal
76		Langgudu	Kawuwu	205	620	Desa Tertinggal
77		Palibelo	Padolo	86	581	Desa Tertinggal
X	**Kota Bima**					
1		Raba	Rite	407	1524	Desa Stunting & Tertinggal
2		Asakota	Melayu	855	3144	Desa Tertinggal
3		Asakota	Kolo	1048	3834	Desa Stunting
4		Raba	Ntobo	750	2617	Desa Stunting
5		Raba	Rabadompu Timur	541	1864	Desa Stunting

Selain itu untuk mendorong pencapaian target pembangunan Provinsi NTB, sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat dapat diharapkan berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan pengembangan pariwisata kerakyatan diperlukan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan. Terdapat 99 desa wisata yang sudah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka pengembangan pariwisata kerakyatan dan berkelanjutan yang lebih optimal.

Berikut penetapan 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020 sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 050.13-366 Tahun 2019:

Tabel 5. 4 99 lokasi desa wisata di provinsi NTB tahun 2019-2020

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
1	**BIMA**	1. KAWINDA TOI
		2. PIONG
		3. LABUHAN KANANGA
		4. OI PANIHI
		5. SAMBORI
		6. MARIA
		7. SORO
		8. RISA
		9. PANDA
		10. TOLOTANGGA
2	**DOMPU**	1. SANEO
		2. MALAJU
		3. PANCASILA
		4. HUU
		5. DOROPETI
		6. RIWO
		7. MADAPRAMA
		8. NANGAMIRO
		9. LANCI JAYA
3	**KOTA BIMA**	1. KOLO
		2. DARA
		3. KUMBE
		4. ULE

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
4	**KOTA MATARAM**	1. TANJUNG KARANG
		2. JEMPONG BARU
		3. KARANG PULE
		4. SAYANG SAYANG
5	**LOMBOK BARAT**	1. BUWUN MAS
		2. MEKAR SARI
		3. PUSUK LESTARI
		4. PELANGAN
		5. SENGGIGI
		6. BANYUMULEK
		7. LINGSAR
		8. SENTELUK
		9. KARANG BAYAN
		10. GILI GEDE INDAH
		11. SEKOTONG BARAT
		12. BATU PUTIH
		13. LABUAN TERENG
6	**LOMBOK TENGAH**	1. SUKARARA
		2. MARONG
		3. MERTAK
		4. LANTAN
		5. KUTA
		6. LABULIA
		7. BONJERUK
		8. SEPAKEK
		9. SELONG BELANAK
		10. MEKAR SARI
		11. KARANG SIDEMEN
		12. REMBITAN
		13. AIK BERIK
		14. TANAK BEAK
		15. PENUJAK
		16. SENGKOL
7	**LOMBOK TIMUR**	1. TETEBATU
		2. SEMBALUN BUMBUNG
		3. KEMBANG KUNING

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
		4. PRINGGASELA
		5. TANJUNG LUAR
		6. JERUK MANIS
		7. SEKAROH
		8. SEMBALUN LAWANG
		9. LENEK RAMBAN BIAK
		10. JEROWARU
		11. LABUHAN PANDAN
		12. SUGIAN
		13. LENEK PESIRAMAN
		14. BEBIDAS
		15. SENANGGALIH
		16. SERIWE
		17. SAPIT
		18. SEMBALUN
8	**LOMBOK UTARA**	1. SENARU
		2. PEMENANG BARAT
		3. GENGGELANG
		4. SOKONG
		5. KARANG BAJO
		6. SANTONG
		7. MEDANA
		8. GILI INDAH
9	**SUMBAWA**	1. PULAU BUNGIN
		2. MARENTE
		3. BATUDULANG
		4. LANTUNG
		5. LABUAN AJI
		6. LABUAN JAMBU
		7. LENANGGUAR
		8. TELUK SANTONG
		9. LEPADE
10	**SUMBAWA BARAT**	1. MANTAR
		2. TATAR
		3. POTO TANO
		4. LABUHAN KERTASARI

NO	KABUPATEN/KOTA	DESA
		5. LABUAN LALAR
		6. BERU
		7. PASIR PUTIH
		8. SEKONGKANG ATAS

5.2 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**.**

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat, dan
6. Sosial.

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota :

Pendidikan

Pemerintah Provinsi :

1. Pendidikan menengah;
2. Pendidikan khusus.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

SPM Kesehatan

Pemerintah Provinsi :

1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi :

1. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbahdomestik.

SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman

Pemerintah Provinsi :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

SPM Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat

Pemerintah Provinsi :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. pelayanan informasi rawan bencana;
3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.

SPM Sosial

Pemerintah Provinsi :

1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau

jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh Kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Penerapan Standar Pelayanan minimal diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian. Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan :

1. Pengumpulan data;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Sementara itu laporan penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat hasil penerapan SPM, kendala penerapan SPM dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode ketiga pembangunan tahun 2019-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2021 yaitu **"Menuju NTB Gemilang dengan Membangun Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Nilai Tambah Industri, Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah"**.

Pemerintah Provinsi NTB melakukan pemetaan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 yang disepakati dalam Berita Acara sebagai bentuk harmonisasi terhadap kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem *entebePlan (http://e-planning.ntbprov.go.id/)* sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas *(bottom-up).*

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023 telah ditetapkan sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2019-2023

No	Indikator	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
		2019	2020	2021	
1	Indeks Risiko Bencana	172,18	167,01	162	129,02
2	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur	75,76	77,14	78,56	74,92
3	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	NA
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,07	68,84	69,61	68,14
5	Indeks Kebahagiaan	-	71,9	-	NA
6	Persentase Balita *Stunting*	32,49	31,49	30,49	25,5*)
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,53	58,03	58,53	75,16

No	Indikator	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
		2019	2020	2021	
8	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Pertambangan Bijih Logam)	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	4,76
9	Pertumbuhan Industri	3,2	4,04	5,26	-1,38
10	Inflasi	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	1,8
11	Gini Ratio	0,367	0,366	0,365	0.374
12	Angka Kemiskinan	13,75	12,75	11,75	13,88
13	Indeks Kriminalitas	16,45	15,65	14,85	12,71
14	Indeks Demokrasi	76,37	76,7	77,03	NA
15	Indeks Pembangunan Gender	91,08	91,45	91,81	90,4

Sumber: LKPJ Provinsi NTB Tahun 2019
*Keterangan: *) Data Survey masih pada angka 67%*

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
A	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Pertambangan Bijih Logam	%	4,5 - 5,0	5,0 - 5,5	5,5 - 6,0	4,76
2	Inflasi		3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	1.87
3	Angka Kemiskinan	%	13,75	12,75	11,75	13,88
4	Gini Ratio		0,367	0,366	0,365	0,374
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,07	68,84	69,61	68,14
6	Indeks Kebahagiaan		-	71,9	-	NA
B	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
7	Indeks Kriminalitas		16,45	15,65	14,85	12,71

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
8	Indeks Kebermanfaatan Infrastruktur		75,76	77,14	78,56	74,92
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		57,53	58,03	58,53	75,16
10	Ketaatan Terhadap RTRW	%	87,79	88,45	89,03	NA
11	Indeks Risiko Bencana		172,18	167,01	162	129,02
12	Indeks Reformasi Birokrasi		B	B	B	NA
13	Indeks Pelayanan Publik		97,78	97,87	97,97	NA
14	Indeks Demokrasi		76,37	76,7	77,03	NA
C	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**					
1.01	**Pendidikan**					
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,57	13,62	13,68	13,48
16	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,96	6,98	7,01	7,27
1.02	**Kesehatan**					
17	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	%	73	75	77	86,47
18	Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	72,62	75,72	78,81	75.02
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,07	66,2	66,43	66,28
20	Persentase Balita Stunting	%	32,49	31,49	30,49	25,5
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
21	Persentase sarana dan prasarana infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	%	50	100		50,00
22	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	84,65	86,65	88,65	80,28
23	Cakupan Air Minum	%	74,08	75,74	77,55	74,69
24	Indeks Kinerja Sistem Irigasi		56,18	57,07	58,01	54,41
25	Persentase Penyusunan Regulasi Rencana Tata Ruang (RTR)	%	0	18,18	36,36	0,00
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					
26	Cakupan pemulihan sektor perumahan dan permukiman	%	75	100		84,88
27	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	%	92,37	92,74	93,1	92,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**					
28	Cakupan pemulihan sektor sosial	%	50	100		33,21
29	Cakupan pemulihan sektor ekonomi produktif	%	50	100		11,48
30	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Tramtibmas	%	100	100	100	100,00
31	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah (%)	%	100	100	100	100,00
32	Cakupan Desa Tangguh Bencana (434 Desa Rawan Bencana)	%	11,75	16,36	20,97	11,75
33	Cakupan Komunitas "Sekolah Perjumpaan" yang terbentuk dalam rangka Pendidikan Karakter	%	10	20	30	10,00
1.06	**Sosial**					
34	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial	%	100	100	100	100,00
35	Persentase PMKS yang tertangani	%	5,5	6,6	7,6	5,29
2	**URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR**					
2.01	**Tenaga Kerja**					
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,39	3,26	3,21	3,42
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
37	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		60,43	60,67	60,91	NA
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		91,08	91,45	91,81	90,4
39	Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Perempuan	Tahun	20,42	20,57	20,72	20,21
2.03	**Pangan**					
40	Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		78,8	79,6	80,6	85,30
2.05	**Lingkungan Hidup**					
41	Indeks Kualitas Air		22,75	25,25	27,75	74,63
42	Indeks Kualitas Udara		88,45	88,53	89,01	87,17
43	Neraca pengolahan sampah	%	53	54	55	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
2.04	**Pertanahan**					
44	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	%	100	100	100	100,00
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
45	Rasio Penduduk BerKTP Persatuan Penduduk	rasio	0,8	0,82	0,84	0,99
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**					
46	Cakupan desa pesisir, dan lingkar hutan yang diberdayakan	%	24,47	26,74	29,01	33,29
2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
47	Pertumbuhan Penduduk	%	1,13	1,08	1,04	1,13
2.09	**Perhubungan**					
48	Indeks konektivitas transportasi publik		76,7	78,64	80,58	78.64
2.10	**Komunikasi dan Informatika**					
49	Level Kematangan Layanan TIK Pemerintah dan Publik	Level	2	2,5	3	2,2
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					
50	Persentase Koperasi Aktif	%	62	63	65	59,61
2.12	**Penanaman Modal**					
51	Nilai Realisasi Investasi	Rp. Milyar	16.000	16.800	17.640	10.024
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**					
52	Prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional	Medali	25	30	35	35
53	Prestasi Pemuda di tingkat nasional dan internasional	orang	15	15	15	23
54	Proporsi wirausaha muda	%	67,97	68,07	68,18	68
2.14	**Statistik**					
55	Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	%	70	80	90	95,49
2.15	**Persandian**					
56	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (Level 1-5)	Level	II	II+	III	II
2.16	**Kebudayaan**					
57	Cakupan mediator bale mediasi yang dilatih	%	3,52	7,05	10,57	NA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
58	Cakupan Cagar Budaya yang direvitalisasi	%	20	24,35	28,7	26,00
2.17	**Perpustakaan**					
59	Cakupan Komunitas Literasi yang terbina (59 Komunitas)	%	100	100	100	100,00
60	Persentase Digitalisasi Koleksi Deposit (7527 Judul)	%	23,91	27,9	31,89	26,57
2.18	**Kearsipan**					
61	Persentase Arsip yang Terselamatkan	%	33,33	50	66,67	33,33
3	**URUSAN PILIHAN**					
3.01	**Kelautan dan Perikanan**					
62	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,76	4,76	4,75	4,57
3.02	**Pariwisata**					
63	Persentase Desa Wisata yang dikembangkan	%	20	40	60	20,00
64	Rata-rata Lama Menginap	hari	2,75	2,95	3,1	2,05
65	Angka kunjungan wisatawan	orang	4.000.000	4.400.000	4.650.000	3.706.352
66	Persentase Geosites yang Tertata	%	-	12,5	25	-
3.03	**Pertanian**					
67	Pertambahan Nilai PDRB sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, perikanan & kehutanan (Rp. Juta)	%	820.307,23	825.043,71	829.328,38	321.690,00
68	Nilai Tukar Petani		>105	>105	>105	115,27
3.04	Kehutanan					
69	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		60,03	60,13	60,23	66,56
70	Cakupan Luas Pengembangan Tanaman Gaharu dan HHBK Lainnya	%	0,08	5,08	10,08	NA
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral					
71	Rasio Elektrifikasi	%	94,46	95,09	95,72	99,55
3.06	Perdagangan					
72	Pengeluaran per kapita	Rp.000	9.956	9.996	10.036	10.640
3.07	Perindustrian					
73	Pertambahan Nilai PDRB Sektor Industri	Rp. Juta	164.565,72	168.395,36	171.859,70	164.960

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
74	Persentase Industri kecil yang meningkat menjadi industri menengah	%	1,68	2,2	2,69	NA
75	Pertumbuhan Industri	%	3,2	4,04	5,26	-1,38
3.08	Transmigrasi					
76	Cakupan Penempatan Transmigran	%	80	85	90	80,00
4	**URUSAN FUNGSI PENUNJANG**					
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					
77	Skor EKPPD		3,0329	3,0462	3,0557	3,2048
78	Persentase Produk Hukum Daerah yang terbentuk	%	100	100	100	144,05
79	Persentase penanganan kasus-kasus hukum	%	100	100	100	100,00
80	Tingkat pemanfaatan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan	%	35,81	36,16	36,53	NA
81	Inovasi Pelayanan Publik yang tereplikasi	Jumlah Inovasi	2	2	2	2
82	Jumlah Kerjasama Pemerintahan dan Non Pemerintahan	Jumlah Kerjasama	36	38	49	150
4.02	**Pengawasan**					
83	Nilai SAKIP		B	BB	BB	BB
4.03	**Perencanaan**					
84	Tingkat konsistensi antar dokumen perencanaan	%	100	100	100	95,09
4.04.	**Keuangan**					
85	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
86	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah		0,47	0,49	0,52	0,5
4.05	**Kepegawaian dan Diklat**					
87	Indeks Profesionalisme ASN		0,65	0,67	0,7	0,54
4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**					
88	Akreditasi BPSDM	Level Akreditasi	B	A	A	B
89	Cakupan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi ASN	%	10,43	11,35	11,42	11,85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun			Capaian Tahun 2019
			2019	2020	2021	
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**					
90	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (lokus NTB)	%	18	21	24	21,00

Sumber: Evaluasi Program Prioritas RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023

BAB VIII PENUTUP

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran", mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Organisasi Perangkat Daerah dan antar Organisasi Perangkat Daerah, tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang.

Perencanaan Tahun 2021 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun ketiga dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2019-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjaringan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.

2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2021.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

LAMPIRAN I

HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD/RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat : Jln. Flamboyan No. 2 Mataram Kode Pos 83126, Telepon/Faksimile (0370) 631581
Email : bappeda@ntbprov.go.id Website : bappeda.ntbprov.go.id

BERITA ACARA

HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD/RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NOMOR : 050/ 1291 /06-Bappeda

Pada Hari Jumat Tanggal Sepuluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah diselesaikan proses Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Rancangan Awal RKPD/Renja Perangkat Daerah, untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.

Hasil dari pemetaan ini, sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Berita Acara ini, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pemetaan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/739/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023, dan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2023;
2. Hasil Pemetaan ini sebelumnya telah dibahas antara Perangkat Daerah dan Bidang Teknis Bappeda pada tanggal 12 s.d 13 Maret 2020 sesuai surat undangan Bappeda Provinsi NTB Nomor 005/765/06-Bappeda tanggal 10 Maret 2020;
3. Hasil Pemetaan ini tidak merubah (mengurangi atau menambah) nomenklatur program, indikator dan target yang terdapat pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023;

4. Hasil Pemetaan ini menjadi bahan acuan dalam Penyusunan RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2021;

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 10 April 2020

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi NTB,

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI., MTP
NIP. 19610810 199003 1 011

Mewakili Perangkat Daerah dalam Penyusunan Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan Rancangan Awal RKPD/Renja Perangkat Daerah Tahun 2021:

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	ULFAH SUNIWANTI	Dinas Pariwisata	Kas. Program	
2.	MUHAMMAD YANI	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Kasubag Program	
3.	ZAINULLAH.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kasubag Progra	
4.	H. Muhtadi Hairi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekdis	
5.	M. ISMED .N	Dinas Kesehatan	Kasubag Program	
6.	H. Supratman Muslim	Dinas Sosial	Sekdis	
7.	Laksmy Fortuna	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kasubag Prog	

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
8.	ARIPIN, ST	Dinas Perumahan dan Permukiman	KASUBAG PROGRAM	
9.	SAMSUDIN, S.Hut, M.Si	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKDIS	
10.	Muslim.	Bappeda	Kabid. Ekonomi	
11.	HUSAILID, M.Si	Bappeda	Kabid. Sosial	
12.	H. Agus Hasmi, SH	Bappeda	Kabid. PWPI	

HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RANCANGAN AWAL RKPD/RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas atau insentif	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah fasilitas atau insentif
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas atau insentif	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas atau insentif	1	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Peningkatan Kerjasama antara Dunia Usaha	101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Peningkatan kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	101	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rasio kebijakan yang diterbitkan dengan yang harus dibuat	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	102	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rasio kehadiran dengan undangan yang disebar	Peningkatan Promosi Dalam Daerah	101	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rasio kehadiran dengan undangan yang disebar	Penyelenggaraan Pameran Investasi	101	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Event yang diikuti
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Penanaman Modal, Infrastruktur dan Perhubungan	101	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanaman modal lintas kab/kota	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan yang lingkupnya lintas kab/kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor ESDM, Lingkungan Hidup dan Kehutanan	101	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	101	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan	Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sektor Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan	101	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan		102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan		102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan		102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengaduan	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Dokumen Pengaduan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu		4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase capaian lanyanan perizinan dan nonperizinan		102	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kewenangan provinsi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah layanan yang menjadi kewenanagan provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi investasi dengan target daerah	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi investasi dengan target daerah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal	101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Realisasi Investasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi investasi dengan target daerah	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dipantau, dibina dan diawasi	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Realisasi investasi dengan target daerah	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	101	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan bermasalah yang difasilitasi	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang diawasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rasio izin investasi yang ditindaklanjuti	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	101	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelearasan program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentramn masyarakat	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Operasi Penertiban, dan Turjawali

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan kegiatan pengatuan, penjagaan, pengawalan dan patroli (TURJAWALI)	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Operasi wibawa pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Kegiatan Operasi Pekat
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pengamanan/pengawaln pejabat (Gub/Wagub), Tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se-NTB	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pelatihan pengendalian keamanan dan kemnyamanan lingkungan	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Satlinmas Yang Terlatih, dan jumlah satlinmas yang mengikuti gelar pasukan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Personil Satpol PP yang mengikuti Gelar Pasukan, dan Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Bimbingan teknis petugas khusus wisata halal	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	6	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah POLPP yang menjadi Tenaga Fungsional SATPOL PP
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	7	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah MoU

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Trantibmas	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarpras Satpol PP dan Satlinmas yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan NTB, Jumlah Masyarakat yang mendapat pembekalan kewaspadaan dini, Jumlah Pemuda/Pelajar yang mengikuti penyuluhan bahaya Narkoba dan Jumlah Masyarakat yang mengikuti penyuluhan perda/pergub
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di mayarakat	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pembinaan masyarakat patuh Perda/Perkada melalui pendekatan kearifan lokal	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pengawasan, pengamanan dan penangann asset vital Pemda di luar dan dalam daerah	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Rapat pengawasan dan penegakan perda Provinsi dan Kab/Kota se-NTB	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Pembinaan, pengawasan dan peyuluhan terhadap aparatur lingkup Pem Prov NTB	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegatan Pengawasan Aparatur
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamongpraja	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub
KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pembangunan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Luas bangunan yang terbangun	3	Pengembangan Rumah Sakit	Luas bangunan yang terbangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlat alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlat alat kesehatan/kedokteran yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlat jenis obat yang tersedia	12	Pengadaan prasarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlat jenis obat yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pengadaan Ambulance/mobil jenazah	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terbeli	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah ambulance/mobil jenazah yang terbeli
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pengadaan meubelair rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah meubelair yang tersedia	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah meubelair yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% ketersediaan sarana & prasarana RS sesuai standar	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pneumatic tube yang terbeli	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Pneumatic tube yang terbeli
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat - alat yang terkalibrasi /terpelihara	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat - alat yang terkalibrasi /terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perlengkapan RS yang terpelihara	19	Pemeliharaan prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah perlengkapan RS yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana Rumah Sakit yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah instalasi limbah RS yang terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah instalasi limbah RS yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% cakupan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% cakupan layanan kesehatan masyarakat	Sub Keg. Pelayanan ambulan dan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/masyarakat miskin	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien tidak mampu/maskin yang terlayani layanan ambulan	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah pasien tidak mampu/maskin yang terlayani layanan ambulan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% cakupan layanan kesehatan masyarakat	Sub Kegiatan . Operasional rumah singgah bagi keluarga pasien tidak mampu	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien tidak mampu/maskin yang terlayani rumah singgah	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah pasien tidak mampu/maskin yang terlayani rumah singgah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% cakupan layanan kesehatan masyarakat	Sub. Keg. Biaya Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Medis dan B3	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Limbah Medis dan B3 yang diangkut dan dikelola	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Limbah Medis dan B3 yang diangkut dan dikelola
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% cakupan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah korban bencana yang tertangani	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah korban bencana yang tertangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penanganan penyakit menular	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang terperiksa CD4,Viral Load &MESO ARV	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah orang yang terperiksa CD4,Viral Load &MESO ARV
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase realisasi target pendapatan	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pendapatan BLUD	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pendapatan BLUD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai akreditasi	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen yang tersusun	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (akreditasi)	Jumlah dokumen yang tersusun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai akreditasi	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen yang tersusun	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (re akreditasi)	Jumlah dokumen yang tersusun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan operasi katarak	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang dioperasi katarak	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang dioperasi katarak
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan sunatan masal	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang yang di Khitan	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang di Khitan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSU Provinsi	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penduduk Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pasien rujukan kasus gizi buruk/stunting	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien gizi buruk/stunting yang di layani	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah pasien gizi buruk/stunting yang di layani

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasaranan sesuai standar	Pembangunan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah unit gedung yang terbangun	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit gedung
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasaranan sesuai standar	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat kesehatan yang tersedia	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit alkes
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasaranan sesuai standar	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis obat yang tersedia	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Jenis obat
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasaranan sesuai standar	Pengadaan mebeleur rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah meubelair yang tersedia	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit Meubelair
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasaranan sesuai standar	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah barang penunjang operasional RS yang tersedia	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah unit
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat kesehatan yang terpelihara/terkalibrasi	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit terpelihara/terkalibrasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perlengkapan RS yang terpelihara	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit gedung terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah instalasi limbah RS yang terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana yang terpelihara sesuai standar	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah meubelair RS yang terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah unit terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Kesehatan Jiwa	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang tertangani	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah orang yang terlayani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Kesehatan Jiwa	Peningkatan kesehatan masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang dengan masalah kesehatan jiwa yang tertangani	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang yang terlayani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Kesehatan Jiwa	Peningkatan kesehatan masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah orang dengan kecanduan NAPZA yang tertangani	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah orang yang terlayani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Kesehatan Jiwa	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah orang yang terlayani

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kunjungan Kesehatan Jiwa	Peningkatan kesehatan masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah siswa SMP dan SMA dilakukan pemeriksaan psikometri	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumah orang yang terlayani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLUD	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendapatan BLUD	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pendapatan BLUD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Akreditasi	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai dari masing-masing standar	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai dari masing-masing standar
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RSJ Mutiara Sukma	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Akreditasi	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategi	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LKJIP OPD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan alat listrik dan elektronik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	RS Manambai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Pembangunan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah unit Bangunan yang terbangun	3	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah unit Bangunan yang terbangun (Gedung Diklat, Workshop, anak & Gedung VIP)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alatnkesehatan/kedokteran yang tersedia	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alatnkesehatan/kedokteran yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis obat yang tersedia	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana rumah sakit yang sesuai standar	Pengadaan meubelair rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Meubeler yang tersedia	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Meubeler yang tersedia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan Prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat-alat terkalibrasi/terpelihara	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat terkalibrasi/terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan Prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah mobil ambulance/mobil jenazah terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah mobil ambulance/mobil jenazah terpelihara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan Prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah gedung yang terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah gedung yang terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan Prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah rumah sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah instalasi limbah terpelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah instalasi limbah terpelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase realisasi target pendapatan	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pendapatan BLUD	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pendapatan BLUD
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Standar Akreditasi	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Standar Akreditasi	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai Standar Akreditasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RS Manambai	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai Standar Akreditasi	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Standar Akreditasi	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Nilai tindak lanjut rekomendasi akreditasi perencanaan perbaikan strategi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Inspektorat	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pelatihan pengembangan APIP	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Audit Kinerja	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Audit	1	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Audit Kinerja
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Joint Audit	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Audit	1	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Joint Audit
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Reviu Atas Laporan Keuangan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Reviu

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Reviu Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Reviu Pengelolaan Anggaran dan PBJ	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Reviu LKjIP Pemda	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Reviu Renja	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Reviu (RKPD)	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Review	2	Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Review
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA)	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan Larwasda
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Laporan	3	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Tim, Jumlah Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Evaluasi SAKIP PD	101	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Pencegahan Korupsi	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	102	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen	1	Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah OPD Yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan Tertentu/ Khusus
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Monev Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan BOS Pendidikan Dasar	102	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	- Jumlah Desa yang di Evaluasi, - Jumlah Sekolah Menengah yang di Evaluasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	- Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD , - Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kab/Kota	102	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Review	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang di Evaluasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	102	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Telaahan Sejawat	Telahaan Sejawat	101	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kegiatan
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Pencegahan Korupsi	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat Waktu, - Persentase PD yang Meningkat Predeksi ZI	Kegiatan Pencegahan Korupsi	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen	1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Tim, - Jumlah Dumas yang tertangani
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Pencegahan Korupsi	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat Waktu, - Persentase PD yang Meningkat Predeksi ZI	Kegiatan SABER PUNGLI	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen	1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Tim, - Jumlah Kegiatan Sosialisasi, -Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi,- Jumlah Dumas yang tertangani
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Pencegahan Korupsi	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat Waktu, - Persentase PD yang Meningkat Predeksi ZI	Pengawalan dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D)	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen	1	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	- Jumlah Tim, -Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi,- Jumlah Dumas yang tertangani
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persenase PD yang Meningkat Akuntabilitas Kinerjanya	Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD)	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Asistensi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD Terdefinisi, Terkelola dan Terukur	Asistensi Penyusunan LKjIP Pemda	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Asistensi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD Terdefinisi, Terkelola dan Terukur	Penilaian, Pembinaan dan Pendampingan Perangkat Daerah (PD)	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Asistensi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD Terdefinisi, Terkelola dan Terukur	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Asistensi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD Terdefinisi, Terkelola dan Terukur	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Evaluasi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Peningkatan Level Maturitas OPD Terdefinisi, Terkelola dan Terukur	Evaluasi Pengarusutaman Gender (PUG)	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Evaluasi	2	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	1	INSPEKTORAT DAERAH	Inspektorat	Program Pencegahan Korupsi	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	- Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tepat Waktu, - Persentase PD yang Meningkat Predeksi ZI	Pembangunan Zona Integritas Menunu WBK/WBBM pada PD	102	Asistensi dan Pendampingan	Jumlah Dokumen Asistensi	2	Asistensi dan Pendampingan	- Jumlah Tim, -Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendudu yang melakukan pendaftaran	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	101	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Jenis Dokumen kebijakan teknis Kependudukan dan pendukungnya dalam satu tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendudu yang melakukan pendaftaran		101	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	2	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Persentase kepemilikan dokumen bagipenduduk rentan adminduk
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendudu yang melakukan pendaftaran		101	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	3	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase pendudu yang melakukan pendaftaran		101	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase Pelayanan Kependudukan	4	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	101	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen kebijakan teknis Pencatatan sipil dan pendukungnya dalam satu tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil		101	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana tata kelola pelaksanaan pendaftaran penduduk skala provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil		101	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	3	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil		101	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Jenis Dokumen Catatan Sipil dan pendukungnya	4	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah dukungan penyelenggaraan bidang pencatatan sipil
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		101	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kab/kota melaksanakan dukcapil go digital	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Urusan Administrasi Kependudukan Di Provinsi	Jumlah SOP terbentuk sub kegiatan dimaksud

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		101	Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kab/kota melaksanakan dukcapil go digital	2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah SOP terbentuk sub kegiatan dimaksud
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kab/kota melaksanakan dukcapil go digital	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dukungan penyelenggaraan urusan adminduk
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	Sosialisasi kebijakan kependudukan	102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	2	Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah sosialisasi ke media cetak dan media lainnya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah pemuka masyarakat terbina gerakan Indonesia sadar adminduk
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	4	Koordinasi Berkala Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah kunjungan ke calon lembaga pengguna data kependudukan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna pemanfaatan data kependudukan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	6	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah kerjasama dengan ormas dan perguruan tinggi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		102	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	7	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Persentase permasalahan urusan adminduk terselesaikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		103	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pendokumentasian Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumentasi penyelenggaraan urusan adminduk
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	Bimtek tenaga pengelola SIAK	103	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	2	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase aparat dukcapil terbina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		103	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	3	Supervisi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan Provinsi	Persentase data kependudukan tingkat kab/kota terverifikasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	Monitoring dan Evaluasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	4	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah monev penyelenggaraan urusan Adminduk dalam setahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota		103	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	5	Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah monev penyelenggaraan urusan Adminduk dalam setahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	101	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Profil Kependudukan	1	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah tabel atau grafik data kependudukan tk Provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rasio pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota		101	Penyediaan Profil Kependudukan	Persentase Penyediaan Profil Kependudukan	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA	Profil Desa	101	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA	Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	101	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa	101	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA	Peningkatan kapasitas pendamping Desa	101	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PERSENTASE KERJASAMA DESA	Pengendalian Penyusunan Produk Hukum Desa	101	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Penguatan kapasitas Lembaga Adat	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat (KPM)	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Hukum Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
									Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Penguatan Kapasitas Pokjanal Posyandu	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bulan bakti gotong royong masyarakat	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Bimtek manajemen badan usaha milik desa	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Kawasan Ekonomi Perdesaan	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Penguatan Pengelola Lembaga Ekonomi Desa	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Gelar TTG Nasional	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PERSENTASE PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peningkatan Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Desa	101	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan rencana kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan rencana kerja SKPD (RKA/DPA/RKAP/DPPA)	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa surat menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa kebersihan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan alat tulis kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan alat listrik dan elektronik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan makanan dan minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		2	Penambahan Ruang Kelas Baru	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		9	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		13	Pembangunan Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		15	Pembangunan Fasilitas Parkir	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		16	Pembangunan Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		33	Rehabilitasi Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		35	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		36	Pengadaan Mebeluer Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		37	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		40	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		42	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		43	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		44	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		47	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		3	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		5	Pembangunan Ruang Laboratorium	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		9	Pembangunan Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		11	Pembangunan Fasilitas Parkir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		12	Pembangunan Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		13	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		14	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		16	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		7	Pembangunan Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		10	Pembangunan Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		12	Pembangunan Ruang Laboratorium	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		14	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		16	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		17	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		26	Rehabilitasi Kantin Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		27	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		29	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		30	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		31	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		32	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		33	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak Untuk Tunadaksa (D)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		34	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		35	Pengadaan Mebeluer Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		36	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		41	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		43	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			103	Pengelolaan Pendidikan Khusus		51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi		2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			101	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			101	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			102	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			102	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			102	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		3	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		2	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		3	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		4	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		5	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		6	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			101	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		7	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3	Pengembangan Rumah Sakit	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		2	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			102	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional		1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			102	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional		2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			101	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			102	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			103	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5	Pembangunan Bendungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8	Pembangunan Unit Air Baku	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9	Pembangunan Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		12	Pembangunan Kanal Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15	Pembangunan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		16	Pembangunan *Check Dam*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		17	Pembangunan *Breakwater*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		18	Pembangunan *Seawall* dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		20	Rehabilitasi Bendungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		23	Rehabilitasi Unit Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		27	Rehabilitasi Kanal Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30	Rehabilitasi Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		31	Rehabilitasi *Check Dam*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		32	Rehabilitasi *Breakwater*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		34	Peningkatan Tanggul Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		37	Peningkatan Kanal Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		40	Peningkatan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		41	Peningkatan *Check Dam*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		42	Peningkatan *Breakwater*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		44	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		45	Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		46	Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		47	Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		58	Operasi dan Pemeliharaan *Check Dam*	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall Dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Pembangunan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9	Peningkatan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		4	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		6	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		8	Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		9	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		10	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		12	Uprating Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		14	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		16	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		17	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		18	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		3	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		5	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		7	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			101	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		3	Penyediaan Tangki Septik	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		4	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		6	Penyediaan Prasarana IPLT	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		7	Penyediaan IPALD	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		8	Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		9	Penyediaan Prasarana Sambungan Rumah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		10	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		11	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		12	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		3	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		4	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		5	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi		6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		4	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		3	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		5	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		6	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		7	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif Kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		8	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		9	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			101	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan *****)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		3	Pengelolaan Leger Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		5	Pembangunan Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		8	Rekonstruksi Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		9	Rehabilitasi Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		10	Pemeliharaan Berkala Jalan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		11	Pemeliharaan Rutin Jalan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		12	Pembangunan Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		13	Pembangunan *Flyover*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		14	Pembangunan *Underpass*	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		15	Pembangunan Terowongan/Tunnel	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		16	Penggantian Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		17	Pelebaran Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		18	Rehabilitasi Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		2	Penyiapan Intsruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		5	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		3	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		4	Penyusunan data dan informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			102	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		3	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		2	Sistem Informasi Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		3	Pengelolaan Kawasan Khusus *****)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			101	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		2	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		3	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		5	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			102	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		6	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			104	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			104	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			101	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		6	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		7	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		2	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			103	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		1	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		3	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		5	Pengelolaan Risiko Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		7	Penanganan Pascabencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		4	Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			104	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			104	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			104	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			101	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		1	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			101	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		2	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			101	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			101	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		4	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN			101	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		5	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Kebakaran	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			101	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			101	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		1	Penyediaan Permakanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		2	Penyediaan Sandang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		4	Penyediaan Alat Bantu	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		1	Pengasuhan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		2	Penyediaan Makanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		3	Penyediaan Sandang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti		12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		1	Penyediaan Permakanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		2	Penyediaan Sandang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		4	Penyediaan Alat Bantu	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		9	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti		12	Pemulasaraan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		1	Penyediaan Permakanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		2	Penyediaan Sandang	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti		10	Pemulangan ke Daerah Asal	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		1	Penyediaan Permakanan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		2	Penyediaan Sandang	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti		10	Pemulangan ke Daerah Asal	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			101	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		1	Pengangkatan Anak antar WNI	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			101	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		2	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			102	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		1	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			102	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		1	Penyediaan Permakananan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		2	Penyediaan Sandang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		5	Pelayanan Dukungan Psikososial	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			102	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			103	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah		1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			104	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			101	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			101	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Pelayanan Antar Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			101	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			101	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			102	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			102	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			103	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			103	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			103	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		3	Job Fair/Bursa Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		4	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			105	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			106	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			101	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			101	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota		2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			101	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi		2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi		3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi		4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			103	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			103	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		2	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			103	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		3	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			103	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		4	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penguatan Kelembagaan PUG	101	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang sudah melembagakan PUG	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Koordinasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penguatan Kelembagaan PUG	101	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang sudah melembagakan PUG	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Koordinasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penguatan Kelembagaan PUG	101	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang sudah melembagakan PUG	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Penguatan Kelembagaan PUG	101	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang sudah melembagakan PUG	4	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Manajemen Usaha Bagi Perempuan	102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Sosialisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Advokasi Politik Perempuan	102	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Persentae Perempuan Anggota Legislatif	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Temu PUSPA Daerah	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan yang Dibina	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Hari Ibu, Hari Kartini, HUT Dharma Wanita, HKG PKK	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan yang Dibina	2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Layanan yang Dibina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Pendampingan Korban Kekerasan	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	UPTD yang mampu melakukan penanganan korban scr komperhensif	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15 - 64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	Pendampingan dan Penangan Kasus	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	UPTD yang mampu melakukan penanganan korban scr komperhensif	3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan bagi korban kekerasan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Pembangunan Ketahanan Keluarga	101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan Bintek tentang PUG	2	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Edukasi KG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		101	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Kegiatan di Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga layanan yang terlatih
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		102	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Jejaring yang terbangun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		103	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan yang terbentuk
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Data Gender dan Anak	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	101	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Data Gender dan Anak	1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Dokumen Data Gender dan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Advokasi Percepatan KLA Bagi Kabupaten/ Kota	101	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah maupan non pemerinath dan dunia usaha yang melembagakan PHA	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pesert advokasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Temu / Forum Anak Prov. NTB	101	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pemerintah maupan non pemerinath dan dunia usaha yang melembagakan PHA	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta koordinasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Advokasi Pola Asuh Anak dan Remaja	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	101	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Koordinasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	103	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan yang di bentuk	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Anak Usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	103	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan yang di bentuk	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta koordinasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	Bimtek tentang PUP bagi tenaga Pendidik	101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	7	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Peserta Advokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	Pendewasaan Usia Perkawinan ke Masyarakat	101	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	8	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Sekolah yang Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengembangan Posyandu - BKB	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (TFR)	Pembekalan bagi Penyuluh tentang PUP	102	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Hasil Pemetaan	4	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Model Strategi yang dikembangkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (UnmeetNeed)	Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat	101	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Design Program KIE yang dikembangkan	8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi Konseling yang dikembangkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang memiliki BADUTA yang terpapar Promosi 1000 HPK	Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (KRR)	101	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PIK-R yang memperoleh pembinaan Memperoleh pembianan Genre	6	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah pengelola PIK-R yang memeperoleh bimbingan teknis
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang memiliki BADUTA yang terpapar Promosi 1000 HPK	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	101	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga yang memperoleh pembinaan tentang Kesejahteraan Keluarga	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Kader yang mendapat bimbingan tentang pengasuhan 1000 HPK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Jumlah Keluarga yang memiliki BADUTA yang terpapar Promosi 1000 HPK	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	102	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan yang diberdayakan	4	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Kader yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan tentang KIBA

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PRESENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (%)	Pengembangan pemuda pelopor	101	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PRESENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (%)	Penguatan kewirausahaan bagi pemuda	101	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda; 2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PRESENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (%)	1. Pengembangan keterampilan pemuda 2. Peningkatan kapasitas pemuda	101	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PRESENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (%)	Peningkatan kapasitas pemuda (Paskibraka)	101	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	4	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PRESENTASE PEMUDA BERPRESTASI DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL (%)	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	101	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Peningkatan sarana dan prasarana Keolahragaan	101	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pemuda berprestasi di tingkat Regional, Nasional dan Internasional (Orang)	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	102	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh (medali)	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga *Multi Event* dan *Single Event* Tingkat Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	102	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh (medali)	2	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	102	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh (medali)	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam *Multi Event* dan *Single Event*	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah	103	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (cabor)	1	Seleksi Atlet Daerah	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah	103	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (cabor)	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0	Pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah	103	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (cabor)	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		103	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (cabor)	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		103	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina (cabor)	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		104	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina (org)	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		104	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina (org)	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		104	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina (org)	3	Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan altlet berprestasi (%0		104	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina (org)	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)	Peningkatan kapasitas pemuda	101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Perlatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)	Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan	101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Pemuda dan Olahraga		4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan anggota pramuka yang berprestasi (%)		101	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (org)	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang dihasilkan	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTKD Makro Yang Dihasilkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang dihasilkan	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen PTKD Mikro Yang Dihasilkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga Kerja	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang dihasilkan	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro Yang Dihasilkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi,	101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Peningkatan Kapasitas Calon Tenaga Kerja ke Luar Negeri	101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang magang ke Luar Negeri
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri	101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta yang mengikuti seleksi Pemagangan ke Luar Negeri
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Sosialisasi Asean Skills Compatation (ASC)	101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Siswa SMK yang mengikuti sosialisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	101	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KALPK)	102	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Terakreditasi	1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	102	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Terakreditasi	1	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi	104	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi yang termonitor	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi yang termonitor
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	101	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja	4	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Pencari Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	103	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Lowongan kerja yang terinformasikan	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Lowongan kerja yang terinformasikan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Yang Tertangani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	3	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah PMI ke Luar Negeri Yang Terlayani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Ex. TKI Purna	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	4	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah eks TKI purna yang diberdayakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	106	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perijinan TKA yang Terlayani	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perijinan TKA yang terlayani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Padat Karya Produktif	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	4	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Padat Karya Infrastruktur	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	4	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	104	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang Diberdayakan dan Dilindungi	4	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Dibina	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan Yang Dibina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Dibina	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pekerja Yang Dibina dan Diuji Lingkungan Sosial dan Kesehatan Kerjanya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	Pemberdayaan Ketenagakerjaan pada Peringatan Hari Buruh Internasional	102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Dibina	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kasus Perburuhan Yang tertangani

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	Pengembangangan Kelembagaan Peningkatan Efektifitas Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit)	102	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Dibina	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan Yang Diberdayakan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	103	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah UMP/UMK yang Disahkan	1	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK	Jumlah UMP/UMK Yang Disahkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	1	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Dibina dan Diawasi Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Advokasi Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan Norma K3	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diadvokasi Peraturan Perundang-undangan Norma K3
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pemetaan Kasus Ketenagakerjaan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Dokumen Hasil Pemetaan Kasus
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Temu Teknis Konsultasi Penegakan Hukum	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah koordinasi dan advokasi dalam rangka penegakan hukum
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Tertangani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	2	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Tertangani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah perusahaan yang didata obyek keselamatan dan kesehatan kerjanya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pemeriksaan CTKI ke Tempat Penampungan	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah CTKI Yang Diperiksa di Tempat Penampungan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Perusahaan Pulau Sumbawa	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Diawasi dan Diuji Sarana K3nya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CPMI	101	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang Diawasi	3	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah PPTKIS Yang Diawasi dan Diperiksa di Tempat Penampungan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Naskah Kerjasama Antar Daerah (NKSAD)	101	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen NKSAD	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Dokumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)	101	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KK Calon Transmigran	5	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah KK Calon Transmigran
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigran di UPT Bina	101	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigran yang Diberdayakan di UPT Bina	1	Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran Yang Diberdayakan di UPT Bina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	101	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigran yang Diberdayakan di UPT Bina	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Dokumen Kegiatan Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi SK HPL dan Izin Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Bimtek Kewirausahaan	101	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigran yang Dibimtek	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran Yang Dibimtek
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Penempatan Transmigrasi	Bimtek Pengolahan Hasil Pertanian	101	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Transmigran yang Dibimtek	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Transmigran Yang Dibimtek

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	4	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan alat listrik dan elektronik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Sosial	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	-	101	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin UGB (Undian Gratsi Berhadiah) dan PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) lintas Kab/Kota yang diterbitkan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Rekomendasi Undian Gratis Berhadian (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diterbitkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di tingkatkan kapasitas	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Potensi PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di tingkatkan kapasitas	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Potensi TKSK kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di tingkatkan kapasitas	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Potensi LK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Pemberdayaan Karang Taruna	102	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang di tingkatkan kapasitas	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Volume potensi LKS kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	Pelayanan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang/Traffiking, pekerja migran bermasalah dan orang terlantar	101	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah KTK-PMB (Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah) yang dipulangkan ke daerah asal	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Pekerja Migran Bermasalah Korban Tindak Kekerasan (KTK-PMB) yang Terfasilitasi Pemulangan ke Daerah Asal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Penyandang Disabilitas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	2	Penyediaan Sandang	Tersedianya kebutuhan dasar Sandang bagi Penyandang Disabilitas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kapasitas kebutuhan dasar Asrama ramah difabel bagi Penyandang Disabilitas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	4	Penyediaan Alat Bantu	Volumen kebutuhan dasar Aksesabilitas Alat Bantu Penyandang Disabilitas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Volumen kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Volumen Penyandang Disabiilitas yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Volumen Penyandang Disabiilitas yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Volume Penyandang Disabilitas yang terlayani pembuatan adminduk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Volumen Penyandang Disabilitas yang dapat menggunakan layanan faskes dan fadik
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Volumen Penyandang Disabilitas yang dapat mengkases layanan keluarga dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	101	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumah penyandang disabilitas terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti milik Provinsi	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Volumen Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	1	Pengasuhan	Kapasitas layanan pengasuhan AT dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	2	Penyediaan Makanan	Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	3	Penyediaan Sandang	Volume kebutuhan dasar Sandang bagi Anak Terlantar dalam Panti

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Volumen kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Volumen Anak Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dalan Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Volumen Anak Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	8	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Volume Anak Terlantar yang terlayani pembuatan adminduk dalam Panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Volumen Anak Terlantar yang dapat menggunakan layanan faskes dan fadik
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Volumen Anak Terlantar yang dapat mengkases layanan identitas keluarga dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Volumen Anak Terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar di Balai sosial	102	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Jumah Anak Terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Kapasitas ketersediaan Layanan Pengasuhan Keluarga Penganti kepada Anak Terlantar dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Kapasitas ketersediaan permakanan bagi Lansia Terlantar dalam panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	2	Penyediaan Sandang	Kapasitas ketersedian sandang bagi Lansi Terlantar dalam Panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	4	Penyediaan Alat Bantu	Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Volumen Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Volumen Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas	Volume Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	9	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Volume Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Volume Lansia terlantar yang dapat mengkases layanan keluarga dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Volumen Lansia terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	103	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Jumah LANSIA terlantar yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	12	Pemulaksaraan	Kapasitas ketersediaan layanan pemulaksaraan dalam panti bagi Lansia terlantar
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Kapasitas ketersediaan permakanan bagi GEPENG dalam panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	2	Penyediaan Sandang	Kapasitas ketersedian sandang bagi GEPENG dalam Panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kapasitas ketersediaan Asrama/wisma GEPENG dalam panti pemerintah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Volume ketersediaan Layanan kesehatan dalam panti pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Volumen GEPENG yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Volume GEPENG yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Volume GEPENG yang dilatih keterampilan dasar dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Volume GEPENG dalam panti pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Volume GEPENG dalam panti pemerintah yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	104	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	Jumah Gepeng yang diberikan pemenuhan kebutuhan dasar dalam Panti milik Provinsi	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume GEPENG yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	1	Penyediaan Permakanan	Kapasitas ketersediaan permakanan bagi PMKS (WRSE,Tuna Susila,BWBLP,dalam panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	2	Penyediaan Sandang	Kapasitas ketersedian sandang bagi GEPENG dalam Panti Pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	3	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Kapasitas ketersediaan Asrama/wisma GEPENG dalam panti pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	4	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Volume ketersediaan Layanan kesehatan dalam panti pemerintah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Volumen GEPENG yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	6	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Volume GEPENG yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	7	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Volume GEPENG yang dilatih keterampilan dasar dalam Panti
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Volume GEPENG dalam panti pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	9	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Volume GEPENG dalam panti pemerintah yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di Balai Sosial	105	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	Jumah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberikan pelayanan dan rehabilitas dalam Panti milik Provinsi	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Volume GEPENG yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS Lainnya	102	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Data Kemiskinan yang termutakhirkan	1	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin Daerah cakupan provinsi yang terverfikasi dan validasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Pemberdayaan Fakir Miskin	102	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Data Kemiskinan yang termutakhirkan	2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (%)	Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana Alam	101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Urusan Provinsi yang tertangani	1	Penyediaan Permakananan	Kapasitas ketersediaan logistic (permakanan) korban bencana Alam dan Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (%)	Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana Alam	101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Urusan Provinsi yang tertangani	2	Penyediaan Sandang	Kapasitas ketersediaan logistic (sandang) korban bencana Alam dan Sosial
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (%)	Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Urusan Provinsi yang tertangani	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kapasitas ketersediaan Daya Tampung RPTC korban bencana Alam dan Sosial

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (%)	Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Urusan Provinsi yang tertangani	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Volume kelompok rentan (Perempuan, Lansia, Anak,PD dan PMB) yang tertangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM JAMINAN SOSIAL	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi (%)	Jaminan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial	101	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Urusan Provinsi yang tertangani	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Volume LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) (%)	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlan TMP dan TPMN kewenangan Provinsi yang di tingkatkan umur fungsional	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) (%)	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlan TMP dan TPMN kewenangan Provinsi yang di tingkatkan umur fungsional	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan pemeliharaannya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Dinas Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makan Pahlawan Nasional (TMPN) (%)	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	101	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlan TMP dan TPMN kewenangan Provinsi yang di tingkatkan umur fungsional	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Kapasitas pengamanan TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan Rencana Kerja SKPD**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**1**	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan Rencana Kerja SKPD**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**2**	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**4**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**5**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Belanja Tidak Langsung**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**6**	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**12**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**13**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**15**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Makanan dan Minuman	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**17**	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**18**	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**21**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**33**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**35**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pembibitan ternak sapi bali Serading	**103**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Perbaikan mutu genetik ternak dan HMT**	3	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah ternak
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pembibitan HMT Serading	**105**	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**	**Perbaikan mutu genetik ternak dan HMT**	4	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah produksi Benih HMT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pembibitan HMT Serading		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Tersediaan bibit/benih ternak dan HMT**	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah produksi Benih HMT

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya jumlah wilayah sumber bibit ternak**	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**					2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit yang di bina
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Meningkatnya jumlah wilayah sumber bibit ternak**	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**					2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah wilayah sumber bibit yang di bina
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Meningkatnya bibit ternak dan HPT yang berkualitas**	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lainnya	Jumlah ternak yang di distribusikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**					2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah HPT yang di produksi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pengembangan Pakan Lokal		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**	**Meningkatnya bibit ternak dan HPT yang berkualitas**	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah HPT yang di produksi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pembuatan mani beku		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Meningkatnya mutu bibit ternak**	1	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah straw/semen beku yang di produksi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Meningkatnya mutu bibit ternak**	2	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah sampel straw/semen beku yang di uji
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH**	Peningkatan Peran Balai Laboratorium Veteriner dan RSH	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Meningkatnya Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan**	5	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Jumlah rumah sakit yang dipelihara
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH**	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Meningkatnya Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan**	6	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pos Kesehatan Hewan yang dipelihara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Pembangunan Gedung Kantor	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		7	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		7	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH**	Peningkatan Pengelolaan RPH	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Menigkatnya jumlah pemotongan hewan yang ASUH**	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dipelihara
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Penyediaan Prasarana produksi pertanian/perkebunan	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Pengelolaan Lahan dan Air	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Pembangunan Gedung Kantor	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**		10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**102**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**102**	**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		2	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**4**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**101**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		1	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			101	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			101	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			102	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			102	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			102	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi		3	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			103	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		1	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	103	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan tipe B	103	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		3	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**4**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**104**	**Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**		1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**4**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**104**	**Sertifikasi Persyaratan Teknis kesehatan Masyarakat Veteriner**		2	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**4**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**105**	**Kesejahteraan Hewan**		1	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**4**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**105**	**Kesejahteraan Hewan**		2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pertanian/perkebunan	**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	**5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pertanian/perkebunan	**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**		4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**6**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		1	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**6**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**6**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**		3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**101**	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**		1	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**101**	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**		2	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian dan perkebunan	**102**	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**		1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	**102**	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**		2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**103**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**103**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**		**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**103**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		3	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Pertanian dan Perkebunan**	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	**7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	**103**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**		4	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Terjaminnya produk pangan asal hewan yang ASUH**	Pengawasan Hewan Qurban	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Menigkatnya jumlah pemotongan hewan yang ASUH**	8	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dipelihara
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	**101**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah PHMS yang dikendalikan**	1	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kasus yang dikendalikan : (Anthrax, Rabies, SE, Brucellosis dan AI)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	**101**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah PHMS yang dikendalikan**	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sertifikat pembebasan Hog Cholera

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	**101**	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah PHMS yang dikendalikan**	3	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Persentase pengandalian populasi HPR
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengamatan Penyakit Hewan	**101**	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Terpetanya situasi PHM**	2	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Dokumen
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B	**101**	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Terpetanya situasi PHM**	2	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Dokumen
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	**101**	**Kesejahteraan Hewan**	**Meningkatnya standar RPH**	1	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah Dokumen NKV (3 sertfikat)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	**101**	**Kesejahteraan Hewan**	**Meningkatnya standar RPH**	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	Jumlah dokumen
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan Hewan Qurban	**101**	**Kesejahteraan Hewan**	**Meningkatnya standar RPH**	2	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	Jumlah dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Morbiditas penyakit hewan menular dan mortalitas ternak rendah**	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Persentase kejadian penyakit hewan menular yang dikendalikan**	4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jenis pelayanan kesehatan hewan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Morbiditas penyakit hewan menular dan mortalitas ternak rendah**	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan	**101**	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Persentase kejadian penyakit hewan menular yang dikendalikan**	4	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jenis pelayanan kesehatan hewan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	**3**	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	**Tertibnya peredaran obat hewan di masyarakat**	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan**	**Terpantuanya peredaran obat hean**	2	Pengawasan Pelaksanaan Izin usaha pengecer obat hewan	Jumlah distributor obat hewan yang diawasi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	**101**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Terpantaunya pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan**	1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Dokumen hasil pengujian Produk Pangan Asal Hewan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	**101**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Terpantaunya pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan**	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha yang diawasi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	**101**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	Terpantaunya pemasukan dan pengeluaran produk asal hewan	3	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	**101**	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Benih Ternak, Produksi Pakan Ternak, Produksi Limbah Pakan Pertanian**		Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah orang/peternak yang dibimbing
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Pertumbuhan PoulasiTernak**	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	**101**	**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**	**Meningkatnya Produksi Benih Ternak, Produksi Pakan Ternak, Produksi Limbah Pakan Pertanian**		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah kelompok peternak yang dibimbing
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	**101**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah lembaga/kelompok yang dibina	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi terbentuk

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian	**101**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	Jumlah lembaga/kelompok yang dibina	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah kelompok yang dibina
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	**101**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah lembaga/kelompok yang dibina**	1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi terbentuk
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	**101**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah lembaga/kelompok yang dibina**	2	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah kelompok yang dibina
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	**101**	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah lembaga/kelompok yang dibina**	3	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Jumlah dokumen
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Meningkatnya kualitas produk dan pemasaran hasil ternak**	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	**101**	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Terfaslitasinya unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak**	9	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah unit yang difasilitasi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**PERSENTASE PENURUNAN TERNAK YANG TERINFEKSI PHMS, PERSENTASE PENURUNAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN ASAL TERNAK YANG ASUH**	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	**101**	**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**	**Meningkatnya kapasitas kelompok pengolahan dan pemasaran hasil ternak**	2	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah dokumen
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	**3**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Meningkatnya kapasitas lembaga/kelompok**	Eksposisi hasil peternakan	**101**	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Terpromosinya produk olahan hasil peternakan**	1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah kegiatan expo/bazar/pasar murah
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**		**3**				**101**	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**	**Terpantaunya pemasukan dan pengeluaran Ternak**	2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah ternak yang diawasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Permukiman		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Perumahan dan Permukiman		7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban Gempa yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi	Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban Gempa yang telah Direhabilitasi dan Direkonstruksi	Mitigasi Kawasan Perumahan Rawan Bencana	103	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH (Tidak Ada Kewenangan Provinsi)	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang Tertangani	Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu		Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Kumuh (10 - 15 Ha)	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Tertangani		Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Kumuh (10 - 15 Ha)	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Tertangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH (Tidak Ada Kewenangan Provinsi)	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang Tertangani	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan		Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Kumuh (10 - 15 Ha)	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Tertangani		Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Masyarakat Kurang Mampu di Kawasan Kumuh (10 - 15 Ha)	Jumlah Rumah Layak Huni Yang Tertangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH (Tidak Ada Kewenangan Provinsi)	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang Tertangani	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH (Tidak Ada Kewenangan Provinsi)	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang Tertangani	Perencanaan Pembangunan Perumahan						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Tertata	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Kawasan kumuh yang Ditangani	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Kawasan kumuh yang Ditangani
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Tertata	Penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB	101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				Tersedianya Dokumen RP3KP Provinsi NTB

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Permukiman	4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Tertata	Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh	101	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman				Jumlah Dokumen DED Penataan Permukiman Kumuh

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan peralatan rumah tangga	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan mobil jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	N/A	XX	N/A	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan layanan administrasi dan keuangan	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	101	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasinya	2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah fasilitasi rapat Badan Musyawarah DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan layanan administrasi dan keuangan	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	101	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasinya	2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah kegiatan Pertemuan Badan Musyawarah se-NTB
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan layanan administrasi dan keuangan	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	101	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasinya	2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat penyusunan RKT DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan layanan administrasi dan keuangan	Rapat-rapat paripurna	101	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasinya	2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah rapat Paripurna
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan layanan administrasi dan keuangan	Rapat-rapat paripurna	101	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani administrasinya	2	Fasilitasi Rapat DPRD	Jumlah risalah rapat paripurna yang dihasilkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	102	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani keuangan dan kesejahteraannya	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	2	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	102	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang dilayani keuangan dan kesejahteraannya	3	Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD	Jumlah pelaksanaan medical check up
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah program pembentukan perda (propemperda) prakarsa DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah program pembentukan perda (propemperda) prakarsa Gubernur
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Perda prakarsa dprd yang dihasilkan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Perda prakarsa Gubernur yang dihasilkan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah rekomendasi DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah pelaksanaan kegiatan uji publik dan FGD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas Rancangan Peraturan Daerah	101	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah laporan fasilitasi pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah fasilitasi penyusunan naskah akademik
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	1	Orientasi DPRD	Jumlah kegiatan orientasi DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	2	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	104	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi penyelenggaraan hubungan masyarakat
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghipunan aspirasi masyarakat	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD kunjungan kerja dalam daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghipunan aspirasi masyarakat	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD kunjungan kerja Luar daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghipunan aspirasi masyarakat	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah SPPD kunjungan kerja Luar Negeri
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kegiatan reses	105	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghipunan aspirasi masyarakat	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah pelaksanaan reses
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kegiatan reses	106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah buku kode etik DPRD
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kegiatan reses	106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah rapat pengawasan kode etik
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	3	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kegiatan reses	106	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan penyusunan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan Pertemuan Badan Kehormatan se-NTB

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Perencanaan dan Pengembangan Usaha Kecil menengah	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	101	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi	102	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang di bina dan difasilitasi pengembangannya	2	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Koperasi yang di bina dan difasilitasi pengembangannya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	101	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	102	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Rintisan Penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	101	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Porsentase Peningkatan SDM	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	101	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Wirausaha yang didiklat	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Wirausaha yang didiklat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi	101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangan	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkulitas Terhadap Koperasi Aktif	Penyelarasan Kebijakan dan Program Pengembangan Koperasi	101	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangan	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Porsentase Peningkatan SDM	Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi	101	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan	1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Porsentase Peningkatan SDM	Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi	101	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan	1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi / Analisis Konten	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Konten
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Penguatan Layanan Data dan Informasi PPID Utama	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Penguatan Kemitraan Kelembagaan dan Pers	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan informasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Bimtek Bidang Kominfotik (PPID)	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	101	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan e-Government	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Penguatan Tata Kelola TIK	102	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan e-Government	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	102	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan e-Government	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah	102	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan e-Government	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Pengembangan dan Implementasi Aplikasi TIK	102	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Sosial	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik yang Tervalidasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Ekonomi	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik yang Tervalidasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik SDA dan Infrastruktur	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik yang Tervalidasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Sosial	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik Ekonomi	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**9**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis, dan Diseminasi Statistik SDA dan Infrastruktur	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata yang terbangun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan Ketersediaan Jenis Data	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	101	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase jenis data statistik yang digunakan dalam penyusunana perencanaan pembangunan daerah	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Penguatan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	101	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Pengembangan SDM Persandian	101	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	101	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	101	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Program Optimalisasi Keamanan Informasi dan Tata Kelola Persandian	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	102	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Ketahanan Pangan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan Rencana Kerja SKPD**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**1**	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Ketahanan Pangan**	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**3**	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Peserta

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Roadmap Ketahanan Pangan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Visualisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (BTL)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan NBM
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Prognosa Ketersediaan Pangan	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan Prognosa Ketersediaan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Ketersediaan umbi dan aneka kacang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Lumbung Pangan	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Stok Cadangan Pangan Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Komoditas Pangan yang dipantau Arus distribusinya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Komoditas Pangan yang dipantau perkembangan harganya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pemantauan Ketersediaan Beras Rice Milling Unit (RMU)	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah RMU yang dipantau
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah LDPM yang dibina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI)	101	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Ketersediaan Energi	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah TTIC yang difasilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	102	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Event Pameran
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Promosi Produk Buah dan Sayuran Segar yang Aman Pangan	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Komoditas PSAT yang dipamerkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah KRPL yang ditumbuhkembangkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Orang yang menerima informasi makananku beragam, bergizi seimbang dan aman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah peserta

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)	104	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Tingkat Konsumsi Protein	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Dokumen
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Prevalensi of Undernourisment (POU)	Kawasan Mandiri Pangan	102	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penurunan Prevalensi of Undernourisment (POU)	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Kawasan Mandiri Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Prevalensi of Undernourisment (POU)	Sistem Kewaspdaan Pangan dan Gizi (SKPG)	102	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penurunan Prevalensi of Undernourisment (POU)	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Dokumen Laporan SKPG
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Revieriifkasi OKKPD
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Pelatihan Hazard Analisys Critical Control Point (HACCP)	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Peserta
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Temu Teknis Keamanan Pangan	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersertifikasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas PSAT yang diawasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Produk Dalam
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Frekwensi Bimwas dan Rekomendasi Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasi Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Tersertifikasi dan teregistrasi	Pengawasan Keamanan Pangan	101	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi dan terigistrasi	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Komoditi yang diawasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya	2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Gudang Alat dan Arsip Laboratorium
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tesedianya ruang intalasi gizi, radiologi	3	Pengembangan Rumah Sakit	Tesedianya ruang intalasi gizi, radiologi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan Gedung Kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tesedianya ruang CSSD, Loundry	3	Pengembangan Rumah Sakit	Tesedianya ruang CSSD, Loundry
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tesedianya ruang Laboratorium TB	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tesedianya ruang Laboratorium TB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tesedianya ruang Kalibrasi	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tesedianya Laboratorium Kalibrasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pembangunan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tesedianya ruang Pencucian alat laboratorium	4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tesedianya ruang Pencucian alat laboratorium
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar pelayanan kesehatan di DTPK	6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar pelayanan kesehatan di DTPK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RMC yang dibina	7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah RMC yang dibina
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pembangunan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang rehabiltasi dan dipelihara	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang rehabiltasi dan dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pembangunan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang di pelihara	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang di rehabiltasi dan dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis obat yang diadakan	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis obat yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Ambulance yang diadakan	12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Ambulance yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat Kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat Kalibrasi yang diadakan dan dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah alat Kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Reagensia dan BHP Lainnya / AMHP yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumah alat Kesehatan / Lab. Yang dipelihara dan diadakan	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumah alat Kesehatan / Lab. Yang dipelihara dan diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah barang Laboratoium Rumah Sakit yang diadakan	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang Laboratoium Rumah Sakit yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah barang instalasi CSSD, Gizi, Radiologi & Loundry RS yang diadakan	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang instalasi CSSD, Gizi, Radiologi & Loundry RS yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Esensial	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah BMHP/AMHP yang diadakan	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah BMHP/AMHP yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ RS Paru-Paru/ RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bahan logistik RS yang diadakan	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah bahan logistik RS yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah peralatan kesehatan yang dipelihara	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah peralatan kesehatan yang dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis pengelolaan limbah medis	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah jenis pengelolaan limbah medis
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah ruang operasi yang dipelihara	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah ruang operasi yang dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota dengan fasyankes mempunyai akses pelayanan telemedecine	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota dengan fasyankes mempunyai akses pelayanan telemedecine
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan Imunisasi	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penduduk yang dilayani Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang dilayani Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR dan PKRET	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR dan PKRET
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lansia	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas Santun Lansia	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah puskesmas Santun Lansia
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase Balita Stunting	Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis obat atau bahan penanggungan masalah gizi yang diadakan	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah jenis obat atau bahan penanggungan masalah gizi yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase Balita Stunting	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan kesehatan reproduksi dan TTD dalam mensukseskan program GEN	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan kesehatan reproduksi dan TTD dalam mensukseskan program GEN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase Balita Stunting	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan distrbibusi obat dan PMT	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan distrbibusi obat dan PMT
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kader Posyandu yang bersertifikat	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang dibina tentang kesehatan Olahraga	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab / Kota yang dibina tentang kesehatan Olahraga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Peningkatan Penggunaan Air Bersih	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Sarana Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Peningkatan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan	Peningkatan penggunaan jamban keluarga	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah KK Menggunakan Jamban Keluarga	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah KK Menggunakan Jamban Keluarga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Porsentase Posyandu Aktif	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat, Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi	9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat, Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab / Kota yang di bina standar pelayanan kesehtan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab / Kota yang di bina standar pelayanan kesehtan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80%	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan evaluasi program kesehatan haji yang dilaksanakan	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah kegiatan evaluasi program kesehatan haji yang dilaksanakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas yang di latih pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Puskesmas yang di latih pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program NAPZA	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program NAPZA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kepersertaan JKN	Pelayanan Operasi Katarak	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pasien katarak yang dioperasi	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah pasien katarak yang dioperasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional	Dukungan pelaksanaan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan JKN	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kepesertaan baru yang dibayarkan melalui JKN PBI	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah kepesertaan baru yang dibayarkan melalui JKN PBI

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keselarasan Program Kesehatan Pusat dan Daerah	Pengembangan Sistem Perencanaan Penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen costing SPM Kabupaten / Kota	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen costing SPM Kabupaten / Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional.	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional.
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Lab. Fasyankes yang dibina	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Lab. Fasyankes yang dibina
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan Immunisasi	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase target pendapatan	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan dalam RSBA	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan dalam RSBA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumah Kabupaten /Kota yang di lakukakan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumah Kabupaten /Kota yang di lakukakan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pesentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Tim TGC di Kabupaten / Kota yang di bina	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Tim TGC di Kabupaten / Kota yang di bina
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang di dampingi rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di dampingi dalam rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keselarasan Program Kesehatan Pusat dan Daerah	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Riset Kesehatan yang disosialisasikan	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Jenis Riset Kesehatan yang disosialisasikan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional	102	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penilaian sarana prasarana dan alat kesehatan pasca bencana	29	Penilaian /Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Jumlah dokumen hasil penilaian sarana prasarana dan alat kesehatan pasca bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keselarasan Program Kesehatan Pusat dan Daerah	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keselarasan Program Kesehatan Pusat dan Daerah	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Postinganan pada wesite Dinas Kesehatan	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Postinganan pada wesite Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Keselarasan Program Kesehatan Pusat dan Daerah	Penyediaan sistem informasi kesehatan daerah	103	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan mutu dan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang dilaksanakan	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang dilaksanakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	104	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan akreditasi yang dilaksanakan	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah kegiatan akreditasi yang dilaksanakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan	101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Kab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana pemenuhan minaml 5 Tenaga Kesehatan di pusk	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Kab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana pemenuhan minaml 5 Tenaga Kesehatan di pusk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan	101	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	JumlahKab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 5 Tenaga Kesehatan di Pusk	2	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	JumlahKab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 5 Tenaga Kesehatan di Pusk
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Termasuk Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Dinas Kesehatan	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Sumber Daya Kesehatan	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Laboratorium Kesehatan	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Laboratorium Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (uptd)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	Pendidikan dan pelatihan formal	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Bapelkes	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Bapelkes
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Termasuk Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan (rs mata)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	102	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningktan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	1	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningktan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	101	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Jumlah Dokumen data Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK	2	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen data Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningktan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	102	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Peningktan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	102	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Dokumen data Usaha Kecil Obat	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen data Usaha Kecil Obat Tradisional
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Aktif	Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat	101	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Posyandu yang di Aktifkan	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Posyandu yang di Aktifkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Aktif	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	102	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dikembangkan	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dikembangkan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu Aktif	Peningkatan dan Pengembangan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	103	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Puskesmas dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Puskesmas dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu Keluarga

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**1**	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**4**	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**5**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**6**	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**8**	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**9**	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**2**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**4**	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**5**	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**8**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Alat Tulis Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**10**	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**11**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**12**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**13**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**15**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Makanan dan Minuman	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**17**	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**18**	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**21**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**23**	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**29**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**31**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**33**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pembangunan gedung kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**39**	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Peningkatan SDM Aparatur	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Cakupan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	Penguatan Usaha budidaya perikanan	**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**	**Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan**	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Cakupan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	Penguatan Usaha Perikanan Tangkap	**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**	**Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan**	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**	**Cakupan Pengelolaan Kawasan Konservasi**	Penguatan Usaha Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan	**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**	**Jumlah Kelompok Masyarakat Pesisir yang diberdayakan**	1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	jumlah kelompok masyarakat pesisir yang diberdayakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**		2	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**		3	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**			**103**	**Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil**		4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**101**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah Produksi Penangkapan ikan di Laut yang berkelanjutan**	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Publikasi data Statistik Perikanan Tangkap di Laut
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**101**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	**Jumlah Produksi Penangkapan ikan di Laut yang berkelanjutan**	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit Prasarana Perikanan Tangkap yang disediakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**101**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di Laut yang berkelanjutan	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Perikanan Tangkap
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**102**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang berkelanjutan	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Pengolahan data Statistik Perikanan Tangkap di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang berkelanjutan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**102**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang berkelanjutan	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit Prasarana Perikanan Tangkap yang disediakan di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	**102**	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Produksi Penangkapan ikan di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang berkelanjutan	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit sarana Perikanan Tangkap yang disediakan di wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**103**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Ijin usaha Perikanan Tangkap yang dikeluarkan**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap ukuran 10-30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**103**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Ijin usaha Perikanan Tangkap yang dikeluarkan**	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pertek yang dikeluarkan kapal 10 GT -30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**103**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Ijin usaha Perikanan Tangkap yang dikeluarkan**	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Tersedianya data dan informasi kapal 10-30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**104**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**Jumlah Ijin usaha Perikanan Tangkap yang dikeluarkan**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Tersedianya SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap ukuransampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**104**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil**	**Jumlah Ijin usaha Perikanan Tangkap yang dikeluarkan**	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil	Jumlah Pertek Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap ukuransampai dengan 10 GT yang bukan dimiliki oleh nelayan kecil
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**105**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	SOP Penerbitan TDKP berukuran sampai dengan 10 GT

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**105**	**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT**	2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 10 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran	**106**	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan**	1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Kesesuian dengan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Pelabuhan dan Kesyahbandaran	**106**	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan**	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	**106**	**Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan**	3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Surat Perintah Berlayar yang diterbitkan, Jumlah Kunjungan Kapal yang mendarat di Pelabuhan Perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**107**	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	SOP Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**107**	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	Jumlah Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**108**	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.**	**Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	SOP Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**108**	**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.**	**Jumlah Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.**	2	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT	Jumlah Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**109**	**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang didaftarkan**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT	SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**109**	**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**	**Jumlah Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang didaftarkan**	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**110**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	**Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang didaftarkan**	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	SOP Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	**3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah produksi Perikanan Tangkap**	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	**110**	**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang didaftarkan	2	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai dengan 10 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**102**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	SOP Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**102**	**Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**103**	**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Jumlah Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT	SOP Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**103**	**Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran Sampai Dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing**	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Penerbitan rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Jumlah rekomendasi izin kapal pengangkut hasil pembudidayaan ikan berukuran sampai dengan 30 GT
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**104**	**Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	SOP Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan	**104**	**Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut yang disediakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang disediakan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Laut	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Benih Ikan Budidaya Perikanan Air Payau	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	5	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	6	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Frekuensi kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	8	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Klaster kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	**105**	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**	Jumlah Produksi Budidaya Ikan di Laut	9	Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Panjang Saluran irigasi tambal

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**101**	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	1	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap peraturan perundang2an
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Penertiban Ilegal Fishing	**101**	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang2an
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**101**	**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	3	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Sampai Dengan 12 Mil	Persentase Kepatuhan usaha pembudidayaan ikan di laut terhadap peraturan perundang2an
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**102**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang undangan	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya	Tingkat Kepatuhan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**102**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang undangan	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Tingkat Kepatuhan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	**5**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Luas Kawasan Perairan dan Pesisir yang diawasi dan dikendalikan	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	**102**	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang undangan	3	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tingkat Kepatuhan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1	Penetapan persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	SOP Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	**101**	**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Publikasi Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	**102**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Unit Pengolah yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi Standar	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Bimtek Good Manufacuring Practises dan SSOP
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	**102**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Unit Pengolah yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi Standar	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Rapat Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Mutu dan Keamanan Pangan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	**102**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Unit Pengolah yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi Standar	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Sampel yang diawasi untuk Mutu dan keamanan produk hasil perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Peningkatan Fungsi Laboratorium Penguji	**102**	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**	Jumlah Unit Pengolah yang difasilitasi dan dibina untuk memenuhi Standar	2	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah laporan Hasil Uji Mutu Produk hasil Perikanan dan Kelautan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	**103**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Ketersediaan Stok Olahan Ikan	1	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/ distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan Ketersediaan Stok Olahan ikan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	**103**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Ketersediaan Stok Olahan Ikan	2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku usaha perikanan yang diberi insentif dan fasilitasi
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**		**6**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Produksi Olahan Hasil Perikanan yang bermutu dan memiliki Nilai Tambah**	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	**103**	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**	Jumlah Ketersediaan Stok Olahan Ikan	3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan keuangan semesteran	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	8	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Konservasi Air Tanah	101	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah (Zona)	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Data CAT (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Konservasi Air Tanah	101	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah (Zona)	2	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penetapan CAT (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Konservasi Air Tanah	101	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah (Zona)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan di kendalikan (izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	102	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	102	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	2	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Jumalh rekomendasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	102	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah perizinan air tanah yang dikendalikan (Izin)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan di kendalikan (izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	103	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA yang ditetapkan (Buah)	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Data NPA (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	103	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA yang ditetapkan (Buah)	2	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah penetapan NPA (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR TANAH	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Prosentase zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan (%)	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	103	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah NPA yang ditetapkan (Buah)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Julah pemanfaatan NPA (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pengawasan usaha pertambangan	102	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pengawasan usaha pertambangan	102	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pengawasan usaha pertambangan	102	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pengawasan usaha pertambangan	102	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Pertambangan Mineral Logam yang dikendalikan (Izin)	4	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Jumlah izin yang diawasi (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	103	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan	1	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	103	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan	2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah usulan WIP (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	103	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan	3	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	103	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	103	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah IUP Mineral bukan logam dan batuan	5	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Jumlah izin yang diawasi (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pendataan Hasil Produksi dibidang pertambangan	107	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin Pertambangan yang melaporkan produksinya (Izin)	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah data harga patokan mineral bukan logam dan batuan (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pendataan Hasil Produksi dibidang pertambangan	107	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin Pertambangan yang melaporkan produksinya (Izin)	2	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PROGRAM PEMBINAAN dan PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Prosentase IUP yang meaksanakan *Good Mining Practice* (%)	Pendataan Hasil Produksi dibidang pertambangan	107	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah izin Pertambangan yang melaporkan produksinya (Izin)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah laporan pengedalian (Dokumen)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	103	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	1	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	103	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah rekomenddasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	103	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	3	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dibina (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	103	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah pengelola niaga BBN yang dibina dan diawasi (Izin)	4	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	1	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah kebijakan (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	2	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah EDM yang ditingkatkan (Orang)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	3	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi (Orang)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	4	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah fasilitas EBT yang dinagun (Unit)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	6	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	jumlah peserta bimtek (orang)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Prosentase Energi Baru Terbarukan pembangkit listrik (%)	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	104	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana EBT yang dibangun (unit)	7	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola EBT yang dibina dan diawasi (Unit)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	101	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	1	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	101	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomenddasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	101	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin ketenagalistrikan yang dikendalikan (Izin)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pembinaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	102	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi Ketenagalistrikan yang diawasi (Izin)	1	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah prosedur dan persyaratan izin (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pembinaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	102	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi Ketenagalistrikan yang diawasi (Izin)	2	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah rekomenddasi teknis yang diterbitkan (rekomendasi)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pembinaan pengawasan dan evaluasi pengelolaan bidang ketenagalistrikan	102	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Izin Operasi Ketenagalistrikan yang diawasi (Izin)	3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (Izin)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	1	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah data penerima listrik murah dan hemat (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	2	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah SK Penerima listrik murah dan hemat (Buah)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	3	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah laporan pengedalian dan pengawasan (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	4	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah data dan informasi (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi (Dokumen)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	6	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun (unit)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi (%)	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	106	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah rumah tangga yang dipasang listrik murah dan hemat (RTS)	7	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian (Dokumen)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa keamanan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan peralatan rumah tangga	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan mobil jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	22	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Jumlah Rumah Jabatan yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Biro Umum	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur	1	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur	2	Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Gubernur
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Tersedianya marching band Gita Bhakti Praja yang terampil	3	Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah	Tersedianya marching band Gita Bhakti Praja yang terampil
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Peningkatan pelayanan kedinasan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah kegiatan FGD dalam setahun	7	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Jumlah kegiatan FGD dalam setahun
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Penyediaan jasa surat menyurat	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah Surat yang dikelola	9	Pengelolaan Persuratan dan Arsip	Jumlah Surat yang dikelola
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Umum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelaksanaan program penataan administrasi umum	Pengelolaan Kearsipan	102	Pelaksanaan Administrasi Umum	Jumlah berkas arsip yang ditata	9	Pengelolaan Persuratan dan Arsip	Jumlah berkas arsip yang ditata

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rentra dan Renja Perangkat Daerah
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir tahun
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang Dikelola
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Terbayar
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Janiman Barang Milik Daerah Yang Tersedia
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang Tersedia
X	N/A	XX	N/A	Semua OPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang Yang Tersedia

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Tersedia
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Dokumen Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit/Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkpan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Unit/Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Perencanaan, Keuangan, Umum dan Peningkatan Disiplin Serta Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Ditingkatkan Disiplin dan Kapasitasnya	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Pendataan Statistik Perekonomian	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Pengendalian Inflasi Daerah	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Pengembangan Investasi	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	1	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Pariisata dan Perhubungan	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Bahan kebijakan ekonomi Mikro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan dan Pengembangan Proiduksi Daerah	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitorin g dan Evaluasi Perindustrian dan Perdagangan	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Bahan kebijakan ekonomi Mikro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	2	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Bahan kebijakan ekonomi Mikro
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan dan Pengembangan Proiduksi Daerah	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Produksi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan dan Pengembangan Proiduksi Daerah	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan dan Energi	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Perekonomian	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah dan BUMD	101	Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Perekonomian	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah sarana elektronik yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan di Prov. NTB
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah kekhasan koleksi perpustakaan Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Peningkatan SDM Perpustakaan	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan khusus
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah pembinaan perpustakaan khusus tingkat provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	8	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah koleksi perpustakaan deposit

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang tersedia (ekeltronik/ digital, konvensional, WEB)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pelestarian Bahan Pustaka	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	101	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengelolaan bahan pustaka perpustakaan	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah SDM yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah sosialisasi dan literasi perpustakaan yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah lokasi taman bacaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan gemar membaca yang diterima
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Penyelarasan pengembangan perpustakaan dan arsip	102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		102	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pengembangan minat dan budaya baca	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan duta baca
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam	101	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan Karya cetak karya rekam	1	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Karya Cetak Karya Rekam yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah		101	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan Karya cetak karya rekam	2	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah penghargaan kepada penerbit dan produsen dalam melaksanakan Karya Cetak Karya Rekam

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah	Pelestarian bahan pustaka	102	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah pengelolaan katalog induk daerah dan bibliografi	1	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah katalog induk daerah yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam	102	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Jumlah pengelolaan katalog induk daerah dan bibliografi	2	Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah bibliografi daerah yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah		103	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerah	1	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah	Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan	103	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelestarian naskah kuno daerah	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah alih media naskah kuno yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah		104	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan budaya etnis nusantara	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan jumlah pelestarian KCKR dan Naskah kuno milik daerah		104	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan budaya etnis nusantara	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah pengolahan dan penyiangan koleksi budaya etnis nusantara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis		101	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis	Jumlah Daftar Pertelaahan Arsip dinamis yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	101	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	Jumlah pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	101	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip dinamis	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis		102	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip statis	1	pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pelaksanaan akuisisi arsip	102	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip statis	2	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Jumlah Daftar Pertelaahan Arsip statis yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	102	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Jumlah pengelolaan arsip statis	2	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	103	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah informasi arsip melalui JIKN
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	103	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Record Center di Prov. NTB
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	103	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	Pembinaan dan Pengembangan model instansi/Record Center-Model	103	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah pengelolaan sistem informasi kearsipan nasional	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	Penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	101	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pengelolaan dan pemusnahan arsip	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah penilaian arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (Sepuluh) tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		101	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah pengelolaan dan pemusnahan arsip	2	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang meliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (Sepuluh) tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		102	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah pengelolaan dan penyelamatan arsip	1	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		102	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Jumlah pengelolaan dan penyelamatan arsip	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah arsip yang terselamatkan akibat bencana
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		103	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelamatan arsip dari penggabungan/ pembubaran/ pemekaran Daerah Kab./ Kota	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah pendataan arsip bagi penggabungan perangkat daerah provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		103	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelamatan arsip dari penggabungan/ pembubaran/ pemekaran Daerah Kab./ Kota	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah pendataan arsip bagi pembubaran perangkat daerah provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		103	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelamatan arsip dari penggabungan/ pembubaran/ pemekaran Daerah Kab./ Kota	3	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah penyelamatan arsip bagi pemekaran lintas Kabupaten/ Kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		104	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah alih media kearsipan provinsi	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah arsip sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		104	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah alih media kearsipan provinsi	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		105	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang hilang	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang dinyatakan hilang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		105	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang hilang	2	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah alih media arsip yang dinyatakan hilang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan		105	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	Jumlah arsip statis yang hilang	3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah penetapan dan pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip		101	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	1	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase perizinan penggunaan arsip		101	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi	Jumlah izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	2	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	102	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ	102	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan	102	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	102	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	103	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Pengawasan dan Pengendalian Terminal	103	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Pembinaan Penertiban, pengelolaan Operasional Terminal	103	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	103	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Cakupan pengelolaan Terminal Tipe B	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas utama dan pendukung yang dipelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	103	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Cakupan pengelolaan Terminal Tipe B	5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah SDM terminal yang mengikuti diklat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah titik/lokasi MRLL pada Ruas Jalan Provins
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pengembangan lalu lintas Angkutan Jalan	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah titik/lokasi MRLL pada Ruas Jalan Provins

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah titik/lokasi MRLL pada Ruas Jalan Provins
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pembangunan prasarana perhubungan darat	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas keselamatan yang terpasang	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah fasilitas keselamatan yang terpasang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pembangunan prasarana perhubungan darat	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah fasilitas keselamatan yang terpasang	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Ujicoba/rekayasa lalu lintas
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	105	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Peserta Pelopor Keselamatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	106	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Andalalin	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Dokumen Kebijakan Andalalin
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	106	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Peserta Diklat Penilai Andalalin	2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Peserta Diklat Penilai Andalalin
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	106	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen / Rekomedasi Andalalin yang dikeluarkan	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Dokumen / Rekomedasi Andalalin yang dikeluarkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	106	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Bangunan yang dievaluas	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Bangunan yang dievaluas
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan SDM Transportasi	107	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah SDM Perhubungan Darat yang mengikuti Diklat	1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah SDM Perhubungan Darat yang mengikuti Diklat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan SDM Transportasi	107	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah UPUBKB yang di pantau inspkesi dan di Audit	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah UPUBKB yang di pantau inspkesi dan di Audit
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan SDM Transportasi	107	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah terminal yang di pantau inspkesi dan di Audit	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah terminal yang di pantau inspkesi dan di Audit
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan SDM Transportasi	107	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pengemudi Kendaraan Bermotor yang berkompeten	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program peningkatan Manajemen Transportasi Darat	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan SDM Transportasi	107	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Perusahan Angkutan Umum yang memenuhi Sistem Manajemen Keselamatan	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	110	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Rute Angkutan AKDP
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	110	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi	2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan fasilitas keselamatan yang baik	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan	113	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas / Jumlah AKDP yang memiliki izin	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas / Jumlah AKDP yang memiliki izin
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	101	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Informasi perizinan secara elektronik	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Informasi perizinan secara elektronik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/pengembangan keselamatan pelayaran	101	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data perizinan usaha Angkutan Laut	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Data perizinan usaha Angkutan Laut
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	102	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Informasi perizinan secara elektronik	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Informasi perizinan secara elektronik

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	102	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Data perizinan usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Data perizinan usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	105	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	105	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	2	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	106	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Informasi perizinan secara elektronik	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Informasi perizinan secara elektronik
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	106	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Data perizinan usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Bongkar Muat	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Data perizinan usaha Jasa Pengurusan Transportasi dan Bongkar Muat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Peningkatan/Pengembangan Angkutan Laut di NTB	107	Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antardaerah Kabupaten/Kota	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/pengembangan Kepelabuhanan di NTB	108	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Database 3 pelabuhan Regional
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pengembangan Transportasi Laut	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Peningkatan/pengembangan Kepelabuhanan di NTB	109	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	109	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Regional yang beroperasi	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Regional yang beroperasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	109	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang terpelihara	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pegelolaan Pelayaran yang baik	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	109	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang Terawasi	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan yang Terawasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Dinas Perhubungan	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa tarnsportasi udara di bandara	Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Angkutan transportasi Udara	101	Penyelengaraan Kebandarudaraan	Data fasilitas dan penumpang angkutan udara	5	Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Kebandarudaraan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Data fasilitas dan penumpang angkutan udara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Dokumen Perdagangan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	3	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah Jenis Bahan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	N/A	XX	N/A	Dinas Perdagangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	101	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor	Jumlah Rekomendasi SIUP MB Diterbitkan	1	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan Komitmen SIUP MB Toko Bebas BEA dan rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Monitoring dan Evaluasi Tertib Niaga	102	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi SIUP B2 Diterbitkan	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan Komitmen SIUP MB Toko Bebas BEA dan rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	102	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi SIUP B2 Diterbitkan	2	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan Komitmen SIUP MB Toko Bebas BEA dan rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	103	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Terkendali	2	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Penguatan Kepala Pasar dalam Pengawasan Peredaran Bahan Berbahaya di Pasar Rakyat	103	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Terperiksa	2	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Terlaksananya Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Pengawasan Peredaran Barang Ekspor dan Impor	104	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA yang diterbitkan Instansi Penerbit	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Peningkatan Perusahaan Terdaftar	Eksportir yang sudah Memiliki API dan SKA	104	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah SKA yang diterbitkan Instansi Penerbit	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA & ASONGAN	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik daerah	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	101	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Penataan, pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas Terlaksana	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Terlaksananya kegiatan Penataan, pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA & ASONGAN	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik daerah	Penguatan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	101	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Terbina	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA & ASONGAN	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik daerah	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan	101	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi Tersedia	3	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pemantauan Ketersediaan Sembako Menjelang Hari Besar Keagamaan	101	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pemantauan Barang-barang Strategis dan BBM	101	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di tingkat Distributor dan Sub Distributor
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pemantauan Perdagangan Antar Pulau	102	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Komoditi Terpantau Stock dan Harga	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Operasi Pasar	102	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pelaksanaan Pasar Sembako Murah		Pengendalian Harga, informasi Ketersedian stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha Distribusi barang lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Inforamasi Perdagangan	Jumlah Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok	2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	103	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi Terperiksa	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	103	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengadaan Pupuk dan Pestisida Terawasi	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	103	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Penyaluran Pupuk dan Pestisida Terawasi	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Terlaksananya kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan	103	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Partisipasi Pada Pameran dan promosi Luar Negeri	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pameran Dagang Internasional/Nasional yang diikuti	1	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terlaksananya Pameran Dagang Internasional/ Nasional
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Partisipasi Pada Pameran dan promosi Dalam Negeri	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara	2	Pameran Dagang Lokal	Terlaksannya Pameran Dagang Lokal
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Membangun Jejaring Dengan Eksportir	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang	3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang	3	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Terlaksananya Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Pengembangan Kluster Produk Ekspor	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Produk Ekspr Terpilih	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Identifikasi Potensi Ekspor Daerah		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Produk Ekspr Terpilih	4	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Terlaksananya Peningkatan Citra Produk Ekspor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Isu-Isu Perdagangan Internasional	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembina Pelaku Usaha Ekspor Terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdangangan Luar Negeri	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembina Pelaku Usaha Ekspor Terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Penguatan Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Eksport dan Impor	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembina Pelaku Usaha Ekspor Terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Penguatan Bagi UKM/Calon UKM yang berorientasi Ekspor Eksportir Se- NTB	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembina Pelaku Usaha Ekspor Terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan Kuantitas Ekspor Produk Unggulan Daerah	Inatrade	101	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Terlaksananya Pembina Pelaku Usaha Ekspor Terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Penguatan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Berbahaya	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Konsumen	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Penguatan dan Pembinaan Jejaring Perlindungan Konsumen	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsumen yang memahami hak dan kewajibannya	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Termonitor dan terevaluasinya Lembaga Perlindungan Konsumen	2	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Monitoring, dan Evaluasi terhadap kelembagaan , pemberdayaan dan Jejaring Perlindungan Konsumen	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Termonitor dan terevaluasinya Lembaga Perlindungan Konsumen	2	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen	101	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (SNI-kadaluarsa)	103	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	% barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/ atau jasa sesuai Parameter ketentuan Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Tingkat Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa (SNI-kadaluarsa)	103	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan Pelanggaran yang Difasilitasi	2	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produksi Dalam Negeri yang digunakan Rumah Tangga di Provinsi	Misi Dagang	101	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Jumlah Promosi Terselenggara	1	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produksi Dalam Negeri yang digunakan Rumah Tangga di Provinsi	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	103	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah masyarakat tersosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produksi Dalam Negeri yang digunakan Rumah Tangga di Provinsi	Penyebaruasan Informasi Produk Unggulan Melalui E-Commerce	103	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Produk Perdagangan Terekspose	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA DAERAH	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produksi Dalam Negeri yang digunakan Rumah Tangga di Provinsi	Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perdagangan	103	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Informasi Produk Perdagangan Terekspose	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Sinkronisasi Program Pendidikan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Advokasi dan Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan gedung sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksanya Pembangunan Unit Sekolah Baru	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penambahan ruang kelas sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Baru	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang terbangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	8	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	9	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah)	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang ibadah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah)	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah)	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Parkir	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumalh Fasilitas Parkir yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Bangungan Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (bangunan) Sekolah	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas (Bangunan) Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Komputer yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Bahasa yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101		Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	26	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pager Sekolah)	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pager Sekolah) yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah)	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang ibadah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah Sekolah)	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah Sekolah) yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Parkir	32	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang di rehabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Mebeluer Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaan Mebeluer Sekolah	36	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Sekolah	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Komputer/laptop kelengkapannya) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Buku dan Alat Tulis Siswa SMK:pemenuhan SPM) yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Komputer/laptop kelengkapannya) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOS) Sekolah Menengah Atas	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Negeri yang menerima Biaya Personil Peserta Didik SMA Negeri (Dana BOS)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Beasiswa	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penerima Beasiswa S1, S2, dan S3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan alat praktek dan praga siswa	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran berbasis TIK Pendidikan	46	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (peralatan jaringan) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA	47	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi dan Pelaporan SMA	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SMA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksanaunya Monitoring dalam penyiapan dan tindak lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersalurkannya minat bakat dan kreativitas siswa	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Kegiatan Lomba-lomba Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (KSN, KOSN, FLS2N dan GSI) Tingkat Provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kabupaten/Kota	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Karakter Siswa SMA Tingkat Kabupaten/Kota	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMA Tingkat Kabupaten/Kota

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Evaluasi Pembelajaran Berbasis TIK	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya siswa dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta Kuis Kihajar
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan PTK	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah kasus yang di fasilitasi Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Program Pembinaan Ketenagaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksannya Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah dan Guru Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
					Program Pembinaan Ketenagaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Guru Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya dokumen perencanaan sebaran pendidik dan tenaga kependidkan	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk.	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terseleksinya tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Terpilihnya Juara 1, 2 dan 3 Tingkat Provinsi NTB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terseleksinya Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMA Tingkat Kabupaten/Kota	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tk. Provinsi	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas, kepala tatausaha, laboran, dan pustakawan jenjang TK, SD, dan SMP	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Guru, Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Laboran dan Pustakawan Berprestasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
					Program Pembinaan Ketenagaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Penilaian Kinerja Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Program Pembinaan Ketenagaan		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Peserta Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah PAK yang dihasilkan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Guru SMA	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Guru SMA

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah Menengah Atas	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang bersertifikat Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	terlaksananya Penigkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan & Tenaga Kebudayaan	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Olimpiade Sains Guru	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya OlimpiadeSains Guru Tk Provinsi	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Propinsi Jenjang menengah atas
					Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)		101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya OlimpiadeSains Guru Tk Provinsi	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Propinsi Jenjang Pendidikan Dasar

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Mutu Pendidikan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksannya Pemberian Jasa Mengajar Guru Non PNS SMA Negeri	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Terbayarnya jumlah jam tatap muka jasa jam mengajar guru Non PNS
											Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksannya Pemberian Jasa Kepada Pegamai Non PNS SMA Negeri	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Tersbayarnya Pemberian Jasa Administrasi TU Non PNS
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya SDM teknologi pendidikan yang memadai	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	1. Jumlah Fasilitator Pemanfaatan TIK 2. Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online 3. Jumlah Dokumen Media Pemanfaatan TIK 4. Jumlah peserta Pembimbingan Sekolah Rintisan Berbasis TIK 5. Jumlah peserta Rakor TIK 6. Jumlah peserta Sosialisasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Kreativitas Guru Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pembelajaran	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terseleksinya guru dalam membuat media bahan ajar berbasis TIK	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Jumlah Guru yang terseleksi dalam Lomba Membuat Bahan Ajar berbasis TIK (MembaTIK)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksannya Kegiatan Pembinaan Kelambagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Sinkronisasi Data)	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Sinkronisasi Data

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terlaksannya Kegiatan Pembinaan Kelambagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas (Sekolah Sehat)	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah yang dibina
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Pengelolaan Managemen BOS pada sekolah Menengah Atas	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Menengah Atas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	101	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Data Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan gedung sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Unit Sekolah Baru	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Unit Sekolah Baru

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Kelas Sekolah	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan Ruang Guru Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Guru/kepala sekolah/TU	3	Pembangunan Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang terbangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Praktik Siswa	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang terbangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Laboratorium	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang unit kesehatan sekola	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan perpusatakaan sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Perpustakaan Sekolah	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang serba guna/aula	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Ruang Serba Guna/Aula	8	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang di bangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan Asrama Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Asrama Sekolah	9	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah)	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang ibadah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah)	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah)	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Fasilitas Parkir	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah)	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah) yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	16	Rehabilitasi Ruang Guru/kepala sekolah/TU	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Laboratorium	18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	19	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Asrama Sekolah	22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah)	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir (Pagar Sekolah) yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah)	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah) yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang ibadah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah)	23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (Ruang Ibadah) yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Fasilitas Parkir	24	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Taman, lapangan upacara dan fasilitas Parkir yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Kantin Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Kantin Sekolah	25	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	26	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah (Rumah Singgah/Rumah Dinas Sekolah) yang di rehabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	27	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Mebeluer Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Mebeluer Sekolah	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan alat rumah tangga sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Alat Rumah Tangga Sekolah	29	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Perlengkapan Sekolah (Komputer/laptop kelengkapannya)	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah (Komputer/laptop kelengkapannya) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Perlengkapan (buku-buku dan alat tulis) Peserta Didik	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik (buku-buku dan alat tulis)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Sarana Mobilitas Sekolah	32	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas sekolah (Kendaraan Operasional Sekolah) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	34	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang sekolah yang dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya Pagar Sekolah	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pagar Sekolah) yang dipelihara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir Sekolah	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (taman, lapangan uapacara dan fasilitas parkir) yang dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya Ruang Ibadah Sekolah	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Ibadah yang dipelihara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya Toilet Sekolah	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet Sekolah yang dipelihara
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terpeliharanya Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	36	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang dipelihara

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOS) Sekolah Menengah Atas	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Negeri yang menerima Biaya Personil Peserta Didik SMA Negeri (Dana BOS)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran berbasis TIK Pendidikan	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (peralatan jaringan) yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penyampaian Materi Belajar mengajar dengan Memanfaatkan teknologi Informasi dan Komunikasi	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang melaksanakan Penyampaian materi dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksanya Monitoring Dan Evaluasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Tersedianya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Satuan Pendidikan dan Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi dan Pelaporan SMK	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SMK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersalurkanya Minat Bakat dan kreativitas Siswa	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Lomba (KOSN, FLS2N, LKS)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Evaluasi Pembelajaran Berbasis TIK	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya siswa dalam evaluasi pembelajaran berbasis TIK	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta Kuis Kihajar
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten/Kota	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten/Kota

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Karakter Siswa SMK Tingkat Kabupaten/Kota	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMK Tingkat Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	terlaksananya seleksi	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti seleksi pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	terlaksananya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	jumlah sekolah yang didata pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	terlaksananya bimbingan teknis peningkatan sistem kendali kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	jumlah peserta yang mengikuti Bimtekpada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlindunginya hak dan kewajiban ASN	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Terlindunginya hak dan kewajiban ASN pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksannya Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah dan Guru Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Peserta Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Guru Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk.	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terseleksinya tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Terpilihnya Juara 1, 2 dan 3 Tingkat Provinsi NTB pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terseleksinya Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMK Tingkat Kabupaten/Kota	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Tingkat Kabupaten/Kota

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Aplikasi Penilaian Kinerja Guru dan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Penilaian Kinerja Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terseleksinya Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang akan didiklat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah DUPAK yang dinilai	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Guru SMK	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Guru SMK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Melalui Bimtek	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Calon Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendikdan Menengah Kejuruan	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Olimpiade Sains Guru	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Mutu guru bidang sains	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Propinsi Jenjang menengah kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Mutu Pendidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksannya Pemberian Jasa Mengajar Guru Non PNS SMK Negeri	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Terbayarnya jumlah jam tatap muka jasa jam mengajar guru Non PNS

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Mutu Pendidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksannya Pemberian Jasa Kepada Pegamai Non PNS SMK Negeri	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Tersbayarnya Pemberian Jasa Administrasi TU Non PNS
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya SDM teknologi pendidikan yang memadai	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	1. Jumlah Fasilitator Pemanfaatan TIK 2. Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online 3. Jumlah Dokumen Media Pemanfaatan TIK 4. Jumlah peserta Pembimbingan Sekolah Rintisan Berbasis TIK 5. Jumlah peserta Sosialisasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terseleksinya guru dalam membuat media bahan ajar berbasis TIK	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Jumlah Guru yang terseleksi dalam Lomba Membuat Bahan Ajar berbasis TIK (MembaTIK)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Bengkel/ Unit Produksi yang dibangun	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Jumlah Bengkel/ Unit Produksi yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1. Kerjasama dengan Industri bersipat Konfrehensif dibawah koordinasi Dinas & Pemda, dengan MUO dan PKS sesuai prosedur dan ketentuan perudang-undangan yg berlaku antara Dinas dengan DU/DI (MOU) dan sekolah dengan DU/DI (PKS). 2. Mengembangkan sistem pembelajaran kejuruan yang terintegrasi dengan sistem sertifikasi LSP-P1 (Skema SKKNI). 3. Pembelajaran Produktif Keahlian diarahkan 70% berbasis Portopolio dan Projek, dengan Colobaration Learning antar kelompok. 4. Tersedianya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bisa melayani kegiatan Uji Kompetensi untuk semua Kompetensi Keahlian yang ada ssat ini di SMK-SMK provinsi NTB.	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	1. Adanya MOU, 2. Tersusunnya SKKNI, 3. Panduan Pelaksanaan Penilaian Portofolio, 4. Penambahan ruang Lingkup LSP P1/P2/P3
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Siswa Yang Tersertifikasi LSP	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya sertifikasi siswa melalui LSP P1/P2/P3

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMK)	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksanannya Pembinaan Sekolah Sehat SMK	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	jumlah sekolah yang terbina
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Pengelolaan Managemen BOS pada sekolah Menengah Kejuruan	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	102	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Data Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan gedung sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya uniit sekolah baru	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Unit Sekolah Baru

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya ruang kelas sekolah	2	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya ruang guru/kepala sekolah.TU	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Guru/kepala sekolah/TU yang terbangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya sarana air bersih dan sanitary (Toilet Sekolah)	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sarana air bersih dan sanitary (Toilet Sekolah) yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan ruang ibadah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya ruang ibadah	8	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Ibadah yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir Sekolah	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir Sekolah yang dibangun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang guru	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah	20	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan Sekolah	21	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula	22	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Siswa	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Asrama Siswa	23	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumilah Saranan dan sanitary dan sanitary yang diirehabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lapangan upacara dan fasilitas parkir fasilitas parkir yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Ibadah yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir	25	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang direhabilitasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Rehabilitasi laboratorium dan praktikum sekolah	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan Mebeluer Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Mebeluer Sekolah	35	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaan perlengkapan sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Perlengkapan Sekolah (Komputer/laptop kelengkapannya)	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan buku-buku dan alat tulis siswa	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Perlengkapan Sekolah (buku-buku dan alat tulis) Peserta Didik	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir Sekolah yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Sarana Mobilitas Sekolah	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang diadakan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga peserta didik yang diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/SLB	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik (BOS) Sekolah Luar Biasa Negeri	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Negeri yang menerima Biaya Personil Peserta Didik SLB Negeri Negeri (Dana BOS)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa	45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Peraktik dan Peraga Siswa yag diadakan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Alat Praktisk Siswa berkebutuhan Khusus	45	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa (Alat Rekam/ Viktor Reader)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Proses Assesment bagi Siswa SMA/SMK/SLB	46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Pelatihan Proktor Assesment Kompetensi Siswa
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Penyusunan Soal Ujian Sekolah Pendidikan Khusus	46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester Bersama	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksanannya Penyusunan Soal Ujian Sekolah Pendidikan Khusus	46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Penyusunan Soal Ujian Sekolah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang PK-PLK	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan tindak lanjut Evaluasi Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Tindak Lanjut Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Khusus	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa PK-PLK	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	terlaksananya Kegiatan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba (LKSN, FLS2N dan KOSN),

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa PK-PLK	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Siswa SLB	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa pesertaPendidikan dan Pelatihan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terseleksinya Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa PKPLK Tk. Kab/Kota	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa Pendidikan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	terlaksananya seleksi	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap yang mengikuti seleksi pada Satuan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	terlaksananya pendataan tenaga pendidik dan kependidikan	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah sekolah yang didata pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	terlaksananya bimbingan teknis peningkatan sistem kendali kinerja pendidik dan tenaga kependidikan	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pada Satuan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang akan didiklat pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Inventarisasi Kebutuhan Guru SLB	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil inventarisir kebutuhan guru SLB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya peningkatan kompetensi Guru SLB	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Peningkatan Guru SLB

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlindunginya hak dan kewajiban ASN	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Terlindunginya hak dan kewajiban ASN pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksannya Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah dan Guru Pada Satuan Pendidikan Khusus	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksannya Lomba Karya Nyata Kepala Sekolah dan Guru Pada Satuan Pendidikan Khusus	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Guru Pada Satuan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Tersusun data Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk. Provinsi	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terseleksinya tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Terpilihnya Juara 1, 2 dan 3 pada Satuan Pendidikan Khusus Tingkat Provinsi NTB
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terseleksinya Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SLB Tingkat Kabupaten/Kota	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	102	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Penilaian Kinerja Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	102	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Standarisasi mutu dan kuaiitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Jenjang Pendidikan Khusus	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang akan didiklat pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Jumlah DUPAK yang dinilai	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penilaian DUPAK Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Khusus	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah PAK (Penetapan Angka Kredit) Jabatan Fungsional Guru Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Kegiatan Penyiapan Calon Kepala Sekolah Luar Biasa Melalui Bimtek	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah Calon Kepala Sekolah PK-PLK
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Tenaga Kebudayaan pada Satuan Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Olimpiade Sains Guru	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Mutu guru bidang sains	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Mutu guru bidang sains Pendidikan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Mutu Pendidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksannya Pemberian Jasa Mengajar Guru Non PNS SMK Negeri	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Jumlah jam mengajar GTT Pendidikan Khusus

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pengembangan Mutu Pendidikan	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksannya Pemberian Jasa Kepada Pegamai Non PNS SLB Negeri	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Tersbayarnya Pemberian Jasa Administrasi TU Non PNS
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Sinkronisasi dan Pengelolaan Data PK-PLK	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang tersingkronisasi datanya yang valid

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Pengelolaan Managemen BOS pada sekolah Menengah Kejuruan	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksannnya Pengelolaan Managemen BOS pada sekolah dan pendidkan khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/PaketC 2. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/PaketC 3. Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) 4. Persentase Angka Drop Out (DO) SMA 5. Persentase Angka Drop Out (DO) SMK 6. Persentase Akreditasi SMA minimal B 7. Persentase Akreditasi SMK minimal B 8. Rasio ketersediaan ruang kelas/penduduk usia sekolah pendidikan menengah 9. Persentase siswa SMK yang mendapat sertifikasi kompetensi (2,05%) 10. Rasio Siswa SMK terhadap SMA (40.50%) 11. Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB: 68.44% 12. Jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan keterampilan/Vokasi : (45 Orang)	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	103	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan Pendidkan Khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah (SMA)	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	101	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersedianya dokumen Kurikulum Muatan Lokal Permainan dan Seni Tradisional	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Muatan Lokal Permainan dan Seni Tradisional

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB	102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	- Jumlah Dokumen yang disusun
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	- Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK)	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	102	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah peserta pelatihan kurikulum muatan lokal pendidikan khusus
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah 2. Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB 3. Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 4. Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 5. Kepala Sekolah bersertifikat 6. Pengawas Sekolah bersertifikat 7. persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya 8. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Data Hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB Tingkat Kabupaten/Kota	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB Tingkat Kabupaten/Kota
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah 2. Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB 3. Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 4. Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 5. Kepala Sekolah bersertifikat 6. Pengawas Sekolah bersertifikat 7. persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya 8. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Data Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB Tingkat Provinsi	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersusun data Pendistribusian Guru dan Tenaga Kependidikan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pembinaan Ketenagaan	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah 2. Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB 3. Guru SMA/SMALB yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 4. Guru SMK yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV 5. Kepala Sekolah bersertifikat 6. Pengawas Sekolah bersertifikat 7. persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan kompetensinya 8. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	101	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Data Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan SLB Tingkat Kabupaten/Kota	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersusun data Pendistribusian Guru dan Tenaga Kependidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pergelaran Tetap	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan Pergelaran Seni Budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pergelaran Tetap	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan Pergelaran Seni Budaya (Bid. Kebudayaan + Taman Budaya)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pameran Tetap	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Perlindungan dan Pengembangan SDM	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pameran Seni Budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pameran Tetap	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Perlindungan dan Pengembangan SDM	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pameran Seni Rupa dan Lomba Lukis
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksanya upaya perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terdokumentasinya nilai-nilai budaya Sasambo (Manual dan Digital)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksanya upaya perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Peserta Lomba dan Festival Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Penyelenggaraan festival budaya daerah	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terselenggaranya Festival Seni Budaya Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksanya upaya perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan pengembangan kebudayaan kepada masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Olah Seni	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan olah seni

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Eksperimentasi Seni Tradisi	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Eksperimentasi Seni
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM , Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang mendapatkan pembinaan pengetahuan tentang perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksanya kegiatan pembinaan Pranata Kebudayaan kepada masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Peningkatan teknis sanggar seni	101	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan dan pembinaan sumberdaya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan serta upaya perlindungan dan pengembangan di dalam objek pemajuan kebudayaan	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan lembaga, Pranata Kebudayaan dan pembinaan sumberdaya manusia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pendokumentasian senia daerah	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah Dokumentasi Seni Budaya	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pendokumentasian dan Perlindungan Seni Budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pendokumentasian senia daerah	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase jumlah Dokumentasi Seni Budaya	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pendokumentasian seni daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Penerbitan karya seni	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan dan Terciptanya Karya Seni	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pergelaran Karya Seni ke Luar Negeri
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Penerbitan karya seni	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Penerbitan dan Terciptanya Karya Seni	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksannanya Penerbitan Karya Seni Seniman Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Workshop seni	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan dan pembinaan sumberdaya manusia	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya workshop Seni Budaya Tradisi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Rekonstruksi Seni	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Perlindungan (Rekronstruksi) Kesenian Tradisi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan dan pembinaan sumberdaya manusia	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Diskusi Seni Budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Temu Budaya se Indonesia	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya manusia	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terselenggaranya Pentas Seni

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Temu Budaya se Indonesia	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase peningkatan dan Pembinaan Sumberdaya manusia	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terselenggaranya kemitraan dan Pentas Seni Temu Karya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Peningkatan teknis sanggar seni	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Perlindungan pengembangan dan pemanfaatan serta pembinaan sumber daya manusia	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terselenggaranya Bimbingan Tehnis Sanggar Seni
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	102	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terinventarisir dan terdokumentasinya Sumber daya manusiayang berprestasi	3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Terselenggaranya pemilihan Seniman dan Budayawan berprestasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	103	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase dokumentasi nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya kegiatan pendokumentasian (manual dan digital) nilai -nilai budaya yang berkembang di masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	103	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tertatanya Pranata adat yang berkembang di masyarakat	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan lembaga dan Pranata Adat di 10 kab/kota
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	103	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Terlaksananya kegiatan pagelaran budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Festival Kebudayaan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kesenian	103	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terfasilasinya Sarana dan Prasarana Lembaga Adat	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya sarana dan Prasarana pengembangan Lembaga Adat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penyelenggaraan Festival seni	Peningkatan teknis sanggar seni	101	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Sumber Daya Manusia yang Mendapat Pembinaan Kesenian Tradisional	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pembinaan tehnis SDM Kesenian Tradisional
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penyelenggaraan Festival seni	Pengembangan statistik kebudayaan dan pariwisata	101	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Standarisasidan Sertifikasi kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	terlaksananya standarisasi dan sertifiaksi seniman dan budayawan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penyelenggaraan Festival seni	Peningkatan teknis sanggar seni	101	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pembinaan Lembaga Kesenian Tradisional	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Tehnis Lembaga seni
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	Peningkatan teknis sanggar seni	101	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia kesejarahan dan lembaga sejarah lokal Provinsi NTB

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Terlaksananya kegiatan festival/lomba kesejarahan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase jumlah Sumber Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pembinaan kesejarahan	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Informasi Sejarah (manual dan digital)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	101	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya kegiatan Sosialisai dan Pendataan Cagar Budaya di Daerah Kab/Kota yang ditetapkan	1	Register Cagar Budaya	Teregisternya Cagar Budaya di Daerah Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	101	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksana kegiatan Sosialisasi dan Pemeriksaan berkala terhadap Cagar Budaya di Kab/Kota yang ditetapkan	2	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Terjadi Pemeriksaan berkala Cagar Budaya di Daerah Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	101	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Adanya Publikasi Potensi Cagar Budaya Berbasis Pemanfaatannya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, iptek, kebudayaan dan pariwisata di 10 daerah Kab.Kota yang dietetapkan	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Terpublikasinya Potensi Nilai, Informasi dan Pemanfaatan CB di Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksana kegiatan Lomba Cagar Budaya dan Museum Berbasis TIK (PhoneGraphi, Vlog, Poster, Cerpen, dll) di 10 derah Kab/Kota yang ditetapkan	4	Pendayagunaan Cagar Budaya	Memiliki kebermanfaatan atau kepentingan kesejahteraan rakyat dari Cagar Budaya di 10 daerah Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksana kegiatan Lomba Cagar Budaya dan Museum Berbasis TIK (PhoneGraphi, Vlog, Poster, Cerpen, dll) di 10 derah Kab/Kota yang ditetapkan	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Terdapat 50 Kategori Mutu/Kapasitas Pemanfaatan TIK dalam peningkatan pemahaman tentang cagar budaya di 10 Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	102	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya kegiatan statistik dan digitalisasi kekayaan budaya berupa Cagar Budaya yang dikelola di 10 Kab/Kota yang ditetapkan	1	Register Cagar Budaya	Terdaftarnya kekayaan budaya berupa Cagar Budaya yang dikelola di Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	102	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Adanya kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi / Rekonstruksi benda cagar budaya yang dikelola di 10 Kab/Kota yang ditetapkan	2	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Terdapat SOP standar tentang perawatan / pemeliharaan Cagar Budaya yang dikelola di 10 Kab/Kota yang ditetapkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	102	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Adanya kegiatan Rehabilitasi/ Renovasi / Rekonstruksi (Pemagaran & Perawatan) benda cagar budaya yang dikelola di 10 Kab/Kota yang ditetapkan	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Terpagar dan terawatnya Cagar Budaya yang dikelola sebagai bentuk peningkatan Potensi Nilai, Informasi dan Pemanfaatan CB di Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	102	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Adanya kegiatan Lomba Jejak Cagar Budaya dan Museum di lokasi Cagar Budaya yang dikelola di 10 Kab/kota yang ditetapkan	4	Pendayagunaan Cagar Budaya	Terdokumentasinya (Digitalisasi) hasil lomba Jejak CBM sebagai bentuk pendayagunaan Cagar Budaya yang dikelola di Kab/Kota yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	102	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya kegiatan Bimtek Cagar Budaya dan Museum pada 50 peserta pengelola Cagar Budaya di 10 Kab/Kota yang ditetapkan	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Adanya SOP / Juklak dalam penguatan Kapasitas SDM tentang pengelolaan cagar budaya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	103	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Adanya kegiatan Workshop Pembentukan Tim Penyusun Pergub pada 60 peserta Provinsi/Kab/Kota yang direkomendasikan untuk Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	1	Register Cagar Budaya	Terbentuknya Tim Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	103	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Adanya kegiatan Bimtek Penyusunan Kategori dan Standarisasi Kerusakan / Kehancuran / Kemusnahan CB dalam Penerbitan Izin Membawa CB ke Luar Daerah	2	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Adanya SOP standar Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Rehabilitasi/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	103	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Adanya kegiatan Sosialisasi Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah bagi 60 peserta unsur pemerintah dan masyarakat	3	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Adanya Digitalisasi Potensi Nilai, Informasi & Pemanfaatan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	103	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Adanya kegiatan Bimtek Pemberdayaan CB terkait Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah bagi 60 peserta unsur pemerintah dan masyarakat	4	Pendayagunaan Cagar Budaya	Adanya SOP Izin Membawa CB untuk kepentingan pemberdayaan CB
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang direvitalisasi dan dilestarikan	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	103	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Adanya kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya dalam Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah terhadap 50 peserta unsur (jupel, penjaga situs, pengelola CB dan masyarakat)	5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Adanya SOP / Juklak dalam penguatan Kapasitas SDM tentang pengelolaan cagar budaya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Bimtek Penataan atau Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu terhadap 50 peserta unsur pemerintah	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Adanya Standarisasi Penataan atau Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu dalam Pengelolaan Museum Provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengkajian, Inventarisasi, Katalogisasi, dan Pemutakhiran Data Koleksi	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi yang Dikaji, Diinventarisasi, Dikatalogisasi, dan Dimutakhirkan Datanya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Perawatan/pemeliharaan prefentif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Workshop Pengelolaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Museum Inklusi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Perawatan/pemeliharaan prefentif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Perawatan Preventif Koleksi Museum dan Workshop Konservasi Koleksi	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dirawat/Dipelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Konservasi Kuratif Koleksi Museum	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dikonservasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Kegiatan Bimtek Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman terhadap 50 peserta	2	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Adanya SOP / Juklak dalam penguatan Kapasitas SDM tentang pengelolaan Museum Provinsi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Kegiatan Bimtek Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum bagi 60 peserta unsur pemerintah	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Adanya dokumentasi akses masyarakat terhadap museum
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Nilai Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Diklat/Bimtek/dan Sejenisnya yang Diikuti Oleh SDM Permuseuman
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pameran keliling museum	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pameran Keliling Museum	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Koleksi yang Dipamerkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pameran Temporer Museum	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pameran Temporer Museum	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Koleksi yang Dipamerkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Penyuluhan koleksi museum	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Penyuluhan Koleksi Museum	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Koleksi yang Diterangkan ke Masyarakat
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Budaya Daerah	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Kemitraan dengan Museum-Museum Se-Indonesia	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Koleksi yang Dipamerkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pembangunan gedung kantor	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum yang Representatif	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Diadakan dan Dipelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Terpeliharanya taman, tempat parkir, dan halaman kantor museum	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Taman, tempat parkir, dan halaman kantor museum yang dipelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Kegiatan Pengadaan Sarana & Prasarana Penunjang Pengelolaan Museum	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Adanya daftar Inventarisir Pengadaan Sarana & Prasarana Penunjang
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Renovasi Tata Pameran Tetap	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Optimalnya fungsi ruang pameran museum	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Media Pamer Yang Direvitalisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Budaya	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peresentase Koleksi Permuseuman dikelola	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	101	Pengelolaan Museum Provinsi	Kegiatan Penataan Kawasan dan Lingkungan Museum Inklusi	5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Adanya Site plan / Setting lokasi Musium inklusi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan keuangan semesteran	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan peralatan rumah tangga	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya	101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen perencanaan pembangunan embung; dan bangunan penampung air lainnya
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air	101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi SDA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kapasitas tampung air baku yang terpenuhi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Talud/Bronjong sungai
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Banjir	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	101	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terlaksananya Normalisasi/perkuatan tebing sungai
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi permukaan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terlaksananya pembangunan bendung irigasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		4	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi rawa
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		5	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi tambak
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		6	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terlaksananya pembangunan sumur jaringan irigasi tanah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Pembangunan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi air tanah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		9	Peningkatan Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	102	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Terlaksananya perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	101	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		6	Penyediaan Prasarana IPLT	Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	101	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Pembangunan/peningkatan infrastruktur	101	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Perencanaan Pembangunan Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Perencanaan Pembangunan Jembatan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Pembangunan Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		5	Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan provinsi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Rehabilitasi Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		9	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya rehabilitasi jalan provinsi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Rehabilitasi Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Pemeliharaan Rutin Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya jalan kewenangan prov.
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Perencanaan Pembangunan Jalan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		12	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	101	Penyelenggaraan Jalan Provinsi		18	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi	101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi	101	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	101	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi		2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Pembinaan Penyusunan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Tersedianya arahan perda kab/kota yang sesuai dengan tata ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Survey dan Pemetaan	102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (Kawasan)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	102	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi		3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Semua SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	101	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		1	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah paket wisata
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Peningkatan strategi tata kelola atraksi dan daya tarik wisata	101	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah sanggar yang di bimtek
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Pengembangan daerah tujuan wisata	102	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah kawasan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Penataan Geopark	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Perencanaan pengembangan Geopark	102	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarkat lingkar geopark yang di bina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	103	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah sarpras
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase desa wisata yang dikembangkan	Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi	104	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sertifikat
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	efektivitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	101	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah media promosi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	efektivitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	101	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Jumlah event
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	efektivitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Pengembangan statistik wisata terpadu	101	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Jenis dokumen penyediaan data dan informasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	efektivitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	101	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah mitra di dalam dan di luar negeri

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	Pengembangan kerjasama industri kreatif	101	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama Bagi Usaha Pemula	Jumlah usaha kreatif pemula
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	101	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah pelaku wisata yang dilatih
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Dinas Pariwisata	Program Pengembangan Kemitraan	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	101	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pokdarwis yang diberikan penyuluhan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	101	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokume RPPLH yang disusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	101	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokume pengendalian pelaksanaan RPPLH yang disusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	3	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Jumlah dokumen KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kesesuaian pelaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	102	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS dan dokumen lingkungan lainnya yang disusun dan divalidasi	4	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang disusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pemantauan Kualitas Lingkungan	101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah lokasi yang dipantau baku mutu air dan udaranya	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah lokasi yang dilakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan uji kualitas lingkungan	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah parameter yang dapat diuji di Lab	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah parameter yang dapat di uji di Lab
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	101	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pemantauan Kualitas Lingkungan	102	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dipantau baku mutu air dan udaranya	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Tersedianya informasi hasil uji kualitas lingkungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan uji kualitas lingkungan	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	102	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah parameter yang dapat diuji di Lab	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah informasi hasil uji kualitas lingkungan yang tersedia
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pemantauan Kualitas Lingkungan	102	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dipantau baku mutu air dan udaranya	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran yang ditangani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pemantauan Kualitas Lingkungan	103	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi yang dipantau baku mutu air dan udaranya	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah lokasi yang difasilitasi pembersihan unsur pencemarannya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	101	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen pengelolaan Kehati yang ditetapkan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	101	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Taman Kehati yang dikelola
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang difasilitasi perizinannya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	101	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Pengkajian Dampak Lingkungan	101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Amdal/ UKL-UPL/ DELH/ DPLH yang dikaji dan dinilai	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah fasilitasi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kasus kerusakan lingkungan yang ditangani	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kapasitasnya
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kasus kerusakan lingkungan yang ditangani	3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelayanan uji kualitas lingkungan	Pengembangan Laboratorium Lingkungan	101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah parameter yang dapat diuji di Lab	3	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pengelola lingkungan yang taat terhadap dokumen lingkungan	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	101	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah kasus kerusakan lingkungan yang ditangani	4	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan lokasi yang diawasi pengelolaan bahan pencemarnya	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	101	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah gerakan peduli lingkungan yang dibina
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	101	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kampung iklim yang difasilitasi setiap tahun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah kasus kerusakan lingkungan yang ditangani	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah kasus kerusakan lingkungan yang ditangani	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah kebijakan penanganan sampah regional yang tersusun
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	2	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah tonase sampah yang diproses di TPA Regional dengan sanitary landfill dan pengolahan lain; Jumlah tonase sampah yang didaur ulang (3R) di TPA dan TPST Regional melalui pemilahan, pelet, BSF, PLTSa, dll.
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah sarpras pemrosesan akhir dan sarpras pengolahan yang terpelihara; Jumlah sarpras daur ulang (3R) yang terpelihara
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan timbunan sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah kelompok masyarakat persampahan yang terbina

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan sampah	Kerjasama pengelolaan persampahan	101	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang ditangani	6	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kerjasama usaha pengelolaan sampah yang terbentuk
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan operasionalisasi lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak	Perencanaan dan Tata Hutan	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Jumlah Rencana pengelolaan hutan tingkat tapak yang disahkan	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi; Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan operasionalisasi lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak	Perencanaan dan Tata Hutan	102	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rencana pengelolaan hutan tingkat tapak yang disahkan	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya data dan informasi wilayah usaha pada Hutan Produksi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya data dan informasi wilayah usaha pada Hutan Lindung
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan operasionalisasi lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak	Perencanaan dan Tata Hutan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Rencana pengelolaan hutan tingkat tapak yang disahkan	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah RPHJP/RPHJPd yang dinilai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Cakupan operasionalisasi lembaga pengelolaan hutan di tingkat tapak	Perencanaan dan Tata Hutan	103	Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Rencana pengelolaan hutan tingkat tapak yang disahkan	7	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah RPHJP/RPHJPd yang dinilai
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi areal RHL yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRHL yang disusun
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas areal yang ditanami	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas lahan yang direhabilitasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas areal yang ditanami	3	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas pembangunan hutan kota
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas areal yang ditanami	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah bibit produktif yang disediakan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah unit pengelolaan hutan yang difasilitasi penanganan karhutla; Jumlah titik api yang dikendalikan	8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi areal RHL yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	9	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas areal RHL yang dimonitoring
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas kawasan hutan yang dilindungi	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Penegakan Hukum Kehutanan	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah penyelesaian kasus Tipihut	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah unit pengelolaan hutan yang difasilitasi pencegahan dan pengamanan hutan	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan perlindungan hutan pada unit pengelolaan hutan yang dimonitoring
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengelolaan Hutan	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	2	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUPHHBK yang difasilitasi perijinannya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	3	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya HHBK
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	4	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Jumlah ijin pengolahan HHBK yang diawasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	107	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	107	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah unit usaha kehutanan yang melaksanakan penatausahaan hasil hutan secara tertib	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah IUPHHK yang difasilitasi perijinannya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			108	Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi		1	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	109	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah lokasi areal RHL yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	109	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah lokasi areal RHL yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengada dan pengedar benih dan/atau bibit yang dimonitoring

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan yang dilindungi	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang difasilitasi pengembangannya	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik Gunung Rinjani yang terfasilitasi pengawetannya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penanganan lahan kritis	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas areal yang ditanami	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	6	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Objek daya tarik wisata alam yang dikembangkan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	7	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Jumlah ijin kerjasama/ kemitraan konservasi yang difasilitasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan melalui pembentukan kelompok HHBK dan Jasling	Pengembangan Usaha Kehutanan	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah usaha HHBK dan Jasling yang dikembangkan	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang dibentuk
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	102	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang difasilitasi pengembangannya	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang terbina
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	103	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang difasilitasi pengembangannya	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE, Geopark, Cagar Biosfer yang ditingkatkan kapasitasnya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Perlindungan Hutan, Konservasi sumber daya alam dan ekosistem	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rasio Luas Kawasan Hutan yang Terlindungi	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	103	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang difasilitasi pengembangannya	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE, Geopark, Cagar Biosfer yang terfasilitasi pengelolaannya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Peningkatan kapasitas penyuluh
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Peningkatan kelas dari Blue ke Gold/Madya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase desa sekitar hutan yang diberdayakan berbasis perhutanan sosial	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penanganan lahan kritis	Pengelolaan DAS	101	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan KTA yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Tersusunnya dokumen RTnRHL KTA
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penanganan lahan kritis	Pengelolaan DAS	101	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	3	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Rehabiltasi Kerjasama dan Perhutanan Sosial	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penanganan lahan kritis	Pengelolaan DAS	101	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah bangunan KTA yang dimonev dan difasilitasi perencanaannya	5	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terfasilitasinya pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Hukum	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk, - Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	- Jumlah Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		2	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	- Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang terdokumentasi dan tersosialisasi, - Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terdokumentasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Kajian Peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		3	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum yang terevaluasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum (Litigasi) yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Rencana Aksi HAM & HAKI	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	- Jumlah Masalah Non Litigasi yang ter fasilitasi, - Jumlah dokumen pelaporan aksi HAM yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum	PROGRAM BANTUAN HUKUM DAN HAM	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pemda	103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		2	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		3	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Hukum		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			103	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah		5	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	N/A	XX	N/A	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kematangan UKPBJ	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	102	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			102	Pengadaan Barang dan Jasa		3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Penguatan layanan sistem pengadaan secara elektronik	102	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah OPD yang terlayani
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Penguatan standarisasi LPSE Provinsi NTB	102	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	4	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Standarisasi yg terpenuhi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengelolaan Sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	102	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	5	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aplikasi pengadaan barang/jasa
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			102	Pengadaan Barang dan Jasa		6	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			102	Pengadaan Barang dan Jasa		7	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	102	Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	8	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jml SDM Terlatih
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	1	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	2	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	3	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			103	Evaluasi Administrasi Pembangunan		4	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB	103	Evaluasi Administrasi Pembangunan	jumah laporan pelaksanaan pembangunan dan rekomendasi	5	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	jumah laporan pelaksanaan pembangunan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa		3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			103	Evaluasi Administrasi Pembangunan		6	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	2	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Hasil dokumen perencanaan (Prov)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Hasil dokumen perencanaan (Prov)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan rancangan RKPD	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Jumlah Hasil dokumen perencanaan (Prov)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil dokumen perencanaan (Kab/Kota)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	3	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah hasil musrenbang
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah hasil pelaksanaan koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	5	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya	Jumlah hasil integrasi perencanaan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan Kompetensi Aparatur Perencana	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	6	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	jumlah hasil identifikasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	7	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	101	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	9	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data sektoral
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Evaluasi Dokumen Perencanaan	102	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	3	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBH CHT	102	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	3	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	1	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	3	Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah hasil evaluasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	103	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program pada RPJMD dengan RKPD	4	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil Koordinasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA		Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	104	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil Koordinasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Koordinasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengembangan Geopark	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengembangan Geopark	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengembangan Geopark	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM		Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil Koordinasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Keterpaduan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Keterpaduan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Keterpaduan perencanaan wilayah dan lingkungan hidup	101	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	102	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Jumlah hasil monev

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Pemantapan keselarasan program pembangunan daerah dlm perencanaan wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil Koordinasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Pemantapan keselarasan program pembangunan daerah dlm perencanaan wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil Asistensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1	PERENCANAAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Wilayah	5	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		Pemantapan keselarasan program pembangunan daerah dlm perencanaan wilayah	103	Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan		3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Jumlah hasil monev
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Pengembangan Data/Informasi	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penyusunan Data Spasial	101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jenis data
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan	101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jenis data
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs	101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah jenis data
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan	101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan	101	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		2	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		4	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		7	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		8	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		9	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan sosial budaya	102	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		3	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil penelitian

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		5	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		6	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan informasi geospasial	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	103	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan		13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah hasil penelitian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Publikasi Penelitian Unggulan	104	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah peserta sosialisasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penghubung Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah		2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah		2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		3	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Promosi dan Informasi Pariwisata Nusantara	101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		3	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		4	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6	PENGHUBUNG	Badan Penghubung Daerah		2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			101	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan Rencana Kerja SKPD**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**1**	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)**	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**3**	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pengelolaan dan Penataan Arsip**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**2**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bahan dan Alat Pendukung
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**5**	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**6**	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun**	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**9**	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**2**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi keuangan**	**4**	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**5**	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan jasa keamanan kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**8**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Alat Tulis Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**10**	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**11**	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**12**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**13**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**15**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyediaan Makanan dan Minuman**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**17**	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**18**	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**21**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pengadaan Mebeleur**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**26**	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**29**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**31**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**33**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**35**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pembangunan Gedung Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**39**	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor**	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**39**	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pendidikan dan Pelatihan Formal**	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian**	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan**	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	**Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan**	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**11**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan DBH, DAU, DAK, Penyesuaian
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan Lainnya
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Pendapatan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB dan BBNKB (Milyar rupiah)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Intensifikasi Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Air Permukaan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Intensifikasi Penerimaan Pajak Rokok	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pajak Rokok
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Retribusi Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	2	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah yang ditindak lanjuti
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Teknis Perkantoran	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	3	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen SOP pelayanan pajak daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Penyusunan Rancangan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	3	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rancangan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang difasilitasi penyusunannya (Draft)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	4	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Rekomendasi kesamsatan (Rekomendasi)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	5	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Jumlah Kali Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Teknis Perkantoran	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	6	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah layanan kesamsatan yang memperoleh sertifikasi ISO
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengawasan dan Pembinaan Internal Secara Berkala	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	6	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Laporan Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Kesamsatan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	7	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Yang Diedukasi
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengembangan Sistim Informasi Manajemen Pengelolaan Pendaptan Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pendapatan yang dikelola
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan (Paket)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	8	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan (Paket)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PLL	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	9	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Rekonsiliasi dan Verivikasi Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	10	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Jumlah Kendaraan terjaring operasi penertiban kendaraan bermotor (Objek)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	10	Pemeriksanaan Pajak Daerah	Singkronisasi data/ tindak lanjut hasil temuan/ sengketa pajak daerah dan retribusi daerah (Laporan)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PLL	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Proyeksi Penerimaan Pendapatan Lainnya
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PLL	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tunggakan Pajak, Retribusi dan PLL
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Pendapatan Daerah**	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	**4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Penerimaan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah**	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	**101**	**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**	**Jumlah Proyeksi Perolehan Pendapatan Daerah**	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan OPGAB

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	**101**	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi**	**1**	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**1**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**6**	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**7**	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**8**	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	**102**	**Administrasi Keuangan**	**Laporan administrasi keuangan**	**9**	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**1**	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**2**	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**3**	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**5**	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**7**	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**8**	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**12**	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**13**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**15**	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyediaan Makanan dan Minuman	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**17**	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**18**	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**21**	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**29**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**31**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**33**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**35**	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	**103**	**Administrasi Umum**	**Laporan administrasi umum**	**39**	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Peningkatan SDM Aparatur	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**9**	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**10**	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi
X	**N/A**	**XX**	**N/A**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Nilai LAKIP PD**	Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah	**104**	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya**	**Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas**	**11**	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimtek
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	1	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	2	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang Tersusun
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	3	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	4	Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA/ DPPA SKPD yang Tersusun

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ttg APBD dan Perubahan APBD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	5	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub APBD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ttg APBD dan Perubahan APBD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	6	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda Perubahan dan Pergub Perubahan APBD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	7	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	8	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen Pendapatan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen APBD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Pedoman RKA/ RKAP SKPD	**101**	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Ketepatan Waktu Penyusunan APBD**	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen Pembiayaan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**		**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**		1	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD Kabupaten/ Kota	**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/ Kota**	2	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah ttg APBD Kabupaten/ Kota	**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/ Kota**	3	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/ Kota**	4	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/ Kota**	5	Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang Terbina
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	**102**	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**	**Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kabupaten/ Kota**	6	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Sosialisasi Regulasi Kab/ Kota yang Terlaksana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah/ Kuasa BUD	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Laporan Posisi Kas Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Dokumen Informasi Keuangan Daerah	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	2	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah SP2D terkait Pembiayaan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	3	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang Tersusun
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah/ Kuasa BUD	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	4	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	SP2D yang diterbitkan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah/ Kuasa BUD	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	5	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	dokumen pengajuan permintaan pembayaran belanja langsung yang sesuai dengan ketentuan (jumlah SPM , SPJ, SKPP yang teregristrasi)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	6	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Realisasi bulanan, triwulanan, semesteran
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	7	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Laporan Optimalisasi Kas
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	8	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Tersusunnya Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	9	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Dokumen Informasi Keuangan Daerah	**103**	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Jumlah SP2D terhadap SPM**	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh OPD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**2**	**KEUANGAN**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**2**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel**	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	**104**	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan**	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	3	Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Rancangan Perda dan Peraturan KDH ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen Rancangan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	5	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan SKPD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	7	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Jumlah SKPD yang Terekonsiliasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Rancangan Perda dan Peraturan KDH ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Terverifikasinya Bukti Memorial Terhadap Pengujian
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	104	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Ketepatan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan dan Sosialisasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			105	Kegiatan Penunjang Urusan		1	Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	105	Kegiatan Penunjang Urusan	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan	2	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Jumlah Kajian Teknis Terkait Pemberian Subsidi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	105	Kegiatan Penunjang Urusan	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan	3	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersampaikan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Dokumen Standar Harga Berdasar Jenis dan Tipe Barang yang Tersusun
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	3	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	4	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Pemeliharaan/ Perawatan BMD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang memiliki ketersediaan data yang optimal
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Pengamanan dan Penerbitan Aset	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	7	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah Penanganan Sengketa Aset
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	8	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Termanfaatkannya aset secara optimal
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	9	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Termanfaatkannya aset secara optimal
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD yang Tersusun
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Jenis laporan pengelolaan barang milik daerah SKPD yang disusun
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2	KEUANGAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel	Penyusunan RKBMD	101	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya koordinasi dan pembinaan pengelolaan BMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM	KD	PROGRAM PADA	INDIKATOR PROGRAM PADA	KEGIATAN PADA	INDI	KD	KEGIATAN PADA	IN	KD	SUB KEGIATAN PADA

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
KD	URUSAN		BIDANG URUSAN	SKPD	PERMENDAGRI 13	KD	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 90	PERMENDAGRI 13	KAT	KD	PERMENDAGRI 90	DI	KD	PERMENDAGRI 90
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD		101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	3	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)		102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Gedung Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan Gedung Kantor		103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal		104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana		101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen yang tersusun	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam		101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi Rawan Bencana Provinsi	2	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (per Jenis Bencana)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Masyarakat yang menerima Informasi Rawan Bencana Provinsi	2	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (per Jenis Bencana)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana		101	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah EWS Kebencanaan	3	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (EWS) Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen yang Disusun	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penyusunan Rencana Kontinjensi (Renkon)		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Dokumen yang Disusun	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pelatihan Tim Reaksi Cepat		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana,
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Gladi Posko dan Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Sarana dan Prasaran Kesiapsiagaan Bencana untuk Pengendalian Operasi	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Ketersediaan Peralatan, Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana	4	Penyediaan Peralatan, Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjr dan Tanah Longsor		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Risiko Bencana yang disusun	5	Pengelolaan Risiko Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Risiko Bencana yang disusun	5	Pengelolaan Risiko Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjr dan Tanah Longsor		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pengurangan Daerah Rawan Kekeringan		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Desa Tangguh Bencana (Destana)		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Lokasi yang Tangguh terhadap Bencana	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Sekolah/Madrasah Aman Bencana (SMAB)		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Lokasi yang Tangguh terhadap Bencana	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Lokasi yang Tangguh terhadap Bencana	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Identifikasi Lokasi pasca Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Bencana yang Teridentifikasi	7	Penanganan Pasca Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Verifikasi Tingkat Kerusakan Pasca Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Bencana yang Terverifikasi	7	Penanganan Pasca Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7	Penanganan Pasca Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pelatihan Tim Reaksi Cepat		102	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Siaga Darurat Bencana		103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Siaga Darurat Bencana		103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani	2	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Siaga Darurat Bencana		103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penyediaan & Penyiapan Bahan, Baran dan Peralatan Serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanganan Bencana		103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Ketersediaan Logistik	4	Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penanganan Siaga Darurat Bencana		103	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Ketersediaan Logistik, Peralatan dan Perlengkapan	4	Penyediaan Logistik, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP)		104	Penataan Sistem Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Regulasi Kebencanaan	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Penyusunan Standar Operational Procedure (SOP)		104	Penataan Sistem Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Produk Sistem Manajemen Bencana yang Dihasilkan	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana		104	Penataan Sistem Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kegiatan	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan Dini dan Pennggulangan Korban Bencana Alam	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1) Persentase Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 2) Persentase Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat		104	Penataan Sistem Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kegiatan Kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kapasitas masyarakat	3	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Anggota FPK (49 Orang) Jumlah Anggota Tim PPWK (53 Orang) - Jumlah Anggota Tim GNRM (67 Orang)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Jumlah Peserta Rapat Pengurus FPK (35 Orang) - Jumlah Peserta Rakorda FPK (40 Orang) - Jumlah Peserta Rapat Forum Pembauran Kemitraan (50 Orang) - Jumlah Peserta Rakor PPWK (60 Orang) - Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (500 Orang) - Jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (500 Orang) - Jumlah peserta Kemah Kebangsaan (100 Orang) - Jumlah peserta Lokakarya (450 Orang) - Jumlah peserta pengurus GNRM (67 Orang) - Jumlah peserta FGD
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	3	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksanan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Kab/ Kota yang melaksanakan pendidikan pancasila dan karakter kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(1) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa (2) Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Anggota Tim Verifikasi (12 Orang)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	- Jumlah peserta Bimtek Keuangan Parpol (60 Orang) - Jumlah peserta Sosialisasi Pendidikan Politik (60 Orang) - Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol (60 Orang) - Jumlah peserta Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi (80 Orang) - Jumlah peserta Forum Komunikasi Pencapaian IDI (80 Orang) - Jumlah peserta seminar Pendidikan Pengembangan Politik (100 Orang) - Jumlah peserta seminar Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda (100 Orang) - Jumlah peserta Rakortek Pokja IDI (60 Orang)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Penyuluhan kepada masyarakat	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase masyarakat yang meningkat wawasan politiknya pada wilayah dengan tingkat partisipasi politik rendah	Peningkatan peran partai politik (parpol) dan organisasi masyarakat (ormas)	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	(1) Jumlah parpol yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat waktu (2) Jumlah politisi perempuan yang mendapat fasilitasi pendidikan politik	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	1	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	3	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksanan pemberdayaan dan pengawasan Ormas (10 Kab./Kota)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	4	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Terlaksananya Monev pemberdayaan dan pengawasan Ormas (10 Kab./Kota)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Ormas yang berpartisipasi dalam pembangunan	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina/ berdayakan	5	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Perda Penyalahgunaan Narkoba (10Kab/Kota)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Bimbingan Teknis dan Monev (10 Desa) - Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama (10 Kab/Kota) - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya (2 Kab) - Tersosialisasinya peraturan perundang-undanga bidang Ekososbud (10 Kab/Kota) - Terpetakan masalah bidang Ekososbud (10 Kab/Kota)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Termonitornya 10 Desa Bersinar di tahun 2020 dan 2021 (20 Desa tersebar di 10 Kab/ Kota)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	(1) Jumlah Desa/ Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba) (2) Jumlah Kampung Madani yang difasilitasi (3) Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Anggota Tim Tim Reaksi Cepat (TRC) Provinsi NTB (10 Orang)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah anggota Tim Forkopimda (24 Orang) - Jumlah anggota Tim PKS (38 Orang) - Jumlah Tim FKDM (29 Orang) - Jumlah Tim PORA (21 Orang) - Jumlah Tim Jejaring (70 Orang)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	- Jumlah Peserta Rakorda Timdu PKS (50 Orang) - Jumlah peserta Rakor Timdu PKS (30 Orang) - Jumlah peserta rakor FKDM (30 Orang) - Jumlah peserta Rakorda FKDM (50 Orang) - Jumlah Peserta Rapat tim PORA (21 Orang) - Jumlah peserta Diklat Dasar Intelejen (30 Orang)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (10 Kab./Kota)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penurunan Potensi Konflik Sosial	Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	(1) Jumlah direktif pimpinan yang dihasilkan (2) Jumlah kasus yang dimediasi	6	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan	

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI														
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Badan Kepegawaian Daerah	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian	101	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Cakupan Ketersediaan Data ASN Secara Elektronik	1	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	101	Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Cakupan Ketersediaan Data ASN Secara Elektronik	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Seleksi penerimaan calon PNS	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS/PPPK yang terseleksi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS/PPPK yang terseleksi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penempatan PNS/PTT	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	2	Penataan dan Mutasi Jabatan	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Jumlah keputusan pengangkatan CPNS, P3K dan PTT
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pemberhentian PNS/PTT	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	4	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Jumlah keputusan pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan PTT

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penyesuaian Pangkat melalui Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah	102	Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang Lulus Ujian Kenaikan Pangkat melalui ujian dinas dan Penyesuaian Ijasah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penyusunan Peta Komposisi ASN	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	1	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Analisis Kesenjangan Jabatan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penyusunan Data Informasi Kompetensi	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	1	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah Dokumen Rencana Pengembangan ASN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penilaian Kinerja ASN	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Akumulasi Persentase Dimensi Kualifikasi dan Kinerja ASN	2	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	jumlah OPD yeng telah melaporkan capaian kinerja
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pemetaan kompetensi ASN	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	3	Pengembangan *Assessment Center*	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pelayanan Konseling ASN	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	5	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah Fasilitasi penialain kompetensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	5	Fasilitasi Profesi ASN	Jumlah Fasilitasi penialain kompetensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Persentase ASN Yang Telah Terpetakan Kompetensinya	6	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah rekomendasi kebutuhan diklat ASN
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Akumulasi Persentase Dimensi Kualifikasi dan Kinerja ASN	7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal dan Sekolahn Kader
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Fasilitasi Seleksi Sekolah Ikatan Dinas	103	Peningkatan Kapastitas ASN	Akumulasi Persentase Dimensi Kualifikasi dan Kinerja ASN	7	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal dan Sekolahn Kader
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural	104	Pengembangan Karir ASN	persentase keterisian jabatan	1	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	104	Pengembangan Karir ASN	persentase keterisian jabatan	2	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit	104	Pengembangan Karir ASN	persentase keterisian jabatan	2	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	105	Pembinaan ASN	Persentase Dimensi Disiplin ASN	1	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	KEPEGAWAIAN	Badan Kepegawaian Daerah	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	105	Pembinaan ASN	Persentase Dimensi Disiplin ASN	3	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan
KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Mebeleur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur
X	N/A	XX	N/A	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	monev administrasi pertanahan yang dilakukan	101	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	cakupan penetapan lokasi yang difasilitasi	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah monev pertanahan untuk penetapan lokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Terlantar	101	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	cakupan penetapan lokasi yang difasilitasi	1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah monev pertanahan untuk penetapan lokasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah	101	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah sengketa dan konflik pertanahan yang di inventarisasi
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah	101	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	jumlah sengketa dan konflik pertanahan yang di mediasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Monitoring pelaksanaan program/kegiatan pusat di daerah	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	1	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	Frekuensi Pemantauan Kegiatan Pusat di Daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Monev pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	1	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	jumlah monev dan koordinasi trantib, linmas dan kebencanaan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	1	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah	1. jumlah segmen batas yang disingkronisasikan, 2. jumlah desa yang ditata
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	jumlah rupa bumi yang difasilitasi untuk dibakukan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se NTB	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	3	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	jumlah ijin dan administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang diselesaikan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	4	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah DOB yang difasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/ Desa	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Pembinaan Penataan Daerah	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	4	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	jumlah SPM yang difasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Penyusunan LPPD Gubernur	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	5	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah Dokumen LPPD yang diselesaikan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	5	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	frekuensi koordinasi peningkatan kapasda
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	5	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	jumlah Dokumen Informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Pemerintahan	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	cakupan pelaksanaan pemerintahan dan otonomi daerah	6	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Organisasi	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Laporan administrasi umum	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	1. Meningkatkan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	101	Penataan Organisasi	1. Persentase perangkat daerah tingkat kematangan tinggi	1	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	1. Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi menuju tingkat kematangan tinggi, II. Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	2. Meningkatnya kualitas analisa formasi jabatan	Penataan Perangkat Daerah Provinsi dan Evaluasi Perangkat Daerah Provinsi	101	Penataan Organisasi	2. Persentase analisa formasi jabatan Perangkat Daerah berkualitas	2	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Pengembangan Sistem Analis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	3. Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Penyusunan analisis jabatan dan formasi jabatan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	101	Penataan Organisasi	3. Persentase pelayanan publik perangkat daerah yang terstandar	3	Penataan Analisis Jabatan	1. Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi Penataan SDA, II. 2. Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun, III. Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Peningkatan Pelayanan Publik	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	4. Meningkatnya kualitas standarisasi kinerja perangkat daerah	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	101	Penataan Organisasi	4. Persentase laporan SAKIP Perangkat Daerah baik	4	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	I. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi, II. Jumlah Kab/Kota yang Nilai PMPRB baik
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Evaluasi Kinerja SKPD dan Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	5. Meningkatnya kualitas standar pelayanan perangkat daerah	Penilaian kinerja SKPD dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	101	Penataan Organisasi	5. Persentase Perangkat Daerah yang berbudaya kerja baik	5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	I. Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja SKPD, II. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki LAKIP baik
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Peningkatan Budaya Kerja	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja	101	Penataan Organisasi	6. Persentase pelayanan publik perangkat daerah yang terstandar	6	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	I. Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menerapkan Budaya Kerja baik
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	Program Reformasi Ketatalaksanaan	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) OPD	101	Penataan Organisasi	7. Persentase pelayanan publik perangkat daerah yang terstandar	7	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	I. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Organisasi	1. Program Peningkatan Pelayanan Publik, II. Program Pengelolaan Kelembagaan IT Pelayanan Publik, III. Program Pemenuhan Kepatuhan Pelayanan Publik, dan IV. Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM		I. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik, II. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik, III. Monev pelaksanaan Pembangunan Pelayanan Publik, IV. Pembentukan Kerjasama antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik	101	Penataan Organisasi		8	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1. Jumlah unit kerja pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan, II. Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti, III. Jumlah perangkat daerah termonitoring pelaksanaan pelayanan publik, IV. jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Kab./Kota	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	6	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Antar Pemerintah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Provinsi Lainnya	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	6	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Antar Pemerintah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	6	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Antar Pemerintah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Kab./Kota	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Non Pemerintah di Provinsi Lainnya	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Peningkatan Kerjasama Non Pemerintahan	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembentukan Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	7	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah dengan Badan Usaha/Swasta
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengendalian Kerjasama Pemerintahan	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	8	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kerjasama	Program Pengendalian Kerjasama Daerah	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pelaksanaan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengendalian Kerjasama Non Pemerintahan	101	Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase Pemantauan pelaksanaan pemerintahan dan OTDA Pemda Provinsi	8	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	6	8	9	11	10	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlatan dan perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan		103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	1	Perencanaan dan Pelaporan Tugas	Jumlah dokumen dan laporan yang terselesaikan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan		103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	2	Pengelolaan Kepegawaian	Jumlah layanan kepegawaian yang terselesaikan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	3	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah materi sambutan yang terselesaikan
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non dapartemen/luar negeri	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	4	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Informasi program, kegiatan pimpinan yang terpublikasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	5	Dokumentasi Pimpinan	Jumlah dokumentasi yang terekspose
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Pemantapan pelayanan protokoler	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	6	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah acara Yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Pemantapan pelayanan protokoler	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	7	Fasilitasi Tamu	Jumlah penerimaan/ kunjungan tamu yang terfasilitasi
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Humas dan Protokol	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi Pimpinan	Pemantapan pelayanan protokoler	103	Pelaksanaan Administrasi Pimpinan	Terlaksananya penyediaan administrasi/materi Pimpinan	8	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah layanan keprotokolan yang terselesaikan
KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**11**	**10**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Belanja Tidak Langsung (Gaji ASN)	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	9	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
X	N/A	XX	N/A	Biro Kesejahteraan Rakyat	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**1**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan SDM Aparatur	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Ketaqwaan Kepada Tuha Yang Maha Esa	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Kegiatan Peningkatan Ketqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Kegiatan)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pesona Khasanah Ramadhan	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Pesona Khasanah Ramadhan (Hari)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Iman dan Taqwa	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan IMTAQ (Kali)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Pelaksanaan Embarkasi Haji NTB	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Calon Jamaah Haji dan Jamaah Haji yang dilayani (Orang)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan STQ/MTQ Provinsi/Nasional	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Kafilah STQ/MTQ Tingkat Provinsi/Nasional Yang Handal (Orang)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Peserta Diklat Managemen Masjid (Orang)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ)	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Peserta Training Center STQ /MTQ Provinsi/Nasional (Orang)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Kerukunan Umat Beragama/ FKUB	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rakor FKUB (Kegiatan)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/ Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	2	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Sarana Prasarana Peribadatan Yang Terbantu (Unit)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Melalui Monitoring dan Evaluasi Partisipasi Masyarakat	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan OPD Rumpun Kesra (Dokumen)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah Bahan Perumusan Roadmap Angkatan Kerja (Dokumen)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat		2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat		102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Mewabah	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	5	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan Penguatan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Mewabah (Dokumen)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) TERMASUK HIV DAN AIDS	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4NG)	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	5	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan P4GN (Kali)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PENYAKIT MENULAR SEKSUAL (PMS) TERMASUK HIV DAN AIDS	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPA D Provinsi NTB)	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	5	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Jumlah Koordinasi dan Sosialisasi HIV/AIDS (Kali)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	6	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Dokumen)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	6	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penguatan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	6	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	Jumlah Bahan Perumusan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan PMKS (Dokumen)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	7	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan	Jumlah Peserta Sekolah/ Madrasah Sehat (Sekolah/Madrasah)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	1	SEKRETARIAT DAERAH	Biro Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Layanan Di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pemuda Kreatif dan Berprestasi	102	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat	7	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan	Jumlah Kelompok Marching Band dan Gendang Beleq (Kelompok)

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	7	6	8	9	11	10	12	13	14	15	16

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	102	Administrasi Keuangan	Laporan administrasi keuangan	7	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	4	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah PNS
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Alat Tulis Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis ATK
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Instalasi Listrik
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyediaan Makanan dan Minuman	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pembangunan gedung kantor	103	Administrasi Umum	Laporan administrasi umum	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari hari Tertentu
X	N/A	XX	N/A	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai LAKIP PD	Pendidikan dan Pelatihan Formal	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya	Jumlah Sumber Daya yang Disiplin dan Berkapasitas	9	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Diklat Formal
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	1	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pelaksanaan Kompetensi Teknis Umum, , Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pengembangan Kompetensi Urusan pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis			Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu		102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		2	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	- Tercapainya Nilai Indeks Dimensi Pengembangan Kompetensi; - Tersusunnya Rumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional serta Pengelolaan Kelembagaan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Tertentu		102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan yang dihasilkan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Sumber Belajar
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		4	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Tenaga Pengembang / Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		5	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga yang terlaksana
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		6	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pimpinan Tinggi , PKA dan PKP yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat penjenjangannya
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Peserta Prajabatan
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	**URUSAN**	**BIDANG URUSAN**		**SKPD**	**PROGRAM PERMENDAGRI 13**	**KD**	**PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13**	**KD**	**KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90**	**KD**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR SUB KEGIATAN**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			102	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Prajabatan

KODE & NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI															
KD	URUSAN	BIDANG URUSAN		SKPD	PROGRAM PERMENDAGRI 13	KD	PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR PROGRAM PADA PERMENDAGRI 90	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 13	KD	KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	INDIKATOR KEGIATAN PADA PERMENDAGRI 90	KD	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

LAMPIRAN II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2021

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**1,952,054,042,873**	**1,461,951,683,967**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,447,779,352,756**	**885,052,343,683**	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**951,209,800**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen			436,269,800	304,893,750	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dokumen			0	304,893,750	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**951,209,800**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	7 dokumen			79,090,000	523,836,500	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	7 dokumen			0	523,836,500	
1	01	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	3 dokumen			0	902,175,000	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**951,209,800**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen			79,090,000	299,535,325	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dokumen			0	299,535,325	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**951,209,800**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen			79,090,000	0	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,148,683,575**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	4 dokumen			0	118,243,000	
1	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**951,209,800**	**2,148,683,575**	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen			79,090,000	0	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 dokumen			146,080,000	902,175,000	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 dokumen			52,500,000	118,243,000	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**852,321,592,072**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	7343 orang			0	852,240,507,987	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,438,821,267,006**	**856,027,841,972**	
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	7343 orang			751,521,254,806	852,240,507,987	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa administrasi keuangan	3240 OB			1,510,213,200	3,706,249,900	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen			21,142,600	0	
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen			685,632,938,400	38,663,000	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**852,321,592,072**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dokumen			0	38,663,000	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**1,438,821,267,006**	**856,027,841,972**	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 dokumen			26,955,500	42,421,085	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen			61,534,100	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	17 dokumen			24,667,400	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen			22,561,000	0	
1	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**852,321,592,072**	
1	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 dokumen			0	42,421,085	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**27,624,026,191**	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	5000 dokumen			0	8,326,000	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**596,858,900**	**561,966,820**	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 dokumen			62,958,400	0	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**27,624,026,191**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening pembayaran	33 rekening			0	584,716,396	
1	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa pemeliharaan	15 jasa			0	838,580,000	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terkelolanya asset sesuai standar	1 dokumen			0	561,966,820	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**596,858,900**	**561,966,820**	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dokumen			214,605,600	0	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terkelolanya asset sesuai standar	1 dokumen			319,294,900	561,966,820	
1	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**27,624,026,191**	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa administrasi keuangan Jumlah Jasa Administrator ICT Jumlah Jasa Tenaga Administras Jumlah PTT	2016 OB 24 OB 192 OB 28 OB			0	3,706,249,900	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan	108 OB 180 OB			0	901,427,500	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ATK	26 jenis			0	35,882,875	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetak dan penggandaan	75000 lbr			0	22,626,825	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen instalasi listrik	8 jenis			0	16,698,000	
1	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	36 bh			0	159,779,275	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Eksemplar	3650 eksemplar			0	31,194,900	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	11064 orang			0	1,093,728,200	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Frekuensi koordinasi dalam daerah Frekuensi koordinasi/konsultasi keluar daerah	67 OT 64 OT			0	13,171,617,000	
1	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas	10 buah			0	949,900,000	
1	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 paket			0	1,210,724,600	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung	20 bh			0	204,815,000	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubler	20 bh			0	335,903,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Taman gedung kantor yang terpelihara	5 paket 1 paket			0	56,931,900	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	40 unit			0	776,365,000	
1	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengakapan gedung kantor yang terpelihara	40 unit			0	409,802,500	
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	40 unit			0	122,877,500	
1	01	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor yang rehabilitasi	1 unit			0	2,423,912,500	
1	**01**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**74,733,800**	**0**	
1	01	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pendapatan	500 juta			55,988,000	0	
1	01	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen			18,745,800	0	
1	**01**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**3,445,513,620**	
1	01	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta diklat	820 org			0	2,755,513,620	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pergub yang tersosialisai Jumlah Pergub yang tersusun	6 pergub 2 pergub			0	690,000,000	
1	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**1,573,060,400**	**3,445,513,620**	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang	250 orang			0	0	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pakaian	35 set			0	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen kepegawaian	12 dokumen			401,402,500	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pemantauan	4 kali			72,450,000	0	
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pergub yang tersosialisai Jumlah Pergub yang tersusun	6 pergub 2 pergub			855,765,000	690,000,000	
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta diklat	820 org			243,442,900	2,755,513,620	
1	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**2,464,484,500**	**14,371,747,800**	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen instalasi listrik	8 jenis			11,199,000	16,698,000	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK Jumlah peralatan gedung kantor	26 jenis 36 bh			0	35,882,875	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	11064 orang			1,172,875,000	1,093,728,200	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetak dan penggandaan	75000 lbr			89,602,000	22,626,825	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksemplar	3650 eksemplar			137,160,000	31,194,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan/material	50 jenis			65,630,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	2500 orang			139,200,000	0	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi koordinasi dalam daerah Frekuensi koordinasi/konsultasi keluar daerah	67 OT 64 OT			808,950,000	13,171,617,000	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen arsip	250 arsip			39,868,500	0	
1	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**209,647,250**	**2,496,528,100**	
1	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas	10 buah			0	949,900,000	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubler	20 bh			0	335,903,500	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan gedung Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 bh 4 paket			209,647,250	1,210,724,600	
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah buku	30 judul			0	0	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aplikasi	10 aplikasi			0	0	
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung	1 unit			0	0	
1	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,291,781,100**	**2,333,049,896**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	5000 dokumen			32,344,600	8,326,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening pembayaran	33 rekening			355,436,000	584,716,396	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa pemeliharaan	15 jasa			0	838,580,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan Jumlah jasa pegawai tidak tetap Jumlah jasa Tenaga Pendukung Administrasi	108 OB 180 OB 24 OB 251 OB			1,904,000,500	901,427,500	
1	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**796,310,000**	**3,667,011,900**	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	40 unit			682,410,000	776,365,000	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	39 buah			0	0	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah perlengakapan gedung kantor yang terpelihara	40 unit 40 unit			57,900,000	409,802,500	
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aplikasi	6 aplikasi			0	0	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang rehabilitasi	1 unit			0	2,423,912,500	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang terpelihara Taman gedung kantor yang terpelihara	5 paket 1 paket			56,000,000	56,931,900	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**835,883,044,760**	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	terbangunnya USB	1 Paket			0	3,321,930,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	terbangunnya unit sekolah baru terbangunnya USB	1 sekolah 1 Paket			62,891,729,000	3,321,930,250	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Penambahan Ruang Kelas Baru	92 Paket			0	20,032,652,700	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Penambahan Ruang Kelas Baru	92 Paket			7,446,520,000	20,032,652,700	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Guru Pembangunan Ruang Kepala Sekolah Pembangunan Ruang Tata Usaha	10 ruang 10 Ruang 10 Ruang			0	29,244,026,200	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Guru Pembangunan Ruang Kepala Sekolah Pembangunan Ruang Tata Usaha	10 ruang 10 Ruang 10 Ruang			0	29,244,026,200	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	12 Paket			0	16,259,332,500	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	12 Paket			0	9,755,599,500	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	12 Paket			0	9,755,599,500	
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	12 Paket			0	8,224,306,650	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	12 Paket			0	8,224,306,650	
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang	10 ruang			0	5,831,282,000	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang	10 ruang			0	5,831,282,000	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Perabotannya Rehab Perpustakaan Sekolah dan Perabotannya	2 Paket 2 Paket			0	10,965,742,200	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Perpustakaan Sekolah dan Perabotannya Rehab Perpustakaan Sekolah dan Perabotannya	2 Paket 2 Paket			0	10,965,742,200	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,315,814,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	13	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,315,814,700	
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah	50 Ruang			0	14,496,587,775	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Toilet Sekolah	50 Ruang			733,008,000	14,496,587,775	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Fasilitas Parkir	6 Paket			0	0	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembangunan Ruang	10 ruang			0	4,589,107,200	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan Ruang	10 ruang			0	4,589,107,200	
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Rehab Sedang/ Berat Ruang Guru beserta Prabotannya)	3 Paket 12 Paket			0	23,643,821,106	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Rehab Sedang/ Berat Ruang Guru beserta Prabotannya)	3 Paket 12 Paket			100,000,000	23,643,821,106	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang Guru Jumlah Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Tata Usaha	10 ruang 10 Ruang 10 Ruang			0	14,112,804,830	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang Guru Jumlah Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Tata Usaha	10 ruang 10 Ruang 10 Ruang			0	14,112,804,830	
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	7,479,292,950	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	1,908,580,158	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	1,908,580,158	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	4,487,575,770	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	4,487,575,770	
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang UKS	10 ruang			0	1,878,309,720	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang UKS	10 ruang			0	1,878,309,720	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	5,983,434,360	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	5,983,434,360	
1	01	02	1.01	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah ruang bina diri yang direhab	1 ruang			0	159,360	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	4,749,725,952	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	4,749,725,952	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang Ibadah Jumlah Ruang Toilet	10 Ruang 10 ruang			0	8,741,080,678	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang Ibadah Jumlah Ruang Toilet	10 Ruang 10 ruang			0	8,741,080,678	
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang	10 ruang			0	2,110,989,312	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang	10 ruang			0	2,110,989,312	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Pengadaan Mebel	4 Paket			399,274,900	0	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	36	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pengadaan Mebeluer Sekolah	5 Paket			0	0	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pengadaan Komputer dan Perlengkapan Sekolah	9 Paket			0	0	
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (Buku dan a;at tulis Siswa SMA : Pemenuhan SPM)	8.385 Paket			0	2,842,800,000	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa yang Menerima Alat Tulis	15000 siswa			2,266,518,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Komputer/Laptop Kelengkapannya	50 Paket			0	9,679,619,000	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	41	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik (Komputer/Laptop Kelengkapannya	50 Paket			0	9,679,619,000	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Biaya Personil Peserta Didik SMA Negeri (Dana BOS) Jumlah Penerima Beasiswa peserta ielts Peserta Toefl	87.37 Siswa 200 orang 1 orang 1 orang			0	145,385,811,865	
1	01	02	1.01	47	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Proktor Asesment yang di Bimtek	494 orang			0	1,453,019,940	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Proktor Asesment yang di Bimtek	494 orang			0	1,453,019,940	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Hasil Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA	1 Tahun			49,976,500	64,086,050	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Hasil Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA	1 Tahun			0	64,086,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah GSI SMP Jumlah KSN SMA jumlah KSN SMP jumlah peserta FLS2N jumlah peserta FLS2N SD jumlah peserta FLS2N SMP jumlah peserta KO2SN SD jumlah peserta KO2SN SMP jumlah peserta KSN SD ss	180 orang 50 Sekolah 30 orang 180 orang 80 orang 140 orang 100 orang 100 orang 30 orang 1 paket			0	9,388,641,446	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah GSI SMP Jumlah Jambore Tah''fiz Qur''an SMA Jumlah KSN SMA jumlah KSN SMP jumlah peserta FLS2N jumlah peserta FLS2N SD jumlah peserta FLS2N SMP jumlah peserta KO2SN SD jumlah peserta KO2SN SMP jumlah peserta KSN SD ss	180 orang 50 Orang 50 Sekolah 30 orang 180 orang 80 orang 140 orang 100 orang 100 orang 30 orang 1 paket			366,515,000	1,723,479,148	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang di Bimtek Jumlah Dokumen Hasil Kendali Kinerja PTK jenjang SMA jumlah jam tatap muka guru non PNS/Negeri Jumlah Jasa administrasi TU non PNS/ Negeri Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SD Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Guru prestasi jenjang TK Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SD Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SMP jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SD jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP Jumlah Peserta Seleksi Guru Tidak Tetap/pegawai Tidak Tetap Jumlah Peserta Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tersusunnya Data Guru dan Tenaga Kependidikan	270 orang 1 dokumen 1475344.38 JJM 500000 ob 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 2434 orang 434 orang 1 dokumen			0	1,697,999,380	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	50	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Calon Kepala Sekolah yang di Bimtek Jumlah Dokumen Hasil Kendali Kinerja PTK jenjang SMA jumlah jam tatap muka guru non PNS/Negeri Jumlah Jasa administrasi TU non PNS/ Negeri Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SD Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Guru prestasi jenjang TK Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SD Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SMP jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SD jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP Jumlah Peserta Seleksi Guru Tidak Tetap/pegawai Tidak Tetap Jumlah Peserta Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Tersusunnya Data Guru dan Tenaga Kependidikan	270 orang 1 dokumen 1475344.38 JJM 500000 ob 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 2434 orang 434 orang 1 dokumen 1 dokumen			0	1,697,999,380	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA jumlah jam tatap muka guru non PNS/Negeri Jumlah Jasa administrasi TU non PNS/ Negeri Jumlah Kasus yang difasilitasi Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMA Jumlah peserta Guru Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SD Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Guru prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SD Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi SMA Jumlah Peserta Laboran Berprestasi SMA Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru SMA Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi SMA jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SD jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan pada SMA Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi SMA Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pada Satuan Pendidikan Khusus (Inklusi dan SLB)	70 orang 1475344.38 JJM 500000 ob 30 orang 1 dokuemn 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 10 orang 80 orang 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 200 orang 10 orang 60 orang			0	211,521,616,230	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**0**	**630,753,522,899**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA jumlah jam tatap muka guru non PNS/Negeri Jumlah Jasa administrasi TU non PNS/ Negeri Jumlah Kasus yang difasilitasi Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMA Jumlah peserta Guru Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SD Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Guru prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SD Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi SMA Jumlah Peserta Laboran Berprestasi SMA Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru SMA Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi SMA jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SD jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan pada SMA Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi SMA Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pada Satuan Pendidikan Khusus (Inklusi dan SLB)	70 orang 1475344.38 JJM 500000 ob 30 orang 1 dokuemn 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 10 orang 80 orang 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 200 orang 10 orang 60 orang			0	211,521,616,230	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) Sinkronisasi Data Sekolah	120 Orang 328 Orang			0	805,002,300	
1	**01**	**02**	1.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas**										**237,221,470,200**	**479,554,228,819**	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) Sinkronisasi Data Sekolah	120 Orang 328 Orang			0	805,002,300	
1	01	02	1.01	53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa Penerima BOS	8737 Siswa			162,892,500,000	0	
1	01	02	1.01	54	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			75,428,800	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	terbangunnya unit sekolah baru	1 sekolah			0	1,373,924,550	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	01	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Unit Sekolah	1 Unit			0	0	
1	01	02	1.02	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumkah Ruang	20 ruang			1,523,360,000	0	
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Belanja Penunjang DAK Terbangunnya Ruang Praktik Siswa	1 kegiatan 32 Ruang			43,014,998,016	5,998,825,500	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Terbangunnya Ruang Praktik Siswa	35 Ruang			0	5,998,825,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Laboratorium yang dibangun	4 paket			0	1,199,765,100	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Laboratorium yang dibangun	4 paket			0	1,199,765,100	
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	1 sekolah			0	296,716,100	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	1 sekolah			0	296,716,100	
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah asesbilitas sekolah Jumlah Pagar/tembok yang dibangun Jumlah Toilet/kamar mandi guru/siswa yang dibangun	10 pakt 10 paket 10 paket			0	4,671,442,600	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah asesbilitas sekolah Jumlah Pagar/tembok yang dibangun Jumlah Toilet/kamar mandi guru/siswa yang dibangun	10 pakt 10 paket 10 paket			0	4,671,442,600	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Pembangunan sarana parkir	10 paket			0	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah) yang direhabilitasi	13 ruang			2,311,781,001	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang Kelas Sekolah (Bangunan Sekolah) yang direhabilitasi Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhabilitasi	4 paket 8 paket			0	4,328,184,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	1 paket			0	839,053,248	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	20	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	1 paket			0	839,053,248	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan	120 paket			0	9,399,813,075	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	28	Pengadaan Mebel Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Mebeluer Sekolah yang diadakan	120 paket			599,274,900	9,399,813,075	
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) siswa SMK	8125 siswa			2,247,000,000	1,622,064,029	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Perlengkapan Sekolah (buku dan alat tulis) siswa SMK	8125 siswa			0	1,622,064,029	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	59 paket			0	47,499,600,000	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	33	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah alat Praktik dan Peraga siswa	59 paket			115,000,000	47,499,600,000	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah sekolah Negeri yang menerima biaya personil peserta didik SMK negeri (Dana Bos)	53380162 sisw			0	98,219,200,000	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	38	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Belanja Hibah SMKS di Provinsi NTB Belanja Modal SMKN di Provinsi NTB	10 paket 30 Paket			34,950,000,000	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokument Hasil verifikasi, monitoring, evaluasi dan PBM, ujian SMK	30 dokumen			49,976,500	36,987,220	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Dokument Hasil verifikasi, monitoring, evaluasi dan PBM, ujian SMK	30 dokumen			0	36,987,220	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah peserta KOSN, FLS2N, LKS)	510 siswa			0	2,021,149,955	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Debat Bahasa Jambore SMK Jumlah KOSN Jumlah Peserta FLS2n Jumlah peserta LKS	50 siswa 6 kegiatan 200 siswa 250 siswa 510 siswa			199,500,000	2,021,149,955	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan				Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Data Jumlah Kebutuhan Guru Produktif SMK Dokumen Dokumen Hasil Penilaian Kendali Teknis	100 smk 10 dokument 20 dokumen			69,439,000	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	42	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Woja, Kandai II	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Calon Kepala SMK Peserta Bimtek Jumlah data guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMK Jumlah dokumen hasil Kendali Kinerja PTK SMK Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Jumlah Peserta Seleksi GTT/PTT pada Jenjang SMK	70 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 239 orang 1400 orang			0	17,916,425	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Pendidik dan Pelatihan bagi PTK Jenjang SMK Jumlah kasus yang difasilitasi pada jenjang SMK Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMK Jumlah Peserta Jumlah Peserta Guru Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Laboran Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi Jenjang SMK Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMK Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi Jenjang SMK	65 orang 30 orang 1 dokumen 30 orang 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 80 orang 10 orang 200 orang 10 orang			190,785,000	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Pendidik dan Pelatihan bagi PTK Jenjang SMK Jumlah kasus yang difasilitasi pada jenjang SMK Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMK Jumlah Peserta Guru Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Laboran Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru Tingkat Provinsi Jenjang SMK Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi Jenjang SMK Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan Jenjang SMK Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi Jenjang SMK	65 orang 30 orang 1 dokumen 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 80 orang 10 orang 200 orang 10 orang			0	352,818,160	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah bengkel / UP	6 paket			0	5,998,825,500	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	
1	01	02	1.02	44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah bengkel / UP	6 paket			0	5,998,825,500	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Bintek Perluasaan SKKNI dan Cakupan Ruang Lingkup LSP P1/P2/P3 Kerjasama IDUKA (Jumlah Siswa tersertifikasi) Sinkronisasi data Workshop Manajemen Berbasis Sekolah	50 orang 50 orang 100 orang 100 orang			640,091,200	0	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**0**	**184,898,605,653**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Siswa Yang tersertifikasi LSP Workshop kerjasama DUDI, Penyusunan Penilaian Portofolio, Perluasaan SKKNI dan Cakupan Ruang Lingkup LSP P1/P2/P3 Workshop Sinkronisasi data	100 orang 100 orang 150 orang			0	1,022,319,341	
1	**01**	**02**	1.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan**										**218,042,005,417**	**79,584,242,327**	
1	01	02	1.02	46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa	53380162 Siswa			132,056,800,000	0	
1	01	02	1.02	47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			73,999,800	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	terbangunnya unit sekolah baru	1 sekolah			0	2,529,816,575	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lopok, Lopok	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	terbangunnya unit sekolah baru	1 sekolah			0	2,529,816,575	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang Kelas Yang Dibangun	10 paket			0	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah ruang	2 Ruang			0	463,980,000	
1	01	02	1.03	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang yang terbanguan	3 Ruang			0	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Terbangunnya Ruang perpustakaan sekolah	1 Ruang			0	0	
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah sekolah yang mendapatkan asrama sekolah	1 sekolah			0	1,841,359,300	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	07	Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah sekolah yang mendapatkan asrama sekolah	1 sekolah			0	1,841,359,300	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah sekolah yang mendapatkan prasarana pemagaran	10 paket			0	2,299,945,778	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah sekolah yang mendapatkan prasarana pemagaran	10 paket			0	2,299,945,778	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah sekolah yang mendapatkan rudis guru/penjaga sekolah	6 sekolah			0	1,433,185,200	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	11	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah sekolah yang mendapatkan rudis guru/penjaga sekolah	6 sekolah			0	1,433,185,200	
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	2 unit			0	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	12	Pembangunan Ruang Laboratorium	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Ruang Keterampilan yang dibangun	1 Ruang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.03	15	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah ruang bina diri yang direhabilitasi	1 ruang			0	0	
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah ruang kelas sekolah yang di rehab	16 ruang			0	2,469,940,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah ruang kelas sekolah yang di rehab	1 sekolah			0	1,404,298,350	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	19	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah ruang guru yang direhab	2 Ruang			0	0	
1	01	02	1.03	24	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah toilet yang direhab	12 Ruang			0	0	
1	01	02	1.03	28	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah ruang keterampilan yang di rehab	3 Ruang			0	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	35	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Mubeluer	120 paket			0	0	
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	komputer / laptop 1 sekolah 10 unit	11 paket			0	0	
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah perlengkapan sekolah(buku dan alat tulis siswa SLB pemenuhan SPM) yang diadakan	2000 orang			0	1,142,502,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah perlengkapan sekolah(buku dan alat tulis siswa SLB pemenuhan SPM) yang diadakan	2000 orang			252,400,000	1,142,502,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah sekolah yang mendapatkan kendaraan antar jemput siswa	13 sekolah			0	3,198,046,500	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	39	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah sekolah yang mendapatkan kendaraan antar jemput siswa	13 sekolah			0	3,198,046,500	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah alat praktik dan peraga peserta didik	2 sekolah			0	400,722,330	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	40	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah alat praktik dan peraga peserta didik	2 sekolah			0	400,722,330	
1	01	02	1.03	42	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	tersedianya sarana prasarana belajar yang baik	1 Keg			6,383,955,000	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah siswa SLB Negeri	1625 siswa			0	3,737,500,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Tersedianya media pendidikan siswa	10 Paket			0	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	dokumen/naskah soal Jumlah Siswa SLB yang Diterapis	6 dokumen 75 orang			0	366,410,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	dokumen/naskah soal Jumlah Siswa SLB yang Diterapis	6 dokumen 75 orang			0	366,410,700	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah dokumen sekolah hasil verifikasi	45 sekolah			0	45,967,800	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah dokumen sekolah hasil verifikasi	45 sekolah			0	45,967,800	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah siswa yang mengikuti peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa	1 orang			0	1,648,377,915	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti lomba (LKSN, FLS2N, Vokasi dan KOSN)	290 siswa			100,000,000	0	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Calon Kepala Sekolah Peserta Bimtek Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah data guru dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah dokumen hasil kendali kinerja PTK Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Media Pemanfaatan TIK Jumlah Fasilitator Pemanfaatan TIK Jumlah Media /Model Pembelajaran TIK yang dikembangkan Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online Jumlah peserta GTT/PTT Jenjang Pendidikan khusus Jumlah peserta Pembimbingan Sekolah Rintisan Berbasis TIK Jumlah peserta Rakor TIK Jumlah Peserta Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Jenjang SLB Jumlah peserta Sosialisasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK	10 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 orang 1 Tahun 1 Tahun 13 orang 1 Tahun			0	17,792,685	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.03	49	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Calon Kepala Sekolah Peserta Bimtek Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah data guru dan Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah dokumen hasil kendali kinerja PTK Jenjang Pendidikan Khusus Jumlah Dokumen Media Pemanfaatan TIK Jumlah Fasilitator Pemanfaatan TIK Jumlah Media /Model Pembelajaran TIK yang dikembangkan Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online Jumlah peserta GTT/PTT Jenjang Pendidikan khusus Jumlah peserta Pembimbingan Sekolah Rintisan Berbasis TIK Jumlah peserta Rakor TIK Jumlah Peserta Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Jenjang SLB Jumlah peserta Sosialisasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK	10 orang 1 dokumen 1 dokumen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 orang 1 Tahun 1 Tahun 13 orang 1 Tahun			0	17,792,685	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	Jumlah Calon Kepala Sekolah Peserta Bimtek pada SLB Jumlah data guru dan Tenaga Kependidikan pada SLB Jumlah dokumen hasil kendali Kinerja PTK jenjang SLB Jumlah dokumen standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK SLB Jumlah GTT/PTT pada SLB Jumlah kasus yang difasilitasi pada SLB Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SLB jumlah peserta Bintek kompetensi guru SLB Jumlah Peserta Guru Berprestasi Jenjang SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan pada SLB Jumlah peserta seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada SLB	10 orang 1 dokumen 1 dokumen 15 orang 100 orang 10 orang 1 dokumen 70 orang 10 orang 10 orang 10 orang 3 orang 64 orang 13 orang			0	132,400,075	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Calon Kepala Sekolah Peserta Bimtek pada SLB Jumlah data guru dan Tenaga Kependidikan pada SLB Jumlah dokumen hasil kendali Kinerja PTK jenjang SLB Jumlah dokumen standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK SLB Jumlah GTT/PTT pada SLB Jumlah kasus yang difasilitasi pada SLB Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SLB jumlah peserta Bintek kompetensi guru SLB Jumlah Peserta Guru Berprestasi Jenjang SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Guru Produktif Peningkatan Kompetensi Keahlian Jumlah Peserta Kepala Sekolah Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi SLB Tingkat Provinsi Jumlah peserta Peningkatan Kompetensi PTK dan Tenaga Kebudayaan pada SLB Jumlah peserta seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada SLB	0 orang 0 dokumen 0 dokumen 0 orang 0 orang 0 orang 0 dokumen 0 orang 0 orang 30 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang 0 orang			0	132,400,075	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	jumlah data SLB yang tersingkronisasi	45 sekolah			50,000,000	32,591,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**0**	**20,230,916,208**	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase pendidikan berkualitas	1 tahun	jumlah data SLB yang tersingkronisasi	45 sekolah			0	32,591,000	
1	**01**	**02**	1.03		**Pengelolaan Pendidikan Khusus**										**14,918,354,900**	**16,374,659,943**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Siswa Penerima BOS	1625 Siswa			8,120,000,000	0	
1	01	02	1.03	53	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah,	1:18 Rasio	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			11,999,900	0	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**										**567,849,300**	**1,148,765,245**	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**										**472,849,300**	**1,020,811,070**	
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Bimtek Silabus Muatan Lokal SMA Bimtek Silabus Muatan Lokal SMK	328 orang 50 Orang			128,121,500	624,185,385	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**										**0**	**1,020,811,070**	
1	01	03	1.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimtek Silabus Muatan Lokal SMA Bimtek Silabus Muatan Lokal SMK	328 orang 328 Orang			0	624,185,385	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimtek Penyusunan Kurikulum SMA Bimtek Penyusunan Kurikulum SMK Kurikulum Muatan Lokal Permainan dan Seni Tradisional SMA	150 Orang 150 Orang 50 Orang			0	396,625,685	
1	**01**	**03**	1.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah**										**472,849,300**	**1,020,811,070**	
1	01	03	1.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Bimtek Penyusunan Kurikulum SMA Kurikulum Muatan Lokal Permainan dan Seni Tradisional SMA Workshop Kurikulum SMK : Penyusunan Panduan Penilaian Portopolio	150 Orang 50 Orang 100 Orang			344,727,800	396,625,685	
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**										**95,000,000**	**127,954,175**	
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	tersusunnya dokumen silabus muatan lokal	3 dokumen			0	127,954,175	
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**										**0**	**348,871,935**	
1	01	03	1.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersusunnya dokumen silabus muatan lokal	3 dokumen			0	127,954,175	
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**										**95,000,000**	**127,954,175**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Kurikulum	100 %	Jumlah dokumen yang disusun	3 dokumen			95,000,000	0	
1	**01**	**03**	1.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus**										**0**	**348,871,935**	
1	01	03	1.02	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum muatan lokal	60 orang			0	220,917,760	
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**										**0**	**237,443,950**	
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**										**0**	**237,443,950**	
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLB Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Tingkat Provinsi Jumlah Dokumen Media Pemanfaatan TIK Jumlah Dokumen Standarisasi Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA Jumlah Fasilitator Pemanfaatan TIK jumlah jam tatap muka guru non PNS/Negeri Jumlah Jasa administrasi TU non PNS/ Negeri Jumlah Kasus yang difasilitasi Jumlah Media /Model Pembelajaran TIK yang dikembangkan Jumlah PAK Jabatan Fungsional Guru SMA Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online Jumlah peserta Guru Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SD Jumlah peserta Guru prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Guru prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 Tahun 70 orang 1 Tahun 1475344.38 JJM 500000 ob 30 orang 1 Tahun 1 dokuemn 1 Tahun 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 30 orang 10 orang 10 orang 80 orang 1 Tahun 10 orang 30 orang 30 orang 30 orang 200 orang 10 orang 1 Tahun 1 Tahun 60 orang			0	237,443,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
											Sekolah Berprestasi Jenjang SMA Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SD Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang SMP Jumlah peserta Kepala Sekolah prestasi jenjang TK Jumlah Peserta Kepala Tata Usaha Berprestasi SMA Jumlah Peserta Laboran Berprestasi SMA Jumlah Peserta Olimpiade Sains Guru SMA Jumlah peserta Pembimbingan Sekolah Rintisan Berbasis TIK Jumlah Peserta Pengawas Berprestasi SMA jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SD jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang TK jumlah peserta Pengawas prestasi jenjang SMP Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan pada SMA Jumlah Peserta Pustakawan Berprestasi SMA Jumlah peserta Rakor TIK Jumlah peserta Sosialisasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek pada Satuan Pendidikan Khusus (Inklusi dan SLB)					
1	**01**	**04**	1.01		**Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi**										**33,264,241,300**	**237,443,950**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	04	1.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	50 %	Jumlah Data Guru dan Tendik pada Jenjang SMA, SMK dan SLB yang tersusun Jumlah Guru, Kepsek, Pengawas, KTU, Labora dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Prov. NTB pada Jenjang TK, SD, dan SMP Jumlah Jasa Jam Mengajar (JJM) Guru Non PNS Jumlah Jasa Jam Mengajar (JJM) Guru Tetap Yayasan (GTY) Jumlah PAK yang dihasilkan pada jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Guru, Kepsek, Pengawas, KTU, Labora dan Pustakawan Berprestasi Tingkat Prov. NTB pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Lomba Karya Nyata Kepsek pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Lomba Karya Tulis Guru pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta OGN Tingkat Provinsi Jenjang Pendidikan Dasar Jumlah Peserta OGN Tingkat Provinsi Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Seleksi Kepsek dan Pengawas Sekolah pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Sekolah Yang Didata Pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah TU Non PNS	3 Dokumen 180 org 700000 org 700000 org 35 org 420 org 70 org 210 org 60 org 161 org 6500 org 280 org 6 Dokumen 3150 org			32,206,521,300	237,443,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	04	1.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengawas Sekolah bersertifikat	50 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilian Kinerja Kepsek, Guru dan Pengawas SMA, SMK dan SLB Jumlah Kasus yang difasilitasi pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Bimtek Calon Kepsek pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Bimtek Penilian Kinerja pada Jenjang SMA, SMK dan SLB Jumlah Peserta Pelatihan Proctor Asesment Kompetensi pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Jumlah Peserta Peningkatan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kebudayaan pada Jenjang SMA, SMK dan SLB	9 Dokumen 10 Kasus 186 org 350 org 450 org 680 org			1,057,720,000	0	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**										**60,769,000**	**0**	
1	**01**	**05**	1.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**45,769,000**	**0**	
1	01	05	1.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Jumlah SMA Jumlah SMK	20 unit 20 unit			33,012,000	0	
1	**01**	**05**	1.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**0**	**166,212,375**	
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah SMA yang diawasi Jumlah sekolah SMK yang diawasi	5 Sekolah 5 Sekolah			0	166,212,375	
1	**01**	**05**	1.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**45,769,000**	**0**	
1	01	05	1.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Jumlah SMA Jumlah SMK	20 unit 20 unit			12,757,000	0	
1	**01**	**05**	1.02		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**0**	**0**	
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sekolah yang layak izin operasional	10 sekolah			0	0	
1	**01**	**05**	1.02		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**15,000,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	05	1.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Sekolah yang diliai usulan Izin Oprasionalnya	1 Sekolah			3,500,000	0	
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100 %	Sekolah yang diperbaharui izin Operasionalnya	7 Sekolah			11,500,000	0	
1	**01**	**05**	1.02		**Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**0**	**0**	
1	01	05	1.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sekolah yang mendapatkan wasdal perizinan	29 sekolah			0	0	
1	**01**	**06**			**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**										**200,000,000**	**0**	
1	**01**	**06**	1.01		**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**200,000,000**	**0**	
1	01	06	1.01	07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase bahasa dan sastra yang dikembangkan	35 %					200,000,000	0	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**0**	**8,301,667,725**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**										**0**	**3,908,501,895**	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**3,052,139,215**	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gelar Budaya NTB Gemilang Jumlah pergelaran seni budaya Musyawarah Kebudayaan Pengembangan Permainan Rakyat dan Olah raga tradisional pengiriman peserta permainan tradisional dalam pekan kebudayaan nasional (PKN) pentas seni Terlaksananya Festival Seni terlaksananya pemilihan seniman dan budayawan berprestasi	1 kegiatan 3 pergelaran 1 kegiatan 2 kegiatan 25 org 10 pentas 3 Festival 1 kegiatan			0	3,052,139,215	
2	**22**	**02**	1.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**258,233,000**	**0**	
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Adanya dokumen rekomendasi yang dihasilkan	3 dokumen	131,457,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Adanya dokumen rekomendasi yang dihasilkan	3 dokumen	126,776,000	0	
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**254,938,000**	**0**	
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	17,938,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**856,362,680**	
2	22	02	1.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pendokumentasian WBTB Pengembangan siklus daur hidup masyarakat NTB (3 etnis) Pengembangan Website Kebudayaan terlaksananya Bimbingan teknis kebudayaan Terlaksananya kegiatan pendokumentasian (manual dan digital) nilai -nilai budaya yang berkembang di masyarakat terlaksananya pengadaan alat kesenian terlaksananya pergelaran budaya daerah	2 dokumen 1 dokumen 1 web 3 kegiatan 2 keg 2 paket 2 kegiatan			0	334,089,720	
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**254,938,000**	**0**	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	55,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**856,362,680**	
2	22	02	1.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penguatan Lembaga dan Pranat Adat Peningkatan kapasitas pegiat budaya, dan pekerja seni	30 org 30 org			0	292,272,960	
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan Upacara Adat daerah Eksebisi pengobatan tradisional	5 kegiatan 1 kegiatan			0	230,000,000	
2	**22**	**02**	1.03		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**254,938,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	22	02	1.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	63.64 %			Alat upacara adat yang diberikan kepada masyarakat	17 paket	182,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**										**0**	**559,555,845**	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**559,555,845**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya bimtek kesenian tradisional terlaksananya pemberan sertifikasi seniman danbudayawan terlaksananya pembinaan teknis lembaga seni	2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan			0	266,488,925	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**459,516,700**	**0**	
2	22	03	1.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 %	Jumlah pentas dan Pertukaran Budaya	2 keg			459,516,700	0	
2	**22**	**03**	1.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**559,555,845**	
2	22	03	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan Sekolah berbasis Budaya	3 sekolah			0	293,066,920	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**										**164,312,000**	**0**	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**										**164,312,000**	**0**	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan sejarah	100 %			Tersedianya guru sejarah dan komunitas sejarah yang memiliki pengetahuan tentang sejarah lokal provinsi	300 orang	17,938,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**										**0**	**199,476,470**	
2	22	04	1.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimtek Sejarah dan tradisi Jejak Tradisi Daerah	60 org 40 org			0	199,476,470	
2	**22**	**04**	1.01		**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi**										**164,312,000**	**0**	
2	22	04	1.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan sejarah	100 %			Tersedianya guru sejarah dan komunitas sejarah yang memiliki pengetahuan tentang sejarah lokal provinsi	300 orang	146,374,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**										**0**	**2,943,153,485**	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**1,443,927,810**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	22	05	1.01	01	Register Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta bimtek register penetapan cagar budaya	50 org			0	180,235,360	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**0**	
2	22	05	1.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	60 orang			0	0	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**1,443,927,810**	
2	22	05	1.01	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bimtek kajian terhadap naskah naskah kuno di NTB dengan berbagai disiplin dan pendekatan	20 org			0	122,608,630	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**0**	
2	22	05	1.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Penetapan Cagar Budaya	30 orang			0	0	
2	**22**	**05**	1.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**1,443,927,810**	
2	22	05	1.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			workshop alih media naskah kuno (duplikasi, transkripsi dan digitalisas)	10 dokumen			0	165,634,500	
2	22	05	1.01	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			FGD digitalisasi manuskrip cagar budaya	1 dokumen			0	865,265,405	
2	22	05	1.01	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			workshop penyusunan data dan akreditasi SDM Instruktur pembaca manuskrip dan calon plolog	10 dokumen			0	110,183,915	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**600,000,200**	**288,243,130**	
2	22	05	1.02	01	Pelindungan Cagar Budaya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							260,000,000	0	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**851,921,495**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	05	1.02	01	Register Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bimtek registrasi pengelolaan cagar budaya	50 org			0	218,365,565	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**600,000,200**	**288,243,130**	
2	22	05	1.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia					bimtek kajian terhadap naskah naskah kuno di NTB dengan berbagai disiplin dan pendekatan Bimtek pelatihan Pilologi untuk tenaga pengelola perpustakaan, museum dan masyarakat FGD Penyusunan SOP penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah workshop penyusunan dokumen prosedur standar pengelolaan manuskrip dan naskah kuno	20 org 50 org 1 dokumen 10 dokumen			270,531,400	122,608,630	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**851,921,495**	
2	22	05	1.02	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			workshop penyusunan dokumen prosedur standar pengelolaan manuskrip dan naskah kuno	10 dokumen			0	101,381,240	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**600,000,200**	**288,243,130**	
2	22	05	1.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia					bimtek perawatan, preparasi dan konservasi seluruh naskah kuno yang ada di masyarakat FGD digitalisasi manuskrip cagar budaya FGD Penyusunan SOP penerbitan izin membawa Cagar budaya untuk kepentingan Pendayagunaan cb workshop alih media naskah kuno (duplikasi, transkripsi dan digitalisas)	30 org 1 dokumen 1 dokumen 10 dokumen			0	165,634,500	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**851,921,495**	
2	22	05	1.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bimtek perawatan, preparasi dan konservasi seluruh naskah kuno yang ada di masyarakat	30 org			0	316,202,160	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	22	05	1.02	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			workshop penyusunan kelompok-kelompok masyarakat penyalin naskah kuno	20 dokumen			0	100,593,720	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**600,000,200**	**288,243,130**	
2	22	05	1.02	04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							69,468,800	0	
2	**22**	**05**	1.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi**										**0**	**851,921,495**	
2	22	05	1.02	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bimtek pelathan membaca naskah kuno bagi masyarakat dan guru	20 org			0	115,378,810	
2	**22**	**05**	1.03		**Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi**										**0**	**647,304,180**	
2	22	05	1.03	01	Register Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			bimtek register penerbitan izin membawa cagar budaya	50 org			0	212,178,680	
2	22	05	1.03	02	Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			FGD Penyusunan SOP penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah	1 dokumen			0	85,179,810	
2	22	05	1.03	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimtek pelatihan Pilologi untuk tenaga pengelola perpustakaan, museum dan masyarakat	50 org			0	145,749,850	
2	22	05	1.03	04	Pendayagunaan Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			FGD Penyusunan SOP penerbitan izin membawa Cagar budaya untuk kepentingan Pendayagunaan cb	1 dokumen			0	88,661,895	
2	22	05	1.03	05	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Workshop pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang mengembangkan ekonomi kreatif berbasis naskah kuno seperti usada, boga, kerajinan tangan,kaligrafi, duplikat, naskah kuno dll	10 dokumen			0	115,533,945	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**										**0**	**690,980,030**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**										**0**	**690,980,030**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	FGD penyusunan naskah payung hukum museum inklusip pernaskahan Workshop kajian naskah kuno akademik hasil studi kelayakan museum inklusif penaskahan	1 dokumen 10 dokumen			0	431,128,560	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**										**0**	**690,980,030**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			FGD penyusunan naskah payung hukum museum inklusip pernaskahan Workshop kajian naskah kuno akademik hasil studi kelayakan museum inklusif penaskahan	1 dokumen 10 dokumen			0	431,128,560	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**										**0**	**690,980,030**	
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	terbangunnya percontohan museum inklusif pernaskahan oleh masyarakat terbangunya Percontohan Museum inklusif pernaskahan oleh masyarakat	40 org 10 org			0	259,851,470	
2	**22**	**06**	1.01		**Pengelolaan Museum Provinsi**										**0**	**690,980,030**	
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terbangunnya percontohan museum inklusif pernaskahan oleh masyarakat terbangunya Percontohan Museum inklusif pernaskahan oleh masyarakat	40 org 10 org			0	259,851,470	
														TOTAL	**1,953,791,042,773**	**3,194,428,774,400**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**2,392,110,421**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,392,110,421**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	7,887,275	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	0	7,887,275	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	19,238,120	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	4,117,448	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat	500 Surat			0	9,968,200	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	5 Rekening			0	298,034,000	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas	7 Unit			0	0	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa administrasi keuangan	72 OB			0	369,149,770	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa kebersihan kantor	216 OB			0	850,024,213	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	556 Buah			0	20,534,618	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	15372 Lembar			0	187,842,380	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen instalasi listrik	235 Buah			0	17,476,481	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	48 Eksemplar			0	10,701,900	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman	1329 Porsi			0	46,931,500	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 OT			0	77,089,100	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	13 Unit			0	90,295,826	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Mebeleur	10 Buah			0	41,685,545	
1	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	7 Unit			0	70,207,500	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	7 Unit			0	56,695,000	
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	8 Jenis			0	41,327,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Museum	50 Buah			0	0	
1	01	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	5 Unit			0	172,903,995	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	0	41,685,545	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	0	90,295,826	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	0	172,903,995	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**2,931,567,650**	**4,524,882,575**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,411,905,450**	**2,085,337,780**	
2	22	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	1,500,100	19,238,120	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	1,499,800	6,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	1,499,800	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	1,499,800	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	1 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	1,508,000	4,117,448	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Dokumen	Akuntabilitas Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan	4 Dokumen	988,900	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	20,637,200	369,149,770	
2	22	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan	1 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	1,454,000	0	
2	22	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tanggapan Pemeriksaan	1 Laporan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	999,790	0	
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berita Acara Rekon	4 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	1,445,800	0	
2	22	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik Keuangan	12 Dokumen	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	1,500,200	0	
2	22	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah RKBMD yang Disusun	2 Dokumen			498,850	0	
2	22	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berita Acara Rekon	4 Dokumen			996,930	0	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan BMD	12 Dokumen			989,010	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Retribusi Museum	12 Laporan	Tercapainya target pengunjung museum	90000 Orang	999,900	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi dan Komponen Listrik	420 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	16,235,800	17,476,481	
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	556 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	16,312,060	20,534,618	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik	294 Porsi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	4,998,000	0	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah media promosi museum	2848 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	59,268,400	187,842,380	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar	48 eksemplar	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	5,040,000	10,701,900	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Materi Publikasi/Dokumentasi	136 Jenis	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	42,250,000	0	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Fasilitasi Tamu	588 Porsi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	9,996,000	46,931,500	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi Konsultasi dan Koordinasi	40 Orang/Tahun	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Jenis	60,000,000	77,089,100	
2	22	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	0	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud	3 Aplikasi	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	57,000,000	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat/Paket Pengiriman	404 Jenis	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	3,436,000	9,968,200	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana	5 Rekening	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	163,350,000	298,034,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan	324 OB	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Kegiatan	821,457,710	850,024,213	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	7 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	45,490,000	56,695,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur yang Dipelihara	15 Set/Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	4,125,000	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara	7 Jenis	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	32,980,000	41,327,550	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2000 eksemplar	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	1,978,400	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	0	0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	7 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Optimal	10 Jenis	29,970,000	70,207,500	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**										**0**	**2,439,544,795**	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koleksi Yang Dikaji, Dikonservasi, Dan Dialihdigitalkan	2000 Koleksi			0	938,022,800	
2	22	06	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Koleksi yang Dilindungi, Dikembangkan, dan Dimanfaatkan	2000 Koleksi	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis	554,524,200	938,022,800	
2	22	06	1.01	02	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27 Orang			0	57,619,485	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0003 Museum Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	06	1.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Aparatur Pengelola museum yang Dibina	27 Orang	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis	39,551,600	57,619,485	
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lomba dan Festival Kebudayaan; Jumlah Museum Keliling	20 Kegiatan			0	1,051,937,200	
2	22	06	1.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Masyarakat yang Mengakses Museum	90000 Orang	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis	813,111,400	1,051,937,200	
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum Yang Tersedia	8 Unit			0	262,464,730	
2	22	06	1.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Diadakan dan Dipelihara	8 Unit	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis	61,600,000	262,464,730	
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimtek penyusunan vite plan/seting percotohan museum inklusif oleh masyaakat FGD penyusunan dokumen percontohan museum inklusif pernaskahan oleh masyarakat	50 org 1 dokumen			0	129,500,580	
2	22	06	1.01	05	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Pengelolaan Permuseuman Provinsi	28.57 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	10 Unit	Jumlah Koleksi Yang Dilestarikan	10 Jenis	50,875,000	129,500,580	
														TOTAL	**2,931,567,650**	**9,669,310,432**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,786,666,450**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,786,666,450**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Rencanan Kerja Daerah	4 Dokumen			0	4,168,750	
1	01	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Lapoan Keuangan Daerah	12 Dokumen			0	65,052,050	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	1100 surat			0	0	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Jasa Air, Listrik dan Komunikasi Inernet	4 Rekening			0	369,377,700	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi Keuangan	72 OB			0	0	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor	100 OB 276 OB			0	817,710,260	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor	100 OB 276 OB 1967 Buah			0	31,869,950	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetaka dan penggandaan	100 OB 276 OB 1967 Buah 47434 Lembar			0	21,653,120	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 276 OB 1967 Buah 47434 Lembar 769 Buah			0	33,108,500	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 769 Buah			0	9,729,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta rapat	650 0rang			0	37,409,500	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya makanan dan minuman Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 650 Orang 769 Buah			0	130,715,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 650 Orang 3 Unit 769 Buah			0	22,842,220	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 650 Orang 1 Set 3 Unit 769 Buah			0	50,650,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	25,651,900	
1	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpeliharanya gedung kantor Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	118,795,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	47,932,000	
1	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah perlengkapan gedung kantor	8 unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpelharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 17 OT 3 Unit 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	0	
1	01	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Rehab Gedung Kantor	2 Unit			0	0	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**2,917,145,315**	**0**	
2	**22**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,455,265,415**	**0**	
2	22	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	1 Dokumen			3,143,900	0	
2	22	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun	1 Dokumen			3,143,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Dokumen pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen			7,740,000	0	
2	22	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan	1 laporan			0	0	
2	22	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan BA Rekon	4 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah RKBMD yang disusun	2 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Berita Acara yang disusun	2 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen yang disusun	12 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen BP dan STS	12 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Laporan	12 Dokumen			0	0	
2	22	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen instalasi listrik	7 jenis			17,283,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 jenis			15,008,500	0	
2	22	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	150 Orang			0	0	
2	22	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetakan dan penggandaan	14500 lbr			7,840,000	0	
2	22	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan/surat kabar	720 exp			8,460,000	0	
2	22	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan /material	3 jenis			0	0	
2	22	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tamu kantor	300 orang			12,300,000	0	
2	22	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peserta koordinasi dan konsultasi SKPD	3 OT			25,000,000	0	
2	22	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin	4 jenis			0	0	
2	22	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung yang dibangun	1 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bsurat benda pos untuk surat-menyurat	224 buah			2,240,000	0	
2	22	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	4 rekening			235,398,000	0	
2	22	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa tenaga PTT, kebersihan dan Keamanan	336 orang			803,968,115	0	
2	22	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional	3 Unit			25,620,000	0	
2	22	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 jenis			85,120,000	0	
2	22	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor	1 Unit			0	0	
2	22	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarpras pendukung gedung kantor	2 jenis			203,000,000	0	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**										**0**	**2,383,925,505**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional
2	22	02	1.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pendokumentasian seni daerah dan karya seniman Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpelharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 2 Kegiatan 17 OT 3 Unit 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	93,724,080	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pendokumentasian seni daerah dan karya seniman Terlaksanya kegiatan olah seni dan eksperimentasi seni Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpelharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 2 Kegiatan 3 Kegiatan 17 OT 3 Unit 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	498,439,900	
2	22	02	1.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pergelaran olah seni dan eksperimentasi seni tradisi	3 Pergelaran			397,260,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pendokumentasian seni daerah dan karya seniman Terlaksanya kegiatan olah seni dan eksperimentasi seni Terlaksanya kegiatan pergelaran tetap dan pameran tetap Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpelharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 2 Kegiatan 3 Kegiatan 17 Pergelaran 17 OT 3 Unit 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	1,330,103,800	
2	22	02	1.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pergelaran Tetap dan pameran Tetap	17 Pergelaran			1,064,619,900	0	
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pergelaran Temu karya dan kemitraan pengelolaan antar daerah	2 pPergelaran			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0002 Taman Budaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	02	1.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanannya laporan keuangan dan tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran Terlaksananya pendokumentasian seni daerah dan karya seniman Terlaksananya temu karya taman budaya se indonesia dan terbinanya kemitaraan pengelolaan kekayaan budaya Terlaksanya kegiatan olah seni dan eksperimentasi seni Terlaksanya kegiatan pergelaran tetap dan pameran tetap Terlaksanya program penyelarasan pusat dan dan derah dan terlaksanya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Terpelharanya peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas Tersedianaya jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan bacaan Tersedianya barang cetaka dan penggandaan Tersedianya Fasilitas gedung kantor yang memadai Tersedianya makanan dan minuman Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian tugas	100 OB 2 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 17 Pergelaran 17 OT 3 Unit 4 Unit 4 Unit 276 OB 1967 Buah 556 Exemplar 47434 Lembar 1 Set 650 Orang 7 Unit 3 Unit 769 Buah			0	461,657,725	
															TOTAL	**2,917,145,315**	**4,170,591,955**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**2,148,336,760**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**797,327,730**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	2,585,200	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	727,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	2,404,650	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	672,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	693,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	19,773,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	719,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Tahunan	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	284,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	9 Dokumen	324,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Administrasi Pelaksana Tugas ASN	1 Tahun	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	107,527,000	0	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
1	01	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	1,495,000	
1	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	500,000	0	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	1,342,050	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	1 Tahun 200 Surat			0	58,880,000	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	199,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	0	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	6,096,150	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekon BMD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	0	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,883,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah lembar	1000 lembar			0	26,410,440	
1	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	0	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	9,729,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	100,000,000	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya kondisi kendaraan dinas	4 unit			0	52,313,500	
1	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	4,150,000	
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	15,680,000	
1	01	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	86,696,000	
1	01	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kegiatan	1 Tahun			0	191,775,500	
1	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru	259 orang			0	0	
1	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Bimtek PPDB Online	259 orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	10,179,700	0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	8,700,000	0	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	12,960,000	0	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	7,200,000	0	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1,200,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,480,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rakor dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	57,000,000	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	1 Unit	Tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	0	
1	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	0	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	6,850,000	0	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	0	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	Tersediaanya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	177,190,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	29,430,000	0	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1,220,000	0	
1	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1 Tahun	Tersedianya Jasa Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	4,300,000	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**1,351,009,030**	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	79,600,000	
1	01	02	1.01	38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16 Unit	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	6,900,800	0	
1	01	02	1.01	47	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	59,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Media Pembelajaran	10 Judul	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	1,147,000	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta minat, bakan dan kreatifitas siswa	400 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	111,601,800	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	123,181,215	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidika dan tenaga kependidikan pada satpen SMA	150 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMA	1 Tahun	167,797,800	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	299,310,730	
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16 Unit	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	6,900,800	0	
1	01	02	1.02	30	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	79,600,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	59,000,000	
1	01	02	1.02	39	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Media Pembelajaran	10 Judul	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	698,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta minat, bakan dan kreatifitas siswa	400 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	63,330,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah PesertaKuis Ki Hajar Jenjang SMA	1 Tahun			0	101,410,105	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidika dan tenaga kependidikan pada satpen SMA	150 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan SMK	1 Tahun	167,494,400	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	399,906,980	
1	01	02	1.03	37	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	50,000,000	
1	01	02	1.03	46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %			Tersedianya pengelolaan pendidikan Khusus	1 Tahun	0	29,486,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0001 Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	46	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	50,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan	1 Tahun			0	50,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah peserta pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus	20 Orang	Tersedianya pengelolaan pendidikan Khusus	1 Tahun	61,353,400	0	
														TOTAL	**1,029,262,700**	**2,177,822,760**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,418,040,850**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**349,485,230**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			0	3,542,000	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	koordinasi dan Penyusunan RKA	1 Dokumen	DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	21,080,000	3,542,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	6,000,000	51,755,290	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	4,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	50 OT			0	51,755,290	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	4,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	2,888,000	3,386,175	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			DokumenRKA ,Perubahan RKA,DPA,Perubahan DPA, Laporan tahunan dan laporan Hasil Evaluasi Kinerja	6 Dokumen	5,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 OB			4,020,000	0	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Tahunan	1 Dokumen			7,000,000	0	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	3,386,175	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Bulanan	12 Dokumen			6,000,000	0	
1	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat	500 Surat			0	2,150,500	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dukumen Aset	12 Dokumen			1,200,000	4,296,400	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 rekening			0	44,461,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dukumen Aset	12 Dokumen			0	4,296,400	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD	2 Dokumen			2,400,000	0	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			3,000,000	0	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas	4 unit			0	52,313,500	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	60 OB			0	57,894,335	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	24 OB			0	71,849,700	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat Tulis Kantor	687 buah			0	24,622,535	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	50000 Lembar			0	8,918,250	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen Alat Listrik	100 buah			0	3,158,475	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	250 Exp.			0	2,829,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	300 org			0	18,083,750	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Frekuensi Koordinasi dalam Daerah	50 OT			0	0	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Gomong	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan Kantor	1 tahun			0	223,445	
1	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	20 buah			0	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 orang			20,000,000	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Alat Listrik	100 buah			2,746,400	3,158,475	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 buah			25,995,100	0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	300 org			12,240,000	18,083,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	25856 Lembar			7,756,200	0	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	250 Exp.			2,460,000	2,829,000	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Fasilitas Tamu	100 Orang			3,485,000	0	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	3 Dokumen			73,390,000	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengadaan Mebel	40 Unit			0	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 buah			0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	500 Surat			1,870,000	2,150,500	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 rekening			11,079,000	44,461,875	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	24 OB			62,477,100	71,849,700	
1	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas	4 unit			45,490,000	52,313,500	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Service Peralatan Kantor	15 Unit			0	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**1,068,555,620**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	59 Sekolah			0	195,051,385	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menegah Atas yang disusun (Transport Pengawas)	60 Sekolah			161,061,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta FLS2N SMA Jumlah Peserta KKP Jumlah Peserta KOSN SMA Jumlah Peserta KSN SMA	50 Sekolah 174 org 50 Sekolah 50 Sekolah			0	275,507,340	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	120 Orang			250,403,800	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	60 Dokumen			23,091,100	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak yang diperiksa Jumlah Peserta Seleksi GTK	125 Dupak 85 org			0	48,065,745	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Sekolah	59 Sekolah			0	19,258,935	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas)	62 Sekolah			161,197,800	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	62 Sekolah			0	195,064,610	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta FLS2N SMK Jumlah Peserta KKP Jumlah Peserta KOSN SMK Jumlah Peserta KSN SMK	60 Sekolah 176 org 60 Sekolah 60 Sekolah			0	222,131,930	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	124 Orang			143,920,300	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Pependidikan yang dinilai	62 Dokumen			23,073,700	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak yang diperiksa Jumlah Peserta Seleksi GTK	135 Dupak 95 org			0	42,265,835	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Adanya MOU, 2. Tersusunnya SKKNI, 3. Panduan Pelaksanaan Penilaian Portofolio, 4. Penambahan ruang Lingkup LSP P1/P2/P3 Jumlah Peserta Sinkronisasi Data Terlaksanannya Pembinaan Sekolah Sehat SMK Tersedianya Siswa Yang Tersertifikasi LSP	10 dokument 100 orang 10 sekolah 500 orang			0	19,126,225	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0004 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat dan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	6 Sekolah			0	3,797,185	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas)	7 Sekolah			19,000,000	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak yang diperiksa Jumlah Peserta Seleksi GTK	40 Dupak 20 org			0	35,644,020	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JJumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB	12 Dokumen			7,302,100	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	6 Sekolah			0	12,642,410	
														TOTAL	**1,124,627,100**	**1,675,867,515**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**500,362,930**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**490,851,855**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 dokumen			0	18,630,000	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA - SKPD disusun	1 Dokumen			21,430,000	0	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD disusun	1 Dokumen			7,030,000	0	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA - SKPD disusun	1 Dokumen			7,650,900	0	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun	1 Dokumen			20,930,000	0	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan disusun	1 Dokumen			7,797,000	0	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	1 Dokumen			5,123,000	0	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	60 Orang/Bulan			10,723,500	0	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	60 Orang/Bulan			2,526,600	0	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen			10,657,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	3,487,950	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan disusun	1 Dokumen			0	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 Dokumen			0	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan realisasi Fisik dan Keuangan yang disusun	4 Dokumen			0	0	
1	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan BMD pada SKPD disusun	1 Dokumen			2,624,700	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	3,921,500	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekenig	10 rekening			0	69,132,480	
1	01	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peningkatan Fisik Aparatur	72 OK			0	26,910,000	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	2,633,500	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi BMD disusun	2 Dokumen			4,380,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan BMD pada SKPD	12 Orang/Bulan			3,870,400	0	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	6 Unit			0	69,839,500	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	60 OB			0	64,461,180	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	24 OB			0	175,831,550	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	24 OB			0	15,616,195	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Penggadaan	20000 Lembar			0	12,075,000	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen Listrik	100 Buah			0	3,818,000	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bacaan	250 Exemplar			0	9,729,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	360 Orang			0	12,696,000	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Frekuensi Koordinasi Dalam Daerah	50 OT			0	0	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	10 Buah			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan	10 Unit			0	14,766,000	
1	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	10 buah			0	0	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Yang diadakan	30 Stel			78,372,500	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Pegawai yang tersusun	1 Dokumen			16,521,200	0	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai yang datanya terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen			7,094,400	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil MONEV dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen			6,811,800	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	25 Buah			2,697,200	0	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	80 Buah			19,244,900	0	
1	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan logistik kantor yang tersedia	360 Orang			6,120,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	52500 Lembar			13,700,000	0	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	300 EExsemplar			8,460,000	0	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Material yang tersedia	10 Jenis			4,500,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu kantor yang terfasilitasi	12 Kali			4,920,000	0	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil rapat Koordinasi dan konsultasi	1 Dokumen			14,160,600	0	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip yang ditata	15 Dokumen			5,454,900	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang diadakan	2 Jenis			0	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	umlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	2 Jenis			63,296,800	0	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset Tak Berwujud Yang Diadakan	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor yang Diadakan	10 Unit			0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	500 Surat			3,410,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	6 Rekening			61,315,200	0	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	10 Jenis			0	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	5 Orang			33,033,200	0	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia	8 Unit			44,670,000	0	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	8 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	16 Unit			12,180,000	0	
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Terpelihara	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Paket Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**9,511,075**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menegah Atas yang disusun	66 sekolah			171,517,800	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	900 Orang			170,778,000	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Lomba	1 Siswa			0	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK Jumlah Peserta Seleksi Gurpres Berpretasi	1 Dokumen 1 Orang			0	9,511,075	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	492 Dokumen			13,265,200	0	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menegah Atas	66 sekolah			0	0	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang dibina	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas) Lombok Timur	93 sekolah			171,014,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	100 Orang			110,139,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Lomba	1 Siswa			0	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK Jumlah Peserta Seleksi Gurpres Berpretasi	1 Dokumen 1 Orang			0	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dupak Guru / Tenaga Pendidikan yang dinilai	227 Dokumen			13,249,400	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menegah Kejuruan	93 sekolah			0	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang dibina	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas) Kab. Lombok Timur	7 sekolah			0	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	600 Orang			79,082,800	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK Jumlah Peserta Seleksi Gurpres Berpretasi	1 Dokumen 1 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0006 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB Lomnok Timur	32 Dokumen			0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang dibina	1 Sekolah			0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Luar Biasa	7 Orang			0	0	
														TOTAL	**1,239,753,100**	**513,058,930**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,050,187,843**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**550,659,698**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dokumen			0	3,302,685	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	9,708,800	10,889,120	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	7,611,800	8,477,570	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Frekuensi koordinasi	200 OT			0	82,603,925	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	7,010,800	5,302,420	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	7,010,800	5,302,420	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	7,568,800	5,944,120	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perang2kat Daerah disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Perencataan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah	100 %	9,035,500	10,390,825	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0	62,100,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan	12 OB	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,338,500	4,989,275	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	500 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1,243,100	1,429,565	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 Laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,910,800	10,247,420	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	3,331,000	3,830,650	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	2 dokumen			0	1,960,175	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6,123,800	7,042,370	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan keuangan yang disusun	4 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4,610,800	5,302,420	
1	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	1 dokumen			0	1,426,575	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat	500 surat			0	4,128,500	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun	1 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	2,502,700	2,878,105	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	4 rekening			0	43,194,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun	2 dokumen	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	8,285,800	9,528,670	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 dokumen			0	20,487,365	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	1,796,700	2,066,205	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya pajak kendaraan dinas	3 unit			0	0	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 OB			0	62,100,000	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa kebersihan kantor	24 OB			0	143,181,900	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	894 buah			0	19,898,795	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	20315 lembar			0	10,245,925	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	132 buah			0	6,279,000	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan	360 eksemplar			0	8,280,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman	150 orang			0	26,220,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program/kegiatan	1 tahun			0	0	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan gedung kantor	2 unit			0	49,333,988	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya mebeleur	66 buah			0	54,423,865	
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya peralatan kantor	10 unit			0	13,593,000	
1	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya mebeleur	28 buah			0	0	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana dan prasarana	1 buah			0	10,000,000	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian yang diadakan	5 stel			0	4,600,000	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun	1 dokumen			2,497,900	2,872,585	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan hasil Monev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen			7,320,000	5,750,000	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tersedia	75 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4,302,100	4,947,415	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	800 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	14,808,530	17,029,810	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	9,570,000	11,005,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	13000 lembar	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,639,150	6,485,023	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	360 exemplar	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	7,200,000	8,280,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia	28 buah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	3,010,000	3,461,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kunjungan Tamu Kantor yang terfasilitasi	1 tahun	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4,510,000	5,186,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 laporan	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	49,045,990	56,402,888	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0	5,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubel yang diadakan	66 buah			0	55,200,000	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	6 buah			0	49,333,988	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset Tak Berwujud Yang Diadakan	0 buah			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor yang Diadakan	1 unit			0	57,500,000	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang Terkirim	500 surat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	3,180,000	3,657,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	4 rekening	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	39,900,000	45,885,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	0	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	48 OB	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	100 %	127,428,630	146,542,925	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tersedia	4 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	37,985,200	43,682,980	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	0	3,080,000	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	9 unit	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	6,391,000	7,349,650	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	0	102,350,000	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	0	30,000,000	
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	0	34,000,000	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**430,762,760**	**570,475,395**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah	0	59,800,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil monitoring proses belajar mengajar dan ujian SMA Kab. Lombok Utara	2 dokumen			0	29,891,490	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan karakter siswa jenjang SMA tingkat Kab. Lombok Utara Jumlah peserta seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SMA tingkat Kab. Lombok Utara	50 peserta 50 peserta			0	153,986,725	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	12 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah	167,143,740	192,215,301	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada satuan pendidikan SMA kab. Lombok Utara Jumlah peserta seleksi guru dan tenaga kependidikan SMA tingkat Kab. Lombok Utara	50 dokumen 50 peserta			0	61,163,440	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Kependidikan yang dinilai	50 dokumen	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah	21,358,610	24,562,402	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah dokumen hasil pemetaan dan peneria bantuan SMA Kab. Lombok Utara	1 dokumen			0	9,670,465	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menegah Atas	12 laporan	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	12 sekolah	40,440,700	35,006,805	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil monitoring proses belajar mengajar dan ujian SMK Kab. Lombok Utara	1 dokumen			0	28,021,935	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah	0	28,021,935	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	100 orang	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah	119,924,370	137,913,026	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan karakter siswa SMK tingkat Kab. Lombok Utara Jumlah peserta seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SMK tingkat Kab. Lombok Utara	50 peserta 50 peserta			0	132,930,800	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Dupak Guru/Tenaga Pependidikan yang dinilai	50 dokumen	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah	21,220,600	24,403,690	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada satuan pendidikan SMK Kab. Lombok Utara Jumlah peserta seleksi guru dan tenaga kependidikan SMK tingkat Kab. Lombok Utara	50 dokumen 50 peserta			0	61,646,440	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pemetaan dan penerima bantuan SMK Kab. Lombok Utara	1 dokumen			0	9,670,465	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menegah Kejuruan	13 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	13 sekolah	41,339,140	36,040,011	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah	0	4,488,910	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil monitoring proses belajar mengajar dan ujian SLB Kab. Lombok Utara	1 dokumen			0	4,488,910	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Minat, Bakat, Kreativitas Siswa dan Pembinaan karakter	25 orang	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah	12,931,800	14,871,570	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada satuan pendidikan khusus (SLB) Kab. Lombok Utara Jumlah peserta seleksi bakat, minat dan kreatifitas siswa SLB tingkat Kab. Lombok Utara	50 dokumen 50 peserta			0	5,787,375	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah	0	5,787,375	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0007 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pemetaan dan peneria bantuan SLB Kab. Lombok Utara	1 dokumen			0	2,270,100	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Luar Biasa	3 sekolah	Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	3 sekolah	6,403,800	7,364,370	
TOTAL															**842,640,960**	**2,496,737,157**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,904,753,395**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**816,135,105**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen	5 dokumen			0	15,371,360	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen program perencanaan	7 dokumen			0	4,920,850	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	5,839,000	4,707,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	3,478,700	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	2,150,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	frekuensi koordinasi dan sinkronisasi	150 kali			0	58,361,005	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	2,120,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	7,930,200	13,167,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	jumlah dokumen perencanaan	10 dokumen	7,335,000	11,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tenaga administrasi keuangan	12 OB	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen	18,495,500	64,847,925	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen laporan keuangan	2 dokumen	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen	6,369,100	13,708,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya dokumen laporan	2 dokumen			0	13,765,730	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	la poran keuangan	12 dokumen	jumlah dokumen keuangan	26 dokumen	7,441,200	58,361,005	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 dokumen			0	13,708,000	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah materai	500 lembar			0	6,371,000	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	4 rekening			0	47,518,000	
1	01	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	peningkatan mental dan fisik aparatur	72 OK			0	19,320,000	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen rekonsilaisi bmd	4 dokumen	jumlah dokumen BMD	4 dokumen	3,997,700	3,639,750	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen asset	12 dokumen			0	3,639,750	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya jsa pemeliharaan dan pengurusan ijin kendaraan dinas	4 kegiatan/tahun			0	0	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen BMD	4 dokumen	0	8,400,000	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	60 OB			0	64,847,925	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga keamanan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor	48 OB 24 OB			0	214,556,650	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah ATK	660 buah			0	16,614,165	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah lembar cetakan dan penggandaan	20000 lembar			0	8,193,750	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah komponen listrik	80 buah			0	2,809,220	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah koran	300 eksemplar			0	8,280,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peserta rapat dan tamu	200 orang			0	7,360,000	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	filling kabinet, lemari arsip, rak arsip	15 buah			0	33,163,700	
1	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya kondisi bangunan kantor	1 kegiatan			0	212,750,000	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan yang dipelihara	4 unit			0	52,313,500	
1	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan kantor yang dipelihara (laptop, komputer, printer dan AC)	25 unit			0	12,270,500	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen kepegawaian	14 dokumen	11,188,500	18,000	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	12 dokumen	jumlah dokumen kepegawaian	14 dokumen	34,958,500	12,000,000	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	0	2,809,220	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK	660 buah	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	7,794,000	16,614,165	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	porsi makan minum	200 orang	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	5,800,000	7,360,000	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	5018 lembar	pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	2,172,400	8,193,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	0	8,280,000	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah mebel	1 buah	jumlah mebel	1 buah	4,000,000	19,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah mebel	1 buah	0	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah materai	200 buah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	1,280,000	6,371,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rekening	36 tahun	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	38,400,000	47,518,000	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tenaga non pns	132 orang/tahun	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1 tahun	199,845,000	214,556,650	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	biaya pemeliharaan kendaraan dinas	4 unit/tahun	biaya pemeliharaan	1 tahun	29,430,000	52,313,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	biaya pemeliharaan alat dan mesin lainnya	3 unit/tahun	biaya pemeliharaan	1 tahun	2,030,000	12,270,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**1,088,618,290**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah dokumen hasil monitoring	60 dokumen			0	177,719,850	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	frekuensi perjalanan dinas ke SMA	130 orang/kali	kegiatan SMA	1 tahun	185,000,000	177,719,850	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta KSN, peserta FLS2N peserta KOSN peserta pembinaan karakter	450 orang 10 orang 15 orang 75 orang			0	202,172,760	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan lomba	3 kegiatan/tahun	kegiatan SMA	1 tahun	221,124,800	202,172,760	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah peserta Gupres dan tenaga kependidikan(KTU, pengawas,perputakaan, laboran, kepala sekolah) jumlah peserta/PAK	5 OK 100 dupak			0	162,857,020	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	kegiatan SMA	1 tahun	23,136,200	162,857,020	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah dokumen hasil pemetaan penerima bantuan	58 dokumen			0	40,810,970	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			kegiatan SMA	1 tahun	0	40,810,970	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah dokumen hasil monitoring	65 dokumen			0	196,378,600	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	frekuensi perjalanan dinas ke SMK	107 orang/kali	jumlah kegiatan SMK	1 tahun	153,000,000	196,378,600	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah peserta FLS2N jumlah peserta KOSN jumlah peserta pembinaan karakter	15 orang 25 orang 75 orang			0	73,294,330	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan SMK	1 tahun	115,709,500	73,294,330	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah PAK peserta seleksi gupres dan tenaga kependidilkan(Kepsek, KTU, Pengawas, Pustakawan dan laboran)	50 dupak 5 OK			0	152,564,865	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan SMK	1 tahun	18,715,000	152,564,865	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0005 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			jumlah kegiatan SMK	1 tahun	0	23,700,925	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah dokumen hasil pemetaan penerima bantuan	64 dokumen			0	23,700,925	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	frekuensi kunjungan ke SLB	20 orang/kali	jumlah kegiatan	1 tahun	30,000,000	30,000,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %	jumlah kegiatan PAK	2 kegiatan/tahun	jumlah kegiatan	1 tahun	11,420,200	34,451,470	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah PAK	20 dupak			0	34,451,470	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			jumlah dokumen hasil pemetaan penerima bantuan	5 dokumen			0	24,667,500	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan		Persen Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	69.40 %			jumlah kegiatan	1 tahun	0	24,667,500	
														TOTAL	**1,160,160,500**	**3,607,518,150**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**669,805,770**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**483,628,245**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	5 Dok			0	2,574,850	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 Dokumen	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 Dokumen	11,773,000	6	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyedia Administrasi Keuangan	60 OB	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Pearngkat Daerah	100 %	39,918,000	9	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Dokumen	Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Pearngkat Daerah	100 %	4,257,000	2	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah porsi tersedianya peralatan gedung kantor				0	2,309,775	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	1,608,500	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa surat menyurat				0	7,475,000	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa surat menyurat				0	53,820,000	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	100 %	13,575,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa surat menyurat jumlan jasa administrasi keuangan				0	52,962,100	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa kebersihan kantor jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa surat menyurat jumlan jasa administrasi keuangan				0	184,196,650	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah alat tulis kantor Jumlah jasa kebersihan kantor jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa surat menyurat jumlan jasa administrasi keuangan				0	39,616,925	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah alat tulis kantor jumlah barang cetakan dan pengadaan Jumlah jasa kebersihan kantor jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jumlah jasa surat menyurat jumlan jasa administrasi keuangan				0	13,800,000	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				0	11,777,725	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah barang cetakan dan penggandaan jumlah eksemplar bacaan jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				0	15,939,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah porsi				0	31,395,000	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah porsi tersedianya peralatan gedung kantor				0	67,761,220	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara jumlah porsi tersedianya peralatan gedung kantor				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	0	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,089,500	0	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	24,211,000	0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	14,350,000	0	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10,000,000	0	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	8,460,000	0	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5,600,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	16,400,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	202,340,000	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Poesentase Barang Milik Daerah yang di adakan	100 %	0	0	
1	01	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Poesentase Barang Milik Daerah yang di adakan	100 %	0	0	
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Poesentase Barang Milik Daerah yang di adakan	100 %	0	0	
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Poesentase Barang Milik Daerah yang di adakan	100 %	0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penujang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	12,050,000	0	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penujang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	43,800,000	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Prosentase Jasa Penujang urusan Pemerintah daerah yang tersedia	100 %	104,827,500	0	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	131,890,000	0	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Yang Terpelihara	100 %	9,870,000	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**186,177,525**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA				0	2,904,900	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	176,240,000	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	35,173,500	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA Tingkat Kabupaten Dompu				0	114,922,950	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	34,345,500	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kab. Dompug SMA Tingkat Kabupaten Dompu				0	64,573,075	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah atas	100 %	0	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	95,910,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu				0	3,776,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	11,413,500	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Kabupaten Dompu				0	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	5,098,500	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah kejuruan	100 %	0	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerimaan Bantuan SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Kabupaten Dompu				0	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	30,870,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerimaan Bantuan SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Kabupaten Dompu				0	0	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	5,560,000	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerimaan Bantuan SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Guru dan tenaga Kependidikan SLN Tingkatat Kabupaten dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Kabupaten Dompu				0	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	2,872,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0010 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Woja, Kandai II			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerimaan Bantuan SLB Kabupaten Dompu Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerimaan Bantuan SMK Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK Tingkat Kabupaten Dompu Jumlah peserta Seleksi Guru dan tenaga Kependidikan SLN Tingkatat Kabupaten dompu Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Kabupaten Dompu				0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persen Angka Pastisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah	96.68 %			Meningkatnya kualitas pendidikan menengah khusus	100 %	0	0	
TOTAL															**1,062,502,500**	**669,805,787**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,749,850,805**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**782,683,785**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen program dokumen perencanaan	7 dokumen			0	192,174,200	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	1 dokumen			13,732,000	0	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			9,490,000	0	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen DPA-SKPD yang Disusun	1 dokumen			21,690,000	0	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun	1 dokumen			10,200,000	0	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					8,920,000	0	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	4 dokumen			1,230,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa penyediaan Administrasi Keuangan	60 OB			4,020,000	0	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang Terverifikasi	100 dokumen			600,000	0	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 dokumen			16,552,000	0	
1	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	7 dokumen			0	3,000,000	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan disusun	1 dokumen			400,000	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Keuangan yang disusun	4 dokumen			16,160,000	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan keuangan yang disusun	4 dokumen			2,160,000	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat	600 surat			0	7,360,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD disusun	1 dokumen			540,000	0	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	4 rekening			0	58,650,000	
1	01	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Aparatur	75 orang			0	0	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen barang milik daerah	12 dokumen			0	9,660,000	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah disusun	2 dokumen			17,720,000	0	
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas	4 unit			0	2,760,000	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen barang milik daerah	12 dokumen			364,000	9,660,000	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa keuangan	60 OB			0	51,598,890	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan	36 OB 48 OB			0	243,146,340	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tulis kantor	400 bh			0	49,350,295	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	23000 lembar			0	6,164,000	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah komponen listrik	25 buah			0	2,342,550	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah eksemplar	300 eksemplar			0	6,210,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman	456 porsi			0	27,312,500	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Frekuensi koordinasi	1 tahun			0	0	
1	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perlengkapan kantor				0	0	
1	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan kantor				0	66,225,510	
1	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebel	4 jenis			0	0	
1	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit			0	31,912,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit			0	13,144,500	
1	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	6 unit			0	11,672,500	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian yang diadakan	14 stel			4,916,100	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian yang tersusun	1 dokumen			11,200,000	0	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai yang Datanya Terintegrasi dalam Sistim Informasi Kepegawaian	1 dokumen			5,408,700	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan hasil Monev dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen			12,400,000	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen listrik	25 buah			1,354,600	2,342,550	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	400 bh			20,121,500	49,350,295	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	10 jenis			15,120,000	0	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	23000 lembar			7,830,000	6,164,000	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar	300 eksemplar			5,400,000	6,210,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan/Material yang Tersedia	10 jenis			3,200,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya makanan dan minuman	456 porsi			12,300,000	27,312,500	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 dokumen			100,200,000	0	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip yang ditata	15 jenis			1,270,000	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel	4 jenis			0	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan kantor				38,000,000	66,225,510	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	1 jenis			20,000,000	0	
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pendukung Gedung Kantor yang Diadakan	3 unit			0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	600 surat			3,940,000	7,360,000	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	4 rekening			54,000,000	58,650,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	5 jenis			0	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan	36 OB 48 OB			219,600,000	243,146,340	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	4 unit 4 unit			29,430,000	13,144,500	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	8 jenis			1,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya alat/perlengkapan kantor	6 unit			7,960,000	11,672,500	
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Terpelihara	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya gedung kantor	2 unit			12,950,000	31,912,500	
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Jenis			0	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**673,320,600**	**829,167,020**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	240 dokumen			250,000,000	414,000,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	240 dokumen			0	414,000,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	200 orang 700 orang			145,290,000	166,246,300	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	200 orang 700 orang			0	166,246,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Palibelo, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMA Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	50 pak 60 orang			0	46,977,500	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMA Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	50 pak 60 orang			35,170,000	46,977,500	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA Kab. Bima dan Kota Bima	70 dokumen			800,000	9,936,000	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Palibelo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA Kab. Bima dan Kota Bima	70 dokumen			0	9,936,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	120 dokumen			0	138,000,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menegah Kejuruan yang disusun	40 Dokumen			125,000,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	90 orang 200 orang			0	86,646,980	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Peserta Pembinaan Karakter Siswa Jenjang SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	90 orang 200 orang			54,225,000	86,646,980	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMK Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	30 dokumen 60 0rang			0	6,900,000	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMK Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	30 dokumen 60 0rang			0	6,900,000	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK Kab. Bima dan Kota Bima	20 dokumen			0	9,936,000	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK Kab. Bima dan Kota Bima	20 dokumen			800,000	9,936,000	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	12 dokumen			30,000,000	33,120,000	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB (transport Pengawas) Kab. Bima dan Kota Bima	12 dokumen			0	33,120,000	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SLB Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	100 orang			0	38,568,240	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SLB Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	100 orang			31,235,600	38,568,240	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0011 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bima dan Kota Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	20 dokumen 20 0rang			0	6,900,000	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan Khusus (SLB) Kab. Bima dan Kota Bima Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Tingkat Kab. Bima dan Kota Bima	20 dokumen 20 0rang			0	6,900,000	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB Kab. Bima dan Kota Bima	2 dokumen			0	9,936,000	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB Kab. Bima dan Kota Bima	2 dokumen			800,000	9,936,000	
TOTAL															**1,384,699,500**	**3,112,168,520**	

TOTAL															**1,384,699,500**	**3,112,168,520**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**1,414,555,545**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**578,605,710**	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	4 dokumen			0	5,990,580	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			21,695,000	0	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					21,695,000	15,000,000	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,495,000	15,000,000	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,495,000	0	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			3,639,300	0	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			628,000	0	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					4,947,000	0	
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	70 Dokumen			545,400	0	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			3,847,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			608,000	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			9,710,800	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			900,200	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat	1000 Surat			0	1,630,700	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			1,317,000	0	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbayarnya Jasa listrik, telepon,air dan internet	12 bulan			0	53,705,000	
1	01	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Senam	kali			0	534,750	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	erbayarnya honor	OB			0	12,379,750	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			4,915,000	0	
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	orang	12 OB			8,400,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	unit			0	0	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbayarnya honor	12 bulan			0	24,748,230	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa keamanan kantor Jumlah jasa kebersihan	OB OB			0	176,764,200	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	buah			0	8,344,285	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	lembr			0	3,314,300	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	buah			0	4,590,685	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat kabar	eksemplar			0	3,622,500	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Makanan dan Minuman				0	20,849,730	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	kali			0	205,436,000	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit			0	56,695,000	
1	01	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian	5 Set			2,106,900	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			522,000	0	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			518,800	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen			1,317,000	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen	1 buah			1,812,600	0	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	25 jenis			3,496,800	0	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 jenis			8,500,000	0	
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	lembr			2,400,000	3,314,300	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kabar	eksemplar			1,950,000	3,622,500	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	1 Tahun			1,050,500	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makanan dan Minuman				2,550,000	20,849,730	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			97,815,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Bulan			0	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	4 jenis			0	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	6 jenis			0	0	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 jenis			0	0	
1	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Unit	3 unit			0	0	
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	buah	337 buah			2,820,000	0	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarnya Jasa listrik, telepon,air dan internet	12 bulan			38,750,000	53,705,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	5 jenis			1,350,000	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 jenis			150,538,400	0	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit			25,620,000	56,695,000	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	8 jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	8 jenis			0	0	
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 jenis			0	0	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 jenis			0	0	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	5 jenis			0	0	
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 jenis			0	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**835,949,835**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMA Transport Pengawas	Sekolah bulan			0	334,635,740	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sekolah	28 sekolah			235,475,400	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			orang	500 orang			266,019,300	0	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kab. Sumbawa	Peserta			0	362,450,560	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Tingkat Kab. Sumbawa	Peserta			0	138,863,535	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			orang	80 orang			47,528,200	0	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	28 Laporan			5,947,800	0	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMA Kab.Sumbawa	Dokumen			0	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SMK Transport Pengawas	Dokumen bulan			0	0	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	19 Dokumen			156,662,000	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	300 orang			46,637,800	0	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Bakat, Minat, dan Kreatifitas Siswa SMA Tingkat Kab. Sumbawa	Sekolah			0	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PAK yang dinilai pada Satuan Pendidikan SMK Kab. Sumbawa Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Tingkat Kab. Sumbawa	PAK Peserta			0	0	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	60 orang			0	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	19 Laporan			3,495,100	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0009 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SMK Kab.Sumbawa	Dokumen			0	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	2 Dokumen			22,071,800	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Proses Belajar Mengajar dan Ujian SLB Transport Pengawas	Dokumen bulan			0	0	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	4 orang			8,452,200	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan SLB Tingkat Kab. Sumbawa	Peserta			0	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	10 orang			0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Penerima Bantuan SLB Kab.Sumbawa	Dokumen			0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	2 Laporan			1,940,300	0	
														TOTAL	**1,225,185,800**	**1,582,742,075**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**0**	**920,274,965**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**473,303,775**	
1	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	dokumen hasil	1 dokumen			0	6,343,170	
1	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	4 dokumen			0	3,941,970	
1	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun	4 dokumen 1 dokumen			13,600,000	3,941,970	
1	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			13,600,000	0	
1	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun	1 dokumen			13,100,000	0	
1	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun	1 dokumen			13,300,000	0	
1	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen			9,100,000	0	
1	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun	4 dokumen			1,600,000	0	
1	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Penyediaan Administrasi Keuangan	60 OB			5,080,000	47,169,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SLPD	70 dokumen			800,000	0	
1	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Tahunan yang disusun	1 dokumen			2,500,000	0	
1	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	1 dokumen			1,500,000	0	
1	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	4 dokumen			7,800,000	0	
1	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	4 dokumen			1,500,000	0	
1	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	surat	750 surat			0	1,921,880	
1	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	1 dokumen			5,800,000	0	
1	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	rekening	4 rekening			0	20,079,000	
1	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen hasil	12 dokumen			4,000,000	8,708,375	
1	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	dokumen hasil	12 dokumen			0	8,708,375	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	orang	12 OB			0	0	
1	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	OB	60 OB			0	47,169,550	
1	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor	24 OB 24 OB			0	139,683,600	
1	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis	966 Jenis			0	17,207,680	
1	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Lembar	26249 Lembar			0	6,267,500	
1	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Buah	60 Buah			0	3,531,420	
1	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	eksampler	350 eksampler			0	8,280,000	
1	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	porsi	182 porsi			0	10,568,500	
1	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	OT	30 OT			0	55,730,035	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Lemari Es Mesin Potong Rumput Papan Nama Instansi Printer	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit			0	38,071,095	
1	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Bahan Bakar Jasa Suku Cadang Kendaraan Pajak / STNK Service Kendaraan	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit			0	47,932,000	
1	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	AC Komputer Laptop Printer	4 Unit 3 Unit 6 Unit 4 Unit			0	57,868,000	
1	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	set	4 set			1,404,600	0	
1	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	1 dokumen			1,300,000	0	
1	01	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	1 dokumen			1,150,000	0	
1	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokuman	12 dokumen			2,000,000	0	
1	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Buah	60 Buah			4,200,000	3,531,420	
1	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	966 Jenis			10,107,800	17,207,680	
1	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	porsi	182 porsi			6,650,000	10,568,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Lembar	26249 Lembar			5,825,000	6,267,500	
1	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	eksampler	350 eksampler			7,200,000	8,280,000	
1	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	8 Jenis			1,140,000	0	
1	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	kali	12 kali			4,920,000	0	
1	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	OT	30 OT			57,600,000	55,730,035	
1	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	15 dokumen			0	0	
1	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	4 Jenis			0	0	
1	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	4 Jenis			5,788,900	0	
1	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen Lemari Es Mesin Potong Rumput Papan Nama Instansi Printer	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit			0	38,071,095	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	surat	750 surat			3,255,000	1,921,880	
1	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rekening	4 rekening			17,364,000	20,079,000	
1	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	4 Jenis			0	0	
1	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Keamanan Kantor Jasa Kebersihan Kantor	24 OB 24 OB			143,132,350	139,683,600	
1	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Bakar Jasa Suku Cadang Kendaraan Pajak / STNK Service Kendaraan	3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit			25,620,000	47,932,000	
1	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	2 Jenis			9,010,000	0	
1	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis			0	0	
1	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	AC Komputer Laptop Printer	4 Unit 3 Unit 6 Unit 4 Unit			0	57,868,000	
1	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis	1 Jenis			5,000,000	0	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**0**	**446,971,190**	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	180 dokumen			0	13,800,000	
1	01	02	1.01	48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					dokumen hasil	180 dokumen			122,163,900	13,800,000	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kemah Pramuka KSN,KOSN,FLS2N,Lomba Debat Bahasa Inggris, Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Cerdas Cermat 4 Pilar KBB	100 orang 525 orang			0	223,140,250	
1	01	02	1.01	49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			DEBAT BAHASA INGGRIS FLS2N KOSN KSN LCC 4 PILAR PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	35 orang 169 orang 192 orang 275 orang 35 orang 100 orang			200,464,200	0	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	50 orang 60 orang			29,672,600	50,179,560	
1	01	02	1.01	51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	50 orang 60 orang			0	50,179,560	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	20 laporan			0	506,000	
1	01	02	1.01	52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Pembangunan Sumber Daya Manusia					dokumen hasil	20 laporan			0	506,000	
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	108 dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.02	40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					dokumen hasil	18 dokumen			85,101,800	6,900,000	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kemah Pramuka LKS, KOSN,FLS2N,Cerdas Cermat 4 Pilar KBB	50 orang 200 orang			0	119,141,840	
1	01	02	1.02	41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Kemah Pramuka LKS, KOSN,FLS2N,Cerdas Cermat 4 Pilar KBB	50 orang 200 orang			99,535,800	119,141,840	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	45 orang 30 orang			1,775,300	33,303,540	
1	01	02	1.02	43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	45 orang 30 orang			0	33,303,540	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen	2 dokumen			0	0	
1	01	02	1.02	45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	12 laporan			0	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen	2 dokumen			26,734,300	0	
1	01	02	1.03	47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	18 dokumen			0	6,900,000	
1	01	02	1.03	48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			FLS2N KOSN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KARAKTER	50 orang 50 orang 50 orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0008 Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penilaian Angka Kredit Seleksi Guru,Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	10 orang 5 orang			0	0	
1	01	02	1.03	50	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen	10 dokumen			1,420,200	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen	2 dokumen			0	0	
1	01	02	1.03	51	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen hasil	2 laporan			0	0	
														TOTAL	**972,815,750**	**1,611,066,510**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**0**	**175,721,631,580**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**35,408,915,639**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,587,385,295**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			0	107,063,505	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**456,314,600**	**0**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renja SKPD	1 Dokumen			337,404,600	0	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					11,565,000	0	
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			9,950,000	0	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,587,385,295**	
1	02	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	76,062,150	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	940,175,266	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**456,314,600**	**0**	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			9,190,000	0	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,587,385,295**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	464,084,374	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**456,314,600**	**0**	
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			9,160,000	0	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			15,745,000	0	
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	2 Dokumen			63,300,000	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**26,112,950,879**	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	350 Orang			26,021,278,779	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**28,215,877,815**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	350 Orang			0	28,164,539,561	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**26,112,950,879**	**0**	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 Orang 8 Orang			88,401,800	0	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dokumen			3,270,300	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**28,215,877,815**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumla Laporan	2 Dokumen			0	34,265,055	
1	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	17,073,199	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,605,652,529**	
1	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	190 Jenis			0	14,133,086	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Jenis			0	802,348,387	
1	02	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Intruktur Senam dan Penceramah Kegiatan Imtaq	12 Bulan			0	41,365,500	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**50,801,500**	**101,367,900**	
1	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	1 Dokumen			50,801,500	101,367,900	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,605,652,529**	
1	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	1 Dokumen			0	101,367,900	
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 orang 8 Orang			0	539,626,610	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	13 Orang			0	734,833,498	
1	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	55 Jenis			0	82,011,848	
1	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaaan	11 Jenis			0	94,747,235	
1	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	14 Jenis			0	21,081,225	
1	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis			0	658,183,674	
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			0	18,216,000	
1	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minum	24 Kali			0	62,238,000	
1	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	17 Kali			0	567,246,240	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	3 Jenis			0	52,663,594	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit			0	254,023,132	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	60 Unit			0	1,324,505,600	
1	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis			0	218,086,000	
1	02	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	6 Jenis			0	18,975,000	
1	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang Direhab	2 Unit			0	0	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**538,305,900**	**0**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	14 Jenis			10,024,000	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	55 Jenis 15 Jenis			369,648,800	0	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minum rapat	24 Kali			29,830,000	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaaan	11 Jenis			19,998,100	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			7,200,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat / konsultasi	17 Kali			101,605,000	0	
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**58,726,700**	**0**	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	3 Jenis			58,726,700	0	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,276,938,800**	**0**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	190 Jenis			4,705,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	14 Jenis			376,533,800	0	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan & Pengamanan Tersedianya jasa Intruktur Senam dan Penceramah Kegiatan Imtaq	13 Orang 12 Bulan			895,700,000	0	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**278,950,000**	**0**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	64 Unit			244,150,000	0	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	6 Jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	6 Jenis			30,000,000	0	
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Yang di Pelihara	2 Unit			0	0	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana dan prasarana	1 Unit			4,800,000	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**128,050,784,723**	**0**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**57,823,028,400**	**0**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	2,500,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**4,938,695,751**	
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah FKTP yang dibina agar memenuhi standar pelayanan kesehatan di DTPK	40 Sarana			0	588,435,806	
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RMC yang dibina	3 RMC			0	87,681,635	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**57,823,028,400**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**4,938,695,751**	
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang rehabiltasi dan dipelihara	1 Unit			0	1,014,907,223	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RS yang di rehabiltasi dan dipelihara	1 Unit			0	103,362,000	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**57,823,028,400**	**0**	
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	52,277,364,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	43,700,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	2,500,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**4,938,695,751**	
1	02	02	1.01	20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kabupaten / Kota dengan fasyankes mempunyai akses pelayanan telemedecine	2 Kabupaten			0	31,774,500	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi yang di distribusikan ke Kab / Kota	20 Jenis			0	3,112,534,587	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**57,823,028,400**	**0**	
1	02	02	1.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	81,904,400	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	97 %			Jenis obat dan perbekalan kesehatan buffer stock Provinsi	20 Jenis	420,060,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	16400 Penduduk			237,911,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	16400 Penduduk			0	845,798,550	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Penduduk yang dilayani Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	91300 Penduduk			201,370,300	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penduduk yang dilayani Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	91300 Penduduk			0	1,275,231,665	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	20 Puskesmas			0	6,274,417,882	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan teknis program kesehatan ibu dan anak	20 Puskesmas			683,261,200	0	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang mampu PKPR dan PKRET	30 Puskesmas			904,674,600	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas yang mampu PKPR dan PKRET	30 Puskesmas			0	2,200,873,105	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas Santun Lansia	30 Puskesmas			0	505,630,953	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas Santun Lansia	30 Puskesmas			1,093,963,400	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis obat atau bahan penanggungan masalah gizi yang diadakan Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan distrbibusi obat dan PMT Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan kesehatan reproduksi dan TTD dalam mensukseskan program GEN	30 Puskesmas 10 Kab/Kota 100 Sekolah			0	19,819,277,997	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah jenis obat atau bahan penanggungan masalah gizi yang diadakan Jumlah Kabupaten / Kota yang mendapatkan distrbibusi obat dan PMT Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan kesehatan reproduksi dan TTD dalam mensukseskan program GEN	30 Puskesmas 10 Kab/Kota 100 Sekolah			9,301,008,834	0	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kab / Kota yang dibina tentang kesehatan Olahraga	10 Kabupaten			564,032,800	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kab / Kota yang dibina tentang kesehatan Olahraga	10 Kab/Kota			0	1,734,044,405	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina Jumlah KK Menggunakan Jamban Keluarga Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	40 Klp 2900 KK 100 Lokasi 30 Lokasi			3,644,234,400	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok wirausaha sanitasi yang dibina Jumlah KK Menggunakan Jamban Keluarga Jumlah sarana air bersih yang ditingkatkan kualitasnya Jumlah TTU yang memenuhi syarat kesehatan	40 Klp 2900 KK 100 Lokasi 30 Lokasi			0	5,570,131,720	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat, Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi	2500 Kader			0	2,526,665,483	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kader yang terlatih dan bersertifikat, Jumlah Petugas Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang diorientasi	2500 Kader			592,862,300	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kab / Kota yang di bina standar pelayanan kesehtan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	10 Kab/Kota			0	574,833,089	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kab / Kota yang di bina standar pelayanan kesehtan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	10 Kab/Kota			0	0	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80% Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota			840,008,900	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kabupaten/Kota dengan cakupan imunisasi > 80% Jumlah Kabupaten / Kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota			0	6,630,887,465	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan kegiatan evaluasi program kesehatan haji yang dilaksanakan	1 Dokumen			0	89,460,800	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Laporan kegiatan evaluasi program kesehatan haji yang dilaksanakan	1 Dokumen			43,000,000	0	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Puskesmas yang di latih pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa	10 Puskesmas			222,923,800	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang di latih pelaksanaan deteksi dini gangguan jiwa	20 Puskesmas			0	602,899,805	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program NAPZA	10 Puskesmas			0	367,026,640	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program NAPZA	10 Puskesmas			132,735,300	0	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Hibah Kepada PMI & BNN	1 Tahun			3,225,000,000	0	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah kepesertaan baru yang dibayarkan melalui JKN PBI	1500 Orang			43,617,208,900	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kepesertaan baru yang dibayarkan melalui JKN PBI	1500 Orang			0	71,477,959,268	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	10 Dokumen			0	666,094,950	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah analisis faktor resiko KLB yang dihasilkan	10 Dokumen			228,789,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen costing SPM Kabupaten / Kota	10 Dokumen			0	165,738,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen costing SPM Kabupaten / Kota	10 Dokumen			98,612,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	10 Dokumen 20 Sarana			0	1,584,841,668	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan & PIS-PK Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan obat rasional	10 Dokumen 20 Sarana			343,810,400	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen			59,000,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen			0	264,029,339	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	10 Dokumen			319,887,700	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	10 Dokumen			0	594,222,135	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Pujut, Sengkol	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Operasional Rumah Sakit	1 Tahun			3,000,000,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	10 Kab/Kota			0	241,500,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kab./Kota yang mempunyai PSC	10 Kab/Kota			95,651,600	0	
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	17 RS			86,314,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RS yang melaksanakan SISRUTE	17 RS			0	201,329,925	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah Kabupaten /Kota yang di lakukakan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	10 Kab/Kota			0	413,080,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumah Kabupaten /Kota yang di lakukakan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan /Nasional	10 Kabupaten			8,300,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tim TGC di Kabupaten / Kota yang di bina	10 Tim			0	791,635,965	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Tim TGC di Kabupaten / Kota yang di bina	10 Tim			114,000,000	0	
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten / Kota yang di dampingi dalam rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	10 Kabupaten			0	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kabupaten / Kota yang di dampingi dalam rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	10 Kab/Kota			0	208,117,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Riset Kesehatan yang disosialisasikan	3 Jenis			0	440,566,380	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Jenis Riset Kesehatan yang disosialisasikan	3 Jenis			0	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**126,158,076,489**	
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penilaian sarana prasarana dan alat kesehatan pasca bencana	1 Dokumen			0	91,781,500	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**69,658,561,234**	**0**	
1	02	02	1.02	29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah dokumen hasil penilaian sarana prasarana dan alat kesehatan pasca bencana	1 Dokumen			0	0	
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**350,287,289**	**0**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	1 Dokumen			316,787,289	0	
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**										**0**	**998,377,904**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Profil Kesehatan Daerah	1 Dokumen			0	675,912,304	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Postinganan pada website Dinas Kesehatan	90 Dokumen			0	204,242,875	
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**350,287,289**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen Postinganan pada website Dinas Kesehatan	90 Dokumen			0	0	
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**										**0**	**998,377,904**	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	1 PT			0	118,222,725	
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**350,287,289**	**0**	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan	5 Jenis			33,500,000	0	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,644,984,759**	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen			0	2,484,000	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**218,907,800**	**0**	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Dokumen hasil pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen			0	0	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Adanya Dokumen Tata Kelola RS Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	1 Dokumen 17 RS			95,236,000	0	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,644,984,759**	
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RS yang dibina tentang tata kelola Rumah Sakit	27 RS			0	676,496,240	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	10 Kab/Kota			0	966,004,519	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**218,907,800**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pesentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	97 %	Jumlah Kabupaten / Kota yang di bina rangka akreditasi / reakreditasi FKTP dan FKTL	10 Kabupaten			123,671,800	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**0**	**1,722,801,649**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**0**	**435,937,400**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana pemenuhan minaml 5 Tenaga Kesehatan di pusk	10 Kab/Kota			0	282,996,600	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**103,767,000**	**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Kab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana pemenuhan minaml 5 Tenaga Kesehatan di pusk	10 Kabupaten			25,627,000	0	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**0**	**435,937,400**	
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JumlahKab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 5 Tenaga Kesehatan di Pusk	10 Kab/Kota			0	152,940,800	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**103,767,000**	**0**	
1	02	03	1.01	02	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	JumlahKab / Kota Yang Mempunyai dokumen rencana distribusi dan pemerataan minaml 5 Tenaga Kesehatan di Pusk	10 Kabupaten			78,140,000	0	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**618,953,500**	**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			557,213,500	0	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,286,864,249**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Dinas Kesehatan	4 Jenis			0	1,205,102,584	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			0	81,761,665	
1	**02**	**03**	1.02		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**618,953,500**	**0**	
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen			61,740,000	0	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**										**32,181,200**	**0**	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**										**27,118,100**	**0**	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	10 Sarana			27,118,100	0	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**										**0**	**215,013,982**	
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK yang dibina dan diawasi	10 Sarana			0	138,925,750	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**										**27,118,100**	**0**	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Dokumen data Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK	1 Dokumen			0	0	
1	**02**	**04**	1.01		**Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)**										**0**	**215,013,982**	
1	02	04	1.01	02	Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen data Sarana PBF Cabang dan Cabang PAK	1 Dokumen			0	76,088,232	
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**										**5,063,100**	**0**	
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	3 Sarana			5,063,100	0	
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**										**0**	**93,840,287**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang dibina dan diawasi	3 Sarana			0	28,594,750	
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**										**5,063,100**	**0**	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana, produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang memenuhi syarat	30 %	Jumlah Dokumen data Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Dokumen			0	0	
1	**02**	**04**	1.02		**Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)**										**0**	**93,840,287**	
1	02	04	1.02	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen data Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Dokumen			0	65,245,537	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										**0**	**4,540,925,120**	
1	**02**	**05**	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,669,862,232**	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Posyandu yang di Aktifkan	158 Posyandu			0	3,669,862,232	
1	**02**	**05**	1.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**										**1,037,025,250**	**0**	
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Posyandu yang di Aktifkan	158 Posyandu			1,037,025,250	0	
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**657,438,888**	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dikembangkan	6 Jenis			0	657,438,888	
1	**02**	**05**	1.02		**Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi**										**63,999,000**	**0**	
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Jenis Media Promosi Kesehatan yang dikembangkan	6 Jenis			63,999,000	0	
1	**02**	**05**	1.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**213,624,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu KeluargaJumlah Jenis	10 Puskesmas			0	213,624,000	
1	**02**	**05**	1.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi**										**127,000,000**	**0**	
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Posyandu Aktif	70 %	Jumlah Puskesmas dalam penerapan Desa Siaga dan Posyandu KeluargaJumlah Jenis	10 Puskesmas			127,000,000	0	
														TOTAL	**158,806,699,052**	**175,822,999,480**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**20,207,370,523**	**565,988,799**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**11,352,230,267**	**565,988,799**	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	1,838,850	
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	2 Laporan			0	0	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	2 Laporan			0	0	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	1,838,850	
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	2 Laporan			0	0	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Jumlah Laporan	1 Laporan 1 Laporan			1,122,000	0	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gaji dan TPP ASN	57 Orang	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang	1,522,890,117	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	57 Orang			0	2,568,720,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	honor bendahara pengeluaran,PPK dan Pejabat Pengadaan	36 OB	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang	50,057,020	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan keuangan	1 Laporan	Gaji dan tunjangan PNS	57 Orang	1,040,600	1,196,690	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	1,290,300	
1	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	1,196,690	
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			0	8,994,150	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Rekening			0	329,475,000	
1	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	1	1 Laporan			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	1 Jumlah BMD	1 Laporan 500 unit			0	0	
1	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	500 unit			0	19,320,000	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	1	1 Laporan			0	0	
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	170 Orang/bulan 96 Orang/Bulan			0	961,998,000	
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	144 Orang/bulan			0	228,019,872	
1	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	2500 Jenis			0	64,760,076	
1	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetakan dan penggandaan	6500 buah			0	206,794,610	
1	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	200 Jenis			0	15,075,649	
1	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	153 Alat			0	487,598,505	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	12 Jenis			0	9,108,000	
1	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	2000 Jenis			0	124,627,800	
1	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	12 kali			0	87,009,000	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubelair	32 Alat			0	183,462,145	
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	2 unit			0	70,207,500	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	8 unit			0	147,195,400	
1	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	110 unit			0	54,458,250	
1	02	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubelair	200 unit			0	0	
1	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit			0	235,745,400	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pakaian kerja lapangan	57 buah			0	105,948,051	
1	02	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pakaian khusus	57 buah			0	0	
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya komponen listrik/penerangan	20 Jenis	Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	6,073,650	15,075,649	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perlengakapan kantor	35 Jenis	Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	18,669,640	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	11,600,000	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	52,272,560	206,794,610	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	7,920,000	9,108,000	
1	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	14,009,600	0	
1	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	0	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	18,299,420	0	
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kelengkapan kebutuhan operasional kantor	60 Jenis	0	0	
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan dinas operasional Sepeda Listrik	1 Unit 3 unit			369,800,000	0	
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair Jumlah meubel yang diadakan	32 Alat 10 buah			6,754,660	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat dan mesin yang diadakan	50 unit			7,270,802,440	0	
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tetap yang diadakan	1 buah			22,000,000	0	
1	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 buah			0	0	
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlahgedung kantor yang diadakan	4 buah			0	0	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	10 buah			971,620,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Ardministrasi Kantor	110 Kegiatan	5,042,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Ardministrasi Kantor	110 Kegiatan	253,100,000	329,475,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Penunjang Ardministrasi Kantor	110 Kegiatan	656,118,560	2,500,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	8 Jumlah kendaraan	8 surat 8 unit			54,373,000	0	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubel yang dipelihara	50 buah			0	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Jumlah peralatan gedung kantor	50 buah 110 unit			20,350,000	0	
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara Jumlah gedung kantor	10 buah 2 unit			18,315,000	0	
1	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aset tak berwujud lainnya yang dipelihara	10 buah			0	0	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit			0	0	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit			0	0	
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit			0	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**8,823,945,256**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	7,200,934,000	0	
1	02	02	1.01	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Fasilitas gudang alat dan arsip laboratorium Tersedianya Gedung Laboratorium TB	1 unit 1 unit			0	229,605,550	
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	200,927,000	0	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan operasional laboratorium	1 unit			0	390,872,350	
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat Kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	1 PT			0	5,317,527,747	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	72,000,000	0	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	921,672,256	0	
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Reagensia dan BHP Lainnya / AMHP yang diadakan	1 PT			0	10,871,759,195	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	126,967,000	0	
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah alat Kesehatan / Lab. Yang dipelihara dan diadakan	1 PT			0	23,117,334,712	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Pembangunan Gedung Lab BSLPlus dan Arsip	2 Unit	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah Lab Fasyankes Yang dibina	30 Lab			0	44,068,000	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Bimbingan Teknis Ke Faskes	10 OK	10,245,000	0	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RS yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan yang sesuai standar	65 %			Bimbingan Teknis Ke Faskes	10 OK	0	0	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	5 ok			0	0	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5 ok			0	0	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2 Unit			0	0	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang dilaksanakan	3 Jenis			0	947,432,100	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis kegiatan akreditasi yang dilaksanakan	2 Jenis			291,200,000	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**31,195,000**	**0**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 %			Bimbingan Teknis	4 OK	31,195,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Diklat yang diikuti oleh ASN Laboratorium Kesehatan	12 Jenis			0	301,437,425	
TOTAL															**20,207,370,523**	**47,698,869,626**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**2,176,748,998**	**8,280,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,176,748,998**	**8,280,000**	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen			0	0	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah ASN yg mendapat Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	40 orang			0	1,650,812,350	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarkannya TPP Pegawai	1 Tahun			4,429,458,744	0	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			33,260,000	0	
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen yang disusun	2 Dokumen			0	21,252,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	80 jenis			0	7,843,000	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	3 jenis			0	120,865,000	
1	02	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa penceramah imtaq dan instruktur senam	2 orang			0	19,734,000	
1	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah	1 orang			0	9,867,000	
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga administrasi keuangan	3 orang			0	33,699,600	
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga kebersihan	15 orang			0	585,990,895	
1	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis ATK	30 jenis			0	93,946,364	
1	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah cetak dan penggandaan	3 jenis			0	30,764,800	
1	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah instalasi listrik	15 jenis			0	48,037,110	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah bahan bacaan	1 jenis			0	8,280,000	
1	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah makanan dan minuman	50 paket/kali rapat			0	26,413,200	
1	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rapat	20 kali			0	328,591,800	
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor	10 unit			0	28,911,000	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	8 unit			0	69,839,500	
1	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan gedung kantor	10 jenis			0	67,285,350	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	12 Bulan			20,160,000	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis			15,900,000	0	
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	1 jenis			7,200,000	8,280,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Balai Pelatihan Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat	30 surat			4,690,000	0	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa Listrik	3 jenis			148,800,000	0	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis			1,081,545,500	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan Mesin Kantor	2 Jenis			44,690,000	0	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 jenis			12,960,000	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**0**	**367,973,550**	
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jenis diklat yang diikuti oleh ASN Bapelkes	10 jenis pelatihan			0	367,973,550	
														TOTAL	**2,176,748,998**	**3,528,386,519**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**28,509,915,084**	**35,574,314,669**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**14,564,875,045**	**16,295,351,420**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan TKD	115 Orang			2,367,093,045	3,283,169,500	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang mendapatkan TKD	115 Orang			0	3,283,169,500	
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Dokumen			0	0	
1	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Jumlah Laporan	1 Dokumen 2 Dokumen			0	0	
1	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	50 Surat			0	5,994,375	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Jenis			0	389,182,080	
1	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD Jumlah Laporan Jumlah Laporan	2 Orang 1 Dokumen 2 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Kegiatan Akreditasi yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Dalam RSBA Jumlah Pasien Katarak yang Dioperasi Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Ruang Operasi yang Dipelihara Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 1 Jenis 4 Kegiatan 500 Orang 1 Paket 4 Jenis 1 Paket 50 Surat 12 Orang 19 Orang 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Satpam	40 Orang			0	1,242,000,000	
1	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	49 Jenis			0	0	
1	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Jenis ATK	35 Jenis 1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK	1 Tahun 16 Jenis 1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Kegiatan Akreditasi yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Dalam RSBA Jumlah Pasien Katarak yang Dioperasi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Ruang Operasi yang Dipelihara Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 1 Jenis 4 Kegiatan 500 Orang 1 Tahun 1 Paket 4 Jenis 1 Paket 50 Surat 12 Orang 19 Orang 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Kegiatan Akreditasi yang Dilaksanakan Jumlah Kegiatan Dalam RSBA Jumlah Pasien Katarak yang Dioperasi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rapat Jumlah Rekening Jumlah Ruang Operasi yang Dipelihara Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 1 Jenis 4 Kegiatan 500 Orang 1 Tahun 1 Paket 1 Tahun 4 Jenis 1 Paket 50 Surat 12 Orang 19 Orang 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Mebeleur	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	5 Paket			0	1,025,005,465	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK Jumlah Kendaraan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Mebeleur	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Instalasi Listrik Jumlah Jenis ATK Jumlah Kendaraan Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Mebeleur Jumlah Peralatan Gedung kantor	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun			0	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sepeda Listrik Yang diadakan	4 Unit			88,000,000	0	
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Konsultasi/Rapat	3 Kali			53,750,000	0	
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diadakan	4 Paket			998,544,000	0	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	50 Surat			0	5,994,375	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 Jenis			329,988,000	389,182,080	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Satpam	38 Orang			1,140,000,000	1,242,000,000	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Yang Dipelihara	2 Paket			312,000,000	1,025,005,465	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	JUmlah Kegiatan Dalam RSBA	4 Jenis			9,275,500,000	10,350,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**0**	**39,606,405,300**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	2 Lokal 2 Lokal			0	4,447,394,655	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Tersedianya Gedung Laundy Tersedianya RAMP RSM	1 Lokal 1 Lokal			548,544,000	0	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan	1 Paket			0	18,699,363,249	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Alat Kesehatan Yang Diadakan	1 Paket			6,658,683,200	18,699,363,249	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Obat Yang Diadakan	70 Jenis			0	1,909,251,289	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Prasarana yang diadakan	2 Jenis			6,198,544,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang Diadakan	1 Paket			0	1,498,755,555	
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan	70 Jenis			0	2,122,040,552	
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BMHP/AMHP yang diadakan	56 Jenis			0	0	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 4 Jenis 50 Surat 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 1 Paket 4 Jenis 50 Surat 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Ruang Operasi yang Dipelihara Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 1 Paket 4 Jenis 1 Paket 50 Surat 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Obat - Obatan Yang Diadakan	16 Jenis			119,018,839	0	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan yang Diadakan Jumlah Ambulance yang Diadakan Jumlah Bahan Logistik RS yang Diadakan Jumlah Barang Instalasi CSSD, Gizi, Radiologi dan Laundry RS yang Diadakan Jumlah Barang Laboraturium Rumah Sakit yang Diadakan Jumlah BMHP/AMHP yang Diadakan Jumlah Jenis Obat yang Diadakan Jumlah Jenis Pengelolaan Limbah Medis yang Dipelihara Jumlah Pasien Katarak yang Dioperasi Jumlah Peralatan Kesehatan yang Dipelihara Jumlah Rekening Jumlah Ruang Operasi yang Dipelihara Jumlah Surat Keluar Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedianya Ruang CSSD, Laundry Tersedianya Ruang Instalasi Gizi, Radiologi	1 Paket 1 Paket 1 Paket 4 Paket 1 Paket 70 Jenis 70 Jenis 1 Paket 500 Orang 1 Paket 4 Jenis 1 Paket 50 Surat 40 Orang 2 Lokal 2 Lokal			0	0	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Dalam RSBA	4 Kegiatan			0	10,350,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Akreditasi yang Dilaksanakan	1 Jenis			0	579,600,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Jumlah Kegiatan Akreditasi Yang Dilaksanakan	1 Jenis			420,250,000	579,600,000	
														TOTAL	**28,509,915,084**	**81,126,071,389**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**313,020,403,733**	**534,715,586,199**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**260,562,562,925**	**305,079,644,119**	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**73,145,890,125**	**112,093,606,028**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang yang diberikan gaji dan tunjangan	847 orang			73,145,890,125	111,562,552,703	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**111,617,379,827**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang diberikan gaji dan tunjangan	847 orang			0	111,562,552,703	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**73,145,890,125**	**112,093,606,028**	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	16 orang			0	531,053,325	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**111,617,379,827**	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang diberikan jasa	5 orang			0	0	
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	5 Dokumen			0	54,827,124	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**7,273,890,766**	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis jasa yang tersedia	3 jenis			0	6,371,048,277	
1	02	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah karyawan yang mengikuti kebugaran/MCU/Vaksinasi	900 orang			0	111,373,584	
1	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	4 orang			0	2,530,380	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	16 orang			0	531,053,325	
1	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah judul buku yang tersedia	35 judul			0	0	
1	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan yang terbeli	1 unit			0	257,885,200	
1	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**1,272,314,230**	
1	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal/pelatihan formal	209 orang			0	1,272,314,230	
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**280,200,000**	**1,272,314,230**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang yang mengikuti/melanjutkan pendidikan formal	3 orang			280,200,000	1,272,314,230	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,905,170,800**	**6,482,421,861**	
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa yang tersedia	3 jenis			1,662,196,000	6,371,048,277	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayarkan honor	5 orang			242,974,800	111,373,584	
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										**185,231,302,000**	**185,231,302,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pendapatan BLUD	185231302000 rupiah			185,231,302,000	185,231,302,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**0**	**229,635,942,080**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan yang terbangun (IGD Trauma center dan selasar)	2 unit			0	84,468,502,800	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah bangunan yang terbangun (IGD Trauma center dan selasar)	2 unit			0	84,468,502,800	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rumah dinas on-site dokter IGD yang terbangun	2 unit			0	1,986,707,800	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah rumah dinas on-site dokter IGD yang terbangun	2 unit			0	1,986,707,800	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit			50,154,050,808	48,632,227,239	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit			0	48,632,227,239	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis obat yang tersedia Jumlah meubelair yang tersedia	12 jenis 250 unit			0	47,248,033,360	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah jenis obat yang tersedia Jumlah meubelair yang tersedia	12 jenis 250 unit			0	47,248,033,360	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat-alat kesehatan/alat penunjang medik yang terkalibrasi/terpelihara	5300 unit			0	24,809,219,531	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah alat-alat kesehatan/alat penunjang medik yang terkalibrasi/terpelihara	5300 unit			0	24,809,219,531	
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah gedung yang terpelihara	22 unit			0	14,948,496,145	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung yang terpelihara	22 unit			0	14,948,496,145	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah instalasi limbah rumah sakit yang terpelihara Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara	3 unit 250 unit			0	286,071,700	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah instalasi limbah rumah sakit yang terpelihara Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara	3 unit 250 unit			0	286,071,700	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**50,154,050,808**	**222,379,258,575**	
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah jenis obat yang terbeli	12 jenis			0	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,303,790,000**	**6,582,314,661**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SPM yang mencapai target	83 %					0	0	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah orang yang terperiksa CD4, Viralload dan Meso ARV	90 orang			208,410,000	274,858,314	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**6,582,314,661**	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang terperiksa CD4, Viralload dan Meso ARV	90 orang			0	274,858,314	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,303,790,000**	**6,582,314,661**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang mendapatkan layanan kesehatan Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani ambulan Jumlah masyarakat miskin, terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani mobil jenazah Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani rumah singgah	40 orang 30 orang 170 orang 500 orang			2,095,380,000	6,307,456,347	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**6,582,314,661**	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah limbah medis dan B3 yang diangkut dan dikelola Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani layanan ambulan Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang terlayani rumah singgah Jumlah masyarakat miskin,terlantar dan masalah sosial lainnya yang tertangani Jumlah orang yang di khitan Jumlah orang yang dioperasi katarak Jumlah pasien gizi buruk / stunting yang dilayani	136800 kg 300 orang 150 orang 300 orang 500 orang 25 orang 75 orang			0	6,307,456,347	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**674,368,844**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Persentase SPM yang mencapai target	83 %	Jumlah dokumen yang tersusun (re akreditasi)	2 Dokumen			0	674,368,844	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**674,368,844**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang tersusun (re akreditasi)	2 Dokumen			0	674,368,844	
														TOTAL	**313,020,403,733**	**884,515,113,102**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**0**	**97,768,447,873**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**33,642,183,982**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**30,051,264,707**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		14 Bulan			0	13,429,164,707	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**9,905,288,054**	**0**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	125 OB			19,810,576,108	0	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	350 OB			0	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**30,051,264,707**	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	350 OB			0	16,622,100,000	
1	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,597,290,525**	
1	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	26 OB			0	1,483,500,000	
1	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mobil yang diadakan	2 unit			0	513,847,600	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Meubeler yang tersedia	20 unit			0	99,244,425	
1	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mobil yang dipelihara	12 unit			0	500,698,500	
1	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**993,628,750**	
1	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 orang			0	993,628,750	
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**0**	**993,628,750**	
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 orang			0	993,628,750	
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis cetakan	100 jenis			0	0	
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**513,847,600**	
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mobil yang diadakan	2 unit			0	513,847,600	
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,620,000,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis	3 jenis			0	0	
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	29 OB			3,240,000,000	0	
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**0**	**599,942,925**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mobil yang dipelihara	12 unit			0	500,698,500	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubeler yang tersedia	20 unit			0	99,244,425	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**36,663,725,000**	**14,738,345,720**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,163,725,000**	**14,605,425,500**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah Bangunan yang terbangun (Gedung Diklat,Workshop, Anak & Gedung VIP)	4 unit			0	13,880,074,500	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**29,028,743,671**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah Bangunan yang terbangun (Gedung Diklat,Workshop, Anak & Gedung VIP)	4 unit			0	13,880,074,500	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit			0	7,018,908,621	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,163,725,000**	**14,605,425,500**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah alat kesehatan/kedokteran yang tersedia	200 unit			5,163,725,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah jenis obat yang tersedia	12 Jenis			0	0	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**29,028,743,671**	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah jenis obat yang tersedia	12 Jenis			0	7,404,409,550	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mobil ambulance/mobil jenazah terpelihara	10 unit			0	0	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah alat-alat terkalibrasi/terpelihara	12 unit			0	0	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah gedung yang terpelihara	5 unit			0	725,351,000	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,163,725,000**	**14,605,425,500**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah gedung yang terpelihara	5 unit			0	725,351,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**31,500,000,000**	**0**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin	Persentase SPM yang mencapai target	75 %	Jumlah pendapatan BLUD	315000000000 Rupiah			63,000,000,000	0	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**34,964,600,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.04.0000 Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah pendapatan BLUD	3150000000 Rupiah			0	34,964,600,000	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**132,920,220**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			1. Nilai Standar Akreditasi	80 Paripurna			0	132,920,220	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**132,920,220**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Persentase SPM yang mencapai target	75 %	1. Nilai Standar Akreditasi	80 Paripurna			0	132,920,220	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**12,749,960,400**	**0**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**12,749,960,400**	**0**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Samapuin			Jumlah orang	350 OB			12,749,960,400	0	
TOTAL															**60,938,973,454**	**114,614,212,868**	

TOTAL	**60,938,973,454**	**114,614,212,868**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**54,712,938,645**	**74,902,653,773**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**40,428,624,945**	**52,110,133,209**	
1	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang terlayanai	4 orang/bulan			0	0	
1	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang terlayanai	4 orang/bulan			0	0	
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang terlayanai	4 orang/bulan			0	0	
1	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang terlayanai	4 orang/bulan			0	0	
1	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang terlayanai	4 orang/bulan			0	0	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**20,702,137,804**	**29,228,351,254**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ASN	250 orang	persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	20,702,137,804	22,772,351,254	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**25,088,117,754**	
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	255 orang			0	25,088,117,754	
1	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**20,702,137,804**	**29,228,351,254**	
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	0	6,456,000,000	
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	0	0	
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	0	0	
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	0	0	
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase pembayaran gaji ASN	100 persen	0	0	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**24,108,942,585**	
1	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	3 rekening			0	586,500,000	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
1	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**24,108,942,585**	
1	02	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	34 unit			0	326,496,500	
1	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga administrasi	15 orang			0	388,588,105	
1	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit			0	258,444,905	
1	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	7 unit			0	74,103,700	
1	02	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	9 unit			0	109,236,890	
1	02	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	17 unit			0	0	
1	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	41 unit			0	66,203,660	
1	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	1 unit			0	707,802,000	
1	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit			0	21,591,566,825	
1	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**1,672,387,500**	
1	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang diklat formal	250 orang			0	1,672,387,500	
1	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**80,000,000**	**400,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	272 orang	terpenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	60 persen	80,000,000	400,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**10,379,600**	**348,444,905**	
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	0	
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	258,444,905	
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	0	
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Abian Tubuh Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	0	
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	12 laporan	persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	10,379,600	90,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	0	
1	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentase kegiatan yang terlaporkan	100 persen	0	0	
1	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**675,440,550**	
1	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit kendaraan dinas operasional	1 unit	persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	66,203,660	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	0	109,236,890	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**136,107,541**	**431,400,000**	
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis sumber daya	3 jenis	persentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	136,107,541	431,400,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			persentasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**0**	**326,496,500**	
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan	34 unit			0	326,496,500	
1	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah	12 bulan			0	0	
1	**02**	**01**	1.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										**19,500,000,000**	**20,700,000,000**	
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pendapatan BLUD	19500000000 rupiah	persentasi realisasi pendapatan BLUD	56.45 persen	19,500,000,000	20,700,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**0**	**17,126,714,767**	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlah unit gedung	1 unit			0	1,200,732,652	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	03	Pengembangan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	1,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	4,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah unit alkes	19 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	2,810,339,000	2,360,678,199	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat unit alkes	78 unit			0	0	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	371,466,215	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlah jenis obat	13 Jenis			0	0	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlah unit meubelair	81 unit			0	371,466,215	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	12	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah mebelaur	90 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	212,451,000	400,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat unit	57 unit			0	884,054,680	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah unit	34 unit	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	212,668,000	400,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat unit	125 unit			0	0	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat unit terpelihara	185 unit			0	81,489,000	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	81,489,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**3,390,629,697**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			jumlah unit terpelihara Jumlat unit gedung terpelihara Jumlat unit terpelihara	1 unit 14 unit 160 unit			0	852,887,150	
1	**02**	**02**	1.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**5,235,577,400**	**12,466,520,564**	
1	02	02	1.01	19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat		Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %			persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	0	852,887,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah jenis	13 jenis	persentase ketersediaan fasilitas pelayanan,sarana,prasarana dan alat kesehatan	89 persen	2,000,119,400	3,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,302,736,300**	**3,070,000,000**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	4277 orang	persentasi masyarakat yang terlayani	100 persen	100,228,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**13,419,167,150**	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat orang terlayani	50 orang			0	4,331,165,650	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat orang terlayani	51981 orang			0	8,984,271,500	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,302,736,300**	**3,070,000,000**	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	34900 orang	persentasi masyarakat yang terlayani	100 persen	1,684,515,000	2,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**13,419,167,150**	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat orang terlayani	400 orang			0	55,142,500	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,302,736,300**	**3,070,000,000**	
1	02	02	1.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang terlayani	300 orang	persentasi masyarakat yang terlayani	100 persen	87,250,000	120,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang terlayani	78 orang	persentasi masyarakat yang terlayani	100 persen	418,000,000	450,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**13,419,167,150**	
1	02	02	1.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlat orang terlayani	50 orang			0	23,862,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlah pendapatan BLUD Jumlat orang terlayani	19500000000 Rupiah 4277 orang			0	24,725,000	
1	**02**	**02**	1.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi**										**2,302,736,300**	**3,070,000,000**	
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang yang terlayani	531 orang	persentasi masyarakat yang terlayani	100 persen	12,743,300	350,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**02**	**02**	1.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**0**	**0**	
1	02	02	1.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah orang terlayanai	4277 orang/bulan			0	0	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %					0	0	
1	02	02	1.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase SPM yang mencapai target	73.81 %	jumlah	12 bulan			0	0	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**290,000,000**	**800,000,000**	
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	80 %			persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	100 persen	0	400,000,000	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Persentase Capaian elemen akreditasi sesuai standar	80 %	jumlah dokumen elemen akreditasi yang terpenuhi	2 dokumen	persentase elemen akreditasi yang terpenuhi	100 persen	290,000,000	400,000,000	
1	**02**	**02**	1.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**316,917,920**	
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			nilai tindak lanjutrekomendasi akredasi perencanaan perbaikan strategi	80 paripurna			0	316,917,920	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**6,456,000,000**	**6,456,000,000**	
1	**02**	**03**	1.01		**Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi**										**6,456,000,000**	**6,456,000,000**	
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Jumlah Pegawai Non ASN	132 orang			6,456,000,000	6,456,000,000	
														TOTAL	**54,712,938,645**	**142,898,816,379**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**0**	**1,395,255,649,847**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**50,137,485,722**	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**671,682,800**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja 2021	2 Dokumen			0	164,282,100	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**549,228,300**	**351,219,890**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja 2021	2 Dokumen			169,190,100	164,282,100	
1	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			59,419,300	0	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**671,682,800**	
1	03	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	dokumen	2 buku			0	70,160,580	
1	03	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	dokumen	2 buku			0	49,698,860	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**549,228,300**	**351,219,890**	
1	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			45,311,400	0	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**671,682,800**	
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan	1 Laporan			0	250,302,330	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**549,228,300**	**351,219,890**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	5 Buah			40,642,800	0	
1	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	5 Buah			41,982,800	0	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**671,682,800**	
1	03	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan	1 Laporan			0	137,238,930	
1	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**549,228,300**	**351,219,890**	
1	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	2 buku			49,891,300	49,698,860	
1	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan	1 Laporan			142,790,600	137,238,930	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**43,757,219,022**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun			0	43,534,872,617	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**43,523,490,461**	**43,672,848,352**	
1	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 Tahun			43,124,125,061	43,534,872,617	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun			68,666,000	0	
1	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun			59,551,100	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Tahun			43,219,700	0	
1	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen			57,725,200	0	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**43,757,219,022**	
1	03	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyusunan LKPJ dan LKJiP	1 Dok			0	17,273,000	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**43,523,490,461**	**43,672,848,352**	
1	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen			48,038,200	0	
1	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Dok			57,160,100	34,525,415	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**43,757,219,022**	
1	03	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Dok			0	34,525,415	
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran	1 Dok			0	103,450,320	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**43,523,490,461**	**43,672,848,352**	
1	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyusunan laporan realisasi anggaran	1 Dok			65,005,100	103,450,320	
1	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**43,757,219,022**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dok			0	67,097,670	
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**65,326,200**	**0**	
1	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					10,488,200	0	
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,532,150,900**	
1	03	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan			0	7,428,770	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	520,713,100	
1	03	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			0	8,552,090	
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**65,326,200**	**0**	
1	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					16,222,400	0	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					36,565,600	0	
1	03	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,050,000	0	
1	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,532,150,900**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	502,737,335	
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	863,115,250	
1	03	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan			0	155,882,500	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	97,231,235	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	52,226,215	
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			0	8,219,625	
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan			0	946,011,620	
1	03	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan			0	53,936,610	
1	03	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan	12 Bulan			0	15,939,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	34,569,000	
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	138,088,550	
1	03	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit			0	355,338,500	
1	03	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung / kantor	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12 Bulan			0	382,260,000	
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	1,369,006,000	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	20,895,500	
1	**03**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**176,433,000**	
1	03	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pengadaan mesin absensi	10 Buah			0	0	
1	03	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	233 Stel			0	103,983,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan	1 Tahun			0	72,450,000	
1	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**61,545,000**	**72,450,000**	
1	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					32,110,000	0	
1	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan	1 Tahun			29,435,000	72,450,000	
1	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**902,521,900**	**287,040,000**	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			10,156,000	8,219,625	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			327,435,800	0	
1	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan			35,267,600	53,936,610	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			20,682,500	52,226,215	
1	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun			26,460,000	0	
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			59,820,000	34,569,000	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			422,700,000	138,088,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**212,988,000**	**355,338,500**	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit			129,301,000	355,338,500	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			83,687,000	0	
1	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,712,154,300**	**1,399,809,210**	
1	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa Surat Menyurat Kantor	12 Bulan			4,294,000	7,428,770	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			554,000,300	520,713,100	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			1,545,000	8,552,090	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan 12 Bulan			1,152,315,000	863,115,250	
1	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**920,331,000**	**382,260,000**	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun			653,390,000	0	
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			24,120,000	0	
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Tahun			152,696,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan 12 Bulan			51,945,000	382,260,000	
1	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun			38,180,000	0	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**										**74,877,757,989**	**96,621,579,930**	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Tersusunnya Laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Dokumen			0	911,994,850	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	2 Dokumen			0	911,994,850	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	5 Dokumen			0	1,500,000	
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Tersusunnya Laporan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			301,827,000	930,764,000	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	2 Dokumen			0	930,764,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	19 Buah			0	3,796,380,000	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	19 Buah			0	3,796,380,000	
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Keperluan Air Baku	10 Buah			0	1,200,000,000	
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3 Buah			6,167,839,800	5,582,272,500	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3 Buah			0	5,582,272,500	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	10 Buah			5,864,363,000	86,103,950	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	10 Buah			0	86,103,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2 Buah			0	142,677,050	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Perlindungan Tanggul Sungai dari Luapan Banjir	8 Lokasi			0	2,000,000,000	
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	2 Buah			0	142,677,050	
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			692,004,700	336,370,400	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1 Dokumen			0	336,370,400	
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	4 Kegiatan			0	209,948,140	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**14,439,902,500**	**16,742,637,645**	
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	4 Kegiatan			0	209,948,140	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan			1,413,868,000	1,544,626,755	
1	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,541,137,645**	
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	3 Kegiatan			0	1,544,626,755	
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**60,437,855,489**	**79,878,942,285**	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Tersusunnya Laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2 Dokumen			1,722,000,000	1,264,274,350	
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**75,678,942,285**	
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2 Dokumen			0	1,264,274,350	
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Bendung Irigasi	2 DI			0	2,512,625,570	
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**60,437,855,489**	**79,878,942,285**	
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Bendung Irigasi	2 DI			0	2,512,625,570	
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Keperluan Irigasi	10 Buah			4,350,885,994	2,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10 DI			52,817,083,395	66,941,516,445	
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**75,678,942,285**	
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	10 DI			0	66,941,516,445	
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Peningkatan Bendung Irigasi	10 DI			0	4,960,525,920	
1	**03**	**02**	1.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**60,437,855,489**	**79,878,942,285**	
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terlaksananya Peningkatan Bendung Irigasi	10 DI			0	4,960,525,920	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %					0	0	
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kemantapan Jaringan Irigasi	50,04 %	Terpenuhinya fasilitas OP pada jaringan irigasi	7 DI			1,547,886,100	2,200,000,000	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**										**3,559,117,500**	**27,850,071,208**	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**3,559,117,500**	**27,850,071,208**	
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Cakupan Air minum	76.48 %	Tersusunnya Laporan Rencana, Kewajiban, Strategis dan Teknis SPAM	5 Dokumen			418,870,000	5,714,623,815	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**0**	**27,850,071,208**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	03	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Rencana, Kewajiban, Strategis dan Teknis SPAM	5 Dokumen			0	5,714,623,815	
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	34 Buah			0	10,861,687,123	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**3,559,117,500**	**27,850,071,208**	
1	03	03	1.01	03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Cakupan Air minum	76.48 %	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	34 Buah			2,742,614,000	10,861,687,123	
1	03	03	1.01	04	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Cakupan Air minum	76.48 %	Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	27 Buah			0	6,043,031,960	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**0**	**27,850,071,208**	
1	03	03	1.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	27 Buah			0	6,043,031,960	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**3,559,117,500**	**27,850,071,208**	
1	03	03	1.01	06	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Cakupan Air minum	76.48 %	Terlaksananya Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	7 Buah			397,633,500	5,230,728,310	
1	**03**	**03**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota**										**0**	**27,850,071,208**	
1	03	03	1.01	09	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	7 Buah			0	5,230,728,310	
1	**03**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**										**0**	**46,500,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**03**	**04**	1.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**										**0**	**46,500,000,000**	
1	03	04	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	Cakupan Pelayanan	50 %	Tersusunnya Dokumen	100 Persen			0	2,500,000,000	
1	03	04	1.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu Kab. Lombok Barat, Sekotong, Buwun Mas	Cakupan Pelayanan	50 %	Terbangunnya Sarana Prasarana TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	100 Persen			0	27,500,000,000	
1	03	04	1.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Gerung, Kebon Ayu	Cakupan Pelayanan	50 %	Terbangunnya Sarana Prasarana TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	100 Persen			0	7,000,000,000	
1	03	04	1.01	06	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Cakupan Pelayanan	50 %	Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan	100 Persen			0	9,500,000,000	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**										**0**	**600,000,000**	
1	**03**	**05**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional**										**0**	**600,000,000**	
1	03	05	1.01	06	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan	80.01 %	Kesadaran Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sarpras	100 Persen			0	200,000,000	
1	03	05	1.01	07	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan	80.01 %	Adanya Peningkatan SDM Dalam pengelolaan air limbah Domestik	100 Persen			0	200,000,000	
1	03	05	1.01	08	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pelayanan	80.01 %	Terselesaikannya Permasalahan Pembebasan Lahan/Sengketa serta adanya peran serta dunia usaha dalam pengelolaan Air Limbah Domestik	100 Persen			0	200,000,000	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**										**0**	**4,800,312,750**	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**										**0**	**4,800,312,750**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen			0	583,234,000	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**										**15,165,460,600**	**4,800,312,750**	
1	03	06	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Tersusunnya Laporan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2 Dokumen			105,000,000	583,234,000	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**										**0**	**4,800,312,750**	
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perkotaan	11 Buah			0	4,217,078,750	
1	**03**	**06**	1.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi**										**15,165,460,600**	**4,800,312,750**	
1	03	06	1.01	05	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Perkotaan	11 Buah			15,060,460,600	4,217,078,750	
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**										**0**	**54,759,889,020**	
1	**03**	**07**	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**54,759,889,020**	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Kantor	36 Unit			0	54,759,889,020	
1	**03**	**07**	1.01		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**54,759,889,020**	
1	03	07	1.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Pembangunan Gedung dan Kantor	36 Unit			0	54,759,889,020	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**										**0**	**121,568,038,125**	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**121,568,038,125**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Tersusunnya Laporan Perencanaa, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Dokumen			0	75,095,000,000	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**121,568,038,125**	
1	03	08	1.01	01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Perencanaa, Pembangunan, Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Dokumen			0	75,095,000,000	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**121,568,038,125**	
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	21 Buah			0	8,253,203,390	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**121,568,038,125**	
1	03	08	1.01	02	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	21 Buah			0	8,253,203,390	
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Buah			0	38,219,834,735	
1	**03**	**08**	1.01		**Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi**										**0**	**121,568,038,125**	
1	03	08	1.01	03	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	4 Buah			0	38,219,834,735	
1	**03**	**09**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**										**0**	**4,616,662,005**	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**4,616,662,005**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Laporan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen			0	1,035,000,000	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**650,000,000**	**4,616,662,005**	
1	03	09	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Tersusunnya Laporan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah kabupaten/Kota	1 Dokumen			0	1,035,000,000	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**4,616,662,005**	
1	03	09	1.01	02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	2 Dokumen			0	0	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**650,000,000**	**4,616,662,005**	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Buah			650,000,000	3,491,906,000	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**4,616,662,005**	
1	03	09	1.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Buah			0	3,491,906,000	
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Bintek Penataan Bangunan dan Lingkungan Se-NTB	2 Kegiatan			0	51,965,625	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**650,000,000**	**4,616,662,005**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	09	1.01	06	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Bintek Penataan Bangunan dan Lingkungan Se-NTB	2 Kegiatan			0	51,965,625	
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4 Kegiatan			0	37,790,380	
1	**03**	**09**	1.01		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**4,616,662,005**	
1	03	09	1.01	07	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4 Kegiatan			0	37,790,380	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan NTB	14 km			832,547,600	4,548,795,330	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan sosialisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan dan SK Jalan Nasional Tersusunnya Dokumen Lingkungan (UKL-UPL) NTB Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jalan NTB Tersusunnya Dokumen Perencanaan Teknis Jembatan NTB	2 kegiatan 12 Lokasi 20 km 6 unit			0	4,548,795,330	
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pekerjaan Leger Jalan Provinsi NTB	50 km			0	2,677,187,810	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pekerjaan Leger Jalan Provinsi NTB	50 km			0	2,677,187,810	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Survey Jalan Provinsi NTB Terlaksananya Survey Jembatan Provinsi NTB	1484.43 km 781 unit			1,139,986,200	1,692,000,750	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Survey Inventarisasi dan Kondisi Jalan Provinsi NTB Terlaksananya Survey Inventarisasi dan Kondisi Jembatan Provinsi NTB	1484.43 km 784 unit			0	1,692,000,750	
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan	168 km			0	920,477,306,465	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	05	Pembangunan Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Berkala Jalan	112 km			246,793,627,088	920,477,306,465	
1	03	10	1.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %					0	0	
1	03	10	1.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pelebaran jalan menambah lajur	5.4 Km			0	120,000,000,000	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi NTB	6.88 km			0	36,177,608,040	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	09	Rehabilitasi Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan Provinsi NTB	6.88 km			0	36,177,608,040	
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi NTB	6.95 Km			0	37,092,207,410	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi NTB	6.95 Km			0	37,092,207,410	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Provinsi NTB	70 m			0	29,586,450,890	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	12	Pembangunan Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembangunan Jembatan Provinsi NTB	70 m			0	29,586,450,890	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	16	Penggantian Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya penggantian jembatan	20 m			0	15,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	17	Pelebaran Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pelebaran jembatan	15 m			0	10,000,000,000	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan Provinsi NTB	250 m			0	2,814,757,710	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	250 m			0	2,447,000,000	
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	50 m			0	1,000,000,000	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**0**	**1,035,066,314,405**	
1	03	10	1.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Km			0	0	
1	**03**	**10**	1.01		**Penyelenggaraan Jalan Provinsi**										**248,855,822,088**	**1,194,848,556,695**	
1	03	10	1.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya penanggulangan bencana	3 paket			0	12,000,000,000	
1	03	10	1.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan Provinsi NTB	1 kegiatan			89,661,200	150,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jaringan jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	83,95 %	Terlaksananya pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan	1 kegiatan			0	2,000,000,000	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**										**0**	**986,714,260**	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**										**0**	**674,517,090**	
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya SOP Penyelenggaraan tenaga kerja kontruksi	2 Keg			0	172,499,885	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**										**455,228,200**	**674,517,090**	
1	03	11	1.01	03	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Tersedianya SOP Penyelenggaraan tenaga kerja kontruksi	2 Keg			120,078,400	172,499,885	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**										**0**	**674,517,090**	
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstuksi	2 Kegiatan			0	365,572,350	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**										**455,228,200**	**674,517,090**	
1	03	11	1.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Tenaga Ahli Konstuksi	2 Kegiatan			245,045,700	365,572,350	
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Terlaksananya Pembinaan dan Peningakatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2 Keg			90,104,100	136,444,855	
1	**03**	**11**	1.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi**										**0**	**674,517,090**	
1	03	11	1.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembinaan dan Peningakatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	2 Keg			0	136,444,855	
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**										**0**	**312,197,170**	
1	03	11	1.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	11	1.02	03	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Penyelenggaran Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	1 Kegiatan			0	0	
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen			0	312,197,170	
1	**03**	**11**	1.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi**										**124,784,800**	**312,197,170**	
1	03	11	1.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Daya serap jasa konstruksi bersertifikat	9 %	Tersedianya Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen			124,784,800	312,197,170	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**										**476,000,000**	**6,250,082,422**	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**										**117,176,700**	**1,302,123,150**	
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tersedianya persetujuan substansi RTR provinsi NTB	Dokumen			0	727,614,890	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi**										**0**	**1,302,123,150**	
1	03	12	1.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya persetujuan substansi RTR provinsi NTB	Dokumen			0	727,614,890	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**										**117,176,700**	**1,302,123,150**	
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tersedianya Perda RTR yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	1 Dokumen			0	238,956,430	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi**										**0**	**1,302,123,150**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	12	1.01	03	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Perda RTR yang di tetapkan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	1 Dokumen			0	238,956,430	
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercapainya pemahaman peserta sosialisasi	500 Orang			0	335,551,830	
1	**03**	**12**	1.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi**										**117,176,700**	**1,302,123,150**	
1	03	12	1.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tercapainya pemahaman peserta sosialisasi	500 Orang			117,176,700	335,551,830	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**										**67,033,000**	**2,818,704,257**	
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tersusunnya dokumen materi teknis, album peta, Ranperda RTR Provinsi NTB	1 KSP			0	1,856,490,632	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**										**0**	**2,818,704,257**	
1	03	12	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen materi teknis, album peta, Ranperda RTR Provinsi NTB	1 KSP			0	1,856,490,632	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen evaluasi ranperda RTR Kabupaten/kota	1 Dokumen			0	617,213,625	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**										**67,033,000**	**2,818,704,257**	
1	03	12	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tersedianya dokumen evaluasi ranperda RTR Kabupaten/kota	1 Dokumen			67,033,000	617,213,625	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	500 Orang			0	345,000,000	
1	**03**	**12**	1.02		**Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang**										**0**	**2,818,704,257**	
1	03	12	1.02	04	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi	500 Orang			0	345,000,000	
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**225,220,900**	**1,665,356,400**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaran Penataan Ruang	1 Dokumen			137,377,200	1,323,301,550	
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**0**	**1,665,356,400**	
1	03	12	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pelaksanaan Penyelenggaran Penataan Ruang	1 Dokumen			0	1,323,301,550	
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**225,220,900**	**1,665,356,400**	
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	1 Dokumen			87,843,700	342,054,850	
1	**03**	**12**	1.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**0**	**1,665,356,400**	
1	03	12	1.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan ruang (kawasan)	1 Dokumen			0	342,054,850	
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**66,569,400**	**463,898,615**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen			66,569,400	463,898,615	
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**0**	**463,898,615**	
1	03	12	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen			0	463,898,615	
1	**03**	**12**	1.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi**										**66,569,400**	**463,898,615**	
1	03	12	1.04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase RTR yang disusun	9.09 %	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	1 Dokumen			0	0	
														TOTAL	**392,111,756,338**	**3,001,178,522,214**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 Balai Pengujian Material Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**0**	**0**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**0**	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 Balai Pengujian Material Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	0	
1	03	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan	1 Tahun			0	0	
														TOTAL	**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**2,609,718,116**	**12,380,868,450**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**691,337,100**	**514,232,465**	
1	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja 2021	2 Dokumen			18,444,800	0	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			42,348,500	55,806,740	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	69,000,000	
1	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen			20,286,400	0	
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	55,806,740	
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	11,505,750	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	15,165,050	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	4,312,500	
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			0	5,765,525	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan			0	65,728,250	
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	5,865,000	
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	31,470,900	
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	252,804,500	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	8,268,500	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			7,814,000	5,765,525	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			5,558,700	15,165,050	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			5,100,000	5,865,000	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			4,800,000	4,312,500	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			62,624,600	31,470,900	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Bulan			1,900,000	30,000,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			99,000,000	69,000,000	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					17,425,800	24,268,000	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			120,722,200	11,505,750	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			209,160,000	252,804,500	
1	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			76,152,100	8,268,500	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										**0**	**11,866,635,985**	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				0	11,866,635,985	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				1,918,381,016	11,866,635,985	
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan				0	0	
														TOTAL	**2,609,718,116**	**24,773,197,150**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**4,785,718,116**	**12,153,262,010**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**367,808,850**	**850,788,885**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			55,385,000	63,278,750	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	69,805,000	
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	63,278,750	
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	140,308,050	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	17,935,630	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	10,355,865	
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			0	6,449,890	
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan			0	27,832,990	
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	4,715,000	
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	16,224,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	289,351,500	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	17,365,000	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			6,940,000	6,449,890	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			0	17,935,630	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			4,100,000	4,715,000	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			9,005,100	10,355,865	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			15,000,000	16,224,200	
1	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Ampenan, Ampenan Selatan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	15,000,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			60,700,000	69,805,000	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			92,308,750	140,308,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			109,270,000	289,351,500	
1	03	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			15,100,000	17,365,000	
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya Timur, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 paket			0	200,000,000	
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**										**4,417,909,266**	**11,302,473,125**	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				4,417,909,266	11,302,473,125	
1	03	10	1.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan				0	11,302,473,125	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	10	1.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan				0	0	
TOTAL															**4,785,718,116**	**24,119,357,010**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**25,549,488,940**	**4,591,864,785**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,713,846,440**	**483,242,535**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			73,350,000	228,528,000	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	65,550,000	
1	03	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			0	17,779,000	
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	228,528,000	
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	138,000,000	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	50,678,200	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	37,893,190	
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			0	10,295,145	
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan			0	17,118,095	
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	4,337,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	28,175,000	
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	156,676,000	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	40,006,200	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	12 Bulan			8,945,000	10,295,145	
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			59,135,300	50,678,200	
1	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			3,772,000	4,337,800	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			32,945,600	37,893,190	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			12,000,000	28,175,000	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			69,358,500	65,550,000	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			25,010,000	17,779,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,352,000,000	0	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					38,100,000	0	
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			39,230,040	40,006,200	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**										**22,835,642,500**	**4,108,622,250**	
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	M2			4,103,600,000	4,108,622,250	
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	M2			0	4,108,622,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharan Tanggul dan Tebing Sungai	Meter			0	6,810,496,075	
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							678,170,500	0	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Jaringan Irigasi Permukaan	Ha			0	2,711,070,397	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							17,858,352,000	0	
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							195,520,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigasi	Ha			0	8,408,896,839	
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Ha			0	1,695,118,157	
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	DI			0	292,698,000	
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
														TOTAL	**25,549,488,940**	**29,413,803,133**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**73,805,209,100**	**24,459,310,785**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**252,954,200**	**498,812,960**	
1	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			9,300,000	113,160,000	
1	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			0	43,665,500	
1	03	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			0	11,495,860	
1	03	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	12 Bulan			0	113,160,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	2,294,250	
1	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan			0	14,375,115	
1	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	2,529,885	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			0	11,473,550	
1	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan			0	55,029,225	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			0	7,937,300	
1	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			0	42,435,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			0	222,134,000	
1	03	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			0	27,312,500	
1	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			10,520,000	11,473,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	12 Bulan 12 Bulan			43,647,800	14,375,115	
1	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			9,100,000	2,529,885	
1	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	12 Bulan			8,120,000	7,937,300	
1	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			20,000,000	42,435,000	
1	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
1	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	12 Bulan			21,750,000	43,665,500	
1	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			9,996,400	11,495,860	
1	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan			5,720,000	2,294,250	
1	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan			91,050,000	222,134,000	
1	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			23,750,000	27,312,500	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**										**73,552,254,900**	**23,960,497,825**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharan Tanggul dan Tebing Sungai	0 Meter			41,155,493,600	0	
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	M2			0	30,021,126,165	
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Meter			158,000,000	3,406,990,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharan Tanggul dan Tebing Sungai	Meter			0	3,406,990,000	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Jaringan Irigasi Permukaan	Ha			0	8,602,000,000	
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2,575,000,000	0	
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigas	Ha			12,685,700,000	19,353,005,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Rehabilitasi Bendung Irigas	Ha			0	19,353,005,000	
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							16,141,058,000	0	
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Ha			0	11,381,701,001	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	DI			0	1,200,502,825	
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah					Terlaksananya Operasional Unit Pengelola Irigasi	DI			837,003,300	1,200,502,825	
TOTAL															**73,805,209,100**	**98,978,477,961**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**275,655,858,293**	**115,713,142,360**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**8,371,322,447**	**10,429,343,590**	
1	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**330,575,900**	**186,271,970**	
1	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			75,664,800	33,135,985	
1	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**33,135,985**	
1	04	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			0	33,135,985	
1	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**330,575,900**	**186,271,970**	
1	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			75,925,600	33,135,985	
1	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			78,450,100	40,000,000	
1	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			32,346,100	40,000,000	
1	04	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			33,011,500	40,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			35,177,800	0	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,835,631,367**	**218,756,655**	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	1 Tahun			5,658,821,667	0	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,242,775,921**	
1	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	93 Orang			0	6,215,561,401	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,835,631,367**	**218,756,655**	
1	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	10 Orang			83,817,000	165,931,085	
1	04	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	1 Tahun			0	35,000,000	
1	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			61,747,600	14,825,570	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,242,775,921**	
1	04	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	12,388,950	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,835,631,367**	**218,756,655**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Dokumen			31,245,100	3,000,000	
1	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,242,775,921**	
1	04	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	14,825,570	
1	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,751,209,975**	
1	04	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	2 Jenis			0	2,452,375	
1	04	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Rekening	4 Jenis			0	263,673,725	
1	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**28,023,100**	**6,423,900**	
1	04	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			28,023,100	6,423,900	
1	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,751,209,975**	
1	04	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	6,423,900	
1	04	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	10 Orang			0	165,931,085	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	14 Orang			0	785,560,975	
1	04	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	34 Jenis			0	24,073,870	
1	04	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	3 Jenis			0	67,873,805	
1	04	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	11 Jenis			0	8,693,080	
1	04	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	8 Unit			0	38,069,715	
1	04	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Eksemplar	96 Eksemplar			0	22,149,000	
1	04	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	2 Jenis			0	44,877,600	
1	04	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tahun	29 OT			0	107,619,760	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	9 Jenis			0	209,731,135	
1	04	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	26 Unit			0	114,963,200	
1	04	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	1 Unit			0	52,315,800	
1	04	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	13 Unit			0	328,175,500	
1	04	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	38 Unit			0	29,785,000	
1	04	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	1 Unit			0	478,840,450	
1	**04**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**27,140,000**	
1	04	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	2 Jenis			0	27,140,000	
1	**04**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**101,453,400**	**27,140,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			16,453,400	0	
1	04	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	2 Jenis			85,000,000	27,140,000	
1	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**669,901,500**	**221,409,155**	
1	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	11 Jenis			14,922,000	8,693,080	
1	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jumlah Unit	34 Jenis 8 Unit			71,792,100	38,069,715	
1	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	1 Tahun			23,622,400	0	
1	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksemplar	96 Eksemplar			19,260,000	22,149,000	
1	04	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	2 Jenis			117,850,000	44,877,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tahun	29 OT			422,455,000	107,619,760	
1	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**16,000,000**	**324,694,335**	
1	04	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	26 Unit			16,000,000	114,963,200	
1	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	9 Jenis			0	209,731,135	
1	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,115,622,180**	**1,051,687,075**	
1	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	2 Jenis			2,980,000	2,452,375	
1	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Rekening	4 Jenis			266,844,780	263,673,725	
1	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	14 Orang			845,797,400	785,560,975	
1	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**274,115,000**	**8,392,960,500**	
1	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	13 Unit			192,910,000	328,175,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	1 Tahun			28,330,000	35,000,000	
1	04	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Jumlah Unit	1 Unit 38 Unit			0	29,785,000	
1	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	1 Unit			52,875,000	4,000,000,000	
1	04	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Paket	1 Tahun			0	2,000,000,000	
1	04	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Paket	1 Tahun			0	2,000,000,000	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**										**2,418,411,300**	**87,833,798,770**	
1	**04**	**02**	1.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**										**475,296,200**	**278,500,000**	
1	04	02	1.01	02	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	04	02	1.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			85,835,700	82,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	02	1.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			148,643,900	46,000,000	
1	04	02	1.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			240,816,600	150,000,000	
1	04	02	1.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	**04**	**02**	1.02		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**										**394,006,200**	**210,000,000**	
1	04	02	1.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			169,146,500	50,000,000	
1	04	02	1.02	02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	30,000,000	
1	04	02	1.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			224,859,700	30,000,000	
1	04	02	1.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Orang	1 Tahun			0	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	02	1.02	05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Orang	1 Tahun			0	0	
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**										**0**	**81,995,298,770**	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit	20 Unit			0	81,995,298,770	
1	**04**	**02**	1.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi**										**1,549,108,900**	**87,345,298,770**	
1	04	02	1.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah			Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Unit	20 Unit			1,549,108,900	81,995,298,770	
1	04	02	1.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Hektar	1 Hektar			0	3,000,000,000	
1	04	02	1.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Unit	1 Tahun			0	350,000,000	
1	04	02	1.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Unit	1 Tahun			0	1,000,000,000	
1	04	02	1.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase sarana dan infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana gempa bumi	100 %	Jumlah Unit	1 Tahun			0	1,000,000,000	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**										**7,083,473,600**	**16,400,000,000**	
1	**04**	**03**	1.01		**Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**										**0**	**700,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	04	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	500,000,000	
1	04	03	1.01	09	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Dokumen	1 d			0	200,000,000	
1	**04**	**03**	1.02		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha**										**7,083,473,600**	**15,700,000,000**	
1	04	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	500,000,000	
1	04	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	200,000,000	
1	04	03	1.02	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Unit	1 Tahun			7,083,473,600	10,000,000,000	
1	04	03	1.02	04	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	0	Jumlah Unit	1 Tahun			0	5,000,000,000	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**										**0**	**112,534,556,970**	
1	**04**	**04**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**										**0**	**112,534,556,970**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	04	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket	600 Paket			0	112,534,556,970	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**										**257,782,650,946**	**850,000,000**	
1	**04**	**05**	1.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**										**257,782,650,946**	**850,000,000**	
1	04	05	1.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Tahun			0	250,000,000	
1	04	05	1.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket	1600 Paket			515,565,301,892	0	
1	04	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	200,000,000	
1	04	05	1.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	200,000,000	
1	04	05	1.01	05	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	200,000,000	
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**0**	**200,000,000**	
1	**04**	**06**	1.01		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah**										**0**	**200,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	06	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	200,000,000	
TOTAL															**275,655,858,293**	**319,297,259,981**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**												
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										**16,452,149,327**	**16,699,751,367**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**6,794,036,327**	**6,801,841,367**	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**252,071,560**	**250,971,560**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Renja	1 Dokumen			21,370,360	21,370,360	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**790,677,785**	
8	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	4,065,089	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**252,071,560**	**250,971,560**	
8	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen			21,397,600	21,122,600	
8	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKAP	1 Dok			21,397,600	21,122,600	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**790,677,785**	
8	01	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**252,071,560**	**250,971,560**	
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA	1 Dok			3,827,600	3,552,600	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**790,677,785**	
8	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	786,612,696	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**252,071,560**	**250,971,560**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPPA	1 Dok			3,827,600	3,552,600	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**790,677,785**	
8	01	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**252,071,560**	**250,971,560**	
8	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan SKPD	4 Dok.			82,015,200	82,015,200	
8	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Program	2 Kegiatan			98,235,600	98,235,600	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,145,172,167**	**5,145,171,907**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			5,055,259,567	5,055,259,307	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,245,799,888**	
8	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	5,227,772,350	
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	1,711,775	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,145,172,167**	**5,145,171,907**	
8	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Administrasi Kantor	1 Tahun			43,605,000	43,605,000	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,245,799,888**	
8	01	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,145,172,167**	**5,145,171,907**	
8	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Administrasi Keuangan	1 Tahun			2,900,000	2,900,000	
8	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan	1 Dokumen			23,082,600	23,082,600	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,245,799,888**	
8	01	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	1,208,650	
8	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	12,035,256	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,145,172,167**	**5,145,171,907**	
8	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen			20,325,000	20,325,000	
8	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,245,799,888**	
8	01	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	3,071,857	
8	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,652,754,660**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	8,832,000	
8	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	122,130,000	
8	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	43,194,000	
8	01	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	24,840,000	
8	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**1,175,000**	**525,000**	
8	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Rekonsiliasi Aset	1 Tahun			1,175,000	525,000	
8	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,652,754,660**	
8	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	117,300,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	552,000,000	
8	01	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	73,842,857	
8	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	14,411,708	
8	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	12,621,250	
8	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	36,729,275	
8	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	228,672,210	
8	01	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	250,608,000	
8	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	364,952,500	
8	01	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	830,166,600	
8	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	370,518,500	
8	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	152,665,260	
8	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan jabatan	12 bulan			0	44,965,000	
8	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan dinas operasional	12 bulan			0	361,813,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	42,492,500	
8	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
8	01	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Gedung Kantor	12 Bulan			0	0	
8	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**422,467,600**	**371,022,900**	
8	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun			14,970,000	14,970,000	
8	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Kebersihan dan Alat Rumah Tangga	1 Tahun			15,299,900	15,299,900	
8	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Tulis Kantor	1 Tahun			31,033,700	31,009,000	
8	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Fotocopy dan Cetak	1 Tahun			10,609,000	10,609,000	
8	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Bacaan (Koran)	6 Bulan			36,480,000	36,480,000	
8	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan dan Minum	1 Tahun			37,900,000	36,480,000	
8	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi, Mpnitoring dan Evaluasi	1 Tahun			276,175,000	226,175,000	
8	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**200,000,000**	**200,000,000**	
8	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Sepeda Listrik	10 Unit			400,000,000	400,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**617,380,000**	**678,380,000**	
8	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Materai	1 Tahun			9,380,000	9,380,000	
8	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Rekening Listri, Air, Internet	1 Tahun			90,600,000	90,600,000	
8	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			26,400,000	26,400,000	
8	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Honorarium Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan	1 Tahun			491,000,000	552,000,000	
8	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**155,770,000**	**155,770,000**	
8	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12 bulan			39,100,000	39,100,000	
8	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	1 Tahun			116,670,000	116,670,000	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**										**0**	**6,654,238,813**	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**0**	**6,654,238,813**	
8	01	02	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota FPK Jumlah Anggota Tim GNRM Jumlah Anggota Tim PPWK				0	4,011,640,013	
8	01	02	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi terkait dengan bidang Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang tersusun				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Lokakarya Jumlah Peserta Rakor PPWK Jumlah Peserta Rapat Forum Pembauran Kemitraan Jumlah Peserta Rapat Pengurus FPK Jumlah peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Jumlah peserta Sosialisasi Wawasan Kebangsaan				0	2,142,233,800	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**457,500,000**	**450,000,000**	
8	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Honorarium Pegawai Non PNS	12 Bulan			30,000,000	30,000,000	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**0**	**6,654,238,813**	
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0	500,365,000	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**457,500,000**	**450,000,000**	
8	01	02	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Konsolidasi GNRM dan Kader Bela Negara Rakor Forum Kemitraan Pembauran	5 kegiatan 1 kali			268,000,000	268,000,000	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**0**	**6,654,238,813**	
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Pimpinan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan				0	0	
8	**01**	**02**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**457,500,000**	**450,000,000**	
8	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada daerah rawan konflik	10 %	Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Tahun			159,500,000	152,000,000	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**										**0**	**2,206,354,442**	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**0**	**2,206,354,442**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	03	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah program/ kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun				0	914,495,042	
8	01	03	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelembagaan pemerintah yang difasilitasi Jumlah Usulan proposal/ hibah yang terverifikasi				0	0	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**4,153,634,000**	**4,152,459,000**	
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Bantuan Keuangan Parpol Belanja Hibah Uang	12 Parpol 3 Lembaga			3,700,000,000	3,700,000,000	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**0**	**2,206,354,442**	
8	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Bimtek Keuangan Parpol Jumlah peserta Forum Komunikasi Pencapaian IDI Jumlah peserta Forum Peningkatan Kualitas Demokrasi Jumlah peserta Rakortek Pokja IDI Jumlah peserta seminar Pendidikan Pengembangan Politik Jumlah peserta seminar Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Jumlah peserta Sosialisasi Pendidikan Politik Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Parpol			0	791,494,400	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**4,153,634,000**	**4,152,459,000**	
8	01	03	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Jumlah Peserta Bimtek Bantuan Keuangan Parpol Rakor Bersama Kesbangpol Kab./kota se NTB Verifikasi Administrasi Berkas Bantuan Keuangan Parpol	40 orang 1 kali 12 Parpol			252,459,000	252,459,000	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**0**	**2,206,354,442**	
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0	500,365,000	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**4,153,634,000**	**4,152,459,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	03	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam politik	80 %	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Tahun			201,175,000	200,000,000	
8	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**0**	**2,206,354,442**	
8	01	03	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan				0	0	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**										**0**	**672,011,792**	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**0**	**672,011,792**	
8	01	04	1.01	01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah program/ kegiatan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0	256,838,792	
8	01	04	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan perumusan kebijakan yang dilaksanakan				0	0	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**382,819,000**	**363,164,000**	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Hibah Uang	1 Lembaga			200,000,000	200,000,000	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**0**	**672,011,792**	
8	01	04	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksanan pemberdayaan dan pengawasan Ormas	10 Kab/Kota			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah				0	415,173,000	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**382,819,000**	**363,164,000**	
8	01	04	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Pengawasan Ormas	1 tahun			137,544,000	117,889,000	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**0**	**672,011,792**	
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan				0	0	
8	**01**	**04**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**										**382,819,000**	**363,164,000**	
8	01	04	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Ormas yang aktif	79.66 %	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah	1 Tahun			45,275,000	45,275,000	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**										**0**	**1,994,776,085**	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**0**	**1,994,776,085**	
8	01	05	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah program/ kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0	0	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**736,265,000**	**755,920,000**	
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Rapat Timdu P4GN	5 kali			125,542,000	84,105,000	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**0**	**1,994,776,085**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	05	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Perda terkait dengan Narkoba				0	75,181,250	
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bimbingan Teknis dan Monev erpetakan masalah bidang Ekososbud Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai budaya Meningkatnya toleransi dan kerukunan beragama Tersosialisasinya peraturan perundang-undanga bidang Ekososbud	10 Desa 10 Kab/Kota 2 Kab 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota			0	0	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**736,265,000**	**755,920,000**	
8	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Hibah Uang	2 Lembaha			40,000,000	40,000,000	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**0**	**1,994,776,085**	
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0	1,419,229,835	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**736,265,000**	**755,920,000**	
8	01	05	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	Desa Bersinar	10 Desa			394,463,000	411,055,000	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**0**	**1,994,776,085**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0	500,365,000	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**736,265,000**	**755,920,000**	
8	01	05	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Persentase Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba)	51.72 %	monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Tahun			176,260,000	220,760,000	
8	**01**	**05**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**										**0**	**1,994,776,085**	
8	01	05	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan Oleh Pimpinan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan				0	0	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**										**0**	**3,426,026,364**	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**0**	**3,426,026,364**	
8	01	06	1.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah program/ kegiatan di bidang Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0	0	
8	01	06	1.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			ersusunnya Bahan perumusan Tersusunnya Bahan perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0	0	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**3,927,895,000**	**4,176,367,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Belanja Hibah Uang Honor Forkopimda Honor Jejaring	6 lembaga 12 Bulan 6 bulan			3,553,700,000	3,803,700,000	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**0**	**3,426,026,364**	
8	01	06	1.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Tim Forkopimda Jumlah anggota Tim PKS Jumlah Tim FKDM Jumlah Tim Jejaring Jumlah Tim PORA				0	0	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**3,927,895,000**	**4,176,367,000**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Jumlah peserta Rakorda FKDM Jumlah Peserta Rakorda Timdu PKS Mediasi Konflik Peserta Bimtek Dasar Intelijen Rapat Forkopimda	50 orang 120 orang 20 kali 30 orang 6 kali			273,920,000	272,392,000	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**0**	**3,426,026,364**	
8	01	06	1.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Diklat Dasar Intelejen Jumlah peserta Rakorda FKDM Jumlah Peserta Rakorda Timdu PKS Jumlah peserta rakor FKDM Jumlah peserta Rakor Timdu PKS Jumlah Peserta Rapat tim PORA				0	2,925,661,364	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kab/Kota			0	500,365,000	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**3,927,895,000**	**4,176,367,000**	
8	01	06	1.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Cakupan mediasi potensi konflik sosial pada daerah rawan konflik	10 %	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Kab/Kota			100,275,000	100,275,000	
8	**01**	**06**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**0**	**3,426,026,364**	
8	01	06	1.01	06	Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Pimpinan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah direktif pimpinan yang dilaksanakan				0	0	
														TOTAL	**16,452,149,327**	**41,342,391,196**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**0**	**18,740,937,187**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**14,855,682,451**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,888,865,605**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 dok			0	285,377,618	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**268,959,500**	**305,235,073**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	31,833,500	37,582,963	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	23,197,000	28,068,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	23,197,000	28,068,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,888,865,605**	
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	30 lap			0	1,585,229,000	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**268,959,500**	**305,235,073**	
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	3,997,000	4,836,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	3,997,000	4,836,370	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,888,865,605**	
1	05	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 laporan			0	18,258,987	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**268,959,500**	**305,235,073**	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	24,020,200	29,064,442	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	11 Dokumen	158,717,800	172,778,188	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**14,302,047,758**	**15,059,819,885**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	150 Orang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	14,162,284,958	14,800,816,168	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,856,241,749**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	150 orang			0	9,849,239,399	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**14,302,047,758**	**15,059,819,885**	
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang 8 Orang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	47,270,200	246,216,817	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	16,789,000	12,786,900	
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	75,703,600	0	
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	15 Dokumen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,856,241,749**	
1	05	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 laporan			0	7,002,350	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,767,962,497**	
1	05	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	600 lembar			0	5,746,320	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,125,700**	**16,932,069**	
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	3,421,572	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,767,962,497**	
1	05	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	5 rekening			0	87,664,500	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,125,700**	**16,932,069**	
1	05	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	0	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,767,962,497**	
1	05	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan BMD	2 laporan			0	3,421,572	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,125,700**	**16,932,069**	
1	05	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	12,125,700	13,510,497	
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen	0	0	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,767,962,497**	
1	05	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang 8 orang			0	229,418,008	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	5 orang			0	244,968,262	
1	05	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	30 jenis			0	40,026,877	
1	05	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis cetak dan penggandaan	7 jenis			0	34,961,944	
1	05	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	6 jenis			0	9,273,082	
1	05	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41 unit/buah			0	0	
1	05	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	5475 exemplar			0	18,291,900	
1	05	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	500 kotak			0	34,079,100	
1	05	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	30 kali			0	340,334,450	
1	05	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	8 Unit			0	928,978,050	
1	05	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	68 buah/set/unit			0	44,258,682	
1	05	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung			0	0	
1	05	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	35 Unit			0	746,539,750	
1	05	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 gedung			0	0	
1	**05**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**342,612,600**	
1	05	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	150 Stel			0	342,612,600	
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**170,010,000**	**275,000,000**	
1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600 Stel	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	200 Orang	124,470,000	175,000,000	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan/diklat	30 Orang	Jumlah Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi	200 Orang	45,540,000	100,000,000	
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**615,592,110**	**671,311,256**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	23,023,400	28,168,074	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengapan Kantor yang tersedia	34 Unit/Buah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	87,542,100	72,904,315	
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	11 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	33,851,100	40,959,831	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	30 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	28,933,510	34,468,665	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia	9 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	21,656,000	26,202,671	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia	5475 Exemplar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	16,920,000	20,473,200	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1110 Kotak	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	28,666,000	35,634,500	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	5 Jenis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia	8 Jenis	375,000,000	412,500,000	
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**973,236,732**	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Jabatan yang tersedia	1 Unit			0	0	
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	2 Unit			0	928,978,050	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang tersedia	54 buah/Set/Unit			0	44,258,682	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	2 Buah			0	0	
1	05	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33 Buah/Unit			0	0	
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**184,414,100**	**397,839,515**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat yang tersedia	600 Surat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	4,539,500	5,492,795	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 Rekening	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	24,720,000	161,346,720	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia	5 Orang	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia	9 Jasa	155,154,600	231,000,000	
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**539,280,000**	**1,102,831,800**	
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	20 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	168,340,000	189,861,100	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	16 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	272,860,000	237,970,700	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara	66 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	54,510,000	75,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang dirhabilitasi dan/atau dipelihara	1 Gedung	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara	103 Unit	43,570,000	600,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**2,898,175,000**	**3,382,794,254**	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini/Konflik di Masyarakat Jumlah Kegiatan pencegahan pelanggaran melalui patroli tibumtran Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota Jumlah Sekolah yang diberikan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	10 Kegiatan 12 Kali 10 Kabupaten/Kota 10 Sekolah	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	600,914,700	800,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,576,872,629**	
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan TURJAWALI Jumlah operasi penertiban	12 kali 6 kali			0	347,429,375	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Kegiatan Operasi Trantibum	17 Kasus	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	286,300,000	314,930,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,576,872,629**	
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Operasi Pekat	6 kali			0	256,675,975	
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawalan Pejabat Dan Tamu Serta Kegiatan Pemda Di Kab/Kota	10 kab/kota			0	169,435,250	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Rakor Tibum dan Rakor Linmas yang dilaksanakan	2 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	71,914,300	76,999,538	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,576,872,629**	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan Kota Bima, RasanaE Barat, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Tanjung, Semua Kelurahan			Jumlah satlinmas yang mengikuti Gelar Pasukan Jumlah Tenaga Satlinmas Yang Terlatih	500 oramg 50 orang			0	366,710,034	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti Pelatihan Jumlah Personil Satpol PP Yang Dibina	50 Orang 675 Orang	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	169,680,100	186,643,655	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %			Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	257,232,400	282,957,290	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,576,872,629**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Semua Kelurahan			Jumlah Personiul Satpol PP yang mengikuti Gelar Pasukan Jumlah Petugas Khusus Wisata Halal	600 orang 50 orang			0	376,516,831	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	
1	05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Dokumen Perjanjian Kerjasama	1 Perjanjian Kerjasama	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	49,927,100	51,552,180	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %			Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,576,872,629**	
1	05	02	1.01	07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah MoU	1 MoU			0	60,105,164	
1	**05**	**02**	1.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,487,974,100**	**1,863,082,663**	
1	05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %			Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.56 %	Jumlah Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	12 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Trantibum	17 Kasus	52,005,500	150,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**										**0**	**2,250,199,249**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan NTB Jumlah Masyarakat yang Mendapat Pembekalan Kewaspadaan Dini Jumlah penyuluhan bahaya narkoba dan jumlah penyuluhan perda/pergub	10 Kab/Kota 2 kali 19 kali			0	1,551,548,524	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**										**1,240,174,400**	**1,195,721,394**	
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Kab/Kota Tempat Gelar Pasukan dan Serah Terima Lambang Daerah NTB Jumlah sosialisasi perda/pergub kepada masyarakat	10 Kabupaten/Kota 10 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus	350,201,600	385,221,760	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	12 Kali 12 Kali	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus	689,972,900	535,499,843	
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**										**0**	**2,250,199,249**	
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pengawasan Aparatur Jumlah Kegiatan Pengawasan Perda/Pergub	12 kali 6 kali			0	123,650,932	
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**										**1,240,174,400**	**1,195,721,394**	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah		Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	16 Kasus	Jumlah Penanganan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	16 Kasus	199,999,900	274,999,791	
1	**05**	**02**	1.02		**Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur**										**0**	**2,250,199,249**	
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda/Pergub	9 Keg			0	574,999,793	
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**										**0**	**58,182,858**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik			Jumlah PPNS yg terlatih				0	58,182,858	
1	**05**	**02**	1.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi**										**170,026,500**	**323,990,197**	
1	05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Anggota Pol PP yang menjadi PPNS Jumlah PPNS yang mengikuti Rakor	3 Orang 40 Orang	Jumlah PPNS Yang Dibina	43 Orang	120,026,700	126,202,871	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
1	05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase Penurunan Pelanggaran Produk Hukum Daerah	5.26 %	Jumlah Berkas Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Layanan Penguatan Sekber PPNS Jumlah Pelaksanaan Sidang di Tempat	1 Berkas 4 Jenis 1 Kali	Jumlah PPNS Yang Dibina	43 Orang	49,999,800	197,787,326	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
										TOTAL	18,990,604,168	40,925,937,771	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**0**	**15,557,225,546**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**11,504,269,490**	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**532,908,620**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen yang tersedia	2 Dokumen			0	8,574,515	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**123,172,290**	**532,908,620**	
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen	12,296,900	8,574,515	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen	33,994,120	31,543,005	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**532,908,620**	
1	05	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen yang disusun	6 Dokumen			0	31,543,005	
1	05	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen yang disusun	6 Dokumen			0	7,203,370	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**123,172,290**	**532,908,620**	
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen	33,839,790	451,329,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**532,908,620**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah	1 Kegiatan			0	451,329,000	
1	05	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	4 Laporan			0	34,258,730	
1	**05**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**123,172,290**	**532,908,620**	
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen	25,816,910	7,203,370	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan yang dibutuhkan	100 persen	17,224,570	34,258,730	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			0	4,520,960,500	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,107,662,532**	**4,593,040,350**	
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen	4,067,474,632	4,520,960,500	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya administrasi tugas ASN	1 Tahun			0	0	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,107,662,532**	**4,593,040,350**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen	22,697,900	46,242,650	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen verifikasi	10 Dokumen			0	0	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,107,662,532**	**4,593,040,350**	
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen	975,000	515,200	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen yang disusun	6 Dokumen			0	515,200	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,107,662,532**	**4,593,040,350**	
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen	0	25,000,000	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Bahan tanggapan yang dikelola	1 Tahun			0	0	
1	05	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan yang tersusun	2 Laporan			0	4,771,235	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,107,662,532**	**4,593,040,350**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi keuangan selama satu tahun	100 persen	16,515,000	322,000	
1	**05**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,526,568,935**	
1	05	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan yang tersusun	1 Laporan			0	322,000	
1	05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan yang tersusun	1 Laporan			0	0	
1	05	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan yang tersusun	1 Laporan			0	0	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,285,401,935**	
1	05	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat masuk keluar	2 Jenis			0	12,989,250	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,116,200**	**254,703,610**	
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Barang Milik Daerah pada BPBD yang terinventarisir	100 Persen	19,116,200	254,703,610	
1	**05**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,285,401,935**	
1	05	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	5 Jenis			0	261,165,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 Jenis			0	890,700,645	
1	05	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan jenis pemeliharaan kesehatan PNS	1 Jenis			0	0	
1	05	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya laporan jaminan barang milik daerah	1 Laporan			0	254,703,610	
1	05	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	47 Unit			0	0	
1	05	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan	10 Orang			0	46,242,650	
1	05	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga kebersihan kantor	10 Orang			0	391,869,860	
1	05	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perbaikan peralatan kerja	1 Tahun			0	0	
1	05	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan jenis ATK yang disediakan	50 Jenis			0	118,666,890	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Jenis			0	47,181,740	
1	05	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan	10 Jenis			0	38,286,950	
1	05	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan rumah tangga	10 Jenis			0	30,689,935	
1	05	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bacaan/koran	12 Eksemplar			0	0	
1	05	01	1.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya logistik kantor	25 Jenis			0	0	
1	05	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tamu makan dan minum	1500 Orang			0	180,550,000	
1	05	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan hasil rakor dan konsultasi keluar daerah	10 Laporan			0	766,705,000	
1	05	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan mobil jabatan	1 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2&R4	10 Unit			0	1,895,106,850	
1	05	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 Unit			0	0	
1	05	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	6 Unit			0	0	
1	05	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan mebeleur	10 Unit			0	236,699,555	
1	05	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya mobil jabatan	6 Unit			0	0	
1	05	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	47 Unit			0	928,924,000	
1	05	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	6 Jenis			0	0	
1	05	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya mebeleur	10 Jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terehabilitasinya gedung kantor	1 Tahun			0	184,920,000	
1	05	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terehabilitasinya mobil jabatan	6 Unit			0	0	
1	05	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terehabilitasinya kendaraan dinas/operasional	47 Unit			0	0	
1	**05**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**159,390,000**	
1	05	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan mesin/kartu absensi	2 Unit			0	0	
1	05	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 Tahun			0	0	
1	05	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan	1 Tahun			0	0	
1	05	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan pakaian korpri	1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari tertentu	1 Tahun			0	0	
1	05	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pegawai yang mendapatkan diklat formal	10 Orang			0	159,390,000	
1	05	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah aparatur yang terlatih perundang-undangan	2 Orang			0	0	
1	05	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah aparatur yang terlatih perundang-undangan	2 Orang			0	0	
1	**05**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**0**	**159,390,000**	
1	05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase kebutuhan peningkatan SDM yang terpenuhi	100 persen	0	159,390,000	
1	**05**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**411,902,000**	**1,437,080,515**	
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	4,866,000	38,286,950	
1	05	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	70,542,000	118,666,890	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	234,500	30,689,935	
1	05	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	0	180,550,000	
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	12,254,500	47,181,740	
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	7,200,000	0	
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	0	180,000,000	
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	316,805,000	766,705,000	
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan barang dan fasilitas administrasi umum perangkat daerah	100 persen	0	75,000,000	
1	**05**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**211,758,000**	**2,231,806,405**	
1	05	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	0	1,895,106,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang diadakan	10 Unit	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	200,000,000	0	
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	0	236,699,555	
1	05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 persen	11,758,000	100,000,000	
1	**05**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**859,385,000**	**1,556,724,755**	
1	05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen	11,295,000	12,989,250	
1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen	243,000,000	261,165,000	
1	05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen	44,390,000	890,700,645	
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibutuhkan	100 persen	560,700,000	391,869,860	
1	**05**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**699,340,000**	**1,663,844,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	156,290,000	928,924,000	
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	543,050,000	400,000,000	
1	05	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	0	50,000,000	
1	05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	0	184,920,000	
1	05	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	100 persen	0	100,000,000	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**										**0**	**4,052,956,056**	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**										**0**	**288,610,095**	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang disusun	3 Dokumen			0	119,556,760	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**										**0**	**288,610,095**	
1	05	03	1.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase informasi potensi bencana tingkat provinsi yang tersampaikan ke masyarakat	0 persen	0	119,556,760	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**										**0**	**288,610,095**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi, mendapat informasi dan edukasi rawan bencana provinsi	500 Orang			0	169,053,335	
1	**05**	**03**	1.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi**										**0**	**288,610,095**	
1	05	03	1.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase informasi potensi bencana tingkat provinsi yang tersampaikan ke masyarakat	0 persen	0	169,053,335	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	218,124,657	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	
1	05	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang disusu	3 Dokumen			0	218,124,657	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	322,615,422	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	
1	05	03	1.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah peserta pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang			0	322,615,422	
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengendalian Operasi yang ditingkatkan	20 Unit			0	658,766,920	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	
1	05	03	1.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	658,766,920	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	655,385	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	
1	05	03	1.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang Diadakan	10 Jenis			0	655,385	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	220,131,390	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	
1	05	03	1.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jenis bencana yang tertangani	3 Jenis			0	220,131,390	
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah lokasi yang tertangani	4 Lokasi			0	258,984,657	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	622,252,800	3,250,000,000	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Lokasi Bencana yang Teridentifikasi	10 Kab/Kota se NTB			0	475,102,375	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.02	07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	247,721,400	475,102,375	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**0**	**2,154,380,806**	
1	05	03	1.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah TRC yang dilatih	500 Orang			0	0	
1	**05**	**03**	1.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**										**1,109,854,000**	**6,395,396,649**	
1	05	03	1.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	239,879,800	500	
1	05	03	1.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	1,250,000,000	
1	05	03	1.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan kapasitas melalui Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65 Indeks			Persentase cakupan desa tangguh bencana yang terbentuk di provinsi NTB	8 Persen	0	0	
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**0**	**1,609,965,155**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Korban Wabah Penyakit yang Tertangani	500 Orang			0	0	
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**2,934,413,490**	**1,984,965,155**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen	74,527,000	1,094,851,750	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**0**	**1,609,965,155**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.03	02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Daerah yang memiliki Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (lokasi) Jumlah Pengungsi Korban Bencana yang Tertangani	10 Lokasi 1000 Orang			0	1,094,851,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Korban Bencana yang Tertolong dan Terevakuasi	1000 Orang			0	153,679,560	
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**2,934,413,490**	**1,984,965,155**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	05	03	1.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen	1,173,012,100	153,679,560	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana		Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen	1,686,874,390	361,433,845	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**0**	**1,609,965,155**	
1	05	03	1.03	04	Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Logistik yang disediakan	25 Jenis			0	361,433,845	
1	**05**	**03**	1.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**2,934,413,490**	**1,984,965,155**	
1	05	03	1.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen	0	75,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	05	03	1.03	06	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase kejadian darurat bencana yang ditanggulangi	50 persen	0	300,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**										**0**	**0**	
1	05	03	1.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Regulasi yang disusun	2 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	03	1.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Dokumen Kebencanaan yang disusun Jumlah SOP yang disusun	10 Dokumen 2 SOP			0	0	
1	05	03	1.04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penanggulangan Bencana	25 %	Jumlah Rakor yang terlaksana	2 Kegiatan			0	0	
1	**05**	**03**	1.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**										**45,051,640**	**1,500,000,000**	
1	05	03	1.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	20 Persen	45,051,640	500,000,000	
1	05	03	1.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi		Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulanan Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas melalui peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,6 Indeks			Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang dapat dikelola	20 Persen	0	1,000,000,000	
														TOTAL	**10,521,655,152**	**38,155,695,700**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**0**	**32,900,625,655**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**27,088,801,655**	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**328,612,500**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen tersusun	2 Dok			0	0	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**142,509,000**	**0**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	50,144,000	0	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**328,612,500**	
1	06	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen tersusun	2 Dok			0	0	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**142,509,000**	**0**	
1	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	31,660,000	0	
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	31,660,000	0	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**328,612,500**	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	20 Laporan			0	328,612,500	
1	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**142,509,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan	3 Dokumen	29,045,000	0	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**23,514,370,850**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	300 Orang			0	23,514,370,850	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**23,697,974,102**	**24,299,866,850**	
1	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	300 Orang			23,589,034,102	23,514,370,850	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	15 Orang			97,300,000	785,496,000	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			11,640,000	0	
1	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**23,514,370,850**	
1	06	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen tersusun	2 Dok			0	0	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen tersusun	1 Dok			0	0	
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,245,818,305**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	500 Surat			0	12,908,750	
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**1,794,000**	
1	06	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,245,818,305**	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kebutuhan dasar listrik, sumber daya air, telpon dan internet	4 Jenis			0	347,300,000	
1	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	2 Laporan			0	1,794,000	
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**1,794,000**	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	2 Laporan			0	1,794,000	
1	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,245,818,305**	
1	06	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di tingkatkan izin	50 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan	15 Orang			0	785,496,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa/petugas kebersihan kantor	6 Orang			0	151,290,550	
1	06	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	25 Orang			0	38,410,000	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	45 Jenis			0	39,644,410	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1500 Jenis			0	78,547,300	
1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik tersedia	20 Jenis			0	13,470,295	
1	06	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan (media/majalah/koran) kantor/dinas	4 Jenis			0	105,466,500	
1	06	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	200 kotak			0	74,968,500	
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 Kali			0	400,683,000	
1	06	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional diadakan	10 Unit			0	185,259,250	
1	06	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit/Jenis Mebeleur yang diadakan	10 Jenis			0	254,098,250	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung/bangunan kantor di tingkatkan umur fungsionalnya	10 Unit			0	84,812,500	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional	45 Unit			0	671,669,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	5 Unit			0	0	
1	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**578,386,500**	**712,780,005**	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik tersedia	20 Jenis			11,713,300	13,470,295	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 Jenis			27,459,200	0	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya alat tulis kantor	45 Jenis			33,640,800	39,644,410	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetak dan penggandaan	1500 Jenis			38,931,200	78,547,300	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan (media/majalah/koran) kantor/dinas	4 Jenis			44,460,000	105,466,500	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan/material	50 Jenis			8,572,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	200 kotak			65,190,000	74,968,500	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 Kali			348,420,000	400,683,000	
1	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**183,407,000**	**439,357,500**	
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional diadakan	10 Unit			96,657,000	185,259,250	
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas operasional bertambah	4 Unit			0	0	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit/Jenis Mebeleur yang diadakan	10 Jenis			86,750,000	254,098,250	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin	10 Unit			0	0	
1	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**690,560,000**	**549,909,300**	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	500 Surat			8,360,000	12,908,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan dasar listrik, sumber daya air, telpon dan internet	4 Jenis			302,000,000	347,300,000	
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran	25 Orang			33,400,000	38,410,000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa/petugas kebersihan kantor	6 Orang			346,800,000	151,290,550	
1	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**722,570,000**	**756,481,500**	
1	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional	45 Unit			625,970,000	671,669,000	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan mesin yang di pelihara	50 Jenis			22,850,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung/bangunan kantor di tingkatkan umur fungsionalnya	10 Unit			73,750,000	84,812,500	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**										**0**	**0**	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekomendasi Undian Gratis Berhadian (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diterbitkan	50 Rekomendasi			0	0	
1	**06**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**38,022,500**	**0**	
1	06	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah Laporan	1 Laporan			38,022,500	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Potensi PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	200 Orang			0	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**12,289,890,500**	**0**	
1	06	02	1.02	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Potensi PSM kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	200 Orang			68,458,000	0	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah TKSK kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	150 Orang			257,140,000	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	02	1.02	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Potensi TKSK kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	150 Orang			0	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**12,289,890,500**	**0**	
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	JumlahLK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	150 Orang			107,585,000	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	02	1.02	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Potensi LK3 kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	10 Kab/Kota			0	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**12,289,890,500**	**0**	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial	100 %	Jumlah LKS kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan	100 Lembaga			11,856,707,500	0	
1	**06**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	02	1.02	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume potensi LKS kewenangan provinsi yang ditingkatkan kemampuan (capacity building)	50 LKS			0	0	
1	**06**	**03**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**										**849,670,000**	**276,172,500**	
1	**06**	**03**	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**										**849,670,000**	**276,172,500**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase PMB (pekerja migran bermasalah) dan Korban Tindak Kekerasan tertangani	100 %	Pekerja Migran Bermasalah Korban Tindak Kekerasan (KTK-PMB) yang Terfasilitasi Pemulangan ke Daerah Asal	500 Orang			849,670,000	276,172,500	
1	**06**	**03**	1.01		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal**										**0**	**276,172,500**	
1	06	03	1.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pekerja Migran Bermasalah Korban Tindak Kekerasan (KTK-PMB) yang Terfasilitasi Pemulangan ke Daerah Asal	500 Orang			0	276,172,500	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**3,892,278,600**	**713,000,000**	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**										**1,141,919,600**	**713,000,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan				Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %					0	0	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah kebutuhan dasar Sandang bagi Penyandang Disabilitas	100 %			0	0	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**										**0**	**713,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume kebutuhan dasar Aksesabilitas/Alat Bantu Penyandang Disabilitas	150 Orang			0	713,000,000	
1	**06**	**04**	1.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti**										**1,141,919,600**	**713,000,000**	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Volume kebutuhan dasar Aksesabilitas/Alat Bantu Penyandang Disabilitas	150 Orang			837,000,000	713,000,000	
1	06	04	1.01	12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah laporan	20 Laporan			304,919,600	0	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**										**0**	**0**	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar Luar Panti	250 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang dapat mengkases layanan identitas keluarga luar panti	250 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anak terlantar yang dapat pengasuhan keluarga pengganti	50 Anak			0	0	
1	**06**	**04**	1.02		**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti**										**2,600,359,000**	**0**	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah Laporan	1 Laporan			2,600,359,000	0	
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam panti Pemerintah	250 Orang			0	0	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersedian sandang bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Panti Pemerintah	250 Orang			0	0	
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume ketersediaan Layanan kesehatan bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam panti pemerintah	250 Orang			0	0	
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**										**150,000,000**	**0**	
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah orang	100 Orang			0	0	
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti**										**0**	**0**	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	250 Orang			0	0	
1	**06**	**04**	1.05		**Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti**										**150,000,000**	**0**	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah Orang	100 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.05	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	2.50 %	Jumlah laporan	20 Laporan			150,000,000	0	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**										**0**	**4,822,651,500**	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anak terlantar yang mendapatkan hak pengasuhan anak antar WNI	50 Anak			0	0	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**										**182,332,235**	**0**	
1	06	05	1.01	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah rekomendasi	30 Rekomendasi			119,206,735	0	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal				Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan hak pengasuhan anak oleh orang tua tunggal	50 Anak			63,125,500	0	
1	**06**	**05**	1.01		**Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal**										**0**	**0**	
1	06	05	1.01	02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anak terlantar yang mendapatkan hak pengasuhan anak oleh orang tua tunggal	50 Anak			0	0	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**										**0**	**4,822,651,500**	
1	06	05	1.02	01	Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Data Fakir Miskin Daerah cakupan provinsi yang terverfikasi dan validasi	10 Kab/Kota			0	2,177,364,000	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**										**11,752,952,000**	**2,645,287,500**	
1	06	05	1.02	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah bantuan	250 KK			388,540,000	0	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota				Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial	500 KK			8,459,212,000	2,645,287,500	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**										**0**	**4,822,651,500**	
1	06	05	1.02	02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KK Fakir Miskin yang tertangani melalui bantuan sosial	500 KK			0	2,645,287,500	
1	**06**	**05**	1.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi**										**11,752,952,000**	**2,645,287,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	05	1.02	03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Jumlah kelompok	250 Kelompok			2,905,200,000	0	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**										**0**	**0**	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakananan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan logistic (permakanan) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota			0	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**2,812,968,100**	**0**	
1	06	06	1.01	01	Penyediaan Permakanan				Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan logistic (permakanan) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota			1,265,000,000	0	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang				Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan logistic (sandang) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota			300,000,000	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	06	1.01	02	Penyediaan Sandang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan logistic (sandang) korban bencana Alam dan Sosial	10 Kab/Kota			0	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**2,812,968,100**	**0**	
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Kapasitas ketersediaan Daya Tampung RPTC korban bencana Alam dan Sosial	100 Orang			187,500,000	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	06	1.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan Daya Tampung RPTC korban bencana Alam dan Sosial	100 Orang			0	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**2,812,968,100**	**0**	
1	06	06	1.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Jumlah orang	100 Orang			515,878,100	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penanganan Bencana Daerah Provinsi	100 %	Jumlah orang	150 Orang			544,590,000	0	
1	**06**	**06**	1.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	06	1.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume LDP (Layanan Dukungan Psikososial) yang tingkatkan	10 Kab/Kota			0	0	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**										**0**	**0**	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi	1 Lokasi			0	0	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**										**662,247,800**	**0**	
1	06	07	1.01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di rehabilitasi	1 Lokasi			8,258,800	0	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi				Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan pemeliharaannya	1 TMP			540,000,000	0	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	07	1.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sarana dan prasarana TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan pemeliharaannya	1 TMP			0	0	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**										**662,247,800**	**0**	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)/Makam Pahlawan Nasional (MPN)	100 %	Jumlah orang	200 Orang			113,989,000	0	
1	**06**	**07**	1.01		**Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi**										**0**	**0**	
1	06	07	1.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas pengamanan TMP/TMPN kewenangan provinsi yang di tingkatkan	1 Lokasi			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
										TOTAL	58,495,768,337	63,295,274,810	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**2,585,000,900**	**3,009,966,930**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**615,620,900**	**756,093,430**	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang tenaga administrasi pengelola keuangan	5 Orang			35,420,000	47,334,000	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen/laporan tersusun	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah eksemplar surat menyurat kantor	200 Eksamplar			0	3,432,750	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis layanan telepon, listrik, air, internet dan elektronik lainnya	5 Jenis			0	100,222,500	
1	06	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			0	0	
1	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang/tenaga pengelola BMD	1 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat kendaraan	5 Surat			0	0	
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang tenaga administrasi pengelola keuangan	5 Orang			0	47,334,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	3 Orang			0	113,912,100	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat tulis kantor	30 Jenis			0	26,071,765	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan/barang cetakan dan penggandaan kantor	2 Jenis			0	6,139,965	
1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat listrik dan komponen listrik	20 Jenis			0	700,350	
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah eksamplar bahan bacaan	50 Eksamplar			0	8,280,000	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah unit gedung/bangunan kantor/asrama/ layanan lainnya di tingkatkan umur fungsional	10 Unit			0	0	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional di tingkatkan umur fungsional	5 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat listrik dan komponen listrik	20 Jenis			6,090,000	700,350	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor	30 Jenis			10,936,600	26,071,765	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan/barang cetakan dan penggandaan kantor	2 Jenis			6,700,800	6,139,965	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksamplar bahan bacaan	50 Eksamplar			7,200,000	8,280,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	20 Jenis			15,036,000	0	
1	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	30 Orang			0	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			50,000,000	0	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair kantor/panti bertambah	100 Unit			71,862,000	250,000,000	
1	06	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan/mesin/perlengkapan kantor lainnya bertambah	100 Unit			62,761,500	200,000,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar surat menyurat kantor	200 Eksamplar			1,750,000	3,432,750	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis layanan telepon, listrik, air, internet dan elektronik lainnya	5 Jenis			96,450,000	100,222,500	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	3 Orang			99,054,000	113,912,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kendaraan	5 Surat			83,360,000	0	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			12,910,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional di tingkatkan umur fungsional	5 Unit			56,090,000	0	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**2,253,873,500**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas layanan pengasuhan AT dalam panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan						Kapasitas layanan pengasuhan AT dalam panti	100 Orang			60,000,000	0	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan						Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	100 Orang			913,840,000	1,492,136,500	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	100 Orang			0	1,492,136,500	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume kebutuhan dasar Sandang bagi Anak Terlantar dalam Panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	100 Orang			150,000,000	761,737,000	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	100 Orang			0	761,737,000	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti	100 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	80 Orang			12,200,000	0	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	80 Orang			356,380,000	0	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dalan Panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	80 Orang			371,960,000	0	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang dapat menggunakan layanan faskes dan fadik	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang dapat mengkases layanan identitas keluarga dalam panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Anak Terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	80 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0006 Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	1 Laporan			105,000,000	0	
TOTAL															**2,585,000,900**	**5,569,933,860**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**0**	**1,796,110,250**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**34,155,000**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga/Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Lainnya tersedia	10 Orang			26,040,000	0	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyelenggaraan sistem akuntabilitas OPD	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah materai	230 lembar			0	3,542,000	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			0	20,700,000	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga Pengelola BMD	2 Orang			0	0	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa kebersihan kantor	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Aikmel, Lenek	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis			0	9,913,000	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 eksemplar			0	0	
1	06	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan dinas roda 2	2 unit			0	0	
1	06	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah meubleir	5 unit			0	0	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana gedung kantor	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun			0	0	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	50 Jenis			0	0	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	40 Jenis			8,682,800	9,913,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 tahun			2,604,600	0	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 eksemplar			7,200,000	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	10 Laporan			96,000,000	0	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah meubleir	5 unit			0	0	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah materai	230 lembar			3,080,000	3,542,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 tahun			18,000,000	20,700,000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa kebersihan kantor	1 tahun			330,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	8 Unit 1 tahun			94,790,000	0	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah Unit	1 tahun 10 eksemplar			4,190,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			227,430,000	0	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**1,761,955,250**	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi GEPENG dalam panti Pemerintah	100 Orang			0	1,487,295,000	
1	06	04	1.04	01	Penyediaan Permakanan						Kapasitas ketersediaan permakanan bagi GEPENG dalam panti Pemerintah	100 Orang			980,925,000	1,487,295,000	
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersedian sandang bagi GEPENG dalam Panti Pemerintah	100 Orang			0	75,451,500	
1	06	04	1.04	02	Penyediaan Sandang						Kapasitas ketersedian sandang bagi GEPENG dalam Panti Pemerintah	100 Orang			65,610,000	75,451,500	
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses						Kapasitas ketersediaan Asrama/wisma GEPENG dalam panti pemerintah	100 Orang			10,675,000	0	
1	06	04	1.04	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan Asrama/wisma GEPENG dalam panti pemerintah	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume ketersediaan Layanan kesehatan dalam panti pemerintah	100 Orang			0	8,768,750	
1	06	04	1.04	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						Volume ketersediaan Layanan kesehatan dalam panti pemerintah	100 Orang			7,625,000	8,768,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0008 Panti Sosial Bina Karya "Madani"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume GEPENG yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	100 Orang			0	190,440,000	
1	06	04	1.04	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						Volume GEPENG yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	100 Orang			165,600,000	190,440,000	
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						Volume GEPENG yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	100 Orang			1,470,000	0	
1	06	04	1.04	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume GEPENG yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						Volume GEPENG yang dilatih keterampilan dasar dalam Panti	100 Orang			234,400,000	0	
1	06	04	1.04	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume GEPENG yang dilatih keterampilan dasar dalam Panti	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.04	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume GEPENG dalam panti pemerintah yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratis	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal			Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume GEPENG yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.04	10	Pemulangan ke Daerah Asal						Volume GEPENG yang teridentifikasi dan dipulangkan ke daerah asal	100 Orang			30,000,000	0	
1	06	04	1.04	11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	1 Laporan			63,000,000	0	
														TOTAL	**2,377,322,400**	**3,592,220,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**0**	**2,529,125,000**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,060,000,000**	
1	06	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	12 Laporan			0	0	
1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	10 Orang 10 Orang			58,355,000	0	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	100 eksemplar			0	0	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	3 Rekening			0	0	
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	10 Orang			0	0	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat/bahan pembersih kantor Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service) tersedia	20 Jenis 5 Orang			0	0	
1	06	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor di perbaiki	10 Jenis			0	0	
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	3 Laporan			0	0	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit				0	1,000,000,000	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara				0	60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen listrik	50 Jenis			7,140,500	0	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	20 Orang			34,000,000	0	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	40 Jenis			0	0	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan	10000 Lembar			5,991,200	0	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	150 eksemplar			7,200,000	0	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis bahan tersedia	50 Jenis			35,424,000	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	3 Laporan			56,500,000	0	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair bertambah	50 Unit			79,000,000	0	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	100 eksemplar			2,860,000	0	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah layanan tersedia	3 Layanan			103,500,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	15 Orang			390,000,000	0	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	8 Unit			49,300,000	0	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	20 Jenis			0	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			100,000,000	0	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**1,469,125,000**	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan			Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Penyandang Disabilitas	100 Orang			0	1,469,125,000	
1	06	04	1.01	01	Penyediaan Permakanan						Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Penyandang Disabilitas	100 Orang			1,386,000,000	1,469,125,000	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang			Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Tersedianya kebutuhan dasar Sandang bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	02	Penyediaan Sandang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama ramah difabel bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	100 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0007 Panti Sosial Bina Laras "Mutmainnah"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Penyandang Disabilitas	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang diberikan layanan kesehatan	100 Orang			106,000,000	0	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Penyandang Disabiilitas yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Jumlah Penyandang Disabiilitas yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial	100 Orang			48,960,000	150,000,000	
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Jumlah Penyandang Disabiilitas yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	100 Orang			24,770,000	100,000,000	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Selebung			Jumlah enyandang Disabilitas yang dapat mengkases layanan keluarga dalam panti	100 Orang			0	50,000,000	
1	06	04	1.01	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti	100 Orang			0	50,000,000	
														TOTAL	**2,495,000,700**	**4,348,250,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**2,460,000,010**	**1,134,887,275**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**773,921,100**	**185,617,475**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Dokumen 4 orang			4,020,000	4,381,500	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Dokumen			0	4,381,500	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	200 Dokumen			0	2,944,000	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	20 bh			0	65,584,500	
1	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD				0	0	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	2 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	4 orang			0	53,958,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga kebersihan	5 orang			0	109,326,475	
1	06	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kerja yang di perbaiki	12 unit			0	0	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	30 jenis			0	0	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2000 lembar			0	3,381,000	
1	06	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit			0	0	
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	2 kali			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 unit			0	0	
1	06	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Meubeler	40 unit			0	0	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	10 unit			0	0	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	6 unit			0	0	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	30 Jenis			0	0	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	50 Jenis			16,783,000	0	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2000 lembar			4,088,100	3,381,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	125 eksemplar			5,400,000	0	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	30 Jenis			22,480,000	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	2 kali			100,000,000	0	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubeler	40 unit			0	0	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	200 Dokumen			4,500,000	2,944,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	20 bh			57,030,000	65,584,500	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga kebersihan	5 orang			270,000,000	109,326,475	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	6 unit			79,620,000	0	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	30 Unit			10,000,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	10 unit			200,000,000	0	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**949,269,800**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Kapasitas layanan pengasuhan Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			0	0	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			836,200,000	910,455,000	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			0	910,455,000	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam Panti	120 orang			60,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam Panti	120 orang			0	0	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			68,860,000	38,814,800	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			0	38,814,800	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 orang			0	0	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang Volume kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti	120 Orang 120 orang			11,000,710	0	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	120 Orang			610,018,200	0	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Volume anak terlantar yang diberikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dalam Panti	120 orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0002 Panti Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Volume Anak Terlantar yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	120 orang			0	0	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Labuapi, Bengkel			Volume Anak Terlantar yang dapat menggunakan layanan faskes dan fadik	120 orang			0	0	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang	120 Orang			0	0	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan	1 Laporan			100,000,000	0	
														TOTAL	**2,460,000,010**	**2,323,732,550**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**0**	**5,325,622,814**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,527,759,961**	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi	1 thn			0	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan tersedia	15 Org			52,520,000	232,208,000	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			570,000	5,640,290	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	5,640,290	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	100 kegiatan			0	4,168,750	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	48 rekening			0	54,165,000	
1	06	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	100 buah			0	15,252,450	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa pengelola BMD	1 Tahun			0	0	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga pengelola BMD	1 Orang			2,221,000	0	
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan tersedia	15 Org			0	232,208,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	5 Orang			0	184,112,700	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat kantor tersedia	35 jenis			0	15,176,550	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	50 buku 2000 Lembar			0	13,307,800	
1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis			0	11,822,092	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 bh			0	0	
1	06	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun			0	0	
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	30 Exsemplar			0	8,280,000	
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan			0	82,096,200	
1	06	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	3 unit			0	954,071,050	
1	06	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubeler tersedia	10 Set			0	89,674,079	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 unit			0	212,750,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	6 unit			0	0	
1	06	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor yang direhab	4 unit			0	645,035,000	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis			10,219,600	11,822,092	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat kantor tersedia	35 jenis			13,887,600	15,176,550	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	50 buku 2000 Lembar			8,715,000	13,307,800	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	30 Exsemplar			7,200,000	8,280,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis	20 jenis			16,945,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	4 Laporan			40,000,000	82,096,200	
1	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan operasional yang tersedia	3 unit			0	954,071,050	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler tersedia	10 Set			38,594,600	89,674,079	
1	06	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung kantor yang direhab	4 unit			0	645,035,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	100 kegiatan			3,635,000	4,168,750	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	48 rekening			29,155,000	54,165,000	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	5 Orang			270,000,000	184,112,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Mataram, Sandubaya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis	5 jenis			51,240,000	0	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya peralatan dan mesin	10 unit			11,110,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	5 unit			200,000,000	212,750,000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**1,570,172,600**	**1,329,984,913**	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan permakanan bagi klayan dalam pant	40 orang			563,791,400	665,850,000	
1	06	04	1.05	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi klayan dalam pant	40 orang			0	665,850,000	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Tersedianya kebutuhan sandang	1 Tahun			90,400,000	37,383,280	
1	06	04	1.05	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Tersedianya kebutuhan sandang	1 Tahun			0	37,383,280	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan Asrama bagi PMKS dalam panti pemerintah	40 orang			43,938,400	56,732,329	
1	06	04	1.05	03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Kapasitas ketersediaan Asrama bagi PMKS dalam panti pemerintah	40 orang			0	56,732,329	
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan perbekalan kesehatan bagi PMKS di dalam Panti	40 orang			64,558,600	27,168,060	
1	06	04	1.05	04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Kapasitas ketersediaan perbekalan kesehatan bagi PMKS di dalam Panti	40 orang			0	27,168,060	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan	1 Tahun			66,552,000	0	
1	06	04	1.05	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Volume PMKS yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dalam Panti	40 Orang			0	1,467,877,940	
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KEGIATAN	1 TAHUN			3,600,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.05	06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya bimbingan aktivitas hidup	1 Tahun			0	0	
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Tersedianya bimbingan keterampilan dasar	1 Tahun			0	253,000,000	
1	06	04	1.05	07	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Tersedianya bimbingan keterampilan dasar	1 Tahun			559,332,200	253,000,000	
1	06	04	1.05	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlayaninya proses pembuatan adminduk	1 Tahun			0	0	
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 thn			0	89,360,244	
1	06	04	1.05	09	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Terlaksananya pelayanan pendidikan dan kesehatan	1 thn			0	89,360,244	
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Terlaksananya Proses pemulangan	1 Tahun			178,000,000	200,491,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0003 Panti Sosial Karya Wanita "Mirah Adi"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	06	04	1.05	10	Pemulangan ke Daerah Asal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Selagalas			Terlaksananya Proses pemulangan	1 Tahun			0	200,491,000	
TOTAL															**2,326,186,300**	**9,168,115,238**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**2,517,041,600**	**4,024,908,230**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**963,525,600**	**344,579,100**	
1	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	15 Orang			59,120,000	94,208,000	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen/laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	0	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	300 Surat			0	8,856,380	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	48 rekening			0	161,115,000	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga Pengelola BMD	2 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang/Tenaga Administrasi Keuangan tersedia	15 Orang			0	94,208,000	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	35 Jenis			0	13,011,445	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	25 Buku 1500 Lembar			0	8,763,000	
1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis			0	15,769,375	
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	150 eksemplar			0	8,280,000	
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3 Laporan			0	34,575,900	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen dan alat listrik tersedia	20 Jenis			14,670,400	15,769,375	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor tersedia	35 Jenis			17,006,200	13,011,445	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang diadakan Jumlah barang penggandaan yang diadakan	25 Buku 1500 Lembar			4,485,000	8,763,000	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	150 eksemplar			6,600,000	8,280,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan/material	50 Jenis			9,032,000	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	3 Laporan			100,000,000	34,575,900	
1	06	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional bertambah	1 Unit			0	0	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	300 Surat			1,200,000	8,856,380	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rekening	48 rekening			95,842,000	161,115,000	
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis, Jumlah	10 unit			8,330,000	0	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service), tenaga keamanan kantor dan tenaga administrasi kantor	10 Orang			360,000,000	0	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional dipelihara	10 Unit			87,240,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Bangunan/Gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			200,000,000	0	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**3,795,329,130**	
1	06	04	1.01	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi lansia terlantar dalam Panti Pemerintah	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	04	Penyediaan Alat Bantu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam Panti Pemerintah	85 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volumen Lansia Terlantar yang diberikan bimbingan fisik,mental/psikis, spiritual dan sosial dalam Panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volume Lansia Terlantar yang diberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volume Lansia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang terlayani pembuatan adminduk	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volume Lansia Terlantar dalam Panti Pemerintah yang dapat menggunakan layanan kesehatan Gratis	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.01	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volume Lansia Terlantar yang dapat mengakses layanan keluarga dalam Panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan permakanan bagi Lansia Terlantar dalam panti	85 Orang			0	2,551,045,000	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan permakanan bagi Lansia Terlantar dalam panti	85 Orang			1,094,180,000	2,551,045,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersedian sandang bagi Lansi Terlantar dalam Panti Pemerintah	100 Orang			56,915,400	0	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya			Kapasitas ketersedian sandang bagi Lansi Terlantar dalam Panti Pemerintah	100 Orang			0	0	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	100 Orang			0	954,638,000	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	100 Orang			171,964,100	954,638,000	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah	85 Orang			0	115,000,000	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	100 Orang			73,306,500	34,627,880	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	100 Orang			0	34,627,880	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Volumen Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	100 Orang			52,800,000	49,680,000	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volumen Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dapan Panti	100 Orang			0	49,680,000	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			kegiatan	1 tahun			3,600,000	0	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Lansia Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Pantiunifikasi dalam panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.03	09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Lansia terlantar dalam panti pemerintah yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratisan aktivitas hidup sehari-hari dalam Pantiunifikasi dalam panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.03	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume Lansia terlantar yang dapat mengkases layanan keluarga dalam panti yang dapat menggunakan layanan Kesehatan Gratisan aktivitas hidup sehari-hari dalam Pantiunifikasi dalam panti	85 Orang			0	0	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Volume Lansia terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam Panti	85 Orang			0	54,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0004 Panti Sosial Lanjut Usia "Mandalika"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Volume Lansia terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam Panti	85 Orang			70,500,000	54,050,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan layanan pemulaksaraan dalam Panti bagi Lansia Terlantar	85 Orang			30,250,000	36,288,250	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Kapasitas ketersediaan layanan pemulaksaraan dalam Panti bagi Lansia Terlantar	85 Orang			0	36,288,250	
TOTAL															**2,517,041,600**	**8,164,816,460**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**2,312,007,200**	**3,047,067,355**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,143,204,200**	**1,433,118,230**	
1	06	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dok			7,470,000	0	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang/Tenaga/Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Lainnya tersedia	12 Orang			25,020,000	254,610,000	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dok			7,470,000	0	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	40 Jenis			0	4,094,000	
1	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah layanan listrik,air dan telpon/internet kantor	4 Jenis			0	57,097,500	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) tertata	1 Laporan			0	40,000,000	
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang/Tenaga/Jasa Administrasi Keuangan dan Tenaga Lainnya tersedia	12 Orang			0	254,610,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service) tersedia	4 Orang			0	138,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	40 Jenis			0	12,316,730	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	10 Jenis			0	0	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen alat listrik	40 Jenis			6,031,000	0	
1	06	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 Unit			24,860,000	0	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK yang tersedia	40 Jenis			10,710,200	12,316,730	
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	5000 Lembar 10 Jenis			7,846,000	0	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	200 eksemplar			5,400,000	12,000,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	10 Jenis			5,277,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan yang dibuat	20 Laporan			107,000,000	90,000,000	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair diadakan	50 Unit			89,700,000	250,000,000	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis surat keluar/masuk terlaksana	40 Jenis			3,890,000	4,094,000	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah layanan listrik,air dan telpon/internet kantor	4 Jenis			49,650,000	57,097,500	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang Tenaga Kebersihan (cleaning service) tersedia	4 Orang			510,000,000	138,000,000	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tingkatkan umur fungsionalnya	10 Unit			75,740,000	75,000,000	
1	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	10 Jenis			7,140,000	0	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung/bangunan kantor di tingkatkan umur fungsionalnya	5 Unit			200,000,000	500,000,000	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**1,513,949,125**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi			Kapasitas ketersediaan permakanan lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			0	868,307,500	
1	06	04	1.03	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersediaan permakanan lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			674,288,000	868,307,500	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas ketersedaan sandang bagi lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			30,600,000	11,707,000	
1	06	04	1.03	02	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi			Kapasitas ketersedaan sandang bagi lansia terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			0	11,707,000	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses						Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			219,500,000	548,340,125	
1	06	04	1.03	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan Asrama LANSIA bagi Lansia Terlantar dalam panti pemerintah	50 Orang			0	548,340,125	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah	50 Orang			0	57,500,000	
1	06	04	1.03	04	Penyediaan Alat Bantu						Volume ketersediaan alat bantu bagi Lansia dalam panti pemerintah	50 Orang			15,000,000	57,500,000	
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	50 Orang			85,121,000	28,094,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0009 Panti Sosial Lanjut Usia "Meci Angi "

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.03	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan fasilitas kesehatan bagi Lansia Terlantar	50 Orang			0	28,094,500	
1	06	04	1.03	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	50 Orang			70,400,000	0	
1	06	04	1.03	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	50 Orang			7,200,000	0	
1	06	04	1.03	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi			Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) tertata	1 Laporan			53,650,000	50,000,000	
1	06	04	1.03	12	Pemulasaraan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kapasitas ketersediaan layanan pemulaksaraan dalam panti bagi Lansia terlantar	50 Orang			13,044,000	50,000,000	
														TOTAL	**2,312,007,200**	**5,027,134,710**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**2,414,996,000**	**4,454,935,140**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**491,590,800**	**694,837,270**	
1	06	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumah tenaga administrasi keuorgangan	5 org			76,720,000	53,130,000	
1	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis, kegiatan	4 orang			424,000	0	
1	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 dokumen			0	0	
1	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya surat keluar	100 surat			0	5,008,250	
1	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 org			0	0	
1	06	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, dokumen	1 orang			1,732,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumah tenaga administrasi keuorgangan	5 org			0	53,130,000	
1	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumah tenaga kebersihan	5 org			0	180,147,500	
1	06	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumah peralatan kerja yang diperbaiki	5 unit			0	0	
1	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis ATK	50 Jenis			0	39,880,735	
1	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis			0	6,350,760	
1	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	50 Jenis			0	6,942,550	
1	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	1 eksemplar			0	8,280,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	1 kl			0	25,198,800	
1	06	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubelair	6 jenis			0	237,986,175	
1	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	1 unit			0	31,912,500	
1	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	3 unit			0	0	
1	06	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor/wisma yang direhabilitasi	8 unit			0	1,725,000,000	
1	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik	50 Jenis			4,378,500	6,942,550	
1	06	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	50 Jenis			12,805,800	39,880,735	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan	2 jenis			12,937,500	6,350,760	
1	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	1 eksemplar			7,200,000	8,280,000	
1	06	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun			8,438,500	0	
1	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat	1 kl			32,000,000	25,198,800	
1	06	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair	6 jenis			58,534,000	237,986,175	
1	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya surat keluar	100 surat			4,580,000	5,008,250	
1	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun			73,650,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah, Kegiatan	1 Tahun			8,380,000	0	
1	06	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumah tenaga kebersihan	5 org			150,000,000	180,147,500	
1	06	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan jabatan dan operasional kantor yang ditingkatkan umur fungsionalnya	3 Unit			39,810,000	100,000,000	
1	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor Jumlah rumah gedung kantor/wisma yang direhabilitasi	1 unit 8 unit			0	31,912,500	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**0**	**3,660,097,870**	
1	06	04	1.02	01	Pengasuhan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Kapasitas pelayanan pengasuhan AT dalam panti	96 org/bln			0	0	
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Tersedianya kebutuhan dasar permakanan alat terlantar dalam panti	924 org			0	3,274,050,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	02	Penyediaan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Tersedianya kebutuhan dasar permakanan alat terlantar dalam panti	924 org			732,150,000	3,274,050,000	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam panti	924 org			0	226,205,000	
1	06	04	1.02	03	Penyediaan Sandang	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Volume kebutuhan dasar sandang bagi anak terlantar dalam panti	924 org			307,700,000	226,205,000	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	924 org			0	159,842,870	
1	06	04	1.02	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Kapasitas kebutuhan dasar Asrama Anak bagi Anak Terlantar dalam panti	924 org			19,985,000	159,842,870	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah, Kegiatan	1 tahun			55,030,200	0	
1	06	04	1.02	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen kebutuhan dasar fasilitas kesehatan bagi Anak Terlantar dalam Panti	924 org			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen Anak Terlantar yang di berikan bimbingan fisik, mental/psikis, spiritual dan sosial dalan Panti	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah, Kegiatan	1 Tahun			564,040,000	0	
1	06	04	1.02	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen Anak Terlantar yang di berikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari dalam Panti	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volume Anak Terlantar yang terlayani pembuatan adminduk dalam Panti Pemerintah	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen Anak Terlantar yang dapat menggunakan layanan faskes dan fadik	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen Anak Terlantar yang dapat mengkases layanan identitas keluarga dalam panti	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah, Kegiatan	1 tahun			161,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0005 Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak "Sasambo Matupa"

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	1.02	11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			Volumen Anak Terlantar yang diberikan pelayanan reunifikasi dalam panti	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Selat			"Kapasitas ketersediaan Layanan Pengasuhan Keluarga Penganti kepada Anak Terlantar dalam panti"	924 org			0	0	
1	06	04	1.02	13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan sinkronisasi dan koordinasi layanan anak terlantar dalam panti	10 Laporan			83,500,000	100,000,000	
TOTAL															**2,414,996,000**	**10,434,870,280**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**0**	**21,005,822,266**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**17,647,788,158**	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**569,856,291**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	4 Laporan			0	62,010,300	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**316,448,790**	**335,500,000**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	129,870,700	135,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**569,856,291**	
2	07	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	peserta dokumen indeks pengukuran ketenagakerjaan provinsi peserta penyusunan perencanaan program/kegiatan Rembug ketenagakerjaan	50 buku 50 orang 80 orang			0	159,963,988	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**316,448,790**	**335,500,000**	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	15,114,820	17,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**569,856,291**	
2	07	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	dokumen monitoring dan evaluasi	22 OT			0	123,491,370	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**316,448,790**	**335,500,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	17,066,000	18,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**569,856,291**	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	20 Laporan			0	123,303,000	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**316,448,790**	**335,500,000**	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	19,216,280	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**569,856,291**	
2	07	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	evaluasi program/kegiatan	70 orang			0	101,087,633	
2	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**316,448,790**	**335,500,000**	
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	16,304,360	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	6,407,280	25,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	100 %	112,469,350	110,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**14,116,939,778**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	166 Orang			0	14,087,946,507	
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**16,264,714,992**	**16,264,948,082**	
2	07	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	177 Orang	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	16,128,814,822	16,127,948,082	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	77,000,000	77,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	52,188,080	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100 %	6,712,090	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**14,116,939,778**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	16,312,658	
2	07	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	12,680,613	
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,896,842,329**	
2	07	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	2100 Surat			0	2,455,250	
2	07	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Rekening			0	347,300,000	
2	07	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	16 BMD			0	54,833,955	
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**9,795,560**	**25,000,000**	
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	16 BMD			9,795,560	25,000,000	
2	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,896,842,329**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	23 Unit			0	169,370,850	
2	07	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Jumlah PTT/Non ASN	8 Orang 3 Orang			0	612,742,712	
2	07	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	21 Orang			0	1,120,728,866	
2	07	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	57 Jenis			0	26,251,406	
2	07	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 Jenis			0	34,187,258	
2	07	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	15 Jenis			0	14,513,092	
2	07	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16 Unit			0	75,813,865	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	168 Ekesemplar			0	9,729,000	
2	07	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	875 Kotak			0	31,213,875	
2	07	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	20 Rapat			0	194,623,700	
2	07	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	2 Gedung			0	71,702,500	
2	07	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	23 Unit			0	97,278,500	
2	07	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	36 Unit			0	34,097,500	
2	**07**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**64,149,760**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal Jumlah Orang	45 Orang 166 Orang			0	64,149,760	
2	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**33,042,440**	**149,149,760**	
2	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	177 Orang			23,575,440	85,000,000	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal Jumlah Orang	45 Orang 177 Orang			9,467,000	64,149,760	
2	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**183,932,356**	**373,265,621**	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6,517,820	14,513,092	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	57,678,580	75,813,865	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	20,387,886	26,251,406	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	8,578,570	34,187,258	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	9,306,000	10,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	12,842,500	27,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	68,621,000	185,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,100,394,000**	**1,448,228,866**	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	1,408,000	2,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	288,986,000	325,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	810,000,000	1,120,728,866	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**104,059,000**	**173,702,500**	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	76,240,000	85,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	10,659,000	71,702,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	17,160,000	17,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**										**0**	**123,350,150**	
2	**07**	**02**	1.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**										**0**	**123,350,150**	
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah buku data ketenagakerjaan jumlah buku data ketransmigrasian jumlah buku PTKD	50 buku 50 buku 25 eks			0	123,350,150	
2	**07**	**02**	1.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**										**84,745,940**	**125,000,000**	
2	07	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Tenaga	100 %			Meningkatnya Perencanaan dan pelaporan	100 %	84,745,940	125,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**259,982,620**	**806,623,558**	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**										**232,518,720**	**654,093,964**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	232,518,720	583,258,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi**										**0**	**654,093,964**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemagangan ke luar negeri jumlah siswa SMK yang mengikuti sosialisasi jumlah tenaga kerja yang magang ke luar negeri	208 orang 100 orang 100 orang 30 orang			0	583,258,000	
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	1 Dokumen			0	70,835,964	
2	**07**	**03**	1.01		**Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**										**232,518,720**	**654,093,964**	
2	07	03	1.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	0	70,835,964	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**										**27,463,900**	**152,529,594**	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	27,463,900	152,529,594	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**03**	1.02		**Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja**										**0**	**152,529,594**	
2	07	03	1.02	01	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja jumlah dokumen akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja	1 dokumen 40 LPK			0	152,529,594	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**07**	**03**	1.04		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**0**	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta pasca pelatihan berbasis kompetensi yang termonitor	150 orang			0	0	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**										**991,226,210**	**1,211,974,948**	
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**326,888,260**	**7,407,966**	
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	326,888,260	7,407,966	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**04**	1.01		**Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**7,407,966**	
2	07	04	1.01	04	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pencari kerja	30 orang			0	7,407,966	
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**										**0**	**65,621,622**	
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lowongan Kerja Yang Terinformasikan	4000 Orang			0	65,621,622	
2	**07**	**04**	1.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**										**135,633,800**	**150,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	04	1.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	85 %	135,633,800	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**										**521,621,520**	**1,042,219,191**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %	122,673,000	620,755,108	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**										**0**	**745,470,445**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Yang Tertangani	2500 Orang			0	620,755,108	
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri Yang Terlayani	21500 Orang			0	13,251,254	
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**										**521,621,520**	**1,042,219,191**	
2	07	04	1.04	03	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %	306,472,510	310,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %	Jumlah Orang	40 Orang	Menurunnya Tingkat Pengangguran terbuka	90 %	92,476,010	111,464,083	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**04**	1.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi**										**0**	**745,470,445**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	04	1.04	04	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Eks TKI Purna Yang Diberdayakan	45 Orang			0	111,464,083	
2	**07**	**04**	1.06		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**12,347,791**	
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perijinan TKA Yang Terlayani	60 Orang			0	12,347,791	
2	**07**	**04**	1.06		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**7,082,630**	**12,347,791**	
2	07	04	1.06	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	90 %	7,082,630	12,347,791	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**										**294,497,880**	**359,621,584**	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**										**213,501,000**	**265,203,904**	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %	132,211,630	174,415,486	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**265,203,904**	
2	07	05	1.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus perburuhan yang tertangani jumlah perusahaan yang dibina jumlah perusahaan yang dibina dan diuji lingkungan sosial dan kesehatan kerjanya	100 orang 35 perusahaan 500 orang			0	174,415,486	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi**										**213,501,000**	**265,203,904**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %	81,289,370	90,788,418	
2	**07**	**05**	1.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**265,203,904**	
2	07	05	1.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah lembaga ketenagakerjaan yang diberdayakan	11 lembaga			0	90,788,418	
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**										**0**	**94,417,680**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah UMP/UMK yang disahkan	11 UMP/UMK			0	94,417,680	
2	**07**	**05**	1.03		**Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)**										**80,996,880**	**94,417,680**	
2	07	05	1.03	01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja Yang Diselesaikan	73 %			Besaran Sengketa Pengusaha-Pekerja	71 %	80,996,880	94,417,680	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**										**0**	**1,237,590,992**	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**0**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja	57 perusahaan			0	344,417,755	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**269,472,860**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %	73,601,300	344,417,755	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**0**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Hasil Pemetaan Kasus Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Tertangani Jumlah Kasus Ketenagakerjaan Yang Tertangani Jumlah Perusahaan Yang Diadvokasi Peraturan Perundang-undangan Norma K3	1 dokumen 1 kasus 20 kasus 25 perusahaan			0	273,794,070	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**269,472,860**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %	97,718,760	273,794,070	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**0**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah CTKI Yang Diperiksa di Tempat Penampungan Jumlah Perusahaan Yang Diawasi dan Diuji Sarana K3nya Jumlah Perusahaan yang dibina pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Jumlah perusahaan yang didata obyek keselamatan dan kesehatan kerjanya Jumlah PPTKIS Yang Diawasi dan Diperiksa di Tempat Penampungan	3 PPTKIS 40 perusahaan 40 perusahaan 22 perusahaan 3 PPTKIS			0	619,379,167	
2	**07**	**06**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan**										**269,472,860**	**1,237,590,992**	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %	98,152,800	619,379,167	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**										**0**	**163,854,943**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**										**0**	**97,255,603**	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**										**0**	**97,255,603**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen NKSAD	4 dokumen			0	97,255,603	
3	**32**	**02**	1.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**										**124,985,900**	**97,255,603**	
3	32	02	1.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penempatan Transmigran	90 %			Cakupan Penempatan Transmigrasi	85 %	124,985,900	97,255,603	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**										**69,957,660**	**66,599,340**	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**										**69,957,660**	**66,599,340**	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kegiatan optimalisasi pertanahan transmigrasi SKHPL dan ijin prinsip pelepasan kawasan Hutan (IPPKH) Jumlah transmigran yang dibimtek	1 dokumen 30 orang			69,957,660	66,599,340	
3	**32**	**04**	1.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan**										**0**	**66,599,340**	
3	32	04	1.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kegiatan optimalisasi pertanahan transmigrasi SKHPL dan ijin prinsip pelepasan kawasan Hutan (IPPKH) Jumlah transmigran yang dibimtek	1 dokumen 30 orang			0	66,599,340	
														TOTAL	**20,107,256,208**	**43,844,138,063**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**0**	**2,013,355,329**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,160,758,623**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah	10 dokumen			0	16,623,836	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	0	16,623,836	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exampler	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	8,455,200	5,000,000	
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exampler	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	8,455,200	7,500,000	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	40 orang			0	45,770,000	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exampler	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	8,455,200	7,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	10 exampler	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4 Jenis	8,455,200	7,500,000	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	2 orang	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Orang	37,460,400	121,330,163	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	5 exampler	Meningkatnya Pelayanan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Orang	7,212,330	7,669,465	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah	5 laporan			0	7,669,465	
2	07	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	300 buah			0	3,185,500	
2	07	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	6 buah			0	135,240,000	
2	07	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	1 laporan			0	10,513,668	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 buah	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 Buah	9,141,110	10,513,668	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	10 unit			0	91,482,500	
2	07	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	4 orang			0	121,330,163	
2	07	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	13 orang			0	471,964,721	
2	07	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	30 buah			0	11,521,620	
2	07	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang	10 exampler			0	9,763,615	
2	07	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang	50 buah			0	12,314,660	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	1 buah			0	46,309,235	
2	07	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang	12 exampler			0	9,987,750	
2	07	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	500 orang			0	29,555,000	
2	07	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang	9 orang			0	65,812,890	
2	07	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	2 gedung			0	64,342,500	
2	07	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	45 buah			0	7,371,500	
2	07	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	0 buah			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Sandubaya, Dasan Cermen	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis	5 orang			0	0	
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	173 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	14,662,340	12,314,660	
2	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	68 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	408,259,500	46,309,235	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	257 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	14,847,470	11,521,620	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	5 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	10,891,100	9,763,615	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	3 buah	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	8,724,990	9,987,750	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	350 orang	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	25,692,700	29,555,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	25 orang	Pelaksanaan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	70,853,100	65,812,890	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 buah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	1,600,000	3,185,500	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	8 buah	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	109,560,000	135,240,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang	20 orang	Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Menjadi Lancar	1 Tahun	497,404,839	471,964,721	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	5 unit	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkat	1 Tahun	79,123,000	91,482,500	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung	5 buah	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkat	1 Tahun	96,855,000	64,342,500	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang	74 buah	Masa Pakai Barang Milik Daerah Meningkat	1 Tahun	66,132,000	7,371,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0001 Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**0**	**852,596,706**	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	208 orang			0	810,615,036	
2	07	03	1.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %	Jumlah orang	96 orang	Terwujudnya Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Yang Terampil, Kompetensi dan Berdaya Saing	96 Buah	498,753,710	810,615,036	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang	5 OT			0	41,981,670	
2	07	03	1.04	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	87 %	Jumlah orang	100 orang	Termonitornya Alumni Siswa Pelatihan Kerja	100 Orang	29,005,580	41,981,670	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**										**0**	**2,000,000,000**	
2	07	04	1.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	92 %	Jumlah orang	0 orang	Terwujudnya Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Yang Terampil, Kompetensi dan Berdaya Saing	0 Orang	0	2,000,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
														TOTAL	**2,019,999,969**	**6,008,440,658**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**999,982,140**	**1,176,607,570**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**452,152,640**	**847,693,080**	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			nilai lakip OPD	85 point	5,432,900	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	25 Laporan			0	148,378,750	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			nilai lakip OPD	85 point	5,432,900	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			nilai lakip OPD	85 point	5,432,900	7,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi Keuangan	2 dokumen	4,444,000	81,371,700	
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi Keuangan	2 dokumen	5,119,400	30,214,525	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		30 Buku			0	30,214,525	
2	07	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	28 Surat			0	2,455,250	
2	07	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jumlah Rekening	3 Rekening			0	29,900,000	
2	07	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Laporan			0	12,880,000	
2	07	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	4 Unit			0	126,270,000	
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			laporan BMD	1 laporan	2,718,300	12,880,000	
2	07	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	8 Orang			0	81,371,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	6 Orang			0	210,047,500	
2	07	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	57 Jenis			0	26,236,790	
2	07	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	5 Jenis			0	11,398,340	
2	07	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	15 Jenis			0	2,772,075	
2	07	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	3 Rekening			0	8,280,000	
2	07	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	250 Makan/Minuman			0	13,340,000	
2	07	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Trip	2 Orang			0	146,390,400	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		2 unit			0	14,105,325	
2	07	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		3 unit			0	39,833,010	
2	07	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 unit			0	0	
2	07	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	1 Gedung			0	17,020,000	
2	07	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		4 unit			0	0	
2	07	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		4 Jenis			0	123,636,500	
2	07	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Akreditasi lembaga	1 tahun	152,149,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	1,622,900	2,772,075	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	16,741,010	26,236,790	
2	07	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	4,035,240	11,398,340	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	7,200,000	8,280,000	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	3,190,000	13,340,000	
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan Administrasi umum	1 dokumen	0	146,390,400	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen	2,134,290	2,455,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen	31,800,000	29,900,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Laporan penyediaan jasa penunjang	1 dokumen	180,000,000	210,047,500	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun	18,000,000	126,270,000	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			pemeliharaan barang milik daerah	1 tahun	6,699,000	123,636,500	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**										**547,829,500**	**328,914,490**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			pemeriksaan perusahaan	250 perusahaan	100,000,150	277,033,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan	22 Perusahaan			0	277,033,850	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus	20 Kasus			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0002 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Menurunnya Pengangguran Terbuka		Besaran Pemeriksaan Perusahaan	100 %			pemeriksaan perusahaan	250 perusahaan	447,829,350	51,880,640	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah Perusahaan	22 Perusahaan		0	51,880,640	
														TOTAL	**999,982,140**	**2,550,052,225**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**0**	**450,977,905**	
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**450,977,905**	
2	07	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen	1 dokumen			0	0	
2	07	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	5 Orang			0	7,500,000	
2	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	5 Orang			0	7,500,000	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	5 Orang			0	7,500,000	
2	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	13 laporan			0	0	
2	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	5 Orang			0	7,500,000	
2	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2 orang			3,435,300	37,609,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	3,500,000	
2	07	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	1 dokumen			0	0	
2	07	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	192 surat			0	3,648,375	
2	07	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 rekening			0	20,125,000	
2	07	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah BMD	1 laporan			0	0	
2	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			765,800	15,000,000	
2	07	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	6 unit			0	206,081,150	
2	07	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2 orang			0	37,609,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	3 orang			0	138,956,800	
2	07	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis alat tulis kantor	36 jenis			0	9,389,980	
2	07	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis			0	11,707,000	
2	07	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah exemplar	1 exemplar			0	6,210,000	
2	07	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	400 orang			0	0	
2	07	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis			0	17,250,000	
2	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor	36 jenis			2,909,800	9,389,980	
2	07	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exemplar	1 exemplar			4,050,000	6,210,000	
2	07	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	400 Orang			0	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	20 Orang			48,674,200	75,000,000	
2	07	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	192 surat			1,705,000	3,648,375	
2	07	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 rekening			18,225,000	20,125,000	
2	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Kebersihan	3 orang			151,134,600	138,956,800	
2	07	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan	6 unit			40,451,000	206,081,150	
2	07	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 jenis			0	17,250,000	
2	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis			3,650,000	11,707,000	
2	**07**	**06**			**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**										**0**	**0**	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasai pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja di pulau sumbawa	20 PERUSAHAAN			0	0	
2	07	06	1.01	01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasai pelaksanaan norma ketenagakerjaan di tempat kerja di pulau sumbawa	20 PERUSAHAAN			66,124,400	70,000,000	
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani dipulau sumbawa	1 KASUS			65,658,600	65,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0003 Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	06	1.01	02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang ditangani dipulau sumbawa	1 KASUS			0	0	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi pelaksanaan norma K3-nya dipulau sumbawa	20 perusahaan			68,217,000	65,000,000	
2	07	06	1.01	03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi pelaksanaan norma K3-nya dipulau sumbawa	20 perusahaan			0	0	
TOTAL															**475,000,700**	**1,235,455,810**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**0**	**15,760,450,167**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**9,795,970,337**	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**640,917,344**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen yang disusun	4 Dokumen			0	70,817,736	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**87,702,800**	**173,316,534**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	21,518,300	70,817,736	
2	08	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	3,659,500	16,783,548	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**640,917,344**	
2	08	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen			0	16,783,548	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**87,702,800**	**173,316,534**	
2	08	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	15,944,000	2,926,750	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**640,917,344**	
2	08	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen			0	2,926,750	
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen			0	470,061,810	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**87,702,800**	**173,316,534**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	4,358,000	0	
2	08	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	3,685,000	0	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**640,917,344**	
2	08	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dokumen			0	80,327,500	
2	**08**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**87,702,800**	**173,316,534**	
2	08	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	2,369,000	2,461,000	
2	08	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	7 Dokumen	36,169,000	80,327,500	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,151,698,551**	**6,226,779,933**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	6,134,424,551	5,974,828,733	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,981,579,233**	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	5,974,828,733	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,151,698,551**	**6,226,779,933**	
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	13,304,000	247,661,700	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,981,579,233**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,151,698,551**	**6,226,779,933**	
2	08	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3,970,000	4,289,500	
2	**08**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,981,579,233**	
2	08	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	2,461,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat			ADMINISTRASI KEUANGAN	10 DOK	0	4,289,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**08**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,173,473,760**	
2	08	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 Tahun			0	1,422,550	
2	08	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi dan sumberdaya listrik dan air	1 Tahun			0	107,853,900	
2	08	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan pelengkapan kantor	1 Tahun			0	614,445,000	
2	08	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang terpelihara kesehatannya	684 Orang			0	69,000,000	
2	08	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa jaminan barang milik daerah	1 Orang			0	9,179,990	
2	08	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas	1 Tahun			0	0	
2	**08**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**2,534,000**	**9,179,990**	
2	08	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2,534,000	9,179,990	
2	**08**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,173,473,760**	
2	08	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa administrasi keuangan	8 Orang			0	247,661,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa kebersiahan	14 Orang			0	566,645,250	
2	08	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	1 Tahun			0	0	
2	08	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun			0	15,043,150	
2	08	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			0	337,673,810	
2	08	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan listrik	1 Tahun			0	11,684,000	
2	08	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan perlengkapan kantor	1 Tahun			0	175,187,550	
2	08	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan rumah tangga	15 Jenis			0	5,481,360	
2	08	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan	4 Jenis			0	145,935,000	
2	08	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makan minum	1 Tahun			0	49,450,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi	1 Tahun			0	38,157,000	
2	08	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			0	0	
2	08	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			0	0	
2	08	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya meubelair	1 Tahun			0	0	
2	08	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	1 Gedung			0	256,450,000	
2	08	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	40 Unit			0	485,116,000	
2	08	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			0	37,087,500	
2	08	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya perlatan gedung kantor	1 Tahun			0	0	
2	**08**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**286,182,200**	**559,785,960**	
2	08	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	6,135,000	11,684,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	22,768,000	15,043,150	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	46,213,400	337,673,810	
2	08	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	19,800,000	145,935,000	
2	08	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	30,800,000	49,450,000	
2	08	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Kelancaran administrasi umum	1 Tahun	160,465,800	0	
2	**08**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**235,586,100**	**200,000,000**	
2	08	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas	10 Unit	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	200,110,000	200,000,000	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Pembangunan Sumber Daya Manusia Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	141,904,400	0	
2	**08**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**558,712,000**	**1,290,366,700**	
2	08	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun	1,235,000	1,422,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun	93,786,000	107,853,900	
2	08	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun	9,000,000	614,445,000	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Menunjang Urusan Administrasi Umum	1 Tahun	454,691,000	566,645,250	
2	**08**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**266,980,000**	**778,653,500**	
2	08	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	40 Unit			220,200,000	485,116,000	
2	08	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun			24,480,000	37,087,500	
2	08	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya gedung kantor	1 Gedung			22,300,000	256,450,000	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**										**0**	**869,683,130**	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**										**0**	**751,025,210**	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Koordinasi	100 Orang			0	487,949,830	
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**										**1,726,629,900**	**487,949,830**	
2	08	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kapasitas PPRG	20 Orang	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	41 %	1,595,726,700	487,949,830	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %			Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	41 %	130,903,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**08**	**02**	1.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi**										**0**	**751,025,210**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	02	1.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	100 Orang			0	263,075,380	
2	08	02	1.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang			0	0	
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**										**29,911,000**	**29,479,400**	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan PPRG	39.13 %			Meningkatnya Kader Perempuan di Partai Politik	37.2 %	29,911,000	29,479,400	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**08**	**02**	1.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi**										**0**	**35,389,410**	
2	08	02	1.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang			0	35,389,410	
2	08	02	1.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	100 Orang			0	0	
2	**08**	**02**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi**										**0**	**83,268,510**	
2	08	02	1.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	100 Orang			0	83,268,510	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										**0**	**1,858,713,145**	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**1,064,600,770**	
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	237 Kasus			0	466,968,425	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**81,110,500**	**150,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	03	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Regulasi Perlindungan Perempuan	6 Dokumen			81,110,500	150,000,000	
2	**08**	**03**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**1,064,600,770**	
2	08	03	1.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	50 orang			0	597,632,345	
2	**08**	**03**	1.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**13,800,000**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya layanan pengaduan masyarakat	1 Target			0	13,800,000	
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**										**0**	**780,312,375**	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM penyedia layanan yang di latih/bintek	30 Orang			0	230,002,300	
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**										**495,227,400**	**200,000,000**	
2	08	03	1.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Satgas PPA yang terbentuk	50 Satgas/Orang			395,227,500	100,000,000	
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %	Jumlah Perempuan Penyintas/Korban yang menerima Kebutuhan Spesifik dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus serta rentan	30 Orang			99,999,900	100,000,000	
2	**08**	**03**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**										**0**	**780,312,375**	
2	08	03	1.03	03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemenuhan Kebutuhan bagi korban kekerasan	1537 Orang			0	550,310,075	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**										**0**	**903,222,305**	
2	**08**	**04**	1.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**										**0**	**235,886,390**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	04	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	100 Orang			0	103,138,440	
2	08	04	1.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Edukasi	100 Orang			0	0	
2	08	04	1.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Masyarakat	10 Kegiatan			0	132,747,950	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**										**0**	**587,703,475**	
2	08	04	1.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Advokasi	100 Orang			0	0	
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM lembaga layanan yang terampik	50 SDM			0	527,824,470	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**										**380,653,000**	**587,703,475**	
2	08	04	1.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Index Ketahanan Keluarga	4.5 %	Jumlah SDM lembaga layanan yang terampik	50 SDM			263,143,000	527,824,470	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**										**0**	**587,703,475**	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jejaring yang Terbangun	10 Jejaring			0	59,879,005	
2	**08**	**04**	1.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi**										**380,653,000**	**587,703,475**	
2	08	04	1.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Index Ketahanan Keluarga	4.5 %	Jumlah Jejaring yang Terbangun	10 Jejaring			117,510,000	59,879,005	
2	**08**	**04**	1.03		**Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**79,632,440**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	04	1.03	01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Layanan yang Terbentuk	20 Layanan			0	79,632,440	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**										**0**	**443,532,460**	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**443,532,460**	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Data Gender dan Anak	1 Dokumen			0	443,532,460	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**										**34,997,400**	**35**	
2	08	05	1.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dokumen Gender	1 -					34,997,400	35	
2	**08**	**05**	1.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**443,532,460**	
2	08	05	1.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Data Gender dan Anak yang disajikan	5 Dokumen			0	0	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**										**360,562,500**	**0**	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**										**360,562,500**	**0**	
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	25 %	Jumlah Peserta Advokasi Kebijakan tentang KLA	40 Orang			170,766,200	0	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**										**0**	**1,118,231,020**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	06	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pesert advokasi	350 Orang			0	519,302,050	
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta koordinasi	75 Orang			0	598,928,970	
2	**08**	**06**	1.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi**										**360,562,500**	**0**	
2	08	06	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan Pengarusutamaan Hak Anak	25 %					189,796,300	0	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**										**0**	**771,097,770**	
2	**08**	**07**	1.01		**Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**381,678,215**	
2	08	07	1.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Advokasi	572 Orang			0	0	
2	08	07	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Koordinasi	150 Orang			0	381,678,215	
2	**08**	**07**	1.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**										**109,237,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	07	1.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah Media KIE yang digunakan dalam Perlindungan Khusus Anak	2 Buah			109,237,000	0	
2	**08**	**07**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**389,419,555**	
2	08	07	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak	250 Kasus			0	269,272,155	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Siswa	300 Siswa			0	120,147,400	
2	**08**	**07**	1.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**343,054,700**	**0**	
2	08	07	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah orang yang diintervensi tentang, Napza dan PMS	336 orang			295,311,100	0	
2	08	07	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %	Jumlah PD, lembaga, Media dan Dunia Usaha yang diintervensi	15 Lembaga			47,743,600	0	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										**879,553,300**	**988,141,695**	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**										**318,553,300**	**246,029,100**	
2	**14**	**02**	1.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										**265,533,700**	**198,479,100**	
2	14	02	1.01	03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah peserta advokasi	150 Orang			69,570,400	57,159,600	
2	**14**	**02**	1.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										**0**	**232,268,030**	
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta advokasi	250 Orang			0	147,538,330	
2	**14**	**02**	1.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										**265,533,700**	**198,479,100**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	14	02	1.01	07	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah peserta advokasi	250 Orang			195,963,300	141,319,500	
2	**14**	**02**	1.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										**0**	**232,268,030**	
2	14	02	1.01	08	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan	20 Sekolah			0	84,729,700	
2	**14**	**02**	1.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**										**0**	**84,556,510**	
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Model Strategi yang dikembangkan	1 Model			0	84,556,510	
2	**14**	**02**	1.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**										**53,019,600**	**47,550,000**	
2	14	02	1.02	04	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendewasaan Usia Perkawinan	20.70 Tahun	Jumlah Model Strategi yang dikembangkan	1 Model			53,019,600	47,550,000	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**										**276,000,000**	**0**	
2	**14**	**03**	1.01		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**										**162,054,700**	**0**	
2	14	03	1.01	05	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38 %	Jumlah Peserta Kegiatan	30 orang			162,054,700	0	
2	**14**	**03**	1.01		**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**										**0**	**715,850,045**	
2	14	03	1.01	06	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang terfasilitasi	10 Desa			0	437,451,145	
2	14	03	1.01	08	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materi Konseling yang dikembangkan	1 PAket			0	278,398,900	
2	**14**	**03**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**										**0**	**367,643,270**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yg terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1400 orang			0	367,643,270	
2	**14**	**03**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**										**113,945,300**	**0**	
2	14	03	1.02	02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	38 %	Jumlah masyarakat yg terlibat dalam pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1400 orang			113,945,300	0	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**										**0**	**1,339,379,930**	
2	**14**	**04**	1.01		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**0**	**920,182,390**	
2	14	04	1.01	06	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan remaja dalam PIK R/M	180 Orang			0	205,337,675	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader yang mendapat bimbingan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	210 Orang			0	322,915,055	
2	**14**	**04**	1.01		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**150,118,800**	**322,915,055**	
2	14	04	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah Kader yang mendapat bimbingan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK	210 Orang			150,118,800	322,915,055	
2	**14**	**04**	1.01		**Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**0**	**920,182,390**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	14	04	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana yang dibentuk	7 Kelompok			0	391,929,660	
2	**14**	**04**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**0**	**419,197,540**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan program ketahan keluarga melalui Tribina, UPPKS dan pemberdayaan eknomi keluarga	420 Orang			0	419,197,540	
2	**14**	**04**	1.02		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**134,881,200**	**419,197,540**	
2	14	04	1.02	04	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah kader yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan program ketahan keluarga melalui Tribina, UPPKS dan pemberdayaan eknomi keluarga	420 Orang			134,881,200	419,197,540	
														TOTAL	**12,030,332,351**	**30,181,505,004**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**0**	**3,269,458,970**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,672,821,970**	
2	08	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Renja UPTD PPA	1 Dokumen			0	23,184,000	
2	08	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya DPA dan DPPA	2 Dokumen			0	7,590,000	
2	08	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyusunan administrasi pelaksanaan tugas ASN	14 orang			0	490,302,500	
2	08	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Laporan Keuangan UPTD PPA	1 Dokumen			0	3,795,000	
2	08	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jasa surat menyurat	3 jenis			0	441,600	
2	08	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya jasa kebersihan kantor	2 kegiatan			0	241,500,000	
2	08	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedinya ATK	13 jenis			0	6,592,260	
2	08	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2 kegiatan			0	6,558,450	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya komponen instalasi listrik kantor	7 jenis			0	5,120,375	
2	08	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis			0	0	
2	08	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya peralatan rumah tangga	12 jenis			0	7,220,160	
2	08	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terlaksananya rapat interen dan mediasi	480 orang			0	187,450,000	
2	08	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terlaksananya konsultasi keluar daerah	14 orang			0	0	
2	08	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	4 unit			0	526,238,850	
2	08	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terbangunnya gedung penginapan korban kekerasan	2 unit			0	11,613,850	
2	08	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya meubeluer	9 jenis			0	129,975,875	
2	08	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya kendaraaan dinas	7 unit			0	25,239,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	08	01	1.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya absensi sidik jari	1 unit			0	0	
2	08	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terlatihnya pegawai UPTD PPA	3 orang			0	0	
2	08	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedinya ATK	13 jenis			7,942,500	6,592,260	
2	08	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya penggandaan bahan UPTD PPA	20000 lembar			5,956,500	0	
2	08	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya AC	2 unit			39,644,500	0	
2	08	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya jasa pelayanan umum	9 orang			240,000,000	0	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										**272,750,000**	**0**	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan	2 %			cakupan perempuan yg mendapatkan penanganan	85.00 persen	272,750,000	0	
2	08	03	1.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pagesangan Barat			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan	100 Orang			0	1,596,637,000	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**										**7,500,000**	**1,596,637,000**	
2	08	07	1.02	01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Cakupan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 %			cakupan anak yg mendapatkan penanganan	85 persen	7,500,000	1,596,637,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.02.0001 Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
										TOTAL	573,793,500	4,872,688,230	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										**0**	**22,882,908,011**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**10,680,064,765**	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**961,284,310**	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen	1 dokumen			0	139,153,450	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**465,000,000**	**470,000,000**	
2	09	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganngaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	75,000,000	75,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**961,284,310**	
2	09	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Penganggaran	4 DOKUMEN			0	165,879,105	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**465,000,000**	**470,000,000**	
2	09	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	45,000,000	45,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	40,000,000	40,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**961,284,310**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Data Base Ketahanan Pangan Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Jumlah Dokumen Roadmap Ketahanan Pangan JUmlah Dokumen Visualisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan	1 DOKUMEN 6 DOKUMEN 1 DOKUMEN 1 DOKUMEN 56 ORANG			0	328,084,765	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**465,000,000**	**470,000,000**	
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	40,000,000	45,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**961,284,310**	
2	09	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Jumlah Peserta Pertemuan Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan	1 DOKUMEN 56 ORANG			0	206,440,755	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**465,000,000**	**470,000,000**	
2	09	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-Perubahan SKPD	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	45,000,000	45,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**961,284,310**	
2	09	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi (Form A, E-Monev)	12 LAPORAN			0	121,726,235	
2	**09**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**465,000,000**	**470,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi	2 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	70,000,000	70,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggannggaran dan Evaluasi	8 DOKUMEN	150,000,000	150,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,505,419,056**	**7,219,113,890**	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	65 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	6,408,065,056	7,040,113,890	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,649,293,605**	
2	09	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pegawai	65 ORANG			0	6,456,805,800	
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,505,419,056**	**7,219,113,890**	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	6 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	67,354,000	126,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,649,293,605**	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	6 ORANG			0	145,140,120	
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,505,419,056**	**7,219,113,890**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	0	10,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	20,000,000	25,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	14 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	10,000,000	10,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,649,293,605**	
2	09	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Keuangan Bulanan	14 DOKUMEN			0	10,837,025	
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Prognosis	1 DOKUMEN			0	9,811,800	
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,505,419,056**	**7,219,113,890**	
2	09	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Serapan Anggaran	90 PERSEN	0	8,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,649,293,605**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN			0	26,698,860	
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**20,000,000**	**33,000,000**	
2	09	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	0	8,000,000	
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,069,486,850**	
2	09	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1500 Surat Keluar			0	34,130,045	
2	09	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	3 JENIS			0	187,887,000	
2	09	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	4 JENIS			0	24,865,645	
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**20,000,000**	**33,000,000**	
2	09	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	20,000,000	25,000,000	
2	**09**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,069,486,850**	
2	09	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 DOKUMEN			0	30,613,000	
2	09	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengelola administrasi keuangan	6 ORANG			0	10,153,005	
2	09	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Petugas keamanan kantor Jumlah Petugas kebersihan kantor	3 ORANG 4 ORANG			0	323,327,790	
2	09	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kerja yang Terpelihara	26 UNIT			0	29,886,200	
2	09	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	12 JENIS			0	26,648,605	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah arsip Kantor Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	1000 LEMBAR 6 JENIS			0	7,279,270	
2	09	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan listrik dan penerangan	12 JENIS			0	158,421,240	
2	09	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Kursi Tersedianya Laptop Tersedianya Personal Komputer	100 Buah 3 Unit 1 Unit			0	144,204,020	
2	09	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis bahan bacaan	12 JENIS			0	65,571,390	
2	09	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu	1 JENIS			0	6,182,975	
2	09	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 KALI			0	265,254,400	
2	09	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan Dinas Operasional Roda 4	1 UNIT			0	561,394,350	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung yang direhab Jumlah Unit Gedung	3 UNIT 1 UNIT			0	766,130	
2	09	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit kendaraan dinas	44 UNIT			0	600,407,525	
2	09	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit Jumlah Unit peralatan kerja	1 UNIT 26 UNIT			0	15,050,510	
2	09	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bangunan yang Direhab	1 Unit			0	577,443,750	
2	**09**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**372,998,200**	**386,000,000**	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan	12 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	7,182,500	9,000,000	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	24 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	19,000,000	15,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	1 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	5,013,000	7,000,000	
2	09	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	6 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	6,000,000	9,000,000	
2	09	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan bacaan Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu	3 JENIS 3 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	26,460,000	26,000,000	
2	09	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis makanan dan minuman tamu	1 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	25,004,000	25,000,000	
2	09	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 KALI	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	200,350,700	210,000,000	
2	09	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Daokumen Arsip	1 DOKUMEN	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	8,988,000	10,000,000	
2	09	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Publikasi	4 KALI	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 JENIS	75,000,000	75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**09**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**118,046,300**	**170,000,000**	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 JENIS			86,046,300	70,000,000	
2	09	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	5 UNIT			32,000,000	50,000,000	
2	09	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	50,000,000	
2	**09**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**578,419,000**	**482,200,000**	
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 SURAT	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	8,999,000	9,000,000	
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	6 JENIS	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	159,570,000	110,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Sarana Publikasi	4 JENIS	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	19,850,000	20,000,000	
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	13 ORANG	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9 JENIS	390,000,000	343,200,000	
2	**09**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**302,820,000**	**375,000,000**	
2	09	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit kendaraan dinas jabbatan yang dipelihara	37 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	153,100,000	150,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	0	145,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara	26 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	9,490,000	10,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung yang rehab	1 GEDUNG	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	120,250,000	50,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung yang dipelihara	20 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	19,980,000	20,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	65 UNIT	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**										**0**	**1,546,967,810**	
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**1,546,967,810**	
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lumbung Pangan Pangan terbangun	10 UNIT			0	1,019,509,040	
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**										**220,000,000**	**225,000,000**	
2	09	02	1.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	5 %	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	2 UNIT	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	2 UNIT	220,000,000	225,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada Berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**1,546,967,810**	
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lantai Jemur Yang Terbangun	10 UNIT			0	527,458,770	
2	**09**	**02**	1.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi**										**220,000,000**	**225,000,000**	
2	09	02	1.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	5 %			Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	2 UNIT	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	02	1.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lumbung Pangan yang termanfaatkan	5 %	Jumlah Infrastruktur Kemandirian Pangan yang dipelihara	1 PAKET	Jumlah Infrastruktur lumbung pangan dan sarana pendukungnya	2 UNIT	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**										**3,772,180,180**	**2,338,636,000**	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**454,999,380**	**375,000,000**	
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Jenis Laporan Analisis Ketersediaan Pangan	2 DOKUMEN	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap/Tahun	92,050,280	150,000,000	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**0**	**1,426,368,621**	
2	09	03	1.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan NBM Jumlah Dokumen Laporan Prognosa Ketersediaan Pangan	1 DOKUMEN 1 DOKUMEN			0	148,095,390	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ketersediaan umbi dan aneka kacang Stok Cadangan Pangan Masyarakat	2 Jenis 20 Ton			0	224,563,536	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**454,999,380**	**375,000,000**	
2	09	03	1.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)			Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap/Tahun	0	0	
2	09	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)			Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap/Tahun	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Jenis Laporan Analisis Distribusi Pangan	2 DOKUMEN	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap/Tahun	75,000,600	75,000,000	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**0**	**1,426,368,621**	
2	09	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditas Pangan yang dipantau Arus distribusinya Jumlah Komoditas Pangan yang dipantau perkembangan harganya Jumlah RMU yang dipantau	18 null 14 20 UNIT			0	354,648,500	
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah LDPM/PUPM yang dibina Jumlah TTIC yang difasilitasi	52 UNIT 1 UNIT			0	699,061,195	
2	**09**	**03**	1.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**454,999,380**	**375,000,000**	
2	09	03	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah LDPM/PUPM/Pasar Mintra Tani yang dibina	28 UNIT	Tingkat Ketersediaan Energi	7787.81 Kkal/Kap/Tahun	287,948,500	150,000,000	
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**										**0**	**1,395,358,825**	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	30 Ton			0	1,395,358,825	
2	**09**	**03**	1.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi**										**208,510,000**	**50,000,000**	
2	09	03	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Provinsi	20 Ton	Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	3.32 PERSEN	208,510,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	03	1.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)			Persentase Stok Cadangan Pangan Pemerintah	3.32 PERSEN	0	50,000,000	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**0**	**5,039,573,700**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Event Pameran Jumlah Komoditas PSAT yang dipamerkan	3 Event 10 Komoditi			0	164,924,145	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**3,108,670,800**	**1,913,636,000**	
2	09	03	1.04	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah Event Promosi yang diikuti	1 EVENT	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	90 PERSEN	67,080,000	100,000,000	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**0**	**5,039,573,700**	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KRPL yang ditumbuhkembangkan Jumlah Orang yang menerima informasi makananku beragam, bergizi seimbang dan aman Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	54 UNIT 1200 ORANG 20 ORANG			0	4,740,475,490	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**3,108,670,800**	**1,913,636,000**	
2	09	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)	Jumlah KRPL/P2L yang dikembangkan	18 KRPL/P2L	Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	90 PERSEN	3,041,590,800	1,813,636,000	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**0**	**5,039,573,700**	
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan PPH Konsumsi	1 Dokumen			0	134,174,065	
2	**09**	**03**	1.04		**Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi**										**3,108,670,800**	**1,913,636,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	03	1.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rata-Rata Konsumsi Energi	2487.20 (Kkal/ Kap/ Hari)			Rasio konsumsi sayur dan buah terhadap konsumsi ideal	90 PERSEN	0	0	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**										**358,435,000**	**1,375,000,000**	
2	**09**	**04**	1.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi**										**0**	**0**	
2	09	04	1.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	1 %	Jumlah Dokumen Peta Kerentanan Pangan	0 DOKUMEN			0	0	
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**										**0**	**2,405,404,170**	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan SKPG Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang ditumbuhkan Jumlah Penumbuhan Pertanian Keluarga (Family Farming) Jumlah Pertanian Masuk Sekolah	12 Dokumen 10 KAWASAN 10 Kelompok 10 Unit			0	2,405,404,170	
2	**09**	**04**	1.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi**										**358,435,000**	**1,375,000,000**	
2	09	04	1.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	1 %	Jumlah Kelompok yang ditumbuhkan dalam rangka penanganan kerawanan pangan	3 KELOMPOK	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	10 DESA	130,935,000	1,075,000,000	
2	09	04	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)	1 %	Jumlah Balita yang difasilitasi bantuan hibah pangan	600 BALITA	Jumlah Daerah Rentan Rawan Pangan yang difasilitasi	10 DESA	227,500,000	300,000,000	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**										**132,993,400**	**200,000,000**	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**132,993,400**	**200,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Frekwensi Bimwas Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 KALI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	20 KOMODITI	62,998,700	125,000,000	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**389,170,120**	
2	09	05	1.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Frekwensi Bimwas dan Rekomendasi Standar Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	4 KALI			0	144,381,465	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**132,993,400**	**200,000,000**	
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji	20 KOMODITI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	20 KOMODITI	69,994,700	75,000,000	
2	**09**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**389,170,120**	
2	09	05	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditi yang diawasi (Komoditi)	20 KOMODITI			0	244,788,655	
														TOTAL	**12,846,311,136**	**36,156,857,901**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**										**664,939,800**	**577,000,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**261,857,300**	**302,000,000**	
2	09	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	3 ORANG	Persentase Serapan Anggaran	99 PERSEN	17,040,000	15,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 DOKUMEN	Persentase Serapan Anggaran	99 PERSEN	7,000,000	7,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	100 SURAT			0	4,535,715	
2	09	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	3 JENIS			0	72,107,875	
2	09	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan aset	1 dokumen			0	1,521,450	
2	09	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset	1 DOKUMEN	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 DOKUMEN	5,000,000	5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengelolaa administrasi keuangan	3 ORANG			0	59,989,980	
2	09	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Petugas keamanan kantor Jumlah Petugas kebersihan kantor	3 ORANG 2 ORANG			0	174,298,600	
2	09	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis alat tulis kantor	12 JENIS			0	3,290,150	
2	09	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 UNIT			0	144,767,520	
2	09	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bangunan gedung kantor	1 UNIT			0	33,920,400	
2	09	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	3 UNIT			0	0	
2	09	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 UNIT			0	10,308,025	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	09	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bangunan	1 UNIT			0	0	
2	09	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan	12 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 JENIS	2,009,000	4,000,000	
2	09	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	24 JENIS	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 JENIS	4,000,000	5,000,000	
2	09	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Jenis	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	5 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Jenis	24,537,500	25,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	5 Jenis	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	09	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	100 SURAT	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan DaerahJumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	3,700,600	4,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	6 JENIS	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan DaerahJumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	42,320,000	65,000,000	
2	09	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Petugas Pelayanan Umum Kantor	5 ORANG	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan DaerahJumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 JENIS	150,000,000	132,000,000	
2	09	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit peralatan kerja yang dipelihara	5 UNIT	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS	3,000,000	5,000,000	
2	09	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS	0	0	
2	09	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 GEDUNG	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS	3,250,200	35,000,000	
2	09	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 JENIS	0	0	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**										**403,082,500**	**275,000,000**	
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Dokumen Perda Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah Petugas, Pelaku Usaha serta Masyarakat yang memahami Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1 DOKUMEN 50 ORANG	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	60 KOMODITI	245,520,000	75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	05	1.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaku Usaha Temu Teknis Keamanan Pangan Jumlah Peserta Pelatihan Hazard Analiss Critical Control Point/HACCP Reverifikasi OKKPD	30 ORANG 20 ORANG 1 UNIT			0	557,776,680	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	80 %	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang disertifikasi dan diawasi	60 KOMODITI	Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diawasi	60 KOMODITI	157,562,500	200,000,000	
2	09	05	1.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditas PSAT yang diawasi Jumlah Komoditi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersertifikasi	30 KOMODITI 30 KOMODITI			0	700,870,835	
														TOTAL	**664,939,800**	**2,340,387,230**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**27,103,134,335**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**8,119,381,225**	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Renja 2022 RKA/DPA 2022 RKAP/DPPA 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			0	514,145,910	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**433,823,600**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Renja 2022 RKA/DPA 2022 RKAP/DPPA 2021	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			43,323,600	514,145,910	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 tahun			82,700,000	506,174,225	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyusunan LAKIP 2021	1 Dokumen			0	18,502,005	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**433,823,600**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen			82,700,000	0	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			86,200,000	0	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	1 tahun			0	506,174,225	
2	**11**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**433,823,600**	**1,038,822,140**	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			86,700,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan LAKIP 2021	1 Dokumen			26,100,000	18,502,005	
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			26,100,000	0	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**46,682,960,994**	**55,832,517,610**	
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	502 ASN			46,528,341,794	55,024,135,805	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	PTT satgas berantas sampah supir tenaga administrasi keuangan tenaga keamanan kantor tenaga teknis perencanaan tenaga teknis perpetaan tim kreatif persampahan	2 orang 12 orang 4 orang 11 ASN 8 orang 5 orang 3 orang 3 orang			87,873,600	577,960,330	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	0	
2	11	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan 2020	1 Dokumen			0	230,421,475	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**230,421,475**	
2	11	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Keuangan 2020	1 Dokumen			0	230,421,475	
2	**11**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**46,682,960,994**	**55,832,517,610**	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			27,619,000	0	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			39,126,600	0	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**221,785,500**	**200,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dokumen			9,998,000	0	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,850,137,610**	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	surat menyurat	1500 surat			0	17,459,185	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	internet rekening listrik rek telpon	2 line 2 line 1 line			0	176,596,300	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**221,785,500**	**200,000,000**	
2	11	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlindunginya barang milik daerah	1 Tahun			94,000,000	200,000,000	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			40,000,000	0	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			24,999,800	0	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			52,787,700	0	
2	**11**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,850,137,610**	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	PTT satgas berantas sampah supir tenaga administrasi keuangan tenaga keamanan kantor tenaga teknis perencanaan tenaga teknis perpetaan tim kreatif persampahan	2 orang 12 orang 4 orang 11 ASN 8 orang 5 orang 3 orang 3 orang			0	577,960,330	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tenaga kebersihan kantor	9 orang			0	914,147,650	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis ATK	50 jenis			0	65,755,965	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah cetak dan penggandaan	500000 lembar			0	50,106,075	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah instalasi listrik	15 jenis			0	28,595,670	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	all in one desktop latop printer	5 unit 5 unit 5 unit			0	509,456,555	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	harian lokal dan nasional	2 jenis			0	31,547,490	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	makan, smack	2 jenis			0	61,458,990	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 OT			0	247,466,890	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	sepeda motor	3 unit			0	2,203,497,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	kursi biro ess III kursi biro ess IV kursi biro ess staf meja biro ess III meja biro ess IV meja biro staf	6 unit 20 unit 65 unit 6 unit 20 unit 65 unit			0	472,216,910	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	pemeliharaan gedung kantor	2 unit			0	620,521,600	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	pemeliharaan kendaraan operasional	50 unit			0	852,460,500	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Mataram, Punia	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	ac terpeliharanya laptop / pc unit	10 unit 10 unit			0	20,889,750	
2	**11**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**91,380,700**	**0**	
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			91,380,700	0	
2	**11**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**304,984,900**	**0**	
2	11	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	500 Set			0	0	
2	11	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan			29,997,500	0	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 Laporan			40,000,000	0	
2	11	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Laporan			74,999,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal	50 Orang			110,000,000	0	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bimtek	1 Laporan			49,987,500	0	
2	**11**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**173,630,600**	**484,931,080**	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah instalasi listrik	15 jenis			8,999,700	28,595,670	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	20 Laporan			9,998,400	0	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis ATK	50 jenis			9,996,500	65,755,965	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	500000 lembar			9,991,000	50,106,075	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	harian lokal dan nasional	2 jenis			14,910,000	31,547,490	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	makan, smack	2 jenis			23,739,000	61,458,990	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah sepeda motor	30 OT 3 unit			95,996,000	247,466,890	
2	**11**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**2,264,500,000**	**981,673,465**	
2	11	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya kendaraan dinas	5 unit			0	0	
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan pemeliharaan kendaraan operasional	5 Unit 50 unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	kursi biro ess III kursi biro ess IV kursi biro ess staf meja biro ess III meja biro ess IV meja biro staf	6 unit 20 unit 65 unit 6 unit 20 unit 65 unit			0	472,216,910	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah alat dan mesin	2 Unit			2,264,500,000	0	
2	11	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	all in one desktop latop printer	5 unit 5 unit 5 unit			0	509,456,555	
2	**11**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,808,654,500**	**1,108,203,135**	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	surat menyurat	1500 surat			9,994,500	17,459,185	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	internet rekening listrik rek telpon	2 line 2 line 1 line			139,560,000	176,596,300	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Petugas Keamanan Tenaga Jasa Administrasi Tenaga Jasa Pemetaan Tenaga Pemetaan Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Administrasi Tenaga Pendukung Teknis Kehutanan Tenaga Satuan Tugas Berantas Sampah Tenaga Satuan Tugas Berantas Sampah Tenaga Supir Tenaga Tim Kreatif Pengelolaan Persampahan	8 Orang 11 Orang 3 orang 3 Orang 10 Orang 11 Orang 5 Orang 11 Orang 12 Orang 4 Orang 3 Orang			1,659,100,000	914,147,650	
2	**11**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**195,130,000**	**641,411,350**	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	95 Unit			120,150,000	0	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat	40 Unit			14,980,000	0	
2	11	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	ac terpeliharanya laptop / pc unit	10 unit 10 unit			0	20,889,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset tak berwujud	1 Paket			25,000,000	0	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pemeliharaan gedung kantor	2 unit			35,000,000	620,521,600	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,255,111,935**	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**										**0**	**1,223,203,480**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen RPPLH	1 Dokumen			0	748,171,025	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**										**192,885,200**	**1,223,203,480**	
2	11	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Dokumen RPPLH	1 Dokumen			144,194,200	748,171,025	
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Dokumen IKPLHD dan Dokumen IKLH	2 Dokumen			48,691,000	475,032,455	
2	**11**	**02**	1.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**										**0**	**1,223,203,480**	
2	11	02	1.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen IKPLHD dan Dokumen IKLH	2 Dokumen			0	475,032,455	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**0**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Validasi KLHS Kabupaten/Kota dan Dokumen KLHS Provinsi NTB	5 Rekomendasi Validasi			0	495,664,490	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**131,440,000**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Validasi KLHS Kabupaten/Kota dan Dokumen KLHS Provinsi NTB	5 Rekomendasi Validasi			68,100,000	495,664,490	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**0**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KLHS Revisi RPJMD Provinsi NTB	1 Dokumen			0	403,454,500	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**131,440,000**	**1,031,908,455**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	02	1.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	KLHS Revisi RPJMD Provinsi NTB	1 Dokumen			41,600,000	403,454,500	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**0**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokume KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun	0 Dokumen			0	127,747,865	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**131,440,000**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Jumlah dokume KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang disusun	0 Dokumen			0	127,747,865	
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	51.52 %	Jumlah dokume KLHS untuk KRP yang disusun	0 Dokumen			21,740,000	5,041,600	
2	**11**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**										**0**	**1,031,908,455**	
2	11	02	1.02	04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokume KLHS untuk KRP yang disusun	0 Dokumen			0	5,041,600	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,456,713,030**	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**0**	**580,737,005**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi yang dilakukan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	10 lokasi			0	346,729,830	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**0**	**234,007,175**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi					0	0	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**0**	**580,737,005**	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim	1 dokumen			0	234,007,175	
2	**11**	**03**	1.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**										**0**	**234,007,175**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim	1 dokumen			0	234,007,175	
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**207,032,000**	**1,445,419,705**	
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Tersedianya data dan informasi kualitas air laut Tersedianya data dan informasi kualitas air permukaan/sungai Tersedianya data dan informasi kualitas udara	20 titik 60 titik 20 titik			207,032,000	1,066,516,440	
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**0**	**1,445,419,705**	
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya informasi hasil uji kualitas lingkungan	100 titik lokasi			0	1,066,516,440	
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**207,032,000**	**1,445,419,705**	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Jumlah sungai yang terkendali kerusakannya	2 lokasi			0	378,903,265	
2	**11**	**03**	1.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**0**	**1,445,419,705**	
2	11	03	1.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sungai yang terkendali kerusakannya	2 lokasi			0	378,903,265	
2	**11**	**03**	1.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**0**	**430,556,320**	
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Jumlah lokasi yang difasilitasi pembersihan unsur pencemarannya	2 lokasi			0	430,556,320	
2	**11**	**03**	1.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**										**0**	**430,556,320**	
2	11	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi yang difasilitasi pembersihan unsur pencemarannya	2 lokasi			0	430,556,320	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**										**0**	**304,630,515**	
2	**11**	**04**	1.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**										**0**	**304,630,515**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pengelolaan Kehati yang ditetapkan	2 dokumen			0	304,630,515	
2	**11**	**04**	1.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**										**0**	**304,630,515**	
2	11	04	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			pengelolaan taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	0 lokasi	Jumlah dokumen pengelolaan Kehati yang ditetapkan	2 dokumen			0	304,630,515	
2	**11**	**04**	1.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**										**0**	**304,630,515**	
2	11	04	1.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Taman Kehati yang dikelola	0 Lokasi			0	0	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**										**23,083,400**	**642,989,955**	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**23,083,400**	**642,989,955**	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	210 unit	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang difasilitasi perizinannya	2 unit			0	383,159,185	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**642,989,955**	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang difasilitasi perizinannya	2 unit			0	383,159,185	
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	14 unit usaha			0	259,830,770	
2	**11**	**05**	1.01		**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**23,083,400**	**642,989,955**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya	210 unit	Jumlah unit usaha penghasil dan pengumpul limbah B3 yang tertib aturan	14 unit usaha			23,083,400	259,830,770	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**										**0**	**1,738,663,495**	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**1,738,663,495**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen lingkungan	10 dokumen			0	549,524,050	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**199,969,500**	**1,738,663,495**	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	dokumen lingkungan	10 dokumen			99,995,600	549,524,050	
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup	10 orang			0	7,519,045	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**1,738,663,495**	
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup	10 orang			0	7,519,045	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**199,969,500**	**1,738,663,495**	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	jumlah usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, Izin PPLH yang diawasi	33 usaha /kegiatan			99,973,900	595,983,015	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**1,738,663,495**	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah usaha dan /atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, Izin PPLH yang diawasi	33 usaha /kegiatan			0	595,983,015	
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	10 usaha /kegiatan			0	585,637,385	
2	**11**	**06**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**										**199,969,500**	**1,738,663,495**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	06	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	20 usaha/kegiatan	jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	10 usaha /kegiatan			0	585,637,385	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**										**0**	**624,969,800**	
2	**11**	**08**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**624,969,800**	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok masyarakat/lembaga pendidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 sekolah			0	624,969,800	
2	**11**	**08**	1.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**										**202,499,200**	**543,452,000**	
2	11	08	1.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	meningkatnya kapasitas sekolah peduli lingkungan	10.00 %	Jumlah kelompok masyarakat/lembaga pendidikan yang ditingkatkan kapasitasnya	10 sekolah			202,499,200	543,452,000	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**										**0**	**432,988,915**	
2	**11**	**09**	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**432,988,915**	
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang ditingkatkan partisipasi masyarakatnya	2 unit			0	432,988,915	
2	**11**	**09**	1.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**376,512,100**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	meningkatnya kapasitas kelompok masyarakat	2 kelompok	jumlah kelompok masyarakat yang ditingkatkan	2 kelompok			0	376,512,100	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**575,290,720**	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**										**0**	**575,290,720**	
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	12 usaha /kegiatan			0	303,656,810	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**										**199,719,000**	**575,290,720**	
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10 pengaduan	jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	12 usaha /kegiatan			99,567,800	303,656,810	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10 pengaduan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	0 Pengaduan			100,151,200	271,633,910	
2	**11**	**10**	1.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**										**0**	**575,290,720**	
2	11	10	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	0 Pengaduan			0	271,633,910	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**										**930,722,400**	**9,952,394,745**	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**										**930,722,400**	**9,952,394,745**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah Dokumen	7 Dokumen			0	0	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**										**0**	**9,952,394,745**	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebijakan penanganan sampah regional yang tersusun	3 Dokumen			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok masyarakat persampahan yang terbina	124 kelompok			0	9,952,394,745	
2	**11**	**11**	1.01		**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**										**930,722,400**	**9,952,394,745**	
2	11	11	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah kelompok masyarakat persampahan yang terbina	124 kelompok			930,722,400	9,952,394,745	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**8,119,673,911**	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**5,500,274,211**	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi**										**0**	**726,975,260**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi	16 Unit Pengelola			0	726,975,260	
3	**28**	**03**	1.01		**Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi**										**103,856,200**	**726,975,260**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi	16 Unit Pengelola			103,856,200	726,975,260	
3	28	03	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen			0	0	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**0**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen			0	398,489,835	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**263,331,000**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Jumlah Dokumen data dan Informasi Pemanfaatan Hutan yang tersusun	1 Dokumen	Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	170,631,000	398,489,835	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	0	578,971,180	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**0**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen			0	578,971,180	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**263,331,000**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	0	121,950,600	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**0**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama kehutanan pada Hutan Produksi yang dimonitoring dan difasilitasi	4 Kerjasama			0	121,950,600	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**263,331,000**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	0	175,038,280	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**0**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama kehutanan pada Hutan Lindung yang dimonitoring dan difasilitasi	4 Kerjasama			0	175,038,280	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang dinilai di HP	0 Dokumen			0	156,699,000	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**263,331,000**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	49,600,000	156,699,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**0**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang dinilai di HL	0 Dokumen			0	169,804,400	
3	**28**	**03**	1.03		**Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**										**263,331,000**	**1,600,953,295**	
3	28	03	1.03	07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	43,100,000	169,804,400	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersusunnya perencanaan dan kebijakan pemanfaatan hutan berbasis data dan informasi	1 Kebijakan	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**0**	**1,206,208,642**	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RTnRHL yang disusun	1 Dokumen			0	135,947,250	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**8,095,101,800**	**683,926,250**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Dokumen Perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	64,220,200	94,685,800	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	7,395,101,800	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**0**	**1,206,208,642**	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Batang	10000 Batang			0	248,774,900	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**8,095,101,800**	**683,926,250**	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Barat, Lingsar, Lingsar	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	0	248,774,900	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**0**	**1,206,208,642**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Penanganan Karhutla., Jumlah Titik Api Yang Dikendalikan	100 titik api			0	481,020,942	
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**8,095,101,800**	**683,926,250**	
3	28	03	1.04	08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Luas areal RHL yang dimonitoring Terlaksananya Bimtek RHL	16 KPH/Tahura 16 KPH/Tahura	Dokumen perencanaan RTn-RHL	1 Dokumen	635,779,800	340,465,550	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.04		**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**										**0**	**1,206,208,642**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.04	09	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas areal RHL yang dimonitoring	16 Lokasi			0	340,465,550	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**										**661,235,260**	**1,942,244,936**	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan				prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Penyelesaian Kasus Tipihut	10 kasus			420,411,630	905,254,677	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**										**0**	**1,461,223,994**	
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelesaian Kasus Tipihut	10 kasus			0	905,254,677	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**										**661,235,260**	**1,942,244,936**	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	16 UPTD			138,211,430	555,969,317	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**										**0**	**1,461,223,994**	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	16 UPTD			0	555,969,317	
3	**28**	**03**	1.05		**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**										**661,235,260**	**1,942,244,936**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Yang Difasilitasi Penanganan Karhutla., Jumlah Titik Api Yang Dikendalikan	100 titik api			102,612,200	481,020,942	
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**										**1,468,585,000**	**0**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah Sarpras	8 Paket			1,468,585,000	0	
3	**28**	**03**	1.06		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**										**0**	**56,678,095**	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Industri Pengolahan Bahan Baku HHBK yang di bina	11 Kelompok/Lokasi/Unit			0	56,678,095	
3	28	03	1.06	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IUIPHHBK yang difasilitasi perijinannya	1 Kelompok			0	0	
3	28	03	1.06	04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perizinan Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu yang diawasi	11 Lokasi			0	0	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**										**142,812,800**	**318,390,380**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah industri HHK yang dibina	11 Industri			142,812,800	262,201,610	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**										**0**	**318,390,380**	
3	28	03	1.07	02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah industri HHK yang dibina	11 Industri			0	262,201,610	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**										**142,812,800**	**318,390,380**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Jumlah IUPHHK yang difasilitasi perijinannya	1 Ijin			0	56,188,770	
3	**28**	**03**	1.07		**Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun**										**0**	**318,390,380**	
3	28	03	1.07	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IUPHHK yang difasilitasi perijinannya	1 Ijin			0	56,188,770	
3	**28**	**03**	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**										**0**	**129,844,545**	
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Sumber benih yang teridentifikasi	10 unit	Terindentifikasinya Sumber benih yang ada di NTB	10 unit	0	129,844,545	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**03**	1.09		**Perbenihan Tanaman Hutan**										**0**	**129,844,545**	
3	28	03	1.09	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sumber benih teridentifikasi	0 Unit			0	129,844,545	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**										**292,764,650**	**336,330,000**	
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi**										**111,798,740**	**133,632,380**	
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah Penangkar TSL non Appendix yang terbina	24 Penangkar			111,798,740	133,632,380	
3	**28**	**04**	1.02		**Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**133,632,380**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KEE, Cagar Biosfer, dan Geopark Yang Difasilitasi Pengembangannya	8 lokasi			0	133,632,380	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**										**180,965,910**	**202,697,620**	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi				cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE, Geopark, Cagar Biosfer yang ditingkatkan kapasitasnya	16 kelompok			60,959,520	75,362,030	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**										**0**	**202,697,620**	
3	28	04	1.03	05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok masyarakat pada KEE, Geopark, Cagar Biosfer yang ditingkatkan kapasitasnya	16 kelompok			0	75,362,030	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**										**180,965,910**	**202,697,620**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	30503 ha	Jumlah KEE, Cagar Biosfer yang difasilitasi Pengembangannya	8 Lokasi			120,006,390	127,335,590	
3	**28**	**04**	1.03		**Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam**										**0**	**202,697,620**	
3	28	04	1.03	06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penangkar TSL Apendix Yang Terbina	24 Penangkar			0	127,335,590	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**1,887,108,830**	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**0**	**1,887,108,830**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kapasitas penyuluh	437 orang			0	83,195,485	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**205,104,000**	**1,887,108,830**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Peningkatan kapasitas penyuluh	437 orang			42,800,000	83,195,485	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**0**	**1,887,108,830**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan kelas dari Blue ke Gold/Madya	30 kelompok			0	859,314,500	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**205,104,000**	**1,887,108,830**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Peningkatan kelas dari Blue ke Gold/Madya	30 kelompok			61,600,000	859,314,500	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**0**	**1,887,108,830**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	30 kelompok			0	944,598,845	
3	**28**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**										**205,104,000**	**1,887,108,830**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	30 kelompok			100,704,000	944,598,845	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**395,960,870**	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**395,960,870**	
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen RTnRHL KTA	1 Dokumen			0	197,935,470	
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**3,307,905,200**	**395,960,870**	
3	28	06	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS			Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	102,184,000	197,935,470	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	06	1.01	02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS			Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	79,500,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS			Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	3,126,221,200	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS			Terbangunnya bangunan sipil teknis KTA di NTB	30 Unit	0	198,025,400	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**395,960,870**	
3	28	06	1.01	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Monitoring bangunan Konservasi Tanah dan Air	16 Lokasi			0	198,025,400	
														TOTAL	**68,804,897,404**	**122,031,130,057**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**26,372,499,854**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,171,441,166**	
2	11	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Rencana Kerja UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Dokumen			0	8,905,600	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	5,000,000	5,000,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	7,000,000	7,000,000	
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada UPTD TPA Sampah Regional	1 orang	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	20,706,400	20,706,400	
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	0	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran pada UPTD TPA Sampah Regional	4 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Dokumen			0	14,372,815	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanannya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Lancarnya Kegiatan Surat menyurat UPTD TPA Sampah Regional	1 Tahun			0	4,715,000	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kelancaran penyelesaian pekerjaan dan arus Komunikasi dan Informasi pada UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB Tersusunnya Rencana Kerja UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	2 Rekening 1 Dokumen			0	178,020,000	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	0	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersediannya Dokumen Aset UPTD TPA Sampah Regional	1 Dokumen			0	5,602,444	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanannya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	1,600,000	10,000,000	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kelancaran Mekanisme Keuangan dan Barang Untuk UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	4 Orang			0	90,143,394	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kebersihan Kantor UPTD TPA Sampah Regional	2 orang			0	408,883,926	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya ATK dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran	15 Jenis			0	7,838,066	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Blanko Kedinasan untuk Operasional Perkantoran	1 Jenis			0	5,329,572	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Penerangan Kantor dan Operasional kelistrikan terpelihara	5 Jenis			0	10,294,282	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Update Informasi dan Meningkatnya Kinerja Karyawan UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Jenis			0	8,393,850	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Rapat dan Pertemuan yang diadakan UPTD TPA Sampah Regional Berjalan Lancar	200 OH			0	35,995,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pelayanan UPTD TPA Sampah Regional ke Jakarta/Provinsi Lainnya	1 Tahun			0	51,807,500	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional UPTD TPA Sampah Regional	3 Unit			0	218,094,855	
2	11	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dan Kelancaran Kegiatan UPTD TPA Sampah Regional,DISLHK Provinsi NTB	2 Paket			0	1,897,500	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dan Kelancaran Kegiatan UPTD TPA Sampah Regional,DISLHK Provinsi NTB Tersusunnya Rencana Kerja UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	2 Paket 1 Dokumen			0	92,335,512	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Meubelair UPTD TPA Sampah Regional,DISLHK Provinsi NTB Tersusunnya Rencana Kerja UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	6 Buah 1 Dokumen			0	39,968,250	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung UPTD TPA Sampah Regional, DISLHK Provinsi NTB Tersusunnya Rencana Kerja UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Paket 1 Dokumen			0	257,427,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Kendaraan/Operasional Dinas UPTD TPA Sampah Regional, DISLHK Provinsi NTB	3 Unit			0	87,734,075	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor UPTD TPA Sampah Regional, DISLHK Provinsi NTB	3 Unit			0	21,172,650	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselesaikannya Rehab Gedung Kantor di UPTD TPA Sampah Regional	1 Paket			0	588,920,175	
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanannya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Meningkatnya kapasitas SDM UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	33,589,200	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	Tersusunya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pada UPTD TPA Sampah	6 Buah	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	1,897,500	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga pada UPTD TPA Sampah Regional	19 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor pada UPTD TPA Sampah Regional	28 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan pada UPTD TPA Sampah Regional	3 Jenis	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	8,393,850	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu pada UPTD TPA Sampah Regional	130 OH	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	4,750,000	4,750,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	16,000,000	16,000,000	
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	0	
2	11	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	0	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	39,968,250	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	92,335,512	
2	11	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	0	
2	11	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Unit	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Paket	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pada UPTD TPA Sampah Regional	3 Rekening	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	112,836,000	112,836,000	
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor pada UPTD TPA Sampah Regional	49 orang	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	1,381,315,900	1,381,315,900	
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanaya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada PTD TPA Sampah Regional	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	36,881,800	36,881,800	
2	11	01	1.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar pada UPTD TPA Sampah Regional	2 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	290,650,000	290,650,000	
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada UPTD TPA Sampah Regional	6 Unit	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	4,609,900	4,609,900	
2	11	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	0	
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada UPTD TPA Sampah Regional	1 Laporan	0	257,427,500	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**										**3,975,000,000**	**4,000,000,000**	
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah tonase sampah yang didaur ulang (3R) di TPA dan TPST Jumlah tonase sampah yang diproses di TPA Regional dengan sanitary landfill dan pengolahan lain	8.760 Ton 142.952 Ton	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	3,460,284,500	3,485,284,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	11	1.01	02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Suka Makmur			Meningkatnya Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan Sarana Persampahan UPTD TPA Sampah Regional DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	14,052,589,875	
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan Sarana TPA/TPST Regional	1 Unit			0	8,454,004,533	
2	11	11	1.01	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah sarpras daur ulang (3R) yang terpelihara Jumlah sarpras pemrosesan akhir dan sarpras pengolahan yang terpelihara	1 Paket 1 Paket	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	111,897,300	111,897,300	
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	1 Unit	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	145,638,200	145,638,200	
2	11	11	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	1 Tahun			0	1,118,300,480	
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan sampah	70 %	Jumlah kerjasama usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	1 Kerjasama	Tertanganinya Sampah di TPA/TPST Regional	433 Ton	257,180,000	257,180,000	
2	11	11	1.01	06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama usaha pengelolaan sampah yang terbentuk	2 Kerjasama			0	576,163,800	
														TOTAL	**5,934,350,000**	**32,740,272,466**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**6,886,341,933**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,719,248,045**	
2	11	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Rencana Kerja Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	2 Dokumen			0	13,316,770	
2	11	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perecanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	10,000,000	10,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perecanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	5,000,000	5,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya koordinasi masalah Laboratorium Lingkungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB	1 Tahun			0	66,654,000	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perecanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	9,067,000	9,077,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perecanaan dan Evaluasi SKPD yang Akuntabilitas	4 Dokumen	7,000,000	7,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan	12 OB	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan	0	0	
2	11	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	
2	11	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Balai Laboratorium Lingkungan	18 Laporan	Tersedianya informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Balai Laboratorium	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Dokumen			0	9,003,925	
2	11	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	2,000,000	2,000,000	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Lancarnya Kegiatan Surat menyurat Balai Laboratorium Lingkungan	1 Tahun			0	3,788,100	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kelancaran penyelesaian pekerjaan dan arus Komunikasi dan Informasi pada Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	93,426,000	
2	11	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	2,000,000	2,000,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan Pengelolaan aset Daerah	1 Dokumen			0	6,644,930	
2	11	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	4,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Honorarium Penata Usahaan Barang milik Daerah	12 OB	Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah	4 Dokumen	0	9,850,000	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah Untuk Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	6 Orang			0	61,134,000	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan kebersihana kantor selama 1 Tahun untuk Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	3 Orang			0	218,450,665	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	1 Tahun			0	18,371,365	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya blanko Kedinasan untuk operasional Laboratorium	1 Tahun			0	13,018,230	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Komponen Elektronik dan Kelistrikan serta Instalasi Listrik Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	4,626,450	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Sampling dan Pengujian Kualitas Lingkungan Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Alat			0	669,120,140	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Surat Kabar Harian Lokal dan nasional	1 Tahun			0	0	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makan minum untuk rapat dan makan minum tamu Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	75,900,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsultasi dan Koordinasi Pelayanan Balai Laboratorium Lingkungan terlaksana	1 Tahun			0	120,139,350	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsultasi dan Koordinasi Pelayanan Balai Laboratorium Lingkungan terlaksana	1 Tahun			0	109,998,995	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pengadaan Meubelair Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Paket			0	69,074,520	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanaya kegiatan pemeliharaan Koendaraan Dinas Balai Laboratorium Lingkungan, DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	95,864,000	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya peralatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan, DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	27,025,000	
2	11	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Administrasi Pengelolaan Retribusi yang Akuntabilitas	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Meningkatnya kapasitas SDM Balai Laboratorium Lingkungan DISLHK Provinsi NTB	1 Tahun			0	43,691,605	
2	11	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Tersedianya Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	2 Laporan	2,955,600	2,955,600	
2	11	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai Tugas dan Fungsi	1 Kegiatan	Tersedianya Laporan Sistem Informasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	2 Laporan	1,500,000	1,500,000	
2	11	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	5,002,000	5,002,000	
2	11	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	669,120,140	
2	11	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Rumah Tangga	12 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	3,844,900	3,404,600	
2	11	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	16 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	6,624,300	4,999,300	
2	11	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	3,000,000	3,000,000	
2	11	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makan minum	150 Orang/Kali	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	10,026,000	75,900,000	
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	16,000,000	16,000,000	
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	0	
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Mebel	11 Buah	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	26,831,500	26,831,500	
2	11	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Laboratorium Lingkungan	2 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	140,550,273	140,550,273	
2	11	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	0	
2	11	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	54,945,220	54,945,220	
2	11	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat	7 Paket	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	2,975,000	2,975,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 rekening	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	73,294,000	73,294,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	480,000,000	218,450,665	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Kantor	6 Unit/Tahun	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	51,240,000	51,240,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan dan mesin Lainnya	31 Unit	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	63,500,000	63,500,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	Kegiatan Operasional Balai Laboratorium Lingkungan Berjalan Lancar	1 Tahun	37,000,000	37,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**5,008,474,388**	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sampel yang di Uji di Laboratorium Lingkungan	70 Sampel			0	4,681,946,378	
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Pengambilan sampel dan pengujian parameter Kualitas lingkungan	282 titik sampel	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	282 Titik Sampel	100,000,000	100,000,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 lokasi	Peningkatan Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	5 Parameter	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	282 Titik Sampel	578,794,299	502,483,230	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
2	11	03	1.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya informasi hasil uji kualitas lingkungan	1 Dokumen			0	326,528,010	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**										**0**	**158,619,500**	
2	11	06	1.01	03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup yang di Uji Kualitas Lingkungannya	14 Unit/Usaha			0	158,619,500	
														TOTAL	**1,725,150,092**	**9,012,420,461**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**108,073,550**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**108,073,550**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bagi PNS dan KTH Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	1 Kegiatan 1 Kegiatan			0	108,073,550	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,718,746,500**	**4,141,887,150**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,146,028,500**	**0**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA TAHURA	1 Tahun			10,000,000	0	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan TAHURA	1 Tahun			5,000,000	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA TAHURA	1 Tahun			10,000,000	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA Perubahan TAHURA	1 Tahun			7,000,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelaksanaan Aministrasi Tugas ASN yang Organisasi	12 Bulan			24,968,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Mekanisme Keuangan dan Barang yang Tertib administrasi	1 Tahun			0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan keuangan Akhir Tahun TAHURA	5 Dokumen			10,000,000	0	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan TAHURA	12 Bulan			5,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	4 Dokumen			2,000,000	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kegiatan Pengendalian BMD yang optimal dan terarah	1 Tahun			0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan BMD	5 Dokumen			5,000,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Aset Daerah yang Terpelihara	12 Bulan			1,600,000	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Retribusi Daerah	12 Eksemplar			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi ASN/PTT/Tenaga Kontrak	9 Paket			0	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Data Kepegawaian Tahura yang terintegrasi	1 Tahun			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Dilakukan	1 Kegiatan			3,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor	2 Paket			5,000,000	0	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			0	0	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Kantor Balai	1 Tahun			5,000,000	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persediaan Logistik Pendukung Kegiatan Operasional Kantor	12 Bulan			5,000,000	0	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Bahan Bacaan di Kantor Balai	12 Bulan			3,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu Ke Tahura	12 Bulan			2,782,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kinerja Karyawan	1 Tahun			16,000,000	0	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kendaraan Menunjang Operasional Kantor	9 Unit			0	0	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Meubel Kantor yang Memadai	5 Paket			0	0	
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Penunjang Operasional Kantor	27 Paket			0	0	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Sarana Bangunan Kantor Penunjang Kegiatan	10 Paket			0	0	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Sarpras Penunjang Bangunan Kantor	3 Paket			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Pelayanan Kantor Balai	1 Tahun			3,000,000	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kinerja Kedinasan Kantor Balai	12 Bulan			27,678,500	0	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kemanan Kantor	12 Bulan			970,000,000	0	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara	4 Unit			12,000,000	0	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	JumlahKendaraan Dinas yang Terpelihara	4 Unit			0	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap yang Terpelihara	2 Paket			4,000,000	0	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	3 Paket			0	0	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**										**572,718,000**	**4,141,887,150**	
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Peningkatan Kapasitas Tenaga Polhut	3.155 Ha 2 Orang			0	1,577,664,070	
3	28	04	1.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Peningkatan Kapasitas Tenaga Polhut	3.155 Ha 2 Orang			0	1,577,664,070	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	04	1.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA	1 Tahun			155,000,000	0	
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Lebah Sempage			Jumlah TSL endemik Gunung Rinjani yang terfasilitasi pengawetannya	1 Jenis			0	369,702,000	
3	28	04	1.01	03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah TSL endemik Gunung Rinjani yang terfasilitasi pengawetannya	1 Jenis			100,000,000	369,702,000	
3	28	04	1.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Terbentunya Koridor Jelajah bagi Satwa Liar	1 Paket			0	0	
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3.155 Ha 122 Ha			40,000,000	177,617,500	
3	28	04	1.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3.155 Ha 122 Ha			0	177,617,500	
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha			222,718,000	1,933,298,580	
3	28	04	1.01	06	Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya	3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha			0	1,933,298,580	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	04	1.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Terlaksananya Kejasama Menunjang Efektivitas Pengelolaan TAHURA	1 Dokumen			0	0	
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Jumlah izin kerjasama/kemitraan konservasi yang difasilitasi Jumlah KTH Mitra Konservasi Tahura yang dibentuk Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bagi PNS dan KTH Peningkatan Kapasitas Penyuluh Peningkatan Kapasitas Tenaga PEH	1 PKS 2 Kelompok 3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha 2 kali 4 Orang 1 Orang			0	83,605,000	
3	28	04	1.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah izin kerjasama/kemitraan konservasi yang difasilitasi Jumlah KTH Mitra Konservasi Tahura yang dibentuk Jumlah objek dan daya tarik wisata yang dikembangkan Luas Kawasan Hutan yang terlindungi Luas wilayah Tahura yang dipulihkan ekosistemnya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Bagi PNS dan KTH Peningkatan Kapasitas Penyuluh Peningkatan Kapasitas Tenaga PEH	1 PKS 2 Kelompok 3 ODTWA 3.155 Ha 122 Ha 2 kali 4 Orang 1 Orang			45,000,000	83,605,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	04	1.01	09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Lebah Sempage Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Lantan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Terkelolanya 4 Desa Penyangga sekitra TAHURA	4 Desa			0	0	
3	28	04	1.01	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan			Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dibuat dan Penataan Blok	3 Kegiatan			0	0	
3	28	04	1.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Narmada, Pakuan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Tersusunnya Perencanaannya yang Efektif	4 Dokumen			10,000,000	0	
														TOTAL	**1,718,746,500**	**8,391,847,850**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,982,770,870**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,982,770,870**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Dokumen RKA Tahun 2021	1 Dokumen			0	32,740,500	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Tahun			0	58,395,275	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	412 Buah			0	7,293,990	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sambalia Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	8 Rekning			0	32,430,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	1 Dokumen			0	11,749,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tim Pengada Barang/Jasa	4 Orang 1 Orang			0	129,222,050	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Orang			0	390,611,300	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	21 Jenis			0	82,193,030	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Cetak dan Penggandaan	30 Pak 1000 Lembar			0	5,426,850	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Labuhan Lombok Kab. Lombok Timur, Sambelia, Senanggalih Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	2 Jenis			0	14,274,950	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	440 OH			0	25,438,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	4 OT			0	212,492,745	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	2 Jenis			0	611,501,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	30 Buah			0	272,283,430	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	12 Buah			0	16,662,350	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	21 Unit			0	59,857,500	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	20 Unit			0	7,141,500	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	2 Paket			0	1,013,056,850	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**2,239,649,900**	**7,722,940,035**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,354,799,900**	**2,950,030,370**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	9,232,100	58,395,275	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Tahun	7,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	8,500,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	129,222,050	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	14,540,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen BMD Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen BMD Perangkat Daerah	1 Tahun	3,700,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen BMD Perangkat Daerah	1 Tahun	0	11,749,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan PAD	1 Dokumen			0	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bimbingan Teknis	1 Tahun			0	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	5,013,000	14,274,950	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4,193,500	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	20,142,000	82,193,030	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,249,300	5,426,850	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	11,470,000	25,438,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	20,000,000	212,492,745	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit			0	611,501,000	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	12 Buah			0	16,662,350	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penambahan Aset Tetap	4 Unit			0	272,283,430	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Resort yang Terbangun	1 Unit			0	1,013,056,850	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun	2,995,000	7,293,990	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun	30,195,000	32,430,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Urusan Perangkat Daerah	1 Tahun	1,160,000,000	390,611,300	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	35,240,000	59,857,500	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	5,520,000	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Lancarnya Operasional Perangkat Daerah	1 Tahun	13,810,000	7,141,500	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**4,335,090,025**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sambalia			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi; Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	500 Ha			0	270,178,125	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Penataan Batas Blok/Petak	300 Ha	Tersusunnya Penataan Batas Blok/Petak Kawasan	1 Tahun	60,000,000	270,178,125	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 Dokumen			0	166,999,435	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tersedianya Dokumen RPHJPd Tahun 2022	1 Dokumen	59,250,400	166,999,435	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sugian Kab. Lombok Timur, Suwela, Perigi			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	2 Lokasi			0	403,816,750	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sugian Kab. Lombok Timur, Wanasaba, Beriri Jarak Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksanya Fasilitasi Sarana Prasarana KTH	3 KTH	Jumlah Lokasi Pemanfaatan Hutan	1 Tahun	15,150,000	403,816,750	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Suwela, Sapit	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Jumlah Lokasi Pemanfaatan Hutan	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Aikmel, Kembang Kerang Kab. Lombok Timur, Sambelia, Labuhan Pandan Kab. Lombok Timur, Wanasaba, Beriri Jarak Kab. Lombok Timur, Sembalun, Bilok Petung			Luas lahan yang direhabilitasi	40 Ha			0	397,603,300	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terdapat Stock Bibit Untuk Ditanam	1 Tahun	0	397,603,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terdapat Stock Bibit Untuk Ditanam	1 Tahun	40,000,000	385,844,550	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Kab. Lombok Timur, Masbagik, Kesik Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela			Jumlah bibit dan bibit produktif yang disediakan	154000 Batang			0	385,844,550	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Sambelia, Sambalia Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh			Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	6 Titik			0	120,365,440	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Sambelia, Senanggalih Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	17500 Ha			0	2,213,477,450	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Rasio Kemampuan Perlindungan Hutan	1 Tahun	234,850,000	2,213,477,450	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Rasio Kemampuan Perlindungan Hutan	1 Tahun	175,000,000	120,365,440	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Suwela, Perigi Kab. Lombok Timur, Suwela, Mekar Sari	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksanya fasilitasi peningkatan SDM KTH	2 KTH	Adanya Fasilitasi Pengolahan HHBK	1 Tahun	40,789,100	189,342,325	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Sambelia, Belanting Kab. Lombok Timur, Suwela, Perigi Kab. Lombok Timur, Suwela, Mekar Sari			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	12 KTH			0	189,342,325	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Suwela, Sapit			Luas Budidaya HHBK Jahe Luas budidaya HHBK Kayu Putih	25 Ha 50 Ha			0	187,462,650	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Adanya Fasilitasi Pengolahan HHBK	1 Tahun	0	187,462,650	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**67,798,940**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Sambelia, Padak Guar Kab. Lombok Timur, Sembalun, Sembalun Bumbung			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	4 KTH			0	67,798,940	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %			Adanya KTH Baru Yang Terbentuk	1 Tahun	34,810,500	67,798,940	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**200,000,000**	**345,020,700**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	8 Paket			200,000,000	345,020,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Gunung Malang Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Sekaroh			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	8 Paket			0	345,020,700	
TOTAL															**2,239,649,900**	**15,453,620,570**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,101,687,157**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,101,687,157**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Komprehensif	2 Dokumen			0	5,768,400	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kabupaten/Kota	30 OT			0	21,084,813	
2	11	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Pengelola Asset Daerah yang tersusun	1 Dokumen			0	3,734,912	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbayarkannya Tagihan Listrik, Telepon dan Internet Kantor	10 Rekening			0	134,917,080	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah KPH	4 Orang			0	71,617,975	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga Kebersihan Kantor yang tersedia	2 Orang			0	82,777,552	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	16 Jenis			0	21,947,750	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	4 Jenis			0	16,534,815	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Komponen Elektronik dan Kelistrikan Kantor tersedia	10 Jenis			0	22,899,410	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbangunnya Gedung Kantor Resort	3 Unit			0	135,753,452	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis			0	9,860,560	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsumsi untuk Rapat dan Tamu Kedinasan	400 OH			0	15,295,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Jakarta/Provinsi Lain	10 OT			0	78,451,056	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Kendaraan Patroli untuk Operasional Pengamanan Hutan	2 Unit			0	528,018,590	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Mebeleur Kantor Resort	26 Unit			0	154,446,840	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terjaganya Bangunan Kantor Balai KPH Rinjani Barat	1 Unit			0	72,465,272	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terjaganya Kendaraan Dinas/Operasional Balai KPH Rinjani Barat	24 Unit			0	209,518,500	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Cakranegara, Sayang-sayang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terjaganya AC Kantor Balai KPH Rinjani Barat	10 Unit			0	18,949,700	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Pemenang, Pemenang Barat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung kantor Resort yang Terpelihara	1 Unit			0	497,645,480	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**3,729,486,330**	**11,108,703,992**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,359,373,120**	**2,080,602,344**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Komprehensif	2 Dokumen			2,299,550	5,768,400	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			4,999,800	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			9,997,400	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			5,475,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan dan Barang Daerah KPH	4 Orang			24,998,300	71,617,975	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Laporan			0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Pengelola Asset Daerah yang tersusun	1 Dokumen			3,998,800	3,734,912	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			4,992,400	0	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1,999,500	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			4,999,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			4,750,700	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,997,300	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan			2,998,900	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bintek	1 Laporan			2,995,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Komponen Elektronik dan Kelistrikan Kantor tersedia	10 Jenis			4,999,700	22,899,410	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis			2,996,000	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis kebutuhan alat tulis kantor tersedia	16 Jenis			4,993,670	21,947,750	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	4 Jenis			2,271,800	16,534,815	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis			2,925,000	9,860,560	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Konsumsi untuk Rapat dan Tamu Kedinasan	400 OH			4,715,000	15,295,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Jakarta/Provinsi Lain Perjalanan untuk Konsultasi, Sinkronisasi dan Koordinasi ke Kabupaten/Kota	10 OT 30 OT			11,721,200	78,451,056	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kendaraan Patroli untuk Operasional Pengamanan Hutan	2 Unit			0	528,018,590	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Mebeleur Kantor Resort	26 Unit			0	154,446,840	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbangunnya Gedung Kantor Resort	3 Unit			0	135,753,452	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya Bangunan Kantor Balai KPH Rinjani Barat	1 Unit			73,500,000	72,465,272	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat	500 Paket			2,989,100	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbayarkannya Tagihan Listrik, Telepon dan Internet Kantor	10 Rekening			121,000,000	134,917,080	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Kebersihan Kantor yang tersedia	2 Orang			2,012,500,000	82,777,552	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya Kendaraan Dinas/Operasional Balai KPH Rinjani Barat	24 Unit			33,240,000	209,518,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Peralatan dan Mesin	10 Unit			0	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terjaganya AC Kantor Balai KPH Rinjani Barat	10 Unit			4,020,000	18,949,700	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung kantor Resort yang Terpelihara	1 Unit			0	497,645,480	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**7,753,406,030**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	400 Ha			0	405,505,295	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	400 Ha			0	405,505,295	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 Dokumen			0	404,776,540	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 Dokumen			54,128,800	404,776,540	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	3 Lokasi			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	843,295,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	843,295,000	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan										382,400,000	10,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas lahan yang direhabilitasi	500 Ha			0	943,575,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Luas lahan yang direhabilitasi	50 Ha	0	943,575,000	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Luas lahan yang direhabilitasi	50 Ha	0	173,017,500	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyiapan bibit produktif	2000 Batang			0	173,017,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	5 Titik			0	0	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	31000 Ha			368,361,810	3,135,854,097	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	31000 Ha			0	3,135,854,097	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	11 Unit			0	1,326,173,848	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	11 Unit			242,293,700	1,326,173,848	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Luas budidaya HHBK	10 Ha			122,928,900	521,208,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	10 Ha			0	521,208,750	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**1,039,755,618**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	8 Kelompok			0	1,039,755,618	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	8 Kelompok			0	1,039,755,618	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**224,940,000**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	6 Unit			0	224,940,000	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	6 Unit			200,000,000	224,940,000	
														TOTAL	**3,729,486,330**	**22,228,492,797**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,985,756,155**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,985,756,155**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 dok			0	44,824,815	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	25 OT			0	32,002,315	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen laporan keuangan	1 dok			0	15,578,590	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan jasa sumber daya air, listrik dan internet	3 rekening			0	40,250,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen rekonsiliasi BMD	1 dok			0	15,578,590	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengurus barang pembantu daerah Jumlah tenaga aminstrasi keuangan Jumlah tenaga keamanan kantor	1 orang 4 orang 1 orang			0	93,560,780	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga kebersihan kantor	1 orang			0	141,539,010	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat tulis kantor	14 jenis			0	14,372,010	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3 jenis			0	4,146,900	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	9 jenis			0	3,032,550	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	AC Brangkas Infocus PC unit Printer	4 unit 1 unit 1 unit 6 unit 6 unit			0	174,605,880	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Makanan dan minuman rapat dan tamu	300 OH			0	46,805,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan provinsi	5 OT			0	71,157,400	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	12 unit 1 unit			0	870,101,500	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kursi Lemari Meja Kerja	25 unit 8 unit 25 unit			0	130,268,090	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pemeliharaan rutin kendaraan	3 unit			0	46,713,000	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit			0	4,542,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Pelambik	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pembangunan kantor resort	2 unit			0	1,236,733,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,896,836,700**	**6,407,813,800**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**922,550,000**	**2,742,230,660**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 dok			8,507,500	44,824,815	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKAP SKPD	1 dok			4,999,800	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dok			8,999,800	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPPA SKPD	1 dok			6,999,800	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 orang			24,999,500	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan keuangan	1 dok			9,999,900	15,522,815	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	4 dok			4,999,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dok			1,999,900	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen rekonsiliasi BMD	1 dok			9,999,900	15,578,590	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 dok			9,999,900	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dok			2,999,800	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 dok			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	1 kali			2,999,800	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	9 jenis			4,999,900	3,032,550	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Alat Kebersihan	6 Jenis			2,999,900	130,268,090	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor	14 jenis			5,000,000	14,372,010	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	5 jenis			2,999,800	4,146,900	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 jenis			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan minum	115 OH			4,749,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi/konsultasi/sinkronisasi ke luar daerah	2 kali			16,000,000	0	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan roda 2 yang diadakan Jumlah kendaraan roda 4 yang diadakan	12 unit 1 unit			0	870,101,500	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	40 unit			0	0	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	AC Brangkas Infocus PC unit Printer	4 unit 1 unit 1 unit 6 unit 6 unit			0	174,605,880	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pembangunan kantor resort	2 unit			0	1,236,733,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pengiriman surat menyurat	4 jenis			2,999,800	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan jasa sumber daya air, listrik dan internet	3 rekening			21,295,500	40,250,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 oang 1 orang 28 Orang			730,000,000	141,539,010	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan rutin kendaraan	2 unit			23,999,900	46,713,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit			4,000,000	4,542,500	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	2 unit			0	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**3,355,474,830**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan			Pembagian blok/petak pengelolaan hutan	6 Resort			0	69,774,525	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembagian blok/petak pengelolaan hutan	6 Resort			21,856,800	69,774,525	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 Dokumen			33,207,000	121,870,330	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 Dokumen			0	121,870,330	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	0 Lokasi			0	47,642,315	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin usaha pemanfaatan atau kerjasama di Hutan Produksi	2 Lokasi			17,196,200	47,642,315	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			koordinasi sinkronisasi izin usaha pemanfaatan atau kerjasama di hutan lindung	2 Lokasi			17,777,900	47,642,315	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Kuripan, Giri Sasak Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Aik Berik Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Karang Sidemen			Pengembangan sarpras wisata alam dan penyusunan design tapak	3 Lokasi			0	47,642,315	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengembangan Sarana dan Prasarana Wisata Alam	3 Lokasi			215,000,000	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas hutan rakyat yang dikembangkan	0 Ha			0	21,997,315	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas hutan rakyat yang dikembangkan	0 Ha			0	21,997,315	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Pelambik			Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	3 Unit			137,385,800	425,483,555	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan			Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	6 Unit			0	425,483,555	
3	28	03	1.04	05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	0 Unit			0	19,237,315	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	6 Resort			0	90,767,315	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Resort			254,835,400	2,162,028,865	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Sekotong, Sekotong Tengah Kab. Lombok Tengah, Pujut, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Praya Barat Daya, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Batukliang Utara, Semua Kelurahan			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Resort			0	2,162,028,865	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	6 Resort			33,738,500	90,767,315	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	108,222,820	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			JUMLAH UNIT PENGOLAHAN HHBK YANG DIFASILITASI	1 UNIT			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Pengembangan HHBK Kayu Putih	1 Jenis			0	260,045,475	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan			Pengembangan HHBK Kayu Putih	1 Jenis			0	260,045,475	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**399,093,815**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	399,093,815	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok PS	6 Kelompok			43,289,100	399,093,815	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**19,237,315**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	0 Unit			0	19,237,315	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Unit Pengaman Longsor	10 Paket			200,000,000	0	
														TOTAL	**1,896,836,700**	**13,167,375,915**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,146,039,360**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,146,039,360**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dok			0	75,771,660	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dok			0	14,347,860	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1 Tahun			0	3,772,000	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyelesaian Rekening Listrik dan Internet	7 Rek			0	39,385,430	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 Orang			0	227,954,150	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Bima, Bolo, Rato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki	1 Tahun			0	138,000,000	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan Jenis ATK	1 Tahun			0	15,453,010	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun			0	2,415,000	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	1 Tahun			0	0	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun			0	37,763,700	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Bima, Bolo, Rato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	120 Hari			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makan dan Minum	48 OH			0	0	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	1 Tahun			0	40,480,000	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 Buah			0	2,036,745,450	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumalh Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun			0	1,278,800	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Meubeler	1 Tahun			0	179,183,800	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	10 Unit			0	227,113,500	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kab. Bima, Monta, Simpasai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit			0	106,375,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,580,033,800**	**6,019,049,170**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,020,752,100**	**441,581,370**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	4 Dokument			9,910,000	0	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokument Perubahan RKA-SKPD	4 Dokument			4,958,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			9,502,000	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen			9,834,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			24,008,000	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	4 Dok			9,614,000	14,347,860	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	4 Laporan			6,873,000	0	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1 Tahun			1,958,000	3,772,000	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			9,954,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan			5,214,000	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan			2,968,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	4 Laporan			2,928,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	2 Laporan			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	5 Buah			4,999,500	0	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	5 Jenis			2,917,100	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan Jenis ATK	1 Tahun			6,846,500	15,453,010	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 tahun			2,000,400	2,415,000	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Jenis			2,060,000	0	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman tamu	80 OH			3,890,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	25 OT			15,853,200	40,480,000	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat menyurat	20 Paket			2,479,400	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	24 Rekening			23,900,000	0	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kerja Yang diperbaiki	1 Tahun			827,500,000	138,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	18 Unit			23,975,000	227,113,500	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	pemeliharaan peralatan dan mesin	6 unit			3,610,000	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**440,608,100**	**4,818,753,230**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi , luas blok/petak yang dilakukan tata batas	2 blok			0	249,843,135	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi , luas blok/petak yang dilakukan tata batas	2 blok			0	249,843,135	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 Dokumen			0	52,626,645	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						Jumalh Wisata Alam yang dikembangan di hutan produksi	1 Unit			0	91,775,750	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumalh Wisata Alam yang dikembangan di hutan produksi	1 Unit			0	91,775,750	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	0 Lokasi			0	91,502,050	
3	28	03	1.04	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 Dokumen			0	52,626,645	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						Luas Lahan yang di rehabilitasi	30 Ha			0	263,374,495	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Lahan yang di rehabilitasi	30 Ha			0	263,374,495	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						Luas Lahan yang di rehabilitasi	100 Ha			52,704,600	203,577,600	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Lahan yang di rehabilitasi	100 Ha			0	203,577,600	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	0 Titik			0	204,008,160	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Tipihut yang ditangani	100 Ha			0	2,924,759,580	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan						Jumlah Kasus Tipihut yang ditangani	100 Ha			259,280,000	2,924,759,580	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit pengelolaan HHBK yang difasilitasi	6 Unit			0	424,433,030	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah Unit pengelolaan HHBK yang difasilitasi	6 Unit			0	424,433,030	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Luas Budidaya HHBK	30 Ha			128,623,500	516,860,945	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Budidaya HHBK	30 Ha			0	516,860,945	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**208,589,070**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi pembentukannya	7 Kelompok			0	208,589,070	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial						Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi pembentukannya	7 Kelompok			118,673,600	208,589,070	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**550,125,500**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan KTA yang dibuat	5 Unit			0	550,125,500	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS						Jumlah Bangunan KTA yang dibuat	5 Unit			0	550,125,500	
														TOTAL	**1,580,033,800**	**14,855,062,440**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,008,402,295**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,008,402,295**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	2 dokumen			0	34,541,860	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke provinsi dan pusat	1 laporan			0	46,230,000	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen			0	13,812,420	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening listrik, internet, dan telpon yang ditangani	10 rekening			0	37,829,250	
2	11	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	90 unit			0	187,633,770	
2	11	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS yang terjaga kesehatan mental dan fisik	80 orang			0	231,495	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD yang yang tertangani	1 paket			0	506,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan keamanan kantor	72 OB			0	97,198,000	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	24 OB			0	105,515,260	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis ATK yang tersedia	1 paket			0	11,408,805	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan penggandaan yang terlaksana	1 paket			0	6,390,550	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik kantor yang tersedia	7 instalasi			0	8,384,100	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	2 jenis			0	6,865,500	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kedinasan	1 Tahun			0	18,998,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat kooedinasi dan konsultasi luar daerah	15 OT			0	107,400,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	9 unit			0	385,853,750	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubeler yang disediakan	90 unit			0	122,240,285	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 paket			0	0	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit			0	29,500,000	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 unit			0	1,380,000	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	18 unit			0	0	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor yang dibangun/direhab	9 unit			0	1,786,482,450	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**2,666,548,200**	**7,579,572,720**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,661,687,100**	**2,892,617,395**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang komprehensif	2 dokumen			0	34,541,860	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			10,000,000	0	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			5,000,000	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke provinsi dan pusat	1 laporan			10,000,000	46,230,000	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			10,000,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			25,000,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen			10,000,000	13,812,420	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dokumen			5,000,000	0	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			2,000,000	0	
3	28	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening listrik, internet, dan telpon yang ditangani	10 rekening			0	37,829,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	90 unit			0	187,633,770	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS yang terjaga kesehatan mental dan fisik	80 orang			0	231,495	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD yang yang tertangani	1 paket			10,000,000	506,000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			5,200,000	0	
3	28	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan keamanan kantor	72 OB			0	97,198,000	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan informasi pegawai	1 Laporan			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	1 Laporan			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik kantor yang tersedia Penambahan daya kantor	7 instalasi 5 unit			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan rumah tangga	20 Jenis			2,998,800	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	10 Jenis			5,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan yang terlaksana	1 paket			3,000,000	6,390,550	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	2 jenis			3,000,000	6,865,500	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman tamu	200 OH			4,750,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman untuk rapat dan tamu kedinasan Jumlah rapat kooedinasi dan konsultasi luar daerah	1 Tahun 15 OT			16,000,000	18,998,000	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	9 unit			0	385,853,750	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler yang disediakan	90 unit			0	122,240,285	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	10 Unit			4,020,000	0	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit			0	0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK yang tersedia	1 paket			3,000,000	11,408,805	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya sumber daya listrik dan komunikasi	1 tahun			36,219,000	0	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga kebersihan kantor yang tersedia	24 OB			1,437,500,000	105,515,260	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 unit			41,999,300	29,500,000	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	5 Unit			0	0	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 unit			0	1,380,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap	5 Unit			0	0	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rumah gedung kantor yang dibangun/direhab	9 unit			0	1,786,482,450	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**4,550,945,945**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	900 Ha			0	135,623,410	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	900 Ha			0	135,623,410	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 dokumen			0	110,975,345	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 dokumen			49,252,500	110,975,345	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	6 lokasi			0	60,753,350	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	6 lokasi			28,360,000	60,753,350	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	74,553,350	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	74,553,350	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas hutan rakyat yang dikembangkan	50 Ha			0	1,222,280,950	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas hutan rakyat yang dikembangkan	50 Ha			199,962,000	1,222,280,950	
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas pembangunan hutan kota	100 Ha			0	153,537,420	
3	28	03	1.04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas pembangunan hutan kota	100 Ha			0	153,537,420	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	2000000 Batang			0	399,154,420	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaskananya pembangunan penghijauan luar kawasan	9 resort			500,220,000	0	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	15 titik			0	153,640,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	100 kegiatan			0	1,991,272,380	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	100 kegiatan			41,331,600	1,991,272,380	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tertanganinya pencegahan kerusakan kawasan hutan	1 Tahun			235,845,000	0	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	15 titik			0	153,640,000	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	247,467,580	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	247,467,580	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Luas budidaya HHBK	90 Ha			0	1,687,740	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	90 Ha			0	1,687,740	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**408,857,890**	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Tersedianya tenaga bakti rimbawan	108 OB			0	305,440,000	
3	28	05	1.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya tenaga bakti rimbawan	108 OB			0	305,440,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	9 Kelompok			0	103,417,890	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	9 Kelompok			0	103,417,890	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**6,305,910**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Bima, Ambalawi, Kole Kab. Bima, Palibelo, Ntonggu Kota Bima, Asakota, Kolo			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	25 lokasi			0	6,305,910	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	25 lokasi			200,000,000	126,305,910	
														TOTAL	**2,666,548,200**	**15,554,084,760**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,827,884,575**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,827,884,575**	
2	11	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen	2 dokumen			0	28,607,722	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	1 tahun			0	10,285,715	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	1 tahun			0	1,656,575	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	1 tahun			0	45,919,500	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah BMD	1 tahun			0	26,765,376	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga administrasi keuangan jumlah tenaga keamanan kantor	1 tahun 1 tahun			0	257,018,192	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 tahun			0	520,072,751	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis ATK	1 tahun			0	36,022,290	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah cetak dan penggandaan	1 tahun			0	5,738,672	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah instalasi listrik	1 tahun			0	22,693,341	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah bahan bacaan	1 tahun			0	23,811,900	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah makanan dan minuman	1 tahun			0	56,112,870	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rapat	1 tahun			0	99,044,900	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	1 tahun			0	707,961,045	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya peralatan gedung kantor	1 tahun			0	325,910,012	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah meubeleur	7 jenis			0	139,577,064	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	1 tahun			0	72,003,800	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan gedung kantor	1 tahun			0	10,879,000	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar Kab. Sumbawa, Lenangguar, Telaga Kab. Sumbawa, Orong Telu, Mungkin	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	3 paket			0	437,803,850	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,896,615,550**	**8,258,348,759**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,397,687,350**	**2,827,884,575**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	9,880,200	28,607,722	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunny dokumen RKA perubahannSKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	4,330,700	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	1 tahun			0	87,650,585	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA SKPD	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	9,667,500	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA Perubahan	1 dok	Dokumen rencana kerja anggaran SKPD	2 dokumen	4,824,400	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa administrasi ASN	12 bulan	tersedianya jasa adminitrasi SKPD	12 bulan	23,860,500	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa penatausahaan keuangan	12 bulan	tersedianya jasa adminitrasi SKPD	12 bulan	0	257,018,192	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan akhir tahun SKPD	1 laporan	tersedianya jasa adminitrasi SKPD	12 bulan	9,808,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan bulanan/triwulanan/smeteran	12 bulan	tersedianya jasa adminitrasi SKPD	12 bulan	5,985,900	10,285,715	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	3,723,000	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	8,800,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya administrasi pengelolaan BMD	12 bulan	5,206,200	26,765,376	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			laporan kegiatan	12 dokumen	2,442,550	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah ASN	12 bulan	5,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah ASN	12 bulan	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	10,302,900	22,693,341	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	3,026,300	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	6,764,900	36,022,290	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	3,001,300	5,738,672	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah barang yang tersedia	12 bulan	0	23,811,900	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makan dan minum yang tersedia	12 bulan	jumlah barang yang tersedia	12 bulan	9,668,000	56,112,870	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rapat yang terselenggara	1 tahun	jumlah barang yang tersedia	12 bulan	17,432,400	99,044,900	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah aset yang terpelihara	12 bulan	111,375,000	707,961,045	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah aset yang terpelihara	12 bulan	0	139,577,064	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset tetap yang tersedia	2 unit	jumlah aset yang terpelihara	12 bulan	52,633,600	325,910,012	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah aset yang terpelihara	12 bulan	0	437,803,850	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan	2,939,000	1,656,575	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya jasa pelayanan kantor	12 bulan	tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan	23,625,000	45,919,500	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			tersedianya kebutuhan dasar SKPD	12 bulan	1,022,500,000	520,072,751	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan	12 bulan			37,050,000	72,003,800	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan yang terpelihara	12 bulan			3,840,000	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset tetap	12 bulan			0	10,879,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit			0	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**4,666,102,390**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi; Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	250 ha			0	351,937,708	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			dokumen tata blok Kesatuan pengelolaan hutan	250 ha	0	351,937,708	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 dokumen			0	99,181,612	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 dokumen			0	99,181,612	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 tahun			0	0	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 tahun			0	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Jumlah bibit yang tersalur	55000 bibit	jumlah bibit yang tersalurkan	55000 bibit	121,462,800	264,937,172	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lenangguar, Telaga Kab. Sumbawa, Orong Telu, Mungkin			luas yang rehabilitasi	3 paket			0	264,937,172	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan			jumlah bibit produktif yang disediakan	1 paket			0	281,389,636	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			jumlah bibit yang tersalurkan	55000 bibit	0	281,389,636	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 tahun			0	688,247,412	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	presentase kawasan yang terlindungi	4 RPH	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	172,484,800	2,776,784,388	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	1 tahun			0	2,776,784,388	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.05	03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	jumlah jenis hasil hutan yang terlindungi	4 rph	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	20,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	jumlah rapat yang terselenggara	1 tahun	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	43,600,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	presentase kawasan yang terlindungi dari kebakaran hutan dan lahan	4 RPH	Presentase kawasan hutan yang terlindungi	4 RPH	40,182,200	688,247,412	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	12 bulan			0	203,624,462	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 tahun			0	203,624,462	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**101,198,400**	**411,351,906**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Jumlah desa sekitar hutan yang diberdayakan	1 tahun	jumlah kelompok yang diberdayakan	3 kecamatan	101,198,400	411,351,906	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	5 Kelompok			0	411,351,906	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**265,359,303**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Batu Lanteh, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lenangguar, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Orong Telu, Semua Kelurahan			jumlah bangunan koservasi tanah dan air yang dibuat	3 paket			0	265,359,303	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					jumlah bangunan koservasi tanah dan air yang dibuat	3 paket			0	265,359,303	
														TOTAL	**1,896,615,550**	**16,429,046,933**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**2,446,356,590**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,446,356,590**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Tahun			0	0	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1 Tahun			0	2,829,000	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	1 Tahun			0	22,321,500	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Admininstrasi Keuangan	1 Tahun			0	74,015,610	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 Tahun			0	594,534,590	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	1 Tahun			0	17,002,520	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Tahun			0	5,961,140	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	1 Tahun			0	8,530,355	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	1 Tahun			0	1,679,000	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	1 Tahun			0	24,242,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	1 Tahun			0	88,143,475	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit	4 Unit			0	1,408,553,350	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	24 Unit			0	154,144,275	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3 Unit			0	44,399,775	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,936,745,900**	**6,550,799,696**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,460,754,800**	**2,474,323,901**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	9,952,000	1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,839,500	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3 Kelompok	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	10,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Tersusunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	25,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	0	74,015,610	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dokumen	Tersusunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	10,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Dokumen	Tersusunya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Dokumen	4,991,500	27,967,310	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Dokumen			0	27,967,310	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan BMD	1 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	2,533,200	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselesaikannya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	2 Dokumen	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	10,016,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penataausahaan BMD	1 Tahun	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	3 Dokumen	5,199,800	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Tersusunnya laporan Administrasi Pendapatan Daerah	1 Dokumen	2,989,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran pelaksanaan tupoksi kedinasan	12 bulan	Administrasi Kepegawaian yang memadai	1 kegiatan	2,839,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya kinerja kedinasan	1 Tahun	Administrasi Kepegawaian yang memadai	1 kegiatan	2,654,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	5,146,400	8,530,355	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	3,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	5,007,700	17,002,520	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	2,295,000	5,961,140	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	12 bulan	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	2,990,700	1,679,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	4,640,000	24,242,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 rekening	16,000,000	88,143,475	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	1 Unit			0	0	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	1 Buah			0	0	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	4 Unit			0	1,408,553,350	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	3 Unit			0	44,399,775	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening	3,000,000	2,829,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, SDA, dan listrik	1 rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening	15,300,000	22,321,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 rekening	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 rekening	1,267,500,000	594,534,590	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Dokumen	31,862,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Dokumen	0	154,144,275	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Empang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Aset tetap	1 Tahun	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3,999,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**455,991,100**	**3,420,186,412**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi; Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	300 Ha			0	115,324,760	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi; Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	300 Ha			0	115,324,760	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	2 Dokumen			0	26,485,880	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersusunnya Rencana Pengelolaan KPH	1 Dokumen	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Dokumen	20,000,000	26,485,880	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi						Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 Lokasi			0	41,872,880	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 Lokasi			0	41,872,880	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas lahan yang direhabilitasi	30 Ha			0	249,036,870	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersedianya HR di luar kawasan	1 kegiatan	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Kelompok	10,000,000	249,036,870	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Meningkatnya Pembangunan Penghijaun Lingkungan	4000 batang	Terlaksananya Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Kelompok	50,000,000	265,789,150	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	50000 Batang			0	265,789,150	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 Tahun			0	68,539,195	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya kegiatan pengamanan kawasan hutan	1 Tahun	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	219,999,700	2,126,487,195	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	1 Tahun			0	2,126,487,195	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terkedalinya kebakaran hutan dan lahan	20 Titik	Terlaksananya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	155,991,400	68,539,195	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	2 Unit			0	155,547,816	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	2 Unit			0	155,547,816	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya						Luas budidaya HHBK	20640 Batang			0	371,102,666	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	20640 Batang			0	371,102,666	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**68,228,833**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	4 Kelompok			0	68,228,833	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Fasilitas peningkatan KTH	1 Tahun	Berlangsungnya Kegiatan Perhutanan Sosial	5 Kelompok	20,000,000	68,228,833	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**560,093,240**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	2 Unit			0	560,093,240	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS	Pembangunan KTA berupa Gully Plug	2 Paket	Terselesaikannya Bangunan KTA	60 Unit	0	560,093,240	
														TOTAL	**1,936,745,900**	**13,045,664,771**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,137,483,475**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,137,483,475**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang komperensif	2 Dokumen			0	23,675,855	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		20 OT			0	192,586,475	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Valid dan Akuntabel	1 Dokumen			0	12,248,305	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	12 bulan			0	2,482,160	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyelesaian pembayaran rekening listrik, internet dan air	12 Bulan			0	32,890,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	laporan pengelolaan aset daerah yang tersusun	1 Dokumen			0	0	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	4 Orang			0	245,456,000	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga Kebersihan Kantor Tersedia	10 orang			0	143,656,850	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedia	29 Jenis			0	25,969,645	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	3 Jenis			0	6,210,000	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis			0	6,406,075	
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	6 Jenis			0	36,896,025	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Surat Kabar Yang Tersedia	1 Jenis			0	8,786,000	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsumsi untuk rapat, Tamu dan Harian Pegawai	460 Kotak			0	26,680,000	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	10 Unit			0	61,076,385	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kendaraan Dinas yang terpelihara	16 unit			0	200,755,500	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang di Bangun	6 Unit			0	2,111,708,200	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,626,499,800**	**2,893,537,640**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,038,742,800**	**475,560,290**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	2,886,600	23,675,855	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen perubahan RKA SKPD	1 Tahun	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	1,071,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	1,295,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	4 Dokumen	1,295,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	746,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penatausahan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	5,637,000	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	1,927,400	12,248,305	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan keuangan SKPD	18 Dokumen	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18 Laporan	15,362,300	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	1 Laporan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	832,000	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada SKPD	1 Tahun	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	510,000	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan rekonsiliasi barang milik daerah SKPD	2 Laporan	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	6,500,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	1 Tahun	Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersedia	3 Laporan	601,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Tahun	Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	1 Tahun	396,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	2 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	534,000	9,161,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	5,586,000	143,656,850	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Logistik Kantor yang tersedia	24 item	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	19,717,600	25,969,645	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Foto copy Penjilidan Dokumen Peta yang di cetak	975 lembar 10 buku 15 lembar	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	3,790,000	6,210,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya makanan dan minuman tamu	115 Orang/Kali	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	4,715,000	26,680,000	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kegiatan koordinasi dan konsultasi SKPD yang terlaksana	10 OT	Tersedianya barang-barang pendukung administrasi umum perangkat daerah	36 Item	66,985,100	192,586,475	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraaan dinas yang tersedia	1 Unit	Kendaraan dinas yang tersedia	1 Unit	0	0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Surat keluar yang tersedia	100 Dokumen	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	2,985,800	2,482,160	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayar	3 Rekening	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	16,200,000	32,890,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia	2 Orang	Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	830,000,000	0	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	43,620,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	5,550,000	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**5,433,398,617**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	0 Ha			0	276,625,945	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Dokumen RPHJPd KPH yang tersedia	1 Dokumen	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	0	
3	28	03	1.03	02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data informasi wilayah usaha pada Hutan Lindung	4 Ijin/Usaha			0	0	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Demplot HHBK yang yang dikembangkan pada wilayah KPH Lokasi WA yang dikembangkan	3 Lokasi 1 Lokasi	Demplot HHBK pada wilayah KPH yang dikembangkan	3 Lokasi	256,314,600	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	600 Ha			0	1,728,057,217	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	0 Batang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	0 Titik			0	69,413,080	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Kegiatan Pencegahan dan Perlindungan Hutan yang terlaksana	48 Lokasi	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada wilayah KPH yang terlaksana	48 Lokasi	307,771,400	2,098,254,350	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	26 lokasi			0	2,098,254,350	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Pengembangan Budidaya HHBK Pada Wilayah KPH	35 Ha	Budidaya HHBK pada wilayah kerja KPH	35 Ha	0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	0 Ha			0	1,261,048,025	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**319,723,000**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	319,723,000	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	KTH yang difasilitasi	3 Kelompok	KTH yang difasilitasi program Perhutanan Sosial	3 Kelompok	23,671,000	319,723,000	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**399,992,310**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbangunnya Bangunan Konservasi Tanah dan Air Pada Wilayah BKPH Ampang Riwo	6 unit			0	399,992,310	
TOTAL															**1,626,499,800**	**12,184,135,042**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**740,111,480**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**740,111,480**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	31,733,560	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	22 Dokumen			0	74,998,400	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Dokumen			0	15,760,060	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	1 Rekening			0	20,700,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	176 Unit			0	20,161,800	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	4 Orang			0	84,484,405	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	1 Orang 1 Orang 1 Orang			0	118,255,650	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	16 Jenis			0	10,236,035	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	2 Jenis			0	5,091,740	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	20 Jenis			0	12,005,195	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis			0	2,369,000	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	300 OH			0	13,340,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	4 OT			0	116,176,450	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	1 Unit			0	42,716,750	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	18 Unit			0	156,331,000	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	14 Unit			0	12,168,840	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	4 Unit			0	3,582,595	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,658,715,700**	**3,686,700,285**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,041,355,500**	**623,935,030**	
3	28	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen RKA	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	0	74,998,400	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya dokumen RKA pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	9,995,800	31,733,560	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA Perubahan pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	5,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	8,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Dokumen DPA Perubahan pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran	2 Dokumen	10,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terverifikasinya Dokumen SPP/ SPM pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	32,960,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	9,998,000	0	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	4,495,000	15,760,060	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya pengelolaan keuangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	84,484,405	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKBMD SKPD	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	1,955,000	20,161,800	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Laporan Rekonsiliasi BMD SKPD	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	8,246,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya dokumen BMD SKPD pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	7,000,000	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Laporan Pendapatan Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 dokumen	Terlaksananya pengelolaan Pendapatan Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	2,995,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen istalasi listrik/ penerangan kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	4,878,000	12,005,195	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan rumah tangga pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,131,200	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kebutuhan logistik kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	5,000,000	10,236,035	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,000,000	5,091,740	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	2,955,000	2,369,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya fasilitasi kunjungan tamu pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	4,756,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dukungan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD pada balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya kebutuhan umum pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	16,000,000	13,340,000	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	42,716,750	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	12,168,840	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa surat menyurat pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasillitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,000,000	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun	Terfasillitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	16,080,000	20,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasillitasinya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	830,000,000	118,255,650	
3	28	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas/ Operasional pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	45,000,000	156,331,000	
3	28	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	3,910,500	3,582,595	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**617,360,200**	**2,859,333,475**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terlaksananya tahapan pengelolaan KPH pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	226,952,385	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	0 Ha			0	228,471,650	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terlaksananya tahapan pengelolaan KPH pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	228,471,650	
3	28	03	1.01	03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH pada Balai KPH Batulanteh a	1 Tahun	Terlaksananya tahapan pengelolaan KPH pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	226,952,385	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terfasilitasinya pemanfaatan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	263,577,815	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.03	08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terfasilitasinya pemanfaatan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	133,892,430	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Unter Iwes, Pungka	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan pada Balai KPH Batulanteh	1 Lokasi	Terfasilitasinya pemanfaatan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	45,000,000	45,000,000	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas hutan rakyat yang dikembangkan	0 Ha			0	0	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya penanaman lahan kritis di luar kawasan hutan	1 Tahun	Terfasilitasinya rehabilitasi hutan dan lahan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	220,000,000	324,524,825	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	88000 Bibit			0	324,524,825	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Karang Dima Kab. Sumbawa, Rhee, Rhee Kab. Sumbawa, Rhee, Sampe Kab. Sumbawa, Rhee, Luk Kab. Sumbawa, Unter Iwes, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Moyo Utara, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	4 RPH			0	186,753,560	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	30 Kegiatan			0	1,450,160,810	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pelaksanaan perlindungan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	252,370,600	1,450,160,810	
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Terfasilitasinya pelaksanaan perlindungan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	0	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terfasilitasinya koordinasi, singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	Terfasilitasinya pelaksanaan perlindungan hutan pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	99,989,600	186,753,560	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	1 Produk			0	133,892,430	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	0 Ha			0	0	
3	28	03	1.09	02	Sertifikasi Sumber Benih	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya sertifikasi sumber benih lingkup Balai KPH Batulanteh	3 Lokasi			0	0	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**263,577,815**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	263,577,815	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**203,431,780**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	3 Paket			0	203,431,780	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS			Terfasilitasinya pelaksanaan pengelolaan DAS pada Balai KPH Batulanteh	1 Tahun	0	203,431,780	
														TOTAL	**1,658,715,700**	**7,444,577,020**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,356,657,912**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,356,657,912**	
2	11	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya dokumen DPPA tahun 2021 Tersusunya Dokumen RKA Tahun 2021	1 Dokumen 1 Dokumen			0	54,877,977	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunya Dokumen Laporan Keungan Akhir Tahun 2021	1 Dokumen			0	7,654,388	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat perkantoran	410 Buah			0	4,244,075	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselesaikannya pembayaran rekening telepon, listrik, dan jasa internet BKPH Brang Beh	1 Tahun			0	47,817,000	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah	1 dokumen			0	50,557,116	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya penyediaan pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah dan tersedianya jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor	4 Orang 1 Orang			0	222,916,149	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya Peralatan dan petugas kebersihan kantor	1 Orang 12 Jenis			0	812,513,881	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	21 Jenis			0	74,658,908	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya surat dinas dan kelengkapan administrasi perkantoran	5 Jenis			0	9,498,885	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	9 Jenis			0	28,325,121	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Surat kabar harian lokasl	1 Tahun			0	8,786,000	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya konsumsi rapat dan tamu kedinasan	548 OH			0	45,590,600	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya dukungan anggaran untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lain	1 Tahun			0	116,460,960	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kendaraan dinas dan sarana mobilisasi	3 Jenis			0	702,260,955	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan elektronik untuk KPH dan RPH	13 Jenis			0	443,314,569	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan mebeleur	10 Jenis			0	221,510,228	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	9 Unit			0	81,643,100	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	28 Unit			0	25,654,200	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pembangunan gedung resort Brang Lamar Terlaksananya pembangunan pagar kantor RPH Lunyuk Terlaksananya pembangunan pagar kantor RPH Plara Terlaksananya renovasi gedung resort Lunyuk	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket			0	398,373,800	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,495,201,100**	**7,514,123,547**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,001,131,200**	**3,356,657,912**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA dan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,581,000	54,877,977	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	0	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	9,499,800	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terciptanya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Terciptanya	1 tahun			0	103,919,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,000,000	0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Keuangan	1 Orang	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	25,017,200	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	0	222,916,149	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	9,999,000	0	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksana dan Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	18 Dokumen	Cakupan pelayanan Administrasi Keuangan	1 Tahun	5,000,000	7,654,388	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	2,000,600	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekon Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah	2 Kali 2 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	10,261,400	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Data dan Tersusunnya Daftar Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Manajemen Aset dan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	5,183,000	50,557,116	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan pengelolaan retribusi daerah	1 Dokumen			0	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksana dan Tersedianya Data Informasi Kepegawaian	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1 Tahun	0	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4,959,900	28,325,121	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga dan Alat Kebersihan Kantor	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,095,200	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Tulis Kantor	21 Jenis	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	6,228,800	74,658,908	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,000,300	9,498,885	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1,456,800	8,786,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	80 OH	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4,640,000	45,590,600	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	16,000,000	116,460,960	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas sarana mobilisasi	2 Unit	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	74,250,000	702,260,955	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	0	221,510,228	
3	28	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Mesin Komputer	5 Unit	Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	43,628,200	0	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	0	443,314,569	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 Unit	0	398,373,800	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	3,300,000	4,244,075	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselesaikannya pembayaran rekening listrik dan jasa internet	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	15,300,000	47,817,000	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Tersedianya Jasa Tenaga Pengamanan Hutan	1 Orang 24 Orang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	690,000,000	812,513,881	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	6 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	39,050,000	81,643,100	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	8 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	5,680,000	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	0	25,654,200	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	0	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**433,497,600**	**3,472,353,480**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	300 Ha			0	386,755,925	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	200 Ha			0	386,755,925	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJPd) Tersedianya Data Potensi HHBK dan Jasling	1 Dokumen 1 Dokumen	Rencana Pengelolaan Hutan	2 Dokumen	44,054,200	88,755,252	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 Dokumen			0	88,755,252	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Bibit	1 Lokasi	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	3 Lokasi	75,117,400	345,377,890	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Terbangunnya Hutan Rakyat	4 Lokasi			0	345,377,890	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Daerah Tangkapan Mata Air	2 Lokasi	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan	3 Lokasi	70,256,100	80,527,623	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Rehabilitasi Daerah Tangkapan Mata Air Tersedianya bibit untuk bakti sosial	2 Lokasi 4000 Batang			0	80,527,623	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	9 Titik			0	427,311,560	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan patroli pengamanan hutan Terlaksanya penyidikan dan pemberkasan tindak pidana kehutanan	10000 Ha 5 Berkas			0	1,918,468,237	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1 Tahun	Pelaksanaan perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	208,758,400	1,918,468,237	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	Pelaksanaan perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1 Tahun	35,311,500	427,311,560	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	9 Unit			0	91,995,480	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Terlaksanakannya Penanaman Demplot Kayu Putih	10 Ha	0	91,995,480	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terlaksananya penanaman kayu putih	10 Ha	Terlaksanakannya Penanaman Demplot Kayu Putih	10 Ha	0	133,161,513	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	20 Ha			0	133,161,513	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**267,025,607**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Terfasilitasinya pembentukan kelompok perhutanan sosial	1 Tahun			0	267,025,607	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Terlaksananya Pendampingan dan Fasilitasi KTH dalam Program Perhutanan Sosial	12 KTH	Peningkatan Klasfikasi Kemampuan KTH	12 KTH	33,133,800	267,025,607	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**314,166,798**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan			Terlaksananya bangunan KTA berupa bangunan Dam Penahan Terlaksananya bangunan KTA berupa bangunan Gully Plug	3 Unit 4 Unit			0	314,166,798	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa, Lunyuk, Semua Kelurahan	peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS	Terbangunnya Gully Plug	2 Unit	Terbangunnya Gully Plug	2 Unit	27,438,500	314,166,798	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
														TOTAL	**1,495,201,100**	**14,924,327,344**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,597,677,020**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,597,677,020**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	59,620,025	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	30 laporan			0	50,547,790	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	1 dokumen			0	37,855,700	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	300 surat			0	3,893,440	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	10 rekening			0	36,023,750	
2	11	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah ASN	2 kegiatan			0	11,819,815	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah pengelola aset	2 orang			0	23,234,140	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga administrasi keuangan	4 orang			0	39,748,600	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga kebersihan kantor	3 orang			0	213,785,230	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis atk	15 jenis			0	12,590,315	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah cetak dan penggandaan	4000 lembar			0	6,755,100	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah instalasi listrik	10 jenis			0	6,382,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 unit			0	223,457,075	
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah bahan bacaan	2 jenis			0	8,510,000	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah makanan dan minuman	300 OH			0	12,424,370	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rapat	10 rapat			0	94,883,740	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan yag tersedia	5 unit			0	374,092,125	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah mebeleur yang tersedia	15 set			0	95,197,805	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan yang terpelihara	15 unit			0	121,198,500	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	15 unit			0	17,917,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi	3 unit			0	2,147,740,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,408,972,500**	**1,860,646,525**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**983,540,600**	**383,218,870**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen			12,290,000	59,620,025	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen			5,300,000	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen DPA-SKPD	5 dokumen			9,858,500	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 dokumen			9,800,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	15 dokumen			25,259,000	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					9,544,000	0	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan	1 laporan			4,900,000	0	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen			1,820,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan			9,320,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pengelola aset	2 orang			1,500,000	23,234,140	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan			2,820,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan informasi pegawai	5 Laporan			2,780,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	5 Laporan			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah instalasi listrik	10 jenis			4,994,600	6,382,500	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis atk	15 jenis			3,009,900	12,590,315	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	20 jenis			5,065,700	0	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah cetak dan penggandaan	4000 lembar			2,985,900	6,755,100	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	2 jenis			2,980,000	8,510,000	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makanan dan minuman tamu	240 OH			4,466,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah makanan dan minuman	300 OH			15,897,000	12,424,370	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ASN jumlah surat keluar	2 kegiatan 300 surat			1,536,000	3,893,440	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rekening	10 rekening			22,554,000	36,023,750	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga kebersihan kantor	3 orang			772,500,000	213,785,230	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung Kantor	30 unit			46,860,000	0	
3	28	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,500,000	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap	6 unit			0	0	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**425,431,900**	**1,141,238,150**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	0 Ha			0	56,536,300	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	0 Ha			0	56,536,300	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	47,272,705	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	47,272,705	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	519,329,535	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	3 Lokasi			0	519,329,535	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas hutan rakyat yang dikembangkan	0 Ha			0	70,939,475	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas hutan rakyat yang dikembangkan	0 Ha			0	70,939,475	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bibit produktif yang disediakan	100000 Batang			99,995,400	162,437,155	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	100000 Batang			0	162,437,155	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	5 Titik			0	66,061,750	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus Tipihut yang ditangani	100 Ha			170,000,000	0	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	23 Kegiatan			0	1,026,306,000	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5 resort			72,024,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	5 Titik			83,411,600	66,061,750	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5 resort			0	0	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	22,035,725	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	22,035,725	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Luas budidaya HHBK	0 Ha			0	196,625,505	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	0 Ha			0	196,625,505	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**48,842,800**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	48,842,800	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	48,842,800	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**287,346,705**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	4 unit			0	287,346,705	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	4 unit			0	287,346,705	
TOTAL															**1,408,972,500**	**7,962,057,200**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,744,679,680**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,744,679,680**	
2	11	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	12 Bulan			0	0	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	12 Bulan			0	0	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	12 Bulan			0	6,394,000	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	12 Bulan			0	42,866,250	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	12 Bulan			0	197,662,575	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan kerja yang di perbaiki	12 Bulan			0	70,728,910	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	12 Bulan			0	23,731,975	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan Penggandaan	12 Bulan			0	7,954,550	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	12 Bulan			0	4,563,200	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Belo	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	12 Bulan			0	21,482,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	12 Bulan			0	422,197,200	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	4 Bulan			0	575,000,000	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor yang di rebalitasi	4 Bulan			0	23,555,220	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	4 Bulan			0	54,788,300	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung Kantor	12 Bulan			0	18,434,500	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kedaraan	12 Bulan			0	96,128,500	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Sekongkang Bawah Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Tatar	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Pagar Keliling dan Gedung Barang Bukti pada BKPH Sejorong Mataiyang	12 Bulan			0	2,179,192,500	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,671,242,800**	**5,803,338,430**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,136,085,600**	**1,618,487,180**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	9,999,000	4,000,000	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	5,046,000	4,000,000	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	10,022,000	4,000,000	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Dokumen RKA SKPD	10 Dok	10,045,000	4,000,000	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok	25,803,800	197,662,575	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok	9,720,000	10,000,000	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan keuangan Balai KPH Sejorong Mataiyang	15 Dok	4,945,000	5,000,000	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	1,999,000	2,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	9,905,000	10,000,000	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya laporan kebutuhan barang Balai KPH Sejorong Mataiyang	5 Buku	10,295,000	10,000,000	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	4,979,000	4,563,200	
3	28	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	4,264,700	23,555,220	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	15,646,100	23,731,975	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	4,209,000	7,954,550	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	4,756,000	21,482,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Pengadministrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	42,000,000	422,197,200	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	4 Bulan			0	575,000,000	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	4 Bulan			0	54,788,300	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	3,001,000	6,394,000	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	31,500,000	42,866,250	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya sarana Administrasi Umum Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	885,000,000	70,728,910	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	39,050,000	96,128,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	1 Tahun	3,900,000	18,434,500	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**535,157,200**	**4,098,042,695**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Tersedianya penataan blok kerja pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Blok	Terlaksananya pembagian Blok Pengelolaan kawasan hutan pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	2 Blok	199,667,700	199,667,700	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penataan batas pada unit pengelolaan hutan yang difasilitasi Luas blok/petak yang di lakukan tata batas	1 Resort 200 Ha			0	127,550,870	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	391,044,275	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	0 Dokumen			0	391,044,275	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	0 Lokasi			0	153,793,180	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	0 Lokasi			0	153,793,180	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Sekongkang Atas			Jumlah obyek wisata alam yang di kembangakan di HL	1 Dokumen			0	0	
3	28	03	1.03	09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Semua Kelurahan							0	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tertanamnya bibit tanaman MPTS bagi masyarakat sekitar kawasan hutan	4 Jenis	0	106,136,145	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru			Luas lahan yang di rehabilitasi	25000 bibit			0	106,136,145	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %			Tertanamnya bibit tanaman MPTS bagi masyarakat sekitar kawasan hutan	4 Jenis	158,540,000	101,282,225	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Sekongkang Bawah Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Tatar Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Mataiyang			Jumlah bibit produktif yang disediakan	5325 bibit			0	101,282,225	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Mataiyang			Jumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring Jumlah titik karhutlah yang dicegah atau ditangani	4 Resort 8 lokasi			0	60,783,250	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Terselesaikannya kasus illegal logging pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	10 berkas	176,949,500	1,865,901,335	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	40 Kegiatan			0	1,865,901,335	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %			Terselesaikannya kasus illegal logging pada Balai KPH Sejorong Mataiyang	10 berkas	0	60,783,250	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengelolaan HHBK yang difasilitasi	2 Unit			0	25,249,745	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Tongo Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Mujahiddin			Jumlah unit pengelolaan HHBK yang difasilitasi	2 Unit			0	25,249,745	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejorong Mataiyang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Belo Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Tatar Kab. Sumbawa Barat, Maluk, Maluk			Luas budidaya HHBK	82 Ha			0	1,194,184,840	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Luas budidaya HHBK	82 Ha			0	1,194,184,840	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**59,444,305**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Jereweh, Beru Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Sekongkang Bawah Kab. Sumbawa Barat, Sekongkang, Tatar Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Mataiyang			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	4 Klp			0	59,444,305	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	4 Klp			0	59,444,305	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**27,364,250**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan konservasi Tanah dan Air yang di buat	4 Unit			0	27,364,250	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Lalar Liang Kab. Sumbawa Barat, Brang Ene, Kalimantong			Jumlah bangunan konservasi Tanah dan Air yang di buat	4 Unit			0	27,364,250	
														TOTAL	**1,671,242,800**	**13,660,752,530**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,058,418,560**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,058,418,560**	
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dok			0	54,843,500	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	30 OT			0	208,258,330	
2	11	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	1 dok			0	26,582,135	
2	11	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dok			0	35,653,450	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 dok			0	35,218,175	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	12 th			0	2,292,755	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	18 rek			0	58,822,500	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	1 Tahun			0	42,225,125	
2	11	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	10 bh			0	81,765,000	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan	7 org			0	461,196,000	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	1 th			0	77,965,400	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis ATK	20 jns			0	37,081,175	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan penggandaan	1 th			0	0	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	6 bh			0	10,848,065	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 th			0	0	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	12 bln			0	18,975,000	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	12 kali			0	77,850,400	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	6 bh			0	463,726,000	
2	11	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 th			0	123,202,720	
2	11	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	16 bh			0	235,922,500	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	30 bh			0	17,212,855	
2	11	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	5 bh			0	47,868,750	
2	11	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	1 bh			0	0	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	10 bh			0	0	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 th			0	15,962,000	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	13 bh			0	0	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	3 bh			0	924,946,725	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,975,073,396**	**8,085,718,425**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,382,749,900**	**2,528,415,300**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	30 OT			10,000,000	208,258,330	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dok			5,000,000	54,843,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					10,000,000	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya DPA Balai	1 Dok			10,000,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	7 org 1 Dok			25,000,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Th			0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Jumlah laporan	1 dok 1 dok			10,000,000	35,218,175	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 dok			5,000,000	35,653,450	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok			2,000,000	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Th			0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Th			10,000,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD Terlaksanya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Tahun 1 Th			10,000,000	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Th			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Th			3,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Keg			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah instalasi listrik	6 bh			5,000,005	10,848,065	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 th			3,000,075	123,202,720	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	20 jns			5,000,000	37,081,175	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	2000 lbr			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 th			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	12 bln			4,749,821	18,975,000	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat	12 kali			16,000,000	77,850,400	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	6 bh			0	463,726,000	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebeleur	30 bh			0	17,212,855	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan gedung kantor	16 bh			0	235,922,500	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	3 bh			0	924,946,725	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	12 th			3,000,000	2,292,755	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	18 rek			22,000,000	58,822,500	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	1 th			1,190,000,000	77,965,400	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	10 bh			18,000,000	81,765,000	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 th			3,999,999	15,962,000	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor	5 bh			0	47,868,750	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**6,454,513,805**	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 dok			0	30,057,550	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 dok			0	30,057,550	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 Lokasi			0	121,739,460	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	1 Lokasi			0	121,739,460	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	1 unit			0	190,094,540	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HL	1 unit			0	190,094,540	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Luas lahan yang direhabilitasi	100 Ha			0	629,373,610	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai			Luas lahan yang direhabilitasi	100 Ha			0	629,373,610	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bibit produktif yang disediakan	0 Batang			0	1,019,783,660	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	0 Batang			0	1,019,783,660	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai			Jumlah kegiatan peJumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 th			0	27,132,640	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	3 kgt			0	1,882,072,405	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	3 kgt			220,729,996	1,882,072,405	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kegiatan peJumlah kegiatan penanganan karhutla yang dimonitoring; Jumlah titik karhutla yang dicegah dan atau ditangani	1 th			71,593,500	27,132,640	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	3 unit			0	511,169,135	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	3 unit			0	511,169,135	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Bima, Tambora, Kawinda Nae			adanya pembudidayaan lebah Trigona (klulut)	1 unit			49,999,900	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Pekat, Semua Kelurahan			Luas budidaya HHBK	100 Ha			0	2,043,090,805	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**229,682,025**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Kempo, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	2 klp			0	229,682,025	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	2 klp			50,000,100	229,682,025	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**916,198,100**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Pekat, Calabai			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	5 unit			0	916,198,100	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	5 unit			200,000,000	916,198,100	
														TOTAL	**1,975,073,396**	**18,744,530,915**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**1,699,703,335**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,699,703,335**	
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan untuk konsultasi, singkronisasi dan koordinasi tingkat daerah	20 OT			0	86,273,000	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tehnik Perkantaoran	84 Bulan			0	235,018,600	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	230 OH			0	30,788,950	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas	6 Unit			0	654,194,750	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Meubeler	10 Unit			0	172,806,935	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	20 Unit			0	95,121,100	
2	11	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya fasilitas kantor	8 Unit			0	0	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Resort	8 Unit			0	425,500,000	
2	11	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya fasilitas meja dan kursi	25 Unit			0	0	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,689,609,000**	**6,839,349,920**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,194,610,100**	**731,105,945**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	2 Dok			10,000,000	86,273,000	
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dok			4,999,900	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	2 Dok			10,000,000	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Konsumsi untuk rapat dan tamu kedinasan	230 OH			9,999,900	30,788,950	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Tehnik Perkantaoran Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	84 Bulan 36 OB			21,600,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Tenaga Administrasi	24 OB			0	0	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokument laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen			10,000,000	54,602,805	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Laporan Keuangan	12 Dok			5,000,000	0	
3	28	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokument laporan keuangan yang valid dan akuntabel	1 Dokumen			0	54,602,805	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	SKPD kebutuhan barang milik daerah	1 tahun			1,999,800	0	
3	28	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	12 Bulan			0	883,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyelesaian Rekening Listrik, Internet dan Telpon	8 Rekening			0	118,370,190	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dalam rangka Pembinaan Aset daerah pada SKPD	1 tahun			0	0	
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dok			9,999,900	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokume Aset	1 tahun			10,000,000	0	
3	28	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia	2 Jenis			0	8,891,800	
3	28	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	8 Jenis			0	14,687,800	
3	28	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi (Kantor KPH dan Tempat Ibadah	2 Unit			0	0	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dok			2,999,900	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Pengelola administrasi Sistem informasi kepegawaian	1 tahun			5,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bintek	2 Dok			2,950,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	8 Jenis			5,005,000	14,687,800	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	10 Jenis			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya peralatan rumah tangga	12 Jenis			6,279,200	0	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Kelengkapan Administrasi Perkantoran yang tersedia Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Jenis 5000 lembar			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50 Dok			3,000,000	0	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					4,756,000	0	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Dok			16,000,000	0	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jumlah Kendaraan Dinas tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6 Unit 10 unit			0	0	
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubeler Tersedianya Mebel	10 Unit 20 unit			0	0	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Mebel	20 unit			0	0	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor	8 unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Kebutuhan Surat Menyurat	12 Bulan			2,998,000	883,200	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyelesaian Rekening Listrik, Internet dan Telpon	8 Rekening			41,362,500	118,370,190	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya tenaga kebersihan	12 OB			967,500,000	0	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	10 unit 20 Unit			33,240,000	0	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tetap	8 unit			3,920,000	0	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Resort	8 Unit			0	425,500,000	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**465,156,900**	**5,814,978,680**	
3	28	03	1.01	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Terlaksananya Revisi Penyusunan RPHJP dan RPHJPd	4 Dokumen			0	348,015,300	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Terlaksananya Jumlah KPH yang dilakukan tatabatas/Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	4 Dokumen			0	345,950,360	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Jumlah KPH yang dilakukan tatabatas/Luas blok/ petak yang dilakukan tata batas	4 Dokumen			0	345,950,360	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Dompu, Dora Tangga			Terlaksananya Revisi Penyusunan RPHJP dan RPHJPd	4 Dokumen			0	348,015,300	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi dan sikronisasi kegiatan	20 OT			0	37,950,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Koordinasi dan sikronisasi kegiatan	20 OT			0	37,950,000	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi dan sikronisasi kegiatan	20 OT			0	28,462,500	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Koordinasi dan sikronisasi kegiatan	20 OT			0	28,462,500	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Woja, Saneo			Tersedianya Bibit untuk Masyarakat	100000 Batang			0	1,696,717,820	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Tersedianya Bibit untuk Masyarakat	100000 Batang			70,158,000	1,696,717,820	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah bibit produktif yang disediakan	0 Batang			0	277,481,200	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bibit produktif yang disediakan	0 Batang			0	277,481,200	
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			koordinasi Pengamanan Pencegahan Kabakaran Hutan	12 Bulan			0	272,869,240	
3	28	03	1.05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Tipihut yang di tangani	12 Bulan			249,245,300	2,781,440,600	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Tipihut yang di tangani	12 Bulan			0	2,781,440,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terciptanya Penegakan TIPIHUT	12 Bulan			68,628,600	0	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			koordinasi Pengamanan Pencegahan Kabakaran Hutan Terciptanya Penegakan TIPIHUT	12 Bulan 12 Bulan			77,125,000	0	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	0 Unit			0	0	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Terlaksananya Jumlah Luas budidaya HHBK	50000 Batang			0	298,960,900	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Jumlah Luas budidaya HHBK	50000 Batang			0	298,960,900	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**0**	**95,829,500**	
3	28	05	1.01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya tenagapendamping penyuluh kehutanan	1 Tahun			0	0	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	95,829,500	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Jumlah lokasi perhutanan sosial yang dipersiapkan	0 Kelompok			0	95,829,500	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**0**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	0 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya penerapan teknik konservasi tanah dan air di wilayah DAS	1 Tahun			29,842,000	0	
TOTAL															**1,689,609,000**	**14,722,730,675**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**0**	**3,579,268,728**	
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,579,268,728**	
2	11	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersusunya Laporan Keuangan BKPH Ropang	1 Dokumen			0	0	
2	11	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyelesaian pelayanan Surat menyurat	1 Tahun			0	0	
2	11	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyelesaian rekening listrik, Internet	2 rekening			0	114,076,435	
2	11	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga pengurus BMD	1 Orang			0	24,515,700	
2	11	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga Administrasi Kantor Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah	1 Orang 1 Orang 4 orang			0	175,531,400	
2	11	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tenaga kebersihan kantor	1 Orang			0	123,820,856	
2	11	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Alat Tulis Kantor yang tersedia	10 Jenis			0	14,340,419	
2	11	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	4 jenis			0	13,324,877	
2	11	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan yang tersedia	8 jenis			0	17,469,018	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jenis surat kabar yang tersedia	2 jenis			0	9,512,800	
2	11	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsumsi Rapat dan Tamu	200 OH			0	44,462,220	
2	11	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan Konsultasi, Sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lainnya	4 OT			0	37,781,180	
2	11	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Kendaraaan Dinas Operasional	2 Unit			0	234,815,625	
2	11	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersediannya meubeler kantor	24 buah			0	171,814,198	
2	11	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kendaraan Dinas KPH yang terpelihara	19 Unit			0	128,498,700	
2	11	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpelihara tersedianya komputer dan printer RPH	20 Unit 10 Unit			0	486,164,800	
2	11	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya gedung kantor KPH tersedianya instalasi jaringan listrik kantot	2 Unit 2 Unit			0	1,983,140,500	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**1,835,653,800**	**7,335,050,059**	
3	**28**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,253,153,800**	**3,561,799,710**	
3	28	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen RKA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	11,160,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	0	
3	28	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen DPA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	11,160,000	0	
3	28	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1 Dokumen	Tersusunnya Dokumen	4 Dokumen	10,000,000	0	
3	28	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran mekanisme keuangan pada Balai KPH Ropang	1 Tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	19,000,000	0	
3	28	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	0	175,531,400	
3	28	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	10,000,000	0	
3	28	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester	18 Dokumen	Terlaksananya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	19 Dokumen	5,000,000	0	
3	28	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	2,000,000	0	
3	28	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	7,000,000	0	
3	28	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Tersedianya Data Barang Milik Daerah	1 Tahun	5,200,000	24,515,700	
3	28	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan			0	0	
3	28	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	5,000,000	0	
3	28	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	0	0	
3	28	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,475,000	114,076,435	
3	28	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,000,000	123,820,856	
3	28	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	4,979,400	14,340,419	
3	28	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Komponen Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,094,400	13,324,877	
3	28	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,000,000	9,512,800	
3	28	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Komponen Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	3,550,000	44,462,220	
3	28	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	Tersedianya Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	16,000,000	37,781,180	
3	28	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kendaraaan Dinas Operasional	2 Unit			0	234,815,625	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya meubeler kantor	24 buah			0	171,814,198	
3	28	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengadaan Aset	5 Unit			0	0	
3	28	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 Unit			0	0	
3	28	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	2,015,000	0	
3	28	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyelesaian rekening listrik, Internet	1 Tahun	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	51,350,000	0	
3	28	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Tenaga Pengamanan Hutan	1 Orang 1 Orang 35 Orang	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1,022,500,000	0	
3	28	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan Dinas KPH yang terpelihara	8 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana	1 Tahun	44,670,000	128,498,700	
3	28	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana	1 Tahun	0	486,164,800	
3	28	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana	1 Tahun	0	1,983,140,500	
3	**28**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**										**0**	**3,574,219,423**	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penataan Petak/Blok Pengelolaan pada Resort KPH	250 Hektar			0	49,978,126	
3	28	03	1.01	02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan					Penataan Petak/Blok Pengelolaan pada Resort KPH	250 Hektar			0	49,978,126	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Penyusunan Dokumen RPHJPd	1 Dokumen	Tersedianya Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan (RPHJPD)	1 Dokumen	28,990,000	7,625,420	
3	28	03	1.02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RPHJP/RPHJPd yang disusun	1 Dokumen			0	7,625,420	
3	28	03	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek wisata alam yang dikembangkan di HP	0 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lopok, Mamak			Tersusnnya Desain Tapak Waduk Mama RPH Mama	1 Lokasi			0	0	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Pengadaan Bibit Produktif	1 Tahun	Tersedianya Bibit Bagi Masyarakat	1 Tahun	60,220,000	361,381,405	
3	28	03	1.04	02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengkayaan Tanaman	250 Hektar			0	361,381,405	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyiapan Bibit Produktif	10.000 Batang			0	125,692,297	
3	28	03	1.04	04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		prosentase luas kawasan hutan yang dilindungi	66.74 %	Pembuatan Bibit Bakti Sosial	1 Tahun	Tersedianya Bibit Bagi Masyarakat	1 Tahun	45,242,000	125,692,297	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.04	08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Batu Tering Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Lito Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Pungkit Kab. Sumbawa, Lopok, Mamak Kab. Sumbawa, Lenangguar, Tatebal Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lantung, Semua Kelurahan			Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Resort			0	237,716,270	
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Semamung Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Batu Tering Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Lito Kab. Sumbawa, Ropang, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Lopok, Pungkit Kab. Sumbawa, Lopok, Mamak Kab. Sumbawa, Lenangguar, Tatebal Kab. Sumbawa, Lenangguar, Lenangguar Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lantung, Semua Kelurahan			Honorarium Tenaga PAMHUT Patroli Rutin Pengamanan Hutan	35 Orang 5 Resort			0	2,142,637,519	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	03	1.05	02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya operasi rutin pada wilayah BKPH serta operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan	5 RPH	Terlaksananya Perlindunga Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5 RPH	287,000,000	2,142,637,519	
3	28	03	1.05	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan		Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase kawasan hutan yang dikelola	10 %	Terfasilitasinya kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	5 RPH	Terlaksananya Perlindunga Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5 RPH	45,500,000	237,716,270	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Batu Tering Kab. Sumbawa, Ropang, Lebin Kab. Sumbawa, Ropang, Lawin			Bantuan Peralatan Mesi - mesin	3 Unit			0	54,668,240	
3	28	03	1.06	01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Bantuan Peralatan Mesi - mesin	3 Unit			0	54,668,240	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Moyo Hulu, Batu Tering Kab. Sumbawa, Ropang, Ropang Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lantung, Lantung			Budidaya Tanaman Kopidan Tanaman Porang	300 Hektar			0	594,520,146	
3	28	03	1.06	03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Budidaya Tanaman Kopidan Tanaman Porang	300 Hektar			0	594,520,146	
3	**28**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**										**71,798,000**	**4,699,096**	
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		persentase KTH yang meningkat kelasnya	13.27 %	Pendampingan dan Fasilitasi KTH	2 Kelompok	Terlaksananya Pendampingan dan Fasilitasi KTH dalam Program Perhutanan Sosial	2 Kelompok	71,798,000	4,699,096	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sub Unit Organisasi : 2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	28	05	1.01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Lenangguar, Ledang Kab. Sumbawa, Lantung, Lantung			Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang difasilitasi pembentukannya	2 Kelompok			0	4,699,096	
3	**28**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**										**0**	**194,331,830**	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembuatan Dam Penahan	2 Unit			0	194,331,830	
3	28	06	1.01	03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup		peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS prioritas	4 DAS	Pembangunan KTA Gully Plug	3 Unit	Terlaksananya Pembangunan KTA	3 Unit	43,750,000	194,331,830	
														TOTAL	**1,835,653,800**	**14,687,569,136**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										**0**	**12,420,862,861**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**11,241,603,032**	
2	**12**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,644,776,805**	
2	12	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen	1 dokumen			0	7,171,170	
2	12	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	2 dokumen			0	1,637,605,635	
2	**12**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,846,101,302**	
2	12	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	ASN	100 persen			0	7,842,392,552	
2	12	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga keamanan kantor	5 orang			0	0	
2	12	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	2 laporan			0	3,708,750	
2	**12**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**1,750,724,925**	
2	12	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	10 surat			0	16,543,325	
2	12	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	24 rekening			0	448,063,000	
2	12	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jasa kebersihan kantor	48 OB			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah BMD	8 BMD			0	8,903,300	
2	12	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga administrasi keuangan	12 orang			0	706,374,275	
2	12	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga kebersihan	7 orang			0	570,841,025	
2	12	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	48 OB			0	0	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**										**282,934,090**	**297,656,542**	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**										**163,434,090**	**296,656,542**	
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Jumlah peserta bimtek pemanfaatan data kependudukan dan rakor adminstrasi kependudukan	80 orang	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	133,434,090	294,656,542	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**										**0**	**294,656,542**	
2	12	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jenis dokumen kebijakan teknis kependudukan dan pendukungnya dalam satu tahun	6 dokumen			0	294,656,542	
2	**12**	**02**	1.01		**Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**										**163,434,090**	**296,656,542**	
2	12	02	1.01	02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	jumlah laporan bulanan Data penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.	1 dokumen	Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	30,000,000	1,000,000	
2	12	02	1.01	03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %			Persentase Pelayanan Kependudukan	100 %	0	1,000,000	
2	**12**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**										**119,500,000**	**1,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	12	02	1.02	01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %			Pesentase penyelanggaraan pendaftaran kependudukan	100 %	0	1,000,000	
2	12	02	1.02	02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi terkait pendaftaran penduduk	1 tahun	Pesentase penyelanggaraan pendaftaran kependudukan	100 %	97,500,000	0	
2	12	02	1.02	04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase fasilitasi Kab/Kota	100 %	Berat Dokumen/barang yang dikirim	500 KG	Pesentase penyelanggaraan pendaftaran kependudukan	100 %	22,000,000	0	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**										**233,407,600**	**800,000,000**	
2	**12**	**03**	1.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**										**233,407,600**	**800,000,000**	
2	12	03	1.01	01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %	Jumlah peserta Bimtek di Bidang Pencatatan Sipil	47 Orang	Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil dan pendukungnya	1 dok	233,407,600	200,000,000	
2	12	03	1.01	02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %			Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil dan pendukungnya	1 dok	0	200,000,000	
2	12	03	1.01	03	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %			Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil dan pendukungnya	1 dok	0	200,000,000	
2	12	03	1.01	04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan Bidang Catatan Sipil	100 %			Jumlah Jenis Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil dan pendukungnya	1 dok	0	200,000,000	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**778,845,600**	**1,950,571,874**	
2	**12**	**04**	1.01		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**										**0**	**1,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	12	04	1.01	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %			Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	0	1,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**12**	**04**	1.02		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**										**252,391,000**	**1,200,000,000**	
2	12	04	1.02	01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Berat Dokumen/Barang yang dikirim	1250 KG	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	51,616,700	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	12	04	1.02	02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah jenis Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 Jenis	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	118,927,300	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	12	04	1.02	03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah peserta Rakor dalam rangka Komunikasi, inforamasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	50 Orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	70,630,600	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	12	04	1.02	04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah peserta rapat berkala antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah kewenanangan provinsi terkait pencatatan sipil	90 Orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	11,216,400	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	12	04	1.02	05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %			Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	0	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	12	04	1.02	06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %			Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	0	200,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**										**526,454,600**	**749,571,874**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	12	04	1.03	01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 tahun	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	117,500,000	386,936,992	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi**										**0**	**749,571,874**	
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan, dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			persentase aparat dukcapil terbina	100 %			0	362,634,882	
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**										**526,454,600**	**749,571,874**	
2	12	04	1.03	02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan tingkat kab/kota	100 %	Jumlah aparat dukcapil terbina Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	150 orang	Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	6 keg	408,954,600	362,634,882	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**12**	**04**	1.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi**										**0**	**749,571,874**	
2	12	04	1.03	04	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Monev penyelenggaraan urusan adminduk dalam setahun	4 kali			0	386,936,992	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**										**0**	**135,031,413**	
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**										**0**	**135,031,413**	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah tabel atau grafik data kependudukan tk provinsi	1 Dokumen			0	135,031,413	
2	**12**	**05**	1.01		**Penyediaan Profil Kependudukan**										**0**	**335,031,413**	
2	12	05	1.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi				Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	100 %	jumlah tabel atau grafik data kependudukan tk provinsi	1 Dokumen			0	135,031,413	
2	12	05	1.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan profil kependudukan tingkat kab/kota	100 %					0	200,000,000	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										**16,155,457,926**	**39,293,370,543**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**9,015,458,026**	**11,552,518,178**	
2	**13**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**95,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	13	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen			0	10,000,000	
2	13	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
2	13	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	25,000,000	
2	13	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	30,000,000	
2	13	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen			0	30,000,000	
2	**13**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,404,494,651**	**9,184,008,553**	
2	13	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	7,362,384,651	8,423,925,528	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persentase Realisasi Pembayaran Honorarium Bendahara	100 %	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	41,040,000	50,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kertas yang disediakan	20 Riim	Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	1,070,000	3,708,750	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase realisasi pembayaran gaji ASN	100 %	0	706,374,275	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**13**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**0**	**8,903,300**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah BMD	8 BMD			0	8,903,300	
2	**13**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**0**	**50,000,000**	
2	13	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Orang	1 Tahun			0	50,000,000	
2	**13**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**217,089,175**	**600,000,000**	
2	13	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	6,955,300	50,000,000	
2	13	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	7,498,975	50,000,000	
2	13	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	0	50,000,000	
2	13	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	840 porsi	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	25,800,000	50,000,000	
2	13	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan yang dicetak	4 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	15,075,600	100,000,000	
2	13	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	36 Eks	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	3,780,000	50,000,000	
2	13	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan material yang disediakan	4 Jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	30,000,100	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	13	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	0	50,000,000	
2	13	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Frekuensi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi	1 tahun	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	105,979,200	50,000,000	
2	13	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	0	50,000,000	
2	13	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Publikasi Melalui Media Cetak dan Media Online	8 Kali	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8 jenis	22,000,000	50,000,000	
2	**13**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**328,372,700**	**350,000,000**	
2	13	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sepeda listrik yang diadakan	20 unit	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	200,000,000	50,000,000	
2	13	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	0	50,000,000	
2	13	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang yang diadakan	5 Jenis	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	48,372,700	50,000,000	
2	13	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aplikasi yang diadakan	1 Unit	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	80,000,000	50,000,000	
2	13	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	0	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	0	50,000,000	
2	13	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah barang milik daerah yang diadakan	1 paket	0	50,000,000	
2	**13**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**804,001,500**	**1,014,606,325**	
2	13	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Materai yang diadakan	200 lembar	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis	1,280,000	16,543,325	
2	13	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis rekening yamg dibayar	4 Jenis	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis	113,737,500	448,063,000	
2	13	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis	0	50,000,000	
2	13	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai Tidak Tetap/Kontrak yang dipekerjakan	21 Orang	Jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis	688,984,000	500,000,000	
2	**13**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**261,500,000**	**250,000,000**	
2	13	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	23 unit	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	193,960,000	50,000,000	
2	13	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel yang dirawat	20 set	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	5,000,000	50,000,000	
2	13	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dirawat	14 Unit	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	9,260,000	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	13	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah luasan gedung yang direhab	288 M2	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	53,280,000	50,000,000	
2	13	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dirawat	4 jenis	0	50,000,000	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**										**47,500,000**	**4,300,000,000**	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**										**47,500,000**	**4,300,000,000**	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	15 %			Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenanganan Provinsi	2 kali	0	2,000,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**										**0**	**2,652,345,855**	
2	13	03	1.01	01	Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi kerja sama antar desa lintas kabupaten/kota	32 Kali			0	2,652,345,855	
2	**13**	**03**	1.01		**Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi**										**47,500,000**	**4,300,000,000**	
2	13	03	1.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	15 %			Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenanganan Provinsi	2 kali	0	1,000,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	13	03	1.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Realisasi Kerjasama Antar Desa	15 %	Jumlah Peserta Bimtek Pengembangan Kawasan Ekonomi Pedesaan	40 Orang	Jumlah Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenanganan Provinsi	2 kali	47,500,000	1,300,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**										**235,000,000**	**4,150,000,000**	
2	**13**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**										**235,000,000**	**4,150,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	13	04	1.01	02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi monev dalam rangka Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	66,995,300	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi monev dalam rangka penyusunan produk hukum desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	66,004,300	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi Monev perkembangan desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	67,000,400	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %	Frekuensi Monev profil Desa	1 tahun	Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	35,000,000	150,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	19	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	13	04	1.01	20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	04	1.01	21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Aparatur Desa yang mampu melaksanakan tupoksinya dengan baik	52 %			Frekuensi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	0	500,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**										**6,857,499,900**	**19,290,852,365**	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**6,857,499,900**	**19,290,852,365**	
2	13	05	1.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Peserta Bimtek Pengelola Lembaga Adat	30 Orang	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	208,500,000	346,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**18,644,852,365**	
2	13	05	1.01	02	Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Hukum kelembagaan masyarakat Desa dan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat	100 peraturan			0	0	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan kapasitas Kelembangaan	100 Desa			0	2,531,242,460	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**6,857,499,900**	**19,290,852,365**	
2	13	05	1.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah operator peserta bimtek aplikasi Sistim Informasi Posyandu	150 Orang	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	1,974,499,900	2,531,242,460	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**18,644,852,365**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	05	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana kelembagaan	1 Paket			0	0	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**6,857,499,900**	**19,290,852,365**	
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah Desa yang menerima Bantuan Mesin Stimulus Ekonomi	111 Desa	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	4,474,500,000	13,411,212,715	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**18,644,852,365**	
2	13	05	1.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasllitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	9 kali			0	13,411,212,715	
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Kali			0	2,702,397,190	
2	**13**	**05**	1.01		**Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**6,857,499,900**	**19,290,852,365**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	05	1.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat		Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Kali	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	200,000,000	2,702,397,190	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	13	05	1.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	0	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	13	05	1.01	08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	0	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	13	05	1.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Lembaga Adat Aktif	5 %			Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	0	100,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
														TOTAL	**17,450,645,216**	**76,394,691,453**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										**0**	**31,378,013,139**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**10,983,797,205**	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**338,117,940**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumalah Dokumen Rencana Kerja Tahunan SKPD (RKA? DPA, RKAP?DPPA dan Rencana Kerja)	3 Dokumen			0	15,289,940	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**66,851,200**	**0**	
2	15	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen rencana kerja tahunan SKPD dan Renstra	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,720,000	0	
2	15	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,729,100	0	
2	15	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,720,000	0	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**338,117,940**	
2	15	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen data monitoring dan evaluasi	1 Dokumen			0	53,785,500	
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD Dalam Daerah Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	120 OT			0	269,042,500	
2	**15**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**66,851,200**	**0**	
2	15	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,720,000	0	
2	15	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,720,000	0	
2	15	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	8,720,000	0	
2	15	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen hasil evaluasi	1 Dokumen	Terlaknsannya Penyusunan Perencanaan, penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	14,522,100	0	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,707,475,630**	
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	6,690,771,075	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,433,468,607**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Terbayarkan	1078 Orang/Bulan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	6,397,849,207	0	
2	15	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga administrasi keuangan	108 Orang/Bulan	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	24,024,000	0	
2	15	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	1 Dokumen	Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Keuangan Dinas Perhubungan	12 Bulan	11,595,400	0	
2	**15**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,707,475,630**	
2	15	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen			0	11,757,830	
2	15	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang valid	1 Dokumen			0	4,946,725	
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,883,383,135**	
2	15	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	2200 Surat			0	3,680,000	
2	15	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Jenis			0	332,172,900	
2	15	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis perlengkapan dan peralatan kantor	5 Jenis			0	35,041,190	
2	15	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah penceramah (Dai) dan Pemandu Senam	2 Kegiatan			0	44,160,000	
2	15	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah secara efektif	1 Dokumen			0	79,921,780	
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**14,763,000**	**0**	
2	15	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	Terlaksanannya Penyusnan Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	3,446,000	0	
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,883,383,135**	
2	15	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	umlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	20 Unit			0	0	
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**14,763,000**	**0**	
2	15	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas pengelola BMD	24 Orang/Bulan	Terlaksanannya Penyusnan Dokumen aset / barang daerah secara efektif	1 Dokumen	11,317,000	0	
2	**15**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,883,383,135**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa keamanan kantor Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	6 Orang 3 Orang 9 Orang			0	346,746,850	
2	15	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	11 Orang			0	387,878,900	
2	15	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat tulis kantor	43 Jenis			0	68,560,125	
2	15	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis			0	51,684,220	
2	15	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis komponen instalasi	12 Jenis			0	5,982,760	
2	15	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57 Jenis			0	93,468,665	
2	15	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Eksplar Bahan Bacaan (Surat Kabar)	36 Eksemplar			0	13,552,750	
2	15	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu Kedinasan	2477 OK			0	121,394,000	
2	15	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD Luar Daerah Program Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat	68 OT			0	220,731,000	
2	15	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan yang dibeli	14 Unit			0	649,714,350	
2	15	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengadaan Mebeleur Kantor Yang Memadai	4 Jenis			0	11,852,820	
2	15	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket			0	0	
2	15	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	21 Unit			0	418,318,825	
2	15	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pemeliharaan Perlatan Kerja Yang Baik	12 Jenis			0	44,183,000	
2	15	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor	1 Paket			0	954,339,000	
2	**15**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**54,820,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peningkatan SDM	2 Orang			0	54,820,500	
2	**15**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**64,150,000**	**0**	
2	15	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti dilkat	2 Orang	Terlaksanannya peningkatan SDM	3 Orang	64,150,000	0	
2	**15**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**497,753,075**	**0**	
2	15	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	7,645,000	0	
2	15	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	44,243,700	0	
2	15	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor	9 Jenis	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	45,720,375	0	
2	15	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	6 Jenis	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	52,354,000	0	
2	15	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Eksplar bahan bacaan (surat kabar)	1460 Eksemplar	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	9,790,000	0	
2	15	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	2300 Orang/Kali	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	113,000,000	0	
2	15	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD Dalam Daerah dan Luar Daerah program pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat	188 Dokumen	Terlaksananya pelayanan adminitasi umum	7 Kegiatan	225,000,000	0	
2	**15**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**200,680,000**	**0**	
2	15	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yg diadakan	10 Unit			200,680,000	0	
2	**15**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**909,841,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar & masuk	2200 Surat	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	2,000,000	0	
2	15	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	168 rekening	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	315,645,000	0	
2	15	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa perlengkapan dan peralatan kantor	4 Jenis	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	36,390,000	0	
2	15	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa kebersihan dan keamanan kantor Jumlah penceramah (Dai) dan pemandu senam	246 Orang/Bulan 288 Orang/Kali	Terlaksananya pelayanan jasa penunjang	4 Kegiatan	555,806,000	0	
2	**15**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**251,719,600**	**0**	
2	15	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	25,000,000	0	
2	15	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	18 Unit	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	186,759,600	0	
2	15	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 Paket	Terlaksananya pelayanan pemeliharaan BMD	4 Kegiatan	39,960,000	0	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**										**0**	**10,797,890,284**	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**										**0**	**3,369,118,674**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas keselamatan LLAJ yang terpelihara Jumlah Terpasangnya Fasilitas Keselamatan	5 Jenis 4 Jenis			0	2,199,493,924	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**										**345,000,000**	**0**	
2	15	02	1.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Dompu, Dompu, Dore Bara Kab. Sumbawa, Sumbawa, Brang Biji Kab. Sumbawa, Lopok, Pungkit	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah jenis Terpasangnya fasilitas keselamatan Jalan	1 jenis			345,000,000	0	
2	**15**	**02**	1.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi**										**0**	**3,369,118,674**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	1.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Keselamatan yang Terpelihara	1 Jenis			0	1,169,624,750	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**										**850,852,000**	**0**	
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	1 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	85,712,000	0	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**										**0**	**4,783,802,660**	
2	15	02	1.03	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Fasilitas Terminal	1 Dokumen			0	353,590,500	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**										**850,852,000**	**0**	
2	15	02	1.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	0	0	
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Sosialisasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	4 Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	596,798,000	0	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**										**0**	**4,783,802,660**	
2	15	02	1.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			erlaksananya Pembinaan Penyewa Fasilitas Pelayanan Terminal dan Operator Bus di Terminal, dan Uji Petik Retribusi Terminal Jumlah Kendaraan Yang Laik jalan	4 Terminal 1 Kegiatan			0	924,745,360	
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah failitas terminal type B yang terpelihara	1 Terminal			0	3,505,466,800	
2	**15**	**02**	1.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B**										**850,852,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	1.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Fasilitas terminal type B yang terpelihara	1 Paket	Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	168,342,000	0	
2	15	02	1.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Dokumen perencanaan dan hasil Sosialisasi pengembangan terminal	4 Dokumen	0	0	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**										**758,791,900**	**0**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Sosialisasi	16 Dokumen	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	16 Dokumen	458,792,700	0	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**										**0**	**1,690,383,045**	
2	15	02	1.05	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu Jumlah peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sosilisasi Forum Lalu LIntas Angkutan Jalan Provinsi NTB Jumlah Terpilihnya Kab/ Kota Tertib Lalu Lintas	4 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kab/Kota			0	1,347,944,210	
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi Darat 2 orang Tersusunnya Dokumen Faskel di NTB	2 Orang 1 Dokumen			0	223,861,185	
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**										**758,791,900**	**0**	
2	15	02	1.05	03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Dokumen Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	16 Dokumen	0	0	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	6 Kali	Jumlah Dokumen Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	16 Dokumen	299,999,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**15**	**02**	1.05		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi**										**0**	**1,690,383,045**	
2	15	02	1.05	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Jumlah Terpilih Abdi Yasa Teladan	2 Orang			0	118,577,650	
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**										**0**	**0**	
2	15	02	1.06	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Rekomendasi Dokumen Andalalin	18 Dokumen			0	0	
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**										**0**	**158,211,940**	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Jumlah Bangunan yang Dievaluasi	24 Unit			0	158,211,940	
2	**15**	**02**	1.06		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi**										**0**	**0**	
2	15	02	1.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	24 Kali			0	0	
2	15	02	1.06	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	0 Kali			0	0	
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**										**249,133,200**	**0**	
2	15	02	1.07	01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	0	0	
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**										**0**	**145,416,925**	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UPUBKB yang di pantau inspkesi dan di Audit	1 Dokumen			0	145,416,925	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**15**	**02**	1.07		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**										**249,133,200**	**0**	
2	15	02	1.07	02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Unit Pelaksana Penguji Kendaraan Bermotor Yang Dibina	9 Unit Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	99,999,200	0	
2	15	02	1.07	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah kendaraan Angkutan Umum yang laik jalan	66 Unit Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	149,134,000	0	
2	15	02	1.07	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	0	0	
2	15	02	1.07	05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			Jumlah Kendaraan yang Laik Jalan	75 Unit	0	0	
2	**15**	**02**	1.08		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,831,847,720**	**0**	
2	15	02	1.08	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	1,531,860,720	0	
2	15	02	1.08	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	terkendalinya angkutan umum	11 Kegiatan	Tersedianya angkutan subsidi	5 Trayek	299,987,000	0	
2	**15**	**02**	1.10		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota	1 Dokumen			0	0	
2	**15**	**02**	1.10		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**555,798,220**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	1.10	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung			Jumlah Rute Angkutan AKDP	1 Rute			0	555,798,220	
2	**15**	**02**	1.10		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	
2	15	02	1.10	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan	1 Kali			0	0	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**95,158,820**	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan angkutan umum yang memiliki legalitas / Jumlah AKDP yang memiliki izin	1 Kegiatan			0	95,158,820	
2	**15**	**02**	1.13		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**300,008,600**	**0**	
2	15	02	1.13	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	200,000,000	0	
2	15	02	1.13	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi	1 Dokumen	Jumlah Angkutan yang Memenuhi Manajemen Keselamatan Angkutan Umum	498 Unit Kendaraan	100,008,600	0	
2	**15**	**02**	1.14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**100,000,000**	**0**	
2	15	02	1.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	811 Unit Kendaraan	jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	811 Kendaraan	100,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	02	1.14	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Darat	94.37 %			jumlah angkutan umum yang laik jalan (KPS)	811 Kendaraan	0	0	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**										**563,820,000**	**0**	
2	**15**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**										**61,810,000**	**0**	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %			Terlaksananya Fasilitasi Dokumen Perizinan Angkutan Laut	50 Dokumen	61,810,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**15**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi**										**0**	**224,609,950**	
2	15	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Kab. Lombok Utara, Pemenang, Semua Kelurahan			Data perizinan usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	2 Rute			0	224,609,950	
2	**15**	**03**	1.02		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional**										**145,682,000**	**0**	
2	15	03	1.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi perizinan angkutan laut pelayaran rakyat	30 Dokumen	Terlaksananya Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	30 unit	0	0	
2	15	03	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi Jumlah Angkutan Laut yang disubsidi	30 unit 1 Unit	Terlaksananya Angkutan laut pelayaran rakyat yang diawasi	30 unit	145,682,000	0	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**180,800,000**	**0**	
2	15	03	1.05	01	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %			Terlaksananya Armada ASDP Yang Dievaluasi	24 Unit	0	0	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**28,692,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	1 Dokumen			0	28,692,500	
2	**15**	**03**	1.05		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**180,800,000**	**0**	
2	15	03	1.05	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Armada ASDP Yang Dievaluasi	24 Unit	Terlaksananya Armada ASDP Yang Dievaluasi	24 Unit	180,800,000	0	
2	**15**	**03**	1.06		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**										**0**	**916,793,800**	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Informasi perizinan secara elektronik	1 Rute			0	916,793,800	
2	**15**	**03**	1.06		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas**										**35,008,000**	**0**	
2	15	03	1.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Fasilitasi Perizinan di Pelabuhan	129 Dokumen	Terlaksananya usaha dipelabuhan yang diawasi	129 Unit	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	03	1.06	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah usaha dipelabuhan yang diawasi	129 Unit	Terlaksananya usaha dipelabuhan yang diawasi	129 Unit	35,008,000	0	
2	**15**	**03**	1.07		**Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi**										**0**	**0**	
2	15	03	1.07	01	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Dokumen Study Tarif Penyebrangan	1 Dokumen			0	0	
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**										**0**	**0**	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah Dokumen Database Pelabuhan Regional	3 Dokumen			0	0	
2	**15**	**03**	1.08		**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional**										**0**	**38,270,850**	
2	15	03	1.08	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung			Database 3 pelabuhan Regional	1 Dokumen			0	38,270,850	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**										**0**	**8,387,958,550**	
2	15	03	1.09	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung			Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan	1 Dokumen			0	893,088,275	
2	15	03	1.09	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Timur, Jerowaru, Semua Kelurahan			Jumlah Pelabuhan Regional yang beroperasi	1 Paket			0	7,494,870,275	
2	**15**	**03**	1.09		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional**										**140,520,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	15	03	1.09	04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Rute Angkutan Laut dan Perairan	57.69 %	Jumlah pelabuhan yg diawasi	3 Unit	Terlaksananya Rekomendasi Teknis penggunaan ruang laut sektor pelayaran	3 Unit	140,520,000	0	
TOTAL															**13,438,679,902**	**31,378,013,139**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										**16,249,063,769**	**7,818,511,670**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**9,912,569,769**	**7,818,511,670**	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**43,043,900**	**9,147,790**	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	4,796,600	9,147,790	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**9,147,790**	
2	16	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	9,147,790	
2	**16**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**43,043,900**	**9,147,790**	
2	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,098,000	0	
2	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,198,000	0	
2	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,098,000	0	
2	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,203,300	0	
2	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	33,650,000	0	
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,461,872,569**	**7,776,823,480**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gaji dan Tunjangan Aparatur yang terbayarkan	57 ASN	NILAI SAKIP OPD	100 %	6,448,412,569	7,159,530,850	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,776,823,480**	
2	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	65 ASN			0	7,159,530,850	
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,461,872,569**	**7,776,823,480**	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai pengelola administrasi keuangan	6 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	8,740,000	614,929,380	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,776,823,480**	
2	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga PTT/Kontrak	15 Orang			0	614,929,380	
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,461,872,569**	**7,776,823,480**	
2	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	4,720,000	2,363,250	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,776,823,480**	
2	16	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	2,363,250	
2	**16**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,701,338,075**	
2	16	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	880 Surat			0	5,888,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	14 Rekening			0	146,050,000	
2	16	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	5 Jenis			0	3,486,800	
2	**16**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**1,450,000**	**3,486,800**	
2	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Aset Perangkat Daerah	1 Dokumen	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,450,000	3,486,800	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,701,338,075**	
2	16	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	6 Orang			0	213,334,315	
2	16	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	51 Jumlah Jenis			0	77,887,660	
2	16	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	17 Jumlah Jenis			0	28,383,955	
2	16	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen/Penerangan Instalasi Listrik	16 Jumlah Jenis			0	13,806,325	
2	16	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	5110 Eksemplar			0	4,212,450,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makan dan Minum	1300 Orang/Tahun			0	101,430,000	
2	16	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	20 Rapat/Tahun			0	701,380,400	
2	16	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan	3 Unit			0	42,686,045	
2	16	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan	6 Unit			0	80,799,345	
2	16	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	4 Unit			0	15,542,480	
2	16	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	36 Unit/Tahun			0	663,699,500	
2	16	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	35 Unit/Tahun			0	29,980,500	
2	16	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	95 Unit/Tahun			0	91,528,500	
2	16	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	4 Paket			0	194,666,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	16	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan yang Direhabilitasi	2 Unit			0	78,338,000	
2	**16**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**29,053,600**	
2	16	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 ASN			0	29,053,600	
2	**16**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**27,000,000**	**29,053,600**	
2	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	27,000,000	29,053,600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**583,840,200**	**0**	
2	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia	15 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %	12,393,000	0	
2	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	79 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %	82,006,200	0	
2	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang tersedia	3 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %	41,000,000	0	
2	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	9 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %	23,651,000	0	
2	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	5700 eksemplar	NILAI SAKIP OPD	100 %	84,960,000	0	
2	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu yang difasilitasi	50 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	39,720,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta rapat koordinasi dan konsultasi	135 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	300,110,000	0	
2	**16**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**307,107,800**	**0**	
2	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan yang diadakan	10 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	200,000,000	0	
2	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	5 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	30,788,800	0	
2	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbeli	5 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	44,000,000	0	
2	16	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung yang terbeli	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	32,319,000	0	
2	**16**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,010,175,300**	**0**	
2	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	800 surat	NILAI SAKIP OPD	100 %	5,792,300	0	
2	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening yang dibayarkan	15 rekening	NILAI SAKIP OPD	100 %	457,932,000	0	
2	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga PTT dan Kontrak	36 orang	NILAI SAKIP OPD	100 %	1,546,451,000	0	
2	**16**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**478,080,000**	**0**	
2	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	31 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	295,200,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	36,000,000	0	
2	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	100 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	79,590,000	0	
2	16	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya	24 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	27,290,000	0	
2	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Jenis	NILAI SAKIP OPD	100 %	0	0	
2	16	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	2 Unit	NILAI SAKIP OPD	100 %	40,000,000	0	
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**										**4,629,335,000**	**0**	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Opini dan Aspirasi	1 Dokumen	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	250,165,000	0	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**17,819,773,825**	
2	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Konten	2 Dokumen			0	1,813,523,550	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	610 informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	1,099,904,500	0	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**17,819,773,825**	
2	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi yang diproduksi dan disebar melalui media publik	610 Informasi			0	2,623,565,725	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	300 informasi	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	64,499,400	0	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**17,819,773,825**	
2	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Perangkat Daerah	690 Dokumen			0	5,776,925,985	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Lembaga dan Pers yang terlibat dalam penyebarluasan informasi	5 Lembaga/pers	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	24,999,800	0	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**17,819,773,825**	
2	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan informasi	5 Lembaga			0	788,718,760	
2	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi	15 Komunitas			0	3,862,537,085	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi	30 orang	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	76,030,000	0	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**17,819,773,825**	
2	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aparatur yang terlatih dan terfasilitasi	480 Apratur/Orang			0	228,062,250	
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	6 Kasus			0	2,726,440,470	
2	**16**	**02**	1.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi**										**4,629,335,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Sengketa Informasi yang terselesaikan	6 kasus	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	1,074,796,700	0	
2	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Kelompok / Komunitas yang diberdayakan dalam penyebarluasan informasi	15 kelompok/komunitas	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	1,738,975,200	0	
2	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikkasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	10 Unit	Cakupan Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Media Pelayanan Informasi Komunikasi Publik (%)	60 %	299,964,400	0	
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**										**1,707,159,000**	**0**	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**										**1,707,159,000**	**0**	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	2 Dokumen	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	439,804,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**4,047,515,850**	
2	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan e-Government	1 Dokumen			0	1,643,433,950	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data	40 OPD			0	1,481,775,000	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**										**1,707,159,000**	**0**	
2	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data	40 OPD	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	821,500,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	18 OPD	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	333,900,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**4,047,515,850**	
2	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	30 OPD			0	492,660,000	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	3 Aplikasi			0	429,646,900	
2	**16**	**03**	1.02		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**										**1,707,159,000**	**0**	
2	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	1 aplikasi	Persentase Layanan Berbasis TIK	45 %	111,955,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**										**0**	**1,165,410,230**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**										**0**	**1,165,410,230**	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**0**	**1,165,410,230**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Statistik yang Tervalidasi	80 %			0	556,178,065	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**419,500,000**	**0**	
2	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Jenis Data Yang Tersedia (jenis)	520 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %	45,308,600	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**0**	**1,165,410,230**	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman	5 Aparatur/Orang			0	258,941,705	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**419,500,000**	**0**	
2	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah SDM Statistik yang meningkatkan pemahaman	60 aparatur/orang	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %	268,546,400	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**0**	**1,165,410,230**	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Metadata yang terbangun	10 Jenis			0	119,520,420	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**419,500,000**	**0**	
2	20	02	1.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Metadata yang terbangun	10 Jenis	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %	21,035,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**0**	**1,165,410,230**	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunana perencanaan pemabangunan daerah	46 OPD			0	128,298,600	
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**419,500,000**	**0**	
2	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	46 OPD	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %	27,110,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Cakupan ketersediaan data yang terintegrasi	20 %	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik	5 OPD	Cakupan Ketersediaan Data yang Terintegrasi	10 %	57,500,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**20**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi**										**0**	**1,165,410,230**	
2	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi statistik	5 OPD			0	102,471,440	
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**										**393,999,100**	**0**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**										**393,999,100**	**0**	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**317,999,100**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	2 Dokumen	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	33,960,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**987,444,050**	
2	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Regulasi dan Hasil Koordinasi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	2 Dokumen			0	292,801,040	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**317,999,100**	**0**	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	1 orang	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	181,319,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**987,444,050**	
2	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengelola Keamanan Siber	5 Aparatur/Orang			0	444,242,700	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	20 Insiden			0	219,649,310	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**317,999,100**	**0**	
2	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	18 insiden	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	78,400,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**0**	**987,444,050**	
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	25 OPD			0	30,751,000	
2	**21**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi**										**317,999,100**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Pengamanan Informasi Perangkat Daerah	15 OPD	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	24,320,100	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi**										**0**	**161,251,160**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi	26 OPD			0	161,251,160	
2	**21**	**02**	1.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi**										**76,000,000**	**0**	
2	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Komunikasi Sandi	15 OPD	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada Perangkat Daerah	30 %	76,000,000	0	
														TOTAL	**17,062,562,869**	**46,516,269,730**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**14,407,883,721**	**19,555,869,151**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**10,709,634,051**	**11,998,425,531**	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,104,454,100**	**733,552,275**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	447,975,600	66,097,515	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,747,436,040**	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Koperai dan UKM Provinsi NTB	4 Dokumen			0	66,097,515	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,104,454,100**	**733,552,275**	
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	25,791,900	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,747,436,040**	
2	17	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	33,662,340	
2	17	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	7,896,475	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,104,454,100**	**733,552,275**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	23,280,800	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	18,957,400	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,747,436,040**	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	1,178,300,120	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,104,454,100**	**733,552,275**	
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	14,768,900	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,747,436,040**	
2	17	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	461,479,590	
2	**17**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,104,454,100**	**733,552,275**	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	24,392,100	5,975,170	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	5 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	6 Dokumen	549,287,400	461,479,590	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,124,240,561**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	8,113,736,346	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,874,194,551**	**8,450,778,186**	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	73 ASN	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan	7,833,898,751	8,113,736,346	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	6 Laporan	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan	22,202,200	282,512,795	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,124,240,561**	
2	17	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	12 Bulan			0	0	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,874,194,551**	**8,450,778,186**	
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan	5,798,200	4,529,045	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,124,240,561**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan capaian kinerja	1 Dokumen			0	5,975,170	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,874,194,551**	**8,450,778,186**	
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 Laporan	Laporan administrasi keuangan	6 Laporan	12,295,400	50,000,000	
2	**17**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,124,240,561**	
2	17	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	1 Dokumen			0	0	
2	17	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan keuangan SKPD	1 Dokumen			0	4,529,045	
2	**17**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**5,863,500**	**50,000,000**	
2	17	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	1 Dokumen	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	5,863,500	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,720,392,830**	
2	17	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang-barang penunjang/administrasi/surat menyurat perkantoran	2500 Surat			0	10,729,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun			0	176,410,000	
2	17	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perlatatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket			0	0	
2	17	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Thn			0	2,718,600	
2	17	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Thn			0	506,759,000	
2	17	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan SKPD	12 Bulan			0	282,512,795	
2	17	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedinya jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	542,151,400	
2	17	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Perlatan kantor	1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan			0	33,994,805	
2	17	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetak, penggandaan, dan pengadaan surat-surat kantor	12 Bulan			0	76,887,735	
2	17	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			0	19,453,630	
2	17	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Paket			0	404,775,965	
2	17	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	10 Paket			0	0	
2	17	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor	10 Paket			0	77,832,000	
2	17	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor	12 Bulan			0	86,198,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terfasilitasinya kegiatan penyelarasan program pusat dan daerah	1 Tahun			0	787,008,250	
2	17	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit			0	561,394,350	
2	17	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit			0	111,155,550	
2	17	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Unit			0	0	
2	17	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Unit			0	27,554,000	
2	17	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Unit			0	12,857,000	
2	17	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya rehabiliasi kendaraan dinas operasional	1 Unit			0	0	
2	17	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya rehabilitasi kendaraan dinas operasional	4 Unit			0	0	
2	**17**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**198,098,425**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Pakaian Dinas Harian	1 Paket			0	53,684,300	
2	17	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya pakaian KORPRI	1 Paket			0	0	
2	17	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya pakaian khas daerah dan pakaian olahraga	1 Paket			0	8,553,125	
2	17	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal/Kursus singkat	1 Thn			0	135,861,000	
2	**17**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**50,000,000**	**135,861,000**	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Meningkatnya Kemampuan SDM dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Tugas	3 SDM	Meningkatnya SDM Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 SDM	50,000,000	135,861,000	
2	**17**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**612,338,400**	**1,161,374,670**	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	3 Rekening	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	16,478,000	19,453,630	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	175,479,800	33,994,805	
2	17	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	23,715,600	0	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	17,605,200	30,000,000	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	7,820,600	76,887,735	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jumlah Bahan Bacaan	2 Exmplar	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	67,680,000	77,832,000	
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Makanan dan Minuman Tamu	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	41,361,000	86,198,250	
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi/Penyelarasan Pemerintah Ppusat dan Daerah	1 Tahun	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	210,906,600	787,008,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Akuisi Arsip Inaktif	2000 Berkas	Tersedianya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	51,291,600	50,000,000	
2	**17**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**712,960,900**	
2	17	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit			0	561,394,350	
2	17	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 Unit			0	111,155,550	
2	17	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Unit			0	12,857,000	
2	17	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Paket 12 Unit			0	27,554,000	
2	**17**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**809,063,500**	**187,139,500**	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang Keluar	2500 Surat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,315,000	10,729,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	188,700,000	176,410,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	615,048,500	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**253,720,000**	**566,759,000**	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	25 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	229,960,000	506,759,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	0	10,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	27 Unit	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	100 %	23,760,000	50,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**										**0**	**101,074,650**	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**35,960,500**	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	35,960,500	
2	**17**	**02**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**0**	**35,960,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	10 Kopsyah	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	35,960,500	
2	**17**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**0**	**65,114,150**	
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	10 Kopsyah	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	34,296,450	
2	**17**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**65,114,150**	
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	34,296,450	
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	30,817,700	
2	**17**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**0**	**65,114,150**	
2	17	02	1.02	02	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	10 Kopsyah	Jumlah KSP/USP yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	30,817,700	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										**175,000,000**	**723,971,230**	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**175,000,000**	**723,971,230**	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Koperasi/Koperasi Syariah yang berkualitas	30 %	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang mandiri, sehat Akuntable dan transparan.	35 Kop	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang Unggul	35 Kop	141,000,000	423,084,770	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**723,971,230**	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi	30 %			0	423,084,770	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang dibina dan di awasi	30 %			0	300,886,460	
2	**17**	**03**	1.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**175,000,000**	**723,971,230**	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Koperasi/Koperasi Syariah yang berkualitas	30 %	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang patuh terhadap Peraturan dan perundang-udangan	35 Kop	Terwujudnya Koperasi/Koperasi Syariah yang Unggul	35 Kop	34,000,000	300,886,460	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										**0**	**4,413,686,660**	
2	**17**	**04**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**4,413,686,660**	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	4,413,686,660	
2	**17**	**04**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**1,050,000,000**	**4,663,686,660**	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Kesehatan Koperasi/Koperasi Syariah yang Berkualitas	30 %	Penilaian KSP/USP-PS terhadap pelayanan Pola Syariah	15 Kop	Teridentifikasinya Tingkat Kesehatan Koperasi Sayriah	35 Kop	925,000,000	4,413,686,660	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kesehatan Koperasi/Koperasi Syariah yang Berkualitas	30 %	Terwujudnya manajemen Koperasi/Koperasi Syariah yang sehat dan Akuntabel	35 Kop	Teridentifikasinya Tingkat Kesehatan Koperasi Sayriah	35 Kop	125,000,000	250,000,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**04**	1.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**4,413,686,660**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP-PS yang dibina dan dikembangkan	30 %			0	0	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**0**	**0**	
2	**17**	**05**	1.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**0**	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wirausaha yang didiklat	30 %			0	0	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**										**0**	**2,038,143,735**	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**2,038,143,735**	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangannya	30 %			0	1,603,217,185	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**500,000,000**	**2,038,143,735**	
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Persentasi koperasi berkualitas terhadap koperasi aktif	22.42 %	Jumlah Koperasi yang dibina pengembangan kelembagaan/usaha dan infrastruktunya	50 Kop	Terbangunnya Pengembangan Usaha dan Jaringan Kemitraan Lintas Kab/Kota	50 Kop	229,328,400	1,603,217,185	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**2,038,143,735**	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi pengembangannya	30 %			0	434,926,550	
2	**17**	**06**	1.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**500,000,000**	**2,038,143,735**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Persentasi koperasi berkualitas terhadap koperasi aktif	22.42 %	Fasilitasi kemitraan koperasi dan jaringan usaha dengan pihak ketiga	10 Kop	Terbangunnya Pengembangan Usaha dan Jaringan Kemitraan Lintas Kab/Kota	50 Kop	270,671,600	434,926,550	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										**1,280,297,170**	**2,390,850**	
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**										**1,280,297,170**	**2,390,850**	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah UKM yang difasilitasi peningkatan akses permodalan/ pembiayaan, akses teknologi informasi, serta akses sumber daya Produktif	30 30	UKM yang difasilitasi peningkatan Kapasitas Usaha	120 UKM	1,280,297,170	2,390,850	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**07**	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**										**0**	**2,390,850**	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan	30 %			0	2,390,850	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**692,952,500**	**28,176,495**	
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**										**692,952,500**	**28,176,495**	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah yang difasilitasi peningkatan akses pemasaran dan jaringan usaha melalui Promosi/Expo, dan Pameran di Provinsi Lainnya	30 UKM	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas UKM	30 UKM	692,952,500	28,176,495	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	**17**	**08**	1.01		**Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah**										**0**	**28,176,495**	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UKM yang dibina dan difasilitasi pengembangan	30 %			0	28,176,495	
														TOTAL	**14,407,883,721**	**40,653,480,627**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**2,883,078,400**	**5,871,506,697**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**530,998,400**	**747,786,002**	
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Tahun			50,500,000	75,000,000	
2	17	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Pengelola keuangan	1 Tahun			7,254,500	9,500,000	
2	17	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang-barang penunjang/administrasi/surat menyurat perkantoran	1000 Surat			0	10,154,500	
2	17	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Tahun			0	90,321,000	
2	17	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	0	
2	17	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Tahun			0	4,197,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Tersedianya Kebutuahan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	820,500	4,197,500	
2	17	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya jasa administrasi keuangan UPTD	12 Bulan			0	231,648,640	
2	17	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedinya jasa kebersihan kantor	12 Bulan			0	143,450,252	
2	17	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Peralatan kantor	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan			0	19,822,665	
2	17	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetak, penggandaan, dan pengadaan surat-surat kantor	12 Bulan			0	25,084,375	
2	17	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			0	7,992,960	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit			0	101,088,450	
2	17	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan kantor	24 Exemplar			0	6,210,000	
2	17	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dengan Pemerintah Pusat	12 Orang / Kali			0	0	
2	17	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Meubeleur	40 Unit			0	0	
2	17	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun			0	239,771,895	
2	17	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	1 Tahun			0	95,864,000	
2	17	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	1 Tahun			0	30,049,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Mebeleur	1 Tahun			0	0	
2	17	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	83,421,000	
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Yang Tersedia	1 Tahun	Terfasilitasinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	5,907,000	7,992,960	
2	17	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Bahan Logistik yang tersedia	1 Tahun	Terfasilitasinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	6,636,500	30,739,200	
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Tahun	Terfasilitasinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	4,826,200	25,084,375	
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar/Koran yang tersedia	1 Tahun	Terfasilitasinya Kebutuhan Kantor	1 Tahun	5,400,000	6,210,000	
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Yang Keluar	1000 Surat	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	5,396,000	10,154,500	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	61,200,000	90,321,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jasa Umum Pelayanan Kantor	1 Tahun	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	299,455,700	143,450,252	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	6 Unit	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	51,240,000	95,864,000	
2	17	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Meubeler yang dipelihara	15 Set	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	3,802,000	9,500,000	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Tahun	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	10,008,000	239,771,895	
2	17	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Gedung Kantor yang dipelihara	1 Tahun	Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	1 Tahun	18,552,000	320	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**928,549,700**	**1,947,348,935**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		Peningkatan kapasitas SDM Koperasi	300 orang	Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi dan Tenaga PPKL yang diDiklat	399 Orang	Jumlah SDM Koperasi yang terdidik dan terlatihdalam Kapasitas dan Kompetensi di bidang Perkoperasian	399 Orang	928,549,700	1,947,348,935	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang didiklat Jumlah Pendamping Diklat KUKM Provinsi NTB	930 Orang 10 Orang			0	1,947,348,935	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**0**	**3,176,371,760**	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KUKM yang didiklat	550 orang			0	3,176,371,760	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Daya Saing Industri		UKM yang Tangguh dan Mandiri	30 UKM	Jumlah UKM yang di Diklat Tenaga Pendamping Diklat KUKM yang di Diklat	420 Orang 30 Orang	Jumlah Sumber Daya UKM dan Wira Usaha yang terdidik, terlatih dalam Pengelolaan Usahanya	450 Orang	1,423,530,300	3,176,371,760	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
														TOTAL	**2,883,078,400**	**12,084,304,129**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**										**0**	**11,136,829,802**	
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**7,444,633,396**	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**314,499,930**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	85,190,735	
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**191,496,200**	**235,572,992**	
2	18	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	74,056,900	85,190,735	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	65,923,500	68,912,025	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**314,499,930**	
2	18	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	68,912,025	
2	18	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	0 Laporan			0	110,555,250	
2	18	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	0 Laporan			0	49,841,920	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**18**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**191,496,200**	**235,572,992**	
2	18	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	0	81,470,232	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah perencanaan yang tepat sasaran	2 Dokumen	51,515,800	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,239,508,204**	**6,003,175,292**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	5,193,411,404	5,699,697,307	
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,788,869,204**	
2	18	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	61 Orang			0	5,699,697,307	
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,239,508,204**	**6,003,175,292**	
2	18	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	16,596,800	295,776,320	
2	18	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Administrasi keuangan	100 Persen	29,500,000	7,701,665	
2	**18**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**5,788,869,204**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	2 Laporan			0	81,470,232	
2	18	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	7,701,665	
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**1,324,704,262**	
2	18	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	2 Jenis			0	3,151,000	
2	18	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	4 rekening			0	237,361,863	
2	18	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	25 unit			0	24,470,275	
2	18	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	0 Laporan			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	2 Dokumen			0	28,297,820	
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**13,106,800**	**28,297,820**	
2	18	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya adminitrasi BMD	2 Dokumen	13,106,800	28,297,820	
2	**18**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**1,324,704,262**	
2	18	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah unit	25 unit			0	104,891,500	
2	18	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi dan teknis perkantoran Jumlah tenaga administrasi keuangan	6 Orang 5 Orang			0	295,776,320	
2	18	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga keamanan kantor Jumlah tenaga kebersihan	5 Orang 7 Orang			0	251,398,625	
2	18	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis ATK	1 Tahun			0	29,098,795	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan penggandaan	1 Tahun			0	16,707,430	
2	18	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi listrik	0 Tahun			0	0	
2	18	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis/Unit			0	73,498,834	
2	18	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	2 Jenis			0	8,918,250	
2	18	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	2 Jenis			0	32,223,000	
2	18	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	10 Orang			0	93,848,050	
2	18	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	10 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	2 Gedung			0	0	
2	18	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	25 Unit			0	100,510,000	
2	18	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 Unit			0	24,552,500	
2	18	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah/gedung kantor yang direhabilitasi	0 Unit			0	0	
2	**18**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**16,560,000**	
2	18	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang diklat formal Jumlah tenaga penceramah dan pemandu senam	0 Orang 2 Orang			0	16,560,000	
2	**18**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**12,000,000**	**16,560,000**	
2	18	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya jumlah sumber daya yang disiplin dan berkapasitas	100 Persen	12,000,000	16,560,000	
2	**18**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**684,973,410**	**271,001,559**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	18	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	358,080,810	73,498,834	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	54,439,100	29,098,795	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	36,848,500	16,707,430	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	7,755,000	8,918,250	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	77,850,000	32,223,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	18	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya Administrasi umum	100 Persen	150,000,000	110,555,250	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	**18**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**821,676,100**	**516,381,763**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	8,528,900	3,151,000	
2	18	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	176,406,400	237,361,863	
2	18	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	30,740,800	24,470,275	
2	18	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpenuhinya Jasa penunjang	100 Persen	606,000,000	251,398,625	
2	**18**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**320,372,000**	**229,954,000**	
2	18	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	172,150,000	100,510,000	
2	18	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	18,000,000	104,891,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	18	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	130,222,000	24,552,500	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**										**493,287,000**	**748,599,044**	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**212,101,000**	**315,039,384**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %			Jumlah peningkatan iklim investasi	50 Persen	100,055,000	186,186,484	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**315,039,384**	
2	18	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas atau insentif	2 Fasilitas/insentif			0	186,186,484	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**212,101,000**	**315,039,384**	
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %			Jumlah peningkatan iklim investasi	50 Persen	112,046,000	128,852,900	
2	**18**	**02**	1.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**315,039,384**	
2	18	02	1.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	128,852,900	
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**										**0**	**433,559,660**	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	145,756,750	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**										**281,186,000**	**433,559,660**	
2	18	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %			Tersedianya peta potensi dan regulasi	1 Peta	68,924,500	145,756,750	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Rasio Peningkatan Iklim Investasi	50 %			Tersedianya peta potensi dan regulasi	1 Peta	212,261,500	287,802,910	
2	**18**	**02**	1.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi**										**0**	**433,559,660**	
2	18	02	1.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peta Potensi	1 Peta Potensi			0	287,802,910	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**										**0**	**996,043,635**	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**996,043,635**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	345,458,275	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**714,948,000**	**996,043,635**	
2	18	03	1.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Cakupan Promosi Penanaman Modal	Nasional/Internasional %			Jumlah ivent	2 Ivent	345,398,300	345,458,275	
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Cakupan Promosi Penanaman Modal	Nasional/Internasional %			Jumlah ivent	2 Ivent	369,549,700	650,585,360	
2	**18**	**03**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**996,043,635**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	03	1.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Event yang diikuti	2 Event			0	650,585,360	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**										**542,092,100**	**726,294,782**	
2	**18**	**04**	1.01		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**81,745,800**	**127,087,535**	
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %			Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan	4 izin dan non izin	81,745,800	67,626,325	
2	**18**	**04**	1.01		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**859,622,585**	
2	18	04	1.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan yang lingkupnya lintas Kab/Kota	2 Izin			0	67,626,325	
2	18	04	1.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen	50 Perusahaan			0	732,535,050	
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengaduan	2 Dokumen			0	59,461,210	
2	**18**	**04**	1.01		**Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**										**81,745,800**	**127,087,535**	
2	18	04	1.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %			Jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan	4 izin dan non izin	0	59,461,210	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**539,746,037**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan yang menjadi kewenangan provinsi	2750 Izin			0	539,746,037	
2	**18**	**04**	1.02		**Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**460,346,300**	**599,207,247**	
2	18	04	1.02	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %			Jumlah izin yang keluarkan	3500 izin dan non izin	285,022,600	539,746,037	
2	18	04	1.02	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %			Jumlah izin yang keluarkan	3500 izin dan non izin	119,058,800	0	
2	18	04	1.02	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Capaian Layanan Perizinan dan Non Perizinan	87 %			Jumlah izin yang keluarkan	3500 izin dan non izin	56,264,900	59,461,210	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**										**743,672,800**	**482,377,735**	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**743,672,800**	**482,377,735**	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %			Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	147,536,200	148,391,745	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**482,377,735**	
2	18	05	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Realisasi Investasi Jumlah laporan evaluasi perkembangan PMDN/PMA	4 Dokumen 4 dokumen			0	148,391,745	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**743,672,800**	**482,377,735**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %			Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	371,623,400	127,386,650	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**482,377,735**	
2	18	05	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang dibina	20 Perusahaan			0	127,386,650	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**743,672,800**	**482,377,735**	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Persentase Perusahaan Taat LKPM	70 %			Jumlah realisasi investasi	13.362 Milyar	224,513,200	206,599,340	
2	**18**	**05**	1.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**482,377,735**	
2	18	05	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perusahaan yang diawasi	5 Perusahaan			0	206,599,340	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**										**0**	**65,807,370**	
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**65,807,370**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	65,807,370	
2	**18**	**06**	1.01		**Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi**										**113,950,000**	**65,807,370**	
2	18	06	1.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Investasi (kerjasama pemerintah dan badan usaha)		Rasio Izin Investasi yang ditindaklanjuti	50 Persen			Junlah Laporan izin yang diterbitkan	2 Laporan	113,950,000	65,807,370	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
										TOTAL	9,891,082,614	21,456,895,794	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										**0**	**23,513,783,505**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**11,400,288,865**	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**832,962,365**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	305,721,865	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**176,671,400**	**0**	
2	19	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renja	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	145,933,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	6,000,100	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	6,000,100	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**832,962,365**	
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi ke Kab./Kota Jumlah Laporan	75 OT 8 Dokumen			0	527,240,500	
2	**19**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**176,671,400**	**0**	
2	19	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	6,000,100	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Peruabahan DPA-SKPD	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	6,000,100	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terususunnya Dokumen LAKIP DISPORA NTB	1 Dok	Nilai SAKIP BB	70 Skor	6,738,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,611,699,774**	**0**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN DISPORA NTB	65 Orang	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	5,518,005,874	0	
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,313,831,430**	
2	19	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	70 Orang			0	4,301,581,170	
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,611,699,774**	**0**	
2	19	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	0	0	
2	19	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksanananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	12 Bulan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	52,086,200	0	
2	19	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	12 Bulan	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	8,029,000	0	
2	19	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuagan Akhir Tahun	1 Dok	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	11,092,200	0	
2	19	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	3,486,700	0	
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,313,831,430**	
2	19	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	13 Dokumen			0	12,250,260	
2	**19**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,611,699,774**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	12,999,900	0	
2	19	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan	5 Dok	5,999,900	0	
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**3,591,400**	**0**	
2	19	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,253,495,070**	
2	19	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	950 Surat			0	13,236,500	
2	19	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Jenis			0	348,450,000	
2	19	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis	4 Jenis			0	49,956,000	
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**3,591,400**	**0**	
2	19	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	3,591,400	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,253,495,070**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	19	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	8 Orang			0	386,266,140	
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**3,591,400**	**0**	
2	19	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Dokumen Asset/BMD DISPORA NTB	1 Dok	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,253,495,070**	
2	19	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	9 Orang 15 Orang			0	898,763,410	
2	19	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	35 Jenis			0	37,238,265	
2	19	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	30000 Lembar			0	244,682,050	
2	19	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit			0	172,050,005	
2	19	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	120 Eksemplar			0	255,024,000	
2	19	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	1500 Porsi			0	118,680,000	
2	19	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	50 OT			0	631,092,400	
2	19	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	7 Unit			0	2,393,784,800	
2	19	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit			0	162,725,000	
2	19	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	17 Unit			0	541,546,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**19**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**2,715,700**	**0**	
2	19	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Data Kepegawaian ASN DISPORA NTB	65 Orang	2,715,700	0	
2	19	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersusunnya Data Kepegawaian ASN DISPORA NTB	65 Orang	0	0	
2	**19**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**634,817,900**	**0**	
2	19	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	4,300,000	0	
2	19	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	37,718,900	0	
2	19	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	29,000,000	0	
2	19	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	94,655,000	0	
2	19	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	23,400,000	0	
2	19	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	45,744,000	0	
2	19	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	400,000,000	0	
2	**19**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**200,000,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD Penunjang Urusan	10 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD Penunjang Urusan	10 Unit	200,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD Penunjang Urusan	10 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya BMD Penunjang Urusan	10 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**997,500,000**	**0**	
2	19	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	4,500,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	258,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersediannya Jasa Penunjang Urusan	24 Orang	735,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**366,550,000**	**0**	
2	19	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	25,150,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	171,100,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	67,720,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	102,580,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	19	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Asset yang dikelola	325 Unit	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**										**0**	**3,201,446,130**	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**0**	**3,201,446,130**	
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi yang Terseleksi	15 Orang			0	135,005,055	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**3,155,703,100**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	19	02	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	150,031,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**0**	**3,201,446,130**	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wirausahawan Muda yang Dilatih	100 Orang			0	67,410,010	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**3,155,703,100**	**0**	
2	19	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	134,644,700	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**0**	**3,201,446,130**	
2	19	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Pemuda	85 Orang			0	937,549,690	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**3,155,703,100**	**0**	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	505,417,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**0**	**3,201,446,130**	
2	19	02	1.01	04	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka	34 Orang			0	175,618,685	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**3,155,703,100**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	02	1.01	05	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	273,339,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**0**	**3,201,446,130**	
2	19	02	1.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Prasarana Kepemudaan yang Dibangun	12 Unit			0	1,885,862,690	
2	**19**	**02**	1.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi**										**3,155,703,100**	**0**	
2	19	02	1.01	06	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	2,025,650,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	02	1.01	09	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	100 %			Jumlah peserta pelatihan kecakapan Pemuda	210 Orang	66,620,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**										**0**	**8,550,081,180**	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**4,532,388,280**	
2	19	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlit PPLP/PPLPD yang Dibina	64 Orang			0	3,065,355,935	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**2,252,710,500**	**0**	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Presentase Sarana Olahraga yang Terstandar	45 %	2,252,710,500	0	
2	**19**	**03**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**										**0**	**4,532,388,280**	
2	19	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Prasarana Olahraga yang Dibangun	43 Unit			0	1,467,032,345	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**										**0**	**4,017,692,900**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kejuaraan Olahraga Tingkat Provinsi	6900 Orang			0	3,283,912,285	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**										**1,404,028,300**	**0**	
2	19	03	1.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah Medali yang di Peroleh	10 Medali	96,075,600	0	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**										**0**	**4,017,692,900**	
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	100 Orang			0	510,593,905	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**										**1,404,028,300**	**0**	
2	19	03	1.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah Medali yang di Peroleh	10 Medali	0	0	
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah Medali yang di Peroleh	10 Medali	1,307,952,700	0	
2	**19**	**03**	1.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga**										**0**	**4,017,692,900**	
2	19	03	1.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta POPNAS dan PEPARPENAS	173 Orang			0	223,186,710	
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional**										**1,180,738,300**	**0**	
2	19	03	1.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah atlet yang Berprestasi	12 Atlit	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	19	03	1.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah atlet yang Berprestasi	12 Atlit	1,180,738,300	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**03**	1.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	19	03	1.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah atlet pelajar yang dibina	64 Orang			0	0	
2	**19**	**03**	1.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**										**3,995,110,000**	**0**	
2	19	03	1.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan pembinaan altlet berprestasi	100 %			Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Berprestasi	12 Organisasi	3,995,110,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**										**0**	**361,967,330**	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**										**0**	**361,967,330**	
2	19	04	1.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pengembangan Kepemimpinan Pramuka	60 Orang			0	0	
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Pramuka yang dilatih	40 Orang			0	27,213,600	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**										**0**	**0**	
2	19	04	1.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi		Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peserta Pelatihan Kepramukaan Yang Bersertifikat	100 %			Jumlah peserta yang dilatih	50 Orang	0	0	
2	**19**	**04**	1.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**										**0**	**361,967,330**	
2	19	04	1.01	06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Prasarana Kepramukaan yang Dibangun	2 Unit			0	334,753,730	
														TOTAL	**19,981,836,374**	**23,513,783,505**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										**16,414,217,066**	**13,404,435,810**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**15,253,390,466**	**13,322,685,810**	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**222,175,200**	**0**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	21,480,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,002,872,450**	
2	23	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	24,530,765	
2	23	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	53,898,545	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**222,175,200**	**0**	
2	23	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	23,386,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,002,872,450**	
2	23	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	5 Dokumen			0	30,912,460	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**222,175,200**	**0**	
2	23	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	22,787,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,002,872,450**	
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	3 Laporan			0	893,530,680	
2	**23**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**222,175,200**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	25,100,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen	10 Dokumen	18,220,100	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	Jumlah dokumen	10 Dokumen	111,200,900	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**12,783,997,060**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	107 Orang			0	12,779,550,010	
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,214,534,866**	**12,783,997,060**	
2	23	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	12,113,565,566	12,779,550,010	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	16,200,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	69,042,300	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	8,989,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	3,894,400	4,447,050	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**12,783,997,060**	
2	23	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Jenis			0	4,447,050	
2	**23**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,214,534,866**	**12,783,997,060**	
2	23	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	1,662,600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	590,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah laporan	24 Laporan	590,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**21,854,800**	**22,176,600**	
2	23	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	138,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**8,015,324,050**	
2	23	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	2 Surat			0	2,328,750	
2	23	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Jenis			0	340,457,500	
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**21,854,800**	**22,176,600**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	20,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**8,015,324,050**	
2	23	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	103 Orang			0	156,279,250	
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**21,854,800**	**22,176,600**	
2	23	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	110,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**8,015,324,050**	
2	23	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD				0	22,176,600	
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**21,854,800**	**22,176,600**	
2	23	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pengelolaan barang milik daerah	100 %	1,606,000	22,176,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**8,015,324,050**	
2	23	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	48 Unit			0	0	
2	23	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	3 Orang 6 Orang 9 Orang			0	561,260,835	
2	23	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	14 Orang			0	583,715,965	
2	23	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	53 Jenis			0	81,556,045	
2	23	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	9 Jenis			0	663,545,975	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	13 Jenis			0	68,270,900	
2	23	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	120 Eksemplar			0	409,078,000	
2	23	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	435 Orang			0	62,675,000	
2	23	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	12 Kali			0	556,625,300	
2	23	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	10 Unit			0	42,780,000	
2	23	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	10 Unit			0	2,461,549,930	
2	23	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	50 Unit			0	151,800,000	
2	23	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	48 Unit			0	908,764,500	
2	23	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis			0	198,720,000	
2	23	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis			0	252,689,500	
2	23	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	2 Gedung			0	491,050,000	
2	**23**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**56,895,800**	**0**	
2	23	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	21,600,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	Jumlah dokumen	2 Dokumen	33,651,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	937,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	290,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	107 Orang	Jumlah dokumen	2 Dokumen	417,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**652,490,400**	**130,945,900**	
2	23	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Listrik	20 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	12,781,000	68,270,900	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan	20 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	20,311,500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik	30 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	16,984,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetakan	2 Jenis	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	33,751,500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	120 Eksemplar	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	305,041,600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu	650 Orang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	38,520,000	62,675,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Koordinasi	50 Laporan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 Persentase	225,100,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**540,308,400**	**42,780,000**	
2	23	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	529,148,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pengadaan barang milik daerah	100 %	11,160,000	42,780,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**997,981,000**	**342,786,250**	
2	23	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Surat	2 Jenis	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase	2,025,000	2,328,750	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi Air dan Listrik	3 Jenis	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase	272,556,000	340,457,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi	23 Orang	Persentase keterseiaan jasa penunjang umum	100 Persentase	723,400,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**547,150,000**	**0**	
2	23	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	133,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	203,250,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	73,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	111,500,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	26,400,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**										**0**	**3,533,855,355**	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,968,414,175**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung			Jumlah kunjungan layanan elektronik Jumlah kunjungan layanan perpustakaan	30000 orang 100000 orang			0	199,055,800	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**812,758,400**	**0**	
2	23	02	1.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	127,988,300	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,968,414,175**	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pendataan perpustakaan rumah ibadah ponpes dan komunitas jumlah pendataan perpustakaan sekolah di prov NTB (SD, SMP,SMA)	3500 perpustakaan 2500 sekolah			0	1,031,262,500	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**812,758,400**	**0**	
2	23	02	1.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	567,500,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	65,614,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,968,414,175**	
2	23	02	1.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah litersi perpustakaan berbasis insklusi sosial jumlah pendataan perpustakaan rumah ibadah ponpes dan komunitas jumlah replikasi dan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial jumlah SDM pengelola perpustakaan yang dibina jumla NTB (SD, SMP,SMA)	10 kab 3500 perpustakaan 2 kab 150 orang 2500 sekolah			0	399,471,475	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**812,758,400**	**0**	
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	30,773,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,968,414,175**	
2	23	02	1.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan pustaka yang diadakan Jumlah bahan pustaka yang diolah	1250 Judul 5000 Eksemplar			0	12,967,400	
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**812,758,400**	**0**	
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase SDM pengelola perpustakaan yang terbina	100 %	20,883,100	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**	1.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,968,414,175**	
2	23	02	1.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah litersi perpustakaan berbasis insklusi sosial jumlah pembinaan pengelolaan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan yang tersedia jumlah pendataan perpustakaan rumah ibadah ponpes dan komunitas jumlah replikasi dan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial jumlah SDM pengelola perpustakaan yang dibina jumla NTB (SD, SMP,SMA)	10 kab 10 kab 3500 perpustakaan 2 kab 150 orang 2500 sekolah			0	325,657,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**										**158,502,700**	**0**	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase perpustakaan komunitas yang terbina	100 %	74,793,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**1,565,441,180**	
2	23	02	1.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah litersi perpustakaan berbasis insklusi sosial jumlah pembinaan pengelolaan perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan yang tersedia jumlah pendataan perpustakaan rumah ibadah ponpes dan komunitas jumlah replikasi dan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial jumlah SDM pengelola perpustakaan yang dibina jumlah sosialisasi dan literasi perpustakaan yang tersedia jumla NTB (SD, SMP,SMA)	10 kab 10 kab 3500 perpustakaan 2 kab 150 orang 1700 orang 2500 sekolah			0	415,264,770	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah litersi perpustakaan berbasis insklusi sosial jumlah pendataan perpustakaan rumah ibadah ponpes dan komunitas jumlah replikasi dan literasi perpustakaan berbasis inklusi sosial jumla NTB (SD, SMP,SMA)	10 kab 3500 perpustakaan 2 kab 2500 sekolah			0	1,150,176,410	
2	**23**	**02**	1.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi**										**158,502,700**	**0**	
2	23	02	1.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100 %			Persentase perpustakaan komunitas yang terbina	100 %	83,709,500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**										**189,565,500**	**81,750,000**	
2	**23**	**03**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**										**49,027,800**	**0**	
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %	Pengelolaan Koleksi Deposit	2500 Eksemplar	Jumlah pengelolaan koleksi deposit yang tersedia	2500 Eksemplar	49,027,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**	1.01		**Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi**										**0**	**75,799,835**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	03	1.01	01	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelestarian (penjilidan kembali) koleksi perpustakaan yang rusak untuk dapat digunakan kembali oleh Pemustaka Pengelolaan Koleksi Deposit dalam bentuk otomasi Perpustakaan hasil hunting dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	2500 Eksemplar 10000 Eksemplar			0	75,799,835	
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**										**0**	**138,106,720**	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting) Jumlah Naskah Katalog Induk Daerah yang tercetak dan tersedia	2500 Judul 50 Eksemplar			0	80,110,495	
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**										**64,346,300**	**0**	
2	23	03	1.02	01	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	700 Eksemplar	36,385,900	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah Katalog yang terhimpun (hunting)	700 Eksemplar	27,960,400	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**	1.02		**Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah**										**0**	**138,106,720**	
2	23	03	1.02	02	Penerbitan Bibliografi Daerah						Jumlah Bibliografi yang terhimpun (hunting) Jumlah Naskah Bibliografi Daerah yang tercetak dan tersedia	200 Judul 50 Eksemplar			0	57,996,225	
2	**23**	**03**	1.03		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**										**76,191,400**	**81,750,000**	
2	23	03	1.03	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah naskah kuno daerah yang dilestarikan	10 Naskah	34,892,500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Jumlah Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %			Jumlah naskah kuno daerah yang dilestarikan	10 Naskah	41,298,900	81,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**23**	**03**	1.03		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi**										**0**	**119,145,980**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	23	03	1.03	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah naskah kuno yang didayagunakan dan dilayankan secara daring (online) Jumlah naskah kuno yang terhimpun (hunting), dan terialihmediakan	10 Naskah 10 Naskah			0	119,145,980	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										**0**	**1,523,962,830**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**										**0**	**1,373,644,490**	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**										**0**	**246,755,615**	
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip dinamis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah arsip dinamis inaktif	10000 Berkas			0	144,850,320	
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**										**144,663,000**	**101,905,295**	
2	24	02	1.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip dinamis	20000 Berkas	44,640,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip dinamis	20000 Berkas	100,023,000	101,905,295	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**24**	**02**	1.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi**										**0**	**246,755,615**	
2	24	02	1.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip dinamis			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemeliharaan arsip	berkas			0	101,905,295	
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**										**49,200,000**	**439,676,280**	
2	24	02	1.02	02	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %			Jumlah pengelolaan arsip statis	10000 Berkas	49,200,000	439,676,280	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**24**	**02**	1.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi**										**0**	**439,676,280**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	24	02	1.02	02	Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Tanjung, Tanjung			Jumlah arsip statis yang diverifkasi dan dinilai Jumlah dokumen/arsip pembentukan Kabupaten	10000 Berkas 2 Kab./ Kota			0	439,676,280	
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**										**0**	**687,212,595**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Jumlah Informasi Arsip dan Layanan Kearsipan Jumlah Penyiapan Informasi Kearsipan	500 Berkas 500 Berkas			0	389,832,255	
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**										**107,259,300**	**0**	
2	24	02	1.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %	Jumlah Informasi Arsip dan Layanan Kearsipan Jumlah Penyiapan Informasi Kearsipan	150 Orang 500 Berkas			142,468,200	0	
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**										**0**	**687,212,595**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah LKD binaan Jumlah record center Jumlah SDM pengelola arsip di Prov.	11 LKD 31 OPD 50 peserta			0	297,380,340	
2	**24**	**02**	1.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi**										**107,259,300**	**0**	
2	24	02	1.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase peningkatan jumlah pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis	100 %	Record Center OPD	31 OPD			36,025,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**										**26,212,600**	**0**	
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**										**26,212,600**	**0**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan jumlah arsip yang terselamatkan	100 %	Jumlah Arsip yang dipermanenkan	10000 Berkas	Jumlah arsip dipermanenkan dan dimusnahkan	10000 Berkas	26,212,600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
2	**24**	**03**	1.01		**Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun**										**0**	**150,318,340**	
2	24	03	1.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru			Jumlah arsip dipermanenkan dan dimusnahkan	10000 Berkas			0	150,318,340	
														TOTAL	**16,741,551,966**	**41,139,081,665**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**31,660,195,166**	**35,285,812,093**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**23,531,134,666**	**27,820,812,093**	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,605,464,000**	**1,100,640,620**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 dokumen			40,000,000	120,000,000	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**826,210,255**	
3	25	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	185,569,635	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,605,464,000**	**1,100,640,620**	
3	25	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokemen RKA SKPD yang tersusun	1 dokumen			1,370,493,400	100,000,000	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**826,210,255**	
3	25	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	180,205,575	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,605,464,000**	**1,100,640,620**	
3	25	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perubahan RKA yang tersusun	1 dokumen			60,000,000	100,000,000	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**826,210,255**	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	161,418,945	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,605,464,000**	**1,100,640,620**	
3	25	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen			29,971,700	180,205,575	
3	25	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen			29,991,500	161,418,945	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**826,210,255**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Selaprang, Monjok Barat	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	3 Dokumen			0	299,016,100	
3	**25**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**1,605,464,000**	**1,100,640,620**	
3	25	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Kinerja	12 dokumen			30,007,900	250,000,000	
3	25	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 Dokumen			94,999,500	299,016,100	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	203 orang			39,017,361,432	49,377,021,626	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pegawai	258 Org			0	24,688,510,813	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPTB/ BP/ STS yang terverifikasi selama 1 Tahun	2 dokumen			25,974,900	20,000,000	
3	25	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 kali			3,256,800	5,100,000	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	
3	25	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	2 Laporan			0	0	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			7,583,600	8,626,610	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Prov. NTB	2 dokumen			24,029,000	20,000,000	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	
3	25	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	15,870,000	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen			944,200	36,846,000	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	
3	25	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	12 Dokumen			0	36,846,000	
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	0	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**19,575,759,716**	**24,784,583,423**	
3	25	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Semester dan Prognosis	2 dokumen			5,290,500	5,500,000	
3	**25**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**24,749,853,423**	
3	25	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	8,626,610	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**4,239,955,585**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			0	2,816,350	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**48,000,000**	**32,000,000**	
3	25	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan pengamanan aset	1 dokumen			20,000,000	20,000,000	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**4,239,955,585**	
3	25	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jasa Komunikasi air,listrik dan internet	4 Jenis			0	294,860,000	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**48,000,000**	**32,000,000**	
3	25	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian BMD	1 dokumen			20,000,000	6,000,000	
3	25	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan rekonsiliasi BMD	1 dokumen			8,000,000	6,000,000	
3	**25**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**4,239,955,585**	
3	25	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	:aporan BMD	12 Laporan			0	817,389,410	
3	25	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga Adminstrasi Keuangan	9 Orang			0	463,638,600	
3	25	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga Kebersihan dan Keamanan	40 Orang			0	730,508,750	
3	25	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tulis Kantor	1 Thn			0	42,240,305	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	2 jenis			0	8,050,000	
3	25	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat listrik dan elektronik	10 Jenis			0	19,585,650	
3	25	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan dan perlengkapan Kantor	5 Jenis			0	147,995,110	
3	25	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis			0	50,025,000	
3	25	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Makan Minum Rapat dan Kegiatan	2 Jenis			0	23,575,000	
3	25	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan Dinas luar daerah	1 thn			0	85,711,800	
3	25	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perlengkapan gedung Kantor	1 Jenis			0	39,389,800	
3	25	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan gedung Kantor	10 Jenis			0	279,479,210	
3	25	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah mebeleur	2 Jenis			0	103,884,100	
3	25	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor	5 unit			0	143,750,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas	41 unit			0	792,925,000	
3	25	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perlengkapan gedung Kantor	10 Jenis			0	37,455,500	
3	25	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah mebeleur	10 jenis			0	0	
3	25	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor	5 unit			0	0	
3	25	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas	41 unit			0	156,676,000	
3	**25**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**11,764,500**	
3	25	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah pegawai	258 orang			0	11,764,500	
3	**25**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**14,653,000**	**29,000,000**	
3	25	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang dibuat	1 dokumen			5,153,000	6,000,000	
3	25	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen			2,000,000	3,000,000	
3	25	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokomen SKP	1 dokumen			7,500,000	20,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**25**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**229,883,950**	**362,947,450**	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat listrik dan elektronik	10 Jenis			2,900,000	19,585,650	
3	25	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	10 buah			9,937,350	5,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik	20 jenis			10,028,000	15,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetak dan Penggandaan	2 jenis			5,016,000	8,050,000	
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis			9,720,000	50,025,000	
3	25	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan/material yang disediakan	5 jenis			24,985,100	40,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Makan Minum Rapat dan Kegiatan	2 Jenis			29,192,000	23,575,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perjalanan Dinas luar daerah	1 thn			71,492,000	85,711,800	
3	25	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen laporan arsip	1 dokumen			15,363,500	16,000,000	
3	25	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	PPID	3 kegiatan			102,500,000	200,000,000	
3	**25**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,953,944,000**	**1,043,185,100**	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			1,760,000	2,816,350	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa Komunikasi air,listrik dan internet	4 Jenis			220,044,000	294,860,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 unit			11,540,000	15,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tenaga Kebersihan dan Keamanan	40 Orang			1,720,600,000	730,508,750	
3	**25**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**103,430,000**	**468,455,500**	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	8 unit			80,050,000	300,000,000	
3	25	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit mebel yang diservis	10 unit			10,000,000	121,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Perlengkapan gedung Kantor	10 Jenis			13,380,000	37,455,500	
3	25	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang dipelihara	5 unit			0	10,000,000	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**										**2,930,000,000**	**2,174,000,000**	
3	**25**	**02**	1.01		**Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**										**379,000,000**	**654,000,000**	
3	25	02	1.01	04	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jenis kegiatan mitigasi bencana wilayah pesisir dan PPK yang terlaksana	2 kegiatan			379,000,000	654,000,000	
3	**25**	**02**	1.02		**Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi**										**50,000,000**	**150,000,000**	
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jumlah Pertek izin lokasi dan pengelolaan Ruang Laut yang diterbitkan	50 dokumen			100,000,000	300,000,000	
3	**25**	**02**	1.03		**Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**										**2,501,000,000**	**1,370,000,000**	
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan pemanfaatan ruang laut dan pesisir	8.12 %	Jumlah kelompok petambak garam yang terfasilitasi	2 kelompok			2,501,000,000	1,370,000,000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**										**3,060,193,000**	**1,831,000,000**	
3	**25**	**03**	1.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil**										**2,943,435,000**	**1,500,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	03	1.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah unit sarana perikanan tangkap yang tersedia	50 unit			5,886,870,000	3,000,000,000	
3	**25**	**03**	1.07		**Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT**										**99,510,400**	**31,000,000**	
3	25	03	1.07	02	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah surat Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan Dengan Ukuran di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT yang diterbitkan	50 unit			99,510,400	31,000,000	
3	**25**	**03**	1.09		**Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT**										**0**	**451,647,090**	
3	25	03	1.09	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kapal Laik Laut, Laik Simpan, Laik Tangkap	20 kapal			0	451,647,090	
3	**25**	**03**	1.10		**Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**17,247,600**	**300,000,000**	
3	25	03	1.10	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	2.30 %	Jumlah Tanda daftar kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT yang terbit	500 unit			17,247,600	300,000,000	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**										**0**	**0**	
3	**25**	**04**	1.04		**Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**0**	
3	25	04	1.04	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen SOP TDPIK di laut dan lintas daerah Kab/Kota dala 1 daerah Provinsi	1 Dokumen			0	0	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**										**1,450,824,300**	**3,000,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya ikan yang tersedia	1 unit			691,650,000	2,000,000,000	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah unit sarana pembudidayaan ikan di laut yang tersedia	50 unit			2,415,000,000	3,000,000,000	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**										**0**	**0**	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Pembudidaya Ikan Air Tawar dan Payau yang difasilitasi	9 Paket			0	0	
3	**25**	**04**	1.05		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut**										**1,450,824,300**	**3,000,000,000**	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	2.81 %	Jumlah Sarana Budidaya yang tersedia	1 unit			599,998,600	2,000,000,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**83,000,000**	**100,000,000**	
3	**25**	**05**	1.01		**Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil**										**83,000,000**	**100,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap peraturan perundangan (%)	71 %	jumlah sarana pengawasan yang tersedia	1 unit			166,000,000	200,000,000	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**										**605,043,200**	**360,000,000**	
3	**25**	**06**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**99,990,000**	**160,000,000**	
3	25	06	1.01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3 dokumen			99,990,000	160,000,000	
3	**25**	**06**	1.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar**										**454,999,100**	**150,000,000**	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	umlah Pelaku usaha yang mendapatkan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	1135 unit			454,999,100	150,000,000	
3	**25**	**06**	1.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**50,054,100**	**50,000,000**	
3	25	06	1.03	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Konsumsi Ikan	44.46 kg/kap/tahun	Jumlah pelaku usaha perikanan mendapatkan insentif dan fasilitasi	40 unit			50,054,100	50,000,000	
														TOTAL	**31,660,195,166**	**65,565,242,946**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**150,014,000**	**627,500,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**139,514,000**	**327,500,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			2,520,000	60,000,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			0	6,000,000	
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	2 unit			0	45,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			114,000	6,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			30,000	2,000,000	
3	25	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jamuan tamu yang disediakan	40 kotak			0	5,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	5 kali			0	55,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat keluar masuk	500 surat			0	1,500,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	3 jenis			37,650,000	55,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0002 Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			99,200,000	60,000,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit			0	12,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit			0	20,000,000	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**										**10,500,000**	**300,000,000**	
3	25	06	1.02	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ragam produk hasil perikanan yang diawasi	100 sampel			10,500,000	300,000,000	
														TOTAL	**150,014,000**	**627,500,000**	

														TOTAL	**150,014,000**	**627,500,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**1,915,000,000**	**901,910,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**100,000,000**	**151,910,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					4,020,000	57,600,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			0	6,000,000	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen penatausahaan BMD	1 dokumen			0	10,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	20 komponen			0	3,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			4,002,400	2,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	8000 lembar			1,775,100	10,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis			12,202,500	10,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Keruak, Tanjung Luar	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	1 orang			60,000,000	26,640,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					18,000,000	26,670,000	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**										**1,502,000,000**	**550,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0008 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Kawasan Konservasi yang dikelola	37643 Ha			1,502,000,000	450,000,000	
3	25	02	1.03	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah POKMASWAS yang terbentuk dan terbina	5 Kelompok			0	100,000,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**313,000,000**	**200,000,000**	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	5 Kelompok			313,000,000	200,000,000	
														TOTAL	**1,915,000,000**	**901,910,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**3,852,038,000**	**804,600,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**99,978,000**	**171,600,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	3 orang			11,592,000	57,600,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			4,384,000	6,000,000	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen penatausahaan BMD	1 dokumen			0	8,500,000	
3	25	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	100	100 persen			0	0	
3	25	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	100	100 persen			0	0	
3	25	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	100	100 persen			0	0	
3	25	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	100	100 persen			0	0	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 komponen			1,972,000	3,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			2,514,000	3,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	8000 lembar			1,985,000	2,500,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	10 kali			6,000,000	11,000,000	
3	25	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung yang diadakan	1 unit			5,000,000	5,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			6,531,000	11,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			60,000,000	54,000,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit			0	10,000,000	
3	**25**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**										**0**	**100,000,000**	
3	25	02	1.01	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Kawasan Perairan Pesisir dan PPK yang terehabilitasi	2 Ha			0	100,000,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**3,752,060,000**	**533,000,000**	
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaku usaha KP pengelola ruang laut dan pengguna jasa kelautan yang terawasi	10 unit			0	33,000,000	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang terawasi	10 unit			3,489,060,000	200,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	2 Kelompok			263,000,000	300,000,000	
TOTAL															**3,852,038,000**	**804,600,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**392,999,700**	**524,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**80,499,700**	**124,000,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1 orang			6,000,000	40,000,000	
3	25	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya biaya jasa telepon, air dan listrik	12 Bulan			0	15,525,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			2,551,000	3,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	5000 lembar			1,949,200	3,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	5 kali			5,000,000	8,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis jasa yang disediakan	1 jenis			7,999,500	10,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	2 orang			60,000,000	60,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan Wilayah Bima Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit			0	20,000,000	
3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**312,500,000**	**400,000,000**	
3	25	05	1.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operasi Pengawasan	5 operasi			39,000,000	200,000,000	
3	25	05	1.01	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokmaswas Yang terbina	7 kelompok			293,000,000	300,000,000	
														TOTAL	**392,999,700**	**539,525,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**1,682,300,000**	**2,169,500,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**425,589,800**	**542,000,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	5 orang			15,480,000	100,000,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			0	6,000,000	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen penatausahaan BMD	1 dokumen			0	9,000,000	
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan	10 komponen			0	2,500,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			1,019,800	2,500,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Sekotong, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	4000 lembar			0	0	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	8 kali			0	10,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	10 unit			0	25,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			90,000,000	140,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0001 Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	8 orang			305,000,000	215,000,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit			7,320,000	12,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit			6,770,000	20,000,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 unit			0	0	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**										**1,256,710,200**	**1,627,500,000**	
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan Unit prasarana Budidaya ikan di laut	5 unit			1,156,710,200	1,347,000,000	
3	25	04	1.05	05	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Sarana Budidaya ikan Payau	1 unit			100,000,000	280,500,000	
														TOTAL	**1,682,300,000**	**2,169,500,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0003 Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**487,500,000**	**681,000,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**75,000,000**	**131,000,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	1 orang			3,000,000	40,000,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	1 jenis			12,000,000	25,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga layanan umum yang tersedia	2 Orang			60,000,000	66,000,000	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**										**412,500,000**	**550,000,000**	
3	25	04	1.05	03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pelatihan Air Payau yang terlaksana	3 kegiatan			100,000,000	150,000,000	
3	25	04	1.05	04	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana usaha budidaya ikan di laut yang tersedia	1 unit			312,500,000	400,000,000	
														TOTAL	**487,500,000**	**681,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**3,563,923,400**	**2,426,235,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**601,423,400**	**761,235,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			4,620,000	90,000,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			0	6,000,000	
3	25	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan Penatausahaan BMD	1 dokumen			0	8,500,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan logistik	32 jenis			8,227,400	7,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	20000 lembar			1,458,000	5,500,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	5 kali			0	7,000,000	
3	25	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 unit			0	20,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat keluar masuk	500 surat			0	2,235,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis			187,200,000	320,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	5 orang			347,000,000	140,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0004 Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 unit			7,620,000	15,000,000	
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit			45,298,000	140,000,000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**										**2,962,500,000**	**1,665,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	3 unit			1,862,500,000	1,170,000,000	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	3 unit			1,100,000,000	495,000,000	
														TOTAL	**3,563,923,400**	**2,426,235,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Pelabuhan Perikanan Teluk Santong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**299,999,800**	**1,213,235,000**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**299,999,800**	**418,235,000**	
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	4 orang			3,000,000	145,000,000	
3	25	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen RKBMD	1 dokumen			2,242,000	6,000,000	
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan logistik	10 jenis			3,267,800	7,000,000	
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	2000 lembar			3,032,000	6,000,000	
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	6 kali			6,254,000	7,000,000	
3	25	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat keluar masuk	500 surat			430,000	2,235,000	
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa yang disediakan	2 jenis			44,700,000	70,000,000	
3	25	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	4 orang			187,800,000	110,000,000	
3	25	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit			39,100,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0005 Pelabuhan Perikanan Teluk Santong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	25	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5 unit			4,500,000	20,000,000	
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 unit			5,674,000	45,000,000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**										**0**	**795,000,000**	
3	25	03	1.06	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	1 unit			0	45,000,000	
3	25	03	1.06	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kapal yang menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan (unit)	500 unit			0	750,000,000	
														TOTAL	**299,999,800**	**1,213,235,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										**0**	**38,115,710,076**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**23,646,023,101**	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,935,507,500**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	1,452,392,500	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**292,488,000**	**1,089,000,000**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	132,900,000	686,000,000	
3	26	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan	1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	50,000,000	40,000,000	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,935,507,500**	
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 tahun			0	307,050,000	
3	26	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	4 Dokumen			0	176,065,000	
3	**26**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**292,488,000**	**1,089,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	26	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen laporan kerja	1 tahun	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	2,088,000	60,500,000	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	4 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	107,500,000	302,500,000	
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,369,178,093**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	1 tahun			0	8,362,278,093	
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**8,248,574,634**	**9,432,874,893**	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	1 tahun			7,356,410,634	8,362,278,093	
3	26	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan 4 Orang			892,164,000	1,070,596,800	
3	**26**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,369,178,093**	
3	26	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 tahun			0	6,900,000	
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,262,852,308**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1500 surat			0	30,302,500	
3	26	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	12 Bulan			0	369,150,000	
3	26	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis			0	163,341,170	
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**50,000,000**	**96,800,000**	
3	26	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah BMD	12 Dokumen			50,000,000	96,800,000	
3	**26**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,262,852,308**	
3	26	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	1 Tahun			0	16,100,000	
3	26	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	12 Dokumen			0	458,712,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan 2 Orang			0	1,108,314,800	
3	26	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	6 Orang			0	183,882,125	
3	26	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	40 Jenis			0	223,500,775	
3	26	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10000 Lembar			0	67,259,360	
3	26	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	1 Unit			0	43,838,288	
3	26	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120 Buah			0	286,769,290	
3	26	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	30 Exp			0	36,639,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan Dan Minuman	60 Kegiatan			0	512,325,000	
3	26	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	60 Kali			0	5,866,334,000	
3	26	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 Unit			0	1,066,015,500	
3	26	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit			0	1,047,075,000	
3	26	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	26 Unit			0	466,256,000	
3	26	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	120 Buah			0	17,537,500	
3	26	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah/Gedung Kantor Yang direhabilitasi	0 Unit			0	1,299,500,000	
3	**26**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**78,485,200**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Yang Diklat Formal	6 Orang			0	78,485,200	
3	**26**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**73,000,000**	**60,500,000**	
3	26	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Diklat Formal	6 Orang			73,000,000	60,500,000	
3	**26**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**634,213,300**	**1,470,150,000**	
3	26	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	1 Unit			36,656,500	66,550,000	
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Jenis 120 Buah			215,912,800	423,500,000	
3	26	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10000 Lembar			42,884,000	60,500,000	
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	30 Exp			31,860,000	60,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan Dan Minuman	60 Kegiatan			116,000,000	496,100,000	
3	26	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	60 Kali			190,900,000	363,000,000	
3	**26**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**309,140,000**	**700,000,000**	
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	2 Unit			309,140,000	700,000,000	
3	**26**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**720,385,344**	**756,855,000**	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1500 surat			23,350,000	36,905,000	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	12 Bulan			236,000,000	302,500,000	
3	26	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis			123,500,000	260,150,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS Jumlah Tenaga Kebersihan	1 Tahun 6 Orang			337,535,344	157,300,000	
3	**26**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**550,340,000**	**502,150,000**	
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	26 Unit			240,960,000	248,050,000	
3	26	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor Jumlah Rumah/Gedung Kantor Yang direhabilitasi	1 Unit 0 Unit			257,480,000	181,500,000	
3	26	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	120 Buah			51,900,000	72,600,000	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**										**0**	**5,252,569,800**	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**										**0**	**976,467,300**	
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket wisata	20 paket			0	509,359,380	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**										**0**	**509,359,380**	
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah paket wisata	20 paket			0	509,359,380	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**										**0**	**976,467,300**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	02	1.01	02	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sanggar yang di bimtek	100 sanggar			0	0	
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sanggar yang di bimtek	100 sanggar			0	467,107,920	
3	**26**	**02**	1.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi**										**0**	**509,359,380**	
3	26	02	1.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %					0	0	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**65,069,100**	**2,270,051,700**	
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah Kawasan	1 Th			65,069,100	2,270,051,700	
3	**26**	**02**	1.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**0**	**2,903,246,300**	
3	26	02	1.02	03	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kawasan	4 Dokumen			0	2,270,051,700	
3	26	02	1.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat lingkar Geopark yang dibina	2 Geopark			0	633,194,600	
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**										**4,745,000,100**	**13,030,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah destinasi yang dikembangkan	20 paket			4,745,000,100	9,680,000,000	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah Desa Wisata	20 Desa Wisata			0	3,350,000,000	
3	**26**	**02**	1.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi**										**0**	**1,372,856,200**	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarpras	50 paket			0	1,372,856,200	
3	**26**	**02**	1.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**69,905,900**	**936,713,000**	
3	26	02	1.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah Paket Wisata	2 Paket			69,905,900	603,963,000	
3	26	02	1.04	05	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Geosite yang tertata	37.5 %	Jumlah standarisasi industri dan usaha pariwisata	10 paket			0	332,750,000	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**										**0**	**6,782,966,800**	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**0**	**6,782,966,800**	
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Media Promosi	20 Media			0	2,605,743,600	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**2,199,999,900**	**4,840,363,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	26	03	1.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Media Promosi	10 Media			2,126,000,000	1,815,000,000	
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	jumlah fasilitasi kegiatan pemasaran	5 Kegiatan			35,984,900	1,512,500,000	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**0**	**6,782,966,800**	
3	26	03	1.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Event	10 Kegiatan			0	2,060,533,200	
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Dokumen Penyediaan Data Dan Informasi	2 Dokumen			0	464,772,500	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**2,199,999,900**	**4,840,363,000**	
3	26	03	1.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Jenis Dokumen Penyediaan Data Dan Informasi	2 Dokumen			13,015,000	363,000	
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Efektifitas promosi di dalam meningkatkan angka kunjungan wisatawan	4650000 orang	Jumlah Mitra di Dalam dan di Luar Negeri	10 Lokasi			25,000,000	1,512,500,000	
3	**26**	**03**	1.01		**Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi**										**0**	**6,782,966,800**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	03	1.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mitra di Dalam dan di Luar Negeri	14 Lokasi			0	1,651,917,500	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**										**164,885,700**	**6,050,000,000**	
3	**26**	**04**	1.01		**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif**										**164,885,700**	**6,050,000,000**	
3	26	04	1.01	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Produk yang dipasarkan	10 produk			53,400,000	605,000,000	
3	26	04	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Ruang Kreasi dan Orang Kreatif yang terdata	10 orang			72,185,700	4,840,000,000	
3	26	04	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase HaKI yang telah memberikan kontribusi dalam pertambahan nilai ekonomi kreatif	30.21 %	Jumlah Usaha Kreatif Bagi Pemula yang terdata	10 usaha			39,300,000	605,000,000	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**										**0**	**2,434,150,375**	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**										**0**	**2,434,150,375**	
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaku Wisata Yang Dilatih	130 Orang			0	650,865,500	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**										**1,062,577,900**	**2,117,500,000**	
3	26	05	1.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	jumlah SDM yang terlatih	150 orang			862,578,100	605,000,000	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**										**0**	**2,434,150,375**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokdarwis Yang Diberikan Penyuluhan	20 Kelompok			0	1,783,284,875	
3	**26**	**05**	1.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan**										**1,062,577,900**	**2,117,500,000**	
3	26	05	1.01	02	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	jumlah pokdarwis	40 pokdarwis			105,739,800	907,500,000	
3	26	05	1.01	03	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	Jumlah Pelaku Wisata Yang Dilatih Jumlah Pokdarwis Yang Diberikan Penyuluhan	130 Orang 20 Kelompok			94,260,000	605,000,000	
3	**26**	**05**	1.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**										**0**	**0**	
3	26	05	1.02	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase SDM penunjang layanan pariwisata yang memenuhi standar	60 %	jumlah pendampingan ekraf	10 kali			0	0	
														TOTAL	**19,185,579,878**	**81,978,027,049**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										**0**	**7,662,950,576**	
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**4,373,715,976**	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersusunnya dokumen perencanaan tepat waktu	2 Dokumen			0	30,545,150	
3	26	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	perencanaan tersusunnya dokumenepat waktu	4 Dokumen			0	0	
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Koordinasi & Penyusunan DPA SKPD	1 Tahun			0	150,756,500	
3	26	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaaan prangkat daerah	1 Tahun			0	52,614,455	
3	26	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksanya Evaluasi Kinera Perangkat Daerh	1 Tahun			0	167,491,405	
3	26	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Tahun			0	100,756,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	1 Tahun			10,800,000	100	
3	26	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	9 orang			0	917,755,497	
3	26	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	pelaksanaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen			0	33,088,260	
3	26	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Tekirim satu tahun	1500 surat			0	7,158,750	
3	26	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhi Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			0	1,055,700,230	
3	26	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pembayaran Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 bulan			0	422,421,105	
3	26	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahnu			0	85,727,239	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpenuhinya alat tulis kantor	1 tahun			0	118,850,890	
3	26	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Peralatab dan Perlengkapan Kantor	12 bulan			0	197,561,145	
3	26	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			0	15,939,000	
3	26	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpenuhinya biaya makan minum rapat dan tamu kantor	1 Tahun			0	644,460,000	
3	26	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terssedianya kendaraanoprasional yang dibutuhkan	4 unit			0	527,618,850	
3	26	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	1 Tahun			0	14,400,000	
3	26	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	1 tahun			0	112,723,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan			30,680,000	0	
3	26	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun			1,260,000	0	
3	26	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhinya makan minum tamu	1 Tahun			0	0	
3	26	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya kendaraan oprasional yang dibutuhkan	2 unit			0	0	
3	26	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun			1,036,600	0	
3	26	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpenuhi Jasa Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun			557,000,000	0	
3	26	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun			1,249,666,900	6	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	2 unit			0	0	
3	26	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			17,760,000	0	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**										**0**	**3,289,234,600**	
3	26	02	1.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelaksanaan pemasaran pariwisata daya tarik destinasi unggulan islamic center	1 tahun			0	381,527,565	
3	26	02	1.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							152,000,000	0	
3	26	02	1.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	2 Kegiatan			124,500,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	02	1.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 tahun			341,448,500	0	
3	26	02	1.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana islamic center	1 tahun			0	2,907,707,035	
TOTAL															**2,410,152,000**	**7,944,802,682**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**108,934,847,116**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**32,404,042,676**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**112,697,470**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dibuat	1 Dokumen			0	68,619,465	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**34,670,000**	**0**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen			3,135,000	0	
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			6,090,000	0	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**112,697,470**	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Dokumen Perencanaan	4 Dokumen			0	29,196,200	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**34,670,000**	**0**	
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perencanaan	2 Dokumen			6,510,000	0	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**112,697,470**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Kinerja	5 Dokumen			0	14,881,805	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**34,670,000**	**0**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Yang dibuat	12 Laporan			5,719,000	0	
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Yang dibuat	12 Laporan			13,216,000	0	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**33,218,892,223**	**0**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya	407 Orang			33,202,525,223	0	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**29,097,191,824**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Yang Terbayar Gaji dan Tunjangannya	407 Orang			0	28,889,019,974	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN dinas pertanian dan perkebunan	430 Orang			0	204,240,000	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**33,218,892,223**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	9 Orang			14,034,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	1 Laporan			2,333,000	0	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**29,097,191,824**	
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan yang Dibuat	2 Dokumen			0	0	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Tahunan Yang Dibuat	1 Dokumen			0	3,931,850	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**16,276,000**	**0**	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	1 Dokumen			0	0	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,194,153,382**	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat	1678 Surat			0	1,765,825	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			0	252,605,550	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**16,276,000**	**0**	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset	2 Laporan			16,276,000	0	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**3,194,153,382**	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Jumlsh Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	9 Orang 3 Orang			0	163,455,940	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Petugas keamanan kantor Jumlah Petugas kebersihan dan keamanan kantor	8 Orang 9 Orang			0	554,799,100	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	36 Jenis			0	20,203,660	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis			0	76,974,560	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis peralatan listrik dan penerangan	10 Jenis			0	7,127,470	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 tahun			0	158,199,175	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Kabar	1440 Exp			0	9,729,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Rapat, Tamu, dan siswa Yang Difasilitasi Makan dan Minumnya	300 Orang			0	52,992,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD yang dilaksnakan	30 Buah			0	161,439,300	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengandan Kendaraan Dinas	1 Unit			0	617,533,785	
3	27	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur yang diadakan	193 Buah			0	252,263,517	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bangunan gedung dinas yang dipelihara	1 Unit			0	53,187,500	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	60 Unit			0	785,852,500	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	31 unit			0	26,024,500	
3	**27**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Orang			0	0	
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**166,739,000**	**0**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	10 Jenis			5,364,000	0	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 Unit			20,900,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	20 Jenis			14,409,500	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			17,165,500	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah eksemplar surat kabar	1440 Eksemplar			8,460,000	0	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu Yang Difasilitasi Makan dan Minumnya	300 Orang			25,440,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti	50 Buah			75,000,000	0	
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah berkas arsip yang diproses	250 berkas			0	0	
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**220,000,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengandan Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			0	0	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang di adakan	10 Unit			220,000,000	0	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel yang diadakan	193 Buah			0	0	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan	1 PAKET			0	0	
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	1 PAKET			0	0	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**913,577,000**	**0**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Yang Diproses	1678 Buah			1,280,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			213,697,000	0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah Tenaga Kontrak	3 Orang 18 Orang			698,600,000	0	
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**358,200,000**	**0**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit			25,000,000	0	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	35 UNIT			275,250,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan mesin yang di pelihara	31 Unit			20,950,000	0	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bangunan gedung dinas yang dipelihara	1 Unit			37,000,000	0	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**75,931,953,440**	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**										**0**	**1,489,206,300**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat dan masin pertanian yang diserahkan ke masyarakat Jumlah Pengawalan Pupuk Bersubsidi, Pestidida dan Validasi E RDKK	15 Unit 2 Kegiatan			0	1,489,206,300	
3	**27**	**02**	1.01		**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**										**4,981,290,000**	**0**	
3	27	02	1.01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah alat dan mesin pertanian yang diserahkan ke masyarakat	15 Unit			4,477,290,000	0	
3	27	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi yang dilaksankan	1 Tahun			504,000,000	0	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**										**14,264,616,300**	**631,292,500**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah bantuan Benih Hortikultura	45 Ha			1,705,850,000	631,292,500	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**										**0**	**74,442,747,140**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bantuan Benih Hortikultura	45 Ha			0	631,292,500	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bantuan Benih Tanaman Pangan	750 Ha			0	12,196,101,900	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**										**14,264,616,300**	**631,292,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah bantuan Benih Tanaman Pangan	1000 Ha			910,979,200	0	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100 %	Jumlah luasan bantuan benih perkebunan	5000 Ha			11,647,787,100	0	
3	**27**	**02**	1.02		**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**										**0**	**74,442,747,140**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bantuan Benih Perkebunan	6010 Ha			0	61,615,352,740	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**598,851,000**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**0**	**598,851,000**	
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	50 Unit			0	460,851,000	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**87,501,889,100**	**598,851,000**	
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Unit Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	50 Unit			53,753,625,000	460,851,000	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**0**	**598,851,000**	
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Jaringan Irigasi Yang Dibangun	15 Unit			0	138,000,000	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**87,501,889,100**	**598,851,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Unit Jaringan Irigasi Yang Dibangun	15 Unit			11,798,500,100	138,000,000	
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %	Jumlah Bagunan Indutri Hasil Tembakau	1 UNIT			21,949,764,000	0	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**0**	**598,851,000**	
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penyusunan target prognosa yang hadir	1 keg			0	0	
														TOTAL	**141,676,149,623**	**110,164,990,616**	

														TOTAL	**141,676,149,623**	**110,164,990,616**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**3,215,605,100**	**310,000,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**442,667,400**	**50,000,000**	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	3 Orang			4,620,000	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Surat menyurat	300 Buah			0	588,800	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis, jasa Komunikasi, Listrik dan Air	3 jenis			0	39,399,000	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengelola Barang Milik Daerah	1 Orang			0	5,902,030	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset yang dibuat	6 Laporan			0	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	3 Orang			0	35,728,200	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Petugas keamanan kantor Jumlah Petugas kebersihan dan keamanan kantor	2 Orang 6 Orang			0	360,691,118	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Alat tulis kantor	5 Jenis			0	16,132,775	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan	2 Jenis			0	1,200,600	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			0	4,889,570	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat kabar	720 Exp			0	9,729,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Rapat, Tamu, dan siswa Yang Difasilitasi Makan dan Minumnya	108 Orang			0	5,658,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD yang dilaksnakan	10 Buah			0	92,471,500	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Diadakan	1 Unit			0	355,338,500	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	15 Unit			0	99,291,000	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	21 Unit			0	8,268,500	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Mantang	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Unit/Paket	8 Unit			0	2,386,250	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	10 Jenis			5,851,500	0	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang diadakan	12 Jenis			15,508,800	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			3,600,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar	720 Exp			12,600,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindak lanjuti	165 Buah			40,000,000	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang diproses	300 Buah			600,000	0	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Tengah, Batukliang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis			39,150,000	50,000,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honornya Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honornya	2 Orang 6 Orang			247,567,100	0	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihar	11 Unit			64,600,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang difasilitasi/dipelihar	11 Unit			8,570,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0004 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**177,407,700**	**260,000,000**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bibit Unggul Tembakau	100 Kg			133,291,700	260,000,000	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bibit Unggul Tanaman Perkebunan Tersedianya Bibit Unggul Tembakau	400000 Batang 100 Kg			44,116,000	0	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bibit Unggul Bersertifikat Tanaman Tahunan Tersedianya Bibit Unggul Bersertifikat Tanaman Tembakau	1000 Hektar 250 Kilo Gram			0	270,250,000	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**2,595,530,000**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan Laboratorium Tersedianya sarana pendukung kegiatan di UPTD	21 Jenis 8 Paket			2,595,530,000	0	
														TOTAL	**3,215,605,100**	**1,617,924,843**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**4,809,611,075**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,418,325,475**	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD yang dibuat	42 buah			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan			959,100	0	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	1 Orang			7,404,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	1 Laporan			4,005,000	0	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Narmada, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Dokumen Laporan Akhir Tahun yang dibuat	1 DOK			0	4,605,750	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat yang diproses	345 Buah			0	1,466,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang difasilitasi	3 jenis			0	94,185,000	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan barang milik daerah yang dibuat	2 Dok			0	2,018,250	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan aset yang dibuat	2 Laporan			36,755,000	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	4 orang			0	79,768,600	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga keamanan Jumlah tenaga kebersihan	2 orang 5 orang			0	210,976,700	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	11 jenis			0	21,472,225	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 jenis			0	21,263,270	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 jenis			0	15,591,930	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10 unit/buah			0	193,222,425	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat kabar	8604 exp			0	8,280,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta pertemuan/rapat yang difasilitasi	1663 orang			0	19,543,100	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD yang dibuat	12 buah			0	149,847,300	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	10 unit			0	203,785,175	
3	27	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur yang diadakan	1 paket			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	24 unit			0	327,819,000	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dinas yang dipelihara	9 unit			0	64,480,500	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 Jenis			13,111,000	0	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket			0	0	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	11 jenis			14,733,200	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 jenis			8,634,200	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat kabar	100 exp			7,200,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi	200 orang			11,600,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat	5 buah			50,000,000	0	
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit			0	0	
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan gedung kantor yang dibangun	1 Paket			0	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diproses	300 buah			1,275,000	0	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis sumber daya listik dan internet yang dibayarkan	2 jenis			46,800,000	0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga keamanan yang dibayarkan honornya Jumlah Tenaga Kebersihan yang dibayarkan honornya	2 orang 4 otrang			180,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara	12 unit 1 unit			63,720,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	11 unit			8,080,000	0	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 unit			0	0	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**319,001,500**	**0**	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebun benih yang difasilitasi	1 Kebun			319,001,500	0	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**759,238,000**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan DAK yang dilaksanakan	3 Paket			759,238,000	0	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung/bangunan yang dibangun	4 unit			0	3,391,285,600	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**										**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0008 Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah luasan pertanaman perkebunan yang aman dari serangan OPT dan DPT	50873 Ha			0	0	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luasan pengendalian OPT tanaman perkebunan	100 Ha			334,098,500	0	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luasan Penanganan DPI Tanaman Perkebunan	1 Ha			0	0	
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luasan yang....	1 tahun			0	0	
														TOTAL	**1,866,614,500**	**4,809,611,075**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**500,092,100**	**6,610,696,495**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**400,000,100**	**846,824,770**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan			5,000,000	0	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	12 bulan			3,000,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan keuangan ajgur tahun yang dibuat	1 Laporan			958,000	0	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunnya laporan tahunan	1 laporan			0	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Meningkatnya kelancaran surat menyurat	12 bulan			0	5,888,000	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kelancaran komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			0	69,759,000	
3	27	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	10,200,000	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset Yang DIbuat	2 Laporan			5,804,600	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Administrasi keuangan lancar	12 bulan			0	99,360,000	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya pesonil, alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan			0	315,065,040	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	12 bulan			0	17,400,765	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			0	17,404,100	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan			0	3,586,160	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	12 bulan			0	8,468,830	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya surat kabar	12 bulan			0	7,659,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 kali			0	60,186,400	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kendaraan dinas yang siap operasional	25 buah			0	0	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kendaraan dinas yang siap operasional	12 bulan			0	375,486,500	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	1 jenis			2,344,600	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	2 jenis			6,990,000	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					7,246,300	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya surat kabar	12 bulan			3,960,000	7,659,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minumannya	10 Orang			2,665,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 kali			19,968,000	60,186,400	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat yang diproses	48 buah			2,760,000	0	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kelancaran komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			76,830,000	69,759,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pesonil, alat dan bahan kebersihan kantor	12 bulan			151,643,600	315,065,040	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas yang siap operasional	12 bulan			103,530,000	375,486,500	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	12 bulan			7,300,000	8,468,830	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan yang dipelihara	1 Unit			0	0	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak			Meningkatnya kelancaran operasional kantor	4 paket			0	0	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak			Pembangunan/rehabilitasi/renopasi UPTD BPTP dan penyediaan sarana pendukung	1 tahun			0	5,610,000,000	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**										**100,092,000**	**153,871,725**	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	1 tahun			56,603,000	58,204,950	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak			Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam	1 tahun			0	58,204,950	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pembangunan Sumber Daya Manusia					Terkendalinya perkembangan OPT	1 tahun			43,489,000	95,666,775	
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terkendalinya perkembangan OPT	1 tahun			0	95,666,775	
														TOTAL	**500,092,100**	**7,744,832,015**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**7,840,490,450**	**0**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**779,914,950**	**0**	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah	1 Tahun			8,160,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya laporan keuangan	1 Tahun			665,000	0	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD yang disusun	1 Dokumen			0	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa surat menurat	1 Tahun			0	1,422,550	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1 Tahun			0	87,457,500	
3	27	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	10 Unit			0	8,165,000	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Aset	2 Laporan			17,902,200	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun			0	48,521,950	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun 84 OB 84 OB			0	501,497,750	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun			0	13,582,190	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun			0	9,287,860	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun			0	5,292,300	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun			0	8,280,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman kantor	1 Tahun			0	16,681,900	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun			0	48,944,000	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Tahun			0	314,145,500	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya komponen instalasi listrik	1 Tahun			9,102,000	0	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Tahun			8,480,000	0	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Tahun			29,270,750	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			9,580,000	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan/majalah	1 Tahun			7,200,000	0	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya fasilitas makanan dan minuman tamu	1 Tahun			9,280,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya koordinasi program pusat dan daerah	1 Tahun			35,000,000	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya jasa surat menyurat	1 Tahun			2,205,000	0	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Tahun			68,550,000	0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1 Tahun			492,800,000	0	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	1 Tahun			81,720,000	0	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**1,766,507,870**	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya benih/bibit buah-buahan	5 Jenis			0	264,176,850	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya benih/bibit buah-buahan	5 Jenis			0	0	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya benih sumber tanaman pangan	162 Ton			515,788,400	0	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya benih padi	96 ton			0	1,502,331,020	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**6,544,787,100**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0003 Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan DAK yang dilaksanakan	1 Paket			6,544,787,100	0	
TOTAL															**7,840,490,450**	**2,829,786,370**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**1,155,792,895**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**940,482,765**	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen anggaran yang dibuat	2 DOK			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 dokumen			0	0	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					5,160,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	5 orang			0	0	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat Jumlah dokumen laporan tahunan yang dibuat	1 DOK 1 DOK			0	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat yang diproses	200 buah			0	3,358,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang difasilitasi	3 jenis			0	169,152,465	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan aset yang dibuat	2 DOK			0	0	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan aset yang dibuat	1 laporan			0	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	8 orang			0	26,772,000	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga keamanan jumlah tenaga kebersihan	3 orang 10 orang			0	502,843,250	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	36 jenis			0	29,896,550	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 jenis			0	6,900,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	4 jenis			0	15,222,205	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	5 unit			0	23,722,545	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat kabar	360 exp			0	8,280,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta pertemuan/rapat yang difasilitasi	80 orang			0	7,544,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD yang dibuat	6 buah			0	146,366,250	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	27 unit			0	0	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	74 unit			0	425,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik penerangan yang diadakan	4 jenis			4,054,000	0	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	41 jenis			26,112,600	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	6 jenis			28,366,400	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar	480 exp			7,200,000	0	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi makanan dan minumannya	80 oh			0	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindak lanjuti	12 buah			37,500,000	0	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terfasilitasinya spring bed pada balai pelatihan pertanian dan perkebunan	48 buah			117,504,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang diproses	240 lembar			3,195,000	0	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 jenis			129,600,000	0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honornya	11 orang			420,000,000	0	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihara	26 unit			141,630,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang difasilitasi/dipelihara	58 unit			38,140,000	0	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihara	26 unit			10,000,000	0	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**3,910,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan/gedung yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	2 unit			0	3,910,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi/dipelihara	26 unit			0	0	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**										**4,130,650,000**	**0**	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyuluh pertanian ASN yang meningkat kompetensinya	60 orang			1,299,109,100	0	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	150 orang			0	0	
3	27	07	1.01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyuluh pertanian swasta/swadaya yang meningkat kompetensinya	90 orang			100,000,000	0	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilaksanakan	1 kegiatan			700,541,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0007 Balai Latihan Pertanian dan Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang dilaksanakan	1 kegiatan			2,030,999,900	0	
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Pekan Daerah dan Pekan Nasional	2 kegiatan			0	211,400,130	
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah korporasi petani yang didampingi	3 unit			0	0	
TOTAL															**5,099,112,000**	**1,155,792,895**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**5,354,887,900**	**7,341,477,272**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**414,991,000**	**1,508,654,272**	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga administrasi keuangan	3 orang			22,920,000	0	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dibuat	1 Laporan			3,231,600	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat	1 Tahun			0	9,818,700	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Belanja Telepon, listrik dan Internet	1 Tahun			0	70,380,000	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan aset yang dibuat	2 Laporan			4,500,000	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tenaga administrasi Keuangan	1 Tahun			0	77,309,900	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terperliharanya kebersihan kantor	1 Tahun			0	117,421,072	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			0	17,825,000	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			0	13,639,000	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			0	12,075,000	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan Kantor	1 Tahun			0	897,575,000	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Surat kabar	1 Tahun			0	6,532,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Menghadiri Agenda Pertemuan Nasional	1 Tahun			0	40,250,000	
3	27	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya sarana kerja	1 Paket			0	51,750,000	
3	27	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya sarana kerja	1 Paket			0	141,804,200	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Ketersediaan dan Kelayakan Kendaraan dinas roda 2 dan 4	65 Unit			0	181,334,300	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Kendaraan roda 4	1 Unit			0	23,000,000	
3	27	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Ketersediaan dan Kelayakan Seragam Kerja Karyawan	65 Buah			0	53,081,700	
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	SDM yang Memadai	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			5,000,000	12,075,000	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Peralatan Kantor Tersedianya sarana kerja	1 Tahun 1 Paket			0	897,575,000	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			10,000,000	17,825,000	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun			3,585,700	13,639,000	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Surat kabar	1 Tahun			8,460,000	6,532,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan tamu yang difasilitasi makan dan minumnya	30 Orang			0	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Menghadiri Agenda Pertemuan Nasional	1 Tahun			75,000,000	40,250,000	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya sarana kerja	1 Paket			0	141,804,200	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	1 Tahun			6,023,700	9,818,700	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Belanja Telepon, listrik dan Internet	1 Tahun			53,400,000	70,380,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terperliharanya kebersihan kantor	1 Tahun			90,750,000	117,421,072	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan roda 4 Ketersediaan dan Kelayakan Kendaraan dinas roda 2 dan 4	1 Unit 65 Unit			118,770,000	181,334,300	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dinas yang dipelihara	10 unit/buah			13,350,000	0	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	1 unit			0	0	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dihasilkannya Benih unggul bersertifikat dan berlabel	1 Tahun			0	0	
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terjaminnya mutu dan jumlah benih yang beredar di pasaran	1 Tahun			0	0	
3	27	02	1.02	03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terjaminnya mutu dan jumlah benih yang beredar di pasaran	1 Tahun			0	0	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**5,832,823,000**	
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian			Kab. Lombok Barat, Narmada, Peresak Kab. Sumbawa, Moyo Hilir, Serading Kota Bima, Raba, Rabadompu Barat			Kantor Laboratorium dan Sub Laboratorium	6 Paket			0	4,708,157,500	
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian						Kantor Laboratorium dan Sub Laboratorium	6 Paket			0	4,708,157,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0002 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						Gedung Kantor	10 Paket			4,939,896,900	1,124,665,500	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor	10 Paket			0	1,124,665,500	
														TOTAL	**5,354,887,900**	**14,888,096,144**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**1,466,629,400**	**2,942,153,150**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,106,629,400**	**2,589,440,100**	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Keungan yang dibayarkan	1 tahun			4,941,600	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat yang diproses	100 surat			0	5,719,065	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening Listrik Yang Dibayarkan	2 rekening			0	150,713,250	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan aset yang dibuat	2 Laporan			0	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Pengeloa Administrasi Keuangan Yang Dibayarkan	12 bulan			0	81,594,570	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah petugas cleaning service yang dibayarakan honornya jumlah petugas keamanann yang dibayarakan honornya	12 orang 6 orang			0	1,062,794,580	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	1 Tahun			0	41,670,480	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Belanja Cetak dan Penggandaan	1356 Lembar			0	22,088,050	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pembbelian Alat Listrik dan Elektronik	1 tahun			0	31,953,210	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kantor (Pengadaan AC Ruang Rapat Serba Guna) Yang Disediakan Jumlah Peralatan Kantor (Pengadaan Laptop) Yang Disediakan	6 unit 5 unit			0	138,451,950	
3	27	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	993 unit			0	1,051,808,630	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan Jumlah Surat Kabar yang dibayarkan perbulan	1 paket 60 bulan			0	9,729,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kegiatan Rapat Yang Dibayarkan Jumlah Makanan dan Minuman Siswa Yang Dibayarkan	1 tahun 1440 orang			0	48,014,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kegiatan Perjalan Dinas	1 tahun			0	151,375,650	
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	1 tahun			0	921,087,900	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Yang Di service	24 unit			0	370,852,000	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara	91 unit			0	66,619,500	
3	27	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pakaian Khusus Siswa	400 stel			0	0	
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Belanja Bahan Ajar / Keterampilan	1 tahun			0	352,713,050	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	1 tahun			15,001,600	27,785,400	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Peralatan Kantor yang akan dibeli	1 tahun			0	120,393,000	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	1 tahun			29,702,900	36,235,200	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Cetak dan Penggandaan yang dibayarkan	1 tahun			19,561,000	19,207,000	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Bahan Bacaan	1 tahun			8,460,000	8,460,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Yang Dibiayai Makanan dan Minuman	1 tahun			129,807,000	4,175,200	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang dibiayai	1 tahun			57,235,000	131,631,000	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1 tahun			0	0	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pembelian Alat Rumah Tangga (Pengadaan Sound System)	1 tahun			0	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pembelian Benda Pos	717 tahun			2,985,000	4,973,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0005 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening yang dibayarkan	1 tahun			74,300,000	131,055,000	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Belanja Jasa Petugas Cleaning Service yang dibayarkan Jumlah Belanja Jasa Petugas Keamanan yang dibayarkan Jumlah Pembelian Alat Pembersih dan Kebersihan	12 bulan 12 bulan 1 tahun			558,495,300	924,169,200	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Orang/Lapangan	1 tahun			126,240,000	322,480,000	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan kantor	1 tahun			79,900,000	57,930,000	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung kantor	1 tahun			0	800,946,000	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan	1 Unit			0	0	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**										**360,000,000**	**0**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	629 Orang			360,000,000	0	
														TOTAL	**1,466,629,400**	**7,096,625,785**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**113,104,340**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**113,104,340**	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terjadinya sinkronisasi perencanaan kegiatan dalam daerah	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan tahunan yang dibuat	1 Laporan			7,433,000	0	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	3 orang			0	55,576,740	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan keuangan yang dibuat	1 Laporan			21,467,700	0	
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya laporan kinerja SKPD	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat yang diproses	100 buah			0	4,627,600	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang difasilitasi	3 jenis			0	52,900,000	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya pengelolaan aset Barang Milik Daerah	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Adanya Laporan Asset	2 Laporan	8,373,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan yang dibayarkan honornya	3 orang			0	55,576,740	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatibaru	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedia dan Terciptanya Lingkungan kantor yang bersih	10 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Alat tulis kantor	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya penunjang kegiatan kantor dan sekolah	31000 Lembar			0	0	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya penerangan lingkungan kantor yang memadai	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan kantor sebagai penunjang kegiatan	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan sebagai penunjang kegiatan	50 Eksemplar			0	0	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makan dan minum rapat tamu dan siswa	1800 Orang			0	0	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terjadinya sinergis kegiatan antara pusat dan daerah	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya bangunan kantor dan sekolah yang nyaman	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Bima, Asakota, Jatiwangi	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terjadinya mobilisasi kegiatan kantor dan sekolah	1 Tahun			0	0	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan	2 Jenis			6,148,000	0	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	352 Orang			200,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2 Jenis			1,200,000	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah exp surat kabar/tabloid	900 exp			10,007,000	0	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu/orang tua siswa yang difasilitasi	415 Orang			12,500,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPPD yang dibuat dan ditindaklanjuti	10 SPPD			55,107,000	0	
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung/bangunan/ruang kelas yang dibangun	1 Unit			0	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diproses	100 buah			3,904,000	4,627,600	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang difasilitasi	3 jenis			45,999,100	52,900,000	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	2 unit			32,729,600	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0006 Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga juru masak asrama yang dibayarkan honornya Jumlah tenaga kebersihan yang dibayarkan honornya Jumlah tenaha keamanan yang dibayarkan honornya	2 Orang 5 Orang 4 Orang			323,870,500	0	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit			56,727,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 Unit			42,280,000	0	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbayarnya jasa tenaga teknis dan Tersedianya Sumber Daya Pertanian dan ketahanan pangan tingkat SMK	1 Tahun			0	0	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan	1 Unit			0	0	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**										**622,858,000**	**0**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah siswa yang difasilitasi di SMKPP	352 Orang			622,858,000	0	
														TOTAL	**1,450,603,900**	**226,208,680**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**59,631,299,629**	**81,677,332,674**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**16,061,129,138**	**21,366,583,176**	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**741,714,600**	**1,820,409,842**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	189,131,300	230,288,512	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,293,180,592**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Renjan yang dihasilkan	1 Dokumen			0	472,770,750	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**741,714,600**	**1,820,409,842**	
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	67,938,000	441,290,650	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,293,180,592**	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen			0	230,288,512	
3	27	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan yang diselesaikan	2 Dokumen			0	898,795,150	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**741,714,600**	**1,820,409,842**	
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	67,709,100	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	63,760,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,293,180,592**	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Singkoronisasi	20 Laporan			0	441,290,650	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**741,714,600**	**1,820,409,842**	
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	67,578,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**2,293,180,592**	
3	27	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Kinerja Diselesiakan	2 Laporan			0	250,035,530	
3	**27**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**741,714,600**	**1,820,409,842**	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	141,882,000	898,795,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	5 Dokumen	143,716,200	250,035,530	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,732,472,799**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pegawai Menerima Gaji	160 Orang			0	13,542,387,505	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**13,468,466,973**	**13,542,387,505**	
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	13,187,366,843	13,542,387,505	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	27,222,200	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	138,880,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen penyusunan RKA yang dihasilkan (Dokmen)	2 Dokumen	Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	42,424,100	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	13,235,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,732,472,799**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan dan Hasil Kinerja	2 Laporan			0	162,816,494	
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**13,468,466,973**	**13,542,387,505**	
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	14,345,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	44,993,830	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan keuangan yang dihasilkan	5 Laporan	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,732,472,799**	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	1 Laporan			0	27,268,800	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,090,291,449**	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	5000 Surat			0	44,528,000	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**89,606,900**	**54,195,130**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	14,924,200	54,195,130	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,090,291,449**	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pelayanan Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	6 Rekening			0	396,830,500	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**89,606,900**	**54,195,130**	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	23,333,200	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	27	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	14,894,500	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,090,291,449**	
3	27	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	160 Orang			0	28,886,275	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan pengelolaa Aset	2 Laporan			0	54,195,130	
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**89,606,900**	**54,195,130**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	5 Dokumen	36,455,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**27**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**13,090,291,449**	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengelolaa administrasi keuangan	9 Orang			0	931,384,425	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Petugas Keamanan kantor Jumlah Petugas kebersihan kantor	5 Orang 9 Orang			0	607,706,000	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat tulis kantor	25 Jenis			0	92,979,144	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	300 Lembar			0	15,444,500	
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Jenis			0	26,868,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit			0	452,844,700	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	4400 Exemplar			0	23,943,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman Rapat/tamu	750 Orang			0	331,936,000	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Kali			0	259,019,100	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan yang diadakan	5 Unit			0	2,443,900,305	
3	27	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur yang diadakan	25 Unit			0	132,351,775	
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit			0	93,610,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan Operasiona yang dipelihara	29 Unit			0	721,701,475	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	15 Unit			0	62,136,800	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	15 Unit			0	17,615,700	
3	27	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	2 Unit			0	6,352,410,020	
3	**27**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**19,967,300**	**0**	
3	27	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan PAD	1 Laporan	0	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis Laporan PAD	1 Laporan	19,967,300	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**696,635,500**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS mengikuti Bimtek/Pelatihan	10 Orang			0	696,635,500	
3	**27**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**128,277,800**	**696,635,500**	
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	14,973,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	23,985,900	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	9,943,700	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	21,917,000	696,635,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	7,458,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pengawasan pegawai	165 Orang	50,000,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**230,137,465**	**750,190,344**	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	9,996,030	26,868,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	25,440,200	92,979,144	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	24,900,425	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	19,995,800	15,444,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	9,933,000	23,943,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	34,956,900	331,936,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	99,945,970	259,019,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terbinanya pegawai	165 Orang	4,969,140	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**400,260,500**	**2,576,252,080**	
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	0	0	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	200,401,500	2,443,900,305	
3	27	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	0	132,351,775	
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	199,859,000	0	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jenis BMD yng diadakan	50 unit	0	0	
3	**27**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**784,544,100**	**1,049,064,500**	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan	10,670,000	44,528,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan	223,960,000	396,830,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Layanan	1 layanan	549,914,100	607,706,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	**27**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**198,153,500**	**877,448,275**	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit	182,550,000	721,701,475	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit	15,603,500	62,136,800	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit	0	93,610,000	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	27	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	95 unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**40,880,015,387**	**12,278,396,635**	
3	**27**	**02**	1.03		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi**										**0**	**0**	
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Dokumen Sumber Daya Genetik Hewan yang dipublikasikan	1 Dokumen			0	0	
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Dokumen Pengembangan dan manajemen mutu Sumber Daya Genetik Hewan yang dipublikasikan	1 Dokumen			0	0	
3	**27**	**02**	1.04		**Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi**										**0**	**0**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Jumlah lahan HPT dikelola	100 Ha			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Dokumen Pengembangan mutu benih pakan yang dihasilkan	1 Dokumen			0	0	
3	27	02	1.04	03	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/BIMTEK Pakan	5 Orang			0	0	
3	**27**	**02**	1.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi**										**0**	**0**	
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Frekuensi pengawasan yang dilakukan	12 Kali			0	0	
3	**27**	**02**	1.06		**Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor**										**50,371,627**	**0**	
3	27	02	1.06	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	10 toko/depo	35,311,627	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	02	1.06	02	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlah distributor obat hewan yang diawasi	10 toko/depo	15,060,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**										**0**	**12,278,396,635**	
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bibit Ternak yang diadakan	4 Jenis			0	8,956,565,918	
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**										**40,829,643,760**	**12,278,396,635**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	02	1.07	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlh bibit ternak yang diadakan	1000 ekor	40,639,818,100	8,956,565,918	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %			Jumlh bibit ternak yang diadakan	1000 ekor	189,825,660	3,321,830,717	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**02**	1.07		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain**										**0**	**12,278,396,635**	
3	27	02	1.07	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bibit Hijauan Makan Ternak yang diadakan	2500 Bibit/Stek			0	3,321,830,717	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**567,450,200**	**36,150,213,361**	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**198,857,000**	**1,734,857,685**	
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	9 unit	0	0	
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %	Klinik Pelayanan Kesehatan Hewan	1 unit	Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	9 unit	198,857,000	0	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**0**	**1,734,857,685**	
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Lembar, Jembatan Kembar			Jumlah Holdingraond yang di Pelihara	1 Unit			0	615,433,885	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**198,857,000**	**1,734,857,685**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	03	1.01	06	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	9 unit	0	615,433,885	
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah unit pelayanan yang terpelihara	9 unit	0	1,119,423,800	
3	**27**	**03**	1.01		**Penataan Prasarana Pertanian**										**0**	**1,734,857,685**	
3	27	03	1.01	08	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Jumlah RPH yang di Pelihara	1 Unit			0	1,119,423,800	
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**368,593,200**	**34,415,355,676**	
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	2 lokasi	218,639,400	31,687,641,121	
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**34,415,355,676**	
3	27	03	1.02	01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wilayah Sumberbibit Ternak yang dikembangkan	4 Lokasi			0	31,687,641,121	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**368,593,200**	**34,415,355,676**	
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %			Jumlah wilayah sumber bibit ternak yang dikembangkan	2 lokasi	149,953,800	2,727,714,555	
3	**27**	**03**	1.02		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**34,415,355,676**	
3	27	03	1.02	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak			Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wilayah Sumberbibit Ternak yang diBina	8 Lokasi			0	2,727,714,555	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**0**	**8,933,564,573**	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,159,826,646**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Penyakit yang dikendalikan	5 Kasus			0	384,682,475	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**382,559,274**	**1,159,826,646**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit	132,950,000	384,682,475	
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit	83,618,920	367,783,800	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,159,826,646**	
3	27	04	1.01	02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sertifikat Pembebasan Hoq Cholera	1 Sertifikat			0	367,783,800	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**										**382,559,274**	**1,159,826,646**	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah PHMS yang dikendalikan	5 penyakit	165,990,354	407,360,371	
3	**27**	**04**	1.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**										**0**	**1,159,826,646**	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Populasi HPR yang dikendalikan	1000 Ekor			0	407,360,371	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**										**394,665,580**	**724,044,784**	
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit	123,580,500	142,426,040	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**										**0**	**724,044,784**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan hasil pengujian Produk Pangan Asal Hewan	1 Laporan			0	142,426,040	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Usaha yang diawasi	10 Lokasi			0	443,388,744	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**										**394,665,580**	**724,044,784**	
3	27	04	1.02	02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit	151,305,080	443,388,744	
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH/RPU/TPH diawasi	61 unit	119,780,000	138,230,000	
3	**27**	**04**	1.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi**										**0**	**724,044,784**	
3	27	04	1.02	03	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan produk pangan asal hewan	1 Laporan			0	138,230,000	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**										**0**	**6,484,774,618**	
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Peta Penyakit	1 Laporan			0	891,737,600	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**										**604,891,370**	**5,593,037,018**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	04	1.03	01	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi	20 sertifikat	168,990,370	0	
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah RPH dan kelompok pengolah hasil pternakan yang tersertifikasi	20 sertifikat	435,901,000	5,593,037,018	
3	**27**	**04**	1.03		**Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan**										**0**	**6,484,774,618**	
3	27	04	1.03	02	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sertifikat Unit Usaha yang dihasilkan	5 Sertifikat			0	5,593,037,018	
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**										**301,373,000**	**972,801,675**	
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH	1 persen	131,106,800	891,737,600	
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**										**0**	**564,918,525**	
3	27	04	1.05	01	Pengelolaan Penerbitan sertifikat kesejahteraan hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen NKV/ Sertifikat yang dihasilkan	6 Lokasi			0	483,854,450	
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemotongan Betina Produktif yang dikendalikan	1 Persen			0	81,064,075	
3	**27**	**04**	1.05		**Kesejahteraan Hewan**										**301,373,000**	**972,801,675**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	04	1.05	02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Penurunan Ternak Yang Terinfeksi PHMS	<1 %			Jumlah pemotongan betina produktif yang diekndalikan di RPH	1 persen	170,266,200	81,064,075	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	**27**	**05**	1.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**										**0**	**0**	
3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang/Peternak yang terdampak	2000 Peternak			0	0	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**										**439,215,680**	**3,432,429,379**	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**										**259,300,600**	**909,748,934**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah produk hasil peternakan yang dipamerkan	10 paket	259,300,600	909,748,934	
3	**27**	**07**	1.02		**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**										**0**	**909,748,934**	
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan expo/bazar/pasar murah	5 Kali			0	909,748,934	
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**										**0**	**2,522,680,445**	
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok/Koorporasi Peternak yang terbentuk	28 Kelompok			0	845,012,398	
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**										**179,915,080**	**2,522,680,445**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	07	1.03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi	89,886,040	845,012,398	
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**										**0**	**2,522,680,445**	
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok/Koorporasi Peternak yang terbina	25 Kelompok			0	470,607,013	
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**										**179,915,080**	**2,522,680,445**	
3	27	07	1.03	02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi	45,022,040	470,607,013	
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas		Persentase Kelompok Ternak Berbasis Korporasi	100 %			Jumlah kelompok berbasis korporasi	3 korporasi	45,007,000	1,207,061,034	
3	**27**	**07**	1.03		**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**										**0**	**2,522,680,445**	
3	27	07	1.03	03	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi petani	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok/ Koorporasi Peternak yang dinilai	25 Kelompok			0	1,207,061,034	
														TOTAL	**59,631,299,629**	**172,284,516,962**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**3,845,588,615**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,258,293,430**	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	laporan kinerja yang dihasilakan	4 dokumen	jumlah dokumen yang di hasilkan	4 dokumen	23,279,500	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK yang diadakan	25 Jenis	laporan keuangan yang dihasilkan	3 dokumen	13,112,400	0	
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Dokumen			0	57,017,000	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			0	3,176,875	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen perencanaan RKBMD	1 dokumen	laporan BMD SKPD yang dihasilkan	1 dokumen	5,024,500	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Jenis			0	451,605,000	
3	27	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	12 Orang			0	9,901,500	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	1 Laporan			0	44,613,100	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	3 Dokumen			0	37,320,720	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Keamanan	3 Orang			0	139,392,650	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	3 Jenis			0	4,741,450	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1 Buku			0	129,030,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	10 Jenis			0	1,823,900	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket			0	54,890,880	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan Pemeliharaan	12 Unit			0	191,875,200	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit			0	72,349,375	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 Unit			0	60,555,780	
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	20 orang			0	0	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	38 Orang	3,703,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Diadakan	2 Unit	Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	38 Orang	33,435,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10000 Lembar	Cakupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	38 Orang	700,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Kendaraan roda dua/roda tiga	1 Unit	Kendaraan Roda Dua/Roda Tiga	1 Unit	20,275,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	5000 Surat	Jumlah layanan	1 Jenis	2,739,700	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	3 Jenis	Jumlah layanan	1 Jenis	9,190,600	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas kebersihan dan keamanan kantor	4 orang	Jumlah layanan	1 Jenis	120,113,300	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah BMD terpelihara	8 Unit	0	191,875,200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Mesin Lainnya	8 Unit	Jumlah BMD terpelihara	8 Unit	106,197,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**2,579,547,980**	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang/peternak yang dibimbing	500 Orang			0	1,939,861,170	
3	27	02	1.04	01	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Laporan yang dihasilkan	1 Laporan	Jumlah lahan HPT yang dikelola	6 Ha	743,168,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Bahan Pakan Ternak Berkwalitas/standar	30 Ton			0	516,727,660	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Laporan yang dihasilkan	1 Laporan	Jumlah lahan HPT yang dikelola	6 Ha	88,652,500	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Jumlah HPT yang dihasilkan	15 Ton	Jumlah HPT yang dihasilkan	15 Ton	53,932,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0004 Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	10 ton			0	122,959,150	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**7,747,205**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Tersedianya Bangunan dan Sarana Pendukung UPTD	5 Unit			0	7,747,205	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Cakupan Pengembangan Wilayah Sumber Bibit Ternak	100 %	Jumlah sarana dan prasarana kantor	3 Unit	Jumlah BMD yang diadakan	3 Unit	19,555,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
														TOTAL	**1,243,077,500**	**4,037,463,815**	

														TOTAL	**1,243,077,500**	**4,037,463,815**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**696,604,573**	**488,006,750**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**438,554,840**	**65,822,200**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyusunan dok perrencanaan balai	4 dokumen			34,403,250	0	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyusunan dok perrencanaan balai	4 dokumen			0	23,000,000	
3	27	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyusunan laporan tahunan balal	1 dokumen			0	16,215,000	
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyusunan laporan tahunan balal	1 dokumen			33,227,550	0	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Petugas pewngelola keuangan	3 orang			34,839,870	0	
3	27	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pengisian laporan bulanan dan triwulan	1 dok			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			0	7,399,100	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	16,000,000	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah REK yang dibayarkan	4 rek			0	95,162,500	
3	27	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Persiapan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah			0	60,950,000	
3	27	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pengisian imtaq dan olah raja	12 kali			0	10,419,000	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pengawsan aset uptd	5 unit			0	0	
3	27	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	kendaraan roda 2 dan roda 4	5 unit			0	15,525,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Petugas pewngelola keuangan	3 orang			0	80,592,000	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah petugas keamanan Jumlah petugas kebrsihan	1 orang 3 orang			0	144,900,000	
3	27	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	servis peralatan kantor	3 unit			0	0	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	persediaan atk kantor	12 rim			0	23,017,595	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Persediaan bahan rapat/fotocopy	12 kali			0	9,545,000	
3	27	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	persediaan peralatan kebun	10 buah			0	0	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	penyediaan informasi harian dan teknis	2 dokumen			0	3,450,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Konsumsi rapat dan imtag	12 kali			0	0	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Koordinasi dan konsultasi jejaring lab dan rsh	4 kali			0	224,192,500	
3	27	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan laptop e kinerja	4 unit			0	11,500,000	
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan bahan pemeliharaan kantor	4 unit			0	28,750,000	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan bahan pemeliharaan kendaraan operasional dan servis	4 unit			0	7,532,500	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Penyediaan bahan pemeliharaan perlengkapan	5 unit			0	25,300,000	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pemeliharaan peralatan kantor	4 unit			0	3,539,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	10,000,000	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	persediaan atk kantor	12 rim			17,515,410	0	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persediaan bahan rapat/fotocopy	12 kali			2,640,000	0	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	penyediaan informasi harian dan teknis	2 dokumen			1,386,000	0	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Koordinasi dan konsultasi jejaring lab dan rsh	4 kali			5,747,200	0	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan laptop e kinerja	4 unit			6,804,380	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			1,786,180	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah REK yang dibayarkan	4 rek			49,245,000	0	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Persiapan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah			2,475,000	0	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah petugas keamanan Jumlah petugas kebersihan Pengisian imtaq dan olah raga	1 orang 3 orang 12 kali			120,000,000	0	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan bahan pemeliharaan kendaraan operasional dan servis	4 unit			0	7,532,500	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	kendaraan roda 2 dan roda 4	5 unit			19,800,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan bahan pemeliharaan perlengkapan	5 unit			7,909,000	0	
3	27	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pemeliharaan peralatan kantor	4 unit			0	3,539,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyediaan bahan pemeliharaan kantor	4 unit			100,776,000	28,750,000	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**319,834,550**	
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					jumlah rsh yg dkelola	1 unit			0	145,770,550	
3	27	03	1.01	05	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rsh yg dkelola	1 unit			0	145,770,550	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Pembangunan pagar kawat kelling RSH dan Laboratorium	280 meter			0	174,064,000	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Pembangunan pagar kawat kelling RSH dan Laboratorium	280 meter			0	174,064,000	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**258,049,733**	**0**	
3	27	04	1.01	01	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Jumlah Vaksin yang di Adakan	50 Dosis			33,236,803	0	
3	27	04	1.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan yang di Adakan	900 ekor			75,424,380	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0003 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	04	1.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kasus yg diperiksa	5 kasus			0	0	
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			jumlah pemeriksaan laboratium	5 penyakit			149,388,550	0	
3	27	04	1.03	03	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			jumlah pemeriksaan laboratium	5 penyakit			0	334,088,110	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**										**0**	**102,350,000**	
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			Pengawasan laboratorium	1 unit			0	102,350,000	
3	27	06	1.02	02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Pengawasan laboratorium	1 unit			0	102,350,000	
														TOTAL	**696,604,573**	**2,035,269,305**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**1,713,077,500**	**15,885,187,835**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**436,245,736**	**5,211,949,293**	
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	12,984,000	312,004,200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	25 Orang			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	1 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	4,571,800	243,390,600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran	3 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	100 %	11,318,500	72,478,980	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Administrasi ATK Pelaksanaan Tugas ASN	21 Jenis	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	3,130,400	0	
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Tenaga Penatausahakan Keuangan SKPD	1 Orang	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	4,020,000	211,263,740	
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	4 Kali	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	2,307,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			0	312,004,200	
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan Keuangan	4 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan	100 %	4,261,000	0	
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen RKBMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	672,000	0	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	3,036,000	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat					0	365,010,000	
3	27	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Dokumen Inventaris BMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	3,135,000	0	
3	27	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rekonsiliasi BMD	1 Dokumen	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	1,137,000	0	
3	27	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit			0	131,764,010	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	36 Orang			0	0	
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	2 Dokumen			0	47,478,555	
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Penatausahaan RKBMD	1 Laporan	Jumlah Laporan BMD SKPD yang dihasilkan	100 %	873,600	47,478,555	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Adaministrasi Keuangan	12 Dokumen			0	211,263,740	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	8 Orang			0	374,409,870	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	30 Jenis			0	72,478,980	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	6 Lembar			0	45,870,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	8 Jenis			0	47,328,020	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket			0	1,783,959,442	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	1 Media			0	8,280,000	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	350 Orang			0	26,063,600	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	4 Unit			0	85,088,500	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	23 Unit			0	0	
3	27	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor Yang Direhabilitasi	4 Paket			0	1,454,523,726	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Informasi	370 Lembar	Jumlah Laporan PAD	100 %	4,889,000	0	
3	27	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunnya Laporan PAD	1 Laporan	Jumlah Laporan PAD	100 %	4,945,146	0	
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	4 Orang			0	243,390,600	
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Mesin Absensi	1 Unit	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	2,200,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Dokumen Anjab	1 Dokumen	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	1,618,500	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Komponen Instalasi Listik	6 Jenis	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	3,069,400	47,328,020	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1 Unit	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	3,017,400	1,783,959,442	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	23 Jenis	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	1,991,300	374,409,870	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang Cetakan	5 Lembar	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	2,700,000	45,870,050	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Pengadaan Bahan Bacaan/ Koran	365 Examplar	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	5,400,000	8,280,000	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Konsumsi	170 Orang	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	2,682,000	26,063,600	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Rapat koordinasi dan Konsultasi	1 Kali	Jumlah Pegawai yang dibina dan diawasi	100 %	7,500,000	0	
3	27	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	1 Unit	Jumlah BMD yang Diadakan	100 %	2,907,190	0	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor	1 Paket	Jumlah BMD yang Diadakan	100 %	4,427,500	0	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terkelolanya Surat-surat	300 Surat	Jumlah Layanan	100 %	1,784,300	3,036,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening yang dibayarkan	6 Rekening	Jumlah Layanan	100 %	54,825,000	365,010,000	
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Unit	Jumlah Layanan	100 %	2,650,000	131,764,010	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersediannya Tenaga Penatausahakan Keuangan SKPD	8 Orang	Jumlah Layanan	100 %	240,000,000	0	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	18,000,000	85,088,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan	3 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	14,120,000	0	
3	27	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	6 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	4,113,700	0	
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	Jumlah BMD Terpelihara	100 %	4,995,000	1,454,523,726	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**10,673,238,542**	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Semen Beku yang di Produksi	150000 Dosis			0	9,597,945,552	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Tersedianya Pakan Ternak Tersedianya Semen Beku	365 Ton 125000 Dosis	Peningkatan Populasi ternak	5 %	1,076,831,380	9,597,945,552	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sampel Semen Beku yang diperiksa	200 Sempel			0	1,075,292,990	
3	27	02	1.05	02	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Terujianya Benih/Bibit Ternak	200 Sampel	Peningkatan Populasi ternak	5 %	189,499,960	1,075,292,990	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0002 Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	1.05	03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	9 %	Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak	1 Kali	Peningkatan Populasi ternak	5 %	10,500,424	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede			jumlah gedung dan sarana pendukung UPTD	10 Unit			0	0	
														TOTAL	**1,713,077,500**	**31,770,375,670**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**5,402,513,930**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**2,089,234,785**	
3	27	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	0	
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	4 laporan			0	0	
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 laporan			20,000,000	34,224,000	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	25 Jenis			1,821,700	33,543,430	
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jasa administrasi administrasi dan teknis perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2 Orang 3 Orang			0	114,517,000	
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 laporan			0	724,500	
3	27	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	1 laporan			0	34,224,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	14 laporan			5,000,000	7,084,000	
3	27	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	14 laporan			0	7,084,000	
3	27	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan	1 laporan			0	724,500	
3	27	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			0	1,265,000	
3	27	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pelayanan Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	2 Jenis			0	62,157,040	
3	27	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pelayanan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit			0	0	
3	27	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	45 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengelolaan Asset	2 laporan			0	0	
3	27	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional	15 unit			0	0	
3	27	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jasa administrasi administrasi dan teknis perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	2 Orang 3 Orang			0	114,517,000	
3	27	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	6 Orang 5 Orang			0	353,272,640	
3	27	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan kantor	15 unit			0	0	
3	27	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	25 Jenis			0	33,543,430	
3	27	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1000 Lembar			0	25,211,795	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	15 Jenis			0	6,595,825	
3	27	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit			0	55,430,690	
3	27	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	24 Exemplar			0	11,636,850	
3	27	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	150 Orang			0	11,787,500	
3	27	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	20 rapat			0	148,294,800	
3	27	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 unit			0	751,713,600	
3	27	01	1.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah dinas	10 unit			0	215,372,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	1 unit			0	126,960,000	
3	27	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional	11 unit			0	78,338,000	
3	27	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit			0	0	
3	27	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	30 unit			0	15,916,115	
3	27	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubeleur	50 unit			0	0	
3	27	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	45 Orang			0	35,190,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal	45 Orang			0	35,190,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Instalasi Listrik	15 Jenis			390,000	6,595,825	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit			0	55,430,690	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	1000 Lembar			628,200	25,211,795	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	24 Exemplar			0	11,636,850	
3	27	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman	150 Orang			0	11,787,500	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	20 rapat			47,000,000	148,294,800	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	2 unit			0	751,713,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	1000 Surat			1,000,000	1,265,000	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelayanan Jasa jasa komunikasi, air dan listrik	2 Jenis			54,049,600	62,157,040	
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	6 Orang 5 Orang			370,000,000	353,272,640	
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional Jumlah rumah dinas	11 unit 10 unit			36,000,000	78,338,000	
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit 30 unit			6,475,000	15,916,115	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**1,081,713,000**	**3,313,279,145**	
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah ternak	75 ekor			730,120,000	2,067,366,845	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.08.0001 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	1.03	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ternak	75 ekor			0	2,067,366,845	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah produksi Benih HMT	5 ton			0	420,740,150	
3	27	02	1.04	02	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah produksi Benih HMT	5 ton			338,093,000	420,740,150	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah ternak	75 ekor			13,500,000	825,172,150	
3	27	02	1.05	01	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ternak	75 ekor			0	825,172,150	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung uptd	10 unit			0	0	
														TOTAL	**1,624,077,500**	**10,462,695,860**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**										**0**	**34,044,212,698**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**14,307,772,148**	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	97,195,861	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**457,756,400**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	135,028,300	97,195,861	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	44,795,000	106,767,978	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	106,767,978	
3	29	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	61,814,892	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**457,756,400**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	39,574,400	229,753,716	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**765,790,957**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Dokumen			0	229,753,716	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**457,756,400**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	27,849,300	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Dokumen			0	270,258,510	
3	**29**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**457,756,400**	**765,790,957**	
3	29	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	31,391,700	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	40,117,700	61,814,892	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien perangkat daerah	4 Dokumen	139,000,000	270,258,510	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	7,772,806,377	8,284,985,307	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	92 Orang			0	8,284,985,307	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	41,580,000	0	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	Dokumen			0	0	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	5,015,700	1,937,750	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	
3	29	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan				0	1,937,750	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	19,202,400	0	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	
3	29	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan				0	0	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	16,619,500	4,989,850	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan				0	714,610	
3	29	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Dokumen			0	52,923,920	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	1,000,000	714,610	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	
3	29	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan				0	7,209,361	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,866,269,457**	**8,299,836,878**	
3	29	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	5,001,480	7,209,361	
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tercapainya pengelolaan keuangan yang baik dan benar	1 Dokumen	5,044,000	0	
3	**29**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,352,760,798**	
3	29	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan				0	0	
3	29	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Dokumen			0	4,989,850	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,844,700**	**6,667,930**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	2,839,100	0	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,189,220,393**	
3	29	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1200 Surat			0	4,301,000	
3	29	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	3 Jenis			0	169,740,000	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,844,700**	**6,667,930**	
3	29	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	14,421,500	0	
3	29	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	15,000,000	0	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,189,220,393**	
3	29	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				0	27,257,760	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,844,700**	**6,667,930**	
3	29	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	0	0	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,189,220,393**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Aset	1 Dokumen			0	6,667,930	
3	29	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan				0	0	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,844,700**	**6,667,930**	
3	29	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	5,798,100	6,667,930	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,189,220,393**	
3	29	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	10 Orang			0	436,589,335	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,844,700**	**6,667,930**	
3	29	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Pengelolaan dan pemnafaatan BMD yang efektif dan efisien	1 Dokumen	1,786,000	0	
3	**29**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**5,189,220,393**	
3	29	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang	4 Orang			0	388,661,590	
3	29	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				0	37,950,000	
3	29	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	17 Jenis			0	53,569,783	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			0	54,234,103	
3	29	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	8 Jenis			0	6,474,500	
3	29	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				0	265,259,241	
3	29	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan rumah tangga				0	0	
3	29	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun			0	34,155,000	
3	29	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	1 Tahun			0	282,399,221	
3	29	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	1 Unit			0	617,533,785	
3	29	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	2 Unit			0	1,873,750,890	
3	29	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor				0	0	
3	29	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	50 Unit			0	274,653,005	
3	29	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	1 Unit			0	248,142,400	
3	29	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	1 Unit			0	44,965,000	
3	29	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	23 Unit			0	362,915,850	
3	29	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor				0	0	
3	29	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				0	0	
3	29	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur yang dipelihara				0	0	
3	29	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi				0	0	
3	**29**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
3	29	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya				0	0	
3	29	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang diklat formal				0	0	
3	29	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta				0	0	
3	**29**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**69,995,200**	**0**	
3	29	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	4,656,000	0	
3	29	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	12,000,000	0	
3	29	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	0	0	
3	29	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	3,339,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	50,000,000	0	
3	29	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Meningkatnya Disiplin dan SDM ASN	1 Dokumen	0	0	
3	**29**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**364,686,500**	**430,832,607**	
3	29	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	9,990,300	6,474,500	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	24,990,200	53,569,783	
3	29	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	5,808,000	0	
3	29	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	36,184,000	0	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	16,631,600	54,234,103	
3	29	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	0	0	
3	29	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	9,742,900	0	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	19,986,000	34,155,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	1 Tahun	241,353,500	282,399,221	
3	**29**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**623,284,320**	**2,765,937,680**	
3	29	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	617,533,785	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	308,990,000	1,873,750,890	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	200,000,000	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	8,821,120	274,653,005	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	105,473,200	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	29	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Karang Pule	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	29	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas2 ASN dengan baik	7 Unit	0	0	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**357,205,000**	**589,960,350**	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun	4,345,000	4,301,000	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun	159,900,000	169,740,000	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun	12,960,000	27,257,760	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas-tugas ASN	1 Tahun	180,000,000	388,661,590	
3	**29**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**263,039,000**	**611,058,250**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	47,860,000	362,915,850	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	146,000,000	0	
3	29	01	1.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	0	0	
3	29	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	0	0	
3	29	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	19,450,000	0	
3	29	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	0	0	
3	29	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	49,729,000	248,142,400	
3	29	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terlaksananya tugas ASN	42 Unit	0	0	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**										**0**	**7,761,156,823**	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**7,186,253,239**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data CAT	1 Dokumen			0	56,968,654	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**367,758,320**	**7,186,253,239**	
3	29	02	1.01	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	60,629,160	56,968,654	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	277,129,160	229,100,585	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**7,186,253,239**	
3	29	02	1.01	02	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penetapan CAT	1 Dokumen			0	229,100,585	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**367,758,320**	**7,186,253,239**	
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	30,000,000	6,900,184,000	
3	**29**	**02**	1.01		**Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**7,186,253,239**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	29	02	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin pengambila air tanah yang diawasi dan dikendalikan	20 Unit			0	6,900,184,000	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**344,982,474**	
3	29	02	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin	1 Dokumen			0	0	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	100 Izin			0	229,996,987	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**99,958,000**	**344,982,474**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	100 Izin	59,990,000	229,996,987	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**344,982,474**	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan	100 Izin			0	114,985,487	
3	**29**	**02**	1.02		**Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**99,958,000**	**344,982,474**	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	100 Izin	39,968,000	114,985,487	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**84,936,000**	**229,921,110**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	39,968,000	57,451,930	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**229,921,110**	
3	29	02	1.03	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data NPA	1 Dokumen			0	57,451,930	
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**84,936,000**	**229,921,110**	
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	14,968,000	57,489,880	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**0**	**229,921,110**	
3	29	02	1.03	02	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penetapan NPA	1 Dokumen			0	57,489,880	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemanfaatan NPA	10 Dokumen			0	114,979,300	
3	**29**	**02**	1.03		**Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi**										**84,936,000**	**229,921,110**	
3	29	02	1.03	03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Jumlah zona pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	1 zona			Terkendalinya pemanfaatan air tanah	1 Dokumen	30,000,000	114,979,300	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**										**0**	**1,092,493,857**	
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**										**0**	**229,996,492**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	03	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin	1 Dokumen			0	0	
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**										**0**	**229,996,492**	
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah				Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	20 Izin			0	114,999,379	
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**										**0**	**229,996,492**	
3	29	03	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	20 Izin			0	114,999,379	
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam atau Batubara dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**										**0**	**229,996,492**	
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah				Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %	Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	20 Izin			0	114,997,113	
3	**29**	**03**	1.02		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**										**0**	**229,996,492**	
3	29	03	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	20 Izin			0	114,997,113	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	03	1.02	04	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang diawasi				0	0	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**										**0**	**574,997,688**	
3	29	03	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin				0	0	
3	29	03	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah usulan WUP				0	0	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	150 Izin			0	229,999,505	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**										**116,964,700**	**574,997,688**	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	390 Izin	74,999,700	229,999,505	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	390 Izin	41,965,000	114,998,275	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut**										**0**	**574,997,688**	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	100 Izin			0	114,998,275	
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang diawasi	320 Izin			0	229,999,908	
3	**29**	**03**	1.03		**Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut**										**116,964,700**	**574,997,688**	
3	29	03	1.03	05	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	390 Izin	0	229,999,908	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**29**	**03**	1.04		**Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat**										**89,998,000**	**0**	
3	29	03	1.04	01	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	0	0	
3	29	03	1.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	49,998,000	0	
3	29	03	1.04	03	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	0	0	
3	29	03	1.04	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	40,000,000	0	
3	29	03	1.04	05	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Izin Pertambangan Rakyat	50 Izin	0	0	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**										**75,000,000**	**287,499,677**	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Pertambangan Rakyat	250 Izin	0	114,999,850	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**										**0**	**287,499,677**	
3	29	03	1.07	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data harga patokan mineral logam dan batuan				0	114,999,850	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan				0	57,499,850	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**										**75,000,000**	**287,499,677**	
3	29	03	1.07	02	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Pertambangan Rakyat	250 Izin	0	57,499,850	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**										**0**	**287,499,677**	
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan				0	114,999,977	
3	**29**	**03**	1.07		**Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan**										**75,000,000**	**287,499,677**	
3	29	03	1.07	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan		Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase IUP yang melaksanakan Good Mining Practice	6.52 %			Terkendalinya Pertambangan Rakyat	250 Izin	75,000,000	114,999,977	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**										**0**	**4,388,112,833**	
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**										**0**	**114,999,827**	
3	29	05	1.03	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin	1 Dokumen			0	0	
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**										**59,999,220**	**114,999,827**	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningakt pemahan masyarakat terhadap perizinan usaha niga bahan bakar nabati	2 Izin	36,854,610	57,499,942	
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun**										**0**	**114,999,827**	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	2 Izin			0	57,499,942	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	05	1.03	03	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dibina	2 Izin			0	0	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	2 Izin			0	57,499,885	
3	**29**	**05**	1.03		**Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun**										**59,999,220**	**114,999,827**	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningakt pemahan masyarakat terhadap perizinan usaha niga bahan bakar nabati	2 Izin	23,144,610	57,499,885	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**										**0**	**4,273,113,006**	
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebijakan	1 Dokumen			0	0	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**										**466,627,600**	**4,273,113,006**	
3	29	05	1.04	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit	99,627,600	0	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**										**0**	**4,273,113,006**	
3	29	05	1.04	02	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM yang ditingkatkan	5 Orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah otrang yang mengikuti sosialisasi	150 Orang			0	143,143,134	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**										**466,627,600**	**4,273,113,006**	
3	29	05	1.04	03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit	75,000,000	143,143,134	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	Terpenuhinya Peelayanan dasar bagi penduduk miskin		Prosentase Energi Terbarukan Dalam Pembangkit Listrik	5.96 %			Meningkatnya penggunaan sarana EBT	45 Unit	292,000,000	4,129,969,872	
3	**29**	**05**	1.04		**Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi**										**0**	**4,273,113,006**	
3	29	05	1.04	04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas EBT yang dibangun	81 Unit			0	4,129,969,872	
3	29	05	1.04	06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bintek	30 Orang			0	0	
3	29	05	1.04	07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelola EBT yang dibina dan diawasi	10 Unit			0	0	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**										**0**	**6,494,677,037**	
3	**29**	**06**	1.01		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**										**0**	**115,000,103**	
3	29	06	1.01	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin (dokumen)	60 Dokumen			0	0	
3	**29**	**06**	1.01		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**										**79,999,200**	**115,000,103**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Meningkatnya jumlah masyarakat penyedia tenaga listrik yang berizin	60 Izin	49,999,900	78,193,640	
3	**29**	**06**	1.01		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**										**0**	**115,000,103**	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	60 Izin			0	78,193,640	
3	**29**	**06**	1.01		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**										**79,999,200**	**115,000,103**	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Meningkatnya jumlah masyarakat penyedia tenaga listrik yang berizin	60 Izin	29,999,300	36,806,463	
3	**29**	**06**	1.01		**Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi**										**0**	**115,000,103**	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)	60 Izin			0	36,806,463	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**										**0**	**116,006,342**	
3	29	06	1.02	01	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prosedur dan persyaratan izin operasi (dokumen)	1 Dokumen			0	1,006,250	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**										**79,983,300**	**115,000,092**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Tertatanya izin operasi ketenagalistrikan	20 Izin	49,994,000	26,862,206	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**										**0**	**116,006,342**	
3	29	06	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)	60 Izin			0	26,862,206	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**										**79,983,300**	**115,000,092**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			Tertatanya izin operasi ketenagalistrikan	20 Izin	29,989,300	88,137,886	
3	**29**	**06**	1.02		**Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi**										**0**	**116,006,342**	
3	29	06	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)	60 Izin			0	88,137,886	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**										**0**	**6,263,670,592**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rasio Elektrifikasi	95.72 %			0	114,908,000	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**										**1,345,097,900**	**6,263,670,592**	
3	29	06	1.06	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			meningkatnya Rasio Elektrifikasi	99.77 %	75,000,000	114,908,000	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**										**0**	**6,263,670,592**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	06	1.06	02	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SK penerima listrik murah dan hemat (buah)	1 Buah			0	0	
3	29	06	1.06	03	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah laporan pengendalian dan pengawasan (dokumen)	1 Dokumen			0	0	
3	29	06	1.06	04	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data dan informasi (dokumen)	1 Dokumen			0	0	
3	29	06	1.06	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi (dokumen)	1 Dokumen			0	0	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**										**1,345,097,900**	**6,263,670,592**	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat		Rasio Elektrifikasi	99.77 %			meningkatnya Rasio Elektrifikasi	99.77 %	1,270,097,900	6,148,762,592	
3	**29**	**06**	1.06		**Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan**										**0**	**6,263,670,592**	
3	29	06	1.06	06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana penyediaan tenaga listrik yang dibangun (RTS)	3605 RTS			0	6,148,762,592	
3	29	06	1.06	07	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian (dokumen)	1 Dokumen			0	0	
														TOTAL	**12,908,402,817**	**67,249,731,650**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**										**400,000,300**	**864,278,556**	
3	**29**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**232,105,800**	**422,422,290**	
3	29	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Orang			6,600,000	59,657,400	
3	29	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			0	1,763,916	
3	29	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rekening	3 Jenis			0	36,128,400	
3	29	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			0	280,140	
3	29	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	2 Unit			0	0	
3	29	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga administrasi keuangan	1 Orang			0	59,657,400	
3	29	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah tenaga kebersihan	3 Orang			0	241,500,000	
3	29	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki				0	0	
3	29	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	17 Jenis			0	5,282,640	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			0	4,296,400	
3	29	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	8 Jenis			0	2,183,850	
3	29	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlegkapan kantor				0	936,985	
3	29	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan rumah tangga				0	0	
3	29	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun			0	1,700,160	
3	29	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	1 Tahun			0	105,984,000	
3	29	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor				0	0	
3	29	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor				0	0	
3	29	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	1 Unit			0	0	
3	29	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	2 Unit			0	47,905,550	
3	29	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor				0	0	
3	29	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara				0	0	
3	29	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur yang dipelihara				0	0	
3	29	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi				0	0	
3	29	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi				0	0	
3	29	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya				0	0	
3	29	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang diklat formal				0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta				0	0	
3	29	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis ATK	17 Jenis			2,924,200	5,282,640	
3	29	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			3,721,600	4,296,400	
3	29	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman	1 Tahun			1,392,000	1,700,160	
3	29	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	perjalanan dinas	5 org/kali			40,000,000	60,000,000	
3	29	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya suarat menyurat	1 Tahun			480,000	0	
3	29	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening Pembayaran	4 Jenis 12 bulan			34,142,400	1,800,000	
3	29	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlegkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis			1,035,600	280,140	
3	29	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga kebersihan	3 Orang			120,000,000	241,500,000	
3	29	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	2 Unit			21,810,000	47,905,550	
3	**29**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**										**0**	**151,273,990**	
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	10 Izin			0	81,583,990	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	02	1.02	02	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah						Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	10 Izin			20,888,500	81,583,990	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah						Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan	10 Izin			25,000,000	69,690,000	
3	29	02	1.02	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin pengambilan air tanah yang diawasi dan dikendalikan	10 Izin			0	69,690,000	
3	**29**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**										**44,835,000**	**72,787,916**	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan Jumlah Surat Keluar	30 Izin 500 Surat			24,835,000	1,763,916	
3	29	03	1.03	03	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	30 Izin			0	80,019,990	
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	30 Izin			0	71,024,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	03	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	30 Izin			20,000,000	71,024,000	
3	**29**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN**										**30,596,000**	**88,146,120**	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Iain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	1 Izin			10,596,000	41,962,120	
3	29	05	1.03	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	1 Izin			0	41,962,120	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun						Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	1 Izin			20,000,000	46,184,000	
3	29	05	1.03	04	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	1 Izin			0	46,184,000	
3	**29**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**										**46,575,000**	**129,648,240**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sub Unit Organisasi : 3.29.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	20 Izin			21,575,000	71,964,240	
3	29	06	1.01	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	20 Izin			0	71,964,240	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	20 Izin			0	57,684,000	
3	29	06	1.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi	20 Izin			25,000,000	57,684,000	
														TOTAL	**400,000,300**	**1,892,010,337**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										**28,287,616,749**	**14,576,355,480**	
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**7,971,233,549**	**6,835,595,310**	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**218,669,700**	**82,062,735**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			112,000,000	19,349,670	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**422,517,130**	
3	30	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	19,349,670	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**218,669,700**	**82,062,735**	
3	30	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	1 Dokumen			10,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**422,517,130**	
3	30	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	62,713,065	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**218,669,700**	**82,062,735**	
3	30	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			9,999,900	0	
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			10,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**422,517,130**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	30	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	340,454,395	
3	**30**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**218,669,700**	**82,062,735**	
3	30	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	1 Dokumen			10,000,000	0	
3	30	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			10,000,000	62,713,065	
3	30	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			56,669,800	0	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,761,275,629**	**5,266,518,060**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	56 ASN			5,713,775,929	4,412,084,275	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,474,346,195**	
3	30	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	58 ASN			0	4,412,084,275	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,761,275,629**	**5,266,518,060**	
3	30	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			30,000,000	845,412,150	
3	30	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			2,500,000	5,027,800	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,474,346,195**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Bahan	3 Jenis Bahan			0	5,027,800	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,761,275,629**	**5,266,518,060**	
3	30	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			2,499,900	0	
3	30	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	1 Laporan			5,000,000	3,993,835	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,474,346,195**	
3	30	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	53,240,285	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,761,275,629**	**5,266,518,060**	
3	30	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen yang disiapkan	1 dokumen			2,499,800	0	
3	30	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen	12 Dokumen			2,500,000	0	
3	30	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	12 Dokumen			2,500,000	0	
3	**30**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**4,474,346,195**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	30	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	3,993,835	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**33,000,000**	**178,837,880**	
3	30	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen			5,000,000	178,837,880	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,983,783,330**	
3	30	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat Keluar			0	4,991,000	
3	30	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Rekening			0	261,050,000	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**33,000,000**	**178,837,880**	
3	30	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 Bulan			5,000,000	0	
3	30	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			5,000,000	0	
3	30	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	2 kali			5,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,983,783,330**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	30	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	56 PNS			0	15,144,971	
3	30	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	100 Barang			0	178,837,880	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**33,000,000**	**178,837,880**	
3	30	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			5,000,000	0	
3	30	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			3,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,983,783,330**	
3	30	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi	11 Orang 11 orang			0	845,412,150	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**33,000,000**	**178,837,880**	
3	30	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pemanfaatan	12 Bulan			5,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**2,983,783,330**	
3	30	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	4 Orang 5 Orang			0	343,180,010	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	2500 ATK			0	93,841,219	
3	30	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10000 Lembar			0	39,029,275	
3	30	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	2 Instalasi			0	7,629,100	
3	30	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	16 Unit			0	143,445,135	
3	30	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	3600 Eksemplar			0	50,094,000	
3	30	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman Tersedia	16 Kali			0	30,353,100	
3	30	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terikuti	18 Kali			0	284,500,800	
3	30	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Teradakan	5 Kendaraan			0	188,959,720	
3	30	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	25 Kendaraan			0	497,314,970	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	**30**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**24,228,200**	
3	30	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	2 ASN			0	24,228,200	
3	**30**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**15,000,000**	**24,228,200**	
3	30	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai	2 orang			5,000,000	0	
3	30	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pegawai	1 ASN			10,000,000	24,228,200	
3	**30**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**362,499,000**	**505,447,494**	
3	30	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			10,000,000	7,629,100	
3	30	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12 Bulan			100,000,000	93,841,219	
3	30	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan	2 unit			5,000,000	0	
3	30	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Penyediaan	12 Bulan			9,999,300	0	
3	30	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetak dan Penggandaan	15000 Lembar			9,999,900	39,029,275	
3	30	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	3600 Eksemplar			45,000,000	50,094,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 Bulan			10,000,000	30,353,100	
3	30	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	30 Orang			159,999,800	284,500,800	
3	30	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Penataan	12 Bulan			12,500,000	0	
3	**30**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**230,830,000**	**0**	
3	30	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	5 unit			200,830,000	0	
3	30	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	11 unit			10,000,000	0	
3	30	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana Pendukung	10 Buah			20,000,000	0	
3	**30**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**841,438,120**	**281,185,971**	
3	30	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat Keluar			4,998,000	4,991,000	
3	30	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 Rekening			181,440,000	261,050,000	
3	30	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengemudi Jumlah PNS Jumlah Tenaga Administrasi Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Kebersihan	2 Orang 56 PNS 10 Orang 4 Orang 5 Orang			655,000,120	15,144,971	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**30**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**508,521,100**	**497,314,970**	
3	30	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	19 Kendaraan			177,000,000	497,314,970	
3	30	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	5 Unit			96,500,000	0	
3	30	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Bulan	12 unit			10,000,000	0	
3	30	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Bulan	12 unit			30,001,000	0	
3	30	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan	12 unit			20,020,000	0	
3	30	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung	2 Gedung			150,000,100	0	
3	30	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bulan Pemeliharaan	12 Bulan			25,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**										**300,000,000**	**641,203,775**	
3	**30**	**02**	1.01		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor**										**75,000,000**	**218,164,660**	
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Distributor Minuman Beralkohol (MB) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	5 Distributor	JJumlah Pertimbangan Teknis SIUP-MB diterbitkan Bagi Distributor	5 Pertek	75,000,000	218,164,660	
3	**30**	**02**	1.01		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Distributor**										**0**	**218,164,660**	
3	30	02	1.01	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitasi pemenuhan Komitmen SIUP MB Toko Bebas BEA dan rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Jumlah Rekomendasi)	5 Rekomendasi			0	218,164,660	
3	**30**	**02**	1.02		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**										**75,000,000**	**215,929,635**	
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Pengecer Bahan Berbahaya (B2) Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	4 Orang	Jumlah Pertimbangan Teknis SIUP-Bahan Berbahaya (B2) diterbitkan Bagi Distributor	4 Pertek	75,000,000	215,929,635	
3	**30**	**02**	1.02		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**215,929,635**	
3	30	02	1.02	02	Fasilitasi pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemenuhan komitmen surat ijin usaha perdaganga bahan berbahaya pengecer terdaftar melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Jumlah Rekomendasi)	5 Rekomendasi			0	215,929,635	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**										**0**	**207,109,480**	
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya (Jumlah Pelaku Usaha)	5 Pelaku Usaha			0	207,109,480	
3	**30**	**02**	1.03		**Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar**										**150,000,000**	**207,109,480**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	02	1.03	02	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Toko Sarana Distribusi Bahan Berbahaya yang Diperiksa	5 Toko	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	5 Usaha	75,000,000	207,109,480	
3	30	02	1.03	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pertimbangan Teknis dan Dokumen Pendukung Usaha Perdagangan Menjadi Izin Usaha	50 %	Jumlah Pengawasan	6 Kali	Jumlah Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar Terkendali	5 Usaha	75,000,000	0	
3	**30**	**02**	1.04		**Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)**										**0**	**438,100,895**	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan SKA (Jumlah SKA)	50 SKA			0	438,100,895	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**										**3,703,875,000**	**1,126,973,665**	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**										**3,703,875,000**	**1,126,973,665**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Persentase Realisasi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	25 %	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Pusat Distribusi Provinsi	1 PDP	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi Terkelola	1 PDP	3,553,875,000	796,335,325	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas**										**0**	**1,524,578,115**	
3	30	03	1.01	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi/Lapak UKM NTB (Jumlah Sarana dan Prasarana)	1 Pusat Distribusi			0	796,335,325	
3	30	03	1.01	02	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Jumlah Pasar)	1 Pusat Distribusi			0	397,604,450	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas**										**3,703,875,000**	**1,126,973,665**	
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup		Persentase Realisasi Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	25 %	Jumlah Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas	1 Kali	Jumlah Pusat Distribusi Provinsi Terkelola	1 PDP	150,000,000	330,638,340	
3	**30**	**03**	1.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas**										**0**	**1,524,578,115**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	03	1.01	03	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Penataan, pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas (Jumlah Kegiatan)	2 Kegiatan			0	330,638,340	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**										**1,678,499,800**	**1,098,910,675**	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**										**90,000,000**	**255,440,990**	
3	30	04	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok yang dilaksanakan	6 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	22 Komoditi	50,000,000	0	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**										**0**	**255,440,990**	
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di tingkat Distributor dan Sub Distributor (Jumlah Kegiatan)	4 Kegiatan			0	255,440,990	
3	**30**	**04**	1.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi**										**90,000,000**	**255,440,990**	
3	30	04	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting yang dilaksanakan	6 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terjamin Ketersediaan Stock dan Harga Di Tingkat Provinsi	22 Komoditi	40,000,000	255,440,990	
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan**										**0**	**843,469,685**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Jumlah Kegiatan)	4 Kegiatan			0	478,188,975	
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**										**1,588,499,800**	**843,469,685**	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Komoditi Bapokting Terpantau Stok dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi	99,999,800	478,188,975	
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan**										**0**	**843,469,685**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi (Jumlah Operasi Pasar)	6 OP			0	365,280,710	
3	**30**	**04**	1.02		**Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan**										**1,588,499,800**	**843,469,685**	
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Harga Bahan Pokok Yang Stabil Antar Waktu Antar Wilayah	4 %	Jumlah Operasi Pasar Di Kabupaten/Kota Terlaksana dalam rangka Stabilisasi Harga Bapok	9 Kali	Jumlah Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	22 Komoditi	1,488,500,000	365,280,710	
3	**30**	**04**	1.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya**										**0**	**687,350,055**	
3	30	04	1.03	01	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dokumen perizinan kegiatan distribusi (Jumlah Dokumen)	20 dokumen			0	179,158,500	
3	30	04	1.03	02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida tingkat daerah provinsi (Jumlah Dokumen)	20 dokumen			0	179,329,735	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi (Jumlah Dokumen)	20 dokumen			0	180,571,850	
3	30	04	1.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pupuk bersubsidi dan pestisida (Jumlah Dokumen)	20 dokumen			0	148,289,970	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**										**0**	**2,566,494,675**	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**										**0**	**2,566,494,675**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pameran Dagang Internasional/Nasional yang Diikuti (Jumlah Pameran)	4 Negara			0	418,208,310	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**										**1,336,376,900**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah UKM yang ikut Pameran	8 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM	586,376,900	418,208,310	
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Pameran Dagang Lokal Terselenggara	2 Pameran	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM	300,000,000	728,571,000	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**										**0**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pameran dagang lokal (Jumlah Pameran)	2 pameran			0	728,571,000	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**										**1,336,376,900**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah UKM Terfasilitasi Misi Dagang	10 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM	150,000,000	443,273,020	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**										**0**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Provinsi Tujuan Misi Dagang	2 Provinsi			0	443,273,020	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Buku Potensi Ekspor dan Terdokumentasinya Video Audio Visual UKM	2 Paket			0	359,481,720	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi**										**1,336,376,900**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Produk Ekspor Terpilih	2 Produk	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM	150,000,000	359,481,720	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	3 %	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Terbina	30 UKM	Jumlah UKM berorientasi Ekspor Unggulan Terpromosi Dagang	4 UKM	150,000,000	616,960,625	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**										**0**	**2,566,494,675**	
3	**30**	**05**	1.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota**										**0**	**2,566,494,675**	
3	30	05	1.01	05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pembinaan pelaku usaha ekspor terbina (Jumlah Pelaku Usaha)	76 pelaku usaha ekspor			0	616,960,625	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**										**0**	**1,567,224,715**	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**720,865,310**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Jumlah Peserta)	100 Orang			0	217,604,150	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**950,000,000**	**720,865,310**	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Konsumen Tersosialisasi Konsumen Cerdas dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	100 Konsumen	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus	100,000,000	217,604,150	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**720,865,310**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	06	1.01	02	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen/Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	3 BPSK			0	338,903,275	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**950,000,000**	**720,865,310**	
3	30	06	1.01	02	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Terjalin Kerjasama	3 BPSK	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus	750,000,000	338,903,275	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**720,865,310**	
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Jumlah Pengaduan)	40 Kasus/Pengaduan			0	164,357,885	
3	**30**	**06**	1.01		**Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**950,000,000**	**720,865,310**	
3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen yang di Koordinasikan Ke BPSK Kab/Kota	50 Kasus	Jumlah Kasus Sengketa Konsumen Yang Ditangani Di Seluruh di Kab/Kota	40 Kasus	100,000,000	164,357,885	
3	**30**	**06**	1.02		**Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**73,500,200**	**0**	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Produk Terverifikasi Mutu	2 Produk	Jumlah Komoditi Teruji	1 Komoditi	73,500,200	0	
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**249,999,700**	**241,782,210**	
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Barang Beredar dan Jasa Yang Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	100 Barang	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	50 Toko	149,999,900	0	
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**846,359,405**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang beredar dan/ atau jasa sesuai Parameter ketentuan Perlindungan Konsumen (Jumlah Produk)	100 Produk			0	604,577,195	
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**249,999,700**	**241,782,210**	
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Cakupan Penyelesaian Sengketa Konsumen	80 %	Jumlah Konsumen yang Direkomendasikan Kepada Lembaga Perlindungan Konsumen	10 Konsumen	Jumlah Toko Retail Di Kab/Kota yang dilakukan Pengawasan Barang Beredar/Jasa	50 Toko	99,999,800	241,782,210	
3	**30**	**06**	1.03		**Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**846,359,405**	
3	30	06	1.03	02	Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen (Jumlah Temuan)	40 Orang			0	241,782,210	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**										**0**	**1,344,529,860**	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri**										**0**	**675,070,240**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi (Jumlah Promosi)	2 Provinsi			0	675,070,240	
3	**30**	**07**	1.01		**Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri**										**11,049,131,600**	**675,070,240**	
3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi Terlaksana	2 Promosi	Jumlah Produk Dalam Negeri Terpromosi	20 Produk	11,049,131,600	675,070,240	
3	**30**	**07**	1.02		**Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri**										**800,000,000**	**0**	
3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Jenis Produk Dalam Negeri Terjual	8 Jenis			800,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**										**0**	**669,459,620**	
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri (Jumlah Peserta)	200 Orang			0	350,865,920	
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**										**175,000,000**	**669,459,620**	
3	30	07	1.03	02	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Sosialiasasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Terlaksana	1 Kali	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	15 UKM	75,000,000	350,865,920	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok		Persentase Barang Produksi Dalam Negeri yang dijual di Retail	3 %	Jumlah Viewers yang mengunjungi portal Digital Marketing	30000 Viewers	Jumlah UKM Terakomodir di Retail	15 UKM	100,000,000	318,593,700	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
3	**30**	**07**	1.03		**Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**										**0**	**669,459,620**	
3	30	07	1.03	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sistem Informasi Perdagangan Tersedia	2 Informasi			0	318,593,700	
														TOTAL	**28,287,616,749**	**32,349,623,100**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										**35,431,708,214**	**28,096,614,840**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**20,122,037,714**	**19,025,764,785**	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**400,013,000**	**133,886,285**	
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen 2 Dokumen			170,760,000	39,441,550	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**649,985,750**	
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		2 Dokumen			0	39,441,550	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**400,013,000**	**133,886,285**	
3	31	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			25,012,000	28,685,140	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**649,985,750**	
3	31	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	28,685,140	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**400,013,000**	**133,886,285**	
3	31	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Dokumen RKA perubahan SKPD	1 Dokumen			16,306,000	0	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**649,985,750**	
3	31	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		5 Dokumen			0	26,880,790	
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 dokumen			0	540,960,000	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**400,013,000**	**133,886,285**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pagesangan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen			14,926,000	30,000,000	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**649,985,750**	
3	31	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 dokumen			0	14,018,270	
3	**31**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**400,013,000**	**133,886,285**	
3	31	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersusunya Dokumen DPA perubahan SKPD	1 Dokumen			17,751,000	0	
3	31	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		5 dokumen			16,156,000	21,741,325	
3	31	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen 5 Dokumen			139,102,000	14,018,270	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,283,997,514**	**7,412,774,345**	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			7,254,174,514	7,380,223,480	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,434,515,670**	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun			0	7,380,223,480	
3	31	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 dokumen			0	12,862,520	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,283,997,514**	**7,412,774,345**	
3	31	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 dokumen			8,021,000	12,862,520	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Dokumen			10,781,000	12,219,210	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,434,515,670**	
3	31	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		5 dokumen			0	21,741,325	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,283,997,514**	**7,412,774,345**	
3	31	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			11,021,000	7,469,135	
3	**31**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**7,434,515,670**	
3	31	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	7,469,135	
3	31	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Dokumen			0	12,219,210	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**11,760,530,027**	
3	31	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	20,732,200	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**7,970,000**	**0**	
3	31	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan Skpd	1 Dokumen			4,450,000	0	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**11,760,530,027**	
3	31	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	153,911,400	
3	31	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**7,970,000**	**0**	
3	31	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen barang milik daerah Skpd	1 Dokumen			3,520,000	0	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**11,760,530,027**	
3	31	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	0	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**7,970,000**	**0**	
3	31	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen barang milik daerah Skpd	1 Dokumen			0	0	
3	**31**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**11,760,530,027**	
3	31	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	120,539,550	
3	31	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	71,404,075	
3	31	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	674,221,425	
3	31	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tuls kantor yang tersedia	32 Jenis			0	42,986,885	
3	31	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis			0	22,281,825	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Jenis			0	12,460,250	
3	31	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	47 unit			0	130,775,700	
3	31	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Jenis			0	28,761,500	
3	31	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun			0	64,032,000	
3	31	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun			0	316,838,800	
3	31	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	5 unit			0	148,667,285	
3	31	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Kantor Yang tersedia	65 unit			0	0	
3	31	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kantor Yang tersedia	16 unit			0	256,262,320	
3	31	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubeler yang tersedia	1 paket			0	0	
3	31	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung kantor yang tersedia	2 unit			0	122,065,312	
3	31	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	10 unit			0	201,641,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	12 unit			0	152,559,000	
3	31	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	38 unit			0	9,522,000	
3	31	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur kantor yang tersedia	1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2 unit			0	9,210,867,500	
3	**31**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**107,589,400**	
3	31	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	65 Orang			0	107,589,400	
3	**31**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**83,900,000**	**107,589,400**	
3	31	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya pakaian dinas bagi Karyawan SKPD	70 org			63,500,000	0	
3	31	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah aparatur yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	65 Orang			20,400,000	107,589,400	
3	**31**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**757,337,800**	**575,150,075**	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Jenis			27,523,000	12,460,250	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah Perlengkapan Kantor Yang tersedia	47 unit 65 unit			188,830,600	130,775,700	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 Jenis			22,605,800	22,281,825	
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1 Jenis			13,860,000	28,761,500	
3	31	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya bahan/material pada SKPD	1 tahun			16,886,000	0	
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	1 Tahun			88,700,000	64,032,000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Tahun			398,932,400	316,838,800	
3	31	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 tahun			0	0	
3	**31**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**10,019,878,400**	**404,929,605**	
3	31	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	5 unit			328,876,000	148,667,285	
3	31	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler yang tersedia	1 paket			35,100,000	0	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Kantor Yang tersedia	16 unit			116,927,400	256,262,320	
3	31	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya aset tetap pada SKPD	40 unit			9,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbangunnya gedung kantor	1 paket			9,529,975,000	0	
3	31	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya sarana prasarana gedung kantor	20 unit			0	0	
3	**31**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,369,461,000**	**848,865,025**	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			14,235,000	20,732,200	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			138,186,000	153,911,400	
3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun			0	0	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai		1 Tahun			1,217,040,000	674,221,425	
3	**31**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**199,480,000**	**9,542,570,050**	
3	31	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mobil Jabatan yang terpelihara	10 unit			199,480,000	201,641,000	
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Yang terpelihara	1 Tahun 12 unit			0	120,539,550	
3	31	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan gedung kantor yang tersedia	38 unit			0	9,522,000	
3	31	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Jumlah Gedung kantor yang tersedia	2 unit 2 unit			0	9,210,867,500	
3	31	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	terpeliharanya sarana prasarana gedung kantor	20 unit			0	0	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**										**14,821,265,500**	**8,464,478,285**	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**										**14,821,265,500**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Tersusunnya RPIP Prov. NTB	1 Tahun			160,827,000	14,018,270	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi**										**0**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya RPIP Prov. NTB	1 Tahun			0	14,018,270	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri				0	981,115,600	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**										**14,821,265,500**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri				2,542,599,400	981,115,600	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi**										**0**	**8,464,478,285**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 Tahun			0	2,773,668,325	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**										**14,821,265,500**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 Tahun			565,863,000	2,773,668,325	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sarana prasarana industri	1 Tahun			7,670,851,000	2,785,999,315	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi**										**0**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sarana prasarana industri	1 Tahun			0	2,785,999,315	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM			0	1,909,676,775	
3	**31**	**02**	1.01		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**										**14,821,265,500**	**8,464,478,285**	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM			3,674,719,100	1,909,676,775	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pembangunan industri Provinsi	1 Dokumen	Terlaksananya Evaluasi pembangunan industri prov. NTB	1 Dokumen			206,406,000	0	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**										**184,742,000**	**437,138,000**	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**										**184,742,000**	**437,138,000**	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang Didorong dari kecil ke menengah	2.69 %	Terfasilitasinya pemenuhan perolehan izin industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			103,031,000	0	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**										**0**	**2,008,671,880**	
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pengawasan	100 IKM			0	437,138,000	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**										**184,742,000**	**437,138,000**	
3	31	03	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Persentase IKM yang Didorong dari kecil ke menengah	2.69 %	Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pengawasan	100 IKM			81,711,000	437,138,000	
3	**31**	**03**	1.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi**										**0**	**2,008,671,880**	
3	31	03	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	200 IKM			0	1,571,533,880	
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**										**303,663,000**	**169,233,770**	
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**										**303,663,000**	**169,233,770**	
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Tersedianya data industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			103,621,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)**										**0**	**169,233,770**	
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	6 dokumen			0	169,233,770	
3	**31**	**04**	1.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**										**303,663,000**	**169,233,770**	
3	31	04	1.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas				Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Jumlah dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi	6 dokumen			92,021,000	169,233,770	
3	31	04	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan database IKM se NTB dalam sistem informasi industri nasional	1 %	Tersedianya data publikasi industri kecil menengah di NTB	1 Dokumen			108,021,000	0	
														TOTAL	**35,431,708,214**	**58,691,619,622**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										**4,075,434,000**	**2,507,772,800**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**3,203,631,500**	**2,299,429,600**	
3	31	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	5 Dokumen	34,469,000	437,184,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
3	31	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi dalam daerah	1 Tahun			0	437,184,000	
3	31	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbayarnya Gaji dan tunjangan Aparatur sipil Negara	1 tahun			0	0	
3	31	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dok	1 Dok	4,244,900	14,018,270	
3	31	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			0	14,018,270	
3	31	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya surat menurat	500 surat			0	8,581,070	
3	31	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya	4 Rekening			0	88,556,900	
3	31	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa administrasi keuangan	6 Orang			0	73,381,500	
3	31	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 Orang			0	12,986,950	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang alat tulis kantor	1 Tahun			0	11,354,410	
3	31	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			0	5,671,915	
3	31	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat listrik / penerangan kantor	1 Tahun			0	3,708,060	
3	31	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan / perlengkapan kantor	1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun			0	9,729,000	
3	31	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya minuman rapat dan tamu	1 Tahun			0	6,003,000	
3	31	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1 Tahun			0	119,636,800	
3	31	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kendaraan operasional	2 unit			0	612,262,300	
3	31	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun			0	154,818,865	
3	31	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			0	114,675,010	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya gedung kantor yang nyaman	1 Tahun			0	42,550,000	
3	31	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun			0	56,695,000	
3	31	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik	1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianyaperalatan gedung kantor yang baik	1 Tahun			0	0	
3	31	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terbangunnya gedung yang nyaman	1 unit			0	583,153,500	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya alat listrik / penerangan kantor	1 Tahun			3,554,100	3,708,060	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun			272,588,900	154,818,865	
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang alat tulis kantor	1 Tahun			523,870,200	11,354,410	
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun			21,556,400	5,671,915	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 Tahun			5,400,000	9,729,000	
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya minuman rapat dan tamu	1 Tahun			20,600,000	6,003,000	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terlaksananya Konsultasi dan koordinasi keluar daerah	1 Tahun			105,000,000	119,636,800	
3	31	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya kendaraan operasional	2 unit			308,990,000	612,262,300	
3	31	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Tahun			1,200,000,000	114,675,010	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya surat menurat	500 surat			8,480,000	8,581,070	
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya	4 Rekening			48,612,000	88,556,900	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor	6 Orang 4 Orang			592,800,000	73,381,500	
3	31	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	1 Tahun			53,466,000	56,695,000	
3	31	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terbangunnya gedung yang nyaman Tersedianya gedung kantor yang nyaman	1 unit 1 Tahun			0	583,153,500	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**										**0**	**208,343,200**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0001 Balai Kemasan Produk Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	02	1.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi keluar daerah	1 Tahun			0	0	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi	1 Tahun			75,417,900	121,651,600	
3	31	02	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terwujudnya kegiatan rapat koordinasi / konsultasi	1 Tahun			0	121,651,600	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen			796,384,600	86,691,600	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	1 Dokumen			0	86,691,600	
														TOTAL	**4,075,434,000**	**5,071,082,550**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										**0**	**131,325,906,460**	
3	**31**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**4,448,074,190**	
3	31	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tes surat	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	21,290,525	
3	31	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	260,820,000	
3	31	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianyaadministrasi keuangan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	67,539,500	
3	31	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	2,895,170,425	
3	31	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	81,654,485	
3	31	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	128,229,025	
3	31	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	15,872,645	
3	31	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	402,004,235	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 rekening	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	12,546,500	
3	31	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah dokumen hasil rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	109,158,000	
3	31	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya kendaraan dinas/operassional	1 unit	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	453,788,850	
3	31	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Kab. Lombok Barat, Kediri, Lelede	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya kendaraan dinass operasional kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya gedung kantor	1 paket	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	0	
3	31	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	26,726,500	15,872,645	
3	31	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya peralatandan perlengkapan kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	717,683,685	402,004,235	
3	31	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	81,654,485	
3	31	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	0	128,229,025	
3	31	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	2 rekening	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	7,200,000	12,546,500	
3	31	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya makan minum rapat dan tamu	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	131,000,000	0	
3	31	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen hasil rapat rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	331,781,000	109,158,000	
3	31	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya kendaraan dinas/operassional	1 unit	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	530,267,000	453,788,850	
3	31	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tes surat	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	3,125,000	21,290,525	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	31	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	168,000,000	260,820,000	
3	31	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	terpeliharanya perlengkapan dan kebersihan gedung kantor	1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	27,220,000	0	
3	31	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianyaadministrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 tahun 1 tahun	Kebutuhan surat menyurat terpenuhi	1 tahun	986,850,000	67,539,500	
3	31	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Aset daerah	1 dokumen			129,876,800	0	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**										**24,874,763,850**	**126,877,832,351**	
3	31	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							12,084,252,000	81	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 dokumen			10,946,698,050	42,405,882,690	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pembangunan sumberdaya industri	1 dokumen			0	42,405,882,690	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata					Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM			1,843,813,800	84,471,949,580	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian
Sub Unit Organisasi : 3.31.0.00.0.00.01.0002 Science Technology and Industrial Park

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	31	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sikronisasi pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	300 IKM			0	84,471,949,580	
TOTAL															**27,934,493,835**	**259,756,642,576**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**172,179,124,850**	**150,725,216,476**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**172,179,124,850**	**150,725,216,476**	
4	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**191,768,700**	**128,194,800**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	53,248,400	38,344,500	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	48,670,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	47,955,000	47,955,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen	100 persen	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen	100 persen	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	41,895,300	41,895,300	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**135,018,289,103**	**146,124,644,676**	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah PNS	6958 OB	jumlah dokumen	100 persen	134,797,712,103	145,897,707,676	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	24 OB	jumlah dokumen	100 persen	76,620,000	82,980,000	
4	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3000 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	66,209,000	66,209,000	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	30,000,000	30,000,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	47,748,000	47,748,000	
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**480,877,000**	**480,877,000**	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	43,074,000	43,074,000	
4	01	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	316,355,000	316,355,000	
4	01	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	jumlah dokumen	100 persen	18,465,000	18,465,000	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	100 persen	55,074,000	55,074,000	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen	100 persen	47,909,000	47,909,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			jumlah dokumen	100 persen	0	0	
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**0**	
4	01	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mobil jabatan yang dibeli	0 unit			0	0	
4	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**0**	**0**	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	0 orang	jumlah PNS	5 orang	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PNS	0 orang	jumlah PNS	5 orang	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**3,558,472,500**	**3,558,473,000**	
4	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah komponen	11 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	61,095,000	61,095,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	29 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	435,052,500	435,052,500	
4	01	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	55 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	192,552,200	192,552,200	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah logistik	60 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	75,641,000	75,641,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah buku	11 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	50,241,000	50,241,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	5 jenis	jumlah dokumen	9 dokumen	60,510,000	60,510,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tamu	24201 orang	jumlah dokumen	9 dokumen	1,718,950,000	1,718,950,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kegiatan	2 kegiatan	jumlah dokumen	9 dokumen	779,363,200	779,363,200	
4	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah arsip	3000 berkas	jumlah dokumen	9 dokumen	185,067,600	185,068,100	
4	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**592,398,000**	**356,864,800**	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	0	0	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	190,665,000	0	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebeleur	51 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	150,920,800	150,920,800	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	22 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	205,812,200	205,944,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset	0 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	0	0	
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset	0 jenis	jumlah dokumen	7 dokumen	0	0	
4	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana prasarana	5 unit	jumlah dokumen	7 dokumen	45,000,000	0	
4	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**10,898,023,040**	**76,162,200**	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah surat	3000 berkas	jumlah dokumen	4 dokumen	76,162,200	76,162,200	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rekening	4 rekening	jumlah dokumen	4 dokumen	2,012,225,000	0	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan kantor	17 jenis	jumlah dokumen	4 dokumen	550,565,000	0	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga kontrak	260 orang	jumlah dokumen	4 dokumen	8,259,070,840	0	
4	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**5,186,743,200**	**0**	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	20 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	692,421,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	214 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	2,523,827,700	0	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan	288 unit	jumlah dokumen	6 dokumen	265,270,000	0	
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	7 gedung	jumlah dokumen	6 dokumen	1,507,104,000	0	
4	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	2 gedung	jumlah dokumen	6 dokumen	198,120,000	0	
4	01	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	0 ge	jumlah dokumen	6 dokumen	0	0	
4	**01**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**										**6,501,427,557**	**0**	
4	01	01	1.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang	14 OB	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	2,970,068,525	0	
4	01	01	1.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pakaian	120 stel	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	439,847,200	0	
4	01	01	1.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah medical check up	8 OK	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	160,000,000	0	
4	01	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang	2 orang	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur dan Wakil Gubernur	12 bulan	2,931,511,832	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Biro Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	**01**	**01**	1.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**										**9,751,125,750**	**0**	
4	01	01	1.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	4,121,114,200	0	
4	01	01	1.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	2,600,950,350	0	
4	01	01	1.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pelayanan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Gubernur,Wakil Gubernur dan sekda	12 bulan	3,029,061,200	0	
														TOTAL	**172,179,124,850**	**150,725,216,476**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Biro Humas dan Protokol
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0011 Biro Humas dan Protokol

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**0**	
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	3 Paket			0	0	
4	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	90 Unit			0	0	
4	**01**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
4	01	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang diklat formal	80 Orang			0	0	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**0**	**0**	
4	**01**	**03**	1.03		**Evaluasi Administrasi Pembangunan**										**0**	**0**	
4	01	03	1.03			Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	1 dokumen			0	0	
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**										**0**	**0**	
4	**01**	**04**	1.03		**Pelaksanaan Administrasi Pimpinan**										**0**	**0**	
4	01	04	1.03	08	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan keprotokolan yang terselesaikan	240 Kali			0	0	
														TOTAL	**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**17,341,855,790**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**3,437,344,170**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen			0	10,126,578	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Disusun	1 Dokumen			9,998,000	0	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,999,000	0	
4	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran	2 Dokumen			0	39,879,056	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,980,000	0	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,987,900	0	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,990,000	0	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja SKPD Yang Disusun	1 Dokumen			9,996,200	0	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Yang Disusun	2 Dokumen			9,961,400	0	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Penerima Tunjungan Kinerja	42 Orang			0	2,106,541,250	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Administrasi Keuangan Yang Terbayar	96 Orang/Bulan			102,920,000	0	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Yang Tersedia	1 Dokumen			9,940,000	0	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	4 Dokumen			0	22,333,506	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Yang Tersedia	12 Dokumen			9,995,000	0	
4	01	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan			0	19,784,474	
4	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Aset BMD	2 Dokumen			0	24,931,954	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen			4,998,500	0	
4	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Surat Menyurat	500 Surat			0	11,534,500	
4	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Jaringan Komunikasi	2 Jaringan			0	34,270,000	
4	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai	12 Jenis			0	0	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah L:aporan BMD Yang Disusun	1 Dokumen			9,998,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Jumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan	1 Orang 1 Orang 10 Orang			0	328,950,600	
4	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Kantor	27 Jenis			0	45,713,305	
4	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis			0	47,612,323	
4	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit			0	69,450,524	
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Bahan Bacaan	2 Jenis			0	13,889,700	
4	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	1000 OK			0	69,575,000	
4	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	22 OK			0	214,327,800	
4	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang Diadakan Jumlah Kendaraan Roda 4 Yang Diadakan	5 Unit 3 Unit			0	0	
4	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur yang diadakan	10 Buah			0	0	
4	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara	18 Unit			0	322,726,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	44 Unit			0	39,012,600	
4	01	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur Yang Dipelihara	20 Buah			0	0	
4	01	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	41 Setel			0	0	
4	01	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	41 Setel			0	0	
4	01	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek	2 Orang			0	16,684,200	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	45 Stel			104,103,000	0	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Data Kepegawaian Yang Diolah	45 Orang			4,998,900	0	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	2 Orang			31,000,000	0	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Bimtek	2 Orang			27,000,000	0	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	38 Jenis			49,999,300	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis			49,988,800	47,612,323	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Diadakan	720 Eksemplar			18,180,000	0	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu Yang Dilayani	1510 Orang/Kali			74,930,000	69,575,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Kooridnasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Yang Dilaksanakan	75 Orang/Tahun			300,000,000	0	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	4 UNit			0	0	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan	10 Unit			89,828,600	0	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			11,400,000	0	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Ketersediaan Jaringan Komunikasi	2 Jaringan			0	0	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Yang Dibayar	14 Orang/Bulan			42,415,000	0	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara	13 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Terpelihara	5 Unit			0	0	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel Yang Terpelihara	50 Buah			2,500,000	0	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Yang Terpelihara	44 Unit			33,280,000	0	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**0**	**13,904,511,620**	
4	01	02	1.02	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	9 Laporan			0	5,269,883,062	
4	01	02	1.02	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	9 Laporan			0	2,318,160,880	
4	01	02	1.02	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kesra Non Pelayanan Dasar	7 Laporan			0	1,957,531,115	
4	01	02	1.02	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	6 Laporan			0	679,714,561	
4	01	02	1.02	05	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kegiatan Evaluasi dan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Kesehatan	9 Laporan			0	1,571,409,910	
4	01	02	1.02	06	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kegiatan Evaluasi dan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Sosial	1 Laporan			0	706,432,672	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	02	1.02	07	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kegiatan Evaluasi dan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Pendidikan	3 Laporan			0	1,401,379,420	
4	**01**	**04**			**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**77,542,588,700**	**0**	
4	01	04	1.01	01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	781 Kali			31,438,539,100	0	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Kelembagaan Bina Spiritual Yang Terfasilitasi	15 Lembaga			4,026,294,000	0	
4	01	04	1.02	01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Pendidikan	3 Dokumen			39,963,873,100	0	
4	01	04	1.02	02	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesra Bidang Kesehatan	18 Dokumen			1,225,295,000	0	
4	01	04	1.02	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sosial	2 Dokumen			152,500,600	0	
4	01	04	1.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2 Dokumen			333,181,400	0	
4	01	04	1.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6 Dokumen			149,498,400	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	04	1.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang Komunikasi, Statistik, Persandian dan Pehubungan	2 Dokumen			253,407,100	0	
TOTAL															**78,589,976,300**	**17,459,043,113**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**3,082,191,800**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**1,893,999,900**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD yang tersusun	3 Dokumen			0	3,049,800	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	8,880,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	8,600,000	33,019,600	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	7,294,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terlaksananya koodinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah	12 bulan			0	33,019,600	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	7,862,500	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6,962,500	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	4,720,000	30,398,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	5,150,000	10,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya tambahan penghasilan PNS	12 bulan			0	1,395,450,000	
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	0	1,395,450,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	15,449,200	41,173,500	
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	8,143,300	25,000,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	18,837,500	30,000,000	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya laporan capaian program dan keuangan biro	1 tahun			0	30,398,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik	12 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	5,465,400	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Analisis Keuangan	12 Dokumen	Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan	1 Tahun	4,185,400	25,000,000	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah DKBMD dan DKPBMD, laporan aset	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	2,541,800	35,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & listrik	12 rekening			0	7,200,000	
4	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya dokumen laporan asset Biro Organisasi	1 tahun			0	12,779,400	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	3,957,500	25,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen pengelolaan akuntansi dan penatausahaan aset yang terlaksana	1 Laporan	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	3,930,000	12,779,400	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 bulan			0	41,173,500	
4	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya kebutuhan ATK	1 tahun			0	21,144,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun			0	15,231,000	
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya bahan bacaan & perundang-undangan	1 tahun			0	18,000,000	
4	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya makanan dan minuman	1 tahun			0	38,200,000	
4	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	1 tahun			0	27,584,000	
4	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Beroperasinya kendaraan dinas operasional	20 unit			0	224,870,000	
4	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya peralatan gedung kantor yg memadai	15 unit			0	25,900,000	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Peningkatan Disiplin ASN	1 Dokumen	0	12,600,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Laporan Peningkatan Disiplin ASN	1 Dokumen	0	25,000,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 Jenis	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	7,013,200	50,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor	50 Jenis	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	37,780,300	21,144,600	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 Dokumen	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	23,550,500	15,231,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3600 Eksemplar	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	18,000,000	18,000,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	500 Porsi	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	35,000,000	38,200,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	15 Kegiatan	Tersedianya Kelengkapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	135,500,000	27,584,000	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mobil jabatan yang diadakan	2 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	0	590,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair yang diadakan	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	0	125,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	19,397,900	100,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang diadakan	3 Aplikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana ASN pada Perangkat Daerah	3 Paket	180,000,000	450,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	1200 Surat	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Tahun	1,740,000	10,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa internet kantor	36 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Tahun	14,400,000	7,200,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Adminstrasi dan Teknis perkantoran Yang dibayar	13 Bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Perangkat Daerah	1 Tahun	0	28,600,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	13 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun	113,290,000	224,870,000	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	7 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun	19,050,000	204,542,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	42 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Perangkat Daerah	1 Tahun	9,090,000	25,900,000	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**										**1,147,912,100**	**1,436,336,900**	
4	01	02	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perangkat daerah yang difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen UPTD /UPTB, Cabang Dinas dan Instansi Vertikal yang terfasilitasi	3 Dokumen 3 Dokumen			174,820,700	332,639,000	
4	01	02	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	22 Dokumen			84,316,300	125,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	02	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang tersusun Jumlah Dokumen Jabatan Struktural yang tersusun Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Rapat Koordinasi Penataan Sumber Daya Aparatur	3 Dokumen 43 Dokumen 10 Kab/Kota			145,913,400	94,438,300	
4	01	02	1.02	01	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah Kab/Kota yang Nilai PMPRB baik Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi	10 Kab/Kota 80 Poin			192,000,100	1,140,000	
4	01	02	1.02	02	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah dokumen hasil Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan SAKIP Perangkat Daerah yang baik	43 Dokumen 43 Laporan			183,498,000	708,160,400	
4	01	02	1.02	03	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menerapkan Budaya Kerja baik	43 OPD			79,926,700	2,936,000	
4	01	02	1.02	04	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	43 OPD			72,658,500	18,337,800	
4	01	02	1.02	05	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					jumlah inovasi pelayanan publik yang termanfaatkan Jumlah perangkat daerah termonitoring pelaksanaan pelayanan publik Jumlah unit kerja pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	15 Inovasi 43 OPD 43 OPD			214,778,400	153,685,400	
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**										**0**	**1,188,191,900**	
4	01	04	1.01	01	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase perangkat daerah tingkat kematangan tinggi	100 persen			0	84,494,000	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Kabupaten /Kota yang terfasilitasi	22 Dokumen			0	125,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Biro Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	04	1.01	03	Penataan Analisis Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase analisa formasi jabatan Perangkat Daerah berkualitas	100 persen			0	94,438,300	
4	01	04	1.01	04	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi	80 Poin			0	1,140,000	
4	01	04	1.01	05	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki LAKIP baik	44 OPD			0	708,160,400	
4	01	04	1.01	06	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi menerapkan Budaya Kerja baik	44 OPD			0	2,936,000	
4	01	04	1.01	07	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP tata kelola pemerintahan	44 OPD			0	18,337,800	
4	01	04	1.01	08	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit kerja pelayanan publik yang memenuhi standar pelayanan	44 OPD			0	153,685,400	
														TOTAL	**1,873,703,100**	**8,245,220,800**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**3,312,468,000**	**4,882,659,105**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**474,980,800**	**855,000,000**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi	100 persen	6,281,000	12,000,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang	cakupan administrasi keuangan	100 persen	4,620,000	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	5,767,000	10,000,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	5,424,000	11,000,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi keuangan	100 persen	6,063,000	8,500,000	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	5,836,600	10,000,000	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	4 dokumen	cakupan administrasi Barang Milik Daerah	100 persen	5,966,200	11,000,000	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah dokumen	1 dokumen	cakupan administrasi kepegawaian	100 persen	5,297,000	11,000,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis ATK	25 jenis	cakupan administrasi umum	100 persen	33,900,300	45,000,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah cetak dan penggandaan	150000 eksemplar	cakupan administrasi umum	100 persen	27,621,000	50,000,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bahan bacaan	4000 eksemplar	cakupan administrasi umum	100 persen	16,380,000	19,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kunjungan tamu	50 kali	cakupan administrasi umum	100 persen	16,625,000	40,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rapat dan konsultasi	50 kali	cakupan administrasi umum	100 persen	200,000,000	400,000,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 unit	cakupan pengadaan Barang Milik Daerah	100 persen	27,923,700	50,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	200 surat	cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan	100 persen	5,930,000	7,500,000	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jasa pelayanan umum	1 orang	cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan	100 persen	30,000,000	35,000,000	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah mebel yang dipelihara	6 unit	cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	1,500,000	3,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	cakupan pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	32,160,000	50,000,000	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**										**2,837,487,200**	**4,027,659,105**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	03	1.01	01	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah Frekuensi monev pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah jumlah monev pertanahan jumlah rakor pertanahan yang dilakukan koordinasi kegiatan ke pemerintah pusat Rakor pelaksanaan Kegiatan Pusat di Daerah	3 dokumen 10 kali 10 kali 1 kali 4 kali 2 kali	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	237,372,200	425,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	03	1.01	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen laporan pelaksanaan SPM jumlah dokumen pemetaan daerah rawan bencana, ketentraman dan ketertiban Jumlah rakor daerah rawan bencana dan trantibum jumlah rakor pimpinan daerah	1 dokumen 1 dokumen 2 kali 2 kali	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	215,339,800	415,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	03	1.01	03	Fasilitasi Penataan Wilayah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah penataan wilayah yang ditata jumlah rupa bumi yang difasilitasi untuk dibakukan jumlah segmen batas yang sudah ditegaskan secara pasti	15 desa persiapan 2 unsur 2 segmen	cakupan pelaksanaan tugas pemerintahan	100 %	297,288,000	450,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	03	1.02	01	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota jumlah dokumen administrasi Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah dan DPRD	7 Kab/Kota 15 dokumen	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	578,000,000	600,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	03	1.02	02	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	Jumlah DOB yang difasilitasi jumlah dokumen fasilitasi pengembangan otonomi dan penataan urusan Rapat koordinasi pelaksanaan Hari Jadi Provinsi dan koordinasi Kabupaten/Kota	2 DOB 1 dokumen 6 kali	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	195,000,000	390,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	03	1.02	03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	dokumen EPPD Kab/Kota dokumen pengembangan peningkatan kapasda jumlah Dokumen informasi LPPD yang diinfokan ke masyarakat jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	10 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	cakupan pelaksanaan otonomi daerah	100 %	699,658,700	782,659,105	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	03	1.03	01	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen kerjasama antar pemerintah jumlah iuran kerjasama yang dibayarkan	10 dokumen 2 iuran	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	228,173,500	385,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	03	1.03	02	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	jumlah dokumen kerjasama dengan Badan Usaha/swasta	5 dokumen	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	221,416,400	290,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	03	1.03	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Nilai Sosial Budaya & Toleransi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyelesaian kebijakan administrasi pemerintahan umum dan pengembangan otonomi daerah	100 %	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	15 dokumen	cakupan fasilitasi kerjasama daerah	100 %	165,238,600	290,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
														TOTAL	**3,312,468,000**	**4,882,659,105**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**0**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 dokumen			0	0	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	5,661,700	6,826,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	2,417,400	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	4 Dokumen			0	0	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	2,445,400	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Tahun	2,494,300	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan	1 Tahun	2,433,400	3,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Perencanaan	1 Tahun	2,670,200	3,982,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	19,513,000	21,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	1,672,400	2,000,000	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Dokumen	1 Dokumen			0	0	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen Keuangan	1 Tahun	2,866,100	3,000,000	
4	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Surat/ dokumen lainnya	50 Surat			0	0	
4	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	2 Rekening			0	0	
4	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit			0	0	
4	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Aparatur pengelolaan keuangan	8 orang			0	0	
4	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ATK	55 Jenis			0	0	
4	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Jenis bahan bacaan	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya Jenis Makanan dan Minuman	2 Jenis			0	0	
4	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Perjalanan Dinas	25 kali			0	0	
4	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	kendaraan Dinas/Operasional	12 unit			0	0	
4	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 tahun			0	0	
4	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah unit kendaraan yang beroperasi dengan baik	15 unit			0	0	
4	01	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	SDM aparatur	6 orang			0	0	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	12,569,500	60,000,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	10,665,600	25,000,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	8,460,000	8,460,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	6,635,000	25,000,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya alat tulis kantor	1 Tahun	36,500,000	70,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Surat menyurat	1 Tahun	17,428,000	30,000,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Surat menyurat	1 Tahun	83,375,000	120,000,000	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**0**	**0**	
4	01	03	1.02	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun			0	0	
4	01	03	1.02	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			paket tender sesuai usulan Perangkat Daerah	95 %			0	0	
4	01	03	1.02	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	1 tahun			0	0	
4	01	03	1.02	04	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Standar pelayanan sesuai standarisasi LPSE	17 standar			0	0	
4	01	03	1.02	05	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Aplikasi pengadaan barang/jasa	2 aplikasi			0	0	
4	01	03	1.02	06	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Informasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 tahun			0	0	
4	01	03	1.02	07	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Menuju Center of Excellence (CoE)	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	03	1.02	08	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SDM Pengadaan Barang dan Jasa terlatih	200 orang			0	0	
4	**01**	**07**			**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**										**4,192,029,900**	**4,144,085,000**	
4	01	07	1.01	01	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa	1 dokumen	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	148,738,400	157,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	07	1.01	02	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Prosentase penyelesain tender sesuai pengajuan OPD	90 persen	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	2,419,519,500	2,647,835,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	07	1.01	03	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	laporan pemantauan & evaluasi pengadaan barang dan jasa	1 laporan	Tercapainya Proses tender yg tepat waktu	97 persen	229,922,000	210,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	07	1.02	01	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah standar pelayanan sesuai standarisasi LPSE	17 standar	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	267,175,300	262,500,000	
4	01	07	1.02	02	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah aplikasi pengadaan barang/jasa yg di-kembangkan	2 aplikasi	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	192,166,700	157,500,000	
4	01	07	1.02	03	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	jumlah informasi pengadaan barang/jasa	4 laporan	Tercapainya Prosentase pelayanan sesuai 17 standar LPSE	17 standar	187,122,000	210,000,000	
4	01	07	1.03	01	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah SDM Terlatih	100 orang	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	162,942,000	157,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	07	1.03	02	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	jumlah kabupaten/ kota terbina	10 kab/kota	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	139,455,800	183,750,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	07	1.03	03	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Selaprang, Semua Kelurahan	Tingkat Kematangan UKPBJ	3.3 level	Jumlah pelaku pengadaan terlatih	200 orang	Tercapainya Kematangan Level Proaktif bagi UKPBJ	3 level	444,988,200	157,500,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
TOTAL															**4,409,836,900**	**4,531,353,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**2,504,018,100**	**5,155,305,700**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**220,346,300**	**2,871,633,900**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	3,522,400	3,522,400	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,993,000	1,993,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,682,700	1,682,700	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,486,700	1,486,700	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,490,000	1,490,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,109,000	1,109,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Evaluas Kinerja	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,120,000	1,120,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
4	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	0	2,107,550,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelayanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	8,040,000	8,040,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,549,400	1,549,400	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Akuntabilitas yang terselesaikan	1 Tahun			0	0	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semester SKPD	1 Dokumen	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	1,619,000	1,619,000	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Jumlah Barang yang terpenuhi	1 Dokumen	1,442,000	1,042,000	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang yang terpenuhi	1 Dokumen	0	8,400,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terlaksananya pengadaan barang1	1 Tahun			0	0	
4	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Muebeler yang diadakan	2 buah			0	0	
4	01	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pakian dinas yang diadakan	45 set			0	18,000,000	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengolahan Data Kepegawaian	40 Data			0	2,250,000	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat	5 Orang			0	32,000,000	
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang melaksanakan Bimtek	5 Orang			0	27,000,000	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	0	1,925,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	15 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	11,517,200	11,517,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	4 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	3,950,000	3,950,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	2 Jenis	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	8,460,000	8,460,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tamu yang terfasilitasi	1 Tahun	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	4,920,000	4,920,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Cakupan pelayanan administari Perkantoran	2 Dokumen	103,000,000	95,000,000	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Peralatan dan Mesin	6 Dokumen	0	75,000,000	
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tersedianya Peralatan dan Mesin	6 Dokumen	0	42,000,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	6 Buah	Tersedianya Peralatan dan Mesin	6 Dokumen	46,637,400	45,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang dikelola	500 Surat	Surat Menyurat yang terpenuhi	500 Surat	2,877,500	2,877,500	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Surat Menyurat yang terpenuhi	500 Surat	0	29,900,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Surat Menyurat yang terpenuhi	500 Surat	0	12,300,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	3 Jenis	0	275,000,000	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Mesin Yang Terpelihara	3 Jenis	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	3 Jenis	13,930,000	13,930,000	
4	01	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Terpeliharanya Peralatan dan Mesin	3 Jenis	0	30,000,000	
4	**01**	**04**			**PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM**										**0**	**0**	
4	01	04	1.01	02	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dalam Daerah yang terlaksana	1 Tahun			0	0	
4	**01**	**06**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**2,283,671,800**	**2,283,671,800**	
4	01	06	1.01	01	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen			293,652,200	293,652,200	
4	01	06	1.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen			330,019,600	330,019,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	06	1.02	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan perikanan	2 Dokumen			300,000,000	300,000,000	
4	01	06	1.02	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen			150,000,000	150,000,000	
4	01	06	1.02	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen bahan Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen			150,000,000	150,000,000	
4	01	06	1.03	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	2 Dokumen			735,000,000	735,000,000	
4	01	06	1.03	02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	2 Dokumen			100,000,000	100,000,000	
4	01	06	1.03	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen			75,000,000	75,000,000	
4	01	06	1.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	2 Dokumen			75,000,000	75,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Biro Perekonomian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	06	1.03	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Bahan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen			75,000,000	75,000,000	
TOTAL															**2,504,018,100**	**5,155,305,700**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.09.0000 Biro Administrasi Kerjasama
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.09.0000 Biro Administrasi Kerjasama

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**0**	
4	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	4 unit			0	0	
4	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 buah			0	0	
4	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	5 unit			0	0	
														TOTAL	**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**0**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**0**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya dokumen Renstra dan Renja	2 dokumen			0	0	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Rumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan			7,130,000	11,687,000	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	4 dokumen			3,700,000	12,180,000	
4	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya dokumen RKA, RKAP, DPA dan DPPA	4 dokumen			0	0	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen RKA Perubahan	1 dokumen			3,700,000	12,180,000	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen DPA	1 dokumen			3,575,000	12,180,000	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen DPA Perubahan	1 dokumen			3,575,000	12,180,000	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	tersedianya dokumen LKjIP	1 dokumen			4,609,600	3,982,000	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	1 tahun			4,020,000	228,123,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah tenaga keuangan	5 orang			13,640,000	228,123,000	
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 tahun			3,725,000	228,123,000	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya dokumen LKjIP	1 dokumen			0	0	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	3 dokumen			3,725,000	228,123,000	
4	01	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	dokumen	1 dokumen			0	228,123,000	
4	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jenis surat	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersedianya jasa telepon dan internet	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah unit	26 unit			0	0	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen	1 Dokumen			3,725,000	228,123,000	
4	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah tenaga keuangan	5 orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jenis atk	55 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun			0	0	
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jenis bacaan	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jenis makanan	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	frequensi perjalanan	10 kali			0	0	
4	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun			0	0	
4	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersedianya meja kerja kantor dan sarana pendukungnnya	20 buh			0	0	
4	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 tahun			0	0	
4	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah unit kendaraan yang beroperasi dengan baik	21 unit			0	0	
4	01	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah aparatur	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	sumber daya manusia	1 tahun			0	0	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis atk tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	55 jenis 1 tahun			0	102,769,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	alat tulis kantor	1 tahun			39,355,000	62,607,000	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumenalat tulis kantor	1 tahun			9,107,500	62,607,000	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis bacaan	2 jenis			8,460,000	8,883,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis makanan	2 jenis			9,620,000	50,127,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	frequensi perjalanan	10 kali			80,350,000	241,827,000	
4	01	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	peralatan kantor	10 unit			0	102,769,000	
4	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	aplikasi	1 buah			0	100,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jenis surat	2 jenis			2,610,000	14,844,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Tersedianya jasa telepon dan internet	2 jenis			0	0	
4	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit	26 unit			10,300,000	35,175,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jasa tenaga administrasi	2 orang			37,800,000	41,600,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah unit kendaraan yang beroperasi dengan baik	21 unit			0	347,307,000	
4	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 tahun			0	184,538,000	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**0**	**0**	
4	01	03	1.03	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumah laporan hasil monev keg. APBD / tindak lanjut rekomendasi	4 laporan			0	0	
4	01	03	1.03	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumah laporan hasil monev keg. APBN / tindak lanjut rekomendasi	4 laporan			0	0	
4	01	03	1.03	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan Rakor	2 laporan			0	0	
4	01	03	1.03	04	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercapainya analisis kinerja pembangunan daerah	1 tahun			0	0	
4	01	03	1.03	05	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	5 laporan			0	0	
4	01	03	1.03	06	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tercapainya fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	1 tahun			0	0	
4	**01**	**08**			**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**										**1,588,000,000**	**0**	
4	01	08	1.01	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan	477,311,200	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Biro Administrasi Pembangunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	08	1.01	02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan	244,300,500	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	08	1.01	03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah	4 laporan	242,511,800	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	08	1.02	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan	147,566,800	0	
4	01	08	1.02	02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan	315,375,500	0	
4	01	08	1.02	03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Prosentase Hasil Pengendalian Pembangunan	30 %			Jumlah Laporan Hasil Analisis Pembangunan Daerah	4 laporan	160,934,200	0	
TOTAL															**1,840,727,100**	**2,788,180,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**4,970,383,300**	**5,964,459,960**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**4,970,383,300**	**5,964,459,960**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	5 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	2 Laporan	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 Laporan	Dokumen perencanaan	100 %	10,000,000	12,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga administrasi keuangan	9 Orang	Dokumen keuangan	100 %	4,620,000	5,544,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	1 Laporan	Dokumen keuangan	100 %	5,605,000	6,726,000	
4	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	18 Laporan	Dokumen keuangan	100 %	10,143,600	12,172,320	
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	4 Dokumen	Dokumen aset	100 %	9,342,000	11,210,400	
4	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen kepegawaian	76 Dokumen	Dokumen kepegawaian	100 %	57,204,500	68,645,400	
4	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang diklat formal	60 Orang	Dokumen kepegawaian	100 %	0	0	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan kantor	46 Unit	Layanan administrasi	100 %	14,305,000	17,166,000	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK	50 Jenis	Layanan administrasi	100 %	74,904,600	89,885,520	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan	11 Jenis	Layanan administrasi	100 %	19,786,200	23,743,440	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan bacaan	144 examplar	Layanan administrasi	100 %	87,660,000	105,192,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah makan dan minum tamu/rapat	1440 OT	Layanan administrasi	100 %	50,350,000	60,420,000	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perjalanan dinas	108 OT	Layanan administrasi	100 %	200,000,000	240,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	0 Unit	Kendaraan dinas	0 %	0	0	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	0 Unit	Kendaraan dinas	0 %	200,000,000	240,000,000	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat	1120 Jenis	Jasa perkantoran	100 %	5,920,000	7,104,000	
4	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	0 Rekening	Jasa perkantoran	100 %	0	0	
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tenaga penunjang perkantoran	84 OB	Jasa perkantoran	100 %	225,600,000	270,720,000	
4	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	0 Unit	Jumlah peralatan	100 %	0	0	
4	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	0 Unit	Jumlah peralatan	100 %	0	0	
4	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubelair	0 Unit	Jumlah peralatan	100 %	0	0	
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan kantor	132 Unit	Jumlah peralatan	100 %	49,640,000	59,568,000	
4	01	01	1.13	01	Penyiapan Materi Pimpinan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah materi sambutan	1000 Materi	Materi sambutan	100 %	437,410,000	524,892,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Biro Administrasi Pimpinan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.13	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah koordinasi dan komunikasi kegiatan pimpinan	720 Kali	Materi sambutan	100 %	545,000,000	654,000,000	
4	01	01	1.13	03	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumentasi pimpinan	1000 Dokumen	Materi sambutan	100 %	825,117,400	990,140,880	
4	01	01	1.14	01	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi acara pimpinan	1000 Kali	Jumlah acara	100 %	454,985,000	545,982,000	
4	01	01	1.14	02	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi tamu pimpinan	175 Kali	Jumlah acara	100 %	322,790,000	387,348,000	
4	01	01	1.14	03	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jadwal layanan keprotokolan	1000 Kali	Jumlah acara	100 %	1,300,000,000	1,560,000,000	
														TOTAL	**4,970,383,300**	**5,964,459,960**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**2,123,739,700**	**1,851,738,840**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**24,420,940**	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	2 Dokumen			0	24,420,940	
4	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang tersedia	2 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	10,010,000	0	
4	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	10,095,200	0	
4	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang tersedia	2 Dokumen			0	0	
4	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	10,004,200	0	
4	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	10,075,900	0	
4	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	9,937,400	0	
4	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Sakip yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersedia	1 Dokumen	10,950,600	0	
4	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	1 orang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	9,240,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan yang tersedia	1 Laporan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Laporan	14,037,000	0	
4	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan kinerja yang terselesaikan	3 Dokumen			0	0	
4	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikannya	1 Dokumen			0	93,855,410	
4	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan	1 Laporan	1,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening Listrik, telepon dan air yang terbayar setiap bulan	2 Rekening			0	34,500,000	
4	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	38 Unit			0	115,814,545	
4	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan Aset Barang Milik Daerah yang terselesaikan	2 Dokumen			0	0	
4	01	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan	1 Laporan	1,000,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan yang terpelihara	18 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang urusan	1 Laporan	0	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	5 Orang			0	40,588,537	
4	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat Kantor yang tersedia	25 jenis			0	93,473,380	
4	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	11290 Explar			0	56,880,725	
4	01	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan tersedia	3 Unit			0	414,243,098	
4	01	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanan yang tersedia	72 Explar			0	0	
4	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tamu Pimpinan Daerah yang Terlayani	624 Porsi			0	22,390,500	
4	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat Koordinasi antar Daerah yang terlaksana	13 OT			0	924,588,500	
4	01	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mobil Jabatan yang dibeli	2 Unit			0	617,533,785	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dibeli	3 Unit			0	116,853,110	
4	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara	18 Unit			0	284,460,550	
4	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	0	0	
4	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 Jenis	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	11,409,500	0	
4	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	4 Jenis	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	15,846,000	0	
4	01	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	7,920,000	12,000,000	
4	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yg difasilitasi	1000 porsi	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	25,900,000	0	
4	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Tahun	Jumlah Administrasi Umum Perangkat	100 Persen	50,000,000	0	
4	01	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			0	0	
4	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang tersedia	1 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang tersedia	5 set			0	0	
4	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	996,500	1,500,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	6 Orang	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	189,200,000	0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
4	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	25,000,000	0	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**0**	**5,426,936,400**	
4	01	02	1.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pejanggik			Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	740 Perda/Pergub/SK			0	367,505,270	
4	01	02	1.03	02	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terfasilitasi Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terdokumentasi Jumlah Produk Hukum Daerah Provinsi yang terdokumentasi dan tersosialisasi	20 Naskah 40 Perda/Pergub 40 Perda/Pergub			0	1,419,744,920	
4	01	02	1.03	03	Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	10 Perda			0	1,480,711,722	
4	01	02	1.03	04	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masalah Hukum (litigasi) yang terafasilitasi	4 Perkara			0	523,841,560	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	01	02	1.03	05	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pelaporan aksi HAM yang terfasilitasi Jumlah Masalah Hukum Non Lilitgasi yang terfasilitasi	18 Dokumen 4 kasus			0	1,635,132,928	
4	**01**	**05**			**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**										**1,711,117,400**	**315,317,900**	
4	01	05	1.01	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	279,999,900	0	
4	01	05	1.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	139,999,800	100,000,000	
4	01	05	1.01	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	365,317,900	215,317,900	
4	01	05	1.01	04	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas & Penegakan Produk Hukum Daerah	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	100 %			Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	379,999,800	0	
4	01	05	1.02	01	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	100 %	Jumlah Penyelesaian Kasus Kasus Hukum Litigasi	4 Perkara	Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	270,300,000	0	
4	01	05	1.02	02	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Persentase Produk Hukum Daerah yang terevaluasi	100 %			Persentase Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 Persen	275,500,000	0	
														TOTAL	**2,123,739,700**	**10,093,857,380**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**										**99,962,195,147**	**63,242,516,030**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**56,733,868,147**	**23,376,000,550**	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**356,221,100**	**6,258,875**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	27,187,700	0	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**20,455,280**	
4	02	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	2 Dokumen			0	20,455,280	
4	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**356,221,100**	**6,258,875**	
4	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	108,644,200	0	
4	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	34,008,800	0	
4	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	109,722,000	0	
4	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perubahan DPA	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	33,839,000	0	
4	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen LKjIP	1 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	29,208,400	6,258,875	
4	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	16 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan, pengabbgaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	22 Dokumen	13,611,000	0	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,864,881,076**	**13,345,293,450**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang disedikan gaji dan tunjangannya	129 Orang	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	12,354,035,876	13,345,293,450	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,377,737,020**	
4	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang disedikan gaji dan tunjangannya	130 Orang			0	13,345,293,450	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,864,881,076**	**13,345,293,450**	
4	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PTT	4 Orang	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	317,151,400	0	
4	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen yang di verifikasi	7500 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	169,372,500	0	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,377,737,020**	
4	02	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	60 orang			0	18,603,435	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,864,881,076**	**13,345,293,450**	
4	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	2,974,800	0	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,377,737,020**	
4	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 Dokumen			0	6,258,875	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,864,881,076**	**13,345,293,450**	
4	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3 Dokumen	Jumlah jenis pelayanan administrasi keuangan	5 Jenis	21,346,500	0	
4	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**13,377,737,020**	
4	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah laporan asset Jumlah laporan keuangan yang disusun	2 Dokumen 1 Dokumen			0	7,581,260	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**14,918,012,175**	
4	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah surat keluar	1500 Surat			0	8,419,150	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,825,000**	**0**	
4	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen perencaanaan kebutuhan BMD	5 Dokumen	Jumlah dokumen	11 Dokumen	1,625,000	0	
4	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis DMD yang diamankan	0 jenis	Jumlah dokumen	11 Dokumen	0	0	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**14,918,012,175**	
4	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis rekening	5 Jenis			0	1,160,961,800	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,825,000**	**0**	
4	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumah dokumen rekonsiliasi dan laporan BMD	2 Dokumen	Jumlah dokumen	11 Dokumen	6,125,000	0	
4	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan penatahusahaan BMD	2 jenis	Jumlah dokumen	11 Dokumen	12,075,000	0	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**14,918,012,175**	
4	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah pengelola administrasi keuangan Jumlah tenaga PTT	9 Orang 4 Orang			0	430,928,000	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,825,000**	**0**	
4	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumalah jenis barang	0 jenis	Jumlah dokumen	11 Dokumen	0	0	
4	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**14,918,012,175**	
4	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah orang tenaga keamanan kantor Jumlah orang tenaga kebersihan kantor	35 Orang 38 Orang			0	3,265,307,125	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tulis kantor	50 Jenis			0	609,476,310	
4	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis			0	570,577,100	
4	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 Jenis			0	81,612,625	
4	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis			0	596,523,515	
4	02	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan rumah tangga	3 Jenis			0	72,864,000	
4	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	3 Jenis			0	198,720,000	
4	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang tenaga pramusaji Jumlah orang yg difasilitasi	25 Orang 1890 Orang			0	1,679,000,000	
4	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPPD	40 SPPD			0	664,631,000	
4	02	01	1.03	20	Pengadaan Mobil Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mobil jabatan	0 Unit			0	1,616,831,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan dinas/operasional	0 Unit			0	0	
4	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeuler	5 Jenis			0	1,543,889,950	
4	02	01	1.03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rumah jabatan yang dipelihara	1 Unit			0	0	
4	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 Unit			0	399,744,600	
4	02	01	1.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah mobil jabatan yang dipelihara	4 Unit			0	192,740,000	
4	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraaan dinas/operasional yang dipelihara	70 Unit			0	1,570,509,000	
4	02	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis			0	0	
4	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis			0	255,277,000	
4	02	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah mebeleur yang dipelihara	5 Jenis			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rumah jabatan yang direhab	0 Unit			0	0	
4	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor yang direhab	1 Unit			0	0	
4	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
4	02	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang disediakan pakaian dinas dan perlengkapannya	137 Orang			0	0	
4	02	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah orang yang disediakan pakaian khusus hari-hari tertentu	137 Orang			0	0	
4	02	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek/worshop/pelatihan jumlah pegawai yg mengikuti kegiatan pembinaan mental dan fisik	20 Orang 235 Orang			0	0	
4	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**279,643,200**	**0**	
4	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan peningkatan mental dan fisik	129 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	60,155,400	0	
4	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumalah pegawai yang diberikan pakaian dinas	0 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	0	0	
4	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya	129 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	29,486,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	0	0	
4	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	25,001,000	0	
4	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbtek	20 Orang	Jumlah jenis layanan kepegawaian	4 Jenis	165,000,000	0	
4	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**857,466,000**	**0**	
4	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	4 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	93,390,000	0	
4	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	0	0	
4	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan Rumah tangga yang disediakan	1 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	33,592,000	0	
4	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	22 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	150,000,700	0	
4	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	7 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	65,004,400	0	
4	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	206,480,000	0	
4	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	0 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	0	0	
4	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah tamu yang difasilitasi	2200 Orang	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	100,368,000	0	
4	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat koordinassi dan konsultasi SKPD	36 kali	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	34,070,000	0	
4	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis bahan arsip	3 jenis	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	100,160,900	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah orang pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	14 Orang	jumlah jenis layanan administrasi umum opd	10 Jenis	74,400,000	0	
4	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**283,586,500**	**0**	
4	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pengadaan kendaraan jabatan	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pengadaan kendaraan operasional	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	02	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis mebel yang diadakan	0 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan dan mesin yang diadakan	9 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	3	213,676,500	0	
4	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis aset tetap lain yang diadakan	2 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	3	69,910,000	0	
4	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	3	0	0	
4	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**4,113,563,200**	**3,265,307,125**	
4	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat keluar	1000 surat	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	15,700,000	0	
4	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 jenis	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	737,863,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah orang jasa pelayanan umum	112 Orang	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3,360,000,000	3,265,307,125	
4	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,068,746,000**	**1,970,253,600**	
4	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan jabatan	4 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	167,600,000	0	
4	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan operasional	66 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	1,198,060,000	1,570,509,000	
4	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis mebel	6 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	25,000,000	0	
4	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan dan mesin	10 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	350,300,000	0	
4	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah aset tetap lain	1 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	12,500,000	0	
4	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	315,286,000	0	
4	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	0 Unit	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	0	399,744,600	
4	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis sarana/prasarana pendukung	0 jenis	Jumlah jenis barang milik daerah	8 Jenis	0	0	
4	**02**	**01**	1.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**34,909,203,571**	**0**	
4	02	01	1.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah anggota DPRD yang dilayani	65 Orang	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	1 Jenis	34,909,203,571	0	
4	02	01	1.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis pakain DPRD	0 jenis	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	1 Jenis	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	1.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah anggota DPRD	0 Orang	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	1 Jenis	0	0	
4	**02**	**01**	1.16		**Layanan Adminstrasi DPRD**										**980,732,500**	**4,788,887,500**	
4	02	01	1.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah anggota DPRD	0 Orang	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis	0	0	
4	02	01	1.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah fasilitasi fraksi	180 kali	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis	60,005,100	0	
4	02	01	1.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rapat koordinassi dan konsultasi DPRD	48 Kali	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis	494,997,400	4,788,887,500	
4	02	01	1.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD	3 Jenis	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4 Jenis	425,730,000	0	
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**										**43,228,327,000**	**39,866,515,480**	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**										**3,107,474,800**	**0**	
4	02	02	1.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah program pembentukan perda (propemperda)	6 raperda	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	344,610,300	0	
4	**02**	**02**	1.01		**Layanan Administrasi DPRD**										**0**	**4,980,628,175**	
4	02	02	1.01	02	Fasilitasi Rapat DPRD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi rapat Badan Musyawarah DPRD Jumlah kegiatan Pertemuan Badan Musyawarah se-NTB Jumlah rapat Paripurna Jumlah rapat penyusunan RKT DPRD Jumlah risalah rapat paripurna yang dihasilkan	24 kali 1 kali 48 kali 1 kali 48 risalah			0	4,788,887,500	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**										**3,107,474,800**	**0**	
4	02	02	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah Rancangan Perda yang dibahas	12 raperda	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	354,746,000	0	
4	**02**	**02**	1.01		**Layanan Administrasi DPRD**										**0**	**4,980,628,175**	
4	02	02	1.01	03	Penyediaan Fasilitasi Fraksi DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah falisitasi kegiatan Fraksi DPRD	108 kegiatan			0	100,000,000	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**										**3,107,474,800**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	1.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah kegiatan sosialisasi perda	1 kali	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	2,110,968,500	0	
4	**02**	**02**	1.01		**Layanan Administrasi DPRD**										**0**	**4,980,628,175**	
4	02	02	1.01	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	6 Jenis			0	91,740,675	
4	**02**	**02**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**										**3,107,474,800**	**0**	
4	02	02	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah naskah akademik	6 naskah	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	276,000,000	0	
4	02	02	1.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen tata tertib	1 Dokumen	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Dokumen	21,150,000	0	
4	**02**	**02**	1.02		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**0**	**48,748,914,805**	
4	02	02	1.02	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota dprd yang dilayani administrasi keuangannya	65 Orang			0	48,171,786,500	
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**679,505,900**	**0**	
4	02	02	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	14 Kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	150,008,500	0	
4	**02**	**02**	1.02		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**0**	**48,748,914,805**	
4	02	02	1.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	325 stel			0	577,128,305	
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**679,505,900**	**0**	
4	02	02	1.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	15 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	163,574,500	0	
4	02	02	1.02	03	Pembahasan APBD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan APBD	14 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	149,946,300	0	
4	**02**	**02**	1.02		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**0**	**48,748,914,805**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	1.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan medical check up	65 Orang			0	0	
4	**02**	**02**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**679,505,900**	**0**	
4	02	02	1.02	04	Pembahasan Perubahan APBD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Perubahan APBD	10 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	107,988,300	0	
4	02	02	1.02	05	Pembahasan Laporan Semester		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat	0 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	0	0	
4	02	02	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10 kali	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	4 Dokumen	107,988,300	0	
4	**02**	**02**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**										**302,429,000**	**10,055,013,730**	
4	02	02	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	50,002,800	0	
4	02	02	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	50,002,800	0	
4	02	02	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	36 Kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	50,002,800	0	
4	02	02	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	36 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	50,002,800	0	
4	02	02	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	36 Kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	43,750,000	5,927,583,690	
4	02	02	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	58,667,800	0	
4	02	02	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat	0 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	0	4,127,430,040	
4	02	02	1.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0 kali	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	6 Dokumen	0	0	
4	**02**	**02**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**										**4,503,881,400**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	1.04	01	Orientasi DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Orientasi	0 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	0	0	
4	02	02	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti Bimtek	65 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	2,009,777,100	0	
4	02	02	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah publikasi dan dokumentasi	36 kali	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	1,245,081,300	0	
4	02	02	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli	200 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	425,580,000	0	
4	02	02	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah tenaga ahli fraksi	9 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	360,995,100	0	
4	02	02	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah orang yang difasilitasi	480 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	62,448,000	0	
4	02	02	1.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen program kerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang	399,999,900	0	
4	**02**	**02**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**										**21,290,299,000**	**29,447,762,500**	
4	02	02	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah SPPD	975 sppd	Jumlah laporan	3 Dokumen	6,735,000,000	10,157,490,000	
4	02	02	1.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan	3 Dokumen	Jumlah laporan	3 Dokumen	120,299,000	0	
4	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Reses		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah reses	2 kali	Jumlah laporan	3 Dokumen	14,435,000,000	19,290,272,500	
4	**02**	**02**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**										**33,206,400**	**363,739,250**	
4	02	02	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah dokumen kode etik DPRD	1 Dokumen	Jumlah laporan	2 Dokumen	15,004,300	0	
4	02	02	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah kegiatan pengawasan kode etik	12 kali	Jumlah laporan	2 Dokumen	18,202,100	363,739,250	
4	**02**	**02**	1.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**										**13,311,530,500**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	1.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	jumlah SPPD	976 sppd	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	12,000,000,000	0	
4	02	02	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan kinerja DPRD	1 Dokumen	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	11,530,500	0	
4	02	02	1.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah laporan pelaksanaan tugas badan musyawarah	12 Dokumen	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	100,000,000	0	
4	02	02	1.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	Jumlah pimpinan yang difasilitasi	4 Orang	Jumlah laporan fasilitasi tugas DPRD	4 Dokumen	1,200,000,000	0	
4	**02**	**03**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**										**0**	**81,591,553,320**	
4	**02**	**03**	1.01		**Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD**										**0**	**12,895,787,200**	
4	02	03	1.01	02	Pembahasan Rancangan Perda			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan kegiatan uji publik dan FGD Jumlah Perda prakarsa Gubernur yang dihasilkan Jumlah program pembentukan perda (propemperda) prakarsa DPRD Jumlah program pembentukan perda (propemperda) prakarsa Gubernur Jumlah Rapat Pembahasan Rancangan Perda Jumlah rekomendasi DPRD	2 Kali 12 Raperda 7 Raperda 12 Raperda 95 Kali 50 Rekomendasi			0	12,895,787,200	
4	02	03	1.01	04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi penyusunan naskah akademik	7 Naskah Akademik			0	0	
4	**02**	**03**	1.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**0**	**10,256,275,000**	
4	02	03	1.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan KUA dan PPAS	10 Rapat			0	2,051,255,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	03	1.02	02	Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan KUPA dan PPAS	10 Rapat			0	2,051,255,000	
4	02	03	1.02	03	Pembahasan APBD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan APBD	3 Rapat			0	2,051,255,000	
4	02	03	1.02	04	Pembahasan APBD Perubahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan APBD Perubahan	3 Rapat			0	2,051,255,000	
4	02	03	1.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat pembahasan Pertanggungjawaban APBD	17 Rapat			0	2,051,255,000	
4	**02**	**03**	1.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**										**0**	**24,197,213,020**	
4	02	03	1.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan dalam daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah kunjungan luar daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah kunjungan luar negeri pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah rapat pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 kali 24 kali 1 kali 48 Kali			0	2,624,765,290	
4	02	03	1.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan dalam daerah pengawasan urusan pemerintah Bidang Infrastruktur Jumlah kunjungan luar daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah kunjungan luar negeri pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah rapat pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 kali 24 kali 1 kali 48 Kali			0	2,595,228,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	03	1.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan dalam daerahPengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah kunjungan luar daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah kunjungan luar negeri pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah rapat pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 kali 24 kali 1 kali 48 Kali			0	3,693,524,000	
4	02	03	1.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan dalam daerah Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah kunjungan luar daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah kunjungan luar negeri pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 kali 24 kali 1 kali 48 Kali			0	2,924,220,000	
4	02	03	1.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan dalam daerahPengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah kunjungan luar daerah pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah kunjungan luar negeri pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	24 kali 24 kali 1 kali 48 Kali			0	5,927,583,690	
4	02	03	1.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Kali			0	2,304,462,000	
4	02	03	1.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat Pengawasan Penggunaan Anggaran	3 Kali			0	4,127,430,040	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	**02**	**03**	1.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**										**0**	**3,975,266,640**	
4	02	03	1.04	01	Orientasi DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan orientasi DPRD	1 kali			0	0	
4	02	03	1.04	02	Bimbingan Teknis DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis DPRD	3 kali			0	1,527,449,550	
4	02	03	1.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan	36 kali			0	1,941,282,800	
4	02	03	1.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga ahli AKD Jumlah tenaga ahli Pimpinan Jumlah tim ahli penyusunan raperda dan kegiatan DPRD lainnya	18 Orang 8 Orang 56 OK			0	434,700,000	
4	02	03	1.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan tenaga ahli fraksi Jumlah tenaga ahli Fraksi	108 Laporan 9 Orang			0	0	
4	02	03	1.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang difasilitasi penyelenggaraan hubungan masyarakat	480 Orang			0	71,834,290	
4	**02**	**03**	1.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**										**0**	**29,447,762,500**	
4	02	03	1.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SPPD kunjungan kerja dalam daerah	1275 SPPD			0	10,157,490,000	
4	02	03	1.05	03	Pelaksanaan Reses			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan reses	3 kali			0	19,290,272,500	
4	**02**	**03**	1.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**										**0**	**819,248,960**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	03	1.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku kode etik DPRD	100 buku			0	455,509,710	
4	02	03	1.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Pertemuan Badan Kehormatan se-NTB jumlah rapat pengawasan kode etik	1 kali 12 kali			0	363,739,250	
4	**02**	**03**	1.08		**Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD**										**0**	**0**	
4	02	03	1.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja Pimpinan DPRD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah cetak buku laporan akuntabilitas kinerja pimpinan DPRD Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	145 Buku 1 Laporan			0	0	
														TOTAL	**99,962,195,147**	**226,879,816,805**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**06**				**PENGHUBUNG**										**0**	**18,029,082,148**	
5	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**17,092,485,693**	
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**294,352,850**	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		2 Dokumen			0	28,370,040	
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**79,796,200**	**123,230,780**	
5	06	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	61,034,600	28,370,040	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	06	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	11,639,600	73,714,540	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**294,352,850**	
5	06	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersusunnya dokumen perencanaan	2 dokuemn			0	73,714,540	
5	06	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	tersusunnya dokumen evaluasi kinerja OPD	1 dokuemn			0	14,018,270	
5	06	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Tahun			0	178,250,000	
5	**06**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**79,796,200**	**123,230,780**	
5	06	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	7,122,000	21,146,200	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,191,029,190**	**6,699,541,548**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	5,179,679,590	6,685,523,278	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,720,687,748**	
5	06	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun			0	6,685,523,278	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,191,029,190**	**6,699,541,548**	
5	06	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	9,109,600	14,018,270	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,720,687,748**	
5	06	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		2 Dokumen			0	21,146,200	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,191,029,190**	**6,699,541,548**	
5	06	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	2,240,000	0	
5	**06**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**6,720,687,748**	
5	06	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Tersusunya Laporan Keuangan OPD	1 tahun			0	0	
5	06	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat		1 Dokumen			0	14,018,270	
5	**06**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**10,028,593,095**	
5	06	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	500 Surat			0	11,017,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	06	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Rekening			0	826,700,500	
5	06	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan	1 tahun			0	0	
5	06	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	1 dokumen			0	187,293,830	
5	06	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				0	301,248,250	
5	06	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	16 Orang			0	2,620,401,500	
5	06	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	Jenis			0	93,507,650	
5	06	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan penggandaan	2 Jenis			0	28,205,245	
5	06	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah instalasi listrik	20 Jenis			0	28,355,320	
5	06	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	5 bacaan			0	103,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	06	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah makanan dan minuman	Jenis			0	271,860,000	
5	06	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	20 Rapat			0	851,736,000	
5	06	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	3 unit			0	1,684,183,050	
5	06	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan gedung kantor	5 Jenis			0	37,139,250	
5	06	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah gedung kantor	2 gedung			0	207,828,000	
5	06	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	18 Jenis			0	695,980,000	
5	06	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	40 Jenis			0	79,637,500	
5	06	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung terbangun	3 unit			0	2,000,000,000	
5	**06**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**48,852,000**	
5	06	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang terlatih	Orang			0	48,852,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	**06**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**60,000,000**	**48,852,000**	
5	06	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	60,000,000	48,852,000	
5	**06**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**317,135,200**	**1,283,656,565**	
5	06	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	13,938,000	28,355,320	
5	06	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	8,797,200	28,205,245	
5	06	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	23,400,000	103,500,000	
5	06	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	0	271,860,000	
5	06	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	271,000,000	851,736,000	
5	**06**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**1,684,183,050**	
5	06	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	3 unit			0	1,684,183,050	
5	**06**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**643,016,000**	**837,717,500**	
5	06	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	42,000,000	11,017,000	
5	06	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	551,016,000	826,700,500	
5	06	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	50,000,000	0	
5	**06**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**782,300,000**	**940,947,250**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	06	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	0	695,980,000	
5	06	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	0	37,139,250	
5	06	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	782,300,000	207,828,000	
5	**06**	**02**			**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**										**125,000,000**	**936,596,455**	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**125,000,000**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		Meningkatnya Daya Saing Industri		Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMII	39000 orang			Jumlah kunjungan	35000 Orang	0	0	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**0**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	1 tahun			0	0	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**125,000,000**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat		Meningkatnya Daya Saing Industri		Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMII	39000 orang			Jumlah kunjungan	35000 Orang	0	0	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**0**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	02	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1 tahun			0	0	
5	06	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah promosi dan produk unggulan	8 event			0	628,463,500	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**125,000,000**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	03	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		Meningkatnya Daya Saing Industri		Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMII	39000 orang			Jumlah kunjungan	35000 Orang	17,500,000	0	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**0**	**936,596,455**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	06	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	1 tahun			0	0	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**125,000,000**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Daya Saing Industri		Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMII	39000 orang			Jumlah kunjungan	35000 Orang	0	628,463,500	
5	06	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Daya Saing Industri		Jumlah kunjungan wisatawan pada Anjungan Daerah NTB TMII	39000 orang			Jumlah kunjungan	35000 Orang	107,500,000	308,132,955	
5	**06**	**02**	1.01		**Pelaksanaan Pelayanan Penghubung**										**0**	**936,596,455**	
5	06	02	1.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat	3 rapat			0	308,132,955	
5	**07**				**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**										**2,481,551,800**	**3,500,000,000**	
5	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,481,551,800**	**3,500,000,000**	
5	**07**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**35,154,800**	**100,000,000**	
5	07	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	9,109,600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	07	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	7,826,000	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	07	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	9,109,600	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	07	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	4 Dok	9,109,600	100,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**07**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**18,219,200**	**150,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	07	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	9,109,600	0	
5	07	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	9,109,600	50,000,000	
5	07	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen1	1 Dok	0	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**9,109,600**	**550,000,000**	
5	07	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					9,109,600	50,000,000	
5	07	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	50,000,000	
5	07	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
5	07	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	07	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	150,000,000	
5	**07**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**0**	**600,000,000**	
5	07	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	07	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	07	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	07	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	07	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	07	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	0	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**60,778,200**	**400,000,000**	
5	07	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	21,416,000	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	07	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	0	100,000,000	
5	07	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	39,362,200	100,000,000	
5	07	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Dokumen	1 Dok	0	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**1,000,000,000**	
5	07	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	07	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	07	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,921,460,000**	**100,000,000**	
5	07	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			ASN	34 ASN	1,921,460,000	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**436,830,000**	**500,000,000**	
5	07	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	383,480,000	100,000,000	
5	07	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	0	100,000,000	
5	07	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	53,350,000	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	07	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	0	100,000,000	
5	07	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			dokumen	1 dok	0	100,000,000	
5	**07**	**01**	1.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**										**0**	**100,000,000**	
5	07	01	1.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	100,000,000	
														TOTAL	**9,679,828,390**	**34,083,807,296**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**										**26,020,291,897**	**32,763,780,787**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**19,303,312,097**	**17,795,827,323**	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**350,289,500**	**258,892,500**	
6	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	138,279,600	40,379,950	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**464,035,350**	
6	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan				0	40,379,950	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**350,289,500**	**258,892,500**	
6	01	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	30,133,900	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	01	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	30,133,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**464,035,350**	
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan				0	423,655,400	
6	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**350,289,500**	**258,892,500**	
6	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	30,133,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	30,133,000	20,000,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	7 Dokumen Laporan	91,477,000	158,512,550	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,477,400,297**	**11,738,917,008**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN Penerima Gaji/ Tunjangan	115 Orang	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	15,040,140,297	11,588,219,858	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**11,897,429,558**	
6	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN				0	11,588,219,858	
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,477,400,297**	**11,738,917,008**	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah PTT Penerima Honor	13 Orang	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	416,916,000	149,588,550	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**11,897,429,558**	
6	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Orang				0	149,588,550	
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,477,400,297**	**11,738,917,008**	
6	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	1 Laporan	Jumlah Penerima Gaji/ Tunjangan/ Honor	129 Orang	20,344,000	1,108,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
6	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**11,897,429,558**	
6	01	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan				0	158,512,550	
6	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan				0	1,108,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,506,399,965**	
6	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Yang Keluar				0	17,572,000	
6	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening				0	373,750,000	
6	01	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Barang Milik Daerah				0	42,976,650	
6	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**25,800,000**	**42,976,650**	
6	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan	4 laporan	Jumlah Dokumen Laporan	4 Laporan	25,800,000	42,976,650	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,506,399,965**	
6	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan				0	502,377,500	
6	01	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan				0	200,768,150	
6	01	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan				0	258,571,750	
6	01	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				0	815,016,155	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan				0	149,385,920	
6	01	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik				0	46,488,750	
6	01	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman				0	242,344,100	
6	01	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat				0	1,205,693,350	
6	01	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan				0	415,083,300	
6	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				0	281,084,150	
6	01	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Barang / Jasa yang diadakan				0	286,594,605	
6	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis Barang / Jasa yang diadakan				0	365,278,985	
6	01	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor				0	163,603,600	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6	01	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan				0	502,377,500	
6	01	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor				0	46,632,500	
6	01	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Alat yang Dilakukan Pemeliharaan				0	48,990,000	
6	01	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi				0	541,811,000	
6	**01**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**1,006,875,600**	
6	01	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Bimtek				0	1,006,875,600	
6	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**243,850,000**	**1,006,875,600**	
6	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Diklat Subtantif, Penjenjangan, dan lainnya	100 orang	Jumlah Peserta Diklat	100 Orang	243,850,000	1,006,875,600	
6	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1,528,873,700**	**1,963,484,930**	
6	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenios Alat Listrik dan elektronik	14 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	22,932,000	46,488,750	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis barang / Jasa yang diadakan	14 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	400,499,500	286,594,605	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Barang yang Diadakan	48 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	221,376,600	815,016,155	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jenis Barang; lembar; buah	9 Jenis; Lembar; Buah	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	114,899,600	149,385,920	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Makanan dan Minuman	2 Jenis	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	227,000,000	242,344,100	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Perjalanan Dinas Luar dan Dalam Daerah	20 Kali	Jumlah Jenis Barang dan Jasa Pada Pelaksanaan Adminstrasi Umum	117 Jenis, Laporan	542,166,000	423,655,400	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**327,275,700**	**780,362,285**	
6	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan yang Diadakan	10 Unit	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	6 Jenis	200,000,000	415,083,300	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Mebel yang diadakan	6 Jenis	Jumlah BMD yang diterima/diadakan	6 Jenis	127,275,700	365,278,985	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
6	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**773,112,900**	**649,893,750**	
6	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	6 Jenis	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	83,310,000	17,572,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis	4 Jenis	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	411,408,000	373,750,000	
6	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Belanja Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan CS	29 Jenis, Orang	Jumlah jenis dan belanja dan jasa	29 Jenis, orang	278,394,900	258,571,750	
6	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**576,710,000**	**1,354,424,600**	
6	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan, pajak dan perizinan	25 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	25,000,000	50,000,000	
6	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan mobil dan motor kendaraan dinas/operasional	24 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	237,150,000	502,377,500	
6	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit Meubelair yang mendapatkan pemeliharaan	45 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	37,500,000	50,000,000	
6	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan	91 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	77,060,000	46,632,500	
6	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Kegiatan Rehabilitasi	3 laporan	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	0	541,811,000	
6	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan kegiatan Pemeliharaan	1 Laporan	Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	164 Unit	200,000,000	163,603,600	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**										**0**	**8,089,155,525**	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**0**	**5,683,851,655**	
6	01	02	1.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang di Audit Kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang di Joint Audit				0	2,467,183,550	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**3,124,282,500**	**8,683,851,655**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6	01	02	1.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi	62 LHE	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	148,414,000	2,467,183,550	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	01	02	1.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen LHA, LHE, dan Monev	26 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	1,048,388,500	524,107,900	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**0**	**5,683,851,655**	
6	01	02	1.01	02	Review Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang Direviu				0	524,107,900	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**3,124,282,500**	**8,683,851,655**	
6	01	02	1.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	8 LHR	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	278,985,500	2,178,811,505	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**0**	**5,683,851,655**	
6	01	02	1.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Jumlah Kegiatan Larwasda Jumlah Tim, Jumlah Sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi				0	2,178,811,505	
6	01	02	1.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang dj Evaluasi				0	513,748,700	
6	**01**	**02**	1.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**3,124,282,500**	**8,683,851,655**	
6	01	02	1.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Review	17 LHR	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	425,159,500	513,748,700	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	01	02	1.01	05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan dan Hasil Evaluasi	29 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	429,222,000	1,000,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	01	02	1.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit	1 LHA	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	150,713,000	1,000,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6	01	02	1.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada PD	80 %	Jumlah Dokumen Laporan Monev	19 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal	73 Dokumen Laporan	643,400,000	1,000,000,000	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**										**1,079,876,400**	**1,260,967,870**	
6	01	02	1.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	40 %	Jumlah Dokumen Laporan Monev TPTGR	4 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laparan	655,534,400	837,861,710	
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**										**0**	**2,405,303,870**	
6	01	02	1.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan Tertentu Khusus				0	837,861,710	
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**										**1,079,876,400**	**1,260,967,870**	
6	01	02	1.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	40 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Audit	21 LHA	Jumlah Dokumen Laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	25 Laparan	424,342,000	423,106,160	
6	**01**	**02**	1.02		**Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**										**0**	**2,405,303,870**	
6	01	02	1.02	02	Review Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	Do Laporankumen			0	75,000,000	
6	01	02	1.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	Do Laporankumen			0	1,069,336,000	
6	01	02	1.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang di Evaluasi, Jumlah Sekolah Menengah yang di Evaluasi Jumlah Pemerintah Daerah Kab/Kota yang di Evaluasi Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi				0	423,106,160	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**										**2,512,820,900**	**5,023,133,939**	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**										**402,306,000**	**544,529,250**	
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	5.55 %	Jumlah Dokumen Regulasi Kebijakan Pengawasan	3 Dokumen Regulasi	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	16 Dokumen Laporan	44,533,000	20,836,500	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**										**0**	**544,529,250**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	03	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	Dokumen Laporan			0	20,836,500	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**										**402,306,000**	**544,529,250**	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Peningkatan Nilai Unsur Pembentuk SPIP	5.55 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	13 Laporan	Jumlah Dokumen Laporan dan Dokumen Regulasi	16 Dokumen Laporan	357,773,000	523,692,750	
6	**01**	**03**	1.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**										**0**	**544,529,250**	
6	01	03	1.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan				0	523,692,750	
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**										**2,110,514,900**	**4,478,604,689**	
6	01	03	1.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Pendampingan dan Asistensi PD	118 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	328,621,700	1,868,968,759	
6	**01**	**03**	1.02		**Asistensi dan Pendampingan**										**0**	**2,478,604,689**	
6	01	03	1.02	01	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tim, Jumlah Dumas yang tertangani Jumlah Tim, Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi, Jumlah Dumas yang tertangani Jumlah Tim, Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi, Jumlah Dumas yang tertangani				0	1,868,968,759	
6	01	03	1.02	02	Asistensi dan Pendampingan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi Jumlah Tim, Jumlah Perangkat Daerah yang di Asistensi				0	609,635,930	
6	**01**	**03**	1.02		**Pendampingan dan Asistensi**										**2,110,514,900**	**4,478,604,689**	
6	01	03	1.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monev PMPRB	1 LHE	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	81,312,000	609,635,930	
6	01	03	1.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi	11 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	1,505,339,500	1,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	03	1.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase PD yang menerapkan ZI menuju WBK/WBBM	17.77 %	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan	2 Laporan	Dokumen Laporan Hasil Pendampingan dan Asistensi	121 Dokumen Laporan	195,241,700	1,000,000,000	
TOTAL															**26,020,291,897**	**63,750,810,724**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**01**				**PERENCANAAN**										**0**	**22,645,495,468**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**11,904,047,313**	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**932,466,115**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	255,807,495	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**541,989,700**	**559,959,458**	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 dokumen			272,892,000	226,000,000	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**932,466,115**	
5	01	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	161,485,990	
5	01	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	82,478,460	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**541,989,700**	**559,959,458**	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen			70,852,800	111,000,000	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**932,466,115**	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	25 Kali			0	318,550,000	
5	01	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	4 Dokumen			0	114,144,170	
5	**01**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**541,989,700**	**559,959,458**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	2 Dokumen			91,061,300	111,000,000	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	3 dokumen			107,183,600	111,959,458	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,681,531,553**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	105 Orang			0	7,947,028,298	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,970,480,101**	**13,834,387,296**	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	141 orang			14,109,802,901	6,860,968,423	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	157 orang			1,726,286,000	6,795,682,648	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,681,531,553**	
5	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan dan alat pendukung	2 Jenis			0	1,310,310,000	
5	01	01	1.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis bahan	1 Jenis			0	23,457,355	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,970,480,101**	**13,834,387,296**	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis bahan	1 Jenis			23,984,400	23,457,355	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen	1 Dokumen			23,051,200	20,278,870	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,681,531,553**	
5	01	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	20,278,870	
5	01	01	1.02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	206,085,520	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,970,480,101**	**13,834,387,296**	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	3 dokumen			36,381,300	93,000,000	
5	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan	2 jenis			50,974,300	41,000,000	
5	**01**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**9,681,531,553**	
5	01	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 Dokumen			0	81,868,500	
5	01	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	1 Dokumen			0	92,503,010	
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**62,000,000**	**60,000,000**	
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan BMD	2 laporan			62,000,000	60,000,000	
5	**01**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**1,290,049,645**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan	2 jenis			0	218,686,530	
5	01	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Rekening			0	365,833,400	
5	01	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10 Unit			0	0	
5	01	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	60 Unit			0	0	
5	01	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dan jenis barang	14000 Eksemplar			0	0	
5	01	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perlengkapan gedung kantor	4 Unit			0	0	
5	01	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah mebeleur	31 Unit			0	705,529,715	
5	**01**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
5	01	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta sosialisasi	100 Orang			0	0	
5	**01**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**158,679,000**	**248,043,300**	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah data	1 dokumen			29,595,800	29,670,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	01	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah laporan	2 laporan			26,000,000	56,122,200	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	15 orang			70,083,200	70,083,200	
5	01	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peserta sosialisasi	60 orang			33,000,000	92,167,100	
5	**01**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**599,345,200**	**619,606,000**	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis komponen	2 jenis			67,774,800	38,301,600	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					187,926,500	188,989,600	
5	01	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah pelayanan	60 kali			187,960,000	186,598,000	
5	01	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis barang	2 jenis			49,685,000	49,716,800	
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis	2 jenis			0	50,000,000	
5	01	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis pengelolaan arsip	3 jenis			105,998,900	106,000,000	
5	**01**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**1,074,343,350**	**1,236,792,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	01	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kendaraan	1 unit			488,169,000	488,169,000	
5	01	01	1.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	10 Unit			128,371,750	200,000,000	
5	01	01	1.07	05	Pengadaan Mebel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah meubeler	3 unit			0	100,000,000	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 unit			457,802,600	396,623,000	
5	01	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jenis sarana dan prasarana	1 jenis			0	52,000,000	
5	**01**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,302,911,000**	**2,892,992,600**	
5	01	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					94,931,600	95,000,000	
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah rekening	36 rekening			395,972,500	361,400,000	
5	01	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	90 unit			50,092,600	50,092,600	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Pelayanan	4 jenis			1,761,914,300	2,386,500,000	
5	**01**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,047,878,000**	**950,550,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	75 kendaraan			769,550,000	687,000,000	
5	01	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah mebel	100 unit			50,000,000	35,000,000	
5	01	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jensi peralatan	10 jenis			102,550,000	102,550,000	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung	1 unit			125,778,000	126,000,000	
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**										**3,195,192,000**	**4,797,638,023**	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**1,453,504,100**	**1,759,375,293**	
5	01	02	1.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil analisis	3 dokumen			149,890,700	248,817,625	
5	**01**	**02**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**4,555,447,160**	
5	01	02	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Pagutan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan (Provinsi)	3 Dokumen			0	518,190,000	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**1,453,504,100**	**1,759,375,293**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan	1 dokumen			51,000,000	125,873,917	
5	**01**	**02**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**4,555,447,160**	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah dokumen perencanaan (kab/kota)	2 Dokumen			0	417,364,555	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**1,453,504,100**	**1,759,375,293**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	02	1.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil konsultasi	2 Laporan			68,414,100	100,425,156	
5	**01**	**02**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**4,555,447,160**	
5	01	02	1.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah hasil musrnbang	1 Dokumen			0	1,057,709,970	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah hasil pelaksanaan koordinasi	1 Dokumen			0	543,061,050	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**1,453,504,100**	**1,759,375,293**	
5	01	02	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaaan Forum SKPD/Lintas SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil Pelaksanaan Koordinasi	2 laporan			149,999,600	215,431,757	
5	01	02	1.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah hasil musrenbang	1 laporan			619,359,900	707,375,931	
5	**01**	**02**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**4,555,447,160**	
5	01	02	1.01	05	Pengintegrasian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah hasil integrasi perencanaan	2 Dokumen			0	0	
5	**01**	**02**	1.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**1,453,504,100**	**1,759,375,293**	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah dokumen perencanaan	4 dokumen			414,839,800	361,450,907	
5	**01**	**02**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**4,555,447,160**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	02	1.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Tersedianya Dokumen Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Tahun 2021, Dokumen Integrasi Aplikasi eKinerja dengan SIPJA Provinsi NTB Tahun 2021 dan Dokumen Pengembangan Aplikasi Android Basis Data Perencanaan NTB Tahun 2021	3 Dokumen			0	1,002,203,035	
5	01	02	1.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Tersusunnya data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi NTB Tahun 2021, Dokumen Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana DAK Fisik Prov. NTB Tahun 2021 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2021	3 dokumen			0	1,016,918,550	
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										**988,070,800**	**2,294,535,964**	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Tersusunnya data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Provinsi NTB Tahun 2021, Dokumen Verifikasi Usulan Program Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana DAK Fisik Prov. NTB Tahun 2021 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2021	3 dokumen			492,827,000	1,016,918,550	
5	01	02	1.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Tersedianya Dokumen Pengembangan Aplikasi e-Kinerja Tahun 2021, Dokumen Integrasi Aplikasi eKinerja dengan SIPJA Provinsi NTB Tahun 2021 dan Dokumen Pengembangan Aplikasi Android Basis Data Perencanaan NTB Tahun 2021	3 Dokumen			223,994,000	1,002,203,035	
5	**01**	**02**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah**										**0**	**314,027,970**	
5	01	02	1.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah laporan pelaksanaan	1 Dokumen			0	314,027,970	
5	**01**	**02**	1.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										**988,070,800**	**2,294,535,964**	
5	01	02	1.02	03	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan pembinaan	10 dokumen			271,249,800	275,414,379	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**										**0**	**992,469,665**	
5	01	02	1.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah dokumen hasil monev	1 dokumen			0	706,165,205	
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										**753,617,100**	**743,726,766**	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah dokumen	2 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen	131,617,400	152,504,387	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	02	1.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah laporan fasilitasi kerjasama	1 laporan	jumlah dokumen	15 dokumen	80,000,000	80,000,000	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	jumlah hasil monev	1 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen	347,000,000	275,500,809	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		CAKUPAN HASIL EVALUASI YANG DIMANFAATKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	100 %	Jumlah hasil fasilitasi/evaluasi	2 dokumen	jumlah dokumen	15 dokumen	194,999,700	235,721,570	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
5	**01**	**02**	1.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah**										**0**	**992,469,665**	
5	01	02	1.03	04	Penyusunan Pelaporan Capaian Pembangunan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase konsistensi perencanaan	100 %	Jumlah laporan	1 dokumen			0	286,304,460	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**11,073,578,100**	**9,735,611,697**	
5	**01**	**03**	1.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**										**1,827,390,500**	**349,800,000**	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Koordinasi	2 dokumen			64,718,500	197,988,340	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Asistensi	2 dokumen			21,205,500	27,130,290	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Monev	1 dokumen			60,649,900	93,187,710	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi	1 dokumen			24,090,000	31,493,660	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	4 dokumen			1,129,123,500	0	
5	01	03	1.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Asistensi	4 dokumen			83,088,600	0	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Hasil Monev	2 dokumen			236,975,500	0	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi	2 dokumen			207,539,000	0	
5	**01**	**03**	1.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**										**5,426,501,700**	**4,954,400,000**	
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	6 Dokumen			535,281,800	485,781,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	1.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil asistensi	3 Dokumen			366,000,000	366,000,000	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil monev	3 Dok			658,218,200	658,218,200	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	5 Dok			1,618,920,000	1,290,000,000	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	2 Dokumen			875,700,000	858,800,000	
5	01	03	1.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil asistensi	1 Dokumen			250,000,000	250,000,000	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil monev	3 Dokumen			2,000,000,000	2,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	3 dokumen			4,548,883,400	4,000,000,000	
5	**01**	**03**	1.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**										**3,819,685,900**	**4,431,411,697**	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	2 dokumen			2,713,650,200	300,000,000	
5	01	03	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah hasil asisteni	2 Dokumen			43,000,000	62,700,110	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah hasil monev	2 Dokumen			53,000,000	80,300,000	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	2 Dokumen			28,000,000	37,955,467	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	Jumlah hasil koordinasi	4 dokumen			364,615,300	350,582,100	
5	01	03	1.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah hasil asisteni	4 dokumen			204,690,100	0	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah hasil monev	4 Dokumen			214,731,400	3,439,874,020	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Keselarasan Program Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100 %	jumlah dokumen sinergitas dan harmonisasi	2 dokumen			197,998,900	160,000,000	
5	**01**	**05**			**PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**										**0**	**4,879,503,360**	
5	**01**	**05**	1.01		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup**										**0**	**4,042,528,530**	
5	01	05	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Dokumen koordinasi yang dihasilkan	5 Dokumen			0	3,439,874,020	
5	01	05	1.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Dokumen asistensi yang dihasilkan	2 Dokumen			0	310,425,135	
5	01	05	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dihasilkan	2 Dokumen			0	292,229,375	
5	**01**	**05**	1.02		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan**										**0**	**267,732,075**	
5	01	05	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah laporan koordinasi yang dihasilkan	2 buku			0	267,732,075	
5	**01**	**05**	1.03		**Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan**										**0**	**569,242,755**	
5	01	05	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan koordinasi yang dihasilkan	4 Buku			0	328,382,845	
5	01	05	1.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Dokumen asistensi yang dihasilkan	4 Buku			0	118,497,955	
5	01	05	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Keciptakaryaan dan Kewilayahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Keselarasan Program Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang dihasilkan	2 Buku			0	122,361,955	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**3,295,770,600**	**3,850,944,436**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**										**3,295,770,600**	**3,850,944,436**	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**										**608,744,300**	**346,500,000**	
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah dan jenis data kelitbangan Jumlah Jenis Data	1 Jenis 1 Jenis			340,736,700	302,000,000	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**										**0**	**656,373,540**	
5	05	02	1.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	24 %	Jumlah dan jenis data kelitbangan	1 Jenis			0	656,373,540	
5	**05**	**02**	1.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**										**608,744,300**	**346,500,000**	
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Ijin Penelitian	325 Dokumen			268,007,600	44,500,000	
5	**05**	**02**	1.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**										**735,650,500**	**1,690,888,884**	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			539,359,400	130,444,444	
5	05	02	1.02	02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	05	02	1.02	04	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	2 Kajian			126,291,100	391,333,332	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			70,000,000	130,444,444	
5	05	02	1.02	07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.02	08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	258,444,444	
5	05	02	1.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	258,444,444	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										**488,492,200**	**1,299,555,552**	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			175,000,000	258,444,444	
5	05	02	1.03	03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			123,791,100	130,444,444	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			120,000,000	130,444,444	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**										**0**	**0**	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	24 %	Jumlah hasil penelitian	3 Kajian			0	0	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										**488,492,200**	**1,299,555,552**	
5	05	02	1.03	06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			69,701,100	258,444,444	
5	05	02	1.03	08	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**										**0**	**0**	
5	05	02	1.03	09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	24 %	Jumlah hasil penelitian	3 Kajian			0	0	
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	24 %	Jumlah hasil penelitian	3 Kajian			0	0	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										**488,492,200**	**1,299,555,552**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	05	02	1.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan**										**0**	**0**	
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	24 %	Jumlah hasil penelitian	3 Kajian			0	0	
5	**05**	**02**	1.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										**488,492,200**	**1,299,555,552**	
5	05	02	1.03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	130,444,444	
5	05	02	1.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	05	02	1.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah Hasil Penelitian	1 Kajian			0	0	
5	**05**	**02**	1.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**										**1,462,883,600**	**514,000,000**	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah peserta diseminasi	700 Orang			895,747,200	514,000,000	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	persentase kajian kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	100 %	Jumlah peserta sosialisasi	1375 Orang			567,136,400	0	
														TOTAL	**39,322,167,051**	**62,088,393,818**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**738,558,211,770**	**37,310,730,568**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**26,494,901,866**	**29,557,176,340**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**472,518,700**	**600,458,585**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Renstra, Renja yang tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	71,015,700	84,453,270	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	77,885,000	103,740,261	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	75,954,700	83,550,170	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	59,883,200	87,068,081	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	54,579,300	82,338,301	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	71,702,500	91,660,372	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dievaluasi	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 Persen	61,498,300	67,648,130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**10,619,104,214**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN	157 org			0	10,487,825,964	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**18,469,986,091**	**20,027,991,447**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	157 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	17,715,911,291	19,106,312,852	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK yang dibtuhkan	5 Jenis	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	28,426,000	32,268,600	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	35 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	567,191,000	744,337,460	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	4 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	68,490,000	89,003,310	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**10,619,104,214**	
5	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	3 Laporan			0	36,939,150	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**18,469,986,091**	**20,027,991,447**	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	23 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	69,161,800	27,237,000	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**10,619,104,214**	
5	02	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	3 Laporan			0	26,398,825	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**18,469,986,091**	**20,027,991,447**	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlahLaporan dan Analisis dan Realisasi yang disusun	4 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 Persen	20,806,000	28,832,225	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**10,619,104,214**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	4 Laporan			0	28,832,225	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	1 Laporan			0	39,108,050	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**169,243,600**	**179,416,790**	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	36,038,800	38,332,500	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**16,747,373,870**	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	11200 Surat			0	70,265,000	
5	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Rekening			0	626,077,250	
5	02	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 unit			0	21,045,000	
5	02	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	30 Org			0	95,565,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**169,243,600**	**179,416,790**	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	66,780,900	68,078,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**16,747,373,870**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	30 Buah			0	102,784,700	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**169,243,600**	**179,416,790**	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	66,423,900	73,006,290	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**16,747,373,870**	
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	26 org			0	1,821,248,215	
5	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	16 org			0	1,072,274,490	
5	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	440 buah			0	27,102,625	
5	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27 paket			0	3,848,217,860	
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	5477 eksemplar			0	36,639,000	
5	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	240 kali			0	751,525,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	35 kali			0	526,664,580	
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pengadaan Kendaraan	2 unit			0	85,387,500	
5	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	1.250 m2			0	336,145,000	
5	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan yang Terpelihara	86 unit			0	796,697,000	
5	02	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	295 unit			0	76,072,500	
5	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	100 unit			0	121,142,150	
5	02	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur yang Terpelihara	70 unit			0	11,178,000	
5	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kator yang Terpelihara	1 paket			0	6,321,343,000	
5	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**1,013,247,750**	
5	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	23 Org			0	78,338,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Sosialisasi	555 ok			0	693,253,350	
5	02	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Bimtek	300 ok			0	241,656,400	
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**462,723,900**	**521,529,900**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin yang dilaksanakan	2 Kegiatan	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	86,483,900	95,565,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	23 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	66,000,000	75,900,000	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Sosialisasi	555 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	162,590,000	178,849,900	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peserta Bimtek	300 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	100 Persen	147,650,000	171,215,000	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**3,833,864,575**	**4,626,226,678**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	30,606,000	33,666,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor	27 paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	42,339,375	109,624,543	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	1000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	73,516,800	76,648,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	5477 Exsampler	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	31,860,000	35,046,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman	240 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	652,090,000	740,300,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah	45 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	458,617,000	526,664,580	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip Dinamis SKPD	10000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	293,233,400	328,056,700	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Upgrade Website	2 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Umum	95 %	2,251,602,000	2,776,220,055	
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**628,855,000**	**956,427,340**	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 unit			463,602,000	796,697,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang tersedia	10 Unit			165,253,000	159,730,340	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,798,931,000**	**1,945,824,100**	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	6500 Surat	Terpenuhinya Kelancaraan Administrasi Perkantoran	100 Persen	94,250,000	103,675,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	4 Rekening	Terpenuhinya Kelancaraan Administrasi Perkantoran	100 Persen	452,615,000	464,876,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20 Unit	Terpenuhinya Kelancaraan Administrasi Perkantoran	100 Persen	179,810,000	197,791,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	16 Orang	Terpenuhinya Kelancaraan Administrasi Perkantoran	100 Persen	1,072,256,000	1,179,481,600	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**658,779,000**	**699,301,500**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan dan Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	30 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	285,600,000	293,205,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Kendaraan Dinas Lapangan yang dipelihara	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	87,170,000	95,887,000	
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlal Mebel yang terpelihara	23 Mebel	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	20,000,000	22,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	1 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	10,150,000	11,165,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	204,000,000	220,000,000	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1932 M2	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	23,184,000	25,502,000	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana Prasaran Pendukung Gedung Kantor yang Terpelihara	155 M2/Tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 Persen	28,675,000	31,542,500	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**710,963,309,904**	**6,712,740,128**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	53,368,000	58,704,800	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Tersusun	1 Dokumen			0	6,325,000	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	63,747,600	70,122,360	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang Tersusun	1 Dokumen			0	6,555,000	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen RKA yang diverifikasi	136 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	52,203,000	57,423,300	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA/DPPA SKPD yang Tersusun	268 Dokumen			0	1,063,586,815	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	136 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	105,972,800	116,570,000	
5	02	02	1.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	268 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	62,090,800	171,464,700	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perda dan Pergub APBD	2 Dokumen			0	41,601,940	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun dan divefikasi	136 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	155,877,000	171,464,700	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perda Perubahan dan Pergub Perubahan APBD	2 Dokumen			0	108,828,180	
5	02	02	1.01	07	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Teknis Penyusunan Anggaran APBD	2 Dokumen			0	183,051,480	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Penjabaran APBD	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	863,432,500	949,775,750	
5	02	02	1.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Perda dan Pergub Perubahan Penjabaran APBD yang tersusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	233,213,300	256,534,630	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang Tersusun	1 Regulasi			0	1,674,966,720	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Regulasi Bidang Anggaran yang tersusun	1 Regulasi	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	144,541,000	158,995,100	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pendapatan	1 Dokumen			0	43,527,500	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen APBD	2 Dokumen			0	1,615,140,500	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat Terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	40,665,000	44,731,000	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**0**	**4,748,298,135**	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pembiayaan	1 Dokumen			0	4,715,000	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**2,190,000,000**	**2,523,164,240**	
5	02	02	1.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	142,907,700	157,198,470	
5	02	02	1.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Rapat Terselenggara	2 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	34,272,100	37,699,310	
5	02	02	1.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	4 Kegiatan	Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran Daerah	100 %	237,709,200	272,480,120	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**5,257,323,210**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	10 Dokumen			0	687,321,650	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**										**1,050,000,000**	**2,244,034,638**	
5	02	02	1.02	01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Pajak dan Retiribusi Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	0	89,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**5,257,323,210**	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/ Kota	10 Dokumen			0	751,677,030	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**										**1,050,000,000**	**2,244,034,638**	
5	02	02	1.02	02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang APBD Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	179,038,000	207,718,590	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	178,819,600	207,498,060	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**5,257,323,210**	
5	02	02	1.02	03	Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada tentang Perubahan APBD Kab/ Kota	10 Dokumen			0	732,753,205	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Raperda dan Raperkada Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	10 Dokumen			0	731,596,075	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**										**1,050,000,000**	**2,244,034,638**	
5	02	02	1.02	04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Perda dan Perkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan ApBD KAb/Kota	10 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	179,582,600	731,596,075	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**5,257,323,210**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kabupaten/ Kota yang Terbina	10 Kab/Kota			0	561,744,410	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**										**1,050,000,000**	**2,244,034,638**	
5	02	02	1.02	05	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang terbina	10 Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	59,188,500	65,107,350	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**5,257,323,210**	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi Regulasi Kabupaten/ Kota yang Terlaksana	1 Kali			0	1,792,230,840	
5	**02**	**02**	1.02		**Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**										**1,050,000,000**	**2,244,034,638**	
5	02	02	1.02	06	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Sosialisasi Regulasi Keuangan yang terlaksana	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	190,865,500	209,952,250	
5	02	02	1.02	07	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Asistensi Pengelolaan BLUD	1 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	0	100,000,000	
5	02	02	1.02	08	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Konsultasi Koordinasi Pembinaan Evaluasi Rancangan Perda/Perkada tentang APBD Kab/Kota	2 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	0	100,000,000	
5	02	02	1.02	09	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Perda /Perkada tentang Perubahan APBD Kab/Kota	2 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	0	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.02	10	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen hasi Konsultasi dan Koordiansi Rancangan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota	4 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	0	100,000,000	
5	02	02	1.02	11	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	jumlah kegiatan pembinaan Implementasi Sistem Imformasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kab/Kota	10 Kali	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	30,593,300	33	
5	02	02	1.02	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu Evaluasi APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	11 Dokumen	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota	10 KAB/KOTA	231,912,500	333,162,280	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**0**	**622,838,620**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Posisi Kas Daerah	1 Dokumen			0	45,157,050	
5	02	02	1.03	02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SP2D terkait Pembiayaan Daerah	80 Persen			0	22,320,350	
5	02	02	1.03	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang Tersusun	3 Dokumen			0	189,479,750	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**251,932,800**	**577,681,570**	
5	02	02	1.03	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) Seluruh OPD diterbitkan	132 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	27,579,500	27,917,860	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.03	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah SP2D yang di terbitkan terkait Pembiayaan Daerah	3200 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	0	22,320,350	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Transfer yang tersusun	3 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	187,371,700	189,479,750	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**0**	**622,838,620**	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Realisasi Bulanan, Triwulanan, Semesteran	4 Dokumen			0	265,193,565	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**251,932,800**	**577,681,570**	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan OTH Perhitungan Pihak ketiga yang disusun	3 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	21,788,000	265,193,565	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**0**	**622,838,620**	
5	02	02	1.03	07	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan Optimalisasi Kas	1 Dokumen			0	72,770,045	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**251,932,800**	**577,681,570**	
5	02	02	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 Persen	15,193,600	72,770,045	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**0**	**622,838,620**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.03	10	Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) seluruh OPD	132 Dokumen			0	27,917,860	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Penerimaan dan pengeluaran KAS	2 Dokumen			0	35,286,945	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang tersusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	113,806,300	35,286,945	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	1.04	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen BA rekonsiliasi	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	138,442,200	109,650,420	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	132 OPD/UPT			0	26,089,475	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan , Semesteran yang tersusun	17 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	51,681,100	56,849,210	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	1.04	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di Konsolidasikan	130 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	197,391,500	206,543,150	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Rancangan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen			0	526,602,825	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.04	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	2 Dokumen			0	14,677,220	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tetang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	2 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	197,761,700	526,602,825	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD	132 OPD/UPT			0	10,452,925	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Tanggapan / Tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban APBD yang disusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	0	38,195,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SKPD yang Terekonsiliasi	132 OPD/UPT			0	215,054,485	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah TPTGR yang terverifikasi	10 Kasus	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	0	24,328,920	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Mataram Timur	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	23,218,700	10,361,500	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.04	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pelaporan yang tersusun	1 Dokumen			0	10,361,500	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Regulasi terkait Juknit Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	37,215,400	40,936,940	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			0	13,999,870	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelapotan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	23,986,400	26,385,040	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**0**	**869,008,195**	
5	02	02	1.04	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Terkait sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	1 Dokumen			0	16,482,950	
5	**02**	**02**	1.04		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**848,067,600**	**1,123,588,680**	
5	02	02	1.04	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah OPD yang terbina	40 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	34,418,300	15,288,130	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	02	02	1.04	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah BLUD Provinsi yang terbina	20 OPD	Ketepatan Waktu Penyusunan LKPD dan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	30,146,000	33,160,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**										**706,399,442,204**	**0**	
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	**02**	**02**	1.05		**Kegiatan Penunjang Urusan**										**0**	**469,644,705**	
5	02	02	1.05	02	Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kajian Teknis Terkait Pemberian Subsidi	3 Dokumen			0	177,083,785	
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**										**706,399,442,204**	**0**	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	
5	**02**	**02**	1.05		**Kegiatan Penunjang Urusan**										**0**	**469,644,705**	
5	02	02	1.05	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Bantuan Keuangan Provinsi yang Tersampaikan	100 Persen			0	292,560,920	
5	**02**	**02**	1.05		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**										**706,399,442,204**	**0**	
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			358,087,500	0	
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			10,000,000,000	0	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah	1 tahun			696,041,354,704	0	
5	**02**	**02**	1.06		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**										**223,867,300**	**244,271,000**	
5	02	02	1.06	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Data Bidang Keuangan Daerah	15 Dokumen	Terlaksanannyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	57,458,500	150,000,000	
5	02	02	1.06	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Aplikasi Keuangan yang dipelihara	1 Aplikasi	Terlaksanannyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	80,707,800	0	
5	02	02	1.06	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Peserta Pembinaan Di Pemerintah Provinsi	148 OPD	Terlaksanannyaa Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Keuangan yang terintegrasi	1 Aplikasi	85,701,000	94,271,000	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	01	Penyusunan Standar Harga	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Standart Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang yang Tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	32,895,000	22,324,500	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	01	Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Standart Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang yang Tersusun	1 Dokumen			0	686,219,030	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	03	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			0	481,289,030	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Standart Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Dokumen Standart Barang Milik Daerah yang disusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	36,880,000	40,568,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			0	419,987,130	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen RKBMD yang tersusun	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	107,778,000	74,920,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Rencana Pemeliharaan/ Perawatan BMD	1 Dokumen			0	227,161,225	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	24,061,000	26,467,100	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Persentase Terdigitalisasinya Dokumen Barang Milik Daerah	50 %	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	488,065,000	498,000,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			0	1,456,207,165	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Kegiatan Inventarisasi yang dilaksanakan	12 Kali	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	53,531,000	58,884,100	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SKPD yang memiliki Ketersediaan Data yang Optimal	1 Dokumen			0	898,782,155	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	5 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	48,745,000	5,135,400	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	08	Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Termanfaatkannya Aset secara Optimal	100 Persen			0	513,549,405	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Status Aset	1 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	50,635,000	55,000,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/ atau dipindahtangankan	100 Persen			0	748,121,805	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Persetujuan Gubernur tentang pemindahtanganan Jumlah SK Penetapan Penggunaan BMD Jumlah SK Penghapusan BMD	12 Dokumen 10 Dokumen 12 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	64,440,000	74,500,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Termanfaatkannya Aset secara Optimal	100 Persen			0	485,173,155	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	03	1.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kota Mataram, Mataram, Pejanggik	Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah	132 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	97,728,000	105,000,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKBMD yang Tersusun	1 Dokumen			0	771,650,000	
5	02	03	1.01	12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen			0	628,700,170	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	48 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	74,065,000	56,721,000	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**0**	**7,735,557,800**	
5	02	03	1.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BMD	1 Dokumen			0	418,717,530	
5	**02**	**03**	1.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,100,000,000**	**1,040,814,100**	
5	02	03	1.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pembinaan ke Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100 %	21,177,000	23,294,000	
														TOTAL	**738,558,211,770**	**85,393,127,067**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**0**	**3,737,422,490**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**751,111,230**	
5	02	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	15,985,000	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	14,726,900	5,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	13,099,600	15,985,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	15,549,000	6,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	13,455,600	5,000,000	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD tersusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan , Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	8,330,200	13,881,880	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	0	137,481,120	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	16,365,700	0	
5	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	13,881,880	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwullan. Semesteran SKPD yang tersusun	18 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	39,790,500	0	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosi dan Realisasi yang tersusun	4 Dokumen	Persentase Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	4,174,700	0	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	100 Materai			0	10,327,000	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	4,610,600	0	
5	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Rekening			0	111,607,500	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik SKPD	2 Dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	6,015,800	6,000,000	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 dokumen	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 dokumen	7,712,000	0	
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	7 org			0	137,481,120	
5	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket			0	149,560,720	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Kabar	1152 eksemplar			0	20,907,000	
5	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	80 kali			0	103,638,000	
5	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara	175 m2			0	56,861,750	
5	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	45 unit			0	35,894,260	
5	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 Org			0	94,967,000	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	18,428,000	94,967,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	0	149,560,720	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetakan dan penggandaan	700 buah	Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	8,157,000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Aset Daerah	36 eksemplar	Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	15,660,000	20,907,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	umlah Makanan dan Minuman	220 kali	Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	9,020,000	90,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapak Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah	14 kali	Tingkat Kelancanran Administrasi Perangkat Daerah	95 %	29,550,000	150,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	2 unit	0	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan mesin lainya yang tersedia	2 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	2 unit	10,500,000	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	2 unit	0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	500 surat	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	5 jasa	6,720,000	10,327,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik	3 Rekening	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang tersedia	5 jasa	61,200,000	111,607,500	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 unit	0	56,861,750	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang terpelihara	26 unit	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 unit	19,635,600	35,894,260	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**										**677,298,800**	**2,986,311,260**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0002 Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	03	1.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah aset yang disertifikatkan Jumlah papan nama aset yang terpasang Jumlah penanganan sengketa aset daerah	30 persil 25 Buah 5 sengketa	Kontribusi retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat	10 %	372,492,400	1,984,681,960	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
5	02	03	1.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penanganan Sengketa Aset	5 Sengketa			0	1,984,681,960	
5	02	03	1.01	09	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BMD yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan	29 Persil			0	1,001,629,300	
5	02	03	1.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pengelolaan BMD pada PD yang akurat dan akuntabel	60 %	Jumlah aset idle yang termanfaatkan	70.80 %	Kontribusi retribusi pemanfaatan aset terhadap PAD meningkat	10 %	304,806,400	1,001,629,300	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
														TOTAL	**1,000,000,000**	**7,633,206,980**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**0**	**3,249,462,540**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**732,240,305**	
5	02	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			0	12,045,675	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			550,000	12,045,675	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Doc			520,000	6,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen DPA SKPD	1 Doc			300,000	6,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Doc			134,000	0	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan	2 Laporan			520,000	965,080	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	5 Org			592,500	93,949,250	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					290,000	0	
5	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	965,080	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	100 Surat			0	2,949,750	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Dokumen RKBMD SKPD	1 Doc			285,000	0	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik SKPD	2 Doc			220,000	0	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Penatausahaa Aset SKPD	2 Doc			60,800	0	
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	5 Org			0	93,949,250	
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Kabar	100 eksemplar			0	8,280,000	
5	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	100 kali			0	30,015,000	
5	02	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rapat	18 kali			0	548,146,350	
5	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	20 unit			0	4,761,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 or			0	31,128,200	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 or			19,500,000	31,128,200	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					52,850,300	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ATK	1 Doc			1,500,000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar	100 eksemplar			7,200,000	8,280,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman	100 kali			29,520,000	30,015,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	18 kali			27,016,000	548,146,350	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pendukung lainnya	4			1,000,000	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Keluar	100 Surat			2,565,000	2,949,750	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4 Kkendaraan			260,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	20 unit			4,140,000	4,761,000	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**450,976,400**	**2,517,222,235**	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tertib Administrasi Pengeloaan Keuangan Daerah	1 Tahun			442,901,700	0	
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang sesuai dengan ketentuan (Jumlah SPM, SPJ, SKPP yang Teregistrasi)	95 Persen			556,400	321,084,485	
5	02	02	1.03	04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SP2D yang diterbitkan	95 Persen			0	2,195,442,690	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang sesuai dengan ketentuan (Jumlah SPM, SPJ, SKPP yang Teregistrasi)	95 Persen			0	321,084,485	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pemantuan Transaksi Non Tunasi	2 Kali			2,000,000	0	
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					SP2D yang diterbitkan	95 Persen			3,677,300	2,195,442,690	
5	02	02	1.03	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	3 Regulasi			0	695,060	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0003 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik					Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	3 Regulasi			341,000	695,060	
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Kab/Kota	4 Kali			1,500,000	0	
TOTAL															**600,000,000**	**6,510,925,080**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**480,000,300**	**1,303,907,145**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**266,272,900**	**1,068,175,645**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	6,492,100	7,141,310	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	6,120,000	12,232,300	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Sumbawa, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	774,800	852,280	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	755,000	0	
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi SKPD tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	100 %	2,374,800	2,612,280	
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	3 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	38,840,400	26,207,610	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	685,000	753,500	
5	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Laporan	2 Laporan			0	24,651,975	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan / Semesteran yang tersusun	17 Laporan	Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	10,258,000	11,283,800	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Kelancaran Administrasi Keuangan	100 %	0	10,000,000	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Arsip Surat Menyurat	100 Surat			0	7,424,170	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	5,614,000	6,175,400	
5	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	3 Rekening			0	195,073,350	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Barang dan Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	10,164,000	11,190,400	
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Dokumen	Tingkat Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100 Persen	2,168,600	2,385,460	
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	5 Org			0	189,722,860	
5	02	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	2 org			0	81,937,500	
5	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 unit			0	536,023,395	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Kabar	96 eksemplar			0	16,583,000	
5	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	100 kali			0	34,891,000	
5	02	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	144 m2			0	63,825,000	
5	02	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Kantor	15 unit			0	61,605,500	
5	02	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	4 org			0	17,719,200	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal	1 Orang	Tingkat Kompetensi Aparatur	90 %	9,694,000	17,719,200	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor tersedia	2 paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	4,469,000	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Cetakan dan Penggandaan tersedia	10000 Dokumen	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	18,895,500	20,785,050	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang tersedia	12 Eksmpler	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	1,260,000	1,386,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	0	81,937,500	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	24 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	12,300,000	34,891,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD luar daerah dan dalam daerah	10 Kali	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	95 %	55,801,000	90,000,000	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaan Mebel	0 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	90 %	0	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesinya Lainnya yang tersedia	2 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	90 %	17,095,900	18,805,490	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung yang tersedia	1 Unit	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	90 %	0	5,000,000	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat Menyurat yang tersedia	750 Surat	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %	4,490,000	7,424,170	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	1 Rekening	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %	10,800,000	4,939,000	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 Unit	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %	7,550,000	536,023,395	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	1 Orang	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	90 %	30,420,800	33,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraaan Dinas yang dipelihara	0 Unit	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	0	61,605,500	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	1 Paket	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	90 %	9,250,000	63,825,000	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**0**	**1,519,081,575**	
5	02	02	1.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Uma Sima			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Yang Tersusun Tepat Waktu	5 Dokumen			0	0	
5	02	02	1.03	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah SP2D yang di terbitkan	3000 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	192,138,400	33,627,000	
5	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %			Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	0	0	
5	02	02	1.03	04	Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SP2D yang diterbitkan	95 Persen			0	1,400,344,075	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pengajuan Permintaan Pembayaran Belanja Langsung yang sesuai dengan ketentuan (Jumlah SPM, SPJ, SKPP yang Teregistrasi)	95 Persen			0	7,946,500	
5	02	02	1.03	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah SP2D yang di terbitkan	3000 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	10,000,000	11,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0004 Unit Pelayanan Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	1.03	09	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Regulasi Terkait Juknis Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	3 Regulasi			0	110,791,000	
5	02	02	1.03	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang direkon	148 OPD	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	710,000	313,500	
5	02	02	1.03	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	Jumlah Dokumen Dasar Pelaksanaan Keuangan yang tersusun	11 Dokumen	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	433,000	110,791,000	
5	02	02	1.03	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD/APBDP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi	100 %	jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuagan Kab/Kota	4 Kali	Terkoordinirnya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Optimal	85 %	10,446,000	80,000,000	
														TOTAL	**480,000,300**	**4,052,445,670**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**0**	**0**	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**0**	**0**	
5	02	02	1.05	01	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
5	02	02	1.05	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	03	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	05	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	06	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0001 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.05	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
5	02	02	1.05	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah	1 Tahun			0	0	
TOTAL															**0**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**77,640,900,418**	**1,153,916,600**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**71,005,378,718**	**891,120,000**	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**467,023,000**	**0**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	97,715,600	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,120,480,650**	
5	02	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen			0	787,555,650	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**467,023,000**	**0**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	49,463,200	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**1,120,480,650**	
5	02	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Profil	1 Dokumen			0	332,925,000	
5	**02**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**467,023,000**	**0**	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	48,450,400	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	8,775,600	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	9,750,000	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	104,287,400	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 persen	148,580,800	0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**115,252,414,192**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN Jumlah KDH/WKDH Jumlah Non ASN	400 Orang 4 Orang 46 Orang			0	114,551,312,092	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**56,450,129,043**	**645,608,000**	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	56,052,642,043	0	
5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	0	600,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	105,032,400	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	0	45,608,000	
5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	73,564,600	0	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**115,252,414,192**	
5	02	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen LKJiP dan Laporan Tahunan	2 Dokumen			0	298,137,500	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**56,450,129,043**	**645,608,000**	
5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	63,480,000	0	
5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	36,940,000	0	
5	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 persen	118,470,000	0	
5	**02**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**115,252,414,192**	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			0	402,964,600	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,164,700**	**119,670,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	7,236,800	0	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**10,165,853,306**	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	1250 lembar			0	106,985,880	
5	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Internet Jumlah Rekening Air Jumlah Rekening listrik Jumlah Rekening Telpon	6 paket/bln 2 rekening 3 rekening 9 rekening/paket			0	1,442,905,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,164,700**	**119,670,000**	
5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	0	0	
5	02	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	0	54,670,000	
5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	0	0	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	8,475,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	3,452,100	0	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**10,165,853,306**	
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	25 orang 11 orang 6 orang			0	1,529,592,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**19,164,700**	**119,670,000**	
5	02	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 persen	0	65,000,000	
5	**02**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**10,165,853,306**	
5	02	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jenis ATK	78 jenis			0	559,928,894	
5	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetak dan Penggandaan Jumlah Penggandaan jumlah Penjilidan	22 jenis 378800 lembar 1200 exp			0	2,623,138,500	
5	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Instalasi Listrik	15 jenis			0	27,342,342	
5	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90 unit/paket			0	2,405,727,090	
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Mataram, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	12 bulan			0	104,328,000	
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	10 unit			0	1,200,685,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	35 buah/set			0	165,220,500	
5	**02**	**01**	1.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**										**661,681,800**	**0**	
5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	368,260,000	0	
5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	189,721,800	0	
5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	0	0	
5	02	01	1.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	0	0	
5	02	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	0	0	
5	02	01	1.04	06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Proporsi penerimaan pendapatan Bukan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	28.83 persen	103,700,000	0	
5	**02**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**263,707,075**	
5	02	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peserta Bimtek	150 orang			0	263,707,075	
5	**02**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**318,781,500**	**0**	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	60,570,000	0	
5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	103,004,000	0	
5	02	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	53,004,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	50,110,000	0	
5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	0	0	
5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5	52,093,500	0	
5	**02**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**3,247,287,675**	**0**	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	23,674,500	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	0	0	
5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	4,654,000	0	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	311,842,475	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	1,305,933,000	0	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	26,100,000	0	
5	02	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	0	0	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	220,000,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	345,200,000	0	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	33,813,700	0	
5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Penyelesaian Adminstrasi Umum OPD	100 persen	976,070,000	0	
5	**02**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**6,139,668,200**	**0**	
5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.07	03	Pengadaan Alat Besar	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	63,037,200	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	474,134,000	0	
5	02	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	107,521,000	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung Baru	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	5,494,976,000	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	**02**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,841,322,000**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	80,502,000	0	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	1,433,020,000	0	
5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	0	0	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang OPD	100 persen	1,327,800,000	0	
5	**02**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**860,320,800**	**125,842,000**	
5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	25,165,000	0	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	329,415,000	0	
5	02	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	179,729,800	0	
5	02	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	125,842,000	125,842,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	200,169,000	0	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	02	01	1.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase Pemenuhan Standar Pemeliharaan BMD Penunjang	100 persen	0	0	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**527,520,800**	**0**	
5	**02**	**02**	1.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**154,620,800**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	1.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Derajat Desentralisasi	35.20 %			Pertumbuhan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	4.05 persen	154,620,800	0	
5	**02**	**02**	1.03		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**372,900,000**	**0**	
5	02	02	1.03	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Derajat Desentralisasi	35.20 %			Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	60.57 persen	372,900,000	0	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**6,108,000,900**	**262,796,600**	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**										**6,108,000,900**	**262,796,600**	
5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	707,140,000	0	
5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	2,071,784,300	0	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	280,950,000	0	
5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	950,812,300	0	
5	**02**	**04**	1.01		**Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah**										**0**	**1,065,571,140**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kekerapan Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak Daerah	24 kali			0	1,065,571,140	
5	**02**	**04**	1.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**										**6,108,000,900**	**262,796,600**	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	305,630,000	0	
5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	251,396,600	262,796,600	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	1,450,000	0	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	161,740,000	0	
5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	217,400,000	0	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	45,555,800	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	146,616,000	0	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	541,819,900	0	
5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %			Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 persen	425,706,000	0	
														TOTAL	**77,640,900,418**	**129,021,942,963**	

| | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **77,640,900,418** | **129,021,942,963** | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**3,588,478,000**	**5,543,021,408**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,135,874,600**	**3,045,211,008**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	525 Dokumen	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	38,574,200	451,100,008	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	750 Surat			0	9,568,000	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	2,498,700	2,500,000	
5	02	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rekening	4 Rekening			0	481,413,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	10,700,000	21,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Keamanan Kantor	22 Orang 10 Orang 5 Orang			0	1,181,832,000	
5	02	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis			0	142,619,262	
5	02	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	12 Jenis			0	78,581,800	
5	02	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Jenis			0	316,113,725	
5	02	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Bahan Bacaan	3 Jenis			0	183,195,000	
5	02	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Jamuan Makan dan Minum	48 Kali			0	351,986,250	
5	02	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Mebeleur	10 Buah			0	319,509,330	
5	02	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	12 Unit			0	357,167,000	
5	02	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor yg di Rehabilitasi	3 Unit			0	4,361,030,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	15 Persen	26,602,000	27,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	18,535,000	0	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	0	136,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	176,462,200	45,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	15,912,400	36,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	7,200,000	0	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	100,126,000	100,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	125,300,000	273,791,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	5,335,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	65,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	5,000,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	410,497,500	458,620,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	811,537,600	910,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	152,670,000	250,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	51,890,000	110,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	169,034,000	125,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**1,452,603,400**	**2,497,810,400**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					124,350,000	319,140,400	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0001 Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					110,259,400	234,430,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					238,000,000	147,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					50,320,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					431,370,000	1,415,640,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kota Mataram, Selaprang, Dasan Agung	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %					498,304,000	336,600,000	
														TOTAL	**3,588,478,000**	**13,326,036,775**	

														TOTAL	**3,588,478,000**	**13,326,036,775**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**3,076,350,740**	**4,361,355,990**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,030,563,240**	**2,649,086,990**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	3 Orang			0	0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	2500 Dokumen			35,310,000	233,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			3,166,000	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	2 Dokumen			3,766,400	21,700,000	
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 Unit			0	355,338,500	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			18,000,000	17,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Kompenen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Jenis			17,680,000	18,500,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	23 Unit			0	136,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	36 Jenis			135,797,000	45,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	12 Jenis			15,625,000	34,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis			7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu Yang diFasilitasi	25 Kali			76,560,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Rapat	36 Kali			100,880,000	183,540,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas	36000 Berkas			4,830,300	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	5 Buah			0	35,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit			124,184,540	236,500,000	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yang diadministrasikan	1500 Surat			7,125,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis			220,974,000	220,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Administrasi Kantor Jumlah Jasa Pengamanan Kantor Jumlah Jasa Pengemudi Kendaraan Operasional Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	8 Orang 10 Orang 3 Orang 1 Orang 11 Orang			990,000,000	992,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	17 Unit			154,770,000	198,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit			55,820,000	45,346,990	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	6 Unit			50,875,000	110,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0006 Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**1,045,787,500**	**1,712,269,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			106,040,000	121,614,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Mutasi Jumlah Potensi Obyek DU Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	780 Obyek 4570 Obyek 6000 Obyek 5670 Obyek			128,575,000	214,430,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	4657800009 0 Rupiah 7890008000 0 Rupiah			167,489,000	146,500,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi			58,873,000	48,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Jumlah Surat Teguran	45790 Obyek 95780 Obyek			300,340,000	712,725,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Barat, Gerung, Gerung Utara			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	25780 Obyek			284,470,500	469,000,000	
														TOTAL	**3,076,350,740**	**4,716,694,490**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,846,608,600**	**4,149,826,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,873,492,000**	**2,294,152,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Efektifitas Kelengkapan penilaian kinerja	100 Persen	2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	40,330,100	345,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	2,492,400	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	4,180,100	36,700,000	
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 Unit			0	0	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	15 Persen	21,600,000	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	18,517,000	18,500,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	99,158,500	85,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	139,598,700	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	14,999,800	25,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	75,463,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	115,275,000	260,952,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	14,848,400	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	7,508,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	237,036,000	260,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	780,275,000	750,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	186,960,000	200,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	50,300,000	90,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Lombok Tengah, Praya, Leneng	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	49,750,000	100,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**973,116,600**	**1,855,674,200**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			93,580,000	244,434,200	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0002 Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Potensi Obyek DU Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah Potensi Obyek Mutasi Jumlah Potensi Obyek TMDU	35600 Obyek 20000 Obyek 30000 Obyek 24000 Obyek			133,868,800	211,000,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	6671997856 3 Rupiah 6451866541 9 Rupiah			159,850,300	197,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi			41,320,000	48,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	7560 Obyek			314,997,500	750,240,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Tengah, Praya, Praya			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	7560 Obyek			229,500,000	405,000,000	
														TOTAL	**2,846,608,600**	**4,149,826,200**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**3,322,928,100**	**3,490,010,900**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**2,055,126,200**	**2,177,560,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	500 Dokumen			34,260,000	258,020,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			2,475,100	2,500,000	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	740 Surat			0	4,904,750	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			3,541,400	21,700,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			20,075,000	17,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Jenis			18,218,500	0	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Unit			17,150,000	65,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Logistik Kantor	13 Jenis			135,000,100	5,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	12 Jenis			18,728,800	30,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis			7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	24 Kali			75,400,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelengaraan Rapat	36 Kali			134,275,000	267,840,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas yang ditata	2500 Berkas			5,132,300	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	0 Buah			0	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bangunan Gedung Kantor	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Gedung Kantor	0 Unit			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat yg diadmininstrasi	1500 Surat			7,665,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis			294,045,000	340,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Tenaga Administrator Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Kendaraan Operasional	1 Orang 9 Orang 14 Orang 8 Orang 1 Orang			1,020,275,000	990,000,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	30 Unit			193,530,000	0	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	35 Unit			25,590,000	60,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					34,565,000	0	
5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor	0 Unit			0	0	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**1,267,801,900**	**1,312,450,900**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0003 Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			110,846,000	125,273,600	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	145489 Obyek 2193 Obyek 25923 Obyek 24896 Obyek			130,735,900	228,400,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	73294817429 Rupiah 74920849932 Rupiah			224,892,700	152,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang di Edukasi	4 Rekomendasi 500 Orang			39,550,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Jumlah Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	15188 Lembar 35471 Lembar			390,711,300	390,711,300	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam			Jumlah Obyek Pajak yang terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	3785 Obyek			371,066,000	371,066,000	
														TOTAL	**3,322,928,100**	**3,494,915,650**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,075,200,200**	**3,412,343,500**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,357,849,000**	**1,943,648,500**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Verifikasi Keuangan SKPD	500 Dokumen			30,208,700	203,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	172,500	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			2,574,700	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi	2 Dokumen			2,860,600	21,700,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtag dan Olah Raga	48 kali			17,583,300	17,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Listrik	7 Jenis			17,475,000	18,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	5 unit/Paket			28,443,400	135,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Logistik Kantor	36 Jenis			118,267,600	45,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis cetakan dan Penggandaan	3 jenis			19,235,000	25,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis bahan bacaan	2 jenis			7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kali penyelenggaraan rapat	35 kali			74,994,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah penyelenggaraan rapat	50 kali			134,336,000	175,120,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah berkas yang ditata	2000 berkas			10,831,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis mebelair	2 jenis/paket			0	65,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis peralatan dan mesin	0 jenis/paket			0	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bangunan	0 paket			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana bangunan	1 paket			0	94,403,500	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana bangunan	0 paket			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah materai dan peket	2 paket			9,976,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah jenis jasa Komunikasi SDA dan Listrik	5 jenis			134,046,000	255,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Tenaga CS,Keamanan dan Administrasi	16 orang			482,276,100	504,425,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan yang dipelihara	13 unit			160,715,200	150,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	6 Jenis			48,486,400	45,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah rehab gedung kantor	6 paket			50,340,000	66,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**717,351,200**	**1,468,695,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong			jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Publikasi Informasi pajak Daerah serta Pekan Panutan pajaksi	25 kali			95,918,800	117,765,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk Keluar jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	30771 Obyek 146 obyek 8863 obyek 8471 Obyek			114,829,700	211,430,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0008 Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB jumlah Realisasi penerimaan PKB	1618562555 95 Rupiah 1714792632 4 Rupiah			129,550,000	143,500,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan jumlah Wajib Pajak yang diedukasi	4 Rekomen 150 orang			46,106,800	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Sokong			Jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang SP2T Jumlah Surat Teguran Pajak dan penagihan Pajak Daerah	9912 obyek 10558 lembar			85,767,500	562,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Lombok Utara, Tanjung, Medana			Jumlah Obyek Kendaraan yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan	13000 Obyek			245,178,400	389,000,000	
														TOTAL	**2,075,200,200**	**3,412,516,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,028,348,100**	**3,179,667,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,388,040,600**	**1,802,492,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			1,938,000	5,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			1,938,000	5,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			1,938,000	5,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA	1 Dokumen			1,940,000	5,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Adminstrasi Keuangan	1000 Dokumen			32,960,400	363,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	828,000	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			2,425,000	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			3,565,000	21,700,000	
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	2 Unit			0	0	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			21,600,000	17,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	100 Jenis			18,241,000	18,500,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Unit/Paket			54,093,000	18,500,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kebutuhan logistik kantor	10 Jenis			111,110,700	10,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	100 Jenis			14,899,000	17,500,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	24 Jenis			7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan	10 Kali			74,760,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelenggaraan Rapat	36 Kali			177,784,000	265,572,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas Yang Ditata	3000 Berkas			14,940,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit	0 0			0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	2 Unit/Paket			43,963,500	35,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin	3 Unit/Paket			0	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	0 0			0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 0			0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	0 Paket			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat dan Materai	500 buah			7,500,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			171,825,000	172,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Tenaga Administrator Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Jumlah Pengemudi Kendaraan Dinas Jumlah Tenaga Pranata Komputer	1 orang 2 orang 8 orang 0 0 1 orang			360,550,000	453,220,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	15 Unit			113,910,000	165,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	120 Unit			43,510,000	45,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung	8 Unit			105,450,000	55,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**640,307,500**	**1,377,175,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0007 Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			99,270,000	94,200,000	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk-Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	24256 Obyek 131 Obyek 4011 Obyek 3122 Obyek			126,000,000	171,325,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	1333918030 2 Rupiah 1608104811 4 Rupiah			119,000,000	127,650,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang di Edukasi	4 Dokumen 300 Orang			41,320,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah (ST)	7890 Obyek 7728 Obyek			85,217,500	612,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa Barat, Taliwang, Telaga Bertong			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Penuruna Notce Pajak yang Dibatalkan	250 Obyek 30 Lembar			169,500,000	327,000,000	
														TOTAL	**2,028,348,100**	**3,180,495,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,844,290,750**	**4,319,270,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,937,218,650**	**2,437,395,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,002,100	5,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,004,100	5,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,022,300	5,000,000	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					2,008,600	5,000,000	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Sumbawa, Brang Bara	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN	3 Orang			0	0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Adminitrasi Keuangan	1000 Dokumen			33,715,000	303,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			2,504,200	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			2,455,000	21,700,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Imtaq dan Olahraga	48 Kali			21,600,000	17,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	10 Jenis			18,995,000	0	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Unit/Paket			31,000,000	100,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang diadakan	1 Tahun			135,000,200	50,000,000	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	7 Jenis			21,559,000	20,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan	5 Jenis			7,200,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	48 Kali			75,000,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rapat	40 Kali			165,075,000	280,880,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas Yang Ditata	20 Berkas			2,496,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Unit /Paket	16 Unit/Paket			0	65,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Jenis Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun			0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	1 Tahun			0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung	1 Tahun			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat, Materai	1 Tahun/Lembar			7,500,300	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis			281,952,000	281,815,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Administrator Jumlah Jasa Cleaning Service Jumlah Jasa Keamanan Kantor Jumlah Jasa Pengemudi (Sopir) Jumlah Jasa Pranata Komputer Jumlah Jasa Samsad Desa	3 org 12 Org 11 Org 2 Org 1 Org 2 Org			870,275,000	902,500,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	14 Unit			152,670,000	170,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 Unit			50,170,000	50,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Rehabilitasi Gedung Kantor	3 Unit			50,014,850	40,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**907,072,100**	**1,881,875,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan	25 Kali			106,440,000	133,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0004 Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	59509 Obyek 1057 Obyek 1057 Obyek 8300 Obyek			203,000,000	191,325,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas			Jumlah Realisasi Penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi Penerimaan PKB	3303308967 5 Rupiah 355795871 Rupiah			133,001,700	128,000,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak Yang di Edukasi	4 Rekomendasi 400 Org			48,015,300	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Sumbawa			Jumlah Surat Pembertahuan Pajak terhutang (SP2T) Jumlah Surat Teguran (ST) dan Penagihan Pajak Daerah	8300 Obyek 8300 obyek			149,615,000	1,057,550,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Sumbawa, Labuhan Badas, Labuhan Badas			Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terjaring Operasi Pajak Kendaraan Bermotor Jumlah Penurunan Notice Pajak Yang di Batalkan	150 Obyek 50 Lembar			267,000,100	327,000,000	
														TOTAL	**2,844,290,750**	**4,319,270,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,028,684,100**	**2,800,505,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,415,961,100**	**1,752,953,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	420 Dokumen			32,481,700	173,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	420 Dokumen			2,508,600	2,500,000	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			3,345,300	21,700,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq & Olahraga	48 Kali			21,600,000	17,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi listrik	12 Jenis			18,496,000	18,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan & Perlengkapan kantor	4 unit/Paket			37,731,600	75,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan Logistik yang di adakan	1 th			120,007,500	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakkan & Penggandaan	10 unit			18,497,900	20,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 Jenis			6,600,000	0	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan Tamu	24 Kali			74,784,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	36 Kali			150,275,000	318,913,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas yang di Tata	3500 Berkas			6,070,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	3 Unit			0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	3 Buah			0	0	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan	5 Paket			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung	2 Paket			0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai					0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana & prasarana kantor lainnya	6 Paket			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat Menyurat	120 Paket			7,512,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis jasa komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik	120 Paket			152,200,500	195,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Administrator Jumlah Tenaga Jasa keamanan kantor Jumlah Tenaga Jasa kebersihan kantor Jumlah Tenaga Jasa Pranata computer	2 orang 5 orang 8 orang 1 Orang			551,350,000	511,840,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pemel.Kendaraan dinas	10 Unit			101,430,000	152,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin	36 Unit			49,990,000	55,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah gedung Kantor Yang di Pelihara / Rehab	7 Unit			53,081,000	90,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**612,723,000**	**1,047,552,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Sosialisasi & Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Panutan Pajak	25 Kali			72,446,800	111,052,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0009 Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah Potensi Aktif Jumlah potensi mutasi masuk - Keluar Jumlah potensi Obyek Kendaraan Baru Jumlah TMDU	15285 348 2696 2844			113,637,300	115,000,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah Realisasi penerimaan BBNKB Jumlah Realisasi penerimaan PKB	1018293096 3 Rupiah 1235150560 1 Rupiah			120,705,600	127,500,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah wajib pajak yang di edukasi	100 Rekomendasi 500 Orang			43,324,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah surat Pemberitahuan Pajak terutang (SP2T) Surat Teguran Pajak & Penagihan Pajak Daerah	8956 Obyek 6798 Obyek			61,727,500	322,000,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Dompu, Dompu, Bali			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaran bermotorObyek Penurunan Jumlah Notice Pajak Yang Di batalkan	00 Obyek 00 Lembar			200,881,800	327,000,000	
														TOTAL	**2,028,684,100**	**2,800,505,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,205,236,400**	**2,630,949,000**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,585,439,400**	**1,564,874,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi	552 Dokumen	Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja OPD	90 Persen	37,915,000	37,915,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kab. Bima, Palibelo, Panda	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Penyusunan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	2 Dokumen	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	2,500,100	2,500,100	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Persentase BMD yang tertib administrasi	85 Persen	3,361,800	21,700,000	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kali pelaksanaan kegiatan imtaq dan olahraga	48 Kali	Persenatse aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	12.5 Persen	21,600,000	17,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	8 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	18,500,000	18,500,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	0	80,500,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Logistik Kantor	47 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	120,000,000	78,088,900	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	15,001,000	26,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Bahan Bacaan	1 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	6,660,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Tamu difasilitasi	24 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	75,030,000	100,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kali Penyelenggaraan Rapat	24 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	220,150,000	112,000,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan dan alat pendukung penataan arsip	11 Jenis	Persentase penyeselesaian Administrasi Umum OPD	100 Persen	17,376,000	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	119,025,500	85,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentase pemenuhan BMD Penunjang	100 Persen	0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah surat yang di administrasi	1500 Surat	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	11,472,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	236,613,000	155,000,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum	16 Orang	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang OPD	100 Persen	480,275,000	510,880,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	9 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	91,050,000	155,290,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin	49 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	49,110,000	50,000,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	1 Unit	Persentase pemenuhan standar pemeliharaan BMD Penunjang OPD	100 Persen	51,800,000	75,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**619,797,000**	**1,066,075,000**	
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pajak Daerah serta Pekan Pajak dan Gebyar Pajak	12 Kali	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	77,600,000	0	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru, Mutasi Masuk, Potensi dan TMDU	32.900 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	120,000,000	143,250,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0010 Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Obyek Pajak baru yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak kendaraan Bermotor	4.086 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	125,896,000	112,500,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Rekomendasi Kesamsatan	4 Rekomendasi	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	44,786,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) dan Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak Daerah, Surat Teguran PKB	9122 Lembar	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	72,015,000	438,325,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Kab. Bima, Palibelo, Panda	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK)	50.80 %	Jumlah Kendaraan Bermotor yang terjaring Operasi Sadar Pajak Kendaraan Bermotor	1567 Obyek	Persentase peningkatan Pendapatan Daerah antar Tahun Anggaran	6.76 Persen	179,500,000	327,000,000	
														TOTAL	**2,205,236,400**	**2,630,949,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**2,138,825,300**	**3,096,487,200**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**1,536,942,800**	**1,790,287,000**	
5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Penatoi	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	0	
5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			2,000,000	2,000,000	
5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen	1 Dokumen			0	2,000,000	
5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	350 Dokumen			33,470,000	213,500,000	
5	02	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			0	0	
5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	2 Dokumen			2,497,000	2,500,000	
5	02	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Surat Keluar	600 Surat			0	13,903,500	
5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BMD	2 Dokumen			3,794,600	21,700,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Kendaraan	4 Unit			0	0	
5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Pelaksanaan Imtaq & Olahraga	48 Kali			21,600,000	17,500,000	
5	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Komponen Listrik	3 Jenis			10,834,000	10,000,000	
5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Pelengkapan Kantor	2 Unit/Paket			25,000,000	35,000,000	
5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Logistik Yang Adakan	20 Jenis			135,051,100	0	
5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan	3 Jenis			30,692,400	30,000,000	
5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	2 Jenis			12,600,000	12,000,000	
5	02	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kunjungan	24 Kali			74,989,000	75,000,000	
5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Penyelengaraan Rapat	36 Kali			201,102,000	333,340,000	
5	02	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Berkas	20000 Berkas			14,991,700	15,000,000	
5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan	0 Unit/Paket			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel	2 Unit/Paket			0	65,000,000	
5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya	0 Unit/Paket			0	0	
5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung Kantor	0 Paket			0	0	
5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	0 Paket			0	0	
5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasana	0 Paket			0	0	
5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Surat	500 Surat			10,326,000	10,000,000	
5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik	3 Jenis			155,475,000	146,727,000	
5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tenaga Administrator Jumlah Tenaga CS Jumlah Tenaga Keamanan Jumlah Tenaga Prakom Jumlah Tenaga Supir	6 Orang 6 Orang 3 Orang 1 Orang 1 Orang			600,275,000	542,520,000	
5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Operasional	10 Unit			109,050,000	145,000,000	
5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan Mesin Lainya	30 Unit			37,020,000	57,500,000	
5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor	2 unit			50,175,000	50,000,000	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**601,882,500**	**1,306,200,200**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.03.0005 Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi Pajak Daerah dan Pekan Panutan Pajak	25 Kali			73,700,000	114,678,200	
5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Potensi Aktif Jumlah Potensi Mutasi Masuk - Keluar Jumlah Potensi Obyek Kendaraan Baru JUmlah TMDU	23259 Obyek 602 Obyek 3428 Obyek 4059 Obyek			71,865,000	145,362,000	
5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Penerimaan PKB Jumlah Realisasi BBNKB	1742365189 3 Rupiah 1424696872 4 Rupiah			117,000,000	98,600,000	
5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Rekomendasi Kesamsatan Jumlah Wajib Pajak yang Konsultasi	5 Orang 150 Orang			40,640,000	45,000,000	
5	02	04	1.01	10	Penagihan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SP2T) Surat Teguran Pajak dan Penagihan Pajak	8370 obyek 14095 Obyek			82,677,500	575,560,000	
5	02	04	1.01	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik		Kota Bima, Mpunda, Lewirato			Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terjaring Operasi Penertiban Pajak Kendaraan Bermotor Penurunan Jumlah Notice Pajak Yang di Batalkan	360 obyek 80 Lembar			216,000,000	327,000,000	
														TOTAL	**2,138,825,300**	**3,110,390,700**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**										**22,003,066,756**	**63,739,525,504**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**19,808,441,356**	**49,698,932,174**	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**169,590,000**	**206,000,000**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen			15,940,000	16,000,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**436,465,250**	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja OPD	2 dokumen			0	120,991,500	
5	03	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Rekncan Kerja Anggaran	2 dokumen			0	38,680,250	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**169,590,000**	**206,000,000**	
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen			15,940,000	16,000,000	
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			15,940,000	16,000,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**436,465,250**	
5	03	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen evaluasi	1 dokumen			0	17,802,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**169,590,000**	**206,000,000**	
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen			15,940,000	16,000,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**436,465,250**	
5	03	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	4 dokumen			0	224,951,500	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**169,590,000**	**206,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen			15,940,000	16,000,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**436,465,250**	
5	03	01	1.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Laporan Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan OPD	4 dokumen			0	34,040,000	
5	**03**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**169,590,000**	**206,000,000**	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Laporan RKDP dan RENJA OPD	4 dokumen			12,450,000	16,000,000	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen LKjIP SKPD	1 dokumen			77,440,000	110,000,000	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**16,988,867,556**	**24,310,035,524**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	90 orang			16,895,997,556	24,149,035,524	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**19,394,543,575**	
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah SPP dan SPM Gaji/Tunjangan	14 dokumen			0	18,923,614,550	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**16,988,867,556**	**24,310,035,524**	
5	03	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah SPJ SPPD	150 Dokumen			2,720,000	5,000,000	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen SPTB/GU	12 dokumen			40,860,000	110,000,000	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**19,394,543,575**	
5	03	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Keuangan	4 dokumen			0	23,500,250	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**16,988,867,556**	**24,310,035,524**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Keuangan	4 Dokumen			4,700,000	10,000,000	
5	03	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 dokumen			15,940,000	10,000,000	
5	03	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan LHP/NHP	1 Dokumen			6,400,000	6,000,000	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokuman Laporan Realisasi Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran	12 laporan			11,850,000	10,000,000	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**19,394,543,575**	
5	03	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik	12 laporan			0	410,076,775	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**16,988,867,556**	**24,310,035,524**	
5	03	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			10,400,000	10,000,000	
5	**03**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**19,394,543,575**	
5	03	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	1 dokumen			0	37,352,000	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**9,440,450,510**	
5	03	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah Surat Masuk dan Keluar	5000 surat			0	21,028,900	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,252,000**	**55,000,000**	
5	03	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen RKBMD	1 Dokumen			5,370,000	5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**9,440,450,510**	
5	03	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 pembayaran			0	391,782,000	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,252,000**	**55,000,000**	
5	03	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Daftar Aset	1 Dokumen			3,000,000	5,000,000	
5	03	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Aset yang dinilai	5 item			0	5,000,000	
5	03	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Daftar Inventaris Barang	12 Daftar			0	5,000,000	
5	03	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Aset	2 Brita Acara			3,000,000	5,000,000	
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah dokumen Penatausahaan BMD	12 Dokumen			882,000	25,000,000	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**9,440,450,510**	
5	03	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	8 unit			0	524,549,500	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**12,252,000**	**55,000,000**	
5	03	01	1.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Aset yang dapat dimanfaatkan	1 Dokumen			0	5,000,000	
5	**03**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**9,440,450,510**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan			0	455,487,400	
5	03	01	1.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis			0	45,770,000	
5	03	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah alat tulis kantor	12 bulan			0	1,345,518,860	
5	03	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			0	27,971,450	
5	03	01	1.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan			0	7,595,750	
5	03	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 paket			0	1,532,662,500	
5	03	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			0	200,790,000	
5	03	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bulan			0	137,950,550	
5	03	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	''Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	90 kali			0	1,107,082,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	03	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan dinas yang diaadakan	5 unit			0	830,166,600	
5	03	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Sarana/prasarana kantor yang terbangun	3 Paket			0	2,117,035,000	
5	03	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah gedung kantor	6 ruangan			0	422,050,000	
5	03	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah kendaraan	23 unit			0	0	
5	03	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah geudng kantor	3 ruangan			0	273,010,000	
5	**03**	**01**	1.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**92,270,000**	**120,000,000**	
5	03	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 jenis			13,200,000	5,000,000	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	3 jenis			6,200,000	30,000,000	
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Penjagaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen			2,870,000	5,000,000	
5	03	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Kepegawaian yang terupdate dalam sistem Kepegawaian	90 pegawai			25,000,000	5,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah laporan Kinerja Pegawai	90 pegawai			4,900,000	5,000,000	
5	03	01	1.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah apresiasi pegawai yang pindah tugas	10 pegawai			6,000,000	10,000,000	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah pegawai yang melaksanakan DIKLAT	10 pegawai			30,000,000	50,000,000	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	4 aturan			3,200,000	5,000,000	
5	03	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	4 aturan			900,000	5,000,000	
5	**03**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**979,175,400**	**3,224,052,250**	
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan			16,962,000	7,595,750	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Sarana/prasarana kantor yang terbangun	5 paket 3 Paket			0	1,532,662,500	
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis			0	20,000,000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah alat tulis kantor ''Jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	12 bulan 12 bulan			318,430,400	137,950,550	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			18,763,000	27,971,450	
5	03	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan			30,420,000	200,790,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan/material yang tersedia	2 jenis			0	20,000,000	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	80 kali			31,500,000	60,000,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah rapat dan koordinasi ke luar daerah	90 kali			465,600,000	1,107,082,000	
5	03	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Arsip Dinamis yang ditatata	7 bidang			59,100,000	100,000,000	
5	03	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah fasilitasi e-government	3 aplikasi			38,400,000	10,000,000	
5	**03**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**389,691,400**	**19,530,166,600**	
5	03	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah kendaraan dinas yang diaadakan	5 unit			200,000,000	830,166,600	
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	1 unit			0	500,000,000	
5	03	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang tersedia	40 unit			86,900,000	200,000,000	
5	03	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Peralatan dan Mesin yang tersedia	4 paket			102,791,400	800,000,000	
5	03	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Gedung kantor yang Tersedia	2 paket			0	16,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang Tersedia	1 paket			0	200,000,000	
5	03	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	1 paket			0	1,000,000,000	
5	**03**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**738,335,000**	**918,298,300**	
5	03	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah Surat Masuk dan Keluar	5000 surat			11,785,000	21,028,900	
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 pembayaran			240,150,000	391,782,000	
5	03	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	2 jenis			0	50,000,000	
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa petugas kebersihan kantor	12 bulan			486,400,000	455,487,400	
5	**03**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**438,260,000**	**1,335,379,500**	
5	03	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	''Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	8 unit			246,250,000	524,549,500	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara	2 unit			34,060,000	15,000,000	
5	03	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Mebel yang terpelihara	2 unit			5,000,000	5,000,000	
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis			29,450,000	45,770,000	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah geudng kantor	3 ruangan			123,500,000	273,010,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah gedung kantor	6 ruangan			0	422,050,000	
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor yang terpelihara/terehabilitasi	1 tahun			0	50,000,000	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**										**0**	**14,229,556,395**	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan Data dan Informasi ASN**										**0**	**1,231,162,975**	
5	03	02	1.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	7094 pegawai			0	405,559,460	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										**853,673,400**	**4,032,629,150**	
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah usulan Formasi CPNS/PPPK	1500 formasi			3,527,000	100,000,000	
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Formasi CPNS/PPPK	400 Formasi			26,020,000	30,000,000	
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Formasi dan CPNS yang terseleksi	400 orang			439,491,400	500,000,000	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengelolaan Data dan Informasi ASN**										**0**	**1,231,162,975**	
5	03	02	1.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	1394 pegawai			0	825,603,515	
5	**03**	**02**	1.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										**853,673,400**	**4,032,629,150**	
5	03	02	1.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Seleksi CPNS/PPPK	10 kab/kota			31,500,000	50,000,000	
5	03	02	1.01	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pemberhentian ASN	1 kegiatan			4,700,000	10,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK			61,113,000	488,858,675	
5	03	02	1.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen analisis zero growth kebutuhan ASN	1 dokumen			24,400,000	50,000,000	
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Fasilitasi cuti, kesra, Mental dan FIsik Anggota Korpri	4 Dokumen			0	1,422,607,500	
5	03	02	1.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi	1 dokumen			4,350,000	50,000,000	
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Data ASN yang telah terdokumentasi secara Elektronik	1394 pegawai			179,540,000	825,603,515	
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Data ASN yang tersedia didalam SIMPEG/SIMADU	7094 pegawai			53,332,000	405,559,460	
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah Buku Saku kepegawaian Dalam Angka	200 buku			25,700,000	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**										**805,920,000**	**3,050,358,440**	
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK			84,410,000	562,856,000	
5	**03**	**02**	1.02		**Administrasi Kepegawaian**										**0**	**4,622,536,665**	
5	03	02	1.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Formasi dan CPNS yang terseleksi	400 orang			0	2,267,726,515	
5	**03**	**02**	1.02		**Mutasi dan Promosi ASN**										**805,920,000**	**3,050,358,440**	
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK			239,540,000	1,121,858,925	
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	330 SK			481,970,000	1,365,643,515	
5	**03**	**02**	1.02		**Administrasi Kepegawaian**										**0**	**4,622,536,665**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	03	02	1.02	03	Penyelesaian Penempatan, Pengangkatan, Mutasi, Dan Kepangkatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan pengangkatan CPNS, P3K dan PTT	400 SK			0	181,236,550	
5	03	02	1.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	245 SK			0	488,858,675	
5	03	02	1.02	07	Pengelolaan Mutasi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	230 SK			0	562,856,000	
5	03	02	1.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan kenaikan pangkat / gaji berkala	3000 SK			0	1,121,858,925	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Dokumen Kerja Sama pemetaan kompetensi dan fasilitasi konseling	5 Dokumen			0	123,814,980	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang melaporkan Kinerja	1420 orang			0	412,025,680	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	400 orang			0	2,219,686,300	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	03	Pengembangan Assessment Center	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	400 orang			0	2,219,686,300	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang mengikuti, Workshop, Seminar, Short Course	200 SPT			3,800,000	94,921,000	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	1.03	04	Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi cuti, kesra, Mental dan FIsik Anggota Korpri	4 Dokumen			0	1,422,607,500	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan formal/ikatan dinas	150 orang			25,751,000	565,368,060	
5	03	02	1.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat	10 kerjasama			32,210,000	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	05	Fasilitasi Profesi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kerja Sama pemetaan kompetensi dan fasilitasi konseling	5 Dokumen			0	123,814,980	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Dokumen			0	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	06	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti, Workshop, Seminar, Short Course	200 SPT			0	94,921,000	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah DOkumen analisis Kesenjangan ASN dan Rencana Pengembangan ASN	2 Dokumen			33,340,000	334,275,100	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang melanjutkan pendidikan formal/ikatan dinas	150 orang			0	565,368,060	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	1.03	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah pegawai yang uji kompetensi jabatan fungsional	20 orang			21,436,000	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.03		**Peningkatan Kapastitas ASN**										**0**	**5,787,928,610**	
5	03	02	1.03	09	Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK			0	949,505,090	
5	**03**	**02**	1.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**221,954,000**	**4,957,570,530**	
5	03	02	1.03	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah kerjasama diklat pembentukan fungsional	2 Diklat			0	100,000,000	
5	03	02	1.03	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah kenaikan jenjang jabatan fungsional	100 SK			0	100,000,000	
5	03	02	1.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah kegiatan sosialisasi jabatan fungsional	1 kegiatan			11,027,000	20,000,000	
5	03	02	1.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan / pemberhentian dalam Jab. Fungsional	440 SK			46,200,000	949,505,090	
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen penilaian DUPAK/PAK	40 DUPAK/PAK			28,090,000	100,000,000	
5	03	02	1.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah SK Pembebasan Sementara dalam jabatan Fungsoinal	50 SK			20,100,000	50,000,000	
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**										**313,078,000**	**2,000,035,210**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	03	02	1.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Kebijakan tentang Evaluai Kinerja Aparatur	2 Peraturan			9,835,000	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.04		**Pengembangan Karir ASN**										**0**	**1,699,918,615**	
5	03	02	1.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam Jab. Struktural	330 SK			0	1,365,643,515	
5	03	02	1.04	02	Penyusunan Pedoman Pola Pengembangan Karir	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah DOkumen analisis Kesenjangan ASN dan Rencana Pengembangan ASN	2 Dokumen			0	334,275,100	
5	**03**	**02**	1.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**										**313,078,000**	**2,000,035,210**	
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah ASN yang melaporkan Kinerja	1420 orang			97,135,000	412,025,680	
5	03	02	1.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen evaluasi kinerja Aparatur	12 Dokumen			38,432,000	100,000,000	
5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan	44 orang			22,402,000	210,717,720	
5	03	02	1.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang Diberikan Satya Lencana Karya Satya	200 pegawai			37,062,000	100,000,000	
5	03	02	1.04	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	jumlah dokumen Laporan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur	2 Dokumen			16,634,000	100,000,000	
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia			Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	40 SK			56,235,000	677,291,810	
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	40 SK			11,807,000	100,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	03	02	1.04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori	Jumlah Pemberian Izin Kawin Cerai PNS	40 SK			3,268,000	100,000,000	
5	03	02	1.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit	190 kategori					20,268,000	100,000,000	
5	**03**	**02**	1.05		**Pembinaan ASN**										**0**	**888,009,530**	
5	03	02	1.05	01	Pembinaan Disiplin ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin	40 SK			0	677,291,810	
5	03	02	1.05	03	Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PNS yang Diberikan Penghargaan	44 orang			0	210,717,720	
														TOTAL	**22,003,066,756**	**107,240,541,234**	

| | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** | **22,003,066,756** | **107,240,541,234** | |

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**										**240,172,500**	**1,565,000,000**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**										**112,042,500**	**415,000,000**	
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Fisik	12 dokumen			3,600,000	70,000,000	
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi keuangan	12 dokumen			1,820,000	70,000,000	
5	03	01	1.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah potensi retribusi darah	10 dokumen			0	25,000,000	
5	03	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	jumlah ATK dan Logistik Kantro	12 bulan			28,622,500	100,000,000	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah bahan Cetakan dan Penggandaan	12 bulan			3,000,000	50,000,000	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah	30 kali			75,000,000	100,000,000	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**										**128,130,000**	**1,150,000,000**	
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah Pegawai yang diberikan Konseling	10 orang			31,530,000	100,000,000	
5	03	02	1.03	02	Pengelolaan Assessment Center	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang telah Terpetakan Kompetensinya	600 orang			90,590,000	1,000,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0001 Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	1.03	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kerjasama Pemetaan Kompetensi ASN	10 Kerjasama			6,010,000	50,000,000	
TOTAL															**240,172,500**	**1,565,000,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										**0**	**34,661,093,511**	
5	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**										**0**	**15,675,370,796**	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**437,520,375**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah dokumen	2 dokumen			0	117,716,875	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**337,379,000**	**532,376,975**	
5	04	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	265,854,400	117,716,875	
5	04	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	17,743,500	0	
5	04	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	18,071,600	319,803,500	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**0**	**437,520,375**	
5	04	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	2 laporan			0	319,803,500	
5	**04**	**01**	1.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**337,379,000**	**532,376,975**	
5	04	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	17,701,000	94,856,600	
5	04	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dok	18,008,500	0	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,269,752,366**	
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah ASN	93 orang			0	8,142,446,906	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**11,077,545,702**	**8,504,448,391**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang	11,016,635,802	8,142,446,906	
5	04	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang	31,357,500	329,552,625	
5	04	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang	8,390,400	8,481,710	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,269,752,366**	
5	04	01	1.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	4 laporan			0	94,856,600	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**11,077,545,702**	**8,504,448,391**	
5	04	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Keuangan	106 Orang	21,162,000	23,967,150	
5	**04**	**01**	1.02		**Administrasi Keuangan**										**0**	**8,269,752,366**	
5	04	01	1.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	4 laporan			0	23,967,150	
5	04	01	1.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah laporan	1 dokumen			0	8,481,710	
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,968,098,055**	
5	04	01	1.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah surat keluar	120 surat			0	4,167,600	
5	04	01	1.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	jumlah rekening	3 rekening			0	802,424,920	
5	04	01	1.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 unit			0	424,274,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	04	01	1.03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah PNS	2 orang			0	0	
5	04	01	1.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah BMD	5 jenis			0	178,542,100	
5	04	01	1.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah perpanjangan izin kendaraan dinas/operasional	27 unit			0	10,596,100	
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,840,000**	**178,542,100**	
5	04	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pengelola Administrasi Barang Milik Daerah	4 Orang	39,840,000	178,542,100	
5	**04**	**01**	1.03		**Administrasi Umum**										**0**	**6,968,098,055**	
5	04	01	1.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	6 orang			0	329,552,625	
5	04	01	1.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Tenaga Kebersihan	37 orang			0	1,311,522,100	
5	04	01	1.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah jenis ATK	20 jenis			0	105,019,150	
5	04	01	1.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah cetak dan penggandaan	6 dokumen			0	82,475,010	
5	04	01	1.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 unit			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	01	1.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peralatan rumah tangga	1 unit			0	110,749,600	
5	04	01	1.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah bahan bacaan	1 jenis			0	16,806,100	
5	04	01	1.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Makanan dan Minuman	600 orang			0	240,366,100	
5	04	01	1.03	18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah rapat	2 kali			0	64,136,650	
5	04	01	1.03	21	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	1 unit			0	593,075,700	
5	04	01	1.03	23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit			0	0	
5	04	01	1.03	25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 unit			0	1,546,120,950	
5	04	01	1.03	26	Pengadaan Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah meubelair	10 unit			0	246,100	
5	04	01	1.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Gedung Kantor	2 unit			0	157,566,100	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	01	1.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	27 unit			0	507,005,100	
5	04	01	1.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 unit			0	0	
5	04	01	1.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 unit			0	0	
5	04	01	1.03	36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	2 unit			0	246,100	
5	04	01	1.03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang Direhabilitasi	2 unit			0	483,205,850	
5	04	01	1.03	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah kendaraan	2 unit			0	0	
5	**04**	**01**	1.04		**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**										**0**	**0**	
5	04	01	1.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	93 stell			0	0	
5	04	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	umlah Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	93 stell			0	0	
5	04	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah ASN yang Diklat Formal	29 orang			0	0	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	01	1.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang			0	0	
5	04	01	1.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya surat menyurat	1000 surat	Jumlah peserta bimtek	10 orang			0	0	
5	**04**	**01**	1.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**600,514,600**	**508,803,010**	
5	04	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	42,825,000	0	
5	04	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	172,314,200	105,019,150	
5	04	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	69,600,000	240,366,100	
5	04	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	66,773,400	82,475,010	
5	04	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	14,400,000	16,806,100	
5	04	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Ketersediaan Administrasi Umum Perkantoran	1488 Orang	234,602,000	64,136,650	
5	**04**	**01**	1.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**602,532,250**	**593,321,800**	
5	04	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah	358 Unit	308,112,250	593,075,700	
5	04	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah	358 Unit	294,420,000	0	
5	04	01	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Barang Milik Daerah	358 Unit	0	246,100	
5	**04**	**01**	1.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,095,986,700**	**2,118,114,620**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen	6,439,900	4,167,600	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen	697,546,800	802,424,920	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Persentasi ketersediaan Jasa Penunjang	100 persen	1,392,000,000	1,311,522,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**04**	**01**	1.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**665,660,000**	**2,546,928,000**	
5	04	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit	172,150,000	507,005,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit	90,000,000	10,596,100	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit	403,510,000	1,546,120,950	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit	0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	04	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Nilai SAKIP OPD	BB Nilai			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	68 Unit	0	483,205,850	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**										**0**	**18,985,722,715**	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**0**	**2,657,279,930**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen			0	90,964,195	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**960,639,000**	**2,657,279,930**	
5	04	02	1.01	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Tekhnis	100 %			Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	150 Orang	79,102,300	90,964,195	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**0**	**2,657,279,930**	
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Pelaksanaan Kompetensi Teknis Umum, , Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 dokumen			0	83,374,770	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**960,639,000**	**2,657,279,930**	
5	04	02	1.01	02	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Tekhnis	100 %			Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	150 Orang	59,880,000	83,374,770	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Tekhnis	100 %			Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	150 Orang	693,581,000	1,615,840,965	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**0**	**2,657,279,930**	
5	04	02	1.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	300 Orang 120 orang 120 orang			0	1,615,840,965	
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan Terlaksananya Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum	1 Dokumen 1 dokumen 1 dokumen			0	867,100,000	
5	**04**	**02**	1.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**										**960,639,000**	**2,657,279,930**	
5	04	02	1.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Tekhnis	100 %			Jumlah Kompetensi Tekhnis ASN	150 Orang	128,075,700	867,100,000	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta jabatan Fungsional	1 dokumen			0	84,524,885	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	42,044,700	84,524,885	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	2 dokumen			0	328,051,185	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	124,836,700	328,051,185	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	300 orang			0	410,577,485	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	213,645,800	410,577,485	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	491,046,600	2,796,830,245	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan yang dihasilkan Jumlah Pemenuhan Fasilitas Sumber Belajar Jumlah Tenaga Pengembang / Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	2 dokumen 50 unit 30 orang			0	2,796,830,245	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	52,490,200	140,874,885	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Lembaga yang terlaksana	10 dokumen			0	140,874,885	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	59,880,000	152,375,000	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	06	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	3 dokumen			0	152,375,000	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	14,463,297,300	12,004,291,330	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**0**	**16,328,442,785**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	04	02	1.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat penjenjangannya Jumlah Peserta Prajabatan Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya Jumlah Pimpinan Tinggi , PKA dan PKP yang memenuhi standar Kompetensi Jabatannya	180 orang 410 orang 130 orang 95 orang			0	12,004,291,330	
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Prajabatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen			0	410,917,770	
5	**04**	**02**	1.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**15,485,417,300**	**16,328,442,785**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2021

Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	04	02	1.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Profesionalisme ASN		Persentase Kompetensi Manajerial	100 %			Jumlah Sertifikasi Kompetensi	68 Orang	38,176,000	410,917,770	
TOTAL															**31,865,514,552**	**68,629,351,122**	